2024 Annual Report
Laporan Tahunan

PT PII

Berinovasi Secara Konsisten untuk Tingkatkan Keberlanjutan

Innovate Consistently to Improve Sustainability

PT PII

DISCLAIMER DAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB
DISCLAIMER AND SCOPE OF RESPONSIBILITIES

Referensi dan standar yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tahunan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tahun 2024 menggunakan parameter dan kriteria standar yang berlaku di Indonesia, tempat di mana Perseroan melaksanakan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan bukan perusahaan yang tercatat di bursa efek, Laporan Tahunan ini menggunakan standar *best practice* penyusunan laporan tahunan di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yang dikombinasikan dengan kriteria *Annual Report Award* (ARA) 2023 serta dengan merujuk pada ketentuan lain terkait penyusunan laporan tahunan yang berlaku bagi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan.

The references and standards used in the 2024 Annual Report of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("the Company") refer to parameters and criteria of standards applicable in Indonesia, where the Company operates. Although the Company is not a listed company, this Annual Report uses the best practice standards for the preparation of annual reports in Indonesia, as stated in the Circular Letter of the Financial Services Authority No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies, combined with the 2023 Annual Report Award (ARA) criteria, and refers to other provisions related to the annual report preparation applicable to the Company, including but not limited to the provisions regulated by the Ministry of Finance.

Laporan Tahunan ini memuat berbagai pernyataan terkait kondisi keuangan, operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perseroan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko serta ketidakpastian, hingga kemungkinan terdapat perbedaan dengan perkembangan yang aktual. Berbagai pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi mengenai kondisi terkini, serta proyeksi atas situasi mendatang terkait bisnis Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil yang pasti.

This Annual Report contains financial statements, operational, policies, projections, plans, strategies, and objectives of the Company, which are classified as forward-looking statements in the sense of applicable laws. These statements involve prospective risks and uncertainties, and may differ from actual developments. Various prospective statements in this Annual Report are based on the assumptions about current conditions, as well as projections of future situations related to the Company's business. The Company is unable to guarantee that the documents that have been confirmed as valid will bring a definite result.

Laporan Tahunan ini disusun dalam Bahasa Indonesia, sehingga apabila terdapat perbedaan arti dari versi bahasa Inggris maka yang berlaku dan menjadi rujukan utama adalah versi Bahasa Indonesia. Laporan Tahunan ini memuat kata "Perseroan" atau "PT PII" yang mengacu pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Selain itu, kata "Kami" terkadang diselipkan pada beberapa kesempatan dengan fungsi yang sama, atas pertimbangan kemudahan penyebutan Perseroan. Demi kemudahan, Laporan Tahunan ini dapat diunduh pada situs *web* Perseroan dengan alamat www.ptpii.co.id.

This Annual Report is prepared in Bahasa Indonesia, so if there are differences in meaning from the English version, the Indonesian version prevails and becomes the main reference. This Annual Report contains the word "Company" or "IIGF" which refers to PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), or Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. In addition, the word "We" is sometimes inserted on certain occasions with the same function, to facilitate the mention of the Company. For convenience, this Annual Report can be downloaded on the Company's website at www.ptpii.co.id.

TEMA DAN KESINAMBUNGAN TEMA

THEME AND THEME CONTINUITY

Berinovasi Secara Konsisten untuk Tingkatkan Keberlanjutan

Innovate Consistently to Improve Sustainability

Komitmen PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, menegaskan pentingnya memperkuat ekosistem pembiayaan inovatif guna mendukung pembangunan infrastruktur Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan non-KPBU. Tema "*Innovative Consistently to Improve Sustainability*" dalam Laporan Tahunan PT PII mengandung makna yang sangat relevan dengan komitmen perusahaan terhadap inovasi dan keberlanjutan. PT PII berkomitmen untuk secara konsisten mengembangkan inovasi di dalam proses bisnis guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menghadapi masa transisi pemerintahan, melalui berbagai inisiatif strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya terbatas pada penjaminan proyek infrastruktur, PT PII berperan dalam mendukung ekosistem pembiayaan kreatif dan inovatif untuk pembangunan dalam rangka stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Selain itu, konsistensi dalam berinovasi juga mengharuskan adanya kolaborasi antara berbagai pihak, baik internal perusahaan, mitra, maupun *stakeholders* lainnya. PT PII senantiasa membuka peluang dalam setiap kesempatan kerjasama dan kolaborasi. Melalui peningkatan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, PT PII mampu menjadi penggerak skema pembiayaan kreatif dan inovatif untuk percepatan pembangunan infrastruktur serta penguatan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas.

Selanjutnya, dalam rangka penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), PT PII berkomitmen menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat, sekaligus menjaga tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai satu-satunya Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur di Indonesia, PT PII memastikan bahwa setiap proyek yang didukung mengedepankan keberlanjutan lingkungan, inklusivitas sosial, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.

The commitment of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / IIGF as an Infrastructure Guarantee Agency (IGA), emphasizes the importance of strengthening an innovative financing ecosystem to support Government Cooperation with Business Entities (PPP) and (Non-PPP) infrastructure development. The theme "Innovate Consistently to Improve Sustainability" in the IIGF Annual Report has a very relevant meaning to the company's commitment to innovation and sustainability. IIGF is committed to consistently innovating in business processes to enhance effectiveness and efficiency in facing the government transition period, through various strategic initiatives in supporting sustainable development. Not only limited to underwriting infrastructure projects, IIGF has a role in supporting a creative and innovative financing ecosystem for development that supports long-term economic stability and growth.

In addition, consistent innovations also require collaboration between various parties, including internal parties, partners, and other stakeholders. IIGF always opens opportunities for cooperation and collaboration. By enhancing cooperation with all stakeholders, IIGF shall be able to drive creative and innovative financing schemes to accelerate infrastructure development and strengthen an inclusive and sustainable financial ecosystem towards Golden Indonesia.

Further, in implementing the Environmental, Social, and Governance (ESG) principles, IIGF is committed to creating a positive impact on the environment and society, while maintaining good corporate governance. As the only Infrastructure Guarantee Business Entity in Indonesia, IIGF ensures that every project supported shall prioritise environmental sustainability, social inclusiveness, and transparent and accountable governance.

KESINAMBUNGAN TEMA
THEME CONTINUITY

The Road to Sustainable Performance & Impact
Jalan Menuju Kinerja dan Dampak Berkelanjutan

Tahun 2023 menjadi tonggak penting pencapaian kinerja terbaik dan tertinggi bagi PT PII semenjak didirikan pada tahun 2009. Peran dan kehadiran PT PII yang memiliki kredibilitas tinggi bagi penjaminan di bidang pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting di tengah kondisi perekonomian yang penuh tantangan, baik secara internasional maupun nasional. PT PII mampu memberikan kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya di sektor infrastruktur.

Setelah melalui masa pemulihan akibat Covid selama 2 tahun dan menjalankan mandat dalam mendukung proyek-proyek non infrastruktur, maka pada tahun 2023 Perseroan berfokus terhadap penguatan keberlangsungan pipeline mandat Perseroan serta berupaya memperluas kebermanfaatan di berbagai sektor, utamanya terkait sektor yang mendukung upaya transisi energi dan menghadapi tantangan perubahan iklim, juga melalui pelaksanaan mandat sehubungan dengan pinjaman langsung Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta kegiatan *Project Development Facility* dan pengembangan jasa *advisory*.

Sampai dengan akhir tahun 2023, PT PII telah mencatatkan Laba Bersih sebesar Rp835,82 miliar dari Pendapatan Rp1,32 triliun dan Aset Rp16,41 triliun, serta mampu memberikan dividen sebesar Rp142,83 miliar atau sekitar 20% dari Laba Bersih. Sejak berdirinya sampai dengan akhir tahun 2023, PT PII juga telah melaksanakan mandat penjaminan sejumlah 50 penjaminan dengan total nilai investasi proyek mencapai Rp497 triliun.

PT PII berkomitmen untuk mendukung berbagai agenda pembangunan dan memberikan dampak kebermanfaatan yang lebih luas terhadap masyarakat, melalui dukungan pada infrastruktur sosial dan perubahan iklim di tahun mendatang, khususnya pada sektor persampahan, sanitasi dan kesehatan, serta dukungan pada Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berskala kecil untuk proyek infrastruktur di daerah dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan melalui pengembangan serta perluasan ekosistem pembiayaan inovatif sehingga upaya mewujudkan Indonesia Maju pada tahun 2045 akan dapat tercapai.

2023 was a brilliant year for IIGF's achievements, with various breakthroughs from the efforts conducted in the previous years. IIGF's role and presence, with high credibility in guaranteeing investment security in the field of infrastructure development, is vital amidst the challenging economic conditions, both internationally and nationally. IIGF is able to capture investors' confidence and interest in investing in the infrastructure sector.

After recovering due to COVID-19 for 2 years and having a mandate in supporting non-infrastructure projects, in 2023, the Company focused on strengthening the sustainability of the Company's mandate pipeline and sought to expand benefits in various sectors, mainly related to sectors that support energy transition and face the climate change challenges, as well as implementing mandates in connection with direct loans to State-Owned Enterprises (SOEs), and Project Development Facility activities and the development of advisory services.

As of the end of 2023, IIGF recorded a Net Income of Rp835.82 billion from Revenues of Rp1.32 trillion and Assets of Rp16.41 trillion and was able to provide dividends of Rp142.83 billion or approximately 20% of the Net Income. Since its establishment until the end of 2023, IIGF has carried out 50 guarantee mandates with a total project investment value of Rp497 trillion.

IIGF is committed to supporting various development agendas and providing a broader beneficial impact on society, through support for social infrastructure and climate change in the coming year, especially in the waste, sanitation and health sectors, as well as support for small-scale Government Cooperation with Business Entities (PPP) for infrastructure projects in the regions in order to accelerate equitable distribution of infrastructure development and through the development and expansion of innovative financing ecosystems so that efforts to realise Advanced Indonesia in 2045 will be achieved.

Beyond Infrastructure

Pandemi Covid-19 yang berlangsung lebih dari 2 tahun telah memukul segala aspek kehidupan dan hampir semua sektor usaha terkena imbasnya termasuk sektor infrastruktur. Agenda pembangunan infrastruktur turut terkena dampak negatif dari pandemi Covid-19. Hal itu terjadi akibat ruang fiskal pemerintah mengalami tekanan, karena lebih banyak digunakan untuk mendukung sektor kesehatan, pengusaha dan masyarakat yang terdampak pandemi. Terlebih lagi, adanya perang Rusia-Ukraina memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian global sehingga menimbulkan ketidakpastian. Namun demikian, di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian nasional mampu menunjukkan pertumbuhan yang kuat sebesar 5,31%, jauh melampaui pertumbuhan tahun 2021 sebesar 3,69%. Perlahan tapi pasti, sektor infrastruktur juga mulai menggeliat sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional dan didukung oleh program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mempercepat pergerakan ekonomi Indonesia yang sebelumnya terhambat oleh pandemi Covid-19.

The Covid-19 pandemic that lasted more than 2 years has hit all aspects of life and all business sectors, including the infrastructure sector. The infrastructure development agenda has also been negatively affected by the Covid-19 pandemic. This is since the government's fiscal space is under pressure, as it is mostly used to support the health sector, entrepreneurs and communities affected by the pandemic. Moreover, the Russia-Ukraine war has had a significant impact on the global economy, creating uncertainty. Nevertheless, amidst the global economic slowdown, the national economy was able to show strong growth of 5.31%, far exceeding 2021's growth of 3.69%. Slowly but surely, the infrastructure sector has also begun to stretch in line with the national economic recovery and is supported by the National Economic Recovery (PEN) program to accelerate Indonesia's economic movement which was previously hampered by the Covid-19 pandemic.

Dalam hal ini, keberadaan Perseroan sangatlah signifikan untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia melalui proyek-proyek infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Selama 13 tahun perjalanannya, PT PII telah menjamin 49 proyek yang terdiri dari 41 proyek penjaminan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan pinjaman langsung (non-KPBU) serta 8 proyek penjaminan BUMN dalam rangka program PEN dengan total nilai investasi sebesar Rp550 triliun. Dengan kinerja yang semakin solid di tahun 2022, Perseroan akan terus berupaya memainkan perannya sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan guna mengakselerasi pengembangan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

In this context, the presence of the Company can significantly support Indonesia's economic recovery through infrastructure projects that can improve the quality of life of the Indonesians. In its 13-year journey, IIGF has guaranteed 49 projects consisting of 41 PPP scheme guarantee projects and direct lending (Non-PPP), as well as 8 SOE guarantee projects related to the National Economic Recovery Program (PEN) with a total Project Value of Rp550 trillion. With an increasingly solid performance in 2022, IIGF will continue to play its role as a Special Mission Vehicle (SMV) of the Ministry of Finance to accelerate infrastructure development and sustainable development in Indonesia.

2021

Aksi Strategis Menuju Pemulihan yang Lebih Baik

Strategic Actions Towards A Better Recovery

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan dengan semangat mendukung program percepatan perekonomian melalui pembangunan infrastruktur, PT PII tentunya terlibat aktif dalam berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Salah satunya melalui penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai agenda besar Pemerintah dalam mempercepat pemulihan perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19.

Tema "Aksi Strategis Menuju Pemulihan yang Lebih Baik" memberikan gambaran upaya PT PII mengemban amanat yang diberikan dengan tujuan besar mendukung Program PEN dari Pemerintah Indonesia. Dengan pengelolaan usaha yang sekaligus dapat memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham, tahun 2021 menjadi jejak langkah penting bagi PT PII untuk dapat memperkuat kompetensinya.

IIGF is a State-Owned Enterprise (SOE) that serves to support the national economic acceleration program through infrastructure development. The Company actively participates in various policies of the Indonesian Government, including providing Guarantee to the National Economic Recovery (PEN) Program as the main agenda of the Government to speed up the economic recovery that was impacted by the Covid-19 pandemic.

The theme of "Strategic Actions towards a Better Recovery" illustrates the commitment of IIGF to implementing the tasks of realizing the PEN Program of the Indonesian Government. The Company's business management, at the same time, provides added value to the Indonesian Government as the main shareholders. 2021 marks the momentous Milestones for IIGF to enhance the competitiveness.

2020

Menjaga Momentum Pemulihan

Safeguarding Momentum Towards Recovery

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) memberikan pengaruh yang luar biasa kepada dinamika perekonomian dunia 2020, termasuk Indonesia. Covid-19 tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah, di tengah tantangan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 PT PII tetap menjaga momentum pembangunan infrastruktur dengan secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan mandatnya dalam memberikan penjaminan pemerintah di bidang infrastruktur. Selain fokus pada pelaksanaan mandat utama, PT PII turut berperan serta mendukung Pemerintah dalam program penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, Pemerintah memberikan mandat baru dan penugasan kepada PT PII untuk berkontribusi dalam PEN.

Berbekal pengalaman selama lebih dari satu dekade sebagai *fiscal tools* Pemerintah, semangat mewujudkan visi dan misi Perseroan serta dukungan dari Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan, Pandemi Covid-19 bukan menjadi penghalang bagi Perseroan untuk terus senantiasa berkarya dan berkontribusi dalam membangun negeri, namun justru menjadi momentum untuk semakin optimal berkontribusi dalam menjaga pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional.

The Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic made an extraordinary impact on the dynamics of the world economy in 2020, including Indonesia. Covid-19 has not only caused a health and humanitarian crisis, but also slowed down the rate of economic growth.

In accordance with the Government policies, amid the challenges of overcoming the impact of the Covid-19 pandemic, IIGF continued to maintain the momentum of infrastructure development by consistently and sustainably conducting the mandate in providing government guarantee in the infrastructure sector. In addition to focusing on implementing its key mandate, the Company also performed a role in supporting the Government in the program to overcome the impact of the Covid-19 pandemic. In 2020, the Government gave a new mandate and assignment to the Company to contribute to the National Economic Recovery PEN Program.

Equipped with more than a decade of experience as the Government's fiscal tool and the spirit to realize IIGF's vision and mission as well as support from the Shareholders and all Stakeholders, the Covid-19 Pandemic was not an obstacle for the Company to continue working and contributing to the country's development. Instead, it became a momentum to contribute more optimally in maintaining the development and recovery of the national economy.

2019

Jaga Infrastruktur untuk Indonesia Maju

Safeguarding the Infrastructure for a Developed Indonesia

Satu dekade kami lalui dengan menjalankan kegiatan usaha untuk memberikan penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur. Selama itu pula, kami senantiasa bekerja keras membangun ekosistem dan pemahaman terkait pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Memasuki dekade kedua, dengan mandat-mandat baru yang diberikan, merupakan saat bagi kami memantapkan langkah selanjutnya untuk semakin mengokohkan peran PT PII dalam mengawal pembangunan infrastruktur demi menjaga cita-cita bangsa untuk Indonesia maju.

In the first decade of our establishment, IIGF has been carrying out the mandate to provide government guarantee in the field of infrastructure. In the course of time, we are always working hard to build ecosystems and awareness of infrastructure project development in Indonesia through the Public Private Partnership (PPP) scheme. Entering the second decade, with new mandates given, we are strengthening the next move to enhance the role of IIGFin safe guarding infrastructure development in order to drive the nation's aspirations for a developed Indonesia.

2018

Dengan PII, Infrastruktur Jadi Teratur

PII, for a Well-Structured Infrastructure

Pemerintah telah menetapkan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan dan kesinambungan kinerja ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan sosial. Mengingat bahwa infrastruktur merupakan proyek strategis yang memiliki karakteristik jangka panjang dan investasi yang tidak sedikit, Pemerintah melakukan inovasi berbagai skema pembiayaan dalam membangun infrastruktur, salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Skema KPBU ini merupakan solusi strategis dalam mengatasi keterbatasan fiskal Pemerintah. Dalam konteks inilah penjaminan atas proyek berskema KPBU yang diberikan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) menjadi sangat penting demi keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

Pada tahun 2018, PT PII telah melaksanakan mandat baru untuk memberikan penjaminan pada proyek non-KPBU, serta melakukan kegiatan dalam penyiapan proyek dan pendampingan transaksi, PT PII secara lengkap mengawal proses pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

Seluruh mandat tersebut memberikan peran bagi PT PII untuk membantu Pemerintah dalam menciptakan proyek infrastruktur agar menjadi lebih teratur. Teratur dari sisi disiplin proses, alokasi risiko, asas kemanfaatan, akuntabilitas, dan kesinambungan proyek di masa mendatang.

The government has established infrastructure development as a development priority to support the improvement and sustainability of national economic performance as well as improving social welfare. Considering that infrastructure is a strategic project with long-term characteristics and signifi cant amounts of investments, the Government implements a number of innovative funding schemes for infrastructure development, including among others, the Public Private Partnership (PPP) scheme.

The PPP scheme is a strategic solution in overcoming the government's fiscal limitations. In this context, the presence of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) that provides guarantee facilities for PPP projects, become essential for the sustainability of infrastructure development.

In 2018, IIGF undertook a new mandate to provide guarantees for non-PPP projects, as well as to engage in project preparation and transaction advisory activities. IIGF has since been comprehensively involved in supporting the development process of infrastructure projects.

These mandates provides IIGF with significant opportunities to support the Government in establishing well-structured infrastructure projects, in terms of a disciplined process, risk allocation, benefit principle, accountability, and future project sustainability.

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

3 Disclaimer dan Lingkup Tanggung Jawab
Disclaimer and Scope of Responsibility

4 Tema dan Kesinambungan Tema
Theme and Continuity

10 Daftar Isi
Contents

Kilas Kinerja 2024
Performance Highlights in 2024

16 Kinerja Unggul Tahun 2024
2024 Excellent Performance

20 Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Data Overview

28 Ikhtisar Saham dan Aksi Korporasi
Share and Corporate Action Highlight

28 Informasi Tentang Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi, Serta Informasi Pendanaan Lainnya
Information of Bonds, Sukuk or Converted Bonds, As Well As Other Financing Information

29 Penghargaan dan Sertifikasi
Certification and Awards

32 Peristiwa Penting Tahun 2024
Significant Events in 2024

Laporan Manajemen
Management Report

42 Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Report

70 Laporan Direksi
Board of Directors' Report

93 Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Statement of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Accountability to 2024 Annual Report of PT Penjaminan Infrastructure Indonesia (Persero)

Profil Perusahaan
Company Profile

96 Identitas Perseroan
Corporate Identity

98 Riwayat Singkat Perseroan
Company's Brief History

104 Jejak Langkah
Milestones

114 Logo Perseroan
Corporate Logo

115 Visi dan Misi Perseroan Perseroan
Corporate Vision and Mission

117 Tata Nilai dan Budaya Perusahaan
Corporate Value and Culture

118 Bidang Usaha dan Kegiatan Perseroan
Company's Business Sector and Activities

119 Produk dan Jasa Perseroan
Company's Products and Services

120 Jenis Sektor yang Dapat Diberikan Penjaminan
Sectors that Can Be Guaranteed

121 Wilayah Operasional
Operational Areas

122 Struktur Organisasi
Organizational Structure

124 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Profiles

128 Profil Direksi
Board of Directors' Profile

132 Informasi Perubahan Keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi
Information on the Changes to the Membership of the Board of Commissioners and Board of Directors

134 Profil Deputi Direktur
Deputy Director's Profile

136 Demografi Karyawan
Employee Demographics

138 Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Structure and Composition of Shareholders

139 Informasi tentang Struktur Grup/Kelompok Usaha serta Entitas Anak/Entitas Asosiasi/Perusahaan Patungan/*Special Purpose Vehicle*
Information on the Structure of the Group/Business Group and its Subsidiaries/Associates/Joint Ventures/Special Purpose Vehicles

139 Keanggotaan Asosiasi
Association Membership

140 Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Perseroan
Supporting Institutions and Professions

141 Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
Public Accountants and Public Accounting Firm

142 Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham
Chronology of Share Issuance and/or Listing

142 Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi/Efek Lainnya
Chronology of Bonds/Securities Issuance and/or Listing

143 Informasi Pada Situs *Website* Perseroan
Information on the Company's Website

Aspek Pendukung Bisnis
Business Support Aspects

148 Tata Kelola Sumber Daya Manusia
Human Resources Governance

167 Tata Kelola Teknologi Informasi
Information Technology Governance

Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

178 Tinjauan Ekonomi dan Industri
Economic and Industrial Review

181 Kebijakan Strategis Tahun 2024
Strategic Policies in 2024

186 Aspek Pemasaran
Marketing Aspect

193 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operational Review by Business Segment

306 Profitabilitas per Segmen
Profitability by Segment

310 Tinjauan Keuangan
Financial Review

310 Analisis Posisi Keuangan
Financial Position Analysis

320 Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
Lain Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

324 Analisis Arus Kas
Cash Flow Analysis

328 Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang
Solvency and Collectability of Receivables

331 Struktur Modal
Capital Structure

332 Ikatan Material Investasi Barang Modal
Material Commitments for Capital Expenditure

333 Realisasi Investasi Barang Modal
Capital Expenditure Realization

335 Prospek Usaha
Business Prospect

339 Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025
Comparison between 2024 Target and Realization and 2025 Projection

342 Indeks Kinerja Utama (IKU) Korporasi
Corporate Key Performance Index (KPI)

344 Kebijakan Dividen
Dividend Policy

345 Aspek Perpajakan
Taxes

348 Informasi Material Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi dan Restrukturisasi Utang/Modal
Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisitions, and Debt/Capital Restructuring

347 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Afiliasi/Berelasi
Information on Material Transaction with Conflict of Interest and/or with Affiliates/ Related Parties

353 Informasi Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Fact Information After the Accounting Reporting Date

353 Realisasi Dana Penawaran Umum
Utilization of Funds from Public Offerings

353 Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

354 Perubahan Peraturan dan Dampaknya Terhadap Perusahaan
Regulation Changes and the Impacts on the Company

355 Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Perusahaan
Changes in Accounting Policy and their Impact on the Company

Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan

360 Pendahuluan
Introduction
- Dasar Hukum dan Kebijakan Penerapan GCG Perseroan
  Legal Basis and the Company's GCG Policy
- Struktur Tata Kelola Perseroan
  Corporate Governance Structure
- Strategi Perseroan Menuju Tata Kelola Terbaik dan Berkelanjutan
  Strategies towards Best and Sustainable Governance
- Prestasi Perseroan dalam Implementasi GCG di Tahun 2024
  Company's Achievement in GCG Implementation in 2024
- Skor Penilaian *Assessment* Atas Penerapan GCG di Perseroan
  GCG Assessment Score in the Company

370 Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

378 Direksi
Board of Directors

395 Dewan Komisaris
Board of Commissioners

425 Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
Working Relationship of the Board of Commissioners and Directors

425 Informasi Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity of the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

427 Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
Nomination and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

432 Komite Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Committee

433 Sekretaris Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Secretary

438 Komite Audit
Audit Committee

453 Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

453 Komite Lain di Bawah Dewan Komisaris
Committees Reporting Directly to the Board of Commissioners
- Komite Pemantau Risiko
  Risk Monitoring Committee

469 Komite Lain di Bawah Direksi
Other Committees Reporting Directly to the Board of Directors
- Komite Pengarah TI
  IT Steering Committee

472 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

478 Unit Audit Internal
Internal Audit Unit

488 Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control*)
Internal Control System

495 Audit Eksternal/Akuntan Publik
External Audit/Public Accountant

498 Manajemen Risiko
Risk Management

517 Informasi Sanksi Administratif Tahun Buku
Information on Administrative Sanctions for the Fiscal Year

517 Informasi Permasalahan Hukum
Information on Legal Issues

518 Kode Etik Perseroan
Code of Conduct

522 Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen dan/atau Karyawan
Policy on Providing Performance-Based Long-Term Compensation to Management and/or Employee

523 Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy

- Kebijakan Pengendalian Gratifikasi
  Gratification Control Policy
- Manual Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
  Anti-Bribery Management System (SMAP) Guidelines
- Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
  State's Official Wealth Report (LHKPN) Guidelines

531 Kebijakan Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

539 Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement of Goods and Services

541 Kebijakan Perlindungan Hak-Hak Kreditur
Creditor Rights Protection Policy

542 Kebijakan *Insider Trading*
Insider Trading Policy

542 Evaluasi Kepatuhan Tata Kelola Perusahaan
Evaluation of the Corporate Governance Compliance

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Corporate and Environmental Social Responsibilities

550 Komitmen Perseroan Dalam Penerapan Program Keberlanjutan
Company's Commitment to Implementing Sustainability Program

552 Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Tahun 2024
Sustainable Performance Overview in 2024

554 Strategi Penerapan Program TJSL
CSR Program Strategy

556 Kontribusi Perseroan Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Company's Contribution to the Sustainable Development Goals

558 Governansi (Tata Kelola) Keberlanjutan
Sustainable Governance

560 Kinerja Aspek Ekonomi
Economic Performance

561 Kinerja Lingkungan
Environmental Performance

568 Kinerja Sosial - Pengembangan Sosial dan Masyarakat
Social Performance - Social and Community Development

582 Kinerja Sosial – Aspek Pengelolaan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Social Performance – Employment, Occupational Health and Safety Managemen

588 Kinerja Sosial - Peningkatan Layanan Kepada Pelanggan
Social Performance - Service Improvement to Customers

Laporan Keuangan Audited
Audited Financial Statements

594 Laporan Keuangan Konsolidasian
Consolidated Financial Statements

Kilas Kinerja 2024

Performance Highlights in 2024

KINERJA UNGGUL TAHUN 2024
2024 EXCELLENT PERFORMANCE

KINERJA OPERASIONAL 2024
2024 OPERATIONAL PERFORMANCE

PROYEK PENJAMINAN
GUARANTEE PROJECTS

53

- 45 Infrastruktur terdiri 35 KPBU PPP dan 10 Non KPBU
- 8 Non Infrastruktur Non Infrastructure
- 45 Infrastructure consists of 35 KPBU PPP Scheme and 10 Non-PP Scheme
- 8 Non Infrastructure

PENJAMINAN BARU SELAMA 2024
NEW GUARANTEE IN 2024

4

a. Penjaminan Pinjaman PT KAI (Persero) dalam rangka Kereta Cepat Jakarta Bandung (Non KPBU)
b. Penjaminan Pinjaman PT PLN (Persero) dalam rangka *Indonesia Sustainable Least-cost Electrification* (ISLE) (Non KPBU)
c. Tol Kediri Tulungagung (KPBU)
d. Jalan Non Tol Transpapua (KPBU)

a. PT KAI (Persero) Loan Guarantee related to the Jakarta-Bandung High-Speed Rail Project (Non-PPP Scheme)
b. PT PLN (Persero) Loan Guarantee related to Indonesia Sustainable Least-cost Electrification (ISLE) (Non-PPP Scheme)
c. Kediri Tulungagung Toll Road (PPP)
d. Trans Papua Non-Toll Road (PPP)

AKUMULASI NILAI PROYEK
ACCUMULATED PROJECTS VALUE

Rp539

Triliun Trillion

KPBU PPP Scheme Rp302,99 T
Non KPBU Non-PPP Scheme Rp172,36 T
Non Infrastruktur Non Infrastructure Rp63,36 T

NILAI EKSPOSUR
EXPOSURE VALUE

Rp100

Triliun Trillion

KPBU PPP Scheme Rp78,76 T

DAMPAK EKONOMI PROYEK YANG TELAH DIJAMIN

ECONOMIC IMPACT OF GUARANTEED PROJECTS

JALAN TOL & NON TOL

TOLL ROAD & NON TOLL ROAD

16

Ruas Jalan Tol dengan total panjang 1001,11 km

Toll Road with a total length of 1001,11 km

123,01 km

Preservasi Jalan Nasional untuk 3 Ruas Jalan

Preservation for 3 National Roads

37

Jembatan Callender Hamilton

Hamilton Callender Bridge

FASILITAS JALAN

ROAD FACILITIES

20.374

Titik Peningkatan Layanan Penerangan Jalan Daerah

Regional Street Lighting Service Point

TELEKOMUNIKASI

TELECOMMUNICATION

3T

Pemerataan Konektivitas Data di kawasan Tertinggal, Terdepan dan Terluar

Equitable Data Conectivity in Underdeveloped, Frontier, and Outermost areas

12.229 km

Kabel Serat Optik Lintas Pulau

Cross-Island Fiber Optic Cable

150 Gbps

Melayani 14,546 titik melalui Satelit Satria-1 dan 11 stasiun bumi

Serving 14,546 points via Satria-1 Satellite and 11 ground stations

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)

DRINKING WATER SUPPLY SYSTEM (SPAM)

6

Proyek SPAM

SPAM Project

15.770

Liter/detik total debit produksi

Liters/second total production discharge

1.432.500

Sambungan Rumah (SR) Kapasitas untuk melayani jumlah rumah tangga

House Connection (SR) capacity to serve households

TRANSPORTASI
TRANSPORTATION

142 km

Pelayanan Rute Kereta Api Makassar-Parepare (Tahap I) Jalur KA Trans Sulawesi
Service of the Makassar - Parepare Railway Train (Phase I) of the Trans Sulawesi Railway

***Proving Ground* Bekasi. Peningkatan fasilitas uji tipe kendaraan bermotor dengan dampak penurunan tingkat emisi dan peningkatan ekspor.**
Bekasi Proving Ground. Improved motor vehicle test facilities contributing to reduced emission levels and increased exports.

30 unit Bus Listrik
Electric Buses

Dukungan terhadap produksi bus listrik oleh PT INKA untuk dioperasikan pada G-20 Bali dan kemudian di kota Bandung dan Surabaya.
Support for the production of electric buses by PT INKA to be operated at the G20 Summit in Bali, and subsequently in Bandung and Surabaya.

162 unit Bus
Buses

Dukungan terhadap peremajaan armada bus PT DAMRI untuk dioperasikan pada 35 trayek angkutan bandara dan angkutan antar kota.
Support for the buses rejuvenation of PT DAMRI to operate on 35 routes of airport transport and inter-city transport.

KETENAGALISTRIKAN
ELECTRICITY

2.428 MW

Total Kapasitas Produksi Energi Listrik
Total Electricity Generation Capacity

40.917 km

Total dukungan rehabilitasi dan perluasan jaringan distribusi listrik tegangan menengah
Support for rehabilitation and expansion of medium voltage electricity distribution network

388 MW

Total dukungan peningkatan rasio bauran energi terbarukan (*hydropower* dan *geothermal*)
Support to increase renewable energy mix ratio (hydropower and geothermal)

BUMN Terjamin mendapatkan pinjaman dengan tenor dan Bunga setara *sovereign*
Guaranteed SOEs obtain loans with sovereign-like tenors and interest rates.

CADANGAN PANGAN & INDUSTRI STRATEGIS PEMERINTAH
GOVERNMENT FOOD RESERVES & STRATEGIC INDUSTRIES

8.000 M

Metric Ton Gula
Metric Ton of Sugar

257 Ribu
Thousands

Kilo Liter Minyak
Kilo Liter of Oil

Udara Air
13 Radar Udara Ground Control Interception (GCI)
13 Ground Control Interception (GCI) Air Radar

Darat Land
Harwat Meriam
Harwat Cannon

Laut Sea
Perawatan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI)
KRI Refurbishment

KINERJA KEUANGAN 2024
2024 FINANCIAL PERFORMANCE

Laba Tahun Berjalan
Net Income for the Year
Rp930,88
miliar billion

Pendapatan
Revenues
Rp1.486,93
miliar billion

Jumlah Aset
Total Assets
Rp16.988,52
miliar billion

Ekuitas
Equity
Rp16.672,57
miliar billion

Liabilitas
Liabilities
Rp315,95
miliar billion

Dividen
Dividend
Rp167,17
miliar billion

Untuk tahun buku 2023 yang dibayarkan pada tahun 2024
For the 2023 fiscal year and paid in 2024

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
IMPORTANT FINANCIAL DATA OVERVIEW

Laporan Posisi Keuangan (dalam ribuan Rupiah)
Financial Position Statement (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Aset Assets					
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents*	**2.030.081.757**	121.487.653	134.306.368	5.893.947.654	4.883.892.973
Investasi Investment	**14.423.560.381**	15.793.648.683	15.008.163.837	7.948.301.268	8.380.506.137
Piutang Usaha Account Receivables	**402.385.200**	327.574.789	294.720.460	169.217.041	155.189.490
Piutang Lainnya Other Receivables	**11.935.434**	11.444.354	9.884.584	10.735.297	12.757.238
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka Prepaid Expenses and Advances	**1.099.038**	3.106.223	2.824.837	6.734.223	1.147.465
Aset Tetap Fixed Assets	**9.619.207**	13.550.832	4.895.573	8.140.743	10.606.021
Aset Hak Guna Right-of-Use Assets	**28.615.680**	45.313.785	12.573.130	31.432.826	50.292.522
Aset Takberwujud Intangible Assets	**4.923.545**	4.287.126	5.469.731	3.242.322	2.044.984
Beban Tangguhan Deferred Expenses	**2.837.247**	4.333.808	5.663.392	7.570.928	19.163.920
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes	**9.169.276**	5.030.281	2.015.255	1.612.945	3.869.629
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	**58.909.855**	70.902.886	69.194.332	58.130.420	22.617.765
Uang Jaminan yang Dapat Dikembalikan Refundable Deposit	**5.385.039**	5.369.039	5.369.039	5.369.039	5.369.039
Jumlah Aset Total Assets	**16.988.521.659**	**16.406.049.459**	**15.555.080.538**	**14.144.434.706**	**13.547.457.183**
Liabilitas Liabilities					
Utang Usaha Account Payables	**6.731.077**	14.044.779	9.993.160	7.372.764	3.089.412
Utang Pajak Taxes Payable	**1.531.600**	3.845.808	3.779.948	4.421.469	3.258.038
Biaya yang Masih Harus Dibayar, Penyisihan dan Utang Lain-lain Accrued Expenses, Provisions, and Other Payables	**117.924.523**	162.668.910	135.669.181	65.281.828	39.569.542
Pendapatan Tangguhan Unearned Income	**71.794.931**	130.836.305	169.931.976	171.117.254	15.661.694
Liabilitas Sewa Pembiayaan Financial Lease Liabilities	**31.198.399**	46.200.522	8.545.628	33.504.325	51.094.380
Pinjaman Penerusan Two-Step Loans	**54.586.445**	55.126.686	55.126.686	55.126.686	55.126.686
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefits Obligations	**32.180.991**	30.526.271	18.565.047	18.895.639	36.225.253
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**315.947.966**	**443.249.281**	**401.611.626**	**355.719.965**	**204.025.005**
Ekuitas Equity					
Modal Saham Share Capital	**10.655.000.000**	10.655.000.000	10.655.000.000	9.570.000.000	9.570.000.000
Laba/(Rugi) Belum Direalisasi atas Kepemilikan Aset Keuangan Unrealized Profit/(Loss) on Ownership of Financial Assets	**85.062.184**	142.007.600	20.604.578	300.351.343	298.992.727
Keuntungan/(Kerugian) Aktuarial, Setelah Pajak Actuarial Gain/(Loss), Net of Tax	**3.852.899**	848.646	5.906.831	4.228.982	(460.829)

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Saldo Laba: Retained Earnings:					
Ditentukan Penggunaannya Appropriated	**306.270.126**	264.478.126	228.769.445	197.499.338	166.471.338
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	**5.622.388.484**	4.900.465.806	4.243.188.058	3.716.635.078	3.308.428.942
Jumlah Ekuitas Total Equity	**16.672.573.693**	**15.962.800.178**	**15.153.468.912**	**13.788.714.741**	**13.343.432.178**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**16.988.521.659**	**16.406.049.459**	**15.555.080.538**	**14.144.434.706**	**13.547.457.183**

*) termasuk deposito berjangka yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang.
including time deposit with original maturities of 3 (three) months or less.

Grafik Aset (dalam ribuan Rupiah)
Graph: Assets (in thousand Rupiah)

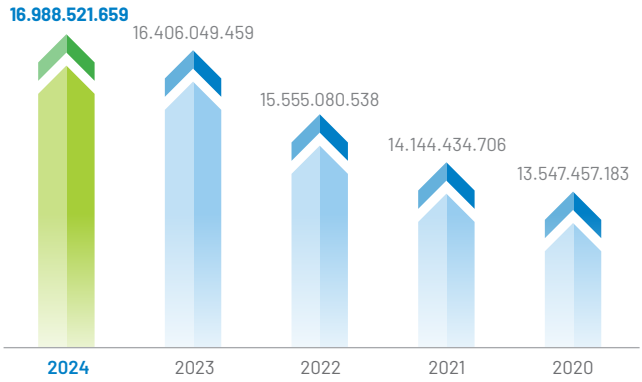

Grafik Liabilitas (dalam ribuan Rupiah)
Graph: Liabilities (in thousand Rupiah)

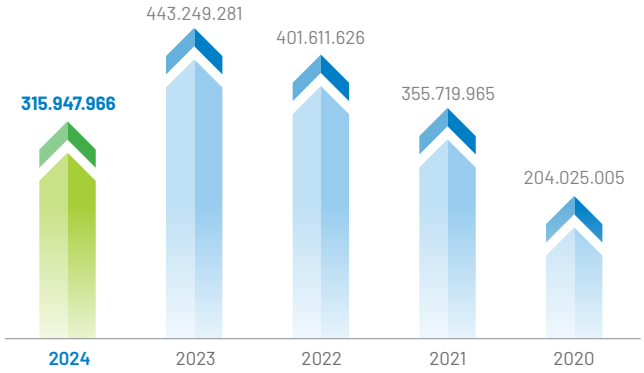

Grafik Ekuitas (dalam ribuan Rupiah)
Graph: Equity (in thousand Rupiah)

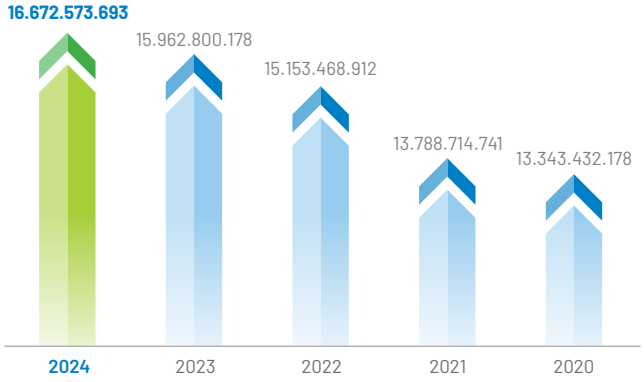

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain (dalam ribuan Rupiah)
Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Pendapatan Revenues	**1.486.930.586**	1.318.005.557	1.088.852.311	922.507.379	998.110.931
Beban Usaha Operating Expenses	**(544.905.230)**	(482.466.290)	(386.215.841)	(333.940.665)	(376.687.367)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	**942.025.356**	835.539.267	702.636.470	588.566.714	621.423.564
(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan (Expenses) Income Tax Benefit	**(11.145.678)**	281.887	11.537.151	36.835.422	(863.242)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**930.879.678**	**835.821.154**	**714.173.621**	**625.402.136**	**620.560.322**
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan, setelah pajak Other comprehensive income/for the year, net of tax	**(53.941.163)**	116.344.837	(278.068.916)	6.048.427	291.915.913
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	**876.938.515**	**952.165.991**	**436.104.705**	**631.450.563**	**912.476.235**
Laba Bersih per Saham Earnings per Share	**87.366**	**78.444**	**67.027**	**65.350**	**64.844**

*) Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah lembar saham.
Earnings per share is calculated by dividing income for the year by the number of shares.

Grafik Pendapatan (dalam ribuan Rupiah)
Graph: Revenue (in thousand Rupiah)

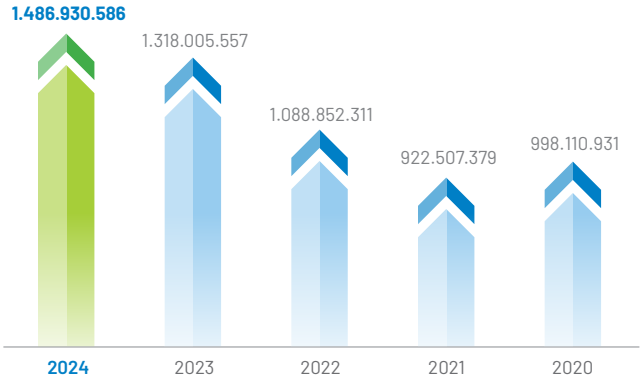

Grafik Laba Tahun Berjalan (dalam ribuan Rupiah)
Graph: Profit for the Year (in thousand Rupiah)

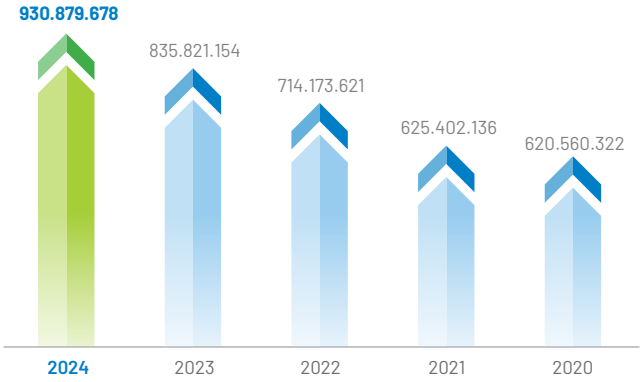

Grafik Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan (dalam ribuan Rupiah)
Graph: Total Comprehensive Income for the Year (in thousand Rupiah)

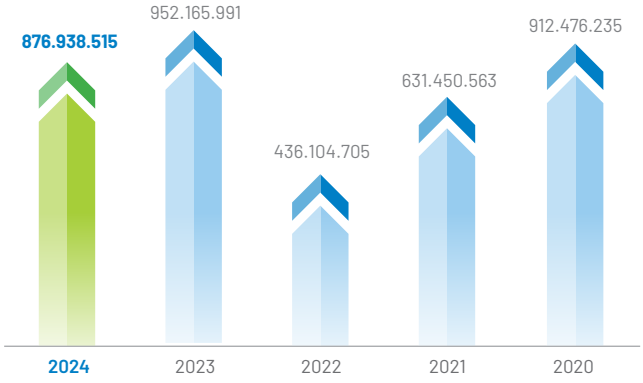

Grafik Laba Per Saham (dalam ribuan Rupiah)
Graph: Earnings Per Share (in thousand Rupiah)

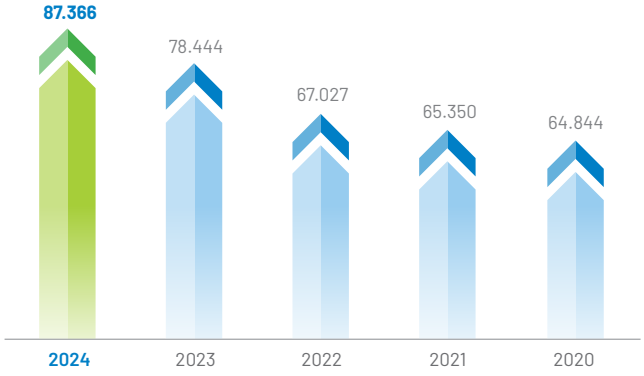

Laporan Arus Kas (dalam ribuan Rupiah)
Statement of Cash Flows (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	**785.154.232**	821.986.457	684.035.254	788.708.517	616.703.033
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	**1.309.755.972**	(676.862.832)	(7.344.891.496)	429.421.940	2.788.510.257
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	**(186.316.100)**	(157.942.340)	901.214.956	(208.075.776)	1.451.870.408
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Increase/(Decrease) of Net Cash and Cash Equivalents	**1.908.594.104**	(12.818.715)	(5.759.641.286)	1.010.054.681	4.857.083.698
Kas dan Setara Kas Awal Tahun* Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year*	**121.487.653**	134.306.368	5.893.947.654	4.883.892.973	26.809.275
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun* **Cash and Cash Equivalents at the End of the Year***	**2.030.081.757**	**121.487.653**	**134.306.368**	**5.893.947.654**	**4.883.892.973**

*) termasuk deposito berjangka yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang.
including time deposit with original maturities of 3 (three) months or less.

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun (dalam ribuan Rupiah)
Graph: Cash and Cash Equivalents at the End of the Year (in thousand Rupiah)

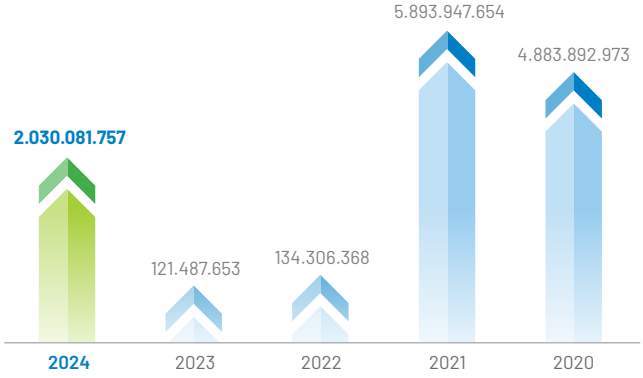

Rasio-rasio Keuangan (dalam %)
Financial Ratios (in %)

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio					
Rasio Imbal Hasil Aset Return on Assets (ROA)	**5,5**	5,1	4,6	4,6	5,4
Rasio Imbal Hasil Ekuitas Return on Equity (ROE)	**5,6**	5,2	4,7	4,6	5,4
Margin Laba Operasi Operating Profit Margin	**63**	63	65	64	63
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	**63**	63	66	68	63
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Operating Expenses to Operating Income (BOPO)	**37**	37	36	37	38
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio					
Rasio Kas Cash Ratio	**13,039**	8.814	10.133	17.959	28.888
Rasio Lancar Current Ratio	**11,096**	7.414	8.582	17.890	28.851
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio					
Rasio Liabilitas terhadap Aset Liabilities on Assets Ratio	**1,9**	2,7	2,6	2,5	1,5
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Liabilities on Equity Ratio	**1,9**	2,8	2,9	2,6	1,6
Pertumbuhan Growth					
Pendapatan Revenues	**12,8**	21,1	18,0	(7,6)	(1,0)
Beban Usaha Operating Expenses	**12,9**	24,9	15,7	(11,3)	(8,9)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**11,4**	17,0	14,2	0,8	17,2
Aset Assets	**3,6**	5,5	10,0	4,4	21,9
Liabilitas Liabilities	**(28,7)**	10,4	12,9	74,4	46,3
Ekuitas Equity	**4,4**	5,3	9,9	3,3	21,6

Grafik Margin Laba Bersih (dalam %)
Graph: Net Profit Margin (in %)

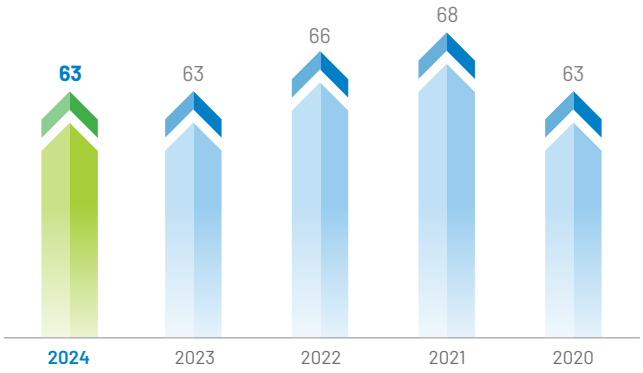

Grafik Margin Laba Operasi (dalam %)
Graph: Operating Profit Margin (in %)

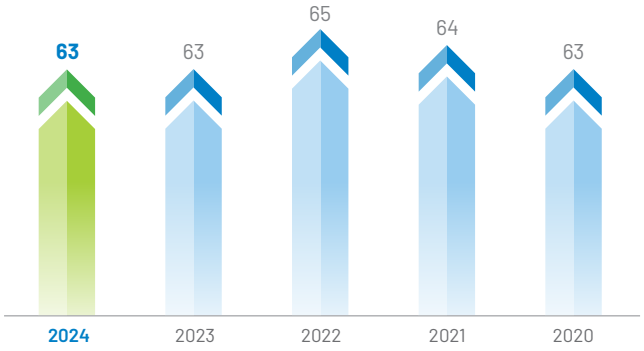

Grafik Beban Operasional Terhadap Pendapatan (BOPO) (dalam %)
Graph: Operating Expenses to Operating Income (BOPO) (in %)

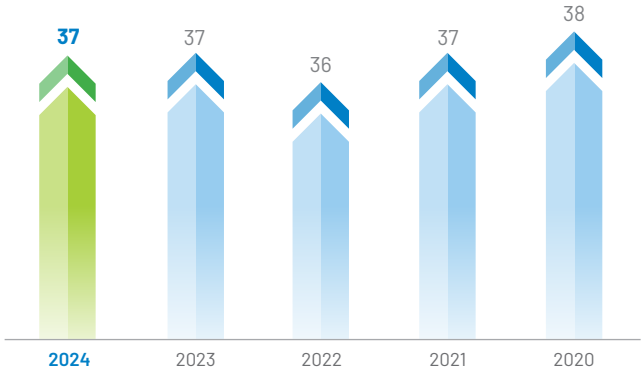

Grafik Rasio Kas (dalam %)
Graph: Cash Ratio (in %)

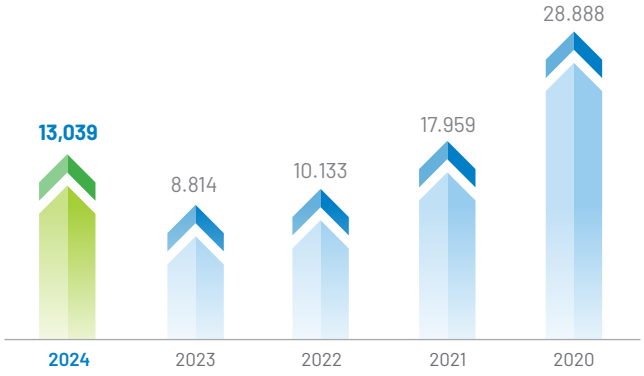

Grafik Rasio Lancar (dalam %)
Graph: Current Ratio (in %)

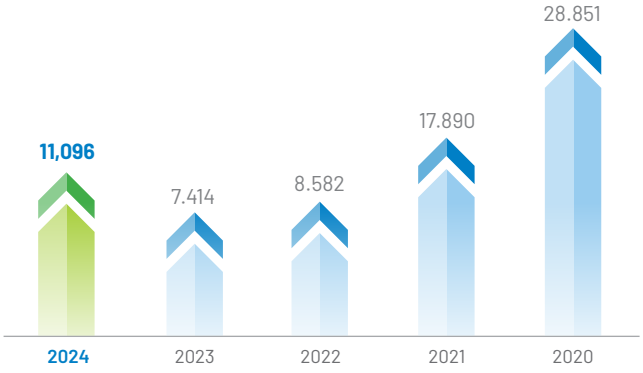

IKHTISAR BISNIS
BUSINESS HIGHLIGHT

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Penjaminan Guarantee	**310.054.107**	232.353.547	252.573.833	156.529.213	121.456.111
Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi Project Preparation and Transaction Advisory	**70.265.155**	70.529.576	41.098.924	29.171.852	21.922.064
Pengelolaan Dana Investment	**1.091.915.052**	1.009.080.358	793.702.056	735.871.054	854.732.756
Pendapatan Lainnya Other Income	**14.696.272**	6.042.076	1.477.498	935.260	-
Jumlah Pendapatan Total Revenue	**1.486.930.586**	**1.318.005.557**	**1.088.852.311**	**922.507.379**	**998.110.931**

Grafik Pendapatan (dalam ribuan Rupiah)
Graph: Revenue Composition (in thousand Rupiah)

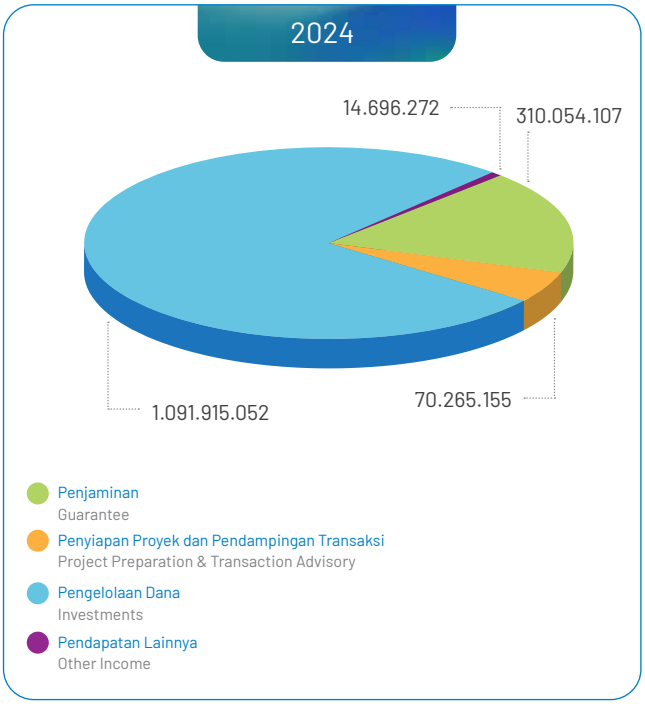

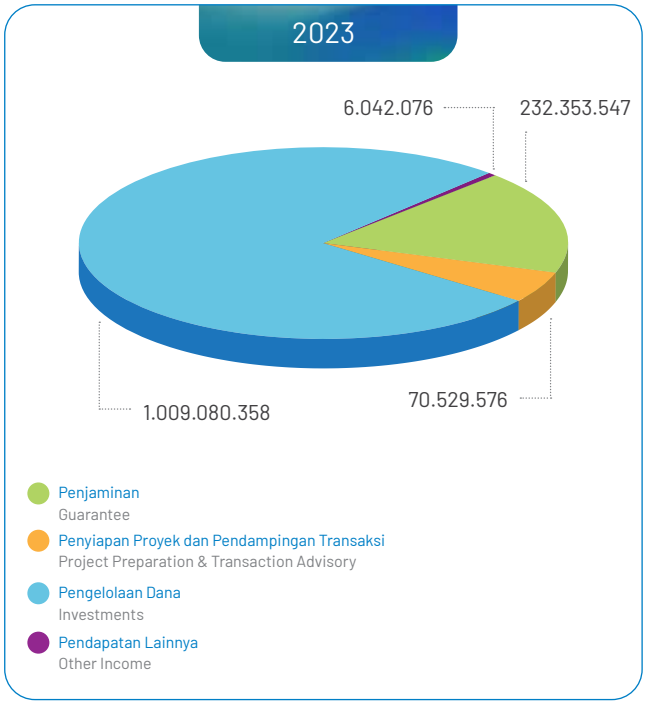

2022

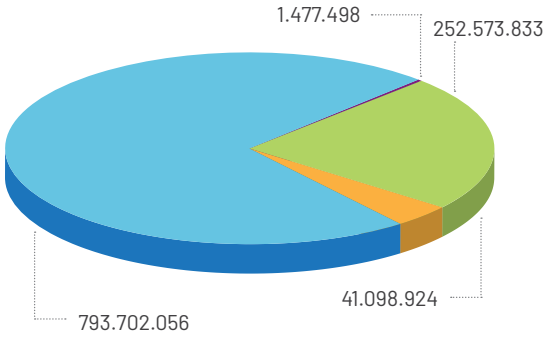

- Penjaminan
  Guarantee
- Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi
  Project Preparation & Transaction Advisory
- Pengelolaan Dana
  Investments
- Pendapatan Lainnya
  Other Income

2021

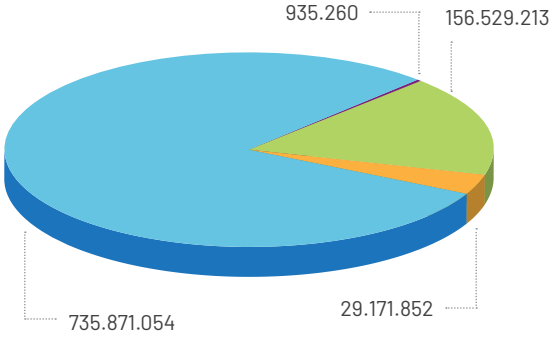

- Penjaminan
  Guarantee
- Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi
  Project Preparation & Transaction Advisory
- Pengelolaan Dana
  Investments
- Pendapatan Lainnya
  Other Income

2020

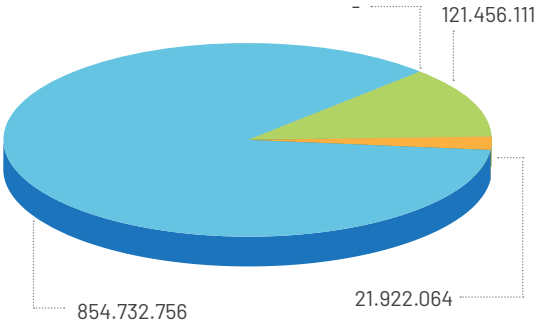

- Penjaminan
  Guarantee
- Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi
  Project Preparation & Transaction Advisory
- Pengelolaan Dana
  Investments
- Pendapatan Lainnya
  Other Income

IKHTISAR SAHAM DAN AKSI KORPORASI
SHARE AND CORPORATE ACTIONS HIGHLIGHTS

Jumlah saham Perseroan sebanyak 10.655.000 lembar saham, dengan kepemilikan seluruhnya atau 100% oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hingga akhir tahun 2024 Perseroan tidak mencatatkan sahamnya di bursa efek manapun baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, Perseroan tidak menyajikan informasi terkait jumlah saham beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah, harga saham penutupan, dan volume perdagangan saham Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga tidak menyajikan informasi terkait pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, penurunan nilai nominal saham, penghentian sementara perdagangan saham, dan penghapusan pencatatan saham.

The Company has 10,655,000 total number of shares, with 100% total ownership by the Government of the Republic of Indonesia. Until the end of 2024, the Company did not list its shares on any stock exchange either in Indonesia or abroad. Accordingly, the Company did not present information related to the number of outstanding shares, market capitalization, highest share price, lowest share price, closing share price, and trading volume of the Company's shares.

In addition, the Company also does not present information related to stock splits, reverse stock, share dividends, bonus shares, decrease in par value of shares, temporary suspension of share trading, and delisting of shares.

INFORMASI TENTANG OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI, SERTA INFORMASI PENDANAAN LAINNYA
INFORMATION ON BONDS, SUKUK OR CONVERTIBLE BONDS, AND OTHER FUNDING

Hingga akhir tahun 2024, Perseroan tidak menerbitkan obligasi/sukuk/obligasi konversi. Oleh karena itu, Perseroan tidak menyajikan informasi terkait jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki pendanaan lainnya seperti Surat Berjangka Menengah.

As of the end of 2024, the Company did not issue any bonds/sukuk/convertible bonds. Therefore, the Company does not present information related to the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest/reward rates, maturity dates, and bond/sukuk ratings. In addition, the Company also did not have other funding such as Intermediate Term Notes.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
CERTIFICATION AND AWARDS

Penghargaan
Awards

No	Tanggal Date	Acara/Kegiatan Event	Penghargaan Awards	Penyelenggara Organizer
1	1 Maret 2024 1 March 2024	BAZNAS Award 2024	Donatur Program CSR Terbaik 2024 Best CSR Program Donor 2024	BAZNAS
2	7 Maret 2024 7 March 2024	PR Indonesia Award 2024	*Bronze Award* kategori Departemen PR untuk Sektor BUMN Bronze Award in PR Department category for SOE Sector	PR Indonesia
3	13 Maret 2024 13 March 2024	Anugerah BUMN 2024	Kategori *Good Corporate Governance* Good Corporate Governance Category	BUMN Track
4	21 Maret 2024 21 March 2024	Indonesia Best 50 CEO	*Best CEO* pada Kategori *Infrastructure Support Financing* Best CEO in Infrastructure Support Financing Category	The Iconomics
5	25 April 2024 25 April 2024	Global CSR Award & Summit 2024	- Penghargaan *Silver* kategori *Best Community Programme* - Penghargaan Platinum kategori *Best* CEO - Silver Award in Best Community Programme category - Platinum Award in Best CEO category	The Pinnacle Group Intl.
6	8 Mei 2024 8 May 2024	Indonesia Best CSR Award 2024	*Best CSR* pada Kategori *Infrastructure Support Financing* Best CSR in Infrastructure Support Financing Category	The Iconomics
7	15 Mei 202 15 May 2024	Peringatan Hari Pendidikan Nasional National Education Day Memorial	Program Online dengan Dampak Terbesar 2024 Online-based Program with the Biggest Impact in 2024	Putera Sampoerna Foundation
8	31 Mei 2024 31 May 2024	Indonesia Regulatory & Compliance Awards 2024	*Most Strategic Enterprise in Regulatory Compliance, Financial Services-Non Bank Prosper* B	Hukum Online
9	5 Juli 2024 5 July 2024	ASEAN Risk Awards 2024	ASEAN GRC Kategori I ASEAN GRC Category I	ERMA

10 11 12 13 14

No	Tanggal Date	Acara/Kegiatan Event	Penghargaan Awards	Penyelenggara Organizer
10	9 Juli 2024 9 July 2024	The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2024	PPP *Agency of the Year*	The Asset
11	30 Juli 2024 30 July 2024	TJSL & CSR Award 2024	- Kategori Pilar Lingkungan - *Strong Commitment CEO on Environment Program of CSR* - Environmental Pillar Category - Strong Commitment CEO on Environment Program of CSR	BUMN Track
12	31 Juli 2024 31 July 2024	SPEx2 Award 2024	- *The Best Execution Winner in Infrastructure Financing & Insurance Industry* - *Outstanding Achievement in Sustainability & Governance* - Penghargaan khusus untuk Direktur Utama PT PII sebagai *The Best Chief Strategy Execution Officer in* BUMN - The Best Execution Winner in Infrastructure Financing & Insurance Industry - Outstanding Achievement in Sustainability & Governance - Honorary Award for the President Director of PT PII as The Best Chief Strategy Execution Officer in BUMN	Qubisa, Kontan
13	31 Juli 2024 31 July 2024	ENSIA 2024	Penghargaan *Gold* kategori Inovasi Sosial untuk program TJSL *Flagship*-nya WE CARE (*Waste Management for Circular Economy*) Penghargaan Gold kategori Inovasi Sosial untuk program TJSL Flagship-nya WE CARE (Waste Management for Circular Economy)	SUCOFINDO
14	7 Oktober 2024 7 October 2024	Annual Report Award 2023	Kategori Keuangan *Non-Go Public* Non-Go Public Finance	KNKG

15

16

17

18

No	Tanggal Date	Acara/Kegiatan Event	Penghargaan Awards	Penyelenggara Organizer
15	11 Oktober 2024 11 October 2024	Anugerah Humas Indonesia 2024 2024 Indonesian Public Relations Award	*Bronze Winner* untuk Utilisasi Kanal Digital TikTok dalam Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital pada kategori Korporasi Negara BUMN Bronze Winner for Utilisation of TikTok Digital Channel in Public Information Disclosure in the Digital Age in the category of State-Owned Corporations.	Media Humas Indonesia
16	14 November 2024 14 November 2024	BUMN Branding and Marketing Award 2024	- *Global Branding & Marketing Platinum Award* dalam kategori *Impact on Indonesia* - *Global Branding & Marketing Gold Award* dalam kategori *International Recognition* - *The Best CMO Branding & Marketing Award* dalam kategori *Excellence in Global Branding and Marketing Strategy* - Platinum Award for Global Branding & Marketing in the International Recognition Category - Gold Award for Global Branding & Marketing in the Impact on Indonesia Category - The Best CMO Branding & Marketing Award in the Category of Excellence in Global Branding and Marketing Strategy	BUMN Track
17	21 November 2024 21 November 2024	Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT)	- Peringkat *Gold* dalam kategori *In-Accordance* - *First-Year Commendation* sebagai apresiasi atas partisipasi perdananya dalam ASRRAT - Gold rating in the In-Accordance category - First-Year Commendation as an appreciation for inaugural participation in ASRRAT	National Center for Corporate Reporting

Sertifikasi
Certification

No	Nama Sertifikat Certificate	Pemberi Sertifikasi Certifying Body	Masa Berlaku Sertifikasi Expiry
18	**ISO 37001:2016** Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System	PT Chesna dan Komite Akreditasi Nasional PT Chesna and the National Accreditation Committee	30 Maret 2022 - 29 Maret 2025 30 March 2022 - 29 March 2025

PERISTIWA PENTING TAHUN 2024
SIGNIFICANT EVENTS IN 2024

4 Januari January

PT PII menggelar peringatan HUT ke-14 atas kontribusi dalam membangun Indonesia Kini dan Nanti, yang dihadiri oleh Menteri Keuangan RI beserta jajaran, dengan mengusung tema "*Leveraging Sustainability*", sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan di seluruh lini usahanya, di Kantor PT PII, sekaligus bentuk komitmen dalam menjadi penggerak ekosistem *innovative financing* untuk pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat besar untuk masyarakat.

IIGF held its 14th anniversary commemoration, celebrating its contributions to building Indonesia Now and the Future, which was was attended by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia. The event carried the theme "Leveraging Sustainability" as a reflection of the company's commitment to integrating sustainability principles across all lines of business, demonstrated IIGF's dedication to driving an innovative financing ecosystem for sustainable development that delivers significant benefits to society, that took place at the IIGF Office.

9 Januari January

DJPK bersama PT PII dan PT IIF melaksanakan kegiatan Bakti Sosial di 3 desa di Kabupaten Cianjur yang merupakan desa terdampak gempa besar pada tahun 2023, yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-23 DJPK, HUT ke-14 PT PII dan PT IIF.

DJPK, in collaboration with IIGF and PT IIF, conducted social service activities in three villages in Cianjur Regency that were affected by a major earthquake in 2023. This initiative was part of a series of events commemorating DJPK's 23rd Anniversary, as well as the 14th Anniversaries of IIGF and PT IIF.

22 Januari January

PT PII menerima kunjungan dari MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) untuk berdiskusi terkait dengan upaya peningkatkan investasi PT PII di seluruh wilayah Indonesia, khususnya pada sektor transisi energi dan pembiayaan di tingkat pemerintah daerah melalui KPBU.

IIGF received a visit from MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) to discuss efforts to enhance IIGF's investment in Indonesia, especially in the energy transition sector and financing at the local government level via PPP.

20 Februari February

PT PII bersama BAZNAS Indonesia meresmikan Rumah Kemas di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan dalam sektor Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan upaya peningkatan kualitas dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kemasan produk.

IIGF, in collaboration with BAZNAS Indonesia, inaugurated the Rumah Kemas in Maros Regency, South Sulawesi, which is one of the Company's Social Responsibility (CSR) programs in the Community Empowerment sector, to improve the quality and competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) through product packaging.

27 Februari February

Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol, Perjanjian Regres, dan Perjanjian Penjaminan Jalan Tol Kediri - Tulungagung yang dilakukan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Direktur Utama PT PII, Kepala BPJT Kementerian PUPR RI, dan Direktur PT Surya Sapta Agung Tol sebagai pihak Badan Usaha Jalan Tol, di Auditorium Kementerian PUPR.

The signing of the Toll Road Concession Agreement, Recourse Agreement, and Kediri - Tulungagung Toll Road Guarantee Agreement between the Minister of Public Works and Public Housing (PUPR) of the Republic of Indonesia, President Director of IIGF, Head of BPJT of the Ministry of PUPR RI, and Director of PT Surya Sapta Agung Tol as the Toll Road Special Purpose Vehicle at the Auditorium of the Ministry of PUPR.

28 Februari February

PT PII berpartisipasi aktif dalam peringatan Hari Gizi Nasional ke-64, dengan menyerahkan bantuan kepada Pemprov DKI Jakarta melalui Program Jakarta Bergerak atas *Stunting* pada acara puncak Hari Gizi Nasional ke-64.

IIGF participated in the commemoration of the 64th National Nutrition Day, by assisting DKI Jakarta Provincial Government in the Jakarta Movement Against Stunting Program at the peak event of the 64th National Nutrition Day.

5-7 Maret March

PT PII turut berpartisipasi pada kegiatan Dhawafest Pesona 2024. Beragam hasil karya kreasi dan produk unggulan mitra binaan UMKM PT PII dihadirkan antara lain Kerajinan Ketak dari Lombok Barat, Beras Sehat Nutri *Zinc* dari petani binaan di Karawang, Makanan ringan dari oleh-oleh Situbondo serta Kerajinan Kain Batik dan Tas Kulit dari Jawa Barat.

IIGF participated in the 2024 Dhawafest Pesona. A variety of creative works and flagship products from PT PII's fostered MSME partners were showcased, including ketak handicrafts from West Lombok, NutriZinc Healthy Rice from supported farmers in Karawang, traditional snacks from Situbondo, as well as batik fabric and leather crafts from West Java.

26 Maret March

PT PII menyelenggarakan *Community of Practice* 'INFINITY' *Gathering*, sebuah ajang diskusi dan silaturahmi para pemangku kepentingan Perseroan dari berbagai Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam *Community of Practice - Innovative Financing Community* (INFINITY), wadah bagi praktisi *innovative financing* untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan sinergi dan kolaborasi pembangunan, khususnya dalam mendorong dan mendukung pembiayaan inovatif.

IIGF organised the Community of Practice 'INFINITY' Gathering, a discussion and gathering of the Company's stakeholders from various Ministries/Institutions that are members of the Community of Practice - Innovative Financing Community (INFINITY), a forum for innovative financing practitioners to strengthen the commitment in creating synergy and development collaboration, especially in encouraging and supporting innovative financing.

16-20 April April

PT PII bersama Kementerian Keuangan turut berpartisipasi dalam IMF-WB *Spring Meeting* 2024 di Washington DC pada 16 - 20 April 2024. Dalam rangkaian kegiatan ini PT PII juga melakukan pertemuan dengan *World Bank*, MIGA, dan BCG membahas potensi investasi di berbagai proyek di Indonesia dalam percepatan pembangunan infrastruktur.

IIGF, in collaboration with the Ministry of Finance, participated in the IMF-WB Spring Meeting 2024 in Washington DC on 16-20 April 2024. In this series of activities, IIGF held meetings with the World Bank, MIGA, and BCG, to discuss the potential for investment in various projects in Indonesia to accelerate infrastructure development.

25 April April

PT PII berkoordinasi dengan BKF Kementerian Keuangan dan LMAN mengadakan *talkshow* "Nyibir Fiskal" dengan pembahasan manfaat mudik bagi perekonomian nasional dan peran Kementerian Keuangan serta lembaga di bawah Kementerian Keuangan memfasilitasi mudik.

IIGF, in coordination with BKF and LMAN of the Ministry of Finance, held a talk show "Nyibir Fiskal" to discuss the benefits of the exodus (mudik) for the national economy and the role of the Ministry of Finance and institutions under the Ministry of Finance in facilitating mudik.

28-30 April April

PT PII berpartisipasi dalam agenda IsDB Annual Meeting 2024 sekaligus peringatan 50 tahun IsDB di Riyadh, Arab Saudi pada 28-30 April 2024. PT PII juga menghadiri pertemuan dengan berbagai pihak antara lain IsDB, ICIEC, SFD, dan ADFIMI membahas potensi kerja sama antara PT PII dalam pembiayaan inovatif pembangunan infrastruktur.

IIGF participated in the IsDB 2024 Annual Meeting as a commemoration of the 50th anniversary of IsDB in Riyadh, Saudi Arabia, on 28-30 April 2024. IIGF attended meetings with various parties including IsDB, ICIEC, SFD, and ADFIMI to discuss the potential for cooperation between IIGF in innovative financing of infrastructure development.

21 Mei May

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan Tahun Buku 2023, dengan agenda Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Penetapan Keputusan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.

The Annual General Meeting of Shareholders for the 2023 Fiscal Year, with the agenda to Approve the Company's Annual Report for the 2023 Fiscal Year and Decision on the Use of the Company's Net Income for the 2023 Fiscal Year.

21 Mei May

PT PII menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kolaborasi Konten dan *Workshop Graphic Standard Manual* bersama Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI.

IIGF hosted the Content Collaboration Coordination Meeting and Graphic Standard Manual Workshop with the Bureau of Communication and Information Services of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

22-24 Mei May

Keterlibatan PT PII dalam penyelenggaraan *10th World Water Forum* sebagai sponsor dan *Knowledge Partner* dalam beberapa panel diskusi. PT PII juga menjajaki kolaborasi dengan Kedutaan Besar Perancis untuk Indonesia melalui kegiatan *French Business Delegation Forum* di French Pavilion, di dalam area Country Pavilion WWF 2024.

IIGF is involved in organizing the 10th World Water Forum as a sponsor and Knowledge Partner in several discussion panels. IIGF explored collaboration with the French Embassy to Indonesia through the French Business Delegation Forum at the French Pavilion, within the WWF 2024 Country Pavilion area.

27 Mei May

Seremonial Program *Employee Voluntary Program* TJSL Pemeriksaan Gigi di SDN Jakasampurna 1-3 Dalam rangka memperingati hari Pendidikan Nasional.

Ceremonial Employee Voluntary Program CSR Dental Check-up at Jakasampurna State Elementary School 1-3 to commemorate National Education Day.

29-30 Mei May

Media Gathering Kolaborasi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan bersama PT PII, PT SMI, dan BPDLH dalam mendukung perubahan penanganan iklim bersama rekan-rekan media di Rancamaya, Ciawi.

Media Gathering in Collaboration with Bureau of Communication and Information Services of the Ministry of Finance with IIGF, PT SMI, and IEF, in supporting climate change management with media partners at Rancamaya, Ciawi.

4-5 Juni June

PT PII berpartisipasi aktif dalam *Asia Infrastructure Forum* 2024 yang diselenggarakan oleh Infrastructure Asia ("InfraAsia"), di mana PT PII berperan sebagai program *partner* dalam acara yang berlangsung di Suntec Singapore Convention & Exhibition Center, Singapura. PT PII juga meresmikan kolaborasi dengan InfraAsia melalui penandatanganan MoU.

IIGF participated in the 2024 Asia Infrastructure Forum organized by Infrastructure Asia ("InfraAsia"), where IIGF was a program partner in the event held at Suntec Singapore Convention & Exhibition Center, Singapore. IIGF also formalized its collaboration with InfraAsia by signing an MoU.

25 Juni June

PT PII bersama BPDLH dan IIF jalin kolaborasi dalam pembiayaan inovatif melalui *blended finance* untuk pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi yang tertuang dalam nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh pimpinan ketiga SMV, yang disaksikan Menteri Keuangan RI beserta Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

IIGF in collaboration with BPDLH and IEF on innovative financing through blended finance for sustainable development. The collaboration, which is stipulated in a memorandum of understanding, was signed by the Heads of the three SMVs, witnessed by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia and the Director General of Treasury and Director General of State Assets.

28 Juni June

Penandatangan Perjanjian Kerjasama Proyek TPPAS Legok Nangka oleh PT PII bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT Jabar Environmental Solutions (JES) di Gedung Sate, Bandung, yang disaksikan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

The signing of the Legok Nangka TPPAS Project Cooperation Agreement by IIGF with the West Java Provincial Government and PT Jabar Environmental Solutions (JES) at Gedung Sate, Bandung, witnessed by the Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment, Luhut Binsar Pandjaitan.

3 Juli July

PT PII berkomitmen melakukan penjaminan untuk proyek KPBU Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena (Segmen Mamberamo-Elelim) yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian regres dengan Kementerian PUPR sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja sama dan penandatanganan perjanjian penjaminan dengan PT Hutama Membelim Trans Papua sebagai Badan Usaha Pelaksana.

IIGF is committed to guaranteeing the Trans Papua Road PPP project for the Jayapura-Wamena section (Mamberamo-Elelim Segment), marked by the signing of a recourse agreement with the Ministry of PUPR as the Government Contracting Agency and the signing of a guarantee agreement with PT Hutama Membelim Trans Papua as the Implementing Business Entity.

7 Juli July

PT PII bersama SMV di bawah Kementerian Keuangan yaitu PT Geo Dipa Energi, PT SMI, PT IIF, LPEI, PT SMF dan PT Karabha Digdaya melakukan peluncuran Program Sinergi TJSL "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu" di kantor PT Geo Dipa Energi Unit Dieng. Program ini menjadi bukti nyata kepedulian SMV Kementerian Keuangan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

IIGF, together with SMVs under the Ministry of Finance, i.e., PT Geo Dipa Energi, PT SMI, PT IIF, LPEI, PT SMF, and PT Karabha Digdaya, launched the CSR Synergy Program "Environmental Based Community Empowerment in the Serayu Watershed" at PT Geo Dipa Energi's office, Dieng Unit. This program is concrete proof of the Ministry of Finance's SMV concern, in social, economic, and environmental aspects.

18 Juli July

Pemberhentian dan pengangkatan Komisaris Utama PT PII, yaitu memberhentikan dengan hormat Rina Widiyani Wahyuningdyah, dan mengangkat Hadiyanto sebagaimana tercantum dalam KMK No. 297 Tahun 2024 yang disahkan pada 17 Juli 2024.

Dismissal and appointment of Commissioner President Commissioner of IIGF, namely dismissing with honour Rina Widiyani Wahyuningdyah, and appoint Hadiyanto as as stated in KMK No. 297 of 2024 which was approved on 17 July 2024.

6 Agustus August

Kunjungan Duta Transformasi Kemenkeu bersama *Project Management Office* (PMO) Sekretariat Jenderal dalam kegiatan PMO *Informal Meeting* II ke PT PII dan Meta Indonesia.

The visit of the Ministry of Finance Transformation Ambassador together with the Project Management Office (PMO) of the Secretariat General in the 2nd PMO Informal Meeting to IIGF and Meta Indonesia.

9 Agustus August

Partisipasi PT PII sebagai Narasumber dalam InARI Expo 2024 pada *Talkshow* "Proyek KPBU terkait Pengelolaan dan Pembangunan Armada Kapal Riset Nasional BRIN", di Cibinong *Science Center.*

IIGF's participation as a speaker in 2024 InARI Expo at the "Public Private Partnership (PPP) Projects related to the Management and Construction of the BRIN National Research Vessel Fleet" Talkshow, at the Cibinong Science Center.

21 Agustus August

Site Visit Jembatan Callendar-Hamilton Semarang bersama Pemegang Saham, untuk meninjau langsung proyek bersama PJPK.

Site Visit of Callendar-Hamilton Bridge Semarang with Shareholders, to directly review the project with GCA.

21 Agustus August

Kunjungan Proyek Kereta Api Makassar-Parepare bersama Komisaris Utama, untuk meninjau langsung proyek bersama PJPK.

Makassar - Parepare Railway Train Project Visit with President Commissioner, to review the project with GCA.

23 Agustus August

Partisipasi aktif PT PII sebagai Narasumber dalam GRC *Summit* pada *Talkshow* "Leadership for Sustainable Impact" di Yogyakarta.

IIGF's active participation as a speaker in the GRC Summit at the "Leadership for Sustainable Impact" Talkshow in Yogyakarta.

26 Agustus August

Partisipasi PT PII pada seremonial Peresmian Proyek Strategis Nasional SPAM Bandar Lampung yang diresmikan langsung oleh Presiden RI.

IIGF's participation in the ceremonial Inauguration of Bandar Lampung SPAM National Strategic Project, inaugurated by the President of the Republic of Indonesia.

30 Agustus August

Pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yaitu memberhentikan dengan hormat Mariatul Aini dan Iqbal Islami serta mengangkat Ferry Irawan dan Ahmad Ghufron

Dismissal and appointment of members the Board of Commissioners dismissed with honour Mariatul Aini and Iqbal Islami also appointed Ferry Irawan and Ahmad Ghufron

11 September September

PT PII berpartisipasi dalam gelaran acara Wisuda Sampoerna University sebagai *Keynote Speaker* bersama Putra Sampoerna Foundation.

IIGF participated in the Sampoerna University Graduation ceremony as a Keynote Speaker with Putra Sampoerna Foundation.

17 September September

PT PII bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Universitas Andalas mengadakan Seminar Nasional bertajuk "Peran BUMN untuk Pembangunan Berkelanjutan: Strategi Pemanfaatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan".

IIGF, together with Directorate General of State Assets Management Ministry of Finance and Andalas University, held a National Seminar entitled "The Role of SOEs for Sustainable Development: Strategies for Utilization of Separated State Assets"

18 September September

CEO *Meeting* Semester 1 bersama Menteri Keuangan, yang diikuti oleh seluruh Direktur Jenderal Unit Eselon 1 dan Direktur Utama SMV Kementerian Keuangan.

CEO Meeting with the Minister of Finance for the period H1, which was attended by all Directors General of Echelon 1 Units and Managing Directors of SMVs of the Ministry of Finance.

25 September September

Townhall Meeting Kuartal 3 bersama Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, di The Financial Hall, Jakarta.

Townhall Meeting Q3 with the Board of Directors and Board of Commissioners, at the Financial Hall, Jakarta.

27-28 September September

Company Gathering PT PII 2024 diikuti oleh Karyawan #IIGFans bersama Direksi dan Dewan Komisaris di Lembang, Bandung.

2024 IIGF Company Gathering, followed by #IIGFans Employee with Commissioners and Directors in Lembang, Bandung.

30 September September

Simposium VI dan Musyawarah Nasional University Network Indonesia Infrastructure Development (UNIID) di Universitas Brawijaya, Malang.

VI Symposium and National Conference of University Network Indonesia Infrastructure Development (UNIID) at Brawijaya University, Malang.

7 Oktober October

PT PII berpartisipasi dalam Kemenkeu Mengajar 9 bersama Menteri Keuangan, dengan menerjunkan 21 relawan di 11 titik di Indonesia.

IIGF participated in Kemenkeu Mengajar 9 with the Minister of Finance, by deploying 21 volunteers in 11 points in Indonesia.

8 Oktober October

Sebagai *Creative Financing Hub*, PT PII menjadi tuan rumah dalam *Talkshow & Networking Session Event Asian Urban Lighting Workshop* 2024 bersama KOTRA.
As a Creative Financing Hub, IIGF hosted the Talkshow & Networking Session Event of Asian Urban Lighting Workshop 2024 with KOTRA.

10 Oktober October

PT PII berpartisipasi pada rangkaian perayaan HORI ke-78 dalam penyelenggaraan cabang olahraga Permainan Tradisional yang diikuti seluruh Unit Eselon 1 dan SMV/BLU Kementerian Keuangan.
IIGF participated in a series of 78th HORI celebrations in organizing Traditional Sport Games, which were attended by all Echelon 1 Units and SMV/BLU of the Ministry of Finance.

14 Oktober October

Bersama PT SMI dan PIP, PT PII meninjau langsung program sinergi TJSL SMV/BLU dengan mitra YDBA di Kabupaten Bogor.
Together with PT SMI and PIP, IIGF conduct a direct inspection the CSR synergy program of SMV/BLU with YDBA partners in Bogor Regency.

22-26 Oktober October

PT PII bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan perwakilan Unit Eselon 1, Lembaga, serta SMV/BLU Kementerian Keuangan menghadiri IMF-WBG Annual Meeting 2024 di Washington.
IIGF, together with Deputy Minister Thomas Djiwandono along with representatives of Echelon 1 Units, Institutions, and SMV/BLU of the Ministry of Finance, attended the IMF-WBG Annual Meeting 2024 in Washington.

27 Oktober October

PT PII bersama PT SMF dan IIF berperan aktif dalam *The Canadian Institutional Investors Roundtable* untuk menjajaki potensi investasi di Indonesia khususnya pada sektor infrastruktur bersama Kanada.
IIGF, together with PT SMF and IIF, participated in The Canadian Institutional Investors Roundtable to explore the potential for investment in Indonesia, especially in the infrastructure sector, with Canada.

29 Oktober October

PT PII bersama Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat Universitas Andalas menggelar *Indonesia Infrastructure Roundtable 2024* ke-27 di Padang.
IIGF, in collaboration with Centre for Agrarian and Customary Law Studies of Andalas University held the 27th Indonesia Infrastructure Roundtable 2024 in Padang.

18 November November

PT PII berpartisipasi dalam kegiatan *Investor and Tenant Gathering* 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI pada peresmian buku serta diskusi panel "*Embrace the Investor Opportunities in Land Transport Infrastructure Land – Together We Can*".

IIGF participated in the Investor and Tenant Gathering 2024 organised by the Directorate General of Land Transportation of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia at the inauguration of the book and panel discussion "Embrace the Investor Opportunities in Land Transport Infrastructure Land - Together We Can"

20 November November

PT PII berpartisipasi dalam kegiatan Indonesia *Sector Briefing* 2024 yang diadakan oleh *Fitch Ratings* sebagai Panelis dalam panel diskusi '*Corporate, Infrastructure and Project Finance*'.

IIGF participated in the Indonesia Sector Briefing 2024 held by Fitch Ratings as a panelist in the 'Corporate, Infrastructure and Project Finance' panel discussion.

4 Desember December

PT PII menggelar Seminar Nasional dan Peluncuran Buku "Bersama Memajukan Timur: Membangun Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan yang Inklusif melalui Skema Pembiayaan Kreatif" dan Kemenkeu Mendengar di Universitas Pattimura, Maluku.

IIGF held a National Seminar and Book Launching "Together Advancing the East: Building Inclusive Sustainable Economic Infrastructure through Creative Financing Schemes" and Kemenkeu Mendengar at Pattimura University, Maluku.

16 Desember December

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PII menyetujui RKAP 2025 PT PII di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

IIGF's Annual General Meeting of Shareholders approved IIGF's 2025 Company Work Plan and Budget at the Head Office of the Directorate General of State Assets Management, Ministry of Finance, Central Jakarta.

18 Desember December

PT PII bersama Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan berpartisipasi dalam Diskusi Publik CNN Indonesia bertajuk "Creative Financing, Jurus Jitu Infrastruktur Menembus Ekonomi 8 Persen"

IIGF, together with Directorate of Government Support Management and Infrastructure Financing (PDPPI), Directorate General of Financing and Risk Management (DJPPR), Ministry of Finance, participated in CNN Indonesia's Public Discussion entitled "Creative Financing, Infrastructure's Surefire Tactics to Penetrate the 8 Percent Economy"

30 Desember December

Acara Syukuran HUT PT PII ke-15 PT PII tepat pada hari jadi PT PII yang diikuti oleh jajaran Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan #IIGFans, serta Komisaris dari periode sebelumnya di PT PII, dengan mengusung tema tahunan "*Accelerating Equitable Growth*".

IIGF's 15th Anniversary Ceremonial Event was attended by the Board of Commissioners, Directors, #IIGFans employees, and Commissioners from the previous period at IIGF, with the annual theme "Accelerating Equitable Growth."

Laporan Manajemen

Management Report

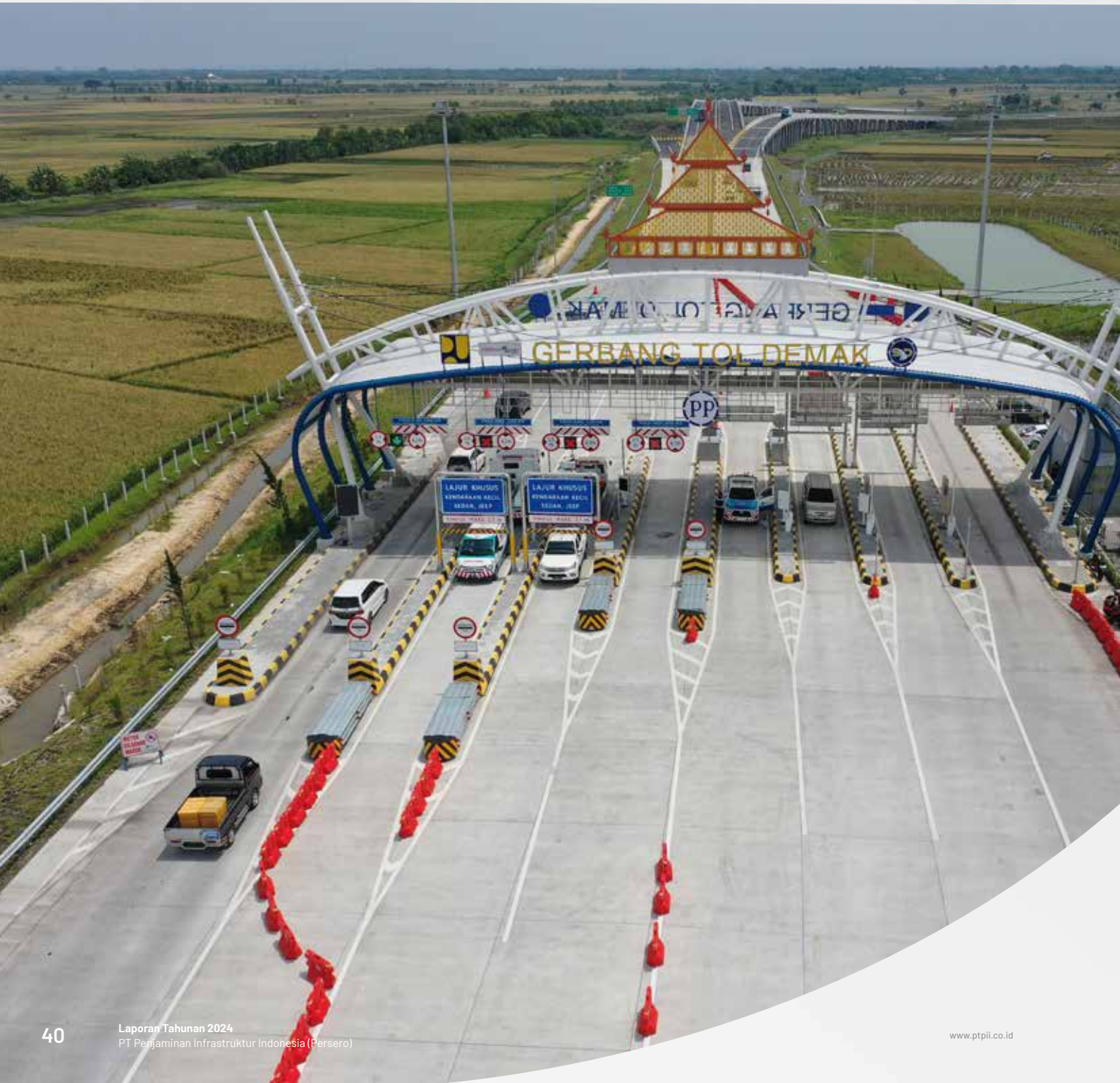

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT

Hadiyanto
Komisaris Utama
President Commissioner

Selama tahun 2024, PT PII mampu merealisasikan target yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024. Secara umum, kinerja yang dibukukan PT PII berhasil mencapai target yang positif.

In 2024, IIGF was able to realize the predetermined targets as outlined in the 2024 Work Program and Budget (WP&B). Generally, IIGF recorded a positive performance.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Yang Terhormat

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) selanjutnya disingkat "PT PII atau Perseroan" telah berhasil melalui tahun 2024 yang penuh tantangan dengan pencapaian yang baik. Mewakili Dewan Komisaris, izinkan kami untuk menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan 2024 ini sebagai wujud komitmen tinggi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan RI.

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan secara intensif untuk memastikan bahwa manajemen PT PII menjalankan operasi Perseroan dengan standar tata kelola yang tinggi, sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kami senantiasa memantau dan memastikan bahwa kegiatan operasional Perseroan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mengutamakan kepentingan Pemegang Saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ini memuat uraian penilaian atas kondisi makro ekonomi tahun 2024, kinerja Direksi, kinerja Perseroan, pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan, pengawasan atas penerapan tata kelola perusahaan berkelanjutan, pandangan atas pengelolaan atas tanggung jawab sosial, peran aktif Dewan Komisaris dalam memantau penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), pandangan atas prospek usaha dan strategi Perseroan, pandangan atas realisasi dan tata kelola penggunaan tambahan dana PMN, dan penilaian atas kinerja Organ Dewan Komisaris. Di samping itu, Laporan juga menyampaikan terkait mekanisme dan frekuensi pemberian nasihat kepada Direksi serta perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris yang menjabat sepanjang tahun 2024.

To All Distinguished Shareholders and Stakeholders

All praise and gratitude to God Almighty, Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, hereinafter referred to as "IIGF" or "the Company," successfully navigated the challenging year of 2024 with commendable achievements. On behalf of the Board of Commissioners, we hereby present a report on the Board's supervisory and advisory responsibilities in this 2024 Annual Report. This 2024 Annual Report serves as a manifestation of our strong commitment to maintaining and improving the performance of the Special Mission Vehicle (SMV) under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

In 2024, the Board of Commissioners conducted intensive supervision to ensure that IIGF manages the Company's operations with high governance standards, in accordance with good corporate governance principles. We consistently oversee and ensure that the Company's operations comply with prevailing regulations while prioritizing the interests of Shareholders and other stakeholders.

This Report of the Board of Commissioners' Supervisory Duties contains a description of the macroeconomic assessment in 2024, the Board of Directors' performance, the Company's performance, supervision of the Company's strategy, supervision of the sustainable corporate governance, perspective on the corporate social responsibility, the active role of the Board of Commissioners in monitoring the whistleblowing system, perspectives on the Company's business prospects and strategies, perspectives on the realization and governance of the usage of additional PMN fund, and the performance assessment of the Board of Commissioners' organs. Additionally, the Report covers the mechanism and frequency of providing guidance to the Board of Directors, along with changes in the composition of the Board of Commissioners throughout 2024.

KONDISI MAKRO EKONOMI 2024

MACROECONOMIC CONDITIONS IN 2024

Pada tahun 2024, dunia dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, termasuk konflik geopolitik, perubahan kepemimpinan politik di luar negeri seperti pergantian pimpinan Amerika Serikat dengan kebijakan kenaikan tarif (Trump 2.0), serta proyeksi ekonomi global yang masih lemah. Dampak dari perang Ukraina-Rusia masih terasa, dengan ketegangan di Timur Tengah dan Laut Cina Selatan yang juga belum mereda. Hal ini berpotensi menambah ketidakpastian dalam ekonomi global, terutama dalam sektor perdagangan dan energi. Konflik geopolitik yang berlangsung mengakibatkan gangguan pasokan komoditas pangan dan energi, pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral di berbagai negara, serta tekanan inflasi yang terus meningkat. Kondisi ini tentu saja turut mempengaruhi perekonomian Indonesia. Perekonomian global pada tahun 2024 diperkirakan masih mengalami kinerja yang bervariasi antar kawasan. Meskipun negara-negara maju masih menunjukkan ketahanan, ekonomi global secara keseluruhan tetap lebih lemah dibandingkan dengan periode sebelum pandemi. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan global hanya sebesar 2,4% pada 2024, sedikit lebih rendah dibandingkan 2023. Sedangkan IMF memproyeksikan pertumbuhan global sebesar 3,2% pada tahun yang sama.

In 2024, the world encountered a range of complex challenges, including geopolitical conflicts, shifts in political leadership abroad, such as the change in U.S. leadership accompanied by a tariff increase policy (Trump 2.0), and weak global economic projections. The repercussions of the Ukraine-Russia war persisted, while tensions in the Middle East and the South China Sea remained unresolved. This could further contribute to uncertainty in the global economy, particularly in the trade and energy sectors. Persistent geopolitical conflicts have disrupted the supply of food and energy commodities, prompted central banks in various countries to tighten monetary policies, and intensified inflationary pressures. These conditions have certainly affected the Indonesian economy. The global economy in 2024 was anticipated to show varying performance across different regions. Although developed countries are still showing resilience, the overall global economy remains weaker compared to the pre-pandemic period. The World Bank projected global growth of only 2.4% in 2024, slightly lower than in 2023. Meanwhile, the IMF projected global growth of 3.2% in the same year.

Tantangan lainnya yang dihadapi adalah adanya dinamika perubahan kepemimpinan, terutama dengan pelaksanaan pemilihan umum di berbagai negara pada tahun 2024, termasuk di Indonesia. Perubahan ini berpotensi membawa kebijakan-kebijakan baru yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian domestik serta hubungan internasional.

Another challenge encountered is the dynamic nature of leadership changes, particularly with the general elections taking place in several countries in 2024, including Indonesia. These changes may introduce new policies that could impact the stability of the domestic economy and international relations.

Sementara itu, Indonesia menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif stabil di tengah tantangan global ini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% pada triwulan IV 2024 (*cumulative to cumulative*/ctc), yang lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Sektor-sektor utama yang mendukung pertumbuhan ini termasuk industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, serta sektor informasi dan komunikasi. Inflasi Indonesia juga terjaga dengan baik, tercatat sebesar 1,57% (yoy) pada Desember 2024, lebih rendah dibandingkan inflasi Desember 2023 (2,61%), berada dalam rentang target sasaran nasional 2,5%±1%. Selain itu, *Purchasing Managers' Index*

Meanwhile, Indonesia has shown relatively stable economic performance amidst these global challenges. Based on data from Statistics Indonesia (BPS), Indonesia recorded economic growth of 5.02% in Q4 2024 (cumulative to cumulative/ctc), which was better than the previous quarter. Key sectors supporting this growth included manufacturing, construction, trade, and the information and communication sector. Indonesia's inflation was also well maintained, recorded at 1.57% (yoy) in December 2024, lower than December 2023 inflation (2.61%), and within the national target range of 2.5%±1%. Furthermore, Indonesia's Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) surged

(PMI) Manufaktur Indonesia mengalami rebound pada Desember 2024, mencatatkan level ekspansif di angka 51,2, menunjukkan optimisme dunia usaha terhadap perekonomian Indonesia ke depan.

in December 2024, reaching an expansionary level of 51.2, reflecting business optimism about the country's economic prospects.

Meskipun ekonomi Indonesia relatif stabil, nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi sepanjang tahun 2024. Untuk merespons hal ini, Bank Indonesia menaikkan suku bunga dari 6% menjadi 6,25% untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Pemerintah juga mengalokasikan dana dari APBN untuk menjaga permintaan domestik, antara lain melalui program perlindungan sosial, pembayaran gaji ke-13 ASN, dan insentif perumahan. Secara keseluruhan, meskipun dunia masih menghadapi berbagai ketidakpastian dan tantangan besar, Indonesia dapat dikatakan memiliki prospek ekonomi yang relatif lebih cerah dibandingkan dengan banyak negara lainnya di kawasan, berkat kebijakan yang tepat dan kondisi ekonomi domestik yang *resilient*.

Despite Indonesia's relatively stable economy, the Rupiah exchange rate depreciated throughout 2024. In response, Bank Indonesia raised interest rates from 6% to 6.25% to maintain exchange rate stability. The government also allocated funds from the State Budget to maintain domestic demand, among others through social protection programs, the 13th salary of the State Civil Apparatus, and housing incentives. In general, although the world is still facing various uncertainties and major challenges, Indonesia is considered to have a relatively brighter economic outlook compared to many other countries in the region, thanks to the right policies and resilient domestic economic conditions.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI/INDIVIDU

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS/ INDIVIDUAL

Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja Direksi dan seluruh jajaran insan Perseroan, mengingat pencapaian positif yang berhasil diraih meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah berupaya maksimal dengan strategi yang tepat untuk menjaga pertumbuhan serta kelangsungan bisnis Perseroan. Lebih lanjut, Dewan Komisaris mengapresiasi pencapaian masing-masing Direktur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Direktur Utama, Direktur Bisnis, dan Direktur Keuangan Perseroan secara individu berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh para pemangku kepentingan. Hal ini terlihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) mereka, dengan angka yang sangat memuaskan: 107.81% untuk Direktur Utama, 103.68% untuk Direktur Bisnis, dan 107.68% untuk Direktur Keuangan. Pencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan mereka dalam mewujudkan target-target yang diharapkan, serta kontribusi besar mereka terhadap keberhasilan Perseroan secara keseluruhan.

The Board of Commissioners highly appreciates the performance of the Board of Directors and all levels of the Company's personnel, considering the positive achievements despite the challenges faced. The Board of Commissioners considers that the Board of Directors has performed their best with the right strategies to maintain the Company's growth and business continuity. Further, the Board of Commissioners appreciated the achievements of each Director in carrying out their duties and responsibilities. The Company's President Director, Business Director, and Finance Director individually achieved the performance targets predetermined by the stakeholders. This is reflected by the achievements of their Key Performance Indicators (KPIs), with very satisfactory figures: 107.81% for the President Director, 103.68% for the Business Director, and 107.68% for the Finance Director. These achievements demonstrate their success in realizing the expected targets, as well as their great contribution to the Company's success.

PENILAIAN ATAS KINERJA PERSEROAN

ASSESSMENT OF THE COMPANY'S PERFORMANCE

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada segenap Direksi dan jajaran atas upaya dan kerja keras selama tahun 2024. Kami menilai Direksi dan jajaran telah melakukan pengelolaan kegiatan secara baik sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mempertahankan stabilitas dan kelangsungan bisnis Perseroan. Selama tahun 2024, PT PII mampu merealisasikan target yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024. Secara umum, kinerja yang dibukukan PT PII berhasil mencapai target yang positif. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan berhasil mencatat kinerja keuangan yang *solid* dan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan kinerja 2024 yang melampaui target RKAP sebesar 107% untuk pendapatan dan 105% untuk laba bersih, Perseroan mampu mencapai target pendapatan usaha sebesar Rp1.486,93 miliar, yang meningkat 13% dari tahun 2023, serta laba bersih sebesar Rp930,88 miliar, yang meningkat 11% dari tahun 2023. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam mengelola operasi dan strategi bisnis yang efektif, serta menunjukkan komitmen tinggi dari Direksi dan seluruh jajaran dalam mencapai tujuan jangka panjang Perseroan.

The Board of Commissioners appreciates the Board of Directors and all supporting levels for their efforts and hard work in 2024. We assessed that the Board of Directors and all supporting levels have managed the activities well in accordance with the predetermined work program to maintain the stability and continuity of the Company's business. In 2024, IIGF was able to realize the predetermined targets as outlined in the 2024 Work Program and Budget (WP&B). Generally, IIGF recorded a positive performance. As of 31 December 2024, the Company recorded solid and better financial performance compared to the previous year. With projected 2024 performance exceeding the WP&B target by 107% for revenue and 105% for net profit, the Company was able to achieve its operating revenue target of Rp1,486.93 billion, which increased by 13% from 2023, and net profit of Rp930.88 billion, which increased by 11% from 2023. This accomplishment highlights the Company's effectiveness in managing its operations and business strategy, while also showcasing the strong commitment of the Board of Directors and all personnel in achieving its long-term objectives.

Dewan Komisaris menilai, Direksi telah menjalankan roda Perseroan yang merupakan salah satu *Special Mission Vehicle* Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI yang mendapat mandat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui skema pembiayaan kreatif. PT PII telah berhasil menorehkan capaian yang signifikan dalam mendukung transformasi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menciptakan landasan bagi Indonesia menuju negara maju sejak pertama kali didirikan 15 tahun yang lalu. Pencapaian ini menunjukkan komitmen Perseroan dalam berperan aktif terhadap pembangunan infrastruktur yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan upaya yang terus-menerus dilakukan oleh Direksi, PT PII telah berhasil beradaptasi dengan dinamika ekonomi global dan domestik, serta memperkuat posisinya sebagai agen perubahan dalam sektor infrastruktur di Indonesia.

The Board of Commissioners considers that the Board of Directors has driven the Company's wheels, as one of the Special Mission Vehicles of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, with the mandate to support the acceleration of infrastructure development in Indonesia via creative financing schemes. IIGF made significant achievements in supporting inclusive and sustainable transformation to create a foundation for Indonesia towards a developed country since it was first established 15 years ago. This achievement reflects the Company's commitment to playing an active role in infrastructure development that not only supports economic growth, but also has a positive impact on the community's welfare widely. With the Board of Directors' continuous efforts, IIGF has successfully adapted to global and domestic economic dynamics, and strengthened its position as an agent of change in the infrastructure sector in Indonesia.

Dewan Komisaris mendukung upaya PT PII dalam mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan dengan memberikan penjaminan terhadap 53 proyek dari berbagai sektor dengan nilai investasi sebesar Rp539 triliun yang merupakan kolaborasi bersama antara Pemerintah dan

The Board of Commissioners supports IIGF's efforts in encouraging sustainable infrastructure development by providing guarantees for 53 projects from various sectors with an investment value of Rp539 trillion, which is a joint collaboration between the Government and the private sector,

pihak swasta yang senantiasa mendukung Perseroan dalam menjalankan mandatnya sebagai *fiscal tools* pemerintah, dengan menjadi penggerak skema *creative financing* dalam pembangunan infrastruktur. Sebagai hasilnya, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga dengan baik, dan dampak yang diberikan kepada masyarakat semakin optimal.

to always support the Company in carrying out its mandate as the government's fiscal tools, by driving creative financing schemes in infrastructure development. Consequently, the performance of the State Budget (APBN) is effectively sustained, and its impact on society is maximized.

Terkait dengan penjaminan 53 proyek yang dilakukan oleh PT PII, rincian tersebut menunjukkan komitmen besar Perseroan dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan Non-KPBU, serta penjaminan yang menggunakan kapasitas PMN Program PEN (Program Pemulihan Ekonomi Nasional). Rincian dari 53 proyek tersebut adalah 45 proyek penjaminan infrastruktur dan 8 penjaminan non infrastruktur. Selain itu terdapat 1 proyek yang sudah selesai masa penjaminannya dan 3 proyek yang berakhir sebelum efektif penjaminannya. Jumlah nilai penjaminan atas proyek yang dijamin sebesar Rp100 triliun. Berdasarkan jumlah efektif eksposur atas 45 proyek penjaminan proyek KPBU dan Non-KPBU yang dijamin sebesar Rp92 triliun dan dengan ekuitas tanpa memperhitungkan PMN PEN yang menjadi sebesar Rp15,10 triliun per 31 Desember 2024 maka *Gearing Ratio* PT PII adalah 6,1x.

In terms of 53 guaranteed projects by IIGF, these projects show the Company's great commitment to supporting infrastructure development through PPP (Public Private Partnership) and Non-PPP schemes, as well as guarantees that use the capacity of the PMN PEN (National Economic Recovery) Program. Of the total 53 projects, 45 are infrastructure guarantee projects, while the remaining 8 are non-infrastructure guarantees. In addition, there is 1 project that has completed its guarantee period and 3 projects that ended before the guarantee was effective. The total value of the guaranteed project is Rp100 trillion. Based on the effective amount of exposure for 45 guaranteed PPP and Non-PPP projects of Rp92 trillion, and with equity without calculating PEN PMN of Rp15.10 trillion, as of 31 December 2024, IIGF's Gearing Ratio was 6.1x.

Dengan *Gearing Ratio* yang tercatat, PT PII menunjukkan rasio eksposur yang terkelola dengan baik sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Hal ini menggambarkan kemampuan Perseroan dalam menjaga keberlanjutan penjaminan proyek dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana.

With a recorded Gearing Ratio, IIGF shows a well-managed exposure ratio in accordance with the available capacity. This illustrates the Company's ability to maintain the sustainability of project guarantees and consider the prudence principle in managing funds.

Penjaminan PT PII pada 53 proyek tersebut juga menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Di sektor jalan, misalnya, telah dibangunnya 16 ruas jalan tol sepanjang 991 km, serta pelestarian 10 ruas jalan nasional sepanjang 520,07 km. Selain itu, 38 jembatan telah diganti di 37 lokasi di Pulau Jawa, yang bertujuan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah. Ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas tetapi juga memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai daerah. Pencapaian ini menggambarkan kontribusi besar PT PII dalam mendukung infrastruktur Indonesia yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

IIGF's guarantees for the 53 projects have also resulted in significant social and economic impacts on the community. For example, in the road sector, 16 toll roads of 991 km have been constructed, and 10 national road sections with a total of 520.07 km have been preserved. In addition, 38 bridges have been replaced in 37 locations in Java, to strengthen connectivity between regions. This not only improves accessibility but also facilitates equitable economic growth in various regions. These achievements illustrate IIGF's great contribution to supporting Indonesia's better infrastructure, which in turn, improves people's quality of life.

Pada sektor ketenagalistrikan, terdapat 2.428 MW total kapasitas produksi energi listrik, 388 MW total dukungan peningkatan rasio bauran energi terbarukan dan 40.917 kms

In the electricity sector, there are 2,428 MW of total electricity generation capacity, 388 MW of total support to increase the renewable energy mix ratio, and 40,917 kms of total support

total dukungan rehabilitasi dan perluasan jaringan distribusi listrik tegangan menengah. Sementara itu, pada sektor telekomunikasi melalui Palapa Ring telah tersedia 8.479 km kabel fiber optik lintas pulau dan Satelit Multifungsi yang menghubungkan 149.400 titik layanan offline di Indonesia termasuk area Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T). Pada sektor Air Minum melalui proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) telah tersedia supply air minum yang melayani 5,9 juta masyarakat. Kemudian pada sektor konservasi energi, telah melayani 20.374 titik dalam peningkatan layanan penerangan jalan di daerah dengan teknologi hemat energi dan ramah lingkungan. Pada sektor transportasi terdapat pelayanan rute kereta api sepanjang 142 km dan juga peningkatan fasilitas uji tipe kendaraan bermotor. Selain itu, PT PII juga mendukung cadangan pangan & industri strategis Pemerintah (8.000 metrik ton gula & 257.000 kilo liter minyak goreng), percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung (KJCB), dan Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification (ISLE).

Dewan Komisaris juga menilai bahwa PT PII berupaya mendorong keberlanjutan program pemerintah menuju negara maju, salah satunya melalui penyediaan Infrastruktur untuk kehidupan yang layak. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, berhasil menarik investasi global melalui reformasi regulasi dan kebijakan fiskal untuk mendanai sektor strategis, termasuk infrastruktur, yang didukung oleh PT PII sebagai salah satu fiscal tools Pemerintah. Melalui dukungan dari berbagai pihak serta kerja sama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, PT PII telah membukukan kinerja keuangan yang bertumbuh dan meraih hasil audit eksternal yang memberikan opini wajar tanpa modifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa PT PII telah menjalankan mandatnya dengan penuh tanggung jawab, menciptakan dampak positif yang luas bagi pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dewan Komisaris mendukung upaya PT PII dalam mengembangkan proyek-proyek yang berorientasi pada keberlanjutan dan yang dapat memberikan dampak positif jangka panjang. Penjaminan terhadap sektor yang mendukung transisi energi, seperti energi terbarukan dan proyek-proyek yang terkait dengan mitigasi dampak perubahan iklim, merupakan langkah strategis yang sangat relevan dengan tujuan global untuk mengurangi emisi karbon dan memitigasi dampak lingkungan.

for rehabilitation and expansion of medium voltage electricity distribution networks. Meanwhile, in the telecommunications sector, via the Palapa Ring, 8,479 km of cross-island fiber optic cables and Multi Functional Satellites have connected 149,400 offline service points in Indonesia including the Outermost, Frontier and Disadvantaged (3T) areas. In the Drinking Water sector, via the Drinking Water Supply System (SPAM) project, there is a drinking water supply that serves 5.9 million people. Further, in the energy conservation sector, 20,374 points serve to improve street lighting services in the area with energy-efficient and environmentally friendly technology. In the transportation sector, a 142 km railway route service has been constructed, in addition to the motor vehicle type test facilities. Additionally, IIGF supports the Government's strategic food & industrial reserves (8,000 metric tons of sugar & 257,000 kiloliters of cooking oil), acceleration of the implementation of infrastructure and facilities for the Jakarta Bandung High Speed Rail (KJCB), and Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification (ISLE).

The Board of Commissioners also considers that IIGF strives to encourage the sustainability of the government's program towards a developed country, one of which is by providing decent Infrastructure. The Government, through the Ministry of Finance, has successfully attracted global investment through regulatory reforms and fiscal policies to fund strategic sectors, including infrastructure, which is supported by IIGF as one of the Government's fiscal tools. Through the support of various parties and good cooperation with all stakeholders, IIGF recorded a growing financial performance and achieved external audit results with an unqualified opinion. Therefore, IIGF has carried out its mandate responsibly, creating a wide positive impact on infrastructure development and the welfare of the Indonesians.

The Board of Commissioners supports IIGF's efforts in developing projects that are oriented towards sustainability and that can have a long-term positive impact. A strategic move that is extremely pertinent to the global objective of lowering carbon emissions and minimizing environmental effects is guaranteeing sectors that promote energy transition, such as renewable energy and initiatives linked to climate change impact mitigation.

Selain itu, Dewan Komisaris juga mengapresiasi inisiatif PT PII yang memperluas jangkauan penjaminan di luar sektor infrastruktur tradisional. Pendekatan ini tidak hanya membantu menciptakan lebih banyak peluang bisnis, tetapi juga mempercepat pengembangan sektor-sektor baru yang berpotensi memberi dampak besar terhadap perekonomian dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam hal ini, secara khusus penjaminan untuk proyek *small scale* KPBU yang menjadi proyek percontohan sangat penting untuk mengembangkan infrastruktur di daerah-daerah, yang memungkinkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

In addition, the Board of Commissioners appreciates IIGF's initiative to expand its guarantee coverage beyond the traditional infrastructure sector. This approach not only creates more business opportunities, but also accelerates the development of new sectors with the potential to have a major impact on the economy and sustainable development in Indonesia. Therefore, in particular, guarantees for small-scale PPP projects that become pilot projects are very important for developing infrastructure in the regions, which enables more equitable and sustainable development throughout Indonesia.

Dewan Komisaris juga menilai positif langkah PT PII dalam mendukung ekonomi hijau melalui pelaksanaan *framework Environment, Social, and Governance* (ESG). Pendekatan ini tidak hanya mendukung transisi energi yang ramah lingkungan, tetapi juga berperan dalam pengembangan fasilitas perkotaan yang lebih efisien dan berkelanjutan, termasuk dalam hal konservasi energi yang semakin penting di era perubahan iklim ini. Dengan strategi-strategi tersebut, Dewan Komisaris berharap PT PII dapat terus berperan sebagai agen pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian ekonomi jangka pendek, tetapi juga menciptakan dampak positif yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

The Board of Commissioners also positively assesses IIGF's steps in supporting the green economy by implementing the Environment, Social, and Governance (ESG) framework. This approach not only supports an environmentally friendly energy transition, but also plays a role in the development of more efficient and sustainable urban infrastructure, including in terms of energy conservation, which is increasingly crucial in this era of climate change. With these strategies, the Board of Commissioners expects that IIGF can continue to play a role as a development agent that not only focuses on short-term economic achievements, but also creates a wider and more sustainable positive impact on society and the environment.

Dalam upaya peningkatan kapasitasnya untuk melakukan penjaminan, PT PII secara akumulatif sejak berdirinya di tahun 2009 hingga 2024 telah mendapatkan PMN sebesar Rp10,7 triliun. Pada tahun 2024 ini, Perseroan membukukan Laba Bersih sebesar Rp930,88 miliar yang mencerminkan pencapaian sebesar 105% terhadap target, yang dihasilkan dari Pendapatan Usaha sebesar Rp1.486,93 miliar dan realisasi Beban Usaha sebesar Rp544,90 miliar. Dengan demikian, baik BOPO masih dapat memenuhi *threshold* dan target anggaran masing-masing sebesar 37% (*threshold*: 37%) sedangkan untuk Margin Laba Bersih berada di bawah *threshold* dan target yaitu 63% (*target*: ≥64%). Pendapatan Usaha terdiri dari Pendapatan Penjaminan (KPBU, Non KPBU dan PEN) sebesar Rp310,10 miliar, Pendapatan PDF sebesar Rp70,27 miliar, Pendapatan Pengelolaan Dana sebesar Rp1.091,92 miliar dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp14,70 miliar. Pencapaian Pendapatan Usaha mencerminkan 107% terhadap target.

To increase its capacity to provide guarantees, IIGF has accumulatively received a PMN of Rp10.7 trillion since its establishment in 2009 until 2024. In 2024, the Company recorded Rp930.88 billion of Net Profit, which reflects a 105% achievement of the predetermined target, resulting from Rp1,486.93 billion of Operating Revenues and Rp544,90 billion of Operating Expenses. Thus, both BOPO achieved the threshold and budget target of 37% (threshold: 37%) while the Net Profit Margin is below the threshold and target, namely 63% (target: ≥64%). The Operating Revenues consists of Guarantee Income (PPP, Non-PPP, and PEN) of Rp310,10 billion, PDF Income of Rp70.27 billion, Income from Fund Management of RpRp1,091.92 billion, and Other Income of Rp14.70 billion. The Operating Revenues achieved 107% of the target.

Pada tahun 2024 PT PII telah berkontribusi dalam penerimaan negara melalui pembayaran PPh final sebesar Rp158,2 miliar dan PPh 21 sebesar Rp39,5 miliar. Selain itu, PT PII pun telah berkontribusi bagi penerimaan negara melalui pembayaran dividen. Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2024 telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2023 sebesar 20% dari laba bersih Perseroan atau sejumlah Rp167,17 miliar yang telah dibayarkan pada 6 Juni 2024. Dewan Komisaris terus mendorong upaya PT PII untuk meningkatkan kontribusi kepada negara melalui pembayaran dividen.

In 2024, IIGF contributed to state revenue via final income tax payments of Rp158.2 billion and income tax Article 21 of Rp39.5 billion. In addition, IIGF has also contributed to the state revenue by paying dividends. The Shareholders, via the Company's Annual General Meeting of Shareholders on 21 May 2024, have approved the dividend distribution for the 2023 fiscal year amounting to 20% of the Company's net profit, equivalent to Rp167.17 billion, which was paid on 6 June 2024. The Board of Commissioners encourages IIGF's efforts to enhance its contribution to the state via dividend payments.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PERSEROAN
SUPERVISION OF THE COMPANY'S STRATEGY IMPLEMENTATION

Dewan Komisaris berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi melalui komunikasi yang intensif dan selalu dilaksanakan untuk membahas isu-isu signifikan, termasuk dalam perencanaan dan konsistensi pelaksanaan rencana Perseroan di tahun 2024.

The Board of Commissioners is committed to implementing its supervisory and advisory functions to the Board of Directors through intensive and frequent communication to discuss significant issues, including the planning and consistent implementation of the Company's 2024 plan.

Dalam perumusan target kinerja dan kebijakan strategis di awal tahun, Dewan Komisaris berperan memberikan arahan, nasihat dan masukan kepada Direksi. Tidak hanya dalam hal perumusan, namun Dewan Komisaris juga mengemban tanggung jawab untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan strategis dan tercapainya target-target kinerja yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) maupun dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) .

In the formulation of performance targets and strategic policies at the beginning of the year, the Board of Commissioners has the role of providing direction, advice, and input to the Board of Directors. In addition to formulation, the Board of Commissioners is responsible for ensuring the effectiveness of the strategic policies and the achievement of performance targets set forth in the Company's Work Program and Budget (WP&B) and Long-Term Plan (RJPP).

Dalam penyusunan arah strategis Perseroan, Dewan Komisaris senantiasa memberikan arahan yang selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), dengan tujuan untuk memperluas kebermanfaatan PT PII dalam berbagai sektor serta tahapan proyek infrastruktur. Fokus utama PT PII adalah pada penguatan keberlangsungan proyek-proyek dalam mandat eksisting, sambil memperluas sektor penjaminan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), khususnya yang mendukung upaya transisi energi dan menghadapi tantangan perubahan iklim (*climate change*).

In preparing the Company's strategic direction, the Board of Commissioners provides direction that is aligned with the Company's Long Term Plan (RJPP), with the objective of expanding IIGF's usefulness in various sectors and stages of infrastructure projects. IIGF's main focus is to strengthen the projects' sustainability within the existing mandate, while expanding the Public Private Partnership (PPP) guarantee sector, especially those that support energy transition and climate change.

Pemberian arahan, nasihat dan masukan dari Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, melalui surat tertulis, rapat Komite di bawah Dewan Komisaris, dan juga dalam kunjungan kerja Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners provides direction, advice, and input to the Board of Directors via the Board of Commissioners' meetings with the Board of Directors, via written letters, Committees' meetings under the Board of Commissioners, and Board of Commissioners' working visits.

PENGAWASAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN BERKELANJUTAN
SUPERVISION OF THE SUSTAINABLE CORPORATE GOVERNANCE

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) di PT PII merupakan bagian integral dari komitmen Perseroan untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta untuk menciptakan lingkungan bisnis yang profesional, transparan, berintegritas, dan efisien. Prinsip-prinsip GCG ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan nilai Perseroan, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, baik bagi Perseroan maupun masyarakat dan lingkungan sekitar. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, PT PII menempatkan penerapan GCG dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar keberlanjutan Perseroan tidak hanya diukur dari sisi finansial, tetapi juga dari aspek sosial dan lingkungan yang lebih luas. Penerapan GCG yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran akan memberikan dampak positif yang luas baik untuk perusahaan maupun masyarakat, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Good Corporate Governance (GCG) implementation within the Company is an integral part of the Company's commitment to protecting the interests of stakeholders and establishing a professional, transparent, integrity, and efficient business environment. These GCG principles shall not only increase the Company's value, but also contribute to the achievement of sustainable development goals, for the Company, the surrounding community, and the environment. As part of this commitment, IIGF upholds the GCG implementation within the framework of sustainable development. This aims to ensure that the Company's sustainability is not only measured from a financial perspective, but also from social and environmental aspects. GCG is implemented by prioritizing the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, and shall provide a broad positive impact on both the company and society, and create a business climate conducive to sustainable growth.

Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus mendukung PT PII dalam penerapan dan penguatan prinsip-prinsip GCG secara berkesinambungan. Dewan Komisaris juga akan terus melakukan pengawasan atas implementasi GCG untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut diterapkan dengan baik dalam setiap aspek operasional perusahaan. Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan sistem pengawasan dan pengendalian yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam perusahaan melaksanakan tugasnya dengan integritas tinggi, serta sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

The Board of Commissioners is committed to supporting IIGF in implementing and strengthening GCG principles continuously. The Board of Commissioners will also continue to supervise the GCG implementation to ensure that the principles are properly applied in every aspect of the company's operations. The Board of Commissioners views that the implementation of a strong supervision and control system is necessary to ensure that every Company's element carries out its duties with high integrity, and in accordance with prevailing policies and regulations.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)
PERSPECTIVES ON THE GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Dewan Komisaris secara konsisten menjalankan tugas pengawasan terhadap pengelolaan PT PII, termasuk dalam aspek kualitas penerapan GCG. Sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perusahaan, PT PII telah menunjuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penilaian GCG Tahun Buku 2024, yang mengacu pada parameter yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

The Board of Commissioners consistently implements its supervisory duties on IIGF's management, especially on the quality of the GCG implementation. As part of the commitment to maintain transparency and accountability in the company's operations, IIGF has appointed the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) to conduct a GCG assessment for 2024 Fiscal Year, which refers to the parameters developed by the Ministry of Finance, as stipulated in the Minister of Finance Regulation No. 88/PMK.06/2015 on the GCG Implementation

Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 tentang penerapan GCG pada perusahaan Persero yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan. Hasil dari penilaian BPKP menunjukkan pencapaian skor sebesar 90,829 dengan klasifikasi "Sangat Baik" dalam penerapan GCG. Skor ini mencerminkan kualitas penerapan GCG yang terus berkembang dan menunjukkan bahwa PT PII telah berhasil mempertahankan standar tinggi dalam tata kelola perusahaan. Pencapaian ini juga menggambarkan bahwa kualitas GCG di PT PII secara konsisten berada dalam kategori "Sangat Baik" setiap tahunnya, yang merupakan hasil dari komitmen dan upaya yang terus dilakukan oleh seluruh jajaran Direksi dan manajemen.

in Company (Persero) Under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance. BPKP assessed that the Company achieved 90.829 with a "Very Good" classification in terms of GCG implementation. This score reflects the quality of GCG implementation that keeps improving and shows that IIGF maintains high standards in corporate governance. This achievement also illustrates that the GCG quality at IIGF is consistently in the "Very Good" category every year, which is the result of the commitment and efforts by all levels of the Board of Directors and management.

Dewan Komisaris akan terus melakukan monitoring dan memberikan arahan strategis untuk memastikan penerapan GCG terus diperbaiki, termasuk pada area-area yang direkomendasikan oleh BPKP sebagai asesor. Perbaikan berkelanjutan dalam aspek-aspek tertentu akan menjadi fokus, guna memastikan bahwa PT PII terus berada pada jalur yang tepat dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap standar GCG yang berlaku. Dewan Komisaris juga berharap agar penerapan GCG Perseroan dapat terus disempurnakan melalui komitmen yang kuat dan partisipasi aktif dari seluruh insan PT PII.

The Board of Commissioners will continue to monitor and provide strategic direction to ensure the improvement of GCG implementation on a continuous basis, including in areas recommended by BPKP as an assessor. Continuous improvements in key areas will remain a priority to ensure that IIGF stays on the right path in upholding integrity and compliance with prevailing GCG standards. The Board of Commissioners also hopes that the Company's GCG implementation can be refined continuously via strong commitment and active participation from all the Company's personnel.

PANDANGAN ATAS KINERJA KEPATUHAN DIREKSI DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

PERSPECTIVE ON THE COMPLIANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL

Dewan Komisaris memberikan penilaian positif terhadap kinerja kepatuhan Direksi selama tahun 2024, dimana Direksi telah menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian dengan pihak ketiga, serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan/atau Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Hal ini menunjukkan komitmen Perseroan untuk memastikan kegiatan operasionalnya berjalan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan dan standar yang berlaku.

The Board of Commissioners assessed the Board of Directors' compliance performance positively in 2024, where the Board of Directors has implemented good corporate governance and complied with prevailing laws and regulations, agreements with third parties, as well as the Company's Work Program and Budget (WP&B) and/or the Company's Long Term Plan (RJPP). This demonstrates the Company's commitment to ensuring that its operations run in accordance with the principles of compliance and prevailing standards.

Optimalisasi pelaksanaan kepatuhan hukum oleh Divisi Corporate Secretary & Communication dan fungsi *Corporate Legal* menjadi hal yang penting dalam memastikan bahwa setiap tindakan dan dokumen Perseroan sesuai dengan kebijakan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup pemeriksaan yang teratur atas legalitas dan dokumen-dokumen penting, yang membantu mencegah adanya potensi masalah hukum yang dapat memengaruhi kelancaran operasional Perseroan.

Optimizing the legal compliance by the Corporate Secretary & Communication Division and Corporate Legal function is important in ensuring that every action and document of the Company is in accordance with internal policies and prevailing laws and regulations. This includes regular checks on legalities and important documents, which assists in preventing potential legal issues that could affect the Company's smooth operations.

Dewan Komisaris mendukung perbaikan yang dilakukan oleh Direksi dalam mengelola dan memperbaiki sistem pengendalian internal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, serta memastikan keberhasilan dalam mencapai tujuan Perseroan. Selain itu, pengendalian internal yang baik juga berkontribusi pada keandalan pelaporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

The Board of Commissioners supports the improvements made by the Board of Directors in managing and improving the internal control system. The objective is to increase effectiveness and efficiency in managing resources, as well as ensure success in achieving the Company's objectives. In addition, good internal control contributes to the reliability of financial reporting and compliance with laws and regulations.

Untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, Dewan Komisaris bersama dengan Komite Audit melakukan pemantauan secara berkala, agar setiap rekomendasi dari audit internal dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur dan target waktu yang ditetapkan. Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk segera menyelesaikan seluruh rekomendasi audit, baik yang bersumber dari audit internal maupun eksternal, terutama bagi temuan yang telah jatuh tempo dan membutuhkan penjadwalan ulang untuk penyelesaiannya. Hal ini menunjukkan komitmen Dewan Komisaris terhadap pentingnya tindak lanjut yang cepat dan tepat untuk memastikan tidak ada aspek yang terabaikan.

To uphold the effectiveness of the internal control system, the Board of Commissioners, in collaboration with the Audit Committee, conducts regular oversight. Any recommendations from the internal audit are addressed in accordance with established procedures and designated time targets. The Board of Commissioners encourages the Board of Directors to immediately complete all internal and external audit recommendations, especially for findings that are overdue and require rescheduling for completion. This reflects the Board of Commissioners' commitment to the timely and appropriate follow-up of issues, ensuring that no aspect is overlooked.

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris dengan dibantu Komite Audit melakukan telaah terhadap hasil evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian intern PT PII yang dilakukan Divisi Internal Audit pada 11 Oktober sampai dengan 13 Desember 2024, dengan ruang lingkup penilaian meliputi seluruh proses pengendalian tingkat entitas (*Entity Level Control*) yang terdapat di dalam lingkungan PT PII selama periode tahun 2024. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tingkat entitas (*Entity Level Control*) di PT PII pada umumnya telah dirancang dan diterapkan dengan kategori baik dengan capaian skor 89,87, sehingga Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa implementasi Sistem Pengendalian Intern dianggap memadai. Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja kepatuhan Direksi serta efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan di Perseroan. Dewan Komisaris akan terus mendorong Direksi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan kepatuhan dan pengendalian internal, dengan memastikan setiap rekomendasi dari audit internal dan eksternal ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Penguatan pengendalian internal yang terus-menerus akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas Perseroan serta mendukung pencapaian tujuan jangka panjang Perseroan.

In 2024, the Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee, reviewed the evaluation results of the effectiveness of IIGF's internal control system, conducted by the Internal Audit Division, from 11 October to 13 December 2024, with the scope of the assessment covering all Entity Level Control processes within IIGF for the 2024 period. The evaluation resulted in Entity Level Control at IIGF which generally was designed and implemented well, with a score of 89.87. Therefore, the Board of Commissioners and Board of Directors stated that the Internal Control System has been implemented adequately. The Board of Commissioners appreciates the compliance performance of the Board of Directors and the effectiveness of the internal control system implemented in the Company. The Board of Commissioners strives to encourage the Board of Directors to make continuous improvements in the compliance and internal control management, by ensuring that any recommendations from internal and external audits are followed up quickly and appropriately. Continuous strengthening of internal controls will enhance the Company's transparency and accountability while supporting the attainment of its long-term objectives.

PANDANGAN ATAS EFEKTIVITAS AUDIT EKSTERNAL

PERSPECTIVES ON EXTERNAL AUDIT EFFECTIVENESS

Pemantauan Dewan Komisaris terhadap audit eksternal merupakan salah satu fungsi penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan perusahaan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Sebagai bagian dari pengawasan tersebut, Dewan Komisaris terlibat aktif dalam proses pemilihan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit eksternal. Pemilihan tersebut dilakukan dengan dasar pada kriteria yang objektif, memastikan bahwa kantor akuntan publik yang dipilih memiliki kredibilitas, kompetensi, dan independensi yang diperlukan untuk melakukan audit secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme.

Dewan Komisaris juga terus memantau kinerja kantor akuntan publik dalam melaksanakan audit eksternal, termasuk melakukan peninjauan terhadap laporan audit yang dihasilkan. Dalam hal ini, Dewan Komisaris memastikan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan bahwa hasil audit memberikan gambaran yang jujur dan transparan mengenai kondisi keuangan dan operasional Perseroan.

Dewan Komisaris juga melakukan *monitoring* terhadap pemeriksaan eksternal dan tindak lanjut atas rekomendasinya untuk pemeriksaan selain audit KAP terhadap Laporan Keuangan, selama tahun 2024 terdapat beberapa pemeriksaan dan tindak lanjut rekomendasi atas pemeriksaan oleh auditor eksternal di antaranya Penilaian Penerapan *Good Corporate Governance* tahun 2023 oleh BPKP, Evaluasi atas Optimalisasi Pembiayaan Pemerintah oleh BPKP, Evaluasi Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri dan Identifikasi Risiko pada Program Substitusi Impor dalam Kerangka Pengawasan Program P3DN Tahun 2024 oleh BPKP, Pengawasan atas Pembangunan dan Tata Kelola Ibu Kota Nusantara (IKN) triwulan IV tahun 2024 lingkup PT PII selaku Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur oleh BPKP, pemantauan penyelesaian kerugian negara semester I tahun 2024 oleh BPK, Penilaian Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan KPBU di Lingkungan Kementerian Keuangan, Bappenas, dan instansi terkait lainnya oleh BPK, Penilaian Indeks Akuntabilitas BUMN atau ICORPAX (*Indonesia Corporate Accountability Index*) pada PT PII Tahun Buku 2023, Audit atas Penjaminan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada PT PII oleh Itjen Kementerian Keuangan.

The Board of Commissioners' monitoring of the external audit is one of the important functions in maintaining the Company's transparency, accountability, and compliance with prevailing standards and regulations. As part of this supervision, the Board of Commissioners is actively involved in the selection process of the public accounting firm that will conduct the external audit. The selection process is based on objective criteria, ensuring that the chosen public accounting firm possesses the required credibility, competence, and independence to perform the audit efficiently and in alignment with professional standards.

The Board of Commissioners strives to monitor the performance of the public accounting firm in carrying out the external audit, including reviewing the resulting audit report. In this regard, the Board of Commissioners ensures that the audit is conducted in accordance with prevailing auditing standards, and that the audit resulted in an honest and transparent picture of the Company's financial and operational conditions.

The Board of Commissioners also monitors external audits and follow-ups on their recommendations for audits in addition to the KAP audits of the Financial Statements. In 2024, there were several audits and follow-ups on recommendations for audits by external auditors including the Assessment of Good Corporate Governance in 2023 by BPKP, Evaluation of Optimization of Government Financing by BPKP, Evaluation of Compliance with Domestic Product Expenditure and Risk Identification in the Import Substitution Program for the Supervision of the P3DN Program in 2024 by BPKP, Supervision of the Development and Governance of the Nusantara Capital City (IKN) in Q4 2024 within IIGF's scope as an Infrastructure Guarantee Agency by BPKP, monitoring of the settlement of state losses in H1 2024 by BPK, Performance Assessment of the Effectiveness of PPP Management within the Ministry of Finance, Bappenas, and other related agencies by BPK, Assessment of the SOE Accountability Index or ICORPAX (Indonesia Corporate Accountability Index) at IIGF for the 2023 Fiscal Year, Audit of the Guarantee for the Drinking Water Supply System Project (SPAM) on IIGF by the Inspectorate General of the Ministry of Finance.

Sebagian besar rekomendasi auditor eksternal telah berhasil ditindaklanjuti pada tahun 2024. Dewan Komisaris terus memastikan bahwa Direksi telah melakukan upaya terbaik dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil rekomendasi yang diberikan oleh auditor eksternal. Pemantauan terhadap tindak lanjut ini menjadi bagian dari pengawasan Dewan Komisaris untuk menjaga agar perusahaan selalu beroperasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Most of the external auditors' recommendations have been successfully followed up in 2024. The Board of Commissioners shall ensure that the Board of Directors performs its best efforts to settle the recommendations of the external auditor. Follow-up monitoring is part of the Board of Commissioners' supervision to ensure that the Company operates with high principles of transparency and accountability.

PANDANGAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

PERSPECTIVES ON THE RISK MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS

Sebagai bagian dari tanggung jawab Dewan Komisaris dalam mengawasi efektivitas manajemen risiko di PT PII, termasuk penerapan manajemen risiko yang baik dan efektif sangat krusial untuk memastikan kelangsungan bisnis Perseroan di tengah lingkungan yang penuh ketidakpastian.

In line with the Board of Commissioners' responsibility to oversee the effectiveness of risk management at PT PII, the implementation of sound and effective risk management practices is crucial to ensure the Company's business continuity amid an environment of uncertainty.

Untuk memastikan bahwa Perseroan dapat mengelola risiko dengan efektif, Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi secara berkala atas efektivitas penerapan manajemen risiko. Evaluasi ini mencakup pemantauan dan penilaian berkala terhadap risiko yang ada, serta memberikan nasihat dan arahan perbaikan yang diperlukan. Dewan Komisaris menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan manajemen risiko, serta mendorong agar manajemen risiko diterapkan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

The Board of Commissioners, through the Risk Monitoring Committee, regularly evaluates the risk management effectiveness to ensure that the Company can manage risks effectively. This evaluation includes periodic monitoring and assessment of existing risks, as well as providing advice and direction on necessary improvements. The Board of Commissioners emphasizes the importance of applying the precautionary principle in risk management and advocates for its proper implementation in alignment with the Company's needs.

Tata kelola manajemen risiko yang diterapkan di Perseroan mengadopsi model 3 garis (*three lines model*), yang menggambarkan hubungan kerja sama dan komunikasi antara berbagai elemen di dalam Perseroan, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, Audit Internal, fungsi Manajemen Risiko, serta para Pemilik Risiko (*Risk Owner*) dan *Risk Officer* yang berada di setiap divisi. Perseroan juga menggunakan pendekatan Manajemen Risiko Korporat (*Enterprise Risk Management*/ERM) sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan manajemen risiko secara efektif dan efisien.

The Company implemented risk management governance that adopted a three lines model, illustrating the cooperation and communication relationships of all elements in the Company including the Board of Commissioners, the Board of Directors, Internal Audit, Risk Management function and the Risk Owners, as well as and Risk Officers in each division. The Company utilizes the Enterprise Risk Management (ERM) approach as a reference to perform risk management activities effectively and efficiently.

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko. Komitmen ini tercermin dalam pengembangan kapabilitas sumber daya, teknologi, dan metodologi yang telah disesuaikan dengan praktik terbaik (*best practices*) di bidang manajemen risiko. Direksi juga telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di

The Board of Commissioners considers that the Board of Directors has demonstrated a strong commitment to improving the quality of risk management. This commitment is reflected in the development of resource capabilities, technology, and methodologies, that have been adjusted to best practices in risk management. The Board of Directors has implemented the Anti-Bribery Management System (SMAP) in the scope

ruang lingkup Pengadaan Barang & Jasa (*Procurement*) untuk mencegah terjadinya risiko kecurangan (*fraud*). Penerapan sistem ini turut memperkuat pengelolaan risiko perusahaan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas.

of Procurement of Goods and Services to prevent fraud risk. The system is implemented to strengthen the company's risk management in maintaining integrity and accountability.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa Direksi telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas penerapan praktik manajemen risiko secara berkesinambungan, terutama pada area-area yang mencakup kapabilitas sumber daya, teknologi, dan metodologi yang dikembangkan sesuai praktik terbaik (*best practice*). Direksi juga telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada ruang lingkup Pengadaan Barang & Jasa (*Procurement*) dalam rangka mencegah terjadinya risiko kecurangan (*fraud*). Penerapan manajemen risiko yang efektif sangat penting, mengingat tantangan dan tuntutan dunia usaha, termasuk harapan para pemangku kepentingan terus meningkat di tengah situasi ekonomi dan bisnis yang tidak pasti.

The Board of Commissioners considers the Board of Directors to have demonstrated a strong commitment to continuously improving the quality of risk management practices, especially in areas that cover resource capabilities, technology and methodologies developed, in accordance with best practice. The Board of Directors has implemented the Anti-Bribery Management System (SMAP) in the Procurement scope of work to prevent fraud risk. Effective risk management is very important, considering the challenges and demands of the business world, including the expectations of stakeholders, that continue to increase amidst uncertain economic and business situations.

Terkait pengelolaan risiko proyek, Dewan Komisaris telah memberikan arahan dan masukan kepada Direksi dalam upaya menguatkan mitigasi risiko, khususnya dalam proses penjaminan *small scale project* Alat Penerangan Jalan (APJ), penanganan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang sudah mengajukan klaim penjaminan, mekanisme regres kepada pemerintah daerah, analisis kemampuan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam memenuhi komitmen *Availability Payment*, penanganan klaim dan regres untuk penjaminan proyek dan juga potensi klaim penjaminan.

In terms of project risk management, the Board of Commissioners has provided direction and input to the Board of Directors to strengthen risk mitigation, particularly in the process of guaranteeing small scale projects for street lighting equipment (APJ), handling SPAM projects that have validly submitted guarantee claims, recourse mechanisms to local governments, analysis of Government Contracting Agency (GCA) ability to fulfil Availability Payment commitments, claim handling, and recourse for project guarantee, as well as potential guarantee claim.

Dewan Komisaris juga memberikan arahan kepada Direksi untuk memastikan bahwa pedoman pengelolaan risiko pasar (*mark to market*) dapat diterapkan dengan baik, terutama dalam menghadapi risiko volatilitas nilai tukar rupiah serta dampaknya pada pergerakan *yield* obligasi maupun Tingkat suku bunga deposito. Pengelolaan risiko pasar ini sangat penting dalam kegiatan pengelolaan dana, mengingat volatilitas pasar yang tidak dapat diprediksi. Selain itu, Dewan Komisaris juga meminta Direksi untuk memberikan masukan yang konstruktif dan berbasis data yang akurat dalam penyusunan profil risiko jaminan Proyek KPBU kepada Kementerian Keuangan. Ini penting sehubungan dengan *piloting* Profil Risiko APBN, Kontinjensi, dan Neraca Konsolidasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Input ini harus mempertimbangkan posisi PT PII sebagai *ring fencing* APBN dan potensi kebutuhan PMN untuk memperkuat kapasitas penjaminan Perseroan di masa mendatang.

The Board of Commissioners also directed the Board of Directors to ensure that market risk management guidelines (mark to market) can be implemented properly, especially in dealing with the risk of rupiah exchange rate volatility and its impact on the movement of bond yields and deposit interest rates. This market risk management is crucial in fund management, given the unpredictability of market volatility. In addition, the Board of Commissioners also requested the Board of Directors to provide constructive input and accurate data in the preparation of risk profiles for PPP project guarantees submitted to the Ministry of Finance. This is particularly important in relation to the piloting of the State Budget, Contingency, and Consolidated Balance Sheet Risk Profiles carried out by the Directorate General of Financing and Risk Management of the Ministry of Finance. The input provided considers the Company's position as State Budget's ring fencing and the potential PMN need to strengthen the Company's guarantee capacity in the future.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

PERSPECTIVE ON THE INFORMATION TECHNOLOGY (IT) SYSTEM

Dalam rangka mengimplementasikan "Digitalisasi", PT PII senantiasa menerapkan pengelolaan TI yang berkesinambungan dengan dukungan struktur dan infrastruktur TI yang selalu dikembangkan. Adapun inisiatif dan program strategis yang telah diimplementasikan pada tahun 2024 yaitu Digitalisasi Proses di sistem ERP (*Procurement & Finance*), GRC *Application*, *Claim Management System, Security Operation Center* dan *Data Lake Implementation*. Pada tahun 2024, PT PII juga telah menyelesaikan penyusunan ITMP periode 2023-2027.

IIGF implements sustainable IT management with the support of an IT structure and infrastructure that is always being developed to implement "Digitalization." In 2024, strategic initiatives and programs have been implemented, i.e., Process Digitalization in the ERP system (Procurement & Finance), GRC Application, Claim Management System, Security Operation Center, and Data Lake Implementation. In 2024, IIGF has set forth its 2023-2027 ITMP.

Dewan Komisaris senantiasa mendukung implementasi kebijakan dan kapabilitas keamanan TI untuk memastikan perlindungan aset informasi serta mendukung keberlangsungan operasional bisnis serta mengembangkan strategi *Disaster Recovery* yang modern dan efisien dengan memanfaatkan teknologi *serverless/cloud* berbasis *multi-zone architecture.*

The Board of Commissioners supports the IT security policies and capabilities to ensure the protection of information assets and support the continuity of business operations and develop a modern and efficient Disaster Recovery strategy by utilizing serverless/cloud technology based on multi-zone architecture.

Dewan Komisaris juga memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan kebijakan dan kapabilitas keamanan TI. Dengan memfokuskan pada perlindungan aset informasi dan keberlanjutan operasional, PT PII juga mengembangkan strategi *Disaster Recovery* yang lebih modern dan efisien dengan menggunakan teknologi *serverless/cloud* berbasis *multi-zone architecture*. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan ketahanan terhadap gangguan dan memastikan bahwa operasional bisnis tetap berjalan lancar meskipun terjadi bencana atau kegagalan sistem.

The Board of Commissioners also provides full support to the development of IT security policies and capabilities. By focusing on the protection of information assets and operational sustainability, IIGF has developed a more modern and efficient Disaster Recovery strategy using serverless/cloud technology based on multi-zone architecture. This allows the Company to increase resilience to disruptions and ensure that business operations continue to run smoothly despite disasters or system failures.

Dewan Komisaris senantiasa mendorong Direksi dalam hal pengembangan sistem TI untuk mendukung proses bisnis Perseroan, mengintegrasikan masing-masing fungsi di Perseroan, dan meningkatkan aksesibilitas serta keamanan data.

The Board of Commissioners encourages the Board of Directors to develop the IT system to support the Company's business processes, integrate each function in the Company, and improve data accessibility and security.

PANDANGAN ATAS KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KARIR

PERSPECTIVE ON CAREER DEVELOPMENT POLICY AND IMPLEMENTATION

Dewan Komisaris memandang bahwa sumber daya manusia (SDM) adalah aset yang sangat penting dan menjadi salah satu faktor utama untuk mendukung keberlanjutan Perseroan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris memberikan arah strategis kepada Direksi untuk mengelola SDM dengan cara yang efektif, optimal, dan berkesinambungan, guna meningkatkan kinerja organisasi serta mengelola talenta internal Perseroan.

The Board of Commissioners views human resources (HR) as a vital asset and a key factor in ensuring the Company's long-term sustainability. Therefore, the Board of Commissioners provides strategic direction to the Board of Directors to manage HR in an effective, optimal and sustainable manner, to improve organizational performance and manage the Company's internal talent.

Dewan Komisaris terus mendukung pengembangan SDM oleh Perseroan dapat meningkatkan pertumbuhan Perseroan, mengembangkan inovasi dan kreatifitas, serta menjadikan Perseroan sebagai yang terdepan melalui penerapan manajemen karir, sistem dan prosedur promosi, mutasi, dan demosi, serta pelaksanaan program pelatihan, pembinaan, *mentoring*, pemberian *reward* dan *punishment*, dan program pengembangan lainnya.

The Board of Commissioners supports the Company's HR development to enhance the Company's growth, develop innovation and creativity, and establish the Company as a leader by implementing career management, promotion, transfer, and demotion systems and procedures, as well as conducting training, coaching, mentoring, reward and punishment programs, and other development programs.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

PERSPECTIVE ON THE ACCOUNTING POLICIES AND FINANCIAL STATEMENTS PREPARATION

Dewan Komisaris secara berkala melakukan reviu dan pembahasan terkait penerapan kebijakan akuntansi di PT PII, serta menyampaikannya kepada Direksi dalam rapat gabungan yang diadakan setiap bulan. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan tetap sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan regulasi yang berlaku, serta untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang transparan dan akurat.

The Board of Commissioners regularly reviews and discusses the accounting policies in IIGF, and submits it to the Board of Directors in the monthly joint meeting. This process is conducted to ensure that the Company's accounting policies comply with generally accepted accounting principles and prevailing regulations while maintaining the quality of transparent and accurate financial statements.

Berdasarkan hasil pembahasan dengan Direksi, Dewan Komisaris berpendapat bahwa kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan masih sejalan dengan kebijakan akuntansi yang berlaku umum dan regulasi yang ada. Hal ini mencerminkan komitmen PT PII dalam menjaga integritas laporan keuangan dan memastikan bahwa semua praktik akuntansi dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Based on the results of the discussion with the Board of Directors, the Board of Commissioners considers the changes in accounting policies applied by the Company are still in line with generally accepted accounting policies and existing regulations. This reflects IIGF's commitment to maintaining the integrity of the financial statements and ensuring that all accounting practices are implemented with high transparency and accountability.

Dewan Komisaris juga menilai bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah akurat, lengkap, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Ini mencakup penyajian yang jelas mengenai posisi keuangan, hasil operasional, serta perubahan dalam ekuitas dan arus kas Perseroan, yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang informed berdasarkan informasi yang tersedia.

The Board of Commissioners has the opinion that the information presented in the financial statements is accurate, complete, and easily understood by stakeholders. This includes a clear presentation of the Company's financial position, results of operations, and changes in equity and cash flows, enabling stakeholders to make informed decisions based on the available information.

Dewan Komisaris mengapresiasi penerapan kebijakan akuntansi yang telah dilakukan oleh Perseroan dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan konsisten dengan standar yang berlaku. Dewan Komisaris akan terus melakukan pemantauan terhadap kebijakan akuntansi dan laporan keuangan yang disusun oleh Direksi, serta memastikan bahwa kebijakan akuntansi yang diterapkan dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

The Board of Commissioners appreciates the accounting policies that have been implemented by the Company and ensures that the policies applied are consistent with prevailing standards. The Board of Commissioners shall monitor the accounting policies and financial statements prepared by the Board of Directors, and ensure that the accounting policies applied can support transparency, accountability, and compliance with prevailing regulations.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN KEBIJAKAN PENGADAAN

PERSPECTIVES ON THE PROCUREMENT POLICY

Dewan Komisaris melakukan reviu dan pembahasan terkait penerapan kebijakan pengadaan barang dan jasa di PT PII, serta menyampaikannya kepada Direksi dalam rapat yang diadakan dengan perseroan serta melalui surat Dewan Komisaris kepada Direksi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan pengadaan yang diterapkan oleh Perseroan senantiasa sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* serta memenuhi kebijakan eksternal (pemerintah) antara lain mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Selain itu, dengan melakukan proses ini maka Dewan Komisaris meminta agar pelaksanaan pengadaan dilakukan sesuai jadwal, tepat waktu, efisien, dan efektif namun tetap akuntabel.

The Board of Commissioners reviews and discusses the procurement policies at IIGF, and submits it to the Board of Directors in meetings held with the company, as well as through letters from the Board of Commissioners to the Board of Directors. The review is conducted to ensure that the procurement policies implemented by the Company are always in accordance with Good Corporate Governance principles and fulfil external (government) policies, among others regarding the Domestic Component Level (DCL). Furthermore, through this process, the Board of Commissioners requests that procurement be carried out as scheduled, in a timely, efficient, and effective manner, while maintaining accountability.

Berdasarkan hasil pembahasan dengan Direksi, Dewan Komisaris berpendapat bahwa kebijakan pengadaan yang diterapkan oleh Perseroan masih sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* serta regulasi yang ada. Hal ini mencerminkan komitmen PT PII dalam pelaksanaan pengadaan sesuai dengan kebijakan pengadaan yang governance dan berintegritas serta memastikan bahwa semua praktik pengadaan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Based on the results of discussion with the Board of Directors, the Board of Commissioners considers the procurement policy implemented by the Company is still in line with Good Corporate Governance principles and existing regulations. This reflects IIGF's commitment to implementing procurement in line with the existing policy with governance and integrity, and ensuring that all procurement practices are implemented with high transparency and accountability.

Dewan Komisaris mengapresiasi pelaksanaan kebijakan pengadaan yang telah dilakukan oleh Perseroan dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan konsisten dengan standar yang berlaku serta prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, efisien, dan efektif. Dewan Komisaris akan terus melakukan pemantauan terhadap kebijakan pengadaan yang disusun oleh Direksi, serta memastikan bahwa kebijakan pengadaan yang diterapkan dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

The Board of Commissioners appreciates the procurement policies that have been implemented by the Company and ensures that the policies implemented are consistent with prevailing standards and the Good Corporate Governance principles, efficient, and effective. The Board of Commissioners shall monitor the procurement policy prepared by the Board of Directors, and ensure that the procurement policies applied can support transparency, accountability, and compliance with prevailing regulations.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN KEBIJAKAN MUTU ATAU KEPUASAN PELAYANAN

PERSPECTIVE ON THE QUALITY POLICY OR SERVICE SATISFACTION

Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan kebijakan mutu atau kepuasan layanan PT PII sangat penting dalam memastikan bahwa Perseroan memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan layanan yang berkualitas kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*).

The Board of Commissioners considers IIGF's quality or service satisfaction policy is very important in ensuring that the Company fulfills the predetermined standards and provides quality services to stakeholders who received guarantees.

Dewan Komisaris senantiasa memantau kinerja Perseroan dalam menerapkan kebijakan mutu atau kepuasan layanan yang meliputi evaluasi terhadap pengukuran kinerja serta tingkat kepuasan pemangku kepentingan. Disamping itu juga, Dewan Komisaris telah mengarahkan agar Direksi memastikan kepatuhan Perseroan untuk memenuhi standar mutu yang relevan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Perseroan akan dapat meningkatkan kinerja operasionalnya, memperkuat reputasi Perseroan sebagai Perusahaan Penjamin, dan memastikan kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkelanjutan.

The Board of Commissioners monitors the Company's performance in implementing the quality or service satisfaction policy, which includes evaluation of performance measurement and the satisfaction of stakeholders. In addition, the Board of Commissioners has instructed the Board of Directors to ensure the Company's compliance with relevant quality standards in accordance with prevailing laws and regulations. Thus, the Company shall be able to improve its operational performance, strengthen the Company's reputation as a Guarantor Company, and ensure the continued satisfaction of stakeholders as guarantee recipients.

Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk terus melakukan evaluasi dan pengembangan dalam hal pelayanan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dengan melakukan peningkatan berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan, PT PII dapat memastikan bahwa para pemangku kepentingan merasa puas dengan layanan yang diterima, yang pada gilirannya akan memperkuat reputasi perusahaan sebagai lembaga yang dapat dipercaya dalam menyediakan jaminan dan membangun hubungan jangka panjang dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

The Board of Commissioners recommends that the Board of Directors to evaluate and develop its services to stakeholders. By making continuous improvements to service quality, IIGF ensures that all stakeholders are satisfied with the services received, which in turn will strengthen the company's reputation as a trustworthy institution in providing guarantees and building long-term relationships with stakeholders.

PANDANGAN ATAS PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (TJSL)

PERSPECTIVE ON SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) MANAGEMENT

Dewan Komisaris berpandangan bahwa kegiatan TJSL merupakan bentuk kepedulian dan dukungan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Perseroan berkeyakinan bahwa melalui pelaksanaan Program TJSL, Perseroan akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, berperan dalam pelestarian lingkungan hidup, dan meningkatkan reputasi Perseroan. Penerapan berbagai program TJSL merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan lingkungan di sekitar proyek infrastruktur yang didukung oleh PT PII serta bagian dari mitigasi dampak sosial atas pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Oleh karena itu optimalisasi penyerapan anggaran TJSL serta ketepatan penggunaannya merupakan hal yang krusial.

The Board of Commissioners considers CSR activities as a form of care and support to stakeholders and the public. As a State-Owned Enterprise, the Company believes that implementation of the CSR Program shall provide many benefits to the community, play a role in preserving the environment, and improve the Company's reputation. The various CSR programs are implemented as a long-term investment to improve the quality of Human Resources around projects infrastructure supported by IIGF, as well as part of the mitigation of social impacts on infrastructure development in the area. Therefore, the optimization and the accuracy of CSR budget absorption and usage are very crucial.

Pada tahun 2024, PT. PII telah melaksanakan 37 program TJSL yang mencakup sektor Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat, Lingkungan, Kesehatan, serta Sosial, Budaya, dan Keagamaan, dengan total realisasi anggaran TJSL sebesar Rp4,8 Miliar. Angka ini menunjukkan komitmen yang terus meningkat dari tahun sebelumnya, dimana realisasi anggaran TJSL tahun 2023 tercatat sebesar Rp4,4 Miliar. Program-program ini mencerminkan upaya berkelanjutan Perseroan dalam memberikan dampak positif kepada masyarakat, dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 menunjukkan komitmen yang konsisten dari Direksi untuk terus meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan lingkungan.

In 2024, IIGF implemented 37 CSR programs covering Education, Community Empowerment, Environment, Health, and Social, Cultural and Religion sectors, with total CSR expenses amounted to Rp4.8 billion. This figure shows an increasing commitment from the previous year, in which the expenses for the CSR budget in 2023 were Rp4.4 billion. These programs reflect the Company's continuous efforts to have a positive impact on the community. The budget allocated in 2024 reflects the consistent commitment of the Board of Directors to increase contributions to social and environmental development.

Dewan Komisaris senantiasa mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Direksi dalam melakukan perbaikan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan. Peraturan terkait TJSL di Perseroan perlu terus diperbaharui dengan melakukan *benchmark* terhadap praktik terbaik (*best practice*) pengelolaan TJSL yang baik. Kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa terkait pelaksanaan TJSL juga perlu menjadi perhatian bagi Direksi agar ketepatan waktu pelaksanaan program TJSL tetap terjaga tanpa mengabaikan aspek tata kelola. Dewan Komisaris akan terus mendukung penuh kegiatan-kegiatan TJSL Perseroan yang rencananya akan difokuskan pada program-program yang dapat mendukung percepatan perkembangan pembangunan masyarakat di Indonesia dalam sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan. Program tersebut sebagai bentuk dukungan kepada fokus Pemerintah untuk membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas

The Board of Commissioners supports the efforts made by the Board of Directors in improving the planning, implementation, and accountability aspects of activities. Regulations related to CSR in the Company shall be continuously updated by benchmarking best practices in CSR management. The procurement policy for goods and/or services related to the CSR implementation shall be taken into account by the Board of Directors. Therefore, the timeliness of the CSR programs can be maintained with due regards to the governance aspects. The Board of Commissioners shall continue to fully support the Company's CSR activities, which are focused on programs to support the accelerated development of community development in Indonesia in the Community Empowerment and Education sectors. These programs are a form of support for the Government's focus on enhancing the quality of Human Resources in a sustainable manner. Thus, it shall encourage poverty alleviation and the next generation of Indonesian

secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong pengentasan kemiskinan dan diharapkan generasi muda Indonesia mendatang dapat memiliki daya saing dan profesionalisme yang dapat diperhitungkan.

Dewan Komisaris mengapresiasi komitmen PT PII dalam implementasi TJSL guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan sehingga PT PII berhasil meraih sejumlah penghargaan penting di tingkat nasional dan global selama tahun 2024. Pada tingkat global, PT PII memperoleh penghargaan Gold untuk Kategori in *Accordance* pada Asia *Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT). Adapun di tingkat nasional, PT PII meraih penghargaan *Platinum Winner* untuk Kategori Pilar Lingkungan dan *Strong Commitment CEO on Environment Program of* CSR pada TJSL & CSR *Award* 2024 dari BUMN *Track*; *Gold Winner* untuk Kategori Inovasi Sosial pada *Environment and Social Innovation Award* (ENSIA) dari PT Sucofindo; *Best Winner* untuk kategori *Infrastructure Supporting Financing* pada Ajang Indonesia *Best CSR Award* 2024 dari The Economics; *Bronze Winner* untuk Kategori *Community Programme & Platinum Winner* untuk Kategori Best CEO pada Global CSR Award & Summit 2024 dari Pinnacle Group International serta Donatur Program CSR Terbaik pada BAZNAS *Award* 2024 dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS); dan Program *Online* dengan Dampak Terbesar 2024 pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional dari Putera Sampoerna Foundation.

youth will have competitiveness and professionalism that can be taken into account.

The Board of Commissioners appreciates IIGF's commitment to implementing CSR to support the achievement of sustainable development. As a result, IIGF won numerous key awards at the national and global levels in 2024. Internationally, IIGF received a Gold award for the in Accordance Category in the Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT). At the national level, IIGF won the Platinum Winner award for the Environmental Pillar Category and Strong Commitment CEO on Environment Program of CSR at the TJSL & CSR Award 2024 from BUMN Track; Gold Winner for the Social Innovation Category at the Environment and Social Innovation Award (ENSIA) from PT Sucofindo; Best Winner for Infrastructure Supporting Financing category at Indonesia Best CSR Award 2024 from The Economics; Bronze Winner for Community Program Category & Platinum Winner for Best CEO Category at Global CSR Award & Summit 2024 from Pinnacle Group International, as well as Best CSR Program Donor at BAZNAS Award 2024 from National Amil Zakat Agency (BAZNAS); and Online-based Program with the Biggest Impact in 2024 Award on National Education Day Memorial from Putera Sampoerna Foundation.

PERAN AKTIF DEWAN KOMISARIS DALAM MEMANTAU PENERAPAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

ACTIVE ROLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN MONITORING THE WHISTLEBLOWING SYSTEM IMPLEMENTATION

Dewan Komisaris menyadari bahwa penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*/WBS) adalah salah satu upaya penting untuk menjaga integritas dan transparansi dalam setiap aspek operasional Perseroan. WBS berfungsi untuk memberikan saluran yang aman bagi para pemangku kepentingan untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi, baik oleh karyawan, pihak terkait, maupun pihak lain yang berhubungan dengan Perseroan. Sistem ini juga berperan dalam melindungi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*), serta memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti dengan adil dan tepat. Oleh karenanya Dewan Komisaris sangat mendukung diimplementasikannya mekanisme

The Board of Commissioners understands that the whistleblowing system (WBS) is one of the important efforts to maintain integrity and transparency in every aspect of the Company's operations. The WBS serves to provide a safe channel for stakeholders to report violations that occur, be it by employees, related parties, or other parties related to the Company. This system serves to safeguard stakeholders' rights while ensuring that any violations are promptly addressed in a fair and appropriate manner. Therefore, the Board of Commissioners strongly supports the Whistleblowing System (WBS) mechanism. Reports received from this mechanism shall be attended and followed-up, including the imposition of appropriate penalties to provide

Whistleblowing System (WBS). Pelaporan yang diperoleh dari mekanisme ini wajib mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.

a deterrent effect for perpetrators of violations and also for those who intend to do so.

Seluruh pengaduan yang masuk melalui saluran pelaporan pelanggaran telah diverifikasi oleh Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3) dan diketahui tidak terdapat pengaduan yang memenuhi kriteria pelaporan pelanggaran untuk ditindaklanjuti ke proses investigasi. Secara umum Dewan Komisaris melihat bahwa pengelolaan WBS di Perseroan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. PT PII telah menyusun dan menyempurnakan kebijakan WBS sebagai dasar pedoman dalam menangani pelaporan pelanggaran. Dewan Komisaris senantiasa mendorong efektivitas implementasi WBS dengan melakukan sosialisasi secara berkala kepada Insan Perseroan dan para pemangku kepentingan dalam rangka memberikan pemahaman tentang WBS yang dikelola secara independen. Dewan Komisaris juga berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan WBS dan memastikan bahwa sistem ini berjalan secara efektif dan independen. Dengan adanya sistem pelaporan pelanggaran yang transparan dan dapat diandalkan, PT PII diharapkan dapat terus menjaga integritasnya, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan membangun budaya perusahaan yang berlandaskan pada etika dan akuntabilitas.

All complaints received through the whistleblowing reporting channel have been verified by the Whistleblowing Management Team (TP3). There were no complaints that meet the criteria for reporting violations to be followed up to the investigation process. Generally, the Board of Commissioners considers that the WBS management in the Company has run as expected. IIGF has developed and refined the WBS policy as a basic guideline to handle whistleblowing. The Board of Commissioners encourages the effective WBS implementation by conducting socialization to the Company's personnel and stakeholders to provide an understanding of the WBS, which is managed independently. The Board of Commissioners is committed to monitoring the WBS implementation and ensuring that this system runs effectively and independently. With a transparent and reliable whistleblowing system, IIGF shall maintain its integrity, increase stakeholder trust, and establish a corporate culture based on ethics and accountability.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA DAN STRATEGI PERSEROAN
PERSPECTIVE ON THE COMPANY'S BUSINESS PROSPECT AND STRATEGY

Sejalan dengan fokus utama agenda Pemerintah pada tahun 2025 yang menitikberatkan pada stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas SDM, perbaikan ketahanan pangan dan pemerataan pembangunan, maka pembangunan infrastruktur difokuskan dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 yaitu menjadi negara maju, menetapkan upaya transformatif super prioritas terutama pada Transformasi Sosial dan Transformasi Ekonomi memiliki arah kebijakan yang menjadi bidang prioritas pembangunan antara lain percepatan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi), energi dan ketenagalistrikan, pangan, penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan, perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), infrastruktur pariwisata, serta akses teknologi informasi dan transformasi digital.

In line with the main focus of the Government's agenda in 2025, i.e., economic stability, economic growth, quality improvement of human resources, food security and equitable development improvement, the infrastructure development is focused on supporting the acceleration of inclusive and sustainable economic transformation. The development transformation towards Golden Indonesia 2045, which is to become a developed country, sets the super-priority on the transformative efforts, especially in Social and Economic Transformation, which have policy directions with prioritized areas of development, including accelerating economic driver infrastructure (connectivity and transportation), energy and electricity, food, gradual and sustainable completion of IKN development, housing for low-income community (MBR), tourism infrastructure, and access to information technology and digital transformation.

Dewan Komisaris melihat prospek usaha PT PII sangat cerah, seiring dengan komitmen pemerintah dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur sejalan dengan RPJMN 2025-2029 di mana agenda pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama, serta pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan menjadi kunci utama untuk mencapai visi Insonesia Emas yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045.

Dewan Komisaris mendukung upaya PT PII untuk memperkuat perannya sebagai instrumen pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta mendukung pemerintah dalam mencapai tujuannya untuk transformasi sosial dan ekonomi diantaranya dengan perluasan sektor penjaminan, termasuk penjaminan terhadap sektor-sektor yang mendukung transisi energi, ketahanan pangan, serta digitalisasi dan teknologi informasi, guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Selain itu, PT PII terus melakukan inovasi dengan mendorong implementasi skema pembiayaan kreatif yang dapat menarik investasi lebih besar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, guna mendanai proyek-proyek infrastruktur strategis yang mendukung prioritas pemerintah serta meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional untuk memperkuat ekosistem pembangunan infrastruktur. Sebagai bagian dari upaya mendukung ekonomi hijau, Dewan Komisaris juga mendukung upaya PT PII yang akan memperkuat integrasi prinsip-prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam setiap proyek yang dijamin, untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif.

The Board of Commissioners sees a very promising outlook for PT PII, in line with the government's commitment to continuing infrastructure development as outlined in the 2025-2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), where infrastructure development is one of the main focuses. Furthermore, equitable and sustainable infrastructure development is key to achieving the vision of a Golden Indonesia as stated in the 2025-2045 National Long-Term Development Plan (RPJPN).

The Board of Commissioners supports IIGF's efforts to strengthen its role as a government instrument in driving sustainable infrastructure development, as well as supporting the government in achieving its objectives for social and economic transformation, including by expanding the guarantee sector, which includes supports in energy transition, food security, as well as digitalization and information technology sectors, for the acceleration of sustainable infrastructure development.

In addition, IIGF keeps innovating by developing and implementing creative financing schemes that can attract greater investment, both domestic and foreign, to fund strategic infrastructure projects that support government priorities and increase collaboration with the government, private sector, and international institutions, to strengthen the infrastructure development ecosystem. As part of the effort to support the green economy, the Board of Commissioners supports IIGF's efforts to strengthen the integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles in every guaranteed project, to ensure that infrastructure development is not only oriented towards economic benefits, but also provides positive social and environmental impacts.

PANDANGAN ATAS REALISASI DAN TATA KELOLA PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA PMN

PERSPECTIVE ON THE REALIZATION AND GOVERNANCE OF THE USAGE OF ADDITIONAL PMN FUND

PT PII sebagai salah satu BUMN memiliki peranan yang sangat penting sebagai *agent of development* dalam mendukung pembangunan ekonomi, terutama di sektor infrastruktur. Sampai dengan tahun 2024, Pemerintah telah memberikan Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp10,7 triliun yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu Rp9,1 triliun untuk penjaminan infrastruktur dan Rp1,6 triliun untuk penjaminan dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dewan Komisaris terus mendorong Perseroan untuk mengelola dana PMN yang telah diberikan oleh Pemegang Saham secara *prudent* (berhati-hati) dan mengoptimalkan penggunaan dana tersebut. Selain itu, Dewan Komisaris juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan (*sustainability*) dana PMN melalui mitigasi risiko yang efektif dan pengelolaan klaim yang optimal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang diterima tidak hanya digunakan secara tepat, tetapi juga dapat berkembang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yakni untuk memperkuat sektor infrastruktur dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menjalankan pengelolaan dana PMN dengan prinsip kehati-hatian yang sangat baik. Pengelolaan ini menunjukkan keseriusan Direksi dalam memanfaatkan dana secara bijaksana, dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang ada dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan kebijakan serta tujuan Perseroan. Hal ini mencerminkan kinerja yang baik dari Direksi dalam menjaga kesehatan keuangan Perseroan dan memastikan bahwa dana PMN digunakan dengan benar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung pembangunan infrastruktur. Dengan pencapaian yang baik ini serta dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab, akan memberikan keyakinan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai pengelolaan dana yang telah dilakukan oleh Perseroan. Hal ini juga akan memperkuat kepercayaan publik dan Pemegang Saham dalam keberlanjutan dan keberhasilan program-program pembangunan yang dijalankan oleh Perseroan.

IIGF, as one of the SOEs, has a very important role as an agent of development to support economic development, especially in the infrastructure sector. As of 2024, the Government has provided State Equity Participation (PMN) of Rp10.7 trillion, which is divided into 2 designations, i.e., Rp9.1 trillion for infrastructure guarantees, and Rp1.6 trillion for guarantees in the National Economic Recovery (PEN) Program.

The Board of Commissioners encourages the Company to manage the PMN funds provided by the Shareholders in a prudent manner and optimize the use of these funds. In addition, the Board of Commissioners emphasized the importance of maintaining the sustainability of the PMN funds via effective risk mitigation and optimal claims management. The objective is to ensure that the funds received are utilized appropriately, and grow in accordance with the stated objectives, i.e., to strengthen the infrastructure sector and support economic recovery.

The Board of Commissioners considers that the Board of Directors has managed the PMN funds with excellent prudence. This management shows the Board of Directors' commitment to utilizing the funds wisely, by considering the risks involved and ensuring that the funds are used in accordance with the Company's policies and objectives. This demonstrates the Board of Directors' strong performance in preserving the Company's financial stability and ensuring the effective utilization of PMN funds to drive economic growth and advance infrastructure development. This good achievement, with transparent and responsible financial management, shall provide confidence to all stakeholders regarding the Company's fund management. This will also strengthen public and shareholders' confidence in the sustainability and success of the development programs undertaken by the Company.

PENILAIAN ATAS KINERJA ORGAN DEWAN KOMISARIS

ASSESSMENT OF THE SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris didukung oleh keberadaan tiga organ Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, termasuk dukungan kesekretariatan oleh fungsi Sekretaris Dewan Komisaris. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Adapun tugas serta tanggung jawab setiap Komite diatur dalam Piagam Komite (*Committee Charter*).

In carrying out its supervisory and advisory functions, the Board of Commissioners is supported by three organs of the Board of Commissioners, i.e., the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and secretarial support by the Secretary of the Board of Commissioners. The Committee Member is appointed and dismissed and reports directly to the Board of Commissioners. The duties and responsibilities of each Committee are set out in the Committee Charter.

Komite Audit bertugas membantu memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite Pemantau Risiko merupakan organ pendukung yang bertugas membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dalam menilai dan memberi masukan terhadap kebijakan dan strategi terkait pengelolaan risiko Perseroan. Adapun Sekretaris Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu tugas dan kegiatan operasional Dewan Komisaris.

The Audit Committee has the responsibility to ensure the effectiveness of the duties and supervisory functions of the Board of Commissioners on matters related to financial statements, internal control systems, internal and external audit functions, and compliance with prevailing laws and regulations. The Risk Monitoring Committee is a supporting organ responsible for assisting the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities, particularly in assessing and providing input on the policies and strategies related to the Company's risk management. The Secretary of the Board of Commissioners was established to assist the duties and operations of the Board of Commissioners.

Secara umum, Dewan Komisaris menilai bahwa masing-masing organ telah memberikan dukungan yang diperlukan melalui kinerja yang baik selama tahun 2024. Penilaian terhadap masing-masing organ dilakukan berdasarkan sejumlah parameter, antara lain pelaksanaan rapat kerja serta penyampaian rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang terkait dengan masing-masing bidang penugasan.

In general, the Board of Commissioners assessed that each organ has provided the necessary support by performing well in 2024. The assessment of each organ was conducted based on several parameters, including the working meetings and the submission of recommendations to the Board of Commissioners related to each area of assignment.

Masing-masing organ pendukung Dewan Komisaris, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko, telah bekerja dengan baik dalam menjalankan program kerja tahunan yang telah disusun dan disetujui. Program kerja tersebut direviu secara berkala dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk evaluasi dan tindak lanjut. Sekretariat membantu Dewan Komisaris dalam penyelesaian seluruh administrasi. Realisasi program kerja Komite Audit sepanjang tahun 2024 telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara triwulanan yang disertai rekomendasi dengan pokok-pokok realisasi program kerja tahunan, meliputi diantaranya: 1) Evaluasi pelaksanaan RKAP 2024; 2) Penyusunan

Each of the supporting organs of the Board of Commissioners, i.e., the Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee, and the Risk Monitoring Committee, has worked well in carrying out the annual work program that has been prepared and approved. The work program is reviewed periodically and the results are submitted to the Board of Commissioners for evaluation and follow-up. The Secretariat assisted the Board of Commissioners in completing all administration. The realization of the Audit Committee's work program in 2024 has been reported to the Board of Commissioners quarterly, accompanied by recommendations with the main points of realization of the annual work program, including: 1) Evaluation of the 2024 WP&B implementation;

Laporan Pengawasan tahun 2024; 3) Evaluasi Audit Laporan Keuangan & IKU Tahun 2023 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota jaringan global PwC); 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap permintaan rekomendasi dan persetujuan tertulis Dewan Komisaris atas tindakan korporasi yang dilakukan Direksi; 5) Rapat anggota Komite Audit pembahasan Evaluasi Tindak Lanjut rekomendasi divisi Internal Audit; 6) Rekomendasi terkait penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024; dan 7) Tanggapan atas RKAP 2025; dll. Sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali.

2) Preparation of the 2024 Supervisory Report; 3) Evaluation of the audit of Financial Statements & KPI for 2024 by Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (member of PwC global network); 4) Recommendation provisions to the Board of Commissioners on requests for recommendations and written approval of the Board of Commissioners for corporate actions taken by the Board of Directors; 5) Audit Committee's meetings to discuss the Follow-up of the recommendations of the Internal Audit; 6) Recommendations related to the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) that will audit the Company's Financial Statements for the 2024 Fiscal Year; and 7) Response to the 2025 WP&B; etc. In 2024, the Audit Committee held twenty-three (23) meetings.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan Komite Pemantau Risiko diantaranya: 1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Perseroan; 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas unit kerja Perseroan yang membidangi manajemen risiko; 3). Melakukan reviu dan evaluasi atas laporan pelaksanaan manajemen risiko Perseroan; 4) Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Perseroan; 5) Melakukan evaluasi atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan manajemen risiko; 6) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap permintaan rekomendasi dan persetujuan tertulis Dewan Komisaris atas tindakan korporasi yang dilakukan Direksi; dan 7) Tanggapan atas RKAP 2025; dll. Selama tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 21 (dua puluh satu) kali rapat.

The Risk Monitoring Committee has carried out various activities: 1) Evaluating the conformity between risk management policies and the Company's risk management policies; 2). Monitoring and evaluating the duties of the Company's working unit in charge of risk management; 3). Reviewing and evaluating the Company's risk management report; 4) Monitoring the adequacy of the process of identification, measurement, monitoring, control, and risk management information systems conducted by the Company; 5) Evaluating the Company's compliance with prevailing laws and regulations related to risk management; 6) Providing recommendations to the Board of Commissioners on requests for recommendations and written approval of the Board of Commissioners for corporate actions taken by the Board of Directors; and 7) Providing feedback on the 2025 WP&B; etc. In 2024, the Risk Monitoring Committee held twenty-one (21) meetings.

Dengan dukungan penuh dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Sekretaris Dewan Komisaris, Dewan Komisaris berhasil mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 103,29% pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan keberhasilan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasihat yang efektif dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan. Hasil IKU ini telah dilaporkan kepada RUPS melalui surat No. S-08/PII/DK/0225 tanggal 28 Februari 2025.

With the full support of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Secretary of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners successfully achieved the Key Performance Indicators (KPI) of 103.29% in 2024. This shows the Board of Commissioners' success in carrying out its supervisory duties and providing effective advice to improve the Company's performance. The KPI result has been reported to the GMS via letter No. S-08/PII/DK/0225 dated 28 February 2025.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS
CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS' COMPOSITION

Pada tahun 2024 terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris PT PII. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 297 tahun tanggal 1 Juli 2024 mengangkat Hadiyanto dan memberhentikan Rina Widiyani Wahyuningdyah sebagai Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2023. Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 339 dan Nomor 342 tanggal 27 Agustus 2024, Pemegang Saham mengangkat Ferry Irawan dan Ahmad Ghufron sebagai Anggota Komisaris PT PII. Penunjukan ini dilakukan untuk menggantikan Mariatul Aini dan Iqbal Islami. Perubahan ini merupakan bagian dari restrukturisasi Dewan Komisaris, yang bertujuan untuk memperkuat kinerja dan pengawasan dalam Perseroan.

In 2024, there was a change in the composition of IIGF's Board of Commissioners. Based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 297 dated 1 July 2024, appointed Hadiyanto and dismissed Rina Widiyani Wahyuningdyah as President Commissioner of Perusahaan Perseroan (Persero) Penjaminan Infrastruktur Indonesia, who was appointed based on the Decree of the Minister of Finance No. 216 of 2023. Further, based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 339 and No. 342 dated 27 August 2024, the Shareholders appointed Ferry Irawan and Ahmad Ghufron as Members of the IIGF's Board of Commissioners. This appointment was made to replace Mariatul Aini, and Iqbal Islami. This change is part of the Board of Commissioners' restructuring, which aims to strengthen performance and supervision within the Company.

Dengan demikian, sampai dengan 31 Desember 2024, susunan Dewan Komisaris setelah adanya perubahan-perubahan di atas adalah sebagai berikut:

Thus, as of 31 December 2024, the composition of the Board of Commissioners after the changes mentioned above is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Masa Jabatan Tenure
Hadiyanto	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 297 Tahun tanggal 1 Juli 2024 The Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 297 dated 1 July 2024	2024-2029
Ferry Irawan	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 339 tanggal 27 Agustus 2024 The Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 339 dated 27 August 2024	2024-2029
Ahmad Ghufron	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 342 tanggal 27 Agustus 2024 The Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 342 dated 27 August 2024	2024-2029

Kami atas nama Dewan Komisaris, menyampaikan terima kasih kepada Rina Widiyani Wahyuningdyah, Mariatul Aini dan Iqbal Islami, atas kontribusinya bagi PT PII dan menyampaikan selamat datang dan bergabungnya para anggota Dewan Komisaris baru. Kami percaya bahwa komposisi komisaris baru dapat mengakselerasi pemahaman terhadap proses bisnis PT PII sehingga dapat melaksanakan pengawasan secara optimal, solid dan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga kinerja PT PII dapat terus meningkat sesuai dengan visi misi dan rencana jangka pendek maupun jangka panjang Perseroan.

On behalf of the Board of Commissioners, we would like to thank Rina Widiyani Wahyuningdyah, Mariatul Aini, and Iqbal Islami, for their contributions to IIGF, and welcome the new members of the Board of Commissioners. We believe that the new composition of the Board of Commissioners shall accelerate understanding of IIGF's business processes so that they can carry out supervision optimally, solidly, and in accordance with good corporate governance. Therefore, IIGF's performance shall improve in accordance with the Company's vision and mission, and short and long-term plans.

PENUTUP
CLOSING

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan sepanjang tahun 2024. Kami sangat menghargai seluruh pencapaian yang membanggakan yang berhasil diraih oleh Perseroan, yang tidak terlepas dari peran serta semua pihak yang terlibat. Ucapan terima kasih kami juga sampaikan kepada Pemegang Saham atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan, kepada mitra usaha atas kerja sama yang saling menguntungkan, serta kepada semua pihak yang telah mendukung PT PII baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontribusi yang diberikan oleh seluruh pemangku kepentingan sangat berarti bagi keberhasilan kami.

Demikianlah laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun 2024 ini disampaikan, dengan harapan agar ke depan PT PII dapat terus berkembang dan meraih lebih banyak keberhasilan untuk kepentingan bersama.

The Board of Commissioners conveys our gratitude to all stakeholders for their trust and support in 2024. We deeply appreciate the Company's remarkable achievements, which would not have been possible without the contributions of all involved parties. We also expressed our gratitude to the Shareholders for their support and trust, to business partners for their mutually beneficial cooperation, and to all parties who continue to support IIGF, directly or indirectly. The contributions made by all stakeholders are very meaningful to our success.

Thus we convey the supervisory report of the Board of Commissioners in 2024. We hope that in the future, IIGF shall grow and achieve more success for the common good.

Jakarta, April 2025
Jakarta, April 2025

Atas nama Dewan Komisaris
On Behalf of the Board of Commissioners

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Hadiyanto
Komisaris Utama
President Commissioner

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' REPORT

M. Wahid Sutopo
Direktur Utama
President Director

Kemajuan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh penjuru Indonesia menjadi *highlight* kontribusi PT PII bagi bangsa tercinta. Pembangunan infrastruktur yang masif ini telah menjadi pendorong utama dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional.

The infrastructure development that is evenly distributed throughout Indonesia highlights IIGF's contribution to our beloved nation. This massive infrastructure development has become the main driver in strengthening the foundation of the national economy.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Yang Terhormat

Perkenankan kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, PT PII mampu melalui tantangan di tahun 2024 dengan mencatat kinerja yang baik. Tahun 2024 merupakan tahun yang penting sekaligus membanggakan bagi PT PII, sebagaimana yang terlihat dari seluruh kemajuan mandat penjaminan, kemajuan pemprosesan proyek baik KPBU maupun non KPBU, serta pelaksanaan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi. Di samping itu, PT PII juga berhasil menutup akhir tahun dengan capaian kinerja keuangan yang tumbuh berkelanjutan, menunjukkan bahwa Perseroan tidak hanya sukses dalam melaksanakan tugas dan mandatnya, tetapi juga dalam menjaga kestabilan dan pertumbuhan keuangan melalui solusi kreatif. Hal ini menjadi indikator penting dari efektivitas manajemen dan strategi Perseroan. Berbagai prestasi dan penghargaan serta pencapaian penting lainnya berhasil PT PII raih, dengan senantiasa mengedepankan implementasi manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik serta *continuous improvement*.

Bersama ini kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban Direksi atas pengelolaan Perseroan untuk tahun buku 2024 beserta laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota jaringan global PwC) dengan memperoleh opini wajar tanpa modifikasi dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

To All Distinguished Shareholders and Stakeholders

Please allow us to give praise and gratitude to the God Almighty for His grace, as IIGF was able to face all the challenges in 2024 by recording good performance. 2024 was an important and proud year for IIGF, as seen by the progress of the guarantee mandate, the progress of PPP and non-PPP projects, as well as the project development facility implementation. In addition, IIGF managed to close the end of the year with the achievement of sustainable financial performance, showing that the Company is not only successful in carrying out its duties and mandates, but also in maintaining financial stability and growth using creative solutions. This is a key indicator of the effectiveness of the Company's management and strategy. IIGF has achieved various achievements and awards, and other important achievements, by always prioritizing risk management, good corporate governance, and continuous improvement.

We hereby submit the accountability report of the Board of Directors for the management of the Company in 2024 fiscal year, along with the financial statements that have been audited by the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PricewaterhouseCoopers), with unqualified opinion, the Company's financial position as of 31 December 2024, as well as its financial and cash flows performance for the year then ended on 31 December 2024, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

TINJAUAN MAKROEKONOMI 2024

2024 MACROECONOMIC OVERVIEW

Sepanjang tahun 2024, dunia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam serta dalam situasi global yang tidak pasti. Analis Kebijakan Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan membagi tantangan global menjadi 3 (tiga) hal, yaitu konflik geopolitik, perubahan kepemimpinan politik di banyak negara, serta proyeksi ekonomi global dan negara-negara besar di dunia yang masih lemah. Dampak dari perang Ukraina-Rusia masih terasa. Konflik geopolitik di Timur Tengah dan di Laut Cina Selatan juga belum usai, bahkan cenderung memanas. Di tahun 2024 beberapa negara mengadakan pemilihan umum yang menghasilkan kepemimpinan baru, baik di negara maju maupun berkembang. Perubahan kepemimpinan ini tentu akan memengaruhi arah kebijakan yang diambil oleh masing-masing negara. Di Indonesia, pemilihan umum juga berlangsung dan menghasilkan pergantian Presiden, yang diharapkan dapat membawa arah kebijakan baru untuk kemajuan bangsa.

In 2024, the world faced complex and diverse challenges in an uncertain global environment. An Associate Policy Analyst of the Fiscal Policy Agency (BKF) of the Ministry of Finance divided the global challenges into three (3) categories, i.e., geopolitical conflicts, changes in political leadership in many countries, and projections of the global economy and major countries that are still weak. The effects of the conflict between Russia and Ukraine are still being felt. Geopolitical tensions in the Middle East and the South China Sea remain unresolved and have shown signs of escalation. In 2024, many countries held general elections that would result in new leadership, both in developed and developing countries. The change in leadership will certainly affect the policy direction of each country. In Indonesia, general elections also took place and resulted in a change of President, who is expected to bring new policy directions for the nation's development.

Tantangan lain yang masih membayangi situasi global adalah kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2024, aktivitas ekonomi global cenderung lemah dengan kinerja yang bervariasi antar kawasan. Kinerja ekonomi negara-negara maju masih cukup resilien, meskipun masih lebih rendah dibanding periode sebelum pandemi. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 sebesar 2,4%, dari 2,6% pada tahun 2023. Meskipun perekonomian global terbukti tangguh dalam menghadapi risiko resesi pada tahun 2023, meningkatnya ketegangan geopolitik akan menghadirkan tantangan baru dalam jangka pendek, sehingga sebagian besar perekonomian akan tumbuh lebih lambat pada tahun 2024 dan 2025 dibandingkan dekade sebelumnya. Sementara itu, IMF memproyeksikan pertumbuhan global tahun 2024 sebesar 3,2%. Pada kuartal III tahun 2024, ekonomi Amerika Serikat tumbuh 2,7% yoy. Di Eropa, laju ekonomi masih stagnan dan tumbuh di kisaran 0,9% pada kuartal III tahun 2024. Ekonomi Cina yang selama beberapa tahun terakhir dapat tumbuh di atas 10%, kini mengalami perlambatan laju ekonomi dan tumbuh di bawah 5%. Berbagai dinamika situasi global ini sedikit banyak memberi dampak terhadap perekonomian Indonesia. Sementara itu, ekonomi di kawasan ASEAN masih resilien meskipun permintaan global turun.

Another challenge that still looms over is the condition of the global economy which has not fully recovered from the impact of the COVID-19 pandemic. In 2024, global economic activity tended to be weak with varying performance between regions. The economic performance of developed countries is still quite resilient, although it was lower than in the pre-pandemic era. The World Bank projected global economic growth in 2024 at 2.4%, from 2.6% in 2023. Although the global economy proved resilient in the face of recession risks in 2023, rising geopolitical tensions presented new challenges in the short term. Thus, most economies grew slower in 2024 and 2025 than in the previous decade. Meanwhile, the IMF projected global growth in 2024 at 3.2%. In Q3 2024, the US economy grew 2.7% yoy. In Europe, the economic pace was still stagnant and grew at around 0.9% in Q3 2024. China's economy, which has been able to grow above 10% in recent years, was now experiencing a slowdown in economic growth and was growing below 5%. These various global dynamics have had a noticeable impact on the Indonesian economy. Meanwhile, economies in the ASEAN region were still resilient despite falling global demand.

Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2024 adalah 5,02% (*year on year/yoy*) atau 5,03% (*cumulative to cumulative*/ctc), lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 4,95% (*yoy*). Pertumbuhan ini didukung oleh aktivitas ekonomi domestik yang baik, yang dikontribusi dari industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, informasi dan komunikasi.

In terms of domestic, Indonesia's economic growth was relatively stable. According to data from Statistics Indonesia (BPS), Indonesia's economic growth in Q4 2024 was 5.02% (year on year/yoy) or 5.03% (cumulative to cumulative/ctc), better than the growth in the previous quarter of 4.95% (yoy). This growth was supported by good domestic economic activities, which were contributed by the manufacturing industry, construction, trade, information and communication.

Tingkat inflasi yang terkendali posisi bulan Desember 2024 tetap terkendali dalam rentang target sasaran nasional 2,5%±1%. Inflasi Desember 2024 tercatat sebesar 1,57% (*yoy*), lebih rendah dibandingkan inflasi Desember 2023 (2,61%). *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur Indonesia pada Desember 2024 berhasil *rebound* dan kembali mencatatkan level ekspansif di angka 51,2, setelah sebelumnya sempat berada di level kontraktif. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan pesanan baru, baik domestik maupun ekspor, serta peningkatan aktivitas pembelian bahan baku oleh perusahaan. Inflasi yang terkendali dan PMI yang ekspansif menunjukkan dunia usaha tetap optimis dengan kondisi perekonomian nasional ke depan. Bank Dunia dalam W*orld Bank East Asia and The Pacific Economic Update* yang dirilis 8 Oktober 2024 memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5% pada 2024 dan 5,1% pada 2025. Hal ini menunjukkan keyakinan Bank Dunia terhadap kekuatan ekonomi Indonesia di tengah tantangan yang dihadapi negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Di antara negara-negara yang lebih besar, hanya Indonesia yang diperkirakan tumbuh di tahun 2024 dan 2025 pada atau di atas tingkat sebelum pandemi. Sementara pertumbuhan Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam diperkirakan berada di bawah tingkat tersebut.

The inflation rate in December 2024 remained under control within the national target range of 2.5%±1%. Inflation in December 2024 was recorded at 1.57% (yoy), lower than inflation in December 2023 (2.61%). Indonesia's Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) in December 2024 managed to rebound and recorded an expansionary level of 51.2, after previously being at a contractionary level. This increase was encouraged by an increase in new domestic and export trade, as well as an increase in raw material purchasing activities by companies. Controlled inflation and an expansionary PMI show that the business world remains optimistic about the condition of the national economy going forward. The World Bank in its World Bank East Asia and The Pacific Economic Update issued on 8 October 2024, projected Indonesia's economy to grow by 5% in 2024 and 5.1% in 2025. This shows the World Bank's confidence in Indonesia's economic strength amidst the challenges faced by countries in East Asia and the Pacific region. Among the larger countries, Indonesia is the only one expected to grow in 2024 and 2025 at or above pre-pandemic levels. Malaysia, the Philippines, Thailand, and Vietnam are expected to grow below these levels.

Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar mengalami depresiasi sepanjang tahun 2024, dari Rp15.873/US$ di April menjadi Rp16.458/US$ pada Juni. Bank Indonesia telah merespons kondisi tersebut dengan menaikkan suku bunga dari 6% menjadi 6,25% untuk stabilisasi Rupiah. Di tengah situasi yang berdampak menekan ekonomi tersebut, pemerintah menggunakan APBN untuk tetap menjaga total permintaan barang dan jasa selama tahun 2024, antara lain melalui penyaluran program perlindungan sosial, pembayaran gaji ke-13 ASN, pemberian insentif perumahan, dan akselerasi pembangunan IKN. Adapun tingkat suku bunga Bank Indonesia mempertahankan BI *rate* di level 6% pada Rapat Dewan Gubernur pertama di tahun 2025.

The Rupiah exchange rates against the dollar depreciated throughout 2024, from Rp15,873/US$ in April to Rp16,458/US$ in June. Bank Indonesia responded by raising interest rates from 6% to 6.25% to stabilize the Rupiah. Amidst this depressing situation, the government used the state budget to maintain the total demand for goods and services in 2024, among others, through the distribution of social protection programs, payment of the 13th salary of State Civil Apparatus, provision of housing incentives, and acceleration of the development of IKN. Meanwhile, Bank Indonesia maintained the BI rate at 6% at the first Board of Governors' Meeting in 2025.

ANALISIS ATAS KINERJA PERSEROAN 2024
2024 COMPANY'S PERFORMANCE ANALYSIS

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN
COMPANY'S STRATEGY AND POLICY

Sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) dan layanan satu pelaksana (*single window*), PT PII berperan aktif mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia melalui skema pembiayaan kreatif untuk menciptakan landasan bagi Indonesia menuju negara maju. Sejalan dengan tema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dimana fokus salah satu strateginya melalui akselerasi pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas serta teknologi informasi dan komunikasi maka Perseroan diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam mendorong partisipasi badan usaha dalam pembangunan infrastruktur. Untuk itu pada tahun 2024, melalui analisis berbagai tantangan dan peluang, Perseroan melakukan perumusan strategi dan kebijakan strategis dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 dengan tema "Perluasan Pengusahaan Penjaminan termasuk pada Sektor Infrastruktur Sosial untuk Memperbesar Dampak Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan".

PT PII telah menetapkan 4 (empat) sasaran usaha Perseroan tahun 2024 sejalan dengan mandat yang diberikan oleh Pemerintah yaitu:

1. Penjaminan yang berkelanjutan;
2. Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi melalui kegiatan atau *Project Development Facility* (PDF) dan *Project Development Advisory* (PDA);
3. Peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan IIGF Institute dengan fokus pada stream edukasi, riset dan publikasi, advokasi serta *knowledge management*; dan
4. Pengelolaan risiko dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Guna mencapai sasaran usaha tersebut, PT PII melakukan inisiatif strategi tahun 2024 meliputi:

1. Strategi pengembangan bisnis,
2. Strategi pengelolaan risiko, dan
3. Strategi penguatan *enabler* yang terdiri dari arsitektur proses bisnis, teknologi informasi dan komunikasi serta SDM berbasis kompetensi.

As an SOE under the Ministry of Finance that carries out duties and functions as a Special Mission Vehicle (SMV) and single window service, IIGF has an active role in supporting the acceleration of sustainable infrastructure development in Indonesia via creative financing schemes to create a foundation for Indonesia towards a developed country. In line with the theme of the 2024 State Budget (APBN), i.e., "Accelerating Inclusive and Sustainable Economic Transformation," in which one of the strategies focuses on accelerating infrastructure development in the fields of energy, food, connectivity, and information and communication technology, the Company shall increase its role in encouraging the participation of business entities in infrastructure development. Therefore, in 2024, via analysis of various challenges and opportunities, the Company formulated strategic strategies and policies in the 2024 Corporate Work Program and Budget (WP&B) with the theme "Expansion of Guarantee Businesses including the Social Infrastructure Sector to Expand the Impact of Community Welfare through Sustainable Infrastructure Development."

IIGF has set four (4) business targets for the Company in 2024, in line with the mandate given by the Government:

1. Sustainable guarantee;
2. Project preparation and transaction assistance via Project Development Facility (PDF) and Project Development Advisory (PDA);
3. Capacity building and institutional strengthening of the IIGF Institute with a focus on education, research and publication, advocacy, and knowledge management; and
4. Risk management and good corporate governance.

To achieve these business targets, IIGF carried out strategic initiatives in 2024:

1. Business development strategy,
2. Risk management strategy, and
3. Enabler strengthening strategy consisting of business process architecture, information and communication technology, and competency-based human resources.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT PII melekat 2 (dua) peran, yaitu sebagai *fiscal tools* sekaligus juga sebagai korporasi sehingga memiliki karakteristik yang unik dan tidak dimiliki oleh Lembaga atau korporasi lainnya. Peran PT PII sebagai *fiscal tools* adalah untuk mendorong adanya skema pembiayaan kreatif sebagai upaya untuk mengatasi anggaran pemerintah yang terbatas dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Proses penjaminan menitikberatkan pada evaluasi kelayakan dan penetapan struktur penjaminan dilakukan berdasarkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, penilaian kehati-hatian dan pengalokasian risiko yang tepat. Sebagai korporasi, PT PII memiliki tujuan keberlanjutan (*sustainability*) guna mendukung kredibilitas sebagai satu satunya Badan Usaha Penjamin Infrastruktur dan peran *ring fencing* APBN yang dapat memberikan efek tunda atau meredam dampak seketika terhadap APBN.

In carrying out its business activities, IIGF has two (2) roles, i.e., as a fiscal tool, and as a corporation. Thus, IIGF has unique characteristics and is not owned by other institutions or corporations. IIGF's role as fiscal tool is to encourage Innovative financing to overcome the limited government budget in encouraging the acceleration of infrastructure development. The guarantee process focuses on evaluating the feasibility and determining the guarantee structure based on compliance with prevailing regulations, prudential assessment, and proper risk allocation. As a corporation, IIGF has sustainability goals to support its credibility as a guarantor and the role of ring fencing (a technique of separating assets, activities, or data, to protect against risks, violations, or losses).

PERAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

BOARD OF DIRECTORS' ROLE IN FORMULATING STRATEGIES AND STRATEGIC POLICY

Penyusunan strategi PT PII dilakukan dengan analisis tantangan dan peluang serta mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi *competitive advantage* Perseroan, yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) lima tahunan dan RKAP setiap tahun. Tugas dan peran utama Direksi dalam perumusan strategi di antaranya menganalisis situasi internal dan eksternal Perseroan untuk memahami lingkungan bisnis dan tantangan yang harus dihadapi, serta menentukan tujuan strategis yang menjadi dasar dalam perumusan strategi dan kebijakan Perseroan. Untuk selanjutnya, Direksi bersama Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi eksternal yang harus diatasi, agar strategi yang dijalankan mendapatkan hasil yang optimal. RJPP dan RKAP disusun oleh Direksi beserta jajaran manajemen di bawahnya, disetujui oleh Dewan Komisaris dan disahkan oleh pemegang saham. Pelaksanaan RJPP dan RKAP dievaluasi secara berkala oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk memastikan ketercapaiannya dari target yang ditetapkan.

IIGF's strategy is formulated by analyzing challenges and opportunities and considering factors that become the Company's competitive advantage, which is stated in the five-year Company Long-Term Plan (RJPP) and WP&B every year. The main duties and roles of the Board of Directors in formulating strategy include analyzing the Company's internal and external situation to understand the business environment and the challenges to be faced, as well as determining strategic objectives that form the basis for establishing the Company's strategy and policies. Further, the Board of Directors, in collaboration with the Board of Commissioners, considers the external conditions that must be faced, so that the strategies implemented obtain optimal results. RJPP and WP&B are prepared by the Board of Directors and its management, approved by the Board of Commissioners, and ratified by the shareholders. The RJPP and WP&B are periodically evaluated by the Board of Directors and the Board of Commissioners to ensure the achievement of the predetermined targets.

Direksi bersama Dewan Komisaris juga menetapkan parameter ukuran kinerja dari seluruh program-program yang disampaikan dalam RJPP maupun RKAP, serta memastikan segenap jajaran Perseroan mendukung penerapan strategi dengan seluruh kompetensi yang dimiliki. Untuk memastikan implementasi strategi dan kebijakan strategis terlaksana dengan baik, Direksi melakukan penjabaran yang diperlukan untuk memastikan implementasi strategi dan kebijakan strategis berada dalam jalur yang tepat untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha Perseroan.

The Board of Directors, in collaboration with the Board of Commissioners, also targets the performance measurement parameters of all programs in the RJPP and WP&B, and ensures that all Company's levels support the strategy implementation with all their competencies. To ensure the strategic implementation and policies are well executed, the Board of Directors conducts the necessary elaboration to ensure the strategic implementation and policies are on the right track to encourage the Company's business growth and sustainability.

PROSES YANG DILAKUKAN DIREKSI UNTUK MEMASTIKAN IMPLEMENTASI STRATEGI

BOARD OF DIRECTORS' PROCESS TO ENSURE STRATEGY IMPLEMENTATION

Pelaksanaan jalannya pengurusan Perseroan terlihat pada struktur organisasi PT PII yang terdiri dari 3 (tiga) Direktorat, yakni (1) Direktur Utama membawahi Deputi Direktur Bidang I, *Corporate Secretary & Communication, Legal & Compliance, Risk Management*; dan Internal Audit; (2) Direktur Keuangan membawahi *underwriting non*-PPP, *Project Monitoring & Claim Management, Corporate Strategy & Finance, Human Capital & Organization Development, Corporate Service & Procurement* serta *Information Technology;* (3) Direktur Bisnis membawahi *Underwriting* PPP, *Guidance & Consultation, Environmental & Social, Project Appraisal* dan IIGF *Institute*. Struktur organisasi dirancang sedemikian rupa untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan PT PII, baik sebagai *fiscal tools* maupun korporasi dapat tercapai.

The Company's management can be seen in IIGF's organizational structure, which consists of three (3) Directorates, i.e., (1) President Director, in charge of Deputy Director of Division I, Corporate Secretary & Communication, Legal & Compliance, Risk Management; and Internal Audit; (2) Finance Director, in charge of non-PPP underwriting, Project Monitoring & Claim Management, Corporate Strategy & Finance, Human Capital & Organization Development, Corporate Service & Procurement and Information Technology; (3) Operations Director, in charge of PPP Underwriting, Guidance & Consultation, Environmental & Social, Project Appraisal, and IIGF Institute. The organizational structure is designed in such a way as to ensure that IIGF's Vision, Mission and Objectives, both as fiscal tools and corporate legal entity, can be achieved.

Dalam merumuskan strategi dan kebijakan strategis Perseroan, Direksi melakukan pemantauan dan analisis terhadap berbagai indikator dalam pelaksanaan proses evaluasi dan *monitoring* penerapan strategi dan kebijakan. Direksi terlibat secara langsung dalam pengawasan implementasi strategi serta memastikan bahwa seluruh bagian organisasi memperoleh kesempatan yang sama dalam menyampaikan ide-ide dan inovasi yang dapat mendukung pencapaian tujuan Perseroan dan senantiasa berkonsultasi kepada Dewan Komisaris. Dalam proses penerapannya, Direksi dapat melakukan penyesuaian strategi maupun kebijakan sesuai dinamika bisnis yang terjadi dan kebutuhan Perseroan.

In formulating the Company's strategic strategies and policies, the Board of Directors monitors and analyses various indicators in the evaluation and monitoring process for the strategies and policies. The Board of Directors is directly involved in supervising strategy and ensuring that all parts of the organization have the same opportunity to convey ideas and innovations to support the achievement of the Company's objectives, and consult with the Board of Commissioners. In its implementation, the Board of Directors may make adjustments to the strategies and policies according to the business dynamics that occur and the Company's needs.

PERBANDINGAN HASIL KINERJA DENGAN CAPAIAN 2023 DAN TARGET 2024

COMPARISON OF PERFORMANCE RESULTS AND TARGET IN 2024

Pada tahun 2024, PT PII berhasil memenuhi target sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024. Hingga 31 Desember 2024, Perseroan mencatatkan kinerja keuangan yang solid, dengan Pendapatan mencapai Rp1.486,93 miliar, meningkat sebesar 12,82% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1.318,01 miliar. Peningkatan pendapatan ini terutama didukung oleh pengelolaan dana melalui penempatan deposito dengan tingkat pengembalian investasi rata-rata 6,8%, serta peningkatan pendapatan penjaminan akibat estimasi kontinjensi korporasi PEN yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun Laba Tahun Berjalan mencapai Rp930,88 miliar, meningkat sebesar 11,37% atau Rp95,06 miliar dibandingkan tahun 2023 Rp835,82 miliar. Kinerja positif ini turut berkontribusi pada kenaikan ekuitas Perseroan selama tahun 2024. Capaian ini berada 105% di atas target RKAP 2024 sebesar Rp884,40 miliar.

In 2024, IIGF successfully met the target in accordance with the Company's 2024 Work Program and Budget (WP&B). As of 31 December 2024, the Company recorded solid financial performance, with revenue amounted to Rp1,486.93 billion, increased by 12.82% compared to 2023 of Rp1,318.01 billion. The increase in revenue was mainly supported by fund management via deposit placement with an average investment return rate of 6.8%, as well as an increase in guarantee income due to higher PEN corporate contingency estimates compared to the previous year. Income for the year amounted to Rp930.88 billion, increased by 11.37% or Rp95.06 billion compared to Rp835.82 billion in 2023. This positive performance also contributed to the increase in the Company's equity in 2024. This achievement is 105% above the 2024 WP&B target of Rp884.40 billion.

Peningkatan kinerja keuangan Perseroan pada tahun 2024 tumbuh seiring dengan pertumbuhan bisnis penjaminan, pengendalian biaya yang efektif, dan tren kualitas aset yang lebih baik. Ditinjau dari posisi keuangan, realisasi total Aset tahun 2024 mencapai sebesar Rp16.988,52 miliar mengalami kenaikan sebesar 3,55% atau Rp582,47 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp16.406,04 miliar, yang disebabkan oleh kenaikan pada penempatan deposito berjangka dengan jangka waktu jatuh tempo 3 bulan atau kurang pada 31 Desember 2024, yang terutama berasal dari arus kas dari aktivitas investasi sehingga berdampak pada kecukupan likuiditas Perseroan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Capaian ini berada 99% di atas target RKAP 2024 sebesar Rp17.194,60 miliar. Sementara itu, total Liabilitas tahun 2024 mencapai sebesar Rp315,95 miliar, lebih rendah 28,72% atau Rp127,30 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp443,25 miliar. Penurunan ini dipengaruhi adanya realisasi atas estimasi kontinjensi penjaminan korporasi bersama di tahun 2024. Capaian ini berada 64.26% di bawah target RKAP 2024 sebesar Rp491,65 miliar. Adapun total Ekuitas tahun 2024 mencapai Rp16.672,57 miliar, mengalami peningkatan 4,45% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15.962,80 miliar. Capaian ini 99,82% di bawah target RKAP 2024 sebesar Rp16.702,95 miliar.

The improved financial performance in 2024 was in line with guaranteed business growth, controlled costs, and better asset quality trends. In terms of financial position, the total Assets in 2024 reached Rp16,988.52 billion, increased by 3.55% or Rp582.47 billion compared to 2023 of Rp16,406.04 billion, which was attributable to an increase in time deposit placements with maturities of three months or less as of December 31, 2024, primarily derived from cash flows generated by investing activities, thereby resulting in a stronger liquidity position for the Company compared to the previous year. This achievement is 99% above the 2024 WP&B target of Rp17,194.60 billion. Meanwhile, total liabilities in 2024 amounted to Rp315.95 billion, which was 28.72% or Rp127.30 billion lower than in 2023 of Rp443.25 billion. This decrease was influenced by the realization of the estimated contingency of joint corporate guarantees in 2024, and had an impact on the Company's ability to pay off obligations better than in 2023. This achievement is 64.26% below the 2024 WP&B target of Rp491.65 billion. In 2024, the total Equity reached Rp15,962.80 billion, increased by 4.45% compared to the total Equity in 2023 of Rp16,672.57 billion. This achievement is 99.82% below the 2024 WP&B target of 16,702.95 billion.

Highlight kinerja PT PII dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

a. Secara umum PT PII terus membukukan Laba dan membayarkan dividen kepada Negara.
b. Total Aset terus meningkat, yang tercermin dengan pertumbuhan dan perkembangan Perseroan dalam hal skala operasional, investasi, dan nilai aset.
c. Total Ekuitas terus meningkat, yang menunjukkan bahwa Perseroan berhasil menghasilkan nilai tambah bagi pemegang saham dan mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan dalam keuangan dan operasi, serta memberikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan masa depan.
d. Total Liabilitas terus meningkat, namun mengalami penurunan pada tahun 2024. Total Liabilitas masih dalam rasio *debt to equity* yang terukur dan dinilai aman.
e. Total Pendapatan sejak tahun 2022-2024 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan membaiknya tren pertumbuhan jangka panjang Perseroan, sehingga dapat memperluas portofolio bisnis, dan memperkuat posisinya sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
f. Total Pendapatan Penjaminan terus meningkat, yang menggambarkan pertumbuhan dan diversifikasi portofolio penjaminan Perseroan semakin luas dengan adanya peningkatan volume penjaminan, ekspansi ke sektor-sektor baru, dan peningkatan pangsa pasar PT PII dalam menyediakan solusi penjaminan yang inovatif dan komprehensif.
g. Total Pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi cenderung meningkat sejak tahun 2020. Hal ini membuktikan tingginya komitmen Perseroan dalam mendukung pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur dan proyek-proyek strategis lainnya di Indonesia serta menunjukkan kontribusi PT PII dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.
h. Total Pendapatan Pengelolaan Dana cenderung mengalami fluktuasi, namun sejak tahun 2021-2024 mengalami peningkatan dimana PT PII melakukan peningkatan efisiensi, diversifikasi investasi, dan pengelolaan risiko yang baik sehingga dapat mengoptimalkan kinerja.

Dari sisi kinerja operasional, sampai dengan 31 Desember 2024, PT PII telah melakukan penjaminan untuk 53 proyek dimana 45 proyek merupakan penjaminan proyek infrastruktur dengan skema KPBU dan non-KPBU, dan 8 penjaminan proyek BUMN Program PEN. Penjaminan infrastruktur diberikan kepada 7 sektor meliputi: (i) ketenagalistrikan, (ii) telekomunikasi, (iii) air minum, (iv)

IIGF's performance highlights within the last three (3) years are as follows:

a. Generally, IIGF continues recording profits and paying dividends to the State.
b. Total Assets keep growing, which is reflected by the Company's growth and development in terms of operations, investment, and asset value.
c. Total Equity keeps increasing, indicating that the Company is successfully generating added value for shareholders and experiencing sustainable growth in finance and operations, as well as providing a strong foundation for future growth.
d. Total liabilities continue to increase, but experience a decrease in 2024. Total liabilities are still within the measured debt to equity ratio and are considered safe.
e. Total Revenue tends to fluctuate. However, in 2022-2024, revenue generation increased. This reflects an improvement in the Company's long-term growth trend. Thus, the Company may attract new investors, expand its business portfolio, and strengthen its position as the Infrastructure Guarantee Agency.
f. Total Guarantee Income keeps increasing, which illustrates the growth and diversification of the Company's guarantee portfolio which is expanding with an increase in guarantee volume, expansion into new sectors, and increase in IIGF's market share in providing innovative and comprehensive guarantee solutions.
g. Total Project Development Facility Income tended to increase since 2020. This proves the Company's high commitment to supporting infrastructure and non-infrastructure development and other strategic projects in Indonesia, and reflects IIGF's contribution in encouraging economic growth and national development.
h. Total Fund Management Income tends to fluctuate, but in 2021-2024, it increased, which showed that IIGF has increased efficiency, investment diversification, and good risk management to optimize performance.

In terms of operational performance, as of 31 December 2024, IIGF signed guarantees for 53 projects, consisting of 45 projects of PPP and non-PPP infrastructure projects, and 8 guarantees for SOEs PEN Program projects. Infrastructure guarantees are given to 7 sectors, which covers: (i) electricity, (ii) telecommunications, (iii) drinking water, (iv) roads, (v) transport, (vi) tourism, and (vii) energy conservation, of

jalan, (v) transportasi, (vi) pariwisata dan (vii) konservasi energi dimana 37 proyek di antaranya telah efektif dijamin. Terdapat 4 tambahan proyek penjaminan baru yang terdiri dari 2 penjaminan proyek infrastruktur dan 2 penjaminan non infrastruktur. Adapun 4 tambahan penjaminan proyek baru di tahun 2024 yaitu Penjaminan Jalan Tol Kediri Tulungagung, Penjaminan Jalan Trans Papua, Penjaminan *Cost Overrun* Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, dan Proyek Indonesia *Sustainable Least-Cost Electrification* (ISLE-1) Program menjadi komitmen PII dalam pembangunan dan penyediaan infrastruktur bagi masyarakat yang berkualitas. Di tahun 2024, PT PII memberikan dukungan terhadap ekonomi hijau melalui pelaksanaan *framework Environment, Social and Governance* (ESG) dalam mendukung transisi energi dan urban facility dalam bentuk konservasi energi.

Dalam 14 tahun perjalanannya, Perseroan telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan memberikan penjaminan terhadap 53 proyek dari berbagai sektor, PT PII telah membantu mewujudkan proyek-proyek vital dengan nilai investasi yang sangat besar, mencapai Rp539 triliun. Hal ini menunjukkan komitmen Perseroan dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang dapat memberi dampak jangka panjang bagi negara.

Penjaminan yang diberikan oleh PT PII tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik infrastruktur, tetapi juga pada dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan untuk masyarakat, diantaranya pada sektor jalan, PT PII telah berhasil mendukung pembangunan 16 ruas jalan tol sepanjang 1.001 KM, yang tentunya meningkatkan kualitas konektivitas antar kota dan provinsi di Indonesia. Hal ini sangat krusial untuk mendukung mobilitas barang dan orang, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, preservasi 3 ruas jalan nasional sepanjang 123 KM juga menjadi kontribusi signifikan PT PII dalam menjaga kualitas infrastruktur yang ada. Pemeliharaan jalan nasional ini penting untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan mengurangi potensi kerusakan yang bisa menimbulkan biaya perbaikan yang lebih tinggi di masa depan.

Tidak kalah penting, PT PII juga telah berperan dalam penggantian 38 jembatan di 37 lokasi di Pulau Jawa, yang turut memperkuat konektivitas antar wilayah. Jembatan yang kokoh dan aman menjadi infrastruktur esensial dalam memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memfasilitasi akses masyarakat ke berbagai layanan dan

which 37 projects have been guaranteed effectively. There are 4 additional new project guarantees consisting of 2 infrastructure project guarantees and 2 non-infrastructure guarantees. The 4 additional new project guarantees in 2024, i.e., Kediri Tulungagung Toll Road Guarantee, Trans Papua Road Guarantee, Jakarta Bandung High Speed Rail Project Cost Overrun Guarantee, and Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification (ISLE-1) Project Program, are IIGF's commitment to developing n providing quality infrastructure for the community. In 2024, IIGF received a new mandate to provide non-infrastructure project guarantees by expanding the range of guarantees outside infrastructure, as well as support for the green economy by implementing the Environment, Social and Governance (ESG) framework in supporting energy transition and urban facilities in the form of energy conservation.

In its 14-year journey, the Company has played a very significant role in encouraging sustainable infrastructure development in Indonesia. By providing guarantees for 53 projects from various sectors, IIGF assisted in actualizing vital projects with a huge investment value, amounted to Rp539 trillion. This shows the Company's commitment to supporting infrastructure development that can have a long-term impact on the country.

IIGF provides guarantees that do not only focus on the physical development of infrastructure, but also on the social and economic impacts generated for the community. For example, in the road sector, IIGF successfully supported the construction of 1,001 kilometers spanning across 16 toll roads, which certainly improves the quality of connectivity between cities and provinces in Indonesia. This is very crucial to support the mobility of goods and people, which in turn encourages economic growth. In addition, the preservation of 123 KM spanning across 3 national roads is also considered IIGF's significant contribution to maintaining the quality of existing infrastructure. These national roads' maintenance is important to ensure the smooth flow of traffic and reduce potential damage that could lead to higher repair costs in the future.

Equally important, IIGF contributed to the replacement of 38 bridges across 37 locations on Java Island, enhancing regional connectivity. Strong and safe bridges are essential infrastructure in facilitating the distribution of goods and services, as well as facilitating community access to various services and facilities. IIGF's contribution in underwriting

fasilitas. Kontribusi PT PII dalam penjaminan proyek-proyek infrastruktur ini telah menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang positif, dan menciptakan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia.

these infrastructure projects has resulted in positive social and economic impacts, and created direct benefits for the Indonesian people.

Peran PT PII dalam sektor telekomunikasi juga sangat penting, terutama dalam mendukung pemerataan konektivitas data di kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T). Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui proyek Palapa Ring, yang bertujuan untuk meningkatkan akses internet dan konektivitas digital di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan internet konvensional. Melalui proyek Palapa Ring, PT PII telah berhasil mengembangkan infrastruktur telekomunikasi yang signifikan, dengan membangun 12.200 KM kabel fiber optik. Hal ini menjadi langkah besar untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang tersebar di seluruh nusantara dan memastikan bahwa konektivitas internet tidak lagi terkonsentrasi hanya di kota-kota besar, tetapi juga merata hingga ke daerah 3T.

IIGF's role in the telecommunications sector is also crucial, especially in supporting equitable data connectivity in the Outermost, Frontier, and Disadvantaged (3T) areas. One of the strategic steps conducted is the Palapa Ring project, with the objective to increase internet access and digital connectivity throughout Indonesia, especially in areas that were previously difficult to reach by conventional internet services. Through the Palapa Ring project, IIGF successfully developed significant telecommunications infrastructure, by building 12,200 KM of fiber optic cables across the island. This is a big step towards connecting scattered areas across the archipelago and ensuring that internet connectivity is no longer concentrated only in big cities, but also evenly distributed to 3T areas.

Selain itu, dukungan PT PII melalui Satelit Multifungsi Satria-1 dan 11 stasiun bumi memperkuat upaya pemerataan konektivitas dengan menyediakan akses internet yang cepat dan stabil. Satelit Satria-1, yang memiliki kapasitas 150 Gbps, mampu melayani sekitar 149.400 titik layanan offline di Indonesia, memberikan akses internet ke pelosok-pelosok Indonesia yang sebelumnya terbatas. Dengan keberadaan infrastruktur ini, PT PII tidak hanya mendorong pemerataan digital, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat di daerah 3T untuk mendapatkan manfaat dari teknologi informasi, yang sangat penting dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Hal ini menjadi langkah konkret dalam mempercepat transformasi digital Indonesia dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara.

In addition, IIGF's support through the Satria-1 Multi Functional Satellite and 11 ground stations, strengthens efforts to equalize connectivity by providing fast and stable internet access. Satria-1 satellite with a capacity of 150 Gbps is capable of serving around 149,400 offline service points in Indonesia, providing internet access to previously limited corners of Indonesia. With the existence of this infrastructure, IIGF not only encourages digital equity, but also opens up opportunities for people in 3T areas to benefit from information technology, which is essential in education, health, and the economy. This is a concrete step in accelerating Indonesia's digital transformation and realizing equitable development across the country.

Dalam sektor Air Minum, PT PII telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan melalui dukungannya terhadap enam proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Proyek-proyek ini dirancang untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan air minum bagi masyarakat, khususnya di daerah yang membutuhkan peningkatan infrastruktur air bersih. Melalui enam proyek SPAM dijamin oleh PT PII, total debit produksi air mencapai 15.770 liter per detik, melayani sekitar 1.432.500 rumah tangga, yang artinya banyak keluarga di berbagai wilayah akan mendapatkan akses air bersih secara mudah, aman dan terjamin kualitasnya. Dukungan terhadap proyek SPAM ini merupakan upaya konkret PT PII dalam mendukung

In the Drinking Water sector, IIGF made a very significant contribution by supporting six Drinking Water Supply System (SPAM) projects. These projects are designed to enhance the quality and availability of drinking water for the community, especially in areas that need clean water infrastructure improvement. In six SPAM projects funded with guarantees from IIGF, the total water production reaches 15,770 liters per second, which serves around 1,432,500 households. Therefore, many families in various regions now have access to clean water easily, safely, and with guaranteed quality. Support for the SPAM projects is IIGF's real action in supporting the fulfilment of the community's basic needs and ensuring a better quality of life. Access to clean and

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan memastikan kualitas hidup yang lebih baik. Akses terhadap air minum yang bersih dan aman merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan, yang mendukung kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

safe drinking water is one of the main pillars of sustainable development, which supports public health and improves overall well-being.

Kemudian pada sektor konservasi energi, PT PII telah memberikan penjaminan untuk peningkatan layanan penerangan jalan pada 20.374 titik dengan teknologi yang hemat energi dan ramah lingkungan melalui proyek penerangan jalan umum (PJU) di Lombok Barat dan Madiun melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Further, in energy conservation, IIGF served more than 20,374 points by improving street lighting services with energy-efficient and environmentally friendly technology through public street lighting (PJU) projects in West Lombo and Madiun through Public Private Partnership (PPP) scheme.

Pada sektor transportasi, PT PII juga mendukung pelayanan rute kereta api sepanjang 142 KM yang menghubungkan Makassar dan Parepare. Hal ini dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendukung mobilitas barang dan orang serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah di Sulawesi. PT PII juga turut mendukung pembangunan *Proving Ground* Bekasi, yang merupakan fasilitas uji tipe kendaraan bermotor. Fasilitas ini tidak hanya berfungsi untuk pengujian laik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap penurunan emisi kendaraan.

In the transportation sector, IIGF supports the service of a 142 KM railway route connecting Makassar and Parepare. The railway improves connectivity between regions, supports the mobility of goods and people, and accelerates economic growth in the Sulawesi region. IIGF also supported the construction of Bekasi Proving Ground, which is a motor vehicle type test facility. This facility not only serves to test vehicle performance, but also has a positive impact on reducing vehicle emissions.

Dalam sektor ketenagalistrikan, PT PII juga memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kapasitas energi dan distribusi listrik di Indonesia, melalui berbagai proyek yang dijamin, PT PII telah berkontribusi pada pengembangan kapasitas produksi energi listrik dengan total 2.428 MW. Kapasitas ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus berkembang di seluruh Indonesia, mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam upaya mendukung transisi energi yang lebih ramah lingkungan, PT PII juga telah memberikan dukungan sebesar 388 MW untuk meningkatkan rasio bauran energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan biomassa, yang dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain itu, PT PII juga mendukung rehabilitasi dan perluasan jaringan distribusi listrik tegangan menengah dengan total panjang jaringan mencapai 40.917 kilometer (KMS). Perbaikan dan ekspansi jaringan distribusi ini sangat penting untuk memastikan distribusi listrik yang merata dan efisien ke seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang sebelumnya belum terjangkau oleh jaringan listrik yang memadai.

In the electricity sector, IIGF plays a very important role in supporting the increase of energy capacity and electricity distribution in Indonesia, through various projects funded and guaranteed. IIGF has contributed to the development of electricity generation capacity totaling 2,428 MW. This capacity is critical to meeting the growing electricity demand across Indonesia, supporting economic growth, and improving people's quality of life. IIGF also provided 388 MW of support to increase the renewable energy mix ratio to support a more environmentally friendly energy transition. This is in line with the Government of Indonesia's commitment to enhancing the use of renewable energy, such as solar, wind, and biomass, which can reduce dependence on fossil energy and support environmental sustainability. In addition, IIGF supports the rehabilitation and expansion of medium voltage electricity distribution networks with a total network of 40,917 kilometers (KMS). The distribution network improvement and expansion is crucial to ensure equitable and efficient distribution of electricity to all regions, including areas that have not previously been reached by adequate electricity networks.

PT PII juga mendukung penyediaan sistem radar udara *Ground-Controlled Intercept* (GCI) Harwatt Meriam, yang merupakan bagian dari upaya penguatan sistem pertahanan Indonesia. Radar ini berfungsi untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian ruang udara Indonesia, meningkatkan kemampuan deteksi dini, dan menjaga kedaulatan negara.

IIGF plays a role in facilitating the provision of the Harwatt Meriam Ground-Controlled Intercept (GCI) air radar system as part of efforts to strengthen Indonesia's defense system. This radar serves to strengthen surveillance and control of Indonesia's airspace, improve early detection capabilities, and maintain state sovereignty.

Secara keseluruhan, dukungan PT PII tidak hanya berfokus pada sektor infrastruktur dan ketahanan pangan, tetapi juga pada sektor strategis lainnya yang mendukung keamanan negara. Dengan peranannya dalam proyek-proyek penting ini, PT PII turut berkontribusi pada pembangunan yang holistik, mencakup aspek ekonomi, energi, transportasi, dan pertahanan. Menuju dasawarsa kedua, PT PII berupaya untuk mendorong keberlanjutan program pemerintah menuju negara maju salah satunya melalui Infrastruktur untuk kehidupan yang layak.

Overall, IIGF's role extends beyond infrastructure and food security to other strategic sectors essential for national security. With its role in these important projects, IIGF contributes to holistic development, covering economic, energy, transportation, and defense aspects. Towards the second decade, IIGF strives to encourage the sustainability of the government's program towards a developed country, one of which is by decent Infrastructure.

KENDALA YANG DIHADAPI DAN LANGKAH PENYELESAIANNYA
OBSTACLES FACED AND STEPS TO RESOLVE THEM

Pada tahun 2024, Perseroan menghadapi sejumlah tantangan dari sisi pendapatan pengelolaan dana investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang menjadi dasar penentuan target tingkat pengembalian. Selanjutnya, kendala yang dihadapi adalah adanya perubahan atau pergantian pejabat Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) selama proses penjaminan berlangsung, pemenuhan standar kelayakan pada proses penilaian proyek potensial, dinamika pada proses persetujuan proyek di tingkat pemerintah daerah Provinsi atau Kabupaten, serta tantangan lainnya yang berpotensi membawa dampak tidak tercapainya tahapan proyek penjaminan yang diharapkan.

In 2024, the Company faced numerous challenges in terms of investment fund management income influenced by the interest rate level, which is the basis for determining the target rate of return. Further, other obstacles included the changes or replacement of the Government Contracting Agency (GCA) during the guarantee process, fulfillment of eligibility standards in the potential project assessment process, dynamics in the project approval process at the provincial or municipal level, and other challenges that have the potential to have an impact on the failure to achieve the expected guarantee project phases.

PT PII juga berkomitmen mendukung pembiayaan kreatif tidak hanya untuk proyek-proyek infrastruktur besar namun juga untuk proyek-proyek daerah berskala kecil, khususnya proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) yang memenuhi aspek ESG dengan energi hijau. Potensi dan peluang kerja sama dari pembiayaan hijau di Indonesia sangat besar, sehingga PT PII berkomitmen untuk terus meningkatkan pemahaman melalui berbagai program peningkatan kapasitas untuk menarik minat calon investor untuk berinvestasi dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

IIGF is also committed to supporting creative financing, not only for large infrastructure projects but also for small-scale local projects, especially Street Lighting (APJ) projects that meet ESG aspects with green energy. The potential and opportunities for cooperation from green financing in Indonesia are very high. Thus, IIGF is committed to enhancing understanding through various capacity building programs to attract potential investors to invest in accelerating infrastructure development in Indonesia.

PENGELOLAAN SDM SECARA BERKELANJUTAN
SUSTAINABLE HR MANAGEMENT

Dalam lanskap bisnis penjaminan yang sangat mengandalkan penilaian mendalam dan keahlian khusus, Sumber Daya Manusia (SDM) bukan sekadar aset, melainkan fondasi krusial bagi keunggulan kompetitif PT PII. SDM merupakan elemen strategis dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan bisnis PT PII. Karakteristik individu yang memiliki growth mindset, berpikir kreatif, adaptif dan Inovatif dalam menghadapi segala jenis perubahan menjadi elemen utama dalam peningkatan kinerja PT PII secara berkelanjutan serta mendukung pencapaian tujuan jangka panjang PT PII. Menyadari peran strategis ini, PT PII menempatkan fokus utama pada peningkatan kapabilitas organisasi melalui pengembangan SDM yang berkelanjutan. Strategi pengelolaan SDM dirancang secara cermat berdasarkan kompetensi inti yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja perusahaan secara menyeluruh.

In the guarantee business landscape that relies heavily on in-depth assessment and special expertise, Human Resources (HR) are not just assets, but also a key foundation for IIGF's competitive advantage. HR is a strategic element in supporting the growth and development of IIGF's business. The characteristics of individuals who have a growth mindset, creative thinking, adaptive, and innovative in facing all types of changes are the key elements in enhancing IIGF's performance sustainably and supporting the achievement of IIGF's long-term goals. Realizing this strategic role, IIGF puts its main focus on improving organizational capabilities via sustainable HR development. HR management strategies are carefully designed based on the core competencies needed to achieve the company's overall performance targets.

Untuk memaksimalkan value dari karyawan dan mendorong kontribusi yang lebih signifikan, PT PII berkomitmen untuk:

- Memperkuat Kapabilitas Organisasi melalui program pelatihan dan pengembangan yang terstruktur dan relevan dengan perkembangan industri penjaminan. Ini tidak hanya meningkatkan kompetensi individu tetapi juga memperkuat daya saing organisasi secara keseluruhan.
- Membangun Strategi Pengelolaan SDM Berbasis Kompetensi, dimana PT PII mengidentifikasi dan mengembangkan kompetensi-kompetensi kunci yang penting bagi keberhasilan bisnis penjaminan. Dengan pengelolaan SDM yang berfokus pada kompetensi inti, perusahaan memastikan bahwa setiap karyawan memiliki keahlian yang tepat untuk memberikan nilai tambah dalam setiap layanan yang diberikan.
- Meningkatkan Produktivitas melalui budaya kerja yang kolaboratif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Dengan memberdayakan karyawan untuk berinovasi dan memberikan ide-ide kreatif, perusahaan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan produktivitas secara berkelanjutan.

To maximize employee value and encourage more significant contributions, IIGF is committed to:

- Strengthening Organizational Capabilities via structured training and development programs that are relevant to the development of the guarantee industry. This not only improves individual competencies but also strengthens the competitiveness of the organization comprehensively.
- Enhancing a Competency-Based HR Management Strategy, where IIGF identifies and develops key competencies that are important for the success of the guarantee business. With HR management that focuses on core competencies, the company ensures that each employee has the right expertise to provide added value in every service provided.
- Increasing Productivity through a collaborative, efficient, and results-oriented working culture. By empowering employees to innovate and provide creative ideas, the company creates an environment that is conducive to continuous productivity improvement.

Investasi strategis pada pengembangan sumber daya manusia merupakan prioritas utama PT PII. Melalui pendekatan Individual Development Plan (IDP), PT PII memastikan bahwa setiap karyawan memiliki peta pengembangan karir yang jelas dan terarah. Program pelatihan yang dipersonalisasi ini bertujuan untuk membekali

IIGF prioritises the strategic investment in human resource development. Via the Individual Development Plan (IDP), IIGF ensures that each employee has a clear and focused career development map. This personalized training program has the objective to equip employees with the specific competencies needed to succeed in their roles,

karyawan dengan kompetensi spesifik yang dibutuhkan untuk sukses dalam menjalankan peran mereka, sekaligus meningkatkan kapabilitas organisasi. Pada tahun 2024, PT PII telah memfasilitasi pengembangan bagi 163 karyawan melalui total 6.447,62 jam pelatihan.

while improving organizational capabilities. In 2024, IIGF has facilitated development for 163 employees through a total of 6,447.62 hours of training.

Guna memastikan bahwa seluruh karyawan berkontribusi secara maksimal terhadap kemajuan Perseroan, PT PII telah mengukur keterikatan karyawan terhadap Perseroan secara berkala melalui *Employee Engagement Survey* (EES) tahun 2024 dengan skor 73%. Berdasarkan hasil tersebut, manajemen telah menyusun rencana aksi untuk meningkatkan keterikatan karyawan, dengan fokus pada peningkatan komunikasi internal, pengembangan karir, serta peningkatan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan karyawan.

To ensure that all employees contribute optimally to the Company's progress, IIGF has periodically assessed employee engagement with the Company using the 2024 Employee Engagement Survey (EES) with a score of 73%. Based on these results, management has prepared an action plan to increase employee engagement, with a focus on improving internal communication, career development, and improving the work environment that supports employee welfare.

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan mencapai tujuan strategis, perseroan telah menggagas implementasi pengelolaan SDM berbasis kompetensi atau *Competency-Based Human Resource Management* (CBHRM) sejak tahun 2023. Diawali dengan fase perencanaan, dan persiapan yang komprehensif, CBHRM telah diperkenalkan kepada karyawan pada tahun 2023 hingga tahun 2024. Selanjutnya dilakukan analisa dan penyusunan kebijakan terkait dengan seluruh pilar pengelolaan SDM, mulai dari rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, pengelolaan kinerja, pengelolaan karier hingga remunerasi untuk diimplementasikan di tahap selanjutnya.

As part of the continuous efforts to improve organizational effectiveness and achieve strategic goals, the company started implementing competency-based human resource management (CBHRM) since 2023. With a comprehensive planning and preparation phase, CBHRM has been introduced to employees in 2023 to 2024. Further, analysis and preparation of policies related to all pillars of HR management, starting from recruitment, training and development, performance management, career management to remuneration to be implemented at the next stage.

KOMITMEN MENJAGA KUALITAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
COMMITMENT TO MAINTAINING THE QUALITY OF CORPORATE GOVERNANCE

Perseroan meyakini bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/ GCG) merupakan pondasi penting dalam menjalankan serta menjaga keberlangsungan usaha serta membangun suatu lingkungan bisnis yang profesional, transparan, berintegritas, dan efisien yang dapat meningkatkan dan mengoptimalkan nilai Perseroan. Implementasi GCG dilakukan selaras dengan *best practices* agar dapat memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan lainnya, serta mendorong PT PII untuk menciptakan nilai bagi Perseroan. Penerapan GCG diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.

The Company believes that good corporate governance (GCG) is an important foundation in running and maintaining business continuity and establishing a professional, transparent, integrity, and efficient business environment that can enhance and optimize the Company's value. GCG is implemented in line with best practices to provide adequate protection and fair treatment to shareholders and all other stakeholders, and encourage IIGF to create value for the Company. GCG implementation is realized in the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors, the completeness and implementation of the duties of committees and working units that carry out internal control functions, the compliance functions, internal auditors, and external auditors, the risk management, including internal control systems.

Selama tahun 2024 PT PII melakukan berbagai upaya untuk memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku. Perseroan melakukan penilaian atas penerapan GCG secara berkala berdasarkan Pasal 72 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 88/PMK.06/2015. Berdasarkan hasil penilaian penerapan GCG tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), PT PII memperoleh skor sebesar 90,829 dengan predikat Sangat Baik. Secara berkelanjutan, tindak lanjut atas rekomendasi hasil assessment GCG dilakukan dengan mengacu pada best practices guna meningkatkan kualitas penerapan GCG yang lebih baik di masa mendatang. Selanjutnya Perseroan secara aktif melakukan diseminasi atas kebijakan terkait GCG guna meningkatkan pemahaman seluruh Insan PT PII atas program tata kelola perusahaan khususnya pengendalian gratifikasi, kebijakan kode etik, dan kebijakan sistem pelaporan pelanggaran kepada seluruh karyawan serta jajaran Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu Perseroan juga melaksanakan Audit Surveillance terkait dengan sertifikat SMAP ISO 37001/2016 ke-2 pada bulan Maret 2024, dengan hasil menunjukkan efektivitas yang baik dan tidak ada ketidaksesuaian, baik yang bersifat mayor maupun minor. PT PII berkomitmen untuk terus menerapkan SMAP dan akan melaksanakan proses resertifikasi pada tahun 2025 untuk ruang lingkup yang sama.

In 2024, IIGF has made various efforts to ensure corporate governance is carried out consistently, in line with the prevailing legislation. The Company regularly assesses the GCG implementation based on Article 72 point (b) of the Minister of Finance Regulation No. 88/PMK.06/2015. Based on the assessment results of GCG implementation in 2024, the Company received 90.829 score, which is Very Good. Follow-up on the recommendations of the GCG assessment results are carried out continuously with reference to best practices to enhance the quality of GCG implementation in the future. Further, the Company actively disseminates GCG-related policies to improve the understanding of all IIGF personnel on corporate governance programs, especially gratification control, code of conduct, and whistleblowing system policies to all employees as well as the Board of Directors and the Board of Commissioners. In addition, the Company also implemented a second Surveillance Audits related to the SMAP ISO 37001/2016 certificate in March 2024, with the results of good effectiveness and no non-conformities, major or minor. IIGF is committed to implementing SMAP and will proceed with the re-certification process in 2025 for the same scope.

Konsistensi dalam penerapan GCG selama tahun 2024, Perseroan memperoleh penghargaan antara lain: (1) Anugerah BUMN 2024 kategori Tata Kelola Perusahaan dari BUMN Track, (2) Indonesia Regulatory & Compliance Awards 2024 kategori Most Strategic Enterprise in Regulatory Compliance, Financial Services-Non-Bank Prosper B dari Hukum Online; (3) Annual Report Award 2023 Kategori Winner of Non-Go Public Financial dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) serta (4) Anugerah Humas Indonesia 2024 kategori Keterbukaan Informasi Media Sosial - TikTok dari Media Humas Indonesia.

Because of the consistency in the GCG implementation in 2024, the Company received awards, among others: (1) 2024 Anugerah BUMN in the category of Corporate Governance from BUMN Track, (2) Indonesia Regulatory & Compliance Awards 2024 in the category of Most Strategic Enterprise in Regulatory Compliance, Financial Services-Non-Bank Prosper B from Hukum Online; (3) Annual Report Award 2023 in the category of Winner of Non-Go Public Financial from the National Committee on Governance (KNKG), and (4) Anugerah Humas Indonesia 2024 in the category of Social Media Information Disclosure - TikTok from Media Humas Indonesia.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Perseroan menerapkan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Perseroan (*Enterprise Risk Management*/ ERM) secara terintegrasi dengan strategi dan proses bisnis yang dilakukan. *Framework* ERM diturunkan pada kebijakan dan/ atau prosedur yang mengatur proses-proses bisnis PT PII.

The Company implements the Enterprise Risk Management (ERM) Framework in an integrated manner with its business strategies and processes. ERM Framework is derived from policies and/or procedures governing IIGF's business processes.

Sebagai perusahaan pengelola risiko yang memberikan penjaminan pemerintah, Perseroan melakukan proses evaluasi kelayakan atas usulan penjaminan yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) untuk memastikan proyek yang akan diberikan penjaminan minimal telah layak secara keuangan dan teknis sesuai regulasi mengacu pada Kerangka Kerja Appraisal. Evaluasi kelayakan proyek dilakukan dari aspek keuangan, ekonomi, teknis, hukum, lingkungan dan sosial. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap usulan alokasi risiko proyek agar risiko-risiko yang dialokasikan kepada PJPK telah dipantau atau dimitigasi secara memadai. Secara regulasi, Perseroan menyusun Acuan Alokasi Risiko untuk skema KPBU yang menjadi acuan PJPK dalam mengalokasikan risiko kepada pihak yang tepat, serta menyusun rencana mitigasi risiko dalam rangka penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penekanan dalam pelaksanaan proses penjaminan PT PII adalah kualitas, kehati-hatian penilaian, kesesuaian struktur penjaminan, alokasi risiko yang fair memegang peranan penting, dibandingkan dengan kepentingan penyelesaian proyek secara tepat waktu.

As a risk management company that provides sovereign guarantees, the Company conducts a feasibility evaluation process for the guarantee proposal submitted by the Government Contracting Agency (GCA) to ensure that the project to be guaranteed is at least financially and technically feasible in accordance with regulations with reference to the Appraisal Framework. Project feasibility is evaluated from financial, economic, technical, legal, environmental, and social aspects. In addition, evaluation is also carried out on the proposed project risk allocation so that the risks allocated to GCA are adequately monitored or mitigated. In terms of regulation, the Company has formulated a Risk Allocation Reference document for the PPP scheme, to be used by the GCA to allocate risks to the right parties, as well as prepare risk mitigation plans to provide adequate infrastructure in accordance with the community's needs. The emphasis in the implementation of IIGF's guarantee process is quality, prudent assessment, suitability of the guarantee structure, fair risk allocation that plays an important role, and compared to the importance of timely project completion.

Penyusunan RKAP Perseroan tahun 2024 telah berbasis pada profil dan peta risiko utama perusahaan. PT PII menetapkan 3 (tiga) risiko utama Perseroan yang terdiri dari (1) risiko strategis terkait dengan pencapaian target penjaminan, (2) risiko keuangan terkait dengan risiko likuiditas akibat terjadinya klaim penjaminan dan (3) risiko keuangan terkait dengan risiko kredit dan tagihan regres. Selera dan toleransi risiko Perseroan ini terutama untuk aktivitas bisnis yang tidak terkait dengan penugasan, sedangkan untuk aktivitas bisnis yang terkait penugasan, PT PII mengikuti selera risiko dan toleransi dari dari pemberi penugasan dengan tetap mengelola eksposur risiko tersebut.

The preparation of the Company's 2024 WP&B has been based on the company's main risk profile and map. IIGF determines the Company's three (3) main risks consist of (1) strategic risk related to the achievement of guarantee targets, (2) financial risk related to liquidity risk due to guarantee claims and (3) financial risk related to credit risk and recourse claims. The Company's risk appetite and tolerance are mainly for business activities that are not related to the assignment. Meanwhile, business activities related to the assignment follow the risk appetite and tolerance of the assignor while still managing the risk exposure.

Atas komitmen dalam menerapkan manajemen risiko, PT PII berhasil meraih penghargaan diantaranya ASEAN Risk Awards 2024 kategori ASEAN GRC *Awards*. Selama 8 tahun berturut-turut, PT PII telah memenangkan penghargaan Asean *Risk Award* pada berbagai kategori dengan lebih dari 250 peserta yang berpartisipasi di berbagai negara ASEAN. Melalui penghargaan ini PT PII diharapkan dapat lebih meningkatkan dan mendorong kematangan penerapan manajemen risiko melalui berbagai inisiatif serta mampu mengintegrasikan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan di Perseroan.

For its commitment to implementing risk management, IIGF won various awards, including the 2024 ASEAN Risk Awards in the ASEAN GRC Awards category. For 8 consecutive years, IIGF has won the ASEAN Risk Award in various categories with more than 250 candidates participating. With these awards, IIGF shall further improve and encourage maturity in risk management through various initiatives and integrate good governance, risk management, and compliance in the Company.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN
INTERNAL CONTROL SYSTEM

Direksi dengan *monitoring* dari dengan Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam menjaga implementasi sistem pengendalian intern dengan melindungi aset yang dimiliki, menciptakan efektivitas dan efisiensi operasional, menjamin tersedianya pelaporan keuangan yang akurat dan handal, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran. Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif dilakukan dengan pelaksanaan fungsi dan peran seluruh unsur dan komponen dalam struktur organisasi Perseroan sesuai kewenangannya. Perseroan menerapkan 2 (dua) aspek pengendalian internal, yaitu pengendalian operasional dan pengendalian keuangan. Kerangka kerja sistem pengendalian intern yang berlaku di Perseroan mengadopsi COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*)-*Internal Control Integrated Framework*. Pengendalian internal dimaknai sebagai sebuah sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, serta karyawan dalam Perseroan, untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

The Board of Directors, in collaboration with the Board of Commissioners, is responsible for maintaining the internal control system implementation by protecting assets owned, creating operational effectiveness and efficiency, ensuring the availability of accurate and reliable financial reporting, and increasing compliance with prevailing regulations, reducing the risk of losses, irregularities, and violations. The effective internal control system is implemented by the functions and roles of all elements and components in the Company's organizational structure according to their authority. The Company implements two (2) internal control aspects, i.e., operational control and financial control. The Company adopts COSO (Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)-Internal Control Integrated Framework as the applicable internal control system. Internal control is a system or process carried out by the Board of Commissioners, Board of Directors, management, and employees in the Company, to provide adequate confidence regarding the adequacy of operational and financial controls, financial reporting, operational effectiveness and efficiency, and compliance with prevailing laws and regulations.

PROSPEK USAHA PERUSAHAAN
BUSINESS PROSPECT

Sejalan dengan fokus utama agenda Pemerintah pada tahun 2025 yaitu menjaga stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas SDM, perbaikan ketahanan pangan dan pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur fokus dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 yaitu menjadi negara maju, menetapkan upaya transformatif super prioritas terutama pada Transformasi Sosial dan Transformasi Ekonomi memiliki arah kebijakan yang menjadi bidang prioritas pembangunan antara lain percepatan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi), energi dan ketenagalistrikan, pangan, penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan, perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), infrastruktur pariwisata, serta akses teknologi informasi dan transformasi digital.

In line with the main focus of the Government's agenda in 2025, i.e., maintaining economic stability, economic growth, improving the quality of human resources, improving food security, and equitable development. Infrastructure development is focused on supporting the acceleration of inclusive and sustainable economic transformation. The development transformation towards Golden Indonesia 2045, which is to become a developed country, sets the super-priority on the transformative efforts, especially in Social and Economic Transformation, which have policy directions with prioritized areas of development, including accelerating economic driver infrastructure (connectivity and transportation), energy and electricity, food, gradual and sustainable completion of IKN development, housing for low-income community (MBR), tourism infrastructure, and access to information technology and digital transformation.

Pemerintah menetapkan anggaran belanja infrastruktur tahun 2025 dalam APBN sebesar Rp400,3 triliun, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, anggaran infrastruktur susut sekitar 5,29% dari Rp422,7 triliun pada 2024. Peruntukkan anggaran tersebut untuk mendorong pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi hingga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dengan keterbatasan anggaran infrastruktur yang bersumber dari APBN maka Pemerintah mendorong badan usaha untuk turut serta terlibat dalam pembiayaan infrastruktur melalui berbagai skema pembiayaan kreatif (*creative financing*) untuk mendorong peran serta badan usaha dalam skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

The Government set the infrastructure expenditure for 2025 in the State Budget of Rp400.3 trillion. Compared to the previous year, the infrastructure budget decreased by around 5.29% from Rp422.7 trillion in 2024. The budget is allocated to encourage the development of education and health infrastructure, connectivity infrastructure, food and energy infrastructure, as well as the Nusantara Capital City (IKN). With the limited infrastructure budget from the State Budget, the Government encourages business entities to participate in infrastructure financing via various creative financing schemes to encourage them to participate in the Public Private Partnership (PPP) scheme.

Dengan semangat optimisme bahwa pembangunan infrastruktur akan tetap prospektif dan masih menjadi kontributor penggerak utama ekonomi dalam negeri di masa depan. Kami juga secara terbuka senantiasa mendukung Kementerian dan Lembaga maupun Pemerintah Daerah yang akan mengembangkan proyek skema KPBU dan mendukung *sustainable finance*, di mana proyek ini memenuhi aspek ESG dengan mengusung konsep green energy. Pada aspek strategi pengembangan bisnis, PT PII akan melakukan penjaminan berkelanjutan untuk tahun 2025 dengan mempertimbangkan keselarasan dan keberlanjutan atas proyek-proyek yang telah diusahakan sebelumnya, termasuk proyek yang mendukung transisi energi dan tantangan perubahan iklim melalui *capacity building*. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah dengan memperluas jangkauan penjaminan di luar infrastruktur, serta dukungan terhadap ekonomi hijau melalui pelaksanaan *framework Environment, Social and Governance* (ESG) dalam mendukung transisi energi dan urban facility dalam bentuk konservasi energi.

This is in line with the spirit of optimism that the infrastructure industry will remain prospective and still be a contributor to the main driver of the domestic economy in the future. We openly support the Ministry of PUPR, other ministries, and Local Governments that will develop PPP scheme projects and support sustainable finance, in which such projects shall meet ESG aspects based on the green energy concept. In terms of business development strategy, IIGF will conduct sustainable guarantees for 2025 by considering the alignment and sustainability of previously attempted projects, including projects that support energy transition and climate change using capacity building. One of the initiatives conducted is expanding the range of guarantees outside infrastructure, as well as supporting the green economy by implementing the Environment, Social and Governance (ESG) framework in supporting energy transition and urban facilities in the form of energy conservation.

PT PII memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi pembiayaan kreatif, memungkinkan pembiayaan yang lebih fleksibel dan inovatif, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur besar yang sulit dibiayai melalui cara konvensional. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah dan sektor swasta untuk bekerja sama dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang lebih efektif, yang pada gilirannya mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Selain itu, peran PT PII dalam mendukung program pemerintah, seperti menjaga ketahanan pangan, juga sangat strategis. Melalui dukungan terhadap proyek-proyek infrastruktur yang berhubungan dengan distribusi pangan,

IIGF has a very important role in facilitating creative financing, enabling more flexible and innovative financing, especially for large infrastructure projects that are difficult to finance through conventional means. This provides room for the government and private sector to collaborate to bring more effective financing solutions, which in turn accelerates the development of needed infrastructure. Moreover, IIGF plays a crucial role in government programs, particularly in ensuring food security. By supporting infrastructure projects related to the agriculture sector, food distribution, and natural resource management, IIGF contributes to the achievement of national food security, including in terms of irrigation management,

dan pengelolaan sumber daya alam, PT PII berkontribusi pada pencapaian ketahanan pangan nasional, termasuk dalam hal pengelolaan irigasi, sistem distribusi pangan, dan pengolahan hasil pertanian. Hal ini merupakan fondasi utama dalam memastikan pasokan pangan yang stabil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

food distribution systems, and agricultural product processing. This is a key foundation in ensuring a stable and affordable food supply for the entire community.

Dengan memberikan jaminan pada proyek-proyek yang mendukung sektor pangan, PT PII tidak hanya berperan dalam meningkatkan infrastruktur secara umum, tetapi juga mendukung keberlanjutan sektor yang sangat vital bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dukungan ini membantu memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat berjalan lancar dan terjamin. Pengalaman dan pengetahuan PT PII lebih dari satu dekade berdiri, menjadi bekal untuk terus mendukung pengembangan infrastruktur nasional. Kami optimis bahwa prospek bisnis Perseroan pada masa mendatang akan semakin baik dan pencapaian kinerja yang semakin bertumbuh dapat diraih, serta mampu menangkap berbagai peluang maupun beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompleks pada masa mendatang.

By providing guarantees for projects that support the food and agriculture sector, IIGF not only plays a role in improving infrastructure, but also supports the sustainability of a sector that is vital to the economy and welfare of the Indonesian people. This assists in ensuring that infrastructure projects related to food security can run smoothly and securely. IIGF's experience and knowledge from more than a decade of existence have provided it with the opportunity to support national infrastructure development. We are optimistic that the Company has better business prospects in the future, can achieve performance growth, can seize various opportunities and adapt to changes in the increasingly complex business environment in the future.

KINERJA KEBERLANJUTAN SERTA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)

SUSTAINABILITY PERFORMANCE AND SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY (CSR) PROGRAM

Sebagai salah satu SMV Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT PII mengemban mandat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Salah satu kontribusi utama PT PII adalah mendukung penyediaan infrastruktur dan menjamin kehidupan yang layak bagi masyarakat dengan menjadi penggerak utama dalam ekosistem pembiayaan kreatif dan inovatif. PT PII berupaya memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berkontribusi pada kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan serta berkontribusi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan Pemerintah.

As one of the SMVs of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, IIGF has the mandate to accelerate infrastructure development in Indonesia. One of IIGF's main contributions is to support the provision of infrastructure and ensure a decent life for the community by becoming a key driver in the innovative financing ecosystem. IIGF strives to ensure that every step taken contributes to social, economic, and environmental welfare, and contributes to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) launched by the Government.

Dalam kurun waktu sejak didirikan hingga kini, Perseroan telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong berbagai inisiatif strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan isu keberlanjutan, melalui inovasi yang relevan, mulai dari pengembangan proyek infrastruktur ramah lingkungan, proyek

Since its establishment, the Company has taken steps to encourage various strategic initiatives in optimizing the sustainability management via relevant innovations, ranging from the development of environmentally friendly infrastructure projects, up to projects that support energy

yang mendukung upaya transisi energi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim hingga dukungan terhadap kebijakan pemerataan pembangunan. Pada prinsipnya kegiatan operasional PT PII tidak secara langsung memberikan dampak substansial terhadap lingkungan dan sosial, namun Perseroan berkomitmen untuk melakukan pengelolaan terhadap dampak negatif yang mungkin untuk memberikan dampak positif kepada lingkungan, sosial dan masyarakat melalui berbagai program, khususnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

transition efforts in facing the climate change, to support for equitable development policies. In principle, IIGF's operations do not have a direct substantial impact on the environment and society, but the Company is committed to managing possible negative impacts to provide positive impacts on the environment, society, and community through various programs, especially Corporate Social Responsibility (CSR).

PT PII melaksanakan program TJSL yang fokus pada 5 bidang yaitu (1) Pendidikan, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) lingkungan, (4) kesehatan serta (5) sosial, budaya dan keagamaan. PT PII memandang bahwa pemangku kepentingan merupakan salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan Perseroan, sehingga perlu dibangun mekanisme komunikasi dan relasi yang positif agar dapat menampung aspirasi mereka, baik yang terlibat ataupun yang terdampak, secara langsung maupun tidak langsung oleh aktivitas operasional PT PII. Pada tahun 2024, Perseroan telah melaksanakan 37 program TJSL yang mencakup sektor Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat, Lingkungan, Kesehatan, serta Sosial, Budaya, dan Keagamaan, dengan total realisasi anggaran TJSL sebesar Rp4,8 miliar. Angka ini menunjukkan komitmen yang terus meningkat dari tahun sebelumnya, dimana realisasi anggaran TJSL tahun 2023 tercatat sebesar Rp 4,4 Miliar, mencerminkan upaya berkelanjutan Perseroan dalam memperbesar dampak positif kepada masyarakat melalui berbagai program yang dijalankan. Program-program ini mencerminkan upaya berkelanjutan Perseroan dalam memberikan dampak positif kepada masyarakat, dan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 menunjukkan komitmen yang konsisten dari Direksi untuk terus meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan lingkungan.

IIGF executed CSR programs that focus on 5 areas, i.e., (1) Education, (2) community empowerment, (3) environment, (4) health, and (5) social, cultural, and religion. IIGF understands that the stakeholders are one of the parties with an important role in supporting the Company's sustainability. Therefore, it is necessary to establish a positive communication and relationship mechanism to accommodate their aspirations, both those involved and those affected, directly or indirectly, by IIGF's operations. In 2024, the Company has implemented 37 CSR programs covering the Education, Community Empowerment, Environment, Health, and Social, Cultural, and Religion sectors, with a total CSR realization of Rp4.8 billion. This figure shows an increasing commitment from the previous year, in which the CSR was recorded at Rp4.4 billion, reflecting the Company's continuous efforts to enhance the positive impact on the community through various programs implemented. These programs reflect the Company's efforts to provide a positive impact on the community, and the budget allocated in 2024 reflects a consistent commitment from the Board of Directors to enhance contributions to social and environmental development.

Komitmen Kami dalam kinerja keberlanjutan sekaligus konsistensi dalam implementasi TJSL dalam mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, PT PII berhasil meraih sejumlah penghargaan penting di tingkat nasional dan global selama tahun 2024. Pada tingkat global, PT PII memperoleh penghargaan *Gold* untuk Kategori *in Accordance* pada Asia *Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT). Adapun di tingkat nasional, PT PII meraih

Our commitment to sustainability performance as well as consistency in the CSR to support the achievement of sustainable development caused IIGF to win numerous key awards at the national and global levels in 2024. Internationally, IIGF received a Gold award for the in Accordance Category in the Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT). At the national level, IIGF won the Platinum Winner award for the Environmental Pillar Category and Strong Commitment CEO

penghargaan Platinum Winner untuk Kategori Pilar Lingkungan dan *Strong Commitment* CEO *on Environment* Program of CSR pada TJSL & CSR Award 2024 dari BUMN *Track; Gold Winner* untuk Kategori Inovasi Sosial pada *Environment and Social Innovation Award* (ENSIA) dari PT Sucofindo; *Best Winner* untuk kategori *Infrastructure Supporting Financing* pada Ajang Indonesia *Best CSR Award* 2024 dari The Economics; *Bronze Winner* untuk Kategori *Community Programme & Platinum Winner* untuk Kategori Best CEO pada Global CSR Award & Summit 2024 dari Pinnacle Group International serta Donatur Program CSR Terbaik pada BAZNAS Award 2024 dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS); dan Program Online dengan Dampak Terbesar 2024 pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional dari Putera Sampoerna Foundation. Melalui berbagai penghargaan yang telah diterima, PT PII menunjukkan komitmen terhadap praktik-praktik berkelanjutan serta perilaku bisnis yang etis dan bertanggung jawab dengan berupaya memberikan yang terbaik terkait kinerja keuangan, operasional, pengelolaan lingkungan hidup, tata Kelola dan tanggung jawab sosial.

on Environment Program of CSR at the TJSL & CSR Award 2024 from BUMN Track; Gold Winner for the Social Innovation Category at the Environment and Social Innovation Award (ENSIA) from PT Sucofindo; Best Winner for Infrastructure Supporting Financing category at Indonesia Best CSR Award 2024 from The Economics; Bronze Winner for Community Program Category & Platinum Winner for Best CEO Category at Global CSR Award & Summit 2024 from Pinnacle Group International, as well as Best CSR Program Donor at BAZNAS Award 2024 from National Amil Zakat Agency (BAZNAS); and Online-based Program with the Biggest Impact in 2024 Award on National Education Day Memorial from Putera Sampoerna Foundation. Through the numerous awards received, IIGF showcases its dedication to sustainability, ethical conduct, and responsible business practices by continuously striving for excellence in financial performance, operations, environmental management, governance, and social responsibility.

KOMPOSISI DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' COMPOSITION

Sampai dengan 31 Desember 2024, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi PT PII. Dengan demikian, komposisi Direksi tetap sama seperti tahun sebelumnya, yaitu:

- M. Wahid Sutopo : Direktur Utama
- Andre Permana : Direktur Bisnis
- Donny Hamdani : Direktur Keuangan

Setelah periode Laporan Tahunan ini berakhir hingga disahkannya Laporan Tahunan ini, terdapat pengangkatan kembali Sdr. Andre Permana sebagai Direktur Bisnis berdasarkan KMK Nomor 55 tahun 2025 tanggal 8 Maret 2025. Keberlanjutan komposisi Direksi ini mencerminkan stabilitas kepemimpinan yang mendukung kelancaran operasional Perseroan. Direksi mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham atas kepercayaannya dan kami akan terus berusaha menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh pemangku kepentingan Perseroan.

As of 31 December 2024, there was no change in the composition of IIGF's Board of Directors. Therefore, the composition of the Board of Directors remains the same as the previous year:

- M. Wahid Sutopo : President Director
- Andre Permana : Business Director
- Donny Hamdani : Finance Director

After the period of this Annual Report ended and until its ratification, Mr. Andre Permana was reappointed as Business Director based on KMK Number 55 of 2025, dated March 8, 2025. The consistency in the Board of Directors' composition reflects stable leadership, ensuring the Company's seamless operations. The Board of Directors would like to thank the shareholders for their trust. We will strive to carry out this mandate to the best of our ability for the benefit of all the Company's stakeholders.

APRESIASI
APPRECIATION

Dalam kesempatan ini, Kami atas nama seluruh jajaran Direksi mengucapkan ucapan terima kasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaan yang diberikan. Dengan arahan dan bimbingan dari Pemegang Saham serta kepercayaan dan dukungan dari segenap pemangku kepentingan, PT PII berkomitmen dapat senantiasa mengoptimalkan peran strategisnya untuk mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan melalui skema pembiayaan kreatif dan terus meningkatkan kebermanfaatan untuk keberlanjutan. Kepada Dewan Komisaris, Kami juga menyampaikan terima kasih atas arahan dan kerja sama yang terjalin selama tahun 2024. Pengawasan dan nasihat yang disampaikan turut memberikan arah kebijakan yang diambil oleh Direksi Perseroan.

Kami juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh karyawan, mitra bisnis dan segenap pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan, kontribusi dan dukungan yang diberikan. Tahun ini kami melakukan refleksi kembali atas nilai-nilai, tujuan dan mandat kami di masa depan, dengan mempertimbangkan faktor yang menjadi kendala dan tantangan saat ini dan di masa mendatang. Kami berharap dapat terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjadikan PT PII sebagai entitas utama dalam mendukung upaya akselerasi pengembangan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan melalui skema pembiayaan kreatif dan kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat. Dengan semangat menginspirasi melangkah bersama, menuju masa depan berkelanjutan.

On behalf of the entire Board of Directors, we would like to take this opportunity to express our gratitude to the Shareholders for their trust. With guidance from Shareholders and the trust of all stakeholders, IIGF remains committed to enhancing its strategic role in promoting sustainable infrastructure development through innovative financing schemes while continuously increasing its contributions to long-term sustainability. We also express our gratitude to the Board of Commissioners, for the direction and cooperation that has been established in 2024. The oversight and guidance provided played a key role in shaping the policies implemented by the Board of Directors.

We also express our appreciation and gratitude to all employees, business partners, and other stakeholders for the trust, contribution, and support they have provided. This year, we reflected on our values, goals, and future mandates, taking into account current and future constraints and challenges. We look forward to continuing our collaboration with various stakeholders to establish IIGF as a leading entity in driving infrastructure acceleration and sustainable development via innovative financing schemes that deliver widespread benefits to the community. With a shared spirit of progress, let's move forward toward a sustainable future.

Jakarta, April 2025
Jakarta, April 2025

Atas nama Direksi
On behalf of the Board of Directors

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

M. Wahid Sutopo
Direktur Utama
President Director

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2024 PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

STATEMENT OF ACCOUNTABILITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2024 ANNUAL REPORT OF PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information contained in the 2024 Annual Report of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) has been presented in full and we shall be fully accountable for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

This statement was made with actual.

Jakarta, April 2025
Jakarta, April 2025

Hadiyanto
Komisaris Utama
President Commissioner

M. Wahid Sutopo
Direktur Utama
President Director

Ferry Irawan
Komisaris
Commissioner

Andre Permana
Direktur Bisnis
Business Director

Ahmad Ghufron
Komisaris
Commissioner

Donny Hamdani
Direktur Keuangan
Finance Director

Profil Perusahaan

Company Profile

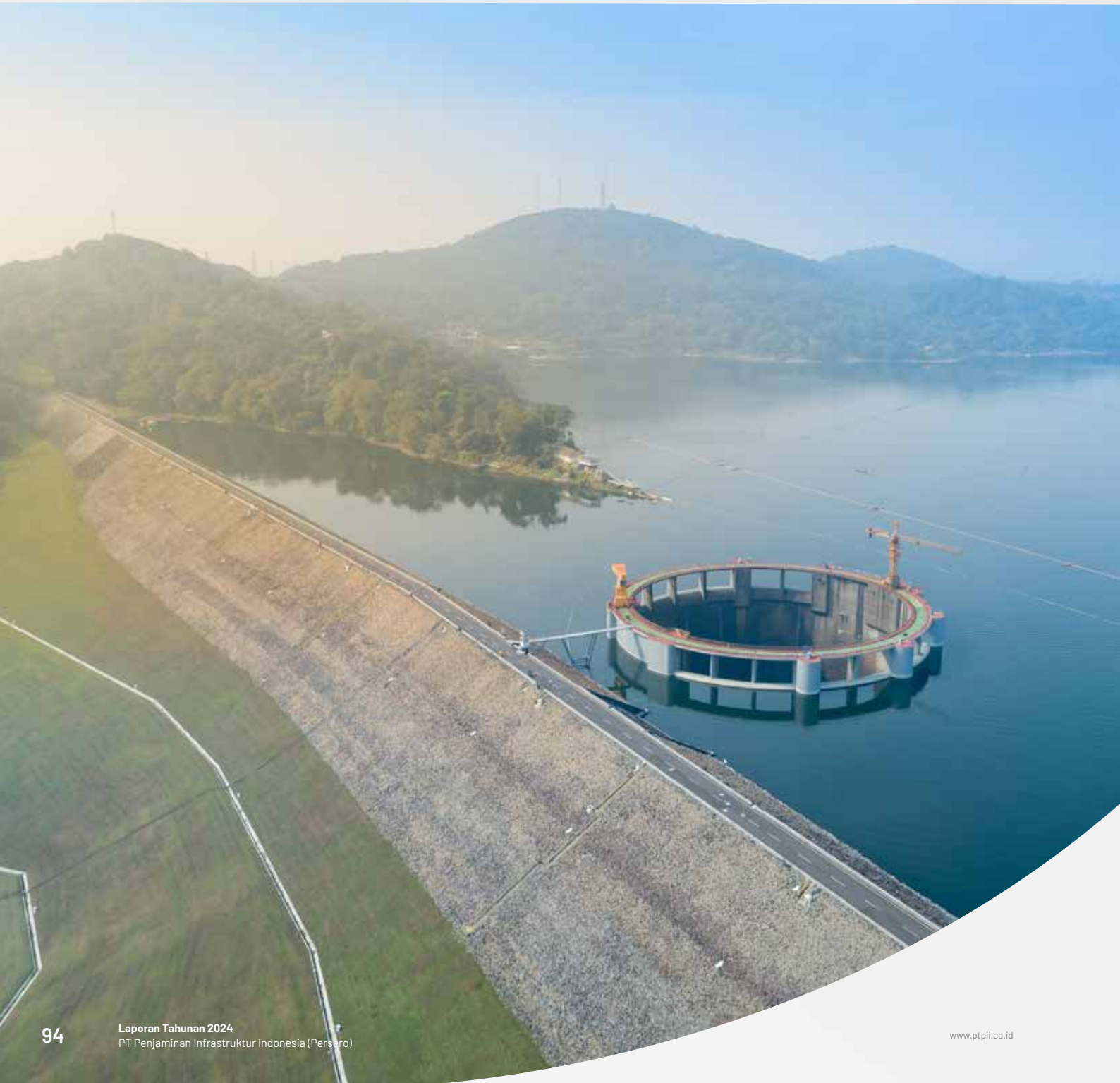

IDENTITAS PERUSAHAAN
CORPORATE IDENTITY

Nama Perusahaan
Company Name

PT PII

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Indonesia Infrastructure Guarantee Fund

Tanggal Pendirian
Date of Establishment

30 Desember 2009
December 30, 2009

Kepemilikan
Ownership

Seluruh saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia (100%).
All Company's shares are owned by the Republic of Indonesia (100%).

Pencatatan Di Bursa
Listing on the Exchange

Perseroan merupakan BUMN yang belum mencatatkan saham di bursa manapun.
The Company is a state-owned enterprise that has not listed on any stock exchange.

Jenis/Badan Hukum Perusahaan
Company's Type/Legal Entity

Perseroan Terbatas yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan.
Limited Liability Company, as a State-Owned Enterprise (SOE) under the guidance and supervision of the Minister of Finance.

Dasar Hukum Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar
Legal Basis for Establishment and Amendments to the Articles of Association

Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor 29 tertanggal 30 Desember 2009, dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Nomor 14 tertanggal 14 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, yang telah beberapa kali dilakukan perubahan dan perubahan terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor 06 tertanggal 18 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Arry Supratno S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Perusahaan Perseroan.
Deed of Establishment of the State-Owned Enterprise (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia No.29, dated December 30, 2009, executed before Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, a Notary in Jakarta, as amended by Deed of Amendment No. 14, dated January 14, 2010, executed before Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, a Notary in Jakarta, which has been duly ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to Decree No. AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010, dated January 27, 2010, on the Ratification of the Company's Legal Entity, which has been amended several times, with the latest amendment effected through the Deed of Statement of Shareholders' Resolution of the State-Owned Enterprise (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Number 06, dated March 18, 2025, executed before Arry Supratno, S.H., Notary in Jakarta, and duly acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to the Notification Receipt of Corporate Data Amendment Number AHU-AH.01.09-0156356, dated March 20, 2025.

Kegiatan Bisnis Utama sesuai Anggaran Dasar
Main Business Pursuant to the Articles of Association

- Memberikan penjaminan Pemerintah (*Sovereign Guarantee*) di bidang infrastruktur;
- Memberikan penjaminan Pemerintah (*Sovereign Guarantee*) dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah; dan
- Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan Pemerintah serta kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional baik pusat dan daerah.
- Providing Sovereign Guarantee in the infrastructure sector;
- Providing Sovereign Guarantees for financing in sectors other than infrastructure, in accordance with government assignments; and
- Conducting activities related to the Government Guarantee implementation, as well as other activities related to the project development to support the central and local national economy.

Jumlah Karyawan
Number of Employees

163

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Rian Ditha Prasetianti
Plt. Pimpinan Divisi Corporate Secretary and Communication
Interim Corporate Secretary and Communication

rian.ditha@iigf.co.id
+62 21 5795 0550

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp20.000.000.000.000 yang terdiri dari 20.000.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000 per lembar saham.
Rp20,000,000,000,000 consisting of 20,000,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share.

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully Paid Up Capital

Rp10.655.000.000.000 yang terdiri dari 10.655.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000 per lembar saham.
Rp10,665,000,000,000 consisting of 10,655,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share.

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Capital Place, 7-8 Floor
Jl. Gatot Subroto No.Kav 18,
RT.6/RW.1, Kuningan Barat.,
Kec. Mampang Prapatan,
Kota Jakarta Selatan

+62 21 5795 0550

Email
Email

info@iigf.co.id

Media Sosial
Social Media

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
@pii_persero
@PII_Persero
@pii_persero

Situs *Website*
Website

www.ptpii.co.id

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
COMPANY'S BRIEF HISTORY

Dalam kurun waktu 14 tahun, Perseroan telah berkontribusi dalam membangun masa kini dan masa depan Indonesia melalui penjaminan untuk berbagai proyek infrastruktur dan non-infrastruktur di Tanah Air, dengan total nilai investasi yang mencapai Rp539 triliun.

Within 14 years, the Company has contributed to building Indonesia's present and future by underwriting various infrastructure and non-infrastructure projects in the country, with a total investment value of Rp539 trillion.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), yang dalam laporan tahunan ini disebut juga dengan "PT PII" atau "Perseroan", merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada 30 Desember 2009 dan ditugaskan sebagai layanan satu pelaksana (*single window*) dalam mengevaluasi, menyusun struktur penjaminan serta pemberian jaminan bagi proyek infrastruktur dengan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Sebagai dasar pelaksanaan KPBU, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur ("Perpres 38/2015"). Penerapan KPBU dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu, serta menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat.

Agar KPBU dapat berjalan baik, Pemerintah Republik Indonesia memberikan dukungan penjaminan infrastruktur melalui PT PII, untuk memberikan kepastian kepada swasta terkait komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dalam memenuhi kewajiban finansialnya terhadap pelaksanaan perjanjian KPBU. Peran PT PII diharapkan mampu meningkatkan kepastian dalam perolehan pembiayaan (*financial close*) proyek melalui peningkatan kelayakan kredit atau *bankability* dari proyek-proyek KPBU,

Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, hereinafter referred to as "IIGF" or "the Company", is a State-Owned Enterprise (SOE), established by the Government of the Republic of Indonesia on 30 December 2009, and is assigned as one of the implementing service (single window) to evaluate, prepare guarantee structures, and provide guarantees for infrastructure projects under the Public Private Partnership (PPP) scheme.

As a basis for implementing PPP, the Government has issued Presidential Regulation No. 38 of 2015 concerning Public Private Partnership (PPP) in Infrastructure Provision ("Perpres 38/2015"). PPP implementation has the objective to fulfill the funding in a sustainable manner to develop infrastructure, by mobilizing private funds, realizing the provision of infrastructure that is of high quality, effective, efficient, right on target and on time, as well as creating an investment climate that encourages the participation of Business Entities in providing infrastructure based on healthy business principles.

The Government of the Republic of Indonesia provides infrastructure guarantee support through IIGF to ensure that PPP can be conducted well, offering assurance to the private sector regarding the commitment of the Government Contracting Agency (GCA) in fulfilling its financial obligations as stipulated in the PPP agreement. IIGF shall play a role to increase certainty in achieving financial close for projects by improving the creditworthiness or bankability of PPP projects, while maintaining the Government's interests, primarily

dengan tetap menjaga kepentingan Pemerintah, utamanya terkait kewajiban kontingensi yang mungkin timbul kepada Pemerintah. PT PII sebagai BUMN yang dirancang Pemerintah untuk menjadi lembaga penjaminan yang kredibel melalui tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, *framework* yang akuntabel serta didukung dengan transparansi, profesionalisme, dan independensi.

Pada tahun 2016, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur ("PP 50/2016"). Melalui PP 50/2016, PT PII mendapatkan perluasan mandat untuk dapat memberikan penjaminan pemerintah untuk proyek infrastruktur di luar skema KPBU. Perluasan mandat tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PK.08/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur terhadap Risiko Gagal Bayar dari Badan Usaha Milik Negara yang Melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur ("PMK 101/2018").

Sejak tahun 2018, PT PII juga mendapatkan penugasan dari Kementerian Keuangan dalam melakukan pendampingan atas penyiapan dan pendampingan transaksi proyek infrastruktur dengan skema KPBU sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.08/2018 yang pada tahun 2020 telah dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan

regarding potential contingent liabilities that may arise for the Government. IIGF, as a SOE, is designed by the Government to serve as a credible guarantee institution through good corporate governance, risk management, an accountable framework, and supported by transparency, professionalism, and independence.

In 2016, the Government of the Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 50 of 2016 on Amendment to Government Regulation No. 35 of 2009 concerning State Capital Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Infrastructure Guarantee Sector ("PP 50/2016"). Through PP 50/2016, IIGF received an expanded mandate to provide sovereign guarantees for infrastructure projects in addition to the PPP scheme. This mandate expansion was followed up with the issuance of Minister of Finance Regulation No. 101/PK.08/2018 of 2018 concerning the Procedures for the Granting and Implementation of Joint-Government Guarantees or Through the Infrastructure Guarantee Agency against the Risk of Default from State-Owned Enterprises that undertaking Loans and/or Issue Bonds to Finance Infrastructure Provision ("PMK 101/2018").

Since 2018, IIGF has also received an assignment from the Ministry of Finance for project preparation and transaction advisory using the PPP scheme, as stated in Minister of Finance Regulation No. 73/PMK.08/2018, which in 2020 was revoked by Minister of Finance Regulation No. 180/PMK/08/2020 concerning Facilities for Preparation and

No. 180/PMK/08/2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sehingga, ruang lingkup kegiatan usaha PT PII menjadi lebih luas, tidak hanya terbatas pada penjaminan, tetapi juga dapat melakukan pendampingan, baik dari tahap penyiapan hingga pelaksanaan transaksi.

Pada tahun 2020, untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan penjaminan Pemerintah yang semakin meningkat dan dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara termasuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai akibat pandemi Covid-19, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur ("PP 55/2020"). Melalui PP 55/2020 ini, Pemerintah memberikan perluasan mandat kepada PT PII sehingga maksud dan tujuan usaha PT PII menjadi lebih luas, yaitu:

1. Memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) di bidang infrastruktur;
2. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan Pemerintah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional; dan
3. Memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah.

Perluasan mandat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan Anggaran Dasar PT PII. Melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 497/KMK/06/2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia ("KMK 497/2020"), Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama, menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT PII yang mencakup perubahan maksud dan tujuan Perseroan, kegiatan usaha Perseroan, serta penambahan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp20 triliun.

Keputusan tersebut kemudian dinyatakan dalam Akta No. 14 tanggal 19 November 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., serta telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0077464. AH.01.02.Tahun 2020 pada tanggal 19 November 2020.

Implementation of Public Private Partnership Project Transactions with Business Entities in Infrastructure Provision. Thus, the scope of IIGF's business activities is expanded, no longer limited to guarantees, but also assistance, both in the preparation stage and the transaction phase.

In 2020, to support Government policy to fulfill the increasing need for sovereign guarantees and support state financial policies including the National Economic Recovery (PEN) program as a result of the Covid-19 pandemic, the Government issued Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 55 of 2020 on the Second Amendment to the Government Regulation No. 35 of 2009 concerning the State Capital Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Infrastructure Guarantee Sector ("PP 55/2020"). Pursuant to PP 55/2020, the Government provides an expanded mandate to IIGF, making IIGF's business and objectives broader:

1. Providing Sovereign Guarantee in the infrastructure sector;
2. Conducting activities related to the Sovereign Guarantee implementation, as well as other activities related to the project development to support the national economy; and
3. Providing Sovereign Guarantees for financing in sectors other than infrastructure, in accordance with government assignments

The mandate expansion was then followed up with amending IIGF's Articles of Association. Based on the Minister of Finance Decree No. 497/KMK/06/2020 concerning the Amendment to the Articles of Association of the Limited Liability Company (Persero) Indonesia Infrastructure Guarantee Fund ("KMK 497/2020"), the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, representing the Government of the Republic of Indonesia as the Main Shareholder, approved the amendment to the Articles of Association of IIGF, which includes changes to the Company's goals and objectives, the Company's business activities, and additional authorized capital for the Company amounted to Rp20 trillion.

This Decree was then ratified in the Deed No. 14 dated 19 November 2020, executed before Notary Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., and has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to Decree No. AHU-0077464.AH.01.02.Tahun 2020 dated 19 November 2020.

Selain itu, di tahun 2020, Pemerintah Republik Indonesia juga membuat beberapa peraturan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan dampak pandemi Covid-19, yang memiliki dampak pada kegiatan usaha PT PII. Peraturan-peraturan penting tersebut antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau untuk Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional ("PP 23/2020");
2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau untuk Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional ("PP 43/2020");

In addition, in 2020, The Government of the Republic of Indonesia has also issued several regulations to implement programs addressing the impacts of the Covid-19 pandemic, which affected IIGF's business activities. These important regulations include:

1. Government Regulation No. 23 of 2020 concerning the Implementation of the National Economic Recovery Program to Support State Financial Policy for Handling the Covid-19 Pandemic and/or Addressing Threats to National Economy Stability and/or Financial System Stability as well as the National Economy Rescue ("PP 23/2020");
2. Government Regulation No. 43 of 2020 on the Amendment to the Government Regulation No. 23 of 2020 concerning the National Economic Recovery Program to Support State Financial Policy for Handling the Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic and/or Addressing Threats to National Economy Stability and/or Financial System Stability as well as the National Economy Rescue ("PP 23/2020");

3. Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah kepada Pelaku usaha Korporasi melalui Badan usaha Penjaminan yang ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PMK 98/2020");
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.08/2020 tentang Penugasan Kepada PT PII untuk Melaksanakan Dukungan Loss Limit Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("KMK 523/2020"); dan
5. Keputusan Menteri Keuangan No. 522/KMK.08/2020 tentang Penugasan Kepada PT PII dalam Melaksanakan Penjaminan Bersama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("KMK 522/2020").

Implementasi perluasan mandat dan penugasan PT PII dimulai dengan melakukan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang dirumuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 21 Desember 2020. Keputusan Pemegang Saham pada RUPSLB telah menyetujui dan mengesahkan perubahan RKAP PT PII Tahun Buku 2020. Kemudian, hasil keputusan RUPSLB tersebut telah dituangkan dalam Akta No. 20 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Dari sisi kapasitas keuangan, menindaklanjuti peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp20 triliun, pada tanggal 30 Desember 2020 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan (Persero) PT PII ("PP 79/2020") yang menjadi dasar tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT PII sebesar Rp1,57 triliun. Penambahan PMN tersebut merupakan bentuk dukungan kapasitas dari Pemerintah kepada PT PII dalam rangka pelaksanaan program PEN serta mendorong perekonomian nasional melalui penugasan pemerintah kepada PT PII. Penambahan PMN tersebut telah dicatatkan sebagai modal disetor PT PII berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 61/KMK.06/2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT PII ("KMK 61/2021").

3. Minister of Finance Regulation No. 98/PMK.08/2020 concerning the Procedures for Sovereign Guarantees to Corporate Business Entities through appointed Guarantee Business Entity to Implement National Economic Recovery Program ("PMK 98/2020");
4. Minister of Finance Decree No. 523/KMK.08/2020 concerning the Assignment to IIGF for the Implementation of Sovereign Guarantee Loss Limit Support to Carry Out the National Economic Recovery Program ("KMK 523/2020"); and
5. Minister of Finance Decree No. 522/KMK.08/2020 concerning the Assignment to IIGF for the Implementation of Joint Guarantees with Indonesian Eximbank for Corporate Entrepreneurs to Carry Out the National Economic Recovery Program ("KMK 522/2020").

Implementation of the expansion of IIGF's mandate and assignments began with the adjustments to the Company's Work Plan and Budget (WP&B) which were formulated through the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on 21 December 2020. The Shareholders' Resolution at the EGMS approved and ratified the changes to IIGF's WP&B for the 2020 Fiscal Year. Subsequently, the resolutions of the EGMS were set forth in Deed No. 20 dated December, 30, 2020 executed before Notary Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

In terms of financial capacity, following up on the increase in the Company's authorized capital to Rp20 trillion, on 30 December 2020, Government Regulation No. 79 of 2020 on the Additional State Equity Participation of the Republic of Indonesia to the Authorized Capital of the Company (Persero) IIGF ("PP 79/2020") was issued, which is the basis for additional State Equity Participation (PMN) to IIGF amounting to Rp1.57 trillion. The PMN addition is a form of capacity support from the Government to IIGF to implement PEN program, and encourage the national economy through government assignments to IIGF. The additional PMN has been recorded as paid-up capital of IIGF based on Minister of Finance Decree No. 61/KMK.06/2021 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia to the Authorized Capital and Amendment to the Articles of Association of the Limited Liability Company (Persero) IIGF ("KMK 61/2021").

Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perseroan dan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan proyek infrastruktur Pemerintah, maka pada tanggal 12 Desember 2022 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara PT PII Tahun Anggaran 2022.

To improve the capital structure, enhance the Company's business capacity, and encourage the acceleration of the development of Government infrastructure projects, on 12 December 2022, Government Regulation No. 53 of 2022 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia to the Authorized Capital of the Limited Liability Company (Persero) Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, was issued. The Addition of State Equity Participation (PMN) to the authorized capital of Limited Liability Company (Persero) Indonesia Infrastructure Guarantee Fund originates from the State Budget for the 2022 Fiscal Year, as re-established in the Details of IIGF's State Budget for the 2022 Fiscal Year.

Selanjutnya pada tahun 2024, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah Untuk Pembiayaan Infrastruktur Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dan/Atau Skema Pembiayaan Lainnya ("PMK 68/2024").

Further, in 2024, the Ministry of Finance issued the Minister of Finance Regulation No. 68 of 2024 on Government Support for Infrastructure Financing through Public Private Partnership and/or Other Financing Schemes ("PMK 68/2024").

PT PII sebagai salah satu *Special Mission Vehicles* (SMV) Kementerian Keuangan RI, hingga 31 Desember 2024, telah menjamin 53 proyek yang terdiri dari 45 proyek penjaminan infrastruktur dengan skema KPBU dan non-KPBU serta 8 proyek penjaminan non infrastructure. Total nilai investasi proyek infrastruktur (skema KPBU dan non-KPBU) adalah sebesar Rp539 triliun, dengan jumlah eksposur atas proyek yang dijamin sebesar Rp100 triliun dan *gearing ratio* 6,1 kali.

IIGF, as one of the Special Mission Vehicles (SMV) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, has guaranteed 53 projects as of 31 December 2024, consisting of 45 infrastructure guarantee projects with PPP and non-PPP schemes, and 8 non-infrastructure guarantee projects. The total investment value of infrastructure projects (PPP and non-PPP schemes) is Rp539 trillion, with a total exposure to guaranteed projects of Rp100 trillion and a gearing ratio of 6.1 times.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA DAN STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN
INFORMATION ON CHANGES IN THE COMPANY'S NAME AND LEGAL STATUS

Sejak didirikan pada 30 Desember 2009 melalui Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor 29, Perseroan tidak pernah mengalami perubahan nama maupun status badan hukum.

Since its establishment on 30 December 2009 via the Deed of Establishment of the Company (Persero) Indonesia Infrastructure Guarantee Fund No. 29, the Company has never changed its name or legal entity status.

JEJAK LANGKAH
MILESTONES

2009

Pembentukan Perseroan
Company's Establishment

Pada 30 Desember 2009
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) resmi didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia sebesar Rp1 triliun sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.
On 30 December 2009, Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (Persero) was officially established by the Government of the Republic of Indonesia as a State-Owned Enterprise (SOE) through State Equity Participation of the Republic of Indonesia amounting to Rp1 trillion, in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 35 of 2009 on the State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Infrastructure Guarantee Sector.

2010

Peresmian Operasional Perseroan
Inauguration of the Company's Operations

Pada 11 Mei 2010 Menteri Keuangan melakukan peresmian PT PII yang menandai dimulainya operasional Perseroan dengan mandat menyediakan penjaminan bagi proyek-proyek infrastruktur berskema KPBU sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
On 11 May 2010, the Minister of Finance inaugurated IIGF, which marked the commencement of the Company's operations with the mandate to provide guarantees for PPP infrastructure projects as one of the efforts to accelerate infrastructure development in Indonesia.

Perpres No. 78/2010 dan PMK 260/2010
Presidential Decree No. 78/2010 and PMK 260/2010

Pada 21 Desember 2010 diterbitkan Perpres No. 78/2010 dan 31 Desember 2010 diterbitkan PMK No. 260/2010 yang menjadi pedoman bagi Perseroan untuk menjamin proyek infrastruktur dan mengokohkan keberadaan Perseroan sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI).
On 21 December 2010, Presidential Decree No. 78/2010 was issued. On 31 December 2010, PMK No. 260/2010 was also issued. Both regulations serve as the foundation for the Company in providing guarantees for infrastructure projects and strengthening its role as an Infrastructure Guarantee Agency (IGA)

Perpres No. 88/2010
Presidential Decree No. 88/2010

Pemerintah RI menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) di IIGF sebesar Rp1 Triliun, merujuk pada PP No.88/2010.
The Government of Indonesia increased the State Equity Participation (PMN) in IIGF by Rp1 trillion, with reference to PP No. 88/2010.

2011

MOU antara Perseroan dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
MOU between the Company and the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

Pada 24 Januari 2011 dilaksanakan penandatanganan MOU antara Perseroan dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam rangka mempromosikan investasi infrastruktur melalui berbagai kegiatan bersama.
On 24 January 2011, an MOU was signed between the Company and the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) to promote infrastructure investment via various joint activities.

Acuan Alokasi Risiko
Risk Allocation References

Pada 31 Maret 2011 Perseroan menerbitkan Dokumen Acuan Alokasi Risiko Edisi Pertama yang berisi acuan mengenai kategori dan distribusi risiko infrastruktur yang akan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur dengan skema KPBU.
On 31 March 2011, the Company issued the First Edition of the Risk Allocation Reference Document, which provides guidelines regarding the categories and distribution of infrastructure risks to be used as a reference by parties involved in PPP scheme infrastructure projects.

Penandatanganan Penjaminan Central Java Power Plant (CJPP)

Signing of Guarantee for the Central Java Power Plant (CJPP)

Pada 6 Oktober 2011 Perseroan menandatangani Perjanjian Penjaminan untuk proyek Central Java Power Plant (CJPP) 2 x 1.000 MW di Batang, Jawa Tengah. Proyek ini merupakan proyek dengan skema KPBU pertama yang berhasil diwujudkan oleh Pemerintah dengan menggunakan fasilitas penjaminan bersama oleh Perseroan dan Kementerian Keuangan RI.

On 6 October 2011, the Company signed a Guarantee Agreement for the 2 x 1,000 MW Central Java Power Plant (CJPP) project in Batang, Central Java. This project is the first PPP project that was successfully realized by the Government using joint guarantee facilities by the Company and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

2012

Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) PT PII

Addition of State Capital Participation (PMN) of IIGF

Pada tanggal 10 Agustus 2012, PT PII kembali menerima penambahan PMN dengan jumlah sebesar Rp 1 triliun melalui PP No. 68/2012.

On 10 August 2012, IIGF received additional State Capital Participation (PMN) of Rp1 trillion pursuant to the Government Regulation No. 68/2012.

IIGF Institute

Peluncuran IIGF Institute dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perseroan dengan 3 (tiga) perguruan tinggi yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gadjah Mada tentang program peningkatan pemahaman dan kapasitas pemangku kepentingan terhadap penyediaan infrastruktur.

Launching of the IIGF Institute and Signing of a Memorandum of Understanding between the Company and three (3) universities, i.e., the Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, and Gadjah Mada University, regarding a program to increase stakeholders' understanding and capacity on infrastructure provision.

2013

Peningkatan Kapitalisasi Penjaminan dan Pengakuan Peringkat Kredit

Guarantee Capitalization Increase and Credit Rating Recognition

Pada awal tahun 2013 Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman dari *World Bank* senilai USD25 juta dan implementasi *Co-Guarantee* dengan MIGA senilai USD50 juta untuk peningkatan kapasitas penjaminan. Di samping itu Perseroan juga mendapatkan Peringkat Kredit BBB- (*outlook* stabil) dari Fitch Rating, lembaga pemeringkat keuangan internasional, setara dengan peringkat Pemerintah Indonesia yang menunjukkan pengakuan atas kapasitas dan kinerja keuangan Perseroan.

In early 2013, the Company obtained a loan from the World Bank amounting to USD25 million and implemented a Co-Guarantee with MIGA amounting to USD50 million to increase guarantee capacity. In addition, the Company also received a BBB- (stable outlook) Credit Rating from Fitch Rating, an international financial rating agency, equivalent to the Government of Indonesia's rating, which recognized the Company's financial capacity and performance.

2014

Kerja sama dengan Universitas Sriwijaya dan Universitas Hasanuddin

Collaboration with Sriwijaya University and Hasanuddin University

Pada 18 Agustus 2014 dan 17 Oktober 2014 Perseroan melalui IIGF Institute menandatangani Nota Kesepahaman dengan Universitas Sriwijaya dan Universitas Hasanuddin, untuk kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, peningkatan kapasitas serta kemitraan dalam bina lingkungan, sosial dan masyarakat.

On 18 August 2014 and 17 October 2014, the Company, via the IIGF Institute, signed a Memorandum of Understanding with Sriwijaya University and Hasanuddin University, for cooperation in the fields of education, research, community service, capacity building, and partnerships in environmental, social, and community development.

2015

Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015

Presidential Regulation No. 38 of 2015

Pada 20 Maret 2015 diterbitkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagai upaya memperluas sektor proyek infrastruktur berskema KPBU yang dapat dijamin Perseroan menjadi 19 sektor termasuk sektor infrastruktur sosial.

On 20 March 2015, Presidential Regulation No. 38 of 2015 concerning the Public Private Partnership in Infrastructure Provision was issued, as an effort to expand the sectors of PPP infrastructure projects eligible for the Company's guarantees to 19 sectors, including social infrastructure sectors.

PLTU Batang Jawa Tengah (CJPP)

SPP Batang Central Java (CJPP)

Pada 28 Agustus 2015 dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan proyek PLTU Batang Jawa Tengah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo beserta Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Batang, PT PLN, Perseroan dan investor pengembang. Proyek ini merupakan proyek KPBU sektor listrik pertama yang akan memperoleh penjaminan dari Perseroan.

On 28 August 2015, President Joko Widodo did the groundbreaking for the construction of the Central Java Batang SPP project, assisted by the Minister of Finance, the Minister of SOEs, Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning, Governor of Central Java, Regent of Batang, PT PLN, the Company, and developer investors. This project was the first PPP project in the electricity sector that received guarantees from the Company.

Pembentukan UNIID

UNIID Establishment

Pada 16 Desember 2015 Perseroan melalui IIGF Institute memfasilitasi pembentukan Jaringan Kerja Antar Perguruan Tinggi untuk Pengembangan Infrastruktur atau University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID). Pembentukan jaringan ini menjadi forum bagi para akademisi untuk berkontribusi mendorong pengembangan infrastruktur nasional.

On 16 December 2015, the Company, via the IIGF Institute, facilitated the establishment of the University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID). The establishment of this network serves as a platform for academics scholars to actively support and promote the advancement of national infrastructure development.

2016

Proyek Palapa *Ring* Paket Barat
Western Package Palapa Ring

Pada 29 Februari 2016 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek Palapa *Ring* Paket Barat oleh Perseroan dan PT Palapa Ring Barat selaku Badan Usaha, dan antara Perseroan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku PJPK. Pada 25 Juli 2016 dilaksanakan *Financial Close* Proyek Palapa *Ring* Paket Barat.
On 29 February 2016, the Guarantee Agreement and Recourse Agreement for the Western Package Palapa Ring project were signed by the Company and PT Palapa Ring Barat as the Business Entity, and between the Company and the Ministry of Communication and Information Technology as the GCA. On 25 July 2016, the Financial Close for Western Package Palapa Ring Project was carried out.

Proyek Palapa *Ring* Paket Tengah
Central Package Palapa Ring

Pada 4 Maret 2016 dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek Palapa *Ring* Paket Tengah oleh Perseroan dengan PT Len Telekomunikasi Indonesia selaku Badan Usaha dan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku PJPK. Pada 29 September 2016 dilaksanakan *Financial Close* Proyek Palapa *Ring* Paket Tengah.
On 4 March 2016, the Guarantee Agreement and Recourse Agreement for the Central Package Palapa Ring project were signed by the Company and PT Len Telekomunikasi Indonesia as the Business Entity, and the Ministry of Communication and Information Technology as the GCA. On 29 September 2016, the Financial Close for Central Package Palapa Ring Project was carried out.

Penandatanganan Perjanjian Penjaminan 4 Jalan Tol
Signing of Guarantee Agreement for 4 Toll Roadsl

Perseroan menandatangani perjanjian penjaminan 4 (empat) proyek di sektor Jalan Tol yaitu Jalan Tol Batang- Semarang, Balikpapan- Samarinda, Pandaan-Malang dan Manado-Bitung.
The Company signed guarantee agreements for four (4) projects in the Toll Road sector, i.e., Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang, and Manado-Bitung Toll Roads.

Proyek SPAM Umbulan
SPAM Umbulan

Pada 21 Juli 2016 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Perseroan dengan PT Meta Adhya Tirta dan Perjanjian Regres antara Perseroan dengan Gubernur Jawa Timur dalam rangka menjamin Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. Pada 30 Desember 2016 dilaksanakan *Financial Close* Proyek SPAM Umbulan.
On 21 July 2016, the Company signed a Guarantee Agreement with PT Meta Adhya Tirta, and a Resource Agreement with the Governor of East Java to guarantee the Umbulan Drinking Water Supply System (SPAM) Project. On 30 December 2016, the SPAM Umbulan Project reached Financial Close.

Proyek Central Java Power Plant (CJPP)
Central Java Power Plant (CJPP) Project

Pada 6 Juni 2016 telah dicapai tahap *financial close* untuk proyek CJPP yang berlokasi di Batang Jawa Tengah.
On 6 June 2016, CJPP project at Batang, Central Java, reached financial close.

Perluasan Mandat Perseroan
Company's Mandate Expansion

Pada 7 November 2016 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur. Diterbitkannya perubahan Peraturan ini memperluas mandat Perseroan untuk dapat menjamin proyek-proyek infrastruktur di luar skema KPBU.
On 7 November 2016, Government Regulation No. 50 of 2016 on the Amendment to the Government Regulation No. 35 of 2009 concerning the State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Infrastructure Guarantee Sector. The issuance of amendment to this Regulation expands the Company's mandate to be able to guarantee infrastructure projects outside the PPP scheme.

2017

Penandatanganan Perjanjian Penjaminan 6 Jalan Tol

Signing of Guarantee Agreement for 6 Toll Roads

Pada 22 Februari 2017 dan Desember 2017 Perseroan menandatangani perjanjian penjaminan sejumlah total 6 (enam) proyek Jalan Tol yaitu: (1) Cileunyi-Sumedang-Dawuan; (2) Serang-Panimbang; (3) Jakarta- Cikampek II Elevated (4); Krian-Legundi-Bunder-Manyar; (5) Probolinggo- Banyuwangi; dan (6) Jakarta-Cikampek II Selatan.

On 22 February 2017 and December 2017, the Company signed six (6) guarantee agreements for Toll Roads projects: (1) Cileunyi-Sumedang-Dawuan; (2) Serang-Panimbang; (3) Jakarta-Cikampek II Elevated (4); Krian-Legundi-Bunder-Manyar; (5) Probolinggo-Banyuwangi; and (6) Jakarta-Cikampek II Selatan.

2018

Penjaminan Proyek SPAM Bandar Lampung

SPAM Bandar Lampung Project Guarantee

Pada 14 Februari 2018 Perseroan menandatangani Perjanjian Penjaminan dan Regres proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung.

On 14 February 2018, the Company signed a Guarantee and Recourse Agreements for the Bandar Lampung Drinking Water Supply System (SPAM) project.

Penjaminan Proyek SPAM Semarang Barat

SPAM West Semarang Project Guarantee

Pada 23 November 2018 Perseroan menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Air Semarang Barat dan Perjanjian Regres dengan PDAM Tirta Moedal untuk Proyek SPAM Semarang Barat.

On 23 November 2018, the Company signed a Guarantee Agreement with PT Air Semarang Barat and a Recourse Agreement with PDAM Tirta Moedal for the SPAM West Semarang Project.

Penjaminan Proyek KEK Mandalika

Mandalika SEZ Project Guarantee

Pada 28 Desember 2018 Perseroan menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) sehubungan dengan Penjaminan Pinjaman Proyek Pembangunan Fasilitas Infrastruktur Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok.

On 28 December 2018 The Company signed a Guarantee Agreement with PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) in relation to the Loan Guarantee for the Infrastructure Facility Development Project in the Mandalika Special Economic Zone, Lombok.

Penugasan dan Pelaksanaan Fasilitas Proyek KPBU

Assignment and Implementation of PPP Project

Perseroan mendapatkan mandat dari Kementerian Keuangan untuk melaksanakan fasilitas dalam rangka Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi pada Proyek KPBU, 1) Perkeretaapian Umum Makassar-Parepare yang dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan, 2) Jalan Lintas Timur Sumatra Selatan, 3) Jalan Lintas Timur Riau yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR, dan 4) Rumah Sakit Kanker Dharmais yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.

The Company received a mandate from the Ministry of Finance to implement facilities for Project Development Facility of PPP Projects, 1) Makassar - Parepare Railway Train developed by the Ministry of Transportation, 2) South Sumatra East Cross Road, 3) Riau East Cross Road developed by Ministry of Public Works and Housing, and 4) Dharmais Cancer Hospital, developed by the Ministry of Health.

2019

Penjaminan pada Proyek KPBU Kereta Api Makassar – Parepare

Guarantee for the Makassar - Parepare Railway Train PPP Project

Pada 5 April 2019 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku PJPK dengan PT Celebes Railway Indonesia (CRI) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP). Proyek ini berskema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di sektor transportasi perkeretaapian sekaligus merupakan proyek KPBU pertama sektor transportasi di lingkup Kementerian Perhubungan.

On 5 April 2019, a Cooperation Agreement was signed between the Ministry of Transportation c.q. Directorate General of Railways as GCA, and PT Celebes Railway Indonesia (CRI) as the Implementing Business Entity (BUP). This project is the first Public Private Partnership (PPP) in the railway transportation sector within the scope of the Ministry of Transportation.

Penjaminan pada Proyek KPBU Satelit Multifungsi Republik Indonesia

Guarantee for PPP Project of Multifunctional Satellite of the Republic of Indonesia

Pada 3 Mei 2019 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Perseroan dengan PT Satelit Nusantara Tiga sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) dan Perjanjian Regres proyek KPBU Satelit Multifungsi Republik Indonesia (SATRIA) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI sebagai PJPK. SATRIA merupakan proyek KPBU keempat di sektor telekomunikasi yang diberikan penjaminan pemerintah melalui Perseroan setelah Palapa Ring Paket Barat, Tengah dan Timur yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar Indonesia.

On 3 May 2019, the Company signed a Guarantee Agreement with PT Satelit Nusantara Tiga as the Implementing Business Entity (BUP) and the Recourse Agreement of the Multifunction Satellite for the Republic of Indonesia PPP project (SATRIA) with the Minister of Communication and Information Technology as the GCA. SATRIA is the fourth PPP project in the telecommunications sector to be provided a sovereign guarantee through the Company, after the Western, Central and Eastern Packages Palapa Ring, with the objective to improve connectivity in Indonesia's Disadvantaged, Frontier, and Outermost regions.

Penjaminan Proyek KPBU Ruas Jalan Tol Semarang – Demak

Semarang-Demak Toll Road PPP Project Guarantee

Pada 23 September 2019 dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Ruas Jalan Tol Semarang-Demak antara Kementerian PUPR selaku PJPK dengan Badan Usaha Pelaksana (BUP) PT Pembangunan Perumahan Semarang- Demak (PPSD) yang merupakan konsorsium dari Konsorsium PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Misi Mulia Metrikal.

On 23 September 2019, a cooperation agreement for the Public Private Partnership (PPP) project for the Semarang-Demak Toll Road section was signed between the Ministry of PUPR as GCA and the Implementing Business Entity (BUP), PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak (PPSD), which is a Consortium of PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, and PT Misi Mulia Metrikal.

2020

Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit 2

Construction of Dieng Unit 2 and Patuha Unit 2 Geothermal Power Plant (GPP) Project

Pada tanggal 19 Agustus 2020 PT PII dan PT Geo Dipa Energi (Persero) ("GeoDipa") menandatangani perjanjian dengan Asian Development Bank (ADB) untuk proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit 2, yang meliputi Penandatanganan Perjanjian Pinjaman/ antara GeoDipa dan ADB, Penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan dengan ADB, dan Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan GeoDipa.

On 19 August 2020, IIGF and PT Geo Dipa Energi (Persero) ("GeoDipa") signed an agreement with the Asian Development Bank (ADB) for the Dieng Unit 2 and Patuha Unit 2 Geothermal Power Plants (GPPs) Development projects, which include the Signing of the Loan Agreement between GeoDipa and ADB, the Signing of the Guarantee Agreement between the Ministry of Finance and ADB, and the Signing of the Guarantee Agreement between IIGF and GeoDipa.

Proyek KPBU Jalan Tol Jogja Solo

Jogja Solo Toll Road PPP Project

Pada tanggal 9 September 2020, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek antara Kementerian PUPR selaku PJPK dengan PT Jasamarga Jogja Solo (dahulu PT Jogjasolo Marga Makmur) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP). Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan BUP dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan PJPK.

On 9 September 2020, a Project Cooperation Agreement was signed between the Ministry of PUPR as GCA, and PT Jasamarga Jogja Solo (previously PT Jogjasolo Marga Makmur) as the Implementing Business Entity (BUP). On the same occasion, IIGF also signed a Guarantee Agreement with the Implementing Business Entity, and a Recourse Agreement with the GCA.

Perluasan Mandat Perseroan

Company's Mandate Expansion

Pada 30 September 2020 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2020 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur. Diterbitkannya perubahan Peraturan ini memperluas maksud dan tujuan PT PII tidak lagi terbatas pada penjaminan pemerintah (*sovereign guarantee*) di bidang infrastruktur, namun juga mencakup penjaminan pemerintah (*sovereign guarantee*) dalam pembiayaan di bidang lainnya berdasarkan penugasan pemerintah dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan pemerintah serta kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek yang mendukung perekonomian nasional.

On 30 September 2020, Government Regulation No. 55 of 2020 on the second amendment to the Government Regulation No. 35 of 2009 on the State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Infrastructure Guarantee Sector. The issuance of the amendment to this Regulation expanded IIGF's goals and objectives, so that the Company is no longer limited to sovereign guarantees in the infrastructure sector, but includes sovereign guarantees in financing in other sectors based on government assignments, and carries out activities related to the sovereign guarantees and other activities related to the projects that support the national economy.

Proyek KPBU Jalan Tol Jogja Bawen

Jogja Bawen Toll Road PPP Project

Pada tanggal 13 November 2020, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek antara Kementerian PUPR selaku PJPK dengan PT Jasamarga Jogja Bawen selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP). Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan BUP dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan PJPK.

On 13 November 2020, a Project Cooperation Agreement was signed between the Ministry of Public Works and Housing as GCA, and PT Jasamarga Jogja Bawen as the Implementing Business Entity (BUP). On the same occasion, IIGF also signed a Guarantee Agreement with the Implementing Business Entity, and a Recourse Agreement with the GCA.

2021

Penjaminan Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi Kelistrikan di Jawa Timur dan Bali

Construction of East Java and Bali Electricity Distribution Network Project Guarantee

Pada 10 Februari 2021 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Perseroan atas Pinjaman Langsung (*Direct Lending*) dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) kepada PT PLN untuk pembiayaan proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Jawa Timur dan Bali.

On 10 February 2021, the Company signed a Sovereign Guarantee Agreement with the Ministry of Finance for Direct Lending facility from the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) to PT PLN, for the financing of the East Java and Bali Distribution Network Development Project.

Penjaminan Pemerintah Untuk Pelaku Korporasi

Sovereign Guarantee for Corporate Entrepreneurs

Pada 16 Februari 2021 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Korporasi yang dilakukan oleh Direktur Utama Perseroan dan Direktur Eksekutif LPEI.

On 16 February 2021, the Company, represented by the President Director, signed a Cooperation Agreement related to the Implementation of Sovereign Guarantees for Corporate Entities was carried out by the President Director of the Company and the Executive Director of Indonesia Eximbank.

Penjaminan Proyek KPBU *Unsolicited* SPAM Jatiluhur I

Unsolicited SPAM Jatiluhur I PPP Project Guarantee

Pada 18 Februari 2021 dilaksanakan kegiatan seremonial penandatanganan perjanjian terkait penjaminan Pemerintah untuk Proyek SPAM Jatiluhur I yang merupakan Proyek KPBU *Unsolicited*.

On 18 February 2021, a ceremonial signing event was held for the Government Guarantee Agreement concerning the Jatiluhur I Water Supply System (SPAM) Project, an Unsolicited PPP initiative.

Penjaminan Proyek KPBU SPAM Regional Umbulan di Pasuruan Jawa Timur

SPAM Umbulan PPP Project Guarantee in Pasuruan, East Java

Pada 18 Februari 2021 dilaksanakan kegiatan seremonial penandatanganan perjanjian terkait penjaminan Pemerintah untuk Proyek SPAM Umbulan di Pasuruan, Jawa Timur

On 18 February 2021, a ceremonial signing was conducted to formalize the Government Guarantee Agreement for the Umbulan Water Supply System (SPAM) Project, in Pasuruan, East Java.

Proyek Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatra Selatan

Preservation of The East Sumatera Cross Road at South Sumatera Province (Jalintim) Project

Pada 22 Februari 2021 dilaksanakan *Financial Close* Proyek KPBU Preservasi Jalintim Sumsel yang merupakan proyek KPBU pertama di sektor Jalan Non-tol di Indonesia dan merupakan proyek KPBU pertama yang mendapatkan pendanaan Syariah.

On 22 February 2021, the Financial Close was achieved for the South Sumatra Eastern Cross Road (Jalintim Sumsel) Preservation PPP Project, which is the first PPP project in Indonesia's non-toll road sector and the first PPP project to receive Sharia-compliant financing.

Penjaminan Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatra di Provinsi Riau

Preservation of The East Sumatera Cross Road at Riau Province

Pada 12 April 2021 Perseroan resmi memberikan penjaminan pada Proyek KPBU Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatra di Provinsi Riau yang merupakan proyek kedua di sektor jalan Non-tol di Indonesia.

On 12 April 2021, the Company officially provided guarantees for the Preservation of The East Sumatera Cross Road PPP Project at Riau Province, which is the second project in the non-toll road sector in Indonesia.

Penjaminan Proyek KPBU Unsolicited SPAM Karian – Serpong (*Unsolicited*)

SPAM Karian-Serpong Unsolicited PPP Project Guarantee (Unsolicited)

Pada 29 April 2021 dilaksanakan penandatanganan perjanjian terkait penjaminan Pemerintah untuk proyek SPAM Karian – Serpong dimana menjadi proyek ke-6 di sektor Air Minum yang diberikan penjaminan oleh Perseroan.

On 29 April 2021, the Company signed an agreement regarding the sovereign guarantee for the Karian-Serpong SPAM project, which is the 6th project in the Drinking Water sector to be given a guarantee by the Company.

Penjaminan Proyek Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa (*Unsolicited*)

Callender Hamilton (CH) Bridge Replacement and/or Duplication Project Guarantee on Java Island (Unsolicited)

Pada 6 Desember 2021 dengan disaksikan langsung oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Perseroan melaksanakan penandatanganan perjanjian terkait penjaminan Pemerintah untuk proyek dengan skema KPBU unsolicited di sektor jalan dan jembatan yaitu proyek Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa.

On 6 December 2021, witnessed directly by the Minister of Public Works and Housing, Basuki Hadimuljono, the Company signed an agreement regarding the Government's guarantee for an unsolicited PPP project in the road and bridge sector, i.e., the Callender Hamilton (CH) Bridge Replacement and/or Duplication project on Java Island.

2022

Penjaminan Proyek KPBU
PPP Project Guarantee

1. Pada tanggal 20 September 2022, dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan terkait dengan Proyek Alat Penerangan Jalan Madiun.
2. Pada tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan terkait dengan Proyek Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJKSB) Bekasi.

1. On 20 September 2022, a guarantee agreement was signed for the Madiun Street Lighting Project.
2. On 31 October 2022, the Company signed a guarantee agreement for the Proving Ground Project of the Bekasi Roadworthiness Testing and Certification Center (BPLJKSB).

Presidensi G20 Indonesia
G20 Indonesia Presidency

Perseroan berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan Presidensi G20 sebagai *co-host* T20 TF8 dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur publik yang berkelanjutan dengan tema "*Stronger Economic Recovery through Inclusive, Resilient, and Greener Infrastructure Investment and Financing*".

The Company actively participates in supporting the G20 Presidency as co-host of T20 TF8 to accelerate economic recovery through the provision of sustainable public infrastructure with the theme "Stronger Economic Recovery through Inclusive, Resilient, and Greener Infrastructure Investment and Financing".

Penjaminan Proyek Non-KPBU
Non-PPP Project Guarantee

1. Pada tanggal 22 April 2022, dilaksanakan penandatanganan perjanjian pelaksanaan penjaminan atas Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I PT Waskita Karya (persero) Tbk.
2. Pada tanggal 19 Mei 2022, dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan terkait Proyek *Sustainable and Reliable Energy Access Program Western and Central Java* (SREAP)
3. Pada tanggal 28 Desember 2022, dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan terkait Proyek Pembangunan PLTU Tahap III (PLTU Timor-1)
4. Pada tanggal 30 Desember 2022, dilaksanakan penandatanganan:
   a. perjanjian penjaminan atas pinjaman PT Industri Kereta Api (Persero);
   b. perjanjian penjaminan atas pinjaman Perusahaan Umum DAMRI;
   c. perjanjian penjaminan atas pinjaman PT Pertamina (Persero);
   d. perjanjian penjaminan atas pinjaman PT LEN Industri (Persero).

1. On 22 April 2022, an agreement was signed for the guarantees of Bond IV and Sukuk Mudharabah I of PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
2. On 19 May 2022, a guarantee agreement was signed for the Western and Central Java Sustainable and Reliable Energy Access Program (SREAP) Project.
3. On 28 December 2022, a guarantee agreement for the SPP Phase III Development Project (SPP Timor-1) was signed.
4 On 30 December 2022, the following signing were carried out:
   a. Guarantee Agreement for the loan of PT Industri Kereta Api (Persero);
   b. Guarantee Agreement for the loan of DAMRI Public Corporation;
   c. Guarantee Agreement for the loan of PT Pertamina (Persero);
   d. Guarantee Agreement for the loan of PT LEN Industry (Persero).

2023

Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi
Project Development Facility

1. Pada tanggal 24 Maret 2023 diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan terkait penugasan khusus PT PII sebagai pelaksana Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara.
2. Pada tanggal 19 Juni 2023 diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait penugasan khusus PT PII sebagai pelaksana dalam Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi Proyek KPBU SPAM Kabupaten Karo;
3. Pada tanggal 31 Agustus 2023 diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait penugasan khusus PT PII sebagai pelaksana dalam Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi Proyek Kapal Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); 4. Pada tanggal 10 November 2023 diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait penugasan khusus PT PII sebagai pelaksana dalam Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi Proyek KPBU SPAM Denpasar.

1. On 24 March 2023, Minister of Finance Decree was issued regarding the special assignment of IIGF as the executor for the Project Development Facility Transactions related to the Utilization and/or Transfer of State-Owned Assets in the Preparation, Development, and Relocation of the National Capital City.
2. On 19 June 2023, Minister of Finance Decree (KMK) was issued regarding the special assignment of IIGF as executor for the Project Development Facility of SPAM Karo Regency PPP Project;
3. On 31 August 2023, Minister of Finance Decree (KMK) was issued regarding the special assignment of IIGF as executor for the Project Development Facility of Vessel Research Project with National Research and Innovation Agency (BRIN); 4. On 10 November 2023, Minister of Finance Decree (KMK) was issued regarding the special assignment of IIGF as executor for the Project Development Facility of SPAM Denpasar PPP Project.

2024

Penjaminan Proyek KPBU
PPP Project Guarantee

1. Pada tanggal 24 Januari 2023, dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan terkait Proyek Tol Akses Patimban.
2. Pada tanggal 12 Oktober 2023, dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan Proyek Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Lombok Barat.
3. Pada tanggal 17 Oktober 2023, dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan terkait Proyek Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir - Ulujami.

1. On 24 January 2023, a guarantee agreement was signed for Patimban Access Toll Road Project.
2. On 12 October 2023, a guarantee agreement was signed for the Public Street Lighting Project in West Lombok Regency.
3. On 17 October 2023, a guarantee agreement was signed for the Jakarta Outer Ring Road (JORR) Cikunir-Ulujami Elevated Toll Project.

Penjaminan Proyek Non-KPBU
Non-PPP Project Guarantee

Pada tanggal 19 Oktober 2023, dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan atas pinjaman PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
On 19 October 2023, a guarantee agreement was signed for the loan of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) for the Government's Food Reserves implementation.

Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi
Project Development Facility

Pada tanggal 2 Agustus 2024 diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan terkait Penugasan Penyiapan Proyek pada Proyek RSUD Wangaya.
On 2 August 2024, the Minister of Finance Decree concerning the assignment of Wangaya Local Hospital was issued.

Penjaminan Proyek KPBU
PPP Project Guarantee

1. Pada tanggal 27 Februari 2024, dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan pada proyek Jalan Tol Kediri - Tulungagung
2. Pada tanggal 3 Juli 2024 telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan pada proyek Jalan Trans Papua ruas Jayapura - Wamena

1. On 27 February 2024, a guarantee agreement was signed for the Kediri - Tulungagung Toll Road project.
2. On 3 July 2024, a guarantee agreement was signed for the Jayapura - Wamena section of the Trans Papua Road project.

Penjaminan Proyek Non-KPBU
Non-PPP Project Guarantee

1. Pada 25 Januari 2024 telah dilaksanakan perjanjian penjaminan atas pinjaman PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI) dari China Development Bank terkait Percepatan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
2. Pada 28 Mei 2024 telah dilaksanakan perjanjian penjaminan atas pinjaman PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT PLN) dari World Bank terkait program *Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification* (ISLE-1)

1. On 25 January 2024, a guarantee agreement was signed for the loan of PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI) from China Development Bank related to the Acceleration of the Jakarta Bandung High Speed Rail Project.
2. On 28 May 2024, a guarantee agreement was signed for the loan of PT Perusahaan Listrik Negara (PTPLN) from the World Bank related to the Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification (ISLE) programme.

PMK 68 Tahun 2024
FMD 68 Year 2024

Pada 18 Oktober 2024 telah diterbitkan PMK 68 Tahun 2024 yang menjadi pedoman Perseroan dalam memberikan penjaminan atas proyek-proyek infrastruktur khususnya yang menggunakan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
On 18 October 2024, PMK 68 of 2024 was issued, which became the company's guideline in providing guarantees for infrastructure projects, specifically the ones using Public Private Partnership (PPP) Scheme.

LOGO PERUSAHAAN
CORPORATE LOGO

Logo PT PII mencerminkan identitas Perseroan dan nilai-nilai inti yang diusung oleh Peseroan. Sejalan dengan hal tersebut, desain logo ini diciptakan dengan ide dasar yang merujuk pada kerajinan anyaman yang merepresentasikan mandat PT PII untuk menjadi jembatan penggerak percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

IIGF's logo reflects the Company's identity and core values. In line with this, the logo design was designed based on the concept of traditional wicker craft, symbolizing PT PII's mandate to serve as a bridging force in accelerating infrastructure development in Indonesia.

PT PII

MAKNA LOGO
LOGO MEANING

Warna Biru pada logo mengandung makna
The Blue Color in the logo means

Trust (terpercaya), *responsibility* (tanggung jawab) dan *strength* (kekuatan). Warna tersebut merepresentasikan PT PII sebagai perusahaan yang terpercaya, bertanggung jawab dan profesional untuk mewujudkan visi PT PII.

Trust, responsibility, and strength. The color represents IIGF as a trusted, responsible, and professional company to actualize IIGF's vision.

Warna Hijau pada logo mengandung makna
The Green Color in the logo means

Growth (pertumbuhan), *financial* (keuangan), *harmony* (keseimbangan, keselarasan) dan *environment* (lingkungan; masyarakat). Warna tersebut sejalan dengan misi PT PII.

Growth, financial, harmony, and environment. The color is in line with IIGF's mission.

VISI DAN MISI PERUSAHAAN
CORPORATE VISION AND MISSION

Visi
Vision

Menjadi entitas penggerak yang terpercaya dalam mendukung upaya akselerasi pengembangan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan oleh Pemerintah melalui berbagai skema inovatif.

To become the trusted driving entity in supporting the Government's efforts to accelerate infrastructure development and sustainable growth through various innovative schemes.

Misi
Mission

Memastikan percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan dengan memberikan penjaminan dan dukungan lainnya melalui:

1. **Menjalankan peran sebagai alat fiskal Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan melalui pengelolaan risiko dan proses yang transparan dan akuntabel;**
2. **Menyediakan *instrument de-risking*, penjaminan, dan fasilitasi pengelolaan risiko untuk mendukung investasi oleh badan usaha dan pemenuhan pembiayaannya secara berkelanjutan;**
3. **Berperan aktif sebagai bagian dari ekosistem Pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip lingkungan dan sosial;**
4. **Memperkuat kapabilitas, kapasitas organisasi, dan kualitas sumber daya manusia guna mendukung tercapainya visi Perseroan.**

Ensuring the acceleration of equitable and sustainable infrastructure development by providing guarantees and other forms of support by:

1. Performing the role as the Government's fiscal tool in implementing sustainable development through transparent and accountable risk management and processes;
2. Providing de-risking instruments, guarantees, and risk management facilitation to support private sector investment and the fulfillment of their financing in a sustainable manner;
3. Having an active role as part of the sustainable national development ecosystem by adhering to environmental and social principles;
4. Strengthening the capabilities, organizational capacity, and quality of human resources to support the achievement of the Company's vision.

VISI DAN MISI PERUSAHAAN DALAM UPAYA MENDUKUNG KINERJA PERUSAHAAN SECARA BERKELANJUTAN

THE COMPANY'S VISION AND MISSION TO SUPPORT SUSTAINABLE PERFORMANCE

Visi dan misi PT PII mencerminkan komitmen Perseroan untuk mendorong kinerja yang berkelanjutan melalui dukungan terhadap akselerasi pengembangan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sebagai agen penggerak pembangunan nasional, visi PT PII dirancang untuk memastikan keberlanjutan Perseroan, baik dari kinerja ekonomi maupun dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas. Untuk mewujudkan visi tersebut, PT PII melaksanakan berbagai misi yang terfokus pada pencapaian pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan infrastruktur yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masa kini, tetapi juga dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

IIGF's vision and mission reflect the Company's commitment to driving sustainable performance by supporting the acceleration of infrastructure development and sustainable development in Indonesia. As a key driver of national development, IIGF's vision is crafted to uphold the Company's long-term sustainability, encompassing both economic performance and the enhancement of overall community well-being. IIGF implements various missions that focus on achieving equitable and sustainable infrastructure development to actualize this vision. The objective is to create infrastructure that not only meets the current needs, but can also be enjoyed by future generations.

REVIEW ATAS VISI DAN MISI PERUSAHAAN

REVIEW OF THE COMPANY'S VISION AND MISSION

Direksi dan Dewan Komisaris PT PII secara rutin melakukan tinjauan terhadap visi dan misi Perseroan untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Hingga laporan ini diterbitkan, Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa visi dan misi Perseroan tetap relevan dengan dinamika dan perkembangan lingkungan bisnis. Selain itu, visi dan misi tersebut juga selaras dengan arah dan sasaran strategis Perseroan dalam mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

IIGF's Board of Directors and Board of Commissioners regularly review the Company's vision and mission to ensure that they are in line with the predetermined long-term goals. Until this report is published, the Board of Commissioners and Board of Directors have assessed that the Company's vision and mission remain relevant to the dynamics and development of the business environment. In addition, the vision and mission are also in line with the Company's strategic direction and objectives to support sustainable infrastructure development and enhance the community's quality of life.

TATA NILAI DAN BUDAYA PERUSAHAAN
CORPORATE VALUE AND CULTURE

PT PII mengusung tata nilai Perseroan yang dikenal dengan nama **InTIME**, yang meliputi ***Integrity*** (Integritas), ***Teamwork*** (Kerja Sama), ***Think Big*** (Berpikir Besar), ***Mutual Trust*** (Kepercayaan Bersama), dan ***Excellence*** (Keunggulan). Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi budaya Perseroan serta pedoman dalam pengembangan karakter talenta di lingkungan PT PII. Selain itu, nilai-nilai InTIME juga menjadi acuan bagi seluruh karyawan dalam menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme tinggi dan dalam mewakili Perseroan di berbagai kegiatan usaha.

IIGF has the Company's values known as **InTIME**, which includes **Integrity**, **Teamwork**, **Think Big**, **Mutual Trust**, and **Excellence**. These values become the foundation of the Company's culture and guidelines in character development of talents within IIGF. In addition, InTIME is also a reference for all employees in performing their duties with high professionalism and representing the Company in various business activities.

Integritas
Integrity

Berperilaku jujur bekerja dengan standar etika tinggi dan mengutamakan kepentingan publik.
Behaving honestly, working with high ethical standards, and prioritizing public interest.

- Jujur
- Amanah (menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab)
- Honest
- Trustworthy (carrying out duties responsibly)

Kerja Sama
Team Work

Bekerja sebagai tim untuk mencapai tujuan Perseroan.
Working in a team to achieve the Company's objectives.

- Proaktif
- Memberikan nilai tambah
- Proactive
- Providing added value

Berpikiran Luas
Think Big

Berpikir ke depan dengan wawasan yang luas dan berani untuk membuat terobosan yang inovatif.
Thinking ahead with great insight and being brave to make innovative breakthroughs.

- *Visioner*
- Berpikiran terbuka
- Belajar berkelanjutan
- Visionary
- Open-minded
- Continuous learning

Saling Percaya
Mutual Trust

Membangun dan saling menjaga kepercayaan secara konsisten dan berkesinambungan.
Establishing and maintaining mutual trust consistently and continuously.

- Berorientasi untuk kepentingan bersama
- Saling menghargai
- Orientated to the common good
- Mutual respect

Keunggulan
Excellence

Melakukan peningkatan kinerja secara berkelanjutan untuk menjadi yang terunggul.
Continuously improving performance to be the best.

- Memberi hasil kerja terbaik
- Bekerja cerdas dan gigih
- Giving the best work
- Working smart and persistently

PENERAPAN BUDAYA PERUSAHAAN
COMPANY CULTURE IMPLEMENTATION

Budaya Perseroan diterapkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai InTIME ke dalam setiap aspek operasional dan interaksi antar karyawan. Sosialisasi terhadap budaya Perseroan ini dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai program dengan membentuk tim *Culture Squad* di setiap Direktorat untuk melakukan implementasi program budaya, pelaksanaan *Town Hall Meeting*, internalisasi budaya Perseroan dengan membuat *video* InTIME dan sosialisasi tentang Kebijakan Kode Etik Perseroan. Seluruh inisiatif ini bertujuan untuk memastikan setiap karyawan memahami dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam aktivitas sehari-hari para karyawan.

The Company's culture is implemented by integrating InTIME values into every aspect of operations and interactions between employees. The Company disseminates the culture continuously through various programs by establishing Culture Squad teams in each Directorate to implement cultural programs, conducting Town Hall Meetings, internalizing corporate culture by making videos related to InTIME, and disseminating Company's Code of Conduct. These initiatives aim to ensure that every employee understands and implements these values in their daily activities.

BIDANG USAHA DAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN

COMPANY'S BUSINESS SECTOR AND ACTIVITIES

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 35 tertanggal 22 September 2022, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H. Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan dari kegiatan Perseroan adalah untuk:

1. Memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantees*) di bidang infrastruktur;
2. Memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantees*) dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah; dan
3. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan pemerintah serta kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional baik pusat dan daerah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti yang telah diuraikan di atas, Perseroan melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

In accordance with the Company's Articles of Association, As most recently amended by the Statement of Shareholders' Resolutions of the Company No. 35 dated September 22, 2022, made before Arry Supratno, S.H. a Notary in Jakarta, The purposes and objectives of the Company's activities are to:

1. Providing Sovereign Guarantee in the infrastructure sector;
2. Providing Sovereign Guarantees for financing in sectors other than infrastructure, in accordance with government assignments; and
3. Conducting activities related to the Sovereign Guarantee implementation, as well as other activities related to the project development to support the central and local national economy.

The Company conducts the following business activities to achieve the purposes and objectives described above:

No	Kegiatan Usaha yang Dijalankan Business Activities	
1	Pemberian penjaminan terhadap kewajiban finansial pemerintah dalam skema perjanjian kerja sama Pemerintah dan Badan usaha dalam proyek infrastruktur yang mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan kewajiban kontingensi Pemerintah dan meningkatkan kelayakan kredit (*creditworthiness*) proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di bidang infrastruktur.	Providing guarantees for the government's fiscal obligations in the Public Private Partnership (PPP) scheme in infrastructure projects, which shall realize accountability in the management of the Government's contingent obligations and increase the creditworthiness of Public Private Partnership in the infrastructure sector.
2	Pemberian penjaminan terhadap kewajiban finansial pemerintah dalam proyek infrastruktur.	Providing guarantees for government fiscal obligations in infrastructure projects.
3	Pemberian penjaminan atas risiko gagal bayar Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan penugasan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang timbul sebagai akibat dari: • Pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan lembaga keuangan; • Penerbitan surat utang atau obligasi dan/atau instrumen keuangan lainnya.	Providing guarantees for the risk of default by State-Owned Enterprises in accordance with assignments and/or provisions stipulated by the Minister of Finance, which arise as a result of: • Execution of loan agreements with financial institutions; • Issuance of debt securities or bonds and/or other financial instruments.
4	Pemberian penjaminan atas risiko gagal bayar kepada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Pemerintah daerah sesuai dengan penugasan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang timbul sebagai akibat dari: • Pelaksanaan perjanjian-perjanjian dengan lembaga keuangan; • Penerbitan surat utang/obligasi.	Providing guarantees for the risk of default to the Local-Owned and/or State-Owned Enterprises in accordance with assignments and/or provisions stipulated by the Minister of Finance, which arise as a result of: • Execution of agreements with financial institutions; • Issuance of debt securities/bonds.

No	Kegiatan Usaha yang Dijalankan Business Activities	
5	Pemberian penjaminan atas risiko finansial lainnya kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha sesuai dengan penugasan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang timbul sebagai akibat perolehan pembiayaan atau fasilitas mitigasi risiko finansial dalam bentuk selain pinjaman dan surat utang/obligasi.	Providing guarantees for other financial risks to State-Owned Enterprises, Local-Owned Enterprises and/or Private Sectors, in accordance with assignments and/or provisions stipulated by the Minister of Finance, which arise as a result of obtaining financing or financial risk mitigation facilities in forms other than loans and debentures/bonds.
6	Pemberian penjaminan kepada pelaku usaha lainnya sesuai dengan penugasan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.	Providing guarantees to other entrepreneurs in accordance with assignments and/or provisions stipulated by the Minister of Finance.
7	Pemberian jasa konsultasi, penyediaan informasi, fasilitasi perencanaan, penyiapan, dan penyiapan kelayakan, atas proyek atau program serta hal lain terkait mitigasi risiko/pemantauan risiko dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan alokasi risiko dan struktur pembiayaan proyek.	Providing consulting services, information provisions, planning, preparation and feasibility facilitation for projects or programs, as well as other matters related to risk mitigation/risk monitoring and/or activities related to risk allocation and project financing structure.
8	Kerja sama dengan pihak lain termasuk organisasi/lembaga keuangan internasional dalam rangka pelaksanaan pemberian penjaminan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.	Collaboration with other parties including international financial organizations/institutions to implement provision of guarantees as referred to in numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7.
9	Usaha patungan atau penyertaan modal pada badan hukum lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sejenis dengan maksud dan tujuan Perseroan.	Joint ventures or capital investments in other legal entities with the objective and goals that are similar with the Company's objective and goals.
10	Kegiatan lainnya untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Other activities to achieve the Company's goals and objectives in accordance with statutory provisions.

PRODUK DAN JASA PERUSAHAAN
COMPANY'S PRODUCTS AND SERVICES

Beberapa produk dan jasa yang dihasilkan Perseroan adalah sebagai berikut.

1. Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur untuk Proyek KPBU maupun Non-KPBU;
2. Penjaminan Pemerintah terhadap Pinjaman dan Penerbitan Obligasi BUMN untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur;
3. Penjaminan Pemerintah terhadap Pinjaman dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;
4. Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi;
5. Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Some of the products and services generated by the Company are as follows.

1. Sovereign Guarantee in the Infrastructure Sector for PPP and non PPP Projects;
2. Sovereign Guarantee for SOE Loans and Bond Issuance to Finance Infrastructure Provision;
3. Sovereign Guarantee of Loans for the implementation of the Government Food Reserve;
4. Project Development Facility;
5. Sovereign Guarantee for Corporate Business Entity in terms of the National Economic Recovery Program

JENIS SEKTOR YANG DAPAT DIBERIKAN PENJAMINAN

SECTORS THAT CAN BE GUARANTEED

Dalam rangka akselerasi pembangunan infrastruktur Indonesia, PT PII berperan aktif dalam pengembangan proyek-proyek infrastruktur melalui kegiatan penjaminan yang diberikan kepada 22 sektor sebagai berikut.

To accelerate Indonesia's infrastructure development, IIGF plays an active role in developing infrastructure projects through guarantee activities provided to 22 sectors as follows.

- **Air Minum** – Drinking Water
- **Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat** – Centralized Wastewater Management System
- **Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat** – Local Wastewater Management System
- **Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan termasuk Bio Energi** – Oil and gas and renewable energy including Bio Energy
- **Konservasi Energi** – Energy Conservation
- **Pariwisata** – Tourism
- **Kesehatan** – Healthcare
- **Lembaga Pemasyarakatan** – Correctional Facilities
- **Ekonomi Fasilitas Perkotaan** – Urban Facilities Economy
- **Perumahan Rakyat** – Public Housing
- **Transportasi** – Transportation
- **Jalan** – Roadway
- **Sumber Daya Air dan Irigasi** – Water Resource and Irrigation
- **Telekomunikasi dan Informatika** – Telecommunication and Informatics
- **Ketenagalistrikan** – Electricity
- **Sistem Pengelolaan Persampahan dan/atau Limbah Berbahaya dan Beracun** – Waste Management System and/or Hazardous and Toxic Waste
- **Fasilitas Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan** – Education, Research, and Development Facilities
- **Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga, Kesenian, dan Budaya** – Sports, Art, and Cultural Faciities and Infrastructure
- **Kawasan** – Area
- **Bangunan Gedung Negara** – State Building
- **Ekosistem Industri** – Industrial Ecosystem
- **Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai** – Battery-based Electric Motorized Vehicle

GEARING RATIO
GEARING RATIO

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 460 tahun 2022 tentang Penetapan Batas Kemampuan (*Gearing Ratio*) Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dalam Melakukan Kegiatan Penjaminan menetapkan batas kemampuan BUPI yakni PT PII dalam melakukan kegiatan penjaminan (*gearing ratio*) sebesar maksimal 12 (dua belas) kali dari ekuitas BUPI.

Gearing ratio adalah rasio yang membandingkan antara nilai eksposur penjaminan dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki pada saat tertentu untuk mengetahui tingkat pemanfaatan dari ekuitas yang dimiliki dalam melakukan penjaminan. Berdasarkan jumlah eksposur atas penjaminan proyek infrastruktur yang telah dilakukan oleh Perseroan dengan nilai sebesar Rp92.211,76 miliar dan dengan ekuitas sebesar Rp15,10 triliun tanpa memperhitungkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maka *Gearing Ratio* PT PII di akhir tahun 2024 sebesar 6,1 kali.

Pursuant to the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 460 of 2022 concerning the Determination of the Gearing Ratio of Infrastructure Guarantee Agency in Conducting Guarantee Activities, it stipulated the limit of BUPI's ability, i.e., IIGF, in providing guarantee (gearing ratio) of a maximum of twelve (12) times of the BUPI's equity.

Gearing ratio is a ratio that compares the value of the guarantee exposure compared to the equity owned at a certain period to determine the level of utilization of the equity owned in the guarantee. Based on the total exposure for infrastructure project guarantees conducted by the Company amounting to Rp92,211.76 billion, and with equity of Rp15,10 trillion, without taking into account the State Equity Participation (PMN) for the National Economic Recovery (PEN) program, IIGF's Gearing Ratio at the end of 2024 is 6.1 times.

WILAYAH OPERASIONAL
OPERATIONAL AREAS

Wilayah operasional PT PII secara keseluruhan berada di wilayah Indonesia. Hingga akhir 31 Desember 2024, Perseroan tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi, kantor cabang dan kantor perwakilan. Seluruh kegiatan usaha Perseroan dilakukan di kantor pusat Perseroan yang beralamat di:

IIGF operates within Indonesia's territory. As of 31 December 2024, the Company does not have subsidiaries, associates, branch offices, and representative offices. All Company's business activities are carried out at the Company's head office located at:

Capital Place, 7-8 Floor
Jl. Gatot Subroto No.Kav 18, RT.6/RW.1,
Kuningan Barat., Kec. Mampang
Prapatan, Kota Jakarta Selatan

STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Struktur organisasi PT PII ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK-004/PII-BOD/0322 tanggal 18 Maret 2022 tentang Struktur Organisasi Perseroan. Bagan struktur organisasi PT PII tahun 2024 adalah sebagai berikut.

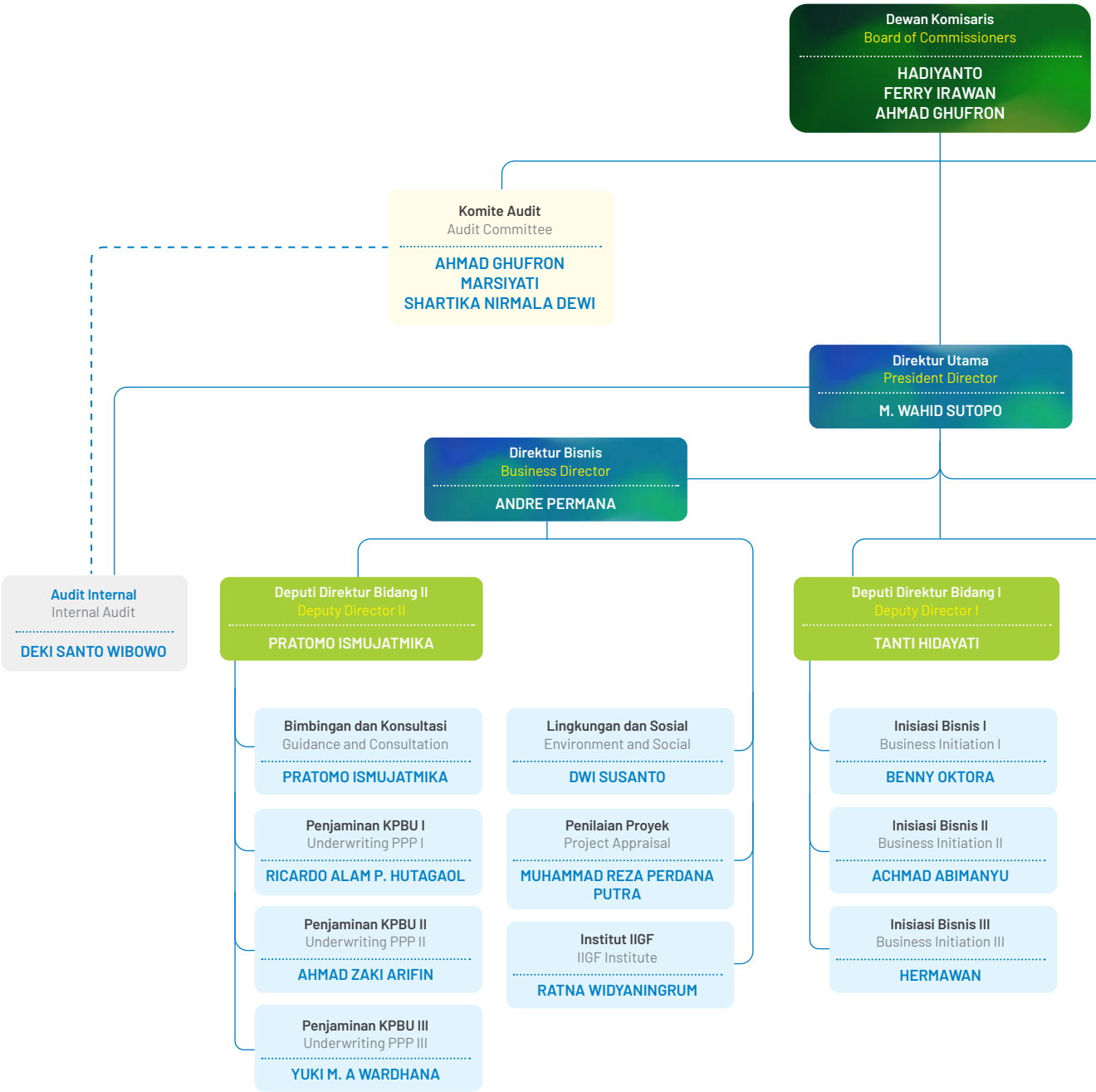

IIGF organizational structure is determined based on the Board of Directors' Decree No. SK-004/PII-BOD/0322 dated 18 March 2022 on the Company's Organizational Structure. IIGF's Organizational Structure in 2024 is as follows.

Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee
FERRY IRAWAN
BELIS SISWANTO

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners
MUHAMMAD NAHDI

Direktur Keuangan
Finance Director
DONNY HAMDANI

Deputi Direktur Bidang III
Deputy Director III
MUHAMMAD RIDHO

Sekretaris Perusahaan dan Komunikasi
Corporate Secretary and Communication
RIAN DITHA PRASETIANTI

Hukum dan Kepatuhan
Legal & Compliance
RIA FRILINA

Manajemen Risiko
Risk Management
RIAN DITHA PRASETIANTI

Penjaminan Non-KPBU
Underwriting Non-PPP
HIRE ROMALIMORA

Pemantauan Proyek dan Manajemen Klaim
Project Monitoring & Claim Management
SALOMI ADRIANA

Strategi Perusahaan dan Keuangan
Corporate Strategy & Finance
JONI LIM

Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi
Human Capital & Organization Development
FIYARNI M. PAMUNTJAK

Layanan Perusahaan dan Pengadaan
Corporate Service & Procurement
HARYO DEWANTO

Teknologi Informasi
Information Technology
ACHMAD ABIMANYU

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

Berikut profil Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat sampai dengan 31 Desember 2024:

The following is the profile of the Company's Board of Commissioners who served until 31 December 2024:

Ferry Irawan
Komisaris Commissioner

Hadiyanto
Komisaris Utama President Commissioner

Ahmad Ghufron
Komisaris Commissioner

Hadiyanto

Komisaris Utama
President Commissioner

Indonesia
Indonesian

62 tahun per 31 Desember 2024
62 years old as of 31 December 2024

Bogor
Bogor

Ciamis, 10 Oktober 1962
Ciamis, 10 October 1962

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Doktor Hukum, Universitas Padjajaran (2012) • International Tax Program, Harvard University, USA (1993) • LLM, Harvard Law School, USA (1993) • Sarjana Hukum, Universitas Padjadjaran (1986)	• Doctorate of Law, Universitas Padjajaran (2012) • International Tax Program, Harvard University, USA (1993) • LLM, Harvard Law School, USA (1993) • Bachelor of Law, Universitas Padjadjaran (1986)
Sertifikasi Certification	• Corporate Governance That Build Value, Wharton School University of Pennsylvania, USA, 1-2 Februari, 2023 • One Planet Leader by IMD in Lausanne, Switzerland, 18-22 November, 2013 • Leading Organizational Change, Wharton University of Pennsylvania, Philadelphia, 3-6 Desember 2012	• Corporate Governance That Builds Value, Wharton School University of Pennsylvania, USA, 1-2 Februari, 2023 • One Planet Leader by IMD in Lausanne, Switzerland, 18-22 November, 2013 • Leading Organizational Change, Wharton University of Pennsylvania, Philadelphia, 3-6 December 2012
Riwayat Jabatan Career History	Beliau memiliki pengalaman luas di sektor keuangan dan hukum, dengan lebih dari 30 tahun pengabdian diantaranya: • Komisaris Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (2021-2024) • Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara (2021-2022) • Penanggungjawab pengelolaan perbendaharaan negara dan implementasi kebijakan fiskal Jenderal Perbendaharaan Negara (2015-2021) • Sekretaris Jenderal Perbendaharaan Negara (2006-2015) • Alternate Executive Director di World Bank, Washington DC (2003-2005)	He has extensive experience in the financial and legal sectors, with over 30 years of service: • President Commissioner of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (2021-2024) • Director General of State Treasury (2021-2022) • Responsible for managing the state treasury and implementing the fiscal policy of the General of State Treasury (2015-2021) • Secretary General of State Treasury (2006-2015) • Alternate Executive Director at World Bank, Washington DC (2003-2005)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 297 tanggal 1 Juli 2024	The Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 297 dated 1 July 2024
Periode Jabatan Term of Office	Ke 1, dengan masa jabatan 1 Juli 2024 – 1 Juli 2029	First, with tenure on 1 July 2024 – 1 July 2029
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	• **Jabatan rangkap di dalam Perseroan** Tidak ada • **Jabatan rangkap di luar Perseroan** - Anggota Dewan Pengawas RS TNI AD Dustira Cimahi (2024-sekarang) - Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjajaran (2024-sekarang) - Ketua P2BP Kementerian Keuangan (2024-sekarang)	• **Concurrent positions in the Company** None • **Concurrent positions outside the Company** - Member of the Board of Trustees of Dustira Army Hospital Cimahi (2024-present) - Member of the Board of Trustees of Universitas Padjajaran (2024-present) - Chairman of P2BP of the Ministry of Finance (2024-present)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Perseroan	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or Company Shareholders
Kepemilikan Saham Shareholdings	-	-
Pernyataan Independensi dan Pelatihan Tahun 2024 Statement of Independence and Training in 2024	Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab GCG sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini	Presented separately, described in the GCG Chapter of the Board of Commissioners in this Annual Report

Ahmad Ghufron

Komisaris
Commissioner

Indonesia
Indonesian

53 tahun per 31 Desember 2024
53 years old as of 31 December 2024

Jakarta
Jakarta

Pekalongan, 15 April 1971
Pekalongan, 15 April 1971

Riwayat Pendidikan Educational Background	Magister Bidang Akuntansi di Universitas Indonesia (2009)	Master of Accounting from the University of Indonesia (2009)
Sertifikasi Certification	Beliau telah memiliki sertifikasi professional, yaitu: • Certified Enterprise Risk Governance (CERG), • Qualified Risk Governance Professional (QRGP), • Certified Risk Management Professional (CRMP), • Certified Strategy Execution Professional (CSEP), • Certified Governance Risk Management and Compliance Professional (CGRMCP)	He has professional certifications: • Certified Enterprise Risk Governance (CERG), • Qualified Risk Governance Professional (QRGP), • Certified Risk Management Professional (CRMP), • Certified Strategy Execution Professional (CSEP), • Certified Governance Risk Management and Compliance Professional (CGRMCP)
Riwayat Jabatan Career History	Beliau seorang profesional dengan latar belakang yang kuat di bidang akuntansi dan manajemen risiko. Beberapa jabatan penting yang pernah beliau emban antara lain: • Komite Pemantau Risiko di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2022-Agustus 2024) • Komite Audit di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (2017-2022) • Komite Standar Audit di Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (2018-2021)	He is a professional with a strong background in accounting and risk management. Some of the important positions he has held include: • Risk Monitoring Committee at PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2022-August 2024) • Audit Committee at PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2017-2022) • Audit Standards Committee at the Association of Government Internal Auditors (2018-2021)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 342 Agustus 2024	The Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 342, August 2024
Periode Jabatan Term of Office	Ke 1 dengan masa jabatan 27 Agustus 2024 – 27 Agustus 2029	First with tenure on 27 August 2024 – 27 August 2029
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	• **Jabatan di dalam Perseroan** Ketua Komite Audit • **Jabatan di luar Perseroan** - Inspektur VII di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (2021-sekarang) - Dewan Pengawas di RSUP dr. Soeradji Tirto Negoro (2023-sekarang)	• **Concurrent positions in the Company** Chairman of Audit Committee • **Concurrent positions outside the Company** - Inspector VII, Inspectorate General, Ministry of Finance (2021-present) - Supervisory Board at Government Hospital, dr. Soeradji Tirto Negoro (2023-present)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Direksi. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham melalui rangkap jabatan di Kementerian Keuangan.	He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. He is affiliated with the Shareholders via his concurrent position at the Ministry of Finance.
Kepemilikan Saham Shareholdings	-	-
Pernyataan Independensi dan Pelatihan Tahun 2024 Statement of Independence and Training in 2024	Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab GCG sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini	Presented separately, described in the GCG Chapter of the Board of Commissioners in this Annual Report

Ferry Irawan

Komisaris
Commissioner

Indonesia
Indonesian

49 tahun per 31 Desember 2024
49 years old as of 31 December 2024

Depok
Depok

Depok, 2 Februari 1975
Depok, 2 February 1975

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Doktoral Ekonomi Moneter Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (2006) • Magister Ekonomi Moneter Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (2004) • Sarjana pada jurusan Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (2000)	• Doctorate of Monetary Economics, Gradue School of Economics, University of Indonesia, Jakarta (2006) • Master of Monetary Economics, Gradue School of Economics, University of Indonesia, Jakarta (2004) • Bachelor of Financial Management, Faculty of Economics, University of Indonesia, Jakarta (2000)
Sertifikasi Certification	-	-
Riwayat Jabatan Career History	Beliau memiliki latar belakang yang kuat dalam bidang ekonomi dan pengalaman yang luas di sektor kebijakan ekonomi makro dan fiskal. Dengan lebih dari 15 tahun pengabdian di Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebelum menjabat sebagai Dewan Komisaris PT PII, beliau menduduki berbagai jabatan di Kementerian Keuangan diantaranya: • Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara (2024-sekarang) • Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah (2022-2023) • Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal (2020-2022) • Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil (2017-2020)	He has a strong background in economics and extensive experience in the macroeconomic and fiscal policy sectors. He has more than 15 years of service in the Ministry of Finance and the Coordinating Ministry for Economic Affairs. Prior to serving on IIGF's Board of Commissioners, he held various positions at the Ministry of Finance: • Deputy for Coordination of Management and Business Development of State-Owned Enterprises (2024-present) • Expert Staff for Local Development (2022-2023) • Assistant Deputy for Monetary and External Sector (2020-2022) • Assistant Deputy for Local Economy and Real Sector (2017-2020)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 342 Agustus 2024	The Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 342, August 2024
Periode Jabatan Term of Office	Ke 1 dengan masa jabatan 27 Agustus 2024 – 27 Agustus 2029	First with tenure on 27 August 2024 – 27 August 2029
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	• Di dalam Perseroan Ketua Komite Pemantau Risiko • Di luar Perseroan - Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (2024-sekarang)	• in the Company Chairman of Risk Monitoring Committee • outside the Company - Deputy for Coordination of Management and Business Development of State-Owned Enterprises (2024-present)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Perseroan	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or Company Shareholders
Kepemilikan Saham Shareholdings	-	-
Pernyataan Independensi dan Pelatihan Tahun 2024 Statement of Independence and Training in 2024	Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab GCG sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini	Presented separately, described in the GCG Chapter of the Board of Commissioners in this Annual Report

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE

Berikut profil Direksi Perseroan yang menjabat sampai dengan 31 Desember 2024:

The following is the profile of the Company's Board of Directors who served until 31 December 2024:

Andre Permana
Direktur Bisnis Business Director

M. Wahid Sutopo
Direktur Utama President Director

Donny Hamdani
Direktur Keuangan Finance Director

M. Wahid Sutopo

Direktur Utama
President Director

Indonesia
Indonesian

55 tahun per 31 Desember 2024
55 years old as of 31 December 2024

Jakarta Selatan
South Jakarta

Jakarta, 17 Juni 1969
Jakarta, 17 June 1969

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik jurusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1993). • Magister Manajemen dari International Business IPMI (program bersama dengan Monash University), Jakarta (2002)	• Bachelor of Electric Engineering from Institut Teknologi Bandung (1993). • Master of Management from International Business IPMI (collaboration with Monash University), Jakarta (2002).
Sertifikasi Certification	*Cybersecurity for Critical Urban Infrastructure*	Cybersecurity for Critical Urban Infrastructure
Riwayat Jabatan Career History	Beliau pernah menjabat berbagai posisi kunci antara lain sebagai Direktur PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (2011-2017), Komisaris Utama PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (2011-2017), Komisaris Utama PT PGN ING Indonesia (2015-2016) dan Direktur Eksekutif Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2017-2019) sebelum diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan.	Held various key positions, including the Director of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (2011-2017), President Commissioner of PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (2011-2017), President Commissioner of PT PGN ING Indonesia (2015-2016), and Executive Director of Business of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2017-2019), prior to being appointed as President Director of the Company.
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	• **Dasar Hukum Pengangkatan Pertama** Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 890/KMK.06/2019 tanggal 29 November 2019 • **Dasar Hukum Pengangkatan Kedua** Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 340/ KMK.06/2022 tanggal 22 Agustus 2022	• **The First Legal Basis of Appointment** Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 890/KMK.06/2019 dated 29 November 2019 • **The Second Legal Basis of Appointment** Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 340/ KMK.06/2022 dated 22 August 2022
Periode Jabatan Term of Office	Periode kedua dengan masa jabatan 4 Desember 2022 sampai 3 Desember 2027	Second term of office from 4 December 2022 to 3 December 2027
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam Perseroan maupun di luar Perseroan	Has no concurrent positions internally or externally
Hubungan Afiliasi Affiliation	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya maupun dengan Pemegang Saham Perseroan	He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, the members of the Board of Directors, or the Company's Shareholders
Kepemilikan Saham Shareholdings	Memiliki kepemilikan saham pribadi sebanyak 10.000 lembar saham pada PT Indosat Tbk dan 10.000 lembar saham pada PT Ameda Sigma Integra	Has 10,000 shares in PT Indosat Tbk and 10,000 shares in PT Ameda Sigma Integra
Pernyataan Independensi dan Pelatihan Tahun 2024 Statement of Independence and Training in 2024	Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab GCG sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini	Presented separately, described in the GCG Chapter of the Board of Directors in this Annual Report

Andre Permana

Direktur Bisnis
Business Director

Indonesia
Indonesian

48 tahun per 31 Desember 2024
48 years old as of 31 December 2024

Tangerang Selatan
South Tangerang

Cirebon, 31 Januari 1976
Cirebon, 31 January 1976

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik jurusan Teknik Sipil dari Universitas Indonesia (1998). • Magister Teknik bidang Manajemen Proyek dari Universitas Indonesia (2003). • Doctor of Philosophy bidang Risk Management, Project Finance dari Nanyang Technological University, Singapura (2012)	• Bachelor of Civil Engineering from University of Indonesia (1998). • Master of Project Management Engineering from University of Indonesia (2003). • Doctor of Philosophy of Risk Management, Project Finance, from Nanyang Technological University, Singapore (2012)
Sertifikasi Certification	• Certified CP3P Level Foundation • Accredited Trainer CP3P Level Foundation • Tenaga Ahli Muda Teknik Sipil (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi)	• Certified CP3P Level Foundation • Accredited Trainer CP3P Level Foundation • Civil Engineering Junior Expert (Construction Services Development Institute)
Riwayat Jabatan Career History	Sebelum diangkat menjadi Direktur Bisnis Perseroan, karier professional beliau di Perseroan dimulai pada tahun 2010 dan pernah menjabat berbagai posisi strategis di antaranya sebagai Kepala Divisi Risk and Compliance (2010-2016), Kepala Divisi Business Development (2017), dan terakhir kali menjabat sebagai Executive Vice President Project Appraisal (2017-2020). Dosen Tidak Tetap, Program S2 Magister Teknik, Fakultas Teknik Universitas Indonesia (2014-sekarang)	Prior to being appointed as the Company's Business Director, his professional career in the Company began in 2010 and he held various strategic positions, including as Head of Risk and Compliance Division (2010-2016), Head of Business Development Division (2017), and most recently as Executive Vice President Project Appraisal (2017-2020). Non-permanent Lecturer, Master of Engineering Program, Faculty of Engineering, University of Indonesia (2014-present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 127/KMK.06/2020 tanggal 23 Maret 2020	Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 127/KMK.06/2020 dated 23 March 2020
Periode Jabatan Term of Office	Periode pertama dengan masa jabatan 23 Maret 2020 sampai 22 Maret 2025	First term of office from 23 March 2020 to 22 March 2025
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam Perseroan maupun di luar Perseroan	Has no concurrent positions internally or externally
Hubungan Afiliasi Affiliation	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya maupun dengan Pemegang Saham Perseroan	He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, the members of the Board of Directors, or the Company's Shareholders
Kepemilikan Saham Shareholdings	Tidak ada	None
Pernyataan Independensi dan Pelatihan Tahun 2024 Statement of Independence and Training in 2024	Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab GCG sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini	Presented separately, described in the GCG Chapter of the Board of Directors in this Annual Report

Donny Hamdani

Direktur Keuangan
Finance Director

Indonesia
Indonesian

46 tahun per 31 Desember 2024
46 years old as of 31 December 2024

Jakarta Timur
East Jakarta

Jakarta, 23 September 1978
Jakarta, 23 September 1978

Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia (2000)	Bachelor of Accounting from University of Indonesia (2000)
Sertifikasi Certification	Chartered Accountant (CA)	Chartered Accountant (CA)
Riwayat Jabatan Career History	Beliau merintis karier sebagai auditor selama 11 tahun di KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (anggota jaringan global PwC) tahun 2001-2012 Kemudian beliau bergabung pertama kali dengan Perseroan pada tahun 2012 dan pernah menjabat berbagai posisi strategis di antaranya sebagai Executive Vice President Corporate Strategy and Finance (2017-2018) dan terakhir kali menjabat sebagai Deputi Direktur Keuangan (2018-2022) sebelum diangkat sebagai Direktur	He started his career as an auditor for 11 years at KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (member of PwC global network) in 2001-2012. Then, he joined the Company in 2012 and held various strategic positions including as Executive Vice President Corporate Strategy and Finance (2017-2018) and most recently served as Deputy Director of Finance (2018-2022) before being appointed as the Company's Director
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 14/KMK.06/2022 tanggal 17 Januari 2022	Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 14/KMK.06/2022 dated 17 January 2022
Periode Jabatan Term of Office	Periode pertama dengan masa jabatan 17 Januari 2022 sampai 16 Januari 2027	First term of office from 17 January 2022 to 16 January 2027
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam Perseroan maupun di luar Perseroan	Has no concurrent positions internally or externally
Hubungan Afiliasi Affiliation	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya maupun dengan Pemegang Saham Perseroan	He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, the members of the Board of Directors, or the Company's Shareholders
Kepemilikan Saham Shareholdings	Tidak ada	None
Pernyataan Independensi dan Pelatihan Tahun 2024 Statement of Independence and Training in 2024	Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab GCG sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini	Presented separately, described in the GCG Chapter of the Board of Directors in this Annual Report

INFORMASI PERUBAHAN KEANGGOTAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

INFORMATION ON THE CHANGES TO THE MEMBERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

PERUBAHAN SUSUNAN DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2024

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS IN 2024

Pada tahun 2024, susunan dan komposisi Dewan Komisaris PT PII mengalami perubahan sesuai Keputusan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2024 tanggal 17 Juli 2024, Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat Hadiyanto dan memberhentikan Rina Widiyani Wahyuningdyah dikarenakan adanya penugasan Rina Widiyani Wahyuningdyah sebagai Sekretaris Dewan Pengawas di Indonesia Investment Authority (INA).

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 339 Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024, Perseroan mengangkat Ferry Irawan dan memberhentikan Iqbal Islami dikarenakan berakhirnya masa penugasan Iqbal Islami di Perseroan. Kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 342 Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024, Perseroan mengangkat Ahmad Ghufron dan memberhentikan Mariatul Aini dikarenakan berakhirnya masa penugasan Mariatul Aini sebagai Komisaris.

Berikut perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris PT PII selama tahun 2024:

In 2024, the composition of IIGF's Board of Commissioners changed in accordance with the Decree of the Minister of Finance as the General Meeting of Shareholders. Based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 297 of 2024 dated 17 July 2024, the General Meeting of Shareholders appointed Hadiyanto and dismissed Rina Widiyani Wahyuningdyah, because of the appointment of Rina Widiyani Wahyuningdyah as Secretary of the Supervisory Board at the Indonesia Investment Authority (INA).

Further, based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 339 of 2024 dated 27 August 2024, the Company appointed Ferry Irawan, and dismissed Iqbal Islami due to the end of his assignment period in the Company. Further, based on the Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 342 of 2024 dated 27 August 2024, the Company appointed Ahmad Ghufron, and dismissed Mariatul Aini due to the end of her assignment period as Commissioner.

The changes in the composition of IIGF's Board of Commissioners in 2024 is as follows:

Jabatan Position	**Periode 1 Januari 2024 – 30 Juni 2024** Period January, 1 2024 – June 30, 2024	**Periode 1 Juli 2024 – 18 Agustus 2024** Period July 1, 2024 – August 18, 2024	**Periode 19 Agustus 2024 – 26 Agustus 2024** Period August 19, 2024 – August 26, 2024	**Periode 27 Agustus 2024 - 31 Desember 2024** Period August 27, 2024 – December 32, 2024
Komisaris Utama President Commissioner	Rina Widiyani Wahyuningdyah	Hadiyanto	Hadiyanto	Hadiyanto
Komisaris Commissioner	Mariatul Aini	Mariatul Aini	Ahmad Ghufron	Ahmad Ghufron
Komisaris Commissioner	Iqbal Islami	Iqbal Islami	Iqbal Islami	Ferry Irawan

Sedangkan untuk susunan Direksi Perseroan pada tahun 2024 tidak terdapat perubahan, sehingga susunan dan komposisi Direksi PT PII per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

There is no change to the composition of the Board of Directors of the Company in 2024. Therefore, the composition of IIGF's Board of Directors as of 31 December 2024 is as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position
M. Wahid Sutopo	Direktur Utama President Director
Andre Permana	Direktur Bisnis Business Director
Donny Hamdani	Direktur Keuangan Finance Director

INFORMASI PERUBAHAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SETELAH TAHUN BUKU 2024

INFORMATION ON CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS AFTER THE 2024 FISCAL YEAR

Tidak ada perubahan pada komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PT PII setelah tahun buku 2024 sampai dengan batas waktu penyusunan Laporan Tahunan.

There were no changes in the members of IIGF's Board of Commissioners and Board of Directors after the 2024 fiscal year, until the deadline of the Annual Report's submission.

PROFIL DEPUTI DIREKTUR
DEPUTY DIRECTOR'S PROFILE

Tanti Hidayati

Deputi Direktur Bidang I
Deputy Director I

Indonesia
Indonesian

52 tahun
52 years old

Depok, Jawa Barat, Indonesia
Depok, West Java, Indonesia

Latar Belakang Pendidikan:
Sarjana Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1995.

Diangkat sebagai Deputi Direktur Bidang I berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-014/DIR/HC/0322.

Educational Background:
Bachelor of Agribusiness from Institut Pertanian Bogor in 1995.

Appointed as Deputy Director of Division I pursuant to the Board of Directors' Decree No. SK-014/DIR/HC/0322.

Pratomo Ismujatmika

Deputi Direktur Bidang II
Deputy Director II

Indonesia
Indonesian

48 tahun
48 years old

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
East Jakarta, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia

Latar Belakang Pendidikan:
- Sarjana Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1999)
- Magister Manajemen (Keuangan) dari Universitas Gadjah Mada (2003)
- Master of Business Administration dari Sullivan University (2005)
- Doktor Ilmu Manajemen (*Candidate*) dari Universitas Padjajaran (2021 - sekarang).

Diangkat sebagai Deputi Direktur Bidang II berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-030/DIR/HC/0922.

Educational Background:
- Bachelor of Architecture Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1999)
- Master of Management (Finance) from Universitas Gadjah Mada (2003)
- Master of Business Administration from Sullivan University (2005)
- Doctor of Management Science (Candidate) from Padjajaran University (2021-present).

Appointed as Deputy Director of Division II pursuant to the Board of Directors' Decree No. SK-030/DIR/HC/0922.

Muhammad Ridho

Deputi Direktur Bidang III
Deputy Director III

Indonesia
Indonesian

48 tahun
48 years old

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
South Tangerang, Banten, Indonesia

Latar Belakang Pendidikan:
- Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas Diponegoro (1998)
- Research Student, Urban and Environmental Engineering, Kyushu University (2003)
- Master of Engineering, Urban and Environmental Engineering, Kyushu University (2005)
- Doctor of Engineering, Urban and Environmental Engineering, Kyushu University (2010).

Diangkat sebagai Deputi Direktur Bidang III berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-030/DIR/HC/0922.

Educational Background:
- Bachelor of Engineering in Urban and Regional Planning from Universitas Diponegoro (1998)
- Research Student, Urban and Environmental Engineering, Kyushu University (2003)
- Master of Engineering, Urban and Environmental Engineering, Kyushu University (2005)
- Doctor of Engineering, Urban and Environmental Engineering, Kyushu University (2010).

Appointed as Deputy Director of Division III pursuant to the Board of Directors' Decree No. SK-030/DIR/HC/0922.

DEMOGRAFI KARYAWAN
EMPLOYEE DEMOGRAPHICS

Hingga akhir tahun 2024, jumlah karyawan PT PII mengalami penurunan sebesar 0,6%, yaitu dari 164 orang di tahun 2023 menjadi 163 orang di tahun 2024, perubahan ini sejalan dengan perkembangan usaha Perseroan. Komposisi karyawan saat ini telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Perseroan, baik secara kuantitas maupun kualitas kompetensinya.

Tabel-tabel di bawah ini menunjukkan komposisi karyawan selama tiga tahun terakhir berdasarkan status kepegawaian, level organisasi, jenjang jabatan, jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan.

As of the end of 2024, IIGF's employees decreased by 0.6%, from 164 people in 2023 to 163 people in 2024, in line with the Company's business development. The current employee composition has been adjusted to the Company's organizational needs, both in terms of quantity and quality of competence.

The tables below depict the composition of employees over the past three years by employment status, organizational level, job title, gender, age, and education level.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian
Employee Composition by Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status	Tahun Year			Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
	2024	2023	2022	
Tetap Permanent	147	149	136	(2)
Tidak Tetap Contract Employee	16	15	16	(1)
Jumlah Total	**163**	**164**	**152**	**(1)**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi
Employee Composition by Organizational Level

Level Organisasi Organizational Level	Tahun Year			Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
	2024	2023	2022	
Deputy Director	3	3	3	0
Executive leader	4	4	2	0
Senior leader	37	36	30	1
Middle level	65	60	59	5
Staff & AM	54	61	58	(7)
Jumlah Total	**163**	**164**	**152**	**(1)**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan
Employee Composition by Position

Level Jabatan Position	Tahun Year			Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
	2024	2023	2022	
EVP	7	7	5	0
VP-SVP	37	36	30	1
DSM-AVP	36	34	30	2
AM-M	59	61	58	(2)
Staff	24	26	29	(2)
Jumlah Total	**163**	**164**	**152**	**(1)**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin
Employee Composition by Gender

Jenis Kelamin Employment Status	Tahun Year			Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
	2024	2023	2022	
Laki-laki Male	86	88	81	(2)
Perempuan Female	77	76	71	1
Jumlah Total	**163**	**164**	**152**	**(1)**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia
Employee Composition by Age

Rentang Usia Age	Tahun Year			Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
	2024	2023	2022	
41 – 56 Tahun Years old	47	42	36	5
31 – 40 Tahun Years old	87	83	74	4
20 – 30 Tahun Years old	29	39	42	(10)
Jumlah Total	**163**	**164**	**152**	**(1)**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Employee Composition by Education Level

Tingkat Pendidikan Education Level	Tahun Year			Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
	2024	2023	2022	
Doktoral Doctorate	3	2	2	1
Pasca Sarjana Master	63	61	51	2
Sarjana 4-yr-Bachelor	94	97	94	(3)
Diploma Diploma	3	4	5	(1)
Jumlah Total	**163**	**164**	**152**	**(1)**

STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
STRUCTURE AND COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA HINGGA ENTITAS PEMILIK AKHIR
INFORMATION ON MAJOR SHAREHOLDERS TO ULTIMATE OWNERSHIP ENTITY

PT PII merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan. Sampai dengan 31 Desember 2024, seluruh saham (100%) Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan jumlah saham sebanyak 10.655.000 lembar saham.

IIGF is a State-Owned Enterprise (SOE) under the guidance and supervision of the Minister of Finance. As of 31 December 2024, all Company's shares (100%) are owned by the Government of the Republic of Indonesia c.q Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, with a total of 10,655,000 shares.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI >5%
COMPOSITION OF SHAREHOLDERS WITH >5%

Dengan kepemilikan saham mencapai 100%, Negara Republik Indonesia merupakan Pemegang Saham Utama dan Pengendali PT PII serta satu-satunya pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5%, sehingga tidak terdapat pemegang saham lainnya dengan kepemilikan di bawah 5%.

With 100% share ownership, the Republic of Indonesia is the Main and Controlling Shareholder of IIGF, and the only shareholder with ownership above 5%. Therefore, there are no other shareholders with ownership below 5%.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM BERDASARKAN KLASIFIKASI
SHAREHOLDER COMPOSITION BY CLASSIFICATION

Nama Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Percentage
Lokal: Negara Republik Indonesia Local: The Republic of Indonesia	10.655.000 lembar 10,655,000 shares	100%

KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
SHAREHOLDINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Sampai dengan 31 Desember 2024, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

As of 31 December 2024, none of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors own shares of the Company, either directly or indirectly.

STRUKTUR GRUP/KELOMPOK USAHA SERTA ENTITAS ANAK/ENTITAS ASOSIASI/PERUSAHAAN PATUNGAN/ *SPECIAL PURPOSE VEHICLE*

STRUCTURE OF THE GROUP/BUSINESS GROUP AND ITS SUBSIDIARIES/ ASSOCIATES/JOINT VENTURES/SPECIAL PURPOSE VEHICLES

Sampai dengan 31 Desember 2024, PT PII tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Entitas Pengendalian Bersama, Perusahaan Patungan atau *Joint Venture Company* (JV), maupun *Special Purpose Vehicle* (SPV).

As of 31 December 2024, IIGF does not have any Subsidiaries, Associates, Joint Control entities, Joint Venture Companies (JV), or Special Purpose Vehicles (SPV).

KEANGGOTAAN ASOSIASI

ASSOCIATION MEMBERSHIP

Hingga tanggal 31 Desember 2024, Perseroan tidak memiliki keanggotaan dalam asosiasi industri manapun.

As of 31 December 2024, the Company does not participate in any industry association.

LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN
SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS

KANTOR NOTARIS
NOTARY OFFICE

Nama Name	Arry Supratno, S.H.	Arry Supratno, S.H.
Alamat Address	Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69, Jakarta Pusat, Jakarta 10210	Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69, Central Jakarta, Jakarta 10210
Jasa yang diberikan Service provided	Penyusunan Akta Notaris sebagai berikut: 1. Berita Acara RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahun Buku 2023; 2. Tiga (3) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham atas Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan; 3. Berita Acara RUPS Tahunan atas persetujuan RKAP Tahun 2025 Perseroan.	The drafting of a Notarial Deed as follows: 1. Minutes of the GMS Approving the 2023 Fiscal Year Report; 2. Three (3) Deed of Statement of Shareholders' Resolution on the Dismissal and Appointment of Members of the Company's Board of Commissioners; 3. Minutes of the Annual GMS Approving the Company's 2025 WP&B.
Periode Penugasan Tenure Period	Tahun 2024	2024

KONSULTAN HUKUM
LEGAL CONSULTANT

PT PII sampai dengan 31 Desember 2024 tidak menghadapi permasalahan hukum, sehingga tidak terdapat informasi mengenai tentang Konsultan Hukum.

As of 31 December 2024, IIGF does not face any legal issues. Therefore, there is no information on Legal Consultant.

BIRO ADMINISTRASI PUBLIK
BUREAU OF PUBLIC ADMINISTRATION

PT PII per 31 Desember 2024 tidak menerbitkan saham di Bursa Efek mana pun, sehingga tidak terdapat informasi mengenai Biro Administrasi Publik.

As of 31 December 2024, IIGF does not issue shares on any Stock Exchange. Thus, there is no information on the Public Administration Bureau.

PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK
SECURITIES RATING COMPANY

PT PII per 31 Desember 2024 tidak menerbitkan saham di Bursa Efek mana pun, sehingga tidak terdapat informasi mengenai Perusahaan Pemeringkat Efek.

As of 31 December 2024, IIGF does not issue shares on any Stock Exchange. Thus, there is no information on the Securities Rating Company.

AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
PUBLIC ACCOUNTANTS AND PUBLIC ACCOUNTING FIRM

Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (KAP)	KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota jaringan global PwC) No. Izin: KEP-315/KM.1/2024	KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (member of PwC global network) No. Permit: KEP-315/KM.1/2024
Nama Akuntan Publik Public Accountant's Name	Jimmy Pangestu, S.E., CPA No. Izin: AP.1124	Jimmy Pangestu, S.E., CPA No. Permit: AP.1124
Alamat Address	WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, RT. 4/RW. 2, Kuningan, Karet, Setiabudi, Indonesia 12920	WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Neighborhood 4/Hamlet 2, Kuningan, Karet, Setiabudi, Indonesia 12920
Periode Penugasan KAP KAP Assignment Period	Tahun Buku 2024	2024 Fiscal Year
Periode Penugasan AP AP Assignment Period	Periode ke -2, Tahun Buku 2023 - 2024	2nd Period, 2023 - 2024 Fiscal Year
Jasa yang diberikan Service provided	- *General Audit* Laporan Keuangan - Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern berdasarkan PSA-62 - Perikatan Asurans atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris.	- Financial Statement General Audit - Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control based on PSA-62 - Assurance Engagement on Key Performance Indicators ("KPI") of the Company, the Board of Directors, and the Board of Commissioners.
Biaya Cost	Rp1.086.650.000	Rp1,086,650,000

Penjelasan lebih lengkap terkait Kantor Akuntan Publik Perseroan tahun 2024 diuraikan Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Akuntan Publik pada Laporan Tahunan ini.

Comprehensive description of the Company's Public Accounting Firm in 2024 is described in this Annual Report's Corporate Governance Chapter of the Public Accountant section.

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN SAHAM

CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE AND/OR LISTING

Seluruh saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga sampai dengan 31 Desember 2024 PT PII tidak menerbitkan saham kepada publik. Dengan demikian pada Laporan Tahunan ini, Perseroan tidak menyajikan informasi mengenai kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi (*corporate action*), perubahan jumlah saham, maupun nama bursa.

All of the Company's shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, as of 31 December 2024, IIGF did not issue any shares to the public. Therefore, in this Annual Report, the Company does not present information on the chronology of listing, types of corporate actions, changes in the number of shares, or the name of the exchange.

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN OBLIGASI/EFEK LAINNYA

CHRONOLOGY OF BONDS/SECURITIES ISSUANCE AND/OR LISTING

Sampai dengan 31 Desember 2024, PT PII tidak melakukan penawaran umum saham dan tidak mencatatkan sahamnya di bursa efek manapun, serta belum pernah menerbitkan efek dalam bentuk apa pun yang diperdagangkan di bursa mana pun, sehingga tidak terdapat informasi mengenai kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku.

As of 31 December 2024, IIGF did not execute public offering of shares and did not list its shares on any stock exchange, and has never issued securities in any form traded on any exchange. Therefore, there is no information regarding the chronology of issuance and/or listing of other securities from the beginning of the issuance until the end of the fiscal year.

INFORMASI PADA SITUS *WEBSITE* PERUSAHAAN
INFORMATION ON THE COMPANY'S WEBSITE

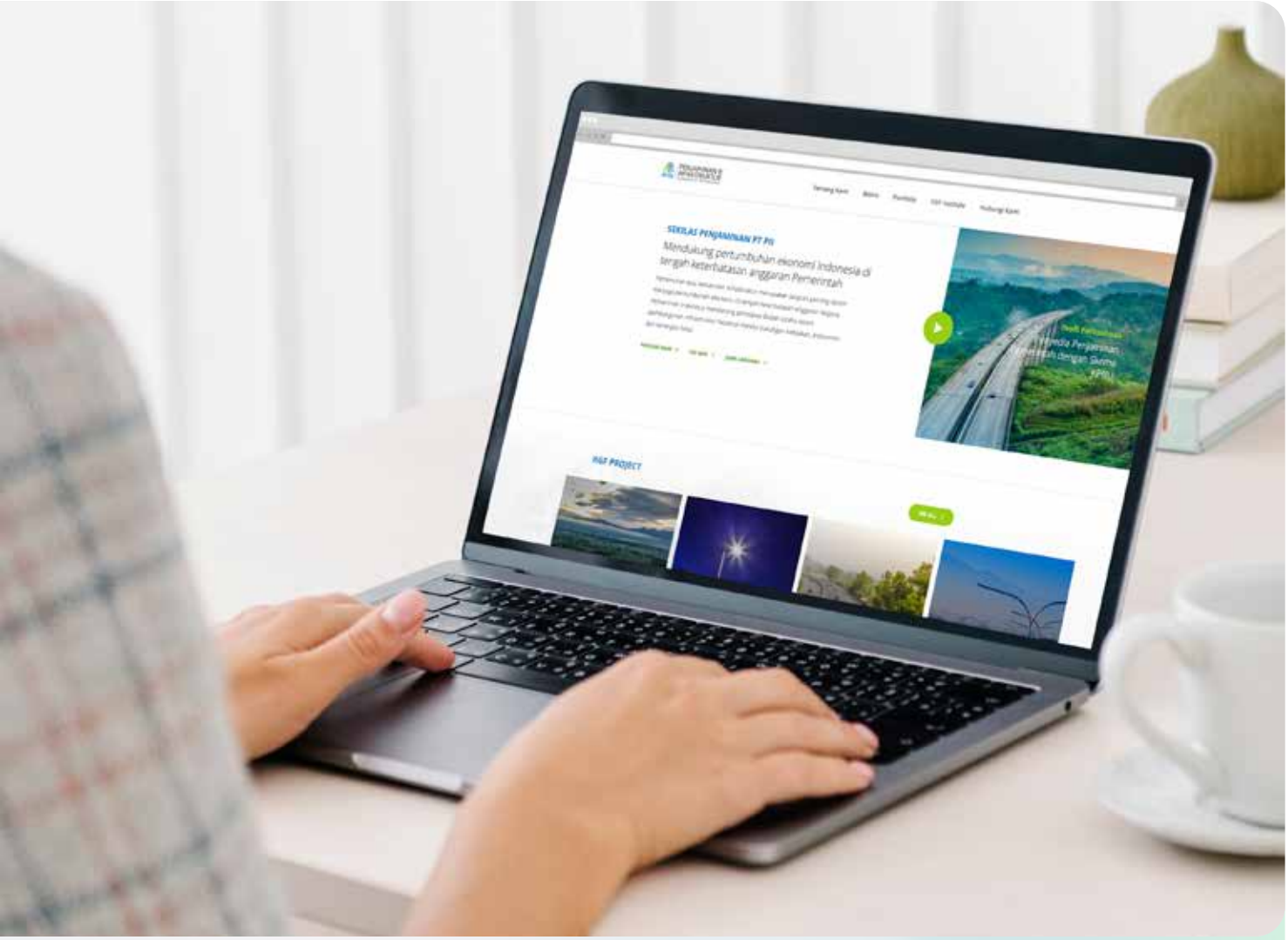

PT PII menyediakan berbagai informasi dan data terkait Perseroan yang dapat diakses oleh publik melalui situs *website* Perseroan yang beralamat di www.ptpii.co.id. Situs *web* resmi PT PII menyajikan informasi dalam dua Bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pada halaman utama, tersedia bar navigasi untuk memudahkan pengunjung mengakses halaman informasi yang terbagi dalam 5 (lima) kategori informasi sebagai berikut:

IIGF provides various Company's information and data accessible by the public at the Company's website, www.ptpii.co.id. IIGF's official website presents information in two languages, i.e., Indonesian and English. The main page has a navigation bar to facilitate visitors to access the information page which is divided into five (5) categories of information as follows:

Tentang Kami
About Us

Tentang Kami
Pada menu ini terdapat informasi terkait:
1. Visi & Misi
2. Jejak Langkah
3. Regulasi
4. Manajemen
5. Struktur Organisasi
6. Pemegang Saham
7. Pemangku Kepentingan

About Us
On this menu, there is related information:
1. Vision & Mission
2. Milestones
3. Regulation
4. Management
5. Organizational Structure
6. Shareholders
7. Stakeholders

Acuan Alokasi risiko
Pada menu ini terdapat informasi terkait:
1. Umpan Balik Alokasi Risiko
2. Alokasi Risiko

Risk Allocation References
On this menu, there is related information:
1. Risk Allocation Feedback
2. Risk Allocation

Tata Kelola Perusahaan
Pada menu ini terdapat informasi terkait:
1. Sekilas Tata Kelola Perusahaan
2. Manual Kebijakan Perusahaan
3. *Whistleblowing*

Good Corporate Governance
On this menu, there is related information:
1. Corporate Governance Highlight
2. Company's Manual
3. Whistleblowing

Bisnis
Business

Berita & Publikasi
Pada menu ini terdapat informasi terkait:
1. Berita Perusahaan
2. Publikasi
3. Publikasi IIGF Institute
4. Perpustakaan Media
5. e-Perpustakaan

News & Publication
On this menu, there is related information:
1. Company News
2. Publication
3. IIGF Institute Publication
4. Media Library
5. e-Library

Produk
Pada menu ini terdapat informasi terkait:
1. Penjaminan Pemerintah
2. Penjaminan Pinjaman Langsung
3. Penyiapan dan Pendampingan Proyek
4. Penjaminan Lainnya
5. Pengembangan Kapasitas

Product
On this menu, there is related information:
1. Sovereign Guarantee
2. Direct Loan Guarantee
3. Project Development Facility
4. Other Guarantee
5. Capacity Development

E-Procurement
Pada menu ini terdapat informasi terkait:
1. Pengadaan
2. Pendaftaran Pengadaan
3. Registrasi Akun

E-Procurement
On this menu, there is related information:
1. Procurement
2. Procurement Registration
3. Account Registration

Portfolio
Portfolio

Proyek
Pada menu ini terdapat informasi terkait:
1. Informasi Proyek
2. Database Proyek dan *Monitoring*

Projects
On this menu, there is related information:
1. Project Information
2. Project Database and Monitoring

Keberlanjutan

Sustainability

IIGF Institute
IIGF Institute

Pada menu ini terdapat informasi terkait kegiatan Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) Institute.

The menu contains information related to the activities of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) Institute.

Hubungi Kami
Contact Us

Pada menu ini terdapat informasi terkait kontak Perseroan dan *feedback form*.

+62 21 5795 0550
info@iigf.co.id

This menu contains information related to the Company's contact and feedback form.

+62 21 5795 0550
info@iigf.co.id

Berikut tabel pemenuhan informasi pada situs Perseroan sesuai dengan POJK No. 8/POJK.04/2015.

The following is a table of information fulfillment on the Company's website in accordance with POJK No. 8/POJK.04/2015.

Uraian Description	**Ketersediaan** Availability	**Keterangan** Remark
Struktur grup Perusahaan dan informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu Company's group structure and shareholders' information down to individual final owners	✓	Ada, terdapat pada menu "Tentang PT PII" Available, at the "About IIGF" menu
Isi Kode Etik Code of Conducts	✓	Ada, terdapat pada menu "Manual Kebijakan Perusahaan" Available, at the "Company's Manual" menu
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan Information on General Meeting of Shareholders (GMS) at least covers the agenda discussed in the GMS, Minutes of GMS, and important dates, i.e. announcement of GMS date, summoning date for GMS, date of GMS, date of announcement for Minutes of GMS	✓	Ada, terdapat pada menu "Berita dan Publikasi" Available, at the "News and Publication" menu
Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir) Annual financial statements (the last 5 years)	✓	Ada, terdapat pada menu "Berita dan Publikasi" Available, at the "News and Publication" menu
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of the Board of Commissioners and Board of Directors	✓	Ada, terdapat pada menu "Tentang PT PII" Available, at the "About IIGF" menu
Piagam/*Charter* Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal Charters of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit	✓	Ada, terdapat pada menu "Manual Kebijakan Perusahaan" Available, at the "Company's Manual" menu

X : tersedia pada situs Perusahaan
✓ : belum tersedia pada situs Perusahaan

X : available at the Company's website
✓ : not available at the Company's website

Aspek Pendukung Bisnis

Business Support Aspects

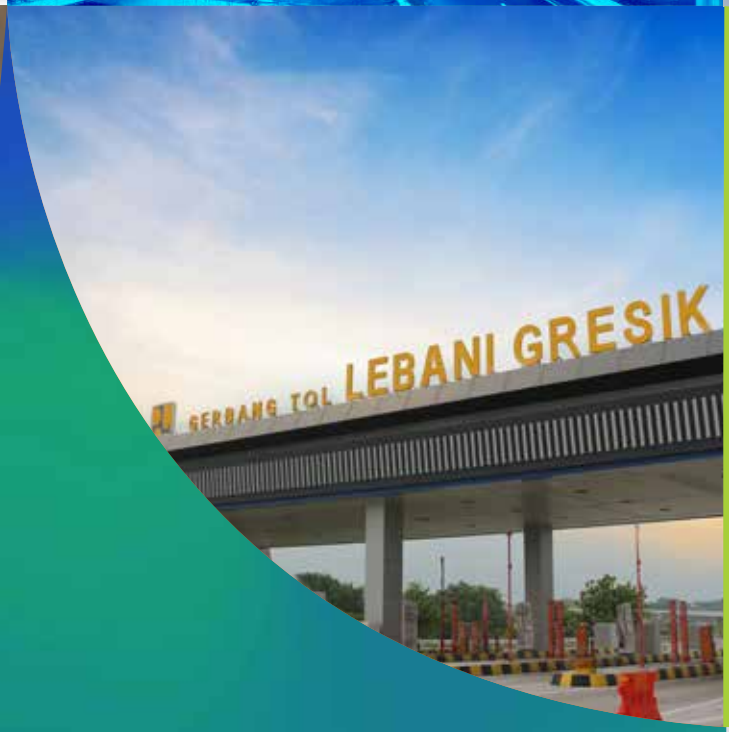
GERBANG TOL LEBANI GRESIK

TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES GOVERNANCE

PT PII sepenuhnya menyadari bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu elemen utama dalam mendukung tercapainya tujuan Perseroan dan mewujudkan visi dan misi serta rencana kerja berkelanjutan yang telah ditetapkan. Dengan latar belakang ini, PT PII secara berkelanjutan mengelola SDM secara fokus demi memperoleh SDM yang andal dan kompetitif untuk memaksimalkan kontribusinya kepada Perseroan.

IIGF is fully aware that Human Resources (HR) is one of the main elements in supporting the achievement of the Company's objectives and realizing the vision and mission, as well as the planned sustainable working program. With this background, IIGF manages HR in a focused manner to obtain reliable and competitive HR to maximize their contribution to the Company.

ROADMAP PENGELOLAAN SDM
HR MANAGEMENT ROADMAP

Pengelolaan SDM PT PII senantiasa disesuaikan dengan strategi Perseroan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta mempertimbangkan kebutuhan organisasi pada saat ini maupun masa yang akan datang. Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan Perusahaan, pengelolaan dan pengembangan SDM harus berjalan dengan baik dan lebih terarah, untuk itu PT PII telah menyusun *Roadmap* SDM periode 2020-2024.

IIGF's Human Resources Management is always adjusted to the Company's short-term and long-term strategies, taking into account the current and future organisational needs. In an effort to support the achievement of the Company's objectives, the management and development of Human Resources (HR) management and development shall be conducted well and more directed, Therefore, IIGF has developed the 2020-2024 HR Roadmap.

Tabel: *Roadmap* Pengelolaan SDM
Table: Human Resource Management Roadmap

	2020	2021	2022	2023	2024
Fokus Focus	Transformasi Internal Internal Transformation		Pengembangan Berkesinambungan Continuous Development		Realisasi Dampak Perubahan Realization of Impact of Changes
Tujuan Objective	• Kesiapan fungsi SDM untuk menjalankan peran strategis. • Keterlibatan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). • Readiness of HR functions to fulfill strategic roles. • Involvement in the National Economic Recovery (PEN).		• Pengembangan Kompetensi SDM PT PII (Level Managerial). • Manajemen Talenta berbasis data. • Development of IIGF's HR Competencies (Managerial Level) • Data-Driven Talent Management	• Kompetensi SDM (Level Non-Managerial). • *Positive employee experience.* • HR Competencies (Non-Managerial Level). • Positive employee experience.	• Mengukur dampak perubahan terhadap organisasi dan pencapaian bisnis. • Measuring the impact of change on the organisation and business outcomes.
Prioritas Program Kerja Work Program Priorities	• Pengembangan *Target Operating Model* HC dan Organisasi HC. • Ketersediaan Kebijakan dan Proses Bisnis HC (*end-to-end*). • Penyesuaian IKU guna mengakomodir mandat jangka pendek. • Pembentukan organisasi baru dengan fokus spesifik jangka pendek. • Strategi budaya organisasi. • *Employee Engagement.* • Development of HC Target Operating Model and HC Organisation. • Availability of HC Policy and Business Process (end-to-end). • KPI adjustment to accommodate short-term mandate. • Establishment of new organisation with specific short-term focus. • Organisational culture strategy.	• Perbaikan Manajemen Kompetensi. • Perbaikan sistem *Job Grading.* • Perencanaan Sumber Daya Manusia • Internalisasi Budaya Organisasi. • Implementasi HRIS. • Improvement of Competency Management. • Job Grading system improvement. • Man Power Planning. • Organisational Culture Internalisation. • HRIS Implementation.	• Pembuatan kurikulum pelatihan dan pengembangan level manajerial. • Asesmen dan Program Pengembangan level manajerial dan Tim HC. • HR *Analytics.* • Segmentasi talenta • Design of training and development curriculum for managerial level. • Assessment and Development Program for managerial level and HC Team. • HR Analytics. • Talent Segmentation.	• Pembuatan kurikulum pelatihan dan pengembangan level non manajerial. • Asesmen dan Program Pengembangan level non manajerial. • Penyusunan Manajemen Karir. • Design of training and development curriculum for non-managerial level. • Assessment and development program for non-managerial level. • Career Management Preparation.	• Implementasi program budaya. • Penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan kompetensi. • Memfasilitasi program-program engagement. • Implementasi program manajemen karir. • Cultural programs implementation. • Formulation of competency-based human resource management policies. • Facilitating engagement programs. • Career management programs.

FUNGSI PENGELOLA SDM

HR MANAGEMENT FUNCTION

Perseroan memberikan komitmen dan perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan SDM Perseroan dan memastikan pengelolaan SDM dijalankan dengan fokus yang baik agar dapat mendukung tercapainya tujuan Perseroan. Untuk itu, Perseroan membentuk Divisi Human Capital and Organization Development, sebuah divisi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan SDM Perseroan. Divisi Human Capital and Organization Development dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan.

Adapun tugas, tanggung jawab, peran dan lingkup Divisi Human Capital and Organization Development secara garis besar antara lain:

1. Memastikan pengembangan struktur organisasi sesuai visi, misi, dan strategi Perseroan.
2. Memastikan pemenuhan kebutuhan SDM Perseroan melalui proses seleksi dan rekrutmen SDM yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, pendekatan terkini, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memastikan efektivitas pelaksanaan program pengembangan berdasarkan arahan strategis organisasi sehingga program pengembangan kompetensi memenuhi kebutuhan Perseroan maupun individu Karyawan.
4. Memastikan terselenggaranya sistem penilaian kinerja yang terstruktur, objektif, dan adil di seluruh unit kerja dalam organisasi.
5. Memastikan terselenggaranya sistem kompensasi dan benefit yang berlandaskan prinsip *internally fair and externally competitive*.
6. Menginternalisasi budaya Perseroan sesuai dengan nilai Perseroan.
7. Memastikan uraian tugas, spesifikasi pekerjaan, dan pengklasifikasian pekerjaan tersedia dalam menunjang tugas dan tanggung jawab Karyawan.
8. Memastikan data dan informasi Karyawan yang akurat dan termutakhir.
9. Berkontribusi aktif dalam meningkatkan optimalisasi dan produktivitas unit kerja.
10. Memfasilitasi program-program untuk meningkatkan *engagement* karyawan.

The Company has a commitment to and care for the management of the Company's human resources and ensures that HR management is carried out with a good focus to support the achievement of the Company's objectives. Therefore, the Company established the Human Capital and Organization Development Division, a division responsible for the management and development of the Company's human resources. The Human Capital and Organization Development Division is led by a Head of Division who is responsible to the Finance Director.

In general, the duties, responsibilities, roles, and scope of the Human Capital and Organization Development Division include:

1. Ensuring the development of the organizational structure in accordance with the Company's vision, mission, and strategy.
2. Ensuring the fulfillment of the Company's HR needs by means of HR selection and recruitment processes that are in accordance with established procedures, updated approaches, and prevailing laws and regulations.
3. Ensuring the effectiveness of the development programs based on the organizational strategic direction so that competency development programs shall fulfill the Company's and the individual's needs.
4. Ensuring the implementation of a structured, objective, and fair performance assessment system in all working units in the organization.
5. Ensuring the compensation and benefits system that is based on internally fair and externally competitive principles.
6. Internalizing the Company's culture in accordance with the Company's values.
7. Ensuring job descriptions, specifications, and classifications are available to support employees' duties and responsibilities.
8. Ensuring accurate and up-to-date employee data and information.
9. Actively contributing to increasing work unit optimization and productivity.
10. Facilitating programs to enhancing employees' engagement.

Struktur Organisasi Divisi Human Capital and Organization Development
Organizational Structure of the Human Capital and Organization Development Division

Dalam pengelolaan kegiatan fungsi Human Capital dalam Divisi Human Capital and Organization Development terdapat 5 (lima) elemen penting yang dapat mendukung kinerja bisnis dan operasional Perseroan secara menyeluruh, yaitu:

In managing Human Capital functions in the Human Capital and Organization Development Division, there are five (5) important elements that can support the Company's business and operational performance:

DESAIN ORGANISASI
ORGANIZATIONAL DESIGN

Perseroan membentuk desain organisasi yang efektif untuk mengakomodir peningkatan efektifitas dan fleksibilitas pekerjaan. Desain organisasi merupakan sebuah proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi sesuai strategi dan lingkungan Perseroan. Desain organisasi yang efektif didukung dengan uraian tugas (*job description*), spesifikasi jabatan (*job specification*), tingkat pekerjaan (*job grading*) dan dokumentasi proses bisnis yang baik sehingga Perseroan dapat memastikan Karyawan bekerja dalam landasan yang sama untuk mencapai tujuan yang disepakati.

The Company has established an effective organizational design to accommodate increased work effectiveness and flexibility. Organizational design is a process of developing relationships and creating structures to achieve organizational objectives, in accordance with the Company's strategy and environment. Effective organizational design is supported by job descriptions, job specifications, job grading, and good business process. Thus, the Company can ensure that employees work on the same basis to achieve the agreed objectives.

MANAJEMEN TALENTA
TALENT MANAGEMENT

Manajemen talenta dalam Perseroan dilakukan untuk mengelola Karyawan dari awal bergabung hingga pengembangan kariernya, dengan cakupan sebagai berikut:

1. Rekrutmen dan penempatan Karyawan;
2. Pelatihan dan pengembangan Karyawan;
3. Pengelolaan kinerja Karyawan; dan
4. Pengembangan karier Karyawan.

The Company carries out talent management by managing the employees, from the moment they are onboard up to their career development, with the following scope:

1. Employee recruitment and placement;
2. Employee training and development;
3. Employee performance management; and
4. Employee career development.

REMUNERASI DAN *BENEFIT*
REMUNERATION AND BENEFIT

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki, maka Perseroan perlu memberikan kompensasi dan manfaat berupa tunjangan yang layak kepada karyawannya. Hal ini dilakukan untuk mendorong daya saing Perseroan, menyelaraskan sasaran kerja individu/kelompok dengan sasaran Perseroan dan memperkuat ownership Karyawan terhadap Perseroan.

The Company needs to provide compensation and benefits in the form of adequate allowances to its employees to maintain and improve the quality of its human resources. This initiative is carried out to enhance the Company's competitiveness, align individual/group performance target with the Company's Objectives, and strengthen employees' ownership towards the Company.

BUDAYA DAN KETERIKATAN
CULTURE AND ENGAGEMENT

Dalam rangka meningkatkan *engagement* Karyawan dan mengelola perubahan secara berkelanjutan, maka Perseroan menempatkan budaya organisasi sebagai fokus utama yang dapat dikaitkan dengan keberhasilan suatu organisasi. Perseroan dengan budaya perusahaan efektif dapat menciptakan peningkatan produktivitas, meningkatkan *ownership* dari Karyawan dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan dan sasaran Perseroan.

The Company prioritizes organizational culture as the main focus that can be linked to the success of an organization to increase employee engagement and manage change in a sustainable manner. A company with an effective corporate culture can create increased productivity, increase employee ownership, and ultimately achieve the Company's goals and objectives.

HUMAN CAPITAL OPERATIONS (HCO)
HUMAN CAPITAL OPERATIONS (HCO)

Perseroan perlu memastikan pelaksanaan operasional berjalan secara efektif dan efisien sehingga peran Human Capital dalam menunjang pelaksanaan operasional menjadi salah satu elemen yang cukup penting. Elemen ini mencakup antara lain pengelolaan *database* Karyawan dan proses bisnis, pengelolaan dokumen administrasi, pengelolaan komunikasi dan pemantauan tugas serta pekerjaan.

The Company needs to ensure that operations run effectively and efficiently. Thus, the role of Human Capital in supporting operations becomes a fairly important element. This element includes, among other things, managing employee databases and business processes, managing administrative documents, managing communications, and monitoring tasks and work.

TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES GOVERNANCE

Dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis di masa depan dan dinamika yang bergerak begitu cepat, Perseroan tentu membutuhkan bibit-bibit talenta unggul yang senantiasa dapat diandalkan untuk mendukung kemajuan organisasi. Adapun Tata Kelola SDM yang dilaksanakan Perseroan meliputi 5 (lima) elemen penting yaitu desain organisasi, manajemen talenta, remunerasi dan manfaat, budaya dan keterikatan serta operasional Human Capital.

In facing various business challenges in the future with fast-moving dynamics, the Company needs superior talent who can always be relied on to support the organization's advancement. The HR Governance implemented by the Company includes five (5) important elements, i.e., organizational design, talent management, remuneration and benefits, culture and engagement, as well as Human Capital operations. In addition, the Human Capital and Organization Development Division also

Selain itu, bekerja sama dengan fungsi General Affair, Divisi Human Capital and Organization Development juga turut serta melakukan praktik Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Perseroan. Kebijakan pengelolaan SDM Perseroan telah diatur dalam Pedoman No. HCOD.002/KEB/V.01/2023 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kegiatan Human Capital.

participates in carrying out Occupational Health and Safety practices in the Company, in collaboration with the General Affairs function. The Company's HR management policy has been regulated in Guideline No. HCOD.002/KEB/V.01/2023 of 2023 on the Human Capital Activities Management.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REKRUTMEN
RECRUITMENT POLICY AND IMPLEMENTATION

Manajemen SDM merupakan salah satu aspek penting dalam keseluruhan strategi organisasi. Dalam konteks global yang terus berubah dan kompetitif, pengelolaan SDM tidak hanya tentang merekrut Karyawan yang tepat untuk posisi yang tepat, tetapi juga tentang memahami tren pasar tenaga kerja, menghadapi tantangan teknologi, dan membangun budaya kerja yang inklusif dan inovatif. Oleh karena itu, rekrutmen menjadi salah satu aspek yang krusial dalam manajemen SDM di berbagai organisasi. Dalam era yang semakin kompetitif dan dinamis, kemampuan untuk menarik, memilih, dan mempertahankan talenta menjadi kunci keberhasilan organisasi.

HR management is an important aspect of an organization's comprehensive strategy. In an ever-changing and competitive global context, HR management is not only about recruiting the right employees for the right positions, but also about understanding labor market trends, meeting technological challenges, and establishing an inclusive and innovative work culture. Therefore, recruitment is a crucial aspect of HR management in various organizations. In an increasingly competitive and dynamic era, the ability to attract, select, and retain talents is the key to organizational success.

Kegiatan seleksi Karyawan pada proses rekrutmen di Perseroan senantiasa dilakukan secara transparan dan terbuka bagi siapa pun tanpa adanya diskriminasi terhadap gender, suku, agama, ras dan golongan tertentu, sepanjang kandidat yang bersangkutan memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Tahapan ini menjadi penting dalam hal pengelolaan SDM karena pada proses inilah Perseroan mendapatkan kandidat yang sesuai dengan budaya dan tujuan strategis yang hendak dicapai Perseroan.

The Company always perform the employees' selection in the recruitment process transparently and openly to anyone without any discrimination against gender, ethnicity, religion, race, or certain groups, as long as the candidate concerned meets the qualifications and requirements set by the Company. In HR management, this is an important phase, because in this process the Company obtains candidates who are in line with the culture and strategic objective that the Company wishes to achieve.

Selama tahun 2024, jumlah perekrutan Karyawan sebanyak 6 (enam) Karyawan yang berasal dari jalur *pro hire*.

In 2024, there were six (6) Employee recruitments via the pro-hire route.

JUMLAH DAN DEMOGRAFI KARYAWAN
EMPLOYEE FIGURE AND DEMOGRAPHICS

Per 31 Desember 2024, PT PII mengalami perubahan jumlah karyawan dari 164 orang pada tahun 2023 menjadi 163 orang pada tahun 2024 (terdapat perubahan sebesar 0,6%). Rincian terkait dengan demografi Karyawan, telah disajikan dalam Laporan Tahunan ini pada Bab Profil Perusahaan, Sub Bab Demografi Karyawan.

As of 31 December 2024, IIGF's employees changed from 164 people in 2023 to 163 people in 2024 (0.6% difference). Details related to Employee demographics can be referred to in this Annual Report in the Company Profile Chapter, Employee Demographics Sub Chapter.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
COMPETENCY DEVELOPMENT POLICY AND IMPLEMENTATION

Program pengembangan kompetensi Karyawan yang dilaksanakan oleh Perseroan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi Karyawan secara merata, baik untuk kemampuan umum maupun kemampuan khusus yang diperlukan masing-masing Karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Program pengembangan kompetensi disesuaikan dengan *Individual Development Plan* setiap Karyawan yang mencakup kompetensi teknis dan non teknis. Program pengembangan kompetensi Karyawan Perseroan dilaksanakan berdasarkan Model Kompetensi (*Competency Model*) dan kesempatan yang terbuka bagi setiap Karyawan.

The Company implements the employee competency development program to increase employee competency equally, for their general abilities and special abilities needed by each employee to improve their performance. The competency development program is tailored to each employee's Individual Development Plan which includes technical and non-technical competencies. The Company's employee competency development program is implemented based on the Competency Model and open opportunities to every employee.

Setiap Karyawan dapat mengajukan diri untuk mengikuti pelatihan dengan mengajukan persyaratan administrasi tertentu dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan divisi/atasan masing-masing dengan mempertimbangkan kebutuhan tugas, rencana pengembangan kompetensi dan pengembangan usaha. Perseroan memastikan tidak terjadinya tindakan diskriminasi dalam memperlakukan Karyawan sehingga tercipta perlakuan yang adil dan jujur sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing untuk mencapai kinerja yang *excellence*.

Each employee can apply to take part in training by submitting certain administrative requirements and obtaining approval from their respective division leaders/superiors, with due regards to the needs, competency development plans, and business development. The Company ensures that there are no acts of discrimination in treating employees to create fair and honest treatment in accordance with each individual's potential, abilities, experience, and skills to achieve performance excellence.

REALISASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN
EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT ACTUALIZATION

Perseroan melalui Divisi Human Capital and Organization Development, menyelenggarakan program pengembangan kompetensi karyawan, dikategorikan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu (1) *inhouse training*; (2) *public training*; dan (3) *knowledge sharing*. Program pengembangan kompetensi Karyawan yang dilaksanakan pada tahun 2024, tersaji pada tabel berikut ini:

The Company, through its Human Capital and Organization Development Division, held organizes employee competency development programs, which are categorized into three (3) classifications, i.e., (1) in-house training; (2) public training; and (3) knowledge sharing. The employee competency development program conducted in 2024 is presented in the following table:

Tabel Pelaksanaan Program Berdasarkan Jenis Pelatihan
Table: Program Implementation by Type of Training

Uraian Description	Jumlah Kegiatan Pelatihan Training	Total Peserta Participants	Rata-rata Peserta per Pelatihan Average Participants per Training
In House Training	9	170	19
Public Training	65	81	1
Knowledge Sharing	4	224	56

Tabel Pelaksanaan Program Berdasarkan Jenjang Jabatan
Table: Program Implementation by Position Level

Uraian Description	Jumlah Kegiatan Pelatihan Training	Total Peserta Participants	Rata-rata Peserta per Pelatihan Average Participants per Training
Senior Leader	33	140	4
Middle	42	180	4
Junior	32	155	5

Tabel Pelaksanaan *Program In House Training*
Table: In House Training Program

No.	Nama Pelatihan Training	
1.	ESG *Awareness Basic Level*	ESG Awareness Basic Level
2.	CP3P *Level Foundation Batch* 16	CP3P Level Foundation Batch 16
3.	CP3P *Level Preparation*	CP3P Level Preparation
4.	*Enterprise Risk Governance Batch* I	Enterprise Risk Governance Batch I
5.	*Leadership Middle*	Leadership Middle
6.	*Executive Briefing* Modernisasi Pengadaan	Modernizing Procurement Executive Briefing
7.	CP3P *Level Preparation Batch* V	CP3P Level Preparation Batch V
8.	*Designing Sustainability* & CSR *Roadmap Based on* ISO 26000	Designing Sustainability & CSR Roadmap Based on ISO 26000
9.	*Enterprise Risk Governance Batch* II	Enterprise Risk Governance Batch II

Tabel Pelaksanaan *Program Public Training*
Table: Public Training Program

No.	Nama Pelatihan Public Training	
1.	*Legal Drafting International Contract*	Legal Drafting International Contract
2.	*Corporate Finance Qualification* (CFQ) *Exam*	Corporate Finance Qualification (CFQ) Exam
3.	*Negotiation Skills*	Negotiation Skills
4.	Manajemen Risiko *Series* 2024	Risk Management Series 2024
5.	*Australia Award – Building Modern Cities Short Course*	Australia Award – Building Modern Cities Short Course
6.	*Growing Infrastructure Course* 2024 – *Enabling & Structuring f or Private Sector Participation in Finance and Innovation (Water & Waste Management)*	Growing Infrastructure Course 2024 – Enabling & Structuring for Private Sector Participation in Finance and Innovation (Water & Waste Management)
7.	*The 9th PRIA Awards 2024*	The 9th PRIA Awards 2024
8.	QIA tingkat Manajerial	Managerial Level QIA
9.	*Leverage Your Business Potential Through a Well - Structured Organization and a Thriving Culture*	Leverage Your Business Potential Through a Well - Structured Organization and a Thriving Culture
10.	Manajemen Risiko Perbankan	Banking Risk Management
11.	*Lobbying and Advocacy Strategy Enhancing Skills for Success in a New Government Era Transition*	Lobbying and Advocacy Strategy Enhancing Skills for Success in a New Government Era Transition

No.	Nama Pelatihan Public Training	
12.	*Measuring The Social Return on Investment* (SROI)	Measuring The Social Return on Investment (SROI)
13.	Sertifikasi *Financial Modeling Valuation Analyst* (FMVA)	Financial Modeling Valuation Analyst (FMVA) Certification
14.	*Refreshment* PMP *Certification Exam*	Refreshment PMP Certification Exam
15.	*Navigating The Global Internal Audit Standards*	Navigating The Global Internal Audit Standards
16.	*Certified Data Science Specialist + Exam*	Certified Data Science Specialist + Exam
17.	*Global Future Fellows 2024: Forging Climate - Economy Equilibrium*	Global Future Fellows 2024: Forging Climate - Economy Equilibrium
18.	Konferensi Auditor Internal 2024	2024 Internal Auditor Conference
19.	*Microsoft Power* BI 2024	Microsoft Power BI 2024
20.	Asean *Risk Award* dan *Risk Governance* 2024	Asean Risk Award dan Risk Governance 2024
21.	*Project Management Basic*	Project Management Basic
22.	Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)	Special Education for the Advocate Profession (PKPA)
23.	*Job Evaluation, Grading and Total Rewards*	Job Evaluation, Grading and Total Rewards
24.	*International Contract Drafting Legal Frameworks and Best Practices*	International Contract Drafting Legal Frameworks and Best Practices
25.	*Certified Professional Management Accountant* (CPMA)	Certified Professional Management Accountant (CPMA)
26.	*Leadership for Sustainable Impact* GRC ESG *and* SDGs	Leadership for Sustainable Impact GRC ESG and SDGs
27.	ACIIA *Regional Conference*	ACIIA Regional Conference
28.	*Business Process Reengineering*	Business Process Reengineering
29.	*Growing Infrastructure Course on Clean Energy* 2024	Growing Infrastructure Course on Clean Energy 2024
30.	*Internal Control Testing*	Internal Control Testing
31.	Sertifikasi Manajemen Risiko - CCRA	Risk Management Certification - CCRA
32.	Sertifikasi Kompetensi QCRO	QCRO Certificate of Competency
33.	*Basic Decoding Financial Statement Analysis* 2024	Basic Decoding Financial Statement Analysis 2024
34.	Peran Psikologi Industri dan Organisasi dalam Proses Transformasi Bisnis	The Role of Industrial and Organizational Psychology in the Business Transformation Process
35.	*Implementing* GRC dan Ujian Sertifikasi GRC *Professional* (CGRCP)	Implementing GRC and GRC Professional (CGRCP) Certification
36.	Penghapus Pidana dan Perlindungan Hukum Untuk Direksi dan Komisaris BUMN	Exemption from Criminal Liability and Legal Protection of the SOEs' Board of Directors and Commissioners
37.	*Clean Energy Finance Training Program* 2024	Clean Energy Finance Training Program 2024
38.	IFRS *Sustainability Disclosure* 2024	IFRS Sustainability Disclosure 2024
39.	SAK *Executive*	SAK Executive
40.	*Certified Public Accountant Review*	Certified Public Accountant Review
41.	*Teamwork Skills: Communicating Effectively In Groups*	Teamwork Skills: Communicating Effectively In Groups
42.	Strategi *Planning and Corporate Budgeting*	Strategic Planning and Corporate Budgeting
43.	*Managing People for Productivity*	Managing People for Productivity
44.	*Effective Communication Interpersonal Skills*	Effective Communication Interpersonal Skills
45.	CISA *Review Course*	CISA Review Course

No.	Nama Pelatihan Public Training	
46.	*Project Risk Management*	Project Risk Management
47.	Seminar Nasional: Bincang SPI 2024	National Seminar: 2024 SPI Talk
48.	*Effective Business Communication*	Effective Business Communication
49.	*Risk Control Self Assessment*	Risk Control Self-Assessment
50.	*Certified Professional Management Accountant* (CPMA)	Certified Professional Management Accountant (CPMA)
51.	*Influencer*	Influencer
52.	Konsep dan Aplikasi Perpajakan PPN, WHT dan PPh	VAT, WHT and Income Tax Concepts and Applications
53.	*Renewable Energy Mini Grids in* SSTC	Renewable Energy Mini Grids in SSTC
54.	*Project Risk Management*	Project Risk Management
55.	*Business and Financial Modeling*	Business and Financial Modeling
56.	ADBI-*Stanford Leadership Academy for Development Training Program on Public Policy for Infrastructure*	ADBI-Stanford Leadership Academy for Development Training Program on Public Policy for Infrastructure
57.	Sertifikasi *Digital* PR *Content Visual Designer*	Certification for Digital PR Content Visual Designer
58.	Sertifikasi Ahli K3 Umum BNSP	General HSE Expert Certification from the National Professional Certification Board
59.	*Finance for Non Finance Professionals*	Finance for Non-Finance Professionals
60.	*Project Management Professional* (PMP) 2024	Professional Project Management (PMP) 2024
61.	*Effective Business Communication*	Effective Business Communication
62.	Inovasi Sosial Kontributor Utama Untuk Percepatan Pencapaian SDGs di Indonesia	Social Innovation as a Key Contributor to Accelerating the SDGs Achievement in Indonesia
63.	*Financial Statement Analysis*	Financial Statement Analysis
64.	*Risk Beyond* 2024	Risk Beyond 2024
65.	*New Corporate Governance Leadership Program Internalizing Integrated Mindset Toward Sustainable Long-term Value Creation*	New Corporate Governance Leadership Program Internalizing Integrated Mindset Toward Sustainable Long-term Value Creation

Tabel Pelaksanaan *Program Knowledge Sharing*
Table: Knowledge Sharing Program

No.	Topik *Knowledge Sharing* Knowledge Sharing Topic	
1.	Sosialisasi *Enterprise Risk Management*	Socialization of Enterprise Risk Management
2.	*Waste & Water Management Asia dan Building Modern Cities*	Waste & Water Management Asia dan Building Modern Cities
3.	Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan	Duties and Functions of the Ministry of Finance
4.	Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Negara	Fundamentals of State Financial Management

Selama tahun 2024, PT PII telah melaksanakan program pelatihan dan pengembangan karyawan dengan jumlah jam pelatihan mencapai 6.447,62 jam dan rata-rata 39,74 jam per orang.

In 2024, IIGF provided employee training and development programs with a total of 6,447.62 training hours and an average of 39.74 hours per person.

RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN TAHUN 2025
EMPLOYEE' COMPETENCY DEVELOPMENT PLAN IN 2025

Pada tahun 2025, PT PII akan mengimplementasikan *Competency Based Human Resources Management* (CBHRM). Melalui CBHRM tersebut, pengembangan kompetensi pada tahun 2025 akan direncanakan sebagai berikut:

1. Pengembangan kompetensi teknis inti dan kompetensi non teknis inti, sesuai dengan *individual development plan* (IDP) yang telah disusun oleh setiap karyawan.
2. Fokus pengembangan pada 2 kompetensi inti yang memiliki *gap* terbanyak, melalui pembelajaran secara *experiential learning.*
3. Program *competency development* untuk kompetensi *Risk Management, Product Knowledge* dan *Innovation & Adaptability.*
4. Program pengembangan kompetensi *leadership level Senior Leader*, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas peran *Senior Leader.*

In 2025, IIGF will implement Competency-Based Human Resources Management (CBHRM). Using CBHRM, competency development in 2025 will be planned as follows:

1. Development of core technical competencies and non-core technical competencies, in accordance with the individual development plan (IDP) prepared for each employee.
2. Development focus on 2 core competencies with the most gaps, via experiential learning.
3. Competency development program for Risk Management, Product Knowledge, and Innovation & Adaptability competencies.
4. Senior Leader level leadership competency development program, with the objective of increasing the Senior Leader's effectiveness.

REALISASI BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN
EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT EXPENSES

Sepanjang tahun 2024, PT PII telah merealisasikan dana pendidikan dan pelatihan Karyawan sebesar Rp4,61 miliar, yaitu mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp4,31 miliar. Peningkatan biaya ini terjadi karena peningkatan kebutuhan akan pengembangan kompetensi karyawan dan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing Perseroan yang semakin kompetitif.

In 2024, IIGF spent employee education and training amounting to Rp4,61 billion, which has increased when compared to 2023, of Rp4,31 billion. This increase in costs occurred due to the increased need for employee competency development and improvement of human resources and the Company's increasingly competitive edge.

Tabel Perbandingan Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan PT PII
Table: Comparison of IIGF's Competency Development Costs

Uraian Description	2024 (Rp juta) 2024 (Rp million)		2023 (Rp juta) 2023 (Rp million)	Perbandingan Realisasi 2024 (%) 2024 Realization (%)	
	Realisasi Realization	Anggaran Budgeting	Realisasi Realization	terhadap Anggaran 2024 to 2024 Budget	terhadap Realisasi 2023 to 2023 Realization
Investasi Pelatihan dan Pendidikan Training and Education Investment	4.607	6.809	4.310	67,7%	106,8%

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KARIER

CAREER DEVELOPMENT POLICY AND IMPLEMENTATION

PT PII berkomitmen untuk memberi kesempatan kepada setiap Karyawan dalam pengembangan kariernya. PT PII telah menetapkan jenjang karier yang jelas dan transparan melalui jalur fungsional maupun struktural. Pada tahun 2024, PT PII telah melakukan *launching program career management* yaitu InCHARGE dengan *tagline "manage your career, control your future"* sekaligus melakukan asesmen kompetensi teknis dan kompetensi non teknis Karyawan, dengan tujuan untuk melakukan pemetaan talenta yang ada di Perseroan dan pengembangan Karyawan. Diharapkan dengan pengelolaan talenta yang telah dilakukan, dapat memberikan kesempatan Karyawan untuk mengembangkan dirinya sekaligus mengembangkan kariernya di Perseroan. Pengembangan karier Karyawan ini bertujuan untuk:

1. Membantu pencapaian prestasi atau tujuan individu sebagai bentuk hubungan timbal balik yang bermanfaat bagi kesejahteraan Karyawan dan tujuan Perseroan.
2. Meningkatkan produktivitas, motivasi, dan loyalitas Karyawan.
3. Membantu Karyawan memahami dan mengembangkan potensi dan keahliannya, sehingga mampu menciptakan iklim kerja positif.
4. Mengurangi tingkat *turnover*. Perseroan melalui Divisi Human Capital and Organization Development, selaku unit kerja yang membidangi fungsi SDM, telah melakukan reviu terhadap kebijakan pengembangan karier yang berlaku di Perseroan. Diharapkan dengan adanya pembaharuan terhadap kebijakan tersebut, dapat mendukung pengembangan karier Karyawan dan tentunya akan berdampak pada *engagement* Karyawan.

IIGF is committed to providing opportunities for every employee to develop their career. IIGF has established clear and transparent career paths via functional and structural pathways. In 2024, the Company launched a career management program, i.e., InCHARGE, with the tagline "manage your career, control your future", and conducted an assessment of employees' technical and non-technical competencies, with the objective to map the existing talents in the Company and develop the employees. With the talent management implemented, the Company shall provide employees with opportunities to develop themselves and simultaneously develop their careers within the Company. The employee's career development has the objective to:

1. Assisting to achieve individual achievements or objectives as a form of reciprocal relationship that is beneficial for employee welfare and the Company's objectives.
2. Increasing employee productivity, motivation, and loyalty.
3. Assisting employees understand and develop their potential and skills, to create a positive working climate.
4. Reducing turnover rate. The Company, via its Human Capital and Organization Development Division, as the work unit responsible for HR functions, has conducted a review of the career development policies applicable to the Company. The updated policy will support employees' career development and will have an impact on employee engagement.

PENILAIAN KINERJA

PERFORMANCE ASSESSMENT

PT PII memiliki sistem penilaian kinerja Karyawan yang terintegrasi dan menyeluruh serta terdokumentasi dengan baik agar dapat digunakan sebagai *tools* untuk membantu masing-masing Karyawan dalam mencapai kinerja terbaik mereka dalam mendukung pencapaian tujuan Perseroan. Kinerja Karyawan dinilai oleh atasan langsung dengan mengacu pada pencapaian tujuan dan target individual menggunakan *Key Performance Indicators* (KPI) berbasis *Balanced Score Card* (BSC) atau disebut juga dengan BSC KPI. Kemudian, dalam rangka *monitoring* pencapaian kinerja

The Company has an integrated and comprehensive employee performance evaluation system, which is well-documented to serve as a tool for supporting each employee in achieving their best performance to support the achievement of the Company's objectives. Employee performance is assessed by direct supervisors with reference to the achievement of individual goals and targets using the Balanced Score Card (BSC)-based Key Performance Indicators (KPI) or BSC KPI. Further, to monitor the performance achievements of individuals, divisions, and the Company, the Human Capital

individu, divisi dan Perseroan, Divisi Human Capital and Organization Development juga melakukan evaluasi kinerja tengah tahun. Di akhir periode proses penilaian kinerja, hasil penilaian kinerja Karyawan tersebut, selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan oleh Divisi Human Capital and Organization Development untuk menentukan program pengembangan dan pelatihan yang dibutuhkan selanjutnya, optimalisasi penempatan Karyawan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, pemberian *reward and punishment*, penentuan remunerasi, dan perencanaan suksesi Karyawan yang berpotensi untuk diangkat ke posisi manajemen puncak.

and Organization Development Division evaluates the mid-year performance. At the end of the performance assessment process period, the results of the employee performance assessment are used as a basis for consideration by the Human Capital and Organization Development Division to determine the training and development needed, optimize employee placement according to their competencies, provide rewards and punishment, determine remuneration, and plan succession of employees who have the potential to be appointed to top management positions.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN REMUNERASI
REMUNERATION STRATEGY AND POLICY

Dalam sistem pengelolaan SDM, remunerasi merupakan salah satu aspek yang penting dalam upaya menarik (*attract*), memotivasi (*motivate*), dan mempertahankan (*retain*) Karyawan terbaik dalam rangka tersedianya SDM yang berkualitas. Perseroan berkomitmen untuk menerapkan sistem remunerasi yang dinamis, responsif, kompetitif, adil dan seimbang, serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kebijakan penerapan remunerasi di lingkungan Perseroan didasarkan atas kinerja Perseroan dan Karyawan, yang disesuaikan dengan strategi Perseroan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

In the HR management system, remuneration is an important aspect of efforts to attract, motivate, and retain the best employees to ensure quality human resources. The Company is committed to implementing a remuneration system that is dynamic, responsive, competitive, fair, and balanced, and in accordance with the prevailing provisions. The policy for implementing remuneration within the Company is based on the performance of the Company and its employees, which is adjusted to the Company's short-term and long-term strategy.

PT PII menerapkan sistem remunerasi Karyawan yang kompetitif dan dipastikan telah memenuhi ketentuan tingkat upah minimum yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Remunerasi juga disusun dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku seperti ketenagakerjaan, maupun melakukan *benchmark* dengan organisasi sejenis lainnya. Terkait hal tersebut, Perseroan telah menetapkan standar penggajian berdasarkan jenjang jabatan yang disandarkan kepada *remuneration survey* dalam industri sejenis dengan memperhatikan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Upah Minimum Provinsi (UMP).

IIGF implements a competitive employee remuneration system and ensures that it meets the prevailing minimum wage as stipulated in statutory provisions. Remuneration is also formulated with due regards to the prevailing laws and regulations, such as employment, as well as benchmarking with other similar organizations. Therefore, the Company has set salary standards based on position levels which are benchmarked against remuneration surveys within similar industries, by taking into account the Labor Law and Provincial Minimum Wage (UMP) Regulations.

Dalam rangka mengupayakan kesejahteraan setiap Karyawan, PT PII menetapkan kebijakan remunerasi Karyawan dengan memperhatikan *gap* rasio gaji seluruh Karyawan untuk menghindari terjadinya kesenjangan yang

IIGF establishes an employee remuneration policy to strive for employee welfare, by paying attention to the salary ratio gap for all employees to avoid a too-high gap. The Company ensures that all employees have received remuneration in

terlalu tinggi. Dapat dipastikan bahwa seluruh Karyawan Perseroan telah mendapatkan remunerasi yang sesuai dengan jabatan dan fungsinya masing-masing. Dengan adanya sistem remunerasi yang baik ini, diharapkan dapat menjadi salah satu strategi retensi Karyawan untuk meningkatkan loyalitas mereka kepada Perseroan, dan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan Perseroan karena setiap Karyawan akan bekerja secara maksimal dalam mencapai rencana kerja Perseroan.

accordance with their respective positions and functions. A good remuneration system shall be an employee retention strategy to increase their loyalty to the Company, and have a positive impact on the Company's growth because each employee will work optimally to achieve the Company's work programs.

Struktur remunerasi Karyawan Perseroan senantiasa disesuaikan setiap tahunnya dengan mempertimbangkan unsur kompetitif dengan eksternal dan unsur *fairness* di dalam Perseroan. Secara umum, setiap Karyawan Perseroan berhak atas beberapa komponen remunerasi sebagai berikut:

1. Gaji pokok;
2. Tunjangan tetap;
3. Tunjangan Hari Raya Keagamaan;
4. Tunjangan Cuti Tahunan;
5. Tunjangan Cuti Besar; dan
6. Tunjangan Profesional.
7. Tunjangan Pajak Penghasilan.

The Company's employee remuneration structure is adjusted annually with due regards to the external competitive elements and internal fairness elements. In general, every employee of the Company is entitled to several remuneration components as follows:

1. Basic Salary;
2. Fixed Allowances;
3. Religious Holiday Allowance;
4. Annual Leave Allowance;
5. Long Service Allowance; and
6. Professional Benefits.
7. Tax borne by the Company: Income Tax.

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

PT PII telah menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Program Jaminan Pensiun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Sampai dengan akhir tahun 2024, seluruh Karyawan Perseroan telah ikut serta dalam Program BPJS Ketenagakerjaan.

EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY

IIGF has implemented the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 46 of 2015 concerning the Administration of the Provident Fund Benefit Program and Pension Security Programs in accordance with Government Regulation No. 45 of 2015 on the Implementation of Pension Security Programs. As of the end of 2024, all Company's employees have been enrolled in the BPJS Employment Program.

INTERNALISASI BUDAYA KERJA
INTERNALIZATION OF WORKING CULTURE

Budaya kerja Perseroan mengacu kepada nilai-nilai Perseroan yaitu InTIME (*Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust* dan *Excellence*). Nilai-nilai Perseroan ini telah menjadi bagian dan tidak dapat dipisahkan dalam seluruh kegiatan usaha Perseroan. Internalisasi nilai-nilai budaya Perseroan tentunya menjadi program berkelanjutan yang terus dilakukan oleh Divisi Human Capital and Organization Development yang membidangi fungsi pengelolaan SDM di Perseroan untuk membentuk budaya Perseroan yang dapat mendukung pencapaian Perseroan dalam jangka panjang.

The Company's work culture refers to the Company's values, i.e., InTIME (Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust, and Excellence). These Company values are a part of and cannot be separated from all of the Company's business activities. The internalization of the Company's cultural values is a continuous program carried out by the Human Capital and Organization Development Division, which oversees the HR management function in the Company, to establish a Company culture that can support the Company's long-term achievements.

Internalisasi ini diantaranya dilakukan melalui sosialisasi dan program-program berkelanjutan yang dilaksanakan selama tahun 2024 melalui kegiatan-kegiatan di Perseroan seperti:

1. Pembentukan tim *Culture Squad* setiap Direktorat dengan tujuan untuk menyusun dan implementasi program budaya
2. Internalisasi budaya dengan penyusunan video InTIME (definisi, perilaku yang harus dilakukan).
3. Kegiatan kebersamaan yaitu *Townhall Meeting, Company Gathering,* dan perayaan Hari Ulang Tahun Perseroan

This internalization is carried out, among other things, via dissemination and sustainable programs, which were implemented in 2024 through various activities in the Company such as:

1. Establishment of Culture Squad teams for each Directorate with the objective to develop and implement cultural programs
2. Internalisation of culture, by preparing InTIME video (definition, conduct).
3. Gathering, i.e., Townhall Meeting, Company Gathering, and the Company's Anniversary celebration.

HUBUNGAN INDUSTRIAL
INDUSTRIAL RELATION

Perseroan terus berupaya menghadirkan lingkungan kerja yang terbuka, positif, dan progresif untuk meningkatkan hubungan industri yang harmonis, dinamis, dan adil antara Perseroan sebagai pihak pemberi kerja dengan para Karyawan sebagai salah satu pemangku kepentingan utama. Pengelolaan hubungan industrial pada lingkup Perseroan senantiasa menjunjung tinggi hak dan kewajiban Karyawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Company strives to provide an open, positive, and progressive working environment to enhance harmonious, dynamic, and fair industrial relations between the Company as an employer and employees as one of the main stakeholders. Industrial relations management within the Company upholds the rights and obligations of employees as regulated in the Company's Regulations and prevailing laws and regulations.

Dalam berbagai kesempatan, manajemen membuka komunikasi dan forum diskusi bersama dengan Karyawan untuk membahas isu-isu di bidang ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan kapanpun sesuai dengan kebutuhan. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan terciptanya hubungan kerja yang sehat maka produktivitas kerja dan *engagement* masing-masing Karyawan juga akan meningkat.

On various occasions, management opens communication and discussion forums with employees to discuss issues in the employment sector. These activities can be carried out at any time based on the needs. The Company understands that by creating healthy working relationships, the work productivity and engagement of each employee will increase.

Komitmen Perseroan untuk membangun dan memelihara Hubungan Industrial yang sehat dan harmonis sebagai sebuah sistem hubungan kerja yang sehat dan konstruktif antara Karyawan, Perseroan dan Pemerintah (Tripartit), dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan Karyawan dan Perseroan.

The Company's commitment to establishing and maintaining healthy and harmonious Industrial Relations as a healthy and constructive working relationship system between employees, the Company, and the Government (Tripartite), is carried out with the objective of enhancing the productivity and welfare of employees and the Company.

Perseroan akan secara konsisten melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan Perseroan serta berkomitmen untuk menindaklanjuti keluhan terkait masalah ketenagakerjaan yang diajukan kepada Perseroan dengan sebaik-baiknya. Perseroan juga berkomitmen

The Company consistently evaluates and improves the Company's policies and is committed to following up complaints with best endeavors regarding employment issues submitted to the Company. The Company is also committed to implementing a fair, reasonable, and consistent

untuk memberlakukan sistem rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier secara adil, wajar, dan konsisten berdasarkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Beberapa pendekatan telah dilakukan oleh Perseroan dalam upaya menciptakan suasana kerja yang terbuka, positif dan progresif untuk menciptakan hubungan industrial yang sehat dan harmonis, antara lain menyelenggarakan Sosialiasi Peraturan Perusahaan Tahun 2024 – 2026 kepada semua karyawan, menyelenggarakan *townhall meeting* yang melibatkan seluruh Karyawan atau *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan Senior Leaders. Melalui kegiatan tersebut Perseroan berusaha memfasilitasi dan memberi ruang bagi Karyawan untuk dapat menyampaikan aspirasi-aspirasinya.

recruitment, promotion, and career development system based on competency, in line with the Company's needs. Several approaches have been taken by the Company in an effort to create an open, positive and progressive working atmosphere to create healthy and harmonious industrial relations, including organizing Socialization of Company Regulations 2024 - 2026 to all employees, organizing townhall meetings involving all employees or Focus Group Discussions (FGD) involving Senior Leaders. Through these activities, the Company tries to facilitate and provide space for employees to express their aspirations.

PROGRAM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) PROGRAM

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan hal penting bagi Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan memiliki komitmen kuat dalam pelaksanaan praktik K3. Praktik K3 yang telah dilaksanakan Perseroan selama ini utamanya berfokus pada pencapaian tingkat kecelakaan nihil atau *zero accident.*

Occupational Health and Safety (OHS) is important for the Company. Therefore, the Company has a strong commitment to implementing OHS practices. The Company has implemented OHS practices with the main focus on achieving a zero-accident rate.

Dalam upaya mencapai hal tersebut, PT PII melaksanakan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang mengatur tentang pengendalian risiko kegiatan kerja, termasuk pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penerapan SMK3 di Perseroan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Therefore, IIGF implements an Occupational Health and Safety Management System (OHSMS), which regulates risk control of work activities, including preventing work accidents and work-related diseases. The OHSMS implementation in the Company is carried out with reference to the Minister of Manpower Regulation No. 5 of 1996 on the Occupational Health and Safety Management System, which have been refined by the Government Regulation No. 50 of 2012 on the Occupational Health and Safety Management System (OHSMS).

PT PII meyakini dengan penerapan SMK3 yang memadai dan kesadaran terhadap pentingnya SMK3 akan mendukung terwujudnya suasana aman dan nyaman dalam bekerja. Hal tersebut juga diharapkan dapat mengurangi dan mencegah terjadinya insiden kecelakaan kerja. Hal tersebut tercermin dari tidak terjadi kecelakaan di lingkungan kerja Perseroan sepanjang tahun 2024.

IIGF understands that adequate implementation of OHSMS and awareness of the OHSMS importance shall support the creation of a safe and comfortable atmosphere at work. This shall also reduce and prevent work accidents/incidents. This is reflected in no accidents in the Company's working environment in 2024.

Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut dalam Laporan Tahunan ini pada Bab Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

This will be detailed in this Annual Report in the Social and Environmental Responsibility Chapter.

TINGKAT KETERLIBATAN KARYAWAN
EMPLOYEE ENGAGEMENT

PT PII menilai bahwa Karyawan memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan bisnis Perseroan. Oleh sebab itu, penting bagi Perseroan untuk mengetahui tingkat keterikatan Karyawan secara personal terhadap Perseroan sebagai tempat pengembangan kariernya. Indikator penilaian Perseroan dalam mengetahui tingkat keterikatan Karyawan dilakukan melalui pelaksanaan *Employee Engagement Survey* (EES). Keterikatan Karyawan merujuk pada tingkat komitmen, loyalitas, dan keterlibatan emosional yang dimiliki oleh Karyawan terhadap pekerjaan dan Perseroan.

The Company considers employees to have a very important role in the Company's business continuity. Therefore, the Company considers the understanding of personal employee engagement important towards the Company as a place for career development. The Company's assesses the indicators of employee engagement by implementing the Employee Engagement Survey (EES). Employee engagement refers to the level of commitment, loyalty, and emotional involvement that employees have towards their work and the Company.

Pada tahun 2024, EES diikuti oleh 157 Karyawan dengan skor 73. Hasil survei tahun 2024 ini akan menjadi landasan Perseroan dalam melakukan pengembangan dalam hal strategi komunikasi dengan karyawan, mekanisme umpan balik dan pengembangan karir karyawan sehingga dapat meningkatkan engagement karyawan di tahun 2025. Fokus ini berbeda dengan inisiatif tahun 2024 yaitu peningkatan peran pimpinan divisi dalam pengelolaan sumber daya manusia sesuai survei pada tahun 2023 dengan skor 79.

In 2024, the EES was participated by 157 employees with a score of 73. The results of the 2024 survey will be the basis for the Company to develop communication strategies with employees, feedback mechanisms and employee career development so as to increase employee engagement in 2025. This focus is different from the 2024 initiative, which is to increase the role of division leaders in human resource management according to the survey in 2023 with a score of 79.

Hasil EES
EES Result

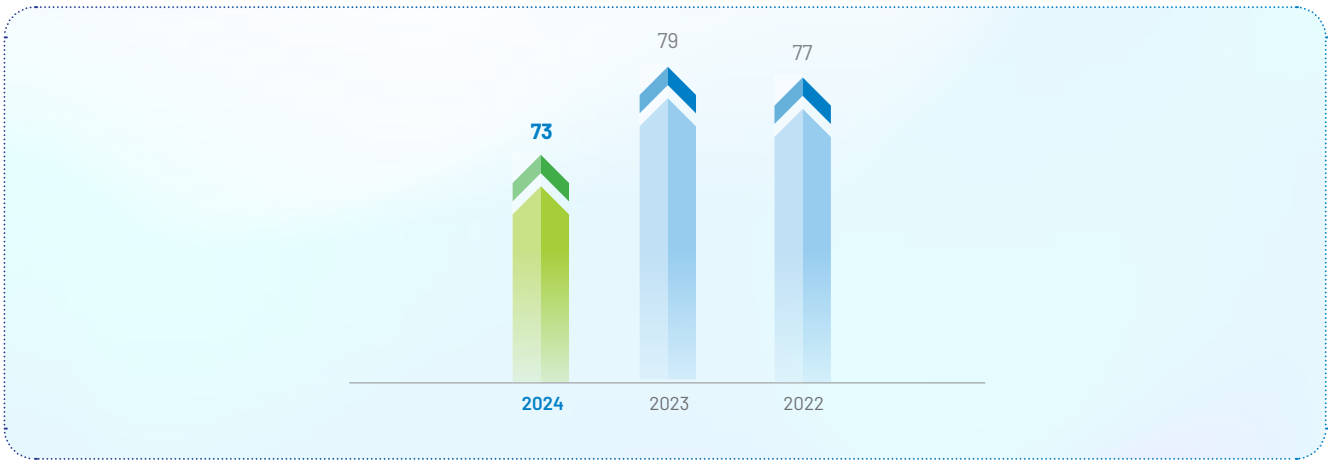

TINGKAT *TURNOVER* KARYAWAN
EMPLOYEE TURNOVER RATE

Dari tahun ke tahun, PT PII selalu berupaya menjaga tingkat turnover Karyawan agar tetap terkendali pada batas yang wajar sehingga tidak mengganggu proses pencapaian tujuan Perseroan. Perseroan menyadari bahwa tingkat perputaran Karyawan menjadi tantangan yang tidak terhindarkan dalam suatu organisasi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya strategi retensi yang tepat untuk meningkatkan loyalitas Karyawan. Perseroan melakukan reviu secara berkala terhadap kebijakan pengelolaan SDM yang dimiliki agar tetap relevan dengan dinamika bisnis yang terjadi dan mampu menjawab kebutuhan Karyawan. Dengan diterapkannya kebijakan pengelolaan SDM yang tepat dan terjalinnya hubungan antar Karyawan yang harmonis, Perseroan mampu mengendalikan tingkat perputaran Karyawan pada angka yang relatif rendah setiap tahunnya.

Informasi lebih detail terkait tingkat *turnover* Karyawan Perseroan pada 3 (tiga) tahun terakhir tersaji pada tabel di bawah ini:

Each year, the Company strives to keep the employee turnover rate under control within reasonable limits so that it does not interfere with the process of achieving the Company's objective. The Company understands that employee turnover is an unavoidable challenge in an organization. Therefore, it is necessary to have an appropriate retention strategy to increase employee loyalty. The Company regularly reviews its HR management policies to ensure its relevance with current business dynamics and answer employee needs. By implementing appropriate HR management policies and establishing harmonious relationships between employees, the Company shall be able to control employee turnover at a relatively low rate every year.

More detailed information regarding the Company's employee turnover rate in the last three (3) years is presented in the following table:

Tabel Tingkat *Turnover* Karyawan (orang)
Table: Employee Turnover Rate (people)

Uraian Description	2024	2023	2022
Penyebab Karyawan Keluar: Employees Exiting:			
Pensiun Pension	1	1	-
Meninggal Dunia Death	-	-	-
Mengundurkan Diri Resignation	7	4	9
Diberhentikan Termination	-	-	-
Jumlah Karyawan Number of Employees	163	164	152
Tingkat *Turnover* Turnover Rate	4,28%	2,53%	6,10%

PROGRAM PENSIUN
PENSION PROGRAM

Bagi Karyawan yang akan memasuki masa pensiun, Perseroan telah mengatur terkait hal tersebut dalam kebijakan berupa Surat Keputusan Direksi. Dalam kebijakan tersebut telah memuat pengaturan terkait fleksibilitas waktu kerja, pelatihan dan hak-hak serta benefit.

Perseroan telah memiliki program pensiun bagi seluruh Karyawan dengan ketentuan-ketentuan di bawah ini:

1. Usia pensiun Karyawan ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun, dengan waktu kerja terakhir jatuh pada akhir bulan saat Karyawan menginjak usia 56 (lima puluh enam) tahun. Sebagai contoh, Karyawan berulang tahun ke-56 di 10 Januari 2016, maka hari kerja terakhir Karyawan adalah 31 Januari 2016.
2. Dalam menjaga efisiensi dan efektivitas bisnis Perseroan atau dalam rangka memberikan kesempatan untuk pengembangan potensi diri Karyawan, maka Perseroan dapat menentukan atau memberhentikan Karyawan dengan hak pensiun.

Sepanjang tahun 2024, terdapat 1 (satu) karyawan yang pensiun dan terdapat 1 (satu) orang karyawan yang telah memasuki masa persiapan pensiun. Perseroan memiliki kebijakan terkait program persiapan pensiun karyawan meliputi kesempatan untuk mengambil pelatihan dan fleksibilitas bekerja 4 (empat) hari kerja dalam seminggu pada 9 (sembilan) bulan pertama dan fleksibilitas masuk kerja di 3 (tiga) bulan terakhir sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia No. SK-020/DIR/COS/HR/0815 tentang Masa Persiapan Pensiun Karyawan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagaimana diubah terakhir dalam Surat Keputusan Direksi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia No. SK-010/DIR/COS/HR/0316 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Direksi No. SK-020/DIR/COS/HR/0815 tentang SK Masa Persiapan Pensiun Karyawan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

In terms of employees entering retirement period, the Company has regulated this matter in a policy in the form of a Board of Directors' Decree. The policy stipulates regulations regarding work time flexibility, training, and rights and benefits.

The Company has a pension program for all employees under the following conditions:

1. The employee retirement is set forth at fifty-six (56) years, with the last working month in the month when employee turns fifty-six (56) years old. For example, if an employee turns 56 on 10 January 2016, the employee's last working day will be 31 January 2016.
2. To maintain the efficiency and effectiveness of the Company's business or to provide opportunities for developing the employees' personal potential, the Company can determine or dismiss employees with retirement rights.

Throughout 2024, there was 1 (one) employee who retired and 1 (one) employee who has entered the retirement preparation period. The Company has a policy related to employee retirement preparation program, including the opportunity to take training and flexibility to work four (4) working days a week in the first nine (9) months and flexibility to work in the last three (3) months as stated in the Decree of the Board of Directors of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia No. SK-020/DIR/COS/HR/0815 on the Retirement Preparation Period for Employees of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) as lastly amended by the Decree of the Board of Directors of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia No. SK-010/DIR/COS/HR/0316 on the First Amendment to the Decree of the Board of Directors No. SK-020/DIR/COS/HR/0815 on the Decree on the Retirement Preparation Period for Employees of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

RENCANA FOKUS PENGELOLAAN SDM TAHUN 2025
HR MANAGEMENT FOCUS IN 2025

PT PII senantiasa melakukan pengembangan terhadap pengelolaan SDM yang berkesinambungan dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Fokus pengelolaan SDM pada tahun 2025 secara umum akan melakukan implementasi pengelolaan SDM berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*) secara bertahap dalam setiap fungsi pengelolaan SDM yang mencakup:

1. *Recruitment and Selection* berbasis kompetensi;
2. *Learning and Development* berbasis kompetensi;
3. *Performance Management* berbasis kompetensi;
4. *Career Management* berbasis kompetensi; dan
5. *Remuneration Management* berbasis kompetensi.

IIGF always develops sustainable and synchronized HR management in accordance with the Company's vision and mission. In 2025, the HR will focus on implementing Competency Based Human Resource Management gradually in each HR management function, which includes:

1. Competency based Recruitment and Selection;
2. Competency based Learning and Development;
3. Competency based Performance Management;
4. Competency based Career Management; and
5. Competency based Remuneration Management.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

Pengembangan Teknologi Informasi (TI), terutama di era digital, semakin penting untuk dilakukan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional Perseroan. Di era pandemi dan post pandemi, penggunaan teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan prioritas bagi banyak Perseroan, tak terkecuali PT PII.

The development of Information Technology (IT), especially in the digital era, is increasingly important to support the Company's effective operation. In the pandemic and post-pandemic era, the use of information technology has become a priority for many companies, including IIGF.

PT PII memberikan perhatian besar terhadap pengembangan TI melalui *upgrading* sarana dan prasarana TI, khususnya terkait digitalisasi dan keamanan penggunaan TI agar dapat bekerja secara optimal terutama saat menghadapi perubahan bisnis yang sangat *agile* serta serangan siber (*cyber attack*) yang semakin bervariasi. *Cyber Security* menjadi salah satu risiko yang dihadapi oleh PT PII terkait pengelolaan TI. Oleh karena itu, PT PII berkomitmen untuk menjamin kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) data sebagai hal yang semakin krusial saat ini yang didukung oleh perangkat yang memadai.

IIGF heavily considers the development of IT by upgrading IT facilities and infrastructure, especially related to digitalization and security of IT usage so that it can work optimally, specifically when facing highly agile business changes and increasingly varied cyber attacks. IIGF faces Cybersecurity risk as one of the risks in managing IT. Therefore, IIGF is committed to ensuring the confidentiality, integrity, and availability of data as an increasingly crucial matter, supported by adequate equipment.

Pemanfaatan Teknologi Informasi diharapkan mampu meningkatkan dan memudahkan proses bisnis Perseroan dan mendukung operasional Perseroan sejalan dengan visi dan misi PT PII.

The utilization of Information Technology shall improve and facilitate the Company's business processes and support the Company's operations, in line with IIGF's vision and mission.

ROADMAP PENGELOLAAN TI

IT MANAGEMENT ROADMAP

Guna memberikan arah pengembangan yang jelas terkait pengelolaan Teknologi Informasi di PT PII, sebuah *Information Technology Master Plan* (ITMP) telah disusun sebagai acuan pengembangan teknologi informasi serta diimplementasikan pada jangka waktu periode 2018-2023 dengan *review* terakhir dilakukan pada tahun 2022.

Pada tahun 2024, PT PII juga telah menyelesaikan penyusunan ITMP periode 2023-2027. Bagan berikut ini menggambarkan tahapan *roadmap* pengelolaan TI Perseroan:

The Company has prepared Information Technology Master Plan (ITMP) as a reference for information technology development to provide a clear development direction related to Information Technology management at IIGF. The ITMP has been implemented in the 2018-2023 period and lastly reviewed in 2022.

In 2024, IIGF has set forth its 2023-2027 ITMP. The following illustrates the phases of the Company's IT management roadmap:

Phase 1	Phase 2	Phase 3
- Melakukan otomasi proses bisnis *end-to-end* - Menciptakan budaya digitalisasi di Perseroan dalam rangka efisiensi biaya dan efektivitas proses bisnis - Menyediakan sistem informasi yang saling terintegrasi - Peningkatan aspek *cyber security* - Automate end-to-end business processes - Creating a digitalization culture within the Company in the context of cost efficiency and effectiveness of business processes - Providing an integrated information system - Improving cyber security aspects	- Membangun *data governance* dalam membangun *single source of information* - Membangun *data quality* - Membangun sistem pengambilan keputusan berdasarkan data-data Perseroan - Building data governance in building a single source of information - Building data quality - Building a decision-making system based on company data	- Persiapan Peran TI Selanjutnya sesuai dengan arahan strategi bisnis Perseroan dalam RJPP - Implementasi *Advance Technology* yang mampu membantu keberlangsungan bisnis - Preparation for the Next IT Role in accordance with the direction of the Company's business strategy in RJPP - Implementation of Advance Technology that can help business continuity

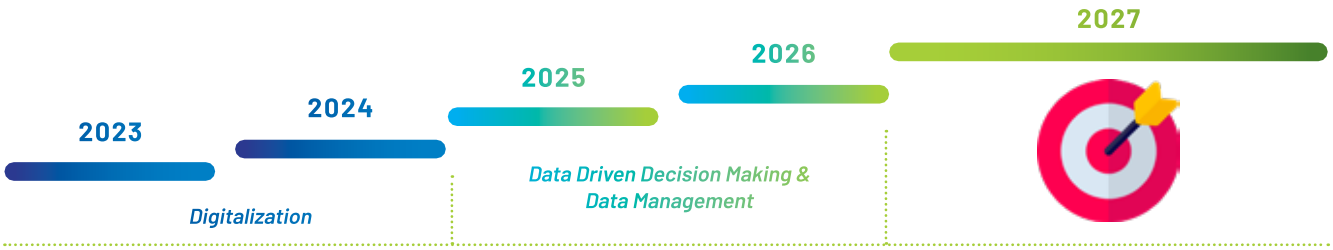

2020

Fokus mendukung kolaborasi insan Perseroan ketika bekerja di rumah (*Work From Home*/ WFH)
Focus on supporting the Company's personnel collaboration during the Working from Home (WFH) phase

→

2021

Fokus mengembangkan aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP)
Focus on developing Enterprise Resource Planning (ERP) application

→

2022

Fokus melakukan otomatisasi proses bisnis
Focus on automating business processes

→

2023-2024

Fokus melakukan transformasi bisnis
Focus on transforming the business

FUNGSI PENGELOLA TI
IT MANAGEMENT FUNCTION

Secara struktural, pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Perseroan adalah Divisi Teknologi Informasi (TI) yang dilaksanakan bersama dengan Komite Pengarah TI dalam rangka implementasi ITMP. Pengelolaan TI juga terbagi ke dalam bagian-bagian yang khusus bertanggung jawab atas pelaksanaan tata kelola TI. Bagian-bagian yang dimaksud adalah Perencanaan TI, Pengembangan TI, Operasional TI serta bagian sarana dan pendukung.

Structurally, the party responsible for managing information technology within the Company is the Information Technology Division (IT), in coordination with the IT Steering Committee for the implementation of the IT Master Plan (ITMP). IT management is further divided into sections, specialized units, each responsible for specific aspects of IT governance. Those various sections are IT Planning, IT Development, IT Operations, and the facilities and supports.

DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY DIVISION

Struktur Organisasi Teknologi Informasi
Information Technology Organization Structure

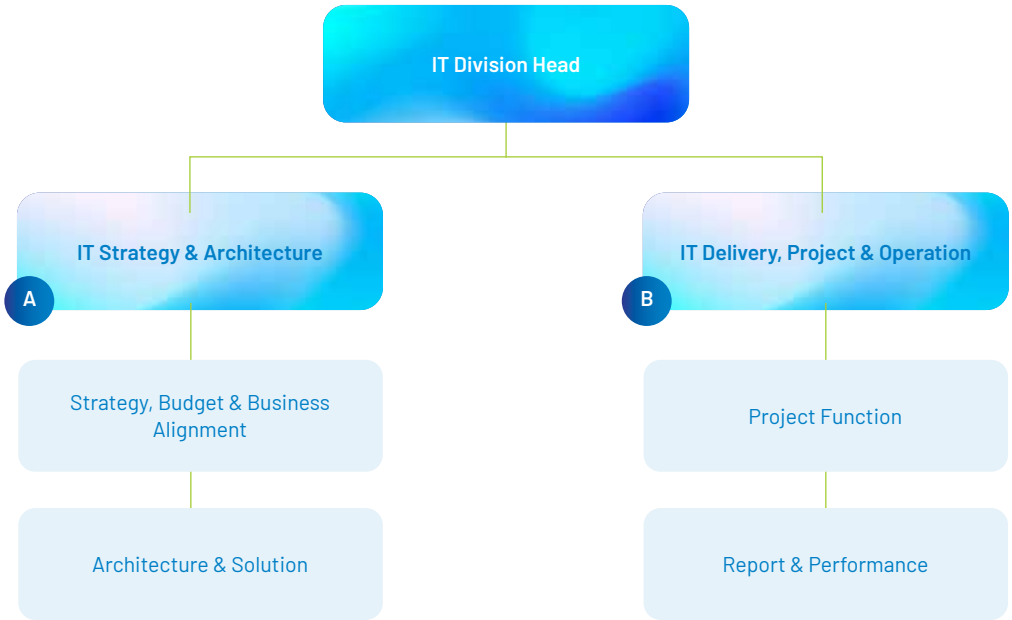

Tugas, tanggung jawab, peran, dan lingkup Divisi Teknologi Informasi secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. **IT *Division Head* (*Layer* 0)**
   Bertanggung jawab untuk memastikan visi, misi, dan strategi IT selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Posisi ini menjadi pengarah utama dalam pengambilan keputusan strategis terkait teknologi informasi, memastikan efisiensi dan efektivitas implementasi teknologi di seluruh organisasi.

The duties, responsibilities, roles, and scope of the Information Technology Division are as follows:

1. **IT Division Head (Layer 0)**
   Responsible for ensuring IT vision, mission, and strategy are aligned with the company's business objectives. This position leads strategic decision-making on information technology, ensuring the efficiency and effectiveness of technology across the organization.

2. IT *Strategy and Architecture* (*Layer* 1)
   Fokus Utama:
   Divisi ini bertugas menyusun strategi teknologi informasi, merancang arsitektur IT, serta memastikan solusi teknologi yang diterapkan mendukung pencapaian tujuan bisnis.
   Lingkup Kerja:
   - **Strategi, Budget, dan *Business Alignment***: Menyusun strategi IT jangka pendek dan panjang, memastikan anggaran teknologi dikelola secara optimal, serta menyelaraskan inisiatif IT dengan kebutuhan bisnis.
   - ***Architecture and Solution***: Merancang arsitektur teknologi yang skalabel, aman, dan siap mendukung pengembangan teknologi berbasis data dan AI.

3. IT *Delivery, Project, and Operation* (*Layer* 1)
   Fokus Utama:
   Divisi ini bertanggung jawab untuk mengelola implementasi proyek teknologi, operasional IT sehari-hari, serta memastikan layanan teknologi berjalan dengan baik.
   Lingkup Kerja:
   - ***Project Function***: Mengelola proyek IT mulai dari perencanaan, eksekusi, hingga evaluasi keberhasilan.
   - ***Report and Performance***: Memastikan kinerja sistem IT terpantau secara real-time dan melaporkan hasil operasional kepada manajemen.
4. *Layer* 2: Unit Operasional Khusus
   Unit ini berfungsi sebagai pelaksana teknis dari strategi dan solusi yang dirancang di layer atas. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis proyek dan pengelolaan sistem, termasuk memastikan operasional harian berjalan tanpa hambatan.

2. IT Strategy and Architecture (Layer 1)
   Key Focus:
   This division is in charge of developing information technology strategies, designing IT architecture, and ensuring that the technology solutions implemented support the achievement of business goals.
   - **Strategy, Budget, and Business Alignment**: Formulating short and long term IT strategies, ensuring technology budgets are optimally managed, and aligning IT initiatives with the business needs.
   - **Architecture and Solution**: Designing a technology architecture that is scalable, secure, and ready to support the development of data-driven technologies and AI.
3. IT Delivery, Project, and Operation (Layer 1)
   Key Focus:
   This division is responsible for managing the implementation of technology projects, day-to-day IT operations, as well as ensuring technology services are running well.
   Scope of Work:
   - **Project Function**: Managing IT projects from planning, execution, to evaluation of success.
   - **Report and Performance**: Ensuring IT system performance is monitored in real-time and reporting operational results to management.
4. Layer 2: Special Operations Unit
   This unit functions as a technical implementer of the strategies and solutions designed at the top layer. They are responsible for the technical implementation of the project and the system management, including ensuring daily operations running without a hitch.

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Komite Pengarah TI dibentuk berdasarkan Surat Keputusan No. SK-038B/DIR/HC/1222 tentang Penunjukan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dengan tujuan untuk memastikan keselarasan rencana strategis teknologi informasi dengan rencana strategis Perseroan, serta meningkatkan keunggulan bersaing melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna.

The IT Steering Committee was established based on SK-038B/DIR/HC/1222 on the Appointment of Members of the Information Technology Steering Committee of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), with the objective to ensure alignment of the information technology strategic plan with the Company's strategic plan, as well as increase the competitive advantage by proper use of information technology.

KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH TI

Ketentuan keanggotaan Komite Pengarah TI ditentukan berdasarkan beberapa aspek berikut ini:

1. Keanggotaan Komite Pengarah TI terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Team Leader serta beberapa Kepala Divisi dan/atau Direksi sebagai Team Member;
2. Komite Pengarah TI adalah Direksi yang membidangi TI dan menyetujui prosedur dan kebijakan pemantauan *Master Plan* TI. Bertanggung jawab atas penyelesaian rencana kegiatan yang tercantum dalam *Roadmap* TI. Menyampaikan keterbukaan informasi atas nama Komite Pengarah TI;
3. Keanggotaan dalam Komite Pengarah TI merupakan bagian dari tanggung jawab individu dan diperhitungkan sebagai salah satu bagian penilaian kinerja individu;
4. Keanggotaan *Team Member* dapat berasal dari luar Perseroan sepanjang disetujui oleh Direksi dan maksimal hanya berjumlah 1 orang.

MEMBERS OF THE IT STEERING COMMITTEE

The terms of membership of the IT Steering Committee are determined based on the following aspects:

1. The members of the IT Steering Committee are one (1) personnel as Team Leader and several Division Heads and/or Directors as Team Members;
2. The IT Steering Committee is the Board of Directors in charge of IT and approves the procedures and policies for monitoring the IT Master Plan. Responsible for completing planned activities as listed in the IT Roadmap. Providing information disclosure on behalf of the IT Steering Committee;
3. IT Steering Committee's membership is part of an individual's responsibilities and is considered in the individual's performance assessment;
4. Team Members may be external parties outside the Company as long as they are approved by the Board of Directors and such member has a maximum of 1 person.

PROGRAM STRATEGIS PENGELOLAAN TI TAHUN 2024

IT MANAGEMENT STRATEGIC PROGRAM IN 2024

Dalam rangka mengimplementasikan "Digitalisasi", PT PII senantiasa menerapkan pengelolaan TI yang berkesinambungan dengan dukungan struktur dan infrastruktur TI yang selalu dikembangkan. Adapun inisiatif dan program strategis yang telah diimplementasikan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Digitalisasi Proses di sistem ERP (*Procurement & Finance*);
2. GRC *Application*;
3. *Claim Management System*;
4. *Security Operation Center*;
5. *Data Lake Implementation*.

IIGF implements sustainable IT management with the support of an IT structure and infrastructure that is always being developed to implement "Digitalization." The strategic initiatives and programs that have been implemented in 2024 are as follows:

1. Digitalization Process on ERP system (Procurement & Finance)
2. GRC Application
3. Claim Management System
4. Security Operation Center
5. Data Lake Implementation

IT RISK & DISRUPTION DAN MITIGASINYA

IT RISK & DISRUPTION AND ITS MITIGATIONS

PT PII telah melakukan pemetaan profil risiko bidang TI tahun 2024 beserta program mitigasinya, sehingga potensi risiko bisa diminimalkan. beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

IIGF mapped the risk profile of the IT sector in 2024 along with the mitigation program, to minimize potential risks, as follows:

Profil Potensi Risiko TI Tahun 2024 dan Program Mitigasinya
Profile of Potential IT Risks and Mitigation Program in 2024

No.	Potensi Risiko Potential Risks	Program Mitigasi Mitigation	
1.	Ketidaksesuaian timeline dan benefit proyek TI dengan portofolio TI yang sudah direncanakan. Mismatch of IT project timeline and benefits with the planned IT portfolio	• Membuat mekanisme *monitoring* dan evaluasi secara berkala pada setiap *milestone* proyek.	• Establishing a regular monitoring and evaluation mechanism at each project milestone.
2.	Potensi kehilangan dan pencurian data akibat eksploitasi *vulnerability* dari layanan TI baik dari sisi internal maupun eksternal. Potential data loss and theft due to exploitation of vulnerabilities of IT services from both internal and external parties	• Mengimplementasikan sistem keamanan berlapis, termasuk enkripsi data, *firewall*, dan sistem deteksi intrusi (IDS/IPS). • Melakukan audit keamanan TI secara berkala dan pengujian penetrasi (*penetration testing*). • Mengadakan pelatihan kesadaran keamanan (*security awareness*) untuk seluruh karyawan.	• Implementing layered security systems, including data encryption, firewalls, and intrusion detection systems (IDS/IPS). • Conducting regular IT security audits and penetration testing. • Conducting security awareness training for all employees.
3.	*System down* yang disebabkan *availability* infrastruktur yang tidak memenuhi SLA. System down caused by infrastructure availability that does not meet SLA	• Meningkatkan kapabilitas infrastruktur TI berbasis *cloud* untuk mendukung beban kerja yang tinggi. • Menetapkan SLA yang jelas dengan penyedia layanan TI dan melakukan *monitoring* SLA secara *real-time*.	• Enhancing cloud-based IT infrastructure capabilities to support high workloads. • Establishing clear SLAs with IT service providers and conducting real-time SLA monitoring.
4.	Kompetensi dan jumlah SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan. HR competence and personnel that do not align with the needs	• Mengadakan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi teknis SDM. • Menyusun *roadmap* pengembangan SDM berbasis kebutuhan jangka panjang. • Kolaborasi dengan pihak ketiga atau *vendor* untuk memenuhi kebutuhan spesifik yang mendesak.	• Organizing training and certification to enhance HR technical competence. • Developing a long-term needs-based HR development roadmap. • Collaborating with third parties or vendors to fulfill specific urgent needs.
5.	Ketergantungan pada *vendor* eksternal dalam pengelolaan sistem TI. Reliance on external vendors in IT system management.	• Mengembangkan dokumentasi teknis dan pelatihan internal untuk mengurangi ketergantungan terhadap *vendor*. • Melakukan diversifikasi *vendor* untuk mencegah risiko monopoli atau kegagalan tunggal (*single point of failure*).	• Developing technical documentation and internal training to reduce dependency on vendors. • Diversifying vendors to prevent the risk of monopoly or single point of failure.

SISTEM KEAMANAN SIBER
CYBER SECURITY SYSTEM

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) telah mengimplementasikan kebijakan dan kapabilitas keamanan TI untuk memastikan perlindungan aset informasi serta mendukung keberlangsungan operasional bisnis.

Kebijakan Keamanan TI:
Kebijakan ini mencakup pengelolaan aset informasi, kontrol akses, keamanan lingkungan kerja dan fisik, serta standar operasional seperti pengelolaan *patching*, akun pengguna, dan pemulihan bencana.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) has implemented IT security policies and capabilities to ensure the protection of information assets and support the continuity of business operations.

IT Security Policy:
This policy covers information asset management, access control, physical and working environment security, and operational standards such as patching, user account management, and disaster recovery.

Kapabilitas Keamanan Utama:

1. Keamanan *Endpoint* dan *Server*
   Perlindungan tingkat lanjut melalui antivirus, enkripsi data, *firewall*, dan *monitoring log.*
2. Keamanan Aplikasi *Cloud*
   Mengoptimalkan fitur keamanan dari penyedia *cloud global* seperti AWS, GCP, dan Microsoft.
3. Kesadaran dan Evaluasi
   Program pelatihan keamanan tahunan dan pengujian kerentanan serta penetrasi secara berkala.
4. *Audit Trail*
   Sistem pemantauan menyeluruh untuk memastikan jejak audit yang terintegrasi.

Key Security Capabilities:

1. Endpoint and Server Security
   Advanced protection using antivirus, data encryption, firewall, and log monitoring.
2. Cloud Application Security
   Optimizing security features from global cloud providers such as AWS, GCP, and Microsoft.
3. Awareness and Evaluation
   Annual security training program and regular vulnerability and penetration testing.
4. Audit Trail
   Comprehensive monitoring system to ensure an integrated audit trail.

DISASTER RECOVERY PLAN (DRP) DAN *DISASTER RECOVERY CENTER* (DRC)

DISASTER RECOVERY PLAN (DRP) AND DISASTER RECOVERY CENTER (DRC)

PT PII telah mengembangkan strategi ***Disaster Recovery*** yang modern dan efisien dengan memanfaatkan teknologi ***serverless/cloud*** berbasis ***multi-zone architecture.*** Pendekatan ini menggantikan konsep tradisional ***Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC)*** yang membutuhkan infrastruktur fisik. Berikut adalah elaborasi pendekatan ini:

IIGF has developed a modern and efficient **Disaster Recovery** strategy by utilizing **serverless/cloud** technology based on **multi-zone architecture**. This approach replaces the traditional concept of **Data Center (DC) and Disaster Recovery Center (DRC)** which requires physical infrastructure. The approach can be defined as follows:

PENDEKATAN *MODERN: MULTI-ZONE ARCHITECTURE*

MODERN APPROACH: MULTI-ZONE ARCHITECTURE

1. **Arsitektur Multi-Zona:**
   - Data dan aplikasi didistribusikan di beberapa zona geografis *(availability zones*) dalam *platform cloud.* Hal ini memastikan ketersediaan layanan meskipun terjadi gangguan di salah satu zona.
   - Infrastruktur ini menghilangkan ketergantungan pada lokasi fisik DRC konvensional.
2. **Teknologi *Backup* dan *Restore*:**
   - *Automated Backup*: Sistem secara otomatis melakukan backup data secara berkala dan menyimpannya di lokasi *cloud* yang aman.
   - *Restore On-Demand*: Dalam situasi bencana, data dapat dipulihkan dengan cepat melalui teknologi *cloud*, sehingga *downtime* dapat diminimalkan.
3. ***Serverless Computing*:**
   - Menggunakan teknologi *serverless*, yang memungkinkan aplikasi berjalan tanpa memerlukan *server* fisik yang dikelola secara manual.

1. **Multi-Zone Architecture:**
   - Data and applications are distributed across multiple geographical zones (availability zones) within the cloud platform. This ensures service availability even if there is a disruption in one of the zones.
   - This infrastructure eliminates dependence on the physical location of conventional DRCs.
2. **Backup and Restore Technology:**
   - Automated Backup: The system automatically performs regular data backups and stores them in a secure cloud location.
   - Restore On-Demand: In a disaster, data can be restored quickly through cloud technology, so that downtime can be minimized.
3. **Serverless Computing:**
   - Using serverless technology, which allows applications to run without the need for manually managed physical servers.

- Infrastruktur elastis ini secara otomatis menyesuaikan dengan kebutuhan beban kerja, mengurangi risiko kegagalan sistem.

KEUNGGULAN PENDEKATAN INI

1. **Keandalan yang Tinggi:**
   - Dengan arsitektur multi-zona, data dan aplikasi tetap tersedia bahkan jika terjadi gangguan di salah satu zona *cloud*.
   - Teknologi ini menjamin tingkat layanan yang tinggi dan meminimalkan *downtime*.
2. **Efisiensi Biaya:**
   - Pendekatan *serverless* mengurangi kebutuhan investasi pada infrastruktur fisik seperti DRC.
   - Biaya operasional lebih efisien karena Perseroan hanya membayar sesuai penggunaan sumber daya.
3. **Keamanan Data yang Optimal:**
   - Data dienkripsi dan disimpan dalam *platform cloud* yang dilengkapi dengan standar keamanan tinggi.
   - Pemantauan keamanan secara *real-time* memastikan perlindungan data dari ancaman.
4. **Skalabilitas dan Fleksibilitas:**
   - Infrastruktur *cloud* memungkinkan skalabilitas sesuai kebutuhan bisnis.
   - Fleksibilitas dalam memulihkan data dari zona *cloud* yang tersedia.

TAHAPAN PENANGANAN KETIKA TERJADI GANGGUAN

1. **Deteksi Awal:**
   - Sistem secara otomatis mendeteksi gangguan melalui mekanisme monitoring *real-time*.
2. **Pemulihan Layanan:**
   - Aktivasi *backup* dan *restore* melalui teknologi *cloud*.
   - Peralihan otomatis ke zona *cloud* lain yang tersedia.
3. **Evaluasi dan Perbaikan:**
   - Analisis pasca-insiden untuk meningkatkan keandalan sistem ke depannya.

Dengan teknologi ***serverless* dan *multi-zone architecture***, PT PII tidak hanya memastikan kelangsungan operasional tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keamanan secara signifikan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen kami dalam memanfaatkan teknologi terkini untuk mendukung strategi bisnis dan pengelolaan risiko perusahaan.

- This elastic infrastructure automatically adapts to workload requirements, reducing the risk of system failure.

ADVANTAGES OF THIS APPROACH

1. **High Reliability:**
   - With multi-zone architecture, data and applications remain available even in the event of a disruption in one of the cloud zones.
   - This technology guarantees high service levels and minimizes downtime.
2. **Cost Efficiency:**
   - The serverless approach reduces the need for investment in physical infrastructure such as DRC.
   - Operational costs are more efficient because the Company only pays for the resources used.
3. **Optimized Data Security:**
   - Data is encrypted and stored in a cloud platform equipped with high security standards.
   - Real-time security monitoring ensures data protection from threats.
4. **Scalability and Flexibility:**
   - Cloud infrastructure enables scalability as per business needs.
   - Flexibility in recovering data from available cloud zones.

STAGES OF DISRUPTION HANDLING

1. **Early Detection:**
   - The system automatically detects disturbances through real-time monitoring mechanisms.
2. **Service Recovery:**
   - Activation of backup and restore through cloud technology.
   - Automatic switchover to other available cloud zones.
3. **Evaluation and Improvement:**
   - Post-incident analysis to improve system reliability in the future.

With **serverless technology and multi-zone architecture**, IIGF not only ensures operational continuity but also significantly enhances efficiency and security. This approach reflects our commitment in utilizing the latest technology to support our business strategy and risk management.

BIAYA INVESTASI TI
IT INVESTMENT COSTS

Biaya investasi pada bidang TI yang dialokasikan Perseroan pada tahun 2024 mencapai Rp2,60 miliar, yaitu meningkat 270% dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 yang sejumlah Rp0,96 miliar.

The Company's allocated IT investment in 2024 of Rp2.60 billion, which increased by 270% compared to 2023, of Rp0.96 billion.

AUDIT TI
TI AUDIT

Pada tahun 2024, TI PT PII menjadi objek audit intern dan eksternal.

1. Pelaksana audit:
   KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota jaringan global PwC)
   Ruang lingkup audit:
   Aplikasi Microsoft Dynamics 365

2. Pelaksana audit :
   Divisi Internal Audit
   Ruang lingkup audit:
   Pengelolaan Fungsi Teknologi Informasi (*Enterprise Resource Planning*/ERP)

In 2024, IIGF's IT was audited internally and externally.

1. Public Auditor:
   KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (member of PwC global network)
   Audit scope:
   Microsoft Dynamics 365 application

2. Auditor:
   Internal Audit Division
   Audit scope:
   Management of Information Technology (Enterprise Resource Planning/ERP)

RENCANA FOKUS PENGELOLAAN TI TAHUN 2025
IT MANAGEMENT FOCUS IN 2025

Berdasarkan *roadmap* pengelolaan TI, fokus pengelolaan TI pada tahun 2025 secara umum mencakup:

1. Implementasi ESG *System*;
2. Implementasi *Contract Management System*;
3. Eksplorasi penggunaan AI.

Based on the IT management roadmap, IT management in 2025 will focus on:

1. ESG System Implementation
2. Contract Management System
3. Exploration of the use of AI

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI
ECONOMIC AND INDUSTRIAL REVIEW

KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL
GLOBAL ECONOMIC CONDITIONS

Pada tahun 2024, ekonomi global menunjukkan laju pertumbuhan yang relatif stabil, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan besar. Berdasarkan laporan *World Economic Outlook (WEO)* yang diterbitkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) pada Januari 2025, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mencapai 3,2%, sedikit lebih tinggi dari prediksi sebelumnya yang sebesar 3,1% (WEO Oktober 2024). Meskipun angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, tingkat pertumbuhannya tetap lebih rendah dibandingkan rata-rata historis sebesar 3,7% yang tercatat antara tahun 2000 hingga tahun 2019. Penyebab utama dari perlambatan ekonomi global ini masih terkait dengan faktor-faktor eksternal, seperti ketegangan geopolitik, kebijakan moneter yang ketat, dan pergeseran dalam pola perdagangan internasional. Walaupun sejumlah negara mulai melonggarkan kebijakan suku bunga untuk mendorong investasi dan konsumsi domestik, proses pemulihan tetap berjalan secara bertahap dan tidak merata di berbagai wilayah.

In 2024, the global economy showed a relatively stable growth rate, although it faced major challenges. Based on the World Economic Outlook (WEO) report published by the International Monetary Fund (IMF) in January 2025, the world economic growth is expected to reach 3.2%, slightly higher than the previous prediction of 3.1% (WEO October 2024). While this represents an improvement compared to a few years ago, the growth rate remains lower than the historical average of 3.7% recorded between 2000 and 2019. The main causes of this global economic slowdown are still related to external factors, such as geopolitical tensions, rigid monetary policies, and shifts in international trade patterns. While several countries have started to ease interest rate policies to encourage domestic investment and consumption, the recovery process remains gradual and uneven across regions.

Inflasi global pada tahun 2024, berdasarkan data IMF menunjukkan penurunan yang signifikan setelah sebelumnya mengalami lonjakan tajam dalam beberapa tahun terakhir. Proyeksi terbaru menunjukkan inflasi global pada angka 4,2% pada tahun 2025 dan diperkirakan akan terus menurun menjadi 3,5% pada tahun 2026. Penurunan ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi, karena semakin mendekati target yang telah ditetapkan oleh bank sentral di berbagai negara, terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Meski begitu, IMF tetap mengingatkan adanya potensi risiko yang bisa menghambat pemulihan, seperti tekanan inflasi yang berkelanjutan akibat gangguan rantai pasokan global, lonjakan harga energi, dan ketidakpastian dalam kebijakan fiskal serta moneter. Jika inflasi kembali meningkat tanpa diduga, bank sentral mungkin terpaksa mempertahankan atau bahkan menaikkan suku bunga, yang dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

The global inflation in 2024, based on IMF data, shows a significant decline after experiencing a sharp spike in recent years. The latest projection shows that global inflation will be approximately 4.2% in 2025 and is predicted to decline to 3.5% in 2026. This decline is a positive signal for economic stability, as it is getting closer to the targets set by central banks in various countries, especially in developed countries such as the United States and Europe. Even so, IMF still warns of potential risks that could hinder the recovery, such as continued inflationary pressures due to global supply chain disruptions, surging energy prices, and uncertainty in fiscal and monetary policies. If inflation unexpectedly picks up, central banks may be forced to maintain or even raise interest rates, which could further slow the pace of economic growth.

Bank Dunia, dalam laporan *Global Economic Prospects* bulan Juni 2024, memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan tetap stabil pada tingkat 2,6% pada tahun 2024, sebelum meningkat sedikit menjadi rata-rata 2,7% pada tahun 2025-

The World Bank, in its June 2024 Global Economic Prospects report, expects global economic growth to remain stable at 2.6% in 2024, before accelerating slightly to an average of 2.7% in 2025-2026. This is still below the 3.1% average recorded in

2026. Angka ini masih di bawah rata-rata 3,1% yang tercatat dalam dekade sebelum pandemi COVID-19. Proyeksi ini menunjukkan bahwa lebih dari 80% populasi dan Produk Domestik Bruto (PDB) dunia akan tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan dekade sebelum pandemi.

the decade before the COVID-19 pandemic. These projections suggest that more than 80% of the world's population and Gross Domestic Product (GDP) will grow slower compared to the decade before the pandemic.

Secara regional, pertumbuhan di negara-negara berpenghasilan rendah diperkirakan mencapai 3,6% pada tahun 2024, dengan rata-rata 5,8% pada tahun 2025-2026, terutama didorong oleh perbaikan prospek di beberapa negara yang rentan dan terdampak konflik. Namun, risiko terhadap prospek ini cenderung menurun, termasuk potensi peningkatan konflik, biaya layanan utang yang lebih tinggi, dan keterbatasan ruang kebijakan fiskal.

Regionally, growth in low-income countries is expected to reach 3.6% in 2024, averaging 5.8% in 2025-2026, mainly driven by improving prospects in some vulnerable and conflict-affected countries. However, risks to this outlook are likely to decline, including the potential for increased conflict, higher debt service costs, and limited fiscal policy space.

Sumber: www.imf.org, www.worldbank.org, dan sumber lainnya (diolah)

Source: www.imf.org, www.worldbank.org, and other sources (edited)

KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA
INDONESIAN ECONOMIC CONDITIONS

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada tahun 2024 tercatat tumbuh sebesar 5,02% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun ada sedikit penurunan dibandingkan dengan angka pertumbuhan 5,05% pada tahun 2023, kondisi ekonomi secara keseluruhan tetap menunjukkan stabilitas yang baik. Di sektor produksi, sektor dengan pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Lainnya yang meningkat sebesar 9,80%, disusul oleh sektor Transportasi dan Pergudangan (8,69%) serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (8,56%). Selain itu, sektor industri pengolahan, yang berperan penting dalam struktur PDB nasional, mengalami pertumbuhan sebesar 4,43%.

According to the data released by the Statistics Indonesia (BPS), Indonesia's economy in 2024 recorded growth of 5.02% compared to the previous year. Although there was a slight decline compared to the growth rate of 5.05% in 2023, the overall economic condition was stable. In the production sector, the sector with the highest growth was Other Services, which increased by 9.80%, followed by Transportation and Warehousing (8.69%) and Accommodation and Food Supply (8.56%). In addition, the manufacturing sector, which plays an important role in the structure of national GDP, experienced growth of 4.43%.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi oleh lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) mencatatkan angka pertumbuhan tertinggi sebesar 12,48%, diikuti oleh pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) yang tumbuh 6,61%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT), yang merupakan komponen utama dalam PDB, naik sebesar 4,94%. Ekspor barang dan jasa juga meningkat sebesar 6,51%, sementara impor naik 7,95%, yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas perdagangan internasional.

In terms of expenditure, consumption by non-profit institutions serving households (PK-LNPRT) recorded the highest growth rate of 12.48%, followed by government capital (PK-P) which grew by 6.61%. Household consumption, which is the main component of GDP, increased by 4.94%. Exports of goods and services also increased by 6.51%, while imports increased by 7.95%, indicating an increase in international trade activity.

Secara spasial, Pulau Jawa tetap menjadi kontributor utama terhadap PDB Indonesia dengan kontribusi sebesar 57,02% dan pertumbuhan 4,92%. Namun, wilayah dengan pertumbuhan

Spatially, Java Island remained the main contributor to Indonesia's GDP with a contribution of 57.02% and growth of 4.92%. However, the region with the highest economic growth

ekonomi tertinggi adalah Maluku dan Papua, yang mencatatkan angka 7,81%, disusul oleh Sulawesi yang tumbuh sebesar 6,18% dan Kalimantan dengan 5,52%. Sementara itu, Pulau Sumatera dan Bali-Nusa Tenggara masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 4,45% dan 5,04%.

Berdasarkan data BPS, inflasi di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada bulan Januari 2024, tingkat inflasi *year-on-year* (y-on-y) tercatat sebesar 2,57%. Angka ini sedikit meningkat menjadi 2,75% pada bulan Februari, 2,84% pada bulan Mei, dan 2,13% pada bulan Juli. Tren penurunan ini berlanjut hingga mencapai 1,84% pada bulan September, 1,71% pada bulan Oktober, dan akhirnya 1,57% pada bulan Desember 2024. Angka tersebut adalah yang terendah dalam sejarah. Tren penurunan ini mencerminkan stabilitas harga yang berhasil dipertahankan sepanjang tahun 2024.

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

was Maluku and Papua with 7.81%, followed by Sulawesi which grew by 6.18% and Kalimantan with 5.52%. Sumatra and Bali-Nusa Tenggara experienced growth of 4.45% and 5.04% respectively.

Based on BPS data, 2024 inflation in Indonesia showed a consistent downward trend. In January 2024, the year-on-year (y-on-y) inflation rate was 2.57%. This figure slightly increased to 2.75% in February, 2.84% in May, and 2.13% in July. This downward trend continued to reach 1.84% in September, 1.71% in October, and finally 1.57% in December 2024. These figures were the lowest in history. This downward trend reflects the price stability that was successfully maintained throughout 2024.

Source: Statistics Indonesia (BPS)

PERKEMBANGAN INDUSTRI KONSTRUKSI DAN INFRASTRUKTUR NASIONAL

DEVELOPMENT OF THE NATIONAL CONSTRUCTION AND INFRASTRUCTURE INDUSTRY

Sektor infrastruktur saat ini masih menjadi sektor yang berpengaruh penting dalam rangka mendukung perkembangan kemajuan nasional. Hal ini juga dinyatakan oleh Menteri Keuangan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fondasi bagi ketahanan perekonomian Indonesia. Anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat sejak 2014 dan telah menghasilkan berbagai capaian sarana prasarana transportasi, pendidikan, perumahan, sanitasi, pengairan, maupun infrastruktur digital.

Sumber:
- Kementerian Keuangan, https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/BNI-Investor-Daily-Summit-2024
- Sekretariat Kabinet, https://setkab.go.id/pembangunan-infrastruktur-dan-sdm-jadi-fondasi-ketahanan-ekonomi-indonesia/

The infrastructure sector is currently an important sector to support the development of national progress. The Minister of Finance also stated that infrastructure development is one of the foundations for Indonesia's economic resilience. The infrastructure budget in the State Budget (APBN) has continued to increase since 2014 and has resulted in various achievements in transportation infrastructure, education, housing, sanitation, irrigation, and digital infrastructure.

Source:
- Ministry of Finance, https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/BNI-Investor-Daily-Summit-2024
- Cabinet Secretariat, https://setkab.go.id/pembangunan-infrastruktur-dan-sdm-jadi-fondasi-ketahanan-ekonomi-indonesia/

KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2024
STRATEGIC POLICY IN 2024

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) Tahun 2024, Strategi dan Fokus Utama tahun 2024 mencakup:

Based on the Company's 2024 Work Program and Budget (WP&B), the 2024 Strategy and Main Focus include:

Strategi Penguatan *Enabler*
Enabler Enhancement Strategy

Strategi Pengembangan Bisnis
Business Development Strategy

Strategi Pengelolaan Risiko
Risk Management Strategy

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS
BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY

Perseroan terus mengembangkan strategi bisnis yang berfokus pada ekspansi sektor penjaminan, diversifikasi ke sektor-sektor baru, serta peningkatan keberlanjutan proyek melalui penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Strategi ini dirancang untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan.

The Company develops a business strategy that focuses on expanding the guarantee sector, diversifying into new sectors, and improving project sustainability by implementing Environmental, Social, and Governance (ESG) principles. This strategy is designed to ensure sustainable growth, increase competitiveness, and have a positive impact on the environment.

PENJAMINAN
GUARANTEE

Perseroan terus memperluas peranannya dalam penjaminan sektor infrastruktur sosial, yang mencakup berbagai proyek strategis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Beberapa sektor utama yang menjadi fokus antara lain sektor kesehatan, dengan adanya penjaminan proyek pembangunan dan pengelolaan rumah sakit pusat dan daerah, sektor perumahan rakyat, termasuk pengembangan rumah susun untuk meningkatkan akses hunian layak, serta sektor sumber daya air dan irigasi, seperti proyek pembangunan bendungan guna mendukung ketahanan air

The Company expands its role in guaranteeing the social infrastructure sector, which includes various strategic projects to support community welfare. Some of the focus sectors include Health, with project guarantees for the construction and management of central and local hospitals, the public housing, with development of flats to increase access to decent housing, as well as the water resources and irrigation, with dam construction projects to support water security and national agriculture. In addition, the Company provides support to the education sector, one of which is

dan pertanian nasional. Selain itu, Perseroan juga memberikan dukungan pada sektor pendidikan, salah satunya melalui fasilitas kapal riset yang berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi di bidang kelautan dan perikanan.

through vessel research facilities that play a role in the science and innovation development in the marine and fisheries sector.

Selain fokus pada infrastruktur sosial, Perseroan juga memperkuat *sustainability pipeline* dengan skema penjaminan guna mendukung energi dan mitigasi perubahan iklim. Dengan strategi ini, PT PII berkomitmen untuk berkontribusi dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan tangguh terhadap perubahan iklim.

In addition to focusing on social infrastructure, the Company also strengthens its sustainability pipeline with guarantee schemes to support energy and climate change mitigation. With this strategy, we are committed to contributing to the Sustainable Development achievement targets, as well as driving more inclusive and climate resilient economic growth.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG)

ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG)

Penguatan kapabilitas penjaminan untuk *sustainability* proyek yang mendapatkan dukungan Pemerintah berupa *Project Development Facility* (PDF), yaitu melalui evaluasi kelayakan proyek dengan standar ESG Kementerian Keuangan untuk mendukung upaya transisi energi dan mitigasi atas dampak perubahan iklim.

Strengthening the assurance capability for project sustainability that received Government support in the form of Project Development Facility (PDF), i.e., by evaluating the project feasibility with the Ministry of Finance's ESG standards to support energy transition efforts and mitigation of climate change impacts.

PENYIAPAN PROYEK DAN PENDAMPINGAN TRANSAKSI

PROJECT DEVELOPMENT FACILITY

- Mendukung penyelesaian penugasan strategik dari Kementerian Keuangan melalui koordinasi dan kolaborasi bersama *stakeholder* kunci dengan turut memperhatikan penerapan prinsip ESG pada setiap proyek guna memastikan manfaat keberlanjutan proyek.
- Pelaksanaan *Project Development Advisory* (PDA) yang sejalan dengan kapabilitas Perseroan dalam bidang *government stakeholder engagement*, identifikasi dan mitigasi risiko, serta analisis struktur proyek yang *bankable* sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah proyek infrastruktur.

- Supporting the completion of strategic assignments from the Ministry of Finance through coordination and collaboration with key stakeholders by considering the ESG principles in each project to ensure project sustainability benefits.
- Project Development Advisory (PDA), which is in line with the Company's capabilities in government stakeholder engagement, risk identification and mitigation, and analysis of bankable project structures, to provide added value to infrastructure projects.

INDONESIA *INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND* (IIGF) *INSTITUTE*

INDONESIA INFRASTRUCTURE GUARANTEE FUND (IIGF) INSTITUTE

IIGF Institute merupakan lembaga *think tank* PT PII yang memiliki peran penting sebagai *ecosystem enabler* dalam mendukung pengembangan bisnis melalui program kegiatan edukasi dan riset berkualitas dengan mitra strategis untuk mendukung pembuatan kebijakan yang bertumpu pada *best practice*. Selain itu, IIGF Institute juga memiliki peran strategis untuk mendorong diseminasi rekomendasi

IIGF Institute is IIGF's think tank playing a pivotal as an ecosystem enabler in supporting business development through a program of educational activities and quality research with strategic partners, aimed at promoting policy-making making based on best practices. In addition, IIGF Institute holds a strategic role to encourage the dissemination of practical policy recommendations to

kebijakan yang aplikatif guna mendukung visi Perseroan untuk mencapai pembangunan infrastruktur berkelanjutan melalui kegiatan *outreach*.

Pada tahun 2024 ini, IIGF Institute menerapkan beberapa kebijakan strategis untuk mendukung pengembangan infrastruktur berkelanjutan melalui pembiayaan kreatif dan inovatif. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang diterapkan pada tahun 2024:

1. **Kolaborasi dengan Unit Vertikal Kemenkeu**
   Dalam inisiatif Kemenkeu Satu, IIGF Institute berkolaborasi dengan unit-unit vertikal Kementerian Keuangan (Eselon 1/BLU/SMV) untuk program *capacity building*, kajian, dan publikasi yang berfokus pada pembiayaan kreatif, guna menciptakan sinergi untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan.
2. **Pengembangan Kurikulum *Targeted Active Learning Program* (TALP)**
   IIGF Institute mengembangkan kurikulum TALP untuk memberikan program pembelajaran yang tepat sasaran, disesuaikan dengan kebutuhan spesifik peserta dan karakteristik sektor proyek KPBU. Hal tersebut diharapkan akan semakin memperkuat keterampilan dan pengetahuan pada *champions* di berbagai instansi dan lembaga untuk penerapan skema KPBU pada berbagai infrastruktur.
3. **Peningkatan Kualitas lembaga sebagai *Accredited Training Organization* (ATO)**
   IIGF Institute melakukan penguatan dan peningkatan kualitas lembaga sebagai ATO dalam penyelenggaraan program sertifikasi CP3P (*Certified Public-Private Partnerships Professional*), dengan menambah jumlah serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi *trainer* untuk menjaga standar kualitas tinggi dalam program sertifikasi ini.
4. **Optimalisasi Layanan *Online Course* pada *website* IIGF *Institute***
   IIGF Institute menyediakan dan mengoptimalkan kursus daring (*online course*) terkait skema pembiayaan kreatif, sehingga membuka akses yang luas bagi peserta untuk mempelajari konsep dan praktik pembiayaan kreatif melalui *platform* daring.
5. **Pendokumentasian Pengetahuan Perusahaan**
   IIGF *Institute* menjalankan peran pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) dengan mendokumentasikan pengetahuan dan pengalaman Perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya. Pendokumentasian ini bertujuan untuk melestarikan pengetahuan institusional, mendukung pembelajaran dan pengembangan kapasitas,

support the Company's vision to achieve sustainable infrastructure development through outreach activities.

In 2024, IIGF Institute implemented several strategic policies to support sustainable infrastructure development through creative and innovative financing. The following are some of the strategic measures in 2024:

1. **Collaboration with Vertical Units of the Ministry of Finance**
   Under the Kemenkeu Satu initiative, IIGF Institute collaborates with vertical units of the Ministry of Finance (Echelon 1/BLU/SMV) for capacity building programs, studies, and publications, focusing on creative financing, to create synergies to support sustainable national infrastructure development.
2. **Targeted Active Learning Program (TALP) Curriculum Development**
   IIGF Institute developed the TALP curriculum to provide a targeted learning program, tailored to the specific needs of participants and the characteristics of the PPP project sector. This shall further strengthen the skills and knowledge of champions in various agencies and institutions for the PPP schemes implementation in various infrastructures.
3. **Improving the Institute's Quality as an Accredited Training Organization (ATO)**
   IIGF Institute strengthens and improves the quality of the institution as an ATO in the CP3P (Certified Public-Private Partnerships Professional) certification program, by increasing the number and increasing the capacity and competence of trainers to maintain high quality standards in this certification program.
4. **Optimization of Online Course Services on IIGF Institute website**
   IIGF Institute provides and optimizes online courses related to creative financing schemes, thus opening up wide access for participants to learn the concepts and practices of creative financing through online platforms.
5. **Documentation of Company Knowledge**
   IIGF Institute performs the role of knowledge management by documenting the knowledge and experience of companies in carrying out their business processes. This documentation aims to preserve institutional knowledge, support learning and capacity building, and improve business process efficiency. In addition, the documentation

serta meningkatkan efisiensi proses bisnis. Selain itu, dokumentasi ini juga mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan di Perusahaan.

6. **Kolaborasi Strategis Pelaksanaan Kajian Multipihak**
   IIGF Institute berkomitmen untuk terus menciptakan kolaborasi strategis pelaksanaan kajian multipihak terkait skema pembiayaan kreatif dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia. Langkah ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi dan lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan akademisi, untuk bersama-sama mengeksplorasi dan mengembangkan solusi pembiayaan inovatif. Kajian yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam skema pembiayaan kreatif, namun dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dan aplikatif.
7. **Program Kemitraan Strategis Internasional**
   IIGF *Institute* memperkuat jangkauan global melalui kemitraan strategis dengan beberapa mitra internasional, guna mendukung pengembangan kapasitas di bidang pembiayaan kreatif dalam penyediaan infrastruktur.
8. **Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi**
   Melalui *University Network for Indonesia Infrastructure Development* (UNIID) atau Jejaring Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia, IIGF *Institute* mendorong pemenuhan kapasitas *stakeholder* dan kualitas penelitian di bidang infrastruktur melalui sumber daya keahlian dan kepakaran akademisi di lingkungan perguruan tinggi.
9. **Penguatan *Community of Practice* (CoP) *Innovative Financing Community* (*Infinity*)**
   Inisiatif CoP Infinity bertujuan untuk memperkuat jaringan pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik di antara para praktisi dan pemangku kepentingan di bidang infrastruktur pembiayaan kreatif dalam penyediaan infrastruktur. Kegiatan CoP Infinity mencakup *platform* untuk bertukar informasi dan pemikiran, yang memungkinkan anggota untuk berbagi wawasan dan pengalaman terkait pembiayaan inovatif. Selain itu, CoP Infinity juga menyelenggarakan berbagai kegiatan diseminasi hasil kajian, yang bertujuan untuk memperluas pemahaman dan penerapan konsep pembiayaan kreatif pada penyediaan infrastruktur publik.

encourages innovation and continuous improvement in the company.

6. **Strategic Collaboration for Multi-Stakeholder Review**
   IIGF Institute is committed to creating strategic collaborations for the multi-stakeholder studies related to creative financing schemes in infrastructure provision in Indonesia. This initiative involves various stakeholders, including government agencies and institutions, financial institutions, and academia, to jointly explore and develop innovative financing solutions. The study aims not only to identify opportunities and challenges in creative financing schemes, but also to provide relevant and applicable policy recommendations.
7. **International Strategic Partnership Program**
   IIGF Institute strengthens its global reach through strategic partnerships with several international partners, to support capacity building in the field of creative financing for infrastructure delivery.
8. **Collaboration with Universities**
   Through the University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID), IIGF Institute encourages the fulfillment of stakeholder capacity and research quality in infrastructure via the expertise and resources of academics in the university.
9. **Strengthening the Innovative Financing Community (Infinity) Community of Practice (CoP)**
   CoP Infinity initiative has the objective to strengthen the knowledge exchange network and best practices among practitioners and stakeholders in the field of creative financing in infrastructure delivery. CoP Infinity activities include a platform for exchanging information and thoughts, which enables members to share insights and experiences related to innovative financing. In addition, the Infinity CoP organizes various study dissemination activities, which aim to broaden the understanding and application of creative financing concepts in public infrastructure delivery.

STRATEGI PENGUATAN *ENABLER*

ENABLER STRENGTHENING STRATEGY

Strategi penguatan *enabler* dalam rangka mendukung sasaran usaha, antara lain:

1. Penyelarasan arsitektur proses bisnis untuk memastikan pengelolaan proses bisnis berbasis pengendalian internal;
2. Penguatan *management decision support system* melalui pemutakhiran modul/fungsi Teknologi Informasi *Enterprise Resource Planning* (IT ERP) yang terintegrasi dengan *project database*;
3. Melanjutkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbasis kompetensi dan mengacu pada konsep *learning organization*.

The strategy to strengthen enablers to support business objectives, among others:

1. Alignment of business process architecture to ensure business process management based on internal control;
2. Strengthening management decision support system by enhancing Information Technology Enterprise Resource Planning (IT ERP) module/function integrated with project database;
3. Developing Human Resources (HR) that is competency-based and refers to the learning organization concept.

STRATEGI PENGELOLAAN RISIKO

RISK MANAGEMENT STRATEGY

Beberapa strategi terkait dengan pengelolaan risiko dalam mendukung pencapaian sasaran, antara lain:

1. Penguatan kapasitas dan kapabilitas Internal Audit dalam mendukung peran menjadi *Trusted Advisor*;
2. Penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) secara sistematis dan konsisten yang tercermin pada tingkat kematangan penerapan ERM level 3 dari 5 level kematangan manajemen risiko;
3. Penguatan mekanisme pemulihan regres melalui Kemenkeu Satu;
4. Pengelolaan likuiditas secara optimum melalui alternatif pendanaan dalam pemenuhan klaim penjaminan.

Several strategies related to risk management in supporting the achievement of targets are as follows:

1. Strengthening the capacity and capability of Internal Audit in supporting the role of being a Trusted Advisor;
2. Systematic and consistent implementation of Enterprise Risk Management (ERM) as reflected in the maturity level of ERM level 3 of 5 risk management maturity levels;
3. Strengthening the recourse recovery mechanism through Kemenkeu Satu;
4. Optimum liquidity management via alternative funding in fulfilling guarantee claims.

ASPEK PEMASARAN
MARKETING ASPECT

Sesuai dengan mandat Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50/2016 tentang Perubahan Kedua atas Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2020 yang isinya terdiri dari 3 (tiga) mandat, yaitu: (1) memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) di bidang infrastruktur; (2) melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan Pemerintah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional; dan (3) memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah.

Sebagai implementasi dari PP tersebut, PT PII terus melanjutkan pengembangan perluasan lingkup atas kegiatan usaha dari tahun-tahun sebelumnya dengan memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) di bidang infrastruktur dan selain infrastruktur, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan pengembangan proyek sesuai penugasan Pemerintah. Beberapa pengembangan usaha tersebut antara lain:

1. Sejak tahun 2018, PT PII telah melaksanakan kegiatan bisnis di luar penjaminan melalui penugasan *Project Development Facility* (PDF) untuk pendampingan penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dari Kementerian Keuangan sesuai dengan PMK 68/2024.
2. Pada tahun 2024, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 101/PMK.08/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) terhadap Risiko Gagal Bayar dari BUMN yang Melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur, PT PII melaksanakan penugasan Pemerintah dengan memberikan penjaminan secara bersama atas Pinjaman PT PLN untuk membiayai Proyek Indonesia *Sustainable Least-Cost Electrification* (ISLE). Penugasan tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan/KMK No. 73/KM.8/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Penugasan Kepada PT PII Untuk Memberikan Jaminan Terhadap Risiko Gagal Bayar dari PT PLN yang Mendapatkan Pinjaman Langsung dari World Bank/*International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) Untuk Membiayai Program ISLE.

In accordance with the Government mandate stipulated in Government Regulation (PP) No. 35/2009, as amended by Government Regulation No. 50/2016 on the Second Amendment to the State Capital Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Company (Persero) in the Field of Infrastructure Guarantee, as amended by Government Regulation No. 55 of 2020, which consists of three (3) mandates: (1) Providing Sovereign Guarantee in the infrastructure sector; (2) Conducting activities related to the Sovereign Guarantee implementation, as well as other activities related to the project development to support the national economy; and 3) Providing Sovereign Guarantee in other sectors' financing in addition to infrastructure based on Government's assignments.

As an implementation of the Government Regulation, IIGF develops the expansion of the scope of business activities from previous years by providing sovereign guarantees in the field of infrastructure and non-infrastructure, as well as other activities related to project development as assigned by the Government. The business development includes:

1. Since 2018, IIGF carried out business activities outside of guarantees via the assignment of the Project Development Facility (PDF) to assist in the preparation and implementation of Public Private Partnership (PPP) projects from the Ministry of Finance in accordance with PMK 68/2024.
2. In 2024, pursuant to the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 101/PMK.08/2018 on the Procedures for Providing and Implementing Sovereign Guarantee Jointly or via Infrastructure Guarantee Agency against the Risk of Default from SOEs that Borrow and/or Bond Issuance to Finance Infrastructure Provision, IIGF carries out Government's assignments by providing joint guarantees for PT PLN Loans to finance the Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification (ISLE) Project. The assignment refers to the Decree of the Minister of Finance/KMK No. 73/KM.8/2023 dated 26 May 2023 on the Assignment to IIGF to Provide Guarantees Against the Risk of Default of PT PLN Obtaining Direct Loans from the World Bank/International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) to Finance the ISLE Program.

3. Pada tahun 2020, secara formal terlibat aktif dalam sinergi Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan penyediaan infrastruktur KPBU melalui Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia sesuai Nota Kesepakatan 7 Kementerian/Lembaga pada 18 September 2020.
4. PT PII juga berperan serta dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui pemberian Penjaminan Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program PEN. Pemberian penjaminan tersebut diatur dalam PMK No. 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK 211/2020) dan PMK 98/2020.
5. Berdasarkan PMK No. 30/PMK.08/2021 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) (PMK 30/2021), PT PII kembali mendapat perluasan mandat untuk memberikan penjaminan terhadap Risiko Politik yang dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan PSN dan dapat memberikan dampak finansial kepada Badan Usaha yang melaksanakan PSN. Terkait dengan pemanfaatan PMN PEN untuk penjaminan sesuai dengan PMK 211/2020.
6. Dalam rangka mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 220/PMK.08/2022 tentang Dukungan Pemerintah untuk Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Kementerian Keuangan bersama-sama PT PII menyedikan Penjaminan Infrastruktur atas kewajiban finansial PJPK yang ditimbulkan oleh risiko infrastruktur dan tertuang dalam Perjanjian KPBU IKN untuk dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan pemerintah.
7. PT PII melaksanakan Jaminan Pemerintah Bersama Kementerian Keuangan kepada BUMN Pangan dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Pemberian Jaminan Pemerintah tersebut diatur dalam PMK 34/2024 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
8. Pada tahun 2024, berdasarkan PMK 89/2023 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (KCJB), PT PII melaksanakan penugasan Pemerintah dengan memberikan penjaminan secara bersama atas Pinjaman PT KAI. Penugasan tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan/KMK

3. In 2020, formally involved in the synergy of Ministries/Institutions to implement PPP infrastructure provision via the Joint Office of PPP of the Republic of Indonesia in accordance with the Memorandum of Understanding of 7 Ministries/Institutions on 18 September 2020.
4. IIGF also participates in the National Economic Recovery (PEN) Program via the provision of Government Guarantees to State-Owned Enterprises implementing the PEN program. The provision of these guarantees is regulated in PMK No. 211/PMK.08/2020 on the Procedures for Providing Government Guarantees for State-Owned Enterprises for National Economic Recovery Program Implementation (PMK 211/2020) and PMK 98/2020.
5. Pursuant to PMK No. 30/PMK.08/2021 on the Procedures for Providing Central Government Guarantees to Accelerate the National Strategic Projects (PSN) ("PMK 30/2021"), IIGF has again received an expanded mandate to provide guarantees for Political Risks that may obstruct the PSN and may have a financial impact on the Business Entities implementing the PSN. On the utilization of PEN PMN for guarantees in accordance with PMK 211/2020.
6. To support the development of the Capital City of Nusantara (IKN) in North Penajam Paser, East Kalimantan, the Ministry of Finance issued PMK 220/PMK.08/2022 on the Government Support for Public Private Partnership and Creative Financing to Accelerate Infrastructure Provision in the Capital City of Nusantara. The Minister of Finance, in collaboration with IIGF, provides an Infrastructure Guarantee for GCA's financial obligations arising from infrastructure risks and contained in the IKN's PPP Agreement to be implemented based on the government guarantee agreement.
7. IIGF implements the Sovereign Guarantee with the Ministry of Finance to Food SOEs to Implement the Government Food Reserves. The provision of the Sovereign Guarantee is regulated in PMK 34/2024 on the Procedures for Providing Sovereign Guarantee to Implement Government Food Reserves.
8. In 2024, pursuant to PMK 89/2023 on the Procedures for Providing Sovereign Guarantee for the Acceleration of the Infrastructure and Facilities for Jakarta Bandung Fast Trains (KCJB), IIGF was assigned by the Government to provide joint guarantees for PT KAI's Loans. The assignment refers to the Decree of the Minister of Finance/KMK No. 239/KM.8/2023 dated 28 December 2023 on the Assignment to

No. 239/KM.8/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penugasan Kepada PT PII Untuk Melakukan Penjaminan Pemerintah Secara Bersama atas Pinjaman PT KAI dalam Rangka Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana KCJB.

Selain melaksanakan perluasan bidang usaha, PT PII melakukan inisiatif strategis bersama *development partners* dan melakukan penguatan kepada mitra perusahaan baik melalui Nota Kesepakatan maupun program kolaborasi bersama melalui 3 (tiga) program utama, antara lain:

1. Pengembangan Proyek
   Aktivitas pengembangan proyek bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas *pipeline* proyek yang kredibel untuk proses penjaminan yang dilakukan melalui sosialisasi dan penyaringan potensi *pipeline*, termasuk dengan dukungan kantor vertikal Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang berperan aktif dalam memfasilitasi potensi proyek Daerah. Dalam rangka pengusahaan *pipeline* proyek, PT PII juga mengembangkan PPP Smart Hub, sebuah *platform* untuk pengembangan KPBU skala kecil yang melibatkan Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan Nasional dan Internasional, Bank Pembangunan Daerah, asosiasi pelaku industri, dan *development partners* untuk mempercepat proses penyusunan, pembiayaan, dan pelaksanaan proyek KPBU, sehingga dapat menghasilkan proyek infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pengusahaan diversifikasi ke KPBU sektor baru juga dilakukan dengan melakukan beberapa program penguatan kapasitas baik dari sisi kesiapan sektor dan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).
2. Penguatan Struktur Penjaminan
   Penyiapan struktur penjaminan merupakan aktivitas penting dalam memastikan aspek *bankability* dan *credit worthiness* dapat tercapai. PT PII secara aktif melakukan penguatan struktur penjaminan dan mitigasi risiko untuk sektor KPBU eksisting dan sektor baru dengan mitra strategis PJPK, perbankan dan investor. PT PII juga melakukan penjajakan kerja sama co/re *guarantee* dengan lembaga multilateral dan bilateral. Melanjutkan inisiatif ESG bersama Kementerian Keuangan yang sudah dimulai sejak tahun 2022, PT PII menyusun *framework* dan mempersiapkan implementasi evaluasi penyiapan proyek PDF dan evaluasi penjaminan berbasis ESG. Selain itu, PT PII menjajaki upaya penguatan mekanisme regres penjaminan proyek daerah melalui penerapan skema pemulihan piutang regres penjaminan melalui pemotongan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) daerah (skema *intercept regress*).

IIGF to Perform Joint Sovereign Guarantee for the Loan of PT KAI in Accelerating KCJB Infrastructure and Facilities.

In addition to carrying out the expansion of business sectors, IIGF carries out strategic initiatives with development partners and strengthens partner companies both through Memorandum of Understanding(s) and collaboration through three (3) programs, among others:

1. Project Development
   Project development activities aim to increase the number and quality of credible project pipelines to process the guarantee via socialization and screening of potential pipelines, including with the support of vertical offices of the Ministry of Finance and Bank Indonesia, which play an active role in facilitating potential local projects. To exploit the project pipeline, IIGF also developed PPP Smart Hub, a platform for small-scale PPP development involving Local Governments, National and International Financial Institutions, Regional Development Banks, industry associations, and development partners. The objective is to accelerate the process of preparing, financing, and implementing PPP projects to produce sustainable infrastructure projects and have a positive impact on society. Diversification into new PPP sectors is also conducted by holding several capacity building programs both in terms of sector readiness and Government Contracting Agency (GCA).
2. Strengthening the Guarantee Structure
   The preparation of the guarantee structure is important to ensure bankability and creditworthiness aspects can be achieved. IIGF actively strengthens the guarantee structure and risk mitigation for the existing PPP sector and new sectors with GCA strategic partners, banks, and investors. IIGF is also exploring co-/re-guarantee cooperation with multilateral and bilateral institutions. Continuing the ESG initiative with the Ministry of Finance that started in 2022, IIGF developed a framework and prepared the PDF project preparation evaluation and ESG-based guarantee evaluation. In addition, IIGF is exploring efforts to strengthen the local project guarantee regress mechanism via the implementation of a guaranteed regress receivables recovery scheme by cutting regional Transfer to Regional and Village Funds (TKDD) funds (intercept regress scheme).

3. Kolaborasi Strategis dalam Penguatan Kemitraan Bisnis Perseroan
   Beberapa jenis kolaborasi penting dilakukan oleh PT PII, diantaranya kerja sama dengan *development partners* untuk *matchmaking* bantuan penyiapan proyek (*technical assistant*) dan *capacity building* berskala internasional, kerja sama penguatan kapabilitas PJPK (*capability building*) dalam pembiayaan kreatif pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan sebagai mitra bisnis utama perusahaan, dan kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam pengembangan instrumen pasar modal untuk mendukung pembiayaan kreatif pada sektor infrastruktur publik.

3. Strategic Collaboration to Strengthen the Company's Business Partnership
   IIGF has carried out several types of important collaborations, including cooperation with development partners for matchmaking of project development assistance (technical assistant) and international capacity building, cooperation to strengthen the capability of GCA (capability building) in creative financing at the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) and the Ministry of Transportation as the company's main business partners, and cooperation with the Indonesia Stock Exchange in developing capital market instruments to support creative financing in the public infrastructure sector.

PANGSA PASAR
MARKET SHARE

Pada tahun 2024, strategi pengembangan *pipeline* KPBU meliputi beberapa tahapan antara lain: *initial project identification*, *scanning* terhadap potensi proyek-proyek KPBU dari berbagai sumber yang menghasilkan *Longlist Projects* dan *Shortlist Project*, dan pelaksanaan *pre-screening* yang merupakan proses persiapan pelaksanaan penyaringan/ *screening* yang berfokus pada aspek kesiapan dokumentasi proyek, komitmen PJPK, identifikasi profil risiko proyek, potensi atas keberlanjutan proyek sampai dengan tahapan proses penjaminan diselesaikan. PT PII terus memperkuat pangsa pasar Perseroan, yang terdiri dari:

1. Kementerian/Lembaga/Badan yang sesuai mandatnya melaksanakan pengembangan infrastruktur publik melalui skema pembiayaan kreatif, antara lain kemitraan KPBU dan *blended financing*.
2. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang melaksanakan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengembangan infrastruktur publik melalui skema pembiayaan kreatif, antara lain kemitraan KPBU, baik KPBU reguler dan KPBU skala kecil, penerbitan obligasi daerah, dan *blended financing*.
4. BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi Negeri/Lembaga Penyiaran Publik/Badan Layanan Umum yang sesuai regulasi sektoral dapat bertindak mewakili pemerintah dalam kontrak kerjasama investasi yang melaksanakan skema pembiayaan kreatif, antara lain kemitraan KPBU, dan *blended financing*.

In 2024, the PPP pipeline development strategy includes several stages: initial project identification, scanning of potential PPP projects from various sources that result in Longlist Projects and Shortlist Projects, and pre-screening, which is a preparatory process for screening that focuses on aspects of project documentation readiness, GCA commitment, identification of project risk profiles, potential for project sustainability until the guarantee process stage is completed. IIGF keeps strengthening the Company's market share, which consists of:

1. Ministries/Institutions/Agencies, that in accordance with their mandate, conduct public infrastructure development through creative financing schemes, including PPP partnerships and blended financing.
2. Ministries/Institutions/Local Governments that implement National Strategic Projects in accordance with prevailing regulations.
3. Local Governments that implement public infrastructure development via creative financing schemes, including PPP partnerships, both regular PPP and small-scale PPP, local bond issuance, and blended financing.
4. SOEs/Local-Owned Enterprises/State Universities/Public Broadcasting Institutions/Public Service Agencies that, in accordance with sectoral regulations, can act on behalf of the government in investment cooperation contracts with creative financing schemes, including PPP partnerships and blended financing.

5. BUMN yang mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyediakan infrastruktur publik dan program pemerintah yang dalam pelaksanaanya menerbitkan obligasi, pinjaman kepada lembaga multilateral atau pinjaman kepada lembaga keuangan.

Sepanjang tahun 2024, PT PII menerima permohonan pendampingan penjaminan proyek dan formulir penyaringan proyek sebanyak 15 proyek yang terdiri dari sektor kesehatan, sektor konservasi energi, sektor jalan, sektor transportasi, sektor minyak, gas bumi, dan energi terbarukan, sektor air minum, sektor ekonomi fasilitas perkotaan, dan sektor perumahan.

Adapun daftar *Screening Form* (SF) KPBU yang telah disampaikan oleh PJPK sebagaimana tabel di bawah ini:

5. SOEs that have been assigned by the government to provide public infrastructure and government programs by issuing bonds, loans to multilateral institutions, or loans to financial institutions.

In 2024, IIGF received requests for 15 project development facilities screening forms, consisting of the health sector, energy conservation sector, road sector, transportation sector, oil, gas, and renewable energy sector, drinking water sector, urban facilities economic sector, and housing sector.

The list of PPP Screening Forms (SF) that have been submitted by GCA is shown in the table below:

Tabel Daftar SF KPBU
Table: List of PPP SF

No.	Nama Proyek Project Name	Tanggal Perolehan Date Obtained
1.	Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) Universitas Padjajaran Padjajaran University Hospital	3 Januari 2024 3 January 2024
2.	Alat Penerangan Jalan (APJ) Kabupaten Bandung Street Lighting Equipment (APJ) in Bandung Regency	4 Januari 2024 4 January 2024
3.	Preservasi Jalan Madiun Madiun Road Preservation	6 Mei 2024 6 May 2024
4.	Terminal Betan Subing Betan Subing Terminal	31 Juli 2024 31 July 2024
5.	Ibu Kota Negara (IKN) – Rumah Tapak Intiland State Capital (IKN) – Intiland Landed House	17 Juli 2024 17 July 2024
6.	Jalan Tol Gilimanuk Mengwi Gilimanuk Mengwi Toll Road	17 September 2024 17 September 2024
7.	Alat Penerangan Jalan (APJ) Kabupaten Ponorogo Street Lighting Equipment (APJ) in Ponorogo Regency	24 September 2024 24 September 2024
8.	Ibu Kota Negara (IKN) – Rusun PT Nindya Karya State Capital (IKN) – Flat of PT Nindya Karya	1 Oktober 2024 1 October 2024
9.	Jaringan Gas Batam Batam Gas Network	15 Oktober 2024 15 October 2024
10.	Pasar Induk Kabupaten Tabanan Tabanan Regency Market	24 Oktober 2024 24 October 2024
11.	Alat Penerangan Jalan (APJ) Kabupaten Bandung Street Lighting Equipment (APJ) in Bandung Regency	29 Oktober 2024 (Perubahan Badan Usaha Pemrakarsa) 29 October 2024 (Change of Proponent Business Entity)
12.	Alat Penerangan Jalan (APJ) Kota Ternate Street Lighting Equipment (APJ) in Ternate	30 Oktober 2024 30 October 2024
13.	*Transit Oriented Development* (TOD) Poris Plawad Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad	29 November 2024 29 November 2024
14.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kota Malang Malang Kanjuruhan Regional General Hospital (RSUD)	13 Desember 2024 13 December 2024
15.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Karo Water Supply System (SPAM) Karo Regency	31 Desember 2024 31 December 2024

Pada tahun 2024, PT PII telah menandatangani 4 (empat) Perjanjian Penjaminan, yaitu:

1. KPBU - Proyek Jalan Tol Kediri Tulungagung;
2. KPBU - Proyek Jalan Non Tol Trans Papua;
3. Non KPBU - Pinjaman PT KAI (Persero) dalam Rangka Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung;
4. Non KPBU - Pinjaman PT PLN (Persero) terkait Program *Indonesia Sustainable Least-cost Electrification* (ISLE)

Sehingga, per 31 Desember 2024, PT PII telah menjamin 53 proyek yang terdiri dari 45 proyek penjaminan infrastruktur dan 8 penjaminan non infrastruktur dengan total nilai investasi proyek yang dijamin sebesar Rp539 triliun. Selain itu, PT PII telah menerbitkan sertifikat penjaminan dengan total nilai fasilitas pinjaman yang dijamin sebesar Rp8.108,4 miliar dan nilai penjaminan sebesar Rp5.973,9 miliar. Per 31 Desember 2024, nilai outstanding fasilitas pinjaman yang dijamin adalah sebesar Rp1.556 Miliar dan nilai penjaminan sebesar Rp1.194 miliar. Sedangkan untuk Penjaminan Bersama Korporasi dengan LPEI, total nilai outstanding pinjaman yang dijamin sebesar Rp400 miliar dan nilai penjaminan sebesar Rp300 miliar, dimana porsi PT PII adalah 80% dan LPEI 20%.

In 2024, IIGF has signed 4 (four) Guarantee Agreements, namely:

1. PPP - Kediri Tulungagung Toll Road Project;
2. PPP - Trans Papua Non-Toll Road Project;
3. Non PPP - Loan of PT KAI (Persero) for the Jakarta Bandung High Speed Rail Project;
4. Non PPP - PT PLN (Persero) Loan related to Indonesia Sustainable Least-cost Electrification (ISLE) Program

Thus, as of December 31, 2024, IIGF has guaranteed 53 projects consisting of 45 infrastructure guarantee projects and 8 non-infrastructure guarantees with a total guaranteed project investment value of Rp539 trillion. In addition, IIGF has issued guarantee certificates with a total guaranteed loan facility value of Rp8,108.4 billion and a guarantee value of Rp5,973.9 billion. As of December 31, 2024, the outstanding value of the guaranteed loan facility was Rp1,556 billion and the guarantee value was Rp1,194 billion. As for the Corporate Joint Guarantee with LPEI, the total outstanding value of the guaranteed loan is Rp400 billion and the guarantee value is Rp300 billion, where the portion of PT PII is 80% and LPEI is 20%.

STRATEGI PEMASARAN
MARKETING STRATEGY

PT PII menjalankan pemasaran dan komunikasi terhadap produk bisnis Perusahaan melalui beberapa aktivitas seperti keterlibatan aktif dalam Kantor Bersama KPBU Indonesia, komunikasi langsung dengan calon PJPK potensial, dan para pemangku kepentingan terkait, serta sosialisasi dan terlibat dalam forum, seminar, baik nasional dan internasional, melaksanakan *media briefing* serta promosi melalui media sosial. Untuk memasarkan dan mengkomunikasikan produk bisnis Perusahaan berbagai kegiatan dilaksanakan secara hybrid, luring maupun secara daring (*online*).

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, Perseroan juga berupaya memanfaatkan aplikasi dan *digital platform* untuk mendukung kegiatan pemasaran Perseroan dan sosialisasi mengenai skema KPBU dan peran PT PII kepada pemangku kepentingan. Sebagai bentuk dukungan terhadap PJPK dalam penyiapan proyek KPBU, PT PII secara aktif telah mempertemukan kebutuhan PJPK dalam penyusunan dokumen studi dengan *development partners* yang dapat memberikan bantuan teknis dalam penyusunan studi tersebut. Dengan demikian, kualitas dan kecepatan penyiapan proyek secara keseluruhan diharapkan dapat mengalami peningkatan.

IIGF implements marketing and communication of the company's business products through several activities, such as active involvement in the Indonesian PPP Joint Office, direct communication with potential GCA candidates, and related stakeholders, as well as socialization and involvement in forums, seminars, both national and international, media briefings, and promotion through social media. To market and communicate the company's business products, various activities are carried out in a hybrid manner, offline and online.

In line with the rapid development of technology, the Company strives to utilize digital applications and platforms to support the Company's marketing activities and socialization of the PPP scheme and the role of IIGF to stakeholders. As a form of support to the GCA in the preparation of PPP projects, IIGF has actively met the needs of the GCA to prepare study documents with development partners who can provide technical assistance in preparing the study. Thus, the overall quality and speed of project preparation shall improve.

PT PII secara aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan dalam bentuk pemberian serta peningkatan pemahaman mengenai skema KPBU kepada calon PJPK dan potential investor baik untuk KPBU regular di tingkat pusat, daerah maupun KPBU IKN. Guna memperoleh *pipeline* potensial yang kredibel, PT PII aktif berkoordinasi dengan PJPK potensial untuk menindaklanjuti pemenuhan catatan pada berbagai proses penjaminan dalam bentuk *workshop*, *Focus Group Discussion* (FGD) maupun koordinasi lintas instansi/lembaga serta berpartisipasi mendukung kegiatan proyek yang dilaksanakan PJPK seperti *market sounding* dan lainnya.

IIGF actively disseminated and provided mentoring by providing and increasing understanding of the PPP scheme to prospective GCA and potential investors for regular PPP at the central, local, and IKN PPP levels. To obtain a credible potential pipeline, IIGF actively coordinates with potential GCA to follow up on the fulfillment of notes on various guarantee processes in the form of workshops, Focus Group Discussions (FGDs), and cross-agencies/institutions coordination, and participates in supporting project activities carried out by GCA, such as market sounding, etc.

Sesuai dengan bidang usaha yang dijalaninya, PT PII terus melakukan pemetaan atas potensi Penjaminan Pemerintah dengan tetap mengacu kepada dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti Daftar Rencana Proyek KPBU/PPP Book Bappenas, Daftar rencana Proyek Strategis Nasional, dokumen perencanaan pemerintah pusat dan daerah, dokumen perencanaan dari sektor infrastruktur terkait, dan interaksi dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan sebagainya.

In line with the business sector, IIGF continues to map the potential for Government Guarantee while still referring to documents issued by the Government, such as the List of PPP Plans (Bappenas PPP Book), List of planned National Strategic Projects, central and local government planning documents, planning documents from related infrastructure sectors, interaction and communication with various stakeholders, etc.

Selanjutnya, PT PII akan menyusun *pipeline project* dan merumuskan strategi dengan melakukan analisis terhadap peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh proyek tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung pengusahaan sesuai dengan bidang usaha yang dijalani Perseroan hingga akhirnya ditentukan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan demi mendukung kesinambungan kinerja usaha sampai pada akhirnya menempatkan posisi Perseroan dalam pasar Penjaminan dan Infrastruktur. Strategi pemasaran tersebut didukung dengan alokasi anggaran dan sumber daya yang efisien, sehingga Perseroan dapat mengimplementasikan rencana dengan lebih terstruktur dan optimal.

Further, IIGF will develop a project pipeline, and formulate a strategy by analyzing the opportunities as well as the challenges that will be faced with such projects. This categorization was necessary to support the business in accordance with the business sector of the Company, until the activities that need to be carried out are determined to support the sustainability of business performance to ultimately position the Company in the Guarantee and Infrastructure market. The marketing strategy is supported by an efficient allocation of budget and resources, allowing the Company to implement the plan in a more structured and optimized manner.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
OPERATIONAL REVIEW BY BUSINESS SEGMENT

Pembiayaan kreatif (*creative financing*) merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mengatasi anggaran pemerintah yang terbatas dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Pemerintah membutuhkan *vehicle* agar pemenuhan atas kebutuhan infrastruktur dapat terlaksana secara berkelanjutan PT PII merupakan *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan yang dibentuk untuk akselerasi pengembangan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, sejak didirikan 15 tahun yang lalu, PT PII telah mendapatkan beberapa kali perluasan mandat serta penambahan penugasan, melalui penyediaan jaminan yang dilakukan dengan proses yang akuntabel, transparan, dan kredibel. Keberadaan PT PII merupakan sebuah solusi di tengah kebutuhan infrastruktur yang mendesak. Selama 15 tahun perjalanannya, PT PII telah membiayai sejumlah proyek infrastruktur dan penjaminan BUMN.

Melalui PP 55/2020, Pemerintah kembali memberikan perluasan mandat kepada PT PII untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan penjaminan Pemerintah yang semakin meningkat serta dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak dari *pandemic* COVID-19. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, maka PT PII diberikan mandat untuk memberikan Penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur, melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan Pemerintah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional, serta untuk memberikan penjaminan Pemerintah dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan penjaminan Pemerintah, Pemerintah memandang perlunya penguatan mandat PT PII, khususnya untuk memberikan penjaminan di bidang lainnya selain infrastruktur serta optimalisasi pengawasan dan monitoring kegiatan penjaminan dan investasi PT PII untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, Menteri Keuangan (Menkeu) menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 148/PMK.08/2022 tentang Ruang Lingkup Pengelolaan Penjaminan Infrastruktur oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. PMK ini merupakan penggantian dari PMK No. 95/PMK.08/2017 yang memuat ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup, dan tata kelola

Creative financing is one of the Government's initiatives to anticipate budget limitation in accelerating infrastructure development. To ensure sustainable delivery, the Government needs dedicated vehicle to fulfill its infrastructure needs in a sustainable manner. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) or Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) serves as Special Mission Vehicle (SMV) of the Ministry of Finance established to accelerate infrastructure development and and promote sustainable growth in Indonesia.

Since its establishment 15 years ago, In support of Indonesia's infrastructure acceleration agenda, IIGF has received several mandate expansions and additional assignments, by providing guarantees that are carried out with accountable, transparent, and credible processes. The existence of IIGF offers a strategic solution amidst urgent infrastructure needs. During its 15-year journey, IIGF has financed various infrastructure projects and guaranteed SOEs.

Pursuant to PP 55/2020, the Government again has expanded its mandate to IIGF to support Government policies to fulfill the increasing need for Sovereign Guarantees, and to support the National Economic Recovery (PEN) Program due to the COVID-19 pandemic. Based on this Government Regulation, IIGF is mandated to provide Sovereign Guarantees in the infrastructure sector, carry out activities related to the Sovereign guarantees, and other activities related to the project development that supports the national economy, as well as Sovereign guarantees in financing in other fields in addition to the infrastructure assigned by the Government.

With the increasing need for Sovereign guarantees, the Government sees the need to strengthen IIGF's mandate, particularly to provide guarantees in other areas besides infrastructure, and optimize supervision and monitoring of IIGF's guarantee and investment activities for the future. Therefore, the Minister of Finance (Menkeu) stipulated Minister of Finance Regulation (PMK) No. 148/PMK.08/2022 on the Scope of Infrastructure Guarantee Management by Infrastructure Guarantee Business Entities. This PMK is an amendment to PMK No. 95/PMK.08/2017, which contains further provisions regarding the scope and governance of the activities in the context of sovereign guarantees in

pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan pemerintah di bidang infrastruktur dan pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur oleh persero. Penjaminan pemerintah yang dilaksanakan oleh PT PII saat ini telah berkembang tidak hanya terbatas pada proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), tetapi juga Penjaminan BUMN dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Penjaminan dalam rangka Cadangan Pangan Pemerintah dan Penjaminan untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Selain itu, PT PII dilibatkan secara aktif dalam memastikan keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional, salah satunya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), pembangunan di berbagai sektor, dan mendukung pelaksanaan program PEN.

Sejalan dengan perluasan mandat dalam Anggaran Dasar dan penugasan Pemerintah kepada PT PII tersebut, kegiatan usaha PT PII membagi bisnis Perseroan terbagi atas 4 (empat) segmen usaha, yang meliputi (1) Penjaminan Proyek Infrastruktur; (2) Pengelolaan Dana; (3) Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi; dan (4) Lainnya.

the infrastructure sector and financing in other sectors in addition to infrastructure by the company. IIGF's sovereign guarantee has developed, it is not only limited to Public Private Partnership (PPP) projects, but is also provided for SOEs Guarantee for National Economic Recovery (PEN) Program and Government Food Reserve, as well as Guarantee to Accelerate the High Speed Rail Infrastructure and Facilities between Jakarta and Bandung.

In addition, IIGF is actively involved in ensuring the sustainability of national strategic projects, one of which is the relocation of the Capital City of Nusantara (IKN), development in various sectors, and implementation of PEN program.

Align with the mandate's expansion in the Articles of Association and the Government's assignment to IIGF, IIGF's business is divided into four (4) business segments, which include (1) Infrastructure Project Guarantee; (2) Fund Management; (3) Project Development Facility (PDF); and (4) Others.

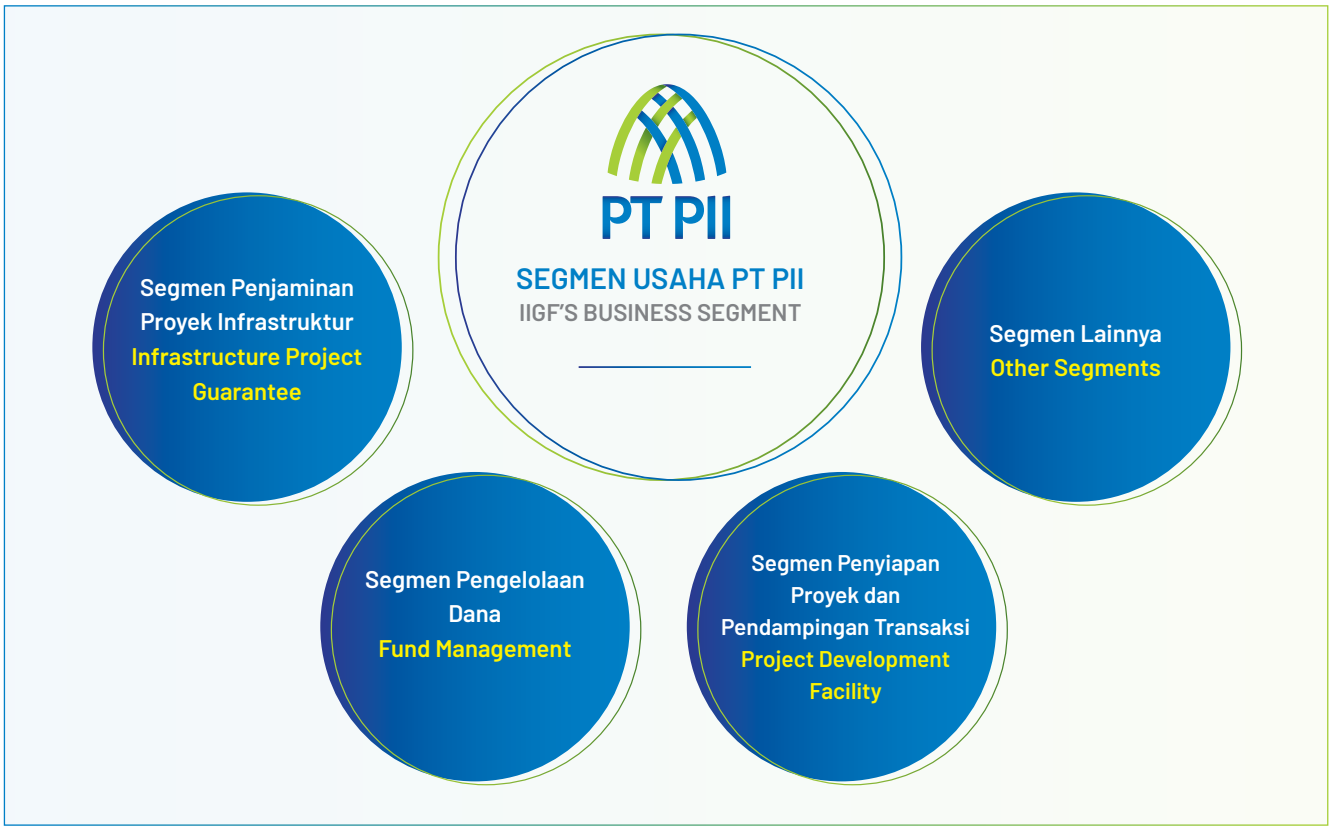

SEGMEN USAHA PENJAMINAN
GUARANTEE SEGMENT

Segmen Penjaminan meliputi 2 (dua) kelompok besar kegiatan usaha, yaitu:

1. Penjaminan Infrastruktur yang terbagi ke dalam KPBU dan Non KPBU; dan
2. Non Infrastruktur yang terbagi ke dalam Penjaminan Pelaku Usaha Korporasi dan Penjaminan BUMN.

Uraian masing-masing kegiatan usaha serta profitabilitas segmen Penjaminan dapat dilihat di bawah ini.

Guarantee Segment includes two (2) large business activities:

1. Infrastructure Guarantee, which is divided into Public Private Partnership (PPP) and Non-PPP; and
2. Non-Infrastructure, which is divided into Guarantee for Corporate Entrepreneurs and Guarantee for SOEs.

The description of each business activity and profitability of the Guarantee segment is as follows.

PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE GUARANTEE

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, kebutuhan penyediaan infrastruktur di Indonesia hanya dapat terpenuhi sekitar 30% oleh APBN, ditambah lagi dengan dampak pandemi COVID-19 yang menambah tekanan kepada alokasi APBN untuk sektor infrastruktur. Oleh karena itu, Pemerintah mengajak Badan Usaha untuk bekerja sama dalam melakukan penyediaan infrastruktur. Salah satu skema kerja sama yang saat ini didorong oleh Pemerintah adalah dengan skema KPBU seperti yang tertuang pada Perpres 38/2015 beserta seluruh peraturan & kebijakan turunannya yang menyediakan beberapa *fiscal tools* untuk dapat menarik minat badan usaha.

Mengacu pada Perpres 38/2015, salah satu bentuk *fiscal tools* untuk KPBU adalah Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) untuk dapat memberikan kenyamanan mitra Badan Usaha serta pihak *lenders* dalam melakukan kerja sama dengan Pemerintah.

Sebagai BUPI, PT PII mendapat mandat dari Pemerintah untuk menjalankan kebijakan satu pelaksana (*Single Window Policy*) bagi Pemerintah dalam memberikan Penjaminan Pemerintah dengan memperhatikan kaidah-kaidah manajemen risiko sesuai dengan prinsip dari skema KPBU. Dalam menjalankan kegiatan penjaminan, PT PII berpartisipasi secara aktif sejak tahapan penyiapan proyek KPBU sampai dengan pelaksanaan proyek dan sampai masa konsesi KPBU berakhir. Partisipasi PT PII pada tahapan penyiapan proyek dilakukan melalui kegiatan pendampingan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) seperti pelaksanaan audiensi, koordinasi, korespondensi, sosialisasi, peningkatan kapasitas (*capacity*

In accordance with the National 2019-2024 Medium-Term Development Plan (RPJMN), the need for infrastructure provision in Indonesia can only be met by approximately 30% of the State Budget. In addition, the COVID-19 pandemic heavily affects the State Budget further pressure on the infrastructure sector. Therefore, the Government invites Private Sectors to work together in providing infrastructure. One of the cooperation schemes currently being encouraged by is the PPP scheme as stated in Presidential Decree 38/2015 and all its derivative regulations & policies, which provide several fiscal tools to attract the business entities' interests.

With reference to Presidential Decree 38/2015, one form of the fiscal tools for PPP is a Sovereign Guarantee through the Infrastructure Guarantee Agency ("BUPI") to provide convenience for Private Sectors' partners and lenders in collaborating with the Government.

As a BUPI, IIGF has a mandate from the Government to implement a Single Window Policy for the Government in providing Sovereign Guarantees taking into account the risk management principles in accordance with the PPP scheme principles. In carrying out guarantee activities, IIGF actively participates, from the PPP project preparation stage, project implementation, up to the PPP concession period ends. IIGF's participation in the project preparation stage is carried out via assistance to the GCA, such as holding hearings, coordination, correspondence, outreach and capacity building, structuring PPP projects, and helping to ensure legal and institutional, technical, financial, environmental and social feasibility, and

building), strukturisasi proyek KPBU, dan membantu memastikan kelayakan hukum dan kelembagaan, teknis, finansial, lingkungan dan sosial dan kesesuaian terhadap prinsip alokasi risiko dari proyek KPBU. Setelah tahapan penyiapan dan transaksi, PT PII melakukan asistensi kepada PJPK dalam implementasi rencana mitigasi risiko mulai dari konstruksi hingga berakhirnya periode penjaminan dengan melakukan pemantauan proyek melalui *Joint Monitoring Committee* (JMC)/Tim Pemantauan Bersama dengan para pemangku kepentingan terutama untuk memantau risiko-risiko proyek yang dialokasikan kepada PJPK. Sebagai bagian dari upaya mitigasi proyek, PT PII juga secara rutin mengadakan rapat atau mengirimkan hasil pemantauan proyek kepada PJPK atau perwakilannya.

conformity to the risk allocation of PPP projects. After the preparation and transaction phases, IIGF provides assistance to the GCA in implementing risk mitigation plans, starting from construction until the end of the concession period, by monitoring the project through the Joint Monitoring Committee (JMC) with stakeholders, especially to monitor project risks allocated to the GCA. As part of project mitigation efforts, IIGF regularly holds meetings or sends project monitoring results to the GCAs or their representatives.

Selain itu, PT PII bersama para pemangku kepentingan lainnya secara aktif melakukan pemantauan terhadap risiko proyek yang menimbulkan kewajiban finansial bagi PJPK, misalnya risiko penyerapan air curah oleh Perumdam dikarenakan keterlambatan pembangunan jaringan distribusi, risiko keterlambatan pengadaan tanah pada proyek jalan tol dikarenakan belum dapat diserahkannya tanah dari Pemerintah kepada Badan Usaha secara 100% pada batas waktu yang telah ditentukan, maupun kemungkinan adanya risiko politik pada proyek.

In addition, IIGF, in collaboration with other stakeholders, actively monitors project risks that may raise financial obligations for the GCA, e.g., the risk of bulk water absorption by Perumdam due to delays in the construction of distribution networks, risks of delays in land acquisition in toll road projects due to the failure to handover 100% land from the Government to Business Entities within the targeted time limit, as well as the possibility of political risks in the project.

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No. 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur yang mencabut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, PT PII dapat mendukung penjaminan 22 sektor proyek infrastruktur dengan skema KPBU yang meliputi: Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat, Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat, Minyak Dan Gas Bumi Dan Energi Terbarukan termasuk Bio Energi, Konservasi Energi, Pariwisata, Kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan, Ekonomi Fasilitas perkotaan, Perumahan rakyat, Transportasi, Jalan, Sumber Daya Air dan irigasi, Telekomunikasi dan Informatika, Ketenagalistrikan, Sistem Pengelolaan Persampahan dan/atau Limbah Berbahaya dan Beracun, Fasilitas Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga, Kesenian dan Budaya, Kawasan, Bangunan Gedung Negara, Ekosistem Industri, dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

With reference to the Regulation of the Minister of National Development Planning/Head of the National Development Planning Agency of the Republic of Indonesia No. 7 of 2023 on the Implementation of Public Private Partnership in Infrastructure Provision, which revokes the Regulation of the Minister of National Development Planning/Head of the National Development Planning Agency of the Republic of Indonesia No. 2 of 2020 on the Procedures for Implementing Public Private Partnership, IIGF shall support the guarantee of 22 infrastructure project sectors with PPP schemes, including: Drinking Water, Centralized Wastewater Management System, Local Wastewater Management System, Oil and Gas and Renewable Energy including Bioenergy, Energy Conservation, Tourism, Health, Correctional Institutions, Economic Urban Facilities, Public Housing, Transportation, Roads, Water Resources and Irrigation, Telecommunications and Informatics, Electricity, Waste Management System and/or Hazardous and Toxic Waste, Education, Research and Development Facilities, Sports Facilities and Infrastructure, Arts and Culture, Regions, State Buildings, Industrial Ecosystems, and Battery-Based Electric Motor Vehicles.

Melalui Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2009, PT PII memperoleh perluasan mandat untuk memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan demikian, penjaminan pemerintah yang dilaksanakan oleh PT PII tidak lagi terbatas pada proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema KPBU. Perluasan mandat tersebut kemudian didukung dengan terbitnya PMK 101/2018 yang mulai berlaku di tahun 2018 dan PMK 89/2023 yang berlaku di tahun 2023.

Pursuant to Government Regulation No. 50 of 2016 on the Amendment to the Government Regulation No. 35 of 2009, IIGF received an expanded mandate to strengthen its role in supporting the acceleration of infrastructure development in Indonesia. Thus, sovereign guarantees implemented by IIGF are no longer limited to government infrastructure projects under the PPP scheme. This mandate expansion was then supported by the issuance of PMK 101/2018 which came into effect in 2018, and PMK 89/2023 which was enforced in 2023.

PENJAMINAN BARU
NEW GUARANTEES

Pada tahun 2024, PT PII memberikan penjaminan bagi 4 proyek baru dengan nilai total investasi proyek sebesar Rp45,8 triliun dan nilai penjaminan sebesar 9,4 triliun yang meliputi:

In 2024, IIGF provided guarantees for 4 new projects with a total investment value of Rp45.8 trillion, and a guarantee value of Rp9.40 trillion, which includes:

PENJAMINAN PROYEK INFRASTRUKTUR

1. Proyek Tol Kediri - Tulungagung dengan skema KPBU;
2. Proyek Jalan Non Tol Trans Papua dengan skema KPBU;
3. Pinjaman PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam Rangka Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung;
4. Pinjaman PT PLN (Persero) terkait Program Indonesia *Sustainable Least-cost Electrification* (ISLE).

INFRASTRUCTURE PROJECT GUARANTEE

1. Kediri - Tulungagung Toll Road Project with PPP scheme;
2. Trans Papua Non-Toll Road Project with PPP scheme;
3. Loan of PT Kereta Api Indonesia (Persero) of Jakarta Bandung High Speed Rail Project;
4. Indonesia Sustainable Least Cost Electrification (ISLE) Program.

Ringkasan Status Penjaminan Proyek Infrastruktur - KPBU
Status of Infrastructure Project Guarantee - PPP

No.	Nama Proyek Project Name	Uraian Description	Nilai Proyek (Rp-triliun) Project Value (Rp trillion)	Durasi Penjaminan (setelah COD) Guarantee Term (after COD)
1.	*Central Java Power Plant*	Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara dengan kapasitas 2x1000 MW yang terletak di Desa Ujungnegoro, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Coal Power Plant with a capacity of 2x1000 MW located in Ujungnegoro Village, Batang Regency, Central Java Province.	65,42	21 tahun years
2.	Palapa *Ring* Paket Barat Western Package Palapa Ring	Proyek telekomunikasi dengan sistem serat optik kabel darat dan laut di daerah bagian barat Indonesia yang berada di 5 Kabupaten/Kota dengan total panjang kabel 2.124 km. Telecommunications project with a land and sea cable fiber optic system in the western part of Indonesia in 5 regencies/cities with a cable length of 2,124 km.	1,23	12 tahun years

No.	Nama Proyek Project Name	Uraian Description	Nilai Proyek (Rp-triliun) Project Value (Rp trillion)	Durasi Penjaminan (setelah COD) Guarantee Term (after COD)
3.	Palapa *Ring* Paket Tengah Central Palapa Ring Package	Proyek telekomunikasi dengan sistem serat optik kabel darat dan laut di daerah bagian tengah Indonesia yang berada di 17 kabupaten/kota dengan total panjang kabel 3.102 km dan 7 *tower*. Telecommunications project with a land and sea cable fiber optic system in the central part of Indonesia in 17 regencies/cities with a total cable length of 3,102 km and 7 towers.	1,09	12 tahun years
4.	Palapa *Ring* Paket Timur Eastern Package Palapa Ring	Proyek telekomunikasi dengan sistem serat optik kabel darat dan laut di daerah bagian timur Indonesia yang berada di 35 Kabupaten/Kota dengan total panjang kabel laut 7.003 km dan 52 *tower*. Telecommunications project with a land and sea cable fiber optic system in the eastern part of Indonesia in 35 regencies/cities with a total cable length of 7,003 km and 52 towers.	5,09	12 tahun years
5.	Jalan Tol Batang - Semarang Batang - Semarang Toll Road	Terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan panjang 75 km. Located in Central Java Province extends with a length of 75 km.	13,97	15 tahun years
6.	Jalan Tol Pandaan - Malang Pandaan - Malang Toll Road	Terletak di Provinsi Jawa Timur dengan panjang 38,48 km. Located in East Java Province extends with a length of 38,48 km.	6,36	15 tahun years
7.	Jalan Tol Manado - Bitung Manado - Bitung Toll Road	Terletak di Provinsi Sulawesi Utara dengan panjang 39 km. Located in North Sulawesi extends with a length of 39 km.	4,95	15 tahun years
8.	Jalan Tol Balikpapan - Samarinda Balikpapan - Samarinda Toll Road	Terletak di Provinsi Kalimantan Timur dengan panjang total 97,99 km. Located in East Java Province with a total length of 97.99 km.	11,89	15 tahun years
9.	SPAM Umbulan Umbulan SPAM	Proyek penyediaan air minum dengan kapasitas air 4.000 l/detik dan panjang pipa transmisi 92,3 km dari Umbulan ke Kab Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik. Drinking water supply project with a water capacity of 4,000 l/second and a transmission pipe length of 92.3 km from Umbulan to Pasuruan Regency, Pasuruan City, Sidoarjo Regency, Surabaya City, Gresik Regency.	2,06	15 tahun years
10.	Proyek Jalan Tol Jalan Layang Sheikh Mohamed Bin Zayed (Jakarta -Cikampek II *Elevated*) Elevated Toll Road Project Sheikh Mohamed Bin Zayed (Jakarta -Cikampek II Elevated)	Terletak di Provinsi Jawa Barat dengan total panjang 36,4 km. Located in West Java Province extends with a length of 36.4 km.	16,31	15 tahun years
11.	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan Cileunyi - Sumedang - Dawuan Toll Road	Terletak di Provinsi Jawa Barat dengan total panjang 60,1 km. Located in West Java Province extends with a length of 60.1 km.	8,41	15 tahun years
12.	Jalan Tol Krian-Legundi Bunder-Manyar Krian-Legundi-Bunder-Manyar Toll Road	Terletak di Provinsi Jawa Timur dengan total panjang 38,3 km. Located in East Java Province extends with a length of 38.3 km.	12,93	15 tahun years

No.	Nama Proyek Project Name	Uraian Description	Nilai Proyek (Rp-triliun) Project Value (Rp trillion)	Durasi Penjaminan (setelah COD) Guarantee Term (after COD)
13.	Jalan Tol Serang-Panimbang Serang-Panimbang Toll Road	Terletak di Provinsi Banten dengan total 83,7 km. Located in Banten Province extends with a length of 83,7 km.	8,58	15 tahun years
14.	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan Jakarta - South Cikampek II Toll Road	Terletak di Provinsi Jawa Barat sepanjang 64 km. Located in West Java Province, extends with a length of 64 km.	14,69	15 tahun years
15.	Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Probolinggo-Banyuwangi Toll Road	Terletak di Provinsi Jawa Timur dengan panjang ruas jalan sekitar 172,9 km. Located in East Java Province extends with a length of 172,9 km.	23,39	15 tahun years
16.	SPAM Kota Bandar Lampung Bandar Lampung SPAM	Proyek penyediaan air minum di Kota Bandar Lampung dengan kapasitas air 750 l/detik dan panjang pipa transmisi 22 km. Drinking water supply project in Bandar Lampung City with a water capacity of 750 l/second and a transmission pipe length of 22 km.	0,75	15 tahun years
17.	SPAM Semarang Barat West Semarang SPAM	Proyek penyediaan air minum di Kota Semarang dengan kapasitas 1.000 l/ detik. Drinking water supply project in Semarang City with a capacity of 1,000 l/second.	0,42	15 tahun years
18.	Kereta Api Makassar- Parepare Makassar - Parepare Railway Train	Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum dengan Area Layanan Sulawesi Selatan meliputi 5 Kabupaten/Kota: Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare. Public Railway Infrastructure with the South Sulawesi Service Area covering 5 Regencies/Cities: Maros Regency, Pangkajene and Islands Regency, Barru Regency, Makassar City, and Parepare City.	0,99	14 tahun sejak Tanggal Operasi Komersil (TOK) 2 14 years since the Commercial Operation Date (COD) 2
19.	Satelit Multifungsi Pemerintah Government's Multifunction Satellite	Satelit dengan teknologi HTS (*High Throughout Satellite*) dengan kapasitas 150 Gbps. Satellite with HTS (High Throughout Satellite) technology with a capacity of 150 Gbps.	6,42	12 tahun years
20.	Jalan Tol Semarang- Demak Semarang-Demak Toll Road	Terletak di Provinsi Jawa Tengah sepanjang 27 km. Located in Central Java Province, extends with a length of 27 km.	5,93	15 tahun years
21.	Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan Preservation of The East Sumatera Cross Road at South Sumatera Province	Terletak di sisi Timur Jalan Sumatera Selatan di Kota Palembang sepanjang 29,87 km. Located on the East side of South Sumatra Roads in Palembang City, extends with a length of 29.87 km.	0,98	11 tahun years
22.	Jalan Tol Solo-Yogyakarta- NYIA Kulonprogo Solo-Yogyakarta- NYIA Kulonprogo Toll Road	Jalan tol ini menghubungkan Kota Solo Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Kulon Progo DIY dengan panjang 96,5 km. The toll road connects the cities of Solo (Central Java), Yogyakarta and Kulon Progo (Special Region of Yogyakarta), extends with a length of 96.5 km.	27,49	15 tahun years
23.	Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Yogyakarta-Bawen Toll Road	Jalan tol ini melalui Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Sleman dengan panjang 75,82 km. This toll road passes through Magelang Regency, Magelang City, Semarang Regency, Temanggung Regency, and Sleman Regency with a length of 75.82 km.	14,26	15 tahun years

No.	Nama Proyek Project Name	Uraian Description	Nilai Proyek (Rp-triliun) Project Value (Rp trillion)	Durasi Penjaminan (setelah COD) Guarantee Term (after COD)
24.	SPAM Kota Pekanbaru SPAM Pekanbaru City	Proyek penyediaan air minum di Kota Pekanbaru dengan kapasitas 750 lpd Drinking water supply project in Pekanbaru City with a capacity of 750 lps	0,50	15 tahun years
25.	SPAM Regional Jatiluhur I SPAM Region Jatiluhur I	Proyek penyediaan air minum Regional dari Jatiluhur dengan kapasitas 4.750 lpd ke Provinsi DKI Jakarta, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, dan Kab. Karawang. Regional drinking water supply project from Jatiluhur with a capacity of 4,750 lps to Special Capital Region of Jakarta Province, Bekasi Regency, Bekasi City, and Karawang Regency.	1,67	10 tahun years
26.	Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau Preservation of The East Sumatera Cross Road at Riau Province	Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau. Preservation of The East Sumatera Cross Road at Riau Province .	0,53	11 tahun years
27.	SPAM Regional Karian Serpong SPAM Region Karian Serpong	Proyek penyediaan air minum Regional dari Bendungan Karian dengan kapasitas 4.600 lpd ke Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Regional drinking water supply project from Karian Dam with a capacity of 4,600 lps to Special Capital Region of Jakarta Province, Tangerang City, and South Tangerang City.	2,43	15 tahun years
28.	Jembatan Callender Hamilton Hamilton Callender Bridge	Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton di Pulau Jawa. Callender Hamilton Bridge Replacement and/or Duplication on Java Island.	2,20	10 tahun years
29.	Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur Lighting Equipment (APJ) in Madiun Regency, East Java	Pembangunan baru (tanpa *retrofit*), pengoperasian, dan pemeliharaan terhadap 7.459 titik yang tersebar di Jalan Nasional, Jalan Kabupaten Utama dan Jalan Perkotaan. New construction (without retrofit), operation and maintenance of 7,459 points across National Roads, Main Regency Roads, and Urban Roads.	0,10	4 tahun years
30.	Proyek Pengembangan *Proving Ground* Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi Proving Ground Project Roadworthiness Testing and Motor Vehicle Certification (BPLJSKB) in Bekasi	Fasilitas pengujian di luar ruangan (*outdoor test*) sesuai dengan standar internasional yang telah mengadopsi *United Nations Agreement*. Outdoor testing facilities comply with international standards that have adopted the United Nations Agreement.	1,98	12 tahun years
31.	Tol Akses Patimban Patimban Access Toll Road	Jalan Tol Akses Patimban sepanjang 37,05 km akan mendukung Pelabuhan Patimban dan pengembangan wilayah di sekitarnya. Patimban Access Toll Road with length of 37.05 km shall support Patimban Port and the development of the surrounding area.	5,02	15 tahun years
32.	Penerangan Jalan Umum – Lombok Barat West Lombok Public Street Lighting	Fasilitas Penerangan Jalan Umum terhadap jalan sepanjang 545,1 km di 12.915 titik pada 10 Kecamatan Kabupaten Lombok. Public Street Lighting Facilities on 545.1 km of roads at 12,915 points in 10 Sub-Districts of Lombok Regency.	0,09	7 tahun years

No.	Nama Proyek Project Name	Uraian Description	Nilai Proyek (Rp-triliun) Project Value (Rp trillion)	Durasi Penjaminan (setelah COD) Guarantee Term (after COD)
33.	Tol Jakarta *Outer Ring Road* (JORR) *Elevated* Cikunir Ulujami Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir Toll Road	Jalan Tol yang bertujuan untuk mengurangi kapasita dan kepadatan di Jalan Tol JORR-1 serta meningkatkan pelayanan jalan, menyediakan rute alternatif, dan memperkuat jaringan jalan tol di daerah Jabodetabek. The Toll Road aims to reduce capacity and congestion on the JORR-1 Toll Road as well as improve road services, provide alternative routes, and strengthen the toll road network in the Jabodetabek area.	21,27	15 tahun years
34.	Jalan Tol Kediri - Tulungagung Kediri - Tulungagung Toll Road	Jalan tol sepanjang 44,17 km ini direncanakan sebagai bagian dari sistem jalan tol trans Jawa dan menjadi penyokong akses menuju Bandara Dhoho Kediri. This 44.17 km toll road is planned as part of the trans Java toll road system and will support access to Dhoho Kediri Airport.	10,3	15 tahun years
35.	Jalan Trans Papua Trans Papua Road	Jalan Trans Papua Ruas Jayapura – Wamena (segmen Mamberamo – Elelim) di Provinsi Papua Pegunungan diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan nasional sesuai RPJMN 2020-2024. The Jayapura - Wamena Trans Papua Road (Mamberamo - Elelim segment) in the Papua Mountain Province shall accelerate equitable distribution of national development in accordance with the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan.	3,34	11 tahun years

Tabel Ringkasan Status Proyek Penjaminan Non KPBU
Table: Non-PPP Guarantee Project Status

No.	Nama Proyek Project Name	Uraian Description	Nilai Proyek (Rp-triliun) Project Value (Rp trillion)	Durasi Penjaminan (setelah COD) Guarantee Term (after COD)
1.	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Mandalika Special Economic Zone (SEZ).	Pengembangan wilayah Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Development of the Mandalika Special Economic Zone Tourism area which is located in Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara.	4,87	35 tahun years
2.	*Hydropower Programme*	Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Mini Hidro yang terletak di empat provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Papua) dengan total kapasitas 195 MW. Hydroelectric and Mini Hydro Power Plants located in four provinces (South Sulawesi, Southeast Sulawesi, West Kalimantan, and Papua) with a total capacity of 195 MW.	7,21	14 tahun years
3.	PLTP Dieng-2 & Patuha-2 Geothermal Power Plant (GPP) Dieng-2 & Patuha-2	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi berlokasi di Dieng Jawa Tengah dan Gunung Patuha Jawa Barat, dengan kapasitas masing-masing sebesar 55 MW. Geothermal Power Plants located in Dieng, Central Java, and Mount Patuha, West Java, with a capacity of 55 MW each.	7,23	20 tahun years

No.	Nama Proyek Project Name	Uraian Description	Nilai Proyek (Rp-triliun) Project Value (Rp trillion)	Durasi Penjaminan (setelah COD) Guarantee Term (after COD)
4.	Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Kalimantan dan Maluku- Papua dengan skema *Result-Based Lending* (RBL-KMP) Construction of the Kalimantan and Maluku-Papua Distribution Network with Result-Based Lending (RBL-KMP) Scheme	Terletak di Kalimantan dan Maluku- Papua, proyek pembangunan jaringan distribusi listrik ini ditargetkan untuk menambah sambungan listrik hingga 6,7 juta pelanggan. Located in Kalimantan and Maluku-Papua, the electricity distribution network construction project is targeted to increase electricity grid to up to 6.7 million customers.	32,54	20 tahun years
5.	Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan skema *Result-Based Lending* (RBL-SNT) Development of Sulawesi and Nusa Tenggara Network Distribution with the Result-Based Lending Scheme (RBL-SNT)	Terletak di Sulawesi dan Nusa Tenggara, target dari Proyek ini adalah peningkatan sambungan listrik sampai dengan 7,7 juta pelanggan. Located in Sulawesi and Nusa Tenggara, the Project's target is to increase electricity connections for up to 7.7 million customers.	22,52	15 tahun years
6.	Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi di Jawa Timur dan Bali Construction of East Java and Bali Distribution Network	Pembangunan sistem distribusi Jaringan Tegangan Menengah, Jaringan Tegangan Rendah, trafo, dan sambungan di wilayah Jawa TImur dan Bali. Construction of distribution systems for Medium Voltage Networks, Low Voltage Networks, transformers, and connections in the East Java and Bali regions.	18,58	20 tahun years
7.	Penjaminan Proyek Pengembangan Jaringan Transmisi dan Distribusi di Jawa Bagian Barat dan Jawa Bagian Tengah (Sustainable and Reliable Energy Access Program/SREAP) Development Project Guarantee Transmission and Distribution Network Development in Western and Central Java (Sustainable and Reliable Energy Access Program/SREAP)	Pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) secara bertahap untuk fasilitas *charging station* kendaraan listrik. Gradually increasing the construction of Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU) infrastructure for electric vehicles' charging station.	43,46	20 tahun years
8.	Penjaminan Pembiayaan Proyek Pembangunan Pembangkit PLTU Tahap III Program 35.000 MW (PLTU Timor-1 2x50 MW) Financing Guarantee for the 35,000 MW Phase III SPP Power Plant Construction Project (SPP Timor-1 2x50 MW)	Pembangunan Pembangkit PLTU Tahap III Program 35.000 MW (PLTU Timor-1 2x50 MW) yang terletak di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Construction of SPP Phase III 35,000 MW Program (SPP Timor-1 2x50) located at Kupang Regency, East Nusa Tenggara.	3,72	10 tahun years
9.	Pinjaman PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam Rangka Pembiayaan Cost Overrun Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Loan of PT Kereta Api Indonesia (Persero) for Cost Overrun Financing of Jakarta Bandung High Speed Rail Project	Pemberian Penjaminan atas pembiayaan *cost overrun* Proyek KCJB. Provision of Guarantee for the cost overrun financing of the KCJB Project.	11,37	45 tahun years
10.	Program Indonesia *Sustainable Least-cost Electrification* (ISLE) Indonesia Sustainable Least-cost Electrification (ISLE) Program	Program Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Electricity infrastructure development program in Maluku, North Maluku, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara.	20,84	30 tahun years

Ringkasan Status Penjaminan Proyek Non Infrastruktur - Penjaminan BUMN dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Status of Non-Infrastructure Project Guarantee - SOE Guarantee in the National Economic Recovery (PEN) Program

No.	Nama Proyek Project Name	Uraian Description	Nilai Proyek (Rp-triliun) Project Value (Rp trillion)	Durasi Penjaminan (setelah COD) Guarantee Term (after COD)
1.	Penjaminan Pemerintah atas Obligasi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun 2021 dalam rangka Pelaksanaan Program PEN dan Obligasi IV & Sukuk Mudharabah I Tahun 2022 Sovereign Guarantee of PT Waskita Karya (Persero) Tbk Bond III Year 2021 in Implementing PEN Program and Bond IV & Sukuk Mudharabah I Year 2022	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar obligasi. Providing guarantees for the risk of default on bond payments.	1,78	Seri A : 5 tahun Seri B : 7 tahun Series A: 5 years Series B: 7 years
2.	Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN Sovereign Guarantee of PT Waskita Karya (Persero) Tbk's Loan for the PEN Program Implementation	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar bunga pinjaman. Providing guarantees for the risk of default on interest payments.	8,08	3 tahun years
3.	Penjaminan Obligasi IV PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional) Bonds IV Guarantee of PT Waskita Karya (Persero) for the National Economic Recovery)	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar obligasi. Providing guarantees for the risk of default on bond payments.	2,13	Seri A : 5 tahun Seri B : 7 tahun Series A: 5 years Series B: 7 years
4.	Penjaminan Sukuk Mudharabah I PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Sukuk Mudharabah I Guarantee PT Waskita Karya (Persero) Tbk in the framework of National Economic	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar sukuk. Recovery Providing guarantees for the risk of default on sukuk payments.	1,15	Seri A : 5 tahun Seri B : 7 tahun Series aA: 5 years Series B: 7 years
5.	Penjaminan Pinjaman Bus Listrik KTT G20 dan BTS Bandung & Surabaya PT Industri Kereta Api (Persero) G20 Summit Electric Bus Loan Guarantee and BTS Bandung & Surabaya PT Industri Kereta Api (Persero)	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar pinjaman 53 unit Bus Listrik KTT G20 dan BTS Bandung & Surabaya. Providing guarantees for the risk of default on loan payment for 53 units of the G20 KTT Electric Bus and BTS Bandung & Surabaya.	0,15	4 tahun years
6.	Penjaminan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Perum DAMRI Guarantee of Working Capital Loans and Investment Loans of Perum DAMRI	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar pinjaman guna peremajaan armada dan *maintenance facility*. Providing guarantees for the risk of loan default for fleet rejuvenation and facility maintenance.	0,097	4 tahun years
7.	Penjaminan Kredit Modal Kerja PT Len Industri (Persero) Working Capital Loan Guarantee PT Len Industri (Persero)	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar pinjaman Pelaksanaan 3 proyek penugasan dari Kementerian Pertahanan RI. Providing guarantees for the risk of loan default. Implementing 3 assignment projects from the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia.	2,8	4 tahun years
8.	Penjaminan Kredit Modal Kerja PT Pertamina (Persero) dalam rangka Talangan Pembayaran Dana Kompensasi dan Subsidi BBM dan LPG 3 Kg Working Capital Loan Guarantee of PT Pertamina (Persero) for Payment of Compensation Funds and Fuel Subsidies and 3 Kg LPG	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar pinjaman pembayaran dana kompensasi dan subsidi BBM dan LPG 3 Kg. Providing guarantees for the risk of default on loan payment of compensation funds and 3 kg fuel and LPG subsidies.	47,19	2 tahun years

KONTIJENSI DAN KAPASITAS PENJAMINAN
CONTINGENCIES AND GUARANTEE CAPACITY

Kecukupan atas kapasitas penjaminan menjadi prioritas bagi Pemerintah karena berpengaruh terhadap kredibilitas PT PII di mata investor eksisting dan potensial dalam pengembangan proyek infrastruktur. Oleh karena itu, kemampuan modal Perseroan sangat menentukan kapasitas untuk menyediakan penjaminan bagi proyek-proyek infrastruktur baik dengan skema KPBU maupun Non KPBU.

Adequacy of guarantee capacity is a priority for the Government because it affects the credibility of IIGF in the eyes of existing and potential investors in the development of infrastructure projects. Therefore, the Company's capital capability determines the capacity to provide guarantees for infrastructure projects both with PPP and Non PPP schemes.

Dalam melakukan penjaminan proyek-proyek infrastruktur, PT PII menggunakan ekuitas Perseroan sebagai kapasitas penjaminan yang terutama bersumber dari PMN dan saldo laba ditahan. Sampai dengan 31 Desember 2024, PMN yang diterima perseroan sebesar Rp10,655 triliun (termasuk PMN Program PEN sebesar Rp1,57 triliun) dengan rincian sebagai berikut:

In guaranteeing infrastructure projects, IIGF uses the Company's equity as the guarantee capacity, which is mainly sourced from PMN and retained earnings. As of December 31, 2024, the PMN received by the company amounted to Rp10.655 trillion (including the PEN Program PMN of Rp1.57 trillion) with the following details:

Referensi Reference	Jumlah Modal Disetor Additional Paid-Up Capital	Akumulasi Modal PT PII Capital Accumulation IIGF	Modal Dasar Authorized Capital
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 Government Regulation No. 35 of 2009	Rp1 triliun Rp1 trillion	Rp1 triliun Rp1 trillion	Rp4 triliun Rp4 trillion
Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2010 Government Regulation No. 88 of 2010	Rp1 triliun Rp1 trillion	Rp2 triliun Rp2 trillion	Rp4 triliun Rp4 trillion
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2011 Government Regulation No. 55 of 2011	Rp1,5 triliun Rp1.5 trillion	Rp3,5 triliun Rp3.5 trillion	Rp4 triliun Rp4 trillion
Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2012* Government Regulation No. 68 of 2012*	Rp1 triliun Rp1 trillion	Rp4,5 triliun Rp4.5 trillion	Rp9 triliun Rp9 trillion
Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2015 Government Regulation No. 94 of 2015	Rp1,5 triliun Rp1.5 trillion	Rp6 triliun Rp6 trillion	Rp9 triliun Rp9 trillion
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2016 Government Regulation No. 79 of 2016	Rp1 triliun Rp1 trillion	Rp7 triliun Rp7 trillion	Rp9 triliun Rp9 trillion
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2017 Government Regulation No. 57 of 2017	Rp1 triliun Rp1 trillion	Rp8 triliun Rp8 trillion	Rp9 triliun Rp9 trillion
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2020** Government Regulation No. 79 of 2020**	Rp1,57 triliun Rp1.57 trillion	Rp9,57 triliun Rp9.57 trillion	Rp20 triliun Rp20 trillion
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2022 Government Regulation No. 53 of 2022	Rp1,08 triliun Rp1.08 trillion	Rp10,66 triliun Rp10.66 trillion	Rp20 triliun Rp20 trillion

*) Berdasarkan hasil keputusan pemegang saham yang dituangkan dalam akta notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. No. 145 tanggal 30 Agustus 2012, Pemerintah selaku pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp9 triliun.

**) Berdasarkan hasil keputusan pemegang saham yang dituangkan dalam akta notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn No. 14 tanggal 19 November 2020., Pemerintah selaku pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp20 triliun.

*) Based on the shareholders' resolution, stipulated in the notarial deed Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. No. 145 dated 30 August 2012, the Government as shareholder approved an increase in the Company's authorized capital to Rp9 trillion.

**) Based on the shareholders' resolution, stipulated in the notarial deed Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn No. 14 dated 19 November 2020, the Government as shareholder approved an increase in the Company's authorized capital to Rp20 trillion.

Secara bertahap PT PII mendapat mandat untuk mengurangi ketergantungan kepada APBN dalam meningkatkan kapasitas penjaminan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur ("PP 78/2010").

Gradually, IIGF received a mandate to reduce dependence on the State Budget in increasing its guarantee capacity, as stipulated in Presidential Regulation No. 78 of 2010 on the Infrastructure Guarantees in Public Private Partnership Carried Out Through Infrastructure Guarantee Agency ("PP 78/2010").

Oleh karenanya, PT PII harus berperan aktif untuk menjalin kerja sama dengan institusi penjaminan lainnya, Lembaga Multilateral, dan Institusi Bilateral dengan tujuan sejenis. Dalam berbagai diskusi yang dilakukan secara intensif dengan para mitra terkait, PT PII melakukan penyusunan kerangka penyediaan dukungan dan penjaminan bersama Pemerintah yang lebih terintegrasi.

Therefore, IIGF must play an active role in establishing cooperation with other guarantee institutions, Multilateral Institutions, and Bilateral Institutions with similar objectives. In various intensive discussions with related partners, IIGF prepared a more integrated framework for providing support and guarantees to the Government.

Pada tahun 2020, Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham PT PII melalui KMK 497/2020 menyetujui peningkatan modal dasar PT PII menjadi Rp20 triliun, yang dilanjutkan dengan penambahan PMN kepada PT PII sebesar Rp1,6 triliun berdasarkan PP 79/2020 pada tanggal 30 Desember 2020. Inisiatif ini dilakukan guna memperbaiki struktur modal dan meningkatkan kapasitas PT PII dalam rangka mendukung program PEN serta mendorong perekonomian nasional melalui penugasan Pemerintah kepada PT PII.

In 2020, the Minister of Finance, as IIGF's Shareholder, via KMK 497/2020 approved an increase in IIGF's authorized capital to Rp20 trillion, which was followed up by additional PMN to IIGF amounted to Rp1.6 trillion based on PP 79/2020 on 30 December 2020. This initiative was carried out to improve the capital structure and increase the capacity of IIGF to support the PEN program and encourage the national economy via government assignments to IIGF.

Jumlah ekuitas Perseroan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp16,67 triliun (termasuk tambahan PMN untuk pelaksanaan penugasan PEN sebesar Rp1,57 triliun). Sejak berdiri sampai dengan 31 Desember 2024, PT PII telah menjamin 53 proyek terdiri dari 45 proyek yang merupakan penjaminan proyek infrastruktur dengan skema KPBU dan non KPBU, serta 8 penjaminan proyek non infrastruktur dengan nilai estimasi investasi proyek sebesar Rp539 triliun.

The total equity of the Company as of December 31, 2024 is Rp16.67 trillion (including additional PMN for the implementation of the PEN assignment of Rp1.57 trillion). Since its establishment until December 31, 2024, IIGF has guaranteed 53 projects consisting of 45 projects which are infrastructure project guarantees with PPP and non-PPP schemes, and 8 non-infrastructure project guarantees with an estimated project investment value of Rp539 trillion.

Jumlah eksposur penjaminan atas proyek yang dijamin oleh PT PII per 31 Desember 2024 sebesar Rp100 triliun yang terdiri dari proyek infrastruktur dengan skema KPBU dan non-KPBU sebesar Rp92 triliun serta proyek non-Infrastruktur sebesar Rp8 triliun, dengan mempertimbangkan ekuitas Perseroan sebesar Rp15,10 triliun (tanpa memperhitungkan PMN Program PEN Rp1,57 triliun) maka *Gearing Ratio* PT PII per 31 Desember 2024 mencapai 6,1x.

The total guarantee exposure of projects guaranteed by IIGF as of December 31, 2024 amounted to Rp100 trillion consisting of infrastructure projects with PPP and non-KPBU schemes of Rp92 trillion and non-Infrastructure projects of Rp8 trillion, taking into account the Company's equity of Rp15.10 trillion (without taking into account the PMN PEN Program of Rp1.57 trillion), IIGF's Gearing Ratio as of December 31, 2024 reached 6.1x.

APPRAISAL PENJAMINAN
GUARANTEE APPRAISAL

Dalam rangka mengevaluasi kelayakan proyek KPBU dari aspek teknis dan finansial sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan (Perpres 78/2010 dan PMK 260/2010 serta peraturan perubahannya yang terkait), PT PII mengacu pada proses *appraisal* penjaminan yang bertujuan untuk melakukan suatu evaluasi yang komprehensif atas dokumen Usulan Penjaminan proyek yang disampaikan oleh PJPK. Adapun proses *appraisal* proyek KPBU mengacu pada Kerangka Evaluasi *Appraisal* yang dapat diperbarui dari waktu ke waktu, di mana PT PII melakukan evaluasi kelayakan proyek KPBU atas berbagai macam aspek, yaitu teknis, finansial, ekonomi, risiko, kapasitas PJPK, hukum, serta lingkungan dan sosial. Adapun proses evaluasi yang dilakukan merupakan proses evaluasi berbasis risiko, di mana risiko-risiko dari tiap aspek yang dievaluasi akan diidentifikasi, dianalisis, dialokasikan ke pihak yang paling mampu mengendalikan risiko, serta dimitigasi. Proses *appraisal* juga dapat memanfaatkan keahlian dari pihak-pihak yang independen untuk meningkatkan kualitas evaluasi sehingga diharapkan *output* dari proses *appraisal* dapat meningkatkan keberlangsungan dan bankabilitas proyek KPBU yang akan dijamin. Terkait dengan proses appraisal untuk proyek Non-KPBU, PT PII mengacu pada masing-masing regulasi terkait fasilitas penjaminan yang akan diberikan di mana secara umum proses *appraisal* akan dilakukan terhadap aspek hukum, finansial, teknis dan risiko. Dalam proses appraisal ini, Divisi Project Appraisal, yang berada di bawah Direktur Bisnis, ditunjuk sebagai koordinator dari proses *appraisal* penjaminan.

In determining the PPP project feasibility from the technical and financial aspects as stipulated in statutory regulations (Presidential Decree 78/2010 and PMK 260/2010 and related amendment to the regulations), IIGF refers to the guarantee appraisal process, aimed at conducting a comprehensive evaluation of the Guarantee Proposal documents submitted by the GCA. PPP project appraisal refers to the Appraisal Evaluation Framework as updated from time to time, in which IIGF evaluates the feasibility of PPP projects on various aspects, i.e., technical, financial, economic, risk, GCA capacity, legal, as well as environmental, and social. The evaluation is in the form of a risk-based evaluation, in which the risks from each aspect evaluated will be identified, analyzed, and allocated to parties deemed capable of controlling the risks and mitigating them. The appraisal process can also utilize the expertise of independent parties to improve the evaluation quality. Thus, the output from the appraisal process shall increase the sustainability and bankability of the PPP project to be guaranteed. In terms of the appraisal process for Non-PPP projects, IIGF refers to relevant regulations related to the guarantee facilities that will be provided, whereas in general the appraisal process will be carried out on legal, financial, technical, and risk aspects. In this appraisal process, the Project Appraisal Division, which is under the Business Director, is appointed as the coordinator of the guarantee appraisal process.

Hingga akhir Desember 2024, proses *appraisal* telah dilakukan terhadap 4 proyek KPBU dan 2 proyek Non-KPBU. Di mana untuk 4 proyek KPBU yang dilakukan evaluasi mencakup aspek teknis, aspek finansial, aspek ekonomi, aspek manajemen risiko, aspek hukum, serta aspek lingkungan dan sosial, sedangkan untuk 2 Proyek non-KPBU dilakukan terhadap aspek teknis, aspek finansial, aspek ekonomi, serta aspek hukum.

As of the end of December 2024, 4 PPP projects and 2 non-PPP projects have been appraised. The 4 PPP projects are evaluated in terms of technical aspects, financial aspects, economic aspects, risk management aspects, legal aspects, as well as environmental and social aspects. The 2 Non-PPP projects are evaluated based on technical aspects, financial aspects, economic aspects, and legal aspects.

Tabel *Appraisal* Penjaminan dalam Proyek KPBU dan Non KPBU
Table: Guarantee Appraisal in PPP and Non-PPP Projects

No.	Proyek KPBU PPP Project
1	Proyek KPBU Fly Over Panorama 1 (Sitinjau Lauik 1) Fly Over Panorama 1 (Sitinjau Lauik 1) PPP Project
2	Proyek KPBU Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Universitas Padjajaran Padjajaran University's State University Hospital PPP Project
3	Proyek KPBU Bandar Udara Singkawang Singkawang Airport PPP Project
4	Proyek KPBU Pembangunan Rumah Tapak Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara PPP Project for the Construction of Landed Houses for State Civil Apparatus (ASN) in the Nusantara Capital City

No.	Proyek Non KPBU Non-PPP Project
1	Pinjaman PT. PLN (Persero) untuk Pendanaan *Result Based Loan Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition Phase*-1 (RBL AICET-1) Loan of PT PLN (Persero) for Result Based Loan Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition Phase-1 (RBL AICET-1) Funding
2	Pinjaman PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2024 Loan of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) in Implementing Government Food Reserves (CPP) in 2024

PORTOFOLIO PENJAMINAN PROYEK INFRASTRUKTUR - KPBU

INFRASTRUCTURE PROJECT GUARANTEE PORTFOLIO - PPP

SEKTOR JALAN DAN JEMBATAN

ROADS AND BRIDGES

PROYEK JALAN TOL BATANG - SEMARANG

BATANG-SEMARANG TOLL ROAD

Lokasi	:	Provinsi Jawa Tengah
Nilai Proyek	:	Rp13,97 triliun
PJPK	:	Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Badan Usaha	:	PT Jasamarga Semarang Batang
Tahapan Proyek	:	Beroperasi sejak 21 Januari 2019

Location	:	Central Java Province
Project Value	:	Rp13.97 trillion
GCA	:	Ministry of Public Works
Business Entity	:	PT Jasamarga Semarang Batang
Project Phase	:	Operating since 21 January 2019

Proyek Tol Batang-Semarang merupakan salah satu proyek infrastruktur jalan tol skema KPBU pertama yang diberikan penjaminan oleh Pemerintah melalui PT PII. Proyek Jalan sepanjang 75 km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans-Jawa yang akan menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur yang memiliki nilai investasi sebesar Rp13,97 triliun.

Pada tanggal 27 April 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Perumahan Rakyat selaku PJPK dan BUP PT Jasamarga Semarang Batang menandatangani PKS Proyek di Kantor Kementerian Keuangan. Pada saat yang bersamaan, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT Jasamarga Semarang Batang dan PT PII serta Perjanjian Regres antara PT PII dengan PJPK.

The Batang-Semarang Toll Road Project is one of the first PPP scheme toll road infrastructure projects to be guaranteed by the Government via IIGF. The 75 km road project, which is part of the Trans-Java Toll Road that will connect Merak, Banten, to Banyuwangi, East Java has an investment value of Rp13.97 trillion.

On 27 April 2016, the Ministry of Public Works and Public Housing as the GCA and PT Jasamarga Semarang Batang as Implementing Business Entity (BUP), signed a Project Cooperation Agreement at the Office of the Ministry of Finance. Simultaneously, IIGF also signed a Guarantee Agreement with PT Jasamarga Semarang Batang, and Recourse Agreement with the GCA.

PROYEK JALAN TOL PANDAAN - MALANG
PANDAAN - MALANG TOLL ROAD PROJECT

Lokasi	:	Provinsi Jawa Timur
Nilai Proyek	:	Rp6,36 triliun
PJPK	:	Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Badan Usaha	:	PT Jasamarga Pandaan Malang
Tahapan Proyek	:	- Seksi 1-3 beroperasi sejak 13 Mei 2019 - Seksi 4 beroperasi sejak 30 Oktober 2019 - Seksi 5 beroperasi sejak 2 April 2020

Location	:	East Java Province
Project Value	:	Rp6.36 trillion
GCA	:	Ministry of Public Works
Business Entity	:	PT Jasamarga Pandaan Malang
Project Phase	:	- Sections 1-3 have been operating since 13 May 2019 - Section 4 has been operating since 30 October 2019 - Section 5 has been operating since 2 April 2020

Proyek KPBU Jalan Tol Pandaan-Malang merupakan bagian dari rencana koridor jalan utara-selatan di Provinsi Jawa Timur sebagai kelanjutan dari ruas jalan tol Gempol-Pandaan dengan panjang 38,48 km. Ruas jalan tol ini akan melalui tiga daerah penting di Jawa Timur yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang dan Kota Malang. Dengan demikian, ruas jalan tol ini akan menjadi arteri utama dari banyak alternatif ruas jalan non-tol yang menghubungkan kawasan utara dengan kawasan selatan wilayah Jawa Timur.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek ini dilaksanakan antara Kementerian PUPR selaku PJPK dengan BUP PT Jasamarga Pandaan Malang. Selain itu, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT Jasamarga Pandaan Malang dengan PT PII serta Perjanjian Regres antara PT PII dengan PJPK.

The Pandaan-Malang Toll Road PPP project is part of the north-south road corridor plan in East Java Province as a an extension to the Gempol-Pandaan toll road with a length of 38.48 km. This toll road section will pass through three key areas in East Java, i.e., Pasuruan Regency, Malang Regency, and Malang City. Thus, this toll road section will become the main roads of many alternative non-toll road sections connecting the northern region with the southern region of East Java.

The signing of the Project Cooperation Agreement was carried out between the Ministry of PUPR as GCA and PT Jasamarga Pandaan Malang as the BUP. In addition, the Company signed a Guarantee Agreement with PT Jasamarga Pandaan Malang, and Recourse Agreement with the GCA.

PROYEK JALAN TOL MANADO - BITUNG
MANADO - BITUNG TOLL ROAD PROJECT

Lokasi	:	Provinsi Sulawesi Utara
Nilai Proyek	:	Rp4,95 triliun
PJPK	:	Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Badan Usaha	:	PT Jasamarga Manado Bitung
Tahapan Proyek	:	Tahapan Proyek : - Seksi 1 beroperasi sejak 10 Juli 2020 - Seksi 2A beroperasi sejak 28 September 2020 - Seksi 2B beroperasi sejak 25 Februari 2022

Location	:	North Sulawesi Province
Project Value	:	Rp4.95 trillion
GCA	:	Ministry of Public Works
Business Entity	:	PT Jasamarga Manado Bitung
Project Phase	:	- Section 1 has been operating since 10 July 2020 - Section 2A has been operating since 28 September 2020 - Section 2B has been operating since 25 February 2022

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Pelabuhan Bitung akan dikembangkan menjadi pelabuhan yang melayani kegiatan ekspor impor dari dan ke wilayah provinsi Sulawesi Utara (Perpres 32/2011). Oleh karena itu, Pemerintah berupaya merealisasikan rencana tersebut melalui Proyek Jalan Tol Manado-Bitung dengan nilai investasi mencapai Rp4,95 triliun. Dengan panjang 39 km, proyek jalan tol ini terbagi ke dalam dua seksi, yaitu seksi I sepanjang 14 km dari Manado-Airmadidi yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam proses pembangunannya dan seksi II sepanjang 25 km yang dibangun oleh BUP. Proyek ini dikerjakan dengan skema SBOT (*Supported Build Operate Transfer)* dengan masa konsesi 40 tahun, di mana Pemerintah menyediakan bantuan berupa dukungan konstruksi untuk seksi I sepanjang 14 km untuk membuat Proyek ini layak secara finansial.

Keberadaan proyek yang terletak di wilayah Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung tersebut bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah di Provinsi Sulawesi Utara dan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi waktu tempuh dan mengurangi risiko-risiko kecelakaan untuk wilayah Sulawesi Utara.

Based on Presidential Regulation No. 32 of 2011 on the 2011-2025 Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development, Bitung Port will be developed into a port for export-import activities to and from the North Sulawesi province (Perpres 32/2011). Therefore, the Government is trying to actualize this plan through the Manado-Bitung Toll Road Project with an investment value of Rp4.95 trillion. With a length of 39 km, this toll road project is divided into two sections, i.e., section I of 14 km, from Manado-Airmadidi, in which the government is responsible for the construction process, and section II of 25 km, in which it will be built by the Implementing Business Entity. This project is carried out under the SBOT (Supported Build Operate Transfer) scheme with a 40-year concession period, where the Government provides assistance in the form of construction support for section I of 14 km to ensure that this project is financially feasible.

The project's existence, located in the North Minahasa Regency and Bitung City, has the objective to increase accessibility between regions in North Sulawesi Province and shall increase travel time efficiency and reduce the risk of accidents in the North Sulawesi region.

PROYEK JALAN TOL BALIKPAPAN - SAMARINDA
BALIKPAPAN-SAMARINDA TOLL ROAD

Lokasi	:	Provinsi Kalimantan Timur
Nilai Proyek	:	Rp11,89 triliun
PJPK	:	Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Badan Usaha	:	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
Tahapan Proyek	:	Seksi 2, 3 dan 4 beroperasi sejak 17 Desember 2019 sedangkan seksi 1 dan 5 beroperasi sejak 24 Agustus 2021

Location	:	East Kalimantan Province
Project Value	:	Rp11.89 trillion
GCA	:	Ministry of Public Works
Business Entity	:	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
Project Phase	:	Sections 2, 3, and 4 have been operating since 17 December 2019 while sections 1 and 5 have been operating since 24 August 2021

Terletak di wilayah administratif Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 97,99 km ini terdiri dari 5 seksi. Konstruksi seksi 1 dan 5 merupakan tanggung jawab Pemerintah, sedangkan konstruksi seksi 2-4 merupakan tanggung jawab BUP. Nilai proyek ini mencapai Rp11,89 triliun dengan durasi penjaminan sampai dengan 15 tahun setelah COD.

Ruas jalan tol Balikpapan-Samarinda merupakan salah satu koridor penting bagi lalu lintas pergerakan orang dan barang di Provinsi Kalimantan Timur, dan merupakan 1 (satu) dari 7 (tujuh) jalan tol yang masuk ke dalam rencana sistem transportasi Provinsi Kalimantan Timur.

Keberadaan ruas tol Balikpapan-Samarinda tersebut dapat menjadi alternatif menyelesaikan permasalahan jalur lalu lintas yang padat dan meningkatkan efisiensi waktu perjalanan. Selain itu, Pembangunan ruas tol ini juga diharapkan meningkatkan pertumbuhan sosial dan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur dan meningkatkan layanan/akses mobilisasi bagi warga Kalimantan Timur.

Located in the administrative area of Balikpapan City, Kutai Kartanegara Regency, and Samarinda City, the 97.99 km Balikpapan-Samarinda Toll Road project consists of 5 sections. Construction of sections 1 and 5 is the Government's is under the responsibility of the Government, while the construction of sections 2-4 is the responsibility of the Implementing Business Entity. The project's value amounted to Rp11.89 trillion with a guarantee duration of up to 15 years after COD.

The Balikpapan-Samarinda toll road section is one of the important corridors for the movement of people and goods in the East Kalimantan Province, and is considered one (1) of the seven (7) toll roads included in the East Kalimantan Province transportation system plan.

The presence of Balikpapan-Samarinda toll road can be an alternative to solving the problem of congested traffic lanes and increasing travel time efficiency. In addition to that, the construction of this toll road section shall enhance the social and economic growth in the East Kalimantan region and improve mobilization services/access for East Kalimantan residents.

PROYEK JALAN TOL JALAN LAYANG SHEIKH MOHAMED BIN ZAYED (JAKARTA - CIKAMPEK II *ELEVATED*)

SHEIKH MOHAMED BIN ZAYED FLYOVER TOLL ROAD (JAKARTA - CIKAMPEK II ELEVATED) PROJECT

Lokasi	:	Provinsi Jawa Barat
Nilai Proyek	:	Rp16,31 triliun
PJPK	:	Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Badan Usaha	:	PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
Tahapan Proyek	:	Beroperasi sejak 12 Desember 2019

Location	:	West Java Province
Project Value	:	Rp16.31 trillion
GCA	:	Ministry of Public Works
Business Entity	:	PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
Project Phase	:	Operating since 12 December 2019

Proyek jalan tol Jakarta - Cikampek II *Elevated* sepanjang 36,4 km ini memiliki nilai investasi sebesar Rp16,31 triliun. Proyek ini dibangun melalui skema KPBU dan merupakan proyek tol yang diberikan Penjaminan Pemerintah melalui PT PII sebagai pelaksana *single window policy.*

Pada tanggal 5 Desember 2016, Kementerian PUPR selaku PJPK dengan PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek selaku BUP melakukan Penandatanganan PKS proyek. Sementara itu, penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Jasamarga Jalan layang Cikampek dan Perjanjian Regres antara PJPK dengan PT PII dilakukan secara bersamaan pada 22 Februari 2017.

The 36.4 km long Jakarta - Cikampek II Elevated toll road project has an investment value of Rp16.31 trillion. This project was built by using PPP scheme and is a toll project that was provided with a Sovereign Guarantee via IIGF as the Infrastructure Guarantee Agency of the single window policy.

On 5 December 2016, the Ministry of PUPR as GCA, and PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek as the Implementing Business Unit (BUP), signed the Project Cooperation Agreement. Simultaneously, the Company signed a Guarantee Agreement with PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek, and Recourse Agreement with GCA on 22 February 2017.

PROYEK JALAN TOL KRIAN - LEGUNDI - BUNDER - MANYAR

KRIAN - LEGUNDI - BUNDER - MANYAR TOLL ROAD

Lokasi	:	Provinsi Jawa Timur
Nilai Proyek	:	Rp12,93 triliun
PJPK	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Badan Usaha	:	PT Waskita Bumi Wira
Tahapan Proyek	:	Operasi Parsial Seksi 1-3 beroperasi sejak 19 November 2020

Location	:	East Java Province
Project Value	:	Rp12.93 trillion
GCA	:	Ministry of Public Works
Business Entity	:	PT Waskita Bumi Wira
Project Phase	:	Partially Operating Section 1-3 have been operating since 19 November 2020

Terletak di Provinsi Jawa Timur, Proyek jalan tol Krian-Legundi- Bunder-Manyar sepanjang 38,3 km ini memiliki nilai investasi mencapai Rp12,93 triliun dengan durasi penjaminan sampai dengan 15 tahun setelah COD.

Pada tanggal 5 Desember 2016, Kementerian PUPR selaku PJPK dan PT Waskita Bumi Wira selaku BUP melakukan penandatanganan PKS Proyek di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara itu, penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Waskita Bumi Wira dan Perjanjian Regres antara PJPK dengan PT PII secara bersamaan dilakukan pada 22 Februari 2017.

Located in East Java Province, the 38.3 km Krian-Legundi-Bunder-Manyar toll road project has an investment value of Rp12.93 trillion with a guarantee duration of up to 15 years after COD.

On 5 December 2016, the Ministry of PUPR as GCA, and PT Waskita Bumi Wira as the BUP, signed a Project Cooperation Agreement at the Coordinating Ministry for Economic Affairs. Simultaneously, the Company signed a Guarantee Agreement with PT Waskita Bumi Wira, and Recourse Agreement with the GCA on 22 February 2017.

PROYEK JALAN TOL SERANG - PANIMBANG
SERANG - PANIMBANG TOLL ROAD

Lokasi	:	Provinsi Banten
Nilai Proyek	:	Rp8,58 triliun
PJPK	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Badan Usaha	:	PT Wijaya Karya Serang Panimbang
Tahapan Proyek	:	Operasi Parsial Seksi 1 beroperasi sejak 16 November 2021

Location	:	Banten Province
Project Value	:	Rp8.58 trillion
GCA	:	Ministry of Public Works
Business Entity	:	PT Wijaya Karya Serang Panimbang
Project Phase	:	Partially Operating Section 1 has been operating since 16 November 2021

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020, proyek jalan tol Serang-Panimbang sepanjang 83,7 km yang terletak di Provinsi Banten ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional dengan nilai investasi sebesar Rp8,58 triliun.

Pada tanggal 22 Februari 2017, penandatanganan PKS antara Kementerian PUPR dengan PT Wijaya Karya Serang Panimbang, Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Wijaya Karya Serang Panimbang, dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan PJPK dilakukan secara bersamaan.

As stated in Presidential Regulation No. 109 of 2020, the 83.7 km long Serang-Panimbang toll road project located in Banten Province is one of the National Strategic Projects with an investment value of Rp8.58 trillion.

On 22 February 2017, the Project Cooperation Agreement between the Ministry of PUPR and PT Wijaya Karya Serang Panimbang was signed. Simultaneously, the Company also signed Guarantee Agreement with PT Wijaya Karya Serang Panimbang, and the Recourse Agreement with the GCA.

PROYEK JALAN TOL CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN
CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN TOLL ROAD

Lokasi	:	Provinsi Jawa Barat
Nilai Proyek	:	Rp8,41 triliun
PJPK	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Badan Usaha	:	PT Citra Karya Jabar Tol
Tahapan Proyek	:	- Seksi 1 beroperasi sejak 24 Januari 2022 - Seksi 2-3 beroperasi sejak 13 Desember 2022 - Seksi 4-6 beroperasi sejak 10 Agustus 2023

Location	:	West Java Province
Project Value	:	Rp8.41 trillion
GCA	:	Ministry of Public Works
Business Entity	:	PT Citra Karya Jabar Tol
Project Phase	:	- Section 1 has been operating since 24 January 2022 - Sections 2-3 have been operating since 13 December 2022 - Sections 4-6 have been operating since 10 August 2023

Terletak di Provinsi Jawa Barat, Proyek jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan sepanjang 60,1 km ini memiliki nilai investasi mencapai Rp8,41 triliun dengan durasi penjaminan sampai dengan 15 tahun setelah COD.

Pada tanggal 22 Februari 2017, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian PUPR dengan PT Citra Karya Jabar Tol, Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Citra Karya Jabar Tol, dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan PJPK.

Located in West Java Province, the 60.1 km Cileunyi-Sumedang-Dawuan toll road project has an investment value of Rp8.41 trillion with a guarantee duration of up to 15 years after COD.

On 22 February 2017, the Cooperation Agreement between the Ministry of PUPR and PT Citra Karya Jabar Tol was signed. Simultaneously, the Company also signed Guarantee Agreement with PT Citra Karya Jabar Tol, and the Recourse Agreement with the GCA.

PROYEK JALAN TOL PROBOLINGGO-BANYUWANGI
PROBOLINGGO-BANYUWANGI TOLL ROAD PROJECT

Lokasi	:	Provinsi Jawa Timur
Nilai Proyek	:	Rp23,39 triliun
PJPK	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Badan Usaha	:	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi
Tahapan Proyek	:	Konstruksi

Location	:	East Java Province
Project Value	:	Rp23.39 trillion
GCA	:	Ministry of Public Works
Business Entity	:	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi
Project Phase	:	Construction

Proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi ini memiliki nilai investasi mencapai Rp23,39 triliun dengan masa durasi penjaminan adalah sampai dengan 15 tahun setelah COD. Jalan tol ini akan melewati 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi dengan panjang ruas jalan sekitar 172,9 km. Keberadaan jalan tol ini diharapkan dapat mendorong kelancaran arus barang dan manusia dari dan ke Banyuwangi.

The Probolinggo-Banyuwangi Toll Road project has an investment value of Rp23.39 trillion with a guarantee duration of up to 15 years after COD. This toll road will pass through three (3) regencies, i.e., Probolinggo, Situbondo, and Banyuwangi regencies, with a road section length of approximately 172.9 km. The presence of this toll road will encourage the smooth flow of goods and people to and from Banyuwangi.

PROYEK JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK II SELATAN
JAKARTA-SOUTH CIKAMPEK II TOLL ROAD PROJECT

Lokasi	:	Provinsi Jawa Barat
Nilai Proyek	:	Rp14,69 triliun
PJPK	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Badan Usaha	:	PT Jasamarga Japek Selatan
Tahapan Proyek	:	Konstruksi

Location	:	West Java Province
Project Value	:	Rp14.69 trillion
GCA	:	Ministry of Public Works
Business Entity	:	PT Jasamarga Japek Selatan
Project Phase	:	Construction

Proyek jalan tol Jakarta-Cikampek II Selatan sepanjang 64 km ini memiliki nilai investasi mencapai Rp14,69 triliun dengan masa durasi penjaminan adalah sampai dengan 15 tahun setelah COD. Pembangunan proyek jalan tol Jakarta Cikampek II Selatan berawal di sekitar *interchange* Jatiasih, masuk ke wilayah Kota Bekasi dan berakhir di sekitar *interchange* Sadang, Kab. Purwakarta Provinsi Jawa Barat.

The 64 km long Jakarta-South Cikampek II toll road project has an investment value of Rp14.69 trillion with a guarantee duration of up to 15 years after COD. The construction of the Jakarta South Cikampek II toll road project started around the Jatiasih interchange, to enter the Bekasi area, and will end around the Sadang interchange, Purwakarta Regency, West Java Province.

PROYEK JALAN TOL SEMARANG - DEMAK
SEMARANG - DEMAK TOLL ROAD

Lokasi	:	Provinsi Jawa Tengah
Nilai Proyek	:	Rp5,93 triliun
PJPK	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Badan Usaha	:	PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak
Tahapan Proyek	:	Konstruksi

Location	:	Central Java Province
Project Value	:	Rp5.93 trillion
GCA	:	Ministry of Public Works
Business Entity	:	PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak
Project Phase	:	Construction

Berlokasi di Kota Semarang hingga Kabupaten Demak, Jawa Tengah, proyek ini memiliki panjang jalan tol 27 km dengan nilai investasi sebesar Rp5,93 triliun. Proyek berskema KPBU ini meliputi Pembangunan dan Pengoperasian Tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan Tanggul Laut.

Pada tanggal 23 September 2019, Menteri PUPR dengan PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak selaku BUP melakukan penandatanganan PKS. Selain itu, di saat yang bersamaan juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan BUP, dan penandatanganan Perjanjian Regres antara PJPK dengan PT PII.

Located in Semarang City up to Demak Regency, Central Java, this project is 27 km long with an investment value of Rp5.93 trillion. This PPP scheme project includes the Construction and Operation of the Semarang-Demak toll road, which is integrated with the Sea Walls.

On 23 September 2019, the Minister of PUPR and PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak as the BUP signed a Project Cooperation Agreement. In addition, the Company signed a Guarantee Agreement with the BUP, and Recourse Agreement with the GCA.

PROYEK PRESERVASI JALAN LINTAS TIMUR SUMATERA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN (JALINTIM SUMSEL)

PRESERVATION OF THE EAST SUMATERA CROSS ROAD AT SOUTH SUMATERA PROVINCE

Lokasi	:	Provinsi Sumatera Selatan
Nilai Proyek	:	Rp0,98 triliun
PJPK	:	Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Badan Usaha	:	PT Jalintim Adhi Abipraya
Tahapan Proyek	:	Operasi sejak 5 September 2023

Location	:	South Sumatra Province
Project Value	:	Rp0.98 trillion
GCA	:	Director General of Highways, Ministry of Public Works
Business Entity	:	PT Jalintim Adhi Abipraya
Project Phase	:	Operating since 5 September 2023

Proyek KPBU Preservasi Jalintim Sumsel merupakan proyek KPBU pertama di sektor Jalan non-tol di Indonesia, serta mendapatkan penjaminan Pemerintah melalui PT PII. Ruang lingkup skema KPBU Proyek ini meliputi Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan pada masa konstruksi serta masa layanan dan Pembiayaan Proyek oleh BUP.

Dengan nilai investasi sebesar Rp0,98 triliun, proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, terutama yang digunakan sebagai jalur logistik, pariwisata, jalan akses ke pelabuhan dan bandara, serta penghematan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan nilai waktu tempuh.

Pada tanggal 3 Agustus 2020 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek antara Kementerian PUPR selaku PJPK dengan PT Jalintim Adhi Abipraya selaku BUP. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Jalintim Adhi Abipraya dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan PJPK.

The South Sumatra Jalintim Preservation PPP Project is the first PPP project in the Non-Toll Road sector in Indonesia, and has received Sovereign Guarantees via IIGF. This PPP Project scheme covers Technical Planning, Construction, Operation and Maintenance during the construction period, as well as the service period and Project Financing by the BUP.

With an investment value of Rp0.98 trillion, this project shall affect the improvement of the economy by increasing connectivity between regions, especially those used as logistics routes, tourism, access roads to ports and airports, as well as saving Vehicle Operational Costs (BOK) and travel time.

On 3 August 2020, a Project Cooperation Agreement was signed between the Ministry of PUPR as GCA, and PT Jalintim Adhi Abipraya as the Implementing Business Unit. On the same occasion, IIGF also signed a Guarantee Agreement with PT Jalintim Adhi Abipraya, and a Recourse Agreement with the GCA.

PROYEK JALAN TOL SOLO - YOGYAKARTA - NYIA KULON PROGO
SOLO - YOGYAKARTA - NYIA KULON PROGO TOLL ROAD PROJECT

Lokasi	:	Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
Nilai Proyek	:	Rp27,49 triliun
PJPK	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Badan Usaha	:	PT Jasamarga Jogja Solo
Tahapan Proyek	:	Operasi Parsial. Seksi 1 beroperasi sejak 20 September 2024

Location	:	Central Java and Special Region of Yogyakarta Province
Project Value	:	Rp27.49 trillion
GCA	:	Ministry of Public Works
Business Entity	:	PT Jasamarga Jogja Solo
Project Phase	:	Partially Operating. Section 1 has been operating since 20 September 2024

Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo sepanjang 96,5 km ini dibangun dengan skema kerja sama *Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer* (DBFOMT) dengan masa konsesi selama 40 tahun. Pembangunan proyek infrastruktur jalan tol ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas antara Solo, Yogyakarta, dan Kulon Progo, termasuk melayani akses Bandara NYIA Kulon Progo, meningkatkan pengembangan wilayah yang dilalui jalan tol serta menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pada tanggal 9 September 2020, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek antara Kementerian PUPR selaku PJPK dengan PT Jogjasolo Marga Makmur (sekarang PT Jasamarga Jogja Solo) selaku BUP. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan BUP dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan PJPK.

The 96.5 km Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Toll Road project was built using a Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT) cooperation scheme, with a concession period of 40 years. The construction of this toll road infrastructure project aims to improve accessibility between Solo, Yogyakarta, and Kulon Progo, including providing access to the NYIA Kulon Progo Airport, promoting regional development along the toll road corridor and support economic growth in the area.

On 9 September 2020, a Project Cooperation Agreement was signed between the Ministry of Public Works and Housing as GCA, and PT Jogjasolo Marga Makmur (now PT Jasamarga Jogja Solo) as the Implementing Business Entity (BUP). On the same occasion, IIGF also signed a Guarantee Agreement with the Implementing Business Entity, and a Recourse Agreement with the GCA.

PROYEK JALAN TOL YOGYAKARTA-BAWEN
YOGYAKARTA-BAWEN TOLL ROAD

Lokasi	:	Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
Nilai Proyek	:	Rp14,26 triliun
PJPK	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Badan Usaha	:	PT Jasamarga Jogja Bawen
Tahapan Proyek	:	Konstruksi

Location	:	Central Java and Special Region of Yogyakarta Province
Project Value	:	Rp14.26 trillion
GCA	:	Ministry of Public Works
Business Entity	:	PT Jasamarga Jogja Bawen
Project Phase	:	Construction

Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 75,82 km ini terletak di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Pembangunan proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Tengah dan Yogyakarta serta meningkatkan konektivitas antar wilayah, terutama akses Semarang-Yogyakarta.

Pada tanggal 13 November 2020, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek antara Kementerian PUPR selaku PJPK dengan PT Jasamarga Jogja Bawen selaku BUP. Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Jasamarga Jogja Bawen dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan PJPK.

The 75.82 km long Yogyakarta-Bawen Toll Road project is located in Central Java Province and Special Region of Yogyakarta Province. The construction of this project shall heavily affect the local economic growth in Central Java and Yogyakarta, and increase connectivity between regions, especially Semarang-Yogyakarta access.

On 13 November 2020, a Project Cooperation Agreement was signed between the Ministry of PUPR as GCA, and PT Jasamarga Jogja Bawen as the Implementing Business Entity (BUP). On the same occasion, IIGF also signed a Guarantee Agreement with PT Jasamarga Jogja Bawen, and a Recourse Agreement with the GCA.

PROYEK PRESERVASI JALAN LINTAS TIMUR SUMATERA DI PROVINSI RIAU (JALINTIM RIAU)

PRESERVATION OF THE EAST SUMATERA CROSS ROAD AT RIAU PROVINCE (JALINTIM RIAU)

Lokasi	:	Provinsi Riau
Nilai Proyek		Rp0,53 triliun
PJPK	:	Direktur Jenderal Bina Marga,
	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Badan Usaha	:	PT Adhi Jalintim Riau
Tahapan Proyek	:	Operasi sejak 27 April 2024

Location	:	Riau Province
Project Value	:	Rp0.53 trillion
GCA	:	Director General of Highways, Ministry of Public Works
Business Entity	:	PT Adhi Jalintim Riau
Project Phase	:	Operating since 27 April 2024

Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatra di Provinsi Riau adalah proyek KPBU kedua di sektor Jalan Non-tol di Indonesia. Terdapat 3 (tiga) jalan yang akan dipreservasi di Jalintim Riau dengan total seluruhnya mencapai 43 kilometer, yaitu Jalan Simpang Kayu Ara (Pekanbaru)-Batas Kabupaten Pelalawan, Jalan Batas Pelalawan-Sikijang Mati, dan Jalan Sikijang Mati-Simpang Lago. Selain itu, dilakukan perbaikan 4 unit jembatan sepanjang 60 meter di Jalan Sikijang Mati-Simpang Lago serta pembangunan 1 unit fasilitas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS), Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres Proyek dilakukan pada 12 April 2021.

Preservation of The East Sumatera Cross Road at Riau Province is the second PPP project in the Non-toll Road sector in Indonesia. There are three (3) roads that will be preserved on Jalintim Riau with a total of 43 kilometers, i.e., Simpang Kayu Ara (Pekanbaru) - Pelalawan Regency Border Road, Pelalawan-Sikijang Mati Border Road, and Sikijang Mati-Simpang Lago Road. In addition, 4 unit of bridges of 60 meters long will be repaired, on Sikijang Mati-Simpang Lago Road, with the additional construction of 1 Motor Vehicle Weighing Unit (UPPKB).

The signing of the Cooperation Agreement (PKS), Guarantee Agreement, and Recourse Agreement was carried out on 12 April 2021.

PROYEK JEMBATAN CALLENDER HAMILTON
CALLENDER HAMILTON BRIDGE PROJECT

Lokasi	:	Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
Nilai Proyek	:	Rp2,20 triliun
PJPK	:	Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Badan Usaha	:	PT Baja Titian Utama
Tahapan Proyek	:	Operasi sejak 20 Desember 2023

Location	:	Banten Province, West Java, Central Java, and East Java
Project Value	:	Rp2.20 trillion
GCA	:	Director General of Highways, Ministry of Public Works
Business Entity	:	PT Baja Titian Utama
Project Phase	:	Operating since 20 December 2023

Proyek Jembatan Callender Hamilton (CH) merupakan proyek penggantian dan/atau duplikasi Jembatan CH di Pulau Jawa dengan lingkup penggantian 33 unit jembatan dengan panjang eksisting 2.452,9 meter untuk koridor Jalan Nasional; duplikasi tanpa penggantian jembatan terhadap 4 unit jembatan dengan panjang eksisting 430 meter; duplikasi dengan penggantian jembatan terhadap 1 unit jembatan dengan panjang eksisting 50 meter; serta pengoperasian dan pemeliharaan untuk seluruh jembatan. Pada 6 Desember 2021 telah dilakukan penandatanganan PKS, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres untuk proyek ini.

The Callender Hamilton (CH) Bridge Project is a replacement and/or duplication project for the CH Bridge on Java Island, which covers the replacement of 33 bridge units with an existing length of 2,452.9 meters for the National Road corridor; duplication without bridge replacement of 4 bridge units with an existing length of 430 meters; duplication with bridge replacement of 1 bridge unit with an existing length of 50 meters; as well as operation and maintenance for all bridges. On 6 December 2021, the PKS, Guarantee Agreement, and Recourse Agreement for this project were signed.

PROYEK JALAN TOL AKSES PATIMBAN
PATIMBAN ACCESS TOLL ROAD PROJECT

Lokasi	:	Provinsi Jawa Barat
Nilai Proyek	:	Rp5,02 triliun
PJPK	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Badan Usaha	:	PT Jasamarga Akses Patimban
Tahapan Proyek	:	Pra-Konstruksi

Location	:	West Java Province
Project Value	:	Rp5.02 trillion
GCA	:	Ministry of Public Works
Business Entity	:	PT Jasamarga Akses Patimban
Project Phase	:	Pre-Construction

Ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional melalui Perpres No. 109 Tahun 2020, Jalan Tol Akses Patimban akan mendukung Pelabuhan Patimban dan pengembangan wilayah di sekitarnya. Penandatanganan PKS, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres Proyek dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2023.

Jalan Tol ini direncanakan akan memiliki panjang 37,05 km, dengan porsi BUP sepanjang 14,11 km dan dukungan konstruksi dari Pemerintah sepanjang 22,94 km. Adapun nilai investasi proyek yang menjadi porsi BUJT adalah sebesar Rp5,02 triliun dengan masa konsesi 50 tahun.

Established as a National Strategic Project pursuant to the Presidential Decree No. 109 of 2020, Patimban Access Toll Road shall support Patimban Port and the development of the surrounding area. The signing of the PKS, Guarantee Agreement, and Recourse Agreement on 24 January 2023.

This toll road is planned to be 37.05 km long, with a BUP portion of 14.11 km and construction support from the Government of 22.94 km. The project investment value of BUJT's portion is Rp5.02 trillion with a 50 years concession.

TOL JAKARTA *OUTER RING ROAD* (JORR) *ELEVATED* CIKUNIR ULUJAMI

JAKARTA OUTER RING ROAD (JORR) ELEVATED CIKUNIR ULUJAMI TOLL ROAD

Lokasi	:	Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat
Nilai Proyek	:	Rp21,27 triliun
PJPK	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Badan Usaha	:	PT Jakarta Metro Expressway
Tahapan Proyek	:	Pra-Konstruksi

Location	:	DKI Jakarta and West Java Provinces
Project Value	:	Rp21.27 trillion
GCA	:	Ministry of Public Works
Business Entity	:	PT Jakarta Metro Expressway
Project Phase	:	Pre-Construction

Proyek jalan tol ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas, mengurangi kemacetan, dan waktu tempuh pada jalan tol JORR-1 serta meningkatkan tingkat pelayanan jalan, menyediakan rute alternatif, dan memperkuat jaringan jalan tol di daerah Jabodetabek. Jalan tol ini akan menjadi bagian dari jalan tol Jabodetabek dengan trase sepanjang 21,5 km yang akan dibangun di atas ruas tol JORR eksisting.

Nilai investasi proyek adalah sebesar Rp21,27 triliun dengan masa konsesi 45 tahun. Penandatanganan PKS dilaksanakan pada 11 Oktober 2023, sedangkan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres ditandatangani pada 17 Oktober 2023.

The toll road project has the objective to increase capacity, reduce traffic and travel time at the JORR-1 Toll Road, as well as improving road services, providing alternative routes, and strengthening the toll road network in the Jabodetabek area. This toll road will be part of the Jabodetabek toll road with a 21.5 km road which will be built on the existing JORR toll road.

The project has an investment value of Rp21.27 trillion with a 45 years concession. The PKS was signed on 11 October 2023 while the Guarantee Agreement and Recourse Agreement were signed on 17 October 2023.

PROYEK JALAN TOL KEDIRI - TULUNGAGUNG
KEDIRI - TULUNGAGUNG TOLL ROAD PROJECT

Lokasi	:	Provinsi Jawa Timur
Nilai Proyek	:	Rp10,26 triliun
PJPK	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Badan Usaha	:	PT Surya Sapta Agung Tol
Tahapan Proyek	:	Pra-konstruksi

Location	:	East Java Province
Project Value	:	Rp10.26 trillion
GCA	:	Ministry of Public Works
Business Entity	:	PT Surya Sapta Agung Tol
Project Phase	:	Pre-construction

Jalan Tol Kediri-Tulungagung merupakan proyek KPBU yang direncanakan sebagai bagian dari sistem jalan tol trans Jawa dan menjadi akses menuju Bandara Kediri yang juga telah selesai dibangun oleh PT Gudang Garam yang merupakan pemegang saham PT Surya Sapta Agung Tol. Adapun Proyek sepanjang 44,17 km ini direncanakan melintasi Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung, di mana dibangunnya ruas tol Kediri-Tulungagung ini berada di bawah program percepatan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dengan Perpres 80 tahun 2019. Ruas tol ini selain akan menjadi jalan penghubung dari dan ke Bandara Kediri, juga bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat menuju kawasan Jawa Timur bagian selatan dan mendukung perekonomian kawasan di sekitarnya, termasuk sektor pariwisata. Nilai investasi jalan tol ini mencapai Rp10,26 triliun.

The Kediri-Tulungagung Toll Road is a PPP project planned as part of the trans Java toll road system and provides access to Kediri Airport, which has finished its construction by PT Gudang Garam, a shareholder of PT Surya Sapta Agung Tol. The 44.17 km project is planned to cross Kediri City, Kediri Regency, and Tulungagung Regency, where the construction of the Kediri-Tulungagung toll road is under the East Java Province economic development acceleration program stipulated by the Presidential Regulation 80 of 2019. This toll road will not only serve as a connecting road to and from Kediri Airport, but also aims to facilitate public access to the southern part of East Java and support the economy of the surrounding areas, including the tourism sector. The investment value of this toll road amounted to Rp10.26 trillion.

PROYEK JALAN TRANS PAPUA
TRANS PAPUA ROAD

Lokasi	:	Provinsi Papua Pegunungan
Nilai Proyek	:	Rp 3,34 triliun
PJPK	:	Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Badan Usaha	:	PT Hutama Mambelim Trans Papua
Tahapan Proyek	:	Pra-konstruksi

Location	:	Mountainous Papua Province
Project Value	:	Rp3.34 trillion
GCA	:	Director General of Highways, Ministry of Public Works
Business Entity	:	PT Hutama Mambelim Trans Papua
Project Phase	:	Pre-construction

Proyek KPBU Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena segmen Mamberamo-Elelim ini merupakan proyek pembangunan jalan sepanjang ±50,14 km di Provinsi Papua Pegunungan, melalui skema KPBU dengan lingkup pekerjaan *design, build, finance, operate, maintenance, and transfer* (DBFOMT) yang dikelola oleh Dirjen Bina Marga selaku PJPK bersama dengan PT Hutama Mambelim Trans Papua sebagai BUP. Total nilai investasi mencapai Rp3,34 triliun termasuk biaya konstruksi Rp2,69 triliun dengan masa kontrak PKS sepanjang 15 tahun. Penandatanganan PKS, Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres dilaksanakan pada 3 Juli 2024.

The Trans Papua Road PPP project for the Jayapura-Wamena segment of the Mamberamo-Elelim segment is a ±50.14 km road project in the Papua Mountain Province, through a PPP scheme with the scope of work of design, build, finance, operate, maintenance, and transfer (DBFOMT) managed by the Director General of Highways as GCA, in collaboration with PT Hutama Mambelim Trans Papua as the BUP. The total investment value amounted to Rp3.34 trillion, including construction costs of Rp2.69 trillion with a 15-year Cooperation Agreement period. The signing of the Cooperation Agreement (PKS), Guarantee Agreement, and Recourse Agreement on 24 January 2023.

SEKTOR TELEKOMUNIKASI
TELECOMMUNICATIONS

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018, dan juga termasuk Proyek Prioritas Nasional, Proyek Palapa Ring adalah salah satu Proyek Infrastruktur Strategis Nasional dan merupakan pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional. Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah tersebut dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Komunikasi Kabel Laut dan Sistem Komunikasi Serat Optik ke-57 kota/kabupaten yang belum terlayani.

As stated in Presidential Regulation No. 56 of 2018, and National Priority Projects, the Palapa Ring Project is one of the National Strategic Infrastructure Projects and is the backbone for construction of a national fiber optic network. The Government's Multifunctional Satellite Project was designed and implemented using the Sea Cable Communication System and Fiber Optic Communication System to 57 unserved cities/regencies.

Dengan estimasi jangkauan wilayah sepanjang 12.229 km, proses pengadaan proyek dibagi menjadi tiga paket yaitu, Paket Barat, Paket Tengah, dan Paket Timur. Proyek ini ditargetkan mampu mendistribusikan jaringan *broadband* dengan kecepatan 10 Mbps di daerah pedesaan dan 20 Mbps di daerah perkotaan.

With an estimated area coverage of 12,229 km, the project procurement process is divided into three packages, i.e., West Package, Central Package, and East Package. This project is targeted to distribute broadband networks with the speed of 10 Mbps in rural areas and 20 Mbps in urban areas.

PROYEK PALAPA RING PAKET BARAT
WESTERN PACKAGE PALAPA RING PROJECT

Lokasi	:	Bengkalis, Kepulauan Meranti, Natuna, Kepulauan Anambas, Lingga
Nilai Proyek	:	Rp1,23 triliun
PJPK	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)
Badan Usaha	:	PT Palapa Ring Barat
Tahapan Proyek	:	Beroperasi sejak 2 Maret 2018

Location	:	Bengkalis, Meranti Islands, Natuna, Anambas Islands, Lingga
Project Value	:	Rp1.23 trillion
GCA	:	Ministry of Communications and Digital Affairs
Business Entity	:	PT Palapa Ring Barat
Project Phase	:	Operating since 2 March 2018

Pada tanggal 29 Februari 2016, penandatanganan Perjanjian Kerja sama dilakukan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku PJPK (saat ini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital) dan PT Palapa Ring Barat selaku BUP di Kantor Kementerian Keuangan. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Palapa Ring Barat serta Perjanjian Regres antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan PT PII. Pada tanggal 10 November 2016, *financial close* proyek ini tercapai di mana PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku lender menyalurkan kredit senilai Rp875 miliar kepada BUP dan kredit tersebut telah lunas pada Juli 2024.

On 29 February 2016, a Cooperation Agreement was signed between the Ministry of Communication and Information Technology (now Ministry of Communications and Digital Affairs) as GCA, and PT Palapa Ring Barat as BUP at the Office of the Ministry of Finance. Simultaneously, IIGF signed a Guarantee Agreement with PT Palapa Ring Barat, and Recourse Agreement with the Ministry of Communication and Information Technology. On 10 November 2016, this project reached its financial close phase, in which PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the lender distributed credit worth Rp875 billion to the BUP, and the loan has been settled in July 2024.

PALAPA RING TENGAH
CENTRAL PACKAGE PALAPA RING

Lokasi	:	Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi, Provinsi Maluku, Provinsi NTT, Provinsi Papua Barat
Nilai Proyek	:	Rp1,09 triliun
PJPK	:	Kementerian Komunikasi dan Digital
Badan Usaha	:	PT Len Telekomunikasi Indonesia
Tahapan Proyek	:	Beroperasi sejak 21 Desember Maret 2018

Location	:	East Kalimantan Province, Sulawesi, Maluku Province, NTT Province, West Papua Province
Project Value	:	Rp1.09 trillion
GCA	:	Ministry of Communications and Digital Affairs
Business Entity	:	PT Len Telekomunikasi Indonesia
Project Phase	:	Operating since 21 December 2018

Pada tanggal 4 Maret 2016, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama proyek senilai Rp1,09 triliun dilakukan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku PJPK (saat ini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital) dengan PT Len Telekomunikasi Indonesia. Pada kesempatan yang sama, PT PII yang merupakan pelaksanaan single window policy penyediaan penjaminan pemerintah untuk proyek infrastruktur juga menandatangani Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek Palapa Ring Tengah.

On 4 March 2016, a Cooperation Agreement valued at Rp1.09 trillion was signed by the Ministry of Communication and Information Technology (now Ministry of Communications and Digital) as the GCA, and PT Len Telekomunikasi Indonesia. On the same occasion, IIGF, which is the implementor of single window policy in providing sovereign guarantees for infrastructure projects, also signed a Guarantee Agreement and Recourse Agreement for the Central Package Palapa Ring project.

PALAPA RING TIMUR
EASTERN PACKAGE PALAPA RING

Lokasi	:	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat
Nilai Proyek	:	Rp5,09 triliun
PJPK	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)
Badan Usaha	:	PT Palapa Timur Telematika
Tahapan Proyek	:	Beroperasi sejak 29 Agustus 2019

Location	:	Provinces of East Nusa Tenggara, Maluku, Papua, and West Papua
Project Value	:	Rp5.09 trillion
GCA	:	Ministry of Communications and Digital Affairs
Business Entity	:	PT Palapa Timur Telematika
Project Phase	:	Operating since 29 August 2019

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 ("Perpres 56/2018"), proyek ini merupakan proyek Infrastruktur Strategis Nasional, yang juga dikategorikan sebagai Proyek Prioritas Nasional. Pada 29 September 2016 bertempat di Istana Negara, disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo, Menko Perekonomian, Menko Polhukam, telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Palapa Timur Telematika selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku PJPK (saat ini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital). Setelah penandatanganan tersebut, dilaksanakan *Financial Close* Proyek Palapa Ring Paket Timur dan juga penyerahan Surat Efektif Penjaminan oleh PT PII pada 29 Maret 2017.

As stated in Presidential Regulation No. 56 of 2018 ("Perpres 56/2018"), the project is a National Strategic Infrastructure project, which is also categorized as a National Priority Project. On 29 September 2016, at the State Palace, witnessed by the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, Coordinating Minister for Economic Affairs, Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs, IIGF signed a Guarantee Agreement with PT Palapa Timur Telematika as the Implementing Business Entity (BUP) and a Recourse Agreement with the Ministry of Communication and Information Technology (now Ministry of Communications and Digital) as GCA. After the signing, the Financial Close for Eastern Package Palapa Ring Project was carried out, and IIGF also submitted an Effective Guarantee Letter on 29 March 2017.

SATELIT MULTIFUNGSI PEMERINTAH
GOVERNMENT'S MULTIFUNCTION SATELLITE

Lokasi	:	**Tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia**
Nilai Proyek	:	**Rp6,42 triliun**
PJPK	:	**Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)**
Badan Usaha	:	**PT Satelit Nusantara Tiga**
Tahapan Proyek	:	**Beroperasi sejak 2 Januari 2024**

Location	:	**Throughout the Republic of Indonesia**
Project Value	:	**Rp6.42 trillion**
GCA	:	**Ministry of Communications and Digital Affairs**
Business Entity	:	**PT Satelit Nusantara Tiga**
Project Phase	:	**Operating since 2 January 2024**

Satelit Multi Fungsi merupakan proyek KPBU keempat di sektor telekomunikasi yang mendapatkan penjaminan pemerintah melalui PT PII setelah Palapa Ring Paket Barat, Tengah, dan Timur.

The Multi-Functional Satellite is the fourth PPP project in the telecommunications sector to receive sovereign guarantee via IIGF after the West, Central, and East Palapa Ring Packages.

Pada tanggal 3 Mei 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku PJPK (saat ini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital) dan PT Satelit Nusantara Tiga selaku BUP melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja sama Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah. Pada saat yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Satelit Nusantara Tiga serta Perjanjian Regres antara PJPK dengan PT PII.

On 3 May 2019, the Ministry of Communication and Information Technology (now Ministry of Communications and Digital Affairs) as GCA, and PT Satelit Nusantara Tiga as BUP, signed a Government Multi-Functional Satellite Project Cooperation Agreement. Simultaneously, IIGF signed a Guarantee Agreement with PT Satelit Nusantara Tiga, and a Recourse Agreement with the GCA.

Proyek ini diharapkan dapat bermanfaat dan dinikmati oleh masyarakat luas, di antaranya untuk sektor pendidikan, kesehatan, politik, hukum dan keamanan, pemerintah daerah, juga khususnya sektor keuangan untuk mendukung percepatan digitalisasi penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi), dalam rangka mengakselerasi realisasi keuangan inklusif di seluruh Indonesia.

This project shall be useful and beneficial for the wider community, including in the education, health, political, legal, and security sectors, local government sector, particularly in the financial sector, to support the acceleration of digitalization of ultra-micro financing (UMi) disbursement, with the aim of accelerating the actualization of inclusive financial inclusion across Indonesia.

SEKTOR KETENAGALISTRIKAN
ELECTRICITY

CENTRAL JAVA POWER PLANT
CENTRAL JAVA POWER PLANT

Lokasi	:	Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
Nilai Proyek	:	Rp65,42 triliun
PJPK	:	PT PLN (Persero)
Badan Usaha	:	PT Bhimasena Power Indonesia
Tahapan Proyek	:	Operasi sejak 31 Agustus 2022

Location	:	Batang Regency, Central Java Province
Project Value	:	Rp65.42 trillion
GCA	:	PT PLN (Persero)
Business Entity	:	PT Bhimasena Power Indonesia
Project Phase	:	Operating since 31 August 2022

Central Java Power Plant merupakan proyek infrastruktur skema KPBU pertama yang berhasil diwujudkan dengan memperoleh fasilitas penjaminan bersama oleh PT PII dan Pemerintah RI (Kementerian Keuangan) sesuai Perpres 78/2010. Proyek ini merupakan langkah pemerintah untuk menyediakan kebutuhan listrik yang dibutuhkan masyarakat. Proyek pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 2 x 1.000 MW ini berlokasi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dengan nilai investasi sebesar US$4 miliar atau lebih dari Rp40 triliun tersebut, proyek dibangun oleh konsorsium PT Bhimasena Power Indonesia (PT BPI) dengan skema *Build Own Operate Transfer* selama masa konsesi 25 tahun.

Pada tanggal 6 Oktober 2011, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT BPI selaku BUP serta Perjanjian Regres dengan PT PLN (Persero) sebagai PJPK. Pada bulan Juni 2016, *Financial Close* proyek ini dilaksanakan di Istana Negara.

The Central Java Power Plant is the first PPP scheme infrastructure project that was successfully implemented by obtaining joint guarantee facilities from IIGF and the Government of Indonesia (Ministry of Finance) in accordance with the Presidential Decree 78/2010. This project is a government's measure to provide the electricity needs of the community. This 2 x 1,000 MW coal-fired power plant project is located in Batang Regency, Central Java. With an investment value of US$4 billion, or equivalent to more than Rp40 trillion, the project will be built by PT Bhimasena Power Indonesia (PT BPI) consortium with a Build Own Operate Transfer scheme over a 25 year concession period.

On 6 October 2011, IIGF signed a Guarantee Agreement with PT BPI as the BUP, and Recourse Agreement with PT PLN (Persero) as GCA. In June 2016, the Financial Close of this project was held at the State Palace.

ALAT PENERANGAN JALAN (APJ) DI KABUPATEN MADIUN
STREET LIGHTING EQUIPMENT (APJ) IN MADIUN REGENCY

Lokasi	:	Kabupaten Madiun
Nilai Proyek	:	Rp0,10 triliun
PJPK	:	Pemerintah Kabupaten Madiun
Badan Usaha	:	PT Tri Tunggal Madiun Terang
Tahapan Proyek	:	Operasional sejak 18 Juli 2023

Location	:	Madiun Regency
Project Value	:	Rp0.10 trillion
GCA	:	Madiun Regency Government
Business Entity	:	PT Tri Tunggal Madiun Terang
Project Phase	:	Operating since 18 July 2023

Proyek APJ di Kabupaten Madiun ("Proyek") merupakan pembangunan infrastruktur Alat Penerangan Jalan yang dilaksanakan dengan skema KPBU. Ruang lingkup Proyek meliputi pembangunan baru (tanpa *retrofit*), pengoperasian, dan pemeliharaan terhadap 7.459 titik yang tersebar antara lain 1.604 titik di jalan Nasional (arteri), 5.603 titik di jalan Kabupaten (lokal) dan 252 titik di jalan perkotaan (lingkungan). Nilai investasi Proyek sebesar Rp 0,10 triliun dengan masa konstruksi selama 9 bulan dan periode kerja sama sampai dengan 10 tahun sejak tanggal operasi komersial.

Proyek ini menunjukkan komitmen PT PII dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk berbagai skala proyek. Hal ini diharapkan dapat menambah jumlah proyek infrastruktur lainnya untuk dapat dijalankan dengan skema KPBU. Selain itu, dukungan PT PII kepada proyek ini juga merupakan komitmen dalam mendukung proyek dengan manfaat penghematan energi dalam rangka mendukung *green infrastructure*, serta mampu memberikan dampak signifikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

The APJ Project in Madiun Regency (the "Project") is a road lighting infrastructure development implemented under the PPP scheme. The scope of the Project includes new construction (without retrofit), operation, and maintenance of 7,459 points spread among others 1,604 points on National roads (arterial), 5,603 points on District roads (local) and 252 points on urban roads (neighborhood). The investment value of the Project is Rp 0.10 trillion with a construction period of 9 months and a cooperation period of up to 10 years from the date of commercial operation.

This project demonstrates IIGF's commitment to supporting the acceleration of infrastructure development in Indonesia on various project scales. This shall increase the number of other infrastructure projects that can be conducted by using the PPP scheme. In addition, IIGF's support for this project is also a commitment to supporting projects with energy saving benefits, in support of green infrastructure, while delivering significant impact to the community, especially in Madiun Regency, East Java.

PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
WEST LOMBOK REGENCY PUBLIC STREET LIGHTING

Lokasi	:	Kabupaten Lombok Barat
Nilai Proyek	:	Rp0,09 triliun
PJPK	:	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
Badan Usaha	:	PT Sinar Energi Indonusa
Tahapan Proyek	:	Pra-Konstruksi

Location	:	West Lombok Regency
Project Value	:	Rp0.09 trillion
GCA	:	West Lombok Regency Government
Business Entity	:	PT Sinar Energi Indonusa
Project Phase	:	Pre-Construction

Proyek Penerangan Jalan Umum Kabupaten Lombok Barat ("Proyek") merupakan Proyek infrastruktur yang dibangun dengan skema KPBU di 200 ruas jalan sepanjang 545,1 km dan tersebar di 12.915 titik. Proyek ini memiliki nilai investasi Rp0,09 triliun dengan periode kerja sama 1 tahun konstruksi dan 10 tahun periode operasi komersial.

Proyek ini diharapkan mampu memberi manfaat dan mendorong peningkatan geliat aktivitas perekonomian masyarakat serta peningkatan minat investasi. Lebih lanjut, dengan dibangunnya Penerangan Jalan Umum akan sangat berdampak positif dari sisi keamanan di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

The West Lombok Regency Public Road Street Lighting Project ("Project") is an infrastructure project under a PPP scheme on 200 roads with 545.1 km long, spread across 12,915 points. This project has an investment value of Rp0.09 trillion with a collaboration period of 1 year construction and 10 years commercial operation period.

This project shall be able to provide benefits and encourage community economic activity, as well as increased interest in investment. Further, the construction of Public Street Lighting will have a very positive impact in terms of security in the West Lombok Regency.

SEKTOR AIR MINUM
DRINKING WATER

PROYEK SPAM UMBULAN-JAWA TIMUR
SPAM UMBULAN EAST JAVA PROJECT

Lokasi	:	Provinsi Jawa Timur
Nilai Proyek	:	Rp2,06 triliun
PJPK	:	Gubernur Jawa Timur
Badan Usaha	:	PT Meta Adhya Tirta Umbulan
Tahapan Proyek	:	Beroperasi sejak 31 Januari 2021

Location	:	East Java Province
Project Value	:	Rp2.06 trillion
GCA	:	Governor of East Java
Business Entity	:	PT Meta Adhya Tirta Umbulan
Project Phase	:	Operating since 31 January 2021

Untuk mengatasi krisis air dan memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha mencari jalan keluar melalui pemanfaatan mata air Umbulan yang terdapat di Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Mata air Umbulan dipilih karena kemampuannya untuk memproduksi 4.000 liter/detik dan dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk 1,8 juta jiwa di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan dan sekitarnya.

Proyek SPAM Umbulan dibangun dengan menggunakan skema KPBU antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku PJPK dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP). Nilai investasi Proyek SPAM Umbulan mencapai Rp2,06 triliun dan memperoleh Dukungan Kelayakan Rp818 miliar dari Kementerian Keuangan. Pada 21 Juli 2016, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan dan Perjanjian Regres dengan Gubernur Jawa Timur untuk Proyek SPAM Umbulan. Proyek ini merupakan sektor air dan proyek daerah pertama yang diberikan penjaminan Pemerintah melalui PT PII.

The East Java Provincial Government tried finding a solution by utilizing the Umbulan spring in Umbulan Village, Winongan Sub-District, Pasuruan Regency to overcome the water crisis and meet the increasing needs of the community. Umbulan spring was chosen because of its production of 4,000 liters/second and it can meet the clean water needs of 1.8 million people in Surabaya City, Sidoarjo Regency, Gresik Regency, Pasuruan Regency, and Pasuruan City and its surroundings.

SPAM Umbulan project was built using a PPP scheme between the East Java Provincial Government as GCA and PT Meta Adhya Tirta Umbulan as the Implementing Business Entity (BUP). The investment value of SPAM Umbulan Project was Rp2.06 trillion, and the project received Feasibility Support of Rp818 billion from the Ministry of Finance. On 21 July 2016, IIGF signed a Guarantee Agreement with PT Meta Adhya Tirta Umbulan and a Recourse Agreement with the Governor of East Java for the SPAM Umbulan Project. This project is in the water sector and is the first regional project to have a sovereign guarantee via IIGF.

PROYEK SPAM KOTA BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG SPAM

Lokasi	:	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Nilai Proyek	:	Rp0,75 triliun
PJPK	:	Perumda Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung
Badan Usaha	:	PT Adhya Tirta Lampung
Tahapan Proyek	:	Beroperasi sejak 13 Agustus 2020

Location	:	Bandar Lampung City, Lampung Province
Project Value	:	Rp0.75 trillion
GCA	:	Drinking Water Local Public Company Way Rilau Bandar Lampung City
Business Entity	:	PT Adhya Tirta Lampung
Project Phase	:	Operating since 13 August 2020

Proyek SPAM Kota Bandar Lampung diinisiasi karena Kota Bandar Lampung memerlukan peningkatan dan penyediaan air minum. PDAM Way Rilau baru melayani sekitar 20% dari total penduduk Kota Bandar Lampung. Selain rendahnya tingkat pelayanan PDAM Way Rilau, kendala kontur pada Kota Bandar Lampung yang berbukit-bukit juga mengakibatkan pendistribusian air minum belum merata. Nilai investasi SPAM Kota Bandar Lampung mencapai Rp0,75 triliun dan memperoleh Dukungan Kelayakan Rp258,8 miliar dari Kementerian Keuangan.

Perjanjian Kerjasama antara PDAM Way Rilau selaku PJPK dan PT Adhya Tirta Lampung selaku BUP telah ditandatangani pada 14 Februari 2018. Pada kesempatan yang sama, PT PII juga telah menandatangani Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres. *Financial Close* Proyek telah tercapai pada 13 Agustus 2018 dan Proyek telah mulai beroperasi sejak 13 Agustus 2020.

Bandar Lampung SPAM project was initiated because Bandar Lampung City needed to improve and provide drinking water. PDAM Way Rilau only serves around 20% of the total population of Bandar Lampung City. In addition to the low level of service at PDAM Way Rilau, the contour constraints of the hilly city of Bandar Lampung also resulted in uneven distribution of drinking water. The investment value of Bandar Lampung SPAM was Rp0.75 trillion, and it received Feasibility Support of Rp258.8 billion from the Ministry of Finance.

The Cooperation Agreement between PDAM Way Rilau as GCA and PT Adhya Tirta Lampung as BUP was signed on 14 February 2018. On the same occasion, IIGF also signed a Guarantee Agreement and Recourse Agreement. The Project's Financial Close was achieved on 13 August 2018 and the Project started operating on 13 August 2020.

SPAM SEMARANG BARAT
WEST SEMARANG SPAM

Lokasi	:	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Nilai Proyek	:	Rp2,06 triliun
PJPK	:	Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang
Badan Usaha	:	PT Air Semarang Barat
Tahapan Proyek	:	Beroperasi sejak 22 Mei 2021

Location	:	Semarang City, Central Java Province
Project Value	:	Rp417 billion
GCA	:	Tirta Moedal Drinking Water Company (PDAM Tirta Moedal) Semarang
Business Entity	:	PT Air Semarang Barat
Project Phase	:	Operating since 22 May 2021

Proyek SPAM Semarang Barat berkapasitas 1.000 liter/detik dibangun berdasarkan skema KPBU antara Perumda Air Minum Tirta Moedal selaku PJPK dengan PT Air Semarang Barat selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP). Nilai proyek SPAM Semarang Barat sebesar Rp0,42 triliun tanpa menggunakan Dukungan Kelayakan dari Kementerian Keuangan. Area pelayanan SPAM Semarang Barat ditargetkan untuk melayani 3 (tiga) Kecamatan yang terbagi dalam 5 (lima) zona wilayah layanan, yaitu Kecamatan Tugu (zona 1), sebagian Kecamatan Ngaliyan (zona 2 dan 3), serta Kecamatan Semarang Barat (zona 4 dan 5).

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan memperluas cakupan sambungan perpipaan air minum dengan penambahan Sambungan Rumah (SR) kurang lebih 37.000 SR, sehingga total SR yang dapat dilayani mencapai sekitar 71.500 SR pada tahun 2030. Banyaknya SR yang saat ini belum terlayani dikarenakan keterbatasan dana dan sumber air baku yang tersedia di dalam Kota Semarang. PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Air Semarang Barat dan Perjanjian Regres dengan PDAM Tirta Moedal untuk Proyek SPAM Semarang Barat pada 23 November 2018. Adapun *Financial Close* proyek ini dicapai pada tanggal 22 Mei 2019.

West Semarang SPAM project with a capacity of 1,000 liters/second was established by using a PPP scheme between Perumda Air Minum Tirta Moedal as GCA and PT Air Semarang Barat as the Implementing Business Entity (BUP). The West Semarang SPAM project was valued at Rp0.42 trillion, without Feasibility Support from the Ministry of Finance. West Semarang SPAM service is targeted to serve three (3) sub-districts divided into five (5) service zones, i.e., Tugu Sub-District (zone 1), parts of Ngaliyan Sub-District (zones 2 and 3), and West Semarang Sub-District (zones 4 and 5).

The project has the objective to improve service performance and expand the coverage of piped water supply connections by adding approximately 37,000 household connections (SR) to serve approximately 71,500 SR by 2030. The large number of SRs are currently unserved due to limited funds and raw water sources available in Semarang City. IIGF signed a Guarantee Agreement with PT Air Semarang Barat and a Recourse Agreement with PDAM Tirta Moedal for the West Semarang SPAM Project on 23 November 2018. The Financial Close of this project was achieved on 22 May 2019.

SPAM KOTA PEKANBARU
PEKANBARU SPAM

Lokasi	:	Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Nilai Proyek	:	Rp0,50 triliun
PJPK	:	Perumda Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru
Badan Usaha	:	PT PP Tirta Madani
Tahapan Proyek	:	- Fase A – Operasi (30 September 2022) - Fase B - Konstruksi

Location	:	Pekanbaru City, Riau Province
Project Value	:	Rp0.50 trillion
GCA	:	Tirta Siak Drinking Water Company (Perumda) Pekanbaru
Business Entity	:	PT PP Tirta Madani
Project Phase	:	- Phase A - Operating (30 September 2022). - Phase B - Construction.

Proyek SPAM Kota Pekanbaru merupakan proyek pembangunan dan pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru berkapasitas 750 lpd dengan nilai investasi sebesar Rp0,50 triliun. Proyek SPAM Kota Pekanbaru merupakan proyek *Rehabilitate-Build-Operate-Transfer* (RBOT), di mana untuk Fase A telah beroperasi pada tanggal 30 September 2022 dan untuk Fase B sedang dalam tahap konstruksi.

Saat ini, Perumdam Tirta Siak Kota Pekanbaru baru dapat melayani sekitar 9,3% dari jumlah penduduk Kota Pekanbaru. Proyek SPAM Kota Pekanbaru diharapkan dapat meningkatkan Sambungan Langganan (SL) sebanyak ± 48.500 SL sehingga dengan pelanggan saat ini dapat mencapai kurang lebih 60.000 SL. Dengan demikian, Proyek SPAM Kota Pekanbaru dapat meningkatkan jumlah pelanggan Perumdam Kota Pekanbaru hingga hampir 4 kali lipat dari kondisi SL saat ini.

Pada tanggal 16 Desember 2020, penandatanganan Perjanjian Kerja sama, Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek SPAM Kota Pekanbaru dilaksanakan secara bersamaan.

Pekanbaru Drinking Water Supply System (SPAM) Project is a project for the construction and operation of the Pekanbaru City Drinking Water Supply System with a capacity of 750 lpd and an investment of Rp0.50 trillion. Pekanbaru SPAM project is a Rehabilitate-Build-Operate-Transfer (RBOT) project, where Phase A has been operational since 30 September 2022, and Phase B is currently under construction.

Currently, Perumdam Tirta Siak Pekanbaru City can only serve approximately 9.3% of the Pekanbaru's population. Pekanbaru SPAM project shall increase Subscription Connections (SL) by ±48,500 SL, targeting to reach approximately 60,000 SL. Thus, Pekanbaru SPAM Project can increase the number of Pekanbaru's Perumdam customers by almost 4 times of the current SL numbers.

On 16 December 2020, the Cooperation Agreement, Guarantee Agreement, and Recourse Agreement for Pekanbaru SPAM Project were signed simultaneously.

SPAM REGIONAL JATILUHUR I
SPAM REGION JATILUHUR I

Lokasi	:	Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang
Nilai Proyek	:	Rp1,67 triliun
PJPK	:	Menteri Pekerjaan Umum, pendelegasian kepada Dirjen Cipta Karya
Badan Usaha	:	PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur
Tahapan Proyek	:	Beroperasi sejak 18 Desember 2024

Location	:	Special Capital Region of Jakarta Province, Bekasi City, Bekasi Regency, and Karawang Regency
Project Value	:	Rp1.67 trillion
GCA	:	Minister of Public Works, delegated to the Director General of Human Settlements
Business Entity	:	PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur
Project Phase	:	Operating since 18 December 2024

Proyek SPAM Regional Jatiluhur I merupakan proyek kerja sama antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (saat ini menjadi Menteri Pekerjaan Umum) dan PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur di mana area pelayanannya akan mencakup Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan Pemerintah Kabupaten Karawang. Proyek dengan kapasitas 4.750 liter/detik ditargetkan akan menyalurkan air minum ke-380.000 sambungan rumah.

Pada 19 Februari 2021 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja sama, Perjanjian Penjaminan dan untuk Proyek *unsolicited* ini telah mencapai *financial close* pada 1 April 2022 dan diberikan penjaminan oleh PT PII dimana durasi penjaminannya adalah 10 tahun sejak COD.

Jatiluhur I Regional SPAM Project is a cooperation project between the Minister of Public Works and Public Housing (now Ministry of Public Works) and PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur where the service area will cover DKI Jakarta Province, Bekasi Municipal, Bekasi Regency, and Karawang Regency. This project with a 4,750 liters/second capacity is targeted to distribute drinking water to 380,000 households.

On 19 February 2021, a Cooperation Agreement and Guarantee Agreement were signed. This unsolicited project has reached financial close on 1 April 2022 and was given a guarantee by IIGF with a 10 years duration from COD.

SPAM REGIONAL KARIAN SERPONG
SPAM REGION KARIAN SERPONG

Lokasi	:	Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan
Nilai Proyek	:	Rp2,43 triliun
PJPK	:	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pendelegasian kepada Dirjen Cipta Karya
Badan Usaha	:	PT Karian Water Services
Tahapan Proyek	:	Pra-konstruksi

Location	:	Special Capital Region of Jakarta Province, Tangerang City, and South Tangerang City
Project Value	:	Rp2.43 trillion
GCA	:	Minister of Public Works, delegated to the Director General of Human Settlements
Business Entity	:	PT Karian Water Services
Project Phase	:	Pre-construction

Proyek SPAM Regional Karian Serpong merupakan proyek antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (saat ini menjadi Menteri Pekerjaan Umum) dengan PT Karian Water Services yang mencakup area Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Tangerang, dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Proyek penyediaan air minum regional dari Bendungan Karian dengan kapasitas 4.600 liter/detik ini ditargetkan akan menyalurkan air minum ke 539.400 sambungan rumah.

Pada 29 April 2021 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja sama dan Perjanjian Penjaminan, dan untuk Perjanjian Regres ditandatangani pada 30 April 2021. Proyek SPAM Karian Serpong merupakan proyek ke-6 di sektor air minum yang diberikan penjaminan dan memiliki durasi penjaminan selama 15 tahun sejak COD.

Karian Serpong Regional SPAM Project is a project between the Minister of Public Works and Public Housing (now the Ministry of Public Works) and PT Karian Water Services which covers the area of DKI Jakarta Province, Tangerang Municipal, and South Tangerang Municipal. This drinking water provision project for Karian Dam Region with a 4,600 liters/second capacity is targeted to distribute drinking water to 539,400 households.

On 29 April 2021, the Cooperation Agreement and Guarantee Agreement were signed, and the Recourse Agreement was signed on 30 April 2021. SPAM Karian Serpong project is the 6th project in the drinking water sector to be given a guarantee with a guarantee duration of 15 years from COD.

SEKTOR TRANSPORTASI
TRANSPORTATION

PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM MAKASSAR - PAREPARE
MAKASSAR - PAREPARE PUBLIC RAILWAY INFRASTRUCTURE

Lokasi	:	Makassar – Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan
Nilai Proyek	:	Rp0,99 triliun
PJPK	:	Kementerian Perhubungan
Badan Usaha	:	PT Celebes Railway Indonesia
Tahapan Proyek	:	- TOK 1 – Operasi (12 Oktober 2022) - TOK 2 - Operasi (28 Desember 2023) - TOK 3 – Konstruksi

Location	:	Makassar-Parepare, South Sulawesi Province
Project Value	:	Rp0.99 trillion
GCA	:	Ministry of Transportation
Business Entity	:	PT Celebes Railway Indonesia
Project Phase	:	- COD 1 - Operating (12 October 2022) - COD 2 - Operating (28 December 2023) - COD 3 - Construction

Proyek Kereta Api Makassar-Parepare merupakan proyek pertama sektor transportasi di lingkup Kementerian Perhubungan RI. Proyek KPBU ini mengadopsi skema *Build Operate Transfer* (BOT) dengan nilai investasi sebesar Rp989 miliar, dengan masa kerja sama 16 tahun setelah Tanggal Operasi Komersial 1 (TOK1). Proyek dengan skema *Availability Payment* (AP) ini akan melayani area meliputi 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare.

Penandatanganan Perjanjian Kerja sama dilakukan antara PJPK dengan PT Celebes Railway Indonesia (PT CRI) pada tanggal 5 April 2019. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT CRI, dan penandatanganan Perjanjian Regres antara PJPK dengan PT PII.

Makassar-Parepare Railway Train is the first project in the transportation sector within the scope of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia. This PPP project adopts the Build Operate Transfer (BOT) scheme with an investment value of Rp989 billion, with a cooperation period of 16 years after Commercial Operation Date 1 (COD1). The project with the Availability Payment (AP) scheme shall cover 5 regencies/cities in South Sulawesi Province, i.e., Maros Regency, Pangkajene and Islands Regency, Barru Regency, Makassar City, and Parepare City.

The GCA and PT Celebes Railway Indonesia (PT CRI) signed the Cooperation Agreement on 5 April 2019. Simultaneously, IIGF signed a Guarantee Agreement with PT CRI, and Recourse Agreement with the GCA.

PENGEMBANGAN *PROVING GROUND* BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR (BPLJSKB) DI BEKASI

PROVING GROUND OF ROADWORTHINESS TESTING AND MOTOR VEHICLE CERTIFICATION (BPLJSKB) IN BEKASI

Lokasi	:	Provinsi Jawa Barat
Nilai Proyek	:	Rp1,98 triliun
PJPK	:	Kementerian Perhubungan
Badan Usaha	:	PT Indonesia International Automotive Proving Ground
Tahapan Proyek	:	Konstruksi

Location	:	West Java Province
Project Value	:	Rp1.98 trillion
GCA	:	Ministry of Transportation
Business Entity	:	PT Indonesia International Automotive Proving Ground
Project Phase	:	Construction

Pengembangan *Proving Ground* BPLJSKB di Bekasi merupakan proyek KPBU *Solicited* yang bertujuan sebagai tempat sertifikasi dan pengujian kendaraan yang mengadopsi standar *United Nations Economic Commission for Europe* (UNECE) untuk peraturan kendaraan internasional yang terdiri dari trek kecepatan tinggi, pengujian rem, pengujian suara, pengujian sidelap dan fasilitas *testing* lainnya. Berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, proyek tersebut menggunakan skema pembayaran ketersediaan layanan (*Availability Payment*) dengan periode kerja sama selama 17 tahun yang terdiri dari 2 tahun masa konstruksi dan 15 tahun masa operasi serta bentuk kerja sama meliputi *Design - Built - Finance - Maintenance - Transfer* (DBFMT).

The BPLJSKB Bekasi Proving Ground is a Solicited PPP project aimed at providing a facility for vehicle certification and testing, adopting standards from the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) standards for international vehicle regulations consisting of high speed tracks, brake testing, sound testing, sidelap testing, and other testing facilities. Located in Bekasi Regency, West Java, the project utilizes the Availability Payment scheme with a cooperation period of 17 years consisting of 2 years of construction and 15 years of operation. The cooperation model follows a Design-Build-Finance-Maintain-Transfer (DBFMT) structure.

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT PII, dan PT Indonesia International Automotive Proving Ground (IIAPG) dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2022.

On 31 October 2022, the cooperation agreement between the Ministry of Transportation (Kemenhub), IIGF, and PT Indonesia International Automotive Proving Ground (IIAPG) was signed.

PORTOFOLIO PENJAMINAN PROYEK INFRASTRUKTUR - NON KPBU
INFRASTRUCTURE PROJECT GUARANTEE PORTFOLIO - NON-PPP

SEKTOR PARIWISATA
TOURISM

KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MANDALIKA
MANDALIKA SPECIAL ECONOMIC ZONE (SEZ)

Lokasi	:	Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nilai Proyek	:	Rp4,87 triliun
Nilai Pinjaman	:	USD248,3 juta
BUMN – Terjamin	:	Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)
Kreditur/Penerima Jaminan	:	Asian Infrastructure Investment Bank
Tahapan Proyek	:	Konstruksi

Location	:	Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province
Project Value	:	Rp4.87 trillion
Loan Value	:	USD248.3 million
SOE - Guaranteed	:	Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)
Creditor/Guarantee Recipient	:	Asian Infrastructure Investment Bank
Project Phase	:	Construction

Sebagai salah satu bagian dari program pengembangan pariwisata Indonesia, proyek Pengembangan Kawasan Pariwisata KEK Mandalika bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dasar yang berkelanjutan untuk pengembangan tujuan wisata baru di wilayah Mandalika, Lombok. Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Nilai investasi untuk Proyek ini diperkirakan sebesar USD316,5 juta (Rp4,5 triliun) dengan rencana pembiayaan dari Asian Infrastructure Investment Bank sebesar USD248,3 juta. Dengan menerapkan konsep *eco-green* dan *event based* destination, pembangunan dan pengembangan proyek di atas lahan seluas 1.175 Ha ini meliputi pengembangan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) antara lain: jaringan jalan, jaringan air bersih, normalisasi sungai, pengolahan air limbah, tempat pembuangan sampah, jaringan dan fasilitas listrik, dan jaringan dan fasilitas gas.

As part of Indonesia's tourism development program, the Mandalika SEZ Tourism Area Development aims to provide sustainable basic infrastructure to support the development of the new tourist destinations in the Mandalika region, Lombok. Central, West Nusa Tenggara (NTB) Province.

The investment value for this project is approximately USD316.5 million (Rp4.5 trillion) with plan financing from the Asian Infrastructure Investment Bank of USD248.3 million. By implementing the eco-green concept and event based destination, the construction and development of this project on an area of 1,175 Ha includes the development of basic infrastructure: road network, clean water network, river normalization, wastewater treatment, waste disposal site, electricity networks and facilities, and gas networks and facilities.

Pada tanggal 28 Desember 2018, dilakukan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan ITDC, yang selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2018 dilakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara AIIB dengan ITDC yang diikuti penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan, PT PII dan AIIB.

On 28 December 2018, the Guarantee Agreement between IIGF and ITDC was signed, followed by the signing of the Loan Agreement between AIIB and ITDC on 31 December 2018, and the signing of the Guarantee Agreement between the Ministry of Finance, IIGF, and AIIB.

SEKTOR KETENAGALISTRIKAN
ELECTRICITY

HYDROPOWER PROGRAMME
HYDROPOWER PROGRAMME

Lokasi	:	Kalimantan, Sulawesi, dan Papua
Nilai Proyek	:	Rp7,21 triliun
Nilai Pinjaman	:	EUR294,7 juta
BUMN – Terjamin	:	PT PLN (Persero)
Kreditur/Penerima Jaminan	:	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Tahapan Proyek	:	Konstruksi

Location	:	Kalimantan, Sulawesi, and Papua
Project Value	:	Rp7.21 trillion
Loan Value	:	EUR294.7 million
SOE - Guaranteed	:	PT PLN (Persero)
Creditor/Guarantee Recipient	:	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Project Phase	:	Construction

Sebagai bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2019-2027 dan bagian dari Program 35.000 MW Pemerintah, *Hydropower Programme* ini bertujuan di antaranya untuk:

1. Meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atas Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH).
2. Menurunkan Biaya Pokok Produksi (BPP) atas penggunaan bahan bakar fosil baik pada saat *base load* dan terutama pada saat beban puncak serta peningkatan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) kepada pelanggan di sistem terkait.

Proyek ini menggunakan skema pinjaman langsung oleh PT PLN (Persero) dari KfW Bank sebesar EUR294,7 juta untuk pembiayaan 6 (enam) sub proyek di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

As part of the 2019-2027 Electricity Supply Business Plan (RUPTL) and part of the Government's 35,000 MW Program, the Hydropower Program has the objective to:

1. Increase the electrification ratio in Central and Eastern Indonesia with the construction of Hydroelectric Power Plants (HPP) over Mini-Hydro Power Plants (MHPP).
2. Reduce the Electricity Generation Cost (BPP) for the fossil fuel consumption, both at base load and specifically during peak load, and increase the Service Quality Level (TMP) to customers in the related system.

This project uses a direct loan scheme by PT PLN (Persero) from KfW Bank of EUR294.7 million to finance six (6) sub-projects in the Kalimantan, Sulawesi, and Papua regions.

Pada tanggal 5 September 2019, dilakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara KfW dengan PLN yang diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PLN serta Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan, PT PII dan KfW atas penjaminan pinjaman langsung tersebut.

On 5 September 2019, PT PLN (Persero) and KfW signed a Loan Agreement, followed by the signing of a Guarantee Agreement between IIGF and PT PLN, and a Guarantee Agreement between the Ministry of Finance, IIGF, and KfW for such direct loan.

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP) DIENG 2 DAN PATUHA 2

GEOTHERMAL POWER PLANT (GPP) DIENG 2 AND PATUHA 2

Lokasi	:	Dieng dan Patuha
Nilai Proyek	:	Rp7,23 triliun
Nilai Pinjaman	:	USD335 juta
BUMN – Terjamin	:	PT Geo Dipa Energi (Persero)
Kreditur/Penerima Jaminan	:	Asian Development Bank
Tahapan Proyek	:	Konstruksi

Location	:	Dieng and Patuha
Project Value	:	Rp7.23 trillion
Loan Value	:	USD335 million
SOE - Guaranteed	:	PT Geo Dipa Energi (Persero)
Creditor/Guarantee Recipient	:	Asian Development Bank
Project Phase	:	Construction

Proyek PLTP Dieng 2 dan Patuha 2 termasuk ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028 dan memiliki tujuan untuk meningkatkan pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya kebutuhan beban dasar/*baseload* di area Jawa. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk mendukung pencapaian target bauran energi terbarukan sebesar 23% di tahun 2025 sesuai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), mengurangi emisi karbon, dan berkontribusi dalam program Pemerintah terkait penyediaan listrik 35.000.

Dieng 2 and Patuha 2 GPPs are included in the 2019-2028 Electricity Supply Business Plan (RUPTL) and have the objective to increase renewable energy power generation, especially baseload needs in the Java area. In addition, the project also aims to support the achievement of the renewable energy mix target of 23% by 2025, in accordance with the National Energy General Plan (RUEN), reduce carbon emissions, and contribute to the Government's 35,000 electricity supply program.

Pendanaan Proyek ini menggunakan skema pinjaman langsung dari dari Asian Development Bank (ADB) kepada GDE sebesar USD335 juta untuk membiayai pembangunan PLTP Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit 2 dengan masing-masing kapasitas sebesar 55 MW.

This project uses a direct loan scheme from Asian Development Bank (ADB) to GDE amounting to USD335 million to finance the construction of GPP Dieng Unit 2 and GPP Patuha Unit 2 with a capacity of 55 MW each.

Pada tanggal 19 Agustus 2020, dilakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara ADB dengan GDE yang diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan GDE serta Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan dengan ADB atas penjaminan pinjaman langsung tersebut.

On 19 September 2020, ADB and GDE signed a Loan Agreement, followed by the signing of a Guarantee Agreement between IIGF and the GDE, and a Guarantee Agreement between the Ministry of Finance with ADB for such direct loan.

PEMBANGUNAN JARINGAN DISTRIBUSI KALIMANTAN DAN MALUKU - PAPUA DENGAN SKEMA *RESULT-BASED LENDING* (RBL-KMP)

CONSTRUCTION OF THE KALIMANTAN AND MALUKU - PAPUA DISTRIBUTION NETWORK WITH THE RESULT-BASED LENDING SCHEME (RBL-KMP)

Lokasi	:	Kalimantan dan Maluku-Papua
Nilai Proyek	:	Rp32,54 triliun
Nilai Pinjaman	:	USD600 juta
BUMN – Terjamin	:	PT PLN (Persero)
Kreditur/Penerima Jaminan	:	Asian Development Bank
Tahapan Proyek	:	Konstruksi

Location	:	Kalimantan and Maluku-Papua
Project Value	:	Rp32.54 trillion
Loan Value	:	USD600 million
SOE - Guaranteed	:	PT PLN (Persero)
Creditor/Guarantee Recipient	:	Asian Development Bank
Project Phase	:	Construction

Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Kalimantan dan Maluku-Papua merupakan proyek infrastruktur ketenagalistrikan dengan *Skema Result-Based Lending* (RBL-KMP) yang berlokasi di Kalimantan, Maluku, dan Papua, dan ditargetkan untuk menambah sambungan listrik untuk 6,7 juta pelanggan. Proyek ini merupakan bagian dari program jangka Panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga listrik (RUPTL) PT PLN 2019-2028.

The Kalimantan and Maluku-Papua Distribution Network Project is an electricity infrastructure project with a Result-Based Lending Scheme (RBL-KMP) located in Kalimantan, Maluku, and Papua, and is targeted to increase electricity connections for 6.7 million customers. This project is part of the long-term program as stated in the 2019-2028 Electricity Supply Business Plan (RUPTL) of PT PLN.

Keberadaan proyek ini nantinya diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan Rasio Elektrisasi Nasional khususnya di Wilayah Timur Indonesia, meningkatkan kualitas hidup di Indonesia Timur melalui penggunaan listrik berkelanjutan serta mempromosikan tenaga surya dan penggunaan energi bersih.

The project shall support the Government's efforts to increase the National Electrification Ratio, especially in the Eastern Region of Indonesia, improve the quality of life in Eastern Indonesia via the use of sustainable electricity, and promote the use of solar power and clean energy.

Pada tanggal 8 Desember 2020, dilakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara ADB dengan PLN, yang selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2020 dilakukan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PLN yang diikuti penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan dengan ADB.

On 8 December 2020, the Loan Agreement between ADB and PLN was signed, followed by the signing of the Guarantee Implementation Agreement between IIGF and PLN on 16 December 2020, and the signing of the Guarantee Agreement between the Ministry of Finance and ADB.

PENGEMBANGAN DISTRIBUSI SULAWESI DAN NUSA TENGGARA DENGAN SKEMA *RESULT-BASED LENDING* (RBL-SNT)

CONSTRUCTION OF SULAWESI AND NUSA TENGGARA DISTRIBUTION WITH THE RESULT-BASED LENDING SCHEME (RBL-SNT)

Lokasi	:	Sulawesi dan Nusa Tenggara
Nilai Proyek	:	Rp22,52 triliun
Nilai Pinjaman	:	USD255 juta
BUMN – Terjamin	:	PT PLN (Persero)
Kreditur/Penerima Jaminan	:	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Tahapan Proyek	:	Sudah beroperasi

Location	:	Sulawesi and Nusa Tenggara
Project Value	:	Rp22.52 trillion
Loan Value	:	USD255 million
SOE - Guaranteed	:	PT PLN (Persero)
Creditor/Guarantee Recipient	:	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Project Phase	:	Operating

Berlokasi di Sulawesi dan Nusa Tenggara, Proyek RBL-SNT ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan Rasio Elektrifikasi dengan menjalankan program melistriki 433 desa di Wilayah Timur Indonesia, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan strategi peningkatan akses listrik melalui perluasan jaringan listrik sehingga pada akhirnya dapat mendorong pencapaian target rasio elektrifikasi nasional 100% pada tahun 2021. Dengan pembiayaan sebesar USD310 juta dari KFW kepada PLN, proyek ini ditargetkan dapat meningkatkan sambungan listrik sampai dengan 7,7 juta pelanggan.

Selain itu, pembangunan proyek ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap ekonomi berkelanjutan dan pengembangan sosial di wilayah Indonesia Timur; meningkatkan keandalan sistem, efisiensi sistem distribusi, dan pelayanan kelistrikan; serta memenuhi kebutuhan energi listrik di wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi.

Located in Sulawesi and Nusa Tenggara, the RBL-SNT Project is one of the Government's efforts to increase the Electrification Ratio by electrifying 433 villages in the Eastern Region of Indonesia, especially disadvantaged, frontier, and outermost areas (3T), with a strategy of increasing access to electricity through electricity network expansion. Therefore, it ultimately encourage the achievement of the national electrification ratio target of 100% by 2021. With financing of USD310 million from KFW to PLN, this project shall increase electricity connections for up to 7.7 million customers.

In addition, the construction of this project shall contribute to sustainable economic and social development in the Eastern Indonesia region; improving system reliability, distribution system efficiency, and electricity services; as well as fulfilling the electricity needs in Nusa Tenggara and Sulawesi regions.

Pada tanggal 16 Desember 2020, PT PII dan PLN menandatangani perjanjian dengan Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) untuk proyek RBL-SNT yang meliputi penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan, PT PII, dan KfW, dan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PLN, yang sebelumnya pada tanggal 8 Desember 2022, KfW dan PLN telah menandatangani Perjanjian Pinjaman.

On 16 December 2020, IIGF and PLN signed agreements with Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) for the RBL-SNT project, including a Guarantee Agreement between the Ministry of Finance, IIGF, and PLN; and a Guarantee Agreement between IIGF and PLN. On 8 December 2020, PLN and KfW signed a Loan Agreement.

PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI DI JAWA TIMUR DAN BALI
CONSTRUCTION OF EAST JAVA AND BALI DISTRIBUTION NETWORK

Lokasi	:	Jawa Timur dan Bali
Nilai Proyek	:	Rp18,58 triliun
Nilai Pinjaman	:	USD310 juta
BUMN – Terjamin	:	PT PLN (Persero)
Kreditur/Penerima Jaminan	:	Asian Infrastructure Investment Bank
Tahapan Proyek	:	Konstruksi

Location	:	East Java and Bali
Project Value	:	Rp18.58 trillion
Loan Value	:	USD310 million
SOE - Guaranteed	:	PT PLN (Persero)
Creditor/Guarantee Recipient	:	Asian Infrastructure Investment Bank
Project Phase	:	Construction

Sistem kelistrikan wilayah Jawa Timur dan Bali merupakan sistem yang terinterkoneksi dengan sistem Jawa-Bali untuk melayani kebutuhan listrik di Jawa Timur, Madura, dan Bali. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN 2019-2028, diperkirakan bahwa sampai dengan tahun 2024 akan ada penambahan pelanggan sekitar 713 ribu pelanggan dengan tambahan penjualan sebesar 13,9 TWh (TerraWatt *hour*). Dalam rangka mendukung tercapainya target tersebut, PT PLN perlu memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem distribusi melalui penambahan jaringan ataupun *uprating* trafo.

The electricity system for the East Java and Bali regions is an interconnected system in Java-Bali to serve electricity needs in East Java, Madura, and Bali. As stated in PT PLN's 2019-2028 Electricity Supply Business Plan (RUPTL), it is estimated that by 2024 there will be approximately 713 thousand additional customers with additional sales of 13.9 TWh (TerraWatt hour). To support the target's achievement, PT PLN needs to repair and increase the efficiency and reliability of the distribution system via additional networks or uprating transformers.

Dalam hal ini, komitmen Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk mendukung PT PLN dalam mengembangkan jaringan distribusi di wilayah Jawa Timur dan Bali, direalisasikan melalui pendanaan senilai USD310 juta untuk pembiayaan non-material distribusi utama pada pembangunan jaringan tegangan menengah, jaringan tegangan rendah, trafo, dan sambungan pelanggan. Selain itu, Kementerian Keuangan dan PT PII juga turut serta memberikan dukungan dalam bentuk penjaminan pada pinjaman dari AIIB tersebut. Pada tanggal 10 Februari 2021, dilakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara AIIB dengan PT PLN, penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan, PT PII dan AIIB dan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PT PLN.

In this regard, the commitment of the Asian Infrastructure Investment Bank ("AIIB") to support PT PLN in constructing distribution networks in the East Java and Bali regions, was realized via funding of US$310 million for main non-material distribution cost specifically for the development of medium-voltage networks, low-voltage networks, transformers, and customer connections. of medium voltage networks, low voltage networks, transformers, and customer connections. In addition, the Ministry of Finance and IIGF also provided support in the form of guarantees for the loan from AIIB. On 10 February 2021, the Loan Agreement between AIIB and PT PLN was signed, the Guarantee Agreement between the Ministry of Finance, IIGF, and AIIB was signed, and the Guarantee Implementation Agreement between IIGF and PT PLN was signed.

PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI DI JAWA BAGIAN BARAT DAN JAWA BAGIAN TENGAH (*SUSTAINABLE AND RELIABLE ENERGY ACCESS PROGRAM*/SREAP)

TRANSMISSION AND DISTRIBUTION NETWORK DEVELOPMENT IN WESTERN AND CENTRAL JAVA/SUSTAINABLE AND RELIABLE ENERGY ACCESS PROGRAM (SREAP)

Lokasi	:	Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah
Nilai Proyek	:	Rp43,46 triliun
Nilai Pinjaman	:	USD600 juta
BUMN – Terjamin	:	PT PLN (Persero)
Kreditur/Penerima Jaminan	:	Asian Development Bank (ADB)
Tahapan Proyek	:	Konstruksi

Location	:	West Java and Central Java Provinces
Project Value	:	Rp43.46 trillion
Loan Value	:	USD600 million
SOE - Guaranteed	:	PT PLN (Persero)
Creditor/Guarantee Recipient	:	Asian Development Bank (ADB)
Project Phase	:	Construction

Dalam upaya mencapai target penjualan dan penambahan pelanggan, Regional Jawa Madura Bali telah merencanakan program investasi jangka menengah dan pendek melalui penambahan kapasitas aset distribusi. Selain untuk mencapai sasaran penjualan, program investasi lainnya juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan

To achieve sales targets and increase customers, the Java Madura Bali Regional has planned a medium and short-term investment program through the expansion of distribution asset capacity. In addition to achieving sales targets, these investment programs are also aimed at improving the efficiency and reliability of distribution operations, including

operasional distribusi, di antaranya dengan penambahan jaringan tegangan menengah serta penambahan jumlah atau kapasitas transformator distribusi. PLN juga telah mempersiapkan beberapa program strategis untuk mendukung visi pemerintah untuk peningkatan energi terbarukan dengan target bauran EBT sebesar 23% di tahun 2025, di antaranya dengan program konversi energi sisi pelanggan, khususnya pada penggunaan peralatan rumah tangga dan kendaraan bertenaga listrik. Untuk itu, telah direncanakan pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) secara bertahap untuk fasilitas charging station kendaraan listrik.

Pelaksanaan program tersebut melalui pendanaan pinjaman (loan) dari ADB sebesar USD600 juta. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan pendapatan penjualan di Sub Regional JBB dan JBT, serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui kualitas dan keandalan sistem transmisi dan distribusi yang tinggi. Pada tanggal 19 Mei 2022 PT PII dan PLN melaksanakan penandatanganan perjanjian dengan ADB, yang meliputi Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan dengan ADB, dan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PLN. Sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2021 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara PLN dengan ADB untuk pendanaan Proyek SREAP.

by adding medium voltage networks and increasing the number or capacity of distribution transformers. PLN has also prepared several strategic programs to support the government's vision to increase renewable energy with an NRE mix target of 23% by 2025, including a customer-side energy conversion program, especially in the utilization of household appliances and electric-powered vehicles. Therefore, the construction of Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU) infrastructure for electric vehicles' charging station is gradually planned.

The implementation of this program is financed through a loan from ADB amounted to USD600 million. The program is expected to increase capacity and sales revenue in the JBB and JBT Sub-Regions, as well as enhance customer satisfaction through improved quality and reliability of the transmission and distribution systems. On 19 May 2022, IIGF and PLN signed agreements with the Asian Development Bank (ADB), including a Guarantee Agreement between the Ministry of Finance and ADB, and Guarantee Agreement between IIGF and PLN. Previously, on 31 December 2021, a Loan Agreement was signed between PLN and ADB for the SREAP Project Financing.

PEMBANGUNAN PEMBANGKIT PLTU TAHAP III PROGRAM 35.000 MW (PLTU TIMOR-1 2X50 MW)

CONSTRUCTION OF PLTU PLANT PHASE III OF 35,000 MW PROGRAM (PLTU TIMOR-1 2X50 MW)

Lokasi	:	Dusun Panaf, Desa Luifuleo, Kabupaten Kupang
Nilai Proyek	:	Rp3,72 triliun
Nilai Pinjaman	:	Rp2,75 triliun
BUMN – Terjamin	:	PT PLN (Persero)
Kreditur/Penerima Jaminan	:	Sindikasi Bank Permata dan Bank Muamalat
Tahapan Proyek	:	Konstruksi

Location	:	Panaf Hamlet, Luifuleo Village, Kupang Regency
Project Value	:	Rp3.72 trillion
Loan Value	:	Rp2.75 trillion
SOE - Guaranteed	:	PT PLN (Persero)
Creditor/Guarantee Recipient	:	Syndication of Bank Permata and Bank Muamalat
Project Phase	:	Construction

PLTU Timor-1 merupakan salah satu proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga uap yang sudah direncanakan di dalam Rencana Usulan Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 – 2030. Saat ini kebutuhan sistem Timor (Kupang – Soe – Kefamenanu – Atambua) merupakan sistem yang paling besar di PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dapat terserap beban puncak 98,4 MW atau 42,46% dari jumlah daya terpasang sebesar 231,73 MW per tanggal 11 Februari 2021.

SPP Timor-1 is one of the steam power plant development projects planned in the 2021-2030 Electricity Supply Business Plan (RUPTL). Currently, the need for the Timor system (Kupang - Soe - Kefamenanu - Atambua) is the largest system in the PLN Main Unit for the East Nusa Tenggara (NTT) Region, which can absorb a peak load of 98.4 MW or 42.46% of the total installed power of 231.73 MW as of 11 February 2021.

Penambahan kapasitas daya di Provinsi NTT dilakukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Untuk Pulau Timor yang merupakan sistem ketenagalistrikan terbesar di NTT, penambahan kapasitas daya listrik diperlukan untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan yang relatif cukup tinggi. Penambahan kapasitas ini juga diperlukan mengingat akan berakhirnya sewa pembangkit *Leased Marine Vessel Power Plant* (LMVPP) berbahan bakar minyak dengan kapasitas 60 MW pada bulan Desember 2021. Pembangunan PLTU Timor-1 menjadi satu-satunya langkah untuk memenuhi target sistem kelistrikan aman (*reserve margin* > 30%) dalam jangka waktu yang dekat. Tanpa PLTU Timor-1, maka sistem akan berada pada status Siaga, (reserve margin <30%) dan meningkatnya risiko pemadaman jika terjadi gangguan atau pemeliharaan. Pembangkit listrik di NTT didominasi oleh bahan bakar minyak (BBM) yang mengakibatkan tingginya Biaya Pokok Produksi (BPP). PLTU Timor-1 menjadi pembangkit baseload dengan BPP rendah (indikasi BPP PLTU Timor-1 sebesar Rp1.228,51/kWh), sehingga berpotensi menurunkan BPP dan menjaga pasokan daya di Sistem Timor.

The addition of power capacity in NTT Province was necessary to increase the electrification ratio. For Timor Island, which is the largest electricity system in NTT, additional electricity capacity is needed to anticipate the relatively high growth in demand. This additional capacity is also necessary considering that the lease pf 60 MW oil-fueled Leased Marine Vessel Power Plant (LMVPP) will end in December 2021. The construction of SPP Timor-1 is the only step to fulfill the target of a safe electricity system (reserve margin >30%) in the short-term. Without SPP Timor-1, the system will be on Standby status, (reserve margin <30%) and the risk of outages will increase if disruption or maintenance occurs. Electricity generation in NTT is dominated by oil fuel (BBM), which results in high Electricity Generation Cost (BPP). SPP Timor-1 is a baseload generator with a low BPP (indicated BPP for SPP Timor-1 is Rp1,228.51/kWh). Thus, it has the potential to reduce BPP and maintain power supply in the Timor System.

Pada tanggal 28 Desember 2022, PT PII dan PLN menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PLN yang selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2022 telah diterbitkan Surat Jaminan Pemerintah atas Penjaminan Proyek PLTU Timor-1 oleh Direktur Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan. Sebelumnya pada tanggal 8 Desember 2022, PLN dan Sindikasi Bank Permata dan Bank Muamalat telah menandatangani perjanjian pinjaman atas pendanaan Proyek PLTU Timor-1.

On 28 December 2022, IIGF and PLN signed a Guarantee Agreement between IIGF and PLN. Subsequently, on 29 December 2022, a Sovereign Guarantee Letter for the SPP Timor-1 Project Guarantee was issued by the Director General of Financing and Risk Management, the Ministry of Finance. Previously, on 8 December 2022, PLN and the Syndication of Bank Permata and Bank Muamalat had signed a loan agreement for SPP Timor-1 PLTU Project Financing.

PROGRAM INDONESIA *SUSTAINABLE LEAST COST ELECTRIFICATION* (ISLE)

INDONESIA SUSTAINABLE LEAST COST ELECTRIFICATION (ISLE) PROGRAM

Lokasi	:	Maluku dan Nusa Tenggara
Nilai Proyek	:	Rp20,84 triliun
Nilai Pinjaman	:	USD562,5 juta
BUMN – Terjamin	:	PT PLN (Persero)
Kreditur/Penerima Jaminan	:	World Bank
Tahapan Proyek	:	Konstruksi

Location	:	Maluku and Nusa Tenggara
Project Value	:	Rp20.84 trillion
Loan Value	:	USD562.5 million
SOE - Guaranteed	:	PT PLN (Persero)
Creditor/Guarantee Recipient	:	World Bank
Project Phase	:	Construction

Program ISLE memiliki tujuan untuk memungkinkan PLN mengembangkan dan melakukan uji coba bagi kerangka kerja elektrifikasi yang berkelanjutan dan terjangkau dengan mengurangi biaya pembangkitan, meningkatkan keandalan jaringan, dan memobilisasi investasi swasta di wilayah Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Lingkup program dari ISLE yaitu (i) Pembangunan BESS/PLTS; (ii) Pembangunan/*upgrade* SCADA; (iii) Pembangunan SUTT dan GI; (iv) Penambahan JTM, JTR, dan Gardu Distribusi; dan (v) Pekerjaan *Management Information System Single Source of Truth* (SsoT). Rencana pengembangan ini telah tertuang dalam Rencana Usulan Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 - 2030.

Pelaksanaan program ISLE salah satunya melalui pendanaan pinjaman (loan) dari World Bank sebesar USD562,5 juta. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan dapat memberikan serangkaian solusi kepada PLN untuk (i) mengurangi biaya pembangkitan di Kepulauan di Wilayah Timur dengan meningkatkan porsi pembangkit listrik terbarukan yang paling rendah biayanya; (ii) meningkatkan keandalan jaringan dengan mengembangkan pedoman yang jelas mengenai bagaimana menilai rugi-rugi kelistrikan dan kurangnya keandalan; dan (iii) mengurangi beban keuangan pada keuangan publik dengan memobilisasi investasi swasta.

ISLE program has the objective to enable PLN to develop and pilot a sustainable and affordable electrification framework by reducing generation costs, improving network reliability, and mobilizing private investment in the Maluku, North Maluku, West Nusa Tenggara, and East Nusa Tenggara regions. ISLE's scope is (i) BESS/SoPP development; (ii) SCADA development/upgrade; (iii) SUTT and GI development; (iv) addition of JTM, JTR, and Distribution Substations; and (v) Single Source of Truth (SsoT) Management Information System development. This development plan has been contained in the 2021-2030 Electricity Supply Proposal Plan (RUPTL).

The ISLE programme is funded by a loan from the World Bank amounting to USD562.5 million. By implementing this program, the program shall provide a series of solutions to PLN to (i) reduce generation costs in the Islands in the Eastern Region by increasing the portion of renewable power plants that have the lowest cost; (ii) improve network reliability by developing clear guidelines on how to assess electricity losses and lack of reliability; and (iii) reduce the financial burden on public finances by mobilizing private investment.

Pada tanggal 7 Mei 2024, PLN menandatangani Perjanjian Pinjaman antara World Bank dengan PLN, yang selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2024 dilakukan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PLN, yang diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan dengan World Bank pada tanggal 28 Mei 2024 atas penjaminan pinjaman langsung tersebut.

On 7 May 2024, PLN signed the Loan Agreement between the World Bank and PLN, followed by the signing of the Guarantee Implementation Agreement between IIGF and PLN on 13 May 2024, followed by the signing of the Guarantee Agreement between the Ministry of Finance and the World Bank on 28 May 2024 for the direct loan guarantee.

SEKTOR TRANSPORTASI
TRANSPORTATION

PEMBIAYAAN *COST OVERRUN* PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG
FINANCING COST OVERRUN OF JAKARTA BANDUNG HIGH SPEED RAIL PROJECT

Lokasi	:	Jakarta dan Bandung
Nilai Proyek	:	Rp11,37 triliun
Nilai Pinjaman	:	USD542,7 juta
BUMN – Terjamin	:	PT KAI (Persero)
Kreditur/Penerima Jaminan	:	China Development Bank (CDB)
Tahapan Proyek	:	Sudah beroperasi

Location	:	Jakarta and Bandung
Project Value	:	Rp11.37 trillion
Loan Value	:	USD542.7 million
SOE - Guaranteed	:	PT KAI (Persero)
Creditor/Guarantee Recipient	:	China Development Bank (CDB)
Project Phase	:	Operating

Kereta Cepat Jakarta dan Bandung (KCJB)/Whoosh resmi beroperasi pada tanggal 2 Oktober 2023. Keberadaan KCJB menjadi solusi dalam mengatasi kepadatan arus transportasi antara Jakarta dan Bandung, serta membangun konektivitas antar kota dan antar kawasan demi pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 93 Tahun 2021, Pemerintah telah menugaskan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("PT KAI") sebagai pimpinan konsorsium BUMN Indonesia atas Perusahaan Patungan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ("PT PSBI") dalam Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana KCJB. Sehubungan dengan adanya kendala pembebasan lahan serta adanya dampak dari Pandemi

Jakarta and Bandung High Speed Rail (KCJB)/Whoosh officially started operating on 2 October 2023. KCJB's existence is a solution in facing the density of transport flows between Jakarta and Bandung, as well as establishing connectivity between cities and regions for local and national economic growth.

Based on the Presidential Regulation No. 93 of 2021, the Government has assigned PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("PT KAI") as the leader of the consortium of BUMN Indonesia for the Joint Venture Company PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ("PT PSBI") in Accelerating the KCJB Infrastructure and Facilities. Due to land acquisition constraints and the impact of the COVID-19 Pandemic, the KCJB Project delayed its

COVID-19, Proyek KCJB mengalami kemunduran yang di mana direncanakan beroperasi pada tahun 2022 menjadi tahun 2023. Dampak dari kemunduran proyek tersebut dan beberapa hal lain menimbulkan adanya penambahan biaya (*cost overrun*). Atas hal tersebut, Pemerintah memberikan dukungan terkait pemberian Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk pembiayaan cost overrun KCJB kepada PT KAI.

Pada tanggal 22 Januari 2024, PT PII dan PT KAI menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan untuk pembiayaan *cost overrun* KCJB, yang selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2024 dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan, PT PII dan CDB. Sebelumnya pada tanggal 29 Desember 2023, CDB dan PT Kai telah menandatangani Perjanjian Pinjaman atas pembiayaan *cost overrun* KCJB.

operation, from the planned starting point of 2022 to 2023. The project's setback and several other matters led to additional costs (cost overrun). Therefore, the Government provided support related to the provision of Sovereign Guarantee for Loans from the China Development Bank (CDB) to finance the KCJB cost overrun to PT KAI.

On 22 January 2024, IIGF and PT KAI signed a Guarantee Implementation Agreement for KCJB cost overrun financing, which was followed by the signing of a Guarantee Agreement between the Ministry of Finance, IIGF, and CDB on 25 January 2024. On 29 December 2023, CDB and PT KAI signed a Loan Agreement for the KCJB cost overrun financing.

PENJAMINAN KORPORASI PADAT KARYA
LABOR INTENSIVE CORPORATE GUARANTEE

KEGIATAN PENJAMINAN KORPORASI PADAT KARYA
LABOR-INTENSIVE CORPORATE GUARANTEE ACTIVITIES

Sejak tahun 2020, PT PII sebagai salah satu SMV Kementerian keuangan mendapatkan perluasan mandat untuk dapat lebih berkontribusi dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui skema penjaminan untuk pelaku usaha korporasi, atau juga disebut korporasi padat karya. Hal ini merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah untuk menangani dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 terhadap masyarakat.

Rincian pemberian perluasan mandat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 28 Juli 2020, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
2. Pada tanggal 24 Agustus 2020, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 43/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara

Since 2020, IIGF, as one of the Ministry of Finance's SMVs, has been assigned an mandate expansion, to further contribute to the National Economic Recovery (PEN) program via a guarantee scheme for corporate *entrepreneurs*, or labor-intensive corporations. This initiative is part of the Government's policy to address the impact of the COVID-19 pandemic on the society.

The details of granting the mandate expansion are as follows:

1. On 28 July 2020, the Minister of Finance issued the Minister of Finance Regulation No. 98/PMK.08/2020 on the Procedures for Sovereign Guarantees to Corporate Entrepreneurs through Appointed Guarantee Business Entity to Implement National Economic Recovery Program.
2. On 24 August 2020, the Government issued Government Regulation No. 43 of 2020 on the Amendment to the Government Regulation No. 23 of 2020 on the Implementation of the National Economic Recovery Program to Support State Financial Policy for Handling

Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, di mana disebutkan pada Pasal 17 ayat (2) dalam rangka Penjaminan langsung oleh Pemerintah terkait Pelaksanaan Program PEN Pemerintah dapat menugaskan Perseroan.

3. Pada tanggal 26 Oktober 2020 telah terbit Peraturan Presiden No. 103 Tahun 2020 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Pembangunan dalam rangka Mendorong Perekonomian Nasional dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional di mana Pemerintah memberikan Jaminan kepada Lembaga Keuangan dalam membiayai kegiatan pembangunan dalam rangka mendorong perekonomian nasional berupa pembiayaan dalam bentuk pinjaman kepada BUMN, BUMD dan/atau Pemerintah Daerah melalui BUPI.
4. Pada tanggal 13 November 2020, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) sehubungan dengan penugasan PT PII dalam skema penjaminan korporasi padat karya sebagai berikut:
   a. KMK No. 522/KMK.08/2020 tentang Penugasan Kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam Melaksanakan Penjaminan Bersama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
   b. KMK No. 523/KMK.08/2020 tentang Penugasan Kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk Melaksanakan Dukungan *Loss Limit* Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menindaklanjuti penugasan berdasarkan KMK tersebut, telah ditandatangani perjanjian kerja sama antar para pihak sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Keuangan dan PT PII pelaksanaan penugasan pemberian dukungan *loss limit* dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 19 November 2020.
2. Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) dan PT PII sehubungan dengan pelaksanaan dukungan *loss limit* dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 15 Desember 2020.

the 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic and/or Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability and National Economy Rescue, which is stated in Article 17 paragraph (2), for the direct Guarantees by the Government regarding the Implementation of the PEN Program, the Government can assign the Company.

3. On 26 October 2020, Presidential Regulation No. 103 of 2020 on the Central Sovereign Guarantees for Development Financing to Encourage the National Economy and/or the National Economic Recovery Program, was issued, in which the Government provides Guarantees to Financial Institutions to finance development activities to encourage the national economy in the form of financing (loans) to SOEs, Local-Owned Enterprises, and/or Local Government via BUPI.
4. On 13 November 2020, a Minister of Finance Decree (KMK) was issued on the assignment of IIGF to the labor-intensive corporate guarantee scheme as follows:
   a. Minister of Finance Decree No. 522/KMK.08/2020 on the Assignment to Indonesia Infrastructure Guarantee Fund to Implement Joint Guarantees with Indonesian Export Financing Agency for Corporate Entrepreneurs to Carry Out the National Economic Recovery Program.
   b. Minister of Finance Decree No. 523/KMK.08/2020 on the Assignment to Indonesia Infrastructure Guarantee Fund to Implement Sovereign Guarantee Loss Limit Support to Carry Out the National Economic Recovery Program.

Pursuant to the KMK, cooperation agreement(s) were signed between the parties as follows:

1. Cooperation Agreement between the Ministry of Finance and IIGF in implementing the assignment to provide loss limit support for the Sovereign Guarantee in the National Economic Recovery Program on 19 November 2020.
2. Cooperation Agreement between the Indonesian Export Financing Agency (Indonesia Eximbank) and IIGF in implementing the loss limit support for the Sovereign Guarantee for Corporate Entrepreneurs in terms of the National Economic Recovery Program on 15 December 2020.

3. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan PT PII sehubungan dengan pelaksanaan penugasan penjaminan bersama dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 23 Desember 2020.
4. Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) dan PT PII sehubungan dengan Pelaksanaan Penjaminan Bersama dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 15 Februari 2021.

Pada tanggal 30 Desember 2020, PT PII telah menerima tambahan PMN sebesar Rp1,57 triliun sebagai bentuk dukungan kapasitas dalam rangka pelaksanaan dukungan loss limit dan penjaminan korporasi padat karya.

Untuk memberikan relaksasi atas program penjaminan korporasi padat karya kepada pelaku usaha, terdapat berbagai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan maupun Perjanjian Kerja sama antara PT PII (Persero) dengan pihak eksternal pada tahun 2022 yang meliputi:

1. Telah dilakukan Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) dan PT PII terkait Pelaksanaan Dukungan Loss Limit dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 28 Januari 2022.
2. Pada tanggal 29 Maret 2022 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 27/PMK.08/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK 98/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
3. Telah dilakukan Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Keuangan dan PT PII terkait Pelaksanaan Penjaminan Bersama dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 9 Juni 2022.
4. Telah dilakukan Addendum Kedua Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Keuangan dan PT PII terkait Pelaksanaan Penugasan Pemberian Dukungan *Loss Limit* dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 9 Juni 2022.
5. Telah dilakukan Addendum Ketiga Perjanjian Kerja Sama No. PRJ-404/PR/2022-009-03/P-LLPEN/DRU/0922 antara Kementerian Keuangan dan PT PII terkait Pelaksanaan Penugasan Pemberian Dukungan *Loss Limit* dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 19 September 2022.

3. Cooperation Agreement between the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and IIGF in implementing joint guarantee assignments for the Sovereign Guarantee in the National Economic Recovery Program on 23 December 2020.
4. Cooperation Agreement between the Indonesian Export Financing Agency (Indonesia Eximbank) and IIGF in terms of the Joint Guarantee in the framework of Sovereign Guarantee for Corporate Entrepreneurs to Implement the National Economic Recovery Program on 15 February 2021.

On 30 December 2020, IIGF received an additional PMN of Rp1.57 trillion as a form of capacity support to implement loss limit support and labor-intensive corporate guarantees.

To provide relaxation of the labor-intensive corporate guarantee program to corporate enterprise, there were various changes to the Minister of Finance Regulation and the Cooperation Agreement between IIGF and external parties in 2022, which include:

1. Addendum to the Cooperation Agreement between the Indonesian Export Financing Agency (Indonesia Eximbank) and IIGF in implementing the loss limit support for the Sovereign Guarantee for Corporate Entrepreneurs in terms of the National Economic Recovery Program on 28 January 2022.
2. On 29 March 2022, the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 27/PMK.08/2022 on the Second Amendment to PMK 98/2020 on the Procedures for Sovereign Guarantees for Corporate Entrepreneurs via Designated Guarantee Business Entity in Implementing the National Economic Recovery Program.
3. Addendum to the Cooperation Agreement between the Ministry of Finance and IIGF in Implementing Joint Guarantee for Sovereign Guarantee for the National Economic Recovery Program on 9 June 2022.
4. The Second Addendum to the Cooperation Agreement between the Ministry of Finance and IIGF regarding the Assignment of Loss Limit Support of Sovereign Guarantee for the National Economic Recovery Program on 9 June 2022.
5. The Third Addendum to the Cooperation Agreement No. PRJ-404/PR/2022-009-03/P-LLPEN/DRU/0922 between the Ministry of Finance and IIGF related to the Assignment of Loss Limit Support of Sovereign Guarantee for the National Economic Recovery Program on 19 September 2022.

6. Telah dilakukan Addendum Kedua Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) dan PT PII terkait Pelaksanaan Dukungan *Loss Limit* dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 14 November 2022.
7. Telah dilakukan Addendum Kedua Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) dan PT PII terkait Pelaksanaan Penjaminan Bersama dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 14 November 2022.

Sesuai PMK 98/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK 27/2022, peran serta fungsi PT PII dalam Skema Penjaminan Korporasi Padat Karya meliputi:

1. Verifikator data transaksi dan tagihan pembayaran IJP penjaminan. PT PII melaporkan kepada Kementerian Keuangan hasil verifikasi administratif terhadap data transaksi penjaminan dan perhitungan IJP penjaminan yang diajukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada Kementerian Keuangan.
2. Penyedia dukungan *loss limit*. Apabila terjadi klaim yang melebihi *threshold*, LPEI mengajukan klaim *loss limit* kepada PT PII. Klaim *loss limit* adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh PT PII kepada Penjamin (LPEI) sehubungan dengan dukungan *loss limit*.
3. Penyedia Penjaminan Bersama (*Co-Guarantor*). Dalam kondisi pelaku usaha korporasi yang dijamin tidak berorientasi ekspor, maka Penjaminan Pemerintah akan dilakukan secara bersama oleh LPEI dan PT PII.
4. Pengelolaan hak tagih atas klaim yang telah dibayarkan oleh Penjamin (Regres) untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas pinjaman dalam hal terjadi klaim pada porsi dukungan *loss limit* dan Penjaminan Bersama dengan menunjuk pihak selaku *recovery agent* and *collecting agent* atas nama Penjamin.
5. Pemantauan atas Pengelolaan Regres yang dilakukan Penjamin, yaitu dengan melakukan pemantauan intensif atas proses pemulihan hak tagih piutang penjaminan, jika terdapat pembayaran klaim penjaminan.

Sampai dengan 31 Desember 2024, Nilai Penjaminan yang telah diperoleh sebesar Rp1,56 triliun dengan cakupan penjaminan sebesar Rp1,19 triliun termasuk cakupan porsi Penjaminan Bersama PT PII sebesar Rp240 miliar dari total transaksi sebanyak 4 penjaminan terdiri dari 3 Bank dan 4 Terjamin yang telah berpartisipasi serta disetujui untuk diberikan dukungan *loss limit* oleh Perseroan.

6. The Second Addendum to the Cooperation Agreement between the Indonesian Export Financing Agency (Indonesia Eximbank) and IIGF in implementing the loss limit support for the Sovereign Guarantee for Corporate Entrepreneurs in terms of the National Economic Recovery Program on 14 November 2022.
7. The Second Addendum to the Cooperation Agreement between the Indonesian Export Financing Agency (Indonesia Eximbank) and IIGF in Cooperative Guarantee Implementation of the Loss Limit Support for the Sovereign Guarantee for Corporate Entrepreneurs in terms of the National Economic Recovery Program on 14 November 2022.

In accordance to PMK 98/2020, as amended by PMK 27/2022, the roles and functions of IIGF in the Labor Intensive Corporate Guarantee Scheme include:

1. transaction data and invoice payment validator for Guarantee Fee. IIGF reports the results of administrative verification of guarantee transaction data and Guarantee Fee calculations submitted by the Indonesian Export Financing Agency (LPEI) to the Ministry of Finance.
2. Loss limit support provider. Should there be a claim that exceeds the threshold, Indonesia Eximbank submits a loss limit claim to IIGF. The loss limit claim is the amount of money that must be paid by IIGF to the Guarantor (LPEI) in connection with the loss limit support.
3. Co-Guarantor. In conditions where corporate entrepreneurs are guaranteed to be not export-oriented, the Government's Guarantee shall be carried out jointly by Indonesia Eximbank and IIGF.
4. Management of collection rights on claims that have been paid by the Guarantor (Recourse) to fulfil the obligation to pay loans in the event of a claim on the portion of loss limit support and Joint Guarantee by appointing a party as recovery agent and collecting agent on behalf of the Guarantor.
5. Monitoring the Recourse management implemented by the Guarantor, i.e., by carrying out intensive monitoring of the process of recovering guarantee receivable collection rights, if there is payment of guarantee claims.

As of 31 December 2024, the Guarantee Value provided amounted to Rp1.56 trillion, with coverage of Rp1.19 trillion, including coverage of IIGF's Joint Guarantee of Rp240 billion from a total of 4 guarantee transactions, consisting of 3 Banks and 4 Guarantees, who have participated and approved by the Company to have loss limit support.

PENJAMINAN BUMN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

SOE GUARANTEE IN IMPLEMENTING THE NATIONAL ECONOMIC RECOVERY PROGRAM AND GOVERNMENT FOOD RESERVES

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Program ini diluncurkan oleh Pemerintah untuk mendukung kebijakan keuangan negara dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional.

PEN dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah di mana dalam pelaksanaannya, skema penjaminan dapat dijalankan oleh langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk.

Pada tanggal 11 Mei 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 ("PP 23/2020") tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagai langkah inisiasi penerapan program PEN. Berdasarkan Pasal 17 PP 23/2020 tersebut, Pemerintah dapat menugaskan Badan Usaha Penjaminan, yang mana dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dalam rangka penjaminan langsung oleh Pemerintah. Menyusul penerbitan PMK No. 98/PMK.08/2020 mengenai Penjaminan Korporasi Padat Karya, Menteri Keuangan juga menerbitkan PMK No. 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 22 Desember 2020. Sesuai dengan mandat dari Kementerian Keuangan, PT PII dapat berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan untuk memberikan Jaminan Pemerintah kepada BUMN yang terdampak pandemi COVID-19 dan/atau mendapatkan penugasan dalam rangka program PEN.

The National Economic Recovery (PEN) Program has the objective to protect, maintain, and improve the economic capabilities of enterprises from the real sector and the financial sector in running their businesses. This program was launched by the Government to support fiscal policies in efforts to protect and stabilize the national economy.

PEN is implemented via the State Equity Participation (PMN), placement of Government funds and/or investment, and/or guarantee activities with a scheme determined by the Government whereas in its implementation, the guarantee scheme may be conducted directly through one or more designated guarantee institutions.

On 11 May 2020, the Government issued Government Regulation No. 23 of 2020 ("PP 23/2020") on the National Economic Recovery Program to Support State Financial Policy for Handling the Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic and/or to Face Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability and National Economy Rescue, as an initial step to implement PEN program. Based on Article 17 of PP 23/2020, the Government can assign a Guarantee Business Entity, which is carried out based on the Decree of the Minister of Finance for direct guarantees by the Government. Following the issuance of PMK No. 98/PMK.08/2020 on Labor-Intensive Corporate Guarantee, the Minister of Finance also issued PMK No. 211/PMK.08/2020 on the Procedures for Providing Sovereign Guarantees for State-Owned Enterprises for National Economic Recovery Program Implementation on 22 December 2020. In accordance with the mandate from the Ministry of Finance, IIGF can collaborate with the Ministry of Finance to provide Sovereign Guarantees to SOEs affected by the COVID-19 pandemic and/or receive assignments within the framework of the PEN program.

PT PII selain berperan serta dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), PT PII juga mendapat perluasan mandat untuk dapat melaksanakan Jaminan Pemerintah bersama Kementerian Keuangan kepada BUMN Pangan dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Pemberian Jaminan Pemerintah tersebut diatur dalam PMK 34/2024 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Sampai dengan 31 Desember tahun 2024, PT PII telah menandatangani di antaranya 9 proyek terkait penjaminan BUMN dalam rangka Program PEN dan penjaminan dalam rangka Cadangan Pangan Pemerintah, dengan status penjaminan yang masih berjalan sebanyak 8 proyek.

In addition to participating in the National Economic Recovery Program (PEN), IIGF also received a mandate expansion on to carry out Sovereign Guarantee in collaboration with the Ministry of Finance to Food SOEs in Implementing Government Food Reserves. The provision of the Sovereign Guarantee is regulated in PMK 34/2024 on the Procedures for Providing Sovereign Guarantee to Implement Government Food Reserves. As of 31 December 2024, IIGF has signed, among others, 9 projects related to SOE guarantees in PEN Program and guarantees in the framework of the Government Food Reserve, with an ongoing guarantee for 8 projects.

PORTOFOLIO PENJAMINAN BUMN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEN

SOES GUARANTEE PORTFOLIO IN THE PEN PROGRAM IMPLEMENTATION

PENJAMINAN PEMERINTAH ATAS OBLIGASI III PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK TAHUN 2021 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEN DAN OBLIGASI IV & SUKUK MUDHARABAH I TAHUN 2022

GOVERNMENT GUARANTEE OF PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK BOND III YEAR 2021 IN THE IMPLEMENTATION OF PEN PROGRAM AND BOND IV & SUKUK MUDHARABAH I YEAR 2022

INFORMASI PENJAMINAN
GUARANTEE INFORMATION

Nilai Obligasi:	:	Rp1,78 triliun
BUMN Terjamin	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Wali Amanat	:	PT Bank Mega Tbk
Jangka Waktu Penjaminan	:	5 dan 7 tahun

Bond Value:	:	Rp1.78 trillion
SOEs	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Guaranteed Trustee	:	PT Bank Mega Tbk
Guarantee Period	:	5 and 7 years

Kinerja operasional dan likuiditas PT Waskita Karya (Persero) Tbk. ("Waskita") mengalami penurunan sebagai akibat dari *pandemic* COVID-19 yang berkepanjangan. Kondisi ini berdampak terhadap profil risiko kredit Waskita yang semakin meningkat sehingga berakibat pada penurunan kredit oleh lembaga pemeringkat. Pada akhirnya pihak perbankan secara bertahap mengurangi dukungan pendanaan kepada Waskita.

Operational performance and liquidity of PT Waskita Karya (Persero) Tbk. ("Waskita") declined as a result of the prolonged COVID-19 pandemic. This condition affected Waskita's increasing credit risk profile, resulting in a credit reduction by the rating agency. In the end, the banking sector gradually reduced funding support to Waskita.

Oleh karena itu, Waskita berencana menerbitkan obligasi dalam rangka *refinancing* dan pemenuhan kebutuhan modal kerja. Agar rencana tersebut dapat tercapai, Waskita membutuhkan dukungan berupa penjaminan untuk meningkatkan peringkat obligasi sehingga dapat menarik minat investor pasar modal dan dapat mengoptimalisasikan penerbitan obligasi yang dilakukan. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan dan PT PII memberikan dukungan penjaminan terhadap risiko gagal bayar atas bunga dan pokok obligasi III Waskita Karya tahun 2021. Pada tanggal 16 September 2022, pihak-pihak terkait telah menandatangani Perjanjian Wali Amanat, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan.

Therefore, Waskita plans to issue bonds the purpose of refinancing and meeting working capital needs. To achieve the target, Waskita needs support in the form of guarantees to increase the bond rating to attract the interest of capital market investors and optimize the bond issuance. In this case, the Ministry of Finance and IIGF provided guarantee against the risk of default on the interest and principal of the 2021 Waskita Karya Bond III. On 16 September 2022, the related parties have signed the Trustee Agreement, Guarantee Agreement, and Guarantee Implementation Agreement.

PENJAMINAN PEMERINTAH ATAS PINJAMAN PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEN

GOVERNMENT GUARANTEE FOR THE LOAN OF PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTING THE PEN PROGRAM

INFORMASI PENJAMINAN

GUARANTEE INFORMATION

Nilai Pinjaman BUMN	:	Rp8,08 triliun
Terjamin	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Kreditur	:	Sindikasi PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara, PT Bank BJB
Jangka Waktu Penjaminan	:	3 tahun

Loan Value	:	Rp8.08 trillion
SOEs Guaranteed	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Creditor:	:	Syndication of PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara, PT Bank BJB
Guarantee Period	:	3 years

Agar kondisi perusahaan semakin membaik, Waskita terus melakukan upaya restrukturisasi keuangan secara menyeluruh, salah satunya adalah melalui penjaminan pemerintah atas pinjaman dan obligasi/sukuk. Untuk menambah modal kerja, Waskita memperoleh pinjaman dari sindikasi Bank dalam negeri yang modalnya akan digunakan untuk membiayai 148 proyek penugasan dari Pemerintah dalam rangka program PEN.

To improve the company's condition, Waskita carries out comprehensive financial restructuring efforts, one of which is via sovereign guarantees for loans and bonds/sukuk. To increase working capital, Waskita obtained a loan from a syndicate of domestic banks, which will be used to finance 148 assignment projects from the Government within the framework of the PEN program.

Untuk meningkatkan kelayakan dalam rencana pinjaman dari pihak Perbankan dalam rangka penyelesaian proyek-proyek yang dikerjakan dan pemenuhan kewajiban Waskita, maka dibutuhkan penjaminan pemerintah. Jaminan pemerintah ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi program restrukturisasi keuangan Waskita. Pada tanggal 25 Oktober 2021, Waskita dan pihak Kreditur menandatangani Perjanjian Pinjaman, sedangkan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2021.

A sovereign guarantee is necessary to increase the feasibility of loan plans from banks to complete the projects and fulfill Waskita's obligations. This sovereign guarantee shall provide a significant boost to Waskita's financial restructuring program. On 25 October 2021, Waskita and the Creditors signed the Loan Agreement. The Guarantee Agreement and Guarantee Implementation Agreement were signed on 29 October 2021.

PENJAMINAN OBLIGASI IV DAN SUKUK MUDHARABAH I PT WASKITA KARYA (PERSERO)

GUARANTEE FOR BOND IV AND SUKUK MUDHARABAH I OF PT WASKITA KARYA (PERSERO)

INFORMASI PENJAMINAN
GUARANTEE INFORMATION

Nilai Pinjaman	:	Obligasi Rp2,13 triliun/ Sukuk Rp1,15 triliun
BUMN Terjamin	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Wali Amanat	:	PT Bank KB Bukopin Tbk
Jangka Waktu Penjaminan	:	5 dan 7 tahun

Loan Value	:	Bonds of Rp2.13 trillion/ Sukuk of Rp1.15 trillion
SOEs Guaranteed	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Trustee	:	PT Bank KB Bukopin Tbk
Guarantee Period	:	5 and 7 years

Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I Waskita Tahun 2022 dengan Jaminan Pemerintah merupakan bagian dari strategi penyehatan keuangan Waskita yang terintegrasi dan saling berkaitan serta merupakan penjaminan atas surat utang Waskita dalam Rangka PEN Tahap II yang merupakan tahap lanjutan dari penerbitan Obligasi III dengan Penjaminan Pemerintah yang telah ditandatangani pada 16 September 2021.

Bond IV dan Sukuk Mudharabah I of Waskita in 2022 with Sovereign Guarantee are part of Waskita's integrated and interrelated financial restructuring strategy and are a guarantee for Waskita's debt securities in Phase II PEN, which is a follow-up to the issuance of Bond III with Sovereign Guarantee, signed on 16 September 2021.

Penerbitan obligasi dan sukuk tersebut dalam Rangka refinancing dan pemenuhan kebutuhan modal kerja Waskita. Dalam upaya pemberian dukungan kepada Waskita, Kementerian Keuangan dan PT PII memberikan dukungan penjaminan terhadap risiko gagal bayar atas bunga dan pokok Obligasi IV dan Sukuk I Waskita tahun 2022 yang pada tanggal 22 April 2022 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Wali Amanat, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan oleh Waskita, Kementerian Keuangan, PT PII dan Wali Amanat.

The issuance of bonds and sukuk is for refinancing and meeting Waskita's working capital needs. To provide support to Waskita, the Ministry of Finance and IIGF provided guarantee support against the risk of default on the interest and principal of Bond IV and Sukuk I of Waskita in 2022. On 22 April 2022, the Trustee Agreement, Guarantee Agreement and Implementation Agreement were signed by Waskita, Ministry of Finance, IIGF, and the Trustee.

PENJAMINAN PINJAMAN BUS LISTRIK KTT G20 DAN BTS BANDUNG & SURABAYA PT INDUSTRI KERETA API (PERSERO)

G20 SUMMIT ELECTRIC BUS LOAN GUARANTEE AND BANDUNG & SURABAYA BTS PT INDUSTRI KERETA API (PERSERO)

INFORMASI PENJAMINAN
GUARANTEE INFORMATION

Nilai Pinjaman	:	Rp0,15 triliun
BUMN Terjamin	:	PT Industri Kereta Api (Persero)
Kreditur	:	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Jangka Waktu Penjaminan	:	4 tahun

Loan Value	:	Rp0.15 trillion
SOEs Guaranteed	:	PT Industri Kereta Api (Persero)
Creditor	:	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Guarantee Period	:	4 years

Bertepatan dengan diselenggarakannya rangkaian agenda KTT G-20, di mana Indonesia untuk pertama kalinya memegang Presidensi G-20, yang digelar di Provinsi Bali. Kementerian Perhubungan menyelenggarakan pengadaan penyediaan layanan transportasi umum bus listrik untuk mendukung Program G-20. Operator yang ditunjuk untuk menyediakan layanan bus listrik adalah Perum DAMRI. Perum DAMRI melalui LOA pada bulan Februari dan April 2022 telah menunjuk PT Industri Kereta Api (Persero) (PT INKA) untuk menyediakan bus listrik sebanyak 53 unit. Setelah dioperasikan pada KTT G-20, bus listrik tersebut selanjutnya akan dioperasikan di Kota Bandung sebanyak 1 koridor (14 unit) dan Kota Surabaya sebanyak 2 koridor (39 unit) dengan skema *Buy The Service* (BTS).

This coincided with the G-20 Summit agenda, where Indonesia held the G-20 Presidency for the first time in Bali Province. The Ministry of Transportation procured electric bus as public transportation services to support the G-20 Program. The operator appointed to provide electric bus services was Perum DAMRI. Perum DAMRI, via LOA in February and April 2022, has appointed PT Industri Kereta Api (Persero) (PT INKA) to provide 53 electric buses. After being utilized at the G-20 Summit, the electric buses would operate in Bandung City in 1 corridor (14 units) and Surabaya City in 2 corridors (39 units) under the Buy The Service (BTS) scheme.

Dalam upaya pemberian dukungan penyediaan bus listrik kepada PT INKA, Kementerian Keuangan dan PT PII memberikan dukungan penjaminan yang di mana pada tanggal 30 Desember 2022 telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian, yang meliputi Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan, PT PII dan Bank Muamalat, yang sebelumnya pada tanggal 30 Desember 2022 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara PT INKA dengan Bank Muamalat untuk pendanaan pengadaan 53 unit bus listrik.

To provide support for the provision of electric buses to PT INKA, the Ministry of Finance and IIGF provided guarantee support. On 30 December 2022, a Guarantee Agreement was signed by the Ministry of Finance, IIGF, and Bank Muamalat. On 30 December 2022, a Loan Agreement was signed between PT INKA and Bank Muamalat to fund the procurement of 53 electric buses.

PENJAMINAN KREDIT MODAL KERJA DAN KREDIT INVESTASI PERUM DAMRI

GUARANTEE OF WORKING CAPITAL LOANS AND INVESTMENT LOANS OF PERUM DAMRI

INFORMASI PENJAMINAN

GUARANTEE INFORMATION

Nilai Pinjaman	:	Rp97,2 miliar
BUMN Terjamin	:	Perum DAMRI
Kreditur	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jangka Waktu Penjaminan	:	4 tahun

Loan Value	:	Rp97.2 billion
SOEs Guaranteed	:	Perum DAMRI
Creditor	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Guarantee Period	:	4 years

Perum DAMRI merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang jasa angkutan penumpang. Pandemi COVID-19 menyebabkan sektor transportasi darat mengalami tekanan yang cukup sulit dikarenakan masyarakat membatasi mobilitas mereka demi pencegahan penularan dari COVID-19 mengakibatkan penurunan drastis pada jumlah penumpang. Oleh sebab itu, DAMRI memanfaatkan fasilitas pinjaman dengan Penjaminan Pemerintah sebagai upaya memperkuat basis komersial perusahaan.

Pinjaman dari Bank Mandiri kepada DAMRI akan difokuskan untuk mengembangkan trayek Angkutan Bandara dan Angkutan Antar Kota melalui peremajaan armada di 35 trayek antarkota dan bandara yang terpilih karena memiliki traffic penumpang yang baik, serta mengembangkan Fasilitas Pemeliharaan Kendaraan (*Maintenance Facility*). Pada tanggal 30 Desember 2022, DAMRI dan pihak Kreditur menandatangani Perjanjian Pinjaman, selanjutnya Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan PT PII dan Bank Mandiri, serta Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan DAMRI ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2022.

Perum DAMRI is a state-owned company that is engaged in the public transportation services sector. The COVID-19 pandemic has caused the land transportation sector to experience a pressure because people limit their mobility to prevent transmission of COVID-19, resulting in a drastic reduction in the number of passengers. Therefore, DAMRI used loan facilities with Sovereign Guarantee as an effort to strengthen the company's commercial base.

The loan from Bank Mandiri to DAMRI would be focused on developing Airport Transport and Intercity Transport routes by means of fleet rejuvenation on 35 intercity and airport routes selected, as these routes have good passenger traffic, and Vehicle Maintenance Facilities development. On 30 December 2022, DAMRI and the Creditors signed a Loan Agreement, followed by a Guarantee Agreement between the Ministry of Finance, IIGF, and Bank Mandiri, and the Guarantee Implementation Agreement between IIGF and DAMRI was signed on 30 December 2022.

PENJAMINAN KREDIT MODAL KERJA PT LEN INDUSTRI (PERSERO)

PT LEN INDUSTRI (PERSERO) WORKING CAPITAL CREDIT GUARANTEE

INFORMASI PENJAMINAN

GUARANTEE INFORMATION

Nilai Pinjaman	:	eqv.Rp2,64 triliun
BUMN Terjamin	:	PT Len Industri (Persero)
Kreditur	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Bank/Lembaga Keuangan Lainnya
Jangka Waktu Penjaminan	:	4 tahun

Loan Value	:	equivalent to Rp2.64 trillion
SOEs Guaranteed	:	PT Len Industri (Persero)
Creditor	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and Other Banks/Financial Institutions
Guarantee Period	:	4 years

PT Len Industri (PT Len) pada tahun 2021 s.d. 2022 menerima surat penunjukan proyek strategis dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam rangka kemandirian penyediaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) oleh Industri Dalam Negeri. Penunjukan dari Kementerian Pertahanan ini selain untuk menjalankan 3 proyek tersebut sekaligus sebagai bentuk dukungan PT Len terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Untuk menunjang pelaksanaan penunjukan atas 3 (tiga) proyek di atas PT Len membutuhkan fasilitas kredit perbankan, baik *Cash Loan* (CL) maupun *Non Cash Loan* (NCL). Oleh sebab itu, PT Len mengajukan permohonan pembiayaan fasilitas pinjaman dengan jaminan Pemerintah. Pada tanggal 30 Desember 2022, PT Len dan pihak Kreditur menandatangani Perjanjian Pinjaman, selanjutnya Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan, PT PII dan Bank Mandiri, serta Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PT Len ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2022.

PT Len Industri (PT Len), in 2021 and 2022 received a letter of appointment for a strategic project from the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia for the independent provision of Main Defense System Equipment (Alutsista) by Domestic Industry. This appointment from the Ministry of Defense is to implement these 3 projects and as a form of PT Len's support for the National Economic Recovery (PEN) Program.

To support the implementation of the appointment of the three (3) projects above, PT Len requires banking credit facilities, both Cash Loans (CL) and Non Cash Loans (NCL). Therefore, PT Len submitted an application for loan financing with a sovereign guarantee. On 30 December 2022, PT Len and the Creditors signed a Loan Agreement, followed by a Guarantee Agreement between the Ministry of Finance, IIGF, and Bank Mandiri, and the Guarantee Implementation Agreement between IIGF and PT Len was signed on 30 December 2022.

PENJAMINAN KREDIT MODAL KERJA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM RANGKA TALANGAN PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI DAN SUBSIDI BBM DAN LPG 3 KG

GUARANTEE OF WORKING CAPITAL CREDIT OF PT PERTAMINA (PERSERO) IN THE CONTEXT OF PAYMENT OF COMPENSATION AND SUBSIDY FUNDS FOR FUEL AND LPG 3 KG

INFORMASI PENJAMINAN
GUARANTEE INFORMATION

Nilai Pinjaman	:	Rp47,19 triliun
BUMN Terjamin	:	PT Pertamina (Persero)
Kreditur	:	Sindikasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Jangka Waktu Penjaminan	:	2 tahun + 1 tahun

Loan Value	:	Rp47.19 trillion
SOEs Guaranteed	:	PT Pertamina (Persero)
Creditor	:	Syndication of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Guarantee Period	:	2 years + 1 year

PT Pertamina (Persero) ("Pertamina") melalui Pertamina Patra Niaga (PPN) melaksanakan penugasan kegiatan P*ublic Service Obligation* (PSO) penyediaan dan pendistribusian kuota volume penyalur Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus (JBKP). Mengacu pada PMK No. 159/PMK.02/2022, dalam pelaksanaan penugasan kegiatan PSO, Pertamina dapat memperoleh Dana Kompensasi Bahan Bakar Minyak dari Pemerintah atas kekurangan penerimaan Pertamina akibat selisih Harga Jual Eceran (HJE). Namun berdasarkan kondisi eksisting pembayaran Dana Kompensasi yang dilakukan oleh Pemerintah baru dapat diselesaikan pada rata-rata 3 tahun. Terjadinya penundaan pembayaran Dana Kompensasi menyebabkan defisit pada *Operating Cash Flow* (OCF). Atas hal tersebut, Pertamina melakukan proses penyediaan KMK Dana Kompensasi dan Subsidi dengan debitur Bank Mandiri, BNI dan BRI dalam rangka upaya menjaga cashflow dalam mencegah terjadinya disrupsi operasional. Namun, fasilitas kredit yang diberikan oleh ketiga Bank tersebut sudah hampir mencapai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang ditentukan oleh OJK. Dengan memperhatikan kondisi BMPK Himbara, opsi yang dapat diupayakan oleh Pertamina adalah permohonan Fasilitas KMK Penjaminan Pemerintah melalui Program PEN dari Kementerian Keuangan atas Fasilitas KMK tersebut, sehingga ketentuan BMPK tersebut dapat dikecualikan.

PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"), through Pertamina Patra Niaga (PPN), carries out Public Service Obligation (PSO) activities to provide and distribute volume quotas for distributors of Certain Fuel Types (JBT) and Special Fuel Types (JBKP). With reference to PMK No. 159/PMK.02/2022, in carrying out PSO assignments, Pertamina shall obtain Fuel Compensation Funds from the Government for the shortfall in Pertamina's revenues due to the difference in Retail Selling Prices (HJE). However, based on existing conditions, payments of Compensation Funds made by the Government can only be completed in an average of 3 years. The delay in payment of the Compensation Fund caused a deficit in Operating Cash Flow (OCF). Therefore, Pertamina carried out the process of provision of KMK Compensation and Subsidy Funds with Bank Mandiri, BNI, and BRI debtors to maintain cash flow to prevent operational disruption. However, the credit facilities provided by the three banks have almost reached the Maximum Credit Limit (BMPK) determined by the OJK. Taking into account the condition of the Himbara BMPK, the option is for Pertamina to request a Sovereign Guarantee KMK Facility through the PEN Program from the Ministry of Finance for the KMK Facility, so that the LLL provisions can be excluded.

Pertamina mengajukan permohonan Fasilitas KMK Penjaminan Pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pada tanggal Pada tanggal 30 Desember 2022, Pertamina dan pihak Kreditur menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi (Bank Mandiri, BNI dan BRI), selanjutnya Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan, PT PII dan Bank Mandiri, serta Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan Pertamina ditandatangani secara bersamaan pada tanggal 30 Desember 2022.

Pertamina applied for a Sovereign Guarantee KMK Facility through the National Economic Recovery (PEN) Program. On 30 December 2022, Pertamina and the Creditors signed a Syndicated Credit Agreement (Bank Mandiri, BNI, and BRI), followed by a Guarantee Agreement between the Ministry of Finance, IIGF, and Bank Mandiri, and the Guarantee Implementation Agreement between IIGF and Pertamina, which were signed simultaneously on 30 December 2022.

SEGMEN USAHA PENYIAPAN PROYEK DAN PENDAMPINGAN TRANSAKSI
PROJECT DEVELOPMENT FACILITY BUSINESS SEGMENT

Dengan pengalaman lebih dari 14 tahun, PT PII telah menjalankan peran serta usaha terbaiknya dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui Penjaminan Pemerintah yang diberikan kepada proyek-proyek infrastruktur melalui skema KPBU. Perkembangan dan pertumbuhan industri infrastruktur di Indonesia menuntut PT PII untuk terus adaptif terhadap kemajuan zaman dan berinovasi serta berkembang dalam menjalankan perannya demi mencapai hasil yang optimal serta pemerataan infrastruktur di Indonesia.

With more than 14 years of experience, IIGF has carried out its best role and endeavors in infrastructure development in Indonesia via Sovereign Guarantees provided for infrastructure projects in the PPP scheme. The development and growth of the infrastructure industry in Indonesia requires IIGF to continue to adapt to the times and innovate and develop to perform its role to achieve optimal results and equitable distribution of infrastructure in Indonesia.

KEGIATAN OPERASI DAN USAHA PENYIAPAN PROYEK DAN PENDAMPINGAN TRANSAKSI
OPERATIONS AND BUSINESS ACTIVITIES FOR PROJECT DEVELOPMENT FACILITY

Pada tahun 2018, PT PII mendapatkan kesempatan untuk menjalankan kegiatan usaha di samping memberikan jaminan pada proyek infrastruktur, yaitu dengan terlibat dalam penyiapan proyek dan pendampingan transaksi. Pelaksanaan kegiatan usaha telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah Untuk Pembiayaan Infrastruktur Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dan/atau Skema Pembiayaan Lainnya ("PMK 68/2024"). Peraturan ini mengatur tentang dukungan pemerintah yang disediakan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung percepatan penyediaan infrastruktur, salah satunya Fasilitas Pengembangan Proyek ("Fasilitas PDF").

In 2018, IIGF had the opportunity to conduct business activities in addition to providing guarantees for infrastructure projects, i.e., by being involved in project development facility. The business activities is in accordance with the prevailing laws and regulations, currently referring to the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 68 of 2024 on Government Support for Infrastructure Financing through Public Private Partnership Schemes and/or Other Financing Schemes ("PMK 68/2024"). This regulation stipulates the government support provided by the Ministry of Finance to support the acceleration of infrastructure provision, one of which is the Project Development Facility ("PDF").

Berdasarkan peraturan tersebut, PT PII dapat memperoleh penugasan dari Kementerian Keuangan untuk menjalankan segmen usaha terkait pelaksanaan Fasilitas PDF di tahap penyiapan dan transaksi Proyek KPBU. PDF menjadi salah satu pengembangan aktivitas kegiatan Perseroan sesuai dengan rencana arah pengembangan Perseroan tahun 2018-2024. Melalui Fasilitas PDF, keterlibatan PT PII secara menyeluruh dalam proses penyediaan infrastruktur diharapkan dapat menjadi nilai tambah tersendiri untuk Proyek. Adapun proyek-proyek yang dapat menerima fasilitas PDF adalah proyek KPBU Prioritas, Proyek KPBU Kilang Minyak, dan/atau Proyek KPBU lainnya yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Based on the regulation, IIGF can obtain an assignment from the Ministry of Finance to conduct business in the segments related to the PDF in the preparation and transaction stages of PPP Projects. PDF is one of the development of the Company's activities in accordance with the Company's development plan in 2018 through 2024. Via PDF, IIGF is thoroughly involved in the process of providing infrastructure, which shall add value to the Project. Projects that can receive PDF include Priority PPP projects, Oil Refinery PPP Projects, and/or other PPP Projects that meet the criteria as stipulated in the regulation.

Dalam pelaksanaan kegiatan PDF, PT PII telah menyiapkan struktur yang berorientasi pada proyek serta menjaga independensi pengambilan keputusan di masing-masing fungsi (*segregation of function*) melalui pembentukan Divisi Inisiasi Bisnis yang didukung oleh dua hal, yaitu: (i) Pengawasan sumber daya manusia yang kompeten untuk menjalankan penugasan tersebut dengan berbekal pengalaman Proyek Infrastruktur selama PT PII beroperasi; dan (ii) Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam pengelolaan transaksi.

In implementing the PDF, IIGF has prepared a project-oriented structure and maintained the independence of decision making in each function (segregation of function) through the establishment of a Business Initiation Division, which is supported by two matters: (I) Competent human resources supervision to carry out the assignments based on Infrastructure Project during IIGF's operations; and (ii) Good Corporate Governance in Infrastructure to manage transactions.

Melalui kegiatan PDF, PT PII dapat terlibat dalam memberikan pendampingan kepada PJPK sejak tahap penyiapan dengan menyusun prastudi kelayakan, dokumen kegiatan pendukung, dan pelaksanaan penjajakan minat pasar sebelum proyek dilaksanakan. Pada tahap transaksi, PT PII mendampingi PJPK mulai dari penyusunan dokumen pengadaan, pengadaan Badan Usaha Pelaksana hingga tercapainya tahap perolehan pembiayaan (*financial close*). Adapun, dengan diterbitkannya PMK 68/2024, PT PII juga dapat melakukan pendampingan kepada PJPK pada tahap manajemen, yaitu memberikan pendampingan pada masa konstruksi termasuk pengujian operasional infrastruktur dan masa penyediaan layanan yang terhitung sejak infrastruktur beroperasi paling lama 2 (dua) tahun. Keterlibatan PT PII secara *end-to-end* diharapkan dapat turut memastikan aspek *bankability* dan *feasibility* proyek sehingga meningkatkan kepastian keberhasilan proyek yang berujung pada kepastian pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan.

Through PDF activities, IIGF is involved in providing assistance to GCA since the preparation stage by preparing pre-feasibility studies, supporting activities documents, and market sounding prior to project implementation. At the transaction stage, IIGF assists GCA by preparing procurement documents, procurement of the Implementing Business Entity, up to the financial close phase. Meanwhile, with the issuance of PMK 68/2024, IIGF can provide assistance to GCA at the management stage, i.e., providing assistance during the construction period including operational testing of infrastructure and the service provision period starting since the operations of infrastructure for a maximum of two (2) years. IIGF's end-to-end involvement shall help ensure the bankability and feasibility aspects of the project, thereby increasing the certainty of project success which leads to the certainty of quality and sustainable infrastructure development.

PELAKSANAAN PENYIAPAN PROYEK DAN PENDAMPINGAN TRANSAKSI
PROJECT DEVELOPMENT FACILITY IMPLEMENTATION

Hingga akhir tahun 2024, PT PII melaksanakan penugasan Fasilitas PDF sebanyak 10 (sepuluh) Proyek yang terdiri dari 9 (sembilan) Proyek dengan skema KPBU dan 1 Proyek Pengelolaan Barang Milik Negara. Dari 9 (sembilan) Proyek skema KPBU tersebut terdapat 3 (tiga) proyek yang penugasannya berakhir, yaitu Tempat Pembuangan Akhir Sampah ("TPAS") Regional Piyungan, Rusunawa Cisaranten, Jaringan Gas Kota Batam serta terdapat 1 (satu) proyek penugasan baru yaitu RSUD Kota Denpasar di pertengahan tahun 2024 sehingga jumlah proyek PDF efektif sampai dengan akhir bulan Desember 2024 sebanyak 7 (tujuh) proyek, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

As of 2024, IIGF has ten (1) PDF assignments, consisting of nine (9) projects with PPP schemes and 1 State-Owned Asset Management Project. Of the nine (9) PPP scheme projects, three (3) projects' assignment were finished, i.e., the Piyungan Regional Final Landfill ("TPAS"), Cisaranten Flats, Batam City Gas Network; and one (1) project was newly assigned, i.e., Denpasar Hospital in mid-2024. Therefore, the number of effective PDF projects as of December 2024 is seven (7) projects, as described below.

PEMBANGUNAN BANDAR UDARA SINGKAWANG
CONSTRUCTION OF SINGKAWANG AIRPORT

Berada di Provinsi Kalimantan Barat (kurang lebih 153 km dari Ibukota Provinsi, Kota Pontianak), kota Singkawang memiliki masyarakat yang beragam dan harmonis yang berkontribusi terhadap keunikan Singkawang. Hal ini yang menjadikannya sebagai tujuan wisata budaya dan religi yang potensial. Selain itu, Kota Singkawang juga memiliki berbagai peluang investasi antara lain seperti industri 4.0, logistik (hub), depo gas, pertanian dan budidaya perairan (akuakultur) hingga kawasan hunian.

Located in West Kalimantan Province (approximately 153 km from the provincial capital, Pontianak), Singkawang City has a diverse and harmonious society that contributes to Singkawang's uniqueness. This is what makes Singkawang a potential cultural and religious tourism destination. In addition, Singkawang City also has various investment opportunities, including industry 4.0, logistics (hub), gas depot, agriculture, aquaculture, and residential areas.

Proyek Bandara Singkawang menjadi salah satu proyek nasional yang akan menggunakan skema KPBU sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 ("Permenhub No. 80/2020") dan termasuk dalam Program Prioritas Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

The Singkawang Airport project is one of the national projects that will use the PPP scheme in accordance with the Minister of Transportation Regulation No. 80 of 2020 on the Ministry of Transportation's Strategic Plan 2020-2024 ("Permenhub No. 80/2020"), and is included in the 2018-2022 Singkawang City Priority Program.

Rencana Induk Nasional Bandar Udara dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional memuat rencana lokasi, penggunaan, hierarki, dan klasifikasi Bandar Udara Singkawang, di mana Proyek KPBU Bandar Udara Singkawang dikategorikan sebagai Bandar Udara Pengumpan dengan Klasifikasi 4C dan penggunaan sebagai bandar udara domestik.

The National Airport Master Plan in the Decree of the Minister of Transportation No. 166 of 2019 on the National Airport Order contains the location plan, usage, hierarchy, and classification of Singkawang Airport, in which the Singkawang Airport PPP Project is categorized as a Feeder Airport with Classification 4C and will be utilized as a domestic airport.

INFORMASI PROYEK

PROJECT INFORMATION

PJPK GCA	Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan	Director General of Civil Aviation, Ministry of Transportation
Lokasi Proyek Project Location	Kota Singkawang, Kalimantan Barat	Singkawang City, West Kalimantan
Skema Proyek Project Scheme	*Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer* (DBFOMT)	Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT)
Lingkup KPBU PPP Scope	• Rancang dan Bangun, diantaranya fasilitas sisi udara dan fasilitas sisi darat bandar udara; • Menyediakan dan memastikan pendanaan untuk konstruksi, operasional dan pemeliharaan Proyek; • Mengoperasikan fasilitas bandar udara (termasuk Aset *Brownfield*) selama periode kerjasama; • Melaksanakan pemeliharaan fasilitas bandar udara (termasuk Aset *Brownfield*) selama periode kerjasama; dan • Pengalihan aset kepada PJPK atas semua fasilitas yang telah dioperasikan dan dipelihara selama masa kerjasama Proyek pada akhir masa konsesi.	• Design and Build, including airside facilities and airport landside facilities; • Providing and securing funding for the construction, operation and maintenance of the Project; • Operating the airport facilities (including Brownfield Assets) during the cooperation period; • Carrying out maintenance of airport facilities (including Brownfield Assets) during the cooperation period; and • Transferring assets to GCA for all facilities that have been operated and maintained during the Project cooperation period at the end of the concession period.
Mekanisme Pengambilan Investasi Investment Return Mechanism	*User Charge*	User Charge
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp841 miliar	Rp841 billion
Masa Kerja Sama Collaboration Period	32 tahun (termasuk 2 tahun konstruksi)	32 years (including 2 years construction)
Tahapan Phase	Penyiapan Proyek (Finalisasi Laporan Akhir Kajian Akhir Prastudi Kelayakan)	Project Preparation (Finalization of Pre-Feasibility Study Final Report)

Mempertimbangkan hasil realisasi atas instrumentasi pendanaan dan pembiayaan yang komprehensif pada Proyek, maka Bandara Singkawang merupakan proyek *brownfield* dengan penyediaan infrastruktur yang diistilahkan sebagai *blended finance* atau bauran pembiayaan yang terdiri atas APBN, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari pemberi hibah. Dengan demikian, keberadaan Bandara Singkawang ini

Considering the realization of the comprehensive funding and financing instrumentation for the Project, Singkawang Airport is a brownfield project with infrastructure provision which is termed as blended finance, consisting of State Budget, Government Islamic Securities (SBSN), and Corporate Social Responsibility (CSR) from the Grantor. Thus, Singkawang Airport shall support increased connectivity through air transportation for the mobility of goods and services,

diharapkan dapat mendukung peningkatan konektivitas melalui transportasi udara untuk mobilitas barang dan jasa utamanya pada wilayah Singkawang, Bengkayang, Sambas, dan Mempawah.

especially in the Singkawang, Bengkayang, Sambas, and Mempawah regions.

Pada tanggal 31 Januari 2020, PJPK mengajukan permohonan fasilitas PDF kepada Menteri Keuangan yang kemudian disetujui pada tanggal 6 September 2020 melalui surat Menteri Keuangan perihal persetujuan atas permohonan fasilitas PDF untuk Proyek. Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penugasan khusus kepada PT PII selaku BUMN pelaksana penugasan pada 13 Januari 2021. Selanjutnya, keputusan tersebut menjadi dasar pelaksanaan PDF proyek oleh PT PII.

On 31 January 2020, GCA submitted a request for PDF to the Minister of Finance, which was then approved on 6 September 2020 via a letter from the Minister of Finance regarding the approval of the PDF request for the Project. The Minister of Finance issued a Minister of Finance's Decree on the special assignments to IIGF as the appointed SOE on 13 January 2021. Further, this decision became the basis for IIGF in implementing the PDF.

PEMBANGUNAN RUSUNAWA CISARANTEN
CONSTRUCTION OF THE CISARANTEN FLATS

Sehubungan dengan kebutuhan penduduk yang terus bertambah dan untuk menutupi *backlog* perumahan, Pemerintah berupaya menyediakan perumahan yang lebih baik bagi warga Bandung. Rencana tersebut direalisasikan melalui proyek Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung ("Rusunawa Cisaranten") di mana pembangunannya direncanakan melalui skema KPBU.

In connection with the growing population needs and to cover the housing backlog, the Government is trying to provide better housing for Bandung residents. This plan was realized through the Bandung Cisaranten Bina Harapan Flats project ("Rusunawa Cisaranten"), in which the construction was planned by using a PPP scheme.

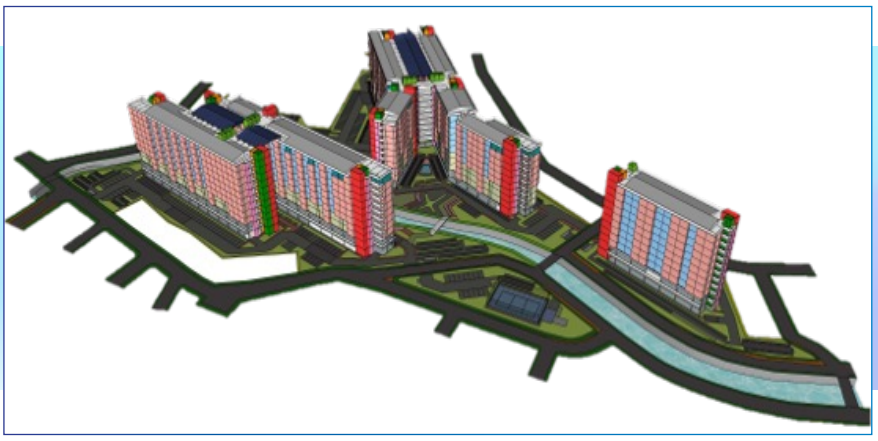

Terdapat 454 kawasan kumuh yang tersebar di 30 kecamatan dan ada *backlog* perumahan sebanyak 416.072 unit rumah pada 2019 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada permintaan yang tinggi untuk perumahan umum di kota Bandung. Hal ini ditunjang juga dengan adanya daftar pemohon untuk Rusun MBR di kota Bandung yang disebutkan mencapai lebih kurang 3000 KK dan yang sudah diserahkan ke PJPK sebesar 324 KK (229KK di Ujung Berung dan 95 di Cingised).

There are 454 slum areas spread across 30 sub-districts and a housing backlog of 416,072 housing units in 2019. Therefore, there is high demand for public housing in Bandung. This is also supported by the list of applicants for MBR flats in Bandung, which have reached approximately 3,000 families, and of which, 324 families have been submitted to the GCA (229 families in Ujung Berung and 95 in Cingised).

INFORMASI PROYEK		PROJECT INFORMATION
PJPK GCA	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ("PUPR")	Minister of Public Works and Public Housing ("PUPR")
Lokasi Proyek Project Location	Kelurahan Cisaranten Bina Harapan, Kota Bandung, Jawa Barat	Cisaranten Bina Harapan Village, Bandung City, West Java
Skema Proyek Project Scheme	*Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer* (DBFOMT)	Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT)
Lingkup KPBU PPP Scope	• Penyusunan *basic design* Rusun 5 tower; • Pembangunan Rusun, Fasum, dan Fasos pendukung; • Pembiayaan; • Pengoperasian dan pemeliharaan bangunan Rusun dan Fasum dan Fasos; • Serah terima seluruh aset kepada PJPK di akhir masa konsesi.	• Preparation of basic design for 5 tower flats; • Construction of Flats, Public Facilities, and supporting Social Facilities; • Financing; • Operation and maintenance of Flats, Public Facilities, and Social Facilities buildings; • Handover of all assets to the GCA at the end of the concession period.
Mekanisme Pengambilan Investasi Investment Return Mechanism	*Availability Payment*	Availability Payment
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp749,7 miliar	Rp749.7 billion
Masa Kerja Sama Collaboration Period	11 tahun 9 bulan – termasuk 6 bulan prakonstruksi, 15 bulan konstruksi dan 10 tahun operasi	11 years 9 months - including 6 months of pre-construction, 15 months of construction, and 10 years of operation
Tahapan Phase	Penyiapan Proyek (Finalisasi Laporan Akhir Kajian Akhir Prastudi Kelayakan)	Project Preparation (Finalization of Pre-Feasibility Study Final Report)

Pada tanggal 5 Juli 2021, Kementerian Keuangan menyetujui Fasilitas PDF untuk Proyek sebagai respons atas surat Permohonan PDF yang sebelumnya telah dikirimkan oleh PJPK kepada Kementerian Keuangan tanggal 30 Maret 2021. Pada tanggal 23 September 2021 Kementerian Keuangan dan PJPK menandatangani Kesepakatan Induk, kemudian Kementerian Keuangan menerbitkan KMK mengenai penugasan khusus kepada PT PII selaku BUMN pelaksana penugasan pada tanggal 19 Oktober 2021. Status penugasan Proyek saat ini adalah telah berakhir sejak tanggal 23 Desember 2024 sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu fasilitas PDF. Kegiatan yang telah dilakukan hingga berakhirnya Fasilitas PDF diantaranya adalah sebagai berikut: (i) Persiapan penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan, (ii) Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan beserta kajian dan/atau dokumen pendukung lainnya untuk kajian prastudi kelayakan, (iii) Penyusunan Rancangan Dokumen Pengadaan Proyek, (iv) Pendampingan PJPK dalam perolehan dukungan Pemerintah.

On 5 July 2021, the Ministry of Finance approved the Request for PDF for the Project in response to the PDF Request letter which had previously been sent by the GCA to the Ministry of Finance on 30 March 2021. On 23 September 2021, the Ministry of Finance and GCA signed a Master Agreement, followed by the Ministry of Finance issuing a KMK regarding a special assignment to IIGF as the implementing SOE on 19 October 2021. This Project's assignment ended since 23 December 2024 in connection with the expiration of the PDF period. Activities that have been implemented until the expiration of the PDF include: (i) Preparation of the Final Pre-Feasibility Study, (ii) Preparation of the Final Pre-Feasibility Study along with other supporting studies and/or documents for the pre-feasibility study, (iii) Preparation of the Draft of Project Procurement Document, (iv) Assistance to the GCA to obtain Government support.

PEMBANGUNAN TPAS REGIONAL PIYUNGAN
CONSTRUCTION OF THE PIYUNGAN REGIONAL LANDFILL

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (PJPK) saat ini sedang mempersiapkan Proyek Pengembangan TPAS Regional Piyungan di lahan baru (± 4,8 ha) yang akan diadakan melalui skema KPBU dengan mempertimbangkan saat ini TPA eksisting (± 10 ha) yang sudah penuh dan telah ditutup pada tahun 2022, selain itu TPA Transisi (± 2 ha) yang dibangun tahun 2022 diproyeksikan hanya akan dapat digunakan hingga tahun 2025.

The Government of Special Region of Yogyakarta (GCA) is currently preparing the Piyungan Regional Landfill Development on new land (±4.8 ha) which will be implemented via a PPP scheme, with due regards to the current existing landfill (±10 ha) which is already full and will be closed in 2022. In addition, the Transitional TPA (±2 ha) which was built in 2022 is forecasted to have full life in 2025.

Proyek akan berupaya untuk mencapai tujuan berikut:

1. Menyediakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan menggunakan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia dan praktik terbaik internasional.
2. Melibatkan pembiayaan swasta untuk investasi modal untuk pembiayaan Proyek mengingat kapasitas fiskal PJPK yang terbatas.
3. Membawa pengalaman teknologi dan manajemen internasional ke dalam Proyek dan melakukan transfer pengalaman teknologi dan manajemen internasional ke dalam perekonomian Indonesia.
4. Meningkatkan manfaat sosial ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat setempat.
5. Meningkatkan penanganan sampah residual yang membutuhkan penimbunan dengan kualitas yang dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:
   a. Mengurangi volume lindi tambahan yang harus diolah.
   b. Mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).
   c. Mengurangi potensi adanya agen penularan penyakit.
   d. Mengurangi masalah gangguan bau yang dapat mengganggu warga dan menurunkan nilai tanah.

The project strives to achieve the following objectives:

1. Providing sustainable waste management using environmentally friendly waste processing technology in accordance with existing regulations in Indonesia and international best practices.
2. Involving private financing for capital investment to finance the project considering the limited fiscal capacity of the GCA.
3. Providing international technology and management experience into the Project and transferring international technology and management experience into the Indonesian economy.
4. Enhancing socio-economic and environmental benefits for local communities.
5. Improving the handling of residual waste that requires landfilling with a quality that can produce the following benefits:
   a. Reducing the volume of additional leachate that must be treated.
   b. Reducing greenhouse gas (GHG) emissions.
   c. Reducing the potential for disease transmission agents.
   d. Reducing the problem of odor which can disturb residents and reduce land values.

INFORMASI PROYEK		PROJECT INFORMATION
PJPK GCA	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Governor of the Special Region of Yogyakarta
Lokasi Proyek Project Location	Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	Sitimulyo Village, Piyungan Sub-District, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta
Skema Proyek Project Scheme	*Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer* (DBFOMT)	Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT)
Lingkup KPBU PPP Scope	• Melakukan desain, pembiayaan, dan pembangunan fasilitas pengolahan sampah dan infrastruktur penunjang; dan • Pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah dan infrastruktur penunjang.	• Carrying out design, financing, and construction of waste processing facilities and supporting infrastructure; and • Operation and maintenance of waste processing facilities and supporting infrastructure.
Mekanisme Pengambilan Investasi Investment Return Mechanism	*Tipping Fee*	Tipping Fee
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp370,6 miliar	Rp370.6 billion
Masa Kerja Sama Collaboration Period	20 tahun (1,5 tahun masa konstruksi dan 18,5 tahun masa operasi)	20 years (1.5 years of construction period and 18.5 years of operation period)
Tahapan Phase	Penyiapan Proyek	Project Preparation

Pada tanggal 12 Juli 2021, Kementerian Keuangan menyetujui untuk memberikan Fasilitas PDF Proyek sebagai respons atas surat Permohonan PDF yang telah dikirimkan oleh PJPK. Pada tanggal 29 November 2021 Kementerian Keuangan dan PJPK menandatangani Kesepakatan Induk, kemudian Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penugasan khusus kepada PT PII selaku BUMN pelaksana penugasan Proyek pada tanggal 16 Desember 2021. Adapun status penugasan Proyek saat ini adalah telah berakhir sejak tanggal 29 Agustus 2024 sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu Fasilitas PDF.

On 12 July 2021, the Ministry of Finance approved the PDF Request for the Project in response to the PDF Request letter which had previously been sent by the GCA. On 29 November 2021, the Ministry of Finance and GCA signed the Master Agreement, then the Ministry of Finance issued a Decree of the Minister of Finance regarding the special assignment to IIGF as the implementing SOE for the Project on 16 December 2021. Currently the Project's assignment status has ended since 29 August 2024 due to the expiration of the PDF period.

Kegiatan yang telah dilakukan hingga berakhirnya Fasilitas PDF diantaranya adalah sebagai berikut: (i) Persiapan penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan, (ii) Penyiapan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan (*Final Business Case*) beserta kajian dan/atau dokumen pendukung untuk kajian prastudi kelayakan, (iii) Pendampingan PJPK untuk perolehan persetujuan DPRD yang sesuai dengan tata tertib sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD, (iv) Pendampingan PJPK dalam penyusunan rancangan dokumen pengadaan Proyek, dan (v) Pendampingan PJPK dalam Strategi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Sektor Hulu sebagai Dampak Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Wilayah Kartamantul.

Activities that have been carried out until the expiration of the PDF include: (i) Preparation of the Final Pre-Feasibility Study, (ii) Preparation of the Final Pre-Feasibility Study (Final Business Case) along with supporting studies and/or documents for the pre-feasibility study, (iii) Assistance to the GCA to obtain DPRD approval in accordance with the rules as stipulated in the DPRD Regulations, (iv) Assistance to the GCA to prepare the draft of Project procurement documents, and (v) Assistance to the GCA in the Management Strategy and Waste Management in the Upstream Sector as an Impact of the Decentralization Policy of Waste Management in the Kartamantul Region.

PEMBANGUNAN JARINGAN GAS KOTA BATAM
BATAM CITY GAS NETWORK DEVELOPMENT

Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Indonesia bertujuan untuk mendukung program pemerintah untuk mewujudkan bauran energi gas bumi hingga 33% di Tahun 2025. Upaya ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan Pemerintah dalam membangun kedaulatan dan kemandirian di bidang energi yang secara bertahap berdampak terhadap berkurangnya subsidi Pemerintah yang bersumber dari APBN, mewujudkan ketahanan energi nasional serta mendukung program diversifikasi energi dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, dengan pengalihan penggunaan LPG tabung 3 kg, 12 kg, dan 50 kg.

The construction of a natural gas network for households in Indonesia aims to support the government's program to realize a natural gas energy mix of up to 33% in 2025. This effort is also represents support for the Government's policy in establishing energy sovereignty and independence which will gradually contribute to the reduction of Government subsidies sourced from the State Budget, strengthen national energy security, and supporting the energy diversification program in reducing dependence on LPG imports, by switching to the use of 3 kg, 12 kg, and 50 kg LPG cylinders.

Dalam periode tahun 2015 hingga tahun 2019, jumlah konsumsi LPG bersubsidi di Kota Batam terus meningkat dari 28,991 MT hingga mencapai 36,412 MT atau meningkat sekitar 5,0% per tahun. Hal ini berdampak terhadap subsidi LPG dari Pemerintah yang turut meningkat dari Rp139 miliar di tahun 2015 menjadi Rp201,6 miliar di tahun 2019 atau sekitar 9,6% per tahun. Berdasarkan data tersebut, terdapat potensi pengembangan jaringan gas rumah tangga di Kota Batam dengan menggunakan sumber daya nasional dan sekaligus berperan sebagai substitusi besaran subsidi yang diberikan Pemerintah. Oleh karena itu, rencana pengembangan jaringan gas rumah tangga di Kota Batam melalui skema KPBU merupakan salah satu alternatif skema yang dapat dipertimbangkan.

In 2015 up to 2019, the amount of subsidized LPG consumption in Batam City increased from 28,991 MT to 36,412 MT, or increased by around 5.0% per year. This has an impact on LPG subsidies from the Government, which also increased from Rp139 billion in 2015 to Rp201.6 billion in 2019, or around 9.6% per year. Based on this data, there is potential for developing a household gas network in Batam City using national resources and at the same time acting as a substitute for the subsidies provided by the Government. Therefore, the alternative is to develop a household gas network in Batam City via a PPP scheme.

INFORMASI PROYEK		PROJECT INFORMATION
PJPK GCA	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	Ministry of Energy and Mineral Resources
Lokasi Proyek Project Location	Kota Batam	Batam City
Skema Proyek Project Scheme	*Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer* (DBFOMT)	Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT)
Lingkup KPBU PPP Scope	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga	Development of Natural Gas Distribution Network Infrastructure for Households
Mekanisme Pengambilan Investasi Investment Return Mechanism	*User Charge*	User Charge
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp2,98 triliun	Rp2.98 trillion
Masa Kerja Sama Collaboration Period	30 tahun	30 years
Tahapan Phase	• Penyusunan Rancangan Perpres Jargas • Penyelesaian Dokumen *Business Case Awal* Proyek	• Drafting of Gas Network Presidential Regulation • Completion of Initial Project Business Case Document

Pada tanggal 7 September 2021, Persetujuan atas Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU Pembangunan Jaringan Distribusi Gas untuk Rumah Tangga Kota Batam telah diberikan sebagai respons atas Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek yang sebelumnya dikirimkan pada tanggal 9 Juni 2021.

On 7 September 2021, the Request for Project Development Facility of PPP Project for the Construction of the Gas Distribution Network for Batam City Households was approved, as a response to the Request for Project Development Facility which was previously submitted on 9 June 2021.

PT PII telah mengirimkan Kajian Kesiapan PT PII dalam melaksanakan penugasan PDF untuk kedua kota, Batam dan Palembang. Kajian tersebut memuat pemahaman mengenai kebutuhan Proyek, rencana pengembangan kajian di bidang hukum, teknis, ekonomi, lingkungan, kelembagaan, risiko, dukungan dan rencana tindak lanjut. Selain itu, PT PII juga menyampaikan rencana pengelolaan sumber daya untuk mendukung penugasan tersebut terkait rencana waktu, sumber daya manusia, dan kebutuhan sinkronisasi proyek di 2 lokasi berbeda tersebut. Sebagai upaya meminimalisir kemungkinan hambatan terhadap progres proyek bagi PJPK, PT PII juga telah memasukkan kajian awal identifikasi kebutuhan regulasi.

IIGF has sent a Feasibility Study of IIGF in carrying out PDF for the two cities, Batam and Palembang. The study contains an understanding of the Project's needs, plans for developing studies in the fields of law, technical, economic, environmental, institutional, risk, support, and follow-up plans. In addition, IIGF also submitted a resource management plan to support this assignment regarding time management, human resources, and project synchronization needs in 2 different locations. IIGF has included an initial study of identifying regulatory needs to minimize possible obstacles to the progress of the projects for GCA.

Pada tanggal 10 Juni 2022, Kementerian Keuangan dan PJPK menandatangani Kesepakatan Induk, kemudian Kementerian Keuangan menerbitkan KMK mengenai penugasan khusus kepada PT PII selaku BUMN pelaksana Penugasan pada tanggal 15 Juli 2022. KMK menyatakan bahwa proyek jaringan gas Batam diharapkan bisa menyelesaikan masalah regulasi terlebih dahulu sehingga diberikan periode 30 bulan untuk hanya menyelesaikan tahapan penyiapan PDF terlebih

On 10 June 2022, the Ministry of Finance and GCA signed a Master Agreement, followed by the Ministry of Finance issuing a KMK regarding a special assignment to IIGF as the implementing SOE on 15 July 2022. KMK stated that the Batam gas network project shall be able to resolve regulatory issues, so that a 30-month period is given to complete the PDF phase. Currently, the Project's assignment status has ended since 10 December 2024 due to the expiration of the

dahulu. Status penugasan Proyek saat ini telah berakhir sejak tanggal 10 Desember 2024 sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu fasilitas PDF. Dokumen yang telah disusun diantaranya adalah i. *Inception Report*, ii. Kajian hukum dan kelembagaan, iii. Dokumen *Outline Business Case,* iv. Dokumen *Real Demand Survey*, v. Dokumen Laporan Awal Prastudi Kelayakan Proyek vi. Dokumen masukan atas izin lingkungan, vii. Rancangan Perubahan Peraturan Presiden terkait pelaksanaan Jargas KPBU oleh Kementerian ESDM beserta Peraturan turunannya.

PDF period. The documents that has been prepared nclude i. Inception Report, ii. Legal and institutional studies, iii. Outline Business Case Document, iv. Real Demand Survey Document, v. Preliminary Project Pre-Feasibility Report vi. Input document on environmental permit, vii. Draft Amendment to the Presidential Regulation conerning to the implementation of the Gas Network PPP by the Ministry of Energy and Mineral Resources and its derivative regulations.

PEMBANGUNAN JARINGAN GAS KOTA PALEMBANG
PALEMBANG CITY GAS NETWORK DEVELOPMENT

Sebagai Ibukota Sumatra Selatan, kota Palembang merupakan pusat perekonomian dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak dan gas bumi, batu bara, perkebunan kelapa sawit, karet, dan *pulp*. Keberadaan infrastruktur jaringan pipa gas bumi dan potensi pasar pengguna jaringan gas menjadi dasar pertimbangan Pemerintah untuk membangun jaringan gas rumah tangga dengan skema KPBU di Kota Palembang.

As the capital city of South Sumatra, Palembang is an economic center with abundant natural resources, such as oil and gas, coal, oil palm plantations, rubber, and pulp. The existence of natural gas pipeline infrastructure and the potential market for gas network users are the basis for the Government's consideration to establish a household gas network with a PPP scheme in Palembang.

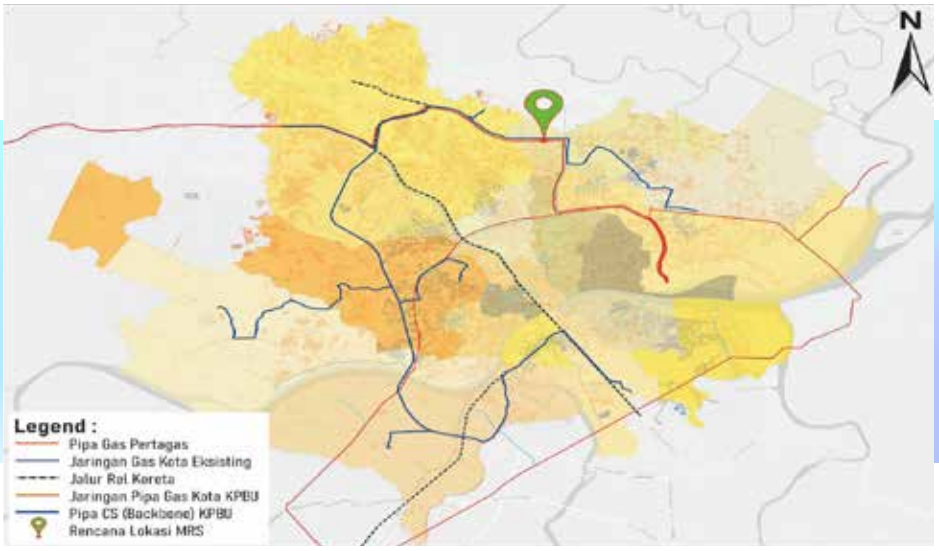

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pemerintah telah memberikan persetujuan atas Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU Pembangunan Jaringan Distribusi Gas untuk Rumah Tangga Kota Palembang pada tanggal 7 September 2021 yang merupakan respons dari Surat Permohonan Pengajuan Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek bersamaan dengan kota Batam pada tanggal 9 Juni 2021.

As previously explained, the Government approved the Project Development Facility and Implementation of PPP Project Transactions for the Construction of Household Gas Distribution Networks in Palembang on 7 September 2021, which is a response to the Application Letter to Request for Project Development Facility and Implementation of Project Transactions, together with Batam, on 9 June 2021.

INFORMASI PROYEK		INFORMASI PROYEK
PJPK GCA	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas)	Directorate General of Oil and Gas
Lokasi Proyek Project Location	Kota Palembang	Palembang
Skema Proyek Project Scheme	*Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer* (DBFOMT)	Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT)
Lingkup KPBU PPP Scope	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga	Development of Natural Gas Distribution Network Infrastructure for Households
Mekanisme Pengambilan Investasi Investment Return Mechanism	*User Charge*	User Charge
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp3,21 triliun	Rp3.21 trillion
Masa Kerja Sama Collaboration Period	30 tahun	30 years
Tahapan Phase	• Penyunan Dokumen Prastudi Kelayakan Awal Proyek • *Market Sounding* I	• Preparation of Preliminary Project Feasibility Study • Market Sounding I

Pada tanggal 10 Juni 2022, Kementerian Keuangan dan PJPK menandatangani Kesepakatan Induk bersamaan dengan proyek jaringan gas Batam. Namun dikarenakan proses kajian dan penyusunan regulasi nasional hanya dimasukkan dalam PDF jaringan gas Batam, jaringan gas Palembang mengalami penundaan dan akhirnya diberikan amandemen Kesepakatan Induk pada tanggal 3 November 2022 disusul dengan KMK pada 28 November 2022. Amandemen ini membuat jaringan gas Palembang memiliki periode 48 bulan untuk tahapan penyiapan dan transaksi. Proyek Palembang diharap dapat berjalan parallel namun tetap mengacu pada hasil penyusunan regulasi di proyek jaringan gas Batam. Saat ini proyek sedang dalam tahapan penyusunan Dokumen Prastudi Kelayakan Awal Proyek dan rencana pelaksanaan *Market Sounding* tahap I.

On 10 June 2022, the Ministry of Finance and GCA signed a Master Agreement in conjunction with the Batam gas network project. However, due to the process of reviewing and drafting national regulations, the only city included is Batam. Palembang gas network experienced delays. Finally, an Amendment to the Master Agreement on 3 November 2022 was issued, followed by KMK on 28 November 2022. The amendment means that Palembang gas network has a 48-month period for the project development facility. The Palembang project is hoped to be carried out in parallel with Batam gas network project, with due regards to the the results of the preparation of regulations. The project is currently preparing the Project Pre-Feasibility Study Document and the plan for the Phase I Market Sounding.

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
MANAGEMENT OF STATE-OWNED ASSETS (BMN)

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur maka status Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara (IKN) setelah ditetapkannya UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pemindahan Ibu Kota Negara tersebut tidak lantas menjadikan Jakarta ditinggalkan begitu saja tetapi Jakarta harus mempunyai rencana besar yang dituangkan dalam Penyiapan Kajian *Grand Design* Kota Jakarta sekaligus untuk mengantisipasi dampak tidak terutilisasinya gedung/bangunan pemerintahan/aset BMN pasca pemindahan IKN dan agar terjadi optimalisasi peningkatan nilai aset BMN yang pada akhirnya dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan proyek KPBU IKN sekaligus mewujudkan visi Jakarta sebagai Kota Bisnis Berskala Global yang Berketahanan Berbasis Transit dan Digital.

Moving the capital from Jakarta to the Nusantara in North Penajam Paser, East Kalimantan, means that Jakarta will no longer be the State Capital (IKN) after the enactment of Law No. 3 of 2022 on the State Capital. The relocation of the State Capital does not mean that Jakarta is simply abandoned, but Jakarta must have a big plan outlined in the Preparation of the Grand Design Study for the Jakarta City. This is also to anticipate the impact of non-utilization of government buildings/state assets after the transfer of IKN and to optimize the increase in the value of BMN assets, which in turn can provide support for the IKN PPP project while realizing Jakarta's vision as a Resilient Transit-Based and Digital Global Business City.

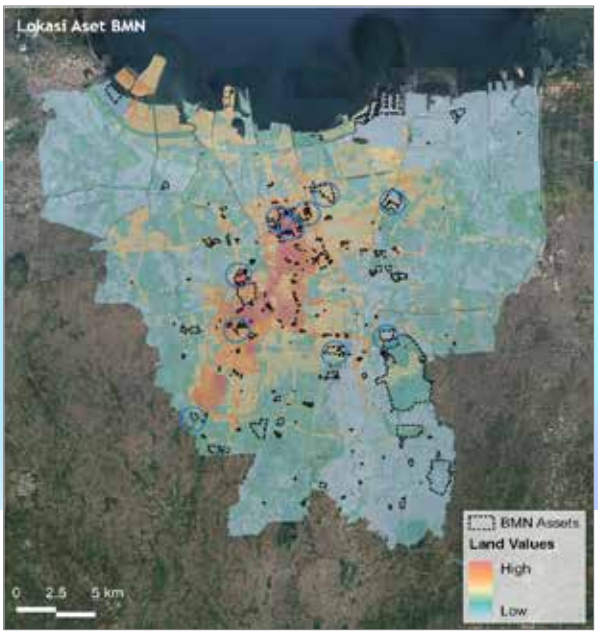

Bahwa berdasarkan KMK No. 48/KM.8/2023 tentang Penugasan Khusus kepada PT PII untuk melaksanakan Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau Pemindahtanganan BMN dalam Rangka Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara, saat ini PT PII sedang melakukan Penyiapan Kajian *Grand Design* Kota Jakarta merupakan bagian atau tahap awal dari Fasilitas PDF tersebut.

Based on KMK No. 48/KM.8/2023 on the Special Assignment to IIGF, to carry out Project Development Facility for the Use of State Property and/or Transfer of BMN for the Preparation, Development, and Relocation of the State Capital, IIGF is Preparing the Jakarta City Grand Design Study in its initial stage of the PDF Facility.

INFORMASI PROYEK		PROJECT INFORMATION
PJPK GCA	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Director General of State Assets Management
Lokasi Proyek Project Location	Jakarta	Jakarta
Estimasi Masa Kerja Sama Estimated Collaboration Period	10 tahun	10 years
Tahapan Phase	Penyiapan Kajian Grand Design Kota Jakarta	Preparation of the Grand Design Study for Jakarta City
Persetujuan Fasilitas Facility Approval	21 Februari 2023	21 February 2023
KMK KMK	24 Maret 2023	24 March 2023
Perjanjian Penugasan Assignment Agreement	31 Mei 2023	31 May 2023
Perjanjian Pelaksanaan Implementation Agreement	6 Juni 2023	6 June 2023

PEMBANGUNAN SPAM KABUPATEN KARO
SPAM KARO REGENCY

Pemerintah Kabupaten Karo saat ini berupaya untuk meningkatkan penyediaan akses air minum untuk mengintegrasikan prioritas pembangunan infrastruktur air minum nasional. Pemerintah Kabupaten Karo telah menetapkan capaian yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ("RPJMD") Kabupaten Karo tahun 2022-2026 yaitu memperluas cakupan pelayanan SPAM dengan peningkatan maupun pembangunan baru serta pengelolaan aset secara efektif guna menurunkan tingkat kehilangan air hingga di bawah 25%. Sebagai upaya untuk meningkatkan penyediaan akses air minum yang selaras dengan prioritas pembangunan infrastruktur air minum nasional, saat ini Pemerintah Kabupaten Karo memiliki rencana untuk memperluas cakupan pelayanan SPAM melalui Proyek KPBU SPAM Kabupaten Karo.

Karo Regency Government is currently working to increase the provision of access to drinking water to integrate national drinking water infrastructure development priorities. The Karo Regency Government has determined the achievements contained in the 2022-2026 Karo Regency Medium-Term Development Plan ("RPJMD"), i.e., expanding the scope of SPAM services with improvements and new developments as well as effective asset management to reduce the level of water loss to below 25%. As an effort to increase the provision of drinking water access, in line with national drinking water infrastructure development priorities, the Karo Regency Government has plans to expand the SPAM services by means of SPAM Karo Regency PPP Project.

INFORMASI PROYEK		PROJECT INFORMATION
PJPK GCA	Perusahaan Umum Daerah Air Minum ("Perumdam") Tirta Malem berdasarkan Penugasan Pemerintah Kabupaten Karo	Regional Public Water Company ("Perumdam") Tirta Malem based on Assignment of Karo Regencial Government
Lokasi Proyek Project Location	Kabupaten Karo	Karo Regency
Skema Proyek Project Scheme	*Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer* (DBFOMT)	Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT)

Lingkup KPBU PPP Scope	• Hulu: DBFOMT *(Design-Build-Finance-Operation-Maintenance-Transfer)*; • Hilir: DBFT (*Design-Build-Finance-Transfer*); • Unit Pelayanan: BFT (Penggantian *water meter* pelanggan eksisting).	• Upstream: DBFOMT (Design-Build-Finance-Operation-Maintenance-Transfer); • Downstream: DBFT (Design-Build-Finance-Transfer); • Service Unit: BFT (Replacement of existing customer water meters).
Mekanisme Pengambilan Investasi Investment Return Mechanism	*User Tariff (Take or Pay)*	User Tariff (Take or Pay)
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp200-250 miliar	Rp200-250 billion
Masa Kerja Sama Estimated Collaboration Period	25 tahun	25 years
Tahapan Phase	Penyiapan Proyek	Project Preparation

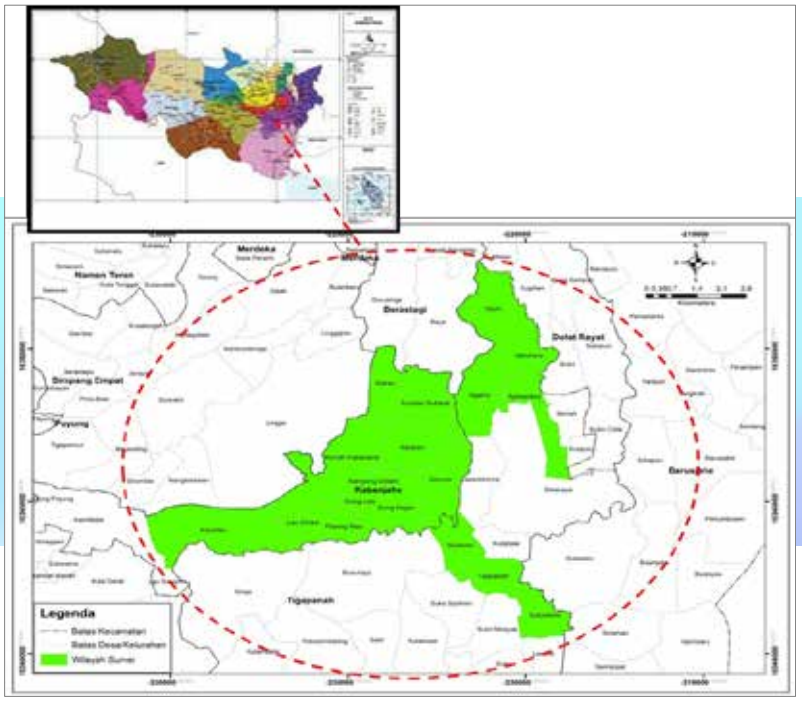

Pada tanggal 21 Februari 2023, Kementerian Keuangan menyetujui Fasilitas PDF untuk Proyek sebagai respons atas surat Permohonan PDF yang telah dikirimkan oleh PJPK. Pada tanggal 5 Juni 2023 Kementerian Keuangan dan PJPK menandatangani Kesepakatan Induk. Sejak diterbitkannya KMK Penugasan pada tanggal 19 Juni 2023, PT PII secara resmi ditugaskan oleh Kementerian Keuangan untuk memberikan Pendampingan Penyiapan dan Transaksi Proyek KPBU SPAM Kabupaten Karo. Selanjutnya, telah dilaksanakan

On 21 February 2023, the Ministry of Finance approved the Request for PDF for the Project in response to the PDF Request letter which had previously been sent by the GCA. On 5 June 2023, the Ministry of Finance and GCA signed a Master Agreement. Since the issuance of the KMK on Assignment on 19 July 2023, IIGF was officially assigned by the Ministry of Finance to provide Assistance in the SPAM Karo Regency PPP Project. Further, an assignment agreement was signed between the Ministry of Finance and IIGF on 1 August 2023,

penandatanganan perjanjian penugasan antara Kementerian Keuangan dan PT PII pada tanggal 1 Agustus 2023 dan perjanjian pelaksanaan antara PT PII dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Malem Kabupaten Karo selaku PJPK pada tanggal 2 Agustus 2023. Status proyek saat ini dalam proses penyusunan Prastudi Kelayakan dan persiapan kegiatan Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*). Perumdam Tirta Malem saat ini juga sedang dalam proses menjalankan beberapa program (program penyehatan) dalam rangka peningkatan kinerja Perumdam dengan tujuan menjadi "SEHAT" di tahun 2026.

and an implementation agreement between IIGF and the Tirta Malem Karo Public Company for Drinking Water (Perumdam) as GCA on 2 August 2023. The project is currently preparing the Pre-Feasibility Study and Market Sounding activities. Perumdam Tirta Malem is currently in the process of running several restructuring programs to improve Perumdam's performance with the aim of becoming "SEHAT" in 2026.

KAPAL RISET BADAN RISET DAN INOVASI (BRIN)

VESSEL RESEARCH BY THE RESEARCH AND INNOVATION AGENCY (BRIN)

Pada tanggal 26 September Tahun 2017, National Oceanic Research Consortium (NORC), atau Konsorsium Riset Samudra Nasional dibentuk dengan tujuan agar kegiatan penelitian kelautan di Indonesia dapat menjadi satu kesatuan dan terkoordinasi dengan baik. Konsorsium riset tersebut beranggotakan 11 institusi kementerian, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), dan beberapa Universitas. Konsorsium riset tersebut berkomitmen membangun kerjasama terkait program penelitian, pengembangan infrastruktur dan data kelautan. Untuk efisiensi dan efektivitas lembaga dan pembiayaan penelitian laut, kegiatan konsorsium riset dilakukan secara sinergis dan sistematis untuk menghasilkan program penelitian laut terpadu oleh semua pihak dengan mengaitkan interaksi antara laut dan atmosfer dengan dampak perubahan iklim. Oleh karenanya, sumber daya yang tersedia harus dikelola dengan baik dan terstruktur. Sumber daya yang dimaksudkan termasuk dalam dua kategori utama: (i) pusat data kelautan nasional sebagai tempat penyimpanan dan pertukaran data di sektor kelautan, dan (ii) kapal penelitian yang baru dibangun atau kapal yang ada dan peralatan penelitian yang telah dimodernisasi. Konsorsium riset juga berkomitmen merumuskan *roadmap* penelitian kelautan berdasarkan Rencana Induk Riset Nasional 2045 yang mencakup pengembangan sumber daya penelitian dan penguatan lembaga penelitian di sektor kelautan.

On 26 September 2017, the National Oceanic Research Consortium (NORC) was established the aim of integrating and better coordinating marine research activities in Indonesia. The research consortium consists of 11 ministerial institutions, non-ministerial government institutions (LPNK), and several universities. The research consortium is committed to establishing collaboration related to research programs, infrastructure development, and marine data. For the efficiency and effectiveness of marine research institutions and funding, research consortium activities are carried out synergistically and systematically to produce an integrated marine research program by all parties, by integrating the interaction between the ocean and the atmosphere with the impacts of climate change. Therefore, available resources must be well managed and well structured. The resources fall into two main categories: (i) national marine data centers as a place for storing and exchanging data in the marine sector, and (ii) newly built or existing research vessels and modernized research equipment. The research consortium is also committed to formulating a marine research roadmap based on the 2045 National Research Master Plan, which includes developing research resources and strengthening research institutions in the marine sector.

Untuk memenuhi kebutuhan riset tersebut, diperlukan modernisasi dan penambahan armada kapal dan fasilitas riset kelautan yang ada. Selain itu perlu adanya peningkatan dalam hal pengelolaan armada kapal dan kegiatan riset di bidang kelautan. Pemenuhan kebutuhan tersebut akan dilakukan dengan skema KPBU.

To fulfill these needs, modernization and additions to the existing fleet of ships and marine research facilities are required. Furthermore, there needs to be improvements in terms of ship fleet management and research activities in the maritime sector. The needs will be fulfilled by using a PPP scheme.

INFORMASI PROYEK

PROJECT INFORMATION

PJPK GCA	Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional	Head of the National Research and Innovation Agency
Lokasi Proyek Project Location	Sesuai wilayah operasi (*mobile*) di seluruh wilayah Indonesia	In accordance with the operational areas (mobile) throughout Indonesia
Skema Proyek Project Scheme	*Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer* (DBFOMT)	Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT)
Lingkup KPBU PPP Scope	1. Pembangunan dan pengelolaan kapal riset baru sebanyak 2 kapal; 2. Pengelolaan kapal riset baru berupa 1 Kapal Litoral dan 1 Kapal Penjelajah Samudera yang pengadaanya masih berproses dengan skema Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN); 3. Penyelenggaraan *Fleet Management Unit* ("FMU") sebagai suatu unit yang akan melaksanakan pengelolaan kapal riset baru ataupun eksisting; dan 4. Pengembangan bisnis riset industri pesisir, laut, dan samudera berbasis kapal riset dalam aspek membantu pemasaran yang dilakukan oleh BRIN.	1. Construction and management of 2 new research vessels; 2. Management of new research vessels in the form of 1 Littoral Ship and 1 Ocean Explorer Ship, of which the procurement is under process using the Foreign Loan/Grant (PHLN) scheme; 3. Fleet Management Unit ("FMU") as a unit that will manage new or existing research vessels; and 4. Development of the coastal, sea, and ocean research business based on research vessels in the aspect of helping marketing carried out by BRIN.
Mekanisme Pengambilan Investasi Investment Return Mechanism	*Availability Payment*	Availability Payment
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp3,8 triliun	Rp3.8 trillion
Masa Kerja Sama Estimated Collaboration Period	20 tahun	20 years
Tahapan Phase	Penyiapan Proyek (Penyusunan Laporan Insepsi Proyek)	Project Preparation (Preparation of Inception Report)

Pada tanggal 29 Agustus 2023, Kementerian Keuangan dan PJPK bersama-sama menandatangani Kesepakatan Induk Proyek Kapal Riset BRIN. KMK Penugasan kepada PT PII diperoleh pada tanggal 31 Agustus 2023 yang kemudian dilakukan penandatanganan Perjanjian Penugasan dan Perjanjian Pelaksanaan pada tanggal 28 Desember 2023. Status proyek saat ini sedang dalam tahapan proses penyusunan Laporan Awal Kajian Akhir Prastudi Kelayakan (BC).

On 29 August 2023, the Ministry of Finance and GCA jointly signed the BRIN Research Vessel Project Master Agreement. The KMK Assignment to IIGF was obtained on 31 August 2023, followed by the signing of the Assignment Agreement and Implementation Agreement on 28 December 2023. The project is currently in the process of preparing the Preliminary Pre-Feasibility Study (BC) Final Study Report.

PEMBANGUNAN SPAM KOTA DENPASAR
CONSTRUCTION OF DENPASAR SPAM

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Sewakadarma menyediakan layanan penyediaan air minum ke wilayah Tabanan dan Denpasar. Pada tahun 1971 melalui bantuan dari Pemerintah Australia di bawah '*Colombo Plan*' telah dibangun jaringan fasilitas pasokan air, dan pada tahun 1975 juga dilakukan pemasangan sebagian besar pipa di jaringan PDAM. Namun, sejak saat itu belum ada peningkatan pembangunan jaringan air minum dan saat ini usia jaringan pipa tersebut sudah tua.

Tirta Sewakadarma Public Drinking Water Company (PERUMDAM) provides drinking water supply services to the Tabanan and Denpasar areas. In 1971, with the assistance from the Australian Government under the 'Colombo Plan', a network of water supply facilities was built, and in 1975, most of the pipes in the PDAM network were installed. However, since then, there has been no further development of the drinking water network and the pipe network is now old.

Seiring dengan terus meningkatnya jumlah bangunan dan pemukiman di kota Denpasar telah memperburuk masalah pasokan air minum. Pada tahun 2021, air minum yang dipasok PDAM hanya mampu memenuhi kebutuhan air minum sebanyak 67,91% dari jumlah penduduk atau sebanyak 493.433 jiwa dari total penduduk sebanyak 726.599. Selain itu, proporsi air tidak berekening/*Non-Revenued Water* (NRW) juga relatif tinggi.

As the number of buildings and residential in Denpasar continues to increase, has further worsened the issue of clean water supply. In 2021, drinking water supplied by PDAM was able to meet the drinking water needs of 67.91% of the total population or 493,433 people out of a total population of 726,599. In addition, the proportion of Non-Revenued Water (NRW) is also relatively high.

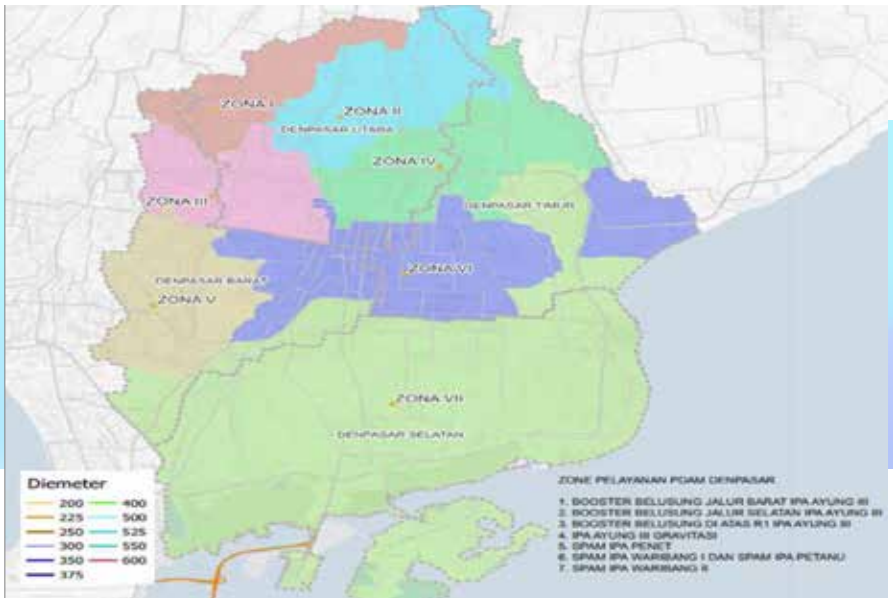

Maka dari itu, Pemerintah Kota Denpasar selaku PJPK Ultimate dan Perumdam Tirta Sewakadarma selaku PJPK mendorong pelaksanaan Proyek SPAM Kota Denpasar untuk mengatasi permasalah air minum yang ada di Kota Denpasar. Proyek tersebut masuk dalam RPJMD Denpasar 2021-2026 dalam perwujudan pengembangan prasarana penyediaan air minum melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan SPAM perpipaan dan non perpipaan.

Therefore, the Denpasar Municipal, as the Ultimate GCA, and Perumdam Tirta Sewakadarma, as the GCA, encourage the Denpasar SPAM Project to overcome drinking water problems in Denpasar City. This project is included in the 2021-2026 Denpasar RPJMD to actualize the development of drinking water supply infrastructure through improving and equalizing piped and non-piped SPAM services.

INFORMASI PROYEK

PROJECT INFORMATION

PJPK GCA	Walikota Denpasar	Mayor of Denpasar
Lokasi Proyek Project Location	Kota Denpasar	Denpasar City
Skema Proyek Project Scheme	*Design-Build-Finance-Maintenance-Transfer* (DBFMT)	Design-Build-Finance-Maintenance-Transfer (DBFMT)
Lingkup KPBU PPP Scope	Bagian Unit Produksi • Penyempurnaan IPA dan Sumur Bor; • *Monitoring* dan *Control* Zona Air Minum Prima (ZAMP) untuk peningkatan kualitas air layak minum, kuantitas dan kontinuitas pelayanan. Bagian Unit Distribusi dan Pelayanan • Revitalisasi Aset untuk Penurunan Kehilangan Air (NRW); • Pengembangan Unit Distribusi (Perluasan Pelayanan). * Direncanakan untuk dapat menyediakan layanan *Drinkable Water*	Production Unit: • Improvement of IPA and Well Drilling; • Monitoring and Controlling the Prime Drinking Water Zone (ZAMP) to improve the quality, quantity, and continuity of service of drinking water. Distribution and Service Unit: • Asset Revitalization to Reduce Water Loss (NRW); • Distribution Unit Development (Service Expansion). * Planned to provide Drinkable Water services
Mekanisme Pengambilan Investasi Investment Return Mechanism	*Revenue Sharing*	Revenue Sharing
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp808,67 miliar	Rp808.67 billion
Masa Kerja Sama Estimated Collaboration Period	20 tahun termasuk masa konstruksi 4 tahun	20 years, including a 4-year construction period
Tahapan Phase	Penyiapan	Preparation

Pada tanggal 23 Oktober 2023, Kementerian Keuangan dan PJPK bersama-sama telah melakukan penandatanganan Kesepatakan Induk Proyek KPBU SPAM Kota Denpasar. Kemudian sebagai tindak lanjut atas penandatanganan surat tersebut, pada tanggal 10 November 2023 Kementerian Keuangan menerbitkan KMK Penugasan di mana PT PII ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk melaksanakan PDF Proyek.

On 23 October 2023, the Ministry of Finance and GCA jointly signed the PPP Denpasar SPAM Project Master Agreement. As a follow-up to the signing of the letter, on 10 November 2023, the Ministry of Finance issued a KMK to Assign IIGF to implement the Project PDF.

RSUD KOTA DENPASAR
DENPASAR HOSPITAL

Kondisi RSUD Wangaya sebagai salah satu rumah sakit tertua di Bali dan membutuhkan peremajaan serta pengembangan pada layanan ruangan IGD & PONEK, IRI, poliklinik, OK, HD, radiologi, laboratorium, farmasi serta ruangan lainnya. Adapun Misi Kota Denpasar melalui RPJMD adalah Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Kesehatan dan Pendapatan Yang Berkeadilan. Melihat kondisi eksisting saat ini dan meninjau rencana pembangunan Kota Denpasar ke depan, RSUD Wangaya merencanakan pengembangan rumah sakit baik dari sisi bangunan fisik rumah sakit yang sesuai dengan regulasi terkini serta penambahan fasilitas pelayanan kesehatan serta peningkatan pelayanan. Terbatasnya APBD Kota Denpasar, mendorong Pemerintah Kota Denpasar untuk coba menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Denpasar pada khususnya dan Provinsi Bali pada lingkup yang lebih luas.

The Wangaya Hospital as one of the oldest hospitals in Bali requires rejuvenation and development in the emergency room & PONEK, IRI, polyclinic, OK, HD, radiology, laboratory, pharmacy, and others. Denpasar's Mission via the RPJMD is to Enhance the Prosperity of the Denpasar Community by Improving the Quality of Health Education Services and Equitable Income. Assessing current conditions and reviewing the development plan of Denpasar in the future, Wangaya Hospital plans to develop the hospital both in terms of the physical building of the hospital in accordance with the latest regulations, and add health service facilities and service improvement. Denpasar's limited budget encourages the Denpasar Municipal to use Public Private Partnership (PPP) scheme in order to provide better health services for the people of Denpasar in particular and Bali Province at a wider scope.

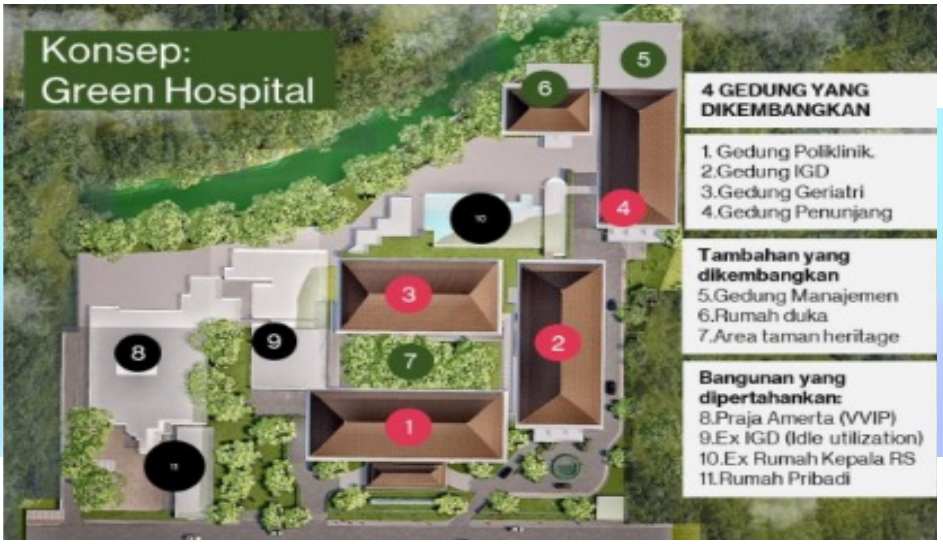

INFORMASI PROYEK / PROJECT INFORMATION

PJPK GCA	Walikota Denpasar up Direktur BLUD RSUD Wangaya	Denpasar Mayor u.p. Director of BLUD Wangaya Hospital
Lokasi Proyek Project Location	Kota Denpasar	Denpasar City
Skema Proyek Project Scheme	*Design-Build-Finance -Maintain-Transfer* (DBFMT)	Design-Build-Finance -Maintain-Transfer (DBFMT)

Lingkup KPBU PPP Scope	• Pembangunan 6 Gedung RS Baru; • Pemeliharaan Gedung RS Baru dan Utilitas; • Sebagian operasional (Humas, *Marketing*, dan Promosi); • Kapasitas tempat tidur 249 TT (Eksisting 216 TT).	• Construction of 6 New Hospital Buildings; • Maintenance of New Hospital Buildings and Utilities; • Partly operational (PR, Marketing, and Promotion); • 249 bed capacity (currently, there are 216 bed capacity).
Mekanisme Pengambilan Investasi Investment Return Mechanism	Pengembalian lainnya (Area Komersil)	Other returns (Commercial Area)
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp586,869 miliar	Rp586.869 billion
Masa Kerja Sama Estimated Collaboration Period	20 tahun (termasuk 2 tahun konstruksi)	20 years (including 2 years construction)
Tahapan Phase	Penyiapan	Preparation

Pada tanggal 9 Februari 2024, Kementerian Keuangan menyetujui Fasilitas PDF untuk Proyek sebagai respons atas surat Permohonan PDF yang telah dikirimkan oleh PJPK. Pada tanggal 9 Juli 2024 Kemenkeu dan PJPK menandatangani Kesepakatan Induk. Pada tanggal 2 Agustus 2024 sudah diterbitkan KMK Penugasan RSUD Wangaya. Sehubungan dengan diterbitkannya PMK 68 tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dan/atau Skema Pembiayaan Lainnya pada tanggal 18 bulan Oktober tahun 2024 di mana PMK tersebut mencabut PMK No. 180 tahun 2020 maka saat ini sedang dilakukan proses adendum KMK Penugasan RSUD Wangaya.

On 9 February 2024, the Ministry of Finance approved the Request for PDF for the Project in response to the PDF Request letter which had previously been sent by the GCA. On 9 July 2024, the Ministry of Finance and GCA signed a Master Agreement. On 2 August 2024, the KMK for the assignment of Wangaya Local Hospital was issued. In connection with the issuance of PMK 68 of 2024 on Government Support for Infrastructure Financing through Public Private Partnership Scheme and/or Other Financing Schemes on 18 October 2024, the PMK revoked PMK No. 180 of 2020, an addendum to the KMK for the Assignment of RSUD Wangaya is currently being conducted.

PELAKSANAAN JASA KONSULTASI (*ADVISORY*)
CONSULTATION SERVICES (ADVISORY)

Di luar segmen usaha penjaminan dan PDF, PT PII telah mengembangkan segmen usaha baru di bidang jasa konsultasi (*advisory*) dengan peran utama menggali konsep dan peluang bisnis, baik dari sisi penugasan jenis baru maupun pelaksanaan jasa konsultasi. *Advisory* PT PII hadir untuk menjawab kebutuhan dan permintaan pemilik proyek maupun *stakeholders* terkait agar dapat memperoleh pendampingan PT PII sejak tahapan awal proyek serta penguatan analisis utamanya pada aspek struktur dan alokasi risiko yang menjadi added *value* Perseroan. Sebagai bentuk komitmen dan upaya persiapan internal Perseroan untuk dapat terjun dalam bidang *advisory*, PT PII kemudian menyusun suatu Kajian Kesiapan, baik dari sisi kompetisi maupun kompetensi, serta identifikasi pemenuhan persyaratan yang diperlukan agar dapat melaksanakan *advisory* secara optimal.

In addition to the guarantee and PDF business segments, IIGF has developed a new business segment in the field of consulting services (advisory) with the main role of exploring business concepts and opportunities, both in terms of new types of assignments and the consulting services. IIGF Advisory services are designed to meet the the needs and requests of project owners and related stakeholders, by providing support from the early stages of the project and to strengthen the main analysis particularly in the areas of risk structure and allocation, which become added value to the Company. As a form of commitment and internal preparation efforts by the Company to be able to enter the advisory sector, IIGF prepared a Feasibility Study, both in terms of competition and competency, as well as identified the fulfillment of the requirements needed to implement advisory service optimally.

Pada tahun 2021, PT PII mulai menjalankan kegiatan *advisory* melalui *pilot project* Pelabuhan New Palembang Tanjung Carat di mana Perseroan berperan sebagai "*Project Advisor*" melalui skema penunjukan langsung dari Kementerian Perhubungan c.q. Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan hasil keluaran berupa dokumen Identifikasi Proyek dan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kesiapan Data Dukung untuk Studi Pendahuluan Proyek dan Studi Pendahuluan Pelabuhan Tanjung Carat. Berikut merupakan beberapa kegiatan *advisory* lainnya yang telah dilakukan Perseroan pada 2021-2024, yakni:

1. Penyusunan Pedoman Kajian Pra Studi Kelayakan Proyek Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU;
2. Pendampingan Kementerian Perhubungan c.q. Dirjen Perhubungan Laut pada proses pengajuan dan perolehan penugasan *Project Development Facility* (PDF) Proyek KPBU Pelabuhan Tanjung Carat;
3. Pendampingan Kementerian Keuangan dalam penyusunan konsep dan penerbitan kerangka regulasi terkait penugasan fasilitasi bentuk baru dalam pengelolaan BMN di wilayah IKN Lama; dan
4. Jasa Konsultansi Proyek Pengembangan Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Batu Ampar melalui penyusunan kajian hukum & kelembagaan, analisis struktur, analisis risiko, dan mekanisme *de-risking* Proyek.
5. Selain itu, saat ini PDA dalam proses menggali beberapa potensi jasa pendampingan maupun kerjasama bentuk lainnya dengan pihak baik dari sisi BUMN maupun swasta.

In 2021, IIGF started advisory activities through the New Palembang Tanjung Carat Port pilot project where the Company acted as a "Project Advisor" through a direct appointment scheme from the Ministry of Transportation c.q. Director General of Sea Transportation, with the output in the form of Project Identification and Preparation of Supporting Data Readiness Evaluation Documents for Project Preliminary Studies and Tanjung Carat Port Preliminary Studies. The Company has carried out several other advisory activities in 2021-2024 as follows:

1. Preparation of Pre-Feasibility Study for Road and Bridge Projects using the PPP Scheme;
2. Assistance from the Ministry of Transportation c.q. Director General of Sea Transportation in the process of submitting and obtaining the Project Development Facility (PDF) assignment for the Tanjung Carat Port PPP Project;
3. Assistance to the Ministry of Finance in drafting concepts and issuing regulatory frameworks related to the assignment of new forms of BMN management facilitation in the Old IKN area; and
4. Consultation Services for the Container Terminal Development Project at Batu Ampar Port via preparation of legal & institutional studies, structural analysis, risk analysis, and Project de-risking mechanisms.
5. In addition, the PDA is currently exploring several potential mentoring services and other forms of cooperation with both state-owned and private parties.

SEGMEN PENGELOLAAN DANA
FUND MANAGEMENT

KEGIATAN OPERASI DAN USAHA PENGELOLAAN DANA
OPERATIONS AND FUND MANAGEMENT BUSINESS

Dalam segmen Pengelolaan Dana, Perseroan melakukan kegiatan penempatan dana pada instrumen keuangan yang telah ditetapkan dalam ketentuan, di antaranya meliputi instrumen investasi pasar uang dan obligasi dengan bobot penempatan yang dinamis dilakukan penyesuaian dengan kondisi pasar yang ada untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang optimal dengan risiko yang terukur.

In the Fund Management segment, the Company performs fund placement activities in financial instruments that have been stipulated in the provisions, including money market investment instruments, bonds and mutual funds, with dynamic placement weights adjusted to existing market conditions to obtain an optimal rate of return with measurable risks.

Adapun sumber pendapatan usaha PT PII berasal dari aktivitas penjaminan, penyiapan proyek dan pendampingan transaksi (*Project Development Facility*/PDF), serta dari aktivitas pengelolaan dana. Aktivitas pengelolaan dana ini merupakan pendukung proses kegiatan penjaminan dan PDF yang merupakan bisnis inti PT PII. Selain melakukan pengelolaan portofolio instrumen investasi, fungsi pengelolaan dana yang dilakukan meliputi pengelolaan likuiditas keuangan Perseroan dan menjaga kapasitas penjaminan oleh Perseroan.

The source of IIGF's business income comes from guarantee activities, Project Development Facility (PDF) transactions, as well as from fund management activities. This fund management activity supports the guarantee and PDF activity process, which is IIGF's core business. In addition to managing the investment instrument portfolio, the fund management function carried out includes managing the Company's financial liquidity and maintaining the Company's guarantee capacity.

KEBIJAKAN STRATEGIS DAN PRODUKTIVITAS PENGELOLAAN DANA
STRATEGIC POLICY AND FUND MANAGEMENT PRODUCTIVITY

Sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, PT PII melakukan penyesuaian strategi pengelolaan dana yang lebih adaptif.

Strategi Perseroan dalam pengelolaan dana dalam bentuk investasi adalah sebagai berikut:

1. Alokasi investasi sesuai Anggaran 2024 dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar Rp956 miliar, telah mengikuti sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam PMK No. 148/PMK.08/2022.
2. Mengoptimalkan penempatan pada Bank sesuai dengan kebijakan dan *limit* yang telah ditetapkan dengan terus memperhatikan kecenderungan pergerakan tingkat suku bunga.

Portofolio investasi Perseroan sampai dengan 31 Desember 2024 terdiri dari investasi atas deposito berjangka (48%) dan investasi atas pendapatan tetap (obligasi) (52%) dari total pengelolaan dana sebesar Rp16,4 triliun.

In line with the national economic recovery, IIGF adjusted its fund management strategy to be more adaptive.

The Company's strategy for managing funds in the form of investment is as follows:

1. Based on 2024 Budget, the investment allocation to achieve Key Performance Indicators (IKU) of Rp956 billion, has followed the provisions required in PMK No. 148/PMK.08/2022.
2. Optimizing placements with the Bank in accordance with established policies and limits with due regards to the trends in interest rate movements.

The Company's investment portfolio as of 31 December 2024 consists of investments in time deposits (44%) and investments in fixed income (bonds) (56%) from total managed funds of Rp16.4 trillion.

Grafik Portofolio Investasi Posisi 31 Desember 2024
Graph: Investment Portfolio on 31 December 2024

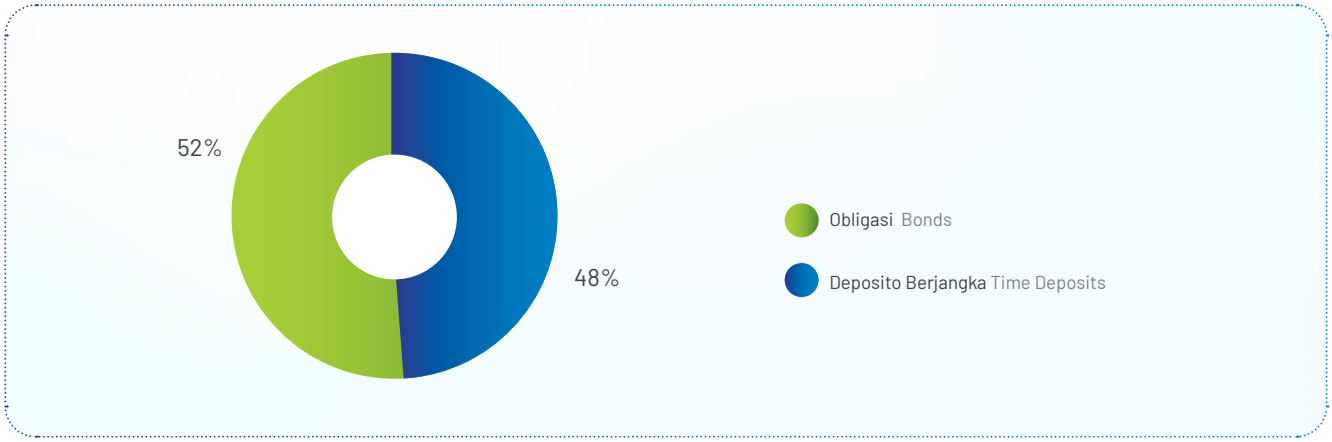

1. Investasi pada deposito berjangka
   Investasi dalam bentuk deposito pada setiap Bank Pemerintah tidak melebihi 25% dari jumlah modal Perseroan; dan pada setiap Bank di luar Bank Pemerintah tidak melebihi 10% dari jumlah modal Perseroan, di mana penempatan dilakukan pada Bank KBMI I, II, III dan IV dan dengan minimal peringkat AA.
2. Investasi pada pendapatan tetap
   Penempatan investasi pada obligasi pada setiap emiten untuk surat utang korporasi dan sukuk korporasi tidak melebihi 5% dari jumlah modal Perseroan dan seluruhnya tidak melebihi 20% dari jumlah modal Perseroan.

Pada bulan Oktober 2022, Pemerintah menerbitkan PMK 148/PMK.08/2022 tentang Ruang Lingkup Pengelolaan Penjaminan Pemerintah Oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) yang berlaku efektif pada tanggal 20 Oktober 2022. Dengan berlakunya PMK tersebut, maka PMK 95/PMK.08/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Seluruh penempatan investasi pengelolaan dana Perseroan per 31 Desember 2024 telah sesuai dengan batas koridor ketentuan yang dipersyaratkan dalam PMK No. 148/PMK.08/2022.

1. Investment in term deposits
   Investments in the form of deposits in each Government Bank shall not exceed 25% of the Company's total capital; and at each Bank other than Government Banks shall not exceed 10% of the Company's total capital, where placements are made in Bank KBMI I, II, III, and IV and with a minimum of AA rating.
2. Investment in fixed income
   Investment in bonds with each issuer for corporate debt securities and corporate *sukuk* shall not exceed 5% of the Company's total capital and in total shall not exceed 20% of the Company's total capital.

In October 2022, the Government issued PMK 148/PMK.08/2022 on the Scope of Sovereign Guarantee Management by Infrastructure Guarantee Business Entity, which became effective on 20 October 2022. With the enactment of the PMK, PMK 95/PMK.08/2017 is revoked and declared invalid.

All investments managed by the Company's funds as of 31 December 2024 are in accordance with the limits stipulated in the PMK No. 148/PMK.08/2022.

SEGMEN LAINNYA
OTHER SEGMENTS

Dalam rangka mendukung pengembangan ekosistem infrastruktur, PT PII juga terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman terkait penyediaan proyek infrastruktur di Indonesia, sehingga PT PII dapat mewujudkan visinya untuk menjadi BUMN penggerak utama yang aktif dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

To support the infrastructure ecosystem development, IIGF strives to increase understanding regarding the provision of infrastructure projects in Indonesia. Therefore, IIGF can actualize its vision to become a key SOE that is active in accelerating sustainable infrastructure development to improve the quality of life of the Indonesian people.

Dampak positif dari kebijakan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui skema pembiayaan alternatif mulai terlihat dengan meningkatnya partisipasi investor swasta dalam penyediaan infrastruktur. Namun demikian, keterbatasan pengetahuan dan kapasitas para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan menjadi tantangan tersendiri untuk penyediaan infrastruktur, khususnya yang menggunakan skema alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Oleh karena itu, PT PII menjadikan upaya pengembangan ekosistem infrastruktur sebagai salah satu pilar utama kegiatan Perseroan melalui pembentukan IIGF Institute. Inisiatif strategis ini merupakan upaya PT PII untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan melalui diseminasi pemahaman, perencanaan, dan pelaksanaan penyediaan infrastruktur dengan skema KPBU.

The positive impact of the Government's policy to accelerate infrastructure development through alternative financing schemes can be seen with the increasing participation of private investors in providing infrastructure. However, limited knowledge and capacity of stakeholders and policymakers are several challenges in providing infrastructure, especially those using alternative schemes such as Public Private Partnership (PPP). Therefore, IIGF strives to develop the infrastructure ecosystem as one of the main pillars of the Company's activities by establishing the IIGF Institute. This strategic initiative is IIGF's effort to enhance stakeholder capacity through dissemination of understanding, planning, and implementation of infrastructure provision using the PPP scheme.

IIGF Institute memiliki peran sebagai *think tank* Perseroan, dan memiliki visi utama untuk menciptakan ekosistem pembangunan infrastruktur yang lebih baik melalui dukungan program kegiatan edukasi dan riset berkualitas dengan mitra strategis sehingga dapat mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk merealisasikan visi tersebut, kegiatan IIGF Institute berfokus pada Edukasi, Riset dan Publikasi, Advokasi Kebijakan dan *Outreach*.

IIGF Institute has a role as the Company's think tank, and has a main vision to create a better infrastructure development ecosystem through the support of quality educational and research activity programs with strategic partners to encourage infrastructure development in Indonesia. The IIGF Institute's activities focus on Education, Research, Publications, Policy Advocacy, and Outreach to actualize this vision.

EDUKASI
EDUCATION

Beberapa program edukasi yang dijalankan oleh PT PII melalui IIGF Institute antara lain *Capacity Building* secara berkala kepada stakeholder melalui *Advanced Learning Program* (ALP) serta penyelenggaraan program sertifikasi *Certified* PPP *Professional* (CP3P) yang bertujuan untuk menyebarkan

IIGF carries out several educational programs via IIGF Institute, which include regular Capacity Building for stakeholders through the Advanced Learning Program (ALP) and the Certified PPP Professional (CP3P) certification programs which aims to disseminate information and provide learning materials

informasi serta menyediakan materi pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan pemangku kepentingan terkait dengan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur, khususnya terkait pembiayaan kreatif.

to increase stakeholders' knowledge related to alternative financing for infrastructure development, especially related to creative financing.

Untuk menjalankan kegiatan *Capacity Building*, IIGF *Institute* berkolaborasi dengan Divisi *Guidance and Consultation* yang memegang peran penting sebagai fungsi terdepan dalam berhubungan dengan PJPK dan calon PJPK serta Divisi lain yang mendukung proses bisnis PT PII dalam hal pendampingan proyek. Selain dengan pihak internal, IIGF *Institute* juga menjadi fasilitator pelaksana *capacity building* Kantor Bersama KPBU bekerja sama dengan pihak eksternal di antaranya, dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas serta mitra akademik nasional maupun daerah yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait dengan proyek yang direncanakan.

To carry out the Capacity activities, the IIGF Institute collaborates with the Guidance and Consultation Division, which plays an important role as the leading function in dealing with GCAs and prospective GCAs, and other Divisions that support IIGF's business processes in terms of project assistance. In addition to the internal parties, the IIGF Institute is also a facilitator for capacity building at PPP Joint Office in collaboration with external parties, including the Ministry of National Development Planning/Bappenas and national and regional academic partners who have knowledge or experience related to the planned project.

Hingga akhir tahun 2024, IIGF Institute telah menyelenggarakan kegiatan *Capacity Building* (CB) secara tatap muka dengan total 608 peserta yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sebagai berikut:

As of the end of 2024, IIGF Institute held face-to-face Capacity Building (CB) activities with a total of 608 participants in various activities as follows:

No.	Tanggal Date	Nama Kegiatan Activity Name	Jumlah Peserta Participant
1.	5 - 6 Februari 2024 5-6 February 2024	CB TALP Proyek RSUD Wangaya dan SPAM Kota Denpasar CB TALP of Wangaya Hospital and SPAM Project in Denpasar	20
2.	14 - 15 Maret 2024 14-15 March 2024	CB Bimbingan Teknis KPBU dalam Pembangunan Infrastruktur Indonesia CB Technical Guidance on PPP in Indonesia's Infrastructure Development	30
3.	21 Maret 2024 21 March 2024	CB Sosialisasi Potensi Pembiayaan Daerah DJPb Pekanbaru CB Socialisation of Pekanbaru DJPb Local Financing Potential	30
4.	26 Maret 2024 26 March 2024	CB KPBU dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) CB PPP National Research and Innovation Agency (BRIN)	40
5.	7 Mei 2024 7 May 2024	CB Sosialisasi KPBU dengan Pemerintah Kabupaten Boalemo, Gorontalo CB PPP Socialisation with Boalemo Regencial Government, Gorontalo	15
6.	5 Juni 2024 5 June 2024	CB Sosialisasi KPBU dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah CB PPP Socialisation with National Committee for Sharia Economy and Finance	5
7.	6 Juni 2024 6 June 2024	CB Sosialisasi KPBU dengan Kantor Wilayah DJKN Sulseltrabar (inisiatif Kemenkeu Satu) CB PPP Socialisation with DJKN Sulseltrabar Regional Office (Ministry of Finance's One initiative)	30
8.	4 - 5 Juli 2024 4-5 July 2024	CB Sosialisasi KPBU dengan Dit. Pembiayaan Syariah, DJPPR, Kemenkeu CB PPP Socialisation with Dit. Sharia Financing, DJPPR, MoF	22
9.	18 - 19 Juli 2024 18-19 July 2024	CB TALP untuk Proyek APJ Denpasar CB TALP for APJ Denpasar Project	15
10.	24 Juli 2024 24 July 2024	CB Persiapan Implementasi KPBU Skema Syariah Proyek RSUD Kota Ternate CB Preparation of PPP Implementation of Sharia Scheme for Ternate Hospital Project	35

No.	Tanggal Date	Nama Kegiatan Activity Name	Jumlah Peserta Participant
11.	20 - 21 Agustus 2024 20-21 August 2024	CB TALP Bimtek APIP Kota Denpasar CB TALP Bimtek APIP Denpasar	35
12.	28 - 29 Agustus 2024 28-29 August 2024	CB Sosialisasi KPBU dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan CB PPP Socialisation with South Kalimantan Provincial Government	40
13.	11 - 12 September 2024 11 - 12 September 2024	CB Edusos Keuangan Syariah dan Pembiayaan Kreatif di Kota Medan CB Social Education on Sharia Finance and Creative Financing in Medan	60
14.	19 September 2024 19 September 2024	CB Sosialisasi KPBU Melalui Skema Pengembalian Investasi AP Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur CB PPP Socialisation through AP Return on Investment Scheme with East Java Provincial Government	35
15.	1 November 2024 1 November 2024	CB Sosialisasi KPBU dengan PUPR dan PDAM Tirta Boalemo CB PPP Socialisation with PUPR and PDAM Tirta Boalemo	40
16.	26 November 2024 26 November 2024	CB Sosialisasi KPBU dengan PT Baja Titian Utama CB PPP Socialisation with PT Baja Titian Utama	36
17.	11 Desember 2024 11 December 2024	CB Sosialisasi KPDBU dalam Penyediaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang CB PPP Socialisation in infrastructure provision within Batang Regency Government	50
18.	17 Desember 2024 17 December 2024	CB Sosialisasi Alternatif Pembiayaan Melalui Skema KPBU untuk Mendorong Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Jawa Tengah dengan Unit Vertikal Kemenkeu - DJKN DIY dan Jawa Tengah CB Socialisation of Alternative Financing via PPP Scheme to Encourage Infrastructure Development in Central Java Region with Vertical Units of Ministry of Finance - DJKN Special Region of Yogyakarta and Central Java	100

Sejalan dengan semakin berkembangnya pihak pemangku kepentingan serta *pipeline* proyek yang dijamin oleh PT PII saat ini dan kedepannya, dipandang perlu adanya standarisasi kurikulum dan materi yang disampaikan sehingga menjadi acuan bagi penyampai materi pada kegiatan *Capacity Building* yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam rangka mendukung hal tersebut, sejak tahun 2023 IIGF *Institute* telah menyusun dan mengembangkan kurikulum *Capacity Building Targeted Active Learning Program* (TALP) untuk beberapa sektor yang dapat dijadikan referensi dalam penyelenggaraan kegiatan *Capacity Building* bagi para pemangku kepentingan. Adapun kurikulum yang telah disusun di tahun 2024 ini yaitu terkait sektor persampahan, sektor kesehatan, dan sektor konservasi energi khususnya untuk mendukung proyek Alat Penerangan Jalan. Hal ini diperlukan untuk mendukung *delivery system* sehingga dapat memastikan kualitas dan efektivitas *delivery* dari modul terjaga sesuai dengan tingkat kapasitas *stakeholder*, sasaran, dan kebutuhan spesifik dari *Capacity Building*.

In line with the growing number of stakeholders and the pipeline of projects guaranteed by IIGF now and in the future, it is deemed necessary to standardize the curriculum and material presented to be the reference for delivering material in Capacity Building activities tailored to the needs. Therefore, since 2023, IIGF Institute has compiled and developed a Targeted Active Learning Program (TALP) Capacity Building curriculum for several sectors that can be used as a reference in organizing Capacity Building activities for stakeholders. The curriculum in 2024 was prepared in relation to the waste sector, the health sector, and the energy conservation sector, especially to support the Street Lighting project. This is necessary to support the delivery system to ensure that the quality and effectiveness of the delivery of the module is maintained in accordance with the capacity level of stakeholders, targets, and specific needs of Capacity Building.

Selain kegiatan *capacity building*, IIGF Institute juga berupaya meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan di bidang infrastruktur guna memastikan tercapainya peningkatan kapasitas ekosistem infrastruktur atas skema KPBU.

Sejak tahun 2019, IIGF Institute telah resmi menjadi *Accredited Training Organization* (ATO) untuk *Certified* PPP *Professional* (CP3P) dari *Accredited Professional Manager Globally* (APMG) *International*. Program CP3P merupakan program sertifikasi kompetensi KPBU berstandar internasional yang dikembangkan oleh World Bank Group (WBG) bersama Asian Development Bank (ADB), European Bank of Reconstruction and Development (EBRD), Islamic Development Bank (IsDB), dan Inter-American Development Bank (IDB) dan sebagian didanai oleh Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF).

Program inovasi dari Multi-Development Banks (MDBs) tersebut memiliki visi bersama yaitu untuk mencapai peningkatan kinerja PPP secara global. Pelaksanaan program CP3P bertujuan untuk membekali individu, para pemangku kepentingan, serta para profesional mengenai praktik-praktik internasional terbaik KPBU. Para peserta yang telah mengikuti program tersebut diharapkan dapat memahami *framework* KPBU yang lebih optimal, meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan proyek KPBU yang berkualitas, meningkatkan kapabilitas dalam hal pendampingan penyiapan proyek serta mendapatkan peluang untuk mengembangkan bisnis pada proyek KPBU.

Program Sertifikasi CP3P dapat diikuti oleh kalangan umum dari berbagai disiplin ilmu ataupun sektor, terutama bagi para praktisi/profesional KPBU di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Praktisi KPBU, Investor, Operator dan Lembaga Keuangan, serta Konsultan (Keuangan, Hukum, dan Teknis) yang ingin memperoleh kredensial KPBU yang dapat diakui secara global.

Pada tahun 2024, ATO PT PII telah melaksanakan 5 program sertifikasi CP3P Level Foundation, 3 program sertifikasi CP3P *Level Preparation*, dan 1 program Sertifikasi CP3P Level Execution yang diikuti oleh total 101 peserta dari berbagai instansi baik Pemerintah Pusat, Badan Usaha/ Swasta, dan Konsultan dengan tingkat kelulusan rata-rata seluruh batch yaitu 89%. Pelaksanaan *course* dan ujian tahun 2024 dilaksanakan secara daring dan juga luring dengan detail pelaksanaan Program CP3P tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Aside from to capacity building activities, the IIGF Institute also strives to increase the capacity of stakeholders in the infrastructure sector to ensure that infrastructure ecosystem capacity building under the PPP scheme are achieved.

Since 2019, IIGF Institute has officially become an Accredited Training Organization (ATO) for Certified PPP Professionals (CP3P) from Accredited Professional Managers Globally (APMG) International. The CP3P program is an international standard PPP competency certification program developed by the World Bank Group (WBG) in collaboration with the Asian Development Bank (ADB), European Bank of Reconstruction and Development (EBRD), Islamic Development Bank (IsDB), and the Inter-American Development Bank (IDB), and partially funded by the Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF).

This innovation from the Multi-Development Banks (MDBs) has a shared vision, of enhancing global PPP performance. The CP3P program aims to equip individuals, stakeholders, and professionals in terms of PPP international best practices. The participants who have attended the program shall be able to understand a more optimal PPP framework, increase their ability to generate quality PPP projects, increase their capabilities in terms of assisting project preparation, and obtain opportunities to develop business in the PPP projects.

CP3P Certification Program can be participated by the public from various disciplines or sectors, especially PPP practitioners/professionals in Ministries/Agencies and Local Governments, PPP Practitioners, Investors, Operators, and Financial Institutions, as well as Consultants (Finance, Legal, and Technical) who want to obtain PPP credentials that are internationally recognized.

In 2024, ATO IIGF has carried out 5 CP3P Level Foundation certification programs, 3 CP3P Level Preparation certification programs, and 1 CP3P Level Execution Certification program, which were attended by 101 participants from various institutions such as, Central Government, Business/Private Entities, and Consultants, with an average pass rate of 89% for all batches. In 2024, the courses and examinations is carried out online and offline with details of the CP3P Program in 2024 that can be seen in the following table.

No.	Kegiatan Activity	Jadwal Pelaksanaan Schedule	Venue	Peserta Participant
1	CP3P *Level Foundation Batch* 15	*Course*: 20-22 Februari 2024 *Refreshment*: 26 Februari 2024 Ujian: 27 Februari 2024 Course: 20-22 February 2024 Refreshment: 26 February 2024 Exam: 27 February 2024	*Course*: Main Hall PT PII *Refreshment* dan Ujian: Ayana Midplaza Jakarta Course: IIGF Main Hall Refreshment and Exam: Ayana Midplaza Jakarta	16 orang (Water.org, AHP, PT Wika Bangunan Gedung, Kementerian Perhubungan 16 people (Water.org, AHP, PT Wika Bangunan Gedung, Ministry of Transportation)
2	CP3P *Level Foundation Batch* 16	*Course*: 13-17 Mei 2024 *Refreshment*: 20 Mei 2024 Ujian: 21 Mei 2024 Course: 13-17 May 2024 Refreshment: 20 May 2024 Exam: 21 May 2024	*Course*: Main Hall PT PII *Refreshment* dan Ujian: JHL Solitaire Gading Serpong Course: IIGF Main Hall Refreshment and Exam: JHL Solitaire Gading Serpong	17 orang (Karyawan Internal PT PII) 17 people (IIGF Internal Employees)
3	CP3P *Level Foundation Batch* 17	*Course*: 25-27 Juni 2024 *Refreshment*: 1 Juli 2024 Ujian: 22 Juli 2024 Course: 25-27 June 2024 Refreshment: 1 July 2024 Exam: 22 July 2024	*Course*: *online* *Refreshment* dan Ujian: Ayana Midplaza Jakarta Course: online Refreshment and Exam: Ayana Midplaza Jakarta	11 orang (DJKN Kemenkeu, PT MRT, PT Jasa Marga, Eliot & Luther, Tesalonika & Partners, dan karyawan internal PT PII) 11 people (DJKN Ministry of Finance, PT MRT, PT Jasa Marga, Eliot & Luther, Tesalonika & Partners, and IIGF internal employees)
4	CP3P *Level Foundation Batch* 18	*Course*: 15-17 Juli 2024 *Refreshment*: 24 Juli 2024 Ujian: 25 Juli 2024 Course: 15-17 July 2024 Refreshment: 24 July 2024 Exam: 25 July 2024	*Course*: *online* *Refreshment* dan Ujian: DoubleTree by Hilton Jakarta Course: online Refreshment and Exam: DoubleTree by Hilton Jakarta	8 orang (LKPP) 8 people (LKPP)
5	CP3P *Level Preparation Batch* 3	*Course*: 8-12 Juli 2024 *Refreshment*: 22 Juli 2024 Ujian: 23 Juli 2024 Course: 8-12 July 2024 Refreshment: 22 July 2024 Exam: 23 July 2024	*Course*: *Main Hall* PT PII *Refreshment* dan Ujian: Fairmont Jakarta Course: IIGF Main Hall Refreshment and Exam: Fairmont Jakarta	14 orang (karyawan internal PT PII) 14 people (IIGF Internal Employees)
6	CP3P *Level Preparation Batch* 4	*Course*: 19-23 Agustus 2024 *Refreshment*: 2 September 2024 Ujian: 3 September 2024 Course: 19-23 August 2024 Refreshment: 2 September 2024 Exam: 3 September 2024	*Course*: *Main Hall* PT PII *Refreshment* dan Ujian: Gaia Hotel Bandung Course: IIGF Main Hall Refreshment and Exam: Gaia Hotel Bandung	5 orang (Itjen Kemenkeu, Eliot & Luther, PT SMI) 5 people (Inspectorate General of the Ministry of Finance, Eliot & Luther, PT SMI)
7	CP3P *Level Execution Batch* 2	*Course*: 4-8 November 2024 *Refreshment*: 12 November 2024 Ujian: 13 November 2024 Course: 4-8 November 2024 Refreshment: 12 November 2024 Exam: 13 November 2024	*Course*: *Main Hall* PT PII *Refreshment* dan Ujian: Ayana Midplaza Jakarta Course: IIGF Main Hall Refreshment and Exam: Ayana Midplaza Jakarta	6 orang (Itjen Kemenkeu, Jasa Marga, Eliot & Luther) 6 people (Inspectorate General of the Ministry of Finance, Jasa Marga, Eliot & Luther)

No.	Kegiatan Activity	Jadwal Pelaksanaan Schedule	Venue	Peserta Participant
8	CP3P *Level Preparation Batch* 5	*Course*: 11-15 November 2024 *Refreshment*: 21 November 2024 Ujian: 22 November 2024 Course: 11-15 November 2024 Refreshment: 21 November 2024 Exam: 22 November 2024	*Course*: *Main Hall* PT PII *Refreshment* dan Ujian: Orient Hotel Jakarta Course: IIGF Main Hall Refreshment and Exam: Orient Hotel Jakarta	6 orang (karyawan internal PT PII) 6 orang (karyawan internal PT PII)
9	CP3P *Level Foundation Batch* 19	*Course*: 3-5 Desember 2024 *Refreshment*: 9 Desember 2024 Ujian: 10 Desember 2024 Course: 3-5 December 2024 Refreshment: 9 December 2024 Exam: 10 December 2024	*Course*: *Main Hall* PT PII *Refreshment* dan Ujian: Double Tree by Hilton Jakarta Course: IIGF Main Hall Refreshment and Exam: Double Tree by Hilton Jakarta	18 orang (Hutama Karya, Jasa Marga, PT Suez Water Treatment Indonesia, PT Bukaka Teknik Utama) 18 people (Hutama Karya, Jasa Marga, PT Suez Water Treatment Indonesia, PT Bukaka Teknik Utama)
		Total		**101 orang**

RISET DAN PUBLIKASI
RESEARCH AND PUBLICATION

Sejak tahun 2015 IIGF Institute telah melaksanakan berbagai riset yang melibatkan para pemangku kepentingan seperti Kementerian dan Lembaga teknis terkait, pemilik proyek, akademisi dan universitas serta Lembaga Non-Pemerintahan. Hasil riset diharapkan dapat menjawab berbagai macam permasalahan yang muncul dari proyek-proyek infrastruktur di berbagai sektor dengan luasnya cakupan masukan dan perspektif dari berbagai pihak. Dengan demikian, hal tersebut dapat mendorong penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang lebih baik di Indonesia.

Since 2015, IIGF Institute has carried out various research involving stakeholders such as related technical Ministries and Institutions, project owners, academics, and universities, as well as Non-Governmental Institutions. The results from the research shall be able to answer various kinds of problems that arise from infrastructure projects in various sectors with a wide range of inputs and perspectives from various parties. Thus, it shall encourage a better infrastructure development in Indonesia.

Sepanjang tahun 2024, rincian kegiatan riset dan publikasi PT PII adalah sebagai berikut:

1. Riset
   a. **Kajian *Benchmarking* Skema Proyek KPBU pada Pasar Tradisional; Studi Penerapan pada Proyek KPDBU Pasar Tabanan, Bali**
      Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dari proyek KPBU sektor pasar di berbagai negara yang telah berhasil diimplementasikan. Dengan mengambil studi kasus dari India dan Filipina, kajian ini memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam persiapan proyek KPDBU Pembangunan Pasar Tabanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemisahan yang jelas antara area komersial dan pasar tradisional, fleksibilitas dalam model pengelolaan, serta peran pemerintah dalam memberikan insentif kepada investor menjadi faktor kunci keberhasilan proyek.

In 2024, IIGF's research and publication activities are as follows:

1. Research
   a. **Benchmarking Study of PPP Project Schemes in Traditional Markets; Study on the Tabanan Market PPP Project, Bali**
      This study aims to identify best practices from market sector PPP projects in various countries that have been successfully implemented. By taking case studies from India and the Philippines, the study provides recommendations that can be applied in the preparation of the KPDBU project for Tabanan Market Development. The analysis shows a clear separation between commercial areas and traditional markets, flexibility in the management model, and the role of the government in providing incentives to investors, are key factors for the project's success.

b. Identifikasi Pemangku Kepentingan dan Perumusan Kebijakan dalam Penyediaan Lahan dalam rangka Percepatan Pembangunan di Sumatera Barat

Kajian ini membahas permasalahan pengadaan tanah di Sumatera Barat, terutama terkait tanah ulayat yang memiliki karakteristik hukum adat yang kompleks. Melalui identifikasi pemangku kepentingan dan perumusan kebijakan, penelitian ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang lebih akomodatif dan berkeadilan bagi masyarakat adat, serta mendukung percepatan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kajian ini menyoroti pentingnya konsultasi publik yang inklusif, penilaian ganti kerugian yang adil, serta pendekatan berbasis kearifan lokal dalam proses pengadaan tanah.

c. Kajian Sektor Rumah Sakit Umum Daerah: Pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin – Kalimantan Selatan

Kajian ini menganalisis kelayakan penerapan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) RSUD Ulin, Kalimantan Selatan. Sebagai rumah sakit rujukan utama di provinsi ini, RSUD Ulin menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan layanan kardiovaskular yang semakin meningkat. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur melalui skema KPBU dipandang sebagai solusi strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan di wilayah ini. Tingginya angka kejadian penyakit kardiovaskular di Kalimantan Selatan menuntut peningkatan layanan kesehatan khusus, terutama dalam aspek diagnosis dan pengobatan penyakit jantung. Dengan keterbatasan fasilitas yang ada, pembangunan Gedung PPJT menjadi langkah prioritas.

Kajian ini menunjukkan bahwa proyek ini layak untuk dilaksanakan, dengan kebutuhan segera untuk menetapkan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), mempercepat koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta memperkuat studi kelayakan guna menarik investasi. Pengawasan independen dan keterlibatan sektor swasta, tenaga medis, serta masyarakat sejak tahap awal diperlukan untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan proyek.

b. Identification of Stakeholders and Policy Formulation in Land Provision to Accelerate Development in West Sumatra

This study discusses land acquisition issues in West Sumatra, especially related to customary land which has complex customary law characteristics. Through stakeholder identification and policy formulation, the study aims to create more accommodating and equitable policies for indigenous peoples, as well as to support the acceleration of infrastructure development for the public interest. The study highlights the importance of inclusive public consultation, fair compensation assessment, and local wisdom-based approaches in the land acquisition process.

c. Local General Hospital Study: Construction of Integrated Cardiac Service Center (PPJT) Building of Ulin General Hospital (RSUD) - South Kalimantan

This study analyses the feasibility of implementing a Public Private Partnership (PPP) scheme in the construction of the Integrated Cardiac Service Centre (PPJT) building at Ulin General Hospital, South Kalimantan. As the main referral hospital in the province, Ulin General Hospital faces challenges in meeting the increasing demand for cardiovascular services. Therefore, infrastructure development through the PPP scheme is considered a strategic solution to increase the capacity and quality of health services in this region. The high incidence of cardiovascular disease in South Kalimantan encourages an increase in specialized health services, especially in the diagnosis and treatment of heart disease. With limited existing facilities, the construction of the PPJT Building is a priority.

This study shows that the project is feasible, with an immediate need to establish the Government Contracting Agency (GCA), accelerate coordination with stakeholders, and strengthen the feasibility study to attract investment. Independent supervisory and involvement of the private sector, medical personnel and the community from an early stage are needed to ensure project's transparency and sustainability. With proper implementation, this project has the potential to

Dengan implementasi yang tepat, proyek ini berpotensi menjadi model KPBU dalam sektor infrastruktur kesehatan di Indonesia serta memperkuat layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

d. **Penyusunan Formula Pemetaan Pemerintah Daerah: Kapasitas Keuangan, Dukungan Politik dan Kesenjangan Infrastruktur**

Kajian ini bertujuan untuk menyusun formula pemetaan kapasitas keuangan, dukungan politik, dan kesenjangan infrastruktur pemerintah daerah dalam implementasi proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Berdasarkan analisis terhadap 36 daerah sampel, ditemukan bahwa tiga faktor utama dalam menentukan kesiapan daerah terhadap skema KPBU adalah kapasitas fiskal, stabilitas politik eksekutif-legislatif, dan kebutuhan infrastruktur. Kajian ini memberikan metodologi yang dapat diterapkan secara lebih luas dengan mengembangkan sistem pemetaan berbasis data.

e. **Tipologi Pengelolaan Sampah melalui *Waste to Energy***

Pengelolaan sampah di Indonesia telah menjadi tantangan yang semakin mendesak, terutama karena volume sampah yang terus meningkat dan semakin terbatasnya lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Salah satu solusi yang mulai dikembangkan adalah teknologi *Waste-to-Energy* (WtE), yang tidak hanya mengurangi jumlah sampah secara signifikan, tetapi juga memberikan manfaat berupa energi terbarukan.

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi daerah yang memiliki karakteristik ideal untuk penerapan teknologi WtE serta mengeksplorasi bentuk dukungan yang diperlukan agar sistem ini berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa daerah dengan produksi sampah di atas 1.000 ton per hari, keterbatasan lahan untuk TPA, kapasitas fiskal yang memadai, serta kebutuhan listrik yang tinggi adalah kandidat ideal untuk penerapan WtE. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, pengelolaan sampah berbasis WtE dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi krisis sampah di Indonesia.

become a PPP model in the health infrastructure sector in Indonesia and strengthen referral health services for the people of South Kalimantan.

d. **Compilation of Local Government Mapping Formula: Financial Capacity, Political Support, and Infrastructure Gap**

This study has the objective to develop a formula for mapping the financial capacity, political support, and infrastructure gap of local governments in Public Private Partnership (PPP) projects. Based on the analysis of 36 sample regions, the three main factors in determining regional readiness for PPP schemes are fiscal capacity, executive-legislative political stability, and infrastructure needs. This study provides a methodology that can be applied more broadly by developing a data-based mapping system.

e. **Waste Management Typology through Waste to Energy**

Waste management in Indonesia has become an increasingly pressing challenge, considering the growing volume of waste and the limited availability land for the Landfill (TPA). One of the solution being developed is Waste-to-Energy (WtE) technology, which not only significantly reduces the amount of waste, but also provides benefits in the form of renewable energy.

This study aims to identify regions with ideal characteristics for WtE technology and explore the forms of support needed for the system to be sustainable. The results show that regions with waste production above 1,000 tons per day, limited land for landfill, adequate fiscal capacity, and high electricity demand, are ideal candidates for WtE. With the right policy support, WtE-based waste management can be a long-term solution to the waste crisis in Indonesia.

f. **Optimalisasi Peran Penjaminan Pemerintah dalam Mengatasi Kesenjangan Pembiayaan Pembangunan Nasional: Urgensi Regulasi yang Komprehensif; Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai Solusi Strategis Penguatan Penjaminan Pemerintah**

Indonesia menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional akibat keterbatasan APBN. Salah satu solusi strategis adalah optimalisasi peran Penjaminan Pemerintah sebagai instrumen fiskal untuk menarik sumber pendanaan non-publik.

Kajian ini menyoroti pentingnya regulasi yang komprehensif dalam mengelola risiko fiskal dari penjaminan pemerintah. Dengan tata kelola yang lebih baik, instrumen penjaminan dapat meningkatkan daya tarik investasi dan memastikan keberlanjutan fiskal. Hasil kajian ini merekomendasikan pembentukan regulasi yang lebih terintegrasi serta peningkatan peran Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) untuk memperkuat mekanisme mitigasi risiko.

g. **Kajian Triangulasi dan Penyelarasan Materi Peraturan pada Penyusunan Regulasi Penjaminan Pemerintah**

h. **Kajian Alternatif Pembiayaan Infrastruktur melalui Pasar Modal di Indonesia dengan Penjaminan Pemerintah**

Sektor infrastruktur berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan kontribusi infrastruktur terhadap PDB mencapai 9,9% pada 2023, kebutuhan pendanaan infrastruktur semakin meningkat. Namun, keterbatasan dana APBN dan pinjaman perbankan menuntut eksplorasi sumber pembiayaan lain, seperti pasar modal. Salah satu instrumen yang dapat dioptimalkan adalah *Project Bonds* atau obligasi berbasis proyek. Instrumen ini memungkinkan pembiayaan infrastruktur secara spesifik pada proyek tertentu dengan potensi risiko yang dapat diminimalkan melalui penjaminan pemerintah. Kajian ini mengeksplorasi potensi, tantangan, serta skema optimalisasi obligasi berbasis proyek dengan penjaminan pemerintah, dengan mempertimbangkan pengalaman internasional dan kondisi pasar keuangan Indonesia.

f. **Optimizing the Sovereign Guarantee's Role in Addressing the National Development Financing Gap: The Urgency of Comprehensive Regulations; Drafting Government Regulations as a Strategic Solution for Strengthening Sovereign Guarantees**

Indonesia faces challenges in meeting the financing needs of national development due to the state budget's limitations. One strategic solution is to optimize the role of Sovereign Guarantee as a fiscal instrument to attract non-public funding sources.

This study highlights the importance of comprehensive regulations in managing the fiscal risks of sovereign guarantees. With better governance, the guarantee instrument can increase investment attractiveness and ensure fiscal sustainability. The results of this study recommend the establishment of more integrated regulations as well as increasing the role of the Infrastructure Guarantee Agency (BUPI) to strengthen risk mitigation mechanisms.

g. **Study on Triangulation and Alignment of Regulatory Materials in the Formulation of Sovereign Guarantee Regulation**

h. **Study on Alternative Infrastructure Financing through Capital Market in Indonesia with Sovereign Guarantee**

Infrastructure sector has a strategic role in encouraging Indonesia's economic growth. With the contribution of infrastructure to GDP reaching 9.9% by 2023, the need for infrastructure funding is increasing. However, limited state budget funds and bank loans require exploration of other financing sources, such as the capital market. One instrument that can be optimized is Project Bonds. This instrument enables project-specific infrastructure financing with potential risks that can be minimized using sovereign guarantees. This study explores the potential, challenges, and optimization schemes of project-based bonds with sovereign guarantees, considering international experience and Indonesia's financial market conditions.

i. **Kajian Integrasi Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU pada Anggota Institusi Kantor Bersama KPBU Indonesia**
Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme pemantauan dan evaluasi (Monev) dalam pelaksanaan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia, khususnya oleh Kantor Bersama KPBU. Saat ini, pemantauan proyek KPBU masih terfragmentasi dengan berbagai kementerian dan lembaga menjalankan fungsi Monev secara terpisah. Kajian ini menyoroti tantangan utama, termasuk keterbatasan koordinasi, kurangnya sistem informasi terintegrasi, dan kebutuhan peningkatan akuntabilitas.
Kajian ini merekomendasikan pengembangan sistem informasi terpusat yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap proyek KPBU, peningkatan koordinasi antar *stakeholder*, serta kebijakan untuk memperkuat sinergi antar anggota Kantor Bersama KPBU.

j. **Kajian Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa: Studi Kasus Proyek Palapa Ring dan Jalan Tol Serang-Panimbang**

k. ***Balancing Risk and Incentives*: *Integrating MRG into Fixed Payment Mechanisms on Hospital PPP Structures***
Keberhasilan suatu proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sangat bergantung pada alokasi risiko yang efektif dan tepat dari pemerintah ke badan usaha. Pemerintah menggunakan beberapa mekanisme seperti Pertanggungan Pendapatan Minimum untuk mendukung skema proyek KPBU. Penelitian tentang Pertanggungan Pendapatan minimum masih sangat minim pada konteks Indonesia. Atas hal tersebut, studi konseptual ini menawarkan adaptasi pertanggungan pendapatan minimum dalam mekanisme pembayaran tetap dalam KPBU serta mengeksplorasi bagaimana mengintegrasikan beberapa prinsip pertanggungan pendapatan minimum ke dalam struktur pembayaran tetap. Kajian konseptual ini menggunakan pendekatan studi literatur pada beberapa penelitian serta penerapan yang sudah berjalan, kemudian disintesa untuk diadopsi penerapannya pada konteks Indonesia. Kajian konseptual ini menemukan bahwa prinsip pertanggungan pendapatan minimum dapat diadaptasi pada skema pembayaran tetap pada proyek KPBU sektor rumah sakit, dan badan usaha masih dapat mengoptimalkan pendapatannya dari beberapa layanan.

i. **Study on the Integration of Monitoring and Evaluation of PPP Projects at Institutional Members of the Indonesian PPP Joint Office**
This study has the objective to evaluate the monitoring and evaluation (M&E) mechanism in the Public Private Partnership (PPP) projects in Indonesia, especially by the PPP Joint Office. Currently, monitoring of PPP projects remains fragmented with different ministries and agencies carrying out M&E functions separately. The study highlights key challenges, including limited coordination, lack of an integrated information system, and the need for increased accountability.

The study recommends the development of a centralized information system that enables real-time monitoring of PPP projects, improved coordination among stakeholders, and policies to strengthen synergies among members of the PPP Joint Office.

j. **Study on the Government Accounting Standard Statement (PSAP) No. 16 on Service Concession Agreement: Case Study of Palapa Ring Project and Serang-Panimbang Toll Road**

k. **Balancing Risk and Incentives: Integrating MRG into Fixed Payment Mechanisms on Hospital PPP Structures**
The success of a Public Private Partnership (PPP) project is highly dependent on effective and appropriate risk allocation from the government to the business entity. The government uses several mechanisms such as Minimum Revenue Insurance to support PPP project schemes. Research on Minimum Revenue coverage is still very minimum in Indonesia. Therefore, this conceptual study offers an adaptation of minimum revenue coverage in the fixed payment mechanism in PPP and explores how to integrate some minimum revenue coverage principles into the fixed payment structure. This conceptual study utilities a literature review approach on several existing studies and applications, which are synthesized for adoption in Indonesia. This conceptual study found that minimum revenue coverage principles can be adapted to fixed payment schemes in hospital PPP projects, and the enterprise can still optimize its revenue from some services.

2. Publikasi
   a. **Bersama Memajukan Indonesia Timur: Membangun Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan yang Inklusif**

2. Publication
   a. **Advancing Eastern Indonesia Together: Building Inclusive Sustainable Economic Infrastructure through Creative Financing Schemes**

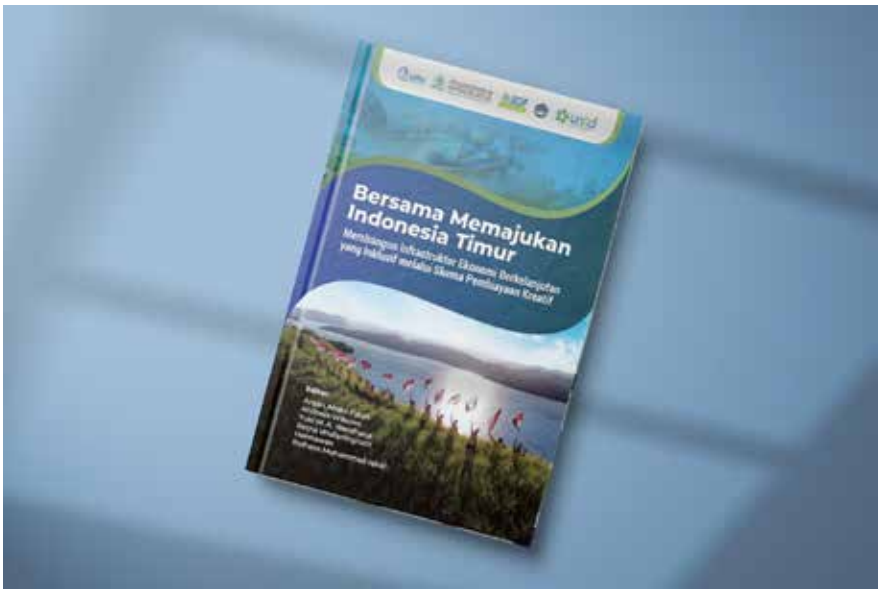

Buku "Bersama Memajukan Timur: Membangun Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan yang Inklusif melalui Skema Pembiayaan Kreatif" ini merupakan buah dari kolaborasi dan bentuk nyata dari penerapan konsep *Triple Helix,* yaitu kolaborasi dunia akademis, pemerintah, dan pelaku industri. Pihak pertama yang terlibat pada buki ini adalah para akademisi dari Universitas Pattimura, yang merupakan anggota aktif dari jaringan University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID). Pihak kedua adalah talenta-talenta terbaik dari Kementerian Keuangan yang ditempatkan di wilayah Indonesia Timur. Pihak ketiga dari sisi pelaku industri adalah para ahli pada PT PII serta IIGF Institute, unit *think tank* di bawah PT PII.

Buku ini membahas strategi inovatif untuk mendukung percepatan pembangunan di kawasan Indonesia Timur dalam kerangka Indonesia Emas 2045. Setiap bab mengupas aspek kunci dari pembangunan berkelanjutan, mulai dari kebutuhan infrastruktur dasar, hilirisasi industri sektor tambang dan sektor perikanan, hingga optimalisasi pajak daerah dan dana

The book "Advancing Eastern Indonesia Together: Building Inclusive Sustainable Economic Infrastructure through Creative Financing Schemes" is the result of collaboration and a tangible form of the Triple Helix concept, i.e., the collaboration of the academic world, government, and industry players. The first party involved in this were academics from Pattimura University, who are active members of the University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID). The second party is the best talents from the Ministry of Finance who are stationed in Eastern Indonesia. The third party from the industry are experts at PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) or IIGF and IIGF Institute, a think tank unit under IIGF.

This book discusses innovative strategies to support accelerated development in Eastern Indonesia within the framework of Golden Indonesia 2045. Each chapter explores key aspects of sustainable development, ranging from basic infrastructure needs, downstream industries in the mining and fisheries sectors, to the optimization of local taxes and transfer funds to

transfer untuk mengatasi kesenjangan fiskal. Buku ini juga menyoroti pentingnya pembiayaan kreatif melalui skema (*Project Development Facility* / PDF) serta pendanaan hijau sebagai salah satu solusi untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, serta lingkungan di wilayah yang secara geografis menantang ini.

Tautan untuk mengunduh: https://institute.iigf.co.id/e-library/lainnya/73/bersama-memajukan-indonesia-timur-:-membangun-infrastruktur-ekonomi-berkelanjutan-yang-inklusif-melalui-skema-pembiayaan-kreatif

overcome fiscal disparities. The book also highlights the importance of creative financing through PPP schemes and green financing as one of the solutions to fund infrastructure development and maintain economic, social, and environmental balance in this geographically challenging region.

Link to download: https://institute.iigf.co.id/e-library/lainnya/73/bersama-memajukan-indonesia-timur-:-membangun-infrastruktur-ekonomi-berkelanjutan-yang-inklusif-melalui-skema-pembiayaan-kreatif

b. Glosarium KPBU 3.0

b. PPP Glossary 3.0

Buku ini menyajikan kumpulan istilah-istilah baku terkait pengembangan dan implementasi KPBU dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia. Istilah-istilah tersebut memiliki arti spesifik seperti yang diberikan pada pernyataan-pernyataan institusional dalam peraturan perundang-undangan mengenai KPBU. Oleh sebab itu, daftar istilah-istilah ini mengacu pada definisi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut bersifat mengikat sehingga dapat memberikan konsistensi dalam penggunaannya. Konsistensi ini diperlukan untuk mendukung komunikasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan proses dan aktivitas KPBU. Secara tidak langsung, daftar istilah KPBU akan membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

This book presents a collection of standardized terms related to the development and implementation of PPP in infrastructure delivery in Indonesia. These terms have specific meanings as given to institutional statements in PPP legislation. Therefore, this glossary refers to the definitions set out in the laws and regulations. The definitions are binding to provide consistency in their use. This consistency is necessary to support communication between stakeholders in implementing PPP processes and activities. Indirectly, the PPP glossary will help accelerate infrastructure development in Indonesia.

Buku ini dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengenal istilah-istilah di bidang pengembangan dan implementasi KPBU. Bagi para peserta program *capacity building* PT PII, glosarium ini akan sangat membantu untuk memahami materi-materi ajar yang diberikan. Selain menerangkan maksud kata dan istilah, glosarium ini juga memberikan informasi tentang konteks pemanfaatan istilah yang terdapat dalam materi dengan merujuk pada peraturan Perundang-undangan sebagai dasarnya.

This book can be a reference for interested parties to recognize terms in the field of PPP development and implementation. This glossary will be very helpful in understanding the teaching materials provided for participants of IIGF's capacity building program. In addition to explaining the meaning of words and terms, this glossary provides information on the context of the terms usage in the material by referring to the laws and regulations as the basis.

Edisi ketiga ini merupakan pembaruan dari edisi pertama dan kedua, di mana istilah-istilah baku yang ditampilkan sudah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkini dan tidak hanya terbatas pada regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai KPBU. Edisi ketiga ini telah memasukkan istilah-istilah baku dari berbagai peraturan terkait empat sektor infrastruktur yang proyeknya telah dijamin oleh PT PII, yaitu sektor air minum, sektor jalan, sektor ketenagalistrikan, dan sektor telekomunikasi.

This third edition is an update of the first and second editions, in which the standard terms displayed have been adjusted to the latest laws and regulations and are not only limited to regulations that specifically regulate PPP. This third edition has included standardized terms from various regulations related to the four infrastructure sectors whose projects have been guaranteed by IIGF, i.e., the drinking water sector, the road sector, the electricity sector, and the telecommunications sector.

Tautan untuk mengunduh : https://institute.iigf.co.id/e-library/lainnya/68/glosarium-kpbu-daftar-istilah-istilah-dalam-skema-kerja-sama-pemerintah-dan-badan-usaha-(kpbu)-edisi-ketiga

Link to download: https://institute.iigf.co.id/e-library/lainnya/68/glosarium-kpbu-daftar-istilah-istilah-dalam-skema-kerja-sama-pemerintah-dan-badan-usaha-(kpbu)-edisi-ketiga

c. Kompendium Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur: Kajian berbasis Studi Kasus Indonesia *Infrastructure Roundtable* (IIR) 1-12

c. Compendium of Infrastructure Policy Recommendations: Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) Case Study 1-12

Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) adalah salah satu kegiatan lokakarya dan kajian berbasis studi kasus yang diselenggarakan oleh PT PII bersama University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID). Kegiatan ini merupakan *case-*

Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) is one of the workshops and case study-based studies organized by IIGF together with the University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID). This activity is a case-based workshop attended by government

based workshop yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah dan *stakeholder* kunci untuk membahas isu-isu, pembelajaran, dan rekomendasi untuk percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia, khususnya melalui skema KPBU.

representatives and key stakeholders to discuss issues, lessons learned, and recommendations for accelerating Indonesia's infrastructure development, especially through the Public Private Partnership (PPP) scheme.

Tujuan IIR adalah untuk meningkatkan kapasitas atau pemahaman para pemangku kepentingan dalam bidang infrastruktur. Adapun ruang lingkup penyelenggaraan kegiatan IIR antara lain sebagai berikut. (1) Mengidentifikasi isu-isu penyelenggaraan proyek infrastruktur, mulai dari aspek kebijakan hingga permasalahan teknis; (2) Mempertemukan para pemangku kepentingan, ahli, akademisi, dan pihak-pihak yang *concern* dalam bidang infrastruktur dalam diskusi dua arah untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan; (3) Menciptakan ekosistem diskusi yang kondusif dan efektif bagi para peserta IIR dalam setiap pembahasan tema; dan (4) Menyampaikan hasil atau keluaran IIR berupa rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Indonesia secara khusus dan kepada seluruh peserta IIR pada umumnya.

The objective of IIR is to increase the capacity or understanding of stakeholders in the infrastructure sector. The scope of IIR includes the following. (1) Identifying issues in infrastructure project, ranging from policy aspects to technical problems; (2) Bringing together stakeholders, experts, academics, and parties concerned in the field of infrastructure in a two-way discussion to produce policy recommendations; (3) Creating a conducive and effective discussion ecosystem for IIR participants in each theme discussion; and (4) Delivering IIR results or outputs in the form of policy recommendations to the Government of Indonesia in particular and to all IIR participants in general.

Penyelenggaraan IIR diawali dengan penyusunan studi kasus dengan tema-tema yang relevan di bidang infrastruktur. Hasil dari setiap penyelenggaraan IIR dituangkan dalam bentuk *policy brief* (ikhtisar kebijakan) yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat dalam bidang infrastruktur. Kajian dan studi kasus yang dilakukan dapat memberikan dukungan untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan infrastruktur serta tata kelola yang baik dalam implementasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Buku ini merupakan kompendium *Policy Brief* dari IIR 1 s.d. 12.

The IIR begins with the preparation of case studies with relevant themes in the infrastructure sector. The results of each IIR are presented in the form of a policy brief, which shall be a reference for the government in formulating and implementing appropriate policies in the infrastructure sector. The studies and case studies conducted can provide support for adhering to the basic principles of infrastructure and good governance in the infrastructure development in Indonesia. This book is a compendium of Policy Briefs from IIR No. 1 to 12.

Tautan untuk mengunduh : https://institute.iigf.co.id/e-library/lainnya/70/kompendium-rekomendasi-kebijakan-infrastruktur

Link to download: https://institute.iigf.co.id/e-library/lainnya/70/kompendium-rekomendasi-kebijakan-infrastruktur

d. Kompendium Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur: Kajian berbasis Studi Kasus Indonesia *Infrastructure Roundtable* (IIR) 13-24

d. Compendium of Infrastructure Policy Recommendations: Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) Case Study 13-24

Indonesia *Infrastructure Roundtable* (IIR) adalah salah satu kegiatan lokakarya dan kajian berbasis studi kasus yang diselenggarakan oleh PT PII bersama University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID). Kegiatan ini merupakan *case-based workshop* yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah dan *stakeholder* kunci untuk membahas isu-isu, pembelajaran, dan rekomendasi untuk percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia, khususnya melalui skema KPBU.

Tujuan IIR adalah untuk meningkatkan kapasitas atau pemahaman para pemangku kepentingan dalam bidang infrastruktur. Adapun ruang lingkup penyelenggaraan kegiatan IIR antara lain sebagai berikut. (1) Mengidentifikasi isu-isu penyelenggaraan proyek infrastruktur, mulai dari aspek kebijakan hingga permasalahan teknis; (2) Mempertemukan para pemangku kepentingan, ahli, akademisi, dan pihak-pihak yang *concern* dalam bidang infrastruktur dalam diskusi dua arah untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan; (3) Menciptakan ekosistem diskusi yang kondusif dan efektif bagi para peserta IIR dalam setiap pembahasan tema; dan (4) Menyampaikan hasil atau keluaran IIR berupa rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Indonesia secara khusus dan kepada seluruh peserta IIR pada umumnya.

Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) is one of the workshops and case study-based studies organized by IIGF together with the University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID). This activity is a case-based workshop attended by government representatives and key stakeholders to discuss issues, lessons learned, and recommendations for accelerating Indonesia's infrastructure development, especially through the Public Private Partnership (PPP) scheme.

The objective of IIR is to increase the capacity or understanding of stakeholders in the infrastructure sector. The scope of IIR includes the following. (1) Identifying issues in infrastructure project, ranging from policy aspects to technical problems; (2) Bringing together stakeholders, experts, academics, and parties concerned in the field of infrastructure in a two-way discussion to produce policy recommendations; (3) Creating a conducive and effective discussion ecosystem for IIR participants in each theme discussion; and (4) Delivering IIR results or outputs in the form of policy recommendations to the Government of Indonesia in particular and to all IIR participants in general.

Penyelenggaraan IIR diawali dengan penyusunan studi kasus dengan tema-tema yang relevan di bidang infrastruktur. Hasil dari setiap penyelenggaraan IIR dituangkan dalam bentuk *policy brief* (ikhtisar kebijakan) yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat dalam bidang infrastruktur. Kajian dan studi kasus yang dilakukan dapat memberikan dukungan untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan infrastruktur serta tata kelola yang baik dalam implementasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Buku ini merupakan kompendium Policy Brief dari IIR 13 s.d. 24.

Tautan untuk mengunduh: https://institute.iigf.co.id/e-library/lainnya/71/kompendium-rekomendasi-kebijakan-infrastruktur-kajian-berbasis-studi-kasus-indonesia-infrastructure-roundtable-(iir)-13—-24

The IIR begins with the preparation of case studies with relevant themes in the infrastructure sector. The results of each IIR are presented in the form of a policy brief, which shall be a reference for the government in formulating and implementing appropriate policies in the infrastructure sector. The studies and case studies conducted can provide support for adhering to the basic principles of infrastructure and good governance in the infrastructure development in Indonesia. This book is a compendium of Policy Briefs from IIR No. 13 to 24.

Link to download: https://institute.iigf.co.id/e-library/lainnya/71/kompendium-rekomendasi-kebijakan-infrastruktur-kajian-berbasis-studi-kasus-indonesia-infrastructure-roundtable-(iir)-13—-24

e. Model Asesmen Kualitatif *Value for Money* bagi Penyelenggaraan Infrastruktur Publik (Edisi 2)

e. Qualitative Value for Money Assessment Model for Public Infrastructure Delivery (2nd Edition)

Salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam pemilihan modalitas pembiayaan infrastruktur adalah uji *Value for Money* (VfM). Kajian ini berfokus pada identifikasi pendorong kunci VfM dengan melakukan analisis *availability, desirability*, dan *viability* dari setiap input, proses, *output* dan *outcome* siklus hidup proyek infrastruktur. Dalam pelaksanaannya, tim peneliti melakukan desk study, curah pendapat, dan melaksanakan *Focus Group Discussion* dengan narasumber dari berbagai instansi terkait. Adapun pendekatan untuk pengolahan datanya menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

One of the instruments that can be used in the selection of infrastructure financing modalities is the Value for Money (VfM) test. This study focuses on identifying the key drivers of VfM by analyzing the availability, desirability, and viability of each input, process, output, and outcome of the infrastructure project life cycle. In its implementation, the research team conducted a desk study, brainstorming, and held Focus Group Discussions with resources from various related agencies. The approach for data processing used the Analytical Hierarchy Process (AHP) method.

Dengan memanfaatkan hasil penelitian ini, setiap modalitas pembiayaan mendapatkan perlakuan yang setara untuk dapat dipilih sebagai cara yang paling tepat untuk penyediaan suatu infrastruktur. Pada kondisi-kondisi yang tepat, KPBU dapat menjadi modalitas dengan alokasi risiko yang lebih optimal dibandingkan dengan penugasan BUMN maupun pembiayaan tradisional melalui alokasi APBN/APBD.

Tautan untuk mengunduh: https://institute.iigf.co.id/e-library/lainnya/72/model-asesmen-kualitatif-value-for-money-bagi-penyelenggaraan-infrastruktur-publik

By utilizing the results of this research, each financing modality will receive equal treatment to be selected as the most appropriate way to provide infrastructure. Under the right conditions, PPP can be a modality with more optimal risk allocation compared to SOE assignments or traditional financing through State Budget/Local Budget allocations.

Link to download: https://institute.iigf.co.id/e-library/lainnya/72/model-asesmen-kualitatif-value-for-money-bagi-penyelenggaraan-infrastruktur-publik

f. *Critical Success Factors* Pembangunan Proyek Infrastruktur Air Minum dengan Skema KPBU

f. Critical Success Factors of Drinking Water Infrastructure Project Development with PPP Scheme

Policy Brief ini disusun untuk mengkaji faktor-faktor kritis penentu keberhasilan lelang Proyek SPAM dengan skema KPBU di Indonesia. Kajian dilakukan melalui pendekatan Studi Kasus pelaksanaan lelang Proyek SPAM Umbulan di Provinsi Jawa Timur dan SPAM Semarang Barat di Provinsi Jawa Tengah. Data-data yang berkaitan dengan penelitian ini diolah dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan teori institusional dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui faktor kritis penentu kesuksesannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan proyek KPBU SPAM di Indonesia sangat dipengaruhi oleh PJPK dalam bentuk komitmen dan inisiatif terhadap proyek serta kualitas dan manajemen sumber daya manusia yang profesional. Namun demikian, diperlukan stimulan dari Pemerintah Pusat agar kedua faktor tersebut dapat muncul, antara lain komitmen politis, dukungan proyek, dan otoritas.

This Policy Brief is prepared to examine the critical factors that determine the success of the SPAM Project auction with the PPP scheme in Indonesia. The study was conducted through a Case Study to the Umbulan SPAM Project auction in East Java Province and West Semarang SPAM in Central Java Province. The data related to this study were processed using the AHP method and institutional theory with a qualitative approach to determine the critical factors that determine its success.

The results show that the success of SPAM PPP projects in Indonesia is strongly influenced by GCA in the form of commitment and initiative towards the project as well as the quality and management of professional human resources. However, stimulants are needed from the Central Government so that both factors can emerge, including political commitment, project support, and authority.

Tautan mengunduh: https://institute.iigf.co.id/e-library/lainnya/69/critical-success-factors-pembangunan-proyek-infrastruktur-air-minum-dengan-skema-kpbu

Link to download: https://institute.iigf.co.id/e-library/lainnya/69/critical-success-factors-pembangunan-proyek-infrastruktur-air-minum-dengan-skema-kpbu

ADVOKASI KEBIJAKAN DAN *OUTREACH*
POLICY ADVOCACY AND OUTREACH

Untuk memperluas keterlibatan para pemangku kepentingan di bidang infrastruktur, PT PII melalui IIGF Institute menyelenggarakan berbagai kegiatan melalui kolaborasi dengan mitra strategis di level nasional dan internasional antara lain, K/L (Kementerian/Lembaga), Perguruan Tinggi, Lembaga Riset dan Institusi sejenis lainnya untuk mendorong penyusunan dan implementasi kebijakan penyediaan infrastruktur yang lebih baik.

Kemitraan (*outreach*) IIGF Institute dengan mitra strategis juga merupakan salah satu strategi aliansi penguatan ekosistem pembangunan infrastruktur melalui inovasi, peningkatan kapasitas, serta menjembatani kebutuhan pembangunan lokal dan sumber daya global yang dapat dimanfaatkan untuk keberlanjutan infrastruktur yang *resilient* dan *inclusive*. Sepanjang tahun 2024, IIGF *Institute* melaksanakan kegiatan *outreach* dengan mitra internasional antara lain:

1. Program Energi dengan GIZ, melalui kolaborasi antar program Energy Hub melalui IKI *Flex Support Package* dan *Sustainable Energy Transition in* Indonesia (SETI) dibawah naungan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM.
2. Kolaborasi dengan KDI Korea dalam penyelenggaraan "*Sharing Session on Minimum Revenue Guarantee* (MRG) *Schemes in Infrastructure Projects*".

Selain dengan mitra internasional, IIGF Institute telah menjalin kerja sama dengan 6 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, yang tergabung dalam *University Network for Indonesia Infrastructure Development* (UNIID) atau Jejaring Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia (JPII). Melalui UNIID, peran keahlian dan kepakaran akademisi di lingkungan perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan dan penyediaan Infrastruktur terutama di daerah.

IIGF, via the IIGF Institute, organizes various activities in collaboration with strategic partners at the national and international levels to encourage better policy formulation and better infrastructure implementation to expand the involvement of the stakeholders, including Ministries/Agencies, Universities, Research Field, and other similar Institutions.

IIGF Institute's partnership (outreach) with strategic partners is also one of the alliance strategies to strengthen the infrastructure development ecosystem through innovation, capacity building, and bridging local development needs and global resources that can be utilized for resilient and inclusive infrastructure sustainability. In 2024, IIGF Institute conducted outreach activities with international partners:

1. Energy Program with GIZ, via collaboration between the Energy Hub program through the IKI Flex Support Package and Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI) under the auspices of the Directorate General of New Renewable Energy and Energy Conservation, Ministry of Energy and Mineral Resources.
2. Collaboration with KDI Korea in organizing "Sharing Session on Minimum Revenue Guarantee (MRG) Schemes in Infrastructure Projects."

In addition to international partners, IIGF Institute has collaborated with 6 universities throughout Indonesia, which are members of the University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID). Via UNIID, the role of expertise and academics expertise in the university environment shall provide optimal contribution to the development and provision of infrastructure, especially in the regions.

No.	Kegiatan Activity	Topik/Tema dan *Case Study* Topic/Theme and Case Study		Universitas University
1.	Kuliah Umum Public Lecture	Peran Aspek Hukum dalam Penjaminan Pemerintah untuk Mendukung Pembangunan Nasional	The Role of Legal Aspects in Sovereign Guarantee to Support National Development	Universitas Gadjah Mada University of Gadjah Mada
2.	Simposium VI Symposium VI	Peluang dan Tantangan *Creative Financing* di bidang Infrastruktur bagi Perguruan Tinggi dan Daerah Menuju Indonesia Emas 2045.	Creative Financing Opportunities and Challenges in Infrastructure for Universities and Regions Towards Golden Indonesia 2045.	Universitas Brawijaya Brawijaya University
3.	Musyawarah Nasional UNIID UNIID National Conference	Mendorong Peran Perguruan Tinggi Melalui Keahlian dan Kepakaran Akademisi untuk Pembangunan Infrastruktur Daerah.	Encouraging the Role of Higher Education through Skills and Expertise of Academics for Local Infrastructure Development.	Universitas Brawijaya Brawijaya University
4.	Seminar Nasional National Seminar	Peran BUMN untuk Pembangunan Berkelanjutan: Strategi Pemanfaatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan.	The Role of SOEs for Sustainable Development: Strategies for Utilization of Separated State Assets.	Universitas Andalas Andalas University
5.	Indonesia *Infrastructure Roundtable* (IIR) ke-26 26th Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR)	Penguatan Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Identifikasi Pemangku Kepentingan dan Perumusan Kebijakan Terkait Penyediaan Lahan Dalam Rangka Percepatan Pemabngunan di Sumatera Barat.	Strengthening Land Acquisition Policy for Public Interest: Identification of Stakeholders and Policy Formulation in Land Provision to Accelerate Development in West Sumatra.	Universitas Andalas Andalas University
6.	Seminar Nasional dan Peluncuran Buku National Seminar and Book Launch	Bersama Memajukan Indonesia Timur: Membangun Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan yang Inklusif melalui Skema Pembiayaan Kreatif.	Advancing Eastern Indonesia Together: Building Inclusive Sustainable Economic Infrastructure via Creative Financing Schemes.	Universitas Pattimura Pattimura University

Sebagai wujud keberlanjutan komitmen PT PII untuk terus meng-amplifikasi pentingnya pembiayaan inovatif dalam pembangunan infrastruktur, kemitraan IIGF Institute dengan *Community of Practice* (CoP) INFINITY (*Innovative Financing Community) "Beyond Knowledge for Better Infrastructure*" - yang diperkenalkan PT PII pada tahun 2023 - kembali mencatat perjalanan penting peran para anggotanya dalam merumuskan rekomendasi kebijakan terkait penyediaan infrastruktur melalui *stakeholder management* dengan menyelenggarakan:

1. **CoP INFINITY *Gathering* Tahun 2024**
   CoP INFINITY Gathering Tahun 2024 bertemakan Diskusi Keberlanjutan Konektivitas Infrastruktur untuk Indonesia Emas 2045 yang didukung oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2024 di Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, para narasumber yang terdiri dari (1) Bapak Herry Trisaputra Zuna – Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (2) Bapak Wahyu Utomo – Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang,

As a form of IIGF's continued commitment to amplify the importance of innovative financing in infrastructure development, IIGF Institute partners with the Community of Practice (CoP) INFINITY (Innovative Financing Community) "Beyond Knowledge for Better Infrastructure" - which was introduced in 2023 - again noted the important role of its members in formulating policy recommendations related to infrastructure provision through stakeholder management by organizing:

1. **CoP INFINITY Gathering in 2024**
   2024 CoP INFINITY Gathering with the theme of Sustainability Discussion on Infrastructure Connectivity for Golden Indonesia 2045 supported by the Ministry of Transportation and the Ministry of Public Works. The event was held on 26 March 2024 at the Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. The speakers were (1) Mr. Herry Trisaputra Zuna – Director General of Infrastructure Financing, Ministry of Public Works and Housing, (2) Mr. Wahyu Utomo – Deputy of Regional Development and Spatial Planning, Coordinating Ministry for Economic Affairs, (3) Mrs. Siti Maimunah – Head of Center for

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, (3) Ibu Siti Maimunah – Kepala Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi, Kementerian Perhubungan, Bapak Andre Permana – Direktur Bisnis PT PII, dan dimoderatori oleh Ibu Prita Amalia – Pengajar Tetap Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran mengulas dan mendiskusikan bersama upaya reformasi penyediaan infrastruktur yang melibatkan program – program strategis Pemerintah yang diperankan oleh masing – masing fungsi Kementerian terkait demi keberlanjutan konektivitas infrastruktur untuk Indonesia Emas 2045.

2. **INCoTalk #2 (*Innovative FInancing Community Talk*)**
   Sesi Berbagi Inspirasi Mengubah Pengalaman dan Data menjadi Tulisan yang Persuasif dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2024 di *Mainhall* PT PII. Sesi tersebut menghadirkan seorang pakar di bidang Kebijakan Publik dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Matondang Elsa Siburian, PhD untuk menyampaikan pentingnya menyusun tulisan yang efektif dan berbasis data untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih baik. Sesi ini berlangsung dengan komunikasi yang interaktif dengan peserta untuk memahami metode penulisan yang dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dalam berbagai jenis tulisan dan mengolah data menjadi narasi yang kuat.
3. **INCoTalk #3**
   INCoTalk #3 bertemakan Bersama Memajukan Indonesia Timur: Membangun Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan yang Inklusif melalui Skema Pembiayaan Kreatif dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024 di Universitas Pattimura, Ambon, dihadiri oleh Pemerintah Kota Ambon, BUMD di Maluku, Perbankan, Akademisi di lingkungan, Universitas Pattimura serta para pemangku kepentingan terkait yang tergabung dalam *Community of Practice Innovative Financing Community* (CoP INFINITY). Diskusi berjalan dengan berbagai sudut pandang yang disampaikan memperkaya wawasan para peserta mengenai pentingnya pembiayaan kreatif dalam mendukung Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di wilayah Indonesia Timur.
4. ***Newsletter Digital***
   Enam edisi newsletter digital dwi-bulanan CoP INFINITY yang secara rutin menyebarluaskan info terbaru dari aktivitas terkait infrastruktur dan kegiatan anggota CoP INFINITY kepada para anggotanya.

Transportation Infrastructure Financing, Ministry of Transportation, Mr. Andre Permana – Business Director of IIGF, and moderated by Mrs. Prita Amalia – Lecturer at the Faculty of Law, Padjadjaran University. They reviewed and discussed together the efforts to reform the provision of infrastructure involving the Government's strategic programs played by each of the relevant Ministry functions for the sustainability of infrastructure connectivity for the Golden Indonesia 2045.

2. **INCoTalk #2 (Innovative FInancing Community Talk)**
   The Inspiration Sharing Session Turning Experience and Data into Persuasive Writing was held on 2 December 2024 at the Main Hall of IIGF. The session was hosted by an expert in Public Policy from the Directorate General of Taxes, Ministry of Finance, Matondang Elsa Siburian, Ph.D., to convey the importance of compiling effective and data-based writing to support better policy making. This session took place with interactive communication with participants to understand writing methods that can improve communication effectiveness in various types of writing and process data into strong narratives.
3. **INCoTalk #3**
   INCoTalk #3 with the theme Advancing Eastern Indonesia Together: Building Inclusive Sustainable Economic Infrastructure via Creative Financing Schemes, was held on 4 December 2024 at Pattimura University, Ambon, attended by the Ambon Municipal, Local-Owned Enterprises in Maluku, Banks, Academics, Pattimura University, and related stakeholders who are members of the Community of Practice Innovative Financing Community (CoP INFINITY). The discussion pointed various viewpoints to enrich the participants' insights into the importance of creative financing in supporting sustainable infrastructure development in Eastern Indonesia.
4. **Digital Newsletter**
   Six editions of CoP INFINITY's bi-monthly digital newsletter have been disseminated to its members for latest information in terms of infrastructure-related activities and CoP INFINITY members' activities.

PROFITABILITAS PER SEGMEN
PROFITABILITY BY SEGMENT

KOMPONEN PENDAPATAN USAHA
COMPONENTS OF REVENUES

Sejalan dengan perluasan mandat yang tertuang dalam Anggaran Dasar serta penugasan yang diberikan oleh Pemerintah, PT PII mengelola bisnisnya dalam empat segmen usaha utama, yaitu Penjaminan Proyek Infrastruktur; Pengelolaan Dana; Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi; dan Segmen Lainnya

In line with the expansion of the mandated in the Articles of Association and the assignments given by the Government, IIGF manages four main business segments, i.e., Infrastructure Project Guarantee; Fund Management; Project Development Facility; and Other Segments.

Pembagian segmen usaha ini selaras dengan struktur pendapatan Perseroan, yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu Pendapatan Penjaminan; Pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi; Pendapatan Pengelolaan Dana; serta Pendapatan Lain-lain yang juga turut berkontribusi dalam keseluruhan pendapatan Perseroan. Struktur ini dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih transparan dan komprehensif mengenai operasi bisnis serta kinerja keuangan Perseroan, sehingga mendukung efektivitas strategi bisnis dan pertumbuhan berkelanjutan.

This division of business segments is in line with the Company's revenue structure, which is grouped into three main categories, i.e., Guarantee Income; Project Development Facility Income; Income from Fund Management; and Other Revenue, which also contributes to the Company's overall revenue. This structure is designed to provide a more transparent and comprehensive picture of the Company's business operations and financial performance, thereby supporting the effectiveness of business strategy and sustainable growth.

Tabel Komponen dan Komposisi Pendapatan Usaha
Table: Components and Composition of Revenues

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)(expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Komponen Pendapatan Components of Revenues	2024		2023	
	Nilai Mark	Komposisi Composition	Nilai Mark	Komposisi Composition
Pendapatan Penjaminan Revenue from Guarantee	310.054.107	20,85%	232.353.547	17,63%
Pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi Revenue from project preparation and transaction advisory	70.265.155	4,73%	70.529.576	5,35%
Pendapatan Pengelolaan Dana Income from Investments	1.091.915.052	73,43%	1.009.080.358	76,56%
Pendapatan Lainnya Other Income	14.696.272	0,99%	6.042.076	0,46%
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenues	**1.486.930.586**	**100,00%**	**1.318.005.557**	**100,00%**

Grafik Komposisi Pendapatan Per Segmen
Graph: Revenue Composition by Segment

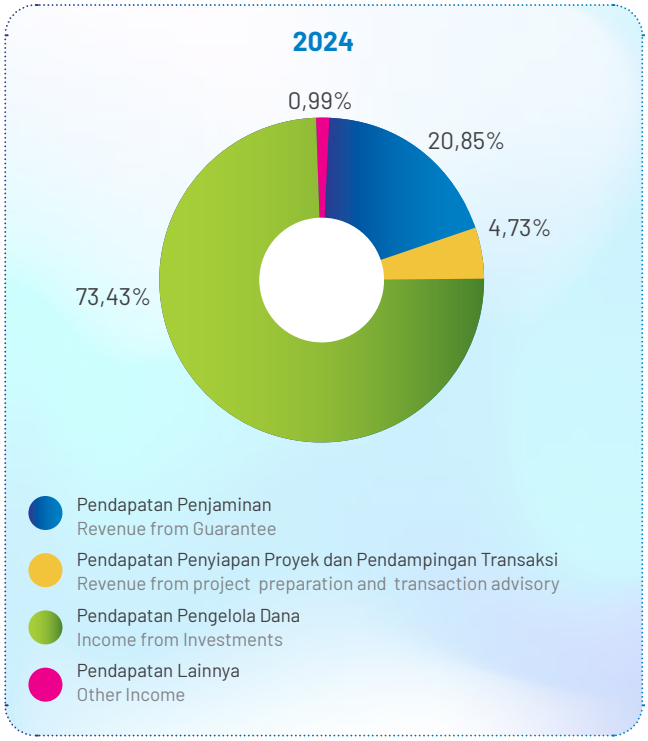

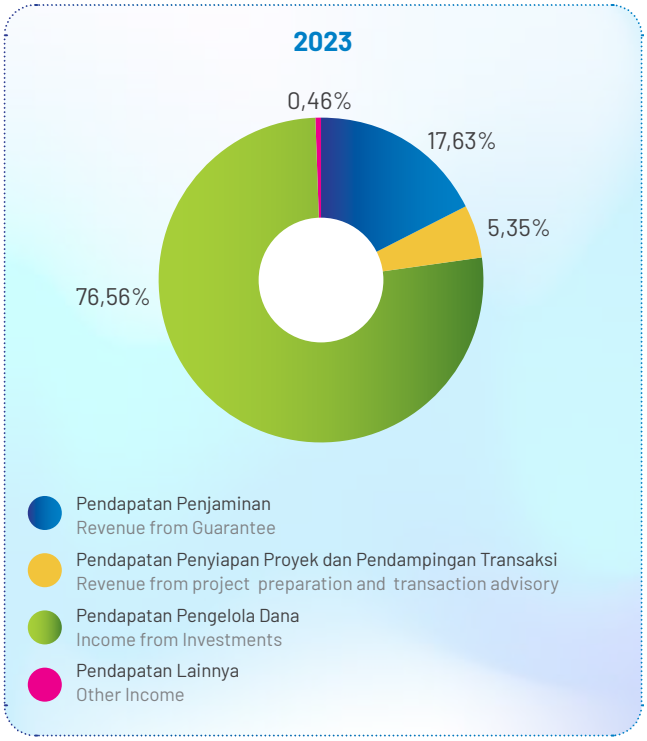

PROFITABILITAS DAN KINERJA KEUANGAN PER SEGMEN
PROFITABILITY AND FINANCIAL PERFORMANCE BY SEGMENT

PENDAPATAN SEGMEN PENJAMINAN
REVENUE FROM GUARANTEE

Pendapatan yang diperoleh segmen penjaminan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp310,05 miliar, yaitu meningkat 33,44% dibandingkan perolehan pada tahun 2023 sebesar Rp232,35 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh terdapat realisasi estimasi kewajiban kontinjensi korporasi PEN di tahun 2024 sebesar Rp115,14 miliar (2023: Rp 66,03 miliar)

The revenue earned by the guarantee segment in 2024 was Rp310.05 billion, increased by 33.44% compared to the revenue earned in 2023 of Rp232.35 billion. This increase was mainly due to the realization of estimated contingent liabilities of PEN corporation in 2024 amounted to Rp115.14 billion (2023: Rp66.03 billion)

Grafik Pendapatan Segmen Penjaminan
Graph: Revenue from Guarantee

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(expressed in thousands Rupiah)

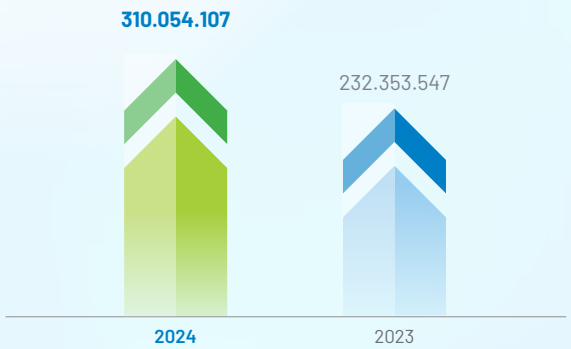

PENDAPATAN SEGMEN PENYIAPAN PROYEK DAN PENDAMPINGAN TRANSAKSI
REVENUE FROM PROJECT PREPARATION AND TRANSACTION ADVISORY

Pada tahun 2024 pendapatan yang diperoleh segmen Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi sebesar Rp70,27 miliar, yaitu sedikit lebih rendah 0,37% dibandingkan perolehan di tahun 2023 sebesar Rp70,53 miliar. Hal ini utamanya dikontribusi oleh telah berakhirnya penugasan proyek PDF TPAS Piyungan, Rusunawa Cisaranten, dan Jargas Batam.

In 2024, the revenue earned by the Project Development Facility was Rp70.27 billion, which was slightly lower by 0.37% compared to the revenue in 2023 of Rp70.53 billion. This was mainly contributed by the end of the project assignments of PDF TPAS Piyungan, Rusunawa Cisaranten, and Jargas Batam.

Grafik Pendapatan Segmen Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi
Graph: Revenue from project preparation and transaction advisory

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(expressed in thousands Rupiah)

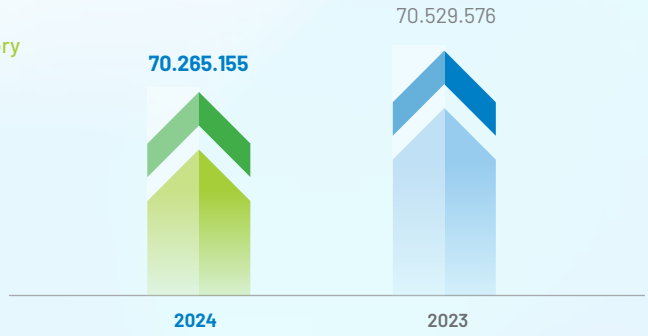

PENDAPATAN SEGMEN PENGELOLAAN DANA
INCOME FROM INVESTMENTS

Pada tahun 2024 pendapatan yang diperoleh segmen pengelolaan dana sebesar Rp1,09 triliun, yaitu meningkat 8,21% dibandingkan perolehan di tahun 2024 sebesar Rp1,01 triliun. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh terutama dipengaruhi oleh kenaikan penempatan deposito dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun dan rata-rata tingkat pengembalian investasi sebesar 6,81% atau 81 bps di atas suku bunga acuan.

In 2024, the revenue earned by the fund management was Rp1.09 trillion, increased by 8.21% compared to the revenue in 2023 of Rp1.01 trillion. This increase was mainly influenced by an increase in deposit placements with a maturity period of more than 3 months to 1 year, and an average investment return rate of 6.81% or 81 bps above the reference interest rate.

Grafik Pendapatan Segmen Pengelolaan Dana
Graph: Income from Investments

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(expressed in thousands Rupiah)

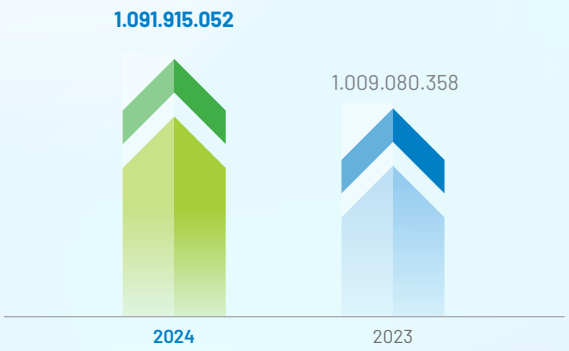

PENDAPATAN LAINNYA
OTHER INCOME

Pendapatan yang diperoleh segmen lainnya pada tahun 2024 adalah sebesar Rp14,70 miliar, yaitu meningkat 143,23% dibandingkan perolehan pada tahun 2023 sebesar Rp6,04 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan atas Pendapatan Bunga Regres terkait proyek SPAM selama tahun 2024.

The revenue earned by other segment in 2024 was Rp14.70 billion, increased by 143.23% compared to the revenue earned in 2023 of Rp6.04 billion. This increase was mainly due to an increase in Regress Interest Income related to the SPAM project in 2024.

Grafik Pendapatan Lainnya
Graph: Other Income

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(expressed in thousands Rupiah)

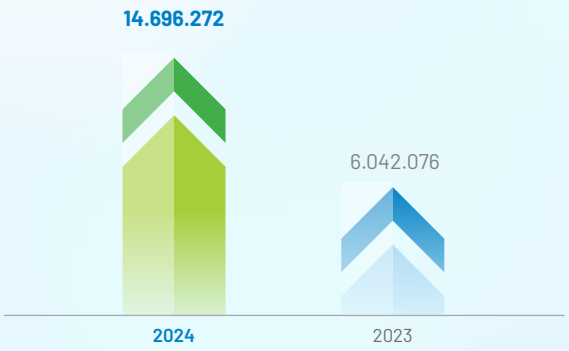

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan pada Laporan Tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan Audit untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) dengan rekan penanggung jawab adalah Jimmy Pangestu, S.E., CPA dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2025 dengan opini **"Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)"** dalam semua hal yang material.

Laporan keuangan Perseroan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia.

The financial performance discussion and analysis in this Annual Report refers to the Financial Statements for the years ending on 31 December 2024 and 2023, which have been audited by Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (a member firm of the PricewaterhouseCoopers network), with Mr. Jimmy Pangestu, S.E., CPA, as the partner in charge, in their respective reports dated 28 February 2025 with an **"Unqualified Opinion"** in all material respects.

The Company's financial reports have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of the Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) of the Indonesian Institute of Accountants.

ANALISIS POSISI KEUANGAN
FINANCIAL POSITION ANALYSIS

Posisi keuangan PT PII pada tahun 2024 terdiri dari jumlah aset sebesar Rp16,99 triliun, jumlah liabilitas sebesar Rp315,95 miliar, dan jumlah ekuitas sebesar Rp16,67 triliun.

IIGF's financial position in 2024 consists of total assets of Rp16.99 trillion, total liabilities of Rp315.95 billion, and total equity of Rp16.67 trillion.

Tabel Posisi Keuangan
Table: Financial Position

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			Persentase Percentage	Nominal
Jumlah aset Total assets	16.988.521.659	16.406.049.459	3,55%	582.472.200
Jumlah liabilitas Total liabilities	315.947.966	443.249.281	(28,72)%	(127.301.315)
Jumlah ekuitas Total equity	16.672.573.693	15.962.800.178	4,45%	709.773.515

ASET
ASSETS

Jumlah aset PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp16,99 triliun, yaitu mengalami peningkatan 3,55% atau Rp582,47 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp16,41 triliun.

In 2024, IIGF's total revenue was Rp16.99 trillion, increased by 3.55% or Rp582.47 billion compared to Rp16.41 trillion in 2023.

Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan pada penempatan deposito berjangka dengan jangka waktu jatuh tempo 3 bulan atau kurang pada 31 Desember 2024, yang terutama berasal dari arus kas dari aktivitas investasi sehingga berdampak pada kecukupan likuiditas Perseroan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya.

The increase was driven by a rise in time deposit placements with maturities of three months or less as of December 31, 2024, primarily sourced from cash flows generated by investing activities. This resulted in an improved liquidity position for the Company compared to the previous year.

Grafik Perkembangan Aset
Graph: Assets Development

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(expressed in thousands Rupiah)

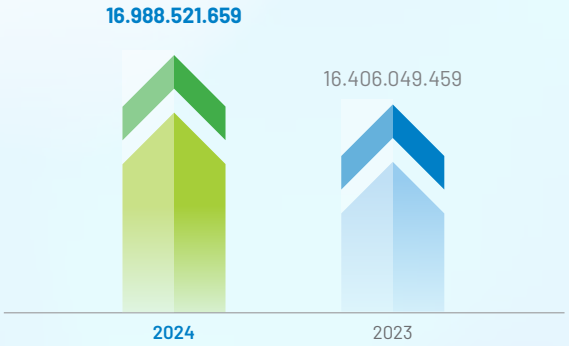

Tabel Jumlah Aset
Table: Total Assets

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			Persentase Percentage	Nominal
Kas dan setara kas Cash and Cash Equivalents	2.030.081.757	121.487.653	1.571,02%	1.908.594.104
Investasi Investment	14.423.560.381	15.793.648.683	(8,67)%	(1.370.088.302)
Piutang usaha setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai Account receivables net of allowance for impairment losses	402.385.200	327.574.789	22,84%	74.810.411
Piutang lainnya Other receivables	11.935.434	11.444.354	4,29%	491.080
Biaya dibayar dimuka dan uang muka Prepaid expenses and advances	1.099.038	3.106.223	(64,62)%	(2.007.185)
Aset tetap Fixed assets	9.619.207	13.550.832	(29,01)%	(3.931.625)
Aset hak-guna Right-of-use assets	28.615.680	45.313.785	(36,85)%	(16.698.105)
Aset takberwujud Intangible assets	4.923.545	4.287.126	14,84%	636.419
Beban tangguhan Deferred expenses	2.837.247	4.333.808	(34,53)%	(1.496.561)
Pajak dibayar dimuka Prepaid income taxes	9.169.276	5.030.281	82,28%	4.138.995
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	58.909.855	70.902.886	(16,91)%	(11.993.031)
Uang jaminan yang dapat dikembalikan Refundable deposits	5.385.039	5.369.039	0,30%	16.000
Jumlah Aset Total Assets	**16.988.521.659**	**16.406.049.459**	**3,55%**	**582.472.200**

KAS DAN SETARA KAS
CASH AND CASH EQUIVALENTS

Jumlah kas dan setara kas PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2,03 triliun, yaitu mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 1.571,02% atau Rp1,91 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp121,49 miliar.

IIGF's total cash and cash equivalents in 2024 amounted to Rp2.03 trillion, significantly increased by 1,571.02% or Rp1.91 trillion compared to 2023 of Rp121.49 billion.

Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penempatan deposito dengan jangka waktu jatuh tempo kurang dari 3 bulan.

This increase was mainly due to deposit placements with maturity periods of less than 3 months.

INVESTASI
INVESTMENT

Jumlah investasi PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp14,42 triliun, yaitu lebih rendah 8,67% atau Rp1,37 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp15,79 triliun.

In 2024, IIGF's total investment was Rp14.42 trillion, decreased by 8.67% or Rp1.37 trillion compared to Rp15.79 trillion in 2023.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh porsi penempatan deposito dengan jangka waktu jatuh tempo kurang dari 3 bulan lebih besar daripada tahun 2023.

This was mainly influenced by the portion of deposits with a maturity period of less than 3 months, which was greater than in 2023.

PIUTANG USAHA
TRADE RECEIVABLES

Jumlah piutang usaha PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp402,39 miliar, yaitu mengalami peningkatan 22,84% atau Rp74,81 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp327,57 miliar.

In 2024, IIGF's trade receivables amounted to Rp402.39 billion, increased by 22.84% or Rp74.81 billion compared to Rp327.57 billion in 2023.

Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan atas piutang pokok dan bunga regres selama 2024.

The increase was mainly due to an increase in principal receivables and recourse interest during 2024.

PIUTANG LAINNYA
OTHER RECEIVABLES

Jumlah piutang lainnya PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp11,94 miliar, yaitu mengalami peningkatan 4,29% atau Rp491,08 juta dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp11,44 miliar.

In 2024, IIGF's other receivables amounted to Rp11.94 billion, increased by 4.29% or Rp491.08 billion compared to Rp11.44 billion in 2023.

Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan deposit terkait asuransi kesehatan yang baru akan dibayarkan di tahun 2025.

The increase was mainly influenced by the addition of deposits related to health insurance which will only be paid in 2025.

BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA
PREPAID EXPENSES AND ADVANCES

Jumlah biaya dibayar dimuka dan uang muka PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1,10 miliar, yaitu lebih rendah 64,62% atau Rp2,01 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3,11 miliar.

In 2024, the total prepaid expenses and advances of IIGF amounted to Rp1.10 billion, which was 64.62% or Rp2.01 billion lower than in 2023 of Rp3.11 billion.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh biaya dibayar dimuka premi asuransi yang sudah teramortisasi secara full di tahun 2024 dan pembayaran premi asuransi berikutnya dilakukan di tahun 2025.

This was mainly due to the prepaid cost of insurance premium which was fully amortized in 2024 and the next insurance premium payment was made in 2025.

ASET TETAP
FIXED ASSETS

Jumlah aset tetap PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp9,62 miliar, yaitu lebih rendah 29,01% atau Rp3,93 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp13,55 miliar.

In 2024, IIGF's total fixed assets amounted to Rp9.62 billion, which was 29.01% or Rp3.93 billion lower than in 2023 of Rp13.55 billion.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh tidak terdapat penambahan aset tetap yang signifikan di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 yang terdapat penambahan aset tetap berupa kegiatan renovasi kantor.

This was mainly influenced by the fact that there was no significant addition of fixed assets in 2024 compared to 2023, where there was an addition of fixed assets in the form of office renovation activities.

ASET HAK-GUNA
RIGHT-OF-USE ASSETS

Jumlah aset hak guna PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp28,62 miliar, yaitu lebih rendah 36,85% atau Rp16,70 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp45,31 miliar.

In 2024, IIGF's right-of-use assets amounted to Rp28.62 billion, which was 36.85% or Rp16.70 billion lower than in 2023 of Rp45.31 billion.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh selama tahun 2024 tidak terdapat kontrak sewa baru untuk Aset Hak-Guna.

This was mainly due to the fact that there were no new lease contracts for Right-of-Use Assets during 2024.

ASET TAK BERWUJUD
NON-TANGIBLE ASSETS

Jumlah aset tak berwujud PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp4,92 miliar, yaitu mengalami peningkatan 14,84% atau Rp636,42 juta dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp4,29 miliar.

In 2024, IIGF's non-tangible assets amounted to Rp4.92 billion, increased by 14.84% or Rp636.42 million compared to Rp4.29 billion in 2023.

Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh terdapat implementasi Aplikasi *Governance, Risk & Compliance* (GRC) dan *Enhancement Website* IIGF *Institute* di tahun 2024.

The increase was mainly influenced by the implementation of Governance, Risk & Compliance (GRC) Application and IIGF Institute Website Enhancement in 2024.

BEBAN TANGGUHAN
DEFERRED EXPENSES

Jumlah beban tangguhan PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2,84 miliar, yaitu lebih rendah 34,53% atau Rp1,50 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp4,33 miliar.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh telah terealisasinya beban tangguhan penjaminan sejalan dengan beberapa proyek yang telah dilaksanakan penandatanganan penjaminannya di tahun 2024.

In 2024, IIGF's total deferred expenses amounted to Rp2.84 billion, which was 34.53% or Rp1.50 billion lower than in 2023 of Rp4.33 billion.

This was mainly influenced by the realization of deferred guarantee expenses in line with several projects that have been signed in 2024.

PAJAK DIBAYAR DIMUKA
PREPAID INCOME TAXES

Jumlah pajak dibayar di muka PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp9,17 miliar, yaitu mengalami peningkatan 82,28% atau Rp4,14 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp5,03 miliar.

Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SPKLB) tahun 2023 yang baru diterima di tahun 2025.

In 2024, IIGF's prepaid taxes amounted to Rp9.17 billion, increased by 82.28% or Rp4.14 billion compared to Rp5.03 billion in 2023.

The increase was mainly due to the payment of Tax Assessment Letter of Overpayment (SPKLB) in 2023 which was only received in 2025.

ASET PAJAK TANGGUHAN
DEFERRED TAX ASSETS

Jumlah aset pajak tangguhan PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp58,91 miliar, yaitu lebih rendah 16,91% atau Rp11,99 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp70,90 miliar.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh efek dari beban pajak tangguhan atas realisasi estimasi kontinjensi penjaminan korporasi bersama di tahun 2024.

In 2024, IIGF's total deferred tax assets amounted to Rp58.91 billion, which was 16.91% or Rp11.99 billion lower than in 2023 of Rp70.90 billion.

This was mainly due to the effect of deferred tax expense on the realization of contingent estimate of joint corporate guarantee in 2024.

UANG JAMINAN YANG DAPAT DIKEMBALIKAN
REFUNDABLE DEPOSITS

Jumlah uang jaminan yang dapat dikembalikan PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp5,39 miliar, yaitu mengalami peningkatan 0,30% atau Rp2,00 juta dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp5,37 miliar.

Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan deposit untuk sewa apartemen.

In 2024, IIGF's refundable deposit amounted to Rp5.39 billion, increased by 0.30% or Rp16.00 million compared to Rp2.00 billion in 2023.

The increase was mainly due to additional deposits for apartment rentals.

LIABILITAS
LIABILITIES

Jumlah liabilitas PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp315,95 miliar, yaitu lebih rendah 28,72% atau Rp127,30 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp443,25 miliar.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya realisasi atas estimasi kontinjensi penjaminan korporasi bersama di tahun 2024.

IIGF's total liabilities in 2024 amounted to Rp315.95 billion, which was 28.72% or Rp127.30 billion lower than in 2023 of Rp443.25 billion.

This was mainly due to the realization of the contingent estimate of joint corporate guarantees in 2024.

Grafik Perkembangan Liabilitas
Graph: Liabilities Development

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(expressed in thousands Rupiah)

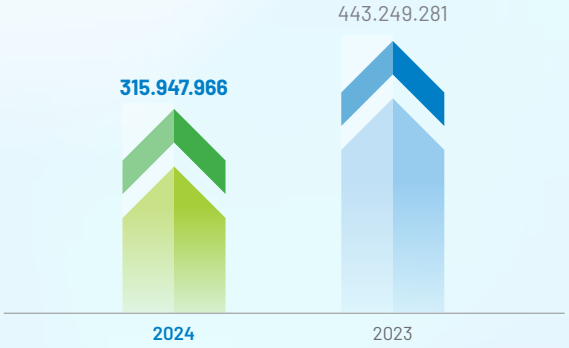

Tabel Jumlah Liabilitas
Table: Total Liabilities

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			Persentase Percentage	Nominal
Utang usaha Account payable	6.731.077	14.044.779	(52,07)%	(7.313.702)
Utang pajak Taxes payable	1.531.600	3.845.808	(60,17)%	(2.314.208)
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain Accrued expenses, provisions, and other payables	117.924.523	162.668.910	(27,51)%	(44.744.387)
Pendapatan tangguhan Unearned income	71.794.931	130.836.305	(45,13)%	(59.041.374)
Liabilitas sewa pembiayaan Financial lease liabilities	31.198.399	46.200.522	(32,47)%	(15.002.123)
Pinjaman penerusan Two-step loans	54.586.445	55.126.686	(0,98)%	(540.241)
Liabilitas imbalan kerja Employee benefits obligation	32.180.991	30.526.271	5,42%	1.654.720
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**315.947.966**	**443.249.281**	**(28,72)%**	**(127.301.315)**

UTANG USAHA
ACCOUNT PAYABLES

Jumlah utang usaha PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp6,73 miliar, yaitu lebih rendah 52,07% atau Rp7,31 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp14,04 miliar.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh pelunasan atas utang usaha tahun 2023 terkait pekerjaan renovasi kantor yang dilakukan di tahun 2024 sehingga secara mutasi utang usaha di tahun 2024 terdapat penurunan yang signifikan.

In 2024, IIGF's total trade payables amounted to Rp6.73 billion, which was 52.07% or Rp7.31 billion lower than in 2023 of Rp14.04 billion.

This was mainly influenced by the repayment of trade payables in 2023 related to office renovation work carried out in 2024 so that in mutation trade payables in 2024 there was a significant decrease.

UTANG PAJAK
TAXES PAYABLE

Jumlah utang pajak PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1,53 miliar, yaitu lebih rendah 60,17% atau Rp2,31 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3,85 miliar.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh lebih bayar atas PPh 21 di periode Desember 2024 dan akan dikompensasikan di tahun 2025.

In 2024, IIGF's taxes payable amounted to Rp1.53 billion, which was 60.17% or Rp2.31 billion lower than in 2023 of Rp3.85 billion.

This was mainly influenced by the overpayment of Income Tax 21 in December 2024 and will be compensated in 2025.

BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR, PENYISIHAN, DAN UTANG LAIN-LAIN
ACCRUED EXPENSES, PROVISIONS, AND OTHER PAYABLES

Jumlah biaya yang masih harus dibayar, penyisihan, dan utang lain-lain PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp117,92 miliar, yaitu lebih rendah 27,51% atau Rp44,74 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp162,67 miliar.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh Nilai Estimasi Kontinjensi Korporasi PEN yang direalisasikan di tahun 2024 lebih besar daripada tahun 2023.

In 2024, the total accrued expenses, provisions, and other payables of IIGF amounted to Rp117.92 billion, which was 27.51% or Rp44.74 billion lower than in 2023 of Rp162.67 billion.

This was mainly influenced by the PEN Corporation Contingent Estimated Value realized in 2024 which was greater than in 2023.

PENDAPATAN TANGGUHAN
UNEARNED INCOME

Jumlah pajak tangguhan PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp71,79 miliar, yaitu lebih rendah 45,13% atau Rp59,04 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp130,84 miliar.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh selama tahun 2024 tidak terdapat pendapatan tangguhan baru yang signifikan dibandingkan tahun 2023.

IIGF's total unearned income in 2024 was Rp71.79 billion, which was 45.13% or Rp59.04 billion lower than in 2023 amounting to Rp130.84 billion.

This was mainly due to the fact that during 2024 there was no significant new deferred income compared to 2023.

LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN
FINANCIAL LEASE LIABILITIES

Jumlah liabilitas sewa pembiayaan PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp31,20 miliar, yaitu lebih rendah 32,47% atau Rp15,00 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp46,20 miliar.

IIGF's total financial lease liabilities in 2024 amounted to Rp31.20 billion, which was 32.47% or Rp15.00 billion lower than in 2023 of Rp46.20 billion.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh selama tahun 2024 tidak terdapat kontrak sewa baru untuk Aset Hak-Guna sehingga mutasi atas liabilitas sewa pembiayaan hanya berasal dari beban bunga.

This was mainly due to the fact that there were no new lease contracts for Right-of-Use Assets during 2024, so the mutation of finance lease liabilities only came from interest expense.

PINJAMAN PENERUSAN
TWO-STEP LOANS

Jumlah pinjaman penerusan PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp54,59 miliar, yaitu lebih rendah 0,98% atau Rp540,24 juta dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp55,13 miliar.

IIGF's two-step loans loan in 2024 was Rp54.59 billion, which was 0.98% or Rp540.24 million lower than in 2023 of Rp55.13 billion.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya pembayaran pertama atas cicilan pokok pinjaman penerusan sebesar Rp540,24 juta di tahun 2024.

This was mainly due to the first payment of principal installments of the forwarding loan amounting to Rp540.24 million in 2024.

LIABILITAS IMBALAN KERJA
EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATIONS

Jumlah liabilitas imbalan kerja PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp32,18 miliar, yaitu mengalami peningkatan 5,42% atau Rp1,65 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp30,53 miliar.

In 2024, IIGF's employee benefits obligation amounted to Rp32.18 billion, increased by 5.42% or Rp1.65 billion compared to Rp30.53 billion in 2023.

Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh pengakuan akrual liabilitas imbalan kerja bulanan yang lebih tinggi dari tahun 2023.

The increase was mainly influenced by the recognition of higher monthly employee benefit liability accruals from 2023.

EKUITAS
EQUITY

Jumlah ekuitas PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp16,67 triliun, yaitu mengalami peningkatan 4,45% atau Rp709,77 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp15,96 triliun.

In 2024, IIGF's total equity was Rp16.67 trillion, increased by 4.45% or Rp709.77 billion compared to Rp15.96 trillion in 2023.

Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan atas laba tahun berjalan 2024.

The increase was mainly influenced by the increase in profit for the year 2024.

Hal ini terutama berdampak pada stabilitas Perseroan dan indikator kesehatan keuangan yang lebih baik.

This has mainly resulted in the Company's stability and better financial health indicators.

Grafik Ekuitas
Graph: Equity

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(expressed in thousands Rupiah)

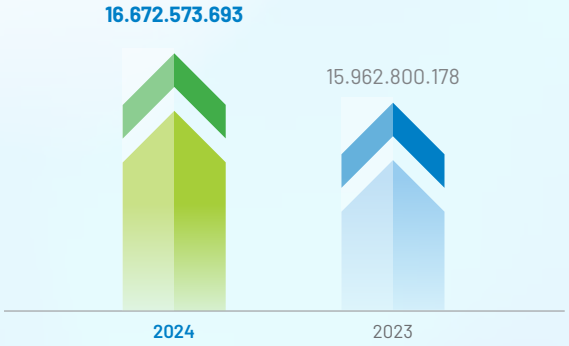

Tabel Jumlah Ekuitas
Table: Total Equity

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			Persentase Percentage	Nominal
Modal saham Share capital	10.655.000.000	10.655.000.000	-	-
Laba belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Unrealized gain from financial assets at fair value through other comprehensive income	85.062.184	142.007.600	(40,10)%	(56.945.416)
Keuntungan aktuarial, setelah pajak Gain from actuarial, net of tax	3.852.899	848.646	354,01%	3.004.253
Saldo laba: Retained earnings:				
Ditentukan penggunaannya - cadangan wajib Appropriated - statutory reserve	306.270.126	264.478.126	15,80%	41.792.000
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	5.622.388.484	4.900.465.806	14,73%	721.922.678
Jumlah Ekuitas Total Equity	**16.672.573.693**	**15.962.800.178**	**4,45%**	**709.773.515**

MODAL SAHAM
SHARE CAPITAL

Jumlah modal saham PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp10,66 triliun sama dengan tahun 2023. Modal saham ini terdiri dari modal dasar sebanyak 20.000.000 lembar saham serta modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 10.655.000 lembar saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham.

In 2024, IIGF's total equity amounted to Rp10.66 trillion, the same as in 2023. The share capital consists of authorized capital of 20,000,000 shares and issued and fully paid capital of 10,655,000 shares, with a nominal value of Rp1,000,000 per share.

LABA BELUM DIREALISASI ATAS KEPEMILIKAN ASET KEUANGAN YANG DIUKUR PADA NILAI WAJAR MELALUI PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

UNREALIZED GAIN FROM FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Jumlah laba belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada tahun 2024 adalah sebesar Rp85,06 miliar, yaitu lebih rendah 40,10% atau Rp56,95 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp142,01 miliar.

The total unrealized gain from financial assets at fair value through other comprehensive income in 2024 was Rp85.06 billion, which was 40.10% or Rp56.95 billion lower compared to Rp142.01 billion in 2023.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan *market rate* atas nilai investasi obligasi yang diukur pada nilai wajar selama tahun 2024.

This was mainly influenced by the decline in the market rate of bond investments at fair value in 2024.

KEUNTUNGAN AKTUARIAL, SETELAH PAJAK

GAIN FROM ACTUARIAL, NET OF TAX

Jumlah keuntungan aktuarial PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp3,85 miliar, yaitu mengalami peningkatan 354,01% atau Rp3,00 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp0,85 miliar.

The total actuarial gain of IIGF in 2024 was Rp3.85 billion, which increased by 354.01% or Rp3.00 billion compared to 2023 of Rp0.85 billion.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh efek OCI atas penyesuaian provisi imbalan kerja di tahun 2024.

This was mainly due to the OCI effect on the adjustment of employee benefits provision in 2024.

SALDO LABA

RETAINED EARNINGS

Jumlah saldo laba ditentukan penggunaannya - cadangan wajib PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp306,27 miliar, yaitu mengalami peningkatan 15,80% atau Rp41,79 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp264,48 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebesar Rp41,79 miliar.

In 2024, IIGF's retained earnings appropriated - statutory reserve amounted to Rp306.27 billion, increased by 15.80% or Rp41.79 billion compared to Rp264.48 billion in 2023. This increase was primarily driven by the additional allocation of net profit for the statutory reserve amounting to Rp41.79 billion.

Jumlah saldo laba belum ditentukan penggunaannya PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp5,62 triliun, yaitu mengalami peningkatan 14,73% atau Rp721,92 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp4,90 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan atas laba tahun berjalan 2024.

The total unappropriated retained earnings of IIGF in 2024 amounted to Rp5.62 trillion, an increase of 14.73% or Rp721.92 billion compared to 2023 of Rp4.90 trillion. The increase was mainly due to an increase in profit for the year 2024.

ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Pada tahun 2024, PT PII berhasil mencatatkan peningkatan kinerja keuangan yang positif. Perolehan pendapatan dan laba yang konsisten didukung oleh strategi yang tepat menjadi aspek pendorong utamanya.

In 2024, IIGF successfully recorded a positive financial performance. Consistent revenue and profit generation supported by the right strategy are the key driving aspects.

Tabel Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Table: Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			Persentase Percentage	Nominal
Pendapatan Revenues	1.486.930.586	1.318.005.557	12,82%	168.925.029
Beban usaha Operating expenses	(544.905.230)	(482.466.290)	12,94%	(62.438.940)
Laba sebelum pajak penghasilan Income before income tax	942.025.356	835.539.267	12,74%	106.486.089
(Beban)/Manfaat pajak penghasilan (Expense)/Income tax benefit	(11.145.678)	281.887	(4.053,95)%	(11.427.565)
Laba tahun berjalan Profit for the year	930.879.678	835.821.154	11,37%	95.058.524
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak Other comprehensive income for the year, after tax	(53.941.163)	116.344.837	(146,36)%	(170.286.000)
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	**876.938.515**	**952.165.991**	**(7,90)%**	**(75.227.476)**

PENDAPATAN
REVENUES

Jumlah pendapatan PT PII tahun 2024 sebesar Rp1,49 triliun, yaitu mengalami peningkatan 12,82% atau Rp168,93 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1,32 triliun.

In 2024, IIGF's total revenue was Rp1.49 trillion, increased by 12.82% or Rp168.93 billion compared to Rp1.32 trillion in 2023.

Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kontribusi dari pendapatan pengelolaan dana khususnya dari penempatan deposito selama tahun 2024 dengan rata- rata tingkat pengembalian investasi sebesar 6,8% atau 81 bps diatas rata-rata suku bunga acuan, selain itu pendapatan penjaminan juga mengalami peningkatan di tahun 2024 utamanya dikarenakan realisasi estimasi kontinjensi korporasi PEN yang lebih besar daripada tahun 2023.

The increase was mainly influenced by contributions from fund management income, especially from the placement of deposits during 2024 with an average investment return of 6.8% or 81 bps above the average benchmark interest rate, besides that guarantee income also increased in 2024 mainly due to the realization of the PEN corporate contingency estimate which was greater than in 2023.

Hal ini terutama berdampak pada kenaikan pada laba Perseroan di tahun 2024.

This mainly impacts the increase in the Company's profit in 2024.

Grafik Perkembangan Pendapatan
Graph: Revenue Development

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(expressed in thousands Rupiah)

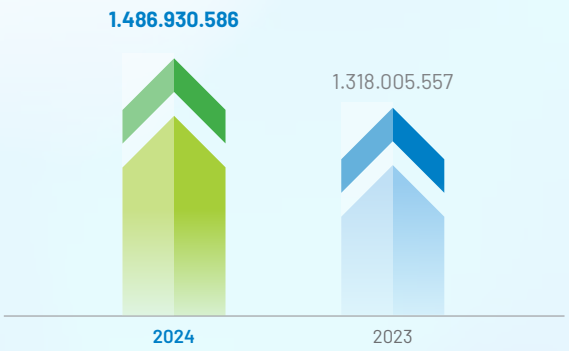

Tabel Pendapatan
Table: Revenue

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			Persentase Percentage	Nominal
Pendapatan penjaminan Revenue from guarantee	310.054.107	232.353.547	33,44%	77.700.560
Pendapatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi Revenue from project preparation and transaction advisory	70.265.155	70.529.576	(0,37)%	(264.421)
Pendapatan pengelolaan dana Income from investments	1.091.915.052	1.009.080.358	8,21%	82.834.694
Pendapatan lainnya Other income	14.696.272	6.042.076	143,23%	8.654.196
Jumlah Pendapatan Total Revenue	**1.486.930.586**	**1.318.005.557**	**12,82%**	**168.925.029**

BEBAN USAHA
OPERATING EXPENSES

Jumlah beban usaha PT PII tahun 2024 sebesar Rp544,91 miliar, yaitu mengalami peningkatan 12,94% atau Rp62,44 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp482,47 miliar.

Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya kerugian penurunan nilai atas piutang usaha di tahun 2024. Terkait pencatatan beban kerugian penurunan nilai ini berdampak pada pengurangan laba Perseroan, namun memberikan gambaran yang lebih akurat tentang risiko kredit yang dimiliki perusahaan.

In 2024, IIGF's operating expenses amounted to Rp544.91 billion, increased by 12.94% or Rp62.44 billion compared to Rp482.47 billion in 2023.

The increase was mainly influenced by the impairment loss on trade receivables in 2024. While the recording of this impairment loss has the effect of reducing the Company's profit, it provides a more accurate picture of the Company's credit risk.

Grafik Perkembangan Beban Usaha
Graph: Operating Expenses

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(expressed in thousands Rupiah)

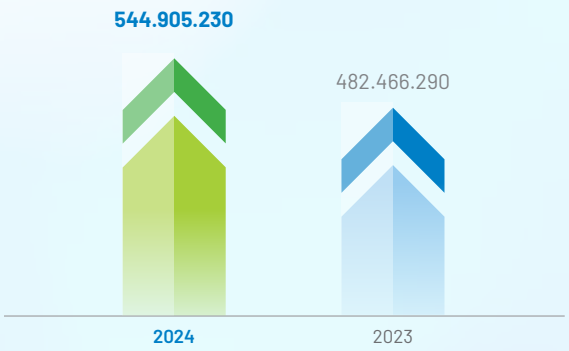

Tabel Beban Usaha
Table: Operating Expenses

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			Persentase Percentage	Nominal
Beban pajak final Final tax expenses	158.158.364	139.545.730	13,34%	18.612.634
Umum dan administrasi General and administrative	128.552.881	127.058.918	1,18%	1.493.963
Penjaminan Guarantee	87.923.483	77.191.609	(13,90%)	(10.731.874)
Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi Project development facility	81.570.951	76.928.221	6,04%	4.642.730
Pengembangan usaha Business development	38.665.474	35.617.112	8,56%	3.048.362
Kerugian penurunan nilai Impairment losses	38.913.580	16.775.000	131,97%	22.138.580
Beban bunga (termasuk beban bunga sewa pembiayaan) Interest expenses (including leasing interest expenses)	7.005.772	5.712.278	22,64%	1.293.494
Penyusutan Depreciation	4.702.176	3.163.028	48,66%	1.539.148
Amortisasi Amortization	1.963.944	2.145.325	(8,45)%	(181.381)
(Kerugian)/keuntungan kurs, bersih Currency exchange (loss)/gain, net	166.542	63.587	161,91%	102.955
Penghasilan keuangan, kotor Financial income, gross	1.986.883	1.428.073	39,13%	558.810
Lain-lain Others	397.970	306.445	29,87%	91.525
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	**544.905.230**	**482.466.290**	**12,94%**	**62.438.940**

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
INCOME BEFORE INCOME TAX

Jumlah laba sebelum pajak penghasilan PT PII tahun 2024 sebesar Rp942,03 miliar, yaitu mengalami peningkatan 12,74% atau Rp106,49 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp835,54 miliar.

Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan pada pendapatan tahun 2024.

In 2024, IIGF's income before tax amounted to Rp942.03 billion, increased by 12.74% or Rp106.49 billion compared to Rp835.54 billion in 2023.

The increase is mainly influenced by the increase in revenue in 2024.

LABA TAHUN BERJALAN
PROFIT FOR THE YEAR

Jumlah laba tahun berjalan PT PII tahun 2024 sebesar Rp930,88 miliar, yaitu mengalami peningkatan 11,37% atau Rp95,06 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp835,82 miliar.

In 2024, IIGF's income for the year amounted to Rp930.88 billion, increased by 11.37% or Rp95.06 billion compared to Rp835.82 billion in 2023.

Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh realisasi estimasi kontinjensi korporasi PEN pada tahun 2024 sebesar Rp115,14 miliar.

The increase was mainly due to the realization of PEN's corporate contingencies estimated in 2024 of Rp115.14 billion.

Hal ini terutama berdampak pada kenaikan pada ekuitas Perseroan di tahun 2024.

This mainly affected the increase in the Company's equity in 2024.

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN
OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan PT PII tahun 2024 sebesar Rp(53,94) miliar sedangkan untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp116,34 miliar.

Total other comprehensive income for the year of IIGF in 2024 was Rp(53.94) billion while in 2023 it was Rp116.34 billion.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan *market rate* atas investasi obligasi yang diukur pada nilai wajar selama tahun 2024.

This was mainly influenced by the decline in the market rate of bond investments measured at fair value during 2024.

Hal ini terutama berdampak pada kebijakan Perseroan dalam mengevaluasi pengelompokan investasi obligasi terkait dengan pencatatan yang diukur dengan nilai wajar atau pada biaya perolehan.

This mainly impacts the Company's policy in evaluating the grouping of bond investments related to recording at fair value or at cost.

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

PT PII berhasil membukukan laba komprehensif tahun berjalan tahun 2024 sebesar Rp876,94 miliar, yaitu lebih rendah 7,90% atau Rp75,23 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp952,17 miliar.

In 2024, IIGF's recorded comprehensive income for the year amounted to Rp876.94 billion, decreased by 7.90% or Rp75.23 billion compared to Rp952.17 billion in 2023.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh dikarenakan penurunan *market rate* atas investasi obligasi yang diukur pada nilai wajar selama tahun 2024.

This was mainly due to the decline in the market rate of bond investments measured at fair value during 2024.

Hal ini terutama berdampak pada kebijakan Perseroan dalam mengevaluasi pengelompokan investasi obligasi terkait dengan pencatatan yang diukur dengan nilai wajar atau pada biaya perolehan.

This mainly impacted the Company's policy in evaluating the grouping of bond investments related to recording at fair value or at cost.

ANALISIS ARUS KAS
CASH FLOW ANALYSIS

Jumlah kas dan setara kas PT PII pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2,03 triliun, yaitu mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 1.571,02% atau Rp1,91 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp121,49 miliar.

Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya deposito yang jatuh tempo pada akhir bulan Desember 2024 sehingga mempengaruhi arus kas investasi di tahun 2024.

Hal ini terutama berdampak pada kecukupan likuiditas Perseroan yang lebih baik di tahun 2024.

IIGF's total cash and cash equivalents in 2024 amounted to Rp2.03 trillion, significantly increased by 1,571.02% or Rp1.91 trillion compared to 2023 of Rp121.49 billion.

The increase was mainly influenced by the deposits that matured at the end of December 2024, thus affecting the investment cash flow in 2024.

This mainly impacts the Company's better liquidity adequacy in 2024.

Grafik Perkembangan Kas dan Setara Kas
Graph: Cash and Cash Equivalents

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(expressed in thousands Rupiah)

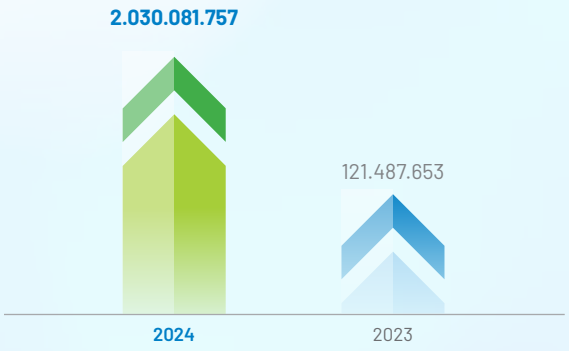

Tabel Arus Kas
Table: Cash Flow

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			Persentase Percentage	Nominal
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Net cash flows provided from operating activities	785.154.232	821.986.457	(4,48)%	(36.832.225)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Net cash provided from/(used for) investing activities	1.309.755.972	(676.862.832)	(293,50)%	1.986.618.804
Arus kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan Net cash flows (used in)/provided from financing activities	(186.316.100)	(157.942.340)	17,96%	(28.373.760)
Penurunan bersih kas dan setara kas Net decrease in cash and cash equivalents	1.908.594.104	(12.818.715)	(14.989,12)%	1.921.412.819
Kas dan setara kas awal tahun Cash and cash equivalents at the beginning of the year	121.487.653	134.306.368	(9,54)%	(12.818.715)
Jumlah Kas dan Setara Kas Akhir Tahun **Total Cash and Cash Equivalents at the End of the Year**	**2.030.081.757**	**121.487.653**	**1.571,02%**	**1.908.594.104**

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2024 sebesar Rp785,15 miliar, yaitu lebih rendah 4,48% atau Rp36,83 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp821,99 miliar.

The net cash flow from operating activities in 2024 amounted to Rp785.15 billion, decreased by 4.48% or equivalent to Rp36.83 billion from 2023, which was Rp821.99 billion.

Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan pembayaran piutang usaha di tahun 2024 yang lebih kecil dari tahun 2023. Terkait dengan perihal ini, Perseroan juga harus mencatatkan beban kerugian penurunan nilai yang lebih besar di tahun 2024.

The decrease was mainly influenced by the receipt of trade receivables payment in 2024 which was smaller than in 2023. Related to this matter, the Company also had to record a larger impairment loss expense in 2024.

Tabel Kas dari Aktivitas Operasi
Table: Cash Flows from Operating Activities

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			Persentase Percentage	Nominal
Laba sebelum pajak penghasilan ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas: Profit before income tax Plus items not affecting cash flow:	942.025.356	835.539.267	12,74%	106.486.089
- Beban penyusutan Depreciation expenses	4.702.176	3.163.028	48,66%	1.539.148
- Beban kerugian penurunan nilai Provision for impairment losses	38.913.580	16.775.000	131,97%	22.138.580
- Beban amortisasi Amortization expenses	1.963.944	2.145.325	(8,45)%	(181.381)
- Beban penyisihan imbalan kerja Expense from provision for employee	7.958.143	6.056.779	31,39%	1.901.364
- Beban amortisasi aset hak-guna Right-of-use assets amortization expense	17.228.322	18.237.353	(5,53)%	(1.009.031)
- Beban bunga sewa pembiayaan Finance lease interest expense	3.078.519	1.784.503	72,51%	1.294.016
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi **Operating cash flows before changes in operating assets and liabilities**	**1.015.870.040**	**883.701.255**	**14,96%**	**132.168.785**
(Kenaikan)/penurunan aset operasi: (Increase)/decrease in operating assets:				
- Piutang usaha Trade receivable	(113.723.991)	(49.629.330)	129,15%	(64.094.661)
- Piutang lainnya Other receivables	(491.080)	(1.559.770)	(68,52)%	1.068.690
- Biaya dibayar dimuka dan uang muka Prepaid expenses and advances	2.007.185	(281.385)	(813,32)%	2.288.570
- Beban tangguhan Deferred expenses	1.496.561	1.329.583	12,56%	166.978
- Pajak dibayar dimuka Prepaid taxes	(4.138.995)	(3.015.026)	37,28%	(1.123.969)

Uraian Description	2024	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			Persentase Percentage	Nominal
(Penurunan)/kenaikan liabilitas operasi: (Decrease)/increase in operating liabilities:				
- Utang usaha Account payable	(7.313.702)	4.051.619	(280,51)%	(11.365.321)
- Utang pajak Taxes payable	(2.314.208)	65.860	(3.613,83)%	(2.380.068)
- Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain Accrued expenses, provisions, and other payables	(44.744.387)	26.999.729	(265,72)%	(71.744.116)
- Pembayaran manfaat imbalan kerja Payment of employee benefit	(2.451.817)	(580.407)	322,43%	(1.871.410)
- Pendapatan tangguhan Unearned income	(59.041.374)	(39.095.671)	51,02%	(19.945.703)
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi **Changes in operating assets and liabilities**	**(230.715.808)**	**(61.714.798)**	**273,84%**	**(169.001.010)**
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi **Net cash flows provided from operating activities**	**785.154.232**	**821.986.457**	**(4,48)%**	**(36.832.225)**

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun 2024 sebesar Rp1,31 triliun mengalami peningkatan 293,5% atau sebesar Rp1,99 triliun dibandingkan tahun 2023 arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp676,86 miliar.

Net cash flows obtained from investment activities in 2024 amounted to Rp1.31 trillion, an increase of 293.5% or Rp1.99 trillion compared to 2023 net cash flows used for investment activities of Rp676.86 billion.

Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh karena terdapat penempatan deposito berjangka sebesar Rp5,45 triliun pada tahun 2024.

This was mainly due to the placement of time deposits amounting to Rp5.45 trillion in 2024.

Tabel Kas dari Aktivitas Investasi
Table: Cash Flows from Investing Activities

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			Persentase Percentage	Nominal
Penempatan investasi Investment income	1.313.142.886	(664.081.825)	(297,74)%	1.977.224.711
Pembelian aset tetap dan aset takberwujud Acquisition of fixed assets and intangible assets	(3.370.914)	(12.781.007)	(73,63)%	9.410.093
Penempatan uang jaminan yang dapat dikembalikan Refundable deposit	(16.000)	(12.781.007)	(99,87)%	12.765.007
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi **Net cash flow used in investing activities**	**1.309.755.972**	**(676.862.832)**	**(293,50)%**	**1.986.618.804**

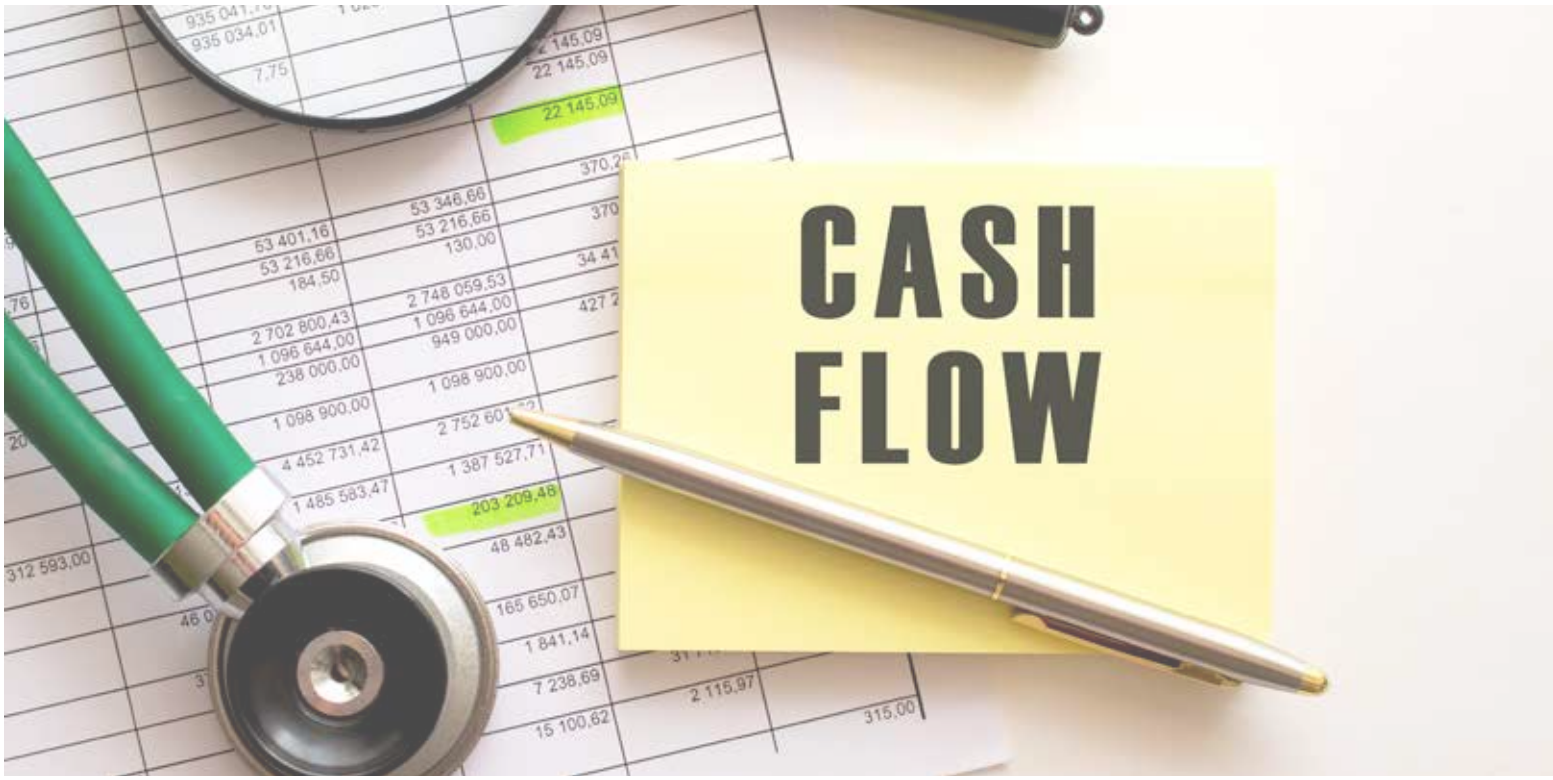

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2024 sebesar Rp186,32 miliar, yaitu mengalami peningkatan 17,96% atau Rp28,37 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp157,94 miliar.

The net cash flow from financing activities in 2024 amounted to Rp186.32 billion, increased by 17.96% or equivalent to Rp28.37 billion from 2023, which was Rp157.94 billion.

Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh pembayaran dividen selama tahun 2024 lebih besar daripada tahun 2023.

The increase was mainly influenced by dividend payments during 2024 being greater than in 2023.

Tabel Kas dari Aktivitas Pendanaan
Table: Cash Flows from Financing Activities

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			Persentase Percentage	Nominal
Pembayaran pinjaman penerusan Two-step loans payment	(540.241)	-	(100,00)%	(540.241)
Pembayaran dividen Dividend payment	(167.165.000)	(142.834.725)	17,03%	(24.330.275)
Pembayaran sewa Payment for lease	(18.610.859)	(15.107.615)	23,19%	(3.503.244)
Arus Kas Bersih (Digunakan untuk)/Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan **Net cash flows (used in)/provided from financing activities**	**(186.316.100)**	**(157.942.340)**	**17,96%**	**(28.373.760)**

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

SOLVENCY AND COLLECTABILITY LEVEL OF RECEIVABLES

Sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) yang menyediakan layanan penjaminan, Perseroan menghadapi risiko likuiditas yang berkaitan dengan potensi ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban finansial, baik atas klaim yang telah diajukan maupun klaim potensial atas risiko-risiko yang ditanggung dalam perjanjian penjaminan.

As an Infrastructure Guarantee Agency (BUPI) that provides guarantee services, the Company faces liquidity risk related to the potential inability to fulfill financial obligations, both for claims that have been submitted and potential claims for risks borne in the guarantee agreement.

Untuk mengelola dan memitigasi risiko tersebut, Perseroan secara aktif menyesuaikan portofolio investasinya dengan kewajiban finansial yang timbul dari klaim yang telah diajukan serta memperhitungkan profil jatuh tempo dari potensi klaim yang dapat terjadi di masa mendatang. Perseroan secara berkala melakukan analisis dan identifikasi terhadap kebutuhan likuiditas guna memastikan kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban finansial.

To manage and mitigate such risks, the Company actively adjusts its investment portfolio to the financial obligations arising from claims that have been filed and considers the maturity profile of potential claims that may occur in the future. The Company regularly analyses and identifies liquidity needs to ensure sufficient funds to meet financial obligations.

Selain itu, analisis ini didukung oleh strategi investasi yang selaras dengan regulasi yang berlaku serta kebijakan investasi yang bersifat konservatif. Pendekatan ini memungkinkan Perseroan untuk mengelola risiko likuiditas secara optimal, sehingga memastikan keberlanjutan operasional dan keandalan layanan penjaminan yang diberikan.

In addition, this analysis is supported by an investment strategy that is aligned with prevailing regulations and conservative investment policy. This approach allows the Company to optimally manage liquidity risk, thus ensuring operational sustainability and reliability of the guarantee services provided.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PENDEK

SHORT-TERM SOLVENCY

Dalam rangka memastikan kapasitas keuangan yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, Perseroan menerapkan pengukuran likuiditas melalui dua indikator utama, yaitu Rasio Kas dan Rasio Lancar. Rasio Kas mengukur kemampuan Perseroan dalam melunasi liabilitas jangka pendek secara langsung menggunakan kas dan setara kas, yang merupakan aset paling likuid. Sedangkan, Rasio Lancar digunakan untuk menilai sejauh mana aset lancar yang dimiliki Perseroan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

The Company has liquidity measurement in two main indicators, i.e., Cash Ratio and Current Ratio to ensure adequate financial capacity to fulfill short-term obligations. Cash Ratio assesses the Company's ability to settle short-term liabilities directly using cash and cash equivalents, which are the most liquid assets. Current Ratio is used to assess the extent to which the Company's current assets can be used to fulfill its short-term liabilities.

Perseroan senantiasa menjaga tingkat likuiditas yang optimal dengan memiliki cadangan kas dan setara kas yang memadai, serta investasi yang dikelola secara prudent. Dengan strategi manajemen likuiditas yang baik, Perseroan memastikan stabilitas keuangan yang mendukung keberlanjutan operasional dan pemenuhan kewajiban finansial secara tepat waktu.

The Company maintains an optimal level of liquidity by having adequate cash and cash equivalent, as well as prudently managed investments. Under good liquidity management strategy, the Company ensures financial stability that supports operational sustainability and timely fulfillment of financial obligations.

Tabel Kinerja Rasio Likuiditas
Table: Liquidity Ratio Performance

(dinyatakan dalam %) (in %)

Uraian Description	2024	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease
Rasio Kas Cash Ratio	13.039	8.814	4.225
Rasio Lancar Current Ratio	11.096	7.414	3.682

Dari rasio-rasio likuiditas, tingkat likuiditas Perseroan pada tahun 2024 tercatat mengalami peningkatan kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio lancar mengalami peningkatan dari 7.414% pada tahun 2023 menjadi 11.096% di tahun 2024, sedangkan rasio kas mengalami peningkatan dari 8.814% pada tahun 2023 menjadi 13.039% di tahun 2024.

From the liquidity ratios, the Company's liquidity level in 2024 recorded a performance increase compared to the previous year. The current ratio increased by 7.414% from 2023 to 11.096% in 2024, while the cash ratio also increased from 2023 of 8.814% to 13.039% in 2024.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PANJANG
LONG-TERM SOLVENCY

Hingga akhir tahun 2024, saldo utang jangka panjang Perseroan terutama berupa pinjaman penerusan yang dipergunakan untuk meningkatkan kapasitas dan teknis operasi Perseroan melalui dukungan Bank Dunia (World Bank) senilai Rp54,59 miliar yang mengalami penurunan dari Rp55,13 miliar di tahun 2023 karena adanya pembayaran angsuran pokok pinjaman penerusan sebesar Rp540,24 juta yang telah jatuh tempo setelah melewati masa tenggang selama 9 (sembilan) tahun sejak tanggal penarikan pertama dan akan berakhir di tahun 2034.

Until the end of 2024, the Company's long-term debt balance was mainly in the form of a forwarding loan used to increase the capacity and technical operations of the Company through the support of the World Bank (World Bank) amounting to Rp54.59 billion which decreased from Rp55.13 billion in 2023 due to the payment of principal installments of the forwarding loan amounting to Rp540.24 million which was due after a grace period of 9 (nine) years from the date of the first withdrawal and will expire in 2034.

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka panjang diukur melalui rasio solvabilitas. Rasio ini mencerminkan kapasitas Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dengan mengandalkan total aset yang dimiliki. Tingkat solvabilitas yang sehat menunjukkan struktur keuangan yang kuat serta ketahanan terhadap risiko keuangan, sehingga memastikan keberlanjutan operasional dan stabilitas jangka panjang Perseroan.

The Company's ability to fulfill its long-term liabilities is reflected in the solvency ratio. This ratio reflects the Company's capacity to fulfill its long-term liabilities by relying on its total assets. A healthy solvency margin indicates a strong financial structure and resilience to financial risks, thus ensuring the Company's operational sustainability and long-term stability.

Tabel Kinerja Rasio Solvabilitas
Table: Solvency Ratio Performance

(dinyatakan dalam %) (in %)

Uraian Description	2024	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease
Rasio Liabilitas terhadap Aset Liabilities on Assets Ratio	1,86	2,70	(0,84)
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Liabilities on Equity Ratio	1,90	2,78	(0,88)

Pada tahun 2024, rasio liabilitas terhadap aset tercatat sebesar 1,86%, sedangkan rasio liabilitas terhadap ekuitas mencapai 1,90%.

In 2024, the ratio of liabilities to assets was 1.86%, while the ratio of liabilities to equity was 1.90%.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG PERSEROAN
COMPANY'S COLLECTABILITY LEVEL OF RECEIVABLES

Hingga akhir tahun 2024, piutang Perseroan terdiri dari piutang bunga yang belum diterima, piutang regres, piutang penjaminan, serta piutang penyiapan proyek dan pendampingan transaksi. Piutang usaha Perseroan didominasi oleh piutang bunga yang belum diterima sebesar 37,30% dan piutang regres sebesar 45,89% dari total piutang usaha.

As of the end of 2024, the Company's receivables consist of unearned interest receivables, recourse receivables, guarantee receivables, as well as project facility development receivables. The Company's trade receivables are dominated by unearned interest receivables of 37.30% and recourse receivables amounting to 45.89% of total trade receivables.

Sesuai dengan ketentuan PSAK 71 mengenai penurunan nilai, Perseroan telah melakukan perhitungan kerugian kredit ekspektasian untuk mengantisipasi risiko kredit yang mungkin timbul. Per 31 Desember 2024, piutang usaha sebesar Rp460,07 miliar mengalami penurunan nilai sebesar Rp57,69 miliar.

In accordance with the provisions of PSAK 71 regarding impairment, the Company has calculated expected credit losses to anticipate credit risks that may arise. As of December 31, 2024, trade receivables amounting to Rp460.07 billion were impaired by Rp57.69 billion.

Piutang regres timbul dari pembayaran klaim yang telah dilakukan Perseroan akibat tidak terpenuhinya kewajiban finansial oleh PJPK kepada BU pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung dan Pekanbaru, serta proyek Palapa *Ring* Paket Barat dan Timur. Selain itu, piutang bunga atas regres sebesar Rp17,32 miliar telah dicatat sebagai bunga yang belum diterima.

Recourse receivables arise from claims payments made by the Company due to non-fulfilment of financial obligations by GCA to Business Entity in Bandar Lampung and Pekanbaru City Water Supply System (SPAM) projects, as well as the West and Eastern Package Palapa Ring projects. In addition, interest receivable on recourse amounted to Rp17.32 billion was recorded as unearned interest.

Meskipun terdapat berbagai komponen dalam struktur piutang usaha, Perseroan tidak mengalami dinamika signifikan dalam tingkat kolektibilitas, baik untuk piutang jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini mencerminkan efektivitas strategi manajemen kredit yang diterapkan dalam menjaga stabilitas arus kas dan keberlanjutan operasional.

Although there are various components in the structure of trade receivables, the Company does not experience significant dynamics in the collectability rate, both for short-term and long-term receivables. This reflects the effectiveness of the credit management strategy in maintaining cash flow stability and operational sustainability.

STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE

PT PII menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan imbal hasil yang optimal bagi Pemegang Saham. Dalam rangka penelaahan struktur modal, Perseroan mempertimbangkan sejumlah faktor, yaitu kebutuhan modal di masa yang akan datang dan efisiensi modal dari Perseroan, keuntungan masa lalu dan proyeksi masa depan, proyeksi arus kas operasional, proyeksi pengeluaran modal dan proyeksi kesempatan investasi strategis.

IIGF reviews and manages its capital structure to ensure optimal capital structure and returns for Shareholders. In reviewing its capital structure, the Company considers several factors, i.e., the future capital requirements and capital efficiency of the Company, past and projected future profits, projected operating cash flows, projected capital expenditures, and projected strategic investment opportunities.

Perseroan dapat mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal dengan melakukan penyesuaian jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi jumlah utang.

The Company may maintain or adjust its capital structure by adjusting the amount of dividends distributed to shareholders, returning capital to shareholders, issuing new shares, or selling assets to reduce the amount of debt.

Tabel Komponen dan Komposisi Pendapatan Usaha
Table: Components and Composition of Capital Structure

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024		2023		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
	Nominal	Komposisi Composition	Nominal	Komposisi Composition	Nominal	Komposisi Composition
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	315.947.966	1,86%	443.249.281	2,70%	(127.301.315)	(0,84)%
Jumlah Ekuitas Total Equity	16.672.573.693	98,14%	15.962.800.178	97,30%	709.773.515	0,84%
Jumlah Aset Total Assets	**16.988.521.659**	**100,00%**	**16.406.049.459**	**100,00%**	**582.472.200**	**0%**

Grafik Komposisi Struktur Modal
Graph: Capital Structure Composition

2023

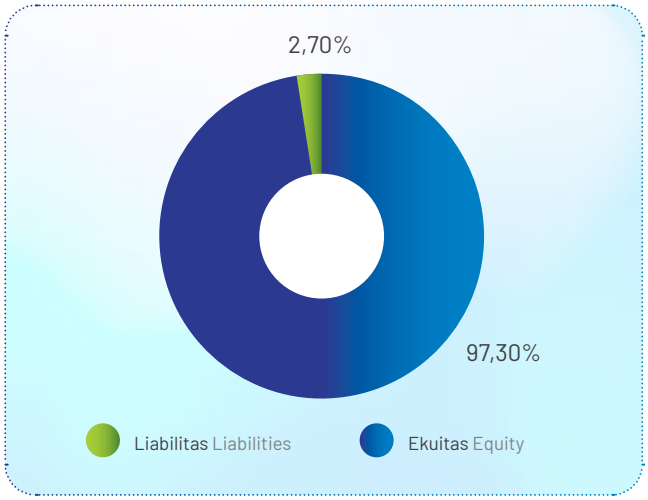

2024

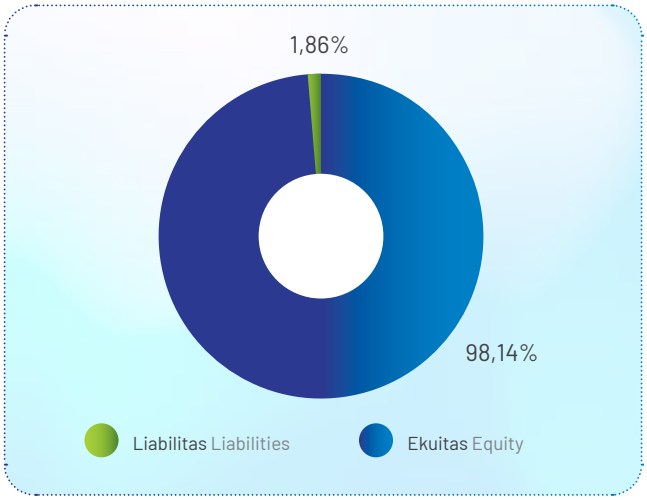

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL
MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Kebijakan pengelolaan modal bertujuan untuk memastikan bahwa Perseroan memiliki struktur permodalan yang efisien, memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan usaha saat ini dan untuk mempertahankan kelangsungan usaha di masa yang akan datang serta untuk memenuhi kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator.

The capital management policy has the objective to ensure that the Company has an efficient capital structure, has strong capital to support the current business development strategy, and maintains business continuity in the future, as well as fulfills the capital adequacy determined by the regulator.

DASAR PEMILIHAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL
BASIS FOR CHOOSING A CAPITAL STRUCTURE POLICY

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi jumlah utang.

To maintain or adjust its capital structure, the Company may adjust the amount of dividends distributed to shareholders, return capital to shareholders, issue new shares, or sell assets to reduce the amount of debt.

Perseroan menelaah dan mengelola struktur permodalannya untuk memastikan struktur modal dan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang dan efisiensi modal dari Perseroan, keuntungan masa lalu dan proyeksi masa depan, proyeksi arus kas operasional, proyeksi pengeluaran modal dan proyeksi kesempatan investasi strategis. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perseroan dapat menggunakan pendanaan internal untuk mengurangi utang.

The Company reviews and maintains its capital structure to ensure optimal capital structure and returns for shareholders, by considering the future capital requirements and capital efficiency of the Company, past and projected future profits, projected operating cash flows, projected capital expenditures, and projected strategic investment opportunities. The Company may use internal funding to reduce debt, to maintain or adjust the capital structure.

IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL
MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL EXPENDITURE

Hingga akhir tahun 2024, PT PII tidak memiliki ikatan/komitmen yang material terkait investasi barang modal. Sehingga tidak terdapat informasi mengenai tujuan dari ikatan, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan, dan mata uang yang menjadi denominasi.

As of the end of 2024, IIGF has no material bonds/commitments related to capital expenditure. Therefore, there is no information on the purpose of the commitments, the source of funds to fulfill the commitments, and the currency of denomination.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL
CAPITAL EXPENDITURE REALIZATION

PT PII mengalokasikan investasi pada barang modal dalam bentuk aset tetap, aset hak guna, dan aset tak berwujud yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional. Seluruh investasi tersebut dibiayai sepenuhnya menggunakan dana internal Perseroan.

IIGF allocates capital expenditure in the form of fixed assets, right-of-use assets, and intangible assets, that are utilised to support its operations. All investments are fully financed using the Company's internal funds.

Program investasi ini bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional Perseroan, memastikan setiap aktivitas kerja dapat berjalan dengan optimal, efektif, dan efisien. Dalam pelaksanaannya telah dilaksanakan kajian atas kebutuhan investasi pada setiap barang modal.

This investment program aims to support the Company's smooth operation, ensuring that every work activity can run optimally, effectively, and efficiently. In implementing the capital expenditure, investment needs are studied for each item.

INVESTASI BARANG MODAL
CAPITAL GOODS INVESTMENT

Realisasi investasi barang modal PT PII pada tahun 2024 sebesar Rp3,90 miliar dan pada tahun 2023 sebesar Rp63,76 miliar. Berikut disajikan rincian perkembangan investasi dalam aset tetap, aset hak guna, dan aset takberwujud.

In 2024, IIGF invested Rp3.90 billion for in capital goods. In 2023, IIGF invested Rp63.76 billion. The following presents details of the development of investment in fixed assets, right-of-use assets, and intangible assets.

Tabel Realisasi Investasi Barang Modal
Table: Capital Expenditure Realization

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023
Aset Kepemilikan Langsung: Direct Ownership Assets:		
- Aset dalam penyelesaian Construction in progress assets	252.965	10.142.451
- Prasarana kantor Leasehold improvement	98.790	614.105
- Peralatan komputer Computer equipments	11.844	840.825
- Peralatan kantor, perabotan, dan perlengkapan Office equipment, furnitures, and fixtures	406.952	220.906
Sub Jumlah Subtotal	**770.551**	**11.818.287**
Aset Hak Guna: Right-of-Use Assets:		
- Gedung kantor Office building	530.217	50.978.008
Sub Jumlah Subtotal	**530.217**	**50.978.008**
Aset Tak Berwujud: Intangible Assets:		
- Aset dalam penyelesaian Construction in progress assets	1.022.608	482.312
- Piranti lunak Software	1.577.755	480.408
Sub Jumlah Subtotal	2.600.363	962.720
Jumlah Realisasi Kegiatan Investasi Barang Modal Total Capital Expenditure Realization	**3.901.131**	**63.759.015**

Dari jumlah diatas, berikut disajikan jumlah nilai buku setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan/atau amortisasi dari masing-masing nilai investasi barang modal:

From the above amount, the amount of book value after deducting the accumulated depreciation and/or amortization of each investment value of capital goods are as follows:

Tabel Investasi pada Aset Tetap Tahun 2024
Table: Fixed Assets Investment in 2024

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Saldo Awal Beginning balance	Penambahan Additions	Pelepasan Disposals	Reklasifikasi Reclassification	Saldo Akhir Ending Balance
Harga Perolehan: Acquisition Cost:					
- Aset dalam penyelesaian Construction in progress assets	150.520	252.965	-	-	403.485
- Prasarana kantor Leasehold improvement	31.473.882	98.790	-	-	31.572.672
- Peralatan komputer Computer equipments	15.055.022	11.844	-	-	15.066.866
- Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan Office equipment, furnitures, and fixtures	11.250.754	406.952	-	-	11.657.706
Sub Jumlah Subtotal	**57.930.178**	**770.551**	**-**	**-**	**58.700.729**
Akumulasi Penyusutan: Accumulated Depreciation:					
- Prasarana kantor Leasehold improvement	(21.273.452)	(2.821.068)	-	-	(24.094.520)
- Peralatan komputer Computer equipments	(12.266.465)	(1.645.713)	-	-	(13.912.520)
- Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan Office equipment, furnitures, and fixtures	(10.839.429)	(235.395)	-	-	(11.074.824)
Sub Jumlah Subtotal	**(44.379.346)**	**(4.702.176)**	**-**	**-**	**(49.081.522)**
Nilai Buku Value	**13.550.832**				**9.619.207**

Tabel Investasi pada Aset Hak Guna Tahun 2024
Table: Right-of-Use Assets Investment in 2024

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Saldo Awal Beginning balance	Penambahan Additions	Pelepasan Disposals	Reklasifikasi Reclassification	Saldo Akhir Ending Balance
Harga Perolehan: Acquisition Cost:					
- Gedung kantor Office building	50.978.008	530.217	-	-	51.508.225
Sub Jumlah Subtotal	**50.978.008**	**530.217**	**-**	**-**	**51.508.225**
Akumulasi Amortisasi: Amortization Accumulation:					
- Gedung kantor Office building	(5.664.223)	(17.228.322)	-	-	(22.892.545)
Sub Jumlah Subtotal	**(5.664.223)**	**(17.228.322)**	**-**	**-**	**(22.892.545)**
Nilai Buku Value	**45.313.785**			**-**	**28.615.680**

Tabel Investasi pada Aset Tak Berwujud Tahun 2024
Table: Intangible Assets Investment in 2024

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Saldo Awal Beginning balance	Penambahan Additions	Pelepasan Disposals	Reklasifikasi Reclassification	Saldo Akhir Ending Balance
Harga Perolehan: Acquisition Cost:					
- Aset dalam penyelesaian Construction in progress assets	96.800	1.022.608	-	(77.800)	1.041.608
- Piranti lunak Software	14.778.044	1.577.755	-	77.800	16.433.599
Sub Jumlah Subtotal	**14.874.844**	**2.600.363**	**-**	**-**	**17.475.207**
Akumulasi Penyusutan: Accumulated Depreciation:					
- Piranti lunak Software	(10.587.718)	(1.963.944)	-	-	(12.551.662)
Sub Jumlah Subtotal	**(10.587.718)**	**(1.963.944)**	**-**	**-**	**(12.551.662)**
Nilai Buku Value	**4.287.126**				**4.923.545**

PROSPEK USAHA
BUSINESS PROSPECT

PROSPEK PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI
ECONOMIC AND INDUSTRY OUTLOOK

Berdasarkan *World Economic Outlook* terbaru yang dirilis oleh IMF pada Januari 2025, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan stabil pada tingkat 3,3% untuk tahun 2025 dan 2026. Angka ini berada di bawah rata-rata historis periode 2000-2019 yang mencapai 3,7%. Proyeksi ini tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan perkiraan pada Oktober 2024, dengan revisi ke atas untuk Amerika Serikat yang diimbangi oleh penurunan proyeksi di negara-negara utama lainnya.

IMF juga memperkirakan inflasi global akan menurun menjadi 4,2% pada tahun 2025 dan 3,5% pada tahun 2026, mendekati target bank sentral, terutama di negara-negara maju. Meskipun demikian, risiko terhadap pertumbuhan dalam jangka menengah cenderung menurun, dengan ketidakpastian kebijakan yang tinggi dan potensi gangguan pada proses disinflasi yang dapat mempengaruhi stabilitas fiskal dan keuangan. Oleh karena itu, IMF menekankan pentingnya penyeimbangan kebijakan untuk memastikan keberlanjutan ekonomi global.

Sumber: www.imf.org

Based on the latest World Economic Outlook issued by the IMF in January 2025, global economic growth is projected to stabilize at 3.3% for 2025 and 2026. This figure is below the historical average for the 2000-2019 period, i.e., 3.7%. This projection did not change significantly compared to October 2024, with an upward revision for the United States offset by a decrease in projections in other major countries.

IMF also estimated that global inflation will decline to 4.2% in 2025 and 3.5% in 2026, approaching central bank targets, especially in advanced economies. However, risks to growth in the medium term are skewed to the downside, with high policy uncertainty and potential disruptions to the disinflation process that may affect fiscal and financial stability. Therefore, the IMF emphasized the importance of policy balancing to ensure the global economy sustainability.

Source: www.imf.org

Pada tahun 2025, perekonomian Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang stabil. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, dengan inflasi dijaga pada kisaran 2,5%. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di rentang 4,7% hingga 5,5%, dengan nilai tengah 5,1%. Proyeksi ini didukung oleh konsumsi rumah tangga yang terjaga, investasi, dan ekspor nonmigas yang terus meningkat.

In 2025, the Indonesian economy is projected to experience stable growth. The government target a 5.2% economic growth, with inflation maintained at around 2.5%. Bank Indonesia estimates economic growth to be in the range of 4.7% to 5.5%, with a median of 5.1%. This projection is supported by maintained household consumption, investment, and increasing non-oil and gas exports.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp171 triliun untuk program makanan gratis, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hampir 2 poin persentase. Program ini awalnya ditujukan untuk menyediakan makanan bagi 17,5 juta anak dengan anggaran Rp71 triliun, namun kini diperluas untuk menjangkau sekitar 83 juta orang hingga akhir tahun 2025.

The government has allocated Rp171 trillion of budget for the free food program to achieve this target, which shall increase Gross Domestic Product (GDP) growth by almost 2 percentage points. The program was initially intended to provide food for 17.5 million children with a budget of Rp71 trillion, but has now expanded to reach approximately 83 million people by the end of 2025.

Selain itu, pemerintah berencana membentuk Badan Pengelola Investasi, mirip dengan Temasek di Singapura, dengan modal awal sebesar Rp1.000 triliun. Badan ini akan mengelola kepemilikan di beberapa perusahaan BUMN besar, termasuk Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, PLN, MIND ID, Pertamina, dan Telkom Indonesia, yang secara kolektif memiliki aset senilai sekitar 600 miliar dolar AS.

In addition, the government plans to form an Investment Management Agency, similar to Temasek in Singapore, with an initial capital of Rp1,000 trillion. This agency will manage ownership in several large state-owned companies, including Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, PLN, MIND ID, Pertamina, and Telkom Indonesia, which collectively have assets value of approximately US$ 600 billion.

Namun, tantangan tetap ada, termasuk potensi ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi global yang dapat mempengaruhi kinerja ekspor dan investasi. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya reformasi struktural dan diversifikasi ekonomi untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

However, challenges remain, including potential geopolitical tensions and a global economic slowdown that could affect export and investment performance. Therefore, the government emphasizes the importance of structural reform and economic diversification to ensure sustainable growth.

Pada tahun 2025, industri konstruksi dan infrastruktur nasional diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Menurut data yang dipublikasikan, pasar konstruksi Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 5,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai proyek infrastruktur besar yang sedang dan akan dilaksanakan, termasuk pembangunan jalan tol, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengalokasikan pagu indikatif sebesar Rp75,63 triliun untuk tahun anggaran 2025, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur ekonomi dan proyek strategis nasional.

In 2025, the national construction and infrastructure industry is projected to experience significant growth. According to published data, Indonesia's construction market is estimated to grow by 5.48% compared to the previous year. This growth is driven by various major infrastructure projects that are currently constructed and will be implemented, including the construction of toll roads, bridges, ports, and other public facilities. In addition, the government, via the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) allocated an indicative ceiling of Rp75.63 trillion for the 2025 fiscal budget, with a focus on the development of economic infrastructure and national strategic projects.

Untuk mendukung pertumbuhan ini, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci dalam menyelesaikan proyek-proyek besar di industri konstruksi Indonesia pada tahun 2025. Skema KPBU terus menjadi andalan untuk mendanai infrastruktur strategis, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan fasilitas publik di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kemitraan ini memungkinkan pembagian risiko dan tanggung jawab antara pemerintah dan investor, sehingga proyek dapat berjalan lebih efisien. Selain itu, transformasi digital melalui adopsi teknologi seperti *Building Information Modeling* (BIM), *drone*, dan *Internet of Things* (IoT) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di sektor konstruksi.

Sumber:
- www.binakonstruksi.pu.go.id dan sumber alinya (diolah)
- www.reuters.com, www.mediakeuangan.kemenkeu.go.id, dan sumber lainnya (diolah)

To support this growth, collaboration between the government and the private sector is key to completing major projects in the Indonesian construction industry by 2025. The Public Private Partnership (PPP) scheme continues to be the mainstay for funding strategic infrastructure, such as the construction of toll roads, ports, and public facilities in the Nusantara Capital City (IKN). This partnership allows for the sharing of risks and responsibilities between the government and investors, so that projects can run more efficiently. In addition, digital transformation through the adoption of technologies such as Building Information Modeling (BIM), drones, and the Internet of Things (IoT) shall increase efficiency and productivity in the construction sector.

Source
- www.binakonstruksi.pu.go.id and other sources (edited)
- www.reuters.com, www.mediakeuangan.kemenkeu.go.id, and other sources (edited)

PROGRAM STRATEGI KE DEPAN
FUTURE STRATEGY

Dalam rangka mengantisipasi prospek bisnis dan peluang yang akan muncul di tahun 2025, Perseroan telah merumuskan serangkaian langkah strategis yang dirancang untuk memperkuat daya saing, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Perseroan telah menetapkan program strategis tahun 2025, beberapa di antaranya adalah:

1. Tetap fokus pada pemantapan bisnis penjaminan baik skema KPBU maupun non-KPBU yang tidak hanya terkonsentrasi pada jumlah namun pada peningkatan nilai kebermanfaatan dengan menciptakan sinergi yang berkesinambungan dengan berbagai *stakeholder* terkait
2. Melanjutkan pelaksanaan pemantauan aktif atas proyek-proyek yang telah efektif penjaminan guna dapat mengantisipasi serta memitigasi risiko secara bersama-sama dengan para PJPK.
3. Pengembangan *pipeline* proyek untuk menghadapi kondisi Pemerintahan baru, berfokus pada:
   a. Pendampingan Proyek melalui *matchmaking* berupa dukungan yang bersumber dari anggaran pemerintah, dukungan dari *development partners* dan sumber lainnya.
   b. Sosialisasi kepada calon PJPK baru (sektor baru dan KPBU skala kecil)
   c. Penguatan kolaborasi dengan *strategic partners*

The Company has formulated a series of strategic steps designed to strengthen competitiveness, improve operational efficiency, and ensure sustainable growth to anticipate business prospects and opportunities that will emerge in 2025. The Company set a 2025 strategic program, as follows:

1. Remain focused on stabilizing the guarantee business both PPP and non-PPP schemes which are not only concentrated on the number but on increasing the value of benefits by creating sustainable synergies with various relevant stakeholders
2. Continuing the active monitoring of guaranteed projects that have become effective, in order to jointly anticipate and mitigate risks together with the GCA.
3. Development of project pipeline in response to the new Government conditions, focusing on:
   a. Project assistance through matchmaking in the form of support sourced from the government budget, support from development partners and other sources.
   b. Socialization to prospective new PJPKs (new sectors and small-scale PPPs)
   c. Strengthening collaboration with strategic partners

4. Ekspansi ke sektor baru seperti pengelolaan limbah (*waste management*), rumah sakit daerah, pendidikan, perumahan MBR, bus listrik, pelabuhan perikanan, dan data center.Mendukung kredibilitas pengembangan *pipeline* proyek penjaminan KPBU dan identifikasi Penjaminan Kredit Perseroan. *Improvement* dalam proses bisnis lainnya dengan melaksanakan semua komunikasi mandat Perseroan dan pelaksanaan pengembangan bisnis dan pengembangan produk.
5. Melakukan pemetaan produk penjaminan dan mengkoordinasikan pengembangan produk penjaminan serta usaha bisnis lainnya seperti identifikasi produk baru, pelaksanaan riset kebutuhan produk, mengidentifikasi pemangku kepentingan, pengembangan konsep produk, pengembangan siklus bisnis dan produk, dan pengujian produk;
6. Melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah atau pihak yang dipandang relevan bagi pengembangan kebijakan, produk penjaminan, dan usaha bisnis lainnya misalnya Bappenas, Kementerian Keuangan, Lembaga pembiayaan, investor, dan lain-lain;
7. Melakukan kemitraan untuk peningkatan kapasitas ekosistem, termasuk pengembangan sektor, dan peningkatan pemangku kepentingan serta mendukung penguatan bisnis Perseroan;
8. Mempersiapkan Perseroan untuk dapat mengoptimalkan kontribusi dan peran Penjaminan Pemerintah dalam Pembangunan Proyek KPBU IKN.

4. Expansion to new sectors such as waste management, regional hospitals, education, MBR housing, electric buses, fishing ports, and data centers.Supporting the credibility of PPP guarantee project pipeline development and identification of the Company's Credit Guarantee. Improvement in other business processes by carrying out all the Company's mandate communication and implementation of business development and product development.
5. Conduct guarantee product mapping and coordinate guarantee product development and other business ventures such as identification of new products, conducting product needs research, identifying stakeholders, developing product concepts, developing business cycle and products, and product testings;
6. Coordinating with Government agencies or parties deemed relevant for the development of policies, guarantee products, and other business ventures such as Bappenas, Ministry of Finance, financing institutions, investors, and others;
7. Conducting partnerships to increase ecosystem capacity, including sector development, and increasing stakeholders and supporting the strengthening of the Company's business;
8. Preparing the Company to be able to optimize the contribution and role of Government Guarantee in the Development of IKN PPP Projects.

PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI TAHUN 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025

COMPARISON 2024 TARGET TO REALIZATION AND TO 2025 PROJECTION

TARGET, REALISASI, DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAN LABA RUGI

TARGET, REALIZATION, AND PROJECTIONS OF INCOME AND PROFIT OR LOSS

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Pendapatan dan Laba Rugi Tahun 2024 serta Proyeksi Tahun 2025
Table: Comparison between 2024 Target and Realization of Income and Profit or Loss and 2025 Projections

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	**Target RKAP 2024** 2024 WP&B Target	**Realisasi 2024** 2024 Realization	**Target RKAP 2025** 2025 WP&B Target	**Pencapaian Target terhadap Realisasi 2024** Achieved to 2024 Realization	**Kenaikan Target RKAP 2025 dari Realisasi 2024** Increased in 2025 WP&B Target and 2024 Realization
Pendapatan usaha Revenues	1.384.456.830	1.486.930.586	1.662.667.249	107%	12%
Beban usaha Operating expenses	(515.681.169)	(544.905.230)	(599.573.510)	106%	10%
Laba sebelum pajak penghasilan Income before income tax	868.775.661	942.025.356	1.063.093.739	108%	13%
Manfaat pajak penghasilan Income tax benefit	15.624.957	(11.145.678)	15.069.641	(71%)	(235%)
Laba tahun berjalan Income for the year	884.400.000	930.879.678	1.078.163.380	105%	16%
Laba komprehensif tahun berjalan Comprehensive income for the year	**900.296.718**	**876.938.515**	**1.087.277.575**	**97%**	**24%**

Realisasi pendapatan usaha tahun 2024 tercapai sebesar Rp1,49 triliun atau tercapai 107% jika dibandingkan dengan penetapan target RKAP 2024 sebesar Rp1,38 triliun. Sedangkan, untuk target RKAP 2025, PT PII memproyeksikan pendapatan usaha sebesar Rp1,66 triliun atau meningkat 12% dari realisasi tahun 2024.

Sedangkan untuk realisasi laba tahun berjalan 2024 tercapai sebesar Rp930,88 miliar atau tercapai 105% jika dibandingkan dengan penetapan target RKAP 2024 sebesar Rp884,40 miliar. Sedangkan, untuk target RKAP 2025, PT PII memproyeksikan laba tahun berjalan sebesar Rp1.078,16 miliar atau meningkat 16% dari realisasi tahun 2024.

The realization of operating income in 2024 was achieved at Rp1.49 trillion or 107% when compared to the 2024 RKAP target of Rp1.38 trillion. Meanwhile, for the 2025 RKAP target, IIGF projects operating income of Rp1.66 trillion or an increase of 12% from the 2024 realization.

Meanwhile, the realization of profit for the current year 2024 was achieved at Rp930.88 billion or achieved 105% when compared to the 2024 RKAP target of Rp884.40 billion. Meanwhile, for the 2025 RKAP target, IIGF projects a profit for the year of Rp1,078.16 billion or an increase of 16% from the realization in 2024.

TARGET, REALISASI, DAN PROYEKSI POSISI KEUANGAN

TARGET, REALIZATION, AND PROJECTIONS OF FINANCIAL POSITION

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Posisi Keuangan Tahun 2024 serta Proyeksi Tahun 2025

Table: Comparisons between 2024 Target and Realization of Financial Position and 2025 Projections

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Target RKAP 2024 2024 WP&B Target	Realisasi 2024 2024 Realization	Target RKAP 2025 2025 WP&B Target	Pencapaian Target terhadap Realisasi 2024 Achieved to 2024 Realization	Kenaikan Target RKAP 2025 dari Realisasi 2024 Increased in 2025 WP&B Target and 2024 Realization
Jumlah Aset Total Assets	17.194.599.535	16.988.521.659	17.865.480.661	99%	5%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	491.650.250	315.947.966	248.729.184	64%	(21%)
Jumlah Ekuitas Total Equity	16.702.949.285	16.672.573.693	17.616.751.477	100%	6%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	17.194.599.535	16.988.521.659	17.865.480.661	99%	5%

Realisasi jumlah aset tahun 2024 tercapai sebesar Rp16,99 triliun atau tercapai 99% jika dibandingkan dengan penetapan target RKAP 2024 sebesar Rp17,19 triliun. Sedangkan, untuk target RKAP 2025, PT PII memproyeksikan jumlah aset sebesar Rp17,87 triliun atau meningkat 5% dari realisasi tahun 2024.

Realisasi jumlah liabilitas tahun 2024 tercapai sebesar Rp315,95 miliar atau tercapai 64% jika dibandingkan dengan penetapan target RKAP 2024 sebesar Rp491,65 miliar. Sedangkan, untuk target RKAP 2025, PT PII memproyeksikan jumlah liabilitas sebesar Rp248,73 miliar atau lebih rendah 21% dari realisasi tahun 2024.

Realisasi jumlah ekuitas tahun 2024 tercapai sebesar Rp16,67 triliun atau 99,82% jika dibandingkan dengan penetapan target RKAP 2024 sebesar Rp16,70 triliun. Sedangkan, untuk target RKAP 2025, PT PII memproyeksikan jumlah ekuitas sebesar Rp17,62 triliun atau meningkat 6% dari realisasi tahun 2024.

The realization of total assets in 2024 reached Rp16.99 trillion or achieved 99% when compared to the 2024 RKAP target of Rp17.19 trillion. Meanwhile, for the 2025 RKAP target, IIGF projects total assets of Rp17.87 trillion or an increase of 5% from the realization in 2024.

The realization of total liabilities in 2024 was reached at Rp315.95 billion or achieved 64% when compared to the determination of the 2024 RKAP target of Rp491.65 billion. Meanwhile, for the 2025 RKAP target, IIGF projects total liabilities of Rp248.73 billion or 21% lower than the 2024 realization.

The realization of total equity in 2024 was achieved at Rp16.67 trillion or 99.82% when compared to the determination of the 2024 RKAP target of Rp16.70 trillion. Meanwhile, for the 2025 RKAP target, IIGF projects total equity of Rp17.62 trillion or an increase of 6% from the 2024 realization.

TARGET, REALISASI, DAN PROYEKSI STRUKTUR MODAL
TARGET, REALIZATION, AND PROJECTION OF CAPITAL STRUCTURE

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Struktur Modal Tahun 2024 serta Proyeksi Tahun 2025
Table: Comparisons between 2024 Target and Realization of Financial Capital Structure and 2025 Projections

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Target RKAP 2024 2024 WP&B Target		Realisasi 2024 2024 Realization		Pencapaian Target terhadap Realisasi 2024 Achieved to 2024 Realization	Target RKAP 2025 2025 WP&B Target	
	Nominal	Komposisi Composition	Nominal	Komposisi Composition		Nominal	Komposisi Composition
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	491.650.250	2,86%	315.947.966	1,86%	64,26%	248.729.184	1,39%
Jumlah Ekuitas Total Equity	16.702.949.285	97,14%	16.672.573.693	98,14%	99,82%	17.616.751.477	98,61%
Jumlah Aset Total Assets	**17.194.599.535**	**100.00%**	**16.988.521.659**	**100,00%**	**98,80%**	**17.865.480.661**	**100,00%**

Realisasi struktur modal pada tahun 2024 terdiri dari liabilitas sebesar Rp315,95 miliar atau sebesar 1,86% dan ekuitas sebesar Rp16,67 triliun atau sebesar 98,14%. Sedangkan di tahun 2025, diproyeksikan struktur modal terdiri dari liabilitas sebesar Rp248,73 miliar atau sebesar 1,39% dan ekuitas sebesar Rp17,62 triliun atau sebesar 98,61%.

The realization of the capital structure in 2024 consists of liabilities of Rp315.95 billion or 1.86% and equity of Rp16.67 trillion or 98.14%. Meanwhile, in 2025, the capital structure is projected to consist of liabilities of Rp248.73 billion or 1.39% and equity of Rp17.62 trillion or 98.61%.

TARGET, REALISASI, DAN PROYEKSI KEBIJAKAN DIVIDEN
TARGET, REALIZATION, AND PROJECTIONS OF DIVIDEND POLICY

Terkait proyeksi kebijakan dividen diputuskan mengacu pada Keputusan RUPS didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The projection of dividend policy shall refer to the GMS Resolution, based on the prevailing laws and regulations.

Pada tahun 2024, terdapat pembagian dividen sebesar Rp167,17 miliar. Untuk informasi lebih rinci dijelaskan dalam Laporan Tahunan ini Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen, Sub Bab Kebijakan Dividen.

In 2024, Rp167.17 billion of dividend was distributed. A more detailed information can be referred to in the Management Discussion and Analysis Chapter of this Annual Report, Sub-Chapter Dividend Policy.

INDEKS KINERJA UTAMA (IKU) KORPORASI
CORPORATE KEY PERFORMANCE INDEX (KPI)

Indeks Kinerja Utama (IKU) Korporasi tahun 2024 telah disetujui oleh Pemegang Saham melalui agenda Rapat Umum Pemegang Saham Persetujuan IKU pada tanggal 23 Desember 2023. Adapun pencapaian IKU tahun 2024 diuraikan dalam tabel berikut:

The Corporation's Key Performance Index (KPI) in 2024 was approved by Shareholders via the General Meeting of Shareholders to Approve KPI on 23 December 2023. The KPI in 2024 is presented in the following table:

Tabel Capaian IKU Korporasi Tahun 2024
Table: Corporate KPI in 2024

Kategori Performansi Performance Category	Sasaran Strategis Strategic Objectives	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicator	Bobot Weight	Satuan Unit	Target	Realisasi Realization	Capaian Achieve-ment	Bobot Capaian Perfor-mance Weight
Mandat dan Keuangan Mandate and Finance	Optimalisasi nilai pemegang saham/ *shareholder value* Optimization of shareholder value	Margin laba bersih*) Net profit margin*)	8,0%	Persentase Percentage	64%	63%	97,82%	7,83%
	Penjaminan yang berkelanjutan Sustainable guarantee	Jumlah penerbitan Penjaminan atas *small scale* KPBU PPP small scale Guarantee issuance	5,0%	Perjanjian Penjaminan Guarantee Agreement	2	0	0,00%	0,00%
		Kenaikan nilai investasi proyek yang dapat dihasilkan melalui penjaminan Increase in project investment value generated via guarantees	5,0%	Nilai (trilliun) Amount (trillion)	Rp49	Rp 46	93,94%	4,70%
		Pemberian dukungan terhadap proyek yang telah dijamin untuk mencapai *financial close* Providing support for secured projects to reach financial close	7,0%	Persentase Percentage	75%	80%	106,67%	7,47%
		Implementasi standar ESG dalam proses bisnis penjaminan PT PII ESG standards implementation in IIGF's assurance business process	5,0%	Persentase Percentage	100%	120%	120,00%	6,00%
	Penyediaan Penjaminan yang *Prudent* Provision of prudent Guarantee	Jumlah proyek yang diselesaikan *appraisal* Number of projects that completed appraisal	5,0%	Memo Evaluasi Evaluation Memo	6	6	100,00%	5,00%
	Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi yang Efektif Effective Project Development Facility	Penyelesaian hasil keluaran penugasan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi secara efektif Effective completion of Project Development Facility	5,0%	Persentase Percentage	100%	118%	118,06%	5,90%
Stakeholder	Pemahaman *Stakeholders* yang efektif Effective understanding of stakeholders	Pencapaian Tingkat pemahaman PJPK dan *stakeholders* lainnya yang baik Achieving a good level of GCA's and other stakeholders' understanding	5,0%	Indeks Index	4,0	4,25	106,25%	5,31%

Kategori Performansi Performance Category	Sasaran Strategis Strategic Objectives	Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicator	Bobot Weight	Satuan Unit	Target	Realisasi Realization	Capaian Achieve-ment	Bobot Capaian Perfor-mance Weight
	Reputasi dan Tingkat kepercayaan pasar yang tinggi High reputation and market trust	*Rating* Perusahaan *Sovereign* Sovereign Company Rating	5,0%	*Rating*	Setara dengan Peringkat Pemerintah Indonesia Equivalent to Indonesian Government Rating	Setara dengan Peringkat Pemerintah Indonesia Equivalent to Indonesian Government Rating	100,00%	5,00%
	Peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan IIGF Institute IIGF Institute's capacity building and strengthening	Peningkatan Kapabilitas mengenai *creative financing* infrastruktur dengan melibatkan unit *vertical* Kementerian Keuangan Capacity Building on creative financing infrastructure involving vertical units of the Ministry of Finance	5,0%	Persentase Persentase	100%	120%	120,00%	6,00%
	Optimalisasi sinergi BUMN/Lembaga Kementerian Keuangan Optimization of synergies between SOEs/Institutions under the Ministry of Finance	Kegiatan *joint program* yang melibatkan BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan Joint program involving all SOEs/Institutions under the Ministry of Finance	5,0%	Proyek/ Program Project/ Program	1	4	120,00%	6,00%
Proses Bisnis Internal Internal Business Process	*Enterprise Risk Management* yang kuat Strong Enterprise Risk Management	Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko korporasi Level of maturity in corporate risk management	8,0%	*Level*	3	3,85	120,00%	9,60%
	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik Good Corporate Governance implementation	Tata kelola Perusahaan yang baik (GCG *Score*) Good corporate governance (GCG score)	10,0%	GCG *Score*	88	90,83	103,21%	10,32%
	Pengelolaan Risiko Penjaminan yang efektif Effective Guarantee Risk Management	Tingkat pengendalian risiko klaim atas penjaminan proyek Risk control level of claims on project guarantees	7,0%	Persentase Percentage	95%	99%	104,09%	7,29%
Pembelajaran dan Pertumbuhan Training and Development	Pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas Human resources management with quality and integrity	Pencapaian *Index Engagement* Karyawan yang optimal Optimal employee engagement index achievement	7,0%	*Score Engagement* (absolut) Engagement Score (Absolute)	73%	73%	100,00%	7,00%
		Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM melalui sertifikasi CP3P (level lanjutan) Increased HR Capacity and Capability through CP3P (advanced) certification	8,0%	Persentase Percentage	Peningkatan 50% increased by 50%	Peningkatan 72% increased by 72%	120,00%	9,60%
Total			**100%**					**103,02%**

KEBIJAKAN DIVIDEN
DIVIDEND POLICY

DASAR KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN
DIVIDEND SHARING POLICY

PT PII merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana modal ditempatkan dan disetor adalah 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan selaku Pemegang Saham. Dengan demikian, pembagian dividen sepenuhnya menjadi hak Pemerintah Republik Indonesia. Besaran dividen yang didistribusikan kepada Pemegang Saham ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

IIGF is a State-Owned Enterprise (SOE), in which the issued and paid-up capital is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia as the Shareholder. Therefore, the dividend distributed fully belongs to the Government of the Republic of Indonesia. The amount of dividends distributed to Shareholders is determined based on the General Meeting of Shareholders (GMS) Resolution.

PEMBAGIAN DIVIDEN
DIVIDEND DISTRIBUTION

PEMBAGIAN DIVIDEN TAHUN 2024
DIVIDEND DISTRIBUTION IN 2024

Pembagian dividen tahun 2024, berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., No.23 tanggal 21 Mei 2024, Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2024 telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun 2023 sebesar 20% dari laba bersih Perseroan atau sejumlah Rp167,17 miliar yang telah dibayarkan pada 6 Juni 2024.

In 2024, based on the Deed of Notary Arry Supratno, S.H., No. 23 dated 21 May 2024, the Shareholders, via the Company's Annual General Meeting of Shareholders on 21 May 2024, have approved the dividend distribution for 2023 amounting to 20% of the Company's net profit, or equivalent to Rp167.17 billion, which was paid on 6 June 2024.

PEMBAGIAN DIVIDEN TAHUN 2023
DIVIDEND DISTRIBUTION IN 2023

Pembagian dividen tahun 2023, berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., No. 22 tanggal 19 Mei 2023, Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2023 telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun 2022 sebesar 20% dari laba bersih Perseroan atau sejumlah Rp142,83 miliar yang telah dibayarkan pada 9 Juni 2023.

In 2023, based on Deed of Notary Arry Supratno, S.H., No. 22 dated 19 May 2023, the Shareholders, via the Company's Annual General Meeting of Shareholders (GMS) on 19 May 2023, have approved the dividend distribution for 2022 amounting to 20% of the Company's net profit, equivalent to Rp142,83 billion, which was paid on 9 June 2023.

Tabel Kronologis Pembagian Dividen
Table: Dividend Distribution

Uraian Description	2024 (Tahun Buku 2023) 2024 (Fiscal Year 2023)	2023 (Tahun Buku 2022) 2023 (Fiscal Year 2022)
Total Dividen (Rp juta) Total Dividend (Rp million)	167.165	142.835
Jumlah Saham (lembar) Shares	10.655.000	10.655.000
Rasio Pembayaran Dividen Ratio of Dividend Payment	20%	20%
Dividen per Saham (Rp) Dividend Per Share (Rp)	0,02	0,01
Tanggal Pengumuman Dividen Date of Dividend Announcement	21 Mei 2024 May 21, 2024	19 Mei 2023 May 19, 2023
Tanggal Pembayaran Dividen Date of Dividend Payment	6 Juni 2024 June 6, 2024	9 Juni 2023 June 9, 2023

ASPEK PERPAJAKAN
TAXES

PENGELOLAAN PERPAJAKAN
TAX MANAGEMENT

PT PII sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran sebagai *agent of value creator* dan *agent of development* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada negara diantaranya melalui pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak. Selain menjadi wajib pajak yang diwajibkan penyetoran dan pelaporan pajak, Perseroan secara aktif juga berperan serta dalam melakukan pemotongan dan pelaporan atas pajak-pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, Pasal 26 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pungut dan *offshore*.

IIGF, as one of the State-Owned Enterprises (SOEs) has a role as an agent of value creator and agent of development, which shall be able to contribute to the State, including through its obligations as a taxpayer. In addition to being a taxpayer who is required to deposit and report taxes, the Company also participates in withholding and reporting taxes, such as Income Tax (PPh) Articles 21, 22, 23, Article 4 paragraph 2, Article 26, and withholding Value Added Tax (VAT) and offshore.

SETORAN PAJAK
TAX PAYMENT

Jumlah setoran pajak tahun 2024 adalah sebesar Rp212,38 miliar, yaitu meningkat 26,06% dari tahun 2023 sebesar Rp188,16 miliar. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan peningkatan beban PPh final sejalan dengan peningkatan pendapatan pengelolaan dana tahun 2024.

In 2024, the total tax paid amounted to Rp212.38 billion, increased by 26.06% compared to 2023 of Rp188.16 billion. The increase was mainly due to an increase in final income tax expenses, in line with the increase in fund management income in 2024.

Tabel Setoran Pajak (Rp juta)
Table: Tax Payment (Rp million)

Uraian Description	2024	2023	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			Persentase Percentage	Nominal
PPh Final Final Income Tax	158.158	139.546	13.34%	18.612
PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	39.458	35.804	10.21%	3.654
PPh Pasal 22, 23, 4 ayat 2 dan 26 Income Tax Articles 22, 23, 4 paragraphs 2, and 26	3.734	3.249	14.94%	485
PPN pungut dan *offshore* VAT Collected and Offshore	11.027	9.559	15.35%	1.468
Jumlah Setoran Pajak Total Tax Paid	**212.379**	**188.158**	**26.06%**	**49.026**

KEPATUHAN TERHADAP ASPEK PERPAJAKAN
COMPLIANCE WITH TAXES

PT PII tidak memperoleh putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apapun selama 3 (tiga) tahun terakhir.

IIGF has no guilty verdict from the highest tax court related to any tax issues during the last three (3) years.

INFORMASI MATERIAL INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL
MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITIONS, AND DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

INVESTASI
INVESTMENT

Pada tahun 2024, PT PII melakukan kegiatan investasi dalam bentuk deposito, Surat Utang Negara dan Surat Utang/Obligasi BUMN.

Sedangkan untuk investasi dalam bentuk barang modal telah diuraikan dalam Laporan Tahunan ini Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen, Sub Bab Realisasi Investasi Barang Modal. Jenis mata uang yang digunakan adalah mata uang Rupiah. Sumber dana investasi merupakan alokasi dana internal Perseroan/ RKAP tahun 2023.

In 2024, IIGF invested in the form of equity participation in a corporate entity.

Furthermore, the investment in capital goods is described in this Annual Report in the Chapter Management Discussion and Analysis, Sub Chapter Capital Goods Investment. The currency used is Rupiah. The source of investment funds was the allocation of 2023 internal Company's funds/WP&B.

EKSPANSI
EXPANSION

Pada tahun 2024, PT PII tidak melakukan aktivitas ekspansi, sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi.

In 2024, IIGF did not conduct any expansion activities. Thus, there was no information on the objective and value of the transaction.

DIVESTASI
DIVESTMENT

Pada tahun 2024, PT PII tidak melakukan aktivitas divestasi, sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi.

In 2024, IIGF did not conduct any divestment activities. Thus, there was no information on the objective and value of the transaction.

AKUISISI
ACQUISITION

Pada tahun 2024, PT PII tidak melakukan aktivitas akuisisi perusahaan, sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi.

In 2024, IIGF did not conduct any company acquisition activities. Thus, there was no information on the objective and value of the transaction.

RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL
DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

Pada tahun 2024, PT PII tidak melakukan restrukturisasi baik utang maupun modal, sehingga tidak terdapat informasi terkait hal tersebut.

In 2024, IIGF did not restructure any debt or capital. Therefore, there is no information related to such matter.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI
INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTION WITH CONFLICT OF INTEREST AND/OR WITH AFFILIATES/RELATED PARTIES

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN
MATERIAL TRANSACTION WITH CONFLICT OF INTEREST

Sampai dengan 31 Desember 2024, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

As of 31 December 2024, there were no transactions with conflict of interests.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI
TRANSACTION WITH AFFILIATED/RELATED PARTIES

PIHAK-PIHAK BERELASI
RELATED PARTIES

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" yang didefinisikan antara lain:

i. perusahaan di bawah pengendalian Perusahaan;
ii. perusahaan asosiasi;
iii. investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
iv. perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam catatan iii di atas;
v. karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan
vi. entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

The Company has transactions with related parties. The definition of related parties used is in accordance with SFAS 224 "Related Party Disclosures" which are defined, among others, as:

i. entities under the control of the Company;
ii. associated companies;
iii. investors with an interest in the voting that gives them significant influence;
iv. entities controlled by investors under note iii above;
v. key employees and family members; and
vi. entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government.

SIFAT PIHAK BERELASI
NATURE OF RELATED PARTIES

a. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perseroan.
b. Direksi adalah orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk perencanaan, pengarahan dan pengendalian aktivitas-aktivitas Perseroan.
c. Bank-bank BUMN dan entitas-entitas nonbank BUMN merupakan pihak berelasi oleh karena merupakan entitas sepengendali oleh Pemerintah Republik Indonesia dimana Perseroan melakukan penempatan investasi dalam bentuk deposito berjangka dan obligasi.

a. The Government of the Republic of Indonesia is the Company's shareholder.
b. The Board of Directors consists of people who have the authority and responsibility for planning, directing, and controlling the Company's activities.
c. State-owned banks and state-owned non-bank entities are related parties because they are entities under the control of the Government of the Republic of Indonesia, in which the Company places investments in the form of time deposits and bonds.

KEWAJARAN TRANSAKSI
FAIRNESS OF TRANSACTIONS

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah sesuai dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga Perseroan menganggap bahwa semua transaksi masih dalam batas wajar sesuai dengan PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Hal ini mengindikasikan bahwa Perseroan telah melakukan transaksi dengan pihak yang berelasi secara wajar. Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan No. 24, sebagaimana terlampir dalam Laporan Tahunan ini.

All transactions with related parties are in accordance with terms and conditions agreed by both parties. Thus, the Company that all transactions are within reason, in line with PSAK No. 7 on Related Party Disclosures. This indicates that the Company has conducted transactions with related parties fairly. All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the Notes to the Financial Statements No. 24, as attached in this Annual Report.

ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI
REASON AND PURPOSE OF THE TRANSACTION

Transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan Perseroan merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan profesional dengan tujuan menguntungkan kedua belah pihak (*efficient related party transaction*).

Related parties' transactions conducted by the Company are business activities carried out to generate operating revenues that are performed regularly, repeatedly, and/or continuously. Transactions with related parties are carried out based on the principle of mutual need and professionalism, with the objective of efficient related party transactions.

NAMA PIHAK AFILIASI/BERELASI YANG BERTRANSAKSI DAN SIFAT SERTA TUJUAN TRANSAKSI
NAME OF THE RELATED PARTY, THE NATURE AND PURPOSE OF THE TRANSACTION

Tabel Nama Pihak Afiliasi/Berelasi, Hubungan, Sifat dan Tujuan Transaksi
Table: Related Party Names, Relationships, Nature, and Purpose of Transactions

Entitas Entities	**Hubungan** Relationships	**Sifat dan Tujuan Transaksi** Nature and Purpose of Transactions
Pemerintah Republik Indonesia	Pemegang Saham	Investasi, Piutang Usaha, Pinjaman Penerusan, Pendapatan, Beban Bunga Investments, Accounts Receivable, Forwarding Loan, Income, Interest Expense
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under Common Control/ State-owned Enterprise	Biaya yang masih harus dibayar, Penyisihan dan Utang Lain-Lain, Beban Penjaminan Accrued expenses, Provisions and other payables, Guarantee expenses
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under Common Control/ State-owned Enterprise	Kas dan Setara Kas, Pendapatan Cash and Cash Equivalents, Revenue
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under Common Control/ State-owned Enterprise	Kas dan Setara Kas, Investasi, Piutang Usaha, Pendapatan Cash and Cash Equivalents, Investments, Accounts Receivable, Revenues
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under Common Control/ State-owned Enterprise	Kas dan Setara Kas, Investasi, Piutang Usaha, Pendapatan Cash and Cash Equivalents, Investments, Accounts Receivable, Revenues
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under Common Control/ State-owned Enterprise	Kas dan Setara Kas, Investasi, Pendapatan Cash and Cash Equivalents, Investments, Income
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Syariah)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under Common Control/ State-owned Enterprise	Kas dan Setara Kas, Investasi, Piutang Usaha, Pendapatan Cash and Cash Equivalents, Investments, Accounts Receivable, Revenues
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under Common Control/ State-owned Enterprise	Investasi, Pendapatan, Piutang Usaha Investment, Revenues, Accounts Receivable
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under Common Control/ State-owned Enterprise	Investasi, Piutang Usaha, Pendapatan Investment, Accounts Receivable, Revenues
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under Common Control/ State-owned Enterprise	Investasi, Piutang Usaha, Pendapatan Investment, Accounts Receivable, Revenues

Entitas Entities	Hubungan Relationships	Sifat dan Tujuan Transaksi Nature and Purpose of Transactions
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under Common Control/ State-owned Enterprise	Investasi, Piutang Usaha, Pendapatan Investment, Accounts Receivable, Revenues
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under Common Control/ State-owned Enterprise	Investasi, Pendapatan Investment, Revenues
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under Common Control/ State-owned Enterprise	Investasi, Pendapatan Investment, Revenues
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under Common Control/ State-owned Enterprise	Investasi, Pendapatan Investment, Revenues
PT Pegadaian (Persero)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under Common Control/ State-owned Enterprise	Pendapatan Pendapatan
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under Common Control/ State-owned Enterprise	Piutang Usaha, Pendapatan Investment, Revenues
PT Pertamina (Persero)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under Common Control/ State-owned Enterprise	Piutang Usaha, Pendapatan Investment, Revenues
PT Jasa Marga (Persero)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under Common Control/ State-owned Enterprise	Pendapatan Revenues
PT Len Industri (Persero)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under Common Control/ State-owned Enterprise	Piutang Usaha, Pendapatan Investment, Revenues
Perusahan Umum Damri	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under Common Control/ State-owned Enterprise	Piutang Usaha, Pendapatan Investment, Revenues
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under Common Control/ State-owned Enterprise	Piutang Usaha, Pendapatan Investment, Revenues
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under Common Control/ State-owned Enterprise	Pendapatan Revenues
PT Geo Dipa Energi (Persero)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under Common Control/ State-owned Enterprise	Pendapatan Revenues
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under Common Control/ State-owned Enterprise	Pendapatan Revenues
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under Common Control/ State-owned Enterprise	Pendapatan Revenues
Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Manajemen Kunci Key Management	Kompensasi dan Remunerasi manajemen kunci Compensation and Remuneration of key management

SALDO DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
VALUE OF THE RELATED PARTIES TRANSACTIONS

Saldo transaksi dengan pihak afiliasi/ berelasi di tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Affiliates/related party balances in 2024 and 2023 are as follows:

(dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

Saldo Pihak Berelasi dalam Aset Balances of Related Parties in Assets	2024		2023	
	Nominal	Persentase dari jumlah Aset Percentage to total Assets	Nominal	Persentase dari jumlah Aset Percentage to total Assets
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	1.696.401.153	9,99%	114.933.386	0,70%
Investasi Investment	11.906.060.381	70,08%	15.693.648.683	95,66%
Piutang Usaha Trade Receivables	168.977.762	0,99%	186.381.624	1,14%
Sub Jumlah Subtotal	**13.771.439.296**	**81,06%**	**15.994.963.693**	**96,79%**

Saldo Pihak Berelasi dalam Liabilitas Balances of Related Parties in Liabilities	2024		2023	
	Nominal	Persentase dari jumlah Liabilitas Percentage to total Liabilities	Nominal	Persentase dari jumlah Liabilitas Percentage to total Liabilities
Pinjaman Penerusan Two-Step Loans	54.586.445	17,28%	55.126.686	12,44%
Biaya Yang Masih Harus Dibayar, Penyisihan dan Utang Lain-lain Accrued Expenses, Provisions, and Other Payables	1.225.900	0,39%	2.365.884	0,53%

Saldo Pihak Berelasi dalam Pendapatan Balances of Related Parties in Revenues	2024		2023	
	Nominal	Persentase dari jumlah Pendapatan Percentage to total Revenues	Nominal	Persentase dari jumlah Pendapatan Percentage to total Revenues
Pendapatan Revenues	1.279.108.456	86,02%	1,088,147,291	82.56%

Saldo Pihak Berelasi dalam Beban Usaha Balances of Related Parties in Operating Expenses	2024		2023	
	Nominal	Persentase dari jumlah Beban Usaha Percentage to Operating Expenses	Nominal	Persentase dari jumlah Beban Usaha Percentage to Operating Expenses
Beban Penjaminan Guarantee Expenses	-	-	(3.170.952)	(0,66%)
Beban Bunga Interest Expense	3.927.253	0,72%	3.927.776	0,81%
Kompensasi dan Remunerasi Manajemen Kunci Key Management Compensation and Remuneration	32.771.471	6,01%	27.990.266	5,80%

KEBIJAKAN PERSEROAN TERKAIT MEKANISME REVIEW ATAS TRANSAKSI SERTA PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

COMPANY POLICY ON REVIEW MECHANISMS FOR TRANSACTIONS AND COMPLIANCE WITH RELATED REGULATIONS AND PROVISIONS

Seluruh transaksi pihak berelasi/afiliasi di atas merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota jaringan global PwC), sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Perseroan telah mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK No. 224.

All related party/affiliate transactions above are affiliate transactions carried out to generate operating revenues that are performed regularly, repeatedly, and/or continuously. As stated in the Audited Financial Report for the 2024 fiscal year, as audited by the KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC) (a member firm of the PricewaterhouseCoopers network), as an effort to ensure the level of fairness of transactions and conformity with generally accepted accounting standards in Indonesia. The Company has disclosed transactions with related parties as defined in PSAK No. 224.

PT PII bukan merupakan Perseroan yang memperdagangkan ekuitasnya kepada umum. Seluruh saham PT PII dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian seluruh transaksi telah diketahui oleh Pemegang Saham.

IIGF is not a Public Company that trades its equity to the public. All shares of IIGF are owned by the Republic of Indonesia. Therefore, all transactions are made known to the Shareholders.

Selama tiga tahun terakhir, tidak terdapat ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material.

During the last three years, there were no significant or material non-compliance with laws, rules, and regulations relating to related party transactions.

KETERLIBATAN ORGAN PERSEROAN DALAM PROSES *REVIEW* TRANSAKSI PIHAK BERELASI

INVOLVEMENT OF THE COMPANY'S ORGANS IN THE REVIEW OF RELATED PARTY TRANSACTIONS

Mekanisme reviu atas transaksi dengan pihak berelasi dilakukan melalui proses audit, baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Dalam proses audit tersebut, Perseroan melibatkan Organ Perseroan diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan beberapa Divisi yang terkait.

Review mechanism for transaction with related parties is through the audit process, conducted by internal and external auditors. In the audit, the Company involves Company's Organs including the Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, and several related divisions.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Komite Audit, Dewan Komisaris berperan dalam memberikan arahan dan masukan kepada Direksi agar transaksi dengan pihak berelasi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*).

Based on the review conducted by the Audit Committee, the Board of Commissioners has a role in providing advice and input to the Board of Directors, so that transactions with related parties shall be carried out in accordance with the arms-length principle.

Direksi memastikan seluruh transaksi dengan pihak berelasi di sepanjang tahun 2024, telah melalui prosedur yang memadai dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*). Informasi lebih rinci terkait transaksi pihak berelasi telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan pada Catatan 24.

The Board of Directors ensures that all transactions with related parties in 2024 have been conducted through adequate procedures and have been carried out in accordance with generally accepted business practices that comply with the arms-length principle. More detailed information regarding related party transactions are disclosed Company's Financial Statements in Note 24.

ASPEK KEPATUHAN PADA PELAKSANAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

COMPLIANCE IN THE TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah sesuai dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga Perseroan menganggap bahwa semua transaksi masih dalam batas wajar. Perseroan tidak pernah mengalami kasus dalam pelaksanaan transaksi dengan pihak berelasi.

All transactions with related parties are in accordance with terms and conditions agreed by both parties. Thus, the Company considers that all transactions are within reason. The Company never experienced any cases in the transactions with related parties.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

MATERIAL FACT AND INFORMATION AFTER THE ACCOUNTANT'S REPORTING DATE

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan, sehingga tidak terdapat informasi yang dapat disajikan lebih lanjut.

There is no information and material facts after the date of the accountant's report. Thus, there is no information that can be presented further.

REALISASI DANA PENAWARAN UMUM

UTILIZATION OF FUNDS FROM PUBLIC OFFERINGS

Sampai dengan 31 Desember 2024, PT PII tidak mencatatkan sahamnya di bursa, sehingga status PT PII bukan merupakan perusahaan terbuka, maka tidak terdapat informasi mengenai total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana, maupun tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana.

As of 31 December 2024, IIGF does not list its shares on the stock exchange. Hence, IIGF is not a public company. Therefore, there is no information related to the total acquisition of funds, details of the use of funds, the fund usage details, balance, and date of the GMS approval on the changes in the use of funds.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Tahun Buku 2024 yang diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers), tidak menyebutkan adanya kejadian keuangan yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi selama tahun buku 2024.

Based on the Audited Financial Statements for 2024 Fiscal Year audited by KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (a member firm of the PricewaterhouseCoopers network), there is no mention of any extraordinary and rare financial events during the 2024 fiscal year.

PERUBAHAN PERATURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERSEROAN

REGULATION CHANGES AND THE IMPACTS ON THE COMPANY

Sebagai wujud realisasi komitmen PT PII pada aspek kepatuhan, di sepanjang tahun 2024 telah melakukan kajian terhadap peraturan baru dan perubahan peraturan yang relevan dan berdampak terhadap Perseroan. Adapun peraturan baru dan perubahan peraturan yang memiliki dampak signifikan adalah sebagai berikut:

As a realization of IIGF's commitment to compliance, in 2024, IIGF has conducted a review of new regulations and regulatory changes that are relevant and affect the Company. The new regulations and changes in regulations with a significant impact are as follows:

Tabel Perubahan Peraturan dan Peraturan Baru yang Berdampak Signifikan
Table: Changes in Regulations and New Regulations with Significant Impacts

No.	Nama Peraturan Regulations	Dampaknya terhadap PT PII secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif serta Tindak Lanjut yang Dilakukan The Impact on PT PII Qualitatively and/or Quantitatively and the Follow-up Actions Taken
1.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Law Number 27 Year 2022 on Personal Data Protection	Diperlukan penerapan di internal PT PII terkait dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dimana tahap awal penerapan telah dimulai PT PII pada tahun 2024 dan terus berlanjut. IIGF's internal implementation is required in relation to the provisions of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, where the initial stage of implementation has been started by IIGF in 2024 and is continued.
2.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan Law No. 4 of 2024 on Maternal and Child Welfare in the First Thousand Days of Life Phase	PT PII telah melakukan penyesuaian dengan regulasi internal yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan PT PII. IIGF have made adjustments on the internal regulations stipulated in IIGF Company Policy.
3.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dan/atau Skema Pembiayaan Lainnya Minister of Finance Regulation No. 68 of 2024 on Government Support for Infrastructure Financing through Public-Private Partnership Schemes and/or Other Financing Schemes	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dan/atau Skema Pembiayaan Lainnya telah mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang sebelumnya menjadi dasar pelaksanaan penjaminan yang dilakukan oleh PT PII. Sehubungan dengan hal tersebut, PT PII perlu memastikan standar operasi yang berlaku di PII sudah sesuai dengan PMK 68/2024 yang tercermin di dalam kebijakan serta *standard operating procedure* di internal PT PII. Minister of Finance Regulation Number 68 of 2024 concerning Government Support for Infrastructure Financing through Public-Private Partnership Schemes and/or Other Financing Schemes has revoked Minister of Finance Regulation Number 260/PMK.011/2010 concerning Guidelines for Implementation of Infrastructure Guarantee in Public-Private Partnership which previously served as the basis for the implementation of guarantees carried out by IIGF. In connection with this, IIGF needs to ensure that the operating standards applicable at IIGF are in accordance with PMK 68/2024 which is reflected in the policies and standard operating procedures within IIGF.
4.	Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 829 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2025 Decree of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Number 829 of 2024 concerning the Provincial Minimum Wage for 2025	Standar Upah PT PII telah memenuhi ketentuan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 829 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2025 IIGFI's wage standards have met the provisions of the Decree of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Number 829 of 2024 concerning the Provincial Minimum Wage for 2025.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERSEROAN

CHANGES IN ACCOUNTING POLICY AND THEIR IMPACT ON THE COMPANY

ALASAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

REASON FOR THE AMENDMENT TO ACCOUNTING PRINCIPLES

Kebijakan akuntansi Perseroan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.

The company's accounting policies are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. The financial statements preparation in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards requires estimations and assumptions. It also requires management to make decision in the process of applying the Company's accounting policies. Areas that are complex or require a higher authorized decision, or areas where assumptions and estimates could have a significant impact on the financial statements.

Perseroan melakukan *review* berkelanjutan kebijakan akuntansi terhadap perkembangan revisi Standar Akuntansi Keuangan yang relevan dengan Perseroan. Berikut adalah penerapan standar akuntansi keuangan baru dan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah diterbitkan tetapi belum diterapkan.

The company reviews the accounting policies continuously with the development of revised Financial Accounting Standards that are relevant to the company. The following are the applications of new and revised financial accounting standards Financial Accounting Standards (PSAK) that have been issued but not yet implemented.

Pada tahun 2024, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi internal dalam Laporan Keuangan.

In 2024, there is no changes to the internal accounting policies in the Financial Statements.

URAIAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA

CHANGES IN ACCOUNTING POLICY AND THEIR IMPACT

PERUBAHAN PADA PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

AMENDMENTS TO THE STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS AND INTERPRETATIONS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru yang telah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Amendemen PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan" - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
2. Amendemen PSAK 216: "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;

The Indonesian Accounting Standard Board Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) has issued new standards which have been effective on 1 January 2024, these standards are as follows:

1. Amendments to PSAK 201: "Presentation of Financial Statements" - Accounting Policies Disclosure;
2. Amendments to PSAK 216: "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use;

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material impact on the financial statements for current or prior financial years.

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sebagaimana diterbitkan oleh DSAK-IAI.

From 1 January 2024, references to each PSAK and ISAK shall be amended as issued by DSAK-IAI.

DAMPAK ATAS STANDAR YANG TELAH DITERBITKAN TETAPI BELUM DITERAPKAN

IMPACT OF STANDARDS ISSUED TO BE IMPLEMENTED

Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amendemen, dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2025 adalah sebagai berikut:

1. SFAS 117: "*Insurance Contract*";
2. Amendemen PSAK 117: "Kontrak Asuransi" terkait Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 - Informasi Komparatif; dan
3. Amendemen PSAK 221: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak tertukarkan.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Perseroan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perseroan periode berikutnya.

The Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments, and interpretations, which are not yet effective for the fiscal year beginning on 1 January 2025:

1. SFAS 117: "Insurance Contract";
2. Amendments to PSAK 117: "Insurance Contracts" on Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109 - Comparative Information; and
3. Amendments to PSAK 221: "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding conditions when a currency is not exchangeable.

As of the issuance date of these financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of these new standards and revisions, on the next period of the Company's financial statements.

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

PENDAHULUAN
BACKGROUND

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("*Good Corporate Governance* atau GCG") di lingkungan Perseroan merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan serta membangun suatu lingkungan bisnis yang profesional, transparan, berintegritas, dan efisien yang dapat meningkatkan dan mengoptimalkan nilai Perseroan.

Good Corporate Governance (GCG) implementation within the Company is part of the Company's commitment to protecting the interests of its stakeholders and establishing a professional, transparent, integrity, and efficient business environment to enhance and optimize the Company's value.

Sebagaimana perkembangan penerapan GCG, Perseroan menempatkan GCG dalam koridor pembangunan berkelanjutan atau *sustainability development*, yang diharapkan dapat berdampak positif baik bagi Perseroan sendiri maupun bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar lokasi usahanya.

As the development of GCG implementation, the Company considers GCG in the corridor of sustainable development, which shall have a positive impact both for the Company and for the community and environment around its business location.

Dengan penyelenggaraan operasional yang berbasis pada tata kelola perusahaan yang baik dan *best practices* ini, Perseroan berharap dapat berkontribusi pada terciptanya suatu iklim usaha yang mengakomodasi persaingan yang sehat di Indonesia serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

By organizing operations based on good corporate governance and best practices, the Company hopes to contribute to the creation of a business climate that accommodates healthy competition in Indonesia as well as sustainable economic growth and stability to provide maximum benefits for the entire community.

Sementara itu bagi Perseroan, implementasi GCG yang mengedepankan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku universal disertai penyelenggaraan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif diharapkan akan memfasilitasi setiap elemen untuk melaksanakan tugasnya sesuai etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mendukung integritas dalam pelaporan keuangan, pengelolaan risiko yang layak, serta membangun hubungan industrial yang berlandaskan etika antara pemangku kepentingan dan Perseroan.

Meanwhile, the Company prioritizes GCG implementation with universally accepted corporate governance, accompanied by an effective supervision and control system. This shall facilitate each element to carry out its duties according to work ethics and responsible decision making, support integrity in financial reporting, proper risk management, and establish industrial relations based on ethics between stakeholders and the Company.

PRINSIP GCG
GCG PRINCIPLES

Prinsip GCG yang diadopsi ke dalam sistem dan struktur GCG Perseroan adalah sebagai berikut:

1. **Prinsip Keterbukaan (*Transparency*)**
   Prinsip keterbukaan ini diterapkan dalam proses pengambilan keputusan serta dalam mengemukakan informasi yang bersifat material dan relevan mengenai Perseroan.

The GCG principles adopted into the Company's GCG system and structure are as follows:

1. **Transparency**
   The transparency principle is applied in the decision-making process, as well as in disclosing material and relevant information about the Company.

2. **Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)**
   Prinsip akuntabilitas diterapkan dengan menetapkan kejelasan fungsi, wewenang, pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap organ Perseroan, guna mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. **Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**
   Prinsip pertanggungjawaban diwujudkan melalui kepatuhan Perseroan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat, termasuk pelaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan.
4. **Prinsip Kemandirian (*Independency*)**
   Prinsip kemandirian diwujudkan melalui penyelenggaraan kepengurusan Perseroan yang profesional serta bebas benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan prinsip korporasi.
5. **Prinsip Kewajaran (*Fairness*)**
   Prinsip keadilan dan kesetaraan ini diterapkan dengan melindungi kepentingan serta memenuhi hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan prinsip-prinsip GCG di atas secara berkesinambungan diharapkan dapat membangun suatu fundamental bisnis yang kuat dan berdaya saing bagi Perseroan sehingga Perseroan dapat terus menjaga prospek pertumbuhan kinerja untuk jangka panjang bagi para *stakeholders* dan membangun citra positif sebagai perusahaan yang akuntabel di mata publik luas.

2. **Accountability**
   The accountability principle is applied by establishing clarity of function, authority, implementation, and responsibility of each organ of the Company to achieve sustainable performance.
3. **Responsibility**
   The accountability principle is realised through the Company's compliance with various prevailing laws and regulations and sound corporate principles, including the responsibilities towards the surrounding community and the environment.
4. **Independence**
   The independence principle is realised by implementing Company's professional management that is free of conflicts of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with the prevailing laws and regulations and corporate principles.
5. **Fairness**
   These fairness and equality principles are implemented by protecting the interests and fulfilling the rights of stakeholders arising under agreements and prevailing laws and regulations.

The implementation of the above GCG principles continuously shall establish a strong and competitive business fundamental for the Company so that the Company can maintain the prospect of long-term performance growth for stakeholders and build a positive image as an accountable Company in the eyes of the public.

TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN GCG
GCG IMPLEMENTATION OBJECTIVE AND BENEFITS

Secara umum, penerapan GCG di lingkungan Perseroan menjadi bagian dari strategi transformatif untuk membangun sebuah korporasi yang sehat dan berkelanjutan. Untuk itu, penerapan GCG memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan nilai Perseroan untuk membangun daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional, agar dapat menjaga eksistensi dan pertumbuhan secara berkelanjutan;
2. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien serta efektif selain juga memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ-organ dalam Perseroan;

Generally, the GCG implementation in the Company is part of a transformative strategy to establish a healthy and sustainable corporation. Therefore, GCG is implemented with the following goals and objectives:

1. Optimizing the Company's value to establish strong competitiveness both nationally and internationally, to maintain its existence and sustainable growth;
2. Encouraging the Company's management professionally, efficiently and effectively, as well as to empower the function and increase the independence of the Company's organs.

3. Mengatur hubungan kerja antara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi;
4. Mendorong agar setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaannya dilandasi nilai moral yang tinggi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanggung jawab sosial yang tinggi;
5. Menciptakan sumber daya manusia yang profesional;
6. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada *Stakeholders*;
7. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan;
8. Memperbaiki budaya kerja Perseroan; dan
9. Meningkatkan citra baik Perseroan.

3. Regulating the working relationship between the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors;
4. Encouraging that every decision making and application is based on high moral values and in accordance with prevailing laws and regulations as well as social responsibility;
5. Creating professional human resources;
6. Increasing accountability to Stakeholders;
7. Preventing irregularities in the Company's management;
8. Refining the Company's working culture; and
9. Enhancing the Company's good image.

DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PENERAPAN GCG PERSEROAN

LEGAL BASIS AND THE COMPANY'S GCG POLICY

Untuk memastikan pelaksanaannya berlangsung secara efektif, Perseroan telah menerapkan GCG sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum terkait implementasi GCG, yaitu di antaranya:

1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berikut perubahannya;
3. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.

To ensure its effective implementation, the Company implemented GCG in accordance with the laws and regulations as the legal basis for GCG implementation, among others:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2003 on State Finance;
2. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises and its amendments;
3. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and its amendments;
4. Regulation of the Government of the Republic of Indonesia No. 45 of 2005 on the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises, as amended by the Government Regulation No. 23 of 2022 on the Amendment to the Government Regulation No. 45 of 2005 on the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises.
5. Regulation of the Government of the Republic of Indonesia No. 35 of 2009 on the State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Infrastructure Guarantee Sector, as amended twice by the Regulation of the Government of the Republic of Indonesia No. 55 of 2020 on the Second Amendment to the Regulation of the Government of the Republic of Indonesia No. 35 of 2009 on the State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Infrastructure Guarantee Sector.

6. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 28/PMK.06/2013 tentang Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan, dan perubahannya melalui:
   a. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 59/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
   b. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 135/PMK.06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.06/2018 terkait Pelaporan, Perubahan dan Pemantauan Penggunaan Tambahan PMN di lingkungan Kementerian Keuangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 197/PMK.06/2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
11. Keputusan Menteri Keuangan No. 505/KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
12. Keputusan Menteri Keuangan No. 556/KMK.01/2020 terkait Pedoman Pengelolaan Komunikasi di lingkungan Kemenkeu;
13. Anggaran Dasar Perseroan; dan
14. Pedoman kebijakan dan aturan pelaksanaan sistem tata kelola perusahaan yang berlaku di Perseroan:

6. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 28/PMK.06/2013 on the Preparation, Submission, and Amendment to the Long Term Plan and Work Program and Budget of the Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance;
7. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 78/PMK.06/2015 on the Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of a Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance, and its amendments:
   a. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 59/PMK.06/2016 on the Amendment to the Regulation of the Minister of Finance No. 78/PMK.06/2015 on the Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of a Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance;
   b. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 135/PMK.06/2017 on the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Finance No. 78/PMK.06/2015 on the Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of a Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance;
8. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 88/ PMK.06/2015 on the Implementation of Good Corporate Governance in the Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance;
9. Minister of Finance Regulation No. 182/PMK.06/2018 on the Reporting, Changes, and Monitoring the Use of Additional PMN within the Ministry of Finance;
10. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 197/PMK.06/2019 on the Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners of a Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance;
11. Minister of Finance Decree No. 505/KMK.06/2020 on the Guidelines for Assessment and Evaluation of the Good Corporate Governance in the Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance;
12. Minister of Finance Decree No. 556/KMK.01/2020 on the Communication Management Guidelines within the Ministry of Finance;
13. Company's Articles of Association; and
14. Policy guidelines and rules for the corporate governance system applicable in the Company:

Kebijakan Policy	Isi Content			
Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik Governance Guidelines Company	Kebijakan dan prosedur sebagai landasan operasional penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) oleh segenap Organ Perseroan dan Insan Perseroan, meliputi:		Policies and procedures as the operational basis for the Good Corporate Governance (GCG) principles by all Company's organs and its employees, including:	
	BAB I	Pendahuluan	CHAPTER I	Introduction
	BAB II	Organ Perseroan	CHAPTER II	Company's Organs
	BAB III	Tata Kelola Manajemen Risiko	CHAPTER III	Risk Management Governance
	BAB IV	Tata Kelola Pengendalian Internal	CHAPTER IV	Internal Control Governance
	BAB V	Kode Etik dan Benturan Kepentingan	CHAPTER V	Code of Conduct and Conflict of Interest
	BAB VI	Pengadaan Barang dan Jasa	CHAPTER VI	Procurement of Goods and Services
	BAB VII	Tata Kelola Informasi	CHAPTER VII	Information Governance
	BAB VIII	Manajemen Mutu	CHAPTER VIII	Quality Management
	BAB IX	Tata Kelola Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Perseroan	CHAPTER IX	Relationship Governance with the Company's Stakeholders
	BAB X	Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan	CHAPTER X	Company's Long-Term Plan and Work Program and Budget
	BAB XI	Kebijakan dan Pelaporan Pelanggaran	CHAPTER XI	Whistleblowing System Policy
	BAB XII	Pengukuran dan Pelaporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	CHAPTER XII	Measurement and Reporting of Good Corporate Governance
	BAB XIII	Penutup	CHAPTER XIII	Closing
Kebijakan Tata Laksana Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Board Manual for the Board of Commissioners and Board of Directors	Tata laksana kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang mengatur mengenai pelaksanaan hubungan kerja antar Dewan Komisaris dan Direksi beserta organ di bawahnya masing-masing, meliputi:		Working procedures for the Board of Commissioners and the Board of Directors that regulate the working relationships between the Board of Commissioners and the Board of Directors and their respective subordinate organs, including:	
	BAB I	Pendahuluan	CHAPTER I	Introduction
	BAB II	Dewan Komisaris	CHAPTER II	Board of Commissioners
	BAB III	Direksi	CHAPTER III	Board of Directors
	BAB IV	Tata Hubungan Kerja Antar Organ Perseroan	CHAPTER IV	Working Relationship between the Company's Organs
	BAB V	Penilaian, Evaluasi dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Perseroan	CHAPTER V	Assessment, Evaluation, and Implementation of Good Corporate Governance in the Company
Kebijakan Kode Etik Code of Conduct	Tata aturan hubungan internal Perseroan (organ Perseroan dan karyawan) dan hubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Adapun isinya meliputi:		The rules of the Company's internal relationships (between the Company's organs and personnel) and relationships with stakeholders in carrying out the Company's business. The contents include:	
	BAB I	Pendahuluan	CHAPTER I	Introduction
	BAB II	Pernyataan Nilai Perseroan	CHAPTER II	Statement of Corporate Values
	BAB III	Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Perseroan	CHAPTER III	Company's Code of Conduct and Business Ethics
	BAB IV	Petunjuk Pelaksanaan	CHAPTER IV	Implementation Guidelines
	BAB V	Pelaporan dan Sanksi Pelanggaran	CHAPTER V	Reporting and Sanctions for Violations
	BAB VI	Penutup	CHAPTER VI	Closing

Kebijakan Policy	Isi Content			
Piagam Komite Audit Audit Committee Charter	Acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit Perseroan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang meliputi:		References and guidelines for the Company's Audit Committee to exercise its duties and authorities, which include:	
	BAB I	Pendahuluan	CHAPTER I	Introduction
	BAB II	Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Kode Etik	CHAPTER II	Duties, Responsibilities, Authorities, and Code of Conduct
	BAB III	Pola Hubungan Kerja, Keanggotaan dan Masa Jabatan	CHAPTER III	Working Relationship Pattern, Membership, and Tenure
	BAB IV	Tata Kerja dan Prosedur Kerja	CHAPTER IV	Working Procedure
	BAB V	Penganggaran dan Pembiayaan	CHAPTER V	Budgeting and Financing
	BAB VI	Penutup	CHAPTER VI	Closing
Piagam Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Charter	Acuan dan pedoman kerja bagi Komite Pemantau Risiko Perseroan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang meliputi:		References and guidelines for the Company's Risk Monitoring Committee to exercise its duties and authorities, which include:	
	BAB I	Pendahuluan	CHAPTER I	Introduction
	BAB II	Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang	CHAPTER II	Duties, Responsibilities, and Authorities
	BAB III	Pola Hubungan Kerja, Keanggotaan dan Masa Jabatan	CHAPTER III	Working Relationship Pattern, Membership, and Tenure
	BAB IV	Tata Kerja dan Prosedur Kerja	CHAPTER IV	Working Procedure
	BAB V	Penganggaran dan Pembiayaan	CHAPTER V	Budgeting and Financing
	BAB VI	Penutup	CHAPTER VI	Closing
Piagam Audit Internal Internal Audit Charter	Prosedur operasi Audit Internal dalam menjalankan fungsinya melakukan penelaahan dan pengujian operasional Perseroan sebagai organisasi bisnis, yang secara garis besar mencakup:		Internal Audit's operating procedures to exercise its function of reviewing and testing the Company's operations as a business organization, which generally includes:	
	BAB I	Pendahuluan	CHAPTER I	Introduction
	BAB II	Struktur, Persyaratan, dan Independensi Auditor Internal	CHAPTER II	Internal Auditor's Structure, Requirements, and Independence
	BAB III	Cakupan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Auditor Internal	CHAPTER III	Internal Auditor's Scope, Authorities, and Responsibilities
	BAB IV	Proses Penugasan Audit Internal	CHAPTER IV	Internal Audit Appointment Process
	BAB V	Penutup	CHAPTER V	Closing
Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Policy	Merupakan kebijakan yang mengatur mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan. Isi dari Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran sebagai berikut:		This is a policy that regulates the mechanism for reporting violations occurring within the Company. The contents of the Whistleblowing System Policy are as follows:	
	BAB I	Pendahuluan	CHAPTER I	Introduction
	BAB II	Pelaporan Pelanggaran	CHAPTER II	Whistleblowing Report
	BAB III	Pihak Terkait Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran	CHAPTER III	Related Parties of Whistleblowing Management
	BAB IV	Penanganan Pelaporan Pelanggaran	CHAPTER IV	Whistleblowing Report Handling
	BAB V	Perlindungan Pelapor dan Terlapor	CHAPTER V	Protection for Whistleblowers and Reported Parties
	BAB VI	Dokumentasi, Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi	CHAPTER VI	Documentation, Socialization, Monitoring and Evaluation

Kebijakan Policy	Isi Content			
Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Gratification Control Policy	Kebijakan ini mengatur mengenai batasan penerimaan dan pemberian gratifikasi, serta pelaporan penerimaan dan penolakan gratifikasi yang berlaku bagi Insan Perseroan. Isi dari pedoman sebagai berikut:		This policy regulates the limits of receiving and giving gratuities, as well as reporting the acceptance and refusal of gratuities applicable to the Company's personnel. The charter's contents are as follows:	
	BAB I	Pendahuluan	CHAPTER I	Introduction
	BAB II	Pengendalian Gratifikasi	CHAPTER II	Gratification Control
	BAB III	Dokumentasi, Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi	CHAPTER III	Documentation, Socialization, Monitoring and Evaluation
	BAB IV	Penutup	CHAPTER IV	Closing
Pedoman Sistem Pengendalian Internal Internal Control System Guidelines	Pedoman pelaksanaan pengendalian internal yang diterapkan di lingkungan Perseroan, meliputi:		Guidelines for the internal control applied within the Company, including:	
	BAB I	Pendahuluan	CHAPTER I	Introduction
	BAB II	Implementasi Sistem Pengendalian Internal	CHAPTER II	Internal Control System Implementation
	BAB III	Tugas dan Tanggung Jawab	CHAPTER III	Duties and Responsibilities

Kebijakan proses bisnis tersebut ditinjau dan dievaluasi secara berkala oleh Perseroan untuk menjaga relevansinya dengan perkembangan bisnis Perseroan dan ketentuan perundangan yang berlaku bagi Perseroan. Kebijakan tersebut disusun dengan memperhatikan metodologi, *best practices*, dan jika diperlukan, dapat melibatkan karyawan Perseroan untuk menyerap aspirasi dan ide-ide melalui penyelenggaraan *focus group discussio*n. Kebijakan tersebut juga dirumuskan melalui sinergi antara unit bisnis yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses bisnis tertentu dengan unit khusus penyiapan dokumen proses bisnis (*Organization Design*).

The Company reviews and evaluates the Company's business process policies regularly to maintain its relevance to the development of the Company's business and the laws and regulations applicable to the Company. The policies are formulated by taking into account methodologies, best practices, and if necessary, the policy's formulation may involve the Company's employees to obtain aspirations and ideas by means of focus group discussions. The policy is also formulated through synergy between the business unit responsible for certain business processes and the special unit for preparing business process documents (Organization Design).

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

Perseroan telah memiliki Struktur Tata Kelola Perusahaan yang memadai yang meliputi Dewan Komisaris, Direksi, berikut dengan organ pendukungnya. Perseroan juga dilengkapi oleh infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang mendukung penyelenggaraan tata kelola secara efektif, antara lain kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tata tertib yang mengatur kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

The Company has an adequate Corporate Governance Structure that includes the Board of Commissioners, and Board of Directors, as well as their supporting organs. The Company is also equipped with Corporate Governance infrastructure to support effective governance implementation, which includes policies and procedures, management information systems, and rules of conduct that regulate the job descriptions of each organizational structure.

Struktur Tata Kelola Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1, yang mengatur organ-organ utama Perseroan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

Berikut penjelasan fungsi masing-masing organ utama Perseroan:

1. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.

2. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

The Company's Corporate Governance structure is in accordance with the provisions of Law No. 40 of 2007 Chapter I on the General Provisions Article 1, which stipulates the Company's main organs, consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors.

The elaboration of each function of the Company's main organs:

1. General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as GMS, is an Organ of the Company that has an authority not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified by the Law of Limited Liability Companies and/or the Company's Articles of Association.
2. The Board of Commissioners is a Company's Organ that functions to supervise generally and/or specifically in accordance with the Articles of Association, and provide advice to the Board of Directors.
3. The Board of Directors is the Company's organ who is authorized and fully responsible for managing the Company for the Company's interest, in line with the purpose and objectives of the Company, as well as representing the Company, both inside and outside the court, in line with the Company's Articles of Association.

Struktur Tata Kelola Perusahaan Perseroan
Corporate Governance Structure

STRATEGI PERSEROAN MENUJU TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBAIK DAN BERKELANJUTAN

STRATEGIES TOWARDS BEST AND SUSTAINABLE GOVERNANCE

Perseroan memiliki komitmen untuk mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas penerapan GCG di segenap aspek Perseroan. Sepanjang tahun 2024, sejumlah inisiatif implementasi GCG telah dilaksanakan, baik yang dilakukan secara mandiri maupun dengan dukungan dari pihak independen, yakni antara lain:

1. Internalisasi kebijakan kode etik dalam berbagai kesempatan kepada seluruh Insan Perseroan serta pembaharuan Pakta Integritas Tahunan karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2023 (Asesmen GCG) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
3. Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi *Area of Improvement* (AoI) GCG sesuai hasil Asesmen GCG Tahun Buku 2023.
4. Pelaksanaan *stakeholders survey* guna memperoleh *feedback* dari *stakeholders* terkait kinerja PT PII.
5. Melaksanakan *Audit Surveillance* SMAP ISO 37001:2016 ke-2 pada bulan Maret 2024, dengan hasil menunjukkan efektivitas yang baik dan tidak ada ketidaksesuaian, baik yang bersifat mayor maupun minor. PT PII berkomitmen untuk terus menerapkan SMAP dan akan melaksanakan proses re-sertifikasi pada tahun 2025 untuk ruang lingkup yang sama.
6. Penyampaian diseminasi program pengendalian gratifikasi kepada seluruh Insan Perseroan
7. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan terkait GCG yaitu kebijakan kode etik, kebijakan pengendalian gratifikasi, kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan kebijakan tata kelola dokumen kepada seluruh karyawan serta jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PT PII.
8. Pelaksanaan kegiatan webinar Forum *Governance Risk and Compliance* (GRC) bertemakan "Hindari Benturan Kepentingan: Komitmen dan Langkah Konkret dalam Pemberantasan Korupsi untuk Indonesia Maju".
9. Partisipasi dalam ajang penghargaan terkait GCG.

The Company is committed to encouraging sustainable business growth by improving the GCG quality in all aspects of the Company. In 2024, several GCG initiatives have been implemented, both independently and with support from independent parties, among others:

1. Internalization of the code of conduct on various occasions to all Company's personnel, as well as the renewal of the Annual Integrity Pact of employees, Board of Directors, and Board of Commissioners.
2. Good Corporate Governance Assessment for the 2023 Fiscal Year (GCG Assessment) by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).
3. Follow-up on GCG Area of Improvement (AoI) recommendations in line with the GCG assessment results for the 2023 Fiscal Year.
4. Stakeholder surveys are carried out to obtain feedback from stakeholders regarding IIGF's performance.
5. Conducted the second ISO 37001:2016 SMAP Surveillance Audit in March 2024, with the results of good effectiveness and no non-conformities, major or minor. IIGF is committed to implementing SMAP and will proceed with the re-certification process in 2025 for the same scope.
6. Dissemination of the gratification control program to all Company's personnel
7. Socialization of GCG related policies, i.e., code of conduct, gratification control policy, whistleblowing system policy, and document governance policy to all employees and IIGF's Board of Directors and Board of Commissioners.
8. The Governance Risk and Compliance (GRC) Forum webinar with the theme "Avoiding Conflict of Interest: Commitment and Concrete Steps in Corruption Eradication for Advanced Indonesia."
9. Participation in GCG-related awards.

PRESTASI PERSEROAN DALAM IMPLEMENTASI GCG DI TAHUN 2024

COMPANY'S ACHIEVEMENT IN GCG IMPLEMENTATION IN 2024

Komitmen Perseroan dalam menjalankan GCG secara berkelanjutan, terbukti memberikan dampak positif bagi Pemegang Saham dan peningkatan kinerja Perseroan.

Beberapa penghargaan terkait GCG yang diterima antara lain:

1. Anugerah BUMN 2024 kategori Tata Kelola Perusahaan [BUMN *Track*]
2. Global CSR *Award & Summit* 2024 kategori *Best Community Programme* dan *Best* CEO [The Pinnacle Group Intl].
3. Indonesia *Regulatory & Compliance Awards* 2024 kategori *Most Strategic Enterprise in Regulatory Compliance, Financial Services-Non-Bank Prosper* B [Hukum *Online*]
4. ASEAN *Risk Awards* 2024 kategori ASEAN GRC *Awards* [ERMA]
5. *Annual Report Award* 2023 kategori *Winner of Non-Go Public Financial* [Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG)]
6. Anugerah Humas Indonesia 2024 kategori Keterbukaan Informasi Media Sosial - TikTok [Media Humas Indonesia]

The Company's commitment to implementing GCG in a sustainable manner is evidenced to have a positive impact on Shareholders and the Company's performance.

Some of the GCG related awards include:

1. SOE Award 2024 in the Corporate Governance [BUMN Track]
2. Global CSR Award & Summit 2024 in the Best Community Program and Best CEO categories [The Pinnacle Group Intl].
3. Indonesia Regulatory & Compliance Awards 2024 in the Most Strategic Enterprise in Regulatory Compliance, Financial Services-Non-Bank Prosper B category [Hukum Online]
4. ASEAN Risk Awards 2024 in the ASEAN GRC Awards [ERMA]
5. Annual Report Award 2023 Winner of Non-Go Public Financial Category [National Committee on Governance (KNKG)]
6. Anugerah Humas Indonesia 2024 in the Social Media Information Disclosure category - TikTok [Media Humas Indonesia]

SKOR PENILAIAN *ASSESSMENT* ATAS PENERAPAN GCG DI PERSEROAN

GCG ASSESSMENT SCORE IN THE COMPANY

Wujud komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan GCG secara berkelanjutan, juga dibuktikan dengan hasil skor penilaian GCG pada tahun buku 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun buku 2023. Berikut hasil penilaian atas penerapan GCG dalam 5 (lima) tahun terakhir:

The Company's commitment to implementing GCG in a sustainable manner is also evidenced by the GCG assessment score in the 2024 fiscal year, which has increased compared to the previous year. The following are the GCG assessment results in the last five (5) years:

Tahun Year	Skor *Assessment* GCG GCG Assessment Score	Kualitas Quality	Pelaksana Penilai Assessment Executor
2024*	90,829	Sangat Baik Excellent	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Financial and Development Supervisory Agency
2023	90,036	Sangat Baik Excellent	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Financial and Development Supervisory Agency
2022	88,170	Sangat Baik Excellent	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Financial and Development Supervisory Agency
2021	89,060	Sangat Baik Excellent	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Financial and Development Supervisory Agency
2020	89,120	Sangat Baik Excellent	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Financial and Development Supervisory Agency

* Hasil asesmen GCG tahun 2024, dijelaskan lebih lanjut pada sub bab Evaluasi Kepatuhan Tata Kelola Perusahaan dalam Bab Tata Kelola Perusahaan Laporan Tahunan ini

* The results of the 2024 GCG assessment can be further referred to in the Corporate Governance Compliance Evaluation sub-chapter in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ dengan kewenangan tertinggi dalam proses pengambilan keputusan penting yang memprioritaskan kepentingan Perseroan serta dilakukan secara wajar dan transparan. Kewenangan RUPS tidak didelegasikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas-batas yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

In accordance with the Company's Articles of Association, the General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest authority organ in the process of making important decisions that prioritise the Company's interests and is conducted in a fair and transparent manner. The authority of the GMS is not delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits stipulated in the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

DASAR PENYELENGGARAAN RUPS
BASIS FOR GMS IMPLEMENTATION

Penyelenggaraan RUPS Perseroan dilaksanakan mengacu pada ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berikut perubahannya;
3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 88/ PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 505/ KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan; dan
5. Anggaran Dasar Perseroan.

The Company's GMS is carried out with reference to the provisions, among others:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
2. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises and its amendments;
3. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 88/ PMK.06/2015 on the Implementation of Good Corporate Governance in the Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance;
4. Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 505/KMK.06/2020 on the Guidelines for Assessment and Evaluation of the Good Corporate Governance in the Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance; and
5. Company's Articles of Association.

HAK DAN WEWENANG RUPS
RIGHTS AND AUTHORITIES OF GMS

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) No. 88/PMK.06/2015 disebutkan bahwa hak RUPS, antara lain:

1. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, dengan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
2. Memperoleh informasi material mengenai Perseroan, secara tepat waktu, terukur, dan teratur;

As stated in the Regulation of the Minister of Finance (PMK) of the Republic of Indonesia No. 88/PMK.06/2015, the GMS' rights are among others:

1. Attending and voting in the GMS, provided that one share entitles its holder to cast one vote;
2. Obtaining material information about the Company, in a timely, measured, and regular manner;

3. Menerima pembagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya; dan
4. Hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Disebutkan juga dalam PMK No.88/PMK.06/2015 bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

3. Receiving a distribution of the Company's profits allocated to Shareholders in the form of dividends, and the remaining assets from liquidation, proportional to the number of shares owned; and
4. Having other rights based on the articles of association and laws and regulations.

PMK No. 88/PMK.06/2015 also stated that the GMS is an organ in the Company that has the rights not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners, within the scope stipulated in the law and/or articles of association.

JENIS-JENIS PELAKSANAAN RUPS
TYPES OF GMS

Selaras dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 20, Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari:
1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan setiap tahun meliputi Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Persetujuan Laporan Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

In line with Article 20 of the Company's Articles of Association, the General Meeting of Shareholders consists of:
1. Annual General Meeting of Shareholders, held every year, including the General Meeting of Shareholders regarding the Approval of the Annual Report and the Annual General Meeting of Shareholders regarding the Approval of the Company's Work Program and Budget.
2. Extraordinary General Meeting of Shareholders, i.e., General Meeting of Shareholders held at any time based on the need for the Company's interests.

PROSEDUR PELAKSANAAN RUPS
GMS PROCEDURE

Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan didahului pemanggilan RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara RUPS disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar menentukan lain.

The Board of Directors shall organize the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders preceded by an invitation to the GMS. The GMS summons shall be delivered within a period of at most fourteen (14) days before the date the GMS is held, excluding the date of the summons and the date of the GMS. The summon to the GMS shall be made by registered mail and/or by advertisement in a newspaper. The summon to the GMS shall state the date, time, place, and agenda of the GMS, as well as a notification that the materials to be discussed in the GMS are available at the Company's office from the date of the invitation to the GMS until the date of the GMS.

The GMS may be held if at least 51% (fifty-one per cent) of the total number of shares with voting rights are present or represented in the GMS, except stipulated otherwise by laws and regulations and/or the articles of association.

PELAKSANAAN RUPS PERSEROAN TAHUN 2024

COMPANY'S GMS IN 2024

Selama tahun 2024, Perseroan telah melaksanakan RUPS terdiri dari:

1. RUPS Tahunan mengenai Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2023
2. RUPS Tahunan mengenai Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025
3. RUPS Luar Biasa Tahun 2024

Berikut penjelasan dari masing-masing pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa selama tahun 2024:

In 2024, the Company conducted GMS consisting of:

1. Annual GMS to Approve the Annual Report for the 2023 Fiscal Year
2. Annual GMS to Approve the Company's Work Program and Budget in 2025
3. Extraordinary GMS in 2024

The following is an elaboration of each Annual GMS and Extraordinary GMS in 2024:

RUPS TAHUNAN PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2023

ANNUAL GMS TO APPROVE THE ANNUAL REPORT FOR THE 2023 FISCAL YEAR

Tanggal Undangan RUPS GMS Invitation Date	6 Mei 2024	6 May 2024
Tanggal & Waktu RUPS GMS Date & Time	21 Mei 2024	21 May 2024
Lokasi Location	The St. Regis Jakarta Jl. H. R. Rasuna Said No. 4 Blok Kav. B Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta	The St. Regis Jakarta Jl. H. R. Rasuna Said No. 4 Blok Kav. B Kuningan, Setia Budi, South Jakarta, Jakarta
Pimpinan RUPST AGMS Chairman	Rionald Silaban, SH	Rionald Silaban, SH
Kuorum Quorum	100%	100%
Pihak Independen Independent Party	• **Arry Supratno, SH** Notaris • **Jimmy Pangestu** KAP	• Arry Supratno, SH Notary • Jimmy Pangestu KAP

Agenda, Keputusan dan Tindak Lanjut atau Realisasi Atas Pelaksanaan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2023

Agenda, Resolutions, and Follow-up or Realisation of the GMS Annual Report for the 2023 Fiscal Year

Agenda	Keputusan Decisions	Tindak Lanjut Follow Up
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 yang mencakup: a. Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023; dan b. Pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk: a. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023; dan b. Pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan	Laporan Tahunan yang terdiri dari Laporan Keuangan serta pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 **telah disahkan** oleh Pemegang Saham pada saat RUPS berlangsung.

Agenda	Keputusan Decisions	Tindak Lanjut Follow Up
1. Approval of the Annual Report for the 2023 Fiscal Year, which includes: a. Ratification of the Company's Financial Statements for the 2023 Fiscal Year; and b. Granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervision and management carried out during the 2023 Fiscal Year.	1. Approving the Company's Annual Report for the 2023 Fiscal Year, including: a. Ratifying the Company's Financial Statements for the 2023 Fiscal Year; and b. Granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervision and management carried out during the 2023 Fiscal Year, to the extent that such actions do not constitute a criminal offense and are reflected in the Annual Report including the Company's Financial Statements	The Annual Report consists of the Financial Statements and the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions carried out in the 2023 Fiscal Year, and has been **ratified** by the Shareholders at the GMS.
2. Penetapan keputusan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 Determination of the use of the Company's Net Income in the 2023 Fiscal Year	2. Penggunaan laba bersih tahun buku 2023 untuk dialokasikan sebagai: a. Cadangan wajib sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp41.792.000.000 (empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta Rupiah); b. Dividen sebesar 20% (dua puluh persen) dari laba bersih atau sebesar Rp167.165.000.000 (seratus enam puluh tujuh miliar seratus enam puluh lima juta Rupiah); dan c. Sisanya ditetapkan sebagai laba ditahan. Pembayaran dividen agar segera dilakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara. 2. In the 2023 fiscal year, the net profit is allocated as: a. Mandatory reserve of 5% (five per cent) of net profit or Rp41,792,000,000 (forty-one billion seven hundred ninety-two million rupiah); b. Dividend of 20% (twenty per cent) of net profit or Rp167,165,000,000 (one hundred sixty-seven billion one hundred sixty-five million rupiah); and c. The remainder is designated as retained earnings. Dividend payments to be made immediately in accordance with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 179/PMK.02/2022 on the the Management of Non-Tax State Revenues from State Assets separated by the State Treasurer.	Pemegang Saham **telah menetapkan** penggunaan laba bersih tahun buku 2023 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. Shareholders **have determined** the utilization of net income for the 2023 fiscal year via the General Meeting of Shareholders for the Annual Report for the 2023 Fiscal Year.

Agenda	Keputusan Decisions	Tindak Lanjut Follow Up
Penetapan keputusan gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 serta pembayaran Tantiem berdasarkan kinerja Tahun Buku 2023. Determination of the salary/honorarium and allowances/facilities of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the 2024 Fiscal Year, as well as the payment of Tantiem based on the performance of the 2023 Fiscal Year.	Penetapan keputusan penyesuaian gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2024 serta pembayaran tantiem berdasarkan kinerja tahun 2023 akan ditetapkan secara terpisah melalui keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara sirkuler. Determination of the adjustment of the salary/honorarium and benefits/facilities of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the 2024 Fiscal Year, as well as the payment of tantiem based on the 2023 performance, which would be determined separately through a Shareholder Resolution to be carried out circularly.	Pemegang Saham **telah menetapkan** penyesuaian gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2023 serta pembayaran tantiem berdasarkan kinerja tahun 2023 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 juncto Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor KMK-177/KM.6/2024 tentang Persetujuan Pembayaran Tantiem Tahun Buku 2023 dan Penetapan Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris, Tunjangan, dan Fasilitas yang Diberikan Kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024. The Shareholders **have determined** the adjustment of the salary/honorarium and allowances/facilities of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the 2023 Fiscal Year, as well as the payment of tantiem based on the 2023 performance via the General Meeting of Shareholders of the Annual Report for the 2023 Fiscal Year, in conjunction with the Resolution of the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia No. KMK-177/KM.6/2023 on the Approval to Pay Tantiem for the 2023 Fiscal Year and Determination of the Board of Directors' Salary, Board of Commissioners' Honorarium, Allowances, and Facilities Provided to the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 Fiscal Year.

RUPS TAHUNAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2025

ANNUAL GMS TO APPROVE THE COMPANY'S WORK PROGRAM AND BUDGET IN 2025

Tanggal Undangan RUPS GMS Invitation Date	20 November 2024	20 November 2024
Tanggal & Waktu RUPS GMS Date & Time	16 Desember 2024	16 December 2024
Lokasi Location	Ruang Rapat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Gedung Syafrudin Prawiranegara II, Lantai 10 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Meeting Room of the Directorate General of State Assets Management, Syafrudin Prawiranegara II Building, 10th Floor North, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Central Jakarta, Special Capital Region of Jakarta
Pimpinan RUPST AGMS Chairman	Rionald Silaban, SH	Rionald Silaban, SH
Kuorum Quorum	100%	100%
Pihak independen Independent Party	**Arry Supratno, SH** Notaris	**Arry Supratno, SH** Notary

Agenda, Keputusan dan Tindak Lanjut atau Realisasi Atas Pelaksanaan RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025

Agenda, Resolutions, and Follow-up or Realisation of the GMS 2025 Work Program and Budget of the Company

Agenda	Keputusan Decisions	Tindak Lanjut Follow Up
Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan Tahun 2025; Approval of the Company's 2025 Work Program and Budget;	Menyetujui dan mengesahkan: Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan Tahun 2025 Approving and ratifying: The Company's 2025 Work Program and Budget	RKAP 2025 **telah disahkan** oleh Pemegang Saham pada saat RUPS berlangsung 2025 WP&B **has been ratified** by the Shareholders during the GMS
Persetujuan atas Kontrak Kinerja Direksi Perseroan Tahun 2025; dan Approval of the Company's Board of Directors Performance Contract in 2025; and	Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Kinerja Direksi Perseroan Tahun 2025 Approving and ratifying the Company's Board of Directors Performance Contract in 2025	Kontrak Kinerja Direksi Perseroan Tahun 2025 **telah disahkan** oleh Pemegang Saham pada saat RUPS berlangsung The Company's Board of Directors Performance Contract in 2025 **has been ratified** by the Shareholders at the GMS
Persetujuan atas Kontrak Kinerja Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2025 Approval of the Company's Board of Commissioners' Performance Contract in 2025	Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2025 Approving and ratifying the Company's Board of Commissioners' Performance Contract in 2025	Kontrak Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2025 **telah disahkan** oleh Pemegang Saham pada saat RUPS berlangsung The Board of Commissioners' Performance Contract in 2025 **has been ratified** by the Shareholders at the GMS

PENYELENGGARAAN RUPS LUAR BIASA TAHUN 2024

EXTRAORDINARY GMS IN 2024

Sepanjang tahun 2024, Pemegang Saham telah menerbitkan Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler sebanyak 3 (tiga) Keputusan, meliputi:

In 2024, the Shareholders have issued three (3) circular Shareholder Resolutions, including:

Tanggal RUPS Date GMS	Perihal Subject
17 Juli 2024 17 July 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perseroan Dismissal and Appointment of the Company's President Commissioner
27 Agustus 2024 27 August 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Dismissal and Appointment of the Member of the Board of Commissioners
27 Agustus 2024 27 August 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Dismissal and Appointment of the Member of the Board of Commissioners

KEPUTUSAN RUPS SEBELUMNYA DAN TINDAK LANJUTNYA

PREVIOUS GMS RESOLUTION AND FOLLOW-UP

Seluruh rekomendasi dari Keputusan RUPS tahun buku 2022 yang diselenggarakan tahun 2023 telah dilaksanakan. Berikut Keputusan RUPS tahun buku 2022 yang diselenggarakan di tahun 2023 dan tindak lanjutnya:

All recommendations from the GMS Resolution for the 2022 fiscal year held in 2023 have been implemented. The following is the GMS Resolution for the 2022 fiscal year held in 2023 and its follow-up:

Agenda	Keputusan Decisions		Tindak Lanjut Follow Up
RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 Annual GMS to Approve the Annual Report for the 2022 Fiscal Year	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk: a. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022; dan b. Pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan.	1. Approving the Company's Annual Report for the 2022 Fiscal Year, including: a. Ratifying the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year; and b. Granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervision and management carried out during the 2022 Fiscal Year, to the extent that such actions do not constitute a criminal offense and are reflected in the Annual Report including the Company's Financial Statements.	Laporan Tahunan yang terdiri dari Laporan Keuangan serta pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022 **telah disahkan** oleh Pemegang Saham pada saat RUPS berlangsung. The Annual Report consists of the Financial Statements and the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions carried out in the 2022 Fiscal Year, and **has been ratified** by the Shareholders at the GMS.
	2. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2022 sebesar Rp714.173.621.000,- (tujuh ratus empat belas miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu Rupiah) untuk dialokasikan sebagai: a. Cadangan wajib sebesar 5% (lima persen) atau senilai Rp35.708.681.050,- (tiga puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh Rupiah); b. Dividen sebesar 20% (dua puluh persen) atau senilai Rp142.834.724.200 (seratus empat puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus Rupiah); dan c. Sisanya sebesar Rp535.630.215.750 (lima ratus tiga puluh lima miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan. Pembayaran dividen agar segera dilakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara dipisahkan oleh Bendahara umum Negara.	2. Approving the use of net income for the 2022 fiscal year amounting to Rp714,173,621,000 (seven hundred fourteen billion one hundred seventy-three million six hundred twenty-one thousand rupiah) to be allocated as: a. Mandatory reserve of 5% (five per cent) or Rp35,708,681,050 (thirty-five billion seven hundred eight million six hundred eighty-one thousand fifty rupiah); b. Dividend of 20% (twenty per cent) or Rp142,834,724,200 (one hundred forty-two billion eight hundred thirty-four million seven hundred twenty-four thousand two hundred rupiah); and c. The remaining amount of Rp535,630,215,750 (five hundred thirty-five billion six hundred thirty million two hundred fifteen thousand seven hundred fifty rupiah) shall be designated as retained earnings. Dividend payments to be made immediately in accordance with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 179/PMK.02/2022 on the the Management of Non-Tax State Revenues from State Assets separated by the State Treasurer.	1. Pemegang Saham **telah menetapkan** penggunaan laba bersih tahun buku 2022 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 2. Pembayaran dividen telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/ PMK.02/2022, yaitu tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah tanggal keputusan RUPS penetapan besaran dividen, dimana Perseroan telah menyetorkan dividen tersebut pada tanggal 9 Juni 2023. 1. Shareholders **have determined** the utilization of net income for the 2022 fiscal year via the General Meeting of Shareholders for the Annual Report for the 2022 Fiscal Year. 2. Dividend has been paid, in accordance with the provisions in the Minister of Finance Regulation No. 179/ PMK.02/2022, which is not more than one (1) month after the date of the GMS Resolution determining the amount of dividends. The Company has deposited the dividends on 9 June 2023.

Agenda	Keputusan Decisions		Tindak Lanjut Follow Up
	3. Penetapan keputusan penyesuaian gaji/honorarium dan tunjangan/ fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023 serta pembayaran tantiem berdasarkan kinerja tahun 2022 akan ditetapkan secara terpisah melalui keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara sirkuler.	3. Determination of the adjustment of the salary/honorarium and benefits/facilities of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 Fiscal Year, as well as the payment of tantiem based on the 2022 performance, which would be determined separately through a Shareholder Resolution to be carried out circularly.	Pemegang Saham **telah menetapkan** penyesuaian gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023 serta pembayaran tantiem berdasarkan kinerja tahun 2022 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 juncto Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor KMK-174/KM.6/2023 tentang Persetujuan Pembayaran Tantiem Tahun Buku 2022 dan Penetapan Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris, Tunjangan, dan Fasilitas yang Diberikan Kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023. The Shareholders **have determined** the adjustment of the salary/honorarium and allowances/facilities of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2022 Fiscal Year, as well as the payment of tantiem based on the 2022 performance via the General Meeting of Shareholders of the Annual Report for the 2022 Fiscal Year, in conjunction with the Resolution of the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia No. KMK-174/ KM.6/2023 on the Approval to Pay Tantiem for the 2023 Fiscal Year and Determination of the Board of Directors' Salary, Board of Commissioners' Honorarium, Allowances, and Facilities Provided to the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 Fiscal Year.
RUPS Tahunan Persetujuan RKAP Tahun 2024 Annual GMS for 2024 WP&B Approval	Menyetujui dan mengesahkan: 1. Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan Tahun 2024; 2. Persetujuan atas Kontrak Kinerja Manajemen Perseroan Tahun 2024; dan 3. Persetujuan atas Kontrak Kinerja Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2024.	Approving and ratifying: 1. Approval of the Company's 2024 Work Program and Budget; 2. Approval of the Company's Management Performance Contract in 2024; and 3. Approval of the Company's Board of Commissioners' Performance Contract in 2024.	RKAP 2024, Kontrak Kinerja Manajemen Perseroan 2024 dan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris 2024 **telah disahkan** oleh Pemegang Saham pada saat RUPS berlangsung tanggal 20 Desember 2023. The 2024 WP&B, the 2024 Management Performance Contract, and the 2024 Board of Commissioners' Performance Contract were **ratified** by the Shareholders during the GMS on 20 December 2023.

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Direksi adalah organ Perseroan yang menjalankan tugas dan tanggung jawab secara kolegial terkait kepengurusan Perseroan. Bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Perseroan, Direksi bertanggung jawab penuh untuk mengelola Perseroan atas kepentingan Perseroan merealisasikan visi dan misi. Direksi juga memiliki peran vital dalam memastikan keberlangsungan aktivitas bisnis serta operasional Perseroan, memastikan kinerja optimal dan nilai tambah optimal bagi Pemegang Saham. Selain menjalankan tugas secara kolegial, anggota Direksi juga dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan departemen yang dipimpinnya.

The Board of Directors is a Company's organ that carries out duties and responsibilities collectively related to the Company's management. Acting for representing on behalf of the Company, the Board of Directors is fully responsible for managing the Company in the best interest of the Company and for realizing its vision and mission. The Board of Directors also has a vital role in ensuring the sustainability of the Company's business activities and operations, achieving optimal performance, and delivering optimal added value for Shareholders. In addition to carrying out their duties collectively, members of the Board of Directors can also carry out tasks and make decisions in accordance with the departments or function under their leadership.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI
APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sebagai Badan Usaha Milik Negara di bawah Kementerian Keuangan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan, dan perubahannya melalui:

a. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 59/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;

b. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 135/PMK.06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;

Seluruh Direksi Perseroan merupakan individu profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

As a State-Owned Enterprise under the Ministry of Finance, the appointment and dismissal of members of the Board of Directors refer to the Company's Articles of Association and Regulation of the Minister of Finance No. 78/PMK.06/2015 on the Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of a Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance, and its amendments:

a. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 59/PMK.06/2016 on the Amendment to the Regulation of the Minister of Finance No. 78/PMK.06/2015 on the Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of a Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance;
b. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 135/PMK.06/2017 on the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Finance No. 78/PMK.06/2015 on the Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of a Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance;

All Company's Directors are professional individuals who have fulfilled the requirements to be appointed as members of the Company's Board of Directors in accordance with the provisions as mentioned above.

MASA JABATAN DIREKSI
TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan ketentuan bahwa RUPS dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, the term of office of the Board of Directors' members is five (5) years, and the member may be reappointed for one (1) term of office, provided that the GMS may dismiss them at any time.

KOMPOSISI DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' COMPOSITION

Pada tahun 2024, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi. Berikut Komposisi Direksi PT PII per 31 Desember 2024:

In 2024, there was no change in the Board of Directors' composition. The following is the composition of IIGF's Board of Directors as of 31 December 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Masa Jabatan Tenure
M. Wahid Sutopo	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 340/KMK.06/2022 Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 340/KMK.06/2022	4 Desember 2022 s.d. 3 Desember 2027 4 December 2022 to 3 December 2027
Andre Permana	Direktur Bisnis Business Director	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 127/KMK.06/2020 Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 127/KMK.06/2020	23 Maret 2020 s.d. 22 Maret 2025 23 March 2020 to 22 March 2025
Donny Hamdani	Direktur Keuangan Finance Director	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 14/KMK.06/2022 Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 14/KMK.06/2022	17 Januari 2022 s.d. 16 Januari 2027 17 January 2022 to 16 January 2027

Penetapan komposisi dan jumlah anggota Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, sehingga diharapkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat, cepat, dan menjunjung tinggi independensi semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

The determination of the composition and number of members of the Board of Directors is adjusted to the Company's needs, and such decision making shall be carried out effectively, precisely, quickly, and uphold independence solely for the Company's benefit.

INDEPENDENSI DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' INDEPENDENCE

Perseroan menganggap independensi Direksi sebagai satu hal penting yang harus dijaga agar setiap anggota Direksi dapat bertindak secara optimal demi kepentingan Perseroan. Untuk mencapai hal tersebut, Perseroan telah menetapkan ketentuan bahwa selain Direksi, pihak lain dilarang melakukan intervensi atau campur tangan dalam kepengurusan Perseroan. Setiap

The Company considers the Board of Directors' independence as a vital matter to be maintained so that each member of the Board of Directors can act optimally for the Company's interest. Therefore, the Company has stipulated that other than the Board of Directors, other parties are prohibited from intervening or interfering in the Company's management.

anggota Direksi diharapkan mampu membuat keputusan secara objektif, bebas dari benturan kepentingan, dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Selain itu, setiap anggota Direksi juga dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensi mereka dalam mengurus Perseroan.

Seluruh anggota Direksi yang menjabat di tahun 2024 telah menyatakan independensinya dalam Pakta Integritas yang ditandatangani pada awal pengangkatan dan diperbaharui setiap awal tahun.

Each member of the Board of Directors shall be able to make decisions objectively, free from conflicts of interest, and not influenced by external pressures. In addition, each member of the Board of Directors is prohibited from engaging in activities that may interfere with their independence in the Company's management.

All members of the Board of Directors who served in 2024 have declared their independence in the Integrity Pact signed at the beginning of their appointment and renewed at the beginning of each year.

Direktur Utama
President Director

Direktur Bisnis
Business Director

Direktur Keuangan
Finance Director

KEBIJAKAN TATA LAKSANA KERJA DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' WORKING PROCEDURE (BOARD MANUAL)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi merujuk pada Kebijakan Tata Laksana Kerja Bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

Pokok-pokok yang diatur dalam *Board Manual* terkait Direksi antara lain adalah:

1. Ketentuan Umum
2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi
3. Rapat dan Pengambilan Keputusan Direksi
4. Benturan kepentingan
5. Kekosongan jabatan dan pelimpahan wewenang
6. Pemberhentian sementara dan pengunduran diri Direksi
7. Organ Pendukung Direksi
8. Pelaporan
9. Penilaian Kinerja Direksi
10. Perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS
11. Program Pengenalan Perusahaan
12. Program Pelatihan Direksi
13. Perjalanan Dinas Luar Negeri
14. Tata Komunikasi dan Korespondensi antara Direksi dan Dewan Komisaris
15. Penetapan Penghasilan Direksi

Board Manual Perseroan lebih lengkapnya dapat dilihat atau diunduh pada *website* Perseroan https://ptpii.co.id/manual-kebijakan-perusahaan

The Board of Directors refers to the Board Manual for the Board of Commissioners and Board of Directors in carrying out its duties and responsibilities.

The main points regulated in the Board Manual in terms of Board of Directors are, among others:

1. General Provisions
2. Duties, Authorities and Obligations of the Board of Directors
3. Meetings and Decision Making of the Board of Directors
4. Conflict of interest
5. Vacancy and delegation of authority
6. Temporary suspension and resignation of the Board of Directors
7. Direct Report to the Directors
8. Reporting
9. Board of Directors' Performance Assessment
10. Actions of the Board of Directors Requiring Approval of the Board of Commissioners or the GMS
11. Company Induction Program
12. Board of Directors' Training Program
13. International Business Trip
14. Communication and Correspondence between the Board of Directors and the Board of Commissioners
15. Determination of the Board of Directors' Income

The Company's Board Manual can be viewed or downloaded on the Company's website https://ptpii.co.id/manual-kebijakan-perusahaan

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI
DUTIES, AUTHORITIES AND OBLIGATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Terkait pengelolaan dan pengurusan Perseroan, maka sesuai Anggaran Dasar, Direksi mengemban tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau pembatasan-pembatasan atau arahan-arahan lebih lanjut yang disepakati oleh Pemegang Saham berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

In the Company's management and administration, in accordance with the Articles of Association, the Board of Directors has the following duties, responsibilities, and authorities:

1. The Board of Directors is responsible for performing all actions related to the Company's management for the Company's benefit, in accordance with the vision and objectives of the Company, as well as representing the Company both inside and outside the court of all matters and all events, with limitations as set forth in the prevailing regulations, the Articles of Association and/or restrictions or further directions agreed by the Shareholders by the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

2. Direksi berwenang untuk:
   a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
   b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
   c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
   d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham;
   e. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan;
   g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
3. Direksi berkewajiban untuk:
   a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
   b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, dan perubahannya serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
   c. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;

2. The Board of Directors has the authorities to:
   a. Establish the Company's management policy;
   b. Regulate the transfer of power of the Board of Directors to one or more members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or represent the Company in and out of court;
   c. Arrange the transfer of power of the Board of Directors to one or several Company's employees, either individually or jointly, or to other persons, to represent the Company in and out of court;
   d. Regulate the provisions of the Company's employment, including the determination of salaries, pensions, and other income for the Company's employees based on the prevailing laws and regulations, provided that the determination of salaries, pensions, and other income for employees who exceed the obligations stipulated by laws and regulations, shall obtain prior approval from the General Meeting of Shareholders;
   e. Appoint and dismiss the Company's employees based on the Company's employment regulations and prevailing laws and regulations;
   f. Appoint and dismiss the Corporate Secretary;
   g. Take all actions necessary with regards to the Company's management and assets, bind the Company with other parties and/or other parties with the Company, and represent the Company inside and outside the Court on all matters and in all situations, with limitations as stipulated in laws and regulations, the Articles of Association, and/or Resolution of the General Meeting of Shareholders
3. The Board of Directors has the responsibilities for:
   a. Ensuring and guaranteeing the Company's business and activities in accordance with its goals, objectives, and business activities;
   b. Preparing in due time the Company's Long Term Plan, the Company's Work Program and Budget, and any amendments thereto and submit them to the Board of Commissioners and Shareholders for ratification by the General Meeting of Shareholders;
   c. Providing an explanation to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long Term Plan and the Company's Work Program and Budget;

d. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi;
e. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
f. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
g. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang;
h. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan;
i. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
k. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf butir d dan e dan dokumen Perseroan lainnya;
l. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;
m. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
n. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

d. Preparing the List of Shareholders, Special Register, Minutes of the General Meeting of Shareholders, and Minutes of the Board of Directors' Meeting;
e. Preparing the Annual Report as a form of accountability for the Company's management and the Company's financial documents, as referred to in the Law concerning Company's Documents;
f. Preparing Financial Statements based on Financial Accounting Standards and submitting them to a Public Accountant for audit;
g. Submitting the Annual Report including the Financial Statements to the General Meeting of Shareholders for approval and ratification, as well as a report on the Company's rights that are not recorded in the books, among others, as a result of the write-off of receivables;
h. Explaining the Annual Report to the General Meeting of Shareholders;
i. Submitting the Balance Sheet and Income Statement that have been approved by the General Meeting of Shareholders to the Minister in charge of Law and Human Rights in accordance with the provisions of laws and regulations;
j. Submitting reports on changes in the composition of Shareholders, Board of Directors, and Board of Commissioners, to the Minister in charge of Law and Human Rights;
k. Maintaining the List of Shareholders, Special Register, Minutes of the General Meeting of Shareholders, Minutes of the Meeting of the Board of Commissioners, and Minutes of the Meeting of the Board of Directors, Annual Report, and the Company's financial documents, as referred to in points d and e, and other Company's documents;
l. Keeping documents at the Company's registered office: List of Shareholders, Special Register, Minutes of the General Meeting of Shareholders, Minutes of the Meeting of the Board of Commissioners, and Minutes of the Meeting of the Board of Directors, Annual Report, and the Company's financial documents, and other Company's documents;
m. Preparing an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and pursuant to the internal control principles, especially the functions of management, recording, safekeeping, and supervision;
n. Providing regular reports in a timely manner with regards to the applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or Shareholders

o. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
p. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
q. Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) organisasi Perseroan;
r. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
6. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
   a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
   d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
8. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang telah diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.

o. Preparing the Company's organizational structure complete with details and duties;
p. Explaining all matters asked or requested by members of the Board of Commissioners and Shareholders;
q. Preparing and determining the Company's Work Program and Budget (WP&B) for the Company's organization;
r. Conducting other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and those stipulated by the General Meeting of Shareholders based on laws and regulations.

4. In carrying out its duties, the Board of Directors shall devote full energy, thought, attention, and is dedicated to the duties, obligations, and achievement of the Company's objectives.
5. The Board of Directors shall comply with the Company's Articles of Association and prevailing regulations, and must implement professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness in carrying out its duties.
6. Each member of the Board of Directors shall carry out his duties in good faith and with full responsibility for the Company's interests and business, taking into account prevailing laws and regulations.
7. Each member of the Board of Directors is fully responsible personally if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties for the interests and business of the Company unless the concerned member of the Board of Directors can prove that:
   a. The loss did not result from the concerned's error or negligence;
   b. The Director has conducted management activities in good faith and with prudence that are consistent with the Company's goals and objectives;
   c. The Director has no conflict of interest, be it directly or indirectly on the management action that resulted in such loss; and
   d. The Director has taken necessary actions to prevent such loss from arising or continuing.
8. The actions taken by members of the Board of Directors without the approval of the Board of Directors' Meeting shall be the personal responsibility of such Director until the said action is approved by the Board of Directors' Meeting.

PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

SEGREGATION OF DUTIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sejalan dengan *Board Manual*, salah satu kewajiban Direksi adalah jika dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi, oleh karena itu melalui Surat Keputusan Direksi No. 006/SK/PII-BOD/0522 tentang Pembagian Tugas dan Kewenangan Direksi Perseroan, Direksi PT PII menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Direksi sebagai berikut:

In line with the Board Manual, one of the obligations of the Board of Directors is that if in the event that the GMS does not determine the segregation of duties and authorities, the segregation of duties and authorities among the Board of Directors is determined based on the Board of Directors' Decree. Therefore, the Board of Directors' Decree No. 006/SK/PII-BOD/0522 on the Segregation of Duties and Authorities of the Company's Board of Directors, IIGF's Board of Directors determines the segregation of duties of each member of the Board of Directors as follows:

Jabatan Position	Tugas Direksi Board of Directors' Duties	
Direktur Utama President Director	1. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama yang dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi atau ketentuan yang berlaku lainnya 2. Pengurusan/pengelolaan Perseroan oleh anggota Direksi lainnya sesuai tugas pokok Perseroan dan/atau penugasan lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Perseroan 3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Direktur Bisnis dan Direktur Keuangan. 4. Memimpin dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang terkait dengan fungsi pengawasan intern, sekretariat perusahaan, manajemen risiko, hukum dan kepatuhan serta inisiasi bisnis dan fungsi lainnya yang ada pada garis komando Direktur Utama sesuai dengan SK Direksi tentang Struktur Organisasi 5. Memberikan bahan masukan, pertimbangan atau saran-saran dalam menentukan strategi, kebijakan Perseroan dan/atau pengambilan keputusan Direksi	1. President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company provided that all actions of the President Director have been approved by the Board of Directors' Meeting or other applicable provisions 2. The Company's management by other members of the Board of Directors in accordance with the Company's main duties and/or other assignments in accordance with the policies set by the General Meeting of Shareholders and/or the Company's Articles of Association. 3. Supervising the duties of the Business Director and Finance Director. 4. Leading and supervising duties related to the functions of internal control, corporate secretariat, risk management, law, and compliance, as well as business initiation and other functions in the line of command of the President Director, in accordance with the Board of Directors' Decree on Organizational Structure. 5. Providing input, considerations, or suggestions in determining strategy, Company's policy, and/or Board of Directors' decision making.
Direktur Keuangan Finance Director	1. Mewakili Perseroan untuk kegiatan terkait fungsi yang ada pada garis komando Direktur Keuangan sesuai dengan SK Direksi tentang Struktur Organisasi atau berdasarkan keputusan Rapat Direksi atau ketentuan yang berlaku lainnya 2. Memimpin dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang terkait dengan fungsi keuangan dan perbendaharaan, investasi, sumber daya manusia, pengembangan organisasi, layanan perusahaan, pengadaan, teknologi informasi, penjaminan non-KPBU dan pemantauan proyek dan fungsi lainnya yang ada pada garis komando Direktur Keuangan sesuai dengan SK Direksi tentang Struktur Organisasi 3. Memberikan bahan masukan, pertimbangan atau saran-saran dalam menentukan strategi, kebijakan Perseroan dan/atau pengambilan keputusan Direksi	1. Representing the Company for activities related to functions in the line of command of the Finance Director, in accordance with the Board of Directors' Decree on Organizational Structure, or based on the Board of Directors' Meeting or other prevailing provisions 2. Leading and supervising the tasks related to the functions of finance and treasury, investment, human resources, organizational development, corporate services, procurement, information technology, non-PPP guarantee, and project monitoring, and other functions in the line of command of the Finance Director in accordance with the Board of Directors' Decree on Organizational Structure. 3. Providing input, considerations, or suggestions in determining strategy, Company's policy, and/or Board of Directors' decision making.

Jabatan Position	Tugas Direksi Board of Directors' Duties	
Direktur Bisnis Business Director	1. Mewakili Perseroan untuk kegiatan terkait fungsi yang ada pada garis komando Direktur Bisnis sesuai dengan SK Direksi tentang Struktur Organisasi atau berdasarkan keputusan Rapat Direksi atau ketentuan yang berlaku lainnya. 2. Memimpin dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang terkait dengan fungsi bimbingan dan konsultasi bisnis, penilaian proyek (baik teknis, finansial, maupun lingkungan dan sosial), penjaminan KPBU dan edukasi pemangku kepentingan serta pengembangan ekosistem bisnis dan fungsi lainnya yang ada pada garis komando Direktur Bisnis sesuai dengan SK Direksi tentang Struktur Organisasi. 3. Memberikan bahan masukan, pertimbangan atau saran-saran dalam menentukan strategi, kebijakan Perseroan dan/atau pengambilan keputusan Direksi.	1. Representing the Company for activities related to functions in the line of command of the Business Director, in accordance with the Board of Directors' Decree on Organizational Structure, or based on the Board of Directors' Meeting or other prevailing provisions. 2. Lead and supervise the tasks related to the functions of business guidance and consultation, project appraisal (technical, financial, and environmental and social), PPP guarantee and stakeholder education, as well as business ecosystem development and other functions in the line of command of the Business Director in accordance with the Board of Directors' Decree on Organizational Structure. 3. Providing input, considerations, or suggestions in determining strategy, Company's policy, and/or Board of Directors' decision making.

BENTURAN KEPENTINGAN DAN RANGKAP JABATAN

CONFLICT OF INTEREST AND CONCURRENT POSITIONS

Selaras dengan *Board Manual*, para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan Perseroan yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau
6. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

In line with the Board Manual, members of the Board of Directors are prohibited from taking actions that have a conflict of interest, and taking personal benefits, either directly or indirectly from the Company's decision-making and activities other than their legal income.

Members of the Board of Directors are prohibited from serving in a concurrent position as:

1. A member of the Board of Directors at State-Owned Enterprises (SOEs), Regional-Owned Enterprises, Private Owned Enterprises;
2. A member of the Board of Commissioners/Supervisory Board of a State-Owned Enterprise;
3. Other structural and functional positions in institutions/agencies of the central and/or local government;
4. Other positions in accordance with the provisions in the legislation;
5. Political party administrator and/or legislative candidates/members and/or candidates for Regional Head/Deputy Regional Head and/or Regional Head/Deputy Regional Head; and/or
6. Positions which may result in a conflict of interest.

Dalam rangka mencegah terjadinya benturan kepentingan di Perseroan, anggota Direksi diminta untuk menandatangani Pakta Integritas pada awal masa pengangkatan dan diperbaharui setiap awal tahun, yang memuat pernyataan bahwa Direksi tidak memiliki benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya.

Selama tahun 2024, seluruh anggota Direksi tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Perseroan serta tidak memiliki rangkap jabatan yang dilarang. Direksi Perseroan memiliki komitmen untuk menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun.

To prevent conflicts of interest in the Company, members of the Board of Directors shall sign an Integrity Pact at the beginning of the appointment period and renewed at the beginning of each year, which contains a statement that the Board of Directors has no conflict of interest in the performance of its duties.

In 2024, all members of the Board of Directors had no conflicts of interest or potential conflicts of interest against the Company and had no prohibited concurrent positions. The Company's Board of Directors is committed to avoiding potential conflicts of interest at all times.

RAPAT DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' MEETING

Rapat Direksi dilaksanakan sebagai sarana pengambilan keputusan dan/atau pembahasan dan diskusi mengenai hal-hal terkait kepengurusan Perseroan. Rapat Direksi dilaksanakan secara berkala, paling kurang satu kali dalam satu bulan. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:

1. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
2. Diminta secara tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
3. Diminta secara tertulis oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

Dalam Rapat Direksi, Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris.

Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling berkomunikasi serta berpartisipasi dalam rapat.

Board of Directors' meetings are held to make decision and/or discuss matters related to the Company's management. The Board of Directors' Meeting is held periodically, at least once a month. The Board of Directors' Meeting may be held at any time if:

1. Deemed necessary by one or more members of the Board of Directors;
2. There is a written request of one or more members of the Board of Commissioners; or
3. There is a written request of one (1) or more shareholders jointly representing 1/10 (one-tenth) or more of the total number of shares with voting rights;

In the Meeting of the Board of Directors, the Board of Directors may invite the Board of Commissioners.

Meetings of the Board of Directors may also be conducted through teleconference, video conference, or other electronic media facilities that allow all participants to communicate directly and participate in the meeting.

PELAKSANAAN FREKUENSI RAPAT DIREKSI TAHUN 2024
FREQUENCY OF BOARD OF DIRECTORS' MEETING IN 2024

Selama tahun 2024, Direksi melaksanakan rapat sebanyak 73 kali rapat yang terdiri dari rapat internal Direksi sebanyak 57 kali rapat dan rapat gabungan bersama Dewan Komisaris sebanyak 16 kali rapat.

In 2024, the Board of Directors held 73 meetings, consisting of 57 internal meetings of the Board of Directors and 16 joint meetings with the Board of Commissioners.

Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Internal dan Gabungan Direksi Tahun 2024
Attendance of the Board of Directors in Internal and Joint Meetings of the Board of Directors in 2024

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Direksi dalam Rapat Internal Direksi Board of Directors' Attendance in Internal Meeting			Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan (Direksi dan Dewan Komisaris) Board of Directors' Attendance in Joint Meeting (Board of Directors and Board of Commissioners)		
		Jumlah Rapat Meetings	Jumlah Kehadiran Atten-dance	Tingkat Kehadiran Atten-dance	Jumlah Rapat Meetings	Jumlah Kehadiran Atten-dance	Tingkat Kehadiran Atten-dance
M. Wahid Sutopo	Direktur Utama President Director	57	55	96%	16	16	100%
Andre Permana	Direktur Bisnis Business Director	57	57	100%	16	16	100%
Donny Hamdani	Direktur Keuangan Finance Director	57	57	100%	16	16	100%
Rata-Rata Tingkat Kehadiran Direksi Board of Directors' Average Attendance			98,66%				100%

Frekuensi dan tingkat kehadiran Direksi dalam rapat internal maupun rapat gabungan bersama Dewan Komisaris telah sesuai dengan kebijakan rapat yang diatur dalam *Board Manual*.
The frequency and attendance of the Board of Directors in internal meetings and joint meetings with the Board of Commissioners were in accordance with the meeting policy stipulated in the Board Manual.

Tingkat Kehadiran Direksi dalam RUPS Tahun 2024
Attendance of the Board of Directors in 2024 GMS

No.	Tanggal Date	Agenda	Realisasi Realization		
			M. Wahid Sutopo	Andre Permana	Donny Hamdani
1.	21 Mei 2024 21 May 2024	RUPS Tahunan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 Annual GMS Annual Report for the 2023 Fiscal Year	✔	✔	✔
2.	16 Desember 2024 16 December 2024	RUPS Tahunan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 Annual GMS 2025 Work Program and Budget (WP&B)	✔	✔	✔

Agenda Rapat Internal Direksi Tahun 2024

Agenda of the Board of Directors' Internal Meetings in 2024

No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat Meeting Date	Agenda	
1.	05 Januari 2024 5 January 2024	Hasil Evaluasi dan Penetapan Besaran Klaim Penjaminan Proyek	Results of Evaluation and Determination of the Project Guarantee Claim Amount
2.	15 Januari 2024 January 15, 2024	Pembahasan Laporan Manajemen Periode Desember 2023	Discussion on the Management Report in December 2023
3.	17 Januari 2024 17 January 2024	- Penetapan Tanggal Pembayaran Klaim Penjaminan Proyek - Hasil Evaluasi Klaim Proyek	- Determination of Payment Date for Project Guarantee Claims - Project Claim Evaluation Result
4.	18 Januari 2024 18 January 2024	Update Proses Penjaminan Final Term Sheet P3 dan GA serta Persiapan Signing Proyek	Update on P3 and GA Term Sheet Final Assurance Process and Project Signing Preparation
5.	07 Februari 2024 7 February 2024	Pembahasan Penetapan Besaran Klaim Penjaminan Proyek	Discussion of Project Guarantee Amount Determination
6.	19 Februari 2024 19 February 2024	Pembahasan Laporan Manajemen periode Januari 2024	Discussion on the Management Report in January 2024
7.	27 Februari 2024 27 February 2024	Pembahasan Penyampaian: 1. Hasil Evaluasi Klaim Penjaminan Proyek 2. Usulan Tanggal Pembayaran Klaim Penjaminan Proyek	Result of Discussion: 1. Project Guarantee Claim Evaluation 2. Proposed Date of Project Guarantee Claim Payment
8.	27 Februari 2024 27 February 2024	Pembahasan Penyampaian Usulan Tanggal Pembayaran Klaim Proyek	Discussion on Submission of Proposed Date of Project Guarantee Claim Payment
9.	08 Maret 2024 8 March 2024	Pembahasan Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek	Discussion on the Signing of Project Guarantee Agreement and Recourse Agreement
10.	15 Maret 2024 15 March 2024	Pembahasan Penyampaian Usulan Tanggal Pembayaran Klaim Penjaminan Proyek	Discussion on Submission of Proposed Date of Project Guarantee Claim Payment
11.	20 Maret 2024 20 March 2024	Pembahasan Laporan Manajemen Periode Februari 2024	Discussion on the Management Report in February 2024
12.	01 April 2024 1 April 2024	1. Penyampaian Usulan Tanggal Pembayaran Klaim Penjaminan Proyek 2. Penetapan Besaran Klaim Penjaminan Proyek	1. Submission of Proposed Date of Project Guarantee Claim Payment 2. Project Guarantee Amount Determination
13.	19 April 2024 19 April 2024	Pembahasan Laporan Manajemen periode Maret 2024	Discussion on the Management Report in March 2024
14.	25 April 2024 25 April 2024	Hasil Evaluasi Klaim Penjaminan Proyek	Project Guarantee Claim Evaluation
15.	06 Mei 2024 6 May 2024	Pembahasan Penyampaian Hasil Evaluasi Rencana Amandemen III PKS dan Perluasan Cakupan Penjaminan Proyek	Discussion on the Submission of Evaluation Results of the Third Amendment Plan of Cooperation Agreement and Expansion of Project Guarantee Coverage
16.	08 Mei 2024 8 May 2024	Usulan Tanggal Pembayaran Klaim Penjaminan Proyek	Proposed Date of Project Guarantee Claim Payment
17.	08 Mei 2024 8 May 2024	Pembahasan *Update* Penyampaian Hasil Evaluasi Rencana Amandemen dan Perluasan Cakupan Penjaminan	Discussion on the Update of Evaluation Results of the Amendment Plan and Expansion of Guarantee Coverage
18.	14 Mei 2024 14 May 2024	Pembahasan *Update* Rencana Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek	Discussion on the Plan Update of Signing of Project Guarantee Agreement and Recourse Agreement

No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat Meeting Date	Agenda	
19.	16 Mei 2024 16 May 2024	*Update* dan Evaluasi Permohonan Persetujuan Atas Rencana Amandemen III PKS dan Perluasan Cakupan Penjaminan Proyek	Update and Evaluation of the Approval for the Third Amendment Plan of Cooperation Agreement and Expansion of Project Guarantee Coverage
20.	16 Mei 2024 16 May 2024	Penyampaian Usulan Tanggal Pembayaran Klaim Penjaminan Proyek	Submission of Proposed Date of Project Guarantee Claim Payment
21.	16 Mei 2024 16 May 2024	Update Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman BUMN	Update on the signing of the Guarantee Implementation Agreement related to SOE Loan Agreement
22.	27 Mei 2024 27 May 2024	Pembahasan Laporan Manajemen periode April 2024	Discussion on the Management Report in April 2024
23.	28 Mei 2024 28 May 2024	Pembahasan Hasil Evaluasi Klaim Penjaminan Proyek	Discussion of Project Guarantee Claim Evaluation
24.	11 Juni 2024 11 June 2024	Pembahasan Penyampaian Hasil PAR dan Hasil *Structuring* Awal Penjaminan Proyek	Discussion on the Submission of PAR Results and Preliminary Structuring Results of Project Guarantee
25.	19 Juni 2024 19 June 2024	Pembahasan Laporan Manajemen periode Mei 2024	Discussion on the Management Report in May 2024
26.	23 Juni 2024 23 June 2024	Signing Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek KPBU	Signing of PPP Project Guarantee Agreement and Recourse Agreement
27.	24 Juni 2024 24 June 2024	*Update Signing* Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek	Update on the Signing of Project Guarantee Agreement and Recourse Agreement
28.	25 Juni 2024 25 June 2024	*Signing Joint Commitment* Proyek KPBU	Signing Joint Commitment of PPP Project
29.	01 Juli 2024 1 July 2024	Rencana Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek	Planning of the Signing of Project Guarantee Agreement and Recourse Agreement
30.	15 Juli 2024 15 July 2024	Pembahasan Laporan Manajemen periode Juni 2024	Discussion on the Management Report in June 2024
31.	18 Juli 2024 18 July 2024	Pembahasan Penyampaian IPA Penjaminan Proyek	Discussion of Project Guarantee IPA Reporting
32.	30 Juli 2024 30 July 2024	Penyampaian Hasil Evaluasi Klaim Penjaminan Proyek	Submission of Project Guarantee Claim Evaluation
33.	05 Agustus 2024 5 August 2024	Pembahasan Update Proses Restrukturisasi dan Perkiraan Perhitungan Terminasi Proyek	Discussion on Restructuring Process Update and Estimated Project Termination Calculation
34.	07 Agustus 2024 7 August 2024	Pembahasan Hasil Evaluasi Klaim Penjaminan Proyek	Discussion of Project Guarantee Claim Evaluation
35.	12 Agustus 2024 12 August 2024	Pembahasan Analisa Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban PJPK dalam Perjanjian Penjaminan Proyek	Analysis of Completion of GCA's Obligation Fulfilment in Project Guarantee Agreement
36.	15 Agustus 2024 15 August 2024	Pembahasan Laporan Manajemen periode Juli 2024	Discussion on the Management Report in July 2024
37.	16 Agustus 2024 16 August 2024	Pembahasan Pembayaran Klaim Penjaminan Proyek KPBU	Discussion of PPP Project Guarantee Claim Payment
38.	27 Agustus 2024 27 August 2024	Lanjutan Pembahasan Pembayaran Klaim Penjaminan Proyek	Continued Discussion of Project Guarantee Claim Payment

No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat Meeting Date	Agenda	
39.	02 September 2024 2 September 2024	Pembahasan Pembayaran Klaim Penjaminan Proyek	Discussion of Project Guarantee Claim Payment
40.	17 September 2024 17 September 2024	Pembahasan Laporan Manajemen periode Agustus 2024	Discussion on the Management Report in August 2024
41.	23 September 2024 23 September 2024	Pemberian Masukan atas Evaluasi Perpanjangan Penjaminan Fasilitas Kredit Modal Kerja Penjaminan	Providing Input on the Evaluation of the Guarantee Extension of Working Capital Credit Facility Guarantee
42.	26 September 2024 26 September 2024	Persetujuan Amendemen Perjanjian Penjaminan PT PII dan Perjanjian Penjaminan Pemerintah	Approval of Amendments to the IIGF Guarantee Agreement and Sovereign Guarantee Agreement
43.	15 Oktober 2024 15 October 2024	Pembahasan Laporan Manajemen Periode September 2024	Discussion on the Management Report in September 2024
44.	18 Oktober 2024 18 October 2024	Evaluasi Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman Langsung (*Direct Lending*) BUMN	Evaluation of Sovereign Guarantee on SOEs Direct Lending
45.	18 Oktober 2024 18 October 2024	Lanjutan Pembahasan Laporan Manajemen Periode September 2024	Follow-up Discussion on the Management Report in September 2024
46.	12 November 2024 12 November 2024	Pembahasan *Root Cause Analysis* dan Restrukturisasi Proyek	Discussion on Root Cause Analysis and Project Restructuring
47.	13 November 2024 13 November 2024	Penyampaian Hasil Evaluasi Klaim Proyek	Submission of Project Claim Evaluation
48.	13 November 2024 13 November 2024	Pembahasan Penjaminan Pinjaman BUMN	Discussion on SOE Loan Guarantee
49.	25 November 2024 25 November 2024	Pembahasan Laporan Manajemen Periode Oktober 2024	Discussion on the Management Report in October 2024
50.	02 Desember 2024 December 2, 2024	Pembahasan Penyampaian Usulan Tanggal Pembayaran Klaim Penjaminan Proyek	Discussion on Submission of Proposed Date of Project Guarantee Claim Payment
51.	13 Desember 2024 2 December 2024	Pembahasan Update Kondisi dan Hasil Evaluasi Penjaminan Proyek	Update on the Condition and Results of Project Assurance Evaluation
52.	13 Desember 2024 13 December 2024	Pembahasan Permohonan Persetujuan Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek	Discussion on the Request for Approval to Sign Project Guarantee Agreement and Recourse Agreement
53.	18 Desember 2024 18 December 2024	Penyampaian Usulan Masukan untuk Evaluasi Bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia Terkait Perpanjangan Jangka Waktu Penjaminan Fasilitas	Submission of Proposed Input for Joint Evaluation with the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia on the Extension of the Guarantee Facility Period
54.	18 Desember 2024 18 December 2024	Pembahasan Lanjutan Penetapan Besaran Klaim Penjaminan	Follow-up Discussion of Guarantee Amount Determination
55.	18 Desember 2024 18 December 2024	Pembahasan Lanjutan Permohonan Persetujuan Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek	Follow-up Discussion on the Request for Approval to Sign Project Guarantee Agreement and Recourse Agreement
56.	19 Desember 2024 19 December 2024	Pembahasan Perpanjangan Jangka Waktu *Joint Commitment Proyek*	Discussion on the Extension of the Joint Project Commitment Period
57.	19 Desember 2024 19 December 2024	Pembahasan Laporan Manajemen periode November 2024	Discussion on the Management Report in November 2024

AGENDA RAPAT GABUNGAN DIREKSI BERSAMA DEWAN KOMISARIS
AGENDA OF THE JOINT MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS WITH THE BOARD OF COMMISSIONERS

Informasi agenda rapat gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris dijelaskan pada sub bab Dewan Komisaris (agenda Rapat) dalam Bab Tata Kelola Perusahaan di dalam Laporan Tahunan ini.

Information on the agenda of the joint meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners can be referred to in the Board of Commissioners sub-chapter (Meeting agenda) in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

PENYAMPAIAN UNDANGAN RAPAT DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' MEETING INVITATION

Sepanjang tahun 2024, penyampaian undangan Rapat Direksi telah sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam Kebijakan Tata Tertib Rapat Direksi yaitu Panggilan Rapat Direksi disampaikan oleh Direktur Utama melalui *e-mail* dari Sekretaris Perusahaan atau bentuk lainnya setelah mendapatkan persetujuan Direktur Utama, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Rapat Direksi atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak apabila seluruh Direksi menyetujui, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Direksi.

In 2024, the invitations to the Board of Directors' Meetings were delivered in accordance with the policy stipulated in the Board of Directors' Meetings Policy and Procedure, i.e., the invitation to the Board of Directors' Meeting is delivered by the President Director via e-mail from the Corporate Secretary or other forms after obtaining the approval of the President Director, no later than three (3) days before the Board of Directors' Meeting or shorter in an urgent situation if all Directors agree, by not taking into account the date of the call and the date of the Board of Directors' Meeting.

RENCANA RAPAT DIREKSI TAHUN 2025
BOARD OF DIRECTORS' MEETING PLAN IN 2025

Sejalan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 Direksi akan melakukan rapat Direksi yang terdiri dari (i) Laporan Manajemen paling tidak sebulan sekali; (ii) Rapat Pembahasan Proyek maupun hal lainnya, *tentative* setiap bulannya; dan (iii) Rapat Penyusunan RKAP atau RUPS tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

In line with the Company's 2025 Work Program and Budget (WP&B), the Board of Directors will conduct Board of Directors' meetings consisting of (i) Management Report at least once a month; (ii) Project Discussion Meeting and other matters, tentatively every month; and (iii) WP&B or AGMS Preparation Meeting in accordance with prevailing regulations.

PELATIHAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' TRAINING

Perseroan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anggota Direksi untuk berpartisipasi dalam program pengembangan kompetensi guna menambah wawasan dan pengetahuan Direksi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam menjalankan kepemimpinan serta menghadapi dinamika pasar dan industri yang terus berkembang.

The Company provides the highest possible opportunity for members of the Board of Directors to participate in competence development programs to broaden the Board of Directors' knowledge and insights in supporting their duties, functions, and responsibilities to exercise leadership in facing the dynamics of the market and industry that keeps growing.

KEBIJAKAN PELATIHAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' TRAINING POLICY

Kebijakan pelatihan Direksi diatur dalam *Board Manual.* Perseroan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anggota Direksi untuk berpartisipasi dalam program pengembangan kompetensi guna menambah wawasan dan pengetahuan Direksi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam menjalankan kepemimpinan serta menghadapi dinamika pasar dan industri yang terus berkembang.

The Board of Directors' training policy is set forth in the Board Manual. The Company provides the highest possible opportunity for members of the Board of Directors to participate in competence development programs to broaden the Board of Directors' knowledge and insights in supporting their duties, functions, and responsibilities to exercise leadership in facing the dynamics of the market and industry that keeps growing.

PELAKSANAAN PELATIHAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' TRAINING

Selama tahun 2024, Direksi telah melaksanakan pelatihan sebagai berikut:

In 2024, the Board of Directors carried out the following training:

Nama Name	Jabatan Position	Program Pelatihan Training Program	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer	Tempat Place
M. Wahid Sutopo	Direktur Utama President Director	*Workshop Strategic Insights for Commissioners & Directors*	30 Mei 2024 30 May 2024	BUMN Track	Jakarta
		Asia Infrastructure Forum	4 – 5 Juli 2024 4-5 July 2024	Infrastructure Asia	Singapura Singapore
		Inhouse Training Enterprise Risk Governance 2024	4 September 2024 4 September 2024	PT PII	Jakarta
		International Monetary Fund (IMF) / The World Bank Group Annual Meeting 2024 and Round Table of the Canadian Institutional Investoron the Indo-Pasific	22 – 30 Oktober 2024 22-30 October 2024	International Monetary Fund (IMF) / The World Bank Group	Canada
Donny Hamdani	Direktur Keuangan Finance Director	*9th Infrastructure Finance Leaders Dialogue*	9 Juli 2024 9 July 2024	The Asset	Singapura
		Leading Change for Organizational Transformation	22-26 Juli 2024 22-26 July 2024	London Business School	London
		Inhouse Training Enterprise Risk Governance 2024	4 September 2024 4 September 2024	PT PII	Jakarta
Andre Permana	Direktur Bisnis Business Director	*Workshop Strategic Insights for Commissioners & Directors*	30 Mei 2024 30 May 2024	BUMN Track	Jakarta
		Asia Infrastructure Forum	4 – 5 Juli 2024 4-5 July 2024	Infrastructure Asia	Singapura
		Inhouse Training Enterprise Risk Governance 2024	4 September 2024 4 September 2024	PT PII	Jakarta
		Smart Street Lighting Capacity Building 2024 & 8th Urban Lighting Workshop	8 – 10 Oktober 2024 8-10 October 2024	Seoul Metropolitan Government & Lighting Urban Community International (LUCI)	Korea Selatan South Korea
		RIMS ERM Conference 2024	15-21 November 2024 15-21 November 2024	The Risk Management Society (RIMS)	Boston, Amerika Serikat Boston, the United States

PROGRAM PENGENALAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' INDUCTION PROGRAM

Kebijakan program pengenalan Direksi diatur dalam *Board Manual*. Program pengenalan Perseroan diberikan kepada Direksi yang diangkat untuk pertama kali. Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai oleh Perseroan. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan Perseroan berada pada Sekretaris Perusahaan.

Materi Program Pengenalan meliputi:
1. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola oleh Perseroan;
2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan; dan/atau
5. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pada tahun 2024 tidak terjadi pergantian atau penambahan Direksi baru, sehingga tidak diselenggarakan program pengenalan bagi Direksi baru.

The Board of Directors' induction program policy is set forth in the Board Manual. The Company's induction program is provided for the newly appointed Directors. The Company's induction program may be in the form of presentations, meetings, visitation to the Company, and documents review, or other programs deemed in line with the Company. The Corporate Secretary is responsible for conducting the Company's induction program.

The Orientation Program covers:
1. The Company's governance principles;
2. Company's overview on objectives, nature, and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short-term and long-term business plan, competitive position, risk, and other strategic issues;
3. Information relating to delegated authorities, internal and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. Information on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as things prohibited; and/ or
5. Laws and regulations related to the Company's business activities.

In 2024, there was no change or addition of new Directors. Thus, there was no induction program for new Directors.

PENILAIAN ATAS KINERJA MASING-MASING KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA
ASSESSMENT OF THE COMMITTEE'S PERFORMANCE REPORTING DIRECTLY TO THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BASIS OF THE ASSESSMENT

Sejak tahun 2018, Direksi telah membentuk Komite dibawah Direksi yaitu Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI) dalam rangka memastikan bahwa rencana strategis teknologi informasi sejalan dengan rencana bisnis Perseroan dan kegiatan terkait TI. Informasi lebih lanjut terkait Komite Pengarah TI dijelaskan dalam Bab Tata Kelola Perusahaan, sub-bab Komite Pengarah Teknologi Informasi dalam laporan tahunan ini.

Since 2018, the Board of Directors has established a Committee under the Board of Directors, i.e., the Information Technology (IT) Steering Committee, to ensure that the information technology strategic plan is in line with the Company's business plan and IT-related activities. Further information regarding the IT Steering Committee can be referred to in the Corporate Governance Chapter, Information Technology Steering Committee sub-chapter in this annual report.

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris bertanggung jawab secara kolektif dan bertindak secara independen dalam melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus atas kebijakan Perseroan, jalannya kepengurusan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan. Sesuai dengan fungsi pengawasan yang diembannya tersebut, Dewan Komisaris juga bertugas memastikan Perseroan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG di segenap aspek bisnisnya serta di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan.

The Board of Commissioners is collectively responsible and acts independently in conducting general and/or special supervision on the Company's policies, the Company's management, and advising the Board of Directors for the Company's interest. In accordance with its supervisory function, the Board of Commissioners also has the responsibility to ensure that the Company has implemented GCG principles in all aspects of its business and at all levels of the Company's organization.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS
APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris PT PII telah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

The appointment and dismissal of IIGF's Board of Commissioners referred to the Minister of Finance Regulation No. 197/PMK.06/2019 on the Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners of a Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance.

Anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk memastikan efektivitas Dewan Komisaris. Kompetensi tersebut meliputi bidang akuntansi, keuangan, kemampuan strategis, pemahaman bisnis, pengalaman dan kedalaman manajerial, pengetahuan industri penjaminan, pemahaman regulasi serta manajemen dan pengendalian risiko.

Members of the Company's Board of Commissioners have the competencies required to ensure the effectiveness of the Board of Commissioners. These competencies include accounting, finance, strategic capabilities, business understanding, managerial experience and depth, knowledge of the guarantee industry, regulatory understanding, and risk management and control.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS
TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.06/2019 dan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

With reference to the Minister of Finance Regulation No. 197/PMK.06/2019 and the Company's Articles of Association, the term of office of members of the Board of Commissioners is set forth for five (5) years, and such personnel may be reappointed for one (1) term of office. The Board of Commissioners' members may be dismissed at any time based on the GMS Resolution by stating the reasons for dismissal.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' COMPOSITION

Pada tahun 2024, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris. Informasi Perubahan Dewan Komisaris selama tahun 2024 dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan, sub bab Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. Berikut Komposisi Dewan Komisaris PT PII per 31 Desember 2024:

In 2024, there was a change to the Board of Commissioners' composition. Information on the changes to the Board of Commissioners in 2024 can be referred to in the Company Profile, Board of Commissioners' Profile Sub-Chapter in this Annual Report. The following is the composition of IIGF's Board of Commissioners as of 31 December 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Masa Jabatan Tenure
Hadiyanto	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 297 Tahun tanggal 17 Juli 2024 The Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 297 dated 17 July 2024	1 Juli 2024 - 30 Juni 2029 1 July 2024 - 30 June 2029
Ferry Irawan	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 339 tanggal 27 Agustus 2024 The Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 339 dated 27 August 2024	27 Agustus 2024 - 26 Agustus 2029 27 August 2024 - 26 August 2029
Ahmad Ghufron	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 342 tanggal 27 Agustus 2024 The Decree of the Minister of Finance (KMK) of the Republic of Indonesia No. 342 dated 27 August 2024	19 Agustus 2024 - 18 Agustus 2029 19 August 2024 - 18 August 2029

Jumlah dan komposisi tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan serta diharapkan dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif, obyektif, dan independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

The number and composition are adjusted to Company's needs so that the supervisory activity can be conducted effectively, objectively, and independently in carrying out the duties and responsibilities.

KOMISARIS INDEPENDEN DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS
INDEPENDENT COMMISSIONERS AND BOARD OF COMMISSIONERS' INDEPENDENCE

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

Based on Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, an Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who is not affiliated with the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners and controlling shareholders, and is free from business or other relationships that may affect his/her ability to act independently or act solely in the Company's interests.

Hingga per tanggal 31 Desember 2024, PT PII belum memiliki Komisaris Independen mengingat seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan dengan Pemegang Saham. Pemegang Saham Perseroan belum mensyaratkan

As of 31 December 2024, IIGF does not have any Independent Commissioner, because all members of the Board of Commissioners have a relationship with the Shareholders. The Company's Shareholders have not required an Independent

adanya Komisaris Independen mengingat keberadaannya belum diperlukan di Perseroan. Namun, Perseroan tetap mengedepankan independensi dan profesionalitas sebagai aspek utama yang harus dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris guna meminimalisir benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan memastikan setiap keputusan diambil seobjektif mungkin tanpa pengaruh dari pihak manapun. Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat situasi yang memiliki potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusannya.

Commissioner considering that its existence is not yet required in the Company. However, the Company prioritizes independence and professionalism as the main aspects inherent to the members of the Board of Commissioners to minimize conflicts of interest in decision making and ensure that every decision is taken as objectively as possible without influence from any party. During 2024, there were no situations that had the potential for conflict of interest faced by members of the Board of Commissioners in making its decisions.

Tabel Status Independensi Dewan Komisaris Tahun 2024
Table: Independence of the Board of Commissioners in 2024

Kriteria Criteria	Status Independensi Independence Status		
	Hadiyanto	Ferry Irawan	Ahmad Ghufron
Bukan Anggota Direksi Perseroan Shall not be a Member of the Company's Board of Directors	✔	✔	✔
Bebas dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan Shall be free from business and other relationships that can influence decision making	✔	✔	✔
Bukan penasihat atau konsultan utama profesional yang material bagi Perseroan, atau pegawai yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris. Shall not be a professional principal advisor or consultant for the Company, or an employee who deal directly with service providers, at least three (3) years before becoming a member of the Board of Commissioners.	✔	✔	✔
Bukan pemasok atau pelanggan utama dari Perseroan atau perusahaan afiliasi atau pegawai dari/atau yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan utama. Shall not be a supplier or main customer of the Company or affiliates or an employee of/or who has direct or indirect contact with the main supplier or customer.	✔	✔	✔

✔ = tidak ada hubungan no relationship

PERNYATAAN TENTANG INDEPENDENSI KOMISARIS
STATEMENT OF INDEPENDENCE OF THE COMMISSIONERS

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris Perseroan menandatangani surat pernyataan independensi yang diperbarui secara berkala. Pernyataan independensi Dewan Komisaris dinyatakan dalam Pakta Integritas Dewan Komisaris yang ditandatangani pada awal pengangkatan dan diperbaharui setiap awal tahun.

In 2024, the Company's Board of Commissioners signed a declaration of independence which is updated regularly. The statement of independence of the Board of Commissioners is in the Integrity Pact of the Board of Commissioners, signed at the beginning of the appointment and renewed at the beginning of each year.

Berikut Pakta Integritas Dewan Komisaris Perseroan tahun 2024.

The following is the Integrity Pact of the Company's Board of Commissioners in 2024.

Hadiyanto **Ferry Irawan** **Ahmad Ghufron**

KEBIJAKAN TATA LAKSANA KERJA DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS' WORKING PROCEDURE (BOARD MANUAL)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam Kebijakan Tata Laksana Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) dan Pedoman Dewan Komisaris yang terakhir diperbaharui pada tahun 2022. *Board Manual* dan Pedoman Dewan Komisaris disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance*.

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners is further regulated in the Board Manual for the Board of Commissioners and Board of Directors (Board Manual) and the Board of Commissioners' Guidelines which were lastly updated in 2022. The Board Manual and the Board of Commissioners' Guidelines were formulated with reference to the corporate law, the provisions of the Articles of Association, the prevailing rules and regulations, the directives of the Shareholders, and the best practices of Good Corporate Governance.

Pokok-pokok yang dimuat dalam *Board Manual* yang berhubungan dengan Dewan Komisaris adalah terkait:

1. Ketentuan Umum
2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Dewan Komisaris
3. Benturan Kepentingan
4. Kekosongan Jabatan Dewan Komisaris
5. Pengunduran Diri Dewan Komisaris
6. Ketentuan Pengawasan Dewan Komisaris
7. Rapat Dewan Komisaris
8. Ketentuan Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris
9. Ketentuan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
10. Organ Pendukung Dewan Komisaris
11. Pelaporan Pengawasan Dewan Komisaris atas RKAP
12. Penunjukan KAP sebagai Auditor Eksternal
13. Program Pelatihan Dewan Komisaris
14. Program Pengenalan Dewan Komisaris
15. Tata Komunikasi dan Korespondensi antara Direksi dan Dewan Komisaris
16. Penetapan Penghasilan Dewan Komisaris

Ketentuan lanjutan dari *Board Manual* yang dimuat dalam Pedoman Dewan Komisaris adalah pedoman pelaksanaan tugas, yaitu:

1. Pedoman pelaksanaan tugas umum Dewan Komisaris
2. Pedoman pembagian tugas Dewan Komisaris
3. Pedoman pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan atas rancangan RJP yang disampaikan kepada Direksi
4. Pedoman pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan atas rancangan RKAP atau perubahan RKAP yang disampaikan kepada Direksi
5. Pedoman pelaksanaan tugas pemberian arahan Dewan Komisaris
6. Pedoman pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris
7. Tugas terkait potensi benturan kepentingan yang menyangkut Dewan Komisaris
8. Tugas terkait praktik tata kelola perusahaan yang baik Perseroan

Board Manual Perseroan lebih lengkapnya dapat dilihat atau diunduh pada *website* Perseroan https://ptpii.co.id/manual-kebijakan-perusahaan

The following items are contained in the Board Manual in terms of the Board of Commissioners:

1. General Provisions
2. Duties, Authorities, and Obligations of the Board of Commissioners
3. Conflict of Interest
4. Vacancy of the Board of Commissioners' Position
5. Resignation of the Board of Commissioners
6. Supervision Provisions of the Board of Commissioners
7. Board of Commissioners' Meeting
8. Provisions on Board of Commissioners' Decision Making
9. Provisions for Performance Assessment of the Board of Commissioners
10. Direct Report to the Board of Commissioners
11. Supervisory Report of the Board of Commissioners on WP&B
12. KAP Appointment as External Auditor
13. Board of Commissioners' Training Program
14. Board of Commissioners' Induction Program
15. Communication and Correspondence between the Board of Directors and the Board of Commissioners
16. Remuneration Establishment of the Board of Commissioners

Further provisions of the Board Manual stipulated in the Board of Commissioners' Guidelines are the duties implementation:

1. Guidelines for the general duties implementation of the Board of Commissioners
2. Guidelines for the segregation of duties of the Board of Commissioners
3. Guidelines for the duties of the Board of Commissioners in approving the RJP draft submitted to the Board of Directors
4. Guidelines for the duties of the Board of Commissioners in approving the WP&B draft or changes to the WP&B submitted to the Board of Directors
5. Guidelines for the Board of Commissioners' directive duties
6. Guidelines for the Board of Commissioners' supervisory duties
7. Duties related to potential conflicts of interest involving the Board of Commissioners
8. Duties related to the Company's good corporate governance practices

The Company's Board Manual can be viewed or downloaded on the Company's website https://ptpii.co.id/manual-kebijakan-perusahaan

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

DUTIES, AUTHORITIES, AND OBLIGATIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Dewan Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dewan Komisaris berwenang untuk:
   a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
   b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
   c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
   d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
   e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
   f. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu.
   g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
   h. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.
   i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.
   j. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

The Duties, Authorities, and Obligations of the Board of Commissioners stipulated in the Company's Articles of Association are as follows:

1. The Board of Commissioners is responsible for supervising the management policies, both the Company's management and its business, which is carried out by the Board of Directors, as well as providing advice to the Board of Directors including supervision of the Company's Long-Term Plan, the Company's Budget Work Plan, the provisions of the Articles of Association, and General Meeting of Shareholders Resolution, and the prevailing laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the Company's goals and objectives.
2. The Board of Commissioners is authorized to:
   a. See the Company's books, papers, and other documents, check cash for verification purpose and other securities, and verify the Company's assets;
   b. Enter the Company's premises, buildings, and offices;
   c. Request explanation from the Board of Directors and/or other officials on all issues related to the Company's management.
   d. Know every policy and action that has been done and will be conducted by the Board of Directors.
   e. Request Directors and/or other officials reporting to Directors, upon Directors' knowledge, to attend Board of Commissioners' Meeting.
   f. Appoint and dismiss a Secretary of the Board of Commissioners, if considered necessary.
   g. Temporarily suspend a Directors' member in accordance with the provision in Articles Of Association
   h. Establish other committees besides Audit Committee, if deemed necessary, taking into account the Company's capability.
   i. Assign experts to carry out certain task and in certain period of time at the expense of the Company, if deemed necessary.
   j. Manage the action of the Company's management in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions in the Articles of Association.

k. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Dewan Komisaris berkewajiban/bertanggung jawab untuk:
   a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan
   b. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
   c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham terkait Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
   d. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.
   e. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.
   f. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
   g. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
   h. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
   i. Membentuk Komite Audit.
   j. Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
   k. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
   l. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/ atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
   m. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

k. Attend the Board of Directors' Meeting and provide opinions on the matters discussed.
l. Carry out other supervision authority as long as it is not contradictory to rules and legislations, Articles of Association, and/or the General Meeting of Shareholders Resolutions.

3. The Board of Commissioners is responsible for:
   a. Providing advice to the Board of Directors in carrying out the Company's management
   b. Auditing, reviewing, and signing the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Program and Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Articles of Association.
   c. Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Program and Budget regarding the justifications for the Board of Commissioners to sign the Company's Long-Term Plan and the Work Program and Budget.
   d. Following the development of the Company's activities, providing opinions and advice to the General Meeting of Shareholders on any issues deemed important for the Company's management.
   e. Reporting immediately to the General Meeting of Shareholders if there are symptoms of a decline in the Company's performance.
   f. Auditing and reviewing periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and signing the annual report.
   g. Provide explanations, opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report, if requested.
   h. Preparing an annual work program and putting it in the Company's Work Program and Budget.
   i. Establishing an Audit Committee.
   j. Proposing a Public Accountant to the General Meeting of Shareholders.
   k. Formulating minutes of the Board of Commissioners Meeting and keeping such copy.
   l. Reporting to the Company regarding his/her and/or his/her family's shareholding in the Company and other companies.
   m. Providing reports on supervisory tasks that have been carried out in the previous fiscal year to the General Meeting of Shareholders.

n. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/ atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
o. Menyusun pembagian tugas antar anggota Dewan Komisaris dan dituangkan di dalam Keputusan Dewan Komisaris.

n. Carrying out other supervisory and advisory duties, as long as it is not contradictory to rules and legislations, Articles of Association, and/or the General Meeting of Shareholders Resolutions.

o. Formulating the segregation of duties of the Board of Commissioners and setting it forth in the Board of Commissioners' Decree.

PEMBAGIAN TUGAS MASING-MASING DEWAN KOMISARIS
SEGREGATION OF DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-002/KOM/0824 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yaitu sebagai berikut:

The segregation of duties of the Board of Commissioners is pursuant to the Board of Commissioners' Decree No. SK-002/KOM/0824 on Segregation of Duties of the Board of Commissioners of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Direksi Job description	
Hadiyanto	Komisaris Utama President Commissioner	1. Mengkoordinasikan seluruh tugas Dewan Komisaris; dan 2. Melaksanakan tugas terkait kebijakan remunerasi dan nominasi.	1. Coordinating all Board of Commissioners' duties; and 2. Implementing tasks related to remuneration and nomination policies.
Ahmad Ghufron	Komisaris Commissioner	1. Sebagai Ketua Komite Audit; 2. Bidang *Internal Audit, Legal and Compliance, Corporate Secretary and Communication*, CEO *Office*, IIGF *Institute, Corporate Strategy & Finance, Treasury & Investment*, dan *Corporate Service & Procurement*; dan 3. Melaksanakan tugas terkait kebijakan remunerasi dan nominasi.	1. As Head of the Audit Committee; 2. Internal Audit, Legal and Compliance, Corporate Secretary and Communication, CEO Office, IIGF Institute, Corporate Strategy & Finance, Treasury & Investment, and Corporate Service & Procurement; and 3. Implementing tasks related to remuneration and nomination policies.
Ferry Irawan	Komisaris Commissioner	1. Sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko; 2. Bidang *Guidance & Consultation, Underwriting, Environment & Social, Human Capital*, Inisiasi Bisnis, *Risk Management, Project Monitoring & Management, Project Appraisal*, dan Penjaminan *non* KPBU; dan 3. Melaksanakan tugas terkait kebijakan remunerasi dan nominasi.	1. As Head of the Risk Monitoring Committee; 2. Guidance & Consultation, Underwriting, Environment & Social, Human Capital, Business Initiation, Risk Management, Project Monitoring & Management, Project Appraisal, and Non-PPP Guarantee; and 3. Implementing tasks related to remuneration and nomination policies.

JENIS KEPUTUSAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS
DECISIONS REQUIRING THE BOARD OF COMMISSIONERS' APPROVAL

Sejalan dengan Anggaran Dasar dan *Board Manual*, jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;

In line with the Articles of Association and Board Manual, the types of decisions requiring the Board of Commissioners' Approval are as follows:

1. Collateralizing fixed assets for short-term credit withdrawal;

2. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa penjaminan bersama, kontrak manajemen, kerja sama lisensi, penyewaan aset dan kerja sama lainnya yang perlu dilakukan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya dengan ruang lingkup, nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;
3. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang termasuk pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan;
4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
5. Memindahtangankan aset tetap yang dilakukan melalui penjualan, tukar menukar, ganti rugi, dan penyertaan modal dengan ketentuan:
   i. Berupa aset selain tanah dan/atau bangunan; dan atau
   ii. Berupa aset dengan nilai di bawah 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan;
6. Penghapusan aset karena pemusnahan atau sebab-sebab lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menetapkan struktur organisasi;
8. Melakukan transaksi sebagaimana huruf b termasuk tindakan-tindakan lainnya yang diambil dalam rangka menjalankan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan nilai transaksi sama atau melebihi 25% (dua puluh lima persen) dan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan.

2. Entering into cooperation with business entities or other parties in the form of joint guarantees, management contracts, licensing cooperation, asset leasing, and other cooperation that needs to be carried out by the Company to achieve its goals and objectives with a certain scope, value or period of time, determined by the GMS;
3. Unless otherwise stipulated by laws and regulations, receiving or granting medium/long-term loans including loans granted to the Company's subsidiaries;
4. Writing off non-performing loans and dead inventory;
5. Transferring fixed assets through sale, exchange, compensation, and equity participation provided that:
   i. In the form of assets other than land and/or buildings; and/or
   ii. In the form of assets with a value below 50% (fifty per cent) of the Company's net assets;
6. Write off of assets due to destruction or other causes in accordance with the provisions of laws and regulations;
7. Determining the organizational structure;
8. Conducting transactions as referred to in point b including other actions taken for the Company's main business activities, with a transaction value equal to or exceeding 25% (twenty-five per cent) and less than 50% (fifty per cent) of the Company's equity value.

BENTURAN KEPENTINGAN DAN RANGKAP JABATAN
CONFLICT OF INTEREST AND CONCURRENT POSITIONS

Selaras dengan *Board Manual*, Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari pengambilan keputusan dan/atau kegiatan Perseroan, selain penghasilan yang sah.

Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara;
2. Menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris; dan/atau
3. Menduduki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan.

In line with the Board Manual, the Board of Commissioners are prohibited from taking actions that have a conflict of interest, and taking personal benefits from the Company's decision-making and activities other than their legal income.

Members of the Board of Commissioners are prohibited from serving in a concurrent position as:
1. A member of the Board of Directors of a State-Owned Enterprise;
2. Hold positions that are prohibited by laws and regulations to be held concurrently with the position of member of the Board of Commissioners; and/or
3. Hold other positions that may cause a conflict of interest with the Company.

Dalam rangka mencegah terjadinya benturan kepentingan di Perseroan, anggota Dewan Komisaris diminta untuk menandatangani Pakta Integritas pada awal masa pengangkatan dan diperbaharui setiap awal tahun yang memuat pernyataan bahwa Dewan Komisaris menjamin tidak adanya benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya.

Selama tahun 2024, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Perseroan. Dewan Komisaris memiliki komitmen untuk menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun, meskipun pada tahun 2024, terdapat beberapa anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan. Namun dapat dipastikan rangkap jabatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Informasi rangkap jabatan Dewan Komisaris disajikan di Bab Profil Perusahaan pada sub bab Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

To prevent conflicts of interest in the Company, members of the Board of Commissioners shall sign an Integrity Pact at the beginning of the appointment period and renew at the beginning of each year, which contains a statement that the Board of Commissioners has no conflict of interest in the performance of its duties.

In 2024, all members of the Board of Commissioners had no conflict of interest or potential conflict of interest with the Company. The Board of Commissioners is committed to avoiding potential conflicts of interest at all times even though in 2024, there were several members of the Board of Commissioners who held concurrent positions. However, it is ensured that the concurrent positions do not conflict with the laws and regulations. Information on the concurrent positions of the Board of Commissioners can be referred to in the Company Profile Chapter in the Board of Commissioners Profile sub-chapter in this Annual Report.

RAPAT DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING

Kebijakan rapat Dewan Komisaris diatur dalam *Board Manual.* Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dewan Komisaris dapat melaksanakan rapat Dewan Komisaris (rapat internal) dan rapat bersama Direksi (rapat gabungan).

Rapat Dewan Komisaris baik rapat internal maupun rapat gabungan dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

The Board of Commissioners' Meeting policy is set forth in the Board Manual. Board of Commissioners' Meetings are meetings held by the Board of Commissioners regarding their duties and functions. The Board of Commissioners may conduct Board of Commissioners meetings (internal meetings) and joint meetings with the Board of Directors.

Internal meetings and joint meetings of the Board of Commissioners can be held at least once a month, or at any time at the request of one (1) or several members of the Board of Commissioners, the request of the Board of Directors, or at the written request of one (1) or several Shareholders representing at least 1/10 (one-tenth) of the total number of shares with voting rights, by stating the matters to be discussed.

FREKUENSI PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2024
FREQUENCY OF BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING IN 2024

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris melaksanakan rapat sebanyak 31 kali, yang terdiri dari rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 15 kali dan rapat gabungan bersama Direksi sebanyak 16 kali.

In 2024, the Board of Commissioners held 31 meetings, consisting of 15 internal meetings of the Board of Commissioners and 16 joint meetings with the Board of Directors.

Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal dan Gabungan Dewan Komisaris Tahun 2024

Attendance of the Board of Commissioners in Internal and Joint Meetings of the Board of Commissioners in 2024

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris Attendance of the Board of Commissioners in Internal Meetings			Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan (Dewan Komisaris dan Direksi) Attendance of the Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors		
		Jumlah Rapat Meetings	Jumlah Kehadiran Atten-dance	Tingkat Kehadiran Atten-dance	Jumlah Rapat Meetings	Jumlah Kehadiran Atten-dance	Tingkat Kehadiran Atten-dance
Hadiyanto[1]	Komisaris Utama President Commissioner	8	8	100%	7	7	100%
Rina Widiyani Wahyuningdyah[2]	Komisaris Utama President Commissioner	7	7	100%	9	9	100%
Ahmad Ghufron[3]	Komisaris Commissioner	7	7	100%	6	6	100%
Ferry Irawan[4]	Komisaris Commissioner	5	5	100%	7	7	100%
Mariatul Aini[5]	Komisaris Commissioner	8	8	100%	5	5	100%
Iqbal Islami[6]	Komisaris Commissioner	10	10	100%	11	11	100%
Rata-Rata Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris Board of Commissioners' Average Attendance				**100%**			**100%**

Frekuensi dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat internal maupun rapat gabungan bersama Direksi telah sesuai dengan kebijakan rapat yang diatur dalam *Board Manual*.

The frequency and attendance of the Board of Commissioners in internal meetings and joint meetings with the Board of Directors were in accordance with the meeting policy stipulated in the Board Manual.

[1] menjabat sejak 1 Juli 2024
[2] berhenti menjabat sejak 30 Juni 2024
[3] menjabat sejak 19 Agustus 2024
[4] menjabat sejak 27 Agustus 2024
[5] berhenti menjabat sejak 18 Agustus 2024
[6] berhenti menjabat sejak 26 Agustus 2024

[1] served in the office since 1 July 2024
[2] ceased to serve since 30 June 2024
[3] served in the office since 19 August 2024
[4] served in the office since 27 August 2024
[5] ceased to serve since 18 August 2024
[6] ceased to serve since 26 August 2024

Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS Tahun 2024

Attendance of the Board of Commissioners in 2024 GMS

No.	Tanggal Date	Agenda	Realisasi Realization					
			Rina Widiyani Wahyun-ingdyah[1]	Mariatul Aini[2]	Iqbal Islami[3]	Hadiyanto[4]	Ferry Irawan[5]	Ahmad Ghufron[6]
1.	21 Mei 2024 21 May 2024	RUPS Tahunan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 Annual GMS Annual Report for the 2023 Fiscal Year	✔	✔	✔	–	–	–
2.	16 Desember 2024 16 December 2024	RUPS Tahunan Rencana Kerja & Anggaran Perseroan (RKAP) Tahun 2025 Annual GMS 2025 Work Program and Budget (WP&B)	–	–	–	✔	✔	✔

[1] Periode menjabat sejak 19 Juni 2023 – 30 Juni 2024
[2] Periode menjabat sejak 6 September 2019 - 18 Agustus 2024
[3] Periode menjabat sejak 31 Januari 2023 – 26 Agustus 2024
[4] Periode menjabat sejak 1 Juli 2024
[5] Periode menjabat sejak 27 Agustus 2024
[6] Periode menjabat sejak 19 Agustus 2024

[1] Term of office from 19 June 2023 - 30 June 2024
[2] Term of office from 6 September 2019 - 18 August 2024
[3] Term of office from 31 January 2023 - 26 August 2024
[4] Term of office from 1 July 2024
[5] Term of office from 27 August 2024
[6] Term of office from 19 August 2024

AGENDA RAPAT
MEETING AGENDA

Berikut agenda rapat yang telah dibahas selama tahun 2024 baik rapat internal maupun rapat gabungan:

The following meeting agenda were discussed in 2024 both in internal and joint meetings:

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024
Agenda of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2024

No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat Meeting Date	Agenda	
1.	24 Januari 2024 24 January 2024	- *Highlight* laporan Manajemen Periode Desember 2023 - Gejala Penurunan Kinerja periode Desember 2023 - Usulan IKU Individu Direksi Tahun 2024	- Highlight of the Management Report in December 2023 - Indicators of Performance Decline in December 2023 - Proposed of Directors' individual KPI in 2024
2.	26 Februari 2024 26 February 2024	- Laporan Manajemen periode Januari 2024 - Kajian Hukum terkait PMN PEN	- Management Report in January 2024 - Legal Review on PMN PEN
3.	25 Maret 2024 25 March 2024	*Highlight* Laporan Manajemen periode Februari 2024	Highlight of the Management Report in February 2024
4.	23 April 2024 23 April 2024	*Highlight* Laporan Manajemen Periode Maret 2024	Highlight of the Management Report in March 2024
5.	5 Mei 2024 5 May 2024	Pembahasan *Annual Report* Tahun 2023	Discussion of the 2023 Annual Report
6.	16 Mei 2024 16 May 2024	Pembahasan Gladi Bersih RUPS	GMS Rehearsal Discussion
7.	20 Mei 2024 20 May 2024	Pembahasan Persiapan RUPS	GMS Preparation Discussion
8.	28 Mei 2024 28 May 2024	*Highlight* Laporan Manajemen Periode April 2024	Highlight of the Management Report in April 2024
9.	24 Juni 2024 24 June 2024	*Highlight* Laporan Manajemen Periode Mei 2024	Highlight of the Management Report in May 2024
10.	30 Juli 2024 30 July 2024	Pembahasan Laporan Manajemen Juni 2024	Discussion on the Management Report in June 2024
11.	22 Agustus 2024 22 August 2024	- Pembahasan Laporan Manajemen Juli 2024; - *Update* terkait Proyek; dan - *Update* terkait RPP Penjaminan	- Discussion on the Management Report in July 2024; - Project Update; and - Assurance Plan Update
12.	28 September 2024 28 September 2024	Pembahasan Laporan Manajemen Agustus 2024	Discussion on the Management Report in August 2024
13.	30 Oktober 2024 30 October 2024	Pembahasan Laporan Manajemen September 2024	Discussion on the Management Report in September 2024
14.	28 November 2024 28 November 2024	Pembahasan Laporan Manajemen Oktober 2024	Discussion on the Management Report in October 2024
15.	22 Agustus 2024 22 August 2024	Pembahasan Narasi dan Tanggapan dalam RUPS RKAP 2025	Preparation for the General Meeting of Shareholders 2025 Work Program and Budget (WP&B)
16.	30 Desember 2024 30 December 2024	Pembahasan Laporan Manajemen November 2024	Discussion on the Management Report in November 2024

Agenda Rapat Dewan Komisaris 2024

Agenda of the Board of Commissioners' Meetings in 2024

No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat Meeting Date	Agenda	
1.	23 Januari 2024 23 January 2024	Pembahasan *Highlight* Laporan Manajemen & Gejala Penurunan Kinerja Periode Desember 2023	Discussion of Management Report Highlights & Symptoms of Performance Decline in December 2023
2.	15 Februari 2024 15 February 2024	*Update Assessment* GCG tahun 2023 oleh BPKP dan Penelaahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan PMN periode Q4 tahun 2023	Update on GCG Assessment in 2023 by BPKP and Review of Realization Report on the Additional PMN Usage in Q4 2023
3.	23 – 24 Februari 2024 23-24 February 2024	Pembahasan Laporan Manajemen Januari 2024	Discussion on the Management Report in January 2024
4.	22 Maret 2024 22 March 2024	Pembahasan Laporan Manajemen Februari 2024	Discussion on the Management Report in February 2024
5.	22 April 2024 22 April 2024	Pembahasan Laporan Manajemen Maret 2024	Discussion on the Management Report in March 2024
6.	26 Mei 2024 26 May 2024	Pembahasan agenda pembahasan Laporan Manajemen April 2024	Discussion of the agenda of the Management Report in April 2024
7.	23 Juni 2024 23 June 2024	Pembahasan Laporan Manajemen Mei 2024	Discussion on the Management Report in May 2024
8.	29 Juli 2024 29 July 2024	- Pembahasan Laporan Manajemen Juni 2024; - Pembahasan *Current Issue* Komite Pemantauan Risiko Juni 2024; dan - Pembahasan *Current Issue* Komite Audit Juni 2024	- Discussion on the Management Report in June 2024; - Current Issue Discussion on Risk Monitoring Committee June 2024; and - Current Issue Discussion on Audit Committee June 2024
9.	21 Agustus 2024 21 August 2024	- Pembahasan Laporan Manajemen Juli 2024; dan - *Update progress* laporan-laporan yang perlu diselesaikan di Bulan Agustus	- Discussion on the Management Report in July 2024; and - Update on the progress of reports to be completed in August
10.	24-25 Agustus 2024 24-25 August 2024	Rapat Kerja Dewan Komisaris	Board of Commissioners' Working Meeting
11.	25 September 2024 25 September 2024	- Pembahasan Laporan Manajemen Agustus 2024; dan - *Update Progress* Laporan sampai dengan bulan September 2024	- Discussion on the Management Report in August 2024; and - Update Progress Report as of September 2024
12.	24 Oktober 2024 24 October 2024	- Pembahasan RKAP Tahun 2025 - Pembahasan Laporan Manajemen September 2024	- Discussion of 2025 WP&B - Discussion on the Management Report in September 2024
13.	26 November 2024 26 November 2024	Pembahasan Laporan Manajemen Oktober 2024	Discussion on the Management Report in October 2024
14.	11 Desember 2024 11 December 2024	Pembahasan Narasi dan Tanggapan Dewan Komisaris dalam RUPS	Discussion of the Board of Commissioners' Narrative and Response to the GMS
15.	23 Desember 2024 23 December 2024	Pembahasan Laporan Manajemen November 2024	Discussion on the Management Report in November 2024

PENYAMPAIAN UNDANGAN RAPAT
MEETING INVITATION DELIVERY

Sepanjang tahun 2024, sebagaimana yang dijelaskan pada tabel agenda rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi, penyampaian undangan rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat gabungan bersama Direksi telah sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam *Board Manual* yaitu panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat Dewan Komisaris diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

In 2024, as explained in the agenda table of the Board of Commissioners' internal meetings, and the joint meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, the delivery of invitations to internal meetings of the Board of Commissioners and joint meetings with the Board of Directors was in accordance with the policy stipulated in the Board Manual, i.e., the invitation to the Board of Commissioners meeting was submitted in writing by the President Commissioner or by a member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner and submitted no later than three (3) days before the Board of Commissioners' meeting was held, or shorter in an urgent situation, without taking into account the date of the call and the date of the meeting.

RENCANA RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025
BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING PLAN IN 2025

Sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun, Dewan Komisaris akan melakukan rapat Dewan Komisaris sebanyak kurang lebih 24 kali dengan agenda rapat internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.

In line with the work program prepared, the Board of Commissioners shall conduct approximately 24 Board of Commissioners' meetings, with the agenda of internal Board of Commissioners meetings and Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors.

PELATIHAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' TRAINING

Perseroan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk berpartisipasi dalam program pengembangan kompetensi guna menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung-jawabnya dan dalam memberikan nasihat yang relevan terhadap rencana strategis yang disiapkan Direksi Perseroan.

The Company provides the highest possible opportunity for members of the Board of Commissioners to participate in competence development programs to broaden the Board of Commissioners' knowledge and insights in supporting their duties, functions, and responsibilities to exercise their advisory duties that are relevant to the Company's strategic business plan prepared by the Board of Directors.

KEBIJAKAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' TRAINING POLICY

Kebijakan pelatihan Dewan Komisaris diatur dalam *Board Manual* dan Pedoman Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners' training policy is set forth in the Board Manual and Board of Commissioners Guidelines.

PELAKSANAAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' TRAINING

Berikut daftar pelatihan yang diikuti Dewan Komisaris PT PII selama tahun 2024:

The Board of Commissioners of IIGF has attended the following training in 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Program Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer	Tempat Time
Hadiyanto[1]	Komisaris Utama President Commissioner	Risk Management Society *(Enterprise Risk Management)*	RIMS ERM	15-22 November 2024 15-22 November 2024
Rina Widiyani Wahyuningdyah[2]	Komisaris Utama President Commissioner	-	-	-
Ahmad Ghufron[3]	Komisaris Commissioner	GRC *Summit*	LSP MKS	22-23 Agustus 2024 22-23 August 2024
Ferry Irawan[4]	Komisaris Commissioner	1. *Asean Global Leadership Program* 2. GRC *Summit*	1. AGLP 2. LSP MKS	1. 2-6 September 2024 2. 22-23 Agustus 2024 1. 2-6 September 2024 2. 22-23 August 2024
Mariatul Aini[5]	Komisaris Commissioner	1. Pelatihan Program CSR dan ESG. 2. *Strategic Insight for Commissioners & Directors. Digital Renaissance: Navigation the Landscape of Business Transformation* 1. CSR and ESG Program Training. 2. Strategic Insight for Commissioners & Directors. Digital Renaissance: Navigation the Landscape of Business Transformation	1. The Pinnacle Group International 2. BUMN Track	1. 23 April 2024 2. 30 Mei 2024 1. 23 April 2024 2. 30 May 2024
Iqbal Islami[6]	Komisaris Commissioner	*Leading Change and Organizational Transformation*	London Bussiness School	22-26 Juli 2024 22-26 July 2024

[1] menjabat sejak 1 Juli 2024
[2] berhenti menjabat sejak 30 Juni 2024
[3] menjabat sejak 19 Agustus 2024
[4] menjabat sejak 27 Agustus 2024
[5] berhenti menjabat sejak 18 Agustus 2024
[6] berhenti menjabat sejak 26 Agustus 2024

[1] served in the office since 1 July 2024
[2] ceased to serve since 30 June 2024
[3] served in the office since 19 August 2024
[4] served in the office since 27 August 2024
[5] ceased to serve since 18 August 2024
[6] ceased to serve since 26 August 2024

PROGRAM PENGENALAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' INDUCTION PROGRAM

Kebijakan program pengenalan Dewan Komisaris diatur dalam Board Manual. Program pengenalan Perseroan diberikan kepada Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kali. Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai oleh Perseroan. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan Perseroan berada pada Sekretaris Perusahaan.

Materi Program Pengenalan meliputi:
1. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan;
2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan; dan/atau
5. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pada tahun 2024, Perseroan telah mengadakan program pengenalan Perseroan kepada Dewan Komisaris baru yaitu Sdr. Hadiyanto sebagai Komisaris Utama pada tanggal 24 Juli 2024, dan Sdr. Ferry Irawan serta Sdr. Ahmad Ghufron sebagai Komisaris tanggal 10 September 2024. Program pengenalan tersebut dilakukan secara formal melalui pertemuan tatap muka (*offline*).

The Board of Commissioners' induction program is set forth in the Board Manual. The Company's induction program is provided to the Board of Commissioners who are appointed for the first time. The Company's induction program may be in the form of presentations, meetings, visitation to the Company, and documents review, or other programs deemed in line with the Company. The Corporate Secretary is responsible for conducting the Company's induction program.

The Orientation Program covers:
1. Implementation of the Company's governance principles;
2. Company's overview on objectives, nature, and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short-term and long-term business plan, competitive position, risk, and other strategic issues;
3. Information relating to delegated authorities, internal and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. Information on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as things prohibited; and/ or
5. Laws and regulations related to the Company's business activities.

In 2024, the Company held an induction program for the new Board of Commissioners, i.e., Mr. Hadiyanto as the President Commissioner on 24 July 2024, and Mr. Ferry Irawan, as well as Mr. Ahmad Ghufron, as Commissioners on 10 September 2024. The induction program was conducted formally via face-to-face meetings (offline).

KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS SEPANJANG TAHUN 2024
BOARD OF COMMISSIONERS' DECISIONS AND RECOMMENDATIONS IN 2024

Hingga 31 Desember 2024, Dewan Komisaris telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

As of 31 December 2024, the Board of Commissioners has issued Board of Commissioners' Decree detailed as follows:

No.	Nomor Surat Keputusan Decree Number	Tanggal Date	Perihal Agenda
1	KEP-01/KOM/PII/06/2024	30 Juni 2024 30 June 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretariat Dewan Komisaris PT PII (Persero) Dismissal and Appointment of Board of Commissioners' Secretariat Staff of IIGF
2	SK-002/KOM/0824	30 Agustus 2024 30 August 2024	Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT PII (Persero) Segregation of Duties of IIGF's Board of Commissioners
3	SK-003/KOM/1024	1 Oktober 2024 1 October 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT PII (Persero) Dismissal and Appointment of IIGF's Audit Committee Member
4	SK-004/KOM/1024	1 Oktober 2024 1 October 2024	Pemberhentian dan Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT PII (Persero) Dismissal and Determination of IIGF's Risk Monitoring Committee Member
5	SK-005/KOM/1224	31 Desember 2024 31 December 2024	Pemberhentian dan Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT PII (Persero) Determination of the Work Program of the Board of Commissioners and Board of Commissioners' Organs of PT PII (Persero) in 2025

PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' APPROVAL

Berikut jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris selama tahun 2024:

1. Persetujuan atas RKAP Tahun 2025
2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2023

The following are the decisions that required the Board of Commissioners' approval in 2024:

1. 2025 WP&B approval
2. 2023 Fiscal Year Annual Report approval

REALISASI PROGRAM KERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2024
REALIZATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' WORK PROGRAM IN 2024

No.	Program Kerja Work Program	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
Aspek Perencanaan Planning			
1	Penyusunan dan penetapan usulan RKA Dewan Komisaris Tahun 2025 Preparation and determination of the proposed Work Program of the Board of Commissioners in 2025	September	Rancangan RAB dan RKA disusun pada bulan Oktober 2024 dan telah disampaikan kepada Direksi. The draft Proposed Budget and Work Program were prepared in October 2024 and submitted to the Board of Directors.
2	Penyusunan dan penetapan usulan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris tahun 2025 Preparation and determination of the proposed Performance Contract of the Board of Commissioners in 2025	September	Usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris tahun 2025 telah disampaikan kepada RUPS dan ditetapkan saat RUPS Persetujuan RKAP tahun 2025. The proposed Performance Contract (IKU) of the Board of Commissioners in 2025 has been submitted to the GMS and set forth during the GMS for the Approval of the 2025 WP&B.
3	Penelaahan dan persetujuan atas usulan RKAP dan atau RJPP Review and approval of the proposed WP&B and/or RJPP	Juli – September (sesuai dengan jadwal RUPS) July - September (in accordance with the GMS schedule)	• 12 Oktober 2024 • 24 Oktober 2024 • Tanggapan ke Direksi: S-46/PII/DK/1024 tanggal 30 Oktober 2024 • 12 October 2024 • 24 October 2024 • Response to the Board of Directors: S-46/PII/DK/1024 dated 30 October 2024

No.	Program Kerja Work Program	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
4	Penyampaian tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS atas rancangan RKAP dan atau RJPP PT PII tahun 2025 Submission of the Board of Commissioners' response to the GMS on the draft of WP&B and/or RJPP of IIGF in 2025	Desember (sesuai dengan jadwal RUPS) December (in accordance with the GMS schedule)	Rapat Dewan Komisaris: 24 Oktober 2024 Tanggapan ke RUPS: S-49/PII/DK/1124 tanggal 14 November 2024 Board of Commissioners' Meeting: 24 October 2024 Response to the GMS: S-49/PII/DK/1124 dated 14 November 2024
Aspek Pengawasan Supervisory			
5	Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya Supervision/advice on risk management policy and its implementation	Triwulanan Quarterly	Rapat berkala dengan divisi Risk Management (RM) mengenai sistem kebijakan manajemen risiko yang dilaksanakan setiap triwulanan Quarterly meetings with the Risk Management (RM) division on the risk management policy system
6	Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal Supervision/advice on risk management policy and its implementation of the Internal Control System	Triwulanan Quarterly	Rapat berkala dengan divisi Internal Audit (IA) dan/atau RM mengenai sistem pengendalian internal yang dilaksanakan setiap triwulanan Quarterly meetings with Internal Audit (IA) and/or RM divisions on the internal control system
7	Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan SDM dan pelaksanaannya Supervision/advice on HR policies and implementation	Mei May	29 Mei 2024 29 May 2024
8	Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan TI dan pelaksanaannya Supervision/advice on IT policy and its implementation	April	26 April 2024 & 16 Agustus 2024 26 April 2024 and 16 August 2024
9	Penyampaian tanggapan atas Laporan Tahunan PT PII Tahun 2023 Submission of responses to the 2023 IIGF's Annual Report	Mei May	Draft *Annual Report* tahun 2023 dilaksanakan pembahasan bulan Mei 2024. The 2023 Annual Report draft was discussed in May 2024.
10	Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya Supervision/advice on quality and service policies and their implementation	Maret March	• 27 Maret 2024 • 4 April 2024 • 26 April 2024 • 27 March 2024 • 4 April 2024 • 26 April 2024
11	Pengawasan atas efektivitas audit eksternal dan internal serta pelaksanaan telaah atas pengaduan terkait Perseroan Supervision of the effectiveness of external and internal audits and review of company-related complaints	Triwulanan Quarterly	• Triwulan IV 2023 tanggal 15 Januari 2024 • Triwulan I 2024 tanggal 30 April 2024 • Triwulan II 2024 tanggal 23 Juli 2024 • Triwulan III 2024 tanggal 25 Oktober 2024 • Q4 2023 dated 15 January 2024 • Q1 2024 dated 30 April 2024 • Q2 2024 dated 23 July 2024 • Q3 2024 dated 25 October 2024
12	Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya Supervision/advice on procurement policy and its implementation	April	30 April 2024 & 16 Agustus 2024 30 April 2024 and 16 August 2024

No.	Program Kerja Work Program	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
13	Pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian dengan Pihak Ke-3 Supervision of the Board of Directors' compliance with Laws and Agreements with Third Parties	Sesuai kebutuhan As necessary	Dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 Implemented in October 2024
14	Respon atas permohonan tanggapan/penjelasan dari Direksi/RUPS Response to request for response/explanation from the Board of Directors/GMS	Paling lambat 14 hari setelah permohonan tanggapan/penjelasan dari Direksi/RUPS diterima lengkap No later than 14 days after the request for response/explanation from the Board of Directors/GMS is received completely	Seluruh permohonan tanggapan/penjelasan dari Direksi/RUPS telah ditanggapi tepat waktu, paling lambat 14 hari setelah permohonan tanggapan/penjelasan dari Direksi/RUPS diterima lengkap All requests for response/explanation from the Board of Directors/GMS have been responded to in a timely manner, no later than 14 days after the request for such response/explanation from the Board of Directors/RUPS has been received completely.
15	Pemantauan kinerja Direksi Board of Directors' performance observation	Bulanan Monthly	Rapat rutin gabungan Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala mengenai laporan manajemen bulanan sepanjang tahun 2024 Regular joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors on monthly management reports in 2024
16	Pelaksanaan rapat rutin bulanan Dewan Komisaris Routine internal meetings of the Board of Commissioners	Bulanan Monthly	Selama periode tahun 2023 telah dilaksanakan rapat rutin Dewan Komisaris sebanyak 14 kali In 2023, 14 meetings of the Board of Commissioners were held
17	Pembahasan gejala penurunan kinerja Discussion of symptoms of performance decline	Sesuai kebutuhan As necessary	• 26 Januari 2024 • 23 Agustus 2024 • 28 Oktober 2024 • 26 January 2024 • 23 August 2024 • 28 October 2024
18	Pengawasan terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta pelaksanaannya Supervision of accounting policies and preparation of financial statements and the implementation	Juni-Juli June-July	15 Agustus 2024 dan 16 Agustus 2024 15-16 August 2024
19	Evaluasi atas pelaksanaan RKAP Evaluation of the WP&B implementation	Triwulanan Quarterly	Dilaksanakan tiap triwulan bersama dengan Divisi Internal Audit & divisi terkait Conducted quarterly together with the Internal Audit Division & related division
20	*Monitoring* atas kegiatan IIGF *Institute* Monitoring IIGF's activities Institute	Sesuai kebutuhan As necessary	Dilaksanakan pada rapat pembahasan laporan manajemen dan rapat komite Held at management report discussion meetings and committee meetings
21	Evaluasi atas kegiatan CSR CSR evaluation	Juni June	Dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Dewan Komisaris 23 Juni 2024 Held simultaneously with the Board of Commissioners' Meetings on 23 June 2024
22	Penelaahan pengusulan remunerasi Direksi Review of the proposal for remuneration of the Board of Directors	Sesuai permintaan Direksi As requested by the Board of Directors	Disampaikan ke RUPS melalui SR-03/PII/DK/0524 tanggal 17 Mei 2024 Delivered to GMS via SR-03/PII/DK/0524 dated 17 May 2024

No.	Program Kerja Work Program	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
23	*Monitoring* atas proyek yang telah dijamin Monitoring of projects that have been guaranteed	Sesuai jadwal Divisi Project Monitoring As scheduled by the Project Monitoring Division	Rapat berkala dengan Direksi terkait laporan bulanan dan rapat berkala dengan divisi RM mengenai pantauan risiko atas proyek yang telah dijamin yang dilaksanakan setiap triwulanan Regular meetings with the Board of Directors on monthly reports and quarterly meetings with the RM division on the risk monitoring of secured projects
24	Pembahasan terkait transaksi atau Tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/ RUPS Discussion of transactions or Actions within the scope of authority of the Board of Commissioners/GMS	Sesuai kebutuhan As necessary	Sepanjang tahun 2023 tidak ada transaksi atau tindakan yang berkaitan dengan bisnis Perseroan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris In 2023, there were no transactions or actions related to the Company's business that required the approval of the Board of Commissioners
25	Pemantauan pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan yang diterima oleh Dewan Komisaris Pemantauan pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan yang diterima oleh Dewan Komisaris	Sesuai kebutuhan As necessary	Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan yang diterima oleh Dewan Komisaris In 2023, the Board of Commissioners did not receive any complaints related to the Company
Aspek Pelaporan Reporting Aspect			
26	Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Submission of report on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners	Triwulanan Quarterly	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS secara tepat waktu setiap periode Triwulan The report on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners is submitted to the GMS in a timely manner every quarterly.
27	Penyampaian laporan pengawasan RKAP Tahun 2023-2024 Submission of WP&B supervision report for the year 2023-2024	Semesteran Every six months	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Pelaksanaan RKAP Tahun 2023 pada semester I dan semester II telah disampaikan kepada RUPS Supervisory Report of the Board of Commissioners on WP&B in H1 and H2 have been delivered to the GMS
28	Penyampaian laporan realisasi capaian IKU Dewan Komisaris Submission of a report on the realization of the Board of Commissioners' KPI achievement	Triwulanan Quarterly	Laporan realisasi capaian IKU Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS setiap periode Triwulan The report on the realization of the Board of Commissioners' KPI is submitted to the GMS every quarterly.
Aspek *Monitoring* & Evaluasi Penerapan GCG Monitoring & Evaluation Aspect of GCG Implementation			
29	Pelaksanaan penilaian penerapan GCG Tahun 2023 oleh BPKP GCG Assessment in 2023 by BPKP	Januari - Februari January - February	• Penilaian penerapan GCG tahun 2023 oleh BPKP telah selesai dilaksanakan berdasarkan berita pelaksanaan penilaian penerapan GCG Tahun 2023 oleh BPKP acara *exit meeting assessment* atas penerapan GCG PT PII tahun 2023 dengan nilai skor keseluruhan adalah 90,036 • The assessment of the 2023 GCG by BPKP has been completed based on the minutes of the GCG Implementation in 2023 by BPKP at the exit meeting assessment of IIGF's GCG implementation in 2023 with an overall score of 90.036.

No.	Program Kerja Work Program	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
30	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2023 Monitoring the follow-up of the implementation of AOI GCG recommendations by BPKP in 2023	Semesteran Every six months	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2023 dilaksanakan per semester sepanjang tahun 2024. Seluruh AOI Aspek Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti sampai dengan Desember 2024. Monitoring of the follow-up to the GCG AOI recommendations by BPKP in 2023 is carried out every six months in 2024. All AOIs of the Board of Commissioners have been followed up until December 2024.
Aspek Audit atas Laporan Keuangan Audit of Financial Statements			
31	Pengadaan KAP Untuk Audit LK Th 2024 Procurement of Public Accounting Firms for Financial Statements Audit in 2024	April-Mei April-May	Rapat Komite Audit tanggal 7 Juni 2024 Audit Committee's Meeting on 7 June 2024
32	Pengusulan penetapan KAP untuk audit LK Th 2024 kepada RUPS Proposal of Public Accounting Firms appointment for Financial Statements Audit in 2024 to GMS	Juni June	Disampaikan ke RUPS melalui S-41/PII/DK/1024 tanggal 18 Oktober 2024 Delivered to GMS via S-41/PII/DK/1024 dated 18 October 2024
Aspek Lainnya Other Aspects			
33	Penelaahan atas pengaduan yang diterima oleh Dewan Komisaris Review of complaints received by the Board of Commissioners	Sesuai kebutuhan/ pengaduan As needed/based on the complaint	• Anggota Komite Audit menjadi Ketua Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran • Laporan tanggal 19 Juli 2024 dan 30 Desember 2024 • Member of the Audit Committee as Chairman of the Whistleblower Management Team • Report dated 19 July 2024 and 30 December 2024
34	Peningkatan kompetensi Anggota Dewan Komisaris Competency development Member of the Board of Commissioners	Sesuai jadwal As scheduled	Telah dilaksanakan sebagaimana yang dijelaskan pada bab ini pada sub bab pelatihan Dewan Komisaris Has been implemented as described in this chapter in the Board of Commissioners' training.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT

Dalam rangka memastikan tata kelola perusahaan yang efektif dan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kontribusi Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan pada kebijakan Perseroan dan praktik tata kelola perusahaan yang disepakati.

The Board of Commissioners assesses the performance of the Board of Commissioners based on the Company's policies and agreed governance practices to ensure effective and sustainable corporate governance, and to enhance the contribution of the Board of Commissioners.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

POLICY AND PROCEDURE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh pemegang saham melalui RUPS. Kebijakan mengenai penilaian serta evaluasi kinerja Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.88/PMK.06/2015, Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2017, dan *Board Manual* Perseroan. Berdasarkan kebijakan tersebut pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui metode pengukuran kinerja yang terintegrasi, yang merupakan penerjemahan tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dewan Komisaris ke dalam seperangkat Sasaran Strategis. Pencapaian Sasaran Strategis diukur melalui Indikator Pencapaian Kinerja (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahunnya.

The Shareholders assess the performance of the Board of Commissioners in the GMS. The policy on the assessment and evaluation of the Board of Commissioners' performance refers to the Minister of Finance Regulation No. 88/PMK.06/2015, the Minister of Finance Regulation No. 106/PMK.06/2017, and the Company's Board Manual. Based on this policy, the performance assessment of the Board of Commissioners is conducted through an integrated performance assessment, which translates the duties, functions, and responsibilities of the Board of Commissioners into a set of Strategic Objectives. The achievement of Strategic Objectives is assessed via Key Performance Indicators set forth by the General Meeting of Shareholders annually.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2024 berdasarkan pada kriteria yang berhubungan dengan pencapaian kinerja (Indikator Kinerja Utama)/ *Key Performance Indicator* (KPI) dan hasil *assessment* GCG yang dilakukan pada saat RUPS Tahunan tentang pertanggungjawaban laporan tahunan PT PII.

The criteria for evaluating the Board of Commissioners' performance in 2024 are based on criteria related to the performance achievement (Key Performance Indicators (KPI)) and the GCG assessment result at the Annual GMS regarding IIGF's annual report.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja (Indikator Kinerja Utama)/ *Key Performance Indicator* (KPI)

   KPI Dewan Komisaris PT PII terdiri dari KPI kolegial dan Individual. KPI Kolegial Dewan Komisaris merupakan indikator penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan pada tugas bersama Dewan Komisaris. KPI Individual/ masing-masing Dewan Komisaris merupakan turunan atau *cascading* dari KPI Kolegial dan diterapkan pada masing-masing Dewan Komisaris yang disesuaikan dengan pembagian tugas masing-masing Dewan Komisaris.

   Berikut aspek yang diatur dalam KPI Dewan Komisaris Kolegial dan Individual Dewan Komisaris:
   - Hasil Penilaian Independen atas Penerapan GCG pada PT PII.
   - Persentase arahan Dewan Komisaris yang ditindaklanjuti oleh Direksi

The performance assessment of the Board of Commissioners uses the following criteria:

1. Key Performance Indicators (KPI) achievement

   The KPIs of IIGF's Board of Commissioners consist of collective KPIs and individual KPIs. The Collective KPI of the Board of Commissioners is an indicator of the performance assessment of the Board of Commissioners based on the joint duties of the Board of Commissioners. Individual KPIs of the Board of Commissioners is derived or cascaded from Collective KPIs and is applied to each Board of Commissioners in accordance with the segregation of duties of each Board of Commissioners.

   The following aspects are regulated in the Collective and Individual KPIs of the Board of Commissioners:
   - Independent Assessment Result of GCG Implementation at IIGF.
   - Percentage of Board of Commissioners' directives followed up by the Board of Directors

- Jumlah pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal
- Persentase pemberian tanggapan (respons) atas permohonan persetujuan/ rekomendasi dari Direksi yang tepat waktu
- Pelaporan

2. Penilaian kinerja hasil *assessment* GCG Aspek Dewan Komisaris
   Penilaian kinerja GCG tahun buku 2024 di Perseroan menggunakan kriteria standar alat uji yang ada di Keputusan Menteri Keuangan No. 505/KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

   Aspek Dewan Komisaris sebagai berikut:
   - Dewan Komisaris mengikuti program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan
   - Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
   - Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP atau perubahan RJPP dan rancangan RKAP atau perubahan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.
   - Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.
   - Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.
   - Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan asosiasi dan pelaksanaannya.
   - Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan bakal calon anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja Direksi dan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

- Supervisions on the follow-up recommendations on internal and external audit by auditors
- Percentage of timely responses to requests for approval/ recommendations from the Board of Directors
- Reporting

2. Performance assessment of GCG results of the Board of Commissioners' Aspect
   The GCG performance assessment for the 2024 fiscal year in the Company uses the test tool standard criteria in the Decree of the Minister of Finance No. 505/ KMK.06/2020 on the Guidelines for Assessment and Evaluation of the Good Corporate Governance in the Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance.

   Aspects of the Board of Commissioners are as follows:
   - The Board of Commissioners participates in training/ learning programs continuously
   - The Board of Commissioners has a clear segregation of duties, authorities, and responsibilities, and determines the factors needed to support the implementation of the Board of Commissioners' duties.
   - The Board of Commissioners approves the RJPP draft or amendments to the RJPP and the WP&B RKAP or amendments to the WP&B submitted by the Board of Directors.
   - The Board of Commissioners provides advice to the Board of Directors in regards to the Company's plans and policies.
   - The Board of Commissioners supervises the Board of Directors on the implementation of the Company's plans and policies.
   - The Board of Commissioners supervises the policies implementation of subsidiary/associates management.
   - The Board of Commissioners plays a role in nominating Directors, evaluating the performance of Directors (individually and collectively), and proposing bonuses/ performance incentives of the Board of Directors and Board of Commissioners in accordance with prevailing regulations, taking into account the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners

- Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.
- Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
- Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dewan Komisaris membentuk Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas dan operasional Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.

- The Board of Commissioners takes action against potential conflicts of interest concerning itself.
- The Board of Commissioners monitors and ensures that good corporate governance practices are implemented in an effective and sustainable manner.
- The Board of Commissioners holds effective Board of Commissioners' meetings and attends the Board of Commissioners' meetings in accordance with the prevailing regulations.
- The Board of Commissioners established a Secretary of the Board of Commissioners to support the duties and operations of the Board of Commissioners.
- The Board of Commissioners has an effective Board of Commissioners' Committee.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT RESULT

Berikut hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2024:

The following is the performance assessment of the Board of Commissioners in 2024:

Penilaian Kinerja Kolegial Collective Performance Assessment	Penilaian Kinerja Hasil Assessment GCG GCG Assessment Performance Assessment
103,29% dari target 100,00% 103.29% of the target 100.00%	90,820% (Sangat Baik) dari target 88,00% (Sangat Baik) 90.820% (Very Good) of the target 88.00% (Very Good)

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan menjadi bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Dewan Komisaris.

The result of the evaluation of the Board of Commissioners' performance is an integral part of the compensation scheme and provision of incentives for the Members of the Board of Commissioners.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE ASSESSMENT

Dalam rangka memastikan bahwa Direksi dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan efektif, maka Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi dengan mengacu pada kebijakan sebagai berikut:
1. Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2015;
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2017; dan
3. *Board Manual* Perseroan.

Pengukuran kinerja Direksi disusun dengan menggunakan metode pengukuran kinerja yang terintegrasi yang merupakan penerjemahan Visi, Misi, dan strategi Perseroan ke dalam seperangkat Sasaran Strategis. Pencapaian Sasaran Strategis diukur dalam Indikator Pencapaian Kinerja (Indikator Kinerja Utama) baik secara individual maupun kolegial. Prosedur pelaksanaan evaluasi atas kinerja Direksi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham dan dibahas dalam forum RUPS.

To ensure that the Board of Directors can carry out its roles and responsibilities effectively, the Board of Commissioners conducts performance assessment of the Board of Directors with reference to the following policies:
1. Minister of Finance Regulation No. 88/PMK.06/2015;
2. Minister of Finance Regulation No. 106/PMK.06/2017; and
3. The Company's Board Manual.

The performance assessment of the Board of Directors is prepared using an integrated performance measurement method that translates the Company's Vision, Mission, and Strategy into a set of Strategic Objectives. The achievement of Strategic Objectives is measured in Key Performance Indicators both individually and collectively. The Board of Commissioners evaluated the procedure for evaluating the performance of the Board of Directors before being submitted to the Shareholders and discussed in the GMS forum.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA

Kriteria penilaian kinerja Direksi tahun 2024 berdasarkan pada kriteria yang berhubungan dengan pencapaian kinerja (Indikator Kinerja Utama)/*Key Performance Indicator* (KPI) dan hasil *assessment* GCG yang dilakukan pada saat RUPS Tahunan tentang Pertanggungjawaban Laporan PT PII.

1. Pencapaian kinerja (Indikator Kinerja Utama)/ *Key Performance Indicator* (KPI)
   KPI Direksi PT PII terdiri dari KPI kolegial dan Individual. KPI Kolegial Direksi merupakan indikator penilaian kinerja Direksi berdasarkan pada tugas bersama Direksi. KPI Individual/masing-masing Direksi merupakan turunan atau *cascading* dari KPI Kolegial dan diterapkan pada masing-masing Direksi yang disesuaikan dengan pembagian tugas masing-masing Direksi.
   a. Penilaian kinerja atau KPI kolegial Direksi

      Berikut aspek yang menjadi penilaian kinerja Direksi yang dimuat dalam KPI Direksi Kolegial tahun 2024:

      - *Margin* laba bersih
      - Jumlah penerbitan Penjaminan atas *small scale* KPBU
      - Kenaikan nilai investasi proyek yang dapat dihasilkan melalui penjaminan

The criteria for evaluating the Board of Directors' performance in 2024 are based on criteria related to performance achievement (Key Performance Indicators (KPI)) and the GCG assessment result at the Annual GMS regarding IIGF's Accountability Report.

1. Key Performance Indicators (KPI) achievement
   The KPIs of IIGF's Board of Directors consist of collective KPIs and individual KPIs. The Collective KPI of the Board of Directors is an indicator of the performance assessment of the Board of Directors based on the joint duties of the Board of Directors. Individual KPIs of the Board of Directors is derived or cascaded from Collective KPIs and is applied to each Board of Directors in accordance with the segregation of duties of each Board of Directors.
   a. Collective performance assessment/KPIs of the Board of Directors
      The following aspects of the Board of Directors' performance assessment are contained in the Collective KPIs of the Board of Directors in 2024:
      - Net profit margin
      - PPP small scale Guarantee issuance
      - Increase in project investment value generated via guarantees

- Pemberian dukungan terhadap proyek KPBU yang telah dijamin untuk mencapai *financial close*
- Implementasi standar ESG dalam proses bisnis penjaminan PT PII
- Jumlah proyek yang diselesaikan *appraisal*
- Penyelesaian hasil keluaran penugasan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi secara efektif
- Pencapaian tingkat pemahaman PJPK dan *stakeholders* lainnya yang baik
- *Rating* perusahaan *sovereign*
- Peningkatan kapasitas mengenai *creative financing* infrastruktur dengan melibatkan unit *vertical* Kementerian Keuangan
- Kegiatan *joint program* yang melibatkan BUMN/ Lembaga di bawah Kementerian Keuangan
- Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko korporasi
- Tata kelola perusahaan yang baik (GCG *score*)
- Tingkat pengendalian risiko klaim atas penjaminan proyek
- Peningkatan indeks *engagement* karyawan yang optimal
- Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM melalui sertifikasi CP3P (level lanjutan)

2. Penilaian kinerja individu masing-masing anggota Direksi
   Berikut aspek yang menjadi penilaian kinerja Direksi yang dimuat dalam KPI Direksi individu tahun 2024:

- Providing support for PPP secured projects to reach financial close
- ESG standards implementation in IIGF's assurance business process
- Number of projects that completed appraisal
- Effective completion of Project Development Facility
- Achieving a good level of GCA's and other stakeholders' understanding
- Sovereign Company Rating
- Capacity building on creative financing infrastructure involving vertical units of the Ministry of Finance
- Joint program involving all SOEs/Institutions under the Ministry of Finance
- Level of maturity in corporate risk management
- Good corporate governance (GCG score)
- Risk control level of claims on project guarantees
- Optimal employee engagement index improvement
- Increased HR Capacity and Capability through CP3P (advanced) certification

2. Individual performance assessment of each member of the Board of Directors
   The following aspects of the Board of Directors' performance assessment are contained in the individual KPIs of the Board of Directors in 2024:

Keterangan Description	Direktur Utama President Director	Direktur Bisnis Business Director	Direktur Keuangan Finance Director
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	✔	✔	✔
Jumlah proyek yang diselesaikan *appraisal* Number of projects that completed appraisal	✔	✔	✔
Pencapaian tingkat pemahaman PJPK dan *stakeholders* lainnya yang baik Achieving a good level of GCA's and other stakeholders' understanding	✔	✔	✔
Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko korporasi Level of maturity in the corporate risk management	✔	✔	✔
Pencapaian Indeks *Engagement* karyawan yang optimal Achieving optimal employee engagement index	✔	✔	✔
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM melalui sertifikasi CP3P (level lanjutan) Increased HR Capacity and Capability through CP3P (advanced) certification	✔	✔	✔
Jumlah penerbitan Penjaminan atas *small scale* KPBU PPP small scale Guarantee issuance	-	✔	-
Kenaikan nilai investasi proyek yang dapat dihasilkan melalui penjaminan Increase in project investment value generated via guarantees	✔	✔	✔

Keterangan Description	Direktur Utama President Director	Direktur Bisnis Business Director	Direktur Keuangan Finance Director
Pemberian dukungan terhadap proyek yang telah dijamin untuk mencapai *financial close* Providing support for secured projects to reach financial close	-	-	✔
Tingkat pengendalian risiko klaim atas penjaminan proyek Risk control level of claims on project guarantees	-	-	✔
Tingkat capaian pendapatan pengelolaan dana Income from fund management achievement	-	-	✔
Penyelesaian Hasil Keluaran penugasan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi secara efektif Effective completion of Project Development Facility	✔	-	-
Peningkatan Kapasitas mengenai *creative financing* infrastruktur dengan melibatkan unit vertical Kementerian Keuangan Capacity Building on creative financing infrastructure involving vertical units of the Ministry of Finance	-	✔	-
Kegiatan program dan/atau kerjasama dengan lembaga multilateral/bilateral/internasional/lembaga pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan bisnis penjaminan PT PII Program activities and/or cooperation with multilateral/bilateral/international institutions/financing institutions to support the IIGF's guarantee business	-	✔	-
Kegiatan *joint program* yang melibatkan BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan Joint program involving all SOEs/Institutions under the Ministry of Finance	✔	-	-
Reputasi PT PII IIGF's reputation	✔	-	-
Rating perusahaan *sovereign* Sovereign Company Rating	-	-	✔
Tata kelola perusahaan yang baik (GCG *score*) Good corporate governance (GCG score)	✔	-	-
Implementasi standar ESG dalam proses bisnis penjaminan PT PII ESG standards implementation in IIGF's assurance business process	-	✔	-
Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal terkait Direktorat Utama Completion of follow-up of internal and external audit results of the Main Directorate	✔	-	-
Penyelesaian tindak lanjut sesuai arahan Komisaris terkait Direktorat Utama Completion of follow-up as directed by the Commissioner of the Main Directorate	✔	-	-
Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal terkait Direktorat Bisnis Completion of follow-up of internal and external audit results of the Business Directorate	-	✔	-
Penyelesaian tindak lanjut sesuai arahan Komisaris terkait Direktorat Bisnis Completion of follow-up as directed by the Commissioner of the Business Directorate	-	✔	-
Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal terkait Direktorat Keuangan Completion of follow-up of internal and external audit results of the Finance Directorate	-	-	✔

Keterangan Description	Direktur Utama President Director	Direktur Bisnis Business Director	Direktur Keuangan Finance Director
Penyelesaian tindak lanjut sesuai arahan Komisaris Direktorat Keuangan Completion of follow-up as directed by the Commissioner of the Directorate of Finance	-	-	✔

Keterangan
✔ : termasuk kriteria penilaian
- : tidak termasuk kriteria penilaian

Description
✔ : included in the assessment criteria
- : not included in the assessment criteria

2. Penilaian kinerja hasil *assessment* GCG Aspek Direksi

Penilaian kinerja GCG tahun buku 2024 di Perseroan menggunakan kriteria standar alat uji yang ada di Keputusan Menteri Keuangan No. 505/KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

Aspek Direksi sebagai berikut:

- Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.
- Direksi melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas
- Direksi menyusun perencanaan perusahaan.
- Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.
- Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.
- Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.
- Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan *stakeholders*.
- Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.
- Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu.
- Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Direksi menyelenggarakan pengawasan internal.

2. GCG Performance Assessment of the Board of Directors

The GCG performance assessment for the 2024 fiscal year in the Company uses the test tool standard criteria in the Decree of the Minister of Finance No. 505/KMK.06/2020 on the Guidelines for Assessment and Evaluation of the Good Corporate Governance in the Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance.

Aspects of the Board of Directors are as follows:

- The Board of Directors carries out training/learning programs continuously.
- The Board of Directors has a clear segregation of duties, authorities, and responsibilities
- The Directors compile the Company's plans.
- The Board of Directors has a role in meeting the Company's performance targets.
- The Board of Directors exercises operational and financial control over the Company's plans and policies.
- The Board of Directors carries out the Company's management in accordance with the prevailing laws and regulations and the Articles of Association.
- The Board of Directors establishes relationship that adds value to the Company and stakeholders.
- The Board of Directors monitors and manages the potential conflict of interests of members of the Board of Directors and management under the Board of Directors.
- The Board of Directors ensures that the Company carries out information and communication disclosure in accordance with the prevailing laws and regulations and timely delivery of information to the Board of Commissioners and shareholders.
- The Board of Directors organizes internal meetings and attends the Board of Commissioners' meetings in accordance with statutory provisions.
- The Board of Directors organizes internal supervision.

- Direksi menyelenggarakan fungsi kesekretariatan perusahaan
- Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- The Board of Directors implements the secretarial function of the company
- The Board of Directors holds an Annual GMS and other GMS in accordance with statutory regulations.

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE ASSESSMENT RESULT

Berikut hasil penilaian kinerja Direksi tahun 2024:

The following is the performance evaluation of the Board of Directors in 2024:

Penilaian Kinerja Kolegial Collective Performance Assessment	Penilaian Kinerja Hasil *Assessment* GCG GCG Assessment Performance Assessment
103,02% dari target 100% 103.02% of the target 100%	92,389% (Sangat Baik) dari Target 88,00% (Sangat Baik) 92.389% (Very Good) of the target 88.00% (Very Good)

Adapun hasil penilaian kinerja Direksi secara individual adalah sebagai berikut:

The results of the performance assessment of the Board of Directors individually are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Skor Pencapaian KPI KPI Achievement Score
M. Wahid Sutopo	Direktur Utama President Director	107,81% dari target 100% 107.81% of the target 100%
Andre Permana	Direktur Bisnis Business Director	103,68% dari target 100% 103.68% of the target 100%
Donny Hamdani	Direktur Keuangan Finance Director	107,68% dari target 100% 107.68% of the target 100%

Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Direksi secara individual menjadi bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Direksi.

The result of the evaluation on the Board of Directors' collective performance and individual performance of each Member of the Board of Directors which is an integral part of the compensation scheme and provision of incentives for the Members of the Board of Directors.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
PERFORMANCE ASSESSMENT FOR COMMITTEE REPORTING DIRECTLY TO BOARD OF COMMISSIONERS

Hingga 31 Desember 2024, Komite di bawah Dewan Komisaris PT PII terdiri dari Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Secara berkala Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi atas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Kriteria Penilaian Komite dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan masing-masing Komite. Adapun dasar penilaian kinerja Komite mencakup:

As of 31 December 2024, the Committees under the Board of Commissioners of IIGF consisted of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee. The Board of Commissioners regularly supervises and evaluates the performance of the Committees reporting directly to the Board of Commissioners.

The Assessment Criteria of the Committees are based on the realization and completion of the work program stated in the Committees' Work Program and Budget, and reported to the Board of Commissioners in the Committees' report. The basis of the Committees' performance assessment includes:

1. Realisasi laporan pelaksanaan tugas Komite sesuai program kerja Komite dan piagam Komite
2. Frekuensi rapat yang dilakukan Komite sehingga dapat membantu fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris.
3. Tingkat kehadiran Komite

1. The realization of the report on the Committee's duties in accordance with the Committee's work program and charter
2. Frequency of meetings conducted by the Committee to assist the supervisory and advisory functions of the Board of Commissioners.
3. Attendance of the Committee

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Komite Audit dibentuk untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perseroan sesuai dengan prinsip GCG. Untuk periode tahun buku 2024, Komite Audit Perseroan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Piagam Komite Audit. Pelaksanaan kinerja Komite Audit juga diukur dari tingkat kehadirannya dalam rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Komite Audit Perseroan telah melaksanakan rapat khusus Komite Audit sebanyak 23 kali serta telah melaksanakan sejumlah kegiatan sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dirinci lebih lanjut di bagian pembahasan Komite Audit pada bab ini dari Laporan Tahunan ini.

The Audit Committee was established to strengthen the Board of Commissioners' supervisory function on the Company's management in accordance with GCG principles. For the 2024 fiscal year, the Company's Audit Committee implemented its duties and responsibilities in accordance with the prevailing laws and regulations and the Audit Committee Charter. The Audit Committee is also assessed by its attendance at the Board of Commissioners meetings, and joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Company's Audit Committee held special meetings of the Audit Committee 23 times and organized several activities as its duties and responsibilities, as further detailed in the section of the Audit Committee in this chapter of this Annual Report.

KOMITE PEMANTAU RISIKO
RISK MONITORING COMMITTEE

Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris meningkatkan kualitas pengawasan melalui pemberian nasihat profesional kepada Dewan Komisaris terkait pengelolaan *Enterprise Risk Management* (ERM). Untuk periode tahun buku 2024, Komite Pemantau Risiko Perseroan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Piagam Komite Pemantau Risiko. Pelaksanaan kinerja Komite Pemantau Risiko juga diukur dari tingkat kehadirannya dalam rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Komite Pemantau Risiko Perseroan telah melaksanakan rapat khusus Komite Pemantau Risiko sebanyak 21 kali serta telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugasnya sebagaimana dirinci di bagian pembahasan Komite Pemantau Risiko pada bab ini dari Laporan Tahunan ini.

The Risk Monitoring Committee was established with the objective of assisting the Board of Commissioners to enhance the quality of its supervision by providing professional advice to the Board of Commissioners on Enterprise Risk Management (ERM). For the 2024 fiscal year, the Company's Risk Monitoring Committee implemented its duties and responsibilities in accordance with the prevailing laws and regulations and the Risk Monitoring Committee Charter. The performance of the Risk Monitoring Committee is also assessed by its attendance at the Board of Commissioners meetings, and joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Company's Risk Monitoring Committee held 21 meetings specific to the Risk Monitoring Committee, and implemented several activities as its duties and responsibilities, as further detailed in the section of the Risk Monitoring Committee in this chapter of this Annual Report.

HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
WORKING RELATIONSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Dalam rangka terciptanya hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi yang terintegrasi, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan adanya persamaan persepsi dan komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan dan menyepakati prinsip dasar dalam hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang diatur dalam *Board Manual* Bagian IV Tata Hubungan Kerja Antar Organ Perseroan.

Pedoman tersebut mengatur antara lain:

1. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
2. Rapat Umum Pemegang Saham
3. Respon atas Peluang Bisnis dan Isu Terkini
4. Perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai Auditor Eksternal
6. Penambahan Penyertaan Modal Negara
7. Program Pengenalan Perseroan
8. Program Pelatihan Dewan Komisaris dan Direksi
9. Perjalanan Dinas Luar Negeri
10. Tata Komunikasi dan Korespondensi antara Direksi dan Dewan Komisaris
11. Penetapan Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi
12. Etika Berusaha

The Board of Commissioners and the Board of Directors need to have a common perception and communication to create an integrated, sustainable, and accountable working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors. Therefore, the Board of Commissioners and the Board of Directors establish and agree on the basic principles in the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors, as stipulated in the Board Manual Section IV Working Relationship between the Company's Organs.

The Manual regulates, among others:

1. Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors
2. General Meeting of Shareholders
3. Responses to Business Opportunities and Current Issues
4. Actions of the Board of Directors Requiring Approval of the Board of Commissioners or the GMS
5. Appointment of Public Accounting Firm (KAP) as External Auditor
6. Additional State Capital Participation
7. Company Introduction Program
8. Training Program of the Board of Commissioners and Board of Directors
9. International Business Trip
10. Communication and Correspondence between the Board of Directors and the Board of Commissioners
11. Remuneration Establishment of the Board of Commissioners and Board of Directors
12. Business Ethics

INFORMASI KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
DIVERSITY OF THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Untuk memperoleh masukan dan pandangan yang lebih komprehensif dalam rangka pengambilan keputusan yang objektif dan optimal, maka Perseroan memiliki ketentuan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Tidak hanya memperkaya sudut pandang, keberagaman komposisi Dewan Komisaris maupun Direksi diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi aspek operasional serta memajukan usaha Perseroan, dan meningkatkan kualitas Tata Kelola Perusahaan.

The Company has provisions for diversity in the composition of the Board of Commissioners and Directors to obtain more comprehensive input and perspective to make objective and optimal decisions. Not only enriching perspectives, the diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors shall provide added value to the operational aspects, advance the Company's business, and improve Corporate Governance quality.

Penentuan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mempertimbangkan aspek keberagaman keahlian, kompetensi, pengetahuan, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tercermin pada tabel di bawah ini:

The establishment of the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors considered the diversity in expertise, competence, knowledge, educational background, and work experience, as required in the implementation of the duties and authorities of each member of the Board of Commissioners and Board of Directors.

The diversity of the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is depicted in the table below:

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2024

THE DIVERSITY OF THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2024

Jabatan Position	Terdapat 3 (tiga) orang Komisaris yaitu yang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 2 (dua) anggota Komisaris	There are three (3) Commissioners, i.e., one (1) President Commissioner and two (2) Commissioners
Usia Age	Keberagaman usia anggota Dewan Komisaris pada rentang usia yang cukup produktif, yaitu 50 tahun – 62 tahun.	The members of the Board of Commissioners are in a fairly productive age range, i.e., 50-62 years.
Pendidikan Education	Jenjang pendidikan anggota Dewan Komisaris meliputi tingkat Sarjana, Magister dan Doktor dengan berbagai bidang pendidikan seperti Hukum, Manajemen Keuangan, Ekonomi Moneter, dan Akuntansi.	The education level of members of the Board of Commissioners includes Bachelor's, Master's, and Doctorate, with various fields of education, such as Law, Financial Management, Monetary Economics, and Accounting.
Pengalaman Kerja Work Experience	Pengalaman kerja yang beragam, antara lain Pejabat dan/atau Senior Eksekutif atau posisi penting lainnya pada di Bidang Keuangan, Perbankan, Telekomunikasi, Pembiayaan Infrastruktur, Transportasi, Administrasi, Akuntansi, Manajemen Risiko, dan Hukum.	Diverse work experience, including Officer and/or Senior Executive or other key positions in Finance, Administration, Telecommunication, Infrastructure Financing, Transportation, Administration, Accounting, Risk Management, and Law.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI TAHUN 2024

THE DIVERSITY OF THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

Jabatan Position	Terdapat 3 (tiga) orang Direksi yaitu Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Direktur Bisnis	There are three (3) Directors, i.e., President Director, Finance Director, and Business Director.
Usia Age	Keberagaman usia anggota Direksi pada rentang usia yang produktif, yaitu 46 tahun – 55 tahun.	The members of the Board of Directors are in a fairly productive age range, i.e., 46-55 years.
Pendidikan Education	Jenjang pendidikan anggota Direksi meliputi tingkat Sarjana, Magister dan doktor dengan berbagai bidang pendidikan seperti Manajemen, Akuntansi, Manajemen Risiko, Project Finance, Teknik Elektro, Teknik Sipil, Teknik bidang Manajemen Proyek	The education level of the Board of Directors includes Bachelor's, Master's, and Doctorate in various sectors, such as Management, Accounting, Risk Management, Project Finance, Electrical Engineering, Civil Engineering, and Project Management Engineering.
Pengalaman Kerja Work Experience	Pengalaman kerja yang beragam, antara lain Direksi, Pejabat dan/atau Senior Eksekutif atau posisi penting lainnya pada di Bidang Keuangan, Akuntansi, Business Development, Risk & Compliance dan Audit.	Diverse work experience, including Directors and/or Senior Executives or other key positions in Finance, Accounting, Business Development, Risk & Compliance, and Audit.

NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

NOMINASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

NOMINATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Kebijakan terkait nominasi dan pemilihan anggota Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada PMK No. 197/2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan dan PMK No. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.06/2017 ("PMK 78/2015").

Kriteria bakal calon anggota Dewan Komisaris, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat umum:
   Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Syarat Khusus:
   a. Sehat jasmani dan rohani;
   b. Memiliki integritas dan moral yang baik;
   c. Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi;
   d. Memahami masalah-masalah manajemen Perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
   e. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan; dan
   f. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
3. Syarat Lain:
   a. Bukan anggota partai politik, pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
   b. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
   c. Telah tidak menjabat sebagai anggota Direksi Persero yang bersangkutan, paling kurang 1 (satu) tahun;

Policies related to the nomination and selection of members of the Board of Commissioners and Board of Directors refer to PMK No. 197/2019 on the Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners of a Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance, and PMK No. 78/PMK.06/2015 on Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of a Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance, as amended several times, lastly by the Minister of Finance Regulation No. 135/PMK.06/2017 ("PMK 78/2015").

The criteria for candidates of the Board of Commissioners are as follows:

1. General requirements:
   Individuals who are capable of performing legal actions.
2. Specific requirements:
   a. Physically and mentally healthy;
   b. Have integrity and good morals;
   c. Have a strong will and high dedication;
   d. Understand the Company's management issues relating to one of the management functions;
   e. Have adequate knowledge of the Company's sector; and
   f. Can provide sufficient time to carry out his/her duties.
3. Other requirements:
   a. Shall not be a party official, member of legislative, and/or shall not be on a process of nomination for a legislative candidate;
   b. Shall not be a head/deputy head of a region and/or shall not be running for candidate of head/deputy head of a region;
   c. Shall not serve as a member of the Board of Directors of the Company concerned, at least one (1) year;

d. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris; dan
e. Tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada Persero yang bersangkutan selama 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

Kriteria bakal calon anggota Direksi, yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;
2. Memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan Perseroan;
3. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan Perseroan;
4. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai di bidang yang akan menjadi tanggung jawabnya;
5. Memiliki *leadership* yang baik;
6. Reputasi yang baik selama yang bersangkutan mengemban tugas-tugas sebelumnya;
7. Memiliki integritas dan moral yang baik;
8. Cakap melakukan perbuatan hukum;
9. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris/Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan; dan
10. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan.

Persyaratan lain untuk dapat dipilih sebagai anggota Direksi, yaitu:
1. bukan pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
2. bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
3. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada instansi/Lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah, anggota Dewan Komisaris/Pengawas pada BUMN, anggota Direksi pada BUMN dan/atau perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi;

d. Not currently holding a position, that, based on statutory regulations is prohibited to be concurrent with the position of a member of the Board of Commissioners, unless signing a statement letter of willing to resign from the position if elected as a member of the Board of Commissioners; and
e. Shall not serve as member of Board of Commissioners on said Company for two (2) consecutive service period.

The criteria for candidates of the Board of Directors are as follows:
1. Have an understanding of management and corporate governance;
2. Have the ability to formulate and implement strategic policies in developing the Company;
3. Have the ability to develop the Company;
4. Have adequate expertise and knowledge in the field that will be his/her responsibility;
5. Have good leadership;
6. Have good reputation during his/her previous assignments;
7. Have integrity and good morals;
8. Is capable of taking legal action;
9. Have never been declared bankrupt or become a member of the Board of Commissioners/Directors who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt within five (5) years before the nomination; and
10. Have never been punished for committing a crime which is detrimental to the state's finances and/or those related to financial sector within five (5) years before the nomination.

Other requirements to be elected as a member of the Board of Directors:
1. shall not be a party official, member of legislative, and/or shall not be on a process of nomination for a legislative candidate;
2. shall not be a head/deputy head of a region and/or shall not be running for candidate of head/deputy head of a region;
3. not currently serving as an official at central and/or local government agencies/institutions, member of the Board of Commissioners/Supervisory Board at SOEs, member of the Board of Directors at SOEs and/or companies, unless signing a statement letter of willing to resign from the position if elected as a member of the Board of Directors;

4. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi; atau
5. tidak menjabat sebagai Anggota Direksi pada Perseroan selama 2 (dua) periode berturut-turut.

4. not currently holding a position, that, based on statutory regulations is prohibited to be concurrent with the position of a member of the Board of Directors unless signing a statement letter of willing to resign from the position if elected as a member of the Board of Directors; or
5. shall not serve as member of Directors on the Company for two (2) periods consecutively.

TAHAPAN DAN PROSEDUR NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

STAGES AND PROCEDURES FOR NOMINATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Berikut tahapan nominasi hingga pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

The following are the stages of nomination up to the appointment of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors:

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Penyampaian pemberitahuan Dewan Komisaris kepada DJKN mengenai anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan masa jabatan yang segera habis/selesai.
Notification submission of the Board of Commissioners to DJKN regarding members of the Board of Commissioners and Board of Directors whose term of office will soon expire.

→

DJKN
DJKN

DJKN melakukan Penjaringan Bakal Calon Dewan Komisaris* dan Direksi**
DJKN conducts Selection of Prospective Candidates for the Board of Commissioners* and Board of Directors**

→

TIM UKK
UKK TEAM

Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Kementerian Keuangan melakukan penilaian administratif dan wawancara kepada Calon Dewan Komisaris dan Direksi
The Fit and Proper Test Team (UKK) of the Ministry of Finance conducts administrative assessment and interview to the candidates of the Board of Commissioners and Board of Directors

→

TIM UKK
UKK TEAM

Hasil penilaian oleh Tim UKK dilaporkan kepada DJKN untuk kemudian disampaikan kepada Menteri melalui Wakil Menteri dengan mekanisme RUPS.
UKK's assessment results are reported to DJKN and then submitted to the Minister through the Deputy Minister via the GMS mechanism.

→

RUPS
GMS

Proses Persetujuan Calon Dewan Komisaris dan Direksi oleh Menteri selaku RUPS melalui Wakil Menteri.
Approval Process of the Candidates of the Board of Commissioners and Directors by the Minister as GMS via the Deputy Minister

→

RUPS
GMS

Penetapan dan Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi oleh Menteri selaku RUPS.
Determination and Appointment of the Board of Commissioners and Directors by the Minister as the GMS.

* Pelaksanaan tahapan penjaringan Bakal Calon ditujukan untuk memperoleh Bakal Calon Dewan Komisaris. Bakal Calon Dewan Komisaris Perseroan diseleksi dari:
1. Mantan Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
3. Pejabat Struktural Pemerintah;
4. Pejabat Fungsional Pemerintah; atau
5. Orang perseorangan lain yang dianggap cakap untuk menjadi anggota Dewan Komisaris.

Untuk Bakal Calon Dewan Komisaris yang berasal dari pejabat struktural dan pejabat fungsional Kementerian Keuangan, mereka ditetapkan sesuai keputusan Menteri dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim Pertimbangan Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara dan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum (TPKOMWAS).

* The Candidate selection stage has the objective to obtain Candidates for the Board of Commissioners. Candidates for the Company's Board of Commissioners are selected from:
1. Former Directors of SOEs;
2. Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs;
3. Government Structural Officials;
4. Government Functional Officers; or
5. Other individuals who are considered capable of becoming members of the Board of Commissioners.

For Candidates of the Board of Commissioners who come from structural officers and functional officials of the Ministry of Finance, they are set forth in accordance with the Minister's decree by taking into account recommendations from the Advisory Team for the Board of Commissioners at State-Owned Enterprises and the Supervisory Board at Public Service Agency (TPKOMWAS).

** Pelaksanaan tahapan penjaringan Bakal Calon ditujukan untuk memperoleh Bakal Calon Direksi. Bakal Calon Direksi Perseroan diseleksi dari:

1. Internal Perseroan, terdiri atas anggota Direksi; dan/atau pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa.
2. Eksternal Perseroan, dalam hal:
   a. Dewan Komisaris tidak menyampaikan usulan bakal calon yang berasal dari internal kepada DJKN.
   b. Dari hasil penilaian akhir oleh Tim UKK terhadap Bakal Calon dari internal Perseroan tidak diperoleh calon yang memenuhi kualifikasi.

** The Candidate selection stage has the objective to obtain Candidates for the Board of Directors. Candidates for the Company's Board of Directors are selected from:

1. Company's internal, consisting of members of the Board of Directors; and/or officers one level below the Board of Directors or officers with special achievements.
2. Company's external, in the event that:
   a. The Board of Commissioners does not submit proposals for internal candidates to the DJKN.
   b. The final assessment by the UKK Team of the Candidates from the Company's internal did not result in candidates who meet the qualifications.

REMUNERASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

RENOMINATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengacu pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sementara itu, besaran gaji dan tunjangan Direksi dirumuskan dan diajukan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS untuk dimintakan persetujuannya.

Kewenangan tersebut dapat diberikan kepada Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 96 ayat 2 UU No. 40 tahun 2007 sedangkan petunjuk teknis tentang kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 200/PMK.06/2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan ("PMK 200/2018").

The remuneration policy of the Board of Commissioners and Directors of the Company refers to Article 96 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. Meanwhile, the salary and allowances for the Board of Directors are formulated and submitted for approval by the Board of Commissioners to the GMS.

This authority can be granted to the Board of Commissioners based on Article 96 paragraph 2 of Law No. 40 of 2007, while the technical guidelines on the remuneration policy of the Board of Commissioners and Board of Directors are further regulated in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 200/PMK.06/2018 on the Procedures for Determining the Income of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance ("PMK 200/2018").

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Determination Procedure for the Board of Commissioners and Board of Directors

Direksi
Board of Directors

Direksi mengajukan usulan remunerasi Direksi kepada Dewan Komisaris beserta kajiannya.
The Board of Directors submits proposals and their studies for the remuneration of the Board of Directors to the Board of Commissioners.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

- Melakukan kajian terkait dengan penetapan remunerasi. Kajian ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan dari pihak independen.
- Mempelajari usulan dari Direksi dan pihak independen (jika ada) untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS
- Conducting studies related to the determination of remuneration. The study can be carried out by requesting assistance from an independent party.
- Reviewing the proposals from the Board of Directors and independent parties (if any) to be submitted to the GMS

RUPS
GMS

- Melakukan kajian terhadap usulan dari Dewan Komisaris.
- Memberikan persetujuan dan menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- Reviewing the proposals from the Board of Commissioners.
- Granting and determining remuneration for the Board of Commissioners and Directors.

INDIKATOR UNTUK PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BOARD OF COMMISSIONERS' AND BOARD OF DIRECTORS' INDICATORS FOR DETERMINING REMUNERATION

Perseroan berpedoman pada keputusan dari RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perseroan yang mencakup aspek-aspek berikut ini:

1. Penghasilan tahun sebelumnya.
2. Tingkat inflasi.
3. Kinerja operasi dan keuangan Perseroan serta pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI).
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, termasuk pertimbangan atas sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.
5. Kewajaran dengan *peer* perusahaan lainnya.
6. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Company refers to GMS Resolution by taking into account the results of the study conducted by the Company which includes the following aspects:

1. Previous year's income.
2. Inflation rate.
3. The Company's operating and financial performance and the Key Performance Indicator's (KPI) achievement.
4. The Company's financial condition and capability, including consideration of the Company's long-term goals and strategies.
5. Fairness with other peer companies.
6. Prevailing laws regulations.

STRUKTUR DAN KOMPONEN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

STRUCTURE AND COMPONENTS OF REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Pemberian remunerasi kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2024 telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024 dalam agenda penetapan keputusan gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 serta pembayaran Tantiem berdasarkan kinerja Tahun Buku 2023 juncto Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor KMK-177/KM.6/2024 tentang Persetujuan Pembayaran Tantiem Tahun Buku 2023 dan Penetapan Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris, Tunjangan, dan Fasilitas yang Diberikan Kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 ("KMK 177/2024"), dengan struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari:

The provision of remuneration to each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors for 2024 has been implemented based on the Annual General Meeting of Shareholders Resolution for the 2023 Fiscal Year held on 21 May 2024 with the agenda of determining the salary/honorarium and allowances/facilities of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2024 Fiscal Year, as well as the payment of Tantiem based on the performance of the 2023 Fiscal Year in conjunction with the Resolution of the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia No. KMK-177/KM.6/2024 on the Approval of Tantiem Payment for 2023 Fiscal Year and Determination of the Board of Directors' Salary, Board of Commissioners' Honorarium, Allowances, and Facilities Provided to the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 Fiscal Year ("KMK 177/2024"), with the remuneration structure of the Board of Commissioners and Board of Directors consisting of:

Keterangan Description	Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners' Remuneration Structure	Struktur Remunerasi Direksi Board of Directors' Remuneration Structure
Struktur Remunerasi Jangka Pendek Short-Term Remuneration Structure	• Honorarium • Tunjangan • Fasilitas Tantiem/Insentif Kinerja • Penghasilan Lainnya • Honorarium • Allowances • Tantiem/Performance Incentives • Other Income	• Gaji dan/atau Honorarium • Tunjangan • Fasilitas Tantiem/Insentif Kinerja • Penghasilan Lainnya • Salary and/or Honorarium • Allowances • Tantiem/Performance Incentives • Other Income
Struktur Remunerasi Jangka Panjang Long-Term Remuneration Structure	Hingga akhir tahun 2024, Perseroan belum menerapkan Remunerasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan jangka Panjang untuk Dewan Komisaris As of the end of 2024, the Company has not implemented Remuneration that takes into account the Company's long-term performance for the Board of Commissioners	Hingga akhir tahun 2024, Perseroan belum menerapkan Remunerasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan jangka panjang untuk Direksi As of the end of 2024, the Company has not implemented Remuneration that takes into account the Company's long-term performance for the Board of Directors

Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2024
Remuneration Component of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2024

Komponen Remunerasi & Fasilitas Lain Remuneration Component & Other Facilities	Jumlah diterima dalam 1 (Satu) Tahun (dalam ribuan Rupiah) Amount received in One (1) Year (in thousand Rupiah)	
	2024	2023
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Total Remuneration of the Board of Commissioners	9.794.519	8.609.071
Jumlah Remunerasi Direksi Board of Directors' Total Remuneration	22.976.952	19.381.195
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi **Total Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors**	**32.771.471**	**27.990.266**

Sesuai dengan KMK 177/2024, komponen gaji anggota Direksi lainnya adalah sebesar 90% dari gaji Direktur Utama dan honorarium Komisaris Utama adalah sebesar 45% dari gaji Direktur Utama. Sedangkan honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama.

In accordance with KMK 177/2024, the salary component of other members of the Board of Directors is 90% of the President Director's salary, and the honorarium of the President Commissioner is 45% of the President Director's salary. The honorarium for members of the Board of Commissioners is set forth at 90% of the Honorarium of the President Commissioner.

BONUS NON KINERJA DAN OPSI SAHAM
NON-PERFORMANCE BONUS AND STOCK OPTIONS

Sampai dengan periode laporan, tidak terdapat Bonus Non Kinerja dan penawaran Opsi Saham yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi di PT PII.

As of the reporting period, there is no Non-Performance Bonus and Stock Options offered to the members of IIGF's Board of Commissioners and Board of Directors.

KOMITE DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' COMMITTEE

Hingga akhir tahun 2024, Organ Pendukung Dewan Komisaris PT PII terdiri dari:
1. Komite Audit
2. Komite Lainnya yaitu Komite Pemantau Risiko.

Organ pendukung Dewan Komisaris PT PII telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 88/PMK.06/2015 pasal 28.

As of the end of 2024, the supporting organs of the IIGF's Board of Commissioners consist of:
1. Audit Committee
2. Other Committee, i.e., Risk Monitoring Committee.

The supporting organs of the IIGF's Board of Commissioners are in accordance with the provisions as governed in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 88/PMK.06/2015 Article 28.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Perseroan telah menunjuk Sekretaris Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain. Saat ini, Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Sdr. Muhammad Nahdi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/KOM/PII/08/2019 dan diperpanjang masa tugasnya melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-04/KOM/PII/08/2022. Sekretaris Dewan Komisaris mengemban tugas pokok untuk memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait kegiatan pengelolaan Perseroan. Berikut Profil Sekretaris Dewan Komisaris PT PII:

The Company has appointed a Secretary of the Board of Commissioners who functions as a liaison between the Board of Commissioners and other parties. Currently, the Secretary of the Board of Commissioners is Mr. Muhammad Nahdi, pursuant to the Decree of the Board of Commissioners No. KEP-03/KOM/PII/08/2019, and his term of office is extended pursuant to the Decree of the Board of Commissioners No. KEP-04/KOM/PII/08/2022. The Secretary of the Board of Commissioners has the main duty to provide administrative and secretarial support to the Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties and providing advice to the Board of Directors regarding the Company's management. The profile of IIGF's Secretary of the Board of Commissioners is as follows:

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
PROFILE OF SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS

Muhammad Nahdi

Sekretaris Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Secretary

Kewarganegaraan Nationality	: Indonesia	Indonesia
Usia Age	: 49 tahun per 31 Desember 2024	49 years old as of 31 December 2024
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	: Bandung, 20 Maret 1975	Bandung, 20 March 1975
Periode Jabatan Term of Office	: Period ke-2, dengan masa Jabatan 15 Agustus 2022 s.d 14 Agustus 2025	Second period, with tenure from 15 August 2022 up to 14 August 2025
Riwayat Pendidikan Educational Background	: Master (S2) of Commerce (Advanced) Program Majoring Applied Finance in Business, Economics and Law (BEL) Faculty, University of Queensland, Brisbane, Australia (2006).	Master of Commerce (Advanced) Program Majoring in Applied Finance in Business, Economics, and Law (BEL) Faculty, University of Queensland, Brisbane, Australia (2006).
Riwayat Jabatan Career History	: Pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Penilaian di Kantor Wilayah DJKN Riau-Sumatra Barat-Kepulauan Riau, DJKN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Kepala Sub Direktorat Standardisasi Penilaian Bisnis dan Sumber Daya Alam di Direktorat Penilaian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	Served as Head of the Valuation Division at the Riau-West Sumatra-Riau Islands Office of DJKN, DJKN, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, and Head of Sub-Directorate of Business and Natural Resources Valuation Standardization at the Directorate of Valuation, Directorate General of State Assets Management, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	: Kepala Sub Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan II, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	Head of Sub Directorate of Separated State Assets II, Directorate of Separated State Assets, Directorate General of State Assets Management, Ministry of Finance

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
TASKS AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' SECRETARY

Secara garis besar, Sekretaris Dewan Komisaris bertugas untuk:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam membuat risalah rapat Dewan Komisaris;
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan rapat-rapat Dewan Komisaris;
3. Mengoordinasi tugas-tugas administratif, kesekretariatan dan protokoler Dewan Komisaris;
4. Mengoordinasi tindak lanjut atas permintaan dan/atau pengumpulan data/informasi dari dan/atau kepada pihak manajemen Perseroan dan eksternal yang tidak tercakup dalam tugas-tugas Komite, termasuk informasi mengenai peraturan dan ketentuan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
5. Mengoordinasi penyusunan rancangan anggaran dan menyampaikan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris;
6. Mengoordinasi penyusunan saran dan pendapat mengenai agenda dan materi Rapat Umum Pemegang Saham; dan
7. Mengoordinasi dan tindak lanjut atas tugas lain yang tidak tercakup dalam tugas-tugas Komite di bawah Dewan Komisaris.

Generally, the Secretary of the Board of Commissioners is responsible for:

1. Assisting the Board of Commissioners in preparing the minutes of the Board of Commissioners' meetings;
2. Coordinating the Board of Commissioners' meetings;
3. Coordinating the administrative, secretarial, and protocol duties of the Board of Commissioners;
4. Coordinating follow-up on requests and/or collection of data/information from and/or to the Company's management and external parties not covered by the duties of the Committee, including information on rules and regulations relevant to the Board of Commissioners' duties and responsibilities;
5. Coordinating the budget preparation and submitting the Annual Budget of the Board of Commissioners;
6. Coordinating the suggestions and opinions regarding the agenda and materials of the General Meeting of Shareholders; and
7. Coordinating and following up on other tasks not covered by the duties of the Committees under the Board of Commissioners.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' SECRETARY

Perseroan memberikan kesempatan Sekretaris Dewan Komisaris untuk mengikuti program peningkatan kompetensi guna meningkatkan wawasan dan pengetahuannya yang menunjang pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Komisaris agar senantiasa relevan dengan perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perseroan.

Berikut pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Dewan Komisaris tahun 2024:

The Company provides the opportunity for the Secretary of the Board of Commissioners to participate in competency development program to improve his/her insight and knowledge to support the duties of the Secretary of the Board of Commissioners, so that it is always relevant to the latest developments in the Company's business.

The Board of Commissioners' Secretary have attended the following training in 2024:

No.	Topik Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Time
1	*GRC Summit 2024 : Leadership For Sustainable Impact: GRC, ESG, and SDGs*	GRC Summit Committee	22 Agustus 2024 22 August 2024

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2024

REPORT ON THE DUTIES OF THE SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2024

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengacu pada Program Kerja Sekretaris Dewan Komisaris. Berikut realisasi program kerja Sekretaris Dewan Komisaris 2024:

In 2024, the Secretary of the Board of Commissioners has conducted activities as an implementation of his/her duties and responsibilities with reference to the Work Program of the Secretary of the Board of Commissioners. The work program realization of the Secretary of the Board of Commissioners in 2024 is as follows:

No.	Program Kerja Work Program	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
Aspek Pelaksanaan Implementation Aspect			
1	Penyusunan RKA Sesdekom Tahun 2025 Preparation of the Secretary of the Board of Commissioners 2025 Work Program & Budget (RKA)	Juli-September July-September	Rancangan RAB dan RKA disusun pada bulan Oktober 2024 dan telah disampaikan kepada Direksi. Usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris tahun 2025 telah disampaikan kepada RUPS dan ditetapkan saat RUPS Persetujuan RKAP tahun 2025. RAB and RKA drafts prepared in October 2024 and submitted to the Board of Directors. Proposed Performance Contract (IKU) of the Board of Commissioners for 2025 has been submitted to the GMS and stipulated during the GMS Approval of the 2025 WP&B
2	Penyiapan bahan RKA Dewan Komisaris Th 2025 Preparation of 2025 RKA for the Board of Commissioners	September	
3	Penyiapan bahan usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris Th 2025 Preparation of the proposed 2024 Performance Contract (IKU) of the Board of Commissioners	September	
4	Penelaahan atas usulan RKAP dan/atau RJPP PT PII Th 2025 Review of the proposed IIGF's WP&B and/or RJPP in 2025	Juli - September July-September	Dewan Komisaris telah memberikan reviu atas penelaahan Dekom terkait masukan atas konsep RKAP 2025 kepada Direksi melalui surat No. S-46/PII/DK/1024 tanggal 30 Oktober 2024 yang telah seluruhnya diakomodasi oleh Direksi. Dekom juga memberikan tanggapan atas RKAP 2025 kepada RUPS melalui surat no S-49/PII/DK/1124 tanggal 14 November 2024 The Board of Commissioners has reviewed the Board of Commissioners' input regarding the 2025 WP&B draft to the Board of Directors via Letter No. S-46/PII/DK/1024 tanggal 30 Oktober 2024, which has been fully accommodated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also provided feedback on the 2025 WP&B to the GMS via Letter No. S-49/PII/DK/1124 tanggal 14 November 2024.
5	Penyiapan bahan tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS atas rancangan RKAP dan atau RJPP Th 2024 Preparation of materials for the Board of Commissioners' responses to the GMS on the 2024 WP&B and/or RJPP draft	Desember	
Aspek Pengawasan Supervisory			
6	Pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris Internal meetings of the Board of Commissioners	Bulanan Monthly	Selama periode tahun 2024 telah dilaksanakan rapat rutin Dewan Komisaris sebanyak 15 kali In 2024, 15 meetings of the Board of Commissioners were held
7	Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi The Board of Commissioners meeting is implemented, by inviting the Board of Directors	Bulanan Monthly	Selama periode tahun 2024 telah dilaksanakan rapat rutin gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 16 kali In 2024, 16 joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors were held
8	Penelaahan atas kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya Review of quality and service policies and their implementation	Bulanan Monthly	Dilaksanakan setiap bulan saat pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Held monthly in the joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors

No.	Program Kerja Work Program	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
9	Evaluasi atas pelaksanaan RKAP Evaluation of the WP&B implementation	Semesteran Every six months	Dilaksanakan per semester dan laporan pelaksanaan pengawasan RKAP telah dikirim Dewan Komisaris kepada RUPS Held every six months, with the report of WP&B supervision sent by the Board of Commissioners to the GMS
10	Evaluasi atas kegiatan CSR CSR evaluation	Bulanan Monthly	Dilaksanakan setiap bulan saat pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Held monthly in the internal meetings of the Board of Commissioners and joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors
11	Pemantauan atas kegiatan IIGF Institute Monitoring IIGF Institute's activities	Bulanan Monthly	Dilaksanakan setiap bulan saat pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Held monthly in the internal meetings of the Board of Commissioners and joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors
12	Penelaahan terkait transaksi atau Tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/RUPS Review of transactions or actions within the scope of authority of the Board of Commissioners/GMS	Sesuai disposisi As per disposition	Dilaksanakan setiap bulan saat pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris Monthly during the internal meeting of the Board of Commissioners
13	*Monitoring* atas proyek yang telah dijamin Monitoring of projects that have been guaranteed	Sesuai disposisi As per disposition	Dilaksanakan setiap bulan saat pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Held monthly in the internal meetings of the Board of Commissioners and joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors
Aspek Pelaporan Reporting Aspect			
14	Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Preparation of report on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners	Triwulanan Quarterly	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dikirimkan ke RUPS per periode triwulan tahun 2024 Report on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners has been sent to the GMS quarterly in 2024
15	Penyusunan laporan pengawasan RKAP Preparation of WP&B monitoring report	Semesteran Every six months	Laporan pengawasan RKAP telah dikirimkan ke RUPS per periode semesteran WP&B monitoring report has been sent to the GMS quarterly
16	Penyusunan laporan realisasi IKU Preparation of IKU realization report	Triwulanan Quarterly	Laporan realisasi IKU telah dikirimkan ke RUPS per periode triwulanan IKU realisation report has been sent to the GMS quarterly
17	*Monitoring* atas proyek yang telah dijamin Monitoring of projects that have been guaranteed	Sesuai jadwal Divisi Project Monitoring As scheduled by the Project Monitoring Division	*Monitoring* atas proyek yang telah dijamin dilaksanakan setiap bulan saat pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Monitoring of projects that have been guaranteed is carried out monthly in the internal meetings of the Board of Commissioners and joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
18	Penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Dewan Komisaris Preparation of the Secretariat of the Board of Commissioners' report	Triwulanan Quarterly	Laporan kegiatan Sekretariat Dewan Komisaris dilaksanakan per triwulanan The report of the Secretariat of the Board of Commissioners is carried out quarterly

No.	Program Kerja Work Program	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
19	Penyampaian tanggapan atas Laporan Tahunan 2023 Submission of responses to the 2023 Annual Report	April	Tanggapan atas Laporan Tahunan 2023 disampaikan sesuai jadwal Responses to the 2023 Annual Report submitted as scheduled
Aspek Penerapan GCG GCG Implementation			
20	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2023 Monitoring the follow-up of the implementation of AOI GCG recommendations by BPKP in 2023	Semesteran Every six months	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2023 dilaksanakan per semester sepanjang tahun 2024. Seluruh AOI Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti sampai dengan Desember tahun 2024 Monitoring of the follow-up to the GCG AOI recommendations by BPKP in 2023 is carried out every six months in 2024. All AOIs of the Board of Commissioners have been followed up until December 2024.
21	Pelaksanaan penilaian penerapan GCG Tahun 2023 GCG assessment in 2023	Januari - Februari January - February	Penilaian penerapan GCG tahun 2023 oleh BPKP telah selesai dilaksanakan berdasarkan berita pelaksanaan penilaian penerapan GCG Tahun 2023 oleh BPKP acara *exit meeting assessment* atas penerapan GCG PT PII tahun 2023 dengan nilai skor keseluruhan adalah 90,829 The assessment of the 2023 GCG by BPKP has been completed based on the minutes of the GCG Implementation in 2023 by BPKP at the exit meeting assessment of IIGF's GCG implementation in 2023 with an overall score of 90.829.
22	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2023 Monitoring the follow-up of the implementation of AOI GCG recommendations by BPKP in 2023	Semesteran Every six months	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP tahun 2023 dilaksanakan sesuai jadwal Monitoring the follow-up of the implementation of AOI GCG recommendations by BPKP in 2023 is conducted as scheduled
23	Pengadaan Penilai GCG Tahun 2024 Procurement of GCG Assessor in 2024	November	Dilaksanakan sesuai jadwal Carried out as scheduled
24	Pembahasan draf *Annual Report* tahun 2023 Discussion of the 2023 Annual Report draft	Mei May	Draf *Annual Report* tahun 2023 dilaksanakan pembahasan bulan Mei 2024. The 2023 Annual Report draft was discussed in May 2024.
25	Peningkatan kompetensi Sesdekom dan Staf Sesdekom Competency improvement of the Secretary of the Board of Commissioners and staff of the Secretary of the Board of Commissioners	Sesuai jadwal As scheduled	Sepanjang tahun 2024, pelatihan dan seminar yang diikuti oleh Sekretaris Dewan Komisaris di dalam negeri dihadiri secara virtual In 2024, the Secretary of the Board of Commissioners attended domestic training virtually

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Tujuan Dewan Komisaris membentuk Komite Audit adalah untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, terutama untuk memastikan bahwa Perseroan dikelola secara efektif dan efisien oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, serta sesuai maksud dan tujuan pendirian Perseroan sehingga dapat diperoleh hasil dan manfaat yang berkelanjutan bagi pemegang saham maupun pemangku kepentingan lain Perseroan.

The Board of Commissioners established the Audit Committee with the objective of supporting the supervisory function of the Board of Commissioners, especially to ensure that the Company has been managed effectively and efficiently by the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association, as well as in accordance with the purpose and objectives of the Company's establishment to obtain sustainable results and benefits for the Company's shareholders and other stakeholders.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE AUDIT
APPOINTMENT AND DISMISSAL OF AUDIT COMMITTEE

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris. Pengangkatan anggota Komite Audit telah sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam piagam Komite Audit yaitu:

1. Memiliki integritas yang baik, kompetensi, dan pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan.
2. Mampu berkomunikasi secara efektif.
3. Anggota Komite Audit yang berasal dari luar Perseroan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat tiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
4. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa atestasi, jasa non-atestasi dan/atau jasa konsultansi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 bulan terakhir.
5. Bukan merupakan orang yang bekerja pada Perseroan dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 bulan terakhir.
6. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
7. Tidak mempunyai kepentingan dan hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagai anggota Komite Audit.

The appointment and dismissal of members of the Audit Committee are carried out by the Board of Commissioners. The appointment of members of the Audit Committee is in accordance with the requirements set forth in the Audit Committee Charter:

1. Shall have good integrity, competence, and sufficient work experience in the audit sector.
2. Shall be able to communicate effectively.
3. Members of the Audit Committee who are from the Company's external party are prohibited from having relationship (in blood) up to the third degree, in a straight line or sideways, with other members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors.
4. Shall not be a person in a Public Accountant Firm, Legal Consultant Office, or other party providing attestation services, non-attestation services, and/or other consultancy services to the Company within the last 6 months.
5. Shall not be a person who works for the Company and has the authority and responsibility to plan, lead, or control and supervise the Company's activities within the last six (6) months.
6. Shall not have any business relationship, directly or indirectly, related to the Company's business activities.
7. Shall have no interests and other relationships that may affect his/her ability to act independently as a member of the Audit Committee.

MASA JABATAN KOMITE AUDIT
TERM OF OFFICE OF THE AUDIT COMMITTEE

Anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Audit memiliki masa jabatan yang tidak lebih dari masa jabatan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Sementara itu, masa jabatan anggota Komite Audit yang tidak merangkap jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk satu kali periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Members of the Board of Commissioners who concurrently serve as members of the Audit Committee shall have a term of office not exceeding the term of office of their appointment as members of the Board of Commissioners, as determined by the General Meeting of Shareholders.

The term of office of the Audit Committee is a maximum of three (3) years, and can be extended once for a 2-year period, without reducing the Board of Commissioners' right of termination at any time.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT 2024
COMPOSITION OF THE AUDIT COMMITTEE IN 2024

Pada tahun 2024, terdapat perubahan susunan anggota Komite Audit dengan adanya pengangkatan dan pemberhentian anggota komite dan Dewan Komisaris Perseroan. Jumlah Komite Audit sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Komite Audit dan 2 (orang) sebagai anggota Komite Audit.

Berikut Susunan Komite Audit per tanggal 31 Desember 2024 beserta perubahan susunan selama tahun 2024:

In 2024, there was a change in the composition of the Audit Committee members with the appointment and dismissal of the Company's committee members and the Board of Commissioners. The Audit Committee has three (3) members, consisting of one (1) Chairman of the Audit Committee and two (2) members of the Audit Committee.

The following is the Audit Committee's composition as of 31 December 2024 and changes in composition in 2024:

Komite Audit Periode 1 Januari 2024 -18 Agustus 2024 Audit Committee 1 January 2024 - 18 August 2024			Komite Audit Periode 19 Agustus 2024 – 30 September 2024 Audit Committee 19 August 2024 - 30 September 2024			Komite Audit Periode 1 Oktober 2024-31 Desember 2024 Audit Committee 1 October 2024 - 31 December 2024		
Nama Name	Jabatan di Perseroan Position in the Company	Jabatan Komite Audit Audit Committee Position	Nama Name	Jabatan di Perseroan Position in the Company	Jabatan Komite Audit Audit Committee Position	Nama Name	Jabatan di Perseroan Position in the Company	Jabatan Komite Audit Audit Committee Position
Mariatul Aini	Komisaris Commissioner	Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee	Ahmad Ghufron	Komisaris Commissioner	Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee	Ahmad Ghufron	Komisaris Commissioner	Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee
Marsiyati	-	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Marsiyati	-	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Marsiyati	-	Anggota Komite Audit Audit Committee Member
Ferry Irawan	-	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	-	-	-	Shartika Nirmala Dewi	-	Anggota Komite Audit Audit Committee Member

Susunan anggota Komite Audit telah sesuai dengan yang diatur dalam PMK No.88/PMK.06/2015 pasal 45 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan, bahwa struktur dan keanggotaan Komite Audit terdiri dari:

1. 1 (satu) orang anggota Komisaris sebagai ketua yang dijabat oleh Sdr. Ahmad Ghufron; dan
2. 1 (satu) orang yang memiliki keahlian di bidang usaha Persero yaitu Sdri. Marsiyati.
3. 1 (satu) orang yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi yaitu Sdri. Shartika Nirmala Dewi

The members of the Audit Committee are in accordance with the stipulation in PMK No. 88/PMK.06/2015 Article 45 on the Implementation of Good Corporate Governance in Companies (Persero) Under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance, that regulates the Audit Committee's structure and membership as:

1. One (1) member of the Board of Commissioners as Chairman, Mr. Ahmad Ghufron; and
2. One (1) person with an expertise in the Company's business, Mrs. Marsiyati.
3. One (1) person with an expertise in the finance and accounting, Mrs. Shartika Nirmala Dewi

PROFIL KOMITE AUDIT 2024

PROFILE OF AUDIT COMMITTEE IN 2024

Ahmad Ghufron

Ketua Komite Audit/Komisaris
Chairman of the Audit Committee/Commissioner

Penjelasan lebih lanjut di uraikan pada Bab Profil Perusahaan, sub bab Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan Ini
Further information can be referred to in the Company Profile, Board of Commissioners' Profile Sub-Chapter in this Annual Report

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: KMK 342 Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024 dan SK-002/KOM/0824 tanggal 30 Agustus 2024	KMK 342 of 2024 dated 27 August 2024 and SK-002/KOM/0824 dated 30 August 2024
Periode jabatan Term of office	: 19 Agustus 2024 s.d. 18 Agustus 2029, Periode ke-1	19 August 2024 to 18 August 2029, 1st Period
Masa Jabatan Tenure	: Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris	Following the term of office as Board of Commissioners

Marsiyati

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Kewarganegaraan Citizenship	:	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	:	Depok, Jawa Barat, Indonesia	Depok, West Java, Indonesia
Usia Age	:	48 tahun per 31 Desember 2024	48 years old as of 31 December 2024
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Bogor, 24 Juni 1976	Bogor, 24 June 1976
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	- Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, lulus 1998 - STIE Muhammadiyah Jakarta, lulus 2002 - Magister (S2) bidang Administrasi Publik dari Institut STIAMI (2010)	- State College of Accountancy, graduated 1998 - STIE Muhammadiyah Jakarta, graduated 2002 - Master of Public Administration from STIAMI Institute (2010)
Riwayat Jabatan Career History	:	Beliau memiliki pengalaman luas di bidang pengawasan dan pembinaan Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan (2015 – saat ini), bidang analisis investasi Pemerintah (2015 – saat ini), bidang penerapan risk management (2019 – saat ini) serta manajemen kinerja (2019 – saat ini).	Has vast experience in the audit and mentoring sector at the Special Mission Vehicle under the Ministry of Finance (2015 - present), Government investment analysis sector (2015 - present), risk management (2019 - present), and performance management (2019 - present).
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	:	Kepala Seksi Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan IIIB, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.	Head of Directorate of Separated State Assets IIIB, Directorate General of State Assets Management, Directorate General of State Assets Management.
Sertifikasi Certification	:	*Certification in Audit Committee Practices from Indonesian Institute of Audit Committee*	Certification in Audit Committee Practices from the Indonesian Institute of Audit Committee
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	KEP-05/KOM/PII/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 KEP-04/KOM/PII/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 KEP-005/KOM/1224 tanggal 31 Desember 2024	KEP-05/KOM/PII/06/2020 dated 17 June 2020 KEP-04/KOM/PII/05/2023 dated 19 May 2023 KEP-005/04/KOM/1224 dated 31 December 2024
Periode jabatan Term of office	:	17 Juni 2020 s.d. 16 Juni 2023, Periode ke-1 17 Juni 2023 s.d. 31 Desember 2024, Periode ke-2	17 June 2020 to 16 June 2023, 1st Period 17 June 2023 to 31 December 2024, 2nd Period
Masa Jabatan Tenure	:	17 Juni 2020 s.d. 31 Desember 2024	17 June 2020 to 31 December 2024

Shartika Nirmala Dewi

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Kewarganegaraan Citizenship	: Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	: Jakarta	Jakarta
Usia Age	: 39 tahun per 31 Desember 2024	39 years old as of 31 December 2024
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	: Jakarta, 20 September 1985	Jakarta, 20 September 1985
Riwayat Pendidikan Educational Background	: • Magister Manajemen Keuangan, Melbourne Business School, University of Melbourne, Australia • Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), Universitas Indonesia • Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia	• Master of Management Finance, Melbourne Business School, The University of Melbourne, Australia • Profession in Accounting, University of Indonesia, Accountants Profession Education (PPAk) • Bachelor of Economics, majoring in Accounting, University of Indonesia
Riwayat Jabatan Career History	: Sebelum menjabat sebagai Komite Audit di PT PII, beliau pernah menduduki berbagai jabatan diantaranya sebagai Komite Pemantau Risiko di PT Geo Dipa Energi (Persero) (2021 - September 2024), Kepala Seksi PKN I Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung, DJKN, Kementerian Keuangan (2019-2021), Pelaksana Direktorat KND, DJKN, Kementerian Keuangan (2010-2019), Posisi terakhir sebagai Senior Associate pada KAP Tanudiredja Wibisana dan Rekan, PricewaterhouseCoopers di Jakarta (2008-2010), Konsultan Keuangan pada PT Prima Mitra Edukarya (2007-2008)	Prior to serving as the IIGF's Audit Committee, she held various positions including as Risk Oversight Committee - PT Geo Dipa Energi (Persero) (2021-September 2024), Section Head in State Assets Management I, Regional Office of DJKN South Sumatra, Jambi, and Bangka Belitung, Directorate General of State Assets Management in Ministry of Finance (2019-2021), Staff at Directorate of Segregated State Assets, Directorate General of State Assets Management in Ministry of Finance (2010-2019), Last position as Senior Associate in KAP Tanudiredja Wibisana dan Rekan, PricewaterhouseCoopers in Jakarta (2008-2010), Financial Consultant in PT Prima Mitra Edukarya (2007-2008).
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	: Kepala Seksi Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan IA, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.	Head of Directorate of Separated State Assets IA, Directorate General of State Assets Management, Ministry of Finance.
Sertifikasi Certification	: • *Qualified Risk Management Analyst* (QRMA) dari Lembaga Profesi Manajemen Risiko (LSP MKS) • *Certification in Audit Committee Practices* dari Indonesian Institute of Audit Committee • *Chartered Accountant* by Ikatan Akuntansi Indonesia	• Qualified Risk Management Analyst (QRMA) from Risk Management Professional Agency (LSP MKS) • Certification in Audit Committee Practices from the Indonesian Institute of Audit Committee • Chartered Accountant by Ikatan Akuntansi Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: SK-003/KOM/1024 tanggal 1 Oktober 2024	SK-003/KOM/1024 dated 1 October 2024
Periode jabatan Term of office	: 1 Oktober 2024 s.d. 30 September 2027, Periode ke-1	1 October 2024 to 30 September 2027, 1st Period
Masa Jabatan Tenure	: 1 Oktober 2024 s.d. 31 Desember 2024	1 October 2024 to 31 December 2024

PERNYATAAN INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE AUDIT

STATEMENT OF INDEPENDENCE OF AUDIT COMMITTEE MEMBERS

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Perseroan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

All members of the Audit Committee have fulfilled all independence criteria and shall be able to carry out their duties independently, uphold the Company's interests, and cannot be influenced by any party.

Tabel Independensi Komite Audit Tahun 2024
Table: Independence of Audit Committee in 2024

Aspek Independensi Independency Aspect	Ahmad Ghufron	Marsiyati	Shartika Nirmala Dewi
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi No financial affiliation with the Board of Commissioners and the Board of Directors	✔	✔	✔
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan No shareholding relationship in the Company	✔	✔	✔
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit No family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Audit Committee members	✔	✔	✔
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Not serving as an administrator of political parties, officials and the government	✔	✔	✔

Keterangan: ✔ : Independen ✖: Tidak Independen

Remark: ✔ : Independent ✖: Not Independent

PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE CHARTER

Komite Audit melaksanakan tugasnya berpedoman pada Piagam Komite Audit yang disusun mengacu pada Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

The Audit Committee exercises its duties with reference to the Audit Committee Charter, which was formulated in reference to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Government Regulation No. 45 of 2005 on the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises, and Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 88/ PMK.06/2015 on the Implementation of Good Corporate Governance in the Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance.

Ruang lingkup Piagam Komite Audit antara lain mengatur terkait:

1. Latar belakang dan dasar pembentukan;
2. Tugas, tanggung jawab, wewenang dan kode etik;
3. Pola hubungan kerja;
4. Struktur dan persyaratan keanggotaan;
5. Masa jabatan;

The scope of the Audit Committee Charter regulates, among others:

1. Background and basis of establishment;
2. Duties, responsibilities, authorities, and code of conduct;
3. Working relationship pattern;
4. Structure and membership requirements;
5. Tenure;

6. Program kerja tahunan;
7. Rapat;
8. Penanganan pengaduan dan pelaporan;
9. Program pengenalan anggota baru dan evaluasi kinerja; dan
10. Penganggaran dan pembiayaan.

6. Annual work program;
7. Meeting;
8. Complaint handling and reporting;
9. New member induction program and performance evaluation; and
10. Budgeting and financing.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE'S DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Komite Audit diberikan kewenangan yang sejalan dengan lingkup tugas, kewajiban, serta tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, terutama terkait kegiatan-kegiatan yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Audit dimuat dalam Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*), yaitu adalah:

1. Memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen Perseroan serta pelaksanaannya.
3. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal.
4. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
5. Memastikan telah terdapat prosedur pengkajian (*review*) yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan.
6. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

To support the effectiveness of its duties, the Audit Committee is granted authority in line with the scope of duties, obligations, and responsibilities of the Board of Commissioners, as stipulated in the Company's Articles of Association, specifically related to activities that require the Board of Commissioners' attention.

The provisions of duties and responsibilities of the Audit Committee are stipulated in the Audit Committee Charter:

1. Ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of implementation of tasks of external and internal auditors.
2. Providing recommendations for improvement of the Company's management control system and its implementation.
3. Assessing the activities and the results of audits conducted by the Internal Audit Unit and external auditors.
4. Providing recommendations on improvement of the management control system and its implementation.
5. Ensuring there have been satisfactory review procedures for all information issued by the Company.
6. Identifying matters that require the attention and duties of the Board of Commissioners.

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

SEGREGATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES IN AUDIT COMMITTEE

Dalam rangka memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta terhadap penerapan rekomendasi tindak lanjut atas hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses untuk dalam penyajian pelaporan keuangan yang andal.

Sehubungan dengan hal itu, Komite Audit memberikan pendapat dan saran/masukan profesional kepada Dewan Komisaris melalui sejumlah kegiatan berkaitan dengan namun tidak terbatas pada:

1. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan penerapan sistem pengendalian internal.
2. Melakukan penelaahan dan evaluasi atas piagam auditor internal.
3. Melakukan penelaahan dan evaluasi atas rencana audit tahunan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit internal, serta pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
4. Menyusun kerangka acuan kerja (*term of reference*) bagi pengadaan auditor eksternal dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian pelaksanaan audit oleh auditor eksternal dengan standar audit yang berlaku, menilai kinerja dan kualitas hasil audit, dan mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris jika terdapat indikasi kuat bahwa independensi auditor eksternal terganggu atau terbukti bahwa auditor eksternal tidak melakukan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku.
6. Memantau pelaksanaan tindak lanjut temuan dan rekomendasi auditor eksternal yang dilakukan oleh Direksi.
7. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap kesesuaian kebijakan, standar, dan pedoman akuntansi yang digunakan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas proses penyusunan laporan keuangan untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen telah menyajikan secara wajar tentang kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

To ensure the effectiveness of the internal control system and implementation of the duties of external auditors and internal auditors, the Audit Committee monitors and evaluates the planning and implementation of audits and follow-up recommendations on audit results, to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the process for the presentation of reliable financial reporting.

Therefore, the Audit Committee provides opinions and professional advice/input to the Board of Commissioners through several activities related to but not limited to:

1. Evaluating the policy and implementation of the internal control system.
2. Reviewing and evaluating the internal auditor charter.
3. Reviewing and evaluating the annual audit plan, implementation and reporting of internal audit results, and the implementation of follow-up by the Board of Directors on internal auditor findings.
4. Preparing terms of reference for the procurement of external auditors and providing recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of external auditors to be submitted to the General Meeting of Shareholders.
5. Monitoring and evaluating the conformity of the audit by the external auditor with the applicable audit standards, assessing the audit performance and quality, and proposing the termination of the relationship with the external auditor to the Board of Commissioners if there is a strong indication that the independence of the external auditor is impaired or it is proven that the external auditor does not conduct the audit in accordance with the applicable audit standards.
6. Monitoring the follow-up of the external auditor's findings and recommendations by the Board of Directors.
7. Reviewing and evaluating the suitability of accounting policies, standards, and guidelines, with generally accepted financial accounting standards.
8. Monitoring and evaluating the process of preparing financial statements to ensure that the financial statements prepared by management have presented the financial condition and the Company's operations fairly in accordance with prevailing financial accounting standards.

9. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan serta rencana jangka panjang Perseroan dengan melakukan penelaahan dan evaluasi atas laporan keuangan interim dan tahunan serta laporan manajemen periodik.
10. Melakukan penelaahan atas informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pihak lain dan ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan.
11. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan.
12. Melakukan penelaahan dan pemeriksaan atas pengaduan yang berkaitan dengan terlapor anggota Direksi, anggota atau organ Dewan Komisaris.
13. Melakukan pengawasan dan pengarahan atas pelaksanaan kerja tim investigasi pelaporan pelanggaran, atas pengaduan yang berkaitan dengan terlapor anggota Direksi, anggota atau organ Dewan Komisaris.
14. Menyusun pedoman kerja Komite Audit yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris.
15. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris.
16. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

9. Monitoring and evaluating the preparation and implementation of the Company's work program and budget as well as the Company's long-term plan by reviewing and evaluating the interim and annual financial statements and regular management reports.
10. Reviewing the information released by the Company to other parties and the Company's compliance with laws and regulations.
11. Ensuring there have been satisfactory review procedures for all information issued by the Company.
12. Reviewing and examining complaints relating to reported members of the Board of Directors, members or organs of the Board of Commissioners.
13. Supervising and directing the violation reporting investigation team, on complaints relating to reported members of the Board of Directors, members or organs of the Board of Commissioners.
14. Preparing the Audit Committee working guidelines as a reference in carrying out its duties and responsibilities and submitting them to the Board of Commissioners to be determined through a Decree of the Board of Commissioners.
15. Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners and duties of the Board of Commissioners.
16. Exercising other duties assigned by the Board of Commissioners.

PROGRAM PELATIHAN/PENINGKATAN KOMPETENSI
TRAINING PROGRAM/COMPETENCE DEVELOPMENT

Perseroan memberikan kesempatan anggota Komite Audit untuk mengikuti program peningkatan kompetensi guna meningkatkan wawasan dan pengetahuannya yang menunjang pelaksanaan tugas anggota Komite Audit agar senantiasa relevan dengan perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perseroan.

Kegiatan peningkatan pelatihan/kompetensi yang diikuti anggota Komite Audit sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The Company provides the opportunity for the Audit Committee to participate in competency development program to improve his/her insight and knowledge to support the duties of the Audit Committee, so that it is always relevant to the latest developments in the Company's business.

The competency development attended by members of the Audit Committee in 2024 are as follows:

Nama Nama	Topik Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Time
Mariatul Aini	*Workshop* BUMN *Series: Digital Renaissance: Navigation the Landscape of Business Transformation* Workshop BUMN Series: Digital Renaissance: Navigation the Landscape of Business Transformation	BUMN Track	30 Mei 2024 30 May 2024

Nama Nama	Topik Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Time
Ahmad Ghufron	*GRC Summit: Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, and SDGs" (Online, GRC Summit Committee)*	GRC Association	22 s.d 23 Agustus 2024 22-23 August 2024
Marsiyati	*Workshop* BUMN *Series: Digital Renaissance: Navigation the Landscape of Business Transformation* Workshop BUMN Series: Digital Renaissance: Navigation the Landscape of Business Transformation	BUMN Track	30 Mei 2024 30 May 2024
	GRC Summit: Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, and SDGs" (Online, GRC Summit Committee)	GRC Association	22 s.d 23 Agustus 2024 22-23 August 2024
	Seeing the Unseen Enemies: Crucial Role of Whistleblowers in Detecting and Preventing Cyberfraud	CRMS	22 November 2024 22 November 2024
Shartika Nirmala Dewi	*Workshop ISO 31000 Series Risk Assessment Techniques*	CRMS	20-22 Mei 2024 20-22 May 2024
	Seeing the Unseen Enemies: Crucial Role of Whistleblowers in Detecting and Preventing Cyberfraud	CRMS	22 November 2024 22 November 2024

RAPAT KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE'S MEETING

Sejalan dengan Kebijakan rapat yang diatur dalam Piagam Komite Audit, penyelenggaraan rapat Komite Audit memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan atau sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling sedikit ketua dan seorang anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari separuh anggota Komite Audit yang hadir.
4. Setiap anggota Komite Audit bebas menyampaikan pendapat profesionalnya dalam pembahasan setiap agenda rapat tanpa intervensi siapa pun.
5. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
6. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat, peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada), dan keputusan rapat.
7. Risalah rapat tersebut ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan secara tertulis oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

In line with the meeting policy set forth in the Audit Committee Charter, the Audit Committee meetings have the following provisions:

1. The Audit Committee holds a meeting at least once a month, or the same as the minimum Board of Commissioners' meeting stipulated in the Articles of Association.
2. Audit Committee meetings can only be held if attended by at least the head and one member.
3. The decision of the Audit Committee meeting is considered valid if approved by more than half of the Audit Committee members present.
4. Each member of the Audit Committee is free to express his/her professional opinion in the discussion of each meeting agenda without any intervention.
5. Decisions in the Audit Committee's meeting are made through deliberation.
6. Each meeting of the Audit Committee is written in the minutes of the meeting, which includes the time and place of the meeting, meeting agenda, participants, topics discussed, dissenting opinions (if any), and meeting decisions.
7. The minutes of the meeting are signed by all members of the Audit Committee present and submitted in writing by the Audit Committee to the Board of Commissioners.

PELAKSANAAN FREKUENSI RAPAT KOMITE AUDIT TAHUN 2024
FREQUENCY OF AUDIT COMMITTEE MEETINGS IN 2024

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 23 kali rapat.

In 2024, the Company's Audit Committee held 23 meetings.

TINGKAT KEHADIRAN KOMITE AUDIT DALAM RAPAT KOMITE AUDIT
ATTENDANCE OF AUDIT COMMITTEE IN AUDIT COMMITTEE MEETINGS

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Audit Audit Committee's Meeting		
		Jumlah Rapat Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance
Mariatul Aini [1]	Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee	14	14	100%
Ahmad Ghufron[2]	Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee	9	9	100%
Marsiyati	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	23	23	100%
Shartika Nirmala Dewi[3]	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	7	7	100%
Ferry Irawan[4]	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	14	14	100%
Rata-Rata Tingkat Kehadiran Komite Audit Audit Committee's Average Attendance				**100%**

Keterangan:
[1] berhenti menjabat sejak 18 Agustus 2024
[2] menjabat sejak 19 Agustus 2024
[3] menjabat sejak 1 Oktober 2024
[4] berhenti menjadi anggota KA menjabat sejak 18 Agustus 2024

Remark:
[1] ceased to serve since 18 August 2024
[2] served in the office since 19 August 2024
[3] served in the office since 1 October 2024
[4] ceased to serve in the Audit Committee since 18 August 2024

REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE AUDIT TAHUN 2024
REALIZATION OF THE AUDIT COMMITTEE WORK PROGRAM IN 2024

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit Perseroan telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya yang telah direncanakan dalam program Kerja Komite Audit, dengan rincian sebagai berikut:

In 2024, the Company's Audit Committee implemented various activities as part of its duties and responsibilities that have been planned in the Audit Committee Work Program, with the following details:

No.	Program Kerja Work Program	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
Aspek Perencanaan Planning			
1	Penyusunan RKA Komite Audit Tahun 2025 Preparation of the Audit Committee RKA in 2025	Juli-September July-September	Oktober 2024 October 2024
2	Penyiapan Bahan RKA Dewan Komisaris Tahun 2025 Preparation of 2025 RKA for the Board of Commissioners	September	Oktober 2024 October 2024
3	Penyiapan Bahan Usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris Tahun 2025 Preparation of the Proposed 2025 Performance Contract (IKU) of the Board of Commissioners	September	Oktober 2024 October 2024

No.	Program Kerja Work Program	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
4	Penelaahan atas Usulan RKAP dan/atau RJPP PT PII Tahun 2025 Review of the proposed IIGF's WP&B and/or RJPP in 2025	Juli - September (sesuai dengan jadwal RUPS) July - September (in accordance with the GMS schedule)	Oktober 2024 October 2024
5	Penyiapan Bahan Tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS atas Rancangan RKAP dan/atau RJPP Tahun 2025 Preparation of Materials for the Board of Commissioners' Responses to the GMS on the 2025 WP&B and/or RJPP draft	Desember (sesuai dengan jadwal RUPS) December (in accordance with the GMS schedule)	Desember 2024 December 2024
Aspek Pengawasan Supervisory			
6	Reviu atas Laporan Hasil Audit Internal Review of Internal Audit report	Triwulanan Quarterly	Dilaksanakan tiap triwulan bersama dengan Divisi Internal Audit. Triwulan IV 2023 tanggal 15 Januari 2024 Triwulan I 2024 tanggal 30 April 2024 Triwulan II 2024 tanggal 23 Juli 2024 Triwulan III 2024 tanggal 25 Oktober 2024 Conducted quarterly together with Internal Audit Division. Q4 2023 dated 15 January 2024 Q1 2024 dated 30 April 2024 Q2 2024 dated 23 July 2024 Q3 2024 dated 25 October 2024
7	Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Internal dan Eksternal Monitoring of Follow-Up on Internal and External Audit Recommendations	Triwulanan Quarterly	Dilaksanakan tiap triwulan bersama dengan Divisi Internal Audit. Triwulan IV 2023 tanggal 15 Januari 2024 Triwulan I 2024 tanggal 30 April 2024 Triwulan II 2024 tanggal 23 Juli 2024 Triwulan III 2024 tanggal 25 Oktober 2024 Conducted quarterly together with Internal Audit Division. Q4 2023 dated 15 January 2024 Q1 2024 dated 30 April 2024 Q2 2024 dated 23 July 2024 Q3 2024 dated 25 October 2024
8	Me-*review* Laporan Manajemen Bulanan Reviewing Monthly Management Report	Bulanan Monthly	Dilaksanakan setiap bulan, baik Komite Audit sendiri maupun bersama dengan divisi terkait. · Rapat Teknis Organ Dekom bersama Manajemen · Rapat BOC Held monthly, independently, or with related divisions. · Technical Meeting of Committees Reporting to the Board of Commissioners, with Management · Meetings of the Board of Commissioners
9	Penelaahan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Audit Internal Review of Internal Audit's Annual Audit Work Program (PKAT)	Awal Tahun Beginning of the Year	Rencana Kerja 2024: S-05/PII/DK/0224 tanggal 7 Februari 2024 2024 Work Program: S-05/PII/DK/0224 dated 7 February 2024

No.	Program Kerja Work Program	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
10	Penelaahan atas Pengaduan terkait Perseroan Review of Complaints on the Company	Semesteran Every six months	1. Anggota Komite Audit menjadi Ketua Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran 2. Laporan tanggal 19 Juli 2024 dan 30 Desember 2024 1. Member of the Audit Committee as Chairman of the Whistleblower Management Team 2. Report dated 19 July 2024 and 30 December 2024
11	Penelaahan atas Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan serta Pelaksanaannya Review of Accounting Policies and Preparation of Financial Statements and the Implementation	Juni-Juli June-July	Rapat 15 Agustus 2024, Surat Nomor S-32/PII/DK/0824 tanggal 16 Agustus 2024 Meeting 15 August 2024, Letter No. S-32/PII/DK/0824 dated 16 August 2024
12	Evaluasi atas Kegiatan CSR CSR Evaluation	Juni June	Dilaksanakan bersamaan dengan Rapat BOC 23 Juni 2024 Held simultaneously with the Board of Commissioners' Meetings on 23 June 2024
13	Penelaahan atas Gejala Penurunan Kinerja Review of Symptoms of Performance Decline	Sesuai Disposisi Dewan Komisaris As per Disposition from the Board of Commissioners	24 Januari 2024, 23 Agustus 2024, 28 Oktober 2024 24 January 2024, 23 August 2024, 28 October 2024
14	Evaluasi atas Pelaksanaan RKAP Evaluation of the WP&B Implementation	Triwulanan Quarterly	Dilaksanakan tiap triwulan bersama dengan Divisi Internal Audit & divisi terkait Conducted quarterly together with Internal Audit Division & related division
15	Penelaahan terkait Transaksi atau Tindakan Dalam Lingkup Kewenangan Dewan Komisaris/RUPS Review of Transactions or Actions within the Scope of Authority of the Board of Commissioners/GMS	Sesuai Disposisi Dewan Komisaris As per Disposition from the Board of Commissioners	Dilaksanakan di setiap penyusunan naskah tanggapan Dewan Komisaris kepada Direksi/RUPS · Tanggapan atas Penggunaan PMN setiap triwulan · Tanggapan atas IKU Individual Direksi Tahun 2024, Penetapan IKU Individual Direksi Tahun 2024, dan Laporan Realisasi IKU setiap triwulan · Evaluasi RKAP 2023 dan Pelaksanaan RKAP 2024 · Laporan pengawasan RKAP setiap semester · Laporan Pengawasan Dekom atas Kinerja Operasional PT PII · Evaluasi Kebijakan Teknologi Informasi S-30/PII/DK/0824 tanggal 16 Agustus 2024 · Reviu Piutang Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Terminasi Proyek · Reviu Perubahan Lingkungan Bisnis Implemented in every preparation of the Board of Commissioners' response to the Board of Directors/GMS · Quarterly feedback on the utilization of PMN · Response to the Board of Directors' Individual KPIs in 2024, Determination of the Board of Directors' Individual KPIs in 2024, and Quarterly KPI Realization Report · Evaluation of 2023 WP&B and Implementation of 2024 WP&B · Biannual WP&B supervisory report · Board of Commissioners' Supervisory Report on IIGF Operational Performance · Evaluation of Information Technology Policies No. S-30/PII/DK/0824 dated 16 August 2024 · Review of Guarantee Fee (IJP) Receivables for Terminated Projects · Review of Changes in the Business Environment

No.	Program Kerja Work Program	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
16	*Monitoring* atas Proyek yang Telah Dijamin Monitoring of projects that have been guaranteed	Sesuai disposisi Dewan Komisaris As per disposition from the Board of Commissioners	Telah dilakukan *site visit* ke Pekanbaru pada tanggal 6-7 Maret 2024 dan visit Bandara Singkawang pada tanggal 29 Agustus 2024 A site visit to Pekanbaru was conducted on 6-7 March 2024 and a visit to Singkawang Airport on 29 August 2024.
Aspek Pelaporan Reporting Aspect			
17	Penyusunan Laporan Triwulanan KA Preparation of Audit Committee Quarterly Report	Triwulanan Quarterly	· Laporan Triwulan I tanggal 30 April 2024 · Laporan Triwulan II tanggal 29 Juli 2024 · Laporan Triwulan III tanggal 14 November 2024 · Q1 Report dated 30 April 2024 · Q2 Report dated 29 July 2024 · Q3 Report dated 14 November 2024
18	Penelaahan atas Laporan Manajemen Triwulanan Review of Quarterly Management Report	Triwulanan Quarterly	Dilaksanakan bersamaan dengan Rapat BOC Held simultaneously with the Joint Meetings of the Board of Commissioners
19	Penyusunan Laporan Tahunan KA Preparation of Audit Committee Annual Report	April	7 Februari 2024 7 February 2024
Aspek Penerapan GCG GCG Implementation			
20	Pelaksanaan Penilaian Penerapan GCG Tahun 2023 oleh BPKP GCG Assessment in 2023 by BPKP	Januari-Maret January - March	· *Kick Off Meeting*: 15 Januari 2024 · Wawancara GCG Dekom: 16 Februari 2024 · *Pra Exit Meeting*: 22 Februari 2024 · *Exit Meeting*: 28 Februari 2024 · Kick Off Meeting: 15 January 2024 · GCG Interview with Board of Commissioners: 16 February 2024 · Pre-Exit Meeting: 22 February 2024 · Exit Meeting: 28 February 2024
21	Pemantauan Tindak Lanjut Pelaksanaan AOI GCG Rekomendasi BPKP Tahun 2023 Monitoring the follow-up of the AOI GCG recommendations by BPKP in 2023	Maret- Desember March - December	· Penguatan SPI Perusahaan: S-05/PII/DK/0224 tanggal 7 Februari 2024 · Pembahasan Kebijakan Mutu atau Kepuasan Layanan Perusahaan: 27 Maret 2024 dan 4 April 2024 · Rapat Evaluasi tindak lanjut GCG tanggal 16 Juli 2024 dan 10 Desember 2024 · Strengthening of Company's SPI: S-05/PII/DK/0224 dated 7 February 2024 · Discussion on the Company's Quality Policy or Service Satisfaction: 27 March 2024 and 4 April 2024 · GCG follow-up Evaluation meeting on 16 July 2024 and 10 December 2024
22	Penelaahan atas Kepatuhan Direksi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian dengan Pihak Ketiga Review of the Board of Directors' compliance with Laws and Agreements with Third Parties	November	Dilaksanakan bersamaan dengan Rapat BOC Held simultaneously with the Joint Meetings of the Board of Commissioners
23	Penelaahan atas Kebijakan dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Review of Policies and Implementation of Internal Control System	Februari February	Disampaikan melalui Surat Dekom kepada Direksi: S-05/PII/DK/0224 tanggal 7 Februari 2024 Submitted through Board of Commissioners' Letter to the Board of Directors: S-05/PII/DK/0224 dated 7 February 2024
24	Penelaahan atas Kebijakan Pengadaan dan Pelaksanaannya Review of Procurement Policy and its Implementation	April	30 April 2024 30 April 2024

No.	Program Kerja Work Program	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
25	Penelaahan atas Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir Review of the Career Development Policy and Implementation	Mei May	29 Mei 2024 Evaluasi Kebijakan Teknologi Informasi S-30/PII/DK/0824 tanggal 16 Agustus 2024 29 May 2024 Evaluation of Information Technology Policies No. S-30/PII/DK/0824 dated 16 August 2024
26	Penelaahan atas Kebijakan Mutu atau Kepuasan Layanan Perseroan Review of the Company's Quality Policy or Service Satisfaction	Maret March	· Surat Dekom Nomor S-16/PII/DK/2024 tanggal 26 April 2024 · Pembahasan Kebijakan Mutu atau Kepuasan Layanan Perusahaan tanggal 27 Maret 2024 dan 4 April 2024 · Board of Commissioners' Letter No. S-16/PII/DK/2024 dated 26 April 2024 · Discussion of the Company's Quality or Service Satisfaction Policy on 27 March 2024 and 4 April 2024
Aspek Audit atas Laporan Keuangan Audit of Financial Statements			
27	Pengadaan KAP Untuk Audit LK Tahun 2024 Procurement of Public Accounting Firms for Financial Statements Audit in 2024	April-Mei April-May	Rapat Komite Audit tanggal 7 Juni 2024 Audit Committee's Meeting on 7 June 2024
28	Pengusulan Penetapan KAP untuk Audit LK Tahun 2024 kepada RUPS Proposal of Public Accounting Firms appointment for Financial Statements Audit in 2024 to GMS	Juni June	S-41/PII/DK/1024 tanggal 18 Oktober 2024 S-41/PII/DK/1024 dated 18 October 2024
29	Penelaahan Rencana Audit LK Tahun 2024 oleh KAP Review of 2024 Financial Statements Audit Plan by Public Accounting Firms	Desember December	*Kick off Meeting* tanggal 5 Desember 2024 Kick off Meeting dated 5 December 2024
30	Pemantauan atas Kemajuan Pelaksanaan Audit LK Tahun 2023 oleh KAP Monitoring of the Audit Progress of 2023 Financial Statements by KAP	Januari-Februari January-February	Rapat Komite Audit tanggal 21 Maret 2024 Audit Committee's Meeting on 21 March 2024
31	Penelaahan atas Laporan Hasil Audit LK Tahun 2023 dari KAP Review of the Audit Result of 2023 Financial Statements by KAP	Maret March	Rapat Komite Audit tanggal 21 Maret 2024 Audit Committee's Meeting on 21 March 2024
Aspek Lainnya Other Aspects			
32	Pembahasan draf *Annual Report* tahun 2022 Discussion of the 2023 Annual Report Draft	Februari-Mei February - May	Dilakukan secara sirkuler oleh Organ Dekom dan Dekom. Conducted on a circular basis by the Board of Commissioners and Board of Commissioners' Organs.
33	*Self Assessment* Kinerja Komite Audit Self-Assessment of the Audit Committee's Performance	Desember December	21 Maret 2024, 30 April 2024, 8 Oktober 2024, 28 Oktober 2024, dan 7 November 2024 21 March 2024, 30 April 2024, 8 October 2024, 28 October 2024, and 7 November 2024
34	Peningkatan kompetensi Anggota Komite Audit Enhancement of Audit Committee Members' Competency	Sesuai Jadwal As Scheduled	· *Workshop* ISO 31000 *Series Risk Assessment Techniques* tanggal 20-22 Mei 2024 · *Workshop* BUMN *Series* tanggal 30 Mei 2024 · IIA *International Conference* di Washington, D.C. tanggal 15-17 Juli 2024 · GRC *Summit*: *Leadership for Sustainable Impact*: GRC, ESG, and SDGs" (*Online*, GRC *Summit Committee*) tanggal 22 s.d 23 Agustus 2024 · *Seeing the Unseen Enemies: Crucial Role of Whistleblowers in Detecting and Preventing Cyberfraud* tanggal 22 November 2024

No.	Program Kerja Work Program	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
			- ISO 31000 Series *Risk Assessment Techniques Workshop on May* 20-22, 2024 - BUMN *Series Workshop on* May 30, 2024 - IIA *International Conference in Washington*, D.C. on July 15-17, 2024 - GRC *Summit*: *Leadership for Sustainable Impact*: GRC, ESG, *and* SDGs (*Online*, GRC *Summit Committee*) on August 22-23, 2024 - *Seeing the Unseen Enemies: Crucial Role of Whistleblowers in Detecting and Preventing Cyberfraud on November* 22, 2024

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Hingga diterbitkannya Laporan Tahunan 2024 ini, PT PII belum memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Namun demikian, fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan secara bersama-sama oleh seluruh anggota Dewan Komisaris sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-02/KOM/PII/04/2020 tanggal 28 April 2020 tentang pembagian tugas Dewan Komisaris.

As of the publication of this 2024 Annual Report, IIGF does not have a Nomination and Remuneration Committee. However, the Nomination and Remuneration function is carried out jointly by all members of the Board of Commissioners, in accordance with the Decree of the Board of Commissioners No. KEP-02/KOM/PII/04/2020 dated 28 April 2020 on the Segregation of Duties of the Board of Commissioners.

KOMITE LAIN DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
OTHER COMMITTEES

Sebagai wujud kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.88/PMK.06/2015 pasal 28 tentang organ pendukung Dewan Komisaris, Perseroan membentuk Komite Lain yaitu Komite Pemantau Risiko yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-01/KOM/PII/01/2018 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko pada Perseroan tanggal 27 Januari 2018.

As a form of the Company's compliance with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 88/PMK.06/2015 Article 28 on the supporting organs of the Board of Commissioners, the Company established another Committee, i.e., the Risk Monitoring Committee based on the Decree of the Board of Commissioners No. KEP-01/KOM/PII/01/2018 on the Establishment of the Company's Risk Monitoring Committee dated 27 January 2018.

KOMITE PEMANTAU RISIKO
RISK MONITORING COMMITTEE

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam Komite Pemantau Risiko bertugas melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha Perseroan paling kurang dengan melakukan: a. evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas unit kerja Perseroan yang membidangi Manajemen Risiko.

The Risk Monitoring Committee is established to assist the Board of Commissioners in the Risk Monitoring Committee is tasked to carry out regular assessments and provide recommendations on the Company's business risks by at least: a. evaluating the conformity between risk management policies and these policies' implementation; and b. monitoring and evaluating the duties of the Company's working unit in charge of Risk Management.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE PEMANTAU RISIKO
APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE RISK MONITORING COMMITTEE

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris. Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam piagam Komite Pemantau Risiko yaitu:

1. Memiliki integritas yang baik, kompetensi, dan pengalaman kerja yang cukup di bidang pemantauan manajemen risiko.
2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan pelaksanaan manajemen risiko dan laporan keuangan.
3. Mampu berkomunikasi secara efektif.
4. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
5. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari luar Perseroan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat tiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
6. Bukan merupakan orang yang bekerja pada Perseroan dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan manajemen risiko Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
7. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
8. Tidak mempunyai kepentingan dan hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.

The appointment and dismissal of members of the Risk Monitoring Committee is carried out by the Board of Commissioners. The appointment of members of the Risk Monitoring Committee is in accordance with the requirements set forth in the Risk Monitoring Committee Charter:

1. Shall have good integrity, competence, and sufficient work experience in the risk management monitoring sector.
2. Shall have sufficient knowledge to read and understand the risk management report and financial statements.
3. Shall be able to communicate effectively.
4. Can provide sufficient time to carry out his/her duties.
5. Members of the Risk Monitoring Committee who are from the Company's external party are prohibited from having relationship (in blood) up to the third degree, in a straight line or sideways, with other members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors.
6. Shall not be a person who works for the Company and has the authority and responsibility to plan, lead, or control and supervise the Company's risk management activities within the last six (6) months.
7. Shall not have any business relationship, directly or indirectly, related to the Company's business activities.
8. Shall have no interests and other relationships that may affect his/her ability to act independently as a member of the Risk Monitoring Committee.

MASA JABATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO
TERM OF OFFICE OF THE RISK MONITORING COMMITTEE

Anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Pemantau Risiko memiliki masa jabatan yang tidak lebih dari masa jabatan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Sementara itu, masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang tidak merangkap jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk satu kali periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Members of the Board of Commissioners who concurrently serve as members of the Risk Monitoring Committee shall have a term of office not exceeding the term of office of their appointment as members of the Board of Commissioners, as determined by the General Meeting of Shareholders. The term of office of Risk Monitoring Committee is a maximum of three (3) years, and can be extended once for a 2-year period, without reducing the Board of Commissioners' right of termination at any time.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU RISIKO 2024
COMPOSITION OF THE RISK MONITORING COMMITTEE IN 2024

Pada tahun 2024, terdapat pergantian Ketua Komite Pemantau Risiko dengan adanya pergantian Dewan Komisaris, sehingga Ketua Komite Pemantau Risiko saat ini dijabat oleh Sdr. Ahmad Ghufron menggantikan Sdr. Iqbal Islami yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan Komisaris.

In 2024, there was a change in the Chairman of the Risk Monitoring Committee with the Board of Commissioners' change. Therefore, the Chairman of Risk Monitoring Committee is currently held by Mr. Ahmad Ghufron, succeding Mr. Iqbal Islami, who previously served as the Chairman of Risk Monitoring Committee and Commissioner.

Komite Audit Periode 1 Januari 2024 – 26 Agustus 2024 Audit Committee 1 Januari 2024 - 26 August 2024			Komite Audit Periode 27 Agustus 2024 - 31 Desember 2024 Audit Committee 27 August 2024 - 31 December 2024		
Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position in the Company	Jabatan Komite Pemantau Risiko Position in the Risk Monitoring Committee	Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position in the Company	Jabatan Komite Pemantau Risiko Position in the Risk Monitoring Committee
Iqbal Islami	Dewan Komisaris Board of Commissioner	Ketua Komite Pemantau Risiko Chairman of Risk Monitoring Committee	Ferry Irawan	Dewan Komisaris Board of Commissioner	Ketua Komite Pemantau Risiko Chairman of Risk Monitoring Committee
Ahmad Ghufron	Dewan Komisaris Board of Commissioner	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee	Belis Siswanto	-	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee
Belis Siswanto	-	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee	-	-	-

Susunan atau komposisi anggota Komite Pemantau Risiko berlandaskan pada PMK No. 88/PMK.06/2015 pasal 46 yang mengatur bahwa Ketua Komite berasal dari anggota komisaris. Dalam hal ini, Sdr. Ferry Irawan telah ditetapkan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko, sementara anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan GRC (*Governance, Risk and Compliance*) adalah Sdr. Belis Siswanto.

The composition of the Risk Monitoring Committee is based on PMK No. 88/PMK.06/2015 Article 46, which stipulates that the Chairman of the Committee is a Commissioner. Therefore, Mr. Ferry Irawan has been appointed as the Chairman of the Risk Monitoring Committee, equipped with member with expertise in finance and GRC (Governance, Risk and Compliance), i.e., Mr. Belis Siswanto.

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO 2024
PROFILE OF RISK MONITORING COMMITTEE IN 2024

Ferry Irawan

Ketua Komite Pemantau Risiko Komisaris
Chairman of Risk Monitoring Committee, Commissioner

Penjelasan lebih lanjut di uraikan pada Bab Profil Perusahaan, sub bab Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan Ini
Further information can be referred to in the Company Profile, Board of Commissioners' Profile Sub-Chapter in this Annual Report

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	KMK No. 339 Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024 KEP-002/KOM/0824 tanggal 30 Agustus 2024	KMK No. 339 of 2024 dated August 27, 2024, KEP-002/KOM/0824 dated August 30, 2024
Periode jabatan Term of office	:	Periode ke-1, 27 Agustus 2024 - 27 Agustus 2029	First period, August 27, 2024 - August 27, 2029
Masa Jabatan Tenure	:	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris	Serving the term as a member of the Board of Commissioners

Belis Siswanto

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of Risk Monitoring Committee

Kewarganegaraan Citizenship	:	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	:	Tangerang Selatan, Banten, Indonesia	South Tangerang, Banten, Indonesia
Usia Age	:	54 tahun per 31 Desember 2024	54 years old as of 31 December 2024
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Kediri, 15 Juni 1970	Kediri, 15 June 1970
Periode Jabatan Term of Office	:	Periode ke-1 dengan masa jabatan 9 Februari 2023 s.d. 8 Februari 2026	First period, with tenure from 9 February 2023 up to 8 February 2026

Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Brawijaya (1996), Magister (S2) Ilmu Administrasi, Manajemen Ekonomi Publik dari Universitas Indonesia (2003) Master of Commerce in Economics dari KEIO University (2005)	Bachelor of Economics in Accounting from Brawijaya University (1996), Master of Administration, Public Economic Management from University of Indonesia (2003), Master of Commerce in Economics from KEIO University (2005).
Riwayat Jabatan Career History	:	Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 1997-2022	He served as Head of Nusa Tenggara Office of the Directorate General of Taxes at the Directorate General of Taxes from 1997-2022.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	:	Inspektur I, Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan.	Inspector I, Inspectorate General, Ministry of Finance.
Sertifikasi Certification	:	-	-
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	KEP-03/KOM/PII/02/2023 tanggal 9 Februari 2023	KEP-03/KOM/PII/02/2023 dated 9 February 2023
Periode jabatan Term of office	:	Periode ke-1	1st period
Masa Jabatan Tenure	:	9 Februari 2023 s.d. 8 Februari 2026	9 February 2023 to 8 February 2026

PERNYATAAN INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

STATEMENT OF INDEPENDENCE OF RISK MONITORING COMMITTEE'S MEMBERS

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Perusahaan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

All members of the Risk Monitoring Committee have fulfilled all independence criteria and shall be able to carry out their duties independently, uphold the Company's interests, and cannot be influenced by any party.

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko Tahun 2024
Table: Independence of Risk Monitoring Committee in 2024

Aspke Independensi Independency Aspect	Ferry Irawan	Belis Siswanto
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan dewan komisaris dan direksi No financial affiliation with the Board of Commissioners and the Board of Directors	✔	✔
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Does not have a relationship with the company shareholders	✔	✔
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan dewan komisaris, direksi, dan/atau sesama anggota komite Pemantau Risiko Does not have any familial relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Risk Monitoring Committee	✔	✔
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve on the board of political, government and official parties	✔	✔

Keterangan: ✔ : Independen ✖: Tidak Independen

Remark: ✔ : Independent ✖: Not Independent

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO
RISK MONITORING COMMITTEE CHARTER

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan untuk pertama kali pada tanggal 15 Maret 2018 dengan mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/PII/KOM/03/2018 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko Perseroan dan sampai dengan tahun 2022 Piagam Komite Pemantau Risiko sudah diperbaharui menjadi edisi ketiga.

Pokok pokok yang diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko antara lain adalah terkait
1. Latar belakang dan dasar pembentukan;
2. Tugas, tanggung jawab dan wewenang;
3. Struktur dan persyaratan keanggotaan,
4. Rapat;
5. Pola kerja;
6. Pelaporan;
7. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko.

In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Monitoring Committee refers to the Risk Monitoring Committee Charter, which was established for the first time on 15 March 2018 with reference to the Board of Commissioners' Decree No. KEP-03/PII/KOM/03/2018 on the Company's Risk Monitoring Committee Charter. As of 2022, the Risk Monitoring Committee Charter has been updated to the third edition.

The main points regulated in the Risk Monitoring Committee Charter are, among others, related to
1. Background and basis of establishment;
2. Duties, responsibilities, and authorities;
3. Structure and membership requirements,
4. Meeting;
5. Working pattern;
6. Reporting;
7. Term of office of Risk Monitoring Committee members.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Komite Pemantau Risiko mengemban tugas dan tanggung jawab untuk:
1. Mendapatkan pemahaman atas manajemen risiko Perseroan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi Perseroan, strategi, sistem dan kebijakan manajemen risiko Perseroan, pengendalian intern Perseroan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur.
2. Melakukan evaluasi terhadap berbagai model pengukuran risiko yang digunakan Perseroan dan memberikan rekomendasi penyempurnaan lebih lanjut.
3. Memantau kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perseroan.
4. Memantau berbagai potensi risiko yang dihadapi Perseroan.
5. Mengevaluasi berbagai kebijakan manajemen risiko Perseroan.
6. Melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan dan tingkat efektivitas masing-masing komponen dari *Enterprise Risk Management* (ERM) dalam Perseroan.
7. Mengukur efektivitas masing-masing komponen dari ERM yang telah diterapkan di Perseroan.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Risk Monitoring Committee has duties and responsibilities as follows:
1. Having an understanding of the Company's risk management which includes various risks faced by the Company, the Company's risk management strategies, systems and policies, the Company's internal controls, including policies, methodologies, and infrastructure.
2. Evaluating various risk measurement models used by the Company and providing recommendations for further improvement.
3. Monitoring the conformity of various policies and implementation of the Company's risk management.
4. Monitoring various potential risks faced by the Company.
5. Evaluating various Company's risk management policies.
6. Coordinating the implementation and monitoring the existence and effectiveness of each component of the Company's Enterprise Risk Management (ERM).
7. Assessing the effectiveness of each ERM component that has been implemented in the Company.
8. Conducting other duties assigned by the Board of Commissioners based on laws and regulations.

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

SEGREGATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES IN RISK MONITORING COMMITTEE

Piagam Komite Pemantau Risiko mengatur tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko, yaitu untuk membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, terutama terkait pemantauan dan penilaian atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perseroan dalam kaitannya dengan penerapan manajemen risiko, serta memberikan pendapat profesional dan rekomendasi yang berkaitan dengan namun tidak terbatas pada:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas unit kerja Perseroan yang membidangi manajemen risiko.
3. Melakukan reviu dan evaluasi atas laporan pelaksanaan manajemen risiko yang dibuat oleh Perseroan.
4. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Perseroan.
5. Melakukan evaluasi atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan manajemen risiko.
6. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

The Risk Monitoring Committee Charter regulates the duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee, i.e., to assist the Board of Commissioners in conducting its duties and functions, especially related to monitoring and assessing the good corporate governance within the Company in terms of the risk management implementation, as well as providing professional opinions and recommendations relating to but not limited to:

1. Conducting evaluation on the conformity between the risk management policy and the implementation of the policy.
2. Monitoring and evaluating the function implementation of the Company's working unit in charge of risk management.
3. Reviewing and evaluating the risk management report made by the Company.
4. Monitoring the adequacy of the process of identification, measurement, monitoring, control, and risk management information system conducted by the Company.
5. Evaluating the Company's compliance with prevailing laws and regulations related to risk management.
6. Exercising other duties assigned by the Board of Commissioners.

PROGRAM PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI

TRAINING AND/OR COMPETENCE DEVELOPMENT PROGRAM

Perseroan memberikan kesempatan anggota Komite Pemantau Risiko untuk mengikuti program peningkatan kompetensi guna meningkatkan wawasan dan pengetahuannya yang menunjang pelaksanaan tugas anggota Komite Pemantau Risiko agar senantiasa relevan dengan perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perseroan.

Kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The Company provides the opportunity for the Risk Monitoring Committee to participate in competency development program to improve his/her insight and knowledge to support the duties of the Risk Monitoring Committee, so that it is always relevant to the latest developments in the Company's business.

The competency development attended by members of the Risk Monitoring Committee in 2024 are as follows:

Nama Name	Topik Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Time
Ferry Irawan	*Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG and SDGs*	GRC Summit	22 – 23 Agustus 2024 22-23 August 2024
	Training Asean Global Leadership Program (AGLP)	AGLP	2 – 6 September 2024 2 – 6 September 2024
Belis Siswanto	*Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG and SDGs*	GRC Summit	22 – 23 Agustus 2024 22-23 August 2024

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO
RISK MONITORING COMMITTEE'S MEETING

Kebijakan rapat Komite Pemantau Risiko mengacu Piagam Komite Pemantau Risiko, Komite Pemantau Risiko wajib menyelenggarakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

The Risk Monitoring Committee meeting policy refers to the Risk Monitoring Committee Charter. The Risk Monitoring Committee must hold regular meetings at least once a month.

PELAKSANAAN FREKUENSI RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2024
FREQUENCY OF RISK MONITORING COMMITTEE MEETINGS IN 2024

Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 21 kali rapat.

In 2024, the Company's Risk Monitoring Committee held 21 meetings.

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee's Meeting		
		Jumlah Rapat Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance
Ferry Irawan[1]	Ketua Pemantau Risiko Chairman of the Risk Monitoring Committee	11	11	100%
Iqbal Islami[2]	Ketua Pemantau Risiko Chairman of the Risk Monitoring Committee	10	10	100%
Belis Siswanto	Anggota Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring	21	21	100%
Ahmad Ghufron[3]	Anggota Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring	10	10	100%
Rata-Rata Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee's Average Attendance				**100%**

Keterangan:
[1] menjabat sejak 27 Agustus 2024
[2] berhenti menjabat sejak 26 Agustus 2024
[3] berhenti menjabat sejak 19 Agustus 204

Remark:
[1] served in the office since 27 August 2024
[2] ceased to serve since 26 August 2024
[3] ceased to serve since 19 August 2024

REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2024
REALIZATION OF THE RISK MONITORING COMMITTEE WORK PROGRAM IN 2024

Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko Perseroan telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya yang telah direncanakan dalam program Kerja Komite Pemantau Risiko, dengan rincian sebagai berikut:

In 2024, the Company's Risk Monitoring Committee implemented various activities as part of its duties and responsibilities that have been planned in the Risk Monitoring Committee Work Program, with the following details:

No.	Uraian Kegiatan Description	Jadwal Pelaksanaan Schedule	Realisasi Kegiatan Realization
Aspek Perencanaan Planning			
1.	Penyusunan RKA KPR Tahun 2025 Preparation of the Risk Monitoring Committee 2025 Work Program & Budget (RKA)	Juli - September July-September	· 18 Juli 2024 · 24 s.d. 25 Agustus 2024 · 18 July 2024 · 24- 25 August 2024
2.	Penyiapan Bahan RKA Dewan Komisaris Tahun 2025 Preparation of 2025 RKA for the Board of Commissioners	September	· 18 Juli 2024 · 24 s.d. 25 Agustus 2024 · 18 July 2024 · 24- 25 August 2024
3.	Penyiapan Bahan Usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris Tahun 2025 Preparation of the Proposed 2025 Performance Contract (IKU) of the Board of Commissioners	September	24 s.d. 25 Agustus 2024 24- 25 August 2024
4.	Penelahaan atas Usulan RKAP dan/atau RJPP PT PII Tahun 2025 Review of the proposed IIGF's WP&B and/or RJPP in 2025	Juli – September (sesuai dengan jadwal RUPS) July - September (in accordance with the GMS schedule)	· 12 Oktober 2024 · 24 Oktober 2024 Tanggapan ke Direksi: S-46/PII/DK/1024 tanggal 30 Oktober 2024 · 12 October 2024 · 24 October 2024 Response to the Board of Directors: S-46/PII/DK/1024 dated 30 October 2024
5.	Penyiapan Bahan Tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS atas Rancangan RKAP dan/atau RJPP Tahun 2025 Preparation of Materials for the Board of Commissioners' Responses to the GMS on the 2025 WP&B and/or RJPP draft	Desember (sesuai dengan jadwal RUPS) December (in accordance with the GMS schedule)	Rapat Dewan Komisaris: 24 Oktober 2024 Tanggapan ke RUPS: S-49/PII/DK/1124 tanggal 14 November 2024 Board of Commissioners' Meeting: 24 October 2024 Response to the GMS: S-49/PII/DK/1124 dated 14 November 2024
Aspek Pengawasan Supervisory			
6.	Pelaksanaan Rapat Internal KPR Internal Risk Monitoring Committee Meeting	Sesuai Kebutuhan As Needed	· 25 Januari 2024 25 January 2024 · 23 Februari 2024 23 February 2024 · 25 Juni 2024 25 June 2024 · 19 September 2024 19 September 2024
7.	Pembahasan dengan Divisi Risk Management Discussion with Risk Management Division	Triwulanan Quarterly	· 25 Januari 2024 25 January 2024 · 27 Maret 2024 27 March 2024 · 23 April 2024 23 April 2024 · 12 Juli 2024 12 July 2024 · 9 Oktober 2024 9 October 2024
8.	*Monitoring* dan Evaluasi atas Kebijakan Manajemen Risiko dan Pelaksanaannya Monitoring and Evaluation of Risk Management Policy and Implementation	Triwulanan Quarterly	Dilaksanakan tiap triwulan bersama dengan Divisi RM Conducted quarterly together with Risk Management Division
9.	Melakukan Evaluasi atas Pelaksanaan RKAP untuk Aspek Pengelolaan Risiko Evaluating the WP&B in terms of Risk Management	Triwulanan Quarterly	Dilaksanakan tiap triwulan bersama dengan Divisi RM & divisi terkait Conducted quarterly together with Risk Management Division & related division
10.	Evaluasi atas Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko yang Disusun dan Dilaksanakan oleh Perseroan Evaluation of Risk Management Policies and Strategies Formulated and Applied by the Company	Triwulanan Quarterly	Dilaksanakan tiap triwulan bersama dengan Divisi RM Conducted quarterly together with Risk Management Division

No.	Uraian Kegiatan Description	Jadwal Pelaksanaan Schedule	Realisasi Kegiatan Realization
11.	Penelaahan Rencana Kerja Divisi Risk Management Review of the 2024 Work Program of the Risk Management Division	Awal Tahun Beginning of the Year	Rencana Kerja 2024: 25 Januari 2024 2024 Work Program: 25 January 2024
12.	Rapat dengan divisi-divisi terkait aspek risiko dari masing-masing divisi Meetings with divisions regarding the risk aspects of each division	Triwulanan Quarterly	Dilaksanakan bersamaan dengan Pembahasan Divisi RM & Rapat BOC-BOD · Rapat Lanjutan Pembahasan Kebijakan Pengembangan Karier: 14 Agustus 2024 · Rapat *Update* Tindak Lanjut MoU Kementerian Dalam Negeri dan Pembahasan Surat Pemegang Saham mengenai Gejala Penurunan Kinerja Periode September 2024: 20 November 2024 Held in conjunction with Risk Management Discussion & Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings · Follow-up Meeting on Career Development Policy: 14 August 2024 · Update Meeting on Follow-up of MoU with Ministry of Home Affairs and Discussion of Shareholders' Letter on Symptoms of Performance Decline in September 2024: 20 November 2024
13.	Penelahaan atas Laporan Manajemen Risiko Review of Risk Management Report	Sesuai periode pelaporan As per reporting period	Disampaikan melalui rapat dan Surat Dekom kepada Direksi: · Evaluasi Manajemen Risiko Tahun 2023: S-08/PII/DK/0224 tanggal 26 Februari 2024 · Evaluasi Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2024: S-17/PII/DK/0424 tanggal 29 April 2024 · Evaluasi Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2024: S-28/PII/DK/0724 tanggal 25 Juli 2024 · Evaluasi Manajemen Risiko Triwulan III Tahun 2024 disampaikan melalui Rapat KPR dengan Divisi RM, Rapat KPR dengan divisi terkait gejala penurunan kinerja dan Rapat BOC-BOD Periode November 2024 Submitted through meetings and Board of Commissioners' Letter to the Board of Directors: · Risk Management Evaluation in 2023: S-08/PII/DK/0224 dated 26 February 2024 · Risk Management Evaluation in Q1 2024: S-17/PII/DK/0424 dated 29 April 2024 · Risk Management Evaluation in Q2 2024: S-28/PII/DK/0724 dated 25 July 2024 · Risk Management Evaluation in Q3 2024 was submitted via Risk Monitoring Committee Meeting with Risk Management Division, Risk Monitoring Committee Meeting with divisions related to symptoms of performance decline, and Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors in November 2024.
14.	Penelaahan Laporan Manajemen Bulanan dengan Fokus pada Aspek Manajemen Risiko Reviewing Monthly Management Report with Focus on Risk Management Aspects	Bulanan Monthly	Dilaksanakan tiap bulan, pada: · Rapat Teknis Organ Dekom bersama Manajemen · Rapat BOC Monthly, in: · Technical Meeting of Committees Reporting to the Board of Commissioners, with Management · Meetings of the Board of Commissioners

No.	Uraian Kegiatan Description	Jadwal Pelaksanaan Schedule	Realisasi Kegiatan Realization
15.	Pembahasan Gejala Penurunan Kinerja Discussion of Symptoms of Performance Decline	Sesuai Disposisi Dewan Komisaris As per Disposition from the Board of Commissioners	· 26 Januari 2024 · 23 Agustus 2024 · 28 Oktober 2024 · 26 January 2024 · 23 August 2024 · 28 October 2024
16.	*Monitoring* atas Proyek yang Telah Dijamin Monitoring of Projects Underwritten	Sesuai Jadwal Divisi Project Monitoring As Scheduled by the Project Monitoring Division	· Pekanbaru · Makassar · Semarang · Purwakarta · Singkawang
17.	Penelahaan Aspek Risiko atas Pemberian Tanggapan (*Response*) kepada Direksi/RUPS Review of Risk Aspects of Providing Response to the Board of Directors/GMS	Sesuai Disposisi Dewan Komisaris As per Disposition from the Board of Commissioners	· Gejala Penurunan Kinerja: · Tanggapan atas Penggunaan PMN Triwulan IV Tahun 2023 · Tanggapan atas IKU Individual Direksi Tahun 2024 · Evaluasi RKAP 2023 dan Pelaksanaan RKAP 2024 · Laporan Pengawasan RKAP Semester II Tahun 2023 · Laporan Realisasi IKU Dekom Triwulan IV Tahun 2023 · Evaluasi Manajemen Risiko Tahun 2023 · Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dekom Triwulan IV Tahun 2024 · Tanggapan atas Rencana Perjalanan Dinas Direksi · Penetapan IKU Individual Direksi Tahun 2024 · Evaluasi Kebijakan Mutu atau Kepuasan Layanan Perseroan · Evaluasi Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2024 · Reviu dan Arahan atas Capaian Kinerja PT PII Triwulan I Tahun 2024 · Tanggapan atas Penggunaan PMN Triwulan I Tahun 2024 · Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Kinerja Operasional PT PII Tahun 2023 · Tanggapan atas Rencana Perjalanan Dinas Direksi · Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dekom Triwulan I Tahun 2024 · Tanggapan atas Rencana Perjalanan Dinas Direksi dan Dewan Komisaris · Evaluasi Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2024 · Laporan Realisasi IKU Dekom Triwulan II Tahun 2024 · Evaluasi Kebijakan Teknologi Informasi · Telaah Kebijakan Pengelolaan SDM dan Pengembangan Karier · Tanggapan atas Penggunaan PMN Triwulan II Tahun 2024 · Gejala Penurunan Kinerja Periode Juli 2024 · Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dekom Triwulan II Tahun 2024 · Laporan Pengawasan RKAP Semester I Tahun 2024 · Tanggapan atas Rencana Perjalanan Dinas Direksi dan Dewan Komisaris · Tanggapan atas Rencana Perjalanan Dinas Direksi · Tanggapan atas Penggunaan PMN Triwulan III Tahun 2024 · Gejala Penurunan Kinerja Periode September 2024 · Laporan Realisasi IKU Dekom Triwulan III Tahun 2024 · Telaah atas Usulan Rancangan RKAP Tahun Buku 2025 · Tanggapan atas Usulan Rancangan RKAP PT PII Tahun Buku 2025 · Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dekom Triwulan III Tahun 2024 · Telaah terhadap Perubahan Lingkungan Bisnis PT PII

No.	Uraian Kegiatan Description	Jadwal Pelaksanaan Schedule	Realisasi Kegiatan Realization
			· Symptoms of Performance Decline: · Response to the Utilisation of PMN in Q4 2023 · Response to Individual KPIs of the Board of Directors in 2024 · Evaluation of 2023 WP&B and Implementation of 2024 WP&B · Supervision Report of WP&B Semester II 2023 · Realization Report of Board of Commissioners' KPIs in Q4 2023 · Risk Management Evaluation in 2023 · Report on the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners in Q4 2024 · Response to Board of Directors' Business Trip · Determination of Individual KPIs of the Board of Directors in 2024 · Evaluation of the Company's Quality Policy or Service Satisfaction · Risk Management Evaluation in Q1 2024 · Review and Direction on IIGF's Performance Achievement in Q1 2024 · Response to the Utilization of PMN in Q1 2024 · Board of Commissioners' Supervisory Report on IIGF Operational Performance in 2023 · Response to Board of Directors' Business Trip · Report on the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners in Q1 2024 · Response to Board of Directors' and Board of Commissioners' Business Trip · Risk Management Evaluation in Q2 2024 · Realization Report of Board of Commissioners' KPIs in Q2 2024 · Evaluation of Information Technology Policies · Review of HR Management and Career Development Policies · Response to the Utilisation of PMN in Q2 2024 · Symptoms of Performance Decline in July 2024 · Report on the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners in Q2 2024 · Supervision Report of WP&B Semester I 2024 · Response to Board of Directors' and Board of Commissioners' Business Trip · Response to Board of Directors' Business Trip · Response to the Utilisation of PMN in Q3 2024 · Symptoms of Performance Decline in September 2024 · Realization Report of Board of Commissioners' KPIs in Q3 2024 · Review of the Proposed 2025 WP&B Draft · Response to the Proposed IIGF's 2025 WP&B Draft · Report on the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners in Q3 2024 · Review of Changes in IIGF's Business Environment
18.	Penelaahan Kebijakan dan Peraturan-Peraturan yang Terkait dengan Kegiatan Usaha Perseroan dengan Fokus pada Aspek Manajemen Risiko Review of Policies and Regulations Related to the Company's Business with a Focus on the Risk Management Aspects	Sesuai Disposisi Dewan Komisaris As per Disposition from the Board of Commissioners	Penelaahan PMN pada tanggal: PMN Review on: · 31 Januari 2024 31 January 2024 · 15 Februari 2024 15 February 2024 · 23 Februari 2024 23 February 2024 · 3 Mei 2024 3 May 2024 · 23 Agustus 2024 23 August 2024 · 28 Oktober 2024 28 October 2024

No.	Uraian Kegiatan Description	Jadwal Pelaksanaan Schedule	Realisasi Kegiatan Realization
19.	Pembahasan terkait Transaksi atau Tindakan dalam Lingkup Kewenangan Dewan Komisaris/RUPS Discussion of Transactions or Actions within the Scope of Authority of the Board of Commissioners/GMS	Sesuai Disposisi Dewan Komisaris As per Disposition from the Board of Commissioners	· Gejala Penurunan Kinerja · Tanggapan atas Penggunaan PMN Triwulan IV Tahun 2023 · Tanggapan atas IKU Individual Direksi Tahun 2024 · Evaluasi RKAP 2023 dan Pelaksanaan RKAP 2024 · Laporan Pengawasan RKAP Semester II Tahun 2023 · Laporan Realisasi IKU Dekom Triwulan IV Tahun 2023 · Evaluasi Manajemen Risiko Tahun 2023 · Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dekom Triwulan IV Tahun 2024 · Tanggapan atas Rencana Perjalanan Dinas Direksi · Penetapan IKU Individual Direksi Tahun 2024 · Laporan Realisasi IKU Dekom Triwulan I Tahun 2024 · Evaluasi Kebijakan Mutu atau Kepuasan Layanan Perseroan · Evaluasi Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2024 · Reviu dan Arahan atas Capaian Kinerja PT PII Triwulan I Tahun 2024 · Tanggapan atas Penggunaan PMN Triwulan I Tahun 2024 · Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Kinerja Operasional PT PII Tahun 2023 · Perjalanan Dinas Direksi · Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dekom Triwulan I Tahun 2024 · Tanggapan atas Rencana Perjalanan Dinas Direksi dan Dewan Komisaris · Evaluasi Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2024 · Laporan Realisasi IKU Dekom Triwulan II Tahun 2024 · Evaluasi Kebijakan Teknologi Informasi · Telaah Kebijakan Pengelolaan SDM dan Pengembangan Karier atas Penggunaan PMN Triwulan II Tahun 2024 · Gejala Penurunan Kinerja Periode Juli 2024 · Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dekom Triwulan II Tahun 2024 · Laporan Pengawasan RKAP Semester I Tahun 2024 · Tanggapan atas Rencana Perjalanan Dinas Direksi dan Dewan Komisaris · Tanggapan atas Rencana Perjalanan Dinas Direksi · Tanggapan atas Penggunaan PMN Triwulan III Tahun 2024 · Gejala Penurunan Kinerja Periode September 2024 · Laporan Realisasi IKU Dekom Triwulan III Tahun 2024 · Telaah atas Usulan Rancangan RKAP Tahun Buku 2025 · Tanggapan atas Usulan Rancangan RKAP PT PII Tahun Buku 2025 · Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dekom Triwulan III Tahun 2024 · Telaah terhadap Perubahan Lingkungan Bisnis PT PII

No.	Uraian Kegiatan Description	Jadwal Pelaksanaan Schedule	Realisasi Kegiatan Realization
			· Symptoms of Performance Decline · Response to the Utilisation of PMN in Q4 2023 · Response to Individual KPIs of the Board of Directors in 2024 · Evaluation of 2023 WP&B and Implementation of 2024 WP&B · Supervision Report of WP&B Semester II 2023 · Realization Report of Board of Commissioners' KPIs in Q4 2023 · Risk Management Evaluation in 2023 · Report on the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners in Q4 2024 · Response to Board of Directors' Business Trip · Determination of Individual KPIs of the Board of Directors in 2024 · Realization Report of Board of Commissioners' KPIs in Q1 2024 · Evaluation of the Company's Quality Policy or Service Satisfaction · Risk Management Evaluation in Q1 2024 · Review and Direction on IIGF's Performance Achievement in Q1 2024 · Response to the Utilization of PMN in Q1 2024 · Board of Commissioners' Supervisory Report on IIGF Operational Performance in 2023 · Board of Directors' Business Trip · Report on the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners in Q1 2024 · Response to Board of Directors' and Board of Commissioners' Business Trip · Risk Management Evaluation in Q2 2024 · Realization Report of Board of Commissioners' KPIs in Q2 2024 · Evaluation of Information Technology Policies · Review of HR Management and Career Development Policies · to the Utilisation of PMN in Q2 2024 · Symptoms of Performance Decline in July 2024 · Report on the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners in Q2 2024 · Supervision Report of WP&B Semester I 2024 · Response to Board of Directors' and Board of Commissioners' Business Trip · Response to Board of Directors' Business Trip · Response to the Utilisation of PMN in Q3 2024 · Symptoms of Performance Decline in September 2024 · Realization Report of Board of Commissioners' KPIs in Q3 2024 · Review of the Proposed 2025 WP&B Draft · Response to the Proposed IIGF's 2025 WP&B Draft · Report on the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners in Q3 2024 · Review of Changes in IIGF's Business Environment
20.	Pengawasan terhadap Implementasi Penjaminan dan PMN Supervision of the Implementation of Guarantee and PMN	Sesuai Disposisi Dewan Komisaris As per Disposition from the Board of Commissioners	· 31 Januari 2024 31 January 2024 · 15 Februari 2024 15 February 2024 · 23 Februari 2024 23 February 2024 · 3 Mei 2024 3 May 2024 · 23 Agustus 2024 23 August 2024 · 28 Oktober 2024 28 October 2024

No.	Uraian Kegiatan Description	Jadwal Pelaksanaan Schedule	Realisasi Kegiatan Realization
Aspek Pelaporan Reporting Aspect			
21.	Penyusunan Laporan Triwulanan KPR Preparation of Risk Monitoring Committee Quarterly Report	Triwulanan Quarterly	· Triwulan I: 26 April 2024 · Triwulan II: 17 Juli 2024 · Triwulan III: 14 November 2024 · Quarter I: 26 April 2024 · Quarter II: 17 July 2024 · Quarter III: 14 November 2024
22.	Penelaahan atas Laporan Manajemen Triwulanan Review of Quarterly Management Report	Triwulanan Quarterly	Dilaksanakan bersamaan dengan 1. Rapat Komite dengan Manajemen: · Triwulan I: 19 April 2024 · Triwulan II: 22 & 25 Juli 2024 · Triwulan III: 22 Oktober 2024 2. Rapat BOC: · Triwulan I: 30 April 2024 · Triwulan II: 29 Juli 2024 · Triwulan III: 24 Oktober 2024 Held in conjunction with 1. Committee meeting with the Management: · Quarter I: 19 April 2024 · Quarter II: 22 & 25 July 2024 · Quarter III: 22 October 2024 2. Meetings of the Board of Commissioners: · Quarter I: 30 April 2024 · Quarter II: 29 July 2024 · Quarter III: 24 October 2024
23.	Penyusunan Laporan Tahunan KPR Preparation of Risk Monitoring Committee Annual Report	Triwulan pertama tahun berjalan First quarter of the year	Laporan Tahunan KPR Tahun 2023 disampaikan pada tanggal 12 Februari 2023 Risk Monitoring Committee Annual Report was delivered on 12 February 2023
Aspek Penerapan GCG GCG Implementation			
24.	Pelaksanaan Penilaian Penerapan GCG Tahun 2023 oleh BPKP GCG Assessment in 2023 by BPKP	Januari - Maret January - March	· *Kick Off Meeting*: 15 Januari 2024 · Wawancara GCG Dekom: 16 Februari 2024 · *Pra Exit Meeting*: 22 Februari 2024 · *Exit Meeting*: 28 Februari 2024 · Kick Off Meeting: 15 January 2024 · GCG Interview with Board of Commissioners: 16 February 2024 · Pre-Exit Meeting: 22 February 2024 · Exit Meeting: 28 February 2024
25.	Pemantauan Tindak Lanjut Pelaksanaan AOI GCG Rekomendasi BPKP Tahun 2023 Monitoring the follow-up of the AOI GCG recommendations by BPKP in 2023	Maret - Desember March - December	· Penguatan SPI Perseroan · Evaluasi Manajemen Risiko Tahun 2023 · Pembahasan Kebijakan Mutu atau Kepuasan Layanan Perseroan · Evaluasi Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2024 · Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karier · Evaluasi Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2024 · Evaluasi Kebijakan Teknologi Informasi · Telaah atas Kebijakan Pengadaan PT PII · Telaah atas Kebijakan Akuntansi PT PII: · Evaluasi Manajemen Risiko Triwulan III Tahun 2024 disampaikan melalui Rapat KPR dengan Divisi RM pada tanggal 9 Oktober 2024 (notula rapat) · Telaah terhadap Perubahan Lingkungan Bisnis tanggal 20 Desember 2024

No.	Uraian Kegiatan Description	Jadwal Pelaksanaan Schedule	Realisasi Kegiatan Realization
			· Strengthening of Company's SPI · Risk Management Evaluation in 2023 · Discussion on the Company's Quality Policy or Service Satisfaction · Risk Management Evaluation in Q1 2024 · Career Development Policy and Implementation · Risk Management Evaluation in Q2 2024 · Evaluation of Information Technology Policies · Review of IIGF's Procurement Policy · Review of IIGF's Accounting Policy: · Risk Management Evaluation in Q3 2024 was submitted via Risk Monitoring Committee Meeting with the Risk Management Division on 9 October 2024 (Minutes of Meeting) · Review of Changes in Business Environment on 20 December 2024
26.	Penelaahan atas Perubahan Lingkungan Bisnis Perseroan Review of Changes in the Company's Business Environment	November	· 20 November 2024 · 20 Desember 2024 · 20 November 2024 · 20 December 2024
27.	Penelahaan atas Kebijakan dan Sistem Teknologi Informasi Perseroan Review of the Company's Information Technology Policy and System	April	· 26 April 2024 · 16 Agustus 2024 · 26 April 2024 · 16 August 2024
28.	Penelahaan atas Kebijakan Mutu atau Kepuasan Layanan Perseroan Review of the Company's Quality Policy or Service Satisfaction	Maret March	· 27 Maret 2024 · 4 April 2024 · 26 April 2024 · 27 March 2024 · 4 April 2024 · 26 April 2024
Aspek Lainnya Other Aspects			
29.	Pembahasan Draf *Annual Report* Tahun 2023 Discussion of the 2023 Annual Report Draft	Februari - Mei February - May	Dilakukan secara sirkuler oleh Organ Dekom dan Dekom. Conducted on a circular basis by the Board of Commissioners and Board of Commissioners' Organs.
30.	*Self Assessment* Kinerja Komite Pemantau Risiko Self Assessment of Risk Monitoring Committee Performance	Desember December	· 25 Januari 2024 25 January 2024 · 26 Juni 2024 26 June 2024 · 18 Juli 2024 18 July 2024 · 24 s.d. 25 Agustus 2024 24- 25 August 2024 · 25 September 2024 25 September 2024
31.	Peningkatan Kompetensi Anggota Komite Pemantau Risiko Competency Development of Risk Monitoring Committee Members	Sesuai Jadwal As Scheduled	· Ketua KPR (Iqbal Islami): *Executive Training: Leading Change for Organisational Transformation* tanggal 22 s.d. 26 Juli 2024 · Anggota KPR (Ahmad Ghufron dan Belis Siswanto): GRC *Summit* tanggal 22 s.d. 23 Agustus 2024 · Ketua KPR (Ferry Irawan): - GRC *Summit* tanggal 22 s.d. 23 Agustus 2024 - *Training Asean Global Leadership Program* tanggal 2 s.d. 6 September 2024 · Chairman of Risk Monitoring Committee (Iqbal Islami): Executive Training: Leading Change for Organisational Transformation on 22-. 26 July 2024 · Members of Risk Monitoring Committee (Ahmad Ghufron and Belis Siswanto): GRC Summit on 22- 23 August 2024 · Chairman of Risk Monitoring Committee (Ferry Irawan): - GRC Summit on 22- 23 August 2024 - Training ASEAN Global Leadership Program on 2- 6 September 2024

KOMITE DI BAWAH DIREKSI
COMMITTEE REPORTING TO THE BOARD OF DIRECTORS

Komite di bawah Direksi adalah organ pendukung Direksi yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Direksi dalam melakukan fungsi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus. Hingga akhir tahun 2024, PT PII memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI).

Committees reporting to the Board of Directors are supporting organs of the Board of Directors with collective responsibilities to assist the Board of Directors in performing certain functions that require specialized expertise. As of the end of 2024, IIGF has an Information Technology (IT) Steering Committee.

KOMITE PENGARAH TI
IT STEERING COMMITTEE

PT PII menetapkan Komite Pengarah TI melalui Surat Keputusan Direksi SK -038B/DIR/HC/1222 tentang Penunjukkan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi. Pembentukan Komite Pengarah TI bertujuan untuk memastikan rencana strategis teknologi informasi agar sejalan dengan rencana strategis Perseroan serta meningkatkan keunggulan bersaing melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna.

IIGF established the IT Steering Committee via the Board of Directors' Decree No. SK-038B/DIR/HC/1222 on the Appointment of Information Technology Steering Committee Members. The establishment of the IT Steering Committee has the objective of ensuring that the information technology strategic plan is in line with the Company's strategic plan, and to enhance competitive advantage through proper use of information technology.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN
STRUCTURE AND MEMBERSHIP

Sejalan dengan Surat Keputusan Direksi No. SK-038B/DIR/HC/1222, struktur dan keanggotaan Komite Pengarah TI adalah sebagai berikut:

In line with the Board of Directors' Decree No. SK-038B/DIR/HC/1222, the structure and membership of IT Steering Committee are as follows:

Ketua Chairman	:	Direktur Keuangan (yang membawah fungsi IT)	Finance Director (in charge of IT function)
Anggota Member	:	1. Direktur Utama (yang membawahi fungsi RM) 2. Kepala Divisi TI 3. Kepala Divisi RM	1. President Director (in charge of RM function) 2. Head of IT Division 3. Head of RM Division

PROFIL ANGGOTA KOMITE PENGARAH TI
MEMBERS OF IT STEERING COMMITTEE

Anggota Komite Pengarah TI salah satunya adalah Direktur Keuangan sehingga profil anggota Komite Pengarah TI dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, sub bab Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

One of the members of IT Steering Committee is the Finance Director. Therefore, his profile can be referred to in the Company Profile Chapter, subchapter of the Board of Directors' Profiles in this Annual Report.

PEDOMAN KOMITE PENGARAH TI
IT STEERING COMMITTEE CHARTER

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pengarah TI berpedoman pada Kebijakan Teknologi Informasi (IT *Policy*) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Pokok-pokok yang diatur dalam Pedoman tersebut antara lain adalah terkait:

1. Keselarasan Rencana Strategis TI dengan Rencana Strategis Perseroan.
2. Persetujuan terhadap IT Master Plan.
3. Pemantauan dan arahan atas implementasi Rencana Strategis TI.
4. Monitoring efektivitas penerapan Kebijakan TI di lingkungan Perseroan.
5. Penentuan prioritas terhadap inisiatif TI.
6. Perumusan Kebijakan dan Prosedur TI.
7. Penyelesaian isu atau permasalahan TI yang bersifat strategis.

In carrying out its duties and responsibilities, the IT Steering Committee is directed by the IT Policy of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). The main points regulated in the Charter are, among others, related to:

1. Alignment of IT Strategic Plan with the Company's Strategic Plan.
2. Approval of the IT Master Plan.
3. Monitoring and provision of advice on the IT Strategic Plan.
4. Monitoring the effectiveness of IT Policy within the Company.
5. Priority determination of IT initiatives.
6. Formulation of IT Policy and Procedures.
7. Resolution of strategic IT issues or problems.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Komite Pengarah TI mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan keselarasan Rencana Strategis TI dengan Rencana Strategis Perseroan
2. Memberikan persetujuan terhadap IT Master Plan
3. Melakukan pemantauan dan memberikan arahan atas implementasi Rencana Strategis TI
4. Memonitor efektivitas penerapan Kebijakan TI di lingkungan Perseroan
5. Menentukan prioritas terhadap inisiatif TI
6. Perumusan Kebijakan dan Prosedur TI
7. Penyelesaian terhadap isu-isu ataupun permasalahan TI yang bersifat strategis

IT Steering Committee has duties and responsibilities as follows:

1. Ensuring alignment of IT Strategic Plan with the Company's Strategic Plan
2. Approving the IT Master Plan
3. Monitoring and providing advice on the IT Strategic Plan
4. Monitoring the effectiveness of IT Policy within the Company
5. Prioritizing IT initiatives
6. Formulating IT Policy and Procedures
7. Resolving strategic IT issues or problems

PROGRAM PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI
TRAINING AND/OR COMPETENCE DEVELOPMENT PROGRAM

Selama tahun 2024, pelatihan yang diikuti oleh Komite Pengarah TI adalah sebagai berikut:

In 2024, the IT Steering Committee attended the following training:

Jabatan Position	Pelatihan Training	
Ketua Chairman Donny Hamdani	Dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, sub bab Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini	Can be referred to in the Company Profile Chapter, subchapter of the Board of Directors' Profiles in this Annual Report
Anggota Member M. Wahid Sutopo	Dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, sub bab Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini	Can be referred to in the Company Profile Chapter, subchapter of the Board of Directors' Profiles in this Annual Report

Jabatan Position	Pelatihan Training	
Anggota Member Achmad Abimanyu	a. CP3P *Level Preparation* b. *Enterprise Risk Governance Batch* I	a. CP3P Level Preparation b. Enterprise Risk Governance Batch I
Anggota Member Rian Ditha Prasetianti	a. *Enterprise Risk Governance Batch* I b. *Asean Risk Award dan Risk Governance* 2024 c. *Executive Briefing* Modernisasi Pengadaan d. Sertifikasi Kompetensi QCRO e. *Designing Sustainability & CSR Roadmap Based on* ISO 26000	a. Enterprise Risk Governance Batch I b. Asean Risk Award dan Risk Governance 2024 c. Modernizing Procurement Executive Briefing d. QCRO Certificate of Competency e. Designing Sustainability & CSR Roadmap Based on ISO 26000

RAPAT KOMITE PENGARAH TI
IT STEERING COMMITTEE'S MEETING

Tabel Realisasi Rapat Komite Pengarah TI Tahun 2024
Table: IT Steering Committee's Meetings in 2024

Waktu Pelaksanaan Time	Peserta Participant	Agenda Rapat Meeting Agenda	Arahan Instruction	
21 Oktober 2024 October 21, 2024	1. M. Wahid Sutopo 2. Donny Hamdani 3. Achmad Abimanyu 4. Rian Ditha Prasetianti	IT Maturity dan *Review* ITMP IT Maturity and ITMP Review	1. IT untuk dapat menampilkan pencapaian-pencapaian di ITMP review kepada perusahaan 2. Diskusi dengan user terkait alignment project-project IT antara ITMP dan kebutuhan terkini.	1. IT to be able to provide the achievements in the ITMP review to the company 2. Discussion with users regarding the alignment of IT projects between ITMP and current needs.

Tingkat Kehadiran Komite Pengarah TI Tahun 2024
Attendance of the IT Steering Committee in 2024

Jabatan Position	Jumlah Rapat Meetings	Kehadiran Attended
M. Wahid Sutopo	1 kali time	100%
Donny Hamdani	1 kali time	100%
Achmad Abimanyu	1 kali time	100%
Rian Ditha Prasetianti	1 kali time	100%

REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE PENGARAH TI TAHUN 2024
REALIZATION OF THE IT STEERING COMMITTEE WORK PROGRAM IN 2024

Sepanjang tahun 2024, Komite Pengarah TI telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya yang telah direncanakan dalam program Kerja Komite Pengarah TI, dengan rincian sebagai berikut:

In 2024, the IT Steering Committee implemented various activities as part of its duties and responsibilities that have been planned in the IT Steering Committee Work Program, with the following details:

No.	Uraian Kegiatan Description	Jadwal Pelaksanaan Schedule	Realisasi Kegiatan Realization
1.	IT Maturity dan *Review* ITMP IT Maturity and ITMP Review	21 Oktober 2024 21 October 2024	Selesai Finished

PENILAIAN KINERJA KOMITE PENGARAH TI
PERFORMANCE ASSESSMENT OF IT STEERING COMMITTEE

Evaluasi kinerja Komite Pengarah TI dilakukan oleh Direksi dengan mengacu pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pelaksanaan rapat Komite Pengarah TI. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Komite telah menjalankan tugasnya secara efektif dan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

The Board of Directors assesses the performance of the IT Steering Committee, with reference to the duties and responsibilities, including the conduct of IT Steering Committee meetings. The evaluation showed that the Committee has performed its duties effectively and in accordance with the prevailing guidelines.

SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat Perseroan yang diangkat secara khusus untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan Perseroan serta diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan. Perseroan membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan dengan tugas utama untuk menjaga citra positif Perseroan dengan membangun komunikasi dan hubungan yang baik antara Perseroan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan juga memastikan kepatuhan Perseroan dalam memenuhi aspek keterbukaan.

The Corporate Secretary is a Company's official who is specifically appointed to carry out the functions of the Corporate Secretary, and is appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanism. The Company established the Corporate Secretary with the main function to maintain the Company's positive image by establishing good communication and relationships between the Company, shareholders, and other stakeholders. The Corporate Secretary also ensures the Company complies with the transparency aspect.

PEJABAT SEKRETARIS PERUSAHAAN DAN DASAR PENGANGKATAN
CORPORATE SECRETARY OFFICER AND BASIS OF APPOINTMENT

Pada tahun 2024, terdapat pergantian Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK No. SK-037/DIR/HCOD/1024 tanggal 6 November 2024. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tersebut, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Sdri. Rian Ditha Prasetianti sebagai Plt. Pimpinan Divisi Corporate Secretary & Communication menggantikan Sdr. Yunan Novaris Arifidianto. Berikut profil Sekretaris Perusahaan per 31 Desember 2024:

In 2024, there was a change of Corporate Secretary based on the Board of Directors' Decree No. SK No. SK-037/DIR/HCOD/1024 dated 6 November 2024. Based on the Board of Directors' Decree, the Corporate Secretary is held by Mrs. Rian Ditha Prasetianti as Acting Head of Corporate Secretary & Communication, replacing Mr. Yunan Novaris Arifidianto. The following is the Corporate Secretary's profile as of 31 December 2024:

Rian Ditha Prasetianti

Plt. Pimpinan Divisi Corporate Secretary & Communication
Acting Head of Corporate Secretary & Communication

Kewarganegaraan Citizenship	: Warga Negara Indonesia	Indonesian
Usia Age	: 46 Tahun per 31 Desember 2024	46 years old as of 31 December 2024
Domisili Domicile	: Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia	Jakarta, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	: Jakarta, 15 Agustus 1978	Jakarta, 15 August 1978
Periode Jabatan Term of Office	: Sejak 2 Januari 2023	Since 2 January 2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	: Sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Akuntansi Universitas Indonesia (2000)	Bachelor of Economics Accounting, University of Indonesia (2000)
Sertifikasi Certification	: • *Certified PPP Professional* (CP3P) *Foundation Level* • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko • *Qualified Chief Risk Officer* (QCRO)	• Certified PPP Professional (CP3P) – Foundation Level • Level 3 Risk Management Certification by the Risk Management Certification Agency • Qualified Chief Risk Officer (QCRO)
Riwayat Jabatan Career History	: Bergabung dengan PT PII sejak 2 Januari 2023 sebagai Pimpinan Divisi Risk Management. Sebelumnya, mengawali karir sebagai Auditor pada salah satu Kantor Akuntan Publik, kemudian pernah menjabat di beberapa bank di Indonesia sebagai Senior Operational Risk Officer, Head of Supply Chain Management dan terakhir sebagai Head, Operational Risk Governance and Advisory.	Joined IIGF on 2 January 2023 as Head of the Risk Management Division. Previously, she started her career as an Auditor at a Public Accounting Firm, then served in several banks in Indonesia as Senior Operational Risk Officer, Head of Supply Chain Management, and Head of Operational Risk Governance and Advisory.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	: Plt. Pimpinan Divisi Corporate Secretary and Communication	Acting Head of Corporate Secretary & Communication

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah didasarkan pada Kualifikasi Sekretaris Perusahaan yang mencakup:

1. Cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Memiliki latar belakang pendidikan yang mampu mendukung kinerja/tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki pengalaman yang diperlukan berkaitan dengan usaha Perseroan;
3. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai di bidang hukum, keuangan, tata kelola perusahaan yang baik, manajerial, komunikasi dan keterampilan interpersonal yang baik; dan
4. Berdomisili di Indonesia.

The appointment of the Corporate Secretary is based on the Qualifications of the Corporate Secretary, which include:

1. Is capable of taking legal action;
2. Has an educational background that shall support the performance/duties and responsibilities, and has the necessary experience related to the Company's business;
3. Has adequate knowledge and understanding in the fields of law, finance, good corporate governance, managerial, communication, with good interpersonal skills; and
4. Is domiciled in Indonesia.

KEDUDUKAN DAN KEBERADAAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY'S POSITION AND EXISTENCE

Posisi Sekretaris Perusahaan dalam struktur organisasi Perseroan berada langsung di bawah Direktur Utama dengan Struktur Organisasi sebagai berikut:

In the Company's organizational structure, the Corporate Secretary is directly under the President Director, with the following Organizational Structure:

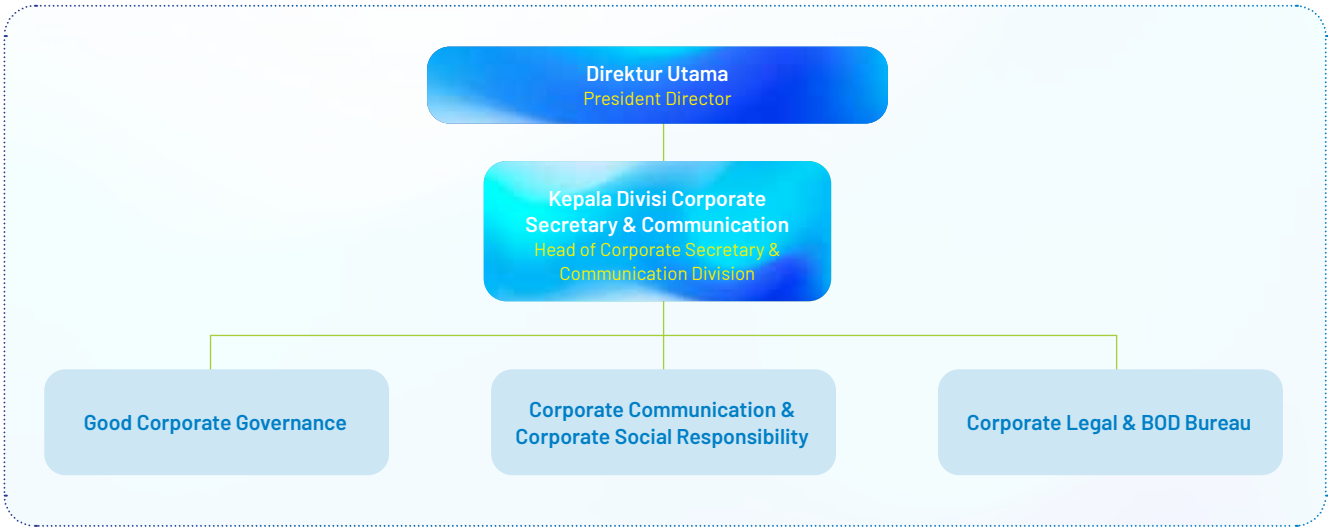

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN
TASKS AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perusahaan berperan dalam menjembatani komunikasi antara organ Perseroan, hubungan antara Perseroan dengan stakeholders, hubungan kelembagaan serta kepatuhan terhadap hukum dan tata kelola perusahaan yang baik.

The Corporate Secretary has a role to liaise the communication between the Company's organs, relationships between the Company and stakeholders, institutional relationships, and compliance with laws and good corporate governance.

Berikut tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan:

1. Mengelola kegiatan kesekretariatan Perseroan termasuk mengelola dokumen Perseroan;
2. Pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan penguatan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di lingkungan Perseroan;
3. Penghubung antar Organ Perseroan;
4. Memastikan pelaksanaan pembinaan hubungan dengan pihak eksternal, termasuk lembaga pemerintah dan non pemerintah, institusi lain, pemegang saham serta *stakeholders* lainnya;

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary:

1. Managing the Company's secretarial activities including the Company's documents;
2. Organizing activities, monitoring, and strengthening the Good Corporate Governance principles within the Company;
3. Liaison between the Company's Organs;
4. Ensuring the establishment of relationships with external parties, including government and non-government agencies, other institutions, shareholders, and other stakeholders;

5. Mengawasi kegiatan komunikasi perusahaan termasuk *corporate branding* di dalam maupun luar lingkungan kerja Perseroan;
6. Mengawasi dan mengimplementasikan kegiatan *Corporate Social Responsibility* Perseroan;
7. Pemberian saran hukum kepada Perseroan, termasuk (i) pelaksanaan penyiapan, perumusan, dan penyelesaian peraturan, perjanjian dan kerja sama Perseroan; (ii) inventarisasi dokumentasi hukum; (iii) konsultasi dan bantuan hukum untuk kepentingan Perseroan dan karyawan di dalam maupun di luar pengadilan;
8. Memimpin proses kajian peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap bisnis Perseroan;
9. Memastikan asesmen dan mitigasi risiko telah dilakukan pada Divisi Corporate Secretary & Communication;
10. Menyusun dan mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Divisi Corporate Secretary & Communication; dan
11. Peningkatan kompetensi SDM Divisi Corporate Secretary & Communication.

5. Supervising corporate communication activities including corporate branding inside and outside the Company's working environment;
6. Supervise and implement activities of the Corporate Social Responsibility activities;
7. Providing legal advice to the Company, including (i) preparation, formulation, and completion of regulations, agreements, and cooperation of the Company; (ii) inventory of legal documentation; (iii) consultation and legal assistance for the interest of the Company and employees in and out of court;
8. Leading the review process of laws and regulations that affect the Company's business;
9. Ensuring risk assessment and mitigation has been conducted by the Corporate Secretary & Communication Division;
10. Preparing and supervising the work program and budget of the Corporate Secretary & Communication Division; and
11. Enhancing the competence of the Corporate Secretary & Communication Division's human resources.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI
COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

Perseroan memberikan kesempatan kepada Sekretaris Perusahaan untuk mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan. Informasi mengenai kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti pejabat Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The Company provides opportunities for the Corporate Secretary to participate in various competency development that can support the implementation of the Corporate Secretary function. Information regarding training and competency improvement attended by Corporate Secretary officials in 2024 is as follows:

No.	Topik Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Time
1	Sosialisasi *Enterprise Risk Management* Socialization of Enterprise Risk Management	PT PII (Persero)	12 Juni 2024 12 June 2024
2	*Enterprise Risk Governance Batch* I	PT PII (Persero)	4 September 2024 4 September 2024
3	*Asean Risk Award dan Risk Governance* 2024	ERMA	3 Juli 2024 3 July 2024
4	Sertifikasi Kompetensi QCRO QCRO Certificate of Competency	CRMS	3 Oktober 2024 3 October 2024
5	*Executive Briefing* Modernisasi Pengadaan Modernizing Procurement Executive Briefing	ADW Consultant	8 Oktober 2024 8 October 2024
6	*Designing Sustainability & CSR Roadmap Based on ISO* 26000	PT PII (Persero)	10 Desember 2024 10 December 2024

URAIAN PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

JOB DESCRIPTION OF THE CORPORATE SECRETARY

Pada tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan fungsi Sekretaris Perusahaan. Berikut rincian kegiatan Sekretaris Perusahaan pada periode tersebut:

In 2024, the Corporate Secretary has carried out several activities that are part of the duties, responsibilities, and functions of the Corporate Secretary. The following are details of the Corporate Secretary's activities during the period:

Aktivitas/Kegiatan Activity	Keterangan Description	
Pengelolaan Dokumen Perseroan Document Governance Company	Kegiatan pengelolaan dokumen Perseroan yang dilakukan di tahun 2024 termasuk dokumen hukum, daftar khusus, dan dokumen korespondensi Perseroan	The Company's document governance is carried out in 2024, which includes legal documents, special registers, and correspondence documents of the Company.
Penyelenggaraan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris serta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Conducting Meetings Board of Directors and Board of Commissioners and General Meeting of Shareholders (GMS)	Rincian kegiatan penyelenggaraan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris serta RUPS di tahun 2024 adalah sebagai berikut: - Rapat Direksi sebanyak 57 kali - Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 16 kali - RUPST Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 pada tanggal 21 Mei 2024 - RUPST RKAP Tahun 2025 pada tanggal 16 Desember 2024	Details of the activities of holding the Board of Directors and Board of Commissioners Meetings as well as the GMS in 2024 are as follows: - 57 Board of Directors' meetings - 16 Joint Meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors - AGMS of the 2023 Fiscal Year Annual Report on 21 May 2024 - AGMS of the 2025 WP&B on 16 December 2024
Kewajiban Pelaporan Reporting Obligations	- Penyampaian Laporan Manajemen Bulanan kepada Dewan Komisaris. - Penyampaian Laporan Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2023 kepada Pemegang Saham. - Penyampaian Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun 2023 kepada Pemegang Saham dan menayangkan pada situs web Perseroan.	- Submission of Monthly Management Report to the Board of Commissioners. - Submission of Good Corporate Governance Assessment Report for 2023 Fiscal Year to Shareholders. - Submission of the 2023 Annual Report to Shareholders and posting it on the Company's website.
Koordinasi Kegiatan terkait penerapan GCG Coordination of GCG activities	Kegiatan terkait penerapan GCG yang dilakukan di tahun 2024 antara lain: - Penilaian atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2023 - *Monitoring* dan evaluasi atas pemenuhan area of *improvement* atas hasil penilaian GCG tahun buku 2023	In 2024, the activities related to the GCG include: - Assessment of the Good Corporate Governance for the 2023 Fiscal Year - Monitoring and evaluation of the fulfillment of areas of improvement on the GCG assessment for the 2023 fiscal year
Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan pemberian saran hukum kepada Perseroan Ensuring compliance with law and advising legal issues to the Company	Kegiatan terkait pemenuhan pemberian saran hukum kepada Perseroan yang dilakukan di tahun 2024 antara lain: - Kajian/Analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap Perseroan; - Pendapat hukum terhadap kondisi/isu yang dihadapi Perseroan; - Penelaahan Perjanjian Kerja Sama, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerahasiaan dan Surat Keputusan Direksi; dan - Pembuatan Akta dan pengurusan perizinan Perseroan.	Activities related to the fulfillment of legal advice to the Company in 2024 include: - Review/Analysis of laws and regulations that affect the Company; - Legal opinion on conditions/issues faced by the Company; - Review of Cooperation Agreements, Memorandum of Understanding, Confidentiality Agreements, and the Board of Directors' Decrees; and - Deed drafting and Company's licenses.

Aktivitas/Kegiatan Activity	Keterangan Description	
Program meningkatkan citra Perseroan *(image building)* dan hubungan dengan *stakeholder* Programs to enhance the Company's image (image building) and relationship with stakeholders	Telah dilaksanakan kegiatan terkait komunikasi perusahaan di sepanjang tahun 2024, di antaranya: - Publikasi informasi Perseroan melalui media massa dan media sosial; - Penguatan komunikasi dan relasi dengan media dan *stakeholders*; - Pengelolaan strategi komunikasi Perseroan; - Pelaksanaan kegiatan Perseroan yang melibatkan stakeholders guna memperkuat citra dan reputasi Perseroan; - Pelaksanaan *Stakeholder Survey;* dan - Pembaruan informasi pada *Website* Perseroan.	Activities related to the Company's communication in 2024 included: - Publication of the Company's information via mass media and social media; - Strengthening communication and relations with the media and stakeholders; - Management of the Company's communication strategy; - The Company's activities involving stakeholders to strengthen the Company's image and reputation; - Stakeholder Survey; and - Information update on the Company's Website.
Koordinasi kegiatan *Corporate Social Responsibility* Perseroan Coordinating the Corporate Social Responsibility activities	Divisi Corporate Secretary & Communication telah menyelenggarakan kegiatan CSR yang tepat sasaran sesuai agenda kegiatan CSR Perseroan untuk tahun 2024.	Divisi Corporate Secretary & Communication telah menyelenggarakan kegiatan CSR yang tepat sasaran sesuai agenda kegiatan CSR Perseroan untuk tahun 2024.

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

EVALUATION OF DUTIES CARRIED OUT CORPORATE SECRETARY

Kebijakan evaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan tertuang dalam *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah disepakati dan disahkan oleh manajemen Perseroan. Indikator pelaksanaan evaluasi tugas Sekretaris Perusahaan didasarkan pada tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.

The policy for evaluating the Corporate Secretary's duties is contained in the Key Performance Indicators (KPI) that have been agreed and ratified by the Company's management. Indicators for the evaluation of the Corporate Secretary's tasks are based on the Corporate Secretary's duties and responsibilities.

Realisasi pencapaian kinerja Sekretaris Perusahaan tahun 2024 mencapai sebesar 111% dari target yang ditetapkan sebelumnya 100%.

The Corporate Secretary's performance achieved 111% out of the previously set target of 100% in 2024.

Indikator KPI yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Sekretaris Perusahaan mencakup beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Optimalisasi sinergi BUMN/Lembaga Kementerian Keuangan;
2. Pencapaian tingkat pemahaman Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan stakeholders lainnya yang baik;
3. Peningkatan citra dan reputasi Perseroan melalui program komunikasi konvensional maupun digital;
4. Pengelolaan Program CSR berbasis CSV;
5. Optimalisasi pelaksanaan kepatuhan hukum;
6. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan pimpinan dan protokoler;
7. Pengelolaan risiko divisi;
8. Pelaksanaan tata kelola yang baik; dan
9. Penyelesaian tindak lanjut sesuai arahan Komisaris.

The KPI indicators used to evaluate the performance of the Corporate Secretary include the following criteria:

1. Optimization of synergies between SOEs/Institutions under the Ministry of Finance;
2. Achieving a good level of Government Contracting Agency's (GCA) and other stakeholders' understanding;
3. Improved the Company's image and reputation via conventional and digital communication programs;
4. CSV-based CSR Program Management;
5. Optimization of legal compliance;
6. Secretarial leader and protocol functions;
7. Division's risk management;
8. Good corporate governance implementation; and
9. Completion of follow-up as directed by the Board of Commissioners.

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

Fungsi Audit Internal Perseroan dijalankan oleh Divisi Internal Audit. Perseroan membentuk Divisi Internal Audit dengan peran sebagai mitra strategis profesional, independen, obyektif, bertanggung jawab dan dapat menjadi penasihat yang terpercaya (*trusted advisor*) bagi Direksi dan jajaran Manajemen dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Perseroan.

Pelaksanaan Audit Internal diharapkan dapat membantu Perseroan mendeteksi lebih dini permasalahan dan kelemahan di dalam unit kerja terutama bila terjadi penurunan atau penyimpangan terhadap kinerja dalam rangka mencapai sasaran Perseroan khususnya pelaksanaan RKAP tahun berjalan. Hasil penelaahan Audit Internal kemudian dirangkum dan dibuatkan rekomendasi perbaikan kepada Direksi dan jajaran manajemen (*early warning system*).

The Company's Internal Audit function is carried out by the Internal Audit Division. The Company established the Internal Audit Division with the role of a professional, independent, objective, responsible strategic partner, and trustworthy advisor to the Board of Directors and Management in actualizing the Company's vision, mission, and objectives.

The Internal Audit shall assist the Company to detect problems and weaknesses in the working unit early, especially if there is a decline or deviation in the performance to achieve the Company's objective, specifically in the WP&B implementation for the current year. The Internal Audit review is summarized, and recommendations for improvement are formulated for the Board of Directors and management (early warning system).

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEDUDUKAN AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT'S ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND POSITION

Fungsi Audit Internal di Perseroan dijalankan oleh Divisi Audit Internal. Berikut bagan yang menggambarkan struktur organisasi Divisi Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK-004/PII-BOD/0322 tanggal 18 Maret 2022:

The Company's Internal Audit function is carried out by the Internal Audit Division. The following chart illustrates the organizational structure of the Company's Internal Audit based on the Board of Directors' Decree No. SK-004/PII-BOD/0322 dated 18 March 2022:

Struktur Organisasi Divisi Audit Internal
The Organizational Structure of the Internal Audit Division

Divisi Audit Internal dibentuk untuk melaksanakan tugas pengawasan atas pelaksanaan proses dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Perseroan serta memberikan rekomendasi perbaikan sesuai dengan rencana, program, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direksi. Sebagai bagian pelaksanaan tugasnya, maka Divisi Internal Audit dapat melakukan pertemuan langsung dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk menyampaikan laporan mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan hasil dan proses pengawasan.

The Internal Audit Division was established to supervise the processes and activities of all working units within the Company and provide recommendations for improvement in accordance with the plans, programs, and policies set forth by the Board of Directors. As part of its duties, the Internal Audit Division may conduct direct meetings with the President Director, Board of Commissioners, and Audit Committee, to submit reports on various matters related to the supervision results and process.

PEJABAT AUDIT INTERNAL DAN DASAR PENGANGKATAN
INTERNAL AUDITOR AND BASIS OF APPOINTMENT

Divisi Audit Internal dipimpin oleh Pimpinan Divisi Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Perseroan telah menunjuk Sdr. Deki Santo Wibowo untuk menjabat Pimpinan Divisi Internal Audit sejak tanggal 5 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK-004/DIR/HC/0220 dan Surat Dewan Komisaris SR-01/PII/ DK/0220.

The Internal Audit Division is led by the Head of Internal Audit, who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. The Company appointed Mr. Deki Santo Wibowo as the Head of Internal Audit on 5 March 2020, pursuant to the Board of Directors' Decree SK-004/DIR/HC/0220 and Board of Commissioners' Letter SR-01/PII/ DK/0220.

Deki Santo Wibowo

Pimpinan Divisi Audit Internal
Head of Internal Audit

Kewarganegaraan Citizenship	: Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	: 48 tahun per 31 Desember 2024	48 years old as of 31 December 2024
Usia Age	: Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Central Jakarta, Special Capital Region of Jakarta
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	: Jakarta, 7 Desember 1976	Jakarta, 7 December 1976
Periode Jabatan Term of Office	: Menjabat sejak: 6 September 2021	Served in the office since: 6 September 2021
Riwayat Pendidikan Educational Background	: Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1999)	Bachelor of Accounting from the Faculty of Economics, University of Indonesia (1999)
Sertifikasi Certification	: Memperoleh *Certified Internal Auditor* (CIA) dari *The Institute of Internal Auditors* (IIA) (2014), *Certified Public Accountant* (CPA) dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2011), *Enterprise Risk Management Certified Professional* (ERMCP) dari *Enterprise Risk Management Academy* (ERMA) (2013), *Certified Enterprise Risk Governance* (CERG) dari *Enterprise Risk Management Academy* (ERMA) (2017), *Information Technology Infrastructure Library* (ITIL) – *Foundation Certificate* dari Pearson Vue (2019). I*ndonesia Internal Audit Practitioner* (IIAP) - dari The Institute of Internal Auditors (IIA) (2022), *Certified Internal Audit Executive* (CIAE) dari BPKP – GIA Corpu (2022).	Obtained Certified Internal Auditor (CIA) from the Institute of Internal Auditors (IIA) (2014), Certified Public Accountant (CPA) from the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) (2011), Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP) from the Enterprise Risk Management Academy (ERMA) (2013), Certified Enterprise Risk Governance (CERG) from the Enterprise Risk Management Academy (ERMA) (2017), Information Technology Infrastructure Library (ITIL) – Foundation Certificate from Pearson Vue (2019). Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP) - from the Institute of Internal Auditors (IIA) (2022), Certified Internal Audit Executive (CIAE) from BPKP – GIA Corpu (2022).
Rangkap Jabatan Career History	: Pernah menjabat sebagai Pimpinan Divisi Organization Development (OD) di PT PII. Pengalaman di bidang audit dan keuangan termasuk sebagai Auditor Internal maupun Auditor Eksternal selama lebih dari 20 tahun. Karier sebagai Auditor Internal ditempuhnya selama 8 tahun sebagai ICS Compliance Head. Sebelum berkarir sebagai Auditor Internal, beliau berkarir di beberapa Kantor Akuntan Publik dan perusahaan terbuka selama kurang lebih 19 tahun	Previously served as Head of the Organization Development (OD) at IIGF. Have experience in the audit and finance sector, as an Internal Auditor and External Auditor for more than 20 years. Had a career as an Internal Auditor for 8 years as ICS Compliance Head. Prior to his career as an Internal Auditor, he worked in several Public Accounting Firms and public companies for approximately 19 years
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	: Tidak merangkap jabatan di Perseroan maupun di luar Perseroan	Has no concurrent positions internally or externally

PIAGAM AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT CHARTER

Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Audit Internal Perseroan merujuk pada Piagam Audit Internal terbitan ketiga yang disahkan pada Desember 2019 oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Piagam tersebut disusun mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pengawasan Menteri Keuangan.

Piagam Audit Internal tersebut antara lain mengatur tentang:
- Latar Belakang
- Tujuan
- Visi dan Misi Audit Internal
- Struktur, Persyaratan dan Independensi Auditor Internal
- Cakupan, Kewenangan dan Tanggung Jawab Auditor Internal
- Perencanaan Penugasan Audit Internal
- Eksekusi Penugasan di Lapangan (Fieldwork)
- Pelaporan Hasil Penugasan Audit Internal
- Tindak Lanjut atas Rekomendasi Audit Internal
- Penutup

In performing its duties, the Company's Internal Audit refers to the third edition of the Internal Audit Charter, ratified in December 2019 by the Board of Directors and Board of Commissioners. The Charter was formulated with reference to the Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, and Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 88/ PMK.06/2015 on the Implementation of Good Corporate Governance in the Company (Persero) under the Supervision of the Minister of Finance.

The Internal Audit Charter, among others, regulates:
- Introduction
- Objectives
- Internal Audit's Vision and Mission
- Internal Auditor's Structure, Requirements, and Independence
- Internal Auditor's Scope, Authorities, and Responsibilities
- Internal Audit Appointment Process
- Execution of Fieldwork Assignments
- Reporting of Internal Audit Assignment Results
- Follow-up on Internal Audit Recommendations
- Closing

SDM DAN SERTIFIKASI PROFESI
HUMAN RESOURCES AND PROFESSIONAL CERTIFICATION

Kualitas hasil pengawasan oleh Audit Internal ditentukan oleh kompetensi SDM-nya. Untuk itu, sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan audit, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta perkembangan industri. Berikut ini informasi sertifikasi profesi yang dimiliki personil Fungsi Audit Internal hingga akhir tahun 2024:

The quality of supervision results by Internal Audit is determined by the competence of its human resources. Therefore, professional certification is an important aspect for auditors to understand audit developments, specifically in terms of compliance with laws and regulations and industry developments. The information on professional certifications held by Internal Audit Function personnel as of the end of 2024 is as follows:

Jabatan Position	Jumlah (orang) Total (person)	Jenjang Pendidikan Education		
		D3/D4 Young Diploma (D3/D4)	S1 S1	S2 S2
SVP Audit Internal	1	-	✔	-
VP Audit Internal	1	-	-	✔
M Audit Internal	1	-	✔	-
AM Audit Internal	1	-	✔	-
Jumlah Total	**4**	**-**	**3**	**1**

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI

COMPETENCE DEVELOPMENT PROGRAM

Perseroan memberikan kesempatan kepada personil Divisi Internal Audit untuk mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan Divisi Audit Internal. Berikut kegiatan program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Pimpinan Divisi Internal Audit dan karyawan Divisi Internal Audit pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The Company provides opportunities for the Internal Audit Division to participate in various competence development that can support the Internal Audit Division's duties. In 2024, the Head of Internal Audit and Internal Audit employees participated in the following competence development programs:

Nama Name	Jabatan Position	Topik Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer
Deki Santo Wibowo	SVP	*Navigating The Global Internal Audit Standards*	Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia
		Leadership for Sustainable Impact GRC ESG *and* SDGs	Center for Risk Management & Sustainability (CRMS)
		Executive Briefing Modernisasi Pengadaan Modernizing Procurement Executive Briefing	Anggada Duta Wisesa (ADW) Consulting
		Certified Information Systems Auditor (CISA) *Review Course*	Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia University of Indonesia Computer Science Center
		Seminar Nasional: Bincang Satuan Pengawasan Intern (SPI) 2024 National Seminar: 2024 Internal Audit Talk	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Internal (FKSPI) Internal Audit Unit Communication Forum (FKSPI)
Oke Darmawireja	VP	Sosialisasi *Enterprise Risk Management* Socialization of Enterprise Risk Management	Divisi Risk Management PT PII IIGF's Risk Management Division
		Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) *Regional Conference*	Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia
		Waste & Water Management Asia dan Building Modern Cities	Divisi Human Capital and Organization Development PT PII IIGF's Human Capital and Organization Development Division
		Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan Duties and Functions of the Ministry of Finance	Divisi Human Capital and Organization Development PT PII IIGF's Human Capital and Organization Development Division
		Executive Briefing Modernisasi Pengadaan Modernizing Procurement Executive Briefing	Anggada Duta Wisesa (ADW) Consulting
Ken Auva Maulida	M	*Qualified Internal Auditor* tingkat Manajerial Managerial Level Qualified Internal Auditor	Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA) Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA)
		Implementing GRC dan Ujian Sertifikasi GRC Professional (CGRCP) Implementing GRC and GRC Professional (CGRCP) Certification	Center for Risk Management & Sustainability (CRMS)
		Sosialisasi *Enterprise Risk Management* Socialization of Enterprise Risk Management	Divisi Risk Management PT PII IIGF's Risk Management Division

Nama Name	Jabatan Position	Topik Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer
		Konferensi Auditor Internal 2024 2024 Internal Auditor Conference	Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA) Internal Audit Professional Training and Development Center (YPIA)
		Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan Duties and Functions of the Ministry of Finance	Divisi Human Capital and Organization Development PT PII IIGF's Human Capital and Organization Development Division
		Dasar - Dasar Pengelolaan Keuangan Negara Fundamentals of State Financial Management	Divisi Human Capital and Organization Development PT PII IIGF's Human Capital and Organization Development Division
Faisal Dita Nurulloh	AM	ESG *Awareness Basic Level*	Center for Risk Management & Sustainability (CRMS)
		Sosialisasi *Enterprise Risk Management* Socialization of Enterprise Risk Management	Divisi Risk Management PT PII IIGF's Risk Management Division
		Seminar Nasional: Bincang Satuan Pengawasan Intern (SPI) 2024 National Seminar: 2024 Internal Audit Talk	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Internal (FKSPI) Internal Audit Unit Communication Forum (FKSPI)

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AUDIT INTERNAL TAHUN 2024

REPORT ON THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INTERNAL AUDIT IN 2024

Sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Divisi Audit Internal Perseroan telah melaksanakan sejumlah kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Audit atas Proses Penyediaan dan Pemantauan Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) PT Waskita Karya (Persero)
2. Audit atas Proses Penjaminan Proyek KPBU *Proving Ground* Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi
3. Audit Kinerja atas Pengelolaan Fungsi Teknologi Informasi (ERP)
4. Audit atas Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
5. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Tingkat Entitas Tahun 2024
6. Rapat Audit Internal
   Kebijakan rapat Divisi Internal Audit mengacu pada Piagam Internal Audit dan Pedoman Administrasi Audit Internal. Sejalan dengan kebijakan tersebut, frekuensi rapat Divisi Internal Audit sebagai berikut:

As its duties and responsibilities, the Company's Internal Audit has implemented several activities as follows:

1. Audit of the Provision and Monitoring Process of the National Economic Recovery (PEN) Program Guarantee of PT Waskita Karya (Persero)
2. Audit of the Guarantee Process of the Bekasi Roadworthiness Testing and Motor Vehicle Certification Proving Ground PPP Project
3. Performance Audit of Information Technology Function Management (ERP)
4. Audit of the Anti-Bribery Management System (ABMS)
5. Evaluation of the Entity Level Internal Control System in 2024
6. Internal Audit Meetings
   The Internal Audit's meetings policy refers to the Internal Audit Charter and Internal Audit Administration Guidelines. In line with these policies, the frequency of Internal Audit's meetings is as follows:

a. Rapat dengan Direksi dan Dewan Komisaris dengan tingkat frekuensi bulanan dan sewaktu-waktu jika diperlukan mengacu pada kebijakan terkait rapat Direksi dan Dewan Komisaris, Piagam Internal Audit serta Pedoman Administrasi Audit Internal yaitu Rapat Laporan Manajemen dan Rapat Kegiatan Audit Internal

b. Rapat dengan Direktur Utama dengan tingkat frekuensi setiap selesai diselenggarakannya *exit meeting* penugasan audit internal dan sewaktu-waktu jika diperlukan mengacu pada Piagam Internal Audit dan Pedoman Administrasi Audit Internal yaitu Rapat Pembahasan Laporan Penugasan Audit Internal
c. Rapat dengan Komite Audit dengan tingkat frekuensi triwulanan dan sewaktu-waktu jika diperlukan mengacu pada Piagam Internal Audit dan Pedoman Administrasi Audit Internal yaitu Rapat Evaluasi Kegiatan Audit Internal

a. Meetings with the Board of Directors and the Board of Commissioners monthly and at any time if necessary, with reference to the meeting policy of the Board of Directors and Board of Commissioners, the Internal Audit Charter, and the Internal Audit Administration Guidelines, i.e., Management Report Meetings and Internal Audit Meetings.
b. Meetings with the President Director every time after the completion of the internal audit assignment exit meeting, and at any time if necessary, with reference to the Internal Audit Charter and Internal Audit Administration Guidelines, i.e., the Internal Audit Assignment Report Meeting
c. Meetings with the Audit Committee quarterly and at any time if necessary with reference to the Internal Audit Charter and Internal Audit Administration Guidelines, i.e., the Internal Audit Evaluation Meeting

Selama tahun 2024, Divisi Audit Internal telah melakukan rapat sebanyak 154 yang terdiri dari rapat internal sebanyak 84 dan berpartisipasi sebagai peserta rapat ataupun menyampaikan presentasi dalam rapat Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

In 2024, the Internal Audit has conducted 154 meetings, consisting of 84 internal meetings, participated as meeting participants or delivered presentations at meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee, with the following details:

Uraian Description	Rapat Direksi Meeting Board of Directors	Rapat Dewan Komisaris Meeting Board of Commissioners	Rapat Komite Audit Meeting Audit Committee
Frekuensi Rapat Meeting Frequency	31	14	25

7. Tugas Lainnya
   Selain tugas di atas sepanjang tahun 2024 Divisi Audit Internal juga terlibat dalam kegiatan – kegiatan berikut:
   1. Pendampingan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
      - Penyusunan/Pemutakhiran Profil Entitas Pemeriksaan Periode Semester I Tahun 2024 pada PT PII
      - Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2024 pada PT PII
      - Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Semester I Tahun Anggaran 2024 pada PT PII
      - Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Investasi Permanen Pemerintah Tahun 2022 s.d 2024 dalam rangka Perbaikan Struktur Permodalan dan Peningkatan Kapasitas Usaha

7. Other Duties
   In addition to the above duties, in 2024, the Internal Audit was also involved in the following activities:
   1. Assistance to the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK)
      - Compilation/Update of Entity Audit Profile for H1 2024 at IIGF
      - Monitoring the Follow-up of BPK Audit Recommendations Semester I Fiscal Year 2024 at IIGF
      - Monitoring the Settlement of State Losses Semester I Fiscal Year 2024 at IIGF
      - Preliminary Performance Assessment on the Effectiveness of Permanent Government Investment Management in 2022 - 2024 to Improve the Capital Structure and Increase the Business

BUMN, Perseroan Terbatas, serta Badan Hukum Lainnya pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Instansi Terkait Lainnya
- Penyusunan/Pemutakhiran Profil Entitas Pemeriksaan Periode Semester II Tahun 2024 pada PT PII

2. Pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
   - Asesmen Penerapan *Good Corporate Governance pada* PT PII Tahun 2023
   - Reviu Pedoman Audit Kinerja dan Pedoman Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) pada PT PII
   - Penilaian Indeks Akuntabilitas BUMN atau ICORPAX (Indonesia *Corporate Accountability Index*) pada PT PII Tahun Buku 2023
   - Reviu atas Pembangunan dan Tata Kelola Ibu Kota Nusantara (IKN) pada PT PII Tahun 2024
   - Evaluasi atas Optimalisasi Pembiayaan Pemerintah
   - Reviu atas Pembangunan dan Tata Kelola Ibu Kota Nusantara (IKN) pada PT PII Triwulan IV Tahun 2024
   - Evaluasi Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri dan Identifikasi Risiko pada Program Substitusi Impor dalam Kerangka Pengawasan Program P3DN Tahun 2024
3. Pendampingan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
   - Pengumpulan Data atas Implementasi Investasi Pemerintah Berkelanjutan Melalui Implementasi Environmental, Social and Governance pada *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan
   - Audit atas Penjaminan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada PT PII
4. Pendampingan dalam pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan dan audit kepatuhan Perseroan tahun buku 2024, serta pendampingan dalam pelaksanaan penilaian atas capaian Indikator Kinerja Utama Korporasi, Direksi, dan Dewan Komisaris, oleh Kantor Akuntan Publik
5. Melaksanakan Penilaian Kapabilitas Divisi Audit Internal Periode 2024
6. Melaksanakan Penilaian Mandiri Program Jaminan Kualitas dan Peningkatan Fungsi Audit Internal 2024

Capacity of SOEs, Limited Liability Companies, and Other Legal Entities at the Ministry of Finance as the State General Treasurer and Other Related Agencies
- Compilation/Update of Entity Audit Profile for H2 2024 at IIGF

2. Assistance to the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP)
   - Assessment of the Good Corporate Governance at IIGF in 2023
   - Review of Performance Audit Guidelines and Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) Guidelines at IIGF
   - Assessment of the SOE Accountability Index or ICORPAX (Indonesia Corporate Accountability Index) at IIGF for the 2023 Fiscal Year
   - Review of the Development and Governance of the Nusantara Capital City (IKN) at IIGF in 2024
   - Evaluation of Optimizing Government Financing
   - Review of the Development and Governance of the Nusantara Capital City (IKN) at IIGF in Q4 2024
   - Evaluation of Domestic Product Expenditure Compliance and Risk Identification in the Import Substitution Program to Monitor P3DN Program in 2024
3. Assistance to the Inspectorate General of the Ministry of Finance
   - Data Collection on the Sustainable Government Investment through Environmental, Social, and Governance Implementation at the Ministry of Finance's Special Mission Vehicle (SMV)
   - Audit of Water Supply System (SPAM) Project Guarantee at IIGF
4. Assistance in the audit of the Company's Financial Statements and compliance audit for the 2024 fiscal year, as well as assistance in the assessment of the achievement of Key Performance Indicators of the Corporation, Board of Directors, and Board of Commissioners, by the Public Accounting Firm.
5. Assessing the Capability of the Internal Audit Division for the 2024 Period
6. Implementing Self-Assessment of Quality Assurance Program and Improvement of Internal Audit Function in 2024

7. Melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi audit internal maupun eksternal
8. Melaksanakan pelaporan kegiatan audit dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi audit kepada Komite Audit per triwulan
9. Berperan aktif mendukung tim Sekretaris Perusahaan dalam meyakinkan kelancaran pelaksanaan evaluasi dan penilaian Good Corporate Governance (GCG) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
10. Penyelenggaraan Webinar Forum GRC 2024: Hindari Benturan Kepentingan, Komitmen dan Langkah Konkret dalam Pemberantasan Korupsi untuk Indonesia Maju
11. Finalisasi rancangan Kebijakan Program Jaminan Kualitas & Peningkatan Fungsi Audit Internal dan Kebijakan Audit Kinerja (berkoordinasi dengan BPKP)
12. Pelaksanaan konsultansi untuk Divisi Corporate Service and Procurement – Pengisian Kuesioner Aplikasi Pengukuran Indeks Kepatuhan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (APIK P3DN) Triwulan IV Tahun 2024
13. Pelaksanaan konsultansi untuk Divisi Corporate Strategy and Finance – Penelaahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara
14. Melakukan benchmark pengelolaan Fungsi Audit Internal kepada PT Pegadaian
15. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan melakukan Audit Internal atas Implementasi SMAP.

7. Monitoring the follow-up on internal and external audit recommendations
8. Reporting audit activities and monitoring the follow-up of audit recommendations to the Audit Committee quarterly
9. Actively supporting the Corporate Secretary team in ensuring the smooth evaluation and assessment of Good Corporate Governance (GCG) by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP)
10. Organizing 2024 GRC Forum Webinar: Avoiding Conflict of Interest, Commitment, and Concrete Steps in Corruption Eradication for Advanced Indonesia
11. Finalization of the Quality Assurance Program Policy & Internal Audit Function Improvement and Performance Audit Policy (in coordination with BPKP)
12. Consultancy for Corporate Service and Procurement Division – Filling out the Compliance Index Assessment Questionnaire for Increasing the Use of Domestic Production (APIK P3DN) Q4 2024
13. Consultancy for the Corporate Strategy and Finance Division – Review of the Realization Report on the Use of Additional State Capital Participation
14. Benchmarking the Internal Audit Function management to PT Pegadaian
15. Actively participating in the Anti-Bribery Management System (ABMS) by conducting an ABMS Internal Audit.

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS AUDIT INTERNAL

EVALUATION OF INTERNAL AUDIT DUTIES

Kebijakan evaluasi pelaksanaan tugas Audit Internal tertuang dalam *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah disepakati dan disahkan oleh manajemen Perseroan. Indikator pelaksanaan evaluasi tugas Divisi Audit Internal didasarkan pada tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Internal.

Realisasi pencapaian kinerja Divisi Audit Internal tahun 2024 mencapai sebesar 117% dari target yang ditetapkan sebelumnya 100%.

The policy for evaluating the Internal Audit's duties is contained in the Key Performance Indicators (KPI) that have been agreed and ratified by the Company's management. Indicators for the evaluation of the Internal Audit's tasks are based on the Internal Audit's duties and responsibilities.

The Internal Audit's performance achieved 117% of the previously set target of 100% in 2024.

Indikator KPI yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Divisi Audit Internal mencakup beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Penyelesaian penugasan audit internal selama tahun 2024
2. Pemantauan penyelesaian tindak lanjut atas laporan audit
3. Pencegahan kerugian negara dan/atau penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Eksternal Auditor (BPK/ BPKP/ Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan/lainnya)
4. Implementasi *Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP) Divisi Audit Internal
5. Pencapaian hasil penilaian GCG yang memuaskan
6. Pemahaman atas penerapan pengendalian internal dalam proses bisnis Perusahaan
7. Penerapan *Integrated* GRC *System*
8. Peran Divisi Audit Internal sebagai *Trusted Advisor* melalui pendampingan eksternal atau konsultansi internal
9. Pengendalian risiko Divisi Audit Internal

The KPI indicators used to evaluate the performance of the Internal Audit include the following criteria:

1. Completion of internal audit assignments in 2024
2. Monitoring the completion of follow-up on audit reports
3. Prevention of state losses and/or completion of follow-up on External Auditor recommendations (BPK/BPKP/ Inspectorate General of the Ministry of Finance/others)
4. Internal Audit Division's Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)
5. Achieved satisfactory GCG assessment results
6. Understanding of internal control in the Company's business processes
7. Integrated GRC System implementation
8. Internal Audit Division's role as a Trusted Advisor via external assistance or internal consulting
9. Internal Audit Division risk control

LAPORAN HASIL PENJAMINAN KUALITAS ATAS PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS DIVISI AUDIT INTERNAL

QUALITY ASSURANCE REPORT ON THE INTERNAL AUDIT SELF-ASSESSMENT

Untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas tata kelola perusahaan yang baik, Direksi secara aktif menjaga dan mengevaluasi kualitas Divisi Audit Internal Perseroan. Sebagai bentuk komitmen Perseroan untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun 2024 Divisi Audit Internal menyelesaikan penilaian mandiri kapabilitas Divisi Audit Internal Periode 2024 mengacu pada Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas SPI Korporasi yang diterbitkan oleh BPKP.

Hasil penilaian mandiri tersebut, menunjukan bahwa kapabilitas Divisi Audit Internal Periode 2024 berada pada level 3 (*integrated*). Hal ini mencerminkan bahwa Divisi Audit Internal telah berhasil menerapkan praktik profesional dan audit internal secara konsisten dan telah selaras dengan standar yang berlaku. Selain itu Divisi Audit Internal mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.

To accelerate the good corporate governance improvement, the Board of Directors actively maintains and evaluates the quality of the Company's Internal Audit. As a form of the Company's commitment to actualizing this, in 2024. the Internal Audit Division completed a self-assessment of the capabilities of the Internal Audit in 2024, with reference to the Technical Guidelines for Self-Assessment of Corporate SPI Capabilities, issued by BPKP.

The self-assessment showed that in 2024, the Internal Audit Division is at level 3 (integrated). This reflects that the Internal Audit Division has successfully implemented professional practices and internal audits consistently, and aligned with prevailing standards. In addition, the Internal Audit Division was able to assess the efficiency, effectiveness, and economy of a program/activity, and provided consultation on governance, risk management, and internal control.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (*INTERNAL CONTROL*)

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Perseroan menerapkan 3 (tiga) aspek pengendalian internal, yaitu pengendalian operasional, pengendalian keuangan dan kepatuhan. Kerangka kerja pengendalian internal yang berlaku di PT PII diatur dalam Pedoman Sistem Pengendalian Internal yang mengadopsi COSO (Committee of the *Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*)-*Internal Control Integrated Framework* 2013. Selain itu Perseroan menerbitkan Kebijakan Pengelolaan Proses Bisnis Berbasis Pengendalian Internal untuk memberikan panduan agar pelaksanaan pengelolaan proses bisnis dapat dilakukan secara efisien, efektif, konsisten, terstandardisasi dan sistematis sesuai dengan sistem pengendalian internal yang terintegrasi (COSO *Framework* 2013).

The Company implements three (3) internal control aspects, i.e., operational control, financial control, and compliance. The Company adopts COSO (Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)-Internal Control Integrated Framework 2013 as the applicable internal control system. In addition, the Company issued an Internal Control-Based Business Process Management Policy to provide guidance so that the implementation of business process management shall be carried out efficiently, effectively, consistently, standardized, and systematically, in accordance with an integrated internal control system (COSO Framework 2013).

Sebagaimana diatur dalam COSO Internal Control – *Integrated Framework* (2013), pengendalian internal merupakan sebuah sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, serta karyawan dalam sebuah perusahaan, untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

As regulated in COSO Internal Control– Integrated Framework (2013), internal control is a system or process carried out by the Board of Commissioners, Board of Directors, management, and employees in a company, to provide adequate confidence regarding the adequacy of operational and financial controls, financial reporting, operational effectiveness and efficiency, and compliance with prevailing laws and regulations.

COSO – *Internal Control - Integrated Framework* terdiri dari 5 (lima) komponen pengendalian, yakni meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*);
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*); dan
5. Pemantauan (*Monitoring*).

COSO Internal Control - Integrated Framework consists of five (5) control components:

1. Control Environment;
2. Risk Assessment;
3. Control Activities;
4. Information and Communication; and
5. Monitoring.

Penerapan sistem pengendalian internal sepanjang tahun 2024 yang mengacu pada COSO dijelaskan sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

   Aspek Lingkungan Pengendalian merupakan suatu kondisi dalam perusahaan yang memengaruhi efektivitas pengendalian internal. Lingkungan pengendalian berdampak pada kesadaran akan pentingnya penerapan pengendalian oleh orang- orang yang terlibat di dalamnya.

   Manajemen bertanggung jawab untuk menciptakan serta menjaga lingkungan pengendalian yang mengarah pada terbentuknya perilaku positif dan kondusif untuk memfasilitasi penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen yang sehat dalam lingkungan kerjanya. Upaya tersebut diwujudkan melalui:

The internal control system in 2024 referred to COSO, as described below:

1. Control Environment

   The Control Environment aspect is a condition within the company that affects the effectiveness of internal control. The control environment has an impact on the awareness of the importance of implementing control by the people involved.

   Management is responsible for creating and maintaining a control environment that leads to the establishment of positive and conducive behavior, to facilitate a sound internal control and management system in the working environment. These efforts are realized by:

a. Penegakan integritas dan nilai etika.
b. Komitmen terhadap kompetensi.
c. Kepemimpinan yang kondusif.
d. Independensi Dewan Komisaris
e. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
f. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
g. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
h. Perwujudan peran Internal Audit yang efektif.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
Aspek Penilaian risiko merupakan suatu rangkaian proses identifikasi dan analisis terhadap risiko-risiko yang berpotensi dapat menghambat pencapaian tujuan Perseroan. Penilaian risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Perseroan sebagai acuan dalam mengembangkan kegiatan pengendalian yang diperlukan dalam meminimalkan risiko. Proses penilaian risiko dimulai dengan menetapkan maksud dan tujuan Perseroan yang jelas dan konsisten, mengidentifikasi secara efisien dan efektif terhadap risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar Perseroan dan terakhir melakukan analisis untuk mengetahui dampak dari risiko serta pengendalian yang diperlukan.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan bahwa arahan pimpinan untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi telah dilakukan selama proses penilaian risiko.

Kebijakan pengendalian dirumuskan untuk memberikan arah kegiatan yang seharusnya dikerjakan serta berfungsi sebagai pedoman penyusunan prosedur. Prosedur dalam hal ini adalah rangkaian urutan tindakan, yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang dengan menggunakan peralatan dan waktu tertentu dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Kegiatan pengendalian diselenggarakan dengan memperhatikan ukuran, kompleksitas, sifat dari tugas dan fungsi Perseroan, dan setidaknya memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. Aktivitas pengendalian dilakukan pada seluruh kegiatan Perseroan

a. Upholding of integrity and ethical values.
b. Commitment to competence.
c. Conducive leadership.
d. Independence of the Board of Commissioners
e. Establishment of an organizational structure in accordance with the needs.
f. Appropriate delegation of authorities and responsibilities.
g. Formulation and implementation of sound policies on human resource development.
h. Realization of an effective Internal Audit role.

2. Risk Assessment
Risk assessment is a series of processes to identify and analyze risks that may potentially hinder the achievement of the Company's objectives. Risk assessment is carried out to determine the impact of identified risks on the achievement of the Company's goals and objectives, as a reference in developing the necessary control activities to minimize risks. The risk assessment process begins with establishing clear and consistent goals and objectives of the Company, identifying the risks efficiently and effectively that may hinder the achievement of these objectives, both internal and external, and finally, conducting an analysis to determine the impact of risks and the necessary controls.

3. Control Activities
Control activities are policies and procedures to assist in ensuring that the leadership's direction to minimize the identified risks has been carried out during the risk assessment process.

Control policies are formulated to provide direction for activities that should be conducted and serve as guidelines for the procedures' preparation. In this case, procedures are a series of sequences of actions, carried out by one or several people, using certain equipment and time in implementing certain activities. Control activities are organized by taking into account the size, complexity, nature of the Company's duties and functions, and shall at least have the following characteristics:

a. Control activities are carried out in all the Company's activities

b. Aktivitas pengendalian dikaitkan dengan proses penilaian risiko untuk mengendalikan tingkatan kemungkinan dan dampak terjadinya risiko.
c. Kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis melalui persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku; dan
d. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan oleh manajemen

Selain itu, untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan bisnis yang ada, Perseroan melakukan evaluasi atas rangkaian kegiatan pengendalian yang diterapkan. Rangkaian kegiatan pengendalian terdiri atas:
a. *Review* atas kinerja Perseroan.
b. Pembinaan sumber daya manusia.
c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
d. Pengendalian fisik aset.
e. Pemisahan fungsi.
f. Pelaksanaan atau otorisasi atas kejadian dan transaksi
g. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
h. Pembatasan akses atas sumber daya yang dimiliki
i. Dokumentasi yang baik atas kejadian dan transaksi pengendalian

4. Informasi dan Komunikasi
Informasi merupakan kumpulan data yang telah diolah dan digunakan untuk menjadi referensi bagi pengambilan keputusan sehubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perseroan. Sementara itu, komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Dengan demikian, sistem informasi dan komunikasi merupakan suatu proses penyajian laporan yang terstruktur dan sistematis mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Perseroan wajib menyampaikan laporan yang memiliki informasi yang relevan serta akurat dan andal baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan

b. Control activities are linked to the risk assessment process to control the level of likelihood and impact of risk occurrence.
c. Written policies and procedures are established via the approval of authorized officials in accordance with prevailing policies and regulations; and
d. Procedures that have been established shall be implemented by management.

In addition, to ensure its relevance to existing business developments, the Company shall evaluate the series of implemented control activities. The control activities consist of a series of:
a. Review of the Company's performance.
b. Human resources development.
c. Control of the information system management.
d. Physical control of assets.
e. Separation of functions.
f. Implementation or authorization of events and transactions
g. Accurate and timely recording of transactions and events
h. Restrictions on access to owned resources
i. Proper documentation of control events and transactions

4. Information and Communication
Information is data collection that has been processed and used as a reference for decision making in implementing the Company's duties and functions. Meanwhile, communication is the process of delivering messages or information using certain symbols or signs either directly or indirectly to obtain feedback.

Thus, the information and communication system are a process of presenting structured and systematic reports on operational, financial, and compliance activities. The Company must submit reports that have relevant, accurate, and reliable information, both financial and non-financial, relating to internal and external events. Such information shall be stored and communicated to the Company's management and other relevant staff in the company,

peristiwa-peristiwa internal serta eksternal. Informasi tersebut harus disimpan dan kemudian dikomunikasikan kepada pimpinan Perseroan dan jajaran terkait lainnya di seluruh perusahaan yang memerlukan dalam bentuk yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian internal dan tanggung jawab operasional.

who may require the information in a form that enables them to carry out their internal control and operational responsibilities.

5. Pemantauan (*Monitoring*)
   Pemantauan adalah proses penilaian atas kualitas sistem Pengendalian Internal Perseroan dalam jangka waktu tertentu. Pemantauan dilaksanakan secara berkesinambungan, serta melalui evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi atas hasil audit dan *review* lainnya.

   Pemantauan berkelanjutan terdiri dari kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, komparasi, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, evaluasi terpisah berupa kegiatan penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu yang mempertimbangkan hasil penilaian risiko dan efektivitas prosedur pemantauan yang berkelanjutan. Evaluasi terpisah dapat diselenggarakan secara mandiri, *review*, dan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian internal serta mempertimbangkan lingkup dan frekuensi evaluasi, metodologi, dan sumber daya.

5. Monitoring
   Monitoring is the process of assessing the quality of the Company's Internal Control system within a certain period of time. Monitoring is conducted on an ongoing basis, as well as through separate evaluations, and follow-up recommendations on the results of audits and other reviews.

   Continuous monitoring consists of regular management activities, supervision, comparison, reconciliation, and other actions related to the duties implementation. A separate evaluation is an assessment of the quality of internal control system performance with a certain scope and frequency that considers the results of risk assessment and the effectiveness of continuous monitoring procedures. Independent separate evaluations can be organized. Reviews and tests of the effectiveness of the internal control system may consider the scope and frequency of evaluation, methodology, and resources.

PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM IMPLEMENTATION

Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik untuk mencapai tujuan Perseroan. Divisi Internal Audit membantu Direktur Utama untuk menilai keandalan dan kecukupan pengendalian internal Perseroan dan tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan perundangan (*compliance*), keandalan pelaporan keuangan (*reporting*), serta efisiensi dan efektivitas operasional Perseroan (*operation*), tetapi juga aspek lainnya yang berdampak pada tata kelola perusahaan (*governance*).

The Board of Directors is responsible for conducting a good internal control system to achieve the Company's objectives. The Internal Audit Division assists the President Director in assessing the reliability and adequacy of the Company's internal control, which is not only limited to compliance with laws and regulations (compliance), reliability of financial reporting (reporting), and efficiency and effectiveness of the Company's operations (operations), but also other aspects with an impact on corporate governance (governance).

PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN OPERASIONAL, KEUANGAN DAN KEPATUHAN

OPERATIONAL, FINANCIAL, AND COMPLIANCE CONTROL SYSTEMS

Pengendalian Internal PT PII diterapkan atas 3 (tiga) aspek utama, yaitu pengendalian operasional, pengendalian keuangan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun langkah-langkah pengendalian operasional, keuangan, dan kepatuhan yang dilakukan oleh PT PII, antara lain meliputi :

1. Pengendalian Operasional
   a. Identifikasi dan penilaian risiko operasional
   b. Pengembangan dan penerapan kebijakan dan prosedur operasional berbasis pengendalian internal
   c. Penetapan tanggung jawab dan Job Description bagi pelaksana prosedur operasional
   d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap keefektifan prosedur operasional oleh Divisi Internal Audit
   e. *Monitoring* pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi auditor internal dan eksternal terkait keefektifan prosedur operasional oleh Divisi Internal Audit
2. Pengendalian Keuangan
   a. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas kejadian dan transaksi untuk menjamin tersedianya informasi yang relevan dan terpercaya untuk pengambilan keputusan
   b. Penetapan prosedur pemantauan dan verifikasi terhadap pencatatan transaksi keuangan
   c. Pelaksanaan proses rekonsiliasi berkala untuk memastikan keakuratan informasi keuangan
   d. Penetapan mekanisme reviu kepatuhan oleh Divisi Risk and Management dan evaluasi oleh Divisi Internal Audit serta Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk menjaga keandalan informasi keuangan
   e. *Monitoring* pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi auditor internal dan eksternal terkait keandalan informasi keuangan oleh Divisi Internal Audit
3. Pengendalian Kepatuhan
   a. Identifikasi peraturan, regulasi, dan kebijakan yang relevan dengan operasi Perseroan
   b. Pengembangan kebijakan dan prosedur kepatuhan yang sesuai dengan persyaratan hukum dan kebijakan Perseroan
   c. Pemantauan dan penilaian terhadap kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan oleh Divisi Internal Audit dan Eksternal Auditor (KAP, BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan)

IIGF implements three (3) Internal Control aspects, i.e., operational control, financial control, and compliance with other prevailing legislation. The operational, financial, and compliance control measures carried out by IIGF include, among others:

1. Operational Control
   a. Identification and assessment of operational risks
   b. Development and application of operational policies and procedures based on internal control
   c. Determination of responsibilities and Job Description for operational procedure implementors
   d. Regular monitoring and evaluation of the effectiveness of operational procedures by the Internal Audit Division
   e. Monitoring the follow-up improvements to the recommendations of internal and external auditors, related to the effectiveness of operational procedures by the Internal Audit Division.
2. Financial Control
   a. Accurate and timely reporting of events and transactions to ensure the availability of relevant and reliable information for decision making.
   b. Establishment of monitoring and verification procedures for financial transaction reporting
   c. Regular reconciliation process to ensure the accuracy of financial information
   d. Establishment of a compliance review mechanism by the Risk Management Division and evaluation by Internal Audit Division and Public Accounting Firm (KAP) to maintain the reliability of financial information.
   e. Monitoring the follow-up improvements to the recommendations of internal and external auditors, related to the reliability of financial information by the Internal Audit Division
3. Compliance Control
   a. Identification of rules, regulations, and policies relevant to the Company's operations
   b. Development of compliance policies and procedures in line with the legal requirements and Company's policies
   c. Monitoring and assessment of compliance with regulations and policies by the Internal Audit Division and External Auditors (KAP, BPK, BPKP, Inspectorate General of the Ministry of Finance).

d. Sosialisasi kepada insan Perseroan tentang regulasi dan kebijakan yang berlaku dan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan tersebut
e. *Monitoring* pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi auditor internal dan eksternal terkait kepatuhan oleh Divisi Internal Audit

d. Socialization to the Company's personnel on the prevailing regulations and policies and the importance of compliance with such regulations and policies
e. Monitoring the follow-up improvements to the recommendations of internal and external auditors, related to compliance by the Internal Audit Division

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL SYSTEMS

Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk memastikan bahwa tata kelola Perseroan dijalankan dengan baik sebagai dasar pencapaian tujuan untuk menjaga dan meningkatkan nilai Perseroan. Salah satu bentuk implementasi tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah dilaksanakan secara memadai.

Pada tahun 2024, Divisi Internal Audit melakukan evaluasi atas *Entity Level Control* yang pada tanggal 11 Oktober sampai dengan 13 Desember 2024. Ruang lingkup penilaian meliputi seluruh proses pengendalian tingkat entitas (*Entity Level Control*) yang terdapat di dalam lingkungan PT PII selama periode tahun 2024.

Metodologi yang digunakan untuk menilai kecukupan penerapan sistem pengendalian internal tingkat entitas adalah sebagai berikut:

1. Penelaahan dokumen dan data;
2. Observasi dan wawancara dengan manajemen dan karyawan; dan
3. Survei penerapan dengan manajemen dan karyawan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sistem pengendalian internal tingkat entitas (*Entity Level Control*) di PT PII pada umumnya telah dirancang dan diterapkan dengan kategori baik dengan capaian skor 89,87 untuk mendukung efektifitas sistem dan kebijakan pengendalian internal.

The Board of Commissioners and Board of Directors are committed to ensuring that corporate governance is well implemented as a basis for achieving the objective of maintaining and increasing the Company's value. One of the implementations of good corporate governance is to ensure that the internal control system runs adequately.

In 2024, the Internal Audit conducted an Entity Level Control evaluation from 11 October to 13 December 2024. The scope of the assessment includes all Entity Level Control processes within IIGF during the 2024 period.

The methodology to assess the adequacy of the entity-level internal control system implementation is as follows:

1. Review of documents and data;
2. Observation and interviews with management and employees; and
3. Survey for management and employees.

Based on the evaluation, the Entity Level Control at the IIGF generally was designed and implemented well, with a score of 89.87, to support the effectiveness of internal control systems and policies.

LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL

REPORT OF COMPLIANCE WITH LAWS AND REGULATIONS AND INTERNAL CONTROL

Berdasarkan audit yang telah dilakukan oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota jaringan global PwC) atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – undangan dan

Based on the audit conducted by KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (global network member of PwC) on Compliance with Laws and Regulations and Internal Control for the year

Pengendalian Internal untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, tidak terdapat temuan atau kelemahan material terkait kepatuhan perundang-undangan maupun kepatuhan terhadap pengendalian internal.

ended 31 December 2024, there were no findings or material weaknesses related to statutory compliance or compliance with internal control.

STUDI BANDING/ *BENCHMARKING*

BENCHMARKING

Dalam rangka mengukur dan membandingkan kinerja terhadap aktivitas atau kegiatan serupa pada unit kerja yang sejenis pada perusahaan lain, PT PII telah mengikuti Konferensi Nasional Audit Internal yang diselenggarakan oleh The Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA Indonesia).

Selain itu PT PII juga aktif sebagai pengurus dan anggota dari Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern Badan Usaha Milik Negara (FKSPI BUMN).

Pada tahun 2024, PT PII juga melakukan kunjungan ke PT Pegadaian terkait *benchmark* pengelolaan Satuan Pengawasan Intern.

IIGF attended the National Conference on Internal Audit organized by the Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA Indonesia) to assess and compare performance against similar activities or activities in similar working units in other companies.

In addition, IIGF is also active as administrators and members of the Communication Forum for Internal Audit Units of State-Owned Enterprises (FKSPI BUMN).

In 2024, IIGF also visited PT Pegadaian to benchmark the Internal Audit Unit.

MONITORING TINDAK LANJUT TEMUAN

MONITORING FOLLOW-UP ON FINDINGS

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal, Divisi Internal Audit melakukan pemantauan dan menindaklanjuti tanggapan atas rekomendasi dari hasil audit internal & eksternal melalui prosedur peninjauan dan verifikasi atas perkembangan status tindakan perbaikan yang dijalankan oleh unit kerja terkait.

Kegiatan pemantauan ini bertujuan untuk menilai secara obyektif sejauh mana pelaksanaan rekomendasi temuan dilaksanakan dan mengecek kebenaran data baik tertulis maupun fisik di lapangan atas laporan tindak lanjut yang disampaikan oleh unit kerja terkait.

Dokumen Laporan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Audit Internal dan Eksternal didistribusikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit secara berkala setidaknya setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sampai dengan akhir Triwulan IV (Q4) 2024, secara keseluruhan PT PII telah menyelesaikan 11 rekomendasi (100%) dari total 11 rekomendasi audit internal yang harus diselesaikan di 2024.

The Internal Audit Division monitors and follows up on responses to recommendations from internal & external audit results through procedures review and verification on the status of corrective actions progress carried out by the relevant work units to ensure the effectiveness of the internal control system.

The monitoring has the objective to objectively assess the extent to which the recommendation of findings have been implemented, and to check the accuracy of both written and physical data in the field on follow-up reports submitted by related working units.

The Follow-up Report on Internal and External Audit Recommendations is distributed to the President Director and Audit Committee periodically, at least once every three (3) months. As of the end of Q4 2024, IIGF completed 11 recommendations (100%) of the total 11 internal audit recommendations that must be completed in 2024.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS TERKAIT HASIL PENELAAHAN ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

Pada tahun 2024, Direksi dan Dewan Komisaris dengan dibantu Komite Audit melakukan telaah terhadap hasil evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian intern PT PII yang dilakukan Divisi Internal Audit pada 11 Oktober sampai dengan 13 Desember 2024, dengan ruang lingkup penilaian meliputi seluruh proses pengendalian tingkat entitas (*Entity Level Control*) yang terdapat di dalam lingkungan PT PII selama periode tahun 2024.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tingkat entitas (*Entity Level Control*) di PT PII pada umumnya telah dirancang dan diterapkan dengan kategori baik dengan capaian skor 89,87, sehingga Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa implementasi Sistem Pengendalian Intern dianggap memadai.

In 2024, the Board of Directors and the Board of Commissioners the Audit Committee have reviewed the evaluation results of the effectiveness of IIGF's internal control system, conducted by the Internal Audit Division, from 11 October to 13 December 2024, with the scope of the assessment covering all Entity Level Control processes within IIGF for the 2024 period.

The evaluation resulted in Entity Level Control at IIGF which generally was designed and implemented well, with a score of 89.87. Therefore, the Board of Commissioners and Board of Directors stated that the Internal Control System has been implemented adequately.

AUDIT EKSTERNAL/AKUNTAN PUBLIK

EXTERNAL AUDIT/PUBLIC ACCOUNTANT

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan PT PII dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.

The independent supervisory function of IIGF's finance is monitored by carrying out an External Audit by a Public Accounting Firm.

MEKANISME PENUNJUKAN HINGGA PENETAPAN AKUNTAN PUBLIK

MECHANISM TO APPOINT AND DETERMINE PUBLIC ACCOUNTANTS

1. Komite Audit menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang berdasarkan pada evaluasi penilaian Kantor Akuntan Publik
2. Dewan Komisaris menerbitkan Surat Pengadaan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan kepada Direktur Utama
3. Pengadaan Kantor Akuntan Publik dilakukan oleh Divisi Corporate Service & Procurement (Divisi CSP) sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa

1. The Audit Committee submits recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of a Public Accounting Firm based on an assessment of the Public Accounting Firm.
2. The Board of Commissioners issues a Procurement Letter to the President Director, for a Public Accountant Firm to exercise an audit of the Financial Statements
3. The procurement of the Public Accounting Firm is organized by the Corporate Service & Procurement (CSP Division), in accordance with the guidelines for the procurement of goods and services.

4. Direktur Utama menerbitkan Surat Usulan Penunjukkan KAP sesuai dengan hasil pengadaan yang dilakukan oleh Divisi CSP kepada Dewan Komisaris
5. Dewan Komisaris menerbitkan Surat Usulan Penunjukkan KAP kepada Pemegang Saham
6. Pemegang Saham menerbitkan KMK Penunjukkan KAP untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan
7. Direktur Utama menerbitkan Surat Penunjukkan kepada KAP untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan

4. The President Director issues a Proposal Letter for the Appointment of KAP to the Board of Commissioners, in accordance with the procurement result organized by the CSP Division
5. The Board of Commissioners issues a Letter of Proposal for the KAP Appointment to the Shareholders
6. Shareholders determine KMK for the KAP appointment to conduct a general audit of the Financial Statements
7. The President Director issues a Letter of Appointment to the KAP to conduct a general audit of the Financial Statements

DAFTAR AKUNTAN PUBLIK
PUBLIC ACCOUNTANT'S LISTS

Sebagai komitmen pengungkapan kepatuhan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.01/2021 tanggal 14 Desember 2021, berikut informasi mengenai KAP Laporan Keuangan Perusahaan dalam 5 (lima) tahun berturut-turut.

As a commitment to disclose compliance with the Minister of Finance Regulation No. 186/PMK.01/2021 dated 14 December 2021, the following is KAP for the Company's Financial Statements in five (5) consecutive years.

Daftar Akuntan Publik Dalam Periode 2019-2024
List of Public Accountants in 2019-2024

Periode Period	Nama Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Nama Akuntan Publik Public Accountant's Name	Lingkup Penugasan Scope of Appointment	Jasa Lainnya Other Services	Komisi yang Dibayarkan Commission Paid
2024	KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-315/KM.1/2024 No. Permit: KEP-315/KM.1/2024	Jimmy Pangestu, S.E. No. Izin: AP.1124 No. Permit: AP.1124	Jasa audit laporan keuangan Financial statement services audit	Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan internal control (PSA 62) serta jasa Perikatan Asurans atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris. Financial statement compliance audit services in accordance with regulations and internal control (PSA 62), and Assurance Engagement Services on Key Performance Indicators ("KPI") of the Company, the Board of Directors, and the Board of Commissioners.	Rp1.086.650.000
2023	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-241/KM.1.2015 No. Permit: KEP-241/KM.1.2015	Jimmy Pangestu, S.E. No. Izin: AP.1124 No. Permit: AP.1124	Jasa audit laporan keuangan Financial statement services audit	Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan internal control (PSA 62) serta jasa Perikatan Asurans atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris. Financial statement compliance audit services in accordance with regulations and internal control (PSA 62), and Assurance Engagement Services on Key Performance Indicators ("KPI") of the Company, the Board of Directors, and the Board of Commissioners.	Rp 1.055.000.000

Periode Period	Nama Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Nama Akuntan Publik Public Accountant's Name	Lingkup Penugasan Scope of Appointment	Jasa Lainnya Other Services	Komisi yang Dibayarkan Commission Paid
2022	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-241/KM.1.2015 No. Permit: KEP-241/KM.1.2015	Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA No. Izin: AP.0229 No. Permit: AP.0229	Jasa audit laporan keuangan Financial statement services audit	Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan internal control (PSA 62) serta jasa Perikatan Asurans atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris. Financial statement compliance audit services in accordance with regulations and internal control (PSA 62), and Assurance Engagement Services on Key Performance Indicators ("KPI") of the Company, the Board of Directors, and the Board of Commissioners.	Rp 981.852.850
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-241/KM.1.2015 No. Permit: KEP-241/KM.1.2015	Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA No. Izin: AP.0229 No. Permit: AP.0229	Jasa audit laporan keuangan Financial statement services audit	Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan internal control (PSA 62) serta jasa Perikatan Asurans atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris. Financial statement compliance audit services in accordance with regulations and internal control (PSA 62), and Assurance Engagement Services on Key Performance Indicators ("KPI") of the Company, the Board of Directors, and the Board of Commissioners.	Rp865.000.000
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-241/KM.1.2015 No. Permit: KEP-241/KM.1.2015	Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA No. Izin: AP.0229 No. Permit: AP.0229	Jasa audit laporan keuangan Financial statement services audit	Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan internal control (PSA 62) serta jasa Perikatan Asurans atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris. Financial statement compliance audit services in accordance with regulations and internal control (PSA 62), and Assurance Engagement Services on Key Performance Indicators ("KPI") of the Company, the Board of Directors, and the Board of Commissioners.	Rp860.000.000

BIAYA AUDIT DAN BIAYA NON AUDIT

AUDIT'S FEE AND NON-AUDIT'S FEE

Selama tahun 2024, PT PII menjalin kerja sama dengan KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PricewaterhouseCoopers) untuk melaksanakan audit atas jasa audit laporan keuangan, jasa audit kepatuhan, dan jasa audit Indikator Kinerja Utama ("IKU") dengan total biaya audit sebesar Rp Rp1.086.650.000 (satu miliar delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tahun yang sama, tidak terdapat pembayaran biaya non-audit kepada KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PricewaterhouseCoopers) karena tidak ada kerja sama selain untuk pelaksanaan audit tersebut.

In 2024, IIGF collaborated with KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PricewaterhouseCoopers) to conduct audits of financial statement audit services, compliance audit services, and Key Performance Indicator ("KPI") audit services, with a total audit fee of Rp1,086,650,000 (one billion eighty-six million six hundred fifty thousand rupiah).

In the same year, there was no payment of non-audit fees to KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PricewaterhouseCoopers) because there were no other services provided other than the aforementioned audit.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Perseroan memandang penerapan manajemen risiko sebagai elemen kunci dalam mencapai tujuan strategis dan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, Perseroan menerapkan sistem manajemen risiko yang terintegrasi dengan strategi dan proses bisnis.

Manajemen risiko diterapkan secara proaktif dan memandang ke depan guna mendukung Perseroan dalam mengantisipasi, memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham, mengelola modal secara komprehensif, serta memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis Perseroan yang berkelanjutan.

The Company considers the risk management implementation as a key element in achieving its strategic objectives and business sustainability. Therefore, the Company implements a risk management system that is integrated with business strategies and processes.

Risk management is implemented in a proactive and forward-looking manner to support the Company in anticipating, maximizing shareholder value, managing capital comprehensively, and ensuring profitability and sustainable growth of the Company's business.

DASAR KEBIJAKAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT POLICY BASIS

Perseroan memiliki sejumlah kebijakan terkait manajemen risiko, antara lain:
1. Operation Manual PT PII;
2. Enterprise Risk Management Framework PT PII; dan;
3. Kebijakan Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU).

Secara umum, kebijakan Perseroan terkait manajemen risiko dirumuskan dengan mengacu pada Kerangka Manajemen Risiko yang mengadopsi standar ISO 31000:2018. Berdasarkan dokumen tersebut, Kerangka Manajemen Risiko Korporasi PT PII didefinisikan sebagai berikut:
1. Pembentukan prinsip dan standar umum bagi praktik manajemen risiko untuk memungkinkan pemahaman umum atas manajemen risiko;
2. Selera dan toleransi risiko (*risk appetite and tolerance*) yang disepakati oleh manajemen dalam menentukan ukuran tingkat risiko;
3. Mengadopsi Kerangka Manajemen Risiko yang mendefinisikan proses manajemen risiko yang diterapkan pada bisnis secara umum; dan
4. Akuntabilitas dan tanggung jawab dalam implementasi manajemen risiko.

Kerangka ini merupakan pendekatan yang terstruktur dan konsisten untuk mengarahkan dan mempersiapkan organisasi agar dapat mengendalikan risiko dan perubahan yang dapat memengaruhi organisasi. Selain itu, Kerangka Manajemen Risiko merupakan pendekatan holistik yang diterapkan dalam pengelolaan berbagai risiko yang dihadapi Perseroan sehingga tetap selaras dengan risk appetite Perseroan di tengah situasi bisnis yang semakin dinamis.

The Company has several policies related to risk management, among others:
1. IIGF's Operation Manual;
2. IIGF's Enterprise Risk Management Framework; and;
3. Business Continuity Management System (SMKU) Policy.

Generally, the Company's policies related to risk management are formulated with reference to the Risk Management Framework adopting the ISO 31000:2018 standard. Based on the document, IIGF's Corporate Risk Management Framework is defined as follows:
1. Establishment of common principles and standards for risk management practices to enable common understanding of risk management;
2. Risk appetite and tolerance agreed upon by management in determining the size of the risk level;
3. Adoption of a risk management framework that defines the risk management processes applied to the business in general; and
4. Accountability and responsibility in the risk management.

The Framework is a structured and consistent approach to direct and prepare the organization to control risks and changes that may affect the organization. In addition, the Risk Management Framework is a holistic approach applied in managing the various risks faced by the Company so that it remains aligned with the Company's risk appetite amidst an increasingly dynamic business condition.

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT PRINCIPLES

Perseroan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang menjadi panduan dalam menerapkan sistem manajemen risiko di lingkungan Perseroan, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Manajemen Risiko berperan dalam menciptakan dan melindungi nilai Perseroan;
2. Manajemen Risiko merupakan bagian integral dari semua proses organisasi, yang harus diterapkan dalam semua aktivitas, proses dan sistem, dan dipertimbangkan dengan informasi terbaik yang tersedia dalam setiap pengambilan keputusan;
3. Manajemen Risiko adalah dinamis, berulang, responsif terhadap perubahan, dan disesuaikan sejalan dengan pencapaian tujuan Perseroan;
4. Manajemen Risiko adalah proses yang digerakkan manusia dan budayanya yang secara inklusif dijalankan di seluruh organisasi; dan
5. Manajemen Risiko adalah penggerak untuk menciptakan organisasi yang mampu beradaptasi dan terus dikembangkan secara berkelanjutan.

The Company implements risk management principles that guide the application of the risk management system within the Company, as elaborated below:

1. Risk Management plays a role in creating and protecting the Company's value;
2. Risk Management is an integral part of all organizational processes, which must be applied in all activities, processes, and systems, and considered with the best available information in every decision making;
3. Risk Management is dynamic, iterative, responsive to change, and customized, in line with the achievement of the Company's objectives;
4. Risk Management is an inclusive people and culture driven process across the organization; and
5. Risk Management is the driver to create an adaptable and developing organization.

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEDUDUKAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO
ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND POSITION OF RISK MANAGEMENT FUNCTION

Fungsi Manajemen Risiko di Perseroan dijalankan oleh Divisi Risk Management. Berikut bagan yang menggambarkan struktur organisasi Divisi Risk Management serta hubungan komunikasi dan pelaporan setiap unsur dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan fungsinya:

The Company's Risk Management function is carried out by the Risk Management Division. The following chart depicts the organizational structure of the Risk Management Division, and the communication and reporting relationships of each element in carrying out its duties, responsibilities, and functions:

Struktur Organisasi Divisi Risk Management
Organizational Structure of Risk Management Division

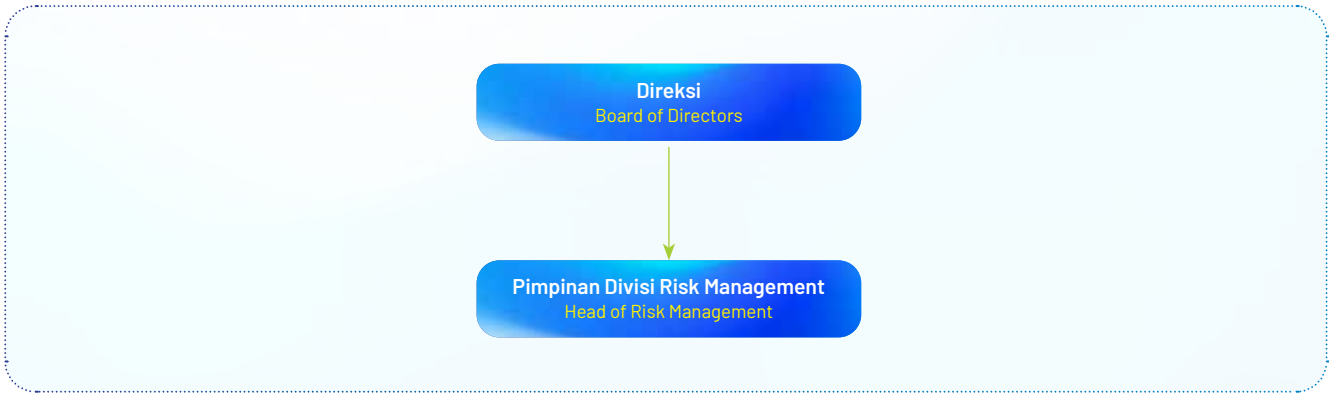

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab fungsionalnya, Pimpinan Divisi Risk Management bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Tim Manajemen Risiko bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan Divisi Risk Management .

In carrying out its duties and functional responsibilities, the Head of Risk Management Division reports directly to the President Director. The Risk Management team is directly responsible to the Head of Risk Management Division.

STRUKTUR TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT GOVERNANCE STRUCTURE

Penerapan Manajemen Risiko menjadi bagian dari tanggung jawab seluruh individu dan unsur-unsur yang ada di dalam organisasi, sesuai dengan kedudukan, fungsi dan kewenangan masing-masing. Tata Kelola Manajemen Risiko yang diterapkan di Perseroan mengadopsi Model 3 Garis (*Three Lines Model*) yang menggambarkan hubungan kerja sama dan komunikasi dari seluruh unsur-unsur di Perseroan, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, Audit Internal, fungsi Manajemen Risiko, serta para Pemilik Risiko (*Risk Owner*) dan Risk Officer yang berada di setiap divisi. Berikut struktur tata kelola manajemen risiko PT PII:

Risk Management is implemented as part of the responsibility of all individuals and elements within the organization, in accordance with their respective positions, functions, and authorities. The Company implemented Risk Management Governance that adopted a Three Lines Model, illustrating the cooperation and communication relationships of all elements in the Company including the Board of Commissioners, the Board of Directors, Internal Audit, Risk Management function and the Risk Owners, as well as and Risk Officers in each division. The following is IIGF's risk management governance structure:

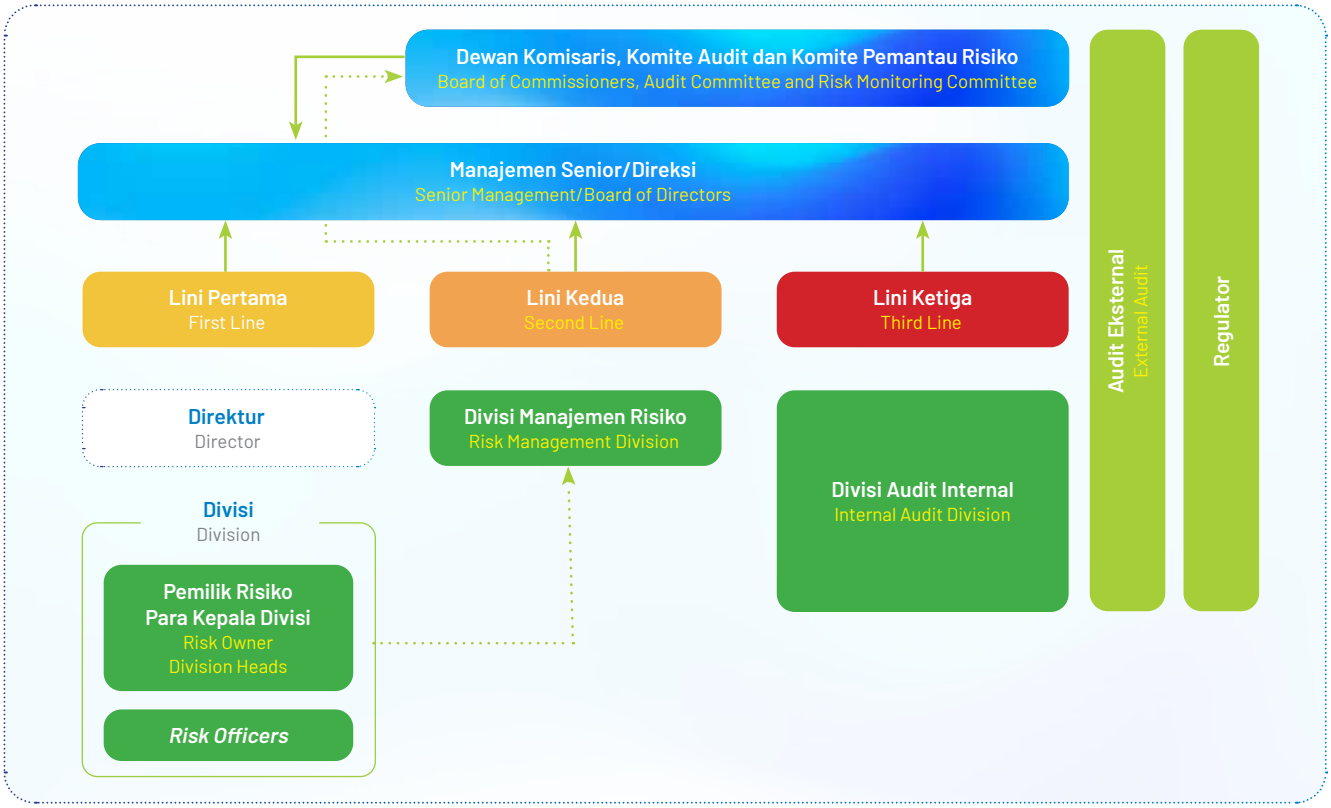

Berikut penjabaran lebih lanjut mengenai struktur Tata Kelola Manajemen Risiko di PT PII:

1. Dewan Komisaris yang didukung oleh Komite Pemantau Risiko.
2. Direksi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Bisnis dan Direktur Keuangan.
3. Divisi Risk Management yang terdiri dari Pimpinan Divisi Risk Management yang dibantu oleh Assistant Vice President, Deputi Senior Manager dan Assistant Manager Manajemen Risiko.
4. *Risk Owner* atau Pemilik Risiko yaitu para Pimpinan Divisi/ Senior Leaders yang bertindak sebagai pengelola risiko di setiap divisi.
5. *Risk Officer* yaitu para staf yang terpilih pada setiap Divisi yang membantu Pemilik Risiko dan Tim dalam melaksanakan proses manajemen risiko di setiap divisi dengan dukungan Tim Divisi Risk Management.
6. Seluruh Staf yang mendukung pelaksanaan proses manajemen risiko di seluruh unit kerja dan divisi masing-masing.

The following is a further description of IIGF's Risk Management Governance structure:

1. Board of Commissioners, supported by the Risk Monitoring Committee.
2. Board of Directors, consisting of President Director, Business Director, and Finance Director.
3. Risk Management Division, consisting of the Head of Risk Management Division, is assisted by Assistant Vice President, Deputy Senior Manager, and Risk Management Assistant Manager.
4. Risk Owners, i.e., Head of Division/Senior Leaders who act as risk managers in each division.
5. Risk Officers, i.e., selected staff in each Division who assist the Risk Owner and Team in implementing the risk management process in each division, supported by the Risk Management Division Team.
6. All Staff who support the risk management process in all working units and their respective divisions.

PEJABAT MANAJEMEN RISIKO DAN DASAR PENGANGKATAN

RISK MANAGEMENT OFFICERS AND BASIS OF APPOINTMENT

Divisi Risk Management dipimpin oleh Pimpinan Divisi Risk Management yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama melalui proses internal. Hingga tanggal 31 Desember 2024, Pimpinan Divisi Risk Management Perseroan dijabat oleh Sdri. Rian Ditha Prasetianti berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK-013/DIR/HCOD/0323 tanggal 2 Januari 2023.

The Risk Management Division is led by the Head of Risk Management, who is appointed and dismissed by the President Director through an internal process. As of 31 December 2024, the Head of the Risk Management Division of the Company is held by Mrs. Rian Ditha Prasetianti, based on the Board of Directors' Decree No. SK-013/DIR/HCOD/0323 dated 2 January 2023.

Rian Ditha Prasetianti

Pimpinan Divisi Risk Management
i Risk Management Head Division

Kewarganegaraan Citizenship	: Warga Negara Indonesia	Indonesian
Usia Age	: 46 Tahun per 31 Desember 2024	46 years old as of 31 December 2024
Domisili Domicile	: Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia	Jakarta, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia

Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Jakarta, 15 Agustus 1978	Jakarta, 15 August 1978
Periode Jabatan Term of Office	:	Sejak 2 Januari 2023	Since 2 January 2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Akuntansi Universitas Indonesia (2000)	Bachelor of Economics Accounting, University of Indonesia (2000)
Sertifikasi Certification	:	• *Certified* PPP *Professional* (CP3P) *Foundation Level* • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 • *Qualified Chief Risk Officer* (QCRO)	• Certified PPP Professional (CP3P) Foundation Level • Level 3 Risk Management Certification by Risk Management Certifying Body • Qualified Chief Risk Officer (QCRO)
Riwayat Jabatan Career History	:	Bergabung dengan PT PII sejak 2 Januari 2023 sebagai Pimpinan Divisi Risk Management. Sebelumnya, mengawali karir sebagai Auditor pada salah satu Kantor Akuntan Publik, kemudian pernah menjabat di beberapa bank di Indonesia sebagai Senior Operational Risk Officer, Head of Supply Chain Management dan terakhir sebagai Head, Operational Risk Governance and Advisory.	Joined IIGF on 2 January 2023 as Head of the Risk Management Division. Previously, she started her career as an Auditor at a Public Accounting Firm, then served in several banks in Indonesia as Senior Operational Risk Officer, Head of Supply Chain Management, and Head of Operational Risk Governance and Advisory.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	:	Plt. Pimpinan Divisi Corporate Secretary and Communication	Acting Head of Corporate Secretary & Communication

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIMPINAN DIVISI RISK MANAGEMENT

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE HEAD OF RISK MANAGEMENT DIVISION

1. Memimpin pengembangan kerangka kerja manajemen risiko korporat (ERM *Framework*) yang diimplementasikan melalui Pelaksanaan Proses Manajemen Risiko Perseroan yang terus dipelihara dan diperbaiki secara berkesinambungan (*Continuous Improvement*);
2. Mendukung proses pengambilan keputusan dalam pemberian penjaminan proyek infrastruktur, terutama dari aspek manajemen risiko Perseroan;
3. Memimpin pelaksanaan proses kajian kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur standar Perseroan yang berlaku;
4. Melaksanakan dokumentasi dan konsultasi proses manajemen risiko yang dilaksanakan oleh pemilik dan pengelola risiko di setiap divisi; dan
5. Menyusun laporan manajemen risiko secara periodik dan menyampaikannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.

Selain menjalankan peran fungsi Manajemen Risiko, Divisi Risk Management PT PII juga bertugas memberikan pendampingan dan konsultasi terkait proses kepatuhan sebagai bagian dari implementasi GCG dan pengendalian internal.

1. Leading the development of the ERM Framework implemented in the Company's Risk Management Process, under continuous improvement;
2. Supporting the decision making process in guarantee infrastructure projects, especially in terms of the Company's risk management;
3. Heading the compliance assessment process with the Company's standard policies and procedures;
4. Documenting and providing consultation of risk management processes carried out by risk owners and managers in each division; and
5. Preparing regular risk management reports and submitting them to the Board of Directors and Board of Commissioners via the Risk Monitoring Committee.

In addition to carrying out the Risk Management function, IIGF's Risk Management Division also has the duty to provide assistance and consultation regarding the compliance process as part of the GCG and internal control implementation.

Jika audit internal dilakukan setelah suatu transaksi dilakukan, maka sebaliknya pengkajian atas kepatuhan (*compliance review*) diterapkan sebagai salah satu alat pengelola risiko sebelum sebuah transaksi dilakukan. Salah satu tugas dari fungsi kepatuhan (*compliance*) adalah memastikan terpenuhinya prasyarat sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa serta proses penjaminan di dalam proyek. Dalam pengawasan aspek kepatuhan dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, fungsi kepatuhan bertugas memberikan peringatan dini kepada manajemen terkait potensi risiko yang dapat diterima Perseroan.

If an internal audit is carried out after a transaction, then, on the contrary, compliance review shall be applied as one of the risk management tools before a transaction is carried out. One of the tasks of the compliance function is to ensure the fulfillment of prerequisites related to the procurement of goods and services and the project's guarantee process. In monitoring compliance aspects and conformity with prevailing regulations, the compliance function is tasked with providing early warning to management regarding potential risks that may be exposed to the Company.

Selain itu, berdasarkan PMK No. 260/PMK.011/2010 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Perseroan sebagaimana diubah dengan PMK No. 8/PMK.08/2016, dalam hal ini dikoordinasikan oleh Divisi Risk Management, Perseroan menyusun Acuan Alokasi Risiko yang menjadi acuan Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dalam proyek KPBU dalam mengalokasikan risiko kepada pihak yang tepat, serta menyusun rencana mitigasi risiko dalam rangka penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

In addition, pursuant to PMK No. 260/PMK.011/2010 of 2010 on the Guidelines for the Infrastructure Guarantee in the Public Private Partnership (PPP), the Company, as amended by PMK No. 8/PMK.08/2016, in this case, coordinated by the Risk Management Division, the Company prepares a Risk Allocation Reference as a reference for the Government Contracting Agency (GCA) in the PPP projects in allocating risks to the right parties, as well as preparing risk mitigation plans in the infrastructure provisions in accordance with the community's needs.

SDM DAN SERTIFIKASI PROFESI
HUMAN RESOURCES AND PROFESSIONAL CERTIFICATION

Per tanggal 31 Desember 2024, Divisi Risk Management didukung oleh 4 (empat) karyawan dengan tingkat Pendidikan dan Sertifikasi Profesi sebagai berikut:

As of 31 December 2024, the Risk Management Division is supported by four (4) employees, with the levels of education and professional certification as follows:

Jabatan Position	Jenjang Pendidikan Education	Sertifikasi Certification	Jumlah Personel Personnel
Pimpinan Divisi Risk Management Head of Risk Management Division	S1	3	1
Assistant Vice President Risk Management	S1	1	1
Deputi Senior Manager Risk Management	S2	4	1
Assistant Manager Risk Management	S1	2	1
Jumlah Total			**4**

Berikut pengungkapan informasi sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan yang bertugas di Divisi Risk Management hingga akhir tahun 2024:

The information regarding the professional certifications held by employees in the Risk Management Division until the end of 2024 is disclosed as follows:

Level Sertifikasi Certification Level	Total Sertifikasi Number of Certifications
Qualified Chief Risk Officer (QCRO) dari LSP MKS Qualified Chief Risk Officer (QCRO) from LSP MKS	1
Certified Corporate Risk Analyst (CCRA) dari BPKP Certified Corporate Risk Analyst (CCRA) from BPKP	1
Certified Risk Management Professional (CRMP) dari Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Certified Risk Management Professional (CRMP) from Risk Management Professional Certification Agency (LSPMR)	1
Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP) dari Enterprise Risk Management Academy (ERMA) Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP) from the Enterprise Risk Management Academy (ERMA)	1
Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP) dari Enterprise Risk Management Academy (ERMA) Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP) from the Enterprise Risk Management Academy (ERMA)	1
Certified GRC Professional dari LSP GRK Certified GRC Professional from LSP GRK	1
Sertifikasi Manajemen Risiko dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification by Risk Management Certifying Body	1
Certified PPP *Professional* (CP3P) *Foundation Level*	3

SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERSEROAN
COMPANY'S RISK MANAGEMENT SYSTEM

Perseroan menggunakan pendekatan Manajemen Risiko Korporat (*Enterprise Risk Management*/ERM) yang disusun secara holistik dan terintegrasi dan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan manajemen risiko secara efektif dan efisien. Kerangka Kerja ERM telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 003/SK/PII-BOD/0321 tanggal 4 Maret 2021. Penyusunan kerangka kerja tersebut merupakan perwujudan komitmen Perseroan dalam penerapan manajemen risiko di seluruh organisasi secara luas dan terintegrasi sehingga dapat memberikan panduan untuk penerapan manajemen risiko secara sistematis dan terukur sesuai standar internasional ISO 31000:2018 *Risk management - Guidelines* yaitu dalam mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan merumuskan langkah-langkah mitigasi terkait tantangan dan dampak terhadap ketidakpastian.

The Company uses the Enterprise Risk Management (ERM) approach, which is prepared holistically and is integrated as a reference to carry out risk management effectively and efficiently. ERM Framework has been ratified pursuant to the Board of Directors' Decree No. 003/SK/PII-BOD/0321 dated 4 March 2021. The framework preparation was the reflection of the Company's commitment to implementing risk management in the organization in a broad and integrated manner to provide guidance for the risk management implementation in a systematic and measurable manner in accordance with the international standard, ISO 31000:2018 Risk Management Guidelines, i.e., in identifying, analyzing, assessing, and formulating mitigation actions related to challenges and impacts on uncertainty.

TUJUAN DAN KERANGKA KERJA PENERAPAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)

OBJECTIVES AND FRAMEWORK OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)

Perseroan menerapkan ERM dengan tujuan untuk:

1. Mengembangkan PT PII menjadi organisasi yang tangguh menghadapi risiko dalam mencapai visi dan misi korporasi melalui evaluasi menyeluruh terhadap risiko yang melekat dalam semua aktivitas bisnis PT PII;
2. Mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko oleh manajemen dalam mencapai pertumbuhan bisnis yang sehat dengan mempertimbangkan profil risiko/ pengembalian (*risk/return*) yang ditetapkan;
3. Memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan menciptakan strategi dan proses yang bijaksana; dan
4. Meningkatkan reputasi PT PII di mata pemegang saham dan para pemangku kepentingan.

Pernyataan Misi Manajemen Risiko, yaitu "*tone at the top*", bertujuan untuk mengomunikasikan visi, prinsip-prinsip dan mandat PT PII dan menegaskan bahwa manajemen puncak Perseroan akan mengarahkan kegiatan Manajemen Risiko di seluruh tingkatan organisasi.

Sementara itu, misi yang ingin dicapai melalui penerapan ERM adalah untuk memahami risiko utama yang dihadapi organisasi dan memfasilitasi proses manajemen risiko melalui penyediaan alat dan metodologi yang tepat untuk dapat mengelola risiko secara eksplisit sehingga tercapai tujuan dari penerapan pendekatan yang konsisten dalam pengelolaan risiko di lingkungan PT PII.

Bersamaan dengan itu, penerapan ERM juga ditujukan untuk menciptakan organisasi sadar risiko melalui:

1. Pembentukan sistem manajemen berbasis risiko, yang mengelola semua risiko utama melalui praktik dalam semua kegiatan bisnis dan pengambilan keputusan;
2. Pengelolaan risiko di semua tingkat dalam organisasi;
3. Akuntabilitas yang jelas dan independensi dalam menjalankan tinjauan kepatuhan dan pemantauan seluruh kegiatan (semua pemilik proses bisnis); dan
4. Adopsi standar internasional yang diterima secara luas.

The Company implements ERM with the objective to:

1. Develop IIGF as a risk resilient organization to achieve the corporate vision and mission through a comprehensive evaluation of the risks inherent in all IIGF's business activities;
2. Support risk-based decision making by management in achieving healthy business growth by considering the established risk/return profile;
3. Fulfill Good Corporate Governance principles by creating prudent strategies and processes; and
4. Enhance IIGF's reputation from the perspective of shareholders and stakeholders.

The Risk Management Mission Statement, "tone at the top", aims to communicate IIGF's vision, principles, and mandate, and confirms that the Company's top management will direct Risk Management at all levels of the organisation.

Meanwhile, ERM implementation has the mission to understand the main risks faced by the organization and facilitate the risk management process through the provision of appropriate tools and methodologies to manage risks explicitly, in order to achieve the objective of implementing a consistent approach to risk management within IIGF.

Simultaneously, ERM is implemented to create a risk-aware organization through:

1. Establishment of a risk-based management system, which manages all major risks through practices in all business activities and decision making;
2. Risk management at all levels in the organization;
3. Clear accountability and independence in carrying out compliance reviews and monitoring of all activities (all business process owners); and
4. Adoption of widely accepted international standards.

KATEGORI RISIKO
RISK CATEGORY

PT PII telah membuat klasifikasi risiko yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Risiko Strategis, mencakup semua risiko yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan strategi.
2. Risiko Finansial, mencakup semua risiko yang terkait dengan risiko pasar dan risiko likuiditas.
3. Risiko Operasional, mencakup semua risiko yang timbul dari pelaksanaan fungsi bisnis Perseroan.

IIGF has created a risk classification as follows:

1. Strategic Risk, includes all risks related to strategy planning, execution, and monitoring.
2. Financial Risk, includes all risks associated with market and liquidity risk.
3. Operational Risk, includes all risks arising from the Company's business functions.

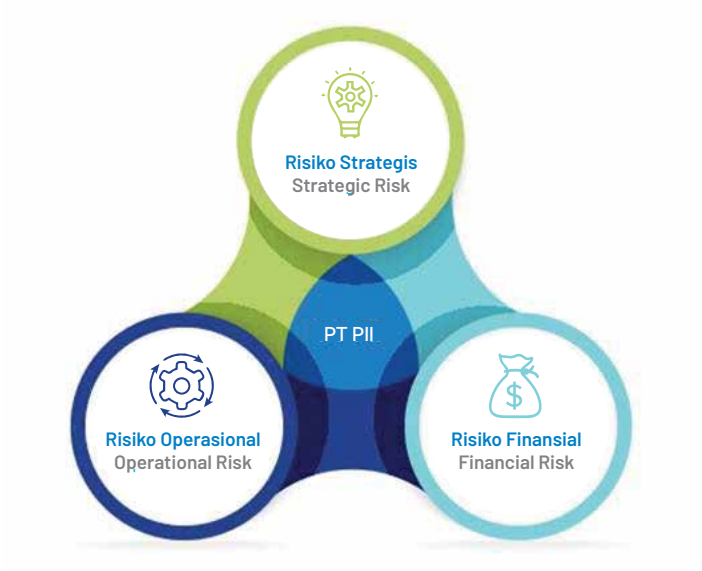

Taksonomi risiko (menunjukkan rincian dari sumber risiko yang mungkin terjadi) dan definisi risiko yang tercakup dalam kerangka ERM ini adalah sebagai berikut:

1. Kategori Risiko Strategis
   Risiko tersebut muncul dari kegagalan untuk menentukan dan melaksanakan strategi bisnis PT PII, kegagalan membuat keputusan bisnis secara akurat atau kegagalan dalam menanggapi perubahan eksternal. Dampak risiko strategis dapat berpotensi memengaruhi nilai-nilai strategis PT PII dan performanya sebagai sebuah organisasi.

2. Kategori Risiko Keuangan
   Kategori ini mengklasifikasikan risiko yang dapat muncul akibat ketidakmampuan PT PII untuk memenuhi target pendapatannya, kerugian dari penempatan dana investasi, dan ketidakmampuan PT PII untuk memperoleh pendanaan baru, baik dari kreditur ataupun dari pemegang saham. Sub kategori risiko keuangan adalah:

The risk taxonomy (details of the possible sources of risk) and risk definitions covered in this ERM framework are as follows:

1. Strategic Risk Category
   Such risks come from failure to determine and execute IIGF's business strategy, failure to decide the business accurately, or failure to respond to external changes. The impact of strategic risks can potentially affect IIGF's strategic values and its performance as an organization.

2. Financial Risk Category
   This category classifies risks that may arise from IIGF's inability to meet its revenue targets, losses from investments, and IIGF's inability to obtain new financing, either from creditors or shareholders. Sub-categories of financial risk:

a. Risiko Pasar (e.g. tingkat bunga, kurs)
   Risiko ini menggabungkan risiko yang dihasilkan dari pergerakan yang merugikan dari faktor pasar yang meliputi suku bunga dan selisih kurs serta harga ekuitas.
b. Risiko Likuiditas dan Kredit
   Risiko ini berhubungan dengan isu likuiditas dan kredit yang terkait dengan aset dan pendapatan PT PII.

3. Kategori Risiko Operasional
   Risiko pada kategori ini umumnya terjadi pada pelaksanaan fungsi bisnis PT PII. Risiko ini fokus pada risiko yang timbul dari kelemahan manusia, sistem, atau proses dalam Perseroan beroperasi (termasuk aktivitas penyediaan penjaminan sebagai bisnis utama PT PII).
   a. Operasional Umum
      Risiko pada sub kategori ini umumnya terkait dengan ketidakmampuan PT PII untuk mengoperasikan fungsi bisnisnya secara efisien, yang menyebabkan kerugian operasional dari kegiatan di luar penyediaan penjaminan.
   b. Penyediaan Penjaminan
      Risiko pada sub kategori ini mengklasifikasikan risiko operasional yang terkait dengan peran PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI).
   c. Hukum dan Kepatuhan
      Risiko pada sub kategori ini terkait dengan ketidakpatuhan PT PII sebagai korporasi terhadap standar hukum atau regulasi yang dapat berdampak pada nilai-nilai strategis dan kinerja PT PII sebagai sebuah organisasi.

a. Market Risk (e.g., interest rate, exchange rate)
   This risk combines risks resulting from adverse movements in market factors, including interest rates, foreign exchange, and equity prices.
b. Liquidity and Credit Risk
   This risk is connected to liquidity and credit issues associated with IIGF's assets and income.

3. Operational Risk Category
   This risk generally happens in the IIGF's business functions. This risk focuses on risks arising from people's weaknesses, systems, or processes by which the Company operates (including guarantee provision activities as IIGF's main business).
   a. General Operations
      Risks in this sub-category are related to IIGF's inability to operate its business functions efficiently, leading to operational losses from activities outside the guarantee provision.
   b. Guarantee Provision
      Risks in this sub-category classify operational risks associated with IIGF's role as a Infrastructure Guarantee Agency (BUPI).
   c. Law and Compliance
      Risks in this sub-category are related to IIGF's non-compliance as a corporation with legal or regulatory standards that may impact IIGF's strategic values and performance as an organization.

PROSES MANAJEMEN RISIKO YANG BERLAKU DI PT PII

RISK MANAGEMENT PROCESS APPLICABLE AT IIGF

Proses Manajemen Risiko merupakan hal yang penting dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan, serta diintegrasikan ke dalam struktur, operasi, dan proses organisasi. Proses manajemen risiko meliputi penerapan yang sistematis dan berkesinambungan pada kegiatan dan proses komunikasi dan konsultasi, penentuan konteks, penilaian, penanganan, pemantauan dan kaji ulang serta pencatatan dan pelaporan risiko.

The Risk Management process is vital in management and decision making, and is integrated into the organizational structure, operations, and processes. The risk management process includes the systematic and continuous application of communication and consultation activities and processes, context determination, assessment, handling, monitoring, and review, as well as recording and reporting of risks.

Mengacu pada standar ISO 31000:2018, Proses Manajemen Risiko di PT PII dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Cakupan, Konteks, dan Kriteria
   Penetapan ruang lingkup, konteks dan kriteria adalah tahapan yang harus dilakukan untuk menyesuaikan proses Manajemen Risiko guna mendukung penilaian dan perlakuan risiko secara efektif dan relevan dengan lingkungan organisasi dan operasional Perseroan. Secara garis besar, proses bisnis yang berjalan di PT PII saat ini terdiri dari:

With reference to the ISO 31000:2018 standard, IIGF's Risk Management Process is described as follows:

1. Scope, Context, and Criteria
   The determination of scope, context, and criteria is a key phase to adjust the Risk Management process to support the assessment and treatment of risks effectively and relevant to the organizational and operational environment of the Company. Generally, IIGF's current business processes consist of:

a. Penjaminan KPBU;
b. Penjaminan Non-KPBU;
c. Pendampingan Penyiapan dan Transaksi;
d. Capacity Building; dan
e. Pengelolaan penempatan dana (investasi).

Menilik dinamika bisnis dan kebutuhan pemangku kepentingan, terdapat potensi penambahan mandat dan proses bisnis lain yang perlu dikaji dampaknya terhadap strategi, operasi dan keuangan Perseroan.

2. Komunikasi dan Konsultasi
Komunikasi dan konsultasi adalah tahapan yang dilaksanakan baik secara internal dan eksternal untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko melalui interaksi dengan para pemangku kepentingan, baik dalam bentuk rapat berkala, rapat insidentil atau *ad hoc, Focus Group Discussion* (FGD); dan diskusi reguler antara fungsi Manajemen Risiko dengan para Pemilik Risiko (*Risk Owner*) dan *Risk Officer.*

3. Penilaian Risiko
Tahapan penilaian risiko mencakup identifikasi, analisis dan evaluasi risiko yang dijalankan secara sistematis dengan tujuan untuk menentukan kemungkinan dan dampak terjadinya suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi sehingga dapat dilakukan penanganan risiko secara tepat.

4. Penanganan Risiko
Penanganan risiko adalah tahapan yang dilakukan untuk menentukan tindakan yang tepat yang dapat memberikan manfaat paling optimal bagi PT PII dalam menghadapi risiko yang teridentifikasi.

5. Pemantauan dan Kaji ulang Risiko
Pemantauan risiko adalah kegiatan pemantauan rutin terhadap kinerja proses Manajemen Risiko atas perencanaan dan harapan atas proses Manajemen Risiko. Sementara itu, kaji ulang risiko merupakan kegiatan peninjauan secara berkala atas kondisi terkini dan pada fokus tertentu.

6. Pencatatan dan Pelaporan Risiko
Proses Manajemen risiko beserta hasilnya harus didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang tepat. Pelaporan risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari tata kelola organisasi yang diterapkan dalam rangka meningkatkan kualitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan, serta membantu pemenuhan tugas dan tanggung jawab para Direksi dan Dewan Komisaris.

a. PPP Guarantee;
b. Non-PPP Guarantee;
c. Project Development Assistance;
d. Capacity Building; and
e. Investment Management.

Looking at the business dynamics and the stakeholders' needs, there is the potential for additional mandates and other business processes to be assessed for their impact on the Company's strategy, operations, and finances.

2. Communication and Consultation
Communication and consultation are phases carried out internally and externally to ensure the effectiveness of risk management by interacting with stakeholders, in the form of regular meetings, incidental or ad hoc meetings, Focus Group Discussions (FGDs); and regular discussions between the Risk Management function, Risk Owners, and Risk Officers.

3. Risk Assessment
The risk assessment stage includes the identification, analysis, and evaluation of risks conducted systematically to determine the likelihood and impact of an event that obstructs the achievement of organizational goals or objectives so that appropriate risk management can be carried out.

4. Risk Handling
Risk handling is a phase to determine the right actions that can provide the most optimal benefits for IIGF in dealing with identified risks.

5. Risk Monitoring and Review
Risk monitoring is a regular monitoring activity of the Risk Management's performance on the planning and expectations. Meanwhile, risk review is a regular activity to review current conditions with a particular focus.

6. Risk Recording and Reporting
The Risk Management process and its results shall be documented and reported via appropriate mechanisms. Risk reporting is an integral part of organizational governance that is implemented to improve the quality of communication with stakeholders, and to fulfill the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners.

PENETAPAN TINGKAT RISIKO
RISK LEVEL DETERMINATION

Perseroan telah menetapkan tingkat risiko yang mungkin dapat diterima Perseroan dan digunakan dalam pengukuran risiko. Tingkat risiko menengah berarti merujuk pada potensi risiko yang mungkin dapat diterima dengan beberapa pertimbangan tambahan mengenai manfaat yang akan diperoleh. Berikut matriks tingkat risiko yang akan digunakan dalam evaluasi risiko:

The Company determined the level of risk that may be acceptable to the Company and is used in risk measurement. Moderate level refers to a potential risk that may be acceptable with some additional considerations in terms of obtained benefits. The following risk level matrix will be used in the risk evaluation:

Kemungkinan Risiko Possible Risks	Dampak Risiko dalam Hal Material Risiko Risk Impact in terms of Material Risk				
	Tidak Signifikan Not Significant	Minor	Moderat Moderate	Mayor Major	Berbahaya Danger
Sangat Rendah Very Low	Rendah Low	Rendah Low	Rendah Low	Rendah Low	Menengah Medium
Rendah Low	Rendah Low	Rendah Low	Menengah Medium	Menengah Medium	Menengah Medium
Sedang Middle	Rendah Low	Menengah Medium	Menengah Medium	Tinggi High	Tinggi High
Tinggi High	Menengah Medium	Menengah Medium	Tinggi High	Tinggi High	Tinggi High
Sangat Tinggi Very High	Menengah Medium	Tinggi High	Tinggi High	Tinggi High	Tinggi High

PEDOMAN PENANGANAN RISIKO
RISK MANAGEMENT GUIDELINES

Tujuan penerapan sistem manajemen risiko di Perseroan adalah agar Perseroan dapat melakukan penanganan risiko secara tepat sehingga dapat ditentukan aktivitas pengelolaan risiko selanjutnya. Penanganan risiko dipersiapkan dengan memperhatikan selera risiko yang diterjemahkan ke dalam matriks tingkat risiko. Di bawah ini merupakan pedoman penanganan risiko untuk setiap tingkat risiko untuk dijadikan acuan dalam menentukan langkah mitigasi terhadap setiap risiko yang teridentifikasi.

The Company implements a risk management system with the objective to enable the Company to handle risks appropriately so that further risk management activities can be determined. Risk handling is prepared with due regards to the risk appetite, which is translated into a risk level matrix. Below are risk handling guidelines for each risk level to be used as a reference in determining the mitigation steps for each identified risk.

Tingkat Risiko Level Risk	Penanganan Risiko Handling Risk	
Rendah Low	• Menerima risiko dengan pemantauan yang konstan. • Minimal, kontrol detektif dapat ditentukan untuk risiko tersebut. • Penanganan risiko dilaksanakan dalam waktu 6 bulan, bila memungkinkan.	• Accepting the risk with constant monitoring. • Minimally, detective controls can be defined for the risk. • Risk management implemented within 6 months, if possible.
Menengah Medium	• Mengurangi tingkat risiko, bila dimungkinkan. • Kontrol pencegahan dapat ditentukan untuk risiko tersebut. • Jika biaya dari penanganan risiko lebih dari manfaatnya, maka terima risiko tersebut. Penanganan risiko sepenuhnya dilaksanakan dalam waktu 3 bulan, bila memungkinkan.	• Reducing the risk level, if possible. • Preventive controls can be defined for the risk. • If the expenses of addressing the risk outweigh the benefits, accept the risk. Risk management fully implemented within 3 months, if possible.
Tinggi High	• Mengurangi tingkat risiko, bila memungkinkan. • Jika biaya dari penanganan risiko lebih dari manfaatnya, maka terima risiko tersebut. Kontrol pencegahan dapat ditentukan untuk risiko tersebut. • Penanganan risiko sepenuhnya dilaksanakan secepatnya, bila memungkinkan. Mensyaratkan pemantauan risiko secara bulanan.	• Reducing the risk level, if possible. • If the expenses of addressing the risk outweigh the benefits, accept the risk. Preventive controls can be defined for the risk. • Risk management fully implemented at the soonest, if possible. Requiring monthly risk monitoring.

RISIKO-RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN

COMPANY'S MAJOR RISKS

Dalam menjalankan usahanya, PT PII terekspos pada sejumlah risiko utama, di antaranya

In conducting its business, IIGF is exposed to several major risks, including: (perlu update)

Jenis Risiko Type of Risk	Penjelasan Risiko Risk Explanation	Pengelolaan dan Penanganan Risiko Risk Management and Handling
Risiko Strategis -Tidak Tercapainya Target Nilai Investasi Penjaminan Strategic Risk - Non-achievement of Guarantee Investment Value Target	Dalam menjalankan peran sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), Perseroan menghadapi risiko terkait aktivitas bisnisnya. Risiko yang dihadapi antara lain terkait dengan target pipeline proyek, tertunda atau tidak berlanjutnya proyek ke tahapan penandatanganan perjanjian penjaminan dan perjanjian regres untuk proyek KPBU, dan tidak terbitnya penugasan untuk penjaminan Non KPBU yang dapat berpengaruh kepada nilai investasi proyek yang dijamin. In carrying out its role as an Infrastructure Guarantee Agency (BUPI), the Company faces risks, related to its business activities. The risks include those related to project pipeline targets, delayed or non-continuation of projects to the stage of signing guarantee agreements and recourse agreements for PPP projects, and non-issuance of assignments for Non-PPP guarantees, which can affect the investment value of the guaranteed project.	Secara umum Perseoran melakukan penguatan strategi antara lain melakukan koordinasi dengan PJPK secara intensif dan pelaksanaannya untuk penambahan pipeline dan perluasan sektor. Dengan dilakukannya pengelolaan dan penanganan terkait pencapaian target nilai investasi penjaminan maka tingkat risiko dapat lebih terkelola dengan baik. Generally, the Company has strengthened the strategy, among others, to coordinate with GCA intensively and its implementation for pipeline and sector expansion. By managing and handling related to the achievement of the target investment value of the guarantee, the level of risk can be better managed.

Jenis Risiko Type of Risk	Penjelasan Risiko Risk Explanation	Pengelolaan dan Penanganan Risiko Risk Management and Handling
Risiko Keuangan - Ketidakcukupan Likuiditas Ketika Terjadi Klaim Penjaminan **Financial Risk - Insufficient Liquidity When a Guarantee Claim Occur**	PT PII memiliki eksposur potensi klaim penjaminan. Ketika terjadi klaim, Perseroan perlu memastikan kecukupan likuiditas untuk memastikan proses pembayaran klaim tepat waktu. IIGF is exposed to potential guarantee claims. When a claim occurs, the Company needs to ensure sufficient liquidity to ensure a timely claim payment process	Secara umum Perseroan melakukan pemantauan posisi penempatan dana (investasi) secara berkala untuk memastikan kecukupan likuiditas terhadap potensi klaim serta melakukan pemantauan atas potensi klaim secara berkala. Sepanjang tahun 2024, Perseroan telah berhasil melakukan pengelolaan likuiditas sehingga tingkat risiko likuiditas dapat lterkelola dengan baik. Generally, the Company monitors the position of investment regularly to ensure adequate liquidity against potential claims and monitors potential claims periodically. In 2024, the Company successfully managed liquidity so that the level of liquidity risk can be well managed.
Risiko Keuangan – Tidak Terpulihkannya Tagihan Regres **Financial Risk - Non-Recovery of Recourse Invoices**	Setelah dilakukannya proses pembayaran klaim, Perseroan juga menghadapi risiko kredit terkait dengan pemulihan regres. Risiko ini berkaitan dengan tidak terpulihkannya tagihan regres karena ketidakmampuan PJPK atau BUMN Terjamin untuk membayar regres. Perseroan perlu memastikan bahwa piutang regres yang timbul dapat terpulihkan sesuai kesepakatan. After the claim payment process, the Company also faces credit risk related to recourse recovery. This risk relates to the non-recovery of recourse receivables due to the inability of GCA or Guaranteed SOEs to pay recourse. The Company needs to ensure that the recourse receivables arising can be recovered as agreed	Secara umum Perseroan melakukan penguatan instrumen regres antara lain skema pembayaran regres dan penguatan perjanjian regres. Dengan dilakukannya pengelolaan dan penanganan terkait hak tagih regres maka tingkat risiko dapat lebih terkelola dengan baik. Generally, the Company has strengthened recourse instruments, including recourse payment schemes and strengthening of recourse agreements. With the management and handling of recourse receivables, the level of risk can be better managed.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB FUNGSI MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2024

REPORT ON THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK MANAGEMENT FUNCTION IN 2024

Sepanjang tahun 2024, Divisi Risk Management telah melaksanakan sejumlah aktivitas yang merupakan bagian dari tugas, tanggung jawab, dan fungsi Manajemen Risiko, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran pada Buku Acuan Alokasi Risiko Tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan R.I. No. 260/PMK.011/2010, Pasal 11;
2. Melaksanakan review atas Dokumen Proses Bisnis PT PII;
3. Melaksanakan verifikasi atas penilaian kepatuhan (*Compliance Check*) untuk memastikan proses penjaminan telah mengikuti prosedur internal (Pedoman/Kebijakan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku;
4. Melaksanakan verifikasi atas penilaian kepatuhan (*Compliance Check*) untuk memastikan proses penempatan dana investasi telah mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku yaitu PMK 148/2022 dan prosedur internal;
5. Melakukan *review* terhadap pengadaan barang dan jasa dengan nilai tertentu untuk memastikan bahwa proses telah mengikuti ketentuan dan prosedur internal yang berlaku;
6. Penyusunan materi dalam kepesertaan di ajang kompetisi praktik manajemen risiko dan/atau bidang GRC di tingkat nasional maupun internasional;
7. Memfasilitasi proses identifikasi, penanganan, pemantauan dan pelaporan risiko Perseroan secara berkelanjutan dengan melibatkan *Risk Officer* dan *Risk Owner;*
8. Melaksanakan implementasi *Risk Register* menjadi *Risk Control Matrix*;
9. Melaksanakan implementasi *Risk Control Self Assessment* (RCSA) dan *Key Risk Indicators* (KRI);
10. Melaksanakan sosialisasi, *training* dan sertifikasi manajemen risiko untuk personil di Perseroan;
11. Melaksanakan penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) untuk penilaian tingkat maturitas ERM dengan mengacu kepada referensi ISO 31000 dan *best practice;*
12. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen *Governance, Risk, and Compliance* yang bertujuan dalam otomatisasi beberapa lingkup modul yaitu *Risk Control Matrix, Risk Control Self-Assessment, Risk Event Database, Key Risk Indicator*, serta *Dashboard*; dan

In 2024, the Risk Management Division carried out several activities that are part of the duties, responsibilities, and functions, of Risk Management:

1. Updating the 2024 Risk Allocation Reference Book, in accordance with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia. No. 260/PMK.011/2010, Article 11;
2. Reviewing IIGF's Business Process Documents;
3. Verifying the Compliance Check to ensure that the guarantee process has followed the applicable internal procedures (Guidelines/Policies and Standard Operating Procedures/SOPs);
4. Verifying Compliance Check to ensure that the investment placement process has followed the prevailing regulatory provisions, i.e., PMK 148/2022 and internal procedures;
5. Reviewing the procurement of goods and services with a certain value to ensure that the process has followed the prevailing provisions and internal procedures;
6. Preparing materials for participation in competitions on risk management practices and/or GRC at national and international levels;
7. Facilitating the process of identification, handling, monitoring, and reporting of the Company's risks continuously by involving Risk Officers and Risk Owners;
8. Implementing Risk Register into Risk Control Matrix;
9. Implementing Risk Control Self Assessment (RCSA) and Key Risk Indicators (KRI);
10. Conducting socialization, training, and certification of risk management for the Company's personnel;
11. Assessing Risk Maturity Index (RMI) for ERM maturity level assessment by referring to ISO 31000 reference and best practice.
12. Development of Governance, Risk, and Compliance Management Information System with the objective to automate several module scopes, i.e., Risk Control Matrix, Risk Control Self-Assessment, Risk Event Database, Key Risk Indicator, and Dashboard; and

13. Implementasi dan Pemeliharaan Sertifikasi atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diadopsi dari ISO 37001:2016 atas area Pengadaan Barang dan Jasa sebagai bagian dari komitmen pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

13. Implementing and Maintaining Certification on Anti-Bribery Management System (ABMS) adopted from ISO 37001:2016 for Procurement of Goods and Services as part of the commitment to Good Corporate Governance.

PENJELASAN MENGENAI HASIL TELAAH YANG DILAKUKAN ATAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2024

EXPLANATION OF REVIEW RESULT CARRIED OUT OVER RISK MANAGEMENT SYSTEM IN 2024

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan risiko yang efektif, Perseroan telah melakukan penilaian atas pelaksanaan manajemen risiko melalui beberapa mekanisme, di antaranya dengan mengakomodir aspek Manajemen Risiko ke dalam *Key Performance Indicator* (KPI) Korporasi, audit dengan pendekatan berbasis risiko, *review* implementasi dan pemantauan dan pelaporan kepada pemangku kepentingan secara berkala. Divisi Risk Management secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas sistem Manajemen Risiko korporat melalui pengawasan dan pemantauan pergerakan tingkat risiko dalam profil risiko Perseroan.

Pada tahun 2024 Divisi Risk Management melakukan evaluasi atas efektivitas sistem Manajemen Risiko korporat melalui penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko yang biasa disebut *Risk Maturity Index* (RMI). Penilaian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran penerapan manajemen risiko di Perseroan serta penyusunan *road map* untuk pengembangan kedepan. Penilaian dilakukan oleh pihak eksternal yang independen mengacu kepada standar ISO 31000 menggunakan *tools* SAICORP.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut diperoleh skor nilai sebesar 3,85 (*repeatable*) dari skala 1-5, Perseroan kemudian melakukan perumusan terhadap *road map* untuk terus meningkatkan pengelolaan risiko. Hasil penilaian ini disampaikan kepada Direksi dan Komisaris sebagai bagian dari realisasi KPI tahun 2024.

To actualize effective risk management, The Company assessed the risk management implementation through several mechanisms, including accommodating aspects of Risk Management into the Corporate's Key Performance Indicator (KPI), audits with a risk-based approach, regular reviews and monitoring, and reporting to stakeholders. The Risk Management Division evaluates the effectiveness of the corporate Risk Management system through supervision and monitoring of risk level movements in the Company's risk profile.

In 2024, the Risk Management Division evaluated the effectiveness of the corporate Risk Management system by assessing the maturity level of risk management, commonly known as the Risk Maturity Index (RMI). This assessment aims to obtain an overview of the risk management implementation in the Company as well as the preparation of a road map for future development. The assessment is conducted by an independent external party with reference to the ISO 31000 standard using SAICORP tools.

The assessment resulted in a score of 3.85 (repeatable) on a scale of 1-5. Further, the Company formulated a road map to improve the risk management. The results of this assessment were presented to the Board of Directors and Commissioners as part of the realization of 2024 KPIs.

PENGAWASAN AKTIF DARI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

ACTIVE SUPERVISION BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Perseroan senantiasa mengkaji efektivitas penerapan manajemen risiko, antara lain melalui Laporan Manajemen Risiko dan pemantauan atas perkembangan mitigasi risiko yang disampaikan setiap semester oleh Divisi Risk Management kepada Direktur Utama selaku anggota Direksi yang membawahi Divisi Risk Management. Kemudian, secara berkala Perseroan menyampaikan Laporan Manajemen kepada Dewan Komisaris yang antara lain memuat informasi mengenai perkembangan penerapan sistem manajemen risiko di Perseroan, termasuk informasi mengenai status tindak lanjut pelaksanaan mitigasi. Laporan dibuat secara komprehensif sehingga memberikan gambaran komitmen dari Perseroan untuk menurunkan tingkat risikonya.

The Company reviews the effectiveness of risk management, among others, through the Risk Management Report and monitoring of risk mitigation progress submitted every semester by the Risk Management Division to the President Director as the member of the Board of Directors in charge of the Risk Management Division. Further, the Company submits a Management Report to the Board of Commissioners which contains information on the progress of the risk management system implementation in the Company, including information on the status of follow-up on mitigation. The report is made comprehensively to illustrate the Company's commitment to reducing its risk level.

Selain itu, untuk memperkuat pengelolaan risiko Perseroan, Dewan Komisaris juga telah membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi penerapan manajemen risiko serta memberikan masukan dan saran terkait efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan. Kemudian, secara berkala diadakan rapat dan diskusi bersama antara Divisi Risk Management dan Komite Pemantau Risiko guna membahas penerapan dan program kerja terkait manajemen risiko dan tindak lanjut atas masukan yang disampaikan.

In addition, to strengthen the Company's risk management, the Board of Commissioners established a Risk Monitoring Committee to assist the Board of Commissioners in supervising risk management as well as providing input and advice regarding the effectiveness of risk management in the Company. Periodically, joint meetings and discussions are held between the Risk Management Division and the Risk Monitoring Committee to discuss the implementation and work programs related to risk management and follow up on the inputs submitted.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS TERKAIT HASIL PENELAAHAN ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan pemantauan atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Direksi dinilai telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas penerapan praktik manajemen risiko secara berkesinambungan, terutama pada area-area yang mencakup kapabilitas sumber daya, teknologi, dan metodologi yang dikembangkan sesuai *best practice* mengingat tantangan dan tuntutan dunia usaha, termasuk harapan para pemangku kepentingan terus meningkat di tengah situasi ekonomi dan bisnis yang tidak pasti.

The Board of Commissioners has supervised and monitored the effectiveness of risk management. Based on the supervision results, the Board of Directors is considered to have shown a strong commitment to enhancing the quality of the risk management practices continuously, especially in areas that include resource capabilities, technology, and methodologies developed in accordance with best practices, considering the challenges and demands of the business world, including the increasing expectations of stakeholders amidst uncertain economic and business situations.

Beberapa rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko antara lain dengan adanya sosialisasi, *training* dan sertifikasi yang akan meningkatkan budaya dan pengelolaan risiko secara keseluruhan. Pada tahun 2024, Perseroan juga melakukan penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko yang biasa disebut *Risk Maturity Index* (RMI). Penilaian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran penerapan manajemen risiko di Perseroan serta penyusunan *road map* untuk pengembangan kedepan sehingga implementasi manajemen risiko akan terus berkembang.

Dengan pendampingan oleh Divisi Risk Management, *Risk Officer* diharapkan dapat meningkatkan perannya untuk membantu para pemilik risiko (*Risk Owner*) dalam mengelola, menjalankan, dan memantau pelaksanaan proses manajemen risiko di setiap divisi dan unit kerja masing-masing.

Hasil pengawasan atas pelaksanaan manajemen risiko melalui penerapan Proses Manajemen Risiko Korporat dengan metodologi *Risk-Control Self Assessment* (RCSA) menunjukkan bahwa pengendalian risiko Perseroan untuk risiko yang dinilai memiliki tingkat risiko di atas rendah telah sepenuhnya memadai.

Some recommendations for improvements have been made in an effort to improve the quality of risk management, which include the socialization, training, and certification, that shall improve the risk culture and management comprehensively. In 2024, the Company also assessed the maturity level of risk management, commonly known as the Risk Maturity Index (RMI). This assessment aims to obtain an overview of the risk management implementation in the Company as well as the preparation of a road map for future development so that the implementation of risk management will continue to improve.

With assistance from the Risk Management Division, Risk Officers shall enhance their role to assist risk owners in managing, implementing, and monitoring the risk management processes in each division and working unit.

The results of risk management monitoring via the Corporate Risk Management Process with the Risk-Control Self Assessment (RCSA) methodology showed that the Company's risk control for risks assessed as having a risk level above low is fully adequate.

INFORMASI SANKSI ADMINISTRATIF TAHUN BUKU
INFORMATION ON ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR THE FISCAL YEAR

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak menerima sanksi administrasi dari regulator dalam bentuk apapun dan tidak pernah mendapatkan sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting (*material event*).

In 2024, the Company did not receive any form of administrative sanction from regulators, and was never sanctioned by regulators for being unable to announce material events within the prescribed time frame.

SANKSI ADMINISTRATIF YANG DIHADAPI ENTITAS ANAK
ADMINISTRATIVE SANCTION IMPOSED ON THE SUBSIDIARIES

Hingga per tanggal 31 Desember 2024, Perseroan tidak memiliki entitas anak sehingga Perseroan tidak menyajikan informasi Sanksi administratif yang melibatkan Entitas Anak.

As of 31 December 2024, the Company does not have any subsidiaries. Therefore, the Company does not disclose information on administrative sanctions involving Subsidiaries.

INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM
INFORMATION ON LEGAL ISSUES

"Sepanjang tahun 2024, anggota Dewan Komisaris & anggota Direksi PT PII yang sedang menjabat tidak memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana".

"In 2024, current members of IIGF's Board of Commissioners and Board of Directors did not face any legal issues, either civil or criminal."

PERMASALAHAN HUKUM PERSEROAN
COMPANY'S LEGAL ISSUES

Selama tahun 2024, PT PII tidak menghadapi permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

In 2024, IIGF does not face any legal issues, both civil and criminal.

ANAK PERSEROAN
SUBSIDIARIES

Hingga Akhir Tahun 2024, Perseroan belum memiliki entitas anak sehingga Perseroan tidak menyajikan informasi mengenai perkara hukum yang melibatkan Entitas Anak.

As of the end of 2024, the Company does not have any subsidiaries. Therefore, the Company does not disclose information on legal issues involving the Subsidiaries.

PERKARA HUKUM LAINNYA
MISCELLANEOUS LEGAL ISSUES

Selama tahun 2024, PT PII tidak terlibat dalam permasalahan hukum yang berkaitan dengan isu perburuhan, ketenagakerjaan, konsumen, kepailitan, komersial, persaingan, atau lingkungan serta tidak terdapat kasus ketidakpatuhan/pelanggaran terhadap hukum, aturan, dan peraturan berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material dalam tiga tahun terakhir.

In 2024, IIGF was not involved in any legal issues related to labor, employment, consumer, bankruptcy, commercial, competition, or environmental matters. There were no instances of non-compliance/violation of laws, rules, and regulations related to significant or material related party transactions in the last three years.

KODE ETIK PERSEROAN
CODE OF CONDUCT

Sebagai bagian dari pelaksanaan praktik GCG, Perseroan telah merumuskan Kode Etik Perseroan yang merupakan salah satu elemen penting yang berlaku mengikat bagi seluruh karyawan Perseroan, termasuk jajaran Direksi dan Dewan Komisaris. Kode Etik Perseroan diatur dalam Kebijakan Kode Etik PT PII yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 008/ SK/PII-BOD/1222 dan No. KEP-09/KOM/ PII/12/2022 tentang Pengesahan Kebijakan Kode Etik Perseroan tanggal 30 Desember 2022.

Kebijakan Kode Etik Perseroan merupakan sekumpulan komitmen etika perilaku yang disusun dan digunakan sebagai pedoman untuk memengaruhi, membentuk, mengatur dan bertingkah laku berdasarkan prinsip kesadaran etis (*ethical sensibility*), berpikir etis (*ethical reasoning*), dan berperilaku etis (*ethical conduct*) sebagai bagian dari usaha untuk mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan.

As part of the GCG practices, the Company formulated the Company's Code of Conduct, which is one of the important elements that applies bindingly to all Company's employees, including the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Company's Code of Conduct is regulated in IIGF's Code of Conduct, which has been ratified via the Joint Decree of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners No. 008/ SK/PII-BOD/1222 and No. KEP-09/ KOM/ PII/12/2022 on the Ratification of the Company's Code of Conduct dated 30 December 2022.

The Company's Code of Conduct contains a set of commitments to ethical behavior, formulated and referred to as a manual to influence, shape, stipulate, and carry out consistent behavior based on ethical sensibility, ethical reasoning, and ethical conduct, as part of efforts to realize the vision, mission, and values of the Company.

NILAI-NILAI DAN BUDAYA PERUSAHAAN
CORPORATE VALUES AND CULTURE

Dalam rangka memperkuat identitas dan kinerja Perseroan, PT PII memiliki nilai-nilai budaya yang dikenal sebagai InTIME, yakni *Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust* dan *Excellence*. Nilai-nilai budaya ini mencerminkan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam lingkungan organisasi Perseroan. Penjabaran masing-masing nilai budaya dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

IIGF has cultural values known as InTIME, i.e., Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust, and Excellence, to strengthen the Company's identity and performance. These cultural values reflect the principles applied in the Company's organizational environment. The description of each cultural value is elaborated in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

POKOK-POKOK DALAM KEBIJAKAN KODE ETIK PERSEROAN

THE COMPANY'S CODE OF ETHICS PRINCIPLES

Pokok-pokok yang diatur dalam Pedoman Kode Etik meliputi:

1. Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Nilai-nilai Perseroan;
3. Kepatuhan terhadap Hukum dan Perundang-undangan dan Norma yang Berlaku;
4. Benturan Kepentingan;
5. Etika Profesional dalam Bekerja;
6. Etika dalam Berhubungan dengan Pemangku Kepentingan;
7. Keterlibatan dalam Aktivitas Politik;
8. Komitmen terhadap Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja;
9. Kesempatan yang Sama Untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi;
10. Pelaporan Keuangan;
11. Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Jamuan, Hiburan dan Pemberian Donasi;
12. Komitmen terhadap Perlindungan Aset Perseroan dan Kerahasiaan Informasi;
13. Penerapan dan Penegakan Kebijakan Kode Etik;
14. Pelaporan dan Sanksi atas Pelanggaran; dan
15. Pernyataan Kepatuhan.

The key points regulated in the Code of Conduct include:

1. Commitment of the Board of Directors and Board of Commissioners;
2. Corporate values;
3. Compliance with all prevailing Laws, Regulations, and Norms;
4. Conflict of Interest;
5. Professional Work Ethics;
6. Ethics in Engaging with Stakeholders;
7. Involvement in Political Activity;
8. Commitment to the Occupational Health and Safety and Environment;
9. Equal Opportunity to Get a Job and Promotion;
10. Financial Reporting;
11. Gifts and Gifts Receipt, Meals, Entertainment, and Donations;
12. Commitment to Protecting the Company's Assets and Confidentiality of Information;
13. Mechanisms for the Enactment of Code of Conduct;
14. Reporting and Sanctions for Violations; and
15. Statement of Compliance.

PENGUNGKAPAN KEPATUHAN BAHWA KODE ETIK BERLAKU BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

COMPLIANCE DISCLOSURE THAT THE CODE OF CONDUCT APPLIES TO ALL LEVELS OF THE ORGANIZATION

Kebijakan Kode Etik telah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 008/SK/PII-BOD/1222 dan No. KEP-09/KOM/ PII/12/2022 tentang Pengesahan Kebijakan Kode Etik Perseroan tanggal 30 Desember 2022. Kebijakan Kode Etik ini berlaku bagi seluruh Insan PT PII di semua level organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan.

The Code of Conduct, which has been ratified via the Joint Decree of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners No. 008/SK-BOD/1222 and No. KEP-09/ KOM/ PII/12/2022 on the Ratification of the Company's Code of Conduct dated 30 December 2022. The Code of Conduct applies to all IIGF personnel at all levels of the organization, starting from the Board of Commissioners, Directors, and the Company's employees.

SOSIALISASI DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN KODE ETIK

SOCIALIZATION AND DISSEMINATION OF CODE OF CONDUCT

Kebijakan Kode Etik Perseroan diungkapkan dan/atau disebarkan kepada semua pihak yang terlibat dalam Perseroan melalui berbagai saluran komunikasi yang dimiliki Perseroan, termasuk melalui teknologi informasi yang dapat diakses oleh semua karyawan dengan mudah setiap saat. Untuk karyawan

The Company's Code of Conduct is disclosed and/or disseminated to all parties in the Company via various communication channels owned by the Company, including by means of information technology accessible by all employees at any time. For new employees, the Company's

baru, sosialisasi Kebijakan Kode Etik Perseroan dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan pengenalan Perseroan (*Induction*) yang menyampaikan mengenai Kebijakan Kode Etik serta menyediakan materi kegiatan terkait secara tertulis yang disampaikan baik melalui email atau dokumen elektronik lainnya.

Code of Conduct is disseminated by holding an Induction, which conveys the Code of Conduct and provides related activity materials in writing delivered either by email or other electronic documents.

Adapun untuk sosialisasi kepada pemangku kepentingan eksternal, hal tersebut disampaikan dalam bentuk diseminasi informasi pada media sosial Perseroan mengenai komitmen dan kebijakan Perseroan, mengunggah dokumen kebijakan melalui *website* Perseroan, ataupun surat dan bentuk sosialisasi lain yang disampaikan kepada mitra usaha/*vendor* atau pemangku kepentingan melalui media komunikasi yang ada ataupun melalui klausul dalam perjanjian/kontrak.

Socialization to external stakeholders is delivered in the form of information dissemination on the Company's social media regarding the Company's commitments and policies, uploading the Code of Conduct on the Company's website, or letters and other forms of socialization delivered to business partners/vendors or stakeholders via existing communication media, or clauses in agreements/contracts.

UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK
ENFORCEMENT OF THE CODE OF CONDUCT

Untuk mewujudkan perilaku Insan PT PII yang berlandaskan etika bisnis, terdapat sejumlah inisiatif strategis yang dilakukan, antara lain melalui:

1. Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap langkah Perseroan, yang tertuang dalam Pakta Integritas yang diperbaharui setiap awal tahun.
2. Untuk karyawan baru, Perseroan memberikan Kebijakan Kode Etik Perseroan dan menegaskan kewajiban mereka untuk menandatangani pernyataan komitmen kepatuhan terhadap Kode Etik Perseroan; dan
3. Keteladanan Pimpinan dengan memberi contoh sikap dan perilaku yang tidak bertentangan dengan kebijakan dan Peraturan Perusahaan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

To actualize IIGF personnel's behavior pursuant to the business ethics, several strategic initiatives are carried out, among others:

1. The commitment of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Employees to implement Good Corporate Governance in every Company's step is stated in the Integrity Pact, which is renewed at the beginning of each year.
2. For new employees, the Company provides guidance on the Code of Conduct and confirms their obligation to sign a commitment to compliance with the Company's Code of Conduct; and
3. Exemplary leadership by having attitudes and behaviours that do not conflict with the Company's policies and regulations in regards to Good Corporate Governance.

Upaya penegakan Pedoman Perilaku dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

1. Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Insan PT PII yang diperbaharui setiap tahun;
2. Sosialisasi melalui saluran komunikasi yang dimiliki Perseroan, termasuk melalui teknologi informasi yang dapat diakses oleh semua pegawai dengan mudah setiap saat;
3. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
4. Pelaporan Daftar Khusus (Kepemilikan saham) Dewan Komisaris dan Direksi;

Enforcement of the Code of Conduct are organized in various ways:

1. Signing of the Integrity Pact by all IIGF's personnel, renewed annually;
2. Socialization through the Company's communication channels, including via information technology that is easily accessible by all employees at all times;
3. State's Official Wealth Report (LHKPN);
4. Report of Shareholdings of the Board of Commissioners and the Board of Directors;

5. Pelaporan Gratifikasi kepada KPK;
6. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi;
7. Mengungkapkan saluran pengaduan pelanggaran (*Whistleblowing System*) pada *website* Perseroan;
8. Memberikan sanksi tegas bagi Insan Perseroan yang terbukti melanggar Kode Etik Perseroan.

5. Gratification Report to KPK;
6. Establishment of Gratification Control Unit;
7. Disclosing the Whistleblowing System on the Company's website;
8. Imposing strict sanctions for the Company's personnel who are proven to have violated the Company's Code of Conduct.

SANKSI DAN PELAPORAN
SANCTIONS AND REPORTING

Dalam hal terdapat pelanggaran Kebijakan Kode Etik, Insan Perseroan ataupun pihak lainnya berkewajiban melaporkan setiap indikasi terjadinya perilaku yang melanggar Kebijakan Kode Etik Perseroan kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3) sebagaimana dimaksud dalam kebijakan terkait sistem pelaporan pelanggaran Perseroan.

Perseroan menghormati hak membela diri dari Insan Perseroan yang diduga melakukan pelanggaran dan mendengar penjelasannya untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk konsekuensi disiplin yang akan diberikan.

Apabila berdasarkan proses investigasi sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan terbukti bahwa Insan Perseroan yang dilaporkan melakukan pelanggaran, maka Insan Perseroan tersebut akan diberikan sanksi pelanggaran yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Pihak yang berwenang di dalam Perseroan akan mengenakan sanksi sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Perusahaan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana atas pelanggaran Kebijakan Kode Etik ini dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Teguran Lisan;
2. Surat Peringatan Pertama (SP-I);
3. Surat Peringatan Kedua (SP-II);
4. Surat Peringatan Ketiga (SP-III);
5. Surat Peringatan Pertama dan Terakhir; hingga
6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Perseroan menyediakan fasilitas saluran pelaporan pelanggaran melalui:

a. *Website* Perseroan dengan alamat https://ptpii.co.id/pelaporan-pelanggaran;

In the event of a violation of the Code of Conduct, the Company's personnel or other parties shall report any indication of behavior that violates the Company's Code of Conduct to the Whistleblowing Management Team (TP3) as referred to in the policy related to the Company's whistleblowing system.

The Company respects the right of self-defense of the Company's employees who are suspected of committing violations and respects their explanations for consideration in determining the form of disciplinary consequences to be imposed.

Based on the investigation process in accordance with the prevailing Company's provisions, if it is proven that the Company's employees have committed violations, such Company's employees shall be given sanctions in accordance with the level of violation. The Company's authorities will impose sanctions in accordance with those stipulated in the Company's Regulations or the provisions of the prevailing laws and regulations, which, for violations of this Code of Conduct may be subject to sanctions in the form of:

1. Verbal Warning;
2. Warning Letter I (SP I);
3. Warning Letter II (SP II).
4. Warning Letter III (SP-III);
5. First and Last Warning Letter; up to
6. Termination of Employment (PHK).

The Company provides violation reporting channel via:

a. The Company's website at https://ptpii.co.id/pelaporan-pelanggaran;

b. Surat, dengan alamat sebagai berikut:
   Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
   PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
   Gedung Capital Place, Lantai 7
   Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710
c. Email, dengan alamat pelaporan@iigf.co.id; dan
d. Kotak Surat Pelaporan di lingkungan kantor Perseroan.

Mekanisme penanganan pelanggaran Kebijakan Kode Etik Perseroan dilaksanakan mengacu pada Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran Perseroan.

b. Mail, to the following address:
   Whistleblowing Management Team
   Indonesia Infrastructure Guarantee Fund
   Capital Place Building, 7th Floor
   Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710
c. Email, to pelaporan@iigf.co.id; and
d. Reporting Mailbox in the Company's office.

The mechanism for handling violations of the Code of Conduct is organized with reference to the Company's Whistleblowing System Policy.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK BESERTA SANKSI YANG DIBERIKAN
CODE OF ETHICS VIOLATIONS AND IMPOSED SANCTIONS

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak mencatat adanya pelanggaran atas kode etik maupun sanksi yang diberikan, hal ini mencerminkan tingginya pemahaman karyawan akan pentingnya kode etik.

In 2024, the Company did not record any violations of the code of conduct or imposed sanctions. This reflects employees' good understanding of the importance of the code of conduct.

KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG BERBASIS KINERJA KEPADA MANAJEMEN DAN/ATAU KARYAWAN
POLICY ON PROVIDING PERFORMANCE-BASED LONG-TERM COMPENSATION TO MANAGEMENT AND/OR EMPLOYEES

Hingga akhir tahun 2024, PT PII belum menerapkan skema kompensasi berbasis jangka panjang kepada manajemen dan/atau karyawan karena kondisi Perseroan saat ini tidak mendukung penerapan skema tersebut. Hal ini disebabkan karena saham PT PII sepenuhnya (100%) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, PT PII tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan (*Employee Stock Option Program*/ESOP) atau oleh manajemen (*Management Stock Option Program*/MSOP). Dengan demikian, tidak tersedia informasi terkait jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga pelaksanaan (*exercise*).

As of the end of 2024, IIGF has not implemented any long-term based compensation scheme to the management and/or employees, as the Company's current condition does not support the implementation of such scheme. This is because IIGF's shares are fully (100%) owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, IIGF does not have Employee Stock Option Program (ESOP), or Management Stock Option Program (MSOP). Hence, there is no information related to the total share of ESOP/MSOP and its realization, time frame, eligible employee and/or management requirements, and the exercise price.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI
ANTI-CORRUPTION POLICY

Selaras dengan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 505/PMK.06/2020 dan Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia (PUGKI) 4.1.2 terkait pengaturan kebijakan dan praktik mengenai pencegahan pencucian uang, anti-suap, anti-korupsi, anti-kecurangan, atau standar terkait lainnya, PT PII telah merumuskan kebijakan yang berfokus pada pencegahan korupsi. Kebijakan ini diatur dalam berbagai kebijakan internal perusahaan, yaitu:

1. Kebijakan Kode Etik;
2. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi;
3. Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
4. Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
5. Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran.

Kebijakan ini mencakup serangkaian program dan prosedur yang dirancang untuk mencegah terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti korupsi, penawaran atau penerimaan suap serta pembayaran atau bujukan-bujukan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau prinsip-prinsip etika. Selain itu, PT PII juga telah merancang program dan prosedur yang komprehensif sebagai upaya mendukung pemberantasan korupsi di lingkungan Perseroan. Program bertujuan menggalang komitmen bersama serta memastikan bahwa setiap elemen Perseroan terlibat aktif dalam mencegah dan memberantas praktik-praktik korupsi dan gratifikasi.

In line with the stipulations in the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 505/PMK.06/2020, and the Indonesian Corporate Governance Manual (PUGKI) 4.1.2 regarding policy and practice arrangements on the prevention of money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, or other related standards, IIGF has formulated a policy that focuses on preventing corruption. This policy is regulated by various internal company policies:

1. Code of Conduct;
2. Gratification Control Policy;
3. Anti-Bribery Management System (SMAP) Guidelines;
4. State's Official Wealth Report (LHKPN) Guidelines; and
5. Whistleblowing System Policy.

This policy covers a range of programs and procedures designed to prevent money laundering and the financing of terrorism, anti-corruption, the offer or acceptance of bribes and other facilitation payments or inducements contrary to laws and regulations or ethical principles. In addition, IIGF has also designed a comprehensive program and/or procedure to support the eradication of corruption within the Company. This program was created to drive joint commitment and ensure that every element Company is actively involved in preventing and eradicating corruption and gratification practices.

PROGRAM DAN PROSEDUR PENCEGAHAN KORUPSI
CORRUPTION PREVENTION PROGRAMS AND PROCEDURES

Berikut serangkaian program PT PII dalam rangka mencegah dan memberantas praktik-praktik korupsi:

1. **Sosialisasi dan Pelatihan**: Perseroan menyelenggarakan program pelatihan dan sosialisasi rutin untuk seluruh karyawan agar memahami risiko korupsi, serta mengetahui tindakan pencegahan yang harus diambil.
2. **Kode Etik dan Kebijakan Internal**: Perseroan memiliki Kode Etik yang jelas dan kebijakan internal terkait pemberantasan korupsi. Dokumen-dokumen ini memberikan panduan dan norma-norma perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota organisasi.

The following are a series of IIGF's programs to prevent and eradicate corrupt practices:

1. **Dissemination and Training**: The Company conducts regular training and socialization programs for all employees to understand the risks of corruption, as well as the preventive measures to be taken.
2. **Code of Conduct and Internal Policy**: The Company has a clear Code of Conduct and internal policies related to corruption eradication. These documents provide guidance and norms of behavior expected of all members of the organization.

3. **Mekanisme Pengaduan dan Perlindungan Pelapor**: Perseroan melakukan implementasi mekanisme pengaduan yang dapat diakses dengan mudah dan memberikan perlindungan bagi pelapor, serta memberlakukan langkah-langkah konkret untuk memastikan kerahasiaan dan tanpa retribusi terhadap pelapor.
4. **Audit dan Pemeriksaan Internal**: Perseroan rutin melakukan audit dan pemeriksaan internal untuk mengidentifikasi potensi risiko korupsi, mengevaluasi efektivitas kontrol internal, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
5. **Sanksi dan Tindakan Disipliner**: Penetapan sanksi dan tindakan disipliner yang jelas terhadap pelanggaran kebijakan anti korupsi. Langkah-langkah ini memberikan sinyal kuat bahwa praktik korupsi tidak akan ditoleransi dan akan ditindak tegas.
6. **Komitmen Pemimpin dan Penyelenggara**: Pemimpin organisasi dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program anti korupsi menunjukkan komitmen tinggi dan memberikan contoh melalui perilaku dan keputusan mereka.

3. **Complaint Mechanism and Whistleblower Protection**: The Company implements a grievance mechanism that is easily accessible and provides protection for whistleblowers, and enforces concrete measures to ensure confidentiality and no retribution against whistleblowers.
4. **Audit and Internal Audit**: The Company regularly conducts internal audits and controls to identify potential corruption risks, evaluate the effectiveness of internal controls, and ensure compliance with established policies and procedures.
5. **Sanctions and Disciplinary Actions**: The establishment of clear sanctions and disciplinary actions against violations of anti-corruption policies. These measures strongly signal that corrupt practices will not be tolerated and will be dealt with firmly.
6. **Commitment of Leaders and Organizers**: Organizational leaders and those involved in implementing the anti-corruption program shall demonstrate high commitment and set an example using their behaviour and decisions.

SOSIALISASI DAN PELATIHAN ANTI KORUPSI
ANTI-CORRUPTION SOCIALIZATION AND TRAINING

Dalam memberikan pemahaman dan pembekalan pengetahuan mengenai korupsi beserta turunannya, Perseroan memberikan pelatihan dan sosialisasi bagi Insan PT PII. Sosialisasi terkait anti korupsi dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 berupa Sosialisasi Kebijakan terkait Governance, Risk and Compliance (GRC) yang termasuk Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Adapun pelatihan yang diberikan kepada Insan PT PII terkait anti korupsi dilakukan melalui Webinar Forum *Governance, Risk and Compliance* (GRC) dalam rangka Perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2024 dengan peserta Insan Perseroan serta perwakilan dari *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan tanggal 5 Desember 2024.

In providing understanding and provision of knowledge about corruption and its derivatives, the Company provides training and socialization for IIGF's personnel. Anti-corruption socialization was conducted on 24 September 2024 in the form of Socialization of Policies related to Governance, Risk, and Compliance (GRC), which includes the Gratification Control Policy and Whistleblowing System Policy. IIGF provided training to the personnel related to Anti-Corruption via the Governance, Risk, and Compliance (GRC) Forum Webinar in the 2024 World Anti-Corruption Day (Hakordia), participated by the Company's personnel and representatives of the Ministry of Finance's Special Mission Vehicle (SMV) on 5 December 2024.

LAPORAN INSIDEN KORUPSI TAHUN 2024
CORRUPTION INCIDENT REPORT IN 2024

Hingga akhir 31 Desember 2024, tidak terdapat insiden korupsi yang dilakukan oleh Insan PT PII sebagaimana yang tercermin pada tabel sebagai berikut:

As of the end of 31 December 2024, there were no incidents of corruption committed by IIGF personnel, as reflected in the following table:

Jenis Insiden Incident Type	Jumlah insiden Number of incidents
Insiden korupsi Corruption	Nihil None
Insiden korupsi yang terbukti yang mengakibatkan karyawan diberhentikan atau dihukum karena korupsi Proven incidents of corruption that result in employees being dismissed or convicted of corruption	Nihil None
Insiden korupsi yang terbukti yang mengakibatkan kontrak dengan mitra bisnis diakhiri atau tidak diperbarui karena pelanggaran terkait korupsi Proven incidents of corruption that resulted in contracts with business partners being terminated or not renewed due to corruption-related offenses	Nihil None

KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
GRATIFICATION CONTROL POLICY

Program Pengendalian Gratifikasi Perseroan diterapkan sejalan dengan penegakan Kode Etik Perseroan dan menjadi bagian penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan selalu mengedepankan pengelolaan perusahaan yang amanah, serta menjunjung tinggi prinsip transparan dan akuntabilitas sehingga memastikan pengelolaan usaha yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penerapan kebijakan gratifikasi ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai GCG utama Perseroan, yakni *integrity* dan *transparency*. kepada seluruh pegawai agar timbul pemahaman untuk menjalankan tugasnya sesuai etika bisnis terbaik, rasa saling percaya dan tanggung jawab saat berinteraksi dengan nasabah, *vendor*, rekanan dan seluruh pemangku kepentingan.

The Company's Gratification Control Program is implemented in line with the enforcement of the Company's Code of Conduct, and is a vital part of implementing good corporate governance. The Company prioritizes trustworthy management of the company, and upholds the principles of transparency and accountability to ensure business management that is free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN). The gratification policy is implemented to instill the Company's main GCG values, i.e., integrity and transparency, to all employees. Therefore, there is an understanding to carry out their duties according to the best business ethics, mutual trust, and responsibility, when interacting with customers, vendors, partners, and all stakeholders.

Guna mewujudkan pengelolaan bisnis Perseroan yang bersih, sehat dan akuntabel, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menerbitkan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi yang terakhir dimutakhirkan pada tahun 2023. Kebijakan tersebut mengatur lebih lanjut penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Perseroan.

The Company's Board of Directors and Board of Commissioners issued a Gratification Control Policy, which was lastly updated in 2023 to realize a clean, healthy, and accountable management of the Company's business. The policy further regulates the gratification control implementation within the Company.

MEDIA PELAPORAN GRATIFIKASI
GRATIFICATION REPORTING MEDIA

Pelaporan gratifikasi Perseroan dapat dilakukan melalui media email kepada Unit Pengendalian Gratifikasi dengan alamat: up.gratifikasi@iigf.co.id

The Company's gratification reporting can be conducted via email to the Gratification Control Unit at: up.gratifikasi@iigf.co.id

SOSIALISASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI
GRATIFICATION CONTROL SOCIALIZATION

Dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen di antara seluruh Insan Perseroan untuk mendukung penerapan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Perseroan telah melakukan sosialisasi atas kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan baik melalui kegiatan tatap muka maupun dengan memanfaatkan media komunikasi yang ada di Perseroan. Pada tahun 2024, Perseroan telah melakukan diseminasi atas program pengendalian gratifikasi kepada seluruh karyawan dengan menggunakan media komunikasi internal (*email*), serta melakukan sosialisasi Kebijakan Pengendalian Gratifikasi secara tatap muka baik yang dilaksanakan dalam program pengenalan Perseroan (*induction*) kepada karyawan yang baru bergabung di PT PII, maupun kepada seluruh karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris yang diselenggarakan bersamaan dengan Sosialisasi Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran.

To build awareness and commitment of the Company's personnel to support the Gratification Control Guidelines implementation, the Company has disseminated the gratification control policy to the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees, through face-to-face activities and by utilizing existing communication media in the Company. In 2024, the Company disseminated the gratification control program to all employees using internal communication media (email), and conducted face-to-face socialization of the Gratification Control Policy, in the introduction program for employees who have just joined IIGF, and to all employees, the Board of Directors, and the Board of Commissioners, in conjunction with the Socialization of the Whistleblowing System Policy.

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dilakukan juga kepada pemangku kepentingan melalui unggahan komitmen pengendalian Gratifikasi Perseroan dalam media sosial Perseroan.

Socialization of Gratification Control is also conducted to stakeholders by uploading the Company's Gratification control commitment on the Company's social media.

LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI 2024
GRATIFICATION CONTROL REPORT IN 2024

Selama tahun 2024, Perseroan menerima 14 (empat belas) laporan penerimaan Gratifikasi dan 1 (satu) laporan penolakan Gratifikasi, dengan rincian sebagai berikut:

In 2024, the Company received fourteen (14) reports of Gratification acceptance and one (1) report of Gratification rejection, with details as follows:

Jenis Laporan Gratifikasi Type Gratification Report	Jumlah Laporan Total Reports	Status Laporan Status Reports
Penolakan Refusal	1	**Laporan Penolakan** Rejection Report
Penerimaan Admission		
- Makanan Meals	5	Diserahkan kepada Panti Sosial dan Tenaga Alih Daya Perseroan Sent to social centers and the Company's outsourced employees
- Kain Batik Batik Fabric	1	Dikelola oleh Instansi Managed by the Company
- Souvenir Kegiatan Berlogo Perusahaan dan/atau Pesan Anti-Gratifikasi Souvenirs from Activities, with Company Logo and/ or Anti-Gratification Message	2	Dikelola oleh Instansi Managed by the Company
- Honorarium Narasumber dan/atau Peserta Rapat Honorarium for Speakers and/or Meeting Participants	5	Ditetapkan menjadi Milik Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Determined to be State Property by the Corruption Eradication Commission
- Alat Elektronik Electronic Devices	1	Dikelola oleh Instansi Managed by the Company
Jumlah Laporan Gratifikasi **Total of Gratification Reports**	**15**	

Setiap pelanggaran material terhadap kebijakan anti pencucian uang, anti suap, anti korupsi telah diinformasikan kepada Direksi secara triwulanan dan tahunan serta kepada Dewan Komisaris secara semesteran dan tahunan.

Any material breach of anti-money laundering, anti-bribery, or anti-corruption policies has been informed to the Board of Directors on a quarterly and annual basis and to the Board of Commissioners on a semi-annual and annual basis.

SURVEY PEMAHAMAN KEBIJAKAN GRATIFIKASI

SURVEY OF UNDERSTANDING OF GRATIFICATION POLICY

Perseroan secara berkala melakukan survei untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap kebijakan gratifikasi Perseroan. Survei ini bertujuan untuk memastikan seluruh Insan PT PII memahami, mematuhi, dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan gratifikasi dalam setiap aspek operasional Perseroan.

The Company regularly conducts surveys to assess the level of understanding of the Company's gratification policy. This survey aims to ensure that all IIGF personnel understand, comply with, and implement the values stipulated in the gratification policy in every aspect of the Company's operations.

Pada tahun 2024, survey penilaian pemahaman dilakukan pada rangkaian kegiatan Webinar Forum GRC dalam rangka Perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia 2024 pada tanggal 5 Desember 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata skor peserta adalah 96,17. Ini menunjukkan bahwa setelah mengikuti Forum GRC 2024, mayoritas peserta memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait benturan kepentingan, budaya anti korupsi, pengendalian gratifikasi, SMAP, dan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).

In 2024, the survey was conducted in the GRC Forum Webinar in conjunction with the 2024 World Anti-Corruption Day on 5 December 2024. The survey resulted in the average score of participants of 96.17. This shows that after attending the 2024 GRC Forum, the majority of participants have a deeper understanding of conflict of interest, anti-corruption culture, gratification control, SMAP, and whistleblowing system.

Selain tingkat pemahaman, penyebaran kuesioner juga ditujukan untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta atas pelaksanaan Forum GRC tahun 2024, berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut :

In addition to the level of understanding, the questionnaires were also distributed to determine the level of participants' satisfaction with the 2024 GRC Forum, based on data processing, the following are the results:

Pertanyaan Question	Respon Responses	
	Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree
Secara umum saya puas dengan pelaksanaan Forum GRC 2024 I am generally satisfied with the 2024 GRC Forum	100%	0
Saya berharap Forum GRC diadakan kembali di tahun depan (2025) I hope the GRC Forum will be held again next year (2025).	100%	0

MANUAL SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM (SMAP) GUIDELINES

Sebagai bentuk komitmen atas anti korupsi dan anti penyuapan, Perseroan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Inisiasi Penerapan SMAP di PT PII telah dimulai sejak tahun 2021 pada standar yang berlaku, yaitu SNI ISO 37001:2016.

As a form of commitment to anti-corruption and anti-bribery, the Company implements an Anti-Bribery Management System (ABMS). ABMS has been initiated at IIGF since 2021 on the applicable standard, i.e., SNI ISO 37001:2016.

Pada tahun 2022, Perseroan melaksanakan proses sertifikasi SMAP, dan pada tanggal 30 Maret 2022 Perseroan mendapatkan sertifikat penerapan SMAP dari PT Chesna yang berlaku hingga tanggal 29 Maret 2025. Sertifikat SMAP yang telah diperoleh Perseroan adalah untuk ruang lingkup Pengadaan Barang & Jasa.

In 2022, the Company carried out the ABMS certification process. On 30 March 2022, the Company received a certificate of ABMS from PT Chesna, which is valid until 29 March 2025. The Company obtained an ABMS certificate for the scope of Procurement of Goods and Services.

Dalam upaya mempertahankan Sertifikasi ISO 37001:2016, pada tanggal 27 Maret 2024, Perseroan melaksanakan *Audit Surveillance* II. *Audit Surveillance* dilakukan untuk memastikan bahwa Perseroan senantiasa berkomitmen menerapkan dan memelihara SMAP secara konsisten dan sesuai dengan sasaran SMAP yang ditetapkan, sehingga Perseroan dapat mempertahankan sertifikasi SMAP dalam lingkup pengadaan barang dan jasa.

In an effort to maintain ISO 37001:2016 Certification, on 27 March 2024, the Company conducted a Surveillance Audit II. The surveillance audit was conducted to ensure that the Company is always committed to implementing and maintaining ABMS consistently and in accordance with the ABMS objectives set forth. Therefore, the Company can maintain SMAP certification in the procurement of goods and services.

Untuk memastikan efektivitas penegakan kebijakan tersebut, Perseroan secara berkala mensosialisasikan kebijakan anti korupsi dan anti penyuapan. Perseroan juga memanfaatkan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dengan mengajak dan menghimbau seluruh insan Perseroan untuk mendukung upaya pencegahan penyuapan dengan menunjukkan sikap integritas tinggi dan komitmen menjalankan prinsip 4 *No's*, yaitu *No Bribery, No Kick Back, No Indecent Gifts*, dan *No Luxurious Hospitality*.

The Company regularly disseminates its anti-corruption and anti-bribery policies to ensure the effectiveness of policy enforcement. The Company also seize the commemoration of World Anti-Corruption Day by inviting and calling on all Company personnel to support bribery prevention by demonstrating high integrity and commitment to the 4 No's principle, i.e., No Bribery, No Kick Back, No Indecent Gifts, and No Luxurious Hospitality.

PEDOMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

STATE'S OFFICIAL WEALTH REPORT (LHKPN) GUIDELINES

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Perseroan telah merumuskan pedoman mengenai pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diatur dalam Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang dimutakhirkan pada tahun 2021.

As a State-Owned Enterprise, the Company has formulated guidelines regarding the State Official Wealth Report (LHKPN), which is regulated in PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)'s State's Official Wealth Reporting Guidelines updated in 2021.

Ketentuan tersebut mengatur secara jelas mengenai pegawai Perseroan yang wajib melaporkan harta kekayaan, tata cara penyampaian, unit kerja pengelola, hingga sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporannya.

The provisions regulate the Company's employees who shall report their assets, the procedures for submission, the managing work unit, and sanctions that shall be imposed on employees who do not carry out their reporting obligations.

PENGELOLA LHKPN

LHKPN MANAGEMENT

Pelaksanaan pemantauan dan koordinasi terkait dengan LHKPN di lingkungan Perseroan dilakukan oleh Unit Pengelola LHKPN (UPL) yang dikelola oleh divisi yang membidangi fungsi Sumber Daya Manusia. UPL terdiri dari Koordinator UPL dan Administrator Instansi dan/atau Administrator Unit Kerja. Tugas Koordinator UPL dalam hal ini meliputi:

1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN para wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan LHKPN.
2. Mengingatkan wajib lapor untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
3. Memantau Admin Instansi dan/atau Admin Unit dalam melakukan pengelolaan data wajib lapor;
4. Memberikan atau melaksanakan koordinasi terkait pendampingan atau konsultasi penggunaan aplikasi untuk pengisian LHKPN bagi wajib lapor.
5. Melaporkan kepada pimpinan tertinggi Perseroan mengenai adanya wajib lapor yang tidak menyampaikan LHKPN atau terlambat menyampaikan LHKPN untuk mendapatkan arahan; dan
6. Membuat laporan pelaksanaan penyampaian LHKPN secara periodik berdasarkan Tanda Terima yang disampaikan oleh wajib lapor.

Admin Instansi dan/atau Admin Unit Kerja memiliki tugas :

a. Sebagai *data entry* yaitu melakukan pemutakhiran data Wajib Lapor;
b. Sebagai verifikator pada modul *e-Registration*, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data Wajib Lapor yang dilakukan oleh Admin Unit;
c. Memberikan himbauan atau sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada Wajib Lapor;
d. Mengaktifkan akun sehingga Wajib Lapor dapat menggunakan modul *e-Filing*;
e. Membuat Akun Admin Unit apabila dibutuhkan; dan
f. Melakukan pengarsipan dokumen tanda terima Wajib Lapor.

The monitoring and coordination related to LHKPN within the Company is carried out by the LHKPN Management Unit (UPL), managed by the division in charge of the Human Resources function. UPL consists of the UPL Coordinator and Agency Administrator and/or Administrator Working Unit. The tasks of the UPL Coordinator in this case include:

1. Coordinating with the Corruption Eradication Commission (KPK) related to monitoring and evaluation of compliance with the fulfillment of LHKPN report obligations of LHKPN personnel who shall report and announce LHKPN.
2. Reminding the LHKPN reporters to comply with the obligation to submit and announce LHKPN;
3. Monitoring the Agency Administrator and/or Unit Administrator in managing mandatory data reporting;
4. Providing or coordinating assistance or consultation on the use of applications for filling out LHKPN for mandatory reporters.
5. Reporting to the highest Company's leader the mandatory reporters who do not submit LHKPN or are late in submitting LHKPN for further direction; and
6. Delivering reports on the LHKPN reporting implementation regularly based on Receipts submitted by mandatory reporters.

The Agency Administrator and/or Working Unit Administrator has the following duties:

a. As data entry, to update the data of Mandatory Reporters;
b. As a verifier in the e-Registration module, i.e., validating the updating of Mandatory Reporting data by the Unit Administrator;
c. Providing directions or socialization related to LHKPN obligations and technical guidance on procedures for filling out LHKPN to Mandatory Reporters;
d. Activating the account so that the Mandatory Reporter can use the e-Filling module;
e. Creating a Unit Administrator Account if necessary; and
f. Filing the Mandatory Reporting receipt document.

WAJIB LAPOR
MANDATORY REPORTERS

Sesuai kebijakan, Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Perseroan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan dengan pangkat *Executive Vice President* atau lebih tinggi.

In accordance with the policy, Mandatory Reporters of LHKPN within the Company are the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees with the rank of Executive Vice President or higher.

SANKSI ATAS KELALAIAN PELAPORAN LHKPN
SANCTIONS FOR FAILURE TO REPORT LHKPN

Sejalan dengan Pedoman LHKPN, bagi Wajib Lapor yang lalai dalam melaksanakan kewajiban pelaporan kekayaannya diberikan sanksi di antaranya mengacu pada Peraturan Perusahaan maupun ketentuan lain yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

In line with the LHKPN Guidelines, Mandatory Reporters who are negligent in carrying out their wealth reporting obligations shall be imposed sanctions, with reference to the Company's Regulations and other provisions stipulated by authorized officials.

LAPORAN LHKPN
LHKPN REPORT

Pada tahun 2024, UPL telah memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang LHKPN kepada pegawai terkait melalui pendistribusian dokumen dan sosialisasi formal yaitu e-LHKPN *online* sebagai sarana konsultasi dalam pengisian e-LHKPN melalui email pada tanggal Januari 2024, 12 Februari 2024, 4 Maret 2024 dan 19 Maret 2024.

In 2025, UPL has provided socialization and technical guidance on LHKPN to relevant employees via document distribution and formal socialization, i.e., e-LHKPN online, as a means of consultation in filling out e-LHKPN via email on 8 January 2024, 12 February 2024, 4 March 2024, and 19 March 2024.

Pelaporan LHKPN yang dilaksanakan PT PII pada tahun 2024 untuk periode tahun 2023, seluruh Wajib Lapor sebanyak telah melaksanakan pelaporan kekayaannya dengan tingkat kepatuhan 100%. Berikut jumlah Wajib Lapor yang melaporkan kekayaannya per masing-masing jabatan:

In 2025, IIGF carried out LHKPN reporting for the period of 2024, and all Mandatory Reporters have reported their wealth with a 100% compliance rate. The following are the Mandatory Reporters who report their wealth by position:

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Lapor Report Date
M. Wahid Sutopo	Direktur Utama President Director	21 Februari 2024 21 February 2024
Andre Permana	Direktur Bisnis Business Director	21 Maret 2024 21 March 2024
Donny Hamdani	Direktur Keuangan Finance Director	21 Maret 2024 21 March 2024
Rina Widiyani Wahyuningdyah	Komisaris Utama President Commissioner	17 Januari 2024 17 January 2024
Iqbal Islami	Komisaris Commissioner	28 Februari 2024 28 February 2024
Mariatul Aini	Komisaris Commissioner	29 November 2023 29 November 2023
Tanti Hidayati	Deputi Direktur Deputy Director	21 Februari 2024 21 February 2024
Pratomo Ismujatmika	Deputi Direktur Deputy Director	11 Maret 2024 11 March 2024
Muhammad Ridho	Deputi Direktur Deputy Director	6 Maret 2024 6 March 2024
Ria Frilina	*Executive Vice President*	13 Maret 2024 13 March 2024
Yunan Novaris A.	*Executive Vice President*	18 Februari 2024 18 February 2024
Yuki Mahardito A. W.	*Executive Vice President*	24 Desember 2023 24 December 2023

KEBIJAKAN PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM

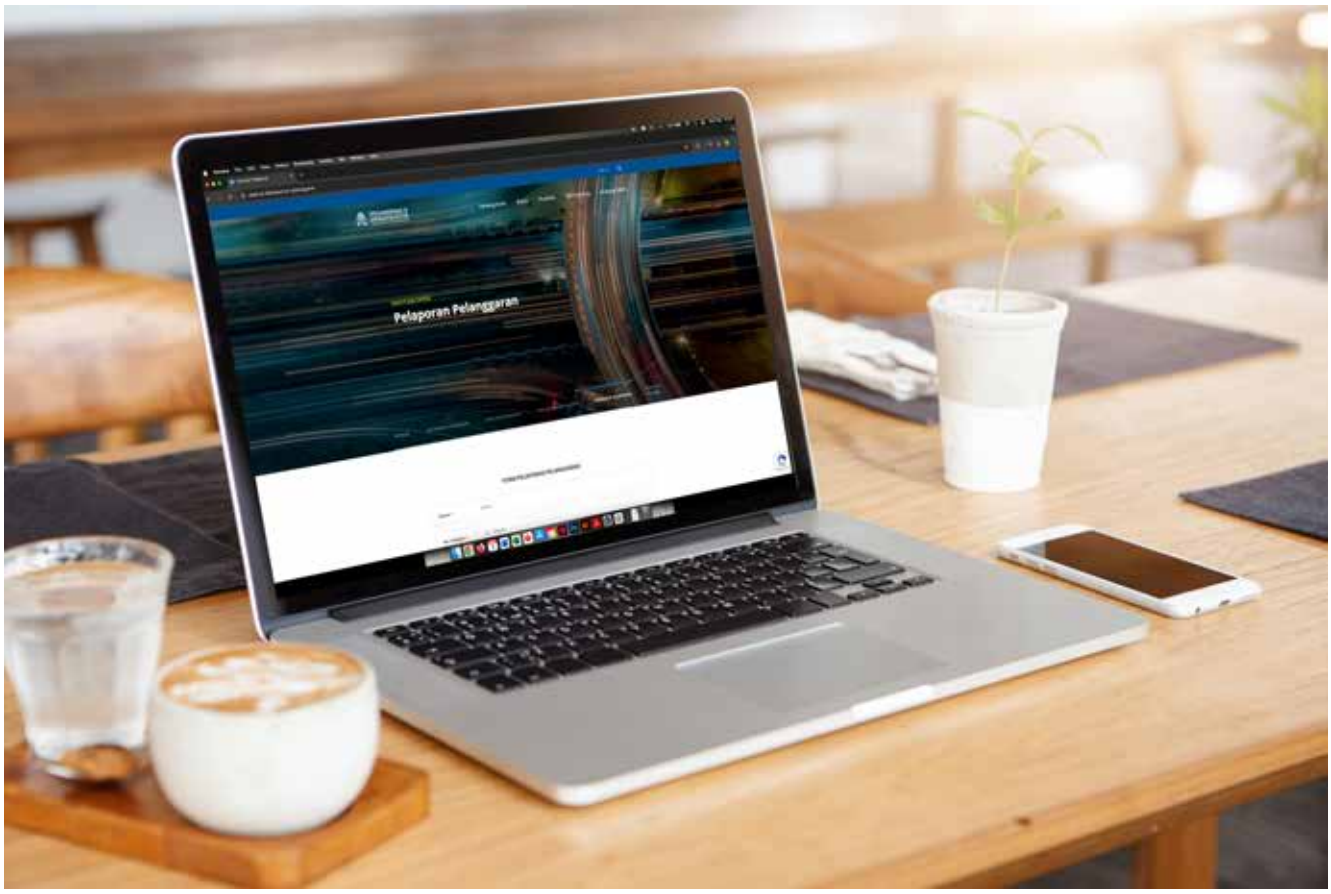

Perseroan memiliki pedoman pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*/WBS) yang dapat digunakan untuk mendorong pelaporan atas perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan atau prinsip-prinsip etika. Pedoman ini juga mencakup ketentuan tentang bagaimana Perseroan melindungi pelapor yang beritikad baik.

Pedoman tersebut diatur dalam Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran nomor CSC.003/KEB/V.02/2023 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 19 September 2023.

Penerapan WBS di lingkungan Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan panduan pelaksanaan dalam menangani Pelaporan Pelanggaran dari Insan Perseroan dan Pemangku Kepentingan untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelaporan pelanggaran yang efektif;

The Company has a Whistleblowing System (WBS) guideline that can be used to encourage reporting of behavior that violates laws and regulations or ethical principles. The guideline also includes provisions on how the Company protects good faith whistleblowers.

The Company formulated and established a Whistleblowing System Policy No. CSC.003/KEB/V.02/2023 which was signed by the Board of Directors and the Board of Commissioners on 19 September 2023.

The WBS within the Company has the following objectives:

1. Providing guidelines in handling Whistleblowing from the Company's Personnel and Stakeholders to ensure the implementation of an effective mechanism for resolving whistleblowing;

2. Mendorong setiap Insan Perseroan dan para Pemangku Kepentingan lainnya untuk menyampaikan/melaporkan tentang pelanggaran dan/atau penyimpangan kode etik, peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, kebijakan dan pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Insan Perseroan yang dipandang dapat merugikan dan/atau membahayakan Perseroan, baik terhadap bisnis Perseroan, keuangan, lingkungan, gedung kantor, kondisi kerja, reputasi Perseroan dan lainnya;
3. Meminimalisasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan Perseroan apabila mekanisme pengendalian internal sebagaimana telah ditentukan tidak dapat dilaksanakan atau diberlakukan untuk mencegah pelanggaran/penyimpangan dan/atau penyalahgunaan oleh Insan Perseroan;
4. Meningkatkan keyakinan kepada setiap Insan Perseroan dan para Pemangku Kepentingan lainnya mengenai adanya perlindungan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pelapor atas potensi hukuman, tindakan balasan atau perlakuan yang tidak wajar dan tidak adil kepada Pelapor apabila yang bersangkutan mengungkapkan pelanggaran, dengan berdasarkan itikad baik dan bukti yang memadai;
5. Mendukung terwujudnya budaya keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas; dan
6. Meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian internal, dan kinerja pegawai maupun organisasi.

2. Encouraging all Company personnel and other Stakeholders to submit/report violations and/or deviations from the code of conduct, laws and regulations, standard operating procedures, policies, and other violations committed by Company personnel that are deemed to be detrimental and/or harmful to the Company, to the Company's business, finances, environment, office buildings, working conditions, reputation, etc.;
3. Minimizing the possibility of risks that may harm the Company if the internal control mechanism as determined cannot be implemented or enforced to prevent violations/deviations and/or abuse by the Company's personnel;
4. Enhancing the confidence of each Company Personnel and other Stakeholders regarding the protection provided by the Company to the Whistleblower against potential punishment, retaliation, or unreasonable, and unfair treatment to the Whistleblower if the person concerned discloses the violation, based on good faith and adequate evidence;
5. Supporting the actualization of a culture of openness, accountability, and integrity; and
6. Improving the effectiveness of good corporate governance, internal control, and employee and organizational performance.

SOSIALISASI WBS
WBS INFORMATION DISSEMINATION

Untuk memberikan pemahaman dan kesadaran seluruh karyawan maupun pihak terkait lainnya untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran guna meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran lain yang mungkin muncul, Perseroan senantiasa melakukan sosialisasi terkait WBS baik kepada pihak internal maupun pihak eksternal.

Selama tahun 2024, Perseroan telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan sosialisasi kepada Insan Perseroan dan para pemangku kepentingan untuk memperkenalkan WBS. Kegiatan sosialisasi tersebut mencakup hal-hal berikut:

1. **Acara (Event) Sosialisasi**
   a. Sosialisasi GRC 2024
      Pada 24 September 2024 dilaksanakan sosialisasi GRC Kode Etik, Gratifikasi, WBS dan SMAP Tahun 2024. Bertempat di PT PII, sosialisasi dihadiri karyawan dan manajemen PT PII. Sosialisasi membahas poin – poin terkait WBS antara lain:

The Company conducts socialization related to WBS to both internal and external parties to provide understanding and awareness to all employees and other related parties to report all forms of violations to minimize the occurrence of violations that may arise.

In 2024, the Company conducted a series of socialization to the Company's employees and stakeholders to introduce the WBS. Socialization included the following:

1. **Socialization**
   a. 2024 GRC Socialization
      On 24 September 2024, the socialization of the GRC Code of Conduct, Gratification, WBS, and SMAP in 2024 was held. Located at IIGF, the socialization was attended by IIGF's employees and management. The socialization discussed points related to WBS:

- Pelanggaran yang dapat dilaporkan
- Penyampaian pelaporan pelanggaran
- Tata cara penanganan laporan pelanggaran
- Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
- Perlindungan pelapor, saksi dan terlapor

b. Forum *Governance Risk and Compliance* (GRC) 2024
Forum GRC 2024 diadakan pada 5 Desember 2024 dihadiri oleh karyawan dan manajemen PT PII, PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF). Salah satu materi yang dibahas adalah terkait dengan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) sebagai salah satu implementasi & tata kelola penanganan benturan kepentingan.

2. **Sosialisasi Melalui Televisi di Area Kantor**
Sosialisasi dilaksanakan dengan memutarkan *looping* video terkait edukasi WBS pada televisi-televisi di area kantor PT PII. Poin-poin yang ditampilkan dalam video antara lain terkait:
   - Definisi pelapor (*whistleblower*)
   - Hal – hal yang termasuk pelanggaran dan dapat dilaporkan
   - Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
   - Saluran pelaporan pelanggaran

- Violations to be reported
- Submission of violation reports
- Procedure for handling whistleblowing reports
- Whistleblowing Management Team
- Protection for whistleblowers, witnesses, and reported parties

b. 2024 Governance Risk and Compliance (GRC) Forum
The 2024 GRC Forum was held on 5 December 2024, attended by IIGF's employees and management, PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), and PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF). One of the materials discussed was the Whistleblowing System (WBS) as one of the implementation & governance of conflict of interest handling.

2. **Socialization through Television in the Office**
Socialization was carried out by looping videos related to WBS education on televisions in the IIGF office. The points featured in the video are:
   - Whistleblower
   - Matters that constitute violations and can be reported
   - Whistleblowing Management Team
   - Whistleblowing channel

JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DILAPORKAN
TYPE OF VIOLATIONS TO BE REPORTED

Sejalan dengan kebijakan WBS, jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui saluran WBS meliputi pelanggaran sebagai berikut:

1. Perbuatan pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non finansial terhadap Perseroan.
2. Pelanggaran peraturan perundang-undangan, misalnya pemalsuan tanda tangan, penggelapan, mark-up, penggunaan narkoba dan perusakan barang.
3. Pelanggaran terhadap Kebijakan Kode Etik Perseroan, misalnya benturan kepentingan, pelecehan serta terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang.
4. Pelanggaran terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum dan sistem pengendalian internal atas laporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji secara material dalam laporan keuangan.
5. Pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur operasional Perseroan, ataupun kebijakan, prosedur, dan/atau peraturan lain yang berlaku bagi Perseroan.

In line with the WBS policy, the violations that can be reported via the WBS channel include the following:

1. Offenses that may cause financial or non-financial losses to the Company.
2. Violation of laws and regulations, such as signature forgery, embezzlement, mark-up, drug consumption, and destruction of goods.
3. Violation of the Company's Code of Conduct, such as conflict of interest, harassment, and involvement in prohibited community activities.
4. Violations of generally accepted accounting principles and internal control systems over financial statements that have the potential to result in material misstatements in the financial statements.
5. Violation of the Company's operational policies and procedures, or other policies, procedures, and/or regulations applicable to the Company.

6. Perilaku Insan Perseroan yang tidak terpuji yang berpotensi mencemarkan reputasi Perseroan dan/atau yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan.
7. Tindakan pembiaran pelanggaran oleh Insan Perseroan yang mengindikasikan adanya keterlibatan yang bersangkutan dengan Pelanggaran tersebut.
8. Tindakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja.

6. Disgraceful behavior of the Company's personnel with the potential to tarnish the Company's reputation and/or may result in losses to the Company.
7. Acts of omission of violations by the Company's Personnel that indicates the involvement of the person related to the Violation.
8. Actions that endanger occupational health and safety.

PIHAK TERKAIT PENGELOLA PELAPORAN PELANGGARAN
RELATED PARTIES OF WHISTLEBLOWING MANAGEMENT

Pihak pengelola pelaporan pelanggaran Perseroan adalah Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3), Penanggung Jawab Tindak Lanjut Pelaporan (PJTL) dan Tim Investigasi Pelaporan Pelanggaran (TIPP).

TP3 adalah tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem Pelaporan Pelanggaran dan pelaksanaan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran yang keanggotaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris.

PJTL terdiri atas:
1. Direktur Utama, jika Terlapor adalah Karyawan;
2. Komisaris Utama, jika Terlapor adalah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau organ Dewan Komisaris; dan
3. Dewan Komisaris (yang dalam hal ini tidak termasuk Komisaris Utama), jika Terlapor adalah Komisaris Utama.

Adapun, TIPP adalah tim yang bertugas melakukan investigasi Pelaporan Pelanggaran yang keanggotaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi dan/atau Surat Keputusan Dewan Komisaris.

The parties responsible for the Company's whistleblowing system are the Whistleblowing Management Team (TP3), the Person in Charge of Report Follow-Up (PJTL), and the Whistleblowing Investigation Team (TIPP).

TP3 is a team responsible for the Whistleblowing system management and the Whistleblowing System Policy implementation, whose members are determined via a Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

PJTL consists of:
1. President Director, if the Reported Party is an employee;
2. President Commissioner, if the Reported Party is a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, or an organ of the Board of Commissioners; and
3. Board of Commissioners (in this case, the Board of Commissioners does not include the President Commissioner), if the Reported Party is the President Commissioner.

Meanwhile, TIPP is a team in charge of investigating Violation Reports whose members are set forth using a Decree of the Board of Directors and/or a Decree of the Board of Commissioners.

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN
REPORTING SUBMISSION MECHANISM

1. Tata cara penyampaian laporan atas terjadinya penyimpangan/pelanggaran adalah sebagai berikut:
   a. Pelapor menyampaikan dugaan pelanggaran secara tertulis kepada Perseroan melalui saluran pelaporan yang telah ditetapkan oleh Perseroan yang dikelola oleh Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3).

1. The procedure for submitting reports on the occurrence of irregularities/violations is as follows:
   a. The Whistleblower submits the alleged violation in writing to the Company by the reporting channel established by the Company, which is managed by the Whistleblower Management Team (TP3).

b. Apabila Pelapor menarik kembali laporan yang telah dilakukan, maka Pelapor wajib memberikan alasan terkait pembatalan pelaporan dimaksud.

2. Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan dilengkapi dengan bukti pendukung yang dapat berupa keterangan tertulis, dokumen, foto, dan bukti lainnya yang berkaitan dengan Pelaporan Pelanggaran dan harus memenuhi kriteria pelaporan sebagaimana diatur di dalam Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran.

b. If the Whistleblower withdraws the report that has been submitted, the Whistleblower shall provide reasons related to the cancellation of such report.

2. The submitted Violation Report shall be equipped with supporting evidence, which may be in the form of written statements, documents, photos, and other evidence related to the Violation, and shall meet the reporting criteria as stipulated in the Whistleblowing Reporting System Policy.

SALURAN PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING CHANNEL

Perseroan menyediakan fasilitas saluran Pelaporan Pelanggaran melalui:

1. Melalui *website* Perseroan, dengan alamat website: www.ptpii.co.id/pelaporan-pelanggaran
2. Menyampaikan surat yang ditujukan kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3) Perseroan, dengan alamat sebagai berikut:
   PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
   U.p Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
   Gedung Capital Place, Lantai 7
   Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.18
   Jakarta 12710 - Indonesia
3. Email: pelaporan@iigf.co.id.
4. Kotak surat masuk TP3 di lingkungan Perseroan.

The Company provides Whistleblowing channel facilities via:

1. The Company's website, at: www.ptpii.co.id/pelaporan-pelanggaran
2. Sending a letter addressed to the Company's Whistleblower Management Team (TP3), at the following address:

   Indonesia Infrastructure Guarantee Fund
   att. Whistleblowing Management Team
   Capital Place Building, 7th Floor
   Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.18
   Jakarta 12710 - Indonesia
3. Email: pelaporan@iigf.co.id.
4. TP3 Inbox in the Company.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN TERLAPOR
PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS AND REPORTED PARTIES

Perseroan memiliki komitmen yang jelas dan tidak memihak untuk mendukung dan melindungi semua Pelapor yang menginformasikan kejadian pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan. Perlindungan kepada terlapor diberikan dengan berlandaskan asas praduga tidak bersalah. Dalam hal ditemukan indikasi tindak pidana, Perseroan dapat bekerja sama dengan lembaga yang berwenang melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan bagi pelapor berupa:

1. Identitas pelapor dijaga kerahasiaannya oleh Perseroan.
2. Perseroan memberikan perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi/tekanan dalam segala bentuk, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun

The Company has a clear and impartial commitment to support and protect all Whistleblowers who inform the violation events that occur within the Company. The whistleblower is protected based on the principle of presumption of innocence. In the event that there are indications of a criminal offense, the Company may cooperate with institutions authorized to protect witnesses and victims, in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.

Whistleblower's protection is in the form of:

1. The Company keeps the whistleblower's identity confidential.
2. The Company protects the whistleblower from all forms of threats, intimidation/pressure, or unpleasant actions from any party as long as the whistleblower maintains the confidentiality of the reported violation.

3. Perlindungan dan kerahasiaan diberikan kepada pelapor yang beritikad baik, terhitung sejak pengaduan disampaikan sampai dengan pengaduan selesai ditindaklanjuti
4. Apabila pelapor sendiri yang menyebarluaskan pengaduannya ke pihak lainnya yang mengakibatkan adanya risiko terungkapnya kerahasiaan pelapor, maka akan menghilangkan hak atas perlindungan yang diterima dari Perseroan.
5. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan tersebut.

Perseroan juga memberikan perlindungan kepada pelapor yang merupakan Insan Perseroan untuk hal-hal sebagai berikut:
1. Pemecatan yang tidak adil;
2. Penurunan jabatan atau pangkat;
3. Pelecehan dan/atau diskriminasi; dan/atau
4. Catatan yang merugikan dalam dokumen data pribadinya (*personal file record*)

Pelapor yang tidak berkenan identitasnya dipublikasikan, akan dijaga kerahasiaan identitas pribadinya, sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilaporkan. Dalam keadaan pelaporan sampai ke pengadilan atau kemungkinan proses hukum yang memerlukan identitas pelapor, maka pembukaan identitas pelapor dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelapor dan merujuk pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain perlindungan di atas, Perseroan juga dapat memfasilitasi perlindungan kepada pelapor dan/atau keluarga inti pelapor melalui aparat yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila diperlukan.

Perseroan memberikan perlindungan kepada terlapor melalui:
1. Kerahasiaan identitas terlapor selama proses verifikasi dan investigasi pelaporan pelanggaran.
2. Hak untuk membela diri dengan menyampaikan keterangan, saksi dan/atau bukti.
3. Hak mendapatkan informasi mengenai status kelanjutan proses dan hasil dari investigasi.
4. Pemulihan reputasi dan nama baik terlapor dalam hal berdasarkan hasil investigasi terlapor tidak dapat dibuktikan melakukan pelanggaran.

3. Protection and confidentiality are provided to whistleblowers who are in good faith, starting from the time the complaint is submitted until the complaint has been followed up.
4. If the whistleblower himself/herself disseminates the complaint to other parties, which results in the risk of disclosure of the whistleblower's confidentiality, the Company eliminates the whistleblower's right to protection.
5. The whistleblower's protection also applies to parties who carry out investigations and parties who provide information related to the complaint.

The Company also protects the whistleblower who is a Company's employee for the following matters:
1. Unfair dismissal;
2. Demotion of rank;
3. Harassment and/or discrimination; and/or
4. Adverse records in the personal file record.

Whistleblowers who do not wish to have their identity published will have their personal identity kept confidential, in accordance with the type of violation reported. In the event of reporting to the court or there is a possibility of a legal process that requires the whistleblower's identity, the whistleblower's identity shall be disclosed with prior notice to the whistleblower and shall refer to the provisions in the prevailing laws and regulations. In addition to the above protection, the Company may also facilitate protection to the whistleblower and/or the whistleblower's immediate family utilizing the authorized apparatus based on prevailing laws and regulations, if necessary.

The Company protects the reported party by:
1. Confidentiality of the reported party's identity during the verification process and whistleblowing investigation.
2. The right to defend themselves by submitting testimony, witnesses, and/or evidence.
3. The right to obtain information regarding the status of the process continuation and the investigation results.
4. Restoration of the reputation and good name of the reported party if the investigation of the reported party resulted in no evidence of violation event.

PENANGANAN PENGADUAN
COMPLAINT HANDLING

Berikut alur skema alur penanganan pengaduan pelanggan Perseroan:

The following is a flowchart of the Company's customer complaint handling scheme:

Pelapor Whistleblower

Menyampaikan laporan dan dokuken pendukung melalui saluran pelaporan pelanggaran yang dapat diakses oleh TP3
Submit reports and supporting documents via whistleblowing channels accessible by TP3

TP3 (Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran) TP3 (Whistleblowing Management Team)

Verifikasi laporan sesuai kriteria Verify the report in line with the criteria	jika tidak sesuai kriteria, laporan ditutup if the report does not meet the criteria, the report is closed	jika sesuai kriteria, usulkan investigasi kepada PJTL if the report fulfills the criteria, investigation is proposed to PJTL

TIPP (Tim Investigasi Pelanggaran) TIPP (Whistleblowing Investigation Team)

Investigasi subtansi pelanggaran Investigate the substance of the offense	mengumpulkan bukti collect evidence	dapat menggunakan bantuan eskternal investigator may use assistance of external investigator	membuat dan menyampaikan laporan hasil ivestigasi ke PJTL prepare and submit investigation report to PJTL

TIPP (Tim Investigasi Pelanggaran) PJTL (Whistleblowing Reporting Follow-up Team)

Tutup Laporan jika dugaan tidak terbutkti Close the report if the allegation is not proven	berlakukan sanksi jika terbutkti bersalah apply sanctions if proven guilty	Lanjutkan proses hukum jika tindak pidana Continue legal process if proven as criminal offense	tindakan lain yang diperlukan other necessary actions

Pelapor Whistleblower

Informasi hasil verifikasi dan Keputusan
Information on verification results and decision

Penjelasan:

1. Pelapor menyampaikan laporan dalam bentuk surat dengan disertai dokumen pendukung yang diperlukan. Laporan ini disampaikan melalui saluran pelaporan pelanggaran yang dapat diakses oleh seluruh anggota TP3.
2. TP3 melakukan verifikasi pelaporan pelanggaran yang diterima sesuai kriteria pelaporan. Apabila pelaporan pelanggaran tidak sesuai dengan kriteria, maka tidak perlu dilakukan Investigasi dan akan dilakukan penghentian penanganan pelaporan. Jika memenuhi kriteria pelaporan, TP3 mengusulkan kepada PJTL untuk dilakukan investigasi atas pelaporan pelanggaran oleh TIPP

Description:

1. The reporter submits a report in the form of a letter with the necessary supporting documents. This report is submitted via the whistleblowing channel accessible by all TP3 members.
2. TP3 verifies the whistleblowing report received based on the reporting criteria. If the whistleblower's report does not meet the criteria, it is not necessary to investigate and TP3 will stop handling the report. If the reporting criteria are met, TP3 proposes to PJTL to investigate the whistleblowing by TIPP.

3. TIPP melakukan investigasi terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan serta mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memastikan bahwa memang telah terjadi pelanggaran. Dalam menjalankan tugasnya TIPP dapat menggunakan bantuan investigator eksternal. TIPP membuat dan menyampaikan laporan hasil investigasi kepada PJTL serta fungsi kepatuhan anti penyuapan dan/atau fungsi kepatuhan lainnya yang terkait untuk melakukan investigasi lanjutan.
4. Dari laporan hasil investigasi/investigasi lanjutan, PJTL menetapkan keputusan atas laporan pelanggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pelaporan tersebut ditutup atau selesai, jika dugaan pelanggaran tidak terbukti;
   b. Terlapor akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di perseroan, jika terlapor terbukti bersalah;
   c. Pelaporan tersebut akan diteruskan kepada penyidik/pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, jika terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut terkait dengan tindak pidana umum dan/atau korupsi; dan/atau
   d. Sanksi atau tindak lanjut lainnya yang dipandang perlu.
5. Pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai hasil verifikasi dan keputusan akhir atas pelaporan pelanggaran.

3. TIPP investigates the event of the reported violation and seeks and collects the necessary evidence to ensure that a violation has indeed occurred. In carrying out its duties, TIPP may use the assistance of external investigators. TIPP prepares and submits a report on the Investigation results to PJTL and the anti-bribery compliance function and/or other relevant compliance functions to conduct further investigations.
4. From the investigation/further investigation result, PJTL decides on the offense violations under the following conditions:
   a. The report is closed or completed, if the alleged violation is not proven;
   b. The reported party will be subject to sanctions in accordance with the Company's prevailing provisions, if the reported party is found guilty;
   c. The report will be forwarded to the investigator/authorized party for further processing in accordance with the prevailing provisions and regulations, if there is evidence indicating that the violation is related to general criminal offenses and/or corruption; and/or
   d. Sanctions or other follow-up deemed necessary.
5. The whistleblower has the right to obtain information regarding the verification results and the final decision on the whistleblowing.

JUMLAH LAPORAN DAN TINDAK LANJUTNYA TAHUN 2024
NUMBER OF REPORTS AND FOLLOW-UP IN 2024

Pada tahun 2024, Perseroan mencatat tidak terdapat pelaporan atas dugaan pelanggaran baik yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan/standar terkait dan peraturan internal Perseroan yang meliputi hal-hal sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran Perseroan.

In 2024, the Company recorded no reports of alleged violations whether categorized as acts that violate laws and regulations, related regulations/standards, and the Company's internal regulations, which include matters as stipulated in the Company's Whistleblowing System Policy.

Uraian Description	2024	2023
Jumlah pengaduan yang masuk pada tahun buku terakhir Number of complaints received in the last fiscal year	1	Nihil None
Jumlah pengaduan yang diproses pada tahun buku terakhir Number of complaints processed in the last fiscal year	1	Nihil None
Jumlah pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku terakhir Number of complaints settled in the last fiscal year	1	Nihil None
Jumlah pengaduan yang belum selesai diproses Total complaints under the follow-up process	Nihil None	Nihil None

PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

Untuk memenuhi kebutuhan operasional dan bisnisnya, Perseroan telah menerbitkan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perseroan agar dapat dilakukan secara profesional, mandiri, transparan dan bertanggung jawab dalam upaya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Fungsi pengadaan barang dan jasa Perseroan dijalankan oleh Divisi Corporate Service & Procurement

Kebijakan Perseroan dalam menerapkan pengadaan barang dan jasa tertuang dalam Pedoman pengadaan Barang dan Jasa PT PII yang disahkan pada 31 Juli 2021. Pedoman ini menjadi acuan bagi Divisi Corporate Services & Procurement selaku divisi yang membidangi proses pengadaan barang dan jasa di Perseroan, dimana di antaranya memuat tujuan dan sasaran, kebijakan umum, etika pengadaan, tahapan pengadaan barang/jasa, ketentuan penerimaan barang/jasa, panel penyedia jasa konsultansi dan tanda bukti perjanjian.

Pada tahun 2024, Divisi Corporate Services & Procurement PT PII melakukan pembaharuan/peninjauan kebijakan pengadaan barang dan jasa dalam rangka memastikan kesesuaian substansi pengaturan dengan implementasi yang berjalan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik, penyesuaian dengan peraturan eksternal serta tindak lanjut rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta sinkronisasi dengan ketentuan dan skema TJSL.

To fulfill its operational and business needs, the Company issued the Procurement of Goods and Services Manual with the objective to regulate the procurement of goods and services within the Company. Therefore, the procurement process can be carried out professionally, independently, transparently, and responsibly to support the acceleration of infrastructure development in Indonesia. The Company's procurement of goods and services function is carried out by the Corporate Service & Procurement Division.

The Company's policy on the implementation of goods and services procurement is stipulated in the IIGF's Procurement of Goods and Services Manual ratified on 31 July 2021. The Manual is a reference for the Corporate Service & Procurement Division as the division in charge of the process of procurement of goods and services in the Company, which includes goals and objectives, general policies, procurement ethics, stages of procurement of goods/services, provisions for the receipt of goods/services, panels of consultancy service providers, and proof of agreement.

In 2024, IIGF's Corporate Services & Procurement updated/reviewed the policy of procurement of goods and services to ensure the suitability of the regulatory substance with continuous implementation, considering good governance, adjustments to external regulations, and follow-up to BPKP recommendations related to the Domestic Component Level (DCL) and synchronization with the CSR provisions and schemes.

SOSIALISASI PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PERSEROAN
SOCIALIZATION OF THE COMPANY'S PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES MANUAL

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa bagi karyawan maupun calon mitra penyedia barang dan jasa, Perseroan melakukan sosialisasi pedoman pengadaan barang dan jasa kepada karyawan. Sementara itu, sosialisasi kepada mitra dilakukan melalui pertemuan-pertemuan koordinasi dan komunikasi resmi. Selain itu, dokumen berupa Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa juga tersedia secara luas melalui *website* Perseroan di alamat www.ptpii.co.id, dapat diakses pada bagian publikasi manual kebijakan Perseroan.

The Company disseminates the procurement of goods and services manual to employees to increase understanding of the mechanism of procurement of goods and services for employees and prospective partners. The Company also disseminates to partners via coordination meetings and official communications. In addition, the document, Procurement of Goods and Services Manual is also widely available on the Company's website at www.ptpii.co.id, and is accessible in the publication section of the Company's manual.

KEGIATAN DIVISI PENGADAAN BARANG DAN JASA

ACTIVITIES OF THE PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES DIVISION

Selama tahun 2024, Divisi Corporate Services & Procurement PT PII telah melakukan:

1. Evaluasi dan peninjauan ulang prosedur pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaaan.
2. Penyusunan dan pemutakhiran daftar *vendor*/mitra penyedia barang dan jasa yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Perseroan.
3. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk proses pemilihan *vendor*/mitra penyedia yang adil dan kompetitif.
4. Pemantauan kinerja *vendor*/mitra penyedia barang dan jasa yang terlibat dalam proyek-proyek Perseroan untuk memastikan bahwa standar kualitas dan waktu pengiriman terpenuhi.
5. Melakukan pengembangan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) khususnya modul pengadaan dengan melakukan digitalisasi dan automasi approval proses administrasi sehingga dapat membuat proses pengadaan lebih cepat, tepat dan akurat.
6. Melaksanakan kegiatan sinergi dengan *Special Mission Vehicles* (SMV) Kementerian Keuangan berupa rapat kerja dalam rangka kolaborasi antar unit pengadaan barang dan jasa yang dihadiri oleh PT PII, PT SMI (Persero), PT SMF (Persero), PT Geo Dipa Energi (Persero), PT LPEI pada tanggal 9-11 Oktober 2024 berlokasi di Hotel Swiss-Belresort Dago Heritage, Bandung, Jawa Barat. Agenda rapat kerja secara umum membahas terkait *sharing session* mengenai Vendor Management & Pengelolaan E-Catalog pengadaan barang dan jasa di lingkungan unit pengadaan SMV. Rapat kerja ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Kolaborasi antar unit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan SMV di bawah Pembinaan dan Pengawasan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
7. Melaksanakan survei kepuasan vendor/mitra dan pelanggan/pengguna layanan pengadaan barang/jasa PT PII dimana survei kepuasan vendor/mitra dan pelanggan/pengguna atas pelayanan PT PII dilakukan sebagai tindak lanjut dari audit GCG. Dari hasil survei diharapkan PT PII dapat mengukur sejauh mana pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan harapan vendor dan pelanggan, dan selanjutnya PT PII dapat merumuskan strategi pelayanan yang baik untuk meningkatkan loyalitas yang berdampak pada meningkatnya pelayanan PT PII sebagai *fiscal tools* Pemerintah. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memberikan gambaran dan pendapat pelanggan dan penyedia barang/jasa terhadap pengadaan barang/jasa atas pelayanan yang telah diberikan PT PII.

In 2024, the Corporate Service & Procurement of IIGF has:

1. Evaluated and reviewed the procurement procedures to improve efficiency and transparency in the procurement process.
2. Prepared and updated a list of vendors/partners who provide goods and services in accordance with the qualification standards set by the Company.
3. Procured goods and services in accordance with established needs and requirements, including a fair and competitive vendor/partner selection process.
4. Monitoring of the performance of vendors/partners in providing goods and services in the Company's projects to ensure that quality standards and delivery times are met.
5. Developing the Enterprise Resource Planning (ERP) system, especially the procurement module by digitizing and automating the approval of administrative processes to make the procurement process faster, more precise, and more accurate.
6. Carrying out synergy activities with the Ministry of Finance's Special Mission Vehicles (SMV) in the form of working meetings for the collaboration between procurement of goods and services units, attended by IIGF, PT SMI (Persero), PT SMF (Persero), PT Geo Dipa Energi (Persero), PT LPEI, on 9-11 October 2024 at Swiss-Belresort Dago Heritage Hotel, Bandung, West Java. The working meeting had the agenda to have sharing sessions regarding Vendor Management & E-Catalogue Management of procurement of goods and services within the SMV procurement unit. The event was a follow up on the Memorandum of Understanding on Collaboration Team Work between Procurement of Goods and Services units in the SMVs within the Guidance and Supervision of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.
7. Conducting a satisfaction survey of vendors/partners and customers/users of IIGF's procurement of goods and services, in which this satisfaction survey of vendors/partners and customers/users of IIGF was carried out as a follow-up to the GCG audit. The survey showed that IIGF shall be able to assess the extent to which the services provided are in accordance with the expectations of vendors and customers, and subsequently, IIGF shall be able to formulate a good service strategy to enhance loyalty, which affects the enhancement of IIGF's services as a Government fiscal tool. The activity has the objective of providing an overview and opinion of customers and goods/service providers on the procurement of goods/services for the services provided by IIGF.

a. Tingkat kepuasan *Vendor*/Mitra Tahun 2024
   1. Secara umum, 100,00% penyedia menyatakan puas selama berhubungan dengan PT PII (baik dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan).
   2. Indeks kepuasan penyedia terhadap proses pengadaan sebesar 4,37 atau 87,39 (sangat puas).
   3. Indeks kepuasan penyedia terhadap proses pelaksanaan 4,38 atau 87,55 (sangat puas).
   4. Indeks kepuasan penyedia terhadap proses pengadaan dan pelaksanaan sebesar 4,37 atau 87,47 (sangat puas).
b. Tingkat kepuasan Pelanggan/Pengguna Tahun 2024
   1. Indeks kepuasan pelanggan terhadap proses pengadaan dan hasil barang/jasa sebesar 4,24 atau 84.85 (sangat puas).
   2. Indeks kepuasan pelanggan terhadap proses pengadaan sebesar 4,25 atau 85,09 (sangat puas).
   3. Indeks kepuasan pelanggan terhadap proses hasil barang/jasa sebesar 4,23 atau 84,61 (sangat puas).

a. Vendor/partner satisfaction level in 2024
   1. Generally, 100.00% of suppliers expressed satisfaction while dealing with IIGF (both in the procurement process and the work execution).
   2. The supplier satisfaction index for the procurement process was 4.37 or 87.39 (very satisfied).
   3. The supplier satisfaction index for the execution process was 4.38 or 87.55 (very satisfied).
   4. The supplier satisfaction index for the procurement and execution process was 4.37 or 87.47 (very satisfied).
b. Customer/user satisfaction level in 2024
   1. The customer satisfaction index for the procurement process and results of goods/services was 4.24 or 84.85 (very satisfied).
   2. The customer satisfaction index for the procurement process was 4.25 or 85.09 (very satisfied).
   3. The customer satisfaction index for the results of goods/services was 4.23 or 84.61 (very satisfied).

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KREDITUR
CREDITOR RIGHTS PROTECTION POLICY

Perseroan senantiasa berupaya membina hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dengan para kreditur berdasarkan komitmen, kepercayaan, kejujuran, dan saling menghormati, serta memberi perlakuan yang sama bagi para kreditur.

Etika Perseroan kepada kreditur diatur dalam Kebijakan Kode Etik PT PII, sejalan dengan kebijakan tersebut, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan menghormati hak dan kewajiban antara Perseroan dan kreditur sesuai kesepakatan berdasarkan perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran dan keterbukaan, diantaranya:
1. Berkomitmen melaksanakan klausul perjanjian dengan sebaik-baiknya.
2. Menyediakan informasi yang aktual dengan memperhatikan kebijakan penyediaan informasi yang berlaku di Perseroan.
3. Mematuhi *covenant* yang berlaku selama perjanjian, apabila ada.
4. Melakukan komunikasi dan pertukaran informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ruang lingkup pengadaan secara aktual, berimbang dan wajar dengan memperhatikan ketentuan terkait komunikasi yang berlaku di Perseroan.

The Company endeavors to foster good relations with all stakeholders, including creditors, based on commitment, trust, honesty, and mutual respect, as well as provide equal treatment for creditors.

The Company's ethics to creditors are regulated in IIGF's Code of Conduct. In line with this policy, the Company is committed to fulfilling its obligations to creditors and respecting the rights and obligations between the Company and creditors in accordance with the previously agreed terms in the agreements, that promote the principles of fairness and transparency, including:
1. Commit to implementing the clauses of the agreement with best endeavors.
2. Provide actual information with due observance of the Company's information provision policy.
3. Comply with the covenants applicable during the agreement, if any.
4. Communicate and exchange information required in accordance with the scope of procurement in an actual, balanced, and reasonable manner, with due regards to the provisions related to communication prevailing in the Company.

KEBIJAKAN *INSIDER TRADING*
INSIDER TRADING POLICY

Kebijakan *insider trading* merupakan upaya dan/atau aturan yang jelas mengenai perdagangan dalam saham korporasi yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pihak internal lainnya untuk memastikan bahwa tidak ada yang mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang belum tersedia di pasar.

Hingga akhir 2024, PT PII belum memiliki kebijakan insider trading karena Perseroan belum memiliki status sebagai perusahaan terbuka (emiten) yang sahamnya diperjualbelikan kepada publik. Meskipun begitu, Perseroan telah memiliki pengaturan terkait penyebaran informasi Perseroan yang tertuang dalam Kebijakan Kode Etik PT PII dan Pedoman Komunikasi, di mana setiap individu di Perseroan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan semua informasi dan dokumen Perseroan sesuai dengan klasifikasinya dan kebijakan terkait komunikasi serta tata kelola dokumen yang berlaku.

Selama tahun 2024, PT PII tidak menerima satu pun pengaduan terkait dugaan penyebaran informasi non-publik oleh internal Perseroan demi kepentingan pihak tertentu yang dapat diidentifikasi sebagai praktik *insider trading.*

The insider trading policy is an effort and/or clear regulations regarding trading the corporation's shares conducted by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and other internal parties to ensure that no one benefits directly or indirectly from information that is not yet available to the public.

As of the end of 2024, IIGF does not have an insider trading policy because the Company is not a public company (issuer) of shares, such shares of which are traded to the public. However, the Company has arrangements related to the dissemination of the Company's information in the IIGF's Code of Conduct and Communication Manual, in which each individual of the Company shall maintain the confidentiality of all information and documents of the Company in accordance with their classification and policies related to communication and document governance that apply.

In 2024, IIGF did not receive any complaints related to the alleged dissemination of non-public information by the Company's internal parties for the benefit of certain parties that could be identified as insider trading practices.

EVALUASI KEPATUHAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
EVALUATION OF CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE

Perseroan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas penerapan GCG sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan (PMK 88/2015). Evaluasi atas penerapan GCG dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Menguji dan menilai penerapan GCG melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan perbandingan dengan indikator dan parameter pengujian yang telah ditentukan.
2. Memberikan gambaran hasil pengukuran melalui pemberian nilai atas penerapan GCG, berikut rekomendasi perbaikan yang diusulkan, guna mengurangi kesenjangan antara tataran praktik dengan indikator dan parameter pengujian.
3. Memantau konsistensi penerapan GCG di lingkungan organisasi Perseroan, serta untuk memperoleh masukan demi penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG.

The Company conducts regular monitoring and evaluation of GCG implementation as part of compliance with Minister of Finance Regulation No. 88/ PMK.06/2015 on the Implementation of Good Corporate Governance in the Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance (PMK 88/2015). The GCG evaluation is carried out with the objective to:

1. Test and assess the GCG implementation through elaboration of GCG implementation conditions and comparison with predetermined indicators and testing parameters.
2. Provide a highlight of the assessment results via the GCG rating, along with proposed improvement recommendations, to reduce the gap between the practical level and the test indicators and parameters.
3. Monitor the consistency of GCG implementation within the Company's organization, as well as obtain input for the improvement and development of GCG policies.

4. Mendorong pengelolaan Perseroan yang semakin profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perseroan.

4. Encourage the Company's management professionally, efficiently, and effectively, as well as empower the function and increase the independence of the Company.

KRITERIA PENILAIAN
ASSESSMENT CRITERIA

Kriteria yang digunakan dalam mengukur efektivitas penerapan GCG berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan No. 505/ KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan yang terdiri dari 6 (enam) aspek pokok yaitu:

The criteria used in assessing the effectiveness of GCG implementation is based on the Decree of the Minister of Finance No. 505/KMK.06/2020 on the Guidelines for Assessment and Evaluation of the Good Corporate Governance in the Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance, which consists of six (6) main aspects:

	Aspek Pengujian/Indikator/Parameter Testing/Indicators/Parameters	Bobot Weight
I.	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Implementing Sustainable Good Corporate Governance	7
II.	Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	9
III.	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35
IV.	Direksi Board of Directors	35
V.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	9
VI.	Aspek Lainnya Other Aspects	+5
Skor Keseluruhan Overall Score		**100**

PIHAK PENILAI INDEPENDEN
INDEPENDENT PARTY'S ASSESSMENT

Berdasarkan PMK 88/2015, Perseroan harus melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam bentuk:

1. Penilaian, yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Persero melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Persero yang dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun; dan
2. Evaluasi, yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Perseroan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Pursuant to the PMK 88/2015, the Company shall assess the Good Corporate Governance in the form of:

1. Assessment, i.e., a program to identify the Good Corporate Governance implementation in the Company through measurement of the exercise and application of Good Corporate Governance in the Company, carried out once (1) a year/annually; and
2. Evaluation, i.e., a program to describe the follow-up to the application and implementation of Good Corporate Governance in the Company carried out in the following year after the assessment as referred to in point a, which includes an evaluation of the assessment results and follow-up on improvement recommendations.

Penilaian atas penerapan GCG Perseroan Tahun Buku 2024 dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

The assessment of the Company's GCG for the 2024 Fiscal Year was carried out by the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP).

HASIL PENILAIAN ATAS PENERAPAN GCG TAHUN 2024

RESULT OF GCG ASSESSMENT IN 2024

Hasil skor penilaian GCG yang diperoleh PT PII Tahun Buku 2024 adalah sebesar **90,829** dengan predikat penilaian **"Sangat Baik"**. Adapun rincian hasil penilaian dan perbandingan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

IIGF's GCG assessment score in the 2024 Fiscal Year was **90.829**, with a **"Excellent"** predicate. The details of the assessment results and comparison with the previous year are as follows:

Aspek Pengujian/Indikator/Parameter Testing/Indicators/Parameters	Bobot Weight	Capaian Tahun 2024 Achievement 2024		Capaian Tahun 2023 Achievement 2023	
		Skor Score	% Pencapaian % Achieved	Skor Score	% Pencapaian % Achieved
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Implementing Sustainable Good Corporate Governance	7	6,569	93,84%	6,823	97,46%
Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	9	8,813	97,92%	8,780	97,56%
Dewan Komisaris Board of Commissioners	35	31,787	90,82%	31,860	91,03%
Direksi Board of Directors	35	32,336	92,39%	32,848	93,85%
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	9	8,407	93,41%	7,642	84,90%
Aspek Lainnya Other Aspects	+5	2,917	58,33%	2,083	41,67%
Skor Keseluruhan Overall Score		90,829	-	**90,036**	-
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG **Classification of GCG Implementation Quality**		**Sangat Baik** **Excellent**			

Keterangan:
0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik

Remark:
0-50: Poor | 50-60: Not Good | 60-75: Okay | 75-85: Good | 85-100: Excellent

REKOMENDASI *AREA OF IMPROVEMENT* (AOI) GCG PERSEROAN TAHUN BUKU 2024

RECOMMENDATIONS FOR THE COMPANY'S AREA OF IMPROVEMENT (AOI) IN GCG FOR THE 2024 FISCAL YEAR

Penilaian atas penerapan GCG Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2025 menghasilkan 18 *Area of Improvement* (AoI) yang terdiri dari:

The GCG assessment for the 2024 Fiscal Year carried out in 2025 resulted in 18 Areas of Improvement (AoI), consisting of:

	Rekomendasi Recommendation	
Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	1. Menetapkan pengaturan secara rinci mengenai jabatan lainnya yang menimbulkan benturan kepentingan. 2. Melakukan upaya-upaya untuk menindaklanjuti AoI yang dihasilkan dari asesmen atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.	1. Establishing detailed stipulations regarding other positions that may cause conflicts of interest. 2. Striving to follow up on the AoI resulting from the assessment of good corporate governance.
Dewan Komisaris Board of Commissioners	1. Melibatkan perangkat Dewan Komisaris secara optimal dalam penyusunan RKA Dewan Komisaris. 2. Mencantumkan rencana kerja pengawasan dan pemberian arahan pada RKA Dewan Komisaris terkait: a) Kebijakan/rancangan Sistem Pengendalian Internal perusahaan dan pelaksanaannya b) Manajemen Risiko Perusahaan c) Sistem teknologi informasi perusahaan d) Kebijakan SDM e) Kebijakan Akuntansi dan penyusunan laporan keuangan f) Kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya g) Kebijakan mutu dan kepuasan pelayanan h) Kepatuhan perusahaan dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga; i) Penunjukan calon auditor dan anggaran biaya audit eksternal j) Pengusulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris k) Persetujuan terhadap Tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris atau Pemegang Saham l) Pelaporan kepada Pemegang Saham atas penilaian kinerja Direksi m) Rencana rapat Dewan Komisaris 3. Mengesahkan program kerja tahunan Komite Dewan Komisaris dan dimuat pada RKA Dewan Komisaris 4. Melakukan telaah atas pengusulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. 5. Menyesuaikan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagaimana ketentuan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko Edisi Ketiga Tahun 2022. 6. Menginstruksikan Komite Dewan Komisaris untuk: a) Melakukan telaah/ pembahasan terkait penyusunan RKA Dewan Komisaris, *internal control report*, kesesuaian visi dan misi perusahaan dengan perubahan lingkungan bisnis, dan kualitas rekomendasi audit eksternal dan kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik. b) Melakukan peninjauan dan pemutakhiran Piagam Komite Dewan Komisaris 7. Menginstruksikan Sekretaris Dewan Komisaris untuk: a) Menyediakan bahan-bahan rapat kepada peserta rapat paling lama 3 (tiga) hari sebelum diadakan rapat kecuali untuk rapat yang sewaktu-waktu dan bersifat mendesak. b) Melakukan validasi risalah rapat sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan	1. Involving the Board of Commissioners' apparatus in the preparation of the Board of Commissioners' WP&B. 2. Including a work program for supervision and instruction in the WP&B of the relevant Board of Commissioners: 1) Policy/design of the company's Internal Control System and its implementation b) Company's risk management c) Company's information technology system d) HR policies e) Accounting policies and preparation of financial statements f) Procurement policy and its implementation g) Quality and service satisfaction policies h) Company's compliance with the provisions of laws and regulations and the articles of association, as well as the company's compliance with all agreements and commitments made by the company with third parties; i) Appointment of prospective auditors and budget for external audit fees j) Proposed remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners k) Approval of Board of Directors' actions that require the approval of the Board of Commissioners or Shareholders l) Reporting to Shareholders on the performance assessment of the Board of Directors m) Board of Commissioners meeting 3. Approving the annual work program of the Board of Commissioners' Committees and including it in the WP&B of the Board of Commissioners 4. Reviewing the proposed remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners. 5. Adjusting the membership of the Risk Monitoring Committee as stipulated in the Risk Monitoring Committee Charter Third Edition 2022. 6. Instructing the Board of Commissioners' Committees to: a) Review/discuss the preparation of the WP&B of the Board of Commissioners, internal control reports, conformity of the company's vision and mission with changes in the business environment, and the quality of external audit recommendations and conformity of audit with the standards of the public accounting profession. b) Review and update the Board of Commissioners' Committees Charter. 7. Instructing the Secretary of the Board of Commissioners to: a) Provide meeting materials to meeting participants at most three (3) days before the meeting is held except for occasional and urgent meetings. b) Validate the minutes of the meeting in accordance with the stipulated procedure

	Rekomendasi Recommendation	
Direksi Board of Directors	1. Mengadakan sosialisasi ulang SOP yang ada PT PII, melakukan evaluasi berkala, dan peningkatan pengawasan melalui audit internal yang lebih rutin. 2. Menginstruksikan Divisi Corporate Service and Procurement (CSP) untuk : a) Melaksanakan tahapan *User Acceptable Test* (UA), sosialisasi internal (user) dan eksternal (*vendor*) serta tahap *go-live.* b) Melaksanakan kegiatan *vendor gathering* untuk mengkomunikasikan kebijakan tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), *Whistle Blowing System* (WBS), dan Sistem Vendor Collaboration. 3. Menginstruksikan Divisi Human Capital untuk: a) Memutakhirkan SOP Pelatihan Karyawan Nomor COS.004/SOP/V.01 tanggal 16 Februari 2017 dan SOPSiaga Tanggap Darurat Nomor HC.003/SOP/V.01 tanggal 1 Oktober 2018. b) Menyusun kebijakan mengenai metode penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan 4. Mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan kinerja yang lebih stabil dan berkelanjutan 5. Menyusun dan menetapkan SOP terkait Kepatuhan lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3) untuk memastikan bahwa seluruh aset, lokasi usaha, dan fasilitas perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Menginstruksikan Divisi Internal Audit untuk: a) Melakukan revisi terhadap Piagam Audit Internal untuk mencakup ruang lingkup fungsi audit internal secara lebih jelas dan komprehensif serta melakukan peninjauan Piagam Audit Internal secara berkala. b) Menyampaikan Rancangan Rencana Aktivitas Audit Internal Tahunan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit guna mendapatkan pertimbangan dan saran sebelum ditetapkan. c) Menyampaikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi dari auditor internal dan eksternal tidak hanya kepada Dewan Komisaris tetapi juga kepada Direktur Utama. d) Menyampaikan hasil assessment atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi pengawasan internal kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit, dan kepada Direktur Utama. 7. Menginstruksikan Sekretaris Perusahaan untuk: a) Menyusun laporan manajemen triwulan IV/tahunan secara akumulatif dan memastikan laporan tersebut telah ditandatangani oleh seluruh direksi. b) Membuat rencana kerja pengenalan perusahaan kepada anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang baru diangkat. c) Membuat undangan pengenalan perusahaan kepada anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang baru diangkat. d) Melakukan peninjauan kembali/pemutakhiran atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik	1. Disseminate IIGF's existing SOPs, conduct periodic evaluations, and increase supervision through more routine internal audits. 2. Instruct the Corporate Service and Procurement (CSP) Division to: a) Conduct the User Acceptable Test (UA) phase, internal (user) and external (vendor) socialisation, and go-live phases. b) Carry out vendor gathering activities to communicate policies on the Anti-Bribery Management System (ABMS), Whistle Blowing System (WBS), and Vendor Collaboration System. 3. Instruct the Human Capital Division to: a) Update Employee Training SOP No. COS.004/SOP/V.01 dated 16 February 2017 and Emergency Response SOP No. HC.003/SOP/V.01 dated 1 October 2018. b) Develop a policy on assessment methods to measure employee satisfaction 4. Take strategic steps to ensure a more stable and sustainable performance growth 5. Develop and establish SOPs related to Environmental Compliance, Occupational Health and Safety (OHS), to ensure that all company assets, business locations, and facilities comply with prevailing laws and regulations. 6. Instruct the Internal Audit Division to: a) Revise the Internal Audit Charter to cover the scope of the internal audit function more clearly and comprehensively, and review the Internal Audit Charter regularly. b) Submit the Annual Draft of Internal Audit Activity to the Board of Commissioners c.q. Audit Committee for consideration and advice before it is approved. c) Submit the results of the follow-up of recommendations from internal and external auditors, not only to the Board of Commissioners, but also to the President Director. d) Submit the assessment results of the quality assurance program and the improvement of the internal supervisory function to the Board of Commissioners c.q. Audit Committee, and to the President Director. 7. Instructing the Corporate Secretary to: a) Compile the Q4/annual management report on an accumulative basis and ensure that the report has been signed by all directors. b) Establish a work program for the introduction of the company to newly appointed members of the board of directors and members of the board of commissioners. c) Invite newly appointed members of the board of directors and members of the board of commissioners to introduce the company. d) Review/update the Good Corporate Governance Guidelines

	Rekomendasi Recommendation	
	e) Menyiapkan materi yang memuat seluruh kebijakan dan panduan tambahan yang dapat memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai praktik yang terdapat dalam pedoman tata kelola perusahaan yang baik, seperti materi mengenai pedoman Manajemen Risiko, Kebijakan Tata Laksana Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), Pedoman Kode Etik PT PII, dan materi pendukung lainnya untuk disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.	e) Prepare materials containing all additional policies and guidelines that can provide further guidance on various practices contained in the good corporate governance guidelines, such as materials regarding Risk Management guidelines, Board Manual, IIGF's Code of Conduct, and other supporting materials to be socialised to the Board of Commissioners and its supporting organs, the Board of Directors, and officials one level below the Board of Directors.
	8. Merencanakan dan melaksanakan rapat Direksi yang membahas tentang Penunjukan Direktur sebagai Penanggung Jawab Penerapan dan Pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).	8. Planning and conducting the Board of Directors' meetings that discuss the Appointment of the Director as the Person in Charge of Implementing and Monitoring Good Corporate Governance at PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
	9. Mengikuti ajang penghargaan di bidang keterbukaan informasi.	9. Participating in awards in the sector of information disclosure.

Area perbaikan tersebut kemudian ditetapkan sebagai rencana aksi perbaikan/penyempurnaan yang menjadi fokus perhatian dari pihak manajemen dan membutuhkan komitmen dari semua pihak terkait untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar dapat meningkatkan penerapan praktik GCG sesuai *best practices* yang terus berkembang.

These improvement areas are determined as an action plan to be the focus of attention from the management and require commitment from all related parties to be implemented to improve the GCG practices in accordance with best practices that keep improving.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI AOI GCG *ASSESSMENT* PERSEROAN TAHUN BUKU 2023

FOLLOW-UP OF THE COMPANY'S ASSESSMENT AOI RECOMMENDATIONS FOR THE 2023 FISCAL YEAR

Perseroan telah menindaklanjuti hasil GCG Assessment tahun buku 2023 sesuai rekomendasi yang diberikan penilai independen. Status tindak lanjut sesuai rekomendasi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The Company has followed up on the results of the GCG Assessment for the 2023 fiscal year in accordance with the recommendations provided by the independent assessor. The follow-up status of the recommendations as of 31 December 2024 is as follows:

Aspek Aspect	Jumlah AoI Number of AOI	Penyelesaian AoI AOI Completion	Persentase Percentage
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Implementing Sustainable Good Corporate Governance	0	0	100%
Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	1	1	100%
Dewan Komisaris Board of Commissioners	7	7	100%
Direksi Board of Directors	7	6	86%
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	4	4	100%
Total	**19**	**18**	**95%**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Corporate Social Responsibility

DISCLAIMER

Informasi kegiatan kami terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) disampaikan pada Laporan Keberlanjutan PT PII Tahun 2024, yang diterbitkan dalam buku terpisah dengan Laporan Tahunan ini. Secara umum, informasi dalam Laporan Tahunan ini dan Laporan Keberlanjutan PT PII Tahun 2024 saling melengkapi.

Information on our activities related to Corporate Social Reponsiility (CSR) is presented in IIGF's 2024 Sustainability Report, which is published in a separate book from this Annual Report. In general, the information in this Annual Report and IIGF's 2024 Sustainability Report are complementary.

KOMITMEN PERSEROAN DALAM PENERAPAN PROGRAM KEBERLANJUTAN

COMPANY'S COMMITMENT TO IMPLEMENTING SUSTAINABILITY PROGRAM

Mengusung tema "*Leveraging Sustainability*" pada tahun 2024, PT PII menegaskan komitmennya untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan di seluruh lini bisnis Perseroan. Komitmen ini mencerminkan perwujudan PT PII untuk menjadi penggerak utama dalam ekosistem pembiayaan inovatif, guna mendukung pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

With the theme "Leveraging Sustainability" in 2024, IIGF affirms its commitment to integrating sustainability principles in all lines of the Company's business. This commitment reflects IIGF's action to be the main driver in the innovative financing ecosystem, to support sustainable development that provides great benefits to society.

Sejak didirikan 14 tahun lalu, PT PII telah berperan penting dalam meletakkan fondasi bagi Indonesia untuk mencapai status negara maju. Salah satu kontribusi utamanya adalah penyediaan infrastruktur yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kehidupan yang layak bagi masyarakat. Sebagai salah satu *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mendapatkan mandat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, PT PII telah meraih capaian signifikan dalam mendukung transformasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Since its establishment 14 years ago, IIGF has played an important role in establishing the foundation for Indonesia to achieve developed country status. One of its main contributions is the provision of infrastructure that not only supports economic growth, but also ensures a decent life for the community. As one of the Special Mission Vehicles (SMV) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia mandated to accelerate infrastructure development in Indonesia, IIGF made significant achievements in supporting inclusive and sustainable transformation.

Dengan komitmen yang terus berlanjut, PT PII berupaya memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berkontribusi pada kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan Indonesia di masa depan. Sepanjang tahun 2024, perseroan ini telah mengambil langkah-langkah transformatif dan konkret untuk mendorong berbagai inisiatif strategis dalam mengoptimalkan keberlanjutan, melalui inovasi yang relevan, mulai dari pengembangan proyek infrastruktur ramah lingkungan hingga dukungan terhadap kebijakan pemerataan pembangunan.

With its ongoing commitment, IIGF endeavors to ensure that every step taken contributes to Indonesia's future social, economic, and environmental well-being. In 2024, the Company has taken transformative and concrete steps to encourage various strategic initiatives in optimizing sustainability, through relevant innovations, ranging from the development of green infrastructure projects up to support for equitable development policies.

Sebagai hasil dari upaya tersebut, PT PII berhasil meraih sejumlah penghargaan pada tahun 2024, sebagai pengakuan atas komitmen dan konsistensinya dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan.

As a result, IIGF won numerous awards in 2024, in recognition of its commitment and consistency to support the achievement of sustainable development.

Pencapaian atas Kinerja Keberlanjutan Perseroan Tahun 2024

The Company's Sustainability Performance in 2024

1 2 3 4 5 6 7

1

Bronze Winner untuk Kategori *Community Programme & Platinum Winner* untuk Kategori *Best CEO* pada *Global CSR Award & Summit 2024* yang digelar oleh The Pinnacle Group International

Bronze Winner for Community Program Category & Platinum Winner for Best CEO Category at the Global CSR Award & Summit 2024 held by The Pinnacle Group International

2

Best Winner untuk Kategori *Infrastructure Support Financing* pada Ajang Indonesia *Best CSR Award 2024* yang digelar oleh The Iconomics

Best Winner for the Infrastructure Support Financing at the Indonesia Best CSR Award 2024 organised by The Iconomics

3

Platinum Winner untuk Kategori Pilar Lingkungan dan *Strong Commitment CEO on Environment Program of CSR* pada TJSL & CSR *Award* 2024 yang digelar oleh BUMN Track

Platinum Winner for Environmental Pillar Category and Strong Commitment CEO on Environment Program of CSR at TJSL & CSR Award 2024 held by BUMN Track

4

Gold Winner untuk Kategori Inovasi Sosial pada *Environmental and Social Innovation Award* (ENSIA) yang digelar oleh PT Sucofindo

Gold Winner for Social Innovation Category at the Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) held by PT Sucofindo

5

Donatur Program CSR Terbaik pada BAZNAS *Award* 2024 yang digelar oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Best CSR Program Donor at BAZNAS Award 2024 held by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS)

6

Penghargaan *Gold* untuk Kategori *In Accordance pada Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT) 2024 oleh National Center for Corporate Rating

Gold Award for the In Accordance Category in the Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2024 by the National Center for Corporate Rating.

7

Penghargaan Program *Online* dengan Dampak Terbesar pada Penghargaan Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2024 oleh Putera Sampoerna Foundation

National Education Day Memorial Online Program with the Biggest Impact 2024 Award held by Putera Sampoerna Foundation

Berbagai penghargaan ini menjadi motivasi bagi PT PII untuk terus berkomitmen dalam memberikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mengedepankan prinsip-prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam setiap langkahnya untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat.

These various awards become IIGF's motivation to be committed to providing social, economic, and environmental impacts, as well as promoting the Environmental, Social, and Governance (ESG) principles in every step to support sustainable growth in order to provide maximum benefits to society.

IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN TAHUN 2024
SUSTAINABLE PERFORMANCE OVERVIEW IN 2024

KINERJA ASPEK EKONOMI
ECONOMIC PERFORMANCE

53 Total Proyek yang dijamin hingga tahun 2024
Total Projects Guaranteed as of 2024 53 Projects

Rp539 Triliun
Trillion

Rp1.486,93
miliar billion
Total Pendapatan Usaha
Total Operating Income

Rp930,88
miliar billion
Laba Tahun Berjalan
Income for the Year

Rp727,38
miliar billion
Distribusi Nilai Ekonomi
Economic Value Distribution

205
pemasok suppliers
Jumlah Pemasok Lokal
Total Local Suppliers

Rp91,84
miliar billion
Total Nilai Pengadaan Pemasok Lokal
Total Procurement Value of Local Vendors

6
Penjaminan Proyek Ramah Lingkungan
Environmentally Friendly Product

- KPBU: PJU Lombok Barat & APJ Madiun
- Non-KPBU: SREAP, PLTP Dieng-2 & Patuha-2, Hydro Power Plant (PLTA Bakaru) dan Program *Indonesia Sustainable Least-cost Electrification* (ISLE).
- PPP: PJU Lombok Barat & APJ Madiun
- Non-PPP: SREAP, GPP Dieng-2 & Patuha-2, Hydro Power Plant (HPP Bakaru) and Indonesia Sustainable Least-cost Electrification (ISLE) Program.

KINERJA ASPEK LINGKUNGAN HIDUP
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

Biaya Pengelolaan Lingkungan
Environmental Management costs

Rp867,82 juta / million — 679,15%

571 Gigajoule
Jumlah Penggunaan Energi
Total Energy Use — 19,64%

101,12 Ton CO_2eq
Jumlah Emisi GRK yang dihasilkan
Total GHG Emissions generated

3,43 Kg
Jumlah Limbah B3 yang dihasilkan
Total B3 Waste generated

3,50 Gigajoule/karyawan Employee
Intensitas Penggunaan Energi/Karyawan
Energy Use Intensity/Employee — 19,14%

Penanaman Planting
1.000 Pohon Tree
Pelestarian Keanekaragaman Hayati tahun 2024
Biodiversity Conservation in 2024

KINERJA ASPEK SOSIAL
SOCIAL PERFORMANCE

Capaian Pengembangan Produk dan Layanan Berkelanjutan
Sustainable Products and Services Development Achievement

- Nilai Proyek Penjaminan Pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan **Rp78,93 Triliun**
- Value of Guarantee Projects for Green Business Activities of Rp78.93 Trillion

Capaian Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Human Resource Management Achievement

- Tingkat Rekrutmen Karyawan **3,67%** dengan tingkat *turnover* sebesar **4,28%**.
- Rasio Gaji Karyawan Golongan Terendah/Entry Level Dibandingkan Upah Minimum **126%**
- Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan **39,74 Jam/orang**
- Karyawan Mendapatkan Promosi Jabatan **18%**

- Employee Recruitment Rate of 3.67% with a turnover rate of 4.28%.
- Ratio of Lowest Position/Entry Level Employee Salary to Minimum Wage of 126%
- Average Training Hour of 39.74 hours/employee
- Employee Promotion of 18%

Capaian Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Social and Environmental Responsibility Program Achievement

- Realisasi Penyaluran Dana untuk Program TJSL **Rp4,8 miliar**
- CSR Program Expenses of Rp4.8 billion

STRATEGI PENERAPAN PROGRAM TJSL
CSR PROGRAM STRATEGY

Strategi penerapan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dijalankan PT PII difokuskan pada upaya menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar melalui berbagai inisiatif yang berkelanjutan. Landasan penerapan program TJSL Perseroan didasarkan pada prinsip keberlanjutan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta sejalan dengan visi PT PII dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

PT PII terus mengoptimalkan peran strategis Perseroan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Kementerian Keuangan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Pada tahun 2024, fokus strategi Perseroan adalah mempersiapkan perluasan sektor infrastruktur sosial melalui segmen layanan penjaminan, dengan tujuan memperbesar dampak kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Tahun ini, Perseroan mulai melakukan penjaminan untuk sektor fasilitas pendidikan dan mempersiapkan perluasan ke sektor kesehatan pada tahun berikutnya.

IIGF's CSR program's strategy is to focus on creating a positive impact on the surrounding community and environment through various sustainable initiatives. The basis of the Company's CSR program is sustainability principles oriented towards a balance between social, economic, and environmental interests, and in line with IIGF's vision in supporting sustainable development in Indonesia.

IIGF strives to optimize the Company's strategic role in accordance with the mandate given by the Ministry of Finance to encourage sustainable infrastructure development. In 2024, the focus of the Company's strategy is to prepare for the expansion of the social infrastructure sector in the guarantee services segment to enhance the impact of community welfare through infrastructure development. This year, the Company shall start the guarantee to the education facility sector and prepare for expansion to the health sector in the following year.

LANDASAN PENERAPAN PROGRAM TJSL PERSEROAN
BASIS OF THE COMPANY'S CSR PROGRAM

Dalam menjalankan program TJSL, Perseroan berpedoman pada sejumlah peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 176 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
5.. Surat Keputusan Direksi No.001/SK/PII-BOD/CSC/2022 tentang Besaran Penyaluran Dana Sponsorship dan Dana Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

In carrying out TJSL programs, the Company refers to various internal regulations and prevailing laws and regulations:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, as amended by Law No. 11 of 2020 on Job Creation;
2. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as amended by Law No. 11 of 2020 on Job Creation;
3. Government Regulation No. 47 of 2012 on Limited Liability Company's Social and Environmental Responsibility;
4. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 176 of 2023 on the Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance;
5. The Board of Directors' Decree No. 001/SK/PII-BOD/CSC/2022 on the Amount of Sponsorship Funds and Corporate Social and Environmental Responsibility Funds

6. Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan No. CSC.006/KEB/V.03/2024
7. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan No. CEOO.001/SOP/V.01

6. Guidelines for the Corporate Social and Environmental Responsibility No. CSC.006/KEB/V.03/2024
7. Standard Operating Procedure for the the Company's Social and Environmental Responsibility No. CEOO.001/SOP/V.01

RUANG LINGKUP PROGRAM TJSL PERUSAHAAN
SCOPE OF THE COMPANY'S CSR PROGRAM

Program TJSL PT PII difokuskan pada 5 (lima) sektor , sebagai berikut:

IIGF's CSR Programs focus on five (5) sectors, as follows:

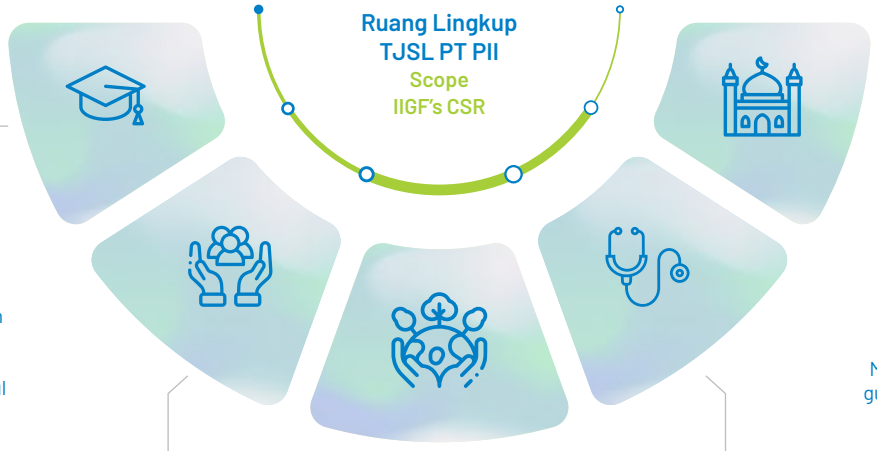

Pendidikan
Education

Mendukung peningkatan kualitas & pemerataan pendidikan sehingga menciptakan SDM unggul dan dukungan terhadap pendidikan inklusif. Diantaranya melalui pemberian beasiswa dan peningkatan kualitas pendidikan termasuk tenaga pengajar.
Supporting the improvement of quality & equal access of education to create excellent human resources and support for inclusive education. This includes providing scholarships and enhancing the quality of education, including the competence of teaching staff.

Pemberdayaan Masyarakat
Community Empowerment

Mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat kurang mampu melalui program pemberdayaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas termasuk ekonomi serta aspek pendukungnya. Diantaranya melalui program pemberdayaan UMKM.
Supporting the improvement of the quality of life of the underprivileged through empowerment, training, and capacity building programs, including economy and its supporting aspects. This is conducted, among others, by MSMEs empowerment programs.

Lingkungan
Environment

Mendukung inisiatif pelestarian dan konservasi lingkungan yang berkelanjutan guna keberlangsungan ekosistem dan habitat di dalamnya. Diantaranya melalui program pengelolaan sampah, konservasi hutan, penghijauan dan energi terbarukan.
Supporting sustainable environmental preservation and conservation initiatives to maintain ecosystems and their habitats. This is conducted, among others, by waste management, forest conservation, reforestation, and renewable energy programs.

Kesehatan
Health

Mendukung inisiatif yang menciptakan pola hidup sehat, pengentasan masalah kesehatan, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, dukungan pada ketahanan pangan serta pengentasan *stunting*.
Supporting initiatives to create healthy lifestyles, alleviate health issues, improve the quality of public health, provide support for food security and alleviate stunting.

Sosial, Budaya, dan Keagamaan
Social, Cultural, and Religion

Mendukung inisiatif sosial guna pengentasan masalah sosial yang terjadi di sekitar Perseroan, serta mendukung pelestarian seni, budaya dan kegiatan keagamaan pada masyarakat. Diantaranya melalui dukungan pada pengentasan masalah kemiskinan ekstrem, bencana alam dan donasi keagamaan serta donasi kepada komunitas marginal.
Supporting social initiatives to support the alleviation of social problems that occur around the Company, as well as supporting the preservation of arts, culture, and religious activities in the community. This is conducted, among others, by eradication of extreme poverty, natural disasters, and religious donations, as well as donations to marginalized communities.

KONTRIBUSI PERSEROAN TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

COMPANY'S CONTRIBUTION TO THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

PT PII berkomitmen untuk menjalankan program TJSL yang selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara partisipatif dan melibatkan berbagai pihak. Perseroan juga telah mengintegrasikan tujuan-tujuan relevan ke dalam program dan aktivitas Perseroan, yang juga sejalan dengan agenda pembangunan daerah, guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, program TJSL di PT PII dijalankan melalui pendekatan berbasis dampak, di mana Perseroan berfokus untuk memaksimalkan dampak positif yang dihasilkan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Berikut adalah beberapa kontribusi utama PT PII terhadap SDGs:

IIGF is committed to implementing CSR programs in line with the Presidential Regulation No. 59/2017 on the Achieving Sustainable Development Goals in a participatory manner and involving various parties. The Company has integrated relevant objectives into the Company's programs and activities, which are also in line with the local development agenda, to support the achievement of the Sustainable Development Goals. In its implementation, IIGF's CSR program is carried out through an impact-based approach, where the Company focuses on maximizing the positive impacts generated in terms of economic, social, and environmental aspects.

The following are some of IIGF's main contributions to the SDGs:

SDG 3 – Kehidupan Sehat dan Sejahtera
SDG 3 – Good Health and Well-Being

- Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bergizi bagi ibu hamil, balita, dan lansia di Bandar Lampung, Lampung.
- Program Pemeriksaan Kesehatan Gigi Gratis untuk anak sekolah di Bekasi, Jawa Barat.
- Program Penyediaan Air Bersih untuk daerah terdampak bencana di Demak, Jawa Tengah.

- Nutritious Supplementary Food (PMT) Program for pregnant women, toddlers, and the elderly in Bandar Lampung, Lampung.
- Free Dental Health Check-up Program for school children in Bekasi, West Java
- Provision of Clean Water for Disaster-affected Areas program in Demak, Central Java.

SDG 4 – Pendidikan Berkualitas
SDG 4 – Quality Education

- Program Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi di Indonesia Timur, menjangkau 75 mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Pattimura.
- Program Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru melalui Inovasi Pembelajaran Berbasis Digital di Denpasar, Buleleng, dan Tabanan, Bali.

- Scholarship program for Outstanding Students in Eastern Indonesia, for 75 students from Hasanuddin University, Sam Ratulangi University, and Pattimura University.
- Teacher Competency Enhancement training through Digital Learning Innovation in Denpasar, Buleleng and Tabanan, Bali.

SDG 7 – Energi Bersih dan Terjangkau
SDG 7 – Affordable and Clean Energy

- Dukungan terhadap proyek energi terbarukan, seperti PLTP Dieng-2 & Patuha-2 dan *Hydro Power Plant* (PLTA Bakaru).
- Efisiensi energi di lingkungan Perseroan, dengan mencatat pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

- Support for renewable energy projects, such as GPP Dieng-2 & Patuha-2 and HPP Bakaru.
- Energy efficiency within the Company, by recording reductions in Greenhouse Gas Emissions (GHG).

SDG 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
SDG 8 – Decent Work and Economic Growth

- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, termasuk Dukungan Kewirausahaan bagi Ex-Pekerja *Central Java Power Plant* (CJPP), dan pengembangan UMKM di berbagai daerah.
- Program Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM, termasuk pembangunan Rumah Kemas untuk UMKM di Maros, Sulawesi Selatan.

- Community Economic Empowerment Programs, including Entrepreneurship Support for Ex-workers of Central Java Power Plant (CJPP) and MSMEs development in various regions.
- Capacity Building for MSME Entrepreneurs, including the development of Packing House for MSMEs in Maros, South Sulawesi.

SDG 9 – Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
SDG 9 – Industry, Innovation, and Infrastructure

- Hingga tahun 2024, PT PII telah menjamin 53 proyek infrastruktur yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- Mendorong pengembangan proyek infrastruktur ramah lingkungan, termasuk proyek KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha).
- Memberikan penjaminan proyek senilai Rp78,93 triliun pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan.

- As of 2024, IIGF has guaranteed 53 infrastructure projects that contribute to economic growth and community welfare.
- Encouraging the development of environmentally friendly infrastructure projects, including Public Private Partnership (PPP) projects.
- Providing project guarantees amounted to Rp78.93 trillion in green business activities.

SDG 11 – Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
SDG 11 – Sustainable Cities and Communities

- Implementasi program pengelolaan sampah melalui *Waste Management for Circular Economy* (WE CARE) untuk mengurangi limbah dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.
- Konservasi lingkungan dengan menanam 1.000 Pohon Mangrove di kawasan pesisir untuk mendukung perlindungan ekosistem dan mengurangi dampak perubahan iklim.

- Implementing waste management program via Waste Management for Circular Economy (WE CARE) to reduce waste and improve the economy of surrounding communities.
- Environmental conservation by planting 1,000 Mangrove Trees in coastal areas to support ecosystem protection and reduce the climate change impact.

SDG 13 – Penanganan Perubahan Iklim
SDG 13 – Climate Action

- Mengurangi emisi karbon dengan peningkatan efisiensi energi di kantor PT PII.
- Dukungan terhadap proyek energi terbarukan, sebagai bagian dari komitmen mengurangi dampak lingkungan dari infrastruktur.

- Reducing carbon emissions by enhancing energy efficiency at IIGF offices.
- Supporting renewable energy projects, as part of the commitment to reducing the environmental impact of infrastructure.

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN
SUSTAINABLE GOVERNANCE

Sebagai bagian dari konsep ESG, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian kinerja dan keberlanjutan usaha. Untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, PT PII berkomitmen untuk menerapkan praktik GCG sebagai salah satu fondasi utama dalam menjalankan bisnis Perseroan. GCG dijadikan landasan untuk mengintegrasikan berbagai aspek bisnis Perseroan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan, dalam setiap kegiatan operasional. Dengan penerapan GCG yang konsisten, PT PII dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

As part of the ESG concept, Good Corporate Governance (GCG) has a significant influence on the achievement of business performance and sustainability. IIGF is committed to implementing GCG practices as one of the main foundations in carrying out the Company's business to ensure sustainable growth. GCG is a foundation to integrate various aspects of the Company's business, including economic, social, and environmental, in every operation. With consistent GCG, IIGF shall enhance stakeholder trust, ensure transparency and accountability, and support long-term sustainable business growth.

STRUKTUR TATA KELOLA KEBERLANJUTAN DAN PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN PROGRAM KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN
SUSTAINABILITY GOVERNANCE STRUCTURE AND PERSON IN CHARGE OF SUSTAINABILITY PROGRAM

Saat ini, PT PII telah memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang berperan untuk mendukung penerapan tata kelola berkelanjutan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ PT PII terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Masing-masing organ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk bertanggungjawab untuk memelihara keberlanjutan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

Currently, IIGF has a corporate governance structure and infrastructure with a role to support the implementation of sustainable governance. In accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, IIGF's organs consist of General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors. Each organ of the Board of Commissioners and Board of Directors has clear authorities and responsibilities as mandated in the Articles of Association and laws and regulations, including being responsible for maintaining the long-term sustainability of the Company's business.

Dalam aspek risiko dan peluang terkait keberlanjutan dan iklim, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi strategi, kebijakan, dan kinerja Perseroan, termasuk manajemen risiko terkait keberlanjutan dan iklim, serta memastikan sistem manajemen risiko yang efektif. Sementara itu, Direksi bertanggung jawab untuk mengeksekusi kebijakan dan strategi keberlanjutan, memastikan pengelolaan Perseroan telah mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, serta melaporkan kinerja terkait ESG secara transparan kepada Dewan Komisaris dan para pemangku kepentingan. Dalam menjalankan program keberlanjutan Perseroan, Direksi dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada jajaran struktur organisasi di bawahnya sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing organ.

In terms of sustainability and climate-related risks and opportunities, the Board of Commissioners is responsible for supervising the Company's strategies, policies, and performance, including sustainability and climate-related risk management, and ensuring an effective risk management system. Meanwhile, the Board of Directors is responsible for executing sustainability policies and strategies, ensuring the Company's management has considered environmental and social aspects, and reporting ESG-related performance transparently to the Board of Commissioners and stakeholders. In carrying out the Company's sustainability program, the Board of Directors may delegate some of their authority to the organizational structure reporting to them, in accordance with the provisions and authority of each organ.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERKAIT KEUANGAN BERKELANJUTAN
SUSTAINABLE FINANCE COMPETENCE DEVELOPMENT

PT PII memberikan kesempatan dan ruang bagi seluruh insan Perseroan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam menghadapi situasi dan kondisi serta isu-isu terkait ekonomi, sosial dan kemasyarakatan. Secara khusus, Dewan Komisaris, Direksi, dan Deputi Direktur serta Divisi penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan telah mengikuti berbagai kegiatan, seperti seminar, *workshop*, dan sebagainya, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan. Adapun topik pelatihan yang diikuti diantaranya terkait *sustainable finance*, dampak ekonomi dan sosial dari sektor jalan tol dan non tol, ESG *Awareness*, dan *Designing CSR and Sustainability Roadmap Based on* ISO 26000 .

IIGF provides opportunities and space for all of the Company's personnel to improve their knowledge and competence in facing the situations and conditions, as well as issues related to the economy, social, and community. In particular, the Board of Commissioners, Directors, and Deputy Directors, as well as the Division in charge of implementing sustainable finance have participated in various activities, such as seminars, workshops, etc., including those related to sustainable finance. The training included sustainable finance, economic and social impacts of the toll and non-toll road sectors, ESG Awareness, and Designing CSR and Sustainability Roadmap Based on ISO 26000.

Pengungkapan informasi lengkap terkait daftar pengembangan kompetensi program keberlanjutan yang telah dilakukan di tahun 2024 disampaikan dalam Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 PT PII.

Complete information disclosure related to the list of sustainability program competency development in 2024 can be referred to in IIGF's 2024 Sustainability Report.

PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN
STAKEHOLDERS' INVOLVEMENT

PT PII menempatkan para pemangku kepentingan sebagai pihak yang memiliki peran besar dalam mendukung keberlanjutan usaha Perseroan. Pelibatan pemangku kepentingan PT PII dalam penerapan program keberlanjutan dilakukan secara aktif melalui komunikasi yang transparan dan kolaborasi yang erat, untuk memastikan bahwa setiap inisiatif yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan harapan para *stakeholder*. PT PII melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, karyawan, masyarakat, mitra bisnis, dan akademisi, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program keberlanjutan, guna memastikan dampak positif yang luas dan berkelanjutan. Melalui dialog yang konstruktif dan mekanisme umpan balik, PT PII berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam setiap keputusan yang diambil, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif.

IIGF considers stakeholders as parties who have a key role in supporting the Company's business sustainability. IIGF's stakeholder engagement in the sustainability programs is actively conducted through transparent communication and close collaboration, to ensure that every initiative implemented is in line with the stakeholders' needs and expectations. IIGF involves various stakeholders, including the government, employees, communities, business partners, and academics, in the planning, implementation, and evaluation of sustainability programs to ensure broad and sustainable positive impacts. Through constructive dialog and feedback mechanisms, IIGF is committed to maintaining a balance between social, economic, and environmental interests in every decision made, and supporting the achievement of more inclusive sustainable development goals.

KINERJA ASPEK EKONOMI
ECONOMIC PERFORMANCE

PT PII berkomitmen untuk terus bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dengan memastikan pencapaian kinerja ekonomi yang optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, Perseroan juga berupaya menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai strategi yang inovatif dan adaptif. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, PT PII secara konsisten menerapkan strategi yang tepat untuk mendorong peningkatan kinerja ekonomi secara berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan peran Perseroan sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan yang berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

IIGF is committed to growing and developing sustainably by ensuring the achievement of optimal economic performance in accordance with the predetermined targets. In addition, the Company strives to create significant added value for all stakeholders through various innovative and adaptive strategies. As part of this commitment, IIGF consistently implements the right strategy to encourage sustainable improvement in economic performance. This step is in line with the Company's role as a Special Mission Vehicle (SMV) of the Ministry of Finance, which focuses on accelerating infrastructure development in Indonesia.

Pada tahun 2024, PT PII mencatatkan pertumbuhan kinerja operasional dan keuangan yang secara keseluruhan memenuhi target dalam RKAP Tahun 2024. Pada aspek kinerja operasional, di tahun 2024 PT PII memainkan peran penting untuk mengakselerasi pembangunan sejumlah infrastruktur strategis dan menjadi penyedia penjaminan pada 4 (empat) proyek baru, dengan nilai total investasi sebesar Rp27,9 Triliun. Proyek ini terdiri dari 2 proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan 2 proyek non-KPBU.

In 2024, IIGF recorded growth in the operational and financial performance which comprehensively met the targets in the 2024 WP&B. In terms of operational performance, in 2024, IIGF played an important role in accelerating the development of several strategic infrastructures and providing guarantees for four (4) new projects, with a total investment value of Rp27.9 trillion. These projects include 2 Public Private Partnership (PPP) projects, and 2 non-PPP projects.

Di sisi keuangan, Perseroan berhasil mencatat kinerja keuangan yang solid dan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. PT PII mencatatkan realisasi laba tahun berjalan tahun 2024 sebesar Rp930,88 miliar, meningkat 11,37% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp835,82 miliar dan berhasil berada 105% di atas target RKAP 2024. Untuk realisasi pendapatan usaha tahun 2024 tercapai sebesar Rp1.486,93 Miliar, meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.318,01 Miliar dan berada 107% di atas target RKAP 2024.

In terms of financial performance, the Company recorded solid and better financial performance compared to the previous year. IIGF recorded profit for the year in 2024 of Rp930,88 billion, increased by 11.37% compared to the previous year of Rp835,82 billion, and succeeded in achieving 105% above 2024 WP&B target. In 2024, the realization of operating revenues was Rp1,486.93 billion, increased by 13% compared to the previous year of Rp1.318,01 billion, and 107% above the 2024 WP&B target.

Sejalan dengan upaya untuk meraih kinerja ekonomi yang optimal, di tahun 2024 Perseroan juga berfokus dalam pengelolaan dampak ekonomi tidak langsung. Hal ini salah satunya dilakukan dengan memberikan penjaminan proyek pembangunan infrastruktur di berbagai sektor dan di berbagai daerah termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta mengembangkan ekosistem pembiayaan inovatif khususnya melalui pembentukan *Community of Practice* untuk Pembiayaan *Inovative* (INFINITY). Selain itu Perseroan juga melaksanakan berbagai program TJSL

In line with efforts to achieve optimal economic performance, in 2024, the Company also increased its focus on managing indirect economic impacts. One of the efforts is to provide guarantees for infrastructure development projects in various sectors and regions, including underdeveloped, frontier, and outermost areas, developing the infrastructure ecosystem, especially through the establishment of the Community of Practice for Innovative Financing (INFINITY), as well as implementing various TJSL programs, especially in the social sector by providing development assistance and renovation of

khususnya pada sektor sosial dalam memberikan bantuan pembangunan maupun renovasi sarana prasarana umum masyarakat, program pengentasan kemiskinan ekstrem serta program pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemasok lokal.

public infrastructure, extreme poverty alleviation programs, as well as community empowerment programs and local suppliers empowerment.

Pembahasan mengenai kinerja ekonomi PT PII telah disampaikan secara lengkap pada Bab Analisis Pembahasan dan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Discussion on IIGF's economic performance can be referred to in the Management & Discussion Analysis Chapter in this Annual Report.

KINERJA LINGKUNGAN
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

PT PII berkomitmen untuk memperluas kontribusinya terhadap keberlanjutan lingkungan dengan menjadikan integrasi pertimbangan lingkungan ke dalam setiap proses pengambilan keputusan proyek, serta menciptakan operasional kantor yang ramah lingkungan. Komitmen ini diwujudkan melalui kepatuhan terhadap semua peraturan lingkungan yang berlaku, pengintegrasian aspek lingkungan dalam proses penjaminan proyek untuk mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta pengelolaan dampak lingkungan seperti pengelolaan sumber daya alam, efisiensi energi, pencegahan polusi, pengelolaan limbah, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

IIGF is committed to increasing its contribution to environmental sustainability by integrating environmental considerations into every project decision making process and by creating environmentally friendly office operations. This commitment is realized by complying with all environmental regulations, integrating environmental aspects in the guarantee process to encourage sustainable infrastructure development, and managing environmental impacts, i.e., natural resource management and energy efficiency, pollution prevention and waste management, and biodiversity preservation.

Langkah strategis ini menunjukkan komitmen nyata PT PII dalam mendukung keuangan berkelanjutan, beradaptasi dengan tantangan perubahan iklim, dan berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) demi masa depan yang lebih berkelanjutan.

This strategic step shows IIGF's commitment to supporting sustainable finance, adapting to the challenges of climate change, and contributing to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) for a more sustainable future.

INISIATIF PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN TAHUN 2024
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PROGRAM IN 2024

Sejalan dengan komitmen PT PII untuk mendukung kelestarian lingkungan, sepanjang tahun 2024 Perseroan telah melaksanakan berbagai inisiatif program pengelolaan lingkungan sebagai langkah nyata dan konsistensi dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Program-program ini dirancang untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

In line with IIGF's commitment to supporting environmental sustainability, in 2024, the Company implemented various environmental management program initiatives as a concrete step and consistency in creating a sustainable positive impact. These programs are designed to support sustainable development goals that include environmental protection and preservation.

PENGELOLAAN ENERGI
ENERGY MANAGEMENT

PT PII memanfaatkan energi yang berasal dari sumber fosil, yaitu listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM), untuk mendukung berbagai aktivitas operasional, baik di lingkungan kantor maupun dalam operasional kendaraan Perseroan. Pada tahun 2024, konsumsi energi tercatat mencapai 571 gigajoule menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 710,51 Gigajoule. Penurunan ini menunjukkan keberhasilan Perseroan dalam menerapkan kebijakan penghematan energi dan peralihan ke sumber energi lain yang lebih efisien yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan kendaraan listrik. Hal ini juga sejalan dengan tren global menuju pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Sebagai bagian dari upaya Perseroan dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan, PT PII secara rutin melakukan pengukuran penggunaan listrik dan BBM untuk mengevaluasi efektivitas program efisiensi energi yang telah diterapkan. Dalam rangka mengukur efisiensi energi per individu, Perseroan melakukan perhitungan intensitas penggunaan energi setiap tahun. Pada tahun 2024 tercatat sebesar 3,50 Gigajoule per karyawan, menurun sebesar 19,14% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,33 Gigajoule per karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan konsumsi energi, berbagai upaya efisiensi yang dilakukan telah membantu menekan laju pertumbuhan penggunaan energi secara keseluruhan.

Untuk terus meningkatkan efisiensi energi, PT PII telah menerapkan berbagai inisiatif strategis, antara lain:

IIGF utilizes energy derived from fossil sources, i.e., electricity and Oil Fuel (BBM), to support various operations, both in the office environment and in the Company's vehicle operations. In 2024, energy consumption was recorded at 571 gigajoules, reflecting a decrease compared to 710.51 gigajoules in 2023. This decrease reflects the Company's success in implementing energy efficiency policies and transitioning to alternative, more environmentally friendly energy sources, such as the adoption of electric vehicles. These efforts are also aligned with the global trend toward reducing reliance on fossil fuels.

As part of the Company's efforts in sustainable energy management, IIGF regularly assesses electricity and fuel consumption to evaluate the effectiveness of the energy efficiency programs implemented. The Company calculated the intensity of energy consumption to assess energy efficiency per individual. In 2024, the energy consumption intensity was 3.50 Gigajoules per employee, decreased by 19.14% compared to the previous year, of 4.33 Gigajoules per employee. This shows that despite the increase in energy consumption, various efficiency efforts have assisted in suppressing the overall growth rate of energy consumption.

To continue enhancing energy efficiency, IIGF has implemented various strategic initiatives, among others:

- Mematikan aliran listrik dan perangkat elektronik saat tidak digunakan guna mengurangi konsumsi energi.
- Mengoptimalkan sistem pencahayaan dengan mengganti lampu TL (*Tube Luminescent*) menjadi lampu LED, yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan.
- Melakukan sosialisasi internal kepada seluruh karyawan untuk membangun budaya kerja yang lebih sadar akan efisiensi energi.

- Switching off electricity and electronic devices when not in use to reduce energy consumption.
- Optimizing the lighting system by replacing TL (Tube Luminescent) lamps with LED lamps, which are more energy efficient and environmentally friendly.
- Conducting internal socialization to all employees to establish a work culture that is more aware of energy efficiency.

Melalui berbagai langkah tersebut, PT PII berkomitmen untuk mengelola konsumsi energi secara lebih bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan efisiensi dalam operasional perusahaan.

Through these various steps, IIGF is committed to managing energy consumption more responsibly, in line with the principles of sustainability and efficiency in the company's operations.

PENGELOLAAN AIR DAN AIR LIMBAH (EFLUEN)

WATER AND WASTEWATER (EFFLUENT) MANAGEMENT

PT PII menyadari bahwa ketersediaan air bersih merupakan aspek krusial dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk mengelola sumber daya air secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, guna meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem dan masyarakat. Sebagai bagian dari kebijakan efisiensi air, PT PII memastikan bahwa pengambilan dan penggunaan air dilakukan secara bijak, dengan tidak menggunakan air dari kawasan lindung atau daerah yang mengalami kelangkaan air. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya air serta memastikan bahwa operasional Perseroan tidak memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan.

IIGF understands that the availability of clean water is a crucial aspect in maintaining environmental balance. Therefore, the Company is committed to managing water resources responsibly and sustainably to minimize negative impacts on ecosystems and communities. As part of the water efficiency policy, IIGF ensures that water withdrawal and utilization are carried out wisely, by not using water from protected areas or areas with water scarcity. The objective is to reduce pressure on water resources and ensure that the Company's operations do not have a significant impact on the environment.

Pada tahun 2024, total penggunaan air di PT PII tercatat sebesar 231 m^3 atau 0,23 megaliter, mengalami peningkatan 54% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 150 m^3 atau 0,15 megaliter. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan aktivitas operasional serta jumlah karyawan.

In 2024, IIGF recorded 231 m^3 or 0.23 megalitres water consumption, increased by 54% compared to 2023, which was 150 m^3 or 0.15 megalitres. This increase was caused by an increase in operations and the number of employees.

Untuk mengatasi peningkatan konsumsi air, PT PII telah menerapkan berbagai inisiatif penghematan air, antara lain:

To overcome the increase in water consumption, IIGF has implemented various water saving initiatives:

- Sosialisasi internal kepada karyawan mengenai pentingnya konservasi air.
- Adopsi teknologi hemat air, seperti penggunaan keran otomatis dan sistem daur ulang air.
- Penyelenggaraan workshop dan kampanye internal guna meningkatkan kesadaran terhadap pengelolaan air secara efisien.
- Optimalisasi sistem irigasi dengan memanfaatkan tanaman asli yang membutuhkan sedikit air untuk mengurangi konsumsi air dalam pemeliharaan lanskap.

- Internal socialization to employees on the importance of water conservation.
- Adoption of water-saving technologies, such as the use of automatic taps and water recycling systems.
- Workshops and internal campaigns to raise awareness on efficient water management.
- Optimization of irrigation systems by utilizing native plants that require less water to reduce water consumption in landscape maintenance.

Selain mengelola konsumsi air, PT PII juga berupaya memastikan bahwa air limbah domestik dari operasional Perseroan dikelola dengan baik dan tidak mencemari badan air. Sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan, PT PII tidak membuang air limbah ke daerah yang mengalami kelangkaan air (*water-stressed area*). Sebaliknya, air limbah domestik diolah melalui kerja sama dengan pihak eksternal, guna memastikan bahwa pembuangan limbah telah memenuhi standar baku mutu lingkungan yang berlaku serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.

In addition to managing water consumption, IIGF also endeavors to ensure that domestic wastewater from the Company's operations is well managed and does not pollute water bodies. As part of its environmental responsibility, IIGF does not discharge wastewater into water-stressed areas. Instead, domestic wastewater is treated in collaboration with external parties, to ensure that waste disposal meets applicable environmental quality standards and does not have a negative impact on the surrounding community.

PENCEGAHAN POLUSI DAN PENGELOLAAN LIMBAH
POLLUTION PREVENTION AND WASTE MANAGEMENT

Sebagai bagian dari upaya pengelolaan operasional ramah lingkungan di lingkungan Perseroan, PT PII secara aktif mengelola emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis dapat berkontribusi dalam pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem.

As part of the effort to manage environmentally friendly operations within the Company, IIGF actively manages Greenhouse Gas (GHG) emissions and waste generated from its operations. This effort is conducted to ensure that every business activity can contribute to reducing negative impacts on the ecosystem.

Pada tahun 2024, operasional kantor PT PII menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sebanyak 3,43 kg dan limbah non-B3 sebanyak 7.380,10 kg. Untuk mengelola limbah ini dengan aman dan sesuai regulasi, Perseroan menerapkan sistem pemisahan limbah berdasarkan kategori limbah B3, organik, dan anorganik, serta bekerja sama dengan pihak ketiga yang telah tersertifikasi dalam pengelolaan limbah.

In 2024, IIGF's office operations generated 3.43 kg of B3 (hazardous and toxic waste) and 7,380.10 kg of non-B3 waste. The Company implements a waste separation system categorized based on hazardous and toxic, organic, and inorganic waste, and cooperates with third parties who have been certified in waste management to manage this waste safely and in compliance with regulations.

Sebagai langkah lebih lanjut dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah, PT PII mengimplementasikan program unggulan WE CARE (*Waste Management for Circular Economy*), yang merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan di sektor lingkungan. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah organik dan anorganik, sekaligus menciptakan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Melalui program *WE CARE*, PT PII tidak hanya berkontribusi pada pengurangan limbah, tetapi juga mendorong penerapan konsep ekonomi sirkular. Beberapa dampak positif dari implementasi program ini antara lain:

- Pengurangan sampah organik dengan proyeksi sebesar 153,6 ton per tahun, yang membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA) serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan limbah.
- Peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku budidaya dan pengelolaan limbah, dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp472,7 juta per tahun.

As a further step in improving waste management effectiveness, IIGF implements the flagship WE CARE (Waste Management for Circular Economy) program, which is part of the Company's Social and Environmental Responsibility (CSR) in the environmental sector. The program has the objective to optimise organic and inorganic waste management, while creating social and economic benefits for the community. Via the WE CARE program, IIGF not only contributes to waste reduction, but also encourages the implementation of the circular economy. Some of the positive impacts of the program's implementation include:

- Reduction of organic waste with a projection of 153.6 tons per year, which helps reduce the burden on landfills and improve efficiency in waste management.
- Improved community economy, especially for cultivation and waste management entrepreneurs, with a potential economic value of Rp472.7 million per year.

Strategi Pencegahan Polusi dan Pengelolaan Limbah dalam Penjaminan Proyek
Pollution Prevention and Waste Management Strategies in Project Guarantee

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, PT PII secara aktif mengintegrasikan strategi pencegahan polusi dan pengelolaan limbah dalam proses penjaminan proyek. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas proyek terhadap lingkungan, sekaligus memastikan bahwa setiap proyek yang didukung sejalan dengan prinsip keberlanjutan. PT PII menyadari bahwa aktivitas proyek yang mendapatkan penjaminan berpotensi menghasilkan polutan, seperti emisi Gas Rumah Kaca (GRK), emisi non-GRK, serta limbah B3 dan non-B3. Untuk mengatasi tantangan ini, PT PII mendorong pengelola proyek untuk:

- Menyusun rencana inventarisasi emisi GRK, serta strategi pengurangan emisi guna menekan dampak lingkungan.
- Mengelola limbah B3 dan non-B3 sesuai dengan regulasi yang berlaku, guna mencegah pencemaran tanah dan air.
- Melaksanakan proses *screening* proyek guna mengidentifikasi risiko polusi dan limbah, serta menyusun rencana mitigasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Sebagai bagian dari proses *due diligence*, PT PII mempertimbangkan aspek lingkungan dalam keputusan penjaminan proyek, khususnya bagi proyek yang mendapatkan *Project Development Facility* (PDF) serta proyek yang wajib menerapkan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Dengan pendekatan ini, PT PII memastikan bahwa setiap proyek yang didukung tidak hanya berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjunjung tinggi tanggung jawab lingkungan dan keberlanjutan.

As part of its commitment to environmental sustainability, IIGF actively integrates pollution prevention and waste management strategies in the project guarantee process. This is to minimize the negative impacts caused by project activities on the environment, while ensuring that every project supported is in line with the sustainability principles. IIGF understands that project that receive guarantees have the activities to potentially produce pollutants, such as Greenhouse Gas (GHG) emissions, non-GHG emissions, and B3 and non-B3 waste. To face this challenge, IIGF encourages project managers to:

- Develop a GHG emission inventory plan, as well as emission reduction strategies to reduce environmental impacts.
- Manage B3 and non-B3 waste in accordance with prevailing regulations, to prevent land and water pollution.
- Implement a project screening process to identify pollution and waste risks, and develop mitigation plans to reduce negative environmental impacts.

As part of the due diligence process, IIGF considers environmental aspects in project guarantee decisions, especially for projects that receive Project Development Facility (PDF) and projects that are required to apply Environmental, Social, and Governance (ESG) principles. With this approach, IIGF ensures that each supported project not only contributes to infrastructure development, but also upholds environmental responsibility and sustainability.

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK)
GREENHOUSE GAS (GHG) EMISSION MANAGEMENT AND CONTROL

Perseroan menyadari bahwa pengurangan emisi GRK sangat penting dalam mencegah pemanasan global dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Untuk itu, PT PII turut berupaya mengurangi dampak perubahan iklim dengan secara aktif mengelola dan mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan dari operasional Perseroan.

Sebagai bentuk langkah nyata dalam pengelolaan emisi GRK, PT PII melakukan berbagai inisiatif strategis, antara lain:

- Identifikasi sumber emisi GRK dalam operasional perusahaan guna menyusun strategi mitigasi yang lebih efektif.
- Pemantauan dan perhitungan emisi GRK secara berkala untuk memastikan akuntabilitas dalam pengurangan emisi.
- Penerapan praktik efisiensi energi berupa penggunaan lampu hemat energi (*Light Emitting Diode*/LED) untuk mengurangi konsumsi listrik serta kampanye hemat energi, termasuk himbauan untuk mematikan AC dan perangkat elektronik saat tidak digunakan guna mengoptimalkan konsumsi daya.

The Company understands that reducing GHG emissions is critical in preventing global warming and supporting the transition to a low-carbon economy. Therefore, IIGF strives to reduce the impact of climate change by actively managing and controlling Greenhouse Gas (GHG) emissions generated from the Company's operations.

As a form of concrete steps in managing GHG emissions, IIGF carries out various strategic initiatives, including:

- Identification of GHG emission sources in the company's operations to develop a more effective mitigation strategy.
- Regular monitoring and calculation of GHG emissions to ensure accountability in reducing emissions.
- Energy efficiency practices such as the use of energy-efficient lighting (Light Emitting Diode/LED) to reduce electricity consumption and energy-saving campaigns, including an appeal to turn off air conditioners and electronic devices when not in use to optimize power consumption.

Pada tahun 2024, jumlah total emisi GRK PT PII sebesar 101,12 Ton CO_2eq, berhasil mengalami penurunan sebesar 6,83% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 108,53 Ton CO_2e. Selanjutnya, intensitas emisi GRK per karyawan juga berhasil mengalami penurunan menjadi 0,62 CO_2eq/karyawan di tahun 2024, menurun 6,26% dari tahun 2023 sebesar 0,66 CO_2eq/karyawan.

In 2024, IIGF's total GHG emissions amounted to 101.12 tons of CO_2e, representing a 6.83% decrease compared to 106.59 tons of CO_2e in 2023. Furthermore, GHG emission intensity per employee also declined to 0.62 tons CO_2e/employee in 2024, down by 6.26% from 0.66 tons CO_2e/employee in 2023.

PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
BIODIVERSITY CONSERVATION

Wilayah kerja PT PII tidak terletak di dalam atau di sekitar kawasan konservasi maupun daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi. Meskipun demikian, PT PII memahami bahwa pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, terutama jika trase proyek melintasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi.

IIGF's working area is not located near or in the conservation area or an area with high biodiversity value. Nevertheless, IIGF understands that infrastructure development such as toll roads has the potential to have a negative impact on biodiversity when the route crosses areas with high biodiversity value.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan, PT PII secara proaktif melakukan upaya mitigasi untuk mengurangi dampak tersebut. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan kajian alternatif guna menghindari atau meminimalkan kawasan bernilai keanekaragaman hayati tinggi yang dilewati trase. Selain itu, PT PII juga menerapkan berbagai pendekatan teknis, seperti desain jalan tol bertingkat (*elevated*), pembangunan koridor satwa, serta solusi teknis lainnya yang mendukung keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati di sekitar proyek infrastruktur.

As a form of responsibility and commitment to environmental conservation, IIGF proactively carries out mitigation efforts to reduce these impacts. One of the steps is to conduct an alternative study to avoid or minimize high biodiversity value areas through which the route passes. In addition, IIGF applies various technical approaches, such as elevated toll road design, construction of animal corridors, and other technical solutions that support the sustainability of ecosystems and biodiversity around infrastructure projects.

Sepanjang tahun 2024, PT PII telah melakukan berbagai inisiatif strategis untuk mendukung upaya pelestarian keanekaragaman hayati, antara lain:

- Program *Waste Management for Circular Economy* (WE CARE) melalui Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Budidaya *Maggot* di Yogyakarta dan Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Dewanata di Dieng Kulon, Banjarnegara, Jawa Tengah
- Program Penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu melalui Pemberdayaan Masyarakat berbasis Lingkungan di Banjarnegara, Jawa Tengah
- Program Pengelolaan Hutan Mangrove melalui Budidaya Udang Berkelanjutan di Kampung Pegat Batumbuk, Berau, Kalimantan Timur
- Program Konservasi Alam melalui Penanaman 1.000 bibit Pohon Mangrove di Angke Kapuk, Jakarta Utara.

In 2024, IIGF has carried out various strategic initiatives to support biodiversity conservation efforts:

- Waste Management for Circular Economy (WE CARE) Program through Organic Waste Management Based on Maggot Cultivation and Optimization of the Dewanata Integrated Waste Management Site in Dieng Kulon, Banjarnegara, Central Java.
- Serayu Watershed Rescue Program through Environment-based Community Empowerment in Banjarnegara, Central Java
- Mangrove Forest Management Program through Sustainable Shrimp Farming in Pegat Batumbuk Village, Berau, East Kalimantan
- Nature Conservation Program by Planting 1,000 Mangrove Tree seedlings in Angke Kapuk, North Jakarta.

BIAYA PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN
THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CONSERVATION COST

Pada tahun 2024, PT PII mengalokasikan anggaran untuk program lingkungan yang bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan serta mendukung berbagai inisiatif dalam program lingkungan hidup. Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2024 mencapai Rp867,82 juta, menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 679,15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana alokasi anggaran hanya sebesar Rp111,38 juta. Peningkatan ini mencerminkan komitmen PT PII dalam memperkuat upaya pelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

In 2024, IIGF allocated a budget for environmental programs to improve environmental conditions and support various initiatives in the environmental program. In 2024, the total budget allocated amounted to Rp867.82 million, showing a significant increase of 679.15% compared to the previous year, which was only Rp111.38 million. This increase reflects IIGF's commitment to strengthening environmental conservation efforts and supporting sustainable development.

PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN
COMPLAINTS ABOUT ENVIRONMENTAL PROBLEMS

PT PII menyediakan Layanan Pengaduan Lingkungan sebagai upaya untuk memperoleh dan menangani masukan, keluhan, atau pertanyaan dari pemangku kepentingan terkait isu lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan operasional Perseroan. Pengaduan lingkungan ini dapat disampaikan secara langsung kepada Perseroan melalui sarana/media yang disediakan.

IIGF provides Environmental Complaint Services as an effort to gain and handle input, complaints, or questions from stakeholders regarding environmental issues resulting from the Company's operations. These environmental complaints can be submitted directly to the Company via the facilities/media provided.

Secara lisan
Verbally

Menghubungi Call Center di +62 21 5795 0550 atau mengunjungi kantor pusat PT PII yang beralamat di Capital Place Lt. 7 dan 8, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.18 Kuningan Barat, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710 – Indonesia.
Contacting the Call Center at +62 21 5795 0550, or visiting IIGF's head office at Capital Place Lt. 7 and 8, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.18 West Kuningan, South Jakarta, Special Capital Region of Jakarta, 12710, Indonesia.

Secara tertulis
In writing

- Menyampaikan email ke alamat info@iigf.co.id
- Menyampaikan form keluhan yang tercantum dalam situs PT PII ataupun melalui media sosial Perseroan.
- Sending an email to info@iigf.co.id
- Submitting a complaint form, available at IIGF's website or via the Company's social media.

Sepanjang tahun 2024 PT PII tidak menerima pengaduan dari pemangku kepentingan terkait lingkungan sehingga tidak terdapat denda ataupun sanksi lingkungan yang ditanggung oleh Perseroan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait lingkungan.

In 2024, IIGF did not receive complaints from stakeholders regarding the environment. Thus, there were no fines or environmental sanctions borne by the Company for non-compliance with environmental laws and regulations.

KINERJA SOSIAL - PENGEMBANGAN SOSIAL DAN MASYARAKAT

SOCIAL PERFORMANCE - SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Sebagai salah satu pemangku kepentingan yang sangat penting, persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan Perseroan memegang peranan kunci dalam menentukan kelangsungan operasional usaha di masa depan. Untuk itu, PT PII berkomitmen untuk memastikan terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Perseroan dan masyarakat. Komitmen ini terwujud melalui berbagai inisiatif yang implementasinya dilakukan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dirancang untuk dilaksanakan secara berkelanjutan. Melalui program TJSL ini, Perseroan secara aktif mendukung aspek-aspek penting seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi lokal, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

As one of the most important stakeholders, public perception and acceptance of the Company's existence plays a key role in determining the continuity of business operations in the future. Therefore, IIGF is committed to ensuring the establishment of a harmonious and mutually beneficial relationship between the Company and the community. This commitment is manifested via various initiatives implemented through the Social and Environmental Responsibility (CSR) Program, designed to be implemented in a sustainable manner. Through this CSR program, the Company actively supports important aspects such as poverty alleviation, local economic empowerment, environmental protection, and improvement of the community's quality of life.

Dalam menjalankan program TJSL, PT PII secara hati-hati mengelola dampak operasional terhadap masyarakat dengan mengutamakan prinsip *Creating Shared Value* (CSV), yang berfokus pada keseimbangan antara tiga aspek utama: *Profit*, *People*, dan *Planet*. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, khususnya masyarakat yang berada di sekitar proyek, memperoleh manfaat langsung.

In implementing the CSR program, IIGF carefully manages the operational impact on the community by prioritizing the Creating Shared Value (CSV) principle, which focuses on the balance between three main aspects: Profit, People, and Planet. This approach aims to ensure that all stakeholders, especially the communities surrounding the project, benefit directly.

Komitmen PT PII untuk berkembang bersama masyarakat tercermin dalam kebijakan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 010/SK/PII-BOD/2020, yang mengatur pedoman pelaksanaan TJSL Perseroan. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap program yang diimplementasikan sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan Perseroan, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). Dengan kebijakan ini, PT PII berkomitmen untuk berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, yang tidak hanya bermanfaat bagi Perseroan, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan.

IIGF's commitment to developing with the community is reflected in the policies set out in the Board of Directors' Decree No. 010/SK/PII-BOD/2020, which regulates the Company's CSR guidelines. This policy is designed to ensure that every program implemented is in line with the company's values and objectives, and supports the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). With this policy, IIGF is committed to having an active role in actualizing sustainable development, which is not only beneficial for the Company, but also for the community and the environment.

INISIATIF PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT TAHUN 2024

SOCIAL AND COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM INITIATIVES IN 2024

Perseroan telah menetapkan program TJSL yang menjadi prioritas utama, dengan fokus pada sektor-sektor yang dapat mendukung percepatan pembangunan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *Environment, Social, and Governance* (ESG). Program ini dirancang untuk menanggapi tantangan sosial dan lingkungan yang ada, sekaligus memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat di sekitar area operasional Perseroan.

The Company has established a CSR program as a top priority, focusing on sectors that can support the acceleration of development based on the principles of Environment, Social, and Governance (ESG). This program is designed to respond to existing social and environmental challenges, while ensuring that every activity implemented provides long-term sustainable benefits for all stakeholders, especially the communities around the Company's operations.

Pada tahun 2024, PT PII telah menyalurkan dana sebesar Rp4,8 miliar untuk program TJSL, yang dialokasikan pada 5 (lima) sektor: Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat, Lingkungan, Kesehatan, serta Sosial, Budaya, dan Keagamaan.

In 2024, IIGF disbursed funds amounting to Rp4.8 billion for the CSR program, which was allocated to five (5) sectors: Education, Community Empowerment, Environment, Health, as well as Social, Cultural, and Religion.

Realisasi Penyaluran Dana Program TJSL Selama Tiga Tahun Terakhir (Rp juta)
Fund Disbursement Realization in the Last Three Years (Rp million)

No	Sektor Sector	2024	2023	2022
1.	Pendidikan Education	**559,6**	937,6	664,0
2.	Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment	**1.110,3**	987,8	919,9
3.	Lingkungan Environment	**810,5**	403,8	562,6
4.	Kesehatan Health	**718,0**	421,9	193,4
5.	Sosial, Budaya, dan Keagamaan Social, Cultural, and Religion	**1.639,2**	1.678,7	1.345,8
	Total	**4.837,5**	**4.429,8**	**3.685,7**

Berbagai program TJSL yang dilakukan sepanjang tahun 2024 menjadi salah satu komitmen PT PII dalam mendukung pencapaian SDGs dengan menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang dinilai mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

CSR programs implemented in 2024 are considered one of the forms of the Company's commitment to achieving SDGs, by creating social and environmental impact that shall be capable of supporting the development acceleration and community's economic improvement.

Berikut ini ringkasan program TJSL prioritas/unggulan yang telah dilaksanakan PT PII sepanjang tahun 2024.

The following is a summary of flagship TJSL programs implemented by IIGF in 2024.

Sektor Pendidikan
Education

Selama tahun 2024, Perseroan telah menyalurkan anggaran sebesar 559,6 juta yang diperuntukkan bagi pelaksanaan TJSL Unggulan pada sektor Pendidikan sebanyak 5 (lima) program, sebagai berikut:

In 2024, the Company disbursed Rp559.5 million of budget for Flagship CSR implementation in the Education sector for five (5) programs, as follows:

1. Program Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi di Indonesia Timur
Scholarship Program for Outstanding Students in Eastern Indonesia

Program beasiswa ini ditujukan bagi 75 mahasiswa berprestasi dari Indonesia Timur yang sedang menempuh pendidikan di tiga universitas, yaitu Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado, Sulawesi Utara; Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar, Sulawesi Selatan; dan Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon, Maluku. Masing-masing universitas mendapatkan kuota 25 mahasiswa penerima beasiswa.

Educational scholarships to 75 outstanding Eastern Indonesian students who are studying at three universities, i.e., Sam Ratulangi University (UNSRAT) Manado, North Sulawesi; Hasanuddin University (UNHAS) Makassar, South Sulawesi; and Pattimura University (UNPATTI) Ambon, Maluku. Each university received a quota of 25 scholarship recipients.

Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa dari keluarga pra-sejahtera yang sedang menempuh perkuliahan minimal semester 2 dan maksimal semester 6. Selain memiliki potensi akademik dan non-akademik yang baik, penerima beasiswa juga harus mendapatkan rekomendasi dari pihak dekanat atau rektorat. Bantuan diberikan dalam bentuk tunjangan biaya hidup dan pendidikan selama enam bulan, yang akan ditransfer setiap bulan kepada penerima.

This scholarship is given to students from underprivileged families who are studying at their 2nd semester up to 6th semester. In addition to having good academic and non-academic potential, scholarship recipients shall obtain recommendations from the dean or rectorate. Assistance is provided in the form of a six-month living and education allowance, which will be transferred monthly to the recipient.

Program beasiswa ini telah berjalan sejak 2023. Selain bantuan finansial, program ini juga mencakup berbagai aktivitas pendamping untuk meningkatkan kapasitas penerima beasiswa. Salah satu kegiatan utama adalah *Student Gathering* dan Seminar, yang bertujuan mengembangkan *soft skill* mahasiswa dalam kepemimpinan dan komunikasi dengan menghadirkan pelatih profesional. Selain itu, para penerima beasiswa di setiap universitas didorong untuk aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan melalui program *Community Development*. Program ini digagas oleh para penerima beasiswa dengan tujuan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat sekitar.

The scholarship program has been running since 2023. In addition to financial assistance, the program also includes a range of mentoring activities to enhance the capacity of the scholarship recipients. One of the main activities is the Student Gathering and Seminar, with the objective to develop students' soft skills in leadership and communication, by providing professional trainers. In addition, scholarship recipients at each university are encouraged to be active in social activities via the Community Development program. This program was initiated by the scholarship recipients with the aim of making a real contribution to the surrounding community.

2. Program Peningkatan Kompetensi Guru melalui Inovasi Pembelajaran Berbasis Digital di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar, Bali

Teacher Competency Improvement Program through Digital-based Learning Innovation in Buleleng Regency, Tabanan Regency, and Denpasar, Bali

PT PII melanjutkan program TJSL yang sebelumnya bertema "Digitalisasi dalam Pembelajaran" dengan program ketiga yang bertajuk "Inovasi Pembelajaran Berbasis Permainan Digital". Program ini merupakan fase ke-3 dari TJSL PT PII yang berfokus pada pengembangan portofolio hasil pelatihan, dengan penekanan pada asesmen diagnostik dalam pembelajaran berdiferensiasi dan penggunaan media belajar digital. Program ini diimplementasikan secara *hybrid* swapacu, dimulai secara efektif pada bulan Mei hingga November 2024. Program "Inovasi Pembelajaran Berbasis Permainan Digital" akan dilaksanakan di Kota Denpasar dan Kabupaten Tabanan, sebagai tindak lanjut atas performa baik pada Fase ke-2 Program TJSL Pendidikan "Digitalisasi dalam Pembelajaran" di Buleleng. Program ini menyasar 40 guru jenjang SMP dan diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju digitalisasi pembelajaran yang sejalan dengan kerangka Kurikulum Merdeka.

IIGF continued the previous CSR program themed "Digitalisation in Learning" with a third program titled "Digital Game-Based Learning Innovation." This program is the 3rd phase of IIGF's CSR which focuses on developing a portfolio of training outcomes, with an emphasis on diagnostic assessment in differentiated learning and the use of digital learning media. The program was implemented on a hybrid self-paced basis, starting effectively in May until November 2024. The "Digital Game-based Learning Innovation" program will be implemented in Denpasar City and Tabanan Regency, as a follow-up to the good performance in Phase 2 of the "Digitalisation in Learning" CSR Education Program at Buleleng. The program targets 40 junior high school teachers and shall be the first step towards digitalization of learning, in line with the Merdeka Curriculum framework.

3. Program Pemberdayaan Santri melalui Pengolahan Limbah Sampah menjadi Produk Bernilai Ekonomi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

Santri Empowerment Program through Processing Waste into Economic Value Products in Purwakarta Regency, West Java

Program pemberdayaan santri dan santriwati di Pondok Hidayatul Ghozali, Purwakarta, difokuskan pada pelatihan kewirausahaan, pengembangan produk ramah lingkungan (*eco-friendly*), serta pendampingan yang bertujuan untuk membuka dan melatih *mindset* para santri tentang pola pikir *entrepreneurship*. Program ini memberikan bekal kepada 34 santri dan 6 pendamping pondok pesantren mengenai penciptaan usaha di bidang kerajinan, dengan fokus pada pembuatan produk yang memiliki nilai lingkungan dan ekonomi. Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghasilkan produk daur ulang sampah plastik yang berkualitas. Program ini juga bertujuan membangun kemandirian pesantren melalui pemberdayaan ekonomi dengan membantu pesantren dalam memilih komoditas yang memiliki potensi pasar, memberikan pelatihan serta pendampingan yang diperlukan, serta memfasilitasi pemasaran dan pengelolaan usaha secara berkelanjutan melalui berbagai saluran strategis.

The santri and santriwati (islamic students) empowerment program at Pondok Hidayatul Ghozali, Purwakarta, is focused on entrepreneurship training, eco-friendly product development, and mentoring with the objective to open and train the students' mindset about entrepreneurship. The program provided 34 students and 6 mentors of the boarding school with knowledge of business establishment in the handicrafts sector, with a focus on making products that have environmental and economic value. In addition, this program aims to improve their ability to produce quality recycled plastic waste products. The program also has the objective to establish the boarding school's independence through economic empowerment by assisting boarding school in selecting commodities that have market potential, providing the necessary training and mentoring, and facilitating marketing and sustainable business management via various strategic channels.

Sektor Pemberdayaan Masyarakat
Community Empowerment

Selama tahun 2024, Perseroan telah menyalurkan anggaran sebesar Rp1,1 Miliar yang diperuntukkan bagi pelaksanaan TJSL pada sektor Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 8 program.

In 2024, the Company has disbursed Rp1.1 billion for the CSR in the Community Empowerment sector consisting of 8 programs.

1. Program Desa Berdaya PT PII
IIGF's Empowered Village Program

Program pemberdayaan ekonomi UMKM melalui pengembangan sektor usaha pertanian, perkebunan, kuliner, dan kesehatan masyarakat di Desa Karangmukti, Bungursari, Purwakarta. Program ini bertujuan untuk membangun masyarakat agar aktif terlibat dalam pengembangan dan penguatan potensi ekonomi lokal, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan serta pembangunan kapasitas masyarakat yang berkelanjutan. Program ini mencakup *capacity building*, pemberdayaan UMKM, peternakan domba, dan budidaya melon, serta program kesehatan untuk lansia dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 199 orang.

MSME economic empowerment program through the development of agricultural, plantation, culinary, and public health business sectors in Karangmukti Village, Bungursari, Purwakarta. The program aims to build communities that are involved in developing and strengthening local economic potential, increasing access to education and health, and building sustainable community capacity. The program includes capacity building, MSMEs empowerment, sheep farming, and melon cultivation, as well as a health program for the elderly, with 199 beneficiaries.

2. Program Agrikultur Pemberdayaan Petani melalui Pembangunan Sarana Prasarana untuk Akses Distribusi Hasil Pertanian
Agricultural Farmer Empowerment through Infrastructure Development for Access to Distribution of Agricultural Products

Program dukungan pembangunan jalan penghubung (jembatan) dan pemasangan gorong-gorong dilaksanakan di Kampung Arca Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, yang merupakan pekerjaan lanjutan dari pelebaran jalan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Jembatan yang akan dibangun berjumlah 3 unit dengan panjang masing-masing 3 meter dan 5 gorong-gorong (1 gorong-gorong besar, 1 gorong-gorong sedang dan 3 gorong-gorong kecil). Program ini bertujuan untuk memberikan akses yang aman dan mudah bagi petani sayur untuk mengangkut hasil panen ke pasar lokal dan regional, serta memfasilitasi petani untuk mengakses pasar dengan biaya transportasi yang lebih rendah dan mendapatkan harga jual yang lebih baik, dan mendorong pengembangan ekonomi di wilayah pedesaan melalui peningkatan akses infrastruktur yang memadai.

The support program for the construction of bridges and installation of culverts was carried out in Kampung Arca, Sukawangi Village, Sukamakmur Sub-District, Bogor Regency, which was a follow-up job to the road widening, an IIGF's CSR program. The bridges to be constructed are 3 units with a length of 3 metres each and 5 culverts (1 large culvert, 1 medium culvert, and 3 small culverts). This program shall ensure safe and easy access for vegetable farmers to transport crops to local and regional markets, enable the farmers to access the markets with lower transportation costs and obtain better selling prices, and encourage economic development in rural areas through improved access to adequate infrastructure.

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Masyarakat Nelayan Pesisir Pantai di Kabupaten Gunungkidul

Coastal Fishermen Community Empowerment and Improvement Program in Gunungkidul Regency

Program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan hasil produk ikan laut dan menginisiasi pembentukan usaha kelompok mikro untuk meningkatkan ekonomi perempuan pesisir Dusun Nanas, Kelurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul. Pelaksanaan program dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 60 orang ini mencakup beberapa kegiatan, diantaranya; pelatihan produksi pengolahan hasil ikan pasca panen, penyediaan alat pengolahan hasil ikan pasca panen, penyuluhan mutu dan keamanan produk, serta pengembangan produk dan sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), pelatihan manajemen pemasaran, pendampingan dan konsultasi, serta *monitoring* dan evaluasi program.

A community empowerment program that focuses on enhancing knowledge and skills in processing marine fish products and initiating the establishment of micro group businesses to improve the economy of coastal women in Nanas Hamlet, Tileng Village, Kapanewon Girisubo, Gunungkidul Regency. The program has a total of 60 beneficiaries, which covers various activities, including; post-harvest fish product processing training, provision of post-harvest fish product processing equipment, Product quality and safety counseling, Product Development and Product certification (PIRT), Marketing management training, Mentoring and Consultation, and Program Monitoring and Evaluation.

4. Program Dukungan Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro ex-Pekerja Konstruksi *Central Java Power Plant* yang Terdemobilisasi

Entrepreneurship Support for Micro Business Actors of Demobilized ex-Central Java Power Plant Construction Workers

Program pemberdayaan masyarakat yang merupakan ex-Pekerja Konstruksi CJPP yang berfokus pada dukungan pengembangan sektor kewirausahaan sebagai upaya meminimalkan dampak langsung yang terjadi dari pengurangan pekerja yang bekerja di CJPP, serta mendukung dan mengembangkan potensi dan usaha ex-pekerja CJPP yang telah memiliki usaha mandiri. PT PII telah memberikan bantuan usaha kepada para pelaku UMKM tersebut sejak tahun 2022, serta mendukung pengembangan ekonomi melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) di wilayah sekitar CJPP sejak tahun 2023 hingga sekarang dengan jenis usaha yang beragam seperti, simpan pinjam, jasa produksi, jasa, industri rumahan, peternakan, dan perikanan. Lokasi pelaksanaan program di desa sekitar lokasi pembangunan CJPP yaitu Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, dan Ponowareng dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 34 pelaku UMKM.

The community empowerment program for ex-CJPP Construction Workers focuses on supporting the development of the entrepreneurship sector to minimize the direct impact of the workers' reduction at CJPP, as well as supporting and developing the potential and business of ex-workers of the CJPP with independent businesses. IIGF disbursed assistance to the MSMEs entrepreneurs of ex-Demobilized CJPP workers since 2022-2024, to support economic development by establishing Joint Business Groups (KUB) in the area around the CJPP since 2013. Currently, the various types of businesses include savings and loans, production services, services, home industries, animal husbandry, and fisheries. The program is implemented in the village around the CJPP construction site, i.e., Ujungnegoro, Karanggeneng, and Ponowareng Villages, with a total of 34 MSME beneficiaries.

5. Program Sentralisasi Tempat Sampah Ilegal menjadi Sentra UMKM Kuliner di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat

Centralization of Illegal Waste Bins into Culinary MSME Centers in Sambas Regency, West Kalimantan

Program optimalisasi pemanfaatan tempat sampah ilegal yang merupakan aset satuan kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singkawang berlokasi di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat menjadi pusat pengembangan usaha kuliner dan pelaku UMKM sehingga roda perekonomian dapat bergerak, meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku UMKM, menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar serta memberi dampak ekonomi yang signifikan bagi lingkungan sekitar. Pada pelaksanaan program, PT PII mendukung pembangunan sarana prasarana yang bisa digunakan oleh beberapa pelaku UMKM, diantaranya pembangunan kanopi, pengerasan halaman, pagar, dan taman bermain, serta dukungan perlengkapan usaha seperti kulkas, *freezer*, pembuatan gerobak, peralatan masak, kursi dan meja.

The program optimizes the use of illegal waste bins, which are actually assets of the Singkawang Primary Tax Service Office working unit, located at Pemangkat Sub-District, Sambas Regency, West Kalimantan, into a culinary business development and MSME entrepreneurs center to encourage the economy, improve the welfare of MSME entrepreneurs, absorb the workforce of the surrounding community, and have a significant economic impact on the surrounding environment. In the program's implementation, IIGF supports the construction of infrastructure that can be used by several MSME entrepreneurs, including the construction of canopies, yard pavements, fences, and playgrounds, as well as support for business equipment, such as refrigerators, freezers, carts construction, cooking utensils, chairs, and tables.

6. Program Bedah Warung Kerek, Kelurahan Kuningan Barat, Kota Jakarta Selatan

Warung Kerek Reconstruction Program, West Kuningan Village, South Jakarta City

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kantor PT PII melalui renovasi warung agar para pelaku usaha UMKM ini mendapatkan tempat yang layak untuk berjualan. Dalam program ini, PT PII mendukung renovasi 4 warung agar membuat kesan yang nyaman, aman, dan unik untuk para pelanggan yang menikmati kuliner di wilayah Kuningan Barat, Jakarta Selatan ini.

The economic empowerment program for the community around IIGF's office through renovation of stalls so that these MSME entrepreneurs have a proper place for their business. In this program, IIGF supported the renovation of 4 stalls to make a comfortable, safe, and unique impression for customers who enjoy culinary in the West Kuningan area of South Jakarta.

7. Program Pengembangan UMKM melalui Pembangunan Rumah Kemas Maros di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

MSME Development by Constructing Maros Packing House in Maros Regency, South Sulawesi

PT PII bekerjasama dengan BAZNAS mendirikan Rumah Kemas bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Rumah Kemas merupakan fasilitas perbaikan kemasan dan tempat kemas otomatis yang diharapkan dapat menjadi pusat informasi dan pelayanan kemasan bagi UMKM, yang dapat membantu UMKM memecahkan permasalahan kemasan yang dihadapinya, menjadi unit konsultasi mengenai kemasan dan

IIGF, in collaboration with BAZNAS, formed a Packaging House for MSME entrepreneurs at Maros Regency, South Sulawesi. Packaging House is an automatic packaging and repair facility that shall be a packaging information and service center for MSMEs, assisting MSMEs in solving packaging problems they face, being a consulting place regarding packaging, and being a packaging service place accessible to MSME entrepreneurs, and

menjadi tempat pelayanan pengemasan yang dapat diakses oleh pelaku UMKM serta dapat menyediakan kemasan sesuai dengan yang diperlukan. Dalam pelaksanaan program pembangunan Rumah Kemas ini, PT PII dan BAZNAS menyasar 50 pelaku UMKM.

Adapun target dan sasaran program ini adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan standar kualitas produk yang lebih higienis dan sesuai standar permintaan pasar
- Menyediakan sarana pembinaan khusus di bidang pengemasan
- Menyediakan berbagai layanan dan fasilitas serta informasi terkait kemasan produk agar para pelaku usaha UMKM dapat meningkatkan mutu, penampilan, nilai jual dan daya saing produknya
- Meningkatkan permintaan pasar atas produk UMKM binaan BAZNAS tidak hanya pasar lokal, tapi bisa masuk pada pasar ekspor.

providing packaging as needed. In implementing this Packaging House construction program, IIGF and BAZNAS targeted 50 MSME entrepreneurs.

The program's targets and objectives are as follows:
- Improving product quality standards that are more hygienic and in accordance with market demand standards
- Providing specialized coaching facilities in the packaging sector
- Providing various services and facilities as well as information related to product packaging so that MSME entrepreneurs can improve the quality, appearance, selling value, and competitiveness of their products.
- Increasing market demand for BAZNAS-assisted MSME products, not only in the domestic market but also in the export market.

Sektor Lingkungan
Environmental

Selama tahun 2024, Perseroan telah menyalurkan anggaran sebesar Rp810,5 Juta yang diperuntukkan bagi pelaksanaan TJSL pada sektor Lingkungan sebanyak 6 program. Program TJSL Unggulan pada Sektor Lingkungan tahun 2024 diantaranya:

In 2024, the Company disbursed Rp810.5 million of CSR budget for the Environmental sector consisting of 6 programs. Flagship TJSL Programs in the Environmental Sector in 2024 include:

1. Program WE CARE (*Waste Management for Circular Economy*)
WE CARE (Waste Management for Circular Economy) Program

Program pengelolaan sampah yang berfokus pada optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan menekankan pada 5 aspek persampahan di TPST Dieng *Waste Management and Treatment* (Dewanata) yang berlokasi di desa wisata Dieng Kulon, Banjarnegara. Pelaksanaan program ini mencakup; studi pendahuluan yang meliputi *baseline* studi terkait 5 aspek pengelolaan sampah (peraturan, kelembagaan, teknis operasional, keuangan, dan partisipasi masyarakat), pendampingan yang mencakup peningkatan kapasitas pengelola TPST yang disertai asistensi dan audiensi pemangku kepentingan, serta modifikasi sarana prasarana pendukung.

Waste management program focuses on optimizing 5 aspects of responsible waste management via TPST Dewanata. TPST Dieng Waste Management and Treatment (Dewanata) is a waste management facility located in Dieng Kulon Village. The program covers preliminary studies, i.e., baseline studies related to 5 waste management aspects (regulations, institutions, technical operations, finance, and community participation), assistance, i.e., capacity building for TPST managers accompanied by assistance and stakeholder hearings, and modification of supporting infrastructure.

2. Program Penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu

Serayu Watershed Restoration Program

Program pemberdayaan berbasis lingkungan penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu dalam bentuk program sinergi TJSL *Special Mission Vehicles* (SMV) Kementerian Keuangan tahun 2024. Ruang lingkup PT PII pada program TJSL SMV Penyelamatan DAS Serayu ini meliputi bantuan *chopper* untuk 12 Desa dan program pengelolaan kambing perah di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelamatan lingkungan dengan pendekatan ekonomi berkelanjutan.

An environment-based empowerment program to conserve Serayu Watershed (DAS) in the form of a synergy CSR of the Special Mission Vehicles (SMV) of the Ministry of Finance in 2024. IIGF's scope in the CSR SMV Serayu Watershed Recovery program includes providing chopper for 12 villages and a dairy goat management program in Sumberejo Village, Batur District, Banjarnegara Regency. This program aims to increase community awareness of the importance of saving the environment with a sustainable economic approach.

3. Program Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat melalui Budidaya Udang Berkelanjutan Tahap 2

Community-based Mangrove Forest Management Program via Sustainable Shrimp Farming Phase 2

Program peningkatan kapasitas petambak dan masyarakat Kampung Pegat Batumbuk dalam hal budidaya udang berkelanjutan dan restorasi mangrove yang berkontribusi terhadap upaya melestarikan sumber penghidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan tambak. Dalam pelaksanaan tahap kedua ini, program dilakukan dengan beberapa tahapan secara umum seperti; operasional budidaya dimulai dari persiapan lahan hingga pasca panen, penerapan sekolah lapang petambak, redesain tambak dan teknis CBEMR (*Community Based Ecological Mangrove Rehabilitation*), dan pertemuan sekolah lapang.

A program to increase the capacity of farmers and the community of Pegat Batumbuk Village for sustainable shrimp farming and mangrove restoration that contributes to efforts to preserve the livelihoods of coastal communities, especially fishermen. The program's second phase will be implemented in several stages, such as: cultivation operations from land preparation to post-harvest, conducting farmer field schools, pond redesign, CBEMR (Community Based Ecological Mangrove Rehabilitation) techniques, and field school meetings.

4. Program Konservasi Alam Mangrove Jakarta Utara

North Jakarta Mangrove Nature Conservation Program

PT PII melaksanakan program penanaman 1.000 bibit pohon Mangrove di Kawasan Konservasi Alam Mangrove Angke Kapuk, Jakarta Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Perseroan mendukung konservasi mangrove sebagai pelindung pantai, penyerap karbon, dan habitat biota yang bernilai ekonomis, seperti ikan, kepiting, dan udang.

IIGF planted 1,000 mangrove tree seedlings at Angke Kapuk Mangrove Nature Conservation, North Jakarta. This activity is part of the Company's efforts to support mangrove conservation as a coastal protection, carbon sink, and habitat for economically valuable biota, such as fish, crabs, and shrimp.

Sektor Kesehatan
Health

Selama tahun 2024, Perseroan telah menyalurkan anggaran sebesar Rp718 Juta yang diperuntukkan bagi pelaksanaan TJSL pada sektor kesehatan sebanyak 6 (enam) program. Program TJSL unggulan pada sektor Kesehatan tahun 2024 diantaranya:

In 2024, the Company has disbursed Rp718 million for the CSR in the health sector consisting of six (6) programs. Flagship CSR Programs in the Health Sector in 2024 include:

1. Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bergizi kepada Balita, Ibu Hamil, dan Lansia di Bandar Lampung
Additional Nutritious Food Provision (PMT) Program for Young Children, Pregnant Women and Elderlies in Bandar Lampung

PT PII berkomitmen untuk menekan angka *stunting* dengan menyelenggarakan program pemberian makanan siap saji berbahan pangan lokal, yaitu makanan yang mengandung kaya zat gizi berupa sumber karbohidrat, sumber protein hewani, maupun protein nabati, disertai dengan kegiatan edukasi. Bantuan pemberian makanan tambahan (PMT) dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Program PMT bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi dengan menyediakan makanan bergizi bagi balita, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya guna mencegah malnutrisi dan meningkatkan daya tahan tubuh.

IIGF is committed to reducing stunting rates by organising a program to provide ready-to-eat meals made from local foods, i.e., foods rich in nutrients in the form of carbohydrate, animal protein, and vegetable protein, accompanied by educational activities. Supplementary feeding programs (PMT) and the clean and healthy behaviors (PHBS) are important steps in improving public health, especially for children and pregnant women. The PMT program aims to meet nutritional needs by providing nutritious food to young children, pregnant women, and other vulnerable groups, to prevent malnutrition and increase stamina.

2. Program Pemeriksaan Gigi untuk Pelajar di Bekasi
Dental Check-up Program for Students in Bekasi

PT PII menyelenggarakan program CSR Kesehatan yaitu Program Pemeriksaan gigi untuk pelajar di Bekasi. Program ini diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesehatan gigi dan mulut Pelajar di kota Bekasi.
2. Menurunkan risiko penyakit kronis gigi dan mulut Pelajar dengan pemeriksaan kesehatan dini
3. Mendukung pemerintah untuk mengembalikan kesehatan gigi pelajar pasca pandemic Covid-19
4. Program ini telah memberikan manfaat kepada 4.000 anak-anak pelajar di 8 sekolah tingkat SD yang tersebar di Bekasi Barat, Bekasi Timur, dan Bekasi Selatan.

IIGF organized a CSR Health program, i.e., the Dental Check-up Program for students in Bekasi. This program's objectives were as follows:

1. To improve the oral health of students in Bekasi.
2. To reduce the risk of chronic dental and oral diseases of students with early health checks.
3. To support the Government to restore students' dental health after the COVID-19 pandemic
4. This program has benefited 4,000 students in 8 elementary schools at West Bekasi, East Bekasi, and South Bekasi.

3. Program Penyediaan Air Bersih untuk Mitigasi Bencana Kekeringan dan Dampak Banjir Rob melalui Instalasi Pemanenan Air Hujan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah

Clean Water Supply Program for Drought Disaster Mitigation and Rob Flood by Installing Rainwater Harvesting at Demak Regency, Central Java

PT PII mendukung pemanfaatan air hujan menggunakan teknologi tepat guna dengan skala kecil maupun besar yang dapat membantu mengurangi dampak dari Bencana Hidrometeorologi yaitu bencana kekeringan dan banjir melalui inovasi baru yaitu pengolahan air dari Pemanen Air Hujan (PAH) menjadi air minum dilakukan sebagai inovasi lanjutan dari air hujan yang dapat dimanfaatkan. Total realisasi Instalasi PAH yang dibuat berada di 18 titik yang merupakan fasilitas umum dan rumah warga. Program ini diharapkan dapat membantu dalam menyediakan air bersih, meningkatkan mutu kesehatan lingkungan, dan membantu dalam kesejahteraan ekonomi.

IIGF supported the use of rainwater using proper technology on a small and large scale that can help reduce the impact of Hydrometeorological Disasters, i.e., drought and floods, using new advanced innovation, the water treatment from Rainwater Harvesting (PAH) into drinking water, to be utilized. PAH has been installed at 18 points of public facilities and residents' homes. This program shall provide clean water, improve the quality of environmental health, and encourage economic welfare.

4. Program Pelatihan Kader Sehat untuk Pengentasan *Stunting* di Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Healthy Cadre Training Program for Stunting Alleviation in Karawang Regency, West Java

Sebagai bagian dari keberlanjutan program Pelatihan dan Peningkatan Pemasaran Produk Petani Padi Lokal Karawang, PT PII juga melaksanakan program pengembangan kapasitas kader sehat dan pengentasan masalah *stunting* melalui Beras Nutrizinc di Karawang. Program ini dilaksanakan dalam dua tahapan program yakni:

1. Pelatihan kader sehat untuk Kader Posyandu di Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang sebanyak 390 orang.
2. Pendistribusian paket gizi untuk keluarga dengan balita, ibu hamil, dan orang beresiko kurang gizi sebanyak 3.550 orang dari 13 desa.

As part of the sustainability of the Karawang Rice Farmer Product Training and Marketing Improvement program, IIGF also implemented a healthy cadre capacity building program and alleviated stunting problems through Nutrizinc Rice in Karawang. This program is implemented in two stages:

1. Training of 390 healthy cadres for Posyandu Cadres in Klari District, Karawang Regency.
2. Distribution of nutrition packages to families with toddlers, pregnant women, and people at risk of malnutrition, to 3,550 people from 13 villages.

5. Program Jakarta Beraksi (Bergerak Atasi Stunting) di Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat

Jakarta Beraksi (Bergerak Atasi Stunting/Move Against Stunting) Program in Johar Baru Village, Central Jakarta

PT PII mendukung pengentasan masalah stunting di DKI Jakarta melalui program Jakarta Beraksi (Bergerak Atasi *Stunting*). Jakarta beraksi merupakan salah satu kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan gizi pada balita, termasuk balita dengan berat badan kurang (*underweight*), balita dengan panjang/tinggi badan kurang (*stunted*), dan balita.

IIGF supported the alleviation of stunting in DKI Jakarta through Jakarta Beraksi (Bergerak Atasi Stunting/Move Against Stunting) program. Jakarta Beraksi is one of the activities initiated by the DKI Jakarta Health Office to overcome nutritional problems in toddlers, including underweight toddlers, stunted toddlers, and toddlers.

6. Revitalisasi Akses Air Bersih dan Manajemen Pengelolaan Air Bersih berbasis Masyarakat di Desa Tliu, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur

Revitalisation of Clean Water Access and Community-based Clean Water Management at Tliu Village, South Central Timor, East Nusa Tenggara

PT PII mendukung revitalisasi sarana akses air bersih dan mendorong pembentukan lembaga pengelola air bersih berbasis masyarakat. PT PII bekerjasama dengan MPM Muhammadiyah melaksanakan beberapa tahapan kegiatan yang meliputi: sosialisasi program peningkatan air bersih dan manajemen pengelolaan air bersih berbasis masyarakat, pengadaan bak penampung utama air sumur Tliu berukuran 3 x 2 meter dibangun untuk menampung debit air dari sumur (sumber mata air), pengadaan instalasi pipa air bersih, dan *workshop* tata kelola kelembagaan air bersih berbasis masyarakat (Pamsimas).

Melalui program dukungan PT PII, sebanyak 41 KK telah memanfaatkan air bersih bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, namun juga untuk peningkatan budidaya tanaman padi, jagung, kacang, sayur mayur, dan budidaya ikan lele yang dapat menambah pendapatan ekonomi rumah tangga.

IIGF supports the revitalisation of clean water access facilities and encourages the establishment of community-based clean water management institutions. IIGF, in collaboration with MPM Muhammadiyah, carried out several activities: socialization of clean water improvement programs and community-based clean water management, procurement of the main reservoir of Tliu well water of 3 x 2 meters to accommodate water discharge from wells (springs), procurement of clean water pipe installations, and workshops on community-based clean water institutional governance (Pamsimas).

Through IIGF's support program, 41 households have clean water not only for daily needs, but also to increase the cultivation of rice, corn, beans, vegetables, and catfish cultivation, which can increase household economic income.

Sektor Sosial, Budaya, dan Keagamaan

Social, Cultural, and Religion

Selama tahun 2024, Perseroan telah menyalurkan anggaran sebesar Rp1,6 Miliar yang diperuntukkan bagi pelaksanaan TJSL pada sektor Sosial, Budaya, dan Keagamaan sebanyak 12 program. Program TJSL unggulan pada sektor Sosial, Budaya,dan keagamaan tahun 2024 diantaranya:

In 2024, the Company disbursed Rp1.6 Billion for CSR in the Social, Cultural, and Religion sector consisting of 11 programs. Flagship CSR Programs in the Social, Culture, and Religion sector in 2024 include:

1. Program Donasi Pasca Bencana Gempa Bumi Cianjur

Cianjur Earthquake Post-Disaster Donation Program

Program kolaborasi PT PII bersama PT IIF dan DJPK Kementerian Keuangan melalui donasi sosial kepada penyintas bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat yang dilaksanakan pada 9 Januari 2024. Donasi ini diberikan dalam bentuk penyaluran alat perlengkapan sekolah kepada siswa penyintas gempa Cianjur di Desa Cirumput, Desa Padaluyu, dan Desa Gasol.

IIGF's collaboration program with PT IIF and the DJPK of the Ministry of Finance via social donations to earthquake disaster survivors in Cianjur, West Java was held on 9 January 2024. This donation was provided in the form of distributing school supplies to students of Cianjur earthquake survivors in Cirumput Village, Padaluyu Village, and Gasol Village.

2. Program Berbagi Berkah Ramadan 1445 H

Ramadan Blessing Sharing Program 1445 H

Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445H/2024, PT PII menyelenggarakan Donasi Berbagi Berkah Bulan Ramadan melalui dukungan berbagai inisiatif sosial keagamaan, baik di lingkungan sekitar perusahaan maupun lingkungan sekitar tempat tinggal karyawan. Donasi berbagi berkah bulan Ramadan pada tahun 2024 diberikan kepada Yayasan/DKM/Pesantren/Komunitas keagamaan lainnya guna mendukung kegiatan keagamaan seperti santunan kepada panti asuhan, kaum dhuafa, pembangunan dan renovasi masjid dan mushola serta kegiatan sosial keagamaan lainnya, yang merupakan rekomendasi dari karyawan.

To welcome the holy month of Ramadan 1445H in 2024, IIGF organised a donation to share the Ramadan blessings by supporting various social and religious initiatives, both in the vicinity of the company and the environment around the employees' residence. The donations to share the Ramadan blessings in 2024 were provided to Foundations/DKM/Islamic Boarding Schools/other religious communities, to support religious activities, such as donations to orphanages, the poor, construction and renovation of mosques and prayer rooms, and other social religious activities, as recommended by the employees.

3. Program Berbagi Daging Kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1445 H

Qurban Sharing Program in Eid al-Adha 1445 H

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1445H / 2024 serta sebagai bentuk kepedulian sosial, PT PII menyalurkan 1.050 kaleng daging hewan kurban untuk untuk 210 Kartu Keluarga yang berada di Kota Manado, Lombok Barat, dan Jayapura.

To welcome Eid al-Adha 1445H in 2024, and as a form of social care, IIGF distributed 1,050 cans of sacrificial meat to 210 Households in Manado, West Lombok, and Jayapura.

4. *Employee Volunteer Program* Ramadan 2024

Employee Volunteer Program in Ramadan 2024

Dalam rangka berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan 1445H/2024M, sekaligus sebagai bagian dari kegiatan *Employee Volunteer Program*, PT PII bersama para karyawan menyelenggarakan kegiatan 'Waktu Berbagi PT PII' yang berlokasi di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3 – Tebet, Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3 - Duren Sawit, Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2 – Cengkareng. Dalam kegiatan tersebut, selain berbuka puasa bersama dengan sekitar 509 anak yatim dan lansia, PT PII juga menyalurkan donasi sembako dan alat tulis serta membantu renovasi sanitasi panti.

To share happiness in the month of Ramadan 1445H in 2024, as well as a part of the Employee Volunteer Program, IIGF, together with employees, held 'IIGF's Sharing Time' at Putra Utama 3 Orphanage – Tebet, Putra Utama 3 Orphanage – Duren Sawit, Budi Mulia 2 Tresna Werdha Nursing Home – Cengkareng. In addition to breaking the fast together with around 509 orphans and the elderly, in this activity, IIGF donated basic necessities and stationery and renovated the orphanage's sanitation.

5. Program Bantuan Tanggap Darurat Bencana Banjir Lahar Dingin di Sumatera Barat

Cold Lava Flood Disaster Emergency Response Program in West Sumatra

Sebagai wujud kepedulian kepada para penyintas bencana banjir lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, PT PII menyalurkan donasi sembako dan kebutuhan lainnya untuk 480 penerima manfaat dari 120 Kartu Keluarga yang berlokasi di Kecamatan Lima Kaum dan Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar pada 10 Juni 2024.

As a form of concern for the survivors of the cold lava flood in Tanah Datar Regency, West Sumatra, IIGF donated basic necessities and other needs to 480 beneficiaries from 120 Households located in Lima Kaum and Rambatan Sub-Districts, Tanah Datar Regency, on 10 June 2024.

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PUBLIC COMPLAINT HANDLING

PT PII menerapkan prinsip keterbukaan kepada masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan pengaduan atau kritik terkait hal-hal yang merugikan atau berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan TJSL Perseroan. Pengaduan dapat disampaikan langsung kepada Perseroan melalui *Call Center* di +62 21 5795 0550 atau dengan mengunjungi kantor pusat PT PII. Selain itu, pengaduan juga dapat disampaikan secara tertulis melalui email ke info@iigf.co.id menggunakan formulir keluhan yang tersedia di situs *web* PT PII, atau melalui saluran media sosial resmi Perseroan.

IIGF implements the transparency principle to the local community and other stakeholders in submitting complaints and criticisms if there are things that are detrimental or matters related to the Company's CSR activities. Complaints can be submitted directly to the Company by contacting the Call Center at +62 21 5795 0550 or visiting IIGF's head office. In addition, complaints can also be submitted in writing via email to info@iigf.co.id using the complaint form available on the IIGF's website, or via the Company's official social media channels.

Sepanjang tahun 2024, PT PII tidak menerima pengaduan dan sanksi terkait ketidakpatuhan terhadap masyarakat maupun terkait program TJSL yang dilaksanakan, serta tidak terdapat insiden pelanggaran terkait hak-hak masyarakat adat yang dilakukan Perseroan.

In 2024, IIGF did not receive complaints and sanctions related to non-compliance with the community or the CSR program implemented. There were no incidents of violations related to the rights of indigenous peoples by the Company.

KINERJA SOSIAL – ASPEK PENGELOLAAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

SOCIAL PERFORMANCE – EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT

Bagi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung keberlanjutan Perseroan. Dalam konteks keberlanjutan usaha, karyawan berperan sebagai penggerak utama operasional bisnis yang bertugas mewujudkan kinerja dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis Perseroan. Mengingat pentingnya peran ini, PT PII berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, memberikan kesempatan yang sama bagi setiap karyawan, serta terus mengembangkan kapasitas dan kompetensi karyawan secara berkelanjutan. Selain itu, Perseroan juga fokus pada pengembangan karir karyawan dan menciptakan suasana kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan kerja secara optimal.

For PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Human Resources (HR) is one of the main pillars in supporting the Company's sustainability. In terms of business sustainability, employees act as the main driver of business operations in charge of actualizing performance and achieving targets set in the Company's strategic goals. Given the importance of this role, IIGF is committed to creating an inclusive working environment, providing equal opportunities for every employee, and developing employee capacity and competence continuously. In addition, the Company focuses on employee career development and establishes a working atmosphere that supports optimal occupational health and safety.

PT PII mengelola karyawan dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam manajemen SDM yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, terutama Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara internal, PT PII telah menetapkan berbagai kebijakan yang mengatur pengelolaan SDM, antara lain:

1. Peraturan Perusahaan Tahun 2024-2026;
2. Kebijakan Pengelolaan Kegiatan Human Capital HCOD.002/KEB/V.01/2023;
3. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-006/DIR/ HR/06/2010 tentang Program Pelatihan Bagi Karyawan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagaimana diubah terakhir melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK-049/DIR/COS/ HR/1116 tentang Perubahan Keempat Surat Keputusan Direksi No. 006/DIR/HR/06/2010 tentang Program Pelatihan Karyawan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
4. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-037/IDR/HC/COS/HR/1215 tentang Fasilitas Kesehatan dan Asuransi Jiwa/Kecelakaan Karyawan sebagaimana diubah terakhir melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK-045/DIR/HC/1220 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor SK-037/IDR/HC/COS/HR/1215 tentang Fasilitas Kesehatan dan Asuransi Jiwa/Kecelakaan Karyawan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

IIGF manages employees by adopting best practices in HR management in accordance with prevailing labor regulations, especially Law No. 13 of 2003 on Limited Liability Companies, as amended by Law No. 11 of 2020 on Job Creation. Internally, IIGF has established various policies governing HR management, among others:

1. 2024-2026 Company Regulation;
2. Human Capital Activity Management Policy HCOD.002/KEB/V.01/2023;
3. The Board of Directors' Decree No. SK-006/DIR/HR/06/2010 on Training Programs for Employees of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), lastly amended by the Board of Directors' Decree No. SK-049/DIR/COS/HR/1116 on the Fourth Amendment to the Board of Directors' Decree No. 006/DIR/HR/06/2010 on Training Programs for Employees of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
4. The Board of Directors' Decree No. SK-037/IDR/HC/COS/HR/1215 on Health Benefits and Life/Accident Insurance for Employees, lastly amended by the Board of Directors' Decree No. SK-045/DIR/HC/1220 on the Amendment to the Board of Directors' Decree No. SK-037/IDR/HC/COS/HR/1215 on Health Benefits and Life/Accident Insurance for Employees of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Perseroan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan SDM dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku, serta mendukung kesejahteraan dan pengembangan karyawan untuk mencapai tujuan Perseroan secara berkelanjutan.

These policies implemented by the Company aim to ensure that every aspect of HR management is conducted transparently, fairly, and in accordance with prevailing legal standards, as well as support employee welfare and development to achieve the Company's objectives in a sustainable manner.

INISIATIF PROGRAM PENGELOLAAN SDM TAHUN 2024

HR MANAGEMENT PROGRAM INITIATIVES IN 2024

PT PII selalu mengutamakan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk pemenuhan hak-hak karyawan. Komitmen Perseroan dalam menghormati HAM tercermin dalam kebijakan yang secara tegas menolak segala bentuk praktik kerja paksa. Selain itu, PT PII juga berkomitmen untuk tidak mempekerjakan anak di bawah umur, menerapkan prinsip non-diskriminasi, mendukung inklusivitas dan keberagaman, menjamin kebebasan berserikat, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan layak bagi seluruh karyawan.

IIGF upholds respect for Human Rights (HAM), including the fulfillment of employee rights. The Company's commitment to respecting human rights is reflected in policies that explicitly reject all forms of forced labor practices. IIGF is also committed to employing labors that comply with the age requirements, having non-discrimination practices, conducting inclusiveness and diversity, ensuring freedom of association, and creating safe and decent working conditions for all employees.

1. **Kesetaraan Dalam Bekerja/Non- Diskriminasi**

   PT PII menyadari bahwa keberagaman karyawan sangat penting bagi inovasi dan pengambilan keputusan yang efektif. Untuk itu, Perseroan menitikberatkan pada aspek keberagaman, inklusi, dan kesempatan yang sama untuk setiap karyawan dalam berkontribusi menciptakan keberlanjutan Perseroan. Dimulai dari aspek rekrutmen, PT PII memberi kesempatan yang sama tanpa membedakan senioritas, gender, suku, agama, ras, dan antar golongan sehingga setiap rekrutmen yang diadakan oleh Perseroan dapat dipastikan selalu terbebas dari unsur diskriminasi.

   Pada tahun 2024, jumlah karyawan PT PII tercatat sebanyak 163 orang, dengan komposisi jumlah karyawan wanita sebanyak 77 orang dan karyawan laki-laki sebanyak 86 orang. Di tahun ini juga Perseroan telah merekrut karyawan baru sebanyak 6 (enam) orang yang berasal dari tenaga *pro-hire*.

1. **Equality at Work/Non-Discrimination**

   IIGF understands that employee diversity is essential for innovation and effective decision-making. Therefore, the Company focuses on aspects of diversity, inclusion, and equal opportunities for each employee to contribute to creating the Company's sustainability. Starting from recruitment, IIGF provides equal opportunities without distinguishing seniority, gender, ethnicity, religion, race, and intergroup so that the Company ensures every recruitment is always free from discrimination.

   In 2024, IIGF recorded to have 163 employees, with 77 female employees and 86 male employees. This year, the Company also recruited six (6) new employees from pro-hire personnel.

2. **Pekerja Anak dan Kerja Paksa**

   PT PII memastikan tidak mempekerjakan anak atau melakukan praktik kerja paksa dalam operasionalnya, sesuai dengan komitmen Perseroan terhadap hak asasi manusia. Kebijakan yang diterapkan mencakup usia minimal karyawan 18 tahun dan jam kerja 8 (delapan) jam sehari, dengan kompensasi untuk lembur sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan. Selama tahun pelaporan, tidak ditemukan kasus pekerja anak atau kerja paksa. Kebijakan ini mendukung kepatuhan

2. **Child Labor and Forced Labor**

   IIGF ensures that it does not employ children or practice forced labor in its operations, in accordance with the Company's commitment to human rights. Policies implemented include a minimum employee age of 18 years and working hours of eight (8) hours a day, with compensation for overtime as stated in the Company's Regulations. During the reporting year, there were no cases of child labor or forced labor. This policy supports compliance with labor and human rights regulations in Indonesia, including the

terhadap regulasi ketenagakerjaan dan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk Undang-Undang tentang Konvensi ILO terkait usia minimal kerja, penghapusan pekerja anak, dan penghapusan kerja paksa.

Law on ILO Conventions related to minimum working age, elimination of child labor, and elimination of forced labor.

3. Kesetaraan Dalam Pengembangan Karier

PT PII selalu memberikan kesempatan yang setara kepada setiap karyawan dan berupaya mendorong terciptanya keberagaman di semua tingkat organisasi. Perseroan mendukung setiap karyawan untuk mengembangkan karier dan mencapai posisi kepemimpinan tanpa diskriminasi. Kebijakan pengembangan karier di Perseroan didasarkan pada sistem penilaian kinerja yang mengacu pada pencapaian tujuan dan target individu, dengan menggunakan metode *Key Performance Indicators* (KPI) berbasis *Balanced Score Card* (BSC). Hasil dari penilaian ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk program pengembangan, pelatihan, penempatan karyawan, serta pemberian penghargaan, sanksi, remunerasi, dan perencanaan suksesi untuk karyawan dengan potensi tinggi menuju posisi manajerial. Pada tahun 2024, sebanyak 29 karyawan atau 18% dari total karyawan menerima promosi jabatan.

Untuk memastikan program pengembangan karier mencapai hasil yang optimal sesuai dengan target kinerja individu, divisi, dan Perseroan, PT PII melakukan *monitoring* melalui tinjauan tengah tahun dan akhir tahun terhadap pencapaian kinerja seluruh karyawan, serta mengoptimalkan budaya *coaching* melalui Divisi Human Capital and Organization Development sebagai bagian dari pengembangan SDM.

3. Equality in Career Development

IIGF provides equal opportunities to every employee and strives to encourage diversity at all levels of the organization. The Company supports every employee to develop careers and achieve leadership positions without discrimination. The Company's career development policy is based on employee performance assessment system with reference to the goals achievement and individual targets pursuant to the Balanced Score Card (BSC)-based Key Performance Indicators (KPI) method. The assessment results become the basis for decision-making for development programs, training, employee placement, as well as rewards, sanctions, remuneration, and succession planning for employees with high potential towards managerial positions. In 2024, 29 employees or 18% of the total employees were promoted.

IIGF conducts monitoring in mid-year and year-end reviews of all employees' performance achievements, and optimizes the coaching culture via the Human Capital and Organization Development Division as part of HR development to ensure that the career development program achieves optimal results in accordance with individual, divisional, and company performance targets.

4. Kesetaraan Dalam Pengembangan Kompetensi

Upaya kesetaraan juga terlihat dalam pengembangan kompetensi karyawan, di mana PT PII memastikan semua karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan. Program pengembangan kompetensi SDM dilaksanakan melalui pelatihan, *workshop*, dan peningkatan keterampilan, baik teknis maupun non-teknis, yang disesuaikan dengan *Competency Model* Perseroan.

Selama tahun 2024, PT PII telah melaksanakan program pelatihan dan pengembangan karyawan dengan jumlah jam pelatihan mencapai 6.447,62 jam dan rata-rata 39,74 jam per orang. Untuk total jumlah peserta pelatihan pada masing-masing program pelatihan dapat dilihat pada Laporan Tahunan ini pada Bab Aspek Pendukung Bisnis Bagian Pengembangan Kompetensi Karyawan.

4. Equality in Competency Development

The efforts to provide equality are also reflected in employee competency development, in which IIGF ensures that all employees have equal opportunities to participate in training. The HR competency development program is carried out through training, workshops, and capacity building, both technical and non-technical, which are adjusted to the Company's Competency Model.

In 2024, IIGF provided employee training and development programs with a total of 6,447.62 training hours and an average of 39.74 hours per person. The total training participants in each training program can be referred to in this Annual Report in the chapter Business Support Aspects, section Employee Competency Development.

5. Remunerasi dan Kesejahteraan Karyawan

PT PII berkomitmen untuk menerapkan praktik ketenagakerjaan yang terbaik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal pemberian remunerasi kepada karyawan. Remunerasi diberikan berdasarkan klasifikasi jabatan, masa kerja, beban kerja, lokasi, dan prestasi individu, tanpa diskriminasi gender. Oleh karena itu, rasio remunerasi antara karyawan perempuan dan laki-laki pada posisi yang sama adalah 1:1.

PT PII memastikan bahwa upah terendah untuk karyawan yang baru direkrut telah memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah operasi Perseroan. Pada tahun 2024, upah terendah untuk karyawan baru adalah Rp6.400.0000, yang lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, Perseroan juga memberikan tunjangan bagi karyawan, seperti tunjangan jabatan, perumahan, komunikasi, transportasi, keagamaan, dan lain-lain, serta benefit berupa pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Sebagai bagian dari bentuk remunerasi lainnya, PT PII memberikan hak cuti melahirkan selama 90 hari bagi karyawan perempuan yang akan melahirkan, serta memberikan kelonggaran bagi karyawan pria untuk mendampingi pasangan mereka selama proses melahirkan dengan cuti selama 5 (lima) hari. Sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 5 (lima) karyawan perempuan dan 1 (satu) karyawan pria memanfaatkan hak cuti ini, dan seluruhnya (100%) kembali bekerja dan diterima kembali setelah masa cuti berakhir.

Untuk karyawan dengan status magang, PT PII memberikan remunerasi berupa bantuan uang saku sebesar Rp150.000 per hari dan uang makan sebesar Rp30.000 per hari. Remunerasi ini diberikan kepada peserta magang dengan syarat menyertakan bukti pendukung berupa formulir dan absensi kehadiran. Pemberian remunerasi untuk peserta magang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

6. Hubungan Industrial

PT PII berkomitmen untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Komitmen ini diwujudkan melalui pengaturan hubungan antara Perseroan dan karyawan yang tercermin dalam Peraturan Perusahaan Tahun 2022-2024. Peraturan

5. Employee Remuneration and Welfare

IIGF is committed to implementing the best labor practices in accordance with prevailing laws and regulations, including in the provision of employee remuneration. Remuneration is provided based on position classification, length of service, workload, location, and individual achievement, without gender discrimination. Therefore, the remuneration ratio between female and male employees in the same position is 1:1.

IIGF ensures that the lowest wage of newly recruited designation employees fulfills the prevailing Minimum Wage provisions in the area where the Company operates. In 2024, the lowest wage for new employees is Rp6,400,000, which is higher than the minimum wage set by the government. In addition, the Company also provides benefits to employees such as allowances for position level, housing, communication, transportation, religious holiday, etc., as well as other benefits in the form of regular medical check-up.

As part of other forms of remuneration, IIGF provides 90 days maternity leave for female employees who will give birth, and provides leeway for male employees to accompany their spouses during the childbirth process with five (5) days paternity leave. In 2024, five (5) female employees exercised their rights to maternity leave, and one (1) male employee exercised his rights to paternity leave, all of whom (100%) returned to work and were accepted back by the Company after the leave period ended.

In terms of interns, IIGF provides remuneration in the form of pocket money assistance of Rp150,000 per day and meal allowance of Rp30,000 per day. This remuneration is provided to the interns subject to supporting evidence in the form of completed forms and attendance. The provision of remuneration for internship is in accordance with the Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2020 on the Domestic Apprenticeship.

6. Industrial Relation

IIGF is committed to creating harmonious industrial relations and in accordance with prevailing regulations. This commitment is actualized through the regulation of the relationship between the Company and employees, as reflected in the 2022-2024 Company Regulation. This

ini menjadi pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, serta prosedur yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak dalam menjaga hubungan yang baik dan produktif.

Hingga akhir tahun 2024, belum terdapat organisasi serikat pekerja di lingkungan PT PII. Meskipun demikian, Perseroan tetap membuka ruang bagi karyawan untuk menyampaikan aspirasi dan menyelesaikan permasalahan perburuhan secara langsung. Karyawan dapat mengakses berbagai media komunikasi internal yang disediakan oleh Perseroan, seperti saluran pengaduan atau forum diskusi, untuk menyampaikan permasalahan atau pendapat setiap karyawan. Dengan demikian, PT PII memastikan bahwa setiap isu yang timbul dapat diatasi dengan cara yang transparan dan konstruktif, tanpa mengabaikan prinsip keterbukaan dan dialog yang positif antara Perseroan dan karyawan.

regulation is a clear guideline regarding rights, obligations, and procedures that shall be complied with by both parties in maintaining a good and productive relationship.

As of the end of 2024, IIGF has no trade union. Nevertheless, the Company provides open space for employees to convey their aspirations and resolve labor issues directly. Employees can access various internal communication media provided by the Company, such as complaint channels or discussion forums, to convey problems or opinions. Thus, IIGF ensures that any issues that arise can be resolved transparently and constructively, without ignoring the principle of openness and positive dialog between the Company and employees.

7. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Karyawan

PT PII memprioritaskan keselamatan dan kesehatan karyawan serta berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat guna mendukung kelancaran operasional perseroan. Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terus ditingkatkan untuk memastikan terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Perseroan telah menetapkan kebijakan dan strategi untuk melindungi serta menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di area kerja, dengan tujuan mencapai target kecelakaan nihil (*zero accident*) di lingkungan kerja.

Sebagai bagian dari program pengelolaan kesehatan karyawan, PT PII menyediakan berbagai fasilitas kesehatan, termasuk akses kepada dokter yang dapat dihubungi karyawan untuk penanganan medis segera, baik untuk karyawan itu sendiri maupun anggota keluarga mereka. Selain menyediakan ruang olahraga yang dilengkapi dengan peralatan seperti *treadmill* dan alat angkat beban untuk mendukung peningkatan kesehatan karyawan, Divisi Human Capital and Organization Development melaksanakan berbagai kegiatan olahraga di lingkungan Perseroan, seperti yoga, *hiking*, zumba, *Burn Your Calories, pound fit*, badminton, basket, *mini soccer*, tenis lapangan, dan golf, dengan seluruh biaya peralatan dan sewa lapangan ditanggung oleh Perseroan. PT PII juga juga menyelenggarakan *Medical Checkup* tahunan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi.

7. Employee Occupational Health and Safety (OHS)

IIGF prioritizes employee health and safety, and strives to provide a healthy and safe working environment to support the Company's smooth operations. The Occupational Health and Safety (OHS) culture keeps being improved to ensure a safe, healthy, and productive working environment. The Company established policies and strategies to protect and ensure the security and safety of every employee and other people in the workplace, to achieve zero accident targets in the working environment.

As part of the employee health management program, IIGF provides various health facilities, including access to doctors that employees can contact for immediate medical treatment, for the employees themselves and their family members. In addition to providing an exercise room equipped with equipment such as treadmills and weights to support employee health improvement, the Human Capital and Organization Development Division conducts various sports within the Company, such as yoga, hiking, zumba, Burn Your Calories, pound fit, badminton, basketball, mini soccer, tennis court, and golf, with all equipment and court rental costs borne by the Company. IIGF also organizes an annual Medical Checkup, as stated in the Board of Directors' Decree.

Sebagai bagian dari implementasi K3, PT PII juga memperbarui SOP Tanggap Darurat menjadi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha yang lebih komprehensif, yang mencakup identifikasi risiko, perencanaan bencana, penanganan darurat, dan pemulihan pasca-bencana. Inisiatif ini menunjukkan komitmen Perseroan dalam menjaga kesejahteraan karyawan dan menghadapi tantangan secara efektif, serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. PT PII mengapresiasi dukungan yang berkelanjutan dari semua pihak terkait dan meyakini bahwa upaya-upaya tersebut membawa dampak positif bagi ekosistem kerja Perseroan.

Further, IIGF has refined its Emergency Response SOP into a more comprehensive Business Continuity Management System, covering risk identification, disaster planning, emergency handling, and post-disaster recovery. These initiatives emphasize the Company's commitment to protecting employees' welfare and dealing with challenges effectively, supporting the creation of a safe, healthy, and productive working environment. IIGF appreciates the continued support of all stakeholders and believes that these efforts have a positive impact on the Company's work ecosystem.

PENANGANAN PENGADUAN PEGAWAI
EMPLOYEE COMPLAINT MANAGEMENT

PT PII menyediakan saluran pengaduan bagi karyawan sebagai tempat untuk menyampaikan keluhan, masukan, atau saran terkait berbagai aspek operasional Perseroan. Setiap karyawan dapat mengajukan pengaduan langsung kepada atasan mereka untuk segera ditindaklanjuti. Selain itu, karyawan juga dapat menggunakan saluran pengaduan resmi yang tersedia untuk menyampaikan masalah atau keluhan mereka.

IIGF provides a complaint facility to employees as a forum for submitting complaints, feedback, or suggestions related to various aspects of the Company's operations. Each employee can submit a complaint directly to their supervisor for immediate follow-up. In addition, employees can also use the official complaint channels available to convey their problems or complaints.

Pada tahun 2024, tercatat tidak terdapat pengaduan yang berindikasi pelanggaran terhadap pengelolaan ketenagakerjaan yang dilakukan, sehingga Perseroan tidak mendapatkan denda ataupun sanksi atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan/atau peraturan terkait pengelolaan ketenagakerjaan.

In 2024, there were no complaints indicating any violations of employment management. Therefore, the Company did not receive fines or sanctions for non-compliance with laws and/or regulations related to employment management.

KINERJA SOSIAL - PENINGKATAN LAYANAN KEPADA PELANGGAN

SOCIAL PERFORMANCE - SERVICE IMPROVEMENT TO CUSTOMERS

Pelanggan merupakan salah satu pemangku kepentingan utama bagi PT PII, yang mendorong Perseroan untuk terus memberikan produk dan layanan terbaik serta setara kepada seluruh pelanggan. Sebagai bagian dari komitmennya, PT PII berfokus pada pengembangan dan inovasi produk serta layanan secara berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini, PT PII telah memberikan penjaminan kepada 22 kategori sektor untuk mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur Indonesia. Sejalan dengan itu, PT PII berupaya menghadirkan produk dan layanan yang tidak hanya memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, tetapi juga berorientasi pada pelestarian lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui layanan terbaik yang memastikan kualitas, keberlanjutan, serta dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Lebih lanjut, dalam memberikan layanan kepada pelanggan, PT PII berupaya memenuhi kebutuhan dari berbagai segmen pelanggan sesuai dengan perkembangan lini usaha dan portofolio proyek yang didukung oleh Perseroan. Upaya utama PT PII adalah memberikan pelayanan terbaik yang bermanfaat bagi setiap pelanggan secara profesional, baik dalam sikap maupun respon yang diberikan oleh Perseroan dan segenap jajarannya. Sejalan dengan komitmen tersebut, PT PII memastikan bahwa tidak ada produk dan layanan yang ditarik kembali, sebagai bagian dari jaminan kualitas dan kepuasan pelanggan yang menjadi prioritas utama Perseroan.

Customers are one of IIGF's main stakeholders, which encourages the Company to strive to provide the best and equal products and services to customers. As part of its commitment, IIGF focuses on continuous development and innovation of products and services to support the achievement of sustainable development goals.

To date, IIGF has provided guarantees to 22 sector categories to accelerate Indonesia's infrastructure development. In line with that, IIGF strives to provide products and services that not only provide social benefits to society, but are also oriented towards environmental preservation. This is realized through the best services that ensure quality, sustainability, and a positive impact on the environment and society.

Further, in providing services to customers, IIGF strives to fulfill the needs of various customer segments, in accordance with the development of business lines and project portfolios supported by the Company. The most vital part is to provide the best and most useful service for each customer in a professional manner, both in the attitude and response given by the Company and all its staff. In line with this commitment, IIGF ensures that no products and services are recalled, as part of the quality assurance and customer satisfaction, which is the Company's top priority.

KESETARAAN PEMENUHAN KUALITAS LAYANAN KEPADA PELANGGAN

EQUITABLE FULFILLMENT OF SERVICE QUALITY TO CUSTOMERS

Komitmen PT PII untuk memberikan kesetaraan pemenuhan kualitas layanan kepada pelanggan tercermin dalam upaya Perseroan untuk selalu memastikan bahwa setiap pelanggan, tanpa terkecuali, menerima layanan yang cepat, efisien, dan profesional. PT PII berfokus pada penerapan standar layanan yang konsisten dan transparansi dalam setiap proses. Selain itu, Perseroan juga berkomitmen untuk mendengarkan dan menanggapi umpan balik pelanggan secara proaktif, guna terus melakukan perbaikan berkelanjutan dan memastikan bahwa layanan yang diberikan selalu memenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggan. Melalui komitmen ini, PT PII

The commitment of IIGF to providing equitable fulfilment of service quality to customers is reflected in the Company's efforts to ensure that every customer, without exception, receives prompt, efficient, and professional services. IIGF focuses on implementing consistent service standards and transparency in every process. In addition, the Company is committed to listening and responding proactively to customer feedback, to make continuous improvements and ensure that the services provided always meet or even exceed customer expectations. Through this commitment, IIGF strives to build long-term mutually beneficial relationships with each

berupaya untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan setiap pelanggan, memperkuat kepercayaan, dan mendukung keberhasilan bersama dalam mencapai tujuan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

customer, strengthen trust, and support mutual success, to achieve sustainable infrastructure development.

INISIATIF PROGRAM PENINGKATAN KEPUASAN *STAKEHOLDERS*

STAKEHOLDERS SATISFACTION IMPROVEMENT PROGRAM

Untuk memastikan tingkat kepuasan *stakeholders* tetap berada pada level "*Satisfactory*", PT PII telah mengimplementasikan berbagai inisiatif program peningkatan kepuasan *stakeholders* yang dirancang secara khusus untuk merespons kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Selain berfokus pada peningkatan komunikasi, transparansi, dan kualitas layanan yang diberikan, pada tahun 2024 Perseroan juga melaksanakan berbagai program strategis untuk memenuhi ekspektasi *stakeholders*, dengan terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan di industri infrastruktur.

IIGF has implemented various stakeholder satisfaction improvement program initiatives specifically designed to respond to the stakeholders' needs and expectations to ensure that the level of stakeholder satisfaction remains at the "Satisfactory" level. In addition to focusing on improving communication, transparency, and quality of services provided, in 2024, the Company implemented various strategic programs to meet stakeholder expectations, by innovating and adjusting to the dynamics of needs and developments in the infrastructure industry.

TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

TRANSPARENCY OF PRODUCTS AND SERVICES INFORMATION

PT PII senantiasa berupaya untuk selalu memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan. Setiap pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi lengkap terkait produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perseroan melalui situs *web* yang beralamat di www.ptpii.co.id. Sejalan dengan itu, Perseroan juga menyediakan sarana/media yang dapat diakses oleh pelanggan atau pemangku kepentingan lainnya yang ingin mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dengan menghubungi Perseroan di +6221 57950550 atau melalui email Perseroan yang beralamat di info@iigf.co.id.

IIGF strives to provide clear, accurate, and transparent information. Every stakeholder can find complete information regarding the products and services offered by the Company via the website at www.ptpii.co.id. In line with that, the Company provides facilities/media that are accessible by customers or other stakeholders who want to obtain more comprehensive information, by contacting the Company at +6221 57950550 or through the Company's email address at info@iigf.co.id.

PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGAN
CUSTOMER COMPLAINT MANAGEMENT

Sebagai bagian dari upaya perlindungan pelanggan, Perseroan telah menyediakan saluran untuk menyampaikan keluhan yang dapat ditujukan kepada Divisi Corporate Secretary & Communication. Penyampaian keluhan, saran atau kritik dapat disampaikan melalui alamat pengaduan ke:

As part of the Customer Protection effort, the Company provides a channel to submit complaints, to be addressed to the Corporate Secretary & Communication Division. Complaints, suggestions, or criticisms can be submitted via the complaint media to:

PT PII | PENJAMINAN & INFRASTRUKTUR
Guarantee & Infrastructure

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Capital Place, 7-8 Floor Jl. Gatot Subroto
No.Kav 18, RT.6/RW.1, Kuningan Barat
Kecamatan Mampang Prapatan
Kota Jakarta Selatan

+62 21 5795 0550
info@iigf.co.id

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN
CUSTOMER SATISFACTION SURVEY

PT PII secara rutin melakukan survei kepuasan pelanggan, yaitu *stakeholders survey* kepada *vendor*/rekanan Perseroan, untuk memperoleh masukan terkait pengetahuan dan persepsi mereka terhadap kinerja Perseroan. Survei ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya PT PII untuk lebih memahami pandangan para pemangku kepentingan mengenai layanan yang diberikan dan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Melalui interaksi yang terstruktur ini, PT PII dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, mengukur tingkat kepuasan, serta terus meningkatkan kualitas produk dan layanan yang disediakan.

IIGF regularly conducts customer satisfaction surveys in the form of stakeholder surveys to the Company's vendors/partners, to obtain input regarding their knowledge and perception of the Company's performance. This survey is conducted as part of IIGF's efforts to better understand stakeholders' views on the services provided and the Company's overall performance. Through this structured interaction, IIGF can identify areas of improvement, assess satisfaction levels, and improve the overall quality of the products and services provided.

Pada tahun 2024, rata-rata persepsi kinerja PT PII di mata existing *stakeholder* sebesar 3,89 dan masuk dalam kategori "Teredukasi". Sementara itu rata-rata persepsi kinerja PT PII di mata potential *stakeholders* sebesar 4,62 atau masuk dalam kategori "Sangat Positif". Jika dirangkum, maka indeks pengetahuan dan persepsi kinerja dari para *stakeholders* baik *existing* maupun potensial PT PII adalah sebesar 4,25 dari skala 5 yang berada pada level "*Satisfactory*".

In 2024, the existing stakeholders assessed IIGF's performance at 3.89 or "Educated". Meanwhile, the potential stakeholders assessed IIGF's performance at 4.62 or "Very Positive". In summary, the knowledge index and perceived performance of IIGF from existing and potential stakeholders is 4.26 out of 5, or "Satisfactory".

Mendukung Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan melalui Produk dan Layanan Ramah Lingkungan

Supporting Sustainable Infrastructure Development through Environmentally Friendly Products and Services

Sebagai bagian dari SMV Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT PII berkomitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. PT PII aktif berperan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan fokus pada pengembangan portofolio produk dan layanan ramah lingkungan, termasuk Kegiatan Usaha yang Berwawasan Lingkungan (KUBL), guna mempercepat proyek-proyek yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Hingga tahun 2024, PT PII telah melakukan penjaminan terhadap sejumlah proyek energi terbarukan dan konservasi energi, termasuk pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, akses energi terbarukan, stasiun pengisian kendaraan listrik, serta penerangan jalan umum yang ramah lingkungan. Proyek-proyek seperti Proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) Madiun dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lombok Barat, yang dilaksanakan dengan skema KPBU, berfokus pada efisiensi energi dengan penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi, yang berpotensi menurunkan konsumsi energi listrik secara signifikan.

Selain itu, PT PII juga mendukung kebijakan transisi energi dengan penjaminan proyek pembangkit listrik tenaga air dan mini hidro (*Hydro Power Programme*) di berbagai provinsi, serta proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Penjaminan ini mendukung pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan. PT PII juga turut berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur berbasis energi hijau melalui proyek-proyek seperti *Sustainable and Reliable Energy Access Program* (SREAP) yang meliputi pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan penguatan bisnis *rooftop solar photo voltaic* (*solar* PV). Secara keseluruhan, nilai cakupan penjaminan PT PII untuk proyek-proyek berwawasan lingkungan hingga tahun 2024 mencapai Rp78,93 triliun.

Sebagai bagian dari komitmennya terhadap penerapan keuangan berkelanjutan, PT PII juga mendukung proyek-proyek dengan konsep *green building* dan *green airport*, seperti Proyek Pengembangan Bandara Singkawang dan Pembangunan Rumah Sakit Universitas Padjadjaran (RS UNPAD), yang dibangun dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG) Kementerian Keuangan.

PT PII meyakini bahwa melalui penjaminan proyek-proyek infrastruktur yang inovatif, serta mengutamakan kesejahteraan sosial dan ramah lingkungan, tidak hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menciptakan dasar yang kokoh untuk masa depan yang lebih hijau, inklusif, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia.

As a part of the SMVs of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, IIGF is committed to supporting sustainable infrastructure development and equitable development throughout Indonesia. IIGF plays an active role in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), with a focus on developing a portfolio of environmentally friendly products and services, including Green Business Activities (KUBL), to accelerate sustainable and environmentally friendly projects.

As of 2024, IIGF has guaranteed several renewable energy and energy conservation projects, including hydropower, geothermal, renewable energy access, electric vehicle charging stations, and environmentally friendly public street lighting. Various projects, such as the Madiun Street Lighting (APJ) and West Lombok Public Street Lighting (PJU) Projects, which are implemented under the PPP scheme, focus on energy efficiency by replacing conventional lamps with energy-efficient LED lamps, with the potential to significantly reduce electricity consumption.

In addition, IIGF supports the energy transition policy by underwriting hydro and mini hydro power projects (Hydro Power Program) in various provinces, as well as geothermal power plant (GPP) development projects in Central Java and West Java. This guarantee supports the development of environmentally friendly renewable energy. IIGF also contributes to the development of green energy-based infrastructure through projects such as the Sustainable and Reliable Energy Access Program (SREAP) which covers the construction of Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU) and strengthening the rooftop solar photo voltaic (solar PV) business. Overall, in 2024, IIGF's guarantee coverage for green projects amounted to Rp78.93 trillion.

As part of its commitment to the sustainable finance implementation, IIGF supports projects with green building and green airport concepts, such as the Singkawang Airport Development Project and the Padjadjaran University Hospital Development (UNPAD Hospital), which were built by considering sustainability aspects and the Ministry of Finance's Environmental, Social, and Governance (ESG) standards.

IIGF understands that by guaranteeing innovative infrastructure projects that prioritize social welfare and are environmentally friendly, it shall not only support national economic growth but also create a strong foundation for a greener, more inclusive, and prosperous future for Indonesians.

Laporan Keuangan Audit 2024

2024 Audited Financial Statements

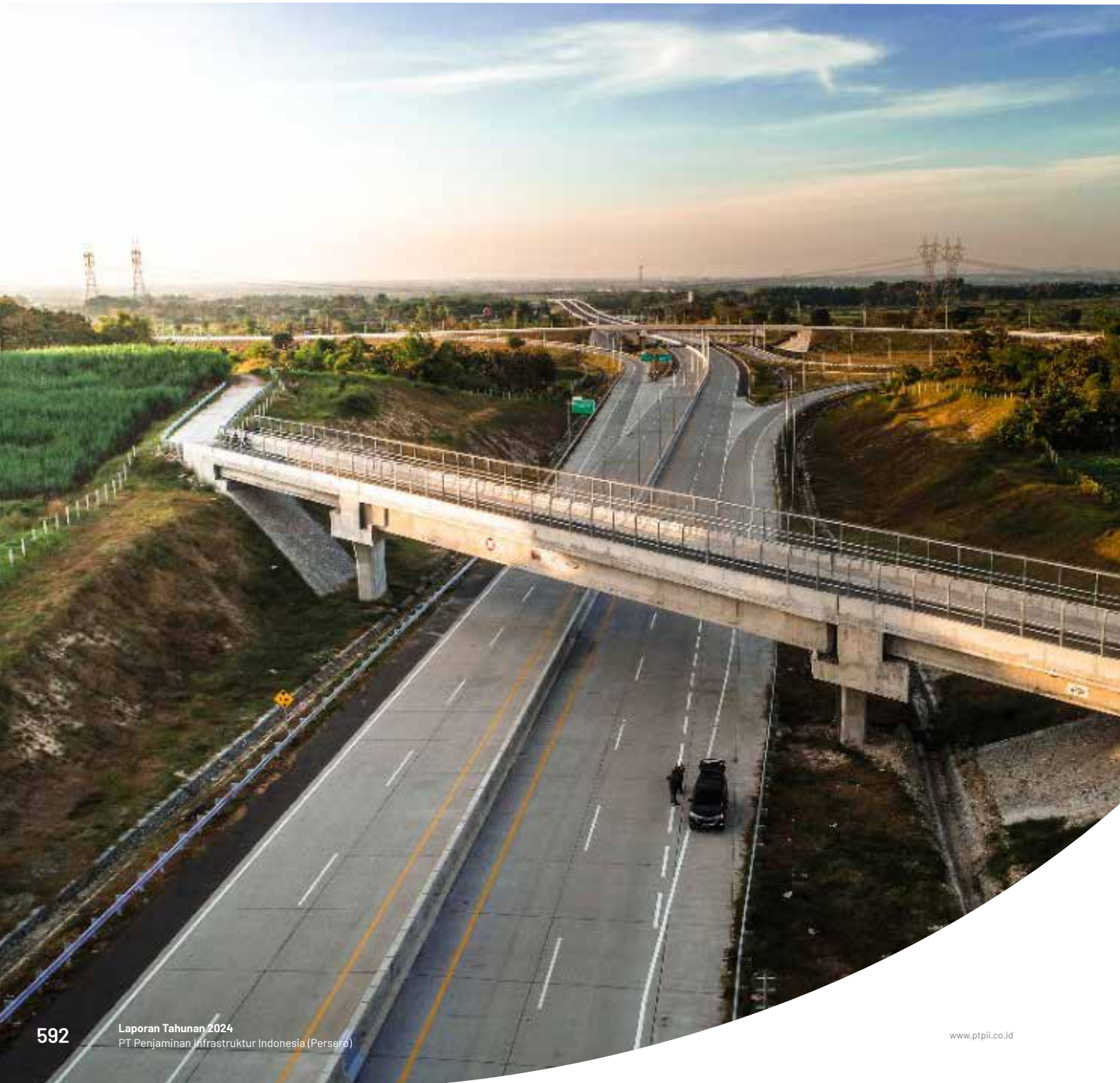

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

LAPORAN KEUANGAN/*FINANCIAL STATEMENTS*

31 DESEMBER/*DECEMBER* 2024

PT PII | PENJAMINAN & INFRASTRUKTUR
Guarantee & Infrastructure

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : M. Wahid Sutopo
   Alamat Kantor : Capital Place Office Tower, Lantai 7 dan 8, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710
   Alamat Rumah : Jalan Taman Wijaya Kusuma I No. 2-A, RT 009, RW 002, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan
   Nomor Telepon : 021- 5795 0550
   Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Donny Hamdani
   Alamat Kantor : Capital Place Office Tower, Lantai 7 dan 8, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710
   Alamat Rumah : Jl. Duren Sawit Blok K2/10 RT 012 RW 011, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur
   Nomor Telepon : 021- 5795 0550
   Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
2. laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. a. semua informasi dalam laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2024 AND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2024

We, the undersigned:

1. *Name* : *M. Wahid Sutopo*
   Office address : *Capital Place Office Tower, 7th & 8th Floor Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710*
   Residential address : *Jalan Taman Wijaya Kusuma I No. 2-A, RT 009, RW 002, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan*
   Telephone : *021- 5795 0550*
   Title : *President Director*
2. *Name* : *Donny Hamdani*
   Office address : *Capital Place Office Tower, 7th & 8th Floor Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710*
   Residential address : *Jl Duren Sawit Blok K2/10 RT 012 RW 011, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur*
   Telephone : *021- 5795 0550*
   Title : *Director of Finance*

declare that:

1. *we are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);*
2. *the financial statements of the PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. all information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);*
   b. the financial statements of the PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;
4. *we are responsible for the internal control system of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).*

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, 28 Februari/*February* 2025

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/
For and on behalf of the Board of Directors

M. Wahid Sutopo
Direktur Utama/
President Director

Donny Hamdani
Direktur Keuangan/
Finance Director

Address : Capital Place 7-8th Floor, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.18 Jakarta Selatan 12710 - Indonesia
Phone : +62 21 5795 0550 | Fax : +62 21 5795 0040 | Email : info@ilgf.co.id | Website : www.ilgf.co.id

pwc

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

We have audited the financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Company"), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at 31 December 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-315/KM.1/2024.

00198/2.1457/AU.1/09/1124-2/1/II/2025

pwc

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung kelidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.

00195/2.1457/AU.1/09/1124-2/1/II/2025

pwc

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

00198/2.1457/AU.1/09/1124-2/1/II/2025

pwc

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

JAKARTA,
28 Februari/*February* 2025

Jimmy Pangestu, S.E., CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.1124

00198/2.1457/AU.1/09/1124-2/1/II/2025

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 1 - *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
ASET				***ASSETS***
Kas dan setara kas	2,030,081,757	5	121,487,653	*Cash and cash equivalents*
Investasi	14,423,560,381	6	15,793,648,683	*Investments*
Piutang usaha – setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 57.688.580 (2023: Rp 18.775.000)	402,385,200	7	327,574,789	*Account receivables – net of allowance for impairment losses of Rp 57,688,580 (2023: Rp 18,775,000)*
Piutang lainnya	11,935,434		11,444,354	*Other receivables*
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	1,099,038		3,106,223	*Prepaid expenses and advances*
Aset tetap	9,619,207	8	13,550,832	*Fixed assets*
Aset hak-guna	28,615,680	9	45,313,785	*Right-of-use assets*
Aset takberwujud	4,923,545	10	4,287,126	*Intangible assets*
Beban tangguhan	2,837,247	11	4,333,808	*Deferred expenses*
Pajak dibayar dimuka	9,169,276	13a	5,030,281	*Prepaid income tax*
Aset pajak tangguhan	58,909,855	13d	70,902,886	*Deferred tax asset*
Uang jaminan yang dapat dikembalikan	5,385,039		5,369,039	*Refundable deposits*
JUMLAH ASET	16,988,521,659		16,406,049,459	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Utang usaha	6,731,077	12	14,044,779	*Account payables*
Utang pajak	1,531,600	13b	3,845,808	*Taxes payable*
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain	117,924,523	14	162,668,910	*Accrued expenses, provisions and other payables*
Pendapatan tangguhan	71,794,931	15	130,836,305	*Unearned income*
Liabilitas sewa pembiayaan	31,198,399	16	46,200,522	*Finance lease liabilities*
Pinjaman penerusan	54,586,445	17	55,126,686	*Two-step loans*
Liabilitas imbalan kerja	32,180,991	18	30,526,271	*Employee benefits obligation*
JUMLAH LIABILITAS	315,947,966		443,249,281	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - modal dasar, 20.000.000 lembar - ditempatkan dan disetor penuh 10.655.000 lembar, dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham	10,655,000,000	19	10,655,000,000	*Share capital - authorised, 20,000,000 shares - issued and paid 10,655,000 shares, with par value of Rp 1,000,000 (full amount) per share*
Laba belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	85,062,184		142,007,600	*Unrealised gain from financial assets at fair value through other comprehensive income*
Keuntungan aktuarial, setelah pajak	3,852,899		848,646	*Gain from actuarial, net of tax*
Saldo laba				*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya - cadangan wajib	306,270,126	21	264,478,126	*appropriated - statutory reserve*
Belum ditentukan penggunaannya	5,622,388,484		4,900,465,806	*Unappropriated*
JUMLAH EKUITAS	16,672,573,693		15,962,800,178	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	16,988,521,659		16,406,049,459	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 2 - *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
Pendapatan				***Revenues***
Pendapatan penjaminan	310,054,107	22	232,353,547	*Revenue from guarantee*
Pendapatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi	70,265,155	22	70,529,576	*Revenue from project preparation and transaction advisory*
Pendapatan pengelolaan dana	1,091,915,052	22	1,009,080,358	*Income from investments*
Pendapatan lainnya	14,696,272	22	6,042,076	*Other income*
Jumlah pendapatan	1,486,930,586		1,318,005,557	*Total revenues*
Beban usaha				***Operating expenses***
Beban pajak final	(158,158,364)	13c	(139,545,730)	*Final tax expense*
Umum dan administrasi	(128,552,881)	23	(127,058,918)	*General and administrative*
Penjaminan	(87,923,483)	23	(77,191,609)	*Guarantee*
Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi	(81,570,951)	23	(76,928,221)	*Project preparation and transaction advisory*
Pengembangan usaha	(38,665,474)	23	(35,617,112)	*Business development*
Kerugian penurunan nilai	(38,913,580)	7	(16,775,000)	*Impairment losses*
Beban bunga (termasuk beban bunga sewa pembiayaan)	(7,005,772)		(5,712,278)	*Interest expense (including finance lease interest)*
Penyusutan	(4,702,176)	8	(3,163,028)	*Depreciation*
Amortisasi	(1,963,944)	10	(2,145,325)	*Amortisation*
(Kerugian)/keuntungan kurs, bersih	166,542		(63,587)	*Foreign exchange (loss)/gain, net*
Penghasilan keuangan, kotor	1,986,883		1,428,073	*Finance income, gross*
Lain-lain	397,970		306,445	*Others*
Jumlah beban usaha	(544,905,230)		(482,466,290)	*Total operating expenses*
Laba sebelum pajak penghasilan	942,025,356		835,539,267	***Profit before income tax***
(Beban)/Manfaat pajak penghasilan	(11,145,678)	13c	281,887	(Expense)/*Income tax benefit*
Laba tahun berjalan	930,879,678		835,821,154	***Profit for the year***
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan:				***Other comprehensive income for the year:***
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will be reclassified subsequently to profit and loss:*
(Kerugian)/keuntungan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	(56,945,416)		121,403,022	*(Loss)/gain from financial assets at fair value through other comprehensive income for the year*
	(56,945,416)		121,403,022	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified subsequently to profit and loss:*
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja	3,851,606	18	(6,484,852)	*Remeasurement from post-employment benefits obligation*
Pajak penghasilan terkait	(847,353)	13d	1,426,667	*Related income tax*
	3,004,253		(5,058,185)	
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(53,941,163)		116,344,837	*Other comprehensive income/ for the year, net of tax*
Total laba komprehensif tahun berjalan	876,938,515		952,165,991	***Total comprehensive income for the year***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 3 - *Schedule*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham/ *Share capital*	Laba/(rugi) belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Unrealised gain/ (loss) from financial assets at fair value through other comprehensive income*	Keuntungan aktuarial, setelah pajak/ *Actuarial gain net of tax*	Saldo laba/*Retained earnings*		Jumlah/ *Total*	
					Ditentukan penggunaannya - cadangan wajib/ *Appropriated - statutory reserve*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo 1 Januari 2023		10,655,000,000	20,604,578	5,906,831	228,769,445	4,243,188,058	15,153,468,912	***Balance at 1 January 2023***
Pencadangan saldo laba	21	-	-	-	35,708,681	(35,708,681)	-	*Appropriation of retained earnings*
Penghasilan komprehensif tahun berjalan:								*Comprehensive income for the year:*
- Laba tahun berjalan		-	-	-	-	835,821,154	835,821,154	*Profit for the year -*
- Dividen	20	-	-	-	-	(142,834,725)	(142,834,725)	*Dividend -*
- Penghasilan komprehensif lain:								*Other comprehensive income: -*
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		-	121,403,022	-	-	-	121,403,022	*Financial assets at fair value through - other comprehensive income*
- Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak		-	-	(5,058,185)	-	-	(5,058,185)	*Remeasurement of post-employment - benefit liabilities, net of tax*
Saldo 31 Desember 2023		10,655,000,000	142,007,600	848,646	264,478,126	4,900,465,806	15,962,800,178	***Balance at 31 December 2023***
Pencadangan saldo laba	21	-	-	-	41,792,000	(41,792,000)	-	*Appropriation of retained earnings*
Penghasilan komprehensif tahun berjalan:								*Comprehensive income for the year:*
- Laba tahun berjalan		-	-	-	-	930,879,678	930,879,678	*Profit for the year -*
- Dividen	20	-	-	-	-	(167,165,000)	(167,165,000)	*Dividend -*
- Penghasilan komprehensif lain:								*Other comprehensive income: -*
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		-	(56,945,416)	-	-	-	(56,945,416)	*Financial assets at fair value through - other comprehensive income*
- Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja, setelah pajak		-	-	3,004,253	-	-	3,004,253	*Remeasurement of post-employment - benefit liabilities, net of tax*
Saldo 31 Desember 2024		10,655,000,000	85,062,184	3,852,899	306,270,126	5,622,388,484	16,672,573,693	***Balance at 31 December 2024***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 4 - *Schedule*

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
Arus kas dari aktivitas operasi				***Cash flows from operating activities***
Laba sebelum pajak penghasilan		942,025,356	835,539,267	*Profit before income tax*
Ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas:				*Add items not affecting cash flows:*
- Beban penyusutan	8	4,702,176	3,163,028	*Depreciation expense* -
- Beban kerugian penurunan nilai		38,913,580	16,775,000	*Impairment losses* -
- Beban amortisasi	10	1,963,944	2,145,325	*Amortisation expense* -
- Beban penyisihan imbalan kerja	18	7,958,143	6,056,779	*Expense from provision for employee benefits obligation* -
- Beban amortisasi aset hak guna	9	17,228,322	18,237,353	*Right-of-use assets amortisation expense* -
- Beban bunga sewa pembiayaan		3,078,519	1,784,503	*Finance lease interest expense* -
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		1,015,870,040	883,701,255	*Operating cash flows before changes in operating assets and liabilities*
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				*Changes in operating assets and liabilities*
(Kenaikan)/penurunan aset operasi:				*(Increase)/decrease in operating assets:*
- Piutang usaha		(113,723,991)	(49,629,330)	*Account receivables* -
- Piutang lainnya		(491,080)	(1,559,770)	*Other receivables* -
- Biaya dibayar dimuka dan uang muka		2,007,185	(281,385)	*Prepaid expenses and advances* -
- Beban tangguhan		1,496,561	1,329,583	*Deferred expenses* -
- Pajak dibayar dimuka		(4,138,995)	(3,015,026)	*Prepaid tax* -
(Penurunan)/kenaikan liabilitas operasi:				*(Decrease)/increase in operating liabilities:*
- Utang usaha		(7,313,702)	4,051,619	*Account payables* -
- Utang pajak		(2,314,208)	65,860	*Taxes payable* -
- Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain		(44,744,387)	26,999,729	*Accrued expenses, provisions and other payables* -
- Pembayaran manfaat imbalan kerja	18	(2,451,817)	(580,407)	*Payment of employee benefit* -
- Pendapatan tangguhan		(59,041,374)	(39,095,671)	*Unearned income* -
		(230,715,808)	(61,714,798)	
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		785,154,232	821,986,457	***Net cash flow provided from operating activities***
Arus kas dari aktivitas investasi				***Cash flows from investing activities***
Penempatan investasi		1,313,142,886	(664,081,825)	*Placement for investments*
Pembelian aset tetap dan aset tak berwujud	8,10	(3,370,914)	(12,781,007)	*Acquisition of fixed assets and intangible assets*
Penempatan uang jaminan yang dapat dikembalikan		(16,000)	(12,781,007)	*Refundable deposit*
Arus kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi		1,309,755,972	(676,862,832)	***Net cash flow provided from/(used in) investing activities***
Arus kas dari aktivitas pendanaan				***Cash flows from financing activities***
Pembayaran pinjaman penerusan	17	(540,241)	-	*Two-step loans payment*
Pembayaran dividen	20	(167,165,000)	(142,834,725)	*Dividend payment*
Pembayaran sewa	27	(18,610,859)	(15,107,615)	*Payment for lease*
Arus kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan		(186,316,100)	(157,942,340)	***Net cash flow (used in)/ provide from financing activities***
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas		1,908,594,104	(12,818,715)	***Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents***
Kas dan setara kas awal tahun		121,487,653	134,306,368	***Cash and cash equivalents at beginning of year***
Kas dan setara kas akhir tahun		2,030,081,757	121,487,653	***Cash and cash equivalents at end of year***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/3 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LLM No. 29 tanggal 30 Desember 2009. Anggaran Dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan dengan Akta Notaris Arry Supratno, S.H. No. 03 tanggal 2 September 2024. Selanjutnya, perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0250317 pada tanggal 10 September 2024.

Sesuai dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk:

a) Memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantees*) di bidang infrastruktur;
b) Memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantees*) dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah; dan
c) Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan pemerintah serta kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional baik pusat dan daerah.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Perusahaan dapat melakukan, antara lain:

a) Memberikan penjaminan kewajiban finansial Pemerintah dalam skema perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha ("KPBU") dalam proyek infrastruktur.
b) Memberikan penjaminan terhadap kewajiban finansial Pemerintah di bidang infrastruktur.
c) Memberikan penjaminan atas risiko gagal bayar Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") berdasarkan penugasan dan/atau ketentuan Menteri Keuangan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan lembaga keuangan, dan penerbitan surat utang/obligasi.

1. GENERAL

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Company") was established based on Notarial Deed of Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LLM No. 29 dated 30 December 2009. The Articles of Association were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decree No. AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010 dated 27 January 2010.

The Company's Articles of Association have been amended several times the latest amendment was in accordance with Notarial Deed of Arry Supratno, S.H. No. 03 dated 2 September 2024. Subsequently, the amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decree No. AHU-AH.01.09-0250317 dated 10 September 2024.

In accordance with adjustment of Article 3 of the Articles of Association, the Company's objective is to:

a) To provide sovereign guarantees in infrastructure sectors;
b) To provide sovereign guarantee for financing in other than infrastructure sectors based on the assignment from the Government; and
c) To conduct activities related to the implementation of sovereign guarantees and other activities related to the implementation of project development that support the national economy both centralised and regional.

In achieving its objective, the Company may do, among others:

a) To provide guarantee for the Government's financial obligations in the Public Private Partnersip ("PPP") cooperation agreement in infrastructure projects.
b) To provide guarantee for the Government's financial obligations in the infrastructure sector.
c) To provide guarantees for default risk of the State-Owned Enterprises ("SOEs") based on the assignment and/or the provision set by the Minister of Finance arising from the implementation of loan agreements with financial institutions, and issuance of debt securities/bonds.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/4 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Dalam mencapai tujuan tersebut, Perusahaan dapat melakukan, antara lain: (lanjutan)

d) Memberikan penjaminan atas risiko gagal bayar Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD") dan/atau pemerintah daerah berdasarkan penugasan dan/atau ketentuan Menteri Keuangan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan lembaga keuangan, dan penerbitan surat utang/obligasi.
e) Memberikan penjaminan atas risiko finansial lainnya kepada BUMN, BUMD dan/atau Badan Usaha berdasarkan penugasan dan/atau ketentuan Menteri Keuangan, yang timbul sebagai akibat perolehan pembiayaan atau fasilitas mitigasi risiko finansial selain pinjaman dan surat utang/obligasi.
f) Memberikan penjaminan kepada pelaku usaha lainnya sesuai dengan penugasan dan/atau ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan.
g) Memberikan jasa konsultasi, penyediaan informasi, fasilitas perencanaan, penyiapan, dan penilaian kelayakan, atas proyek atau program, serta hal lain terkait mitigasi risiko/pemantauan risiko dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan alokasi risiko dan struktur pembiayaan proyek.
h) Kerja sama dengan pihak lain termasuk lembaga keuangan internasional dalam rangka pelaksanaan pemberian penjaminan.
i) Usaha patungan atau penyertaan modal pada badan hukum lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sejenis dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
j) Kegiatan lainnya untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

Perusahaan merupakan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur ("BUPI") yang beroperasi sebagai suatu entitas "*single window*" dalam melakukan proses, penilaian (*appraisal*) dan penyusunan struktur (*structuring*) untuk penjaminan yang diberikan Pemerintah Indonesia pada proyek infrastruktur yang diajukan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama ("PJPK"). Penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan memiliki dukungan pemenuhan kelayakan dan kapasitas oleh, bila diperlukan, Pemerintah Republik Indonesia, lembaga keuangan multilateral atau kombinasinya - untuk mewujudkan fleksibilitas operasional yang lebih baik dalam penyediaan penjaminan infrastruktur.

***1. GENERAL** (continued)*

In achieving its objective, the Company may do, among others: (continued)

d) To provide guarantees for default risk of the Regional Owned Enterprises based on the assignment and/or the provision set by the Minister of Finance arising from the implementation of loan agreements with financial institutions, and issuance of debt securities/bonds.
e) To provide guarantee for other financial risks to SOEs, Regional Owned Enterprises and/ or Enterprises based on the assignment and/or provision set by the Minister of Finance arising from obtaining financing or financial risk mitigation facilities other than loan and debt securities/bonds.
f) To provide guarantee to other business entities in accordance with the assignments and/or provisions set by the Minister of Finance.
g) To provide consulting services, providing informations, planning facilities, preparation, and feasibility assessment, on project or program, and other matters related to risk mitigation/risk monitoring and/or activities related to risk allocation and project financing structure.
h) Cooperation with other parties, including international financial institutions in implementation of guarantee provision.
i) Joint ventures or equity participation in other legal entities that have similar goals and objectives with the Company.
j) Other activities to achieve the goals and objectives of the Company.

The Company is BUPI that operates as a "single window" entity for the processing, appraisal and structuring of all guarantees provided by the Government of Indonesia for infrastructure projects proposed by the Government's Contracting Agencies ("GCA"). Guarantees provided by the Company have eligibility and capacity supported by, as necessary, the Government of Indonesia ("GOI"), a multilateral financing agency or a combination - for greater operational flexibility in providing guarantees for infrastructure projects.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/5 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Perusahaan berdomisili di Indonesia, berkedudukan di Capital Place Office Tower, Lantai 7 dan 8, Jl. Gatot Subroto Kav.18, Jakarta. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2010.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL *(continued)*

The Company is domiciled in Indonesia, located at Capital Place Office Tower, 7th and 8th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav.18, Jakarta. The Company started its commercial operations in 2010.

As at 31 December 2024 and 2023, the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors were as follows:

	2024	2023	
Komisaris Utama	Hadiyanto[1)]	Rina Widiyani Wahyuningdyah	*President Commissioner*
Komisaris	Ferry Irawan[2)]	Iqbal Islami	*Commissioner*
Komisaris	Ahmad Ghufron[3)]	Mariatul Aini	*Commissioner*
Direktur Utama	Muhammad Wahid Sutopo	Muhammad Wahid Sutopo	*President Director*
Direktur	Andre Permana	Andre Permana	*Director*
Direktur	Donny Hamdani	Donny Hamdani	*Director*

1) Hadiyanto diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 297 tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2024.

2) Ferry Irawan diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 339 tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2024.

3) Ahmad Ghufron diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 342 tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2024.

1) Hadiyanto has been appointed as the President Commissioner based on KMK No. 297 of 2024 which has been set on 17 July 2024.

2) Ferry Irawan has been appointed as the Commissioner based on KMK No. 339 of 2024 which has been set on 27 August 2024.

3) Ahmad Ghufron has been appointed as the Commissioner based on KMK No. 342 of 2024 which has been set on 27 August 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan memiliki 163 pegawai (31 Desember 2023: 164 pegawai) (tidak diaudit).

As at 31 December 2024, the Company has 163 employees (31 December 2023: 164 employees) (unaudited).

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Laporan keuangan Perusahaan diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 28 Februari 2025.

Berikut ini adalah informasi kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

The financial statements of the Company were completed and authorised for issuance by the Board of Directors on 28 February 2025.

Presented below are the material accounting policy information adopted in preparing the Company's financial statements.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/6 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas meliputi kas, kas di bank, deposito yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam ribuan Rupiah yang terdekat. Seluruh angka dalam mata uang selain Rupiah dinyatakan dalam jumlah penuh.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 4.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

a. Basis of preparation of the financial statements *(continued)*

The financial statements, except for the statement of cash flows, are prepared under the accrual basis. The financial statements are prepared under the historical cost convention, as modified for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The statement of cash flows is prepared based on the indirect method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks, deposits held at call with banks and short-term investments with original maturities of three months or less, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted.

Figures in the financial statements are rounded to and stated in thousands of Rupiah, unless otherwise stated. Amounts in currencies other than Rupiah are stated in full amount.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/7 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Mulai tanggal 1 Januari 2025, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sebagaimana diterbitkan oleh DSAK-IAI.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru yang telah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024, sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan" - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 216: "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sebagaimana diterbitkan oleh DSAK-IAI.

b. Penjabaran mata uang asing

a. Mata uang fungsional dan penyajian

Pos-pos yang disertakan dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah ("Rp") yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

a. Basis of preparation of the financial statements *(continued)*

Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standards

Beginning 1 January 2025, references to the individual SFAS and ISAKs will be changed as published by DSAK-IAI.

The Indonesian Accounting Standard Board Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued new standards which have been effective on 1 January 2024, these standards are as follows:

- *Amendment of SFAS 201: "Presentation of Financial Statements" - Accounting policies disclosure;*
- *Amendment of SFAS 216: "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use;*

The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material impact to the financial statements for current or prior financial years.

Beginning 1 January 2024, references to the individual SFAS and ISAKs will be changed as published by DSAK-IAI.

b. Foreign currency translation

a. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates (the "functional currency").

The financial statements are presented in Rupiah ("Rp"), which is the functional and presentation currency of the Company.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/8 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

b. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi.

c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas meliputi kas, kas di bank, deposito yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

d. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, (iii) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

b. Foreign currency translation *(continued)*

b. Transactions and balances

Transactions denominated in foreign currency are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At the reporting date, foreign currency monetary assets and liabilities are translated using the closing exchange rate prevailing at that date. Exchange rate used as benchmark is the rate which is issued by Bank Indonesia. Foreign exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the profit or loss.

c. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks, deposits held at call with banks and short-term investments with original maturities of three months or less, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted.

d. Financial assets and liabilities

Financial assets

The Company classifies its financial assets in the following categories: (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii) financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVOCI"), (iii) financial assets measured at amortised cost. Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/9 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

(i) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

(ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, investasi dalam deposito berjangka, piutang usaha, piutang lainnya, uang jaminan yang dapat dikembalikan serta investasi Perusahaan pada obligasi tertentu.

(iii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Suatu instrumen utang diukur pada aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan (*held to collect and sell*); dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

d. Financial assets and liabilities *(continued)*

Financial assets *(continued)*

(i) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading, which are acquired principally for the purpose of selling or repurchasing them in the short-term. The Company has no financial assets at fair value through profit or loss.

(ii) Financial assets measured at amortised cost

Financial assets at amortised cost are recognised initially at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. The Company's financial assets at amortised cost comprise of cash and cash equivalents, investment in time deposits, account receivables, other receivables, refundable deposits and the Company's investment in certain bonds.

(iii) Financial assets at fair value through other comprehensive income

A debt instruments measured at FVOCI only if it meets both of the following conditions and is not designated as at fair value through profit or loss:

- *The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset (held to collect and sell); and*
- *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/10 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

(iii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

Setelah pengukuran awal, aset keuangan ini diukur pada nilai wajar dan keuntungan atau kerugiannya diakui dalam laporan perubahan ekuitas hingga dihentikan pengakuannya. Investasi Perusahaan pada obligasi tertentu diklasifikasikan dalam kategori ini.

Penilaian pembayaran pokok dan bunga semata (“SPPI”)

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta marjin keuntungan.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Perusahaan mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Perusahaan atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

d. Financial assets and liabilities *(continued)*

Financial assets *(continued)*

(iii) Financial assets at fair value through other comprehensive income (continued)

After initial measurement, these financial assets are measured at fair value with unrealised gains or losses recognised in statement of changes in equity until the financial assets are derecognised. The Company’s investments in certain bonds are classified in this category.

Solely payments of principal and interest (“SPPI”) assessment

For the purposes of this assessment, ‘principal’ is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. ‘Interest’ is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Company considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Company considers:

- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Leverage features;*
- *Prepayment and extension terms;*
- *Terms that limit the Company’s claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); and*
- *Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).*

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/11 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Perusahaan. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi untuk klasifikasi PSAK 109 harus konsisten dengan bagaimana portofolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen senior;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan
- Bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (berdasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan).

Perusahaan dapat mereklasifikasikan seluruh aset keuangan yang terpengaruh jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Perusahaan dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau 'kondisi terburuk'. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Perusahaan untuk berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

d. Financial assets and liabilities *(continued)*

Financial assets *(continued)*

Business model assessment

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Company. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

Business model determinations are made considering all relevant evidence that is available at the date of the assessment. This includes, but not limited to:

- *How the performance of the business and the financial assets held within that business unit are evaluated and reported to management. The level of segregation identified for SFAS 109 classification should be consistent with how asset portfolios are segregated and reported to senior management;*
- *The risks that affect the performance of the business unit and the financial assets held within that business unit and in particular the way those risks are managed; and*
- *How managers of the business unit are compensated (based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).*

The Company can reclassify all of its financial assets if and only if, its business model for managing those financial assets changes.

Business model determinations are made on the basis of scenarios that the Company reasonably expects to occur and not under highly stressed or 'worst case' conditions. Where assets are disposed of under conditions that the Company did not reasonably expect to prevail when the assets were recognised, the classification of existing financial assets in the portfolio are not rendered inaccurate but the conditions in question should be considered for any assets acquired going forward.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/12 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Perubahan pada model bisnis atau pengenalan model bisnis baru ditentukan melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan menetapkan aset keuangan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual.

Ketika ada sejumlah aset keuangan yang dianggap tidak dapat tertagih atau berpotensi gagal bayar, maka cadangan kerugian penurunan nilai akan dibuat. Cadangan kerugian penurunan nilai adalah selisih antara jumlah aset keuangan yang tercatat dan nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan yang telah dihitung berdasarkan skenario pemulihan yang diidentifikasi atas rencana penyelesaiaan untuk masing-masing badan usaha secara individu. Keadaan dari masing-masing badan usaha secara individu dipertimbangkan ketika Perusahaan memperkirakan arus kas masa depan dan kapan penyelesaian kewajiban diterima dengan memasukan unsur pertimbangan yang signifikan.

Penyajian penyisihan kerugian kredit ekspektasian dalam laporan posisi keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto piutang usaha dan beban tangguhan.

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dianggap tidak dapat tertagih atau berpotensi gagal bayar.

Liabilitas keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan klasifikasi liabilitas keuangan ini tidak diungkapkan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

d. Financial assets and liabilities *(continued)*

Financial assets *(continued)*

Business model assessment (continued)

Changes to business models or the introduction of new business models are determined through the new business unit approval process.

Impairment of financial asset

The Company determines that financial asset should be evaluated for impairment through individual evaluation.

When any financial assets amount is considered uncollectible or potentially default, a credit impairment provision is raised. This provision is the difference between the account receivables and the present value of estimated future cash flows, based on recovery scenario that has been identified for the workout plan for each investors individually. The individual circumstances of each investors are considered when the Company estimates future cash flows and timing of future recoveries which involve significant judgement.

Presentation of allowance for expected credit losses in statements of financial position

Allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the account receivables and deferred expenses.

At each reporting date, the Company assesses whether the financial assets recorded at amortized cost considered uncollectible or potentially default.

Financial liabilities

The Company classifies its financial liabilities in the category of (i) financial liabilities at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortised cost.

At the reporting date, there are no financial liabilities classified as financial liabilities at fair value through profit or loss. Therefore, the accounting policies related to this classification are not disclosed.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/13 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya dikurangi biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain, dan pinjaman penerusan diklasifikasikan dalam kategori ini.

Pemberhentian pengakuan atas liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

d. Financial assets and liabilities *(continued)*

Financial liabilities

Financial liabilities measured at amortised cost

Financial liabilities that are not classified as at fair value through profit or loss fall into this category and are measured at amortised cost.

Financial liabilities measured at amortised cost are initially recognised at fair value minus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Account payables, accrued expenses, provisions and other payables, and two-step loans are classified in this category.

Derecognition of financial liabilities

Financial liabilities are derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another liability with substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amount is recognised in the statements of profit or loss.

Determination of fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Company measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/14 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service* atau *regulatory agency*) dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Perusahaan menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang sejenis atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menangguhkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diamortisasi dan diakui dalam laba rugi sepanjang umur dari instrumen tersebut.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek tersebut.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

d. Financial assets and liabilities *(continued)*

Determination of fair value *(continued)*

A financial instrument is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid-offer spread or there are few recent transactions.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Company determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is amortised and recognised in profit or loss over the life of the instrument.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially has the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/15 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Nilai wajar untuk semua instrumen keuangan lainnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Dengan teknik ini, nilai wajar merupakan suatu estimasi yang dihasilkan dari data yang dapat diobservasi dari instrumen keuangan yang sama, menggunakan model-model untuk mendapatkan estimasi nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan atau teknik penilaian lainnya menggunakan input (sebagai contoh *Secured Overnight Financing Rate* ("SOFR"), nilai tukar mata uang asing, volatilitas dan *counterparty spreads*) yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa dimasa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

Reklasifikasi aset keuangan

Perusahaan diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki jika Perusahaan mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sedangkan reklasifikasi untuk liabilitas keuangan tidak diperkenankan.

Perusahaan akan mereklasifikasi aset keuangan yang terdampak oleh perubahan model bisnis. Perubahan model bisnis sifatnya harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional Perusahaan seperti memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

d. Financial assets and liabilities *(continued)*

Determination of fair value *(continued)*

For all other financial instruments, fair value is determined using valuation techniques. In these techniques, fair values are estimated from observable data in respect of similar financial instruments, using models to estimate the present value of expected future cash flows or other valuation techniques, using inputs (for example, Secured Overnight Financing Rate ("SOFR"), foreign exchange rates, volatilities and counterparty spreads) existing at the dates of the statement of financial position.

Offsetting

Financial assets and liabilities are offset, and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.

Reclassification of financial assets

The Company is permitted to reclassify its financial assets if the Company changes its business model for managing financial assets while reclassification for financial liabilities is not permitted.

The Company will reclassify financial assets affected by changes in business models. Changes in the Company's business model objectives must have an impact before the reclassification date.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/16 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Yang bukan merupakan perubahan model bisnis adalah:

- perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar);
- hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan; dan
- pengalihan aset keuangan antara bagian dari Perusahaan dengan model bisnis berbeda.

Perusahaan menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Perusahaan tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Kontrak jaminan keuangan dan tagihan komitmen lainnya

Kontrak jaminan keuangan yang dimiliki Perusahaan terdiri dari: KPBU, Non-KPBU, dan penjaminan pelaku usaha korporasi.

Kerugian kredit ekspektasian nilai atas kontrak jaminan keuangan yang memiliki risiko kredit dihitung berdasarkan analisa spesifik untuk masing-masing risiko dalam perjanjian penjaminan. Kerugian kredit ekspektasian atas jaminan keuangan diakui pada liabilitas lain-lain.

KPBU

Perusahaan memiliki perjanjian regres dengan PJPK terkait dengan penjaminan KPBU, yang akan memberikan hak tagih kepada PJPK atas pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan kepada Badan Usaha ("BU") akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban finansial PJPK kepada BU.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

d. Financial assets and liabilities *(continued)*

Reclassification of financial assets *(continued)*

The followings are not a change in business model:

- *changes in intention relating to certain financial assets (even in situations significant changes in market conditions);*
- *temporary loss of certain markets for financial assets; and*
- *transfer of financial assets between parts of the Company with different business models.*

The Company applies a prospective reclassification of the date of the reclassification. The Company does not restate profits, losses (including impairment profit or loss), or interest recognised earlier.

Financial guarantee contracts and other commitment receivables

The financial guarantee contracts owned by the Company consist of: PPP, Non-PPP, and guarantees for corporate business entities.

Expected credit loss on financial guarantee contracts with credit risk are assessed based on each specific risk under the guarantee agreement. Expected credit loss on financial guarantees is recognised as other liabilities.

PPP

The Company has recourse agreement with GCA related to PPP's guarantee, which will give the Company the rights to claim or recourse back to GCA for any payment that has been made by the Company to the Investors, due to inability of GCA in fulfilling its financial obligations to the Investors.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/17 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Kontrak jaminan keuangan dan tagihan komitmen lainnya (lanjutan)

Non-KPBU

Perusahaan juga memiliki perjanjian regres dengan BUMN Terjamin terkait dengan penjaminan atas gagal bayar dari BUMN Terjamin yang melakukan pinjaman dan/atau penerbitan obligasi. Perusahaan akan mendapatkan hak tagih dari BUMN Terjamin atas pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan kepada pemberi pinjaman dan/atau pemegang obligasi akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban pembayaran BUMN Terjamin kepada pemberi pinjaman.

Pelaku Usaha Korporasi

Peran Perusahaan dalam penjaminan pelaku usaha korporasi adalah untuk memberikan dukungan *loss limit* dan melaksanakan penjaminan bersama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“LPEI”) atas kewajiban finansial terjamin (Pelaku Usaha) kepada penerima jaminan (Bank) dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (“PEN”).

e. Investasi

Investasi terdiri dari deposito berjangka, obligasi korporasi yang diperdagangkan di pasar uang dan di bursa efek serta Obligasi Pemerintah.

Obligasi Pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dibeli dari pasar.

Perusahaan telah mengklasifikasikan investasi pada sukuk sebagai diukur pada nilai biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan PSAK 410 “Akuntansi Sukuk”.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

d. Financial assets and liabilities *(continued)*

Financial guarantee contracts and other commitment receivables *(continued)*

Non-PPP

The Company also has recourse agreement with guaranteed SOEs related to provision of guarantee to guaranteed SOEs for defaulted payments by guaranteed SOEs who received loans and/or issued bonds. The Company will get the rights to claim or recourse back to guaranteed SOEs for any payment that has been made by the Company to the lenders and/or bondholders, due to inability of guaranteed SOEs in fulfilling its financial obligations to the lenders.

Corporate Business Entity

The Company's role in corporate business entity guarantee to provide loss limit support and carry out joint guarantees with the Indonesian Export Financing Agency ("LPEI") for guaranteed financial obligations (Business Entity) to guarantee recipients (Banks) related to the government’s guarantee for National Economic Recovery (“PEN”).

e. Investments

Investments consist of time deposits, corporate bonds traded in the money market and at the stock exchange and Government Bonds.

Government Bonds represent bonds issued by the Government of the Republic of Indonesia purchased from the market.

The Company has classified all investment in sukuk as amortised cost in accordance with SFAS 410 “Accounting for Sukuk”.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/18 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Investasi (lanjutan)

Investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi disajikan sebesar nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi terkait perolehan investasi tersebut. Selisih antara biaya perolehan dan nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

f. Aset tetap

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

e. Investments *(continued)*

Investments in sukuk measured at amortised cost are stated at fair value plus or minus transaction costs related to the acquisition of the investment. The difference between the acquisition cost and the nominal value is amortised on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognised in profit or loss.

f. Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is computed using the straight-line method over the following estimated useful lives, as follows:

	Tahun/*Years*	
Prasarana kantor	4	*Leasehold improvement*
Peralatan komputer	4	*Computer equipments*
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	4	*Office equipments, furnitures and fixtures*

Nilai sisa aset dan masa manfaat aset tetap ditelaah, dan disesuaikan bila perlu, pada setiap akhir periode pelaporan.

The assets residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah hanya apabila kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi selama periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

Jika aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutan yang berhubungan dengan aset tersebut dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in the statement profit or loss.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/19 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Aset takberwujud

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Perusahaan diakui sebagai aset takberwujud.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Aset takberwujud diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi amortisasinya. Amortisasi aset takberwujud dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 tahun.

h. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

g. Intangible assets

Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Company are recognised as intangible assets.

Directly attributable costs are capitalised as part of the software product.

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortisation. Amortisation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of 4 years.

h. Taxation

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity.

The current income tax is calculated using tax rates that have been enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretations. Where appropriate, it established provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/20 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Perpajakan (lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah diberlakukan atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Pajak penghasilan tangguhan diukur dengan menggunakan suku bunga pajak yang sudah diberlakukan atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan dan diekspektasi akan digunakan ketika aset pajak tangguhan yang berhubungan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak di masa yang akan datang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus Ketika entitas memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara bersih atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

i. Liabilitas imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

h. Taxation *(continued)*

Deferred income tax is recognised on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax assets is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the entity has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

i. Employee benefits obligation

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised when they are accrued to the employees.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/21 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pensiun

Perusahaan diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang merupakan liabilitas imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 lebih besar, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Liabilitas imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini liabilitas pasti pada tanggal pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program yang berasal dari program pensiun yang ada. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah jangka panjang pada tanggal pelaporan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran program pensiun baik karena diwajibkan, berdasarkan kontrak atau sukarela. Namun karena Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 mengharuskan Perusahaan membayar jumlah tertentu kepada para karyawan yang telah memasuki usia pensiun yang ditentukan berdasarkan masa kerja, Perusahaan rentan terhadap kemungkinan untuk membayar kekurangan apabila iuran kumulatif kurang dari jumlah tertentu. Sebagai akibatnya untuk tujuan pelaporan keuangan, program iuran pasti secara efektif diberlakukan seolah-olah sebagai program imbalan pasti.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

i. Employee benefits obligation *(continued)*

Pension benefits

The Company is required to provide minimum pension benefits as stipulated in the UU Cipta Kerja No. 11 Year 2020 as amended by UU No. 6 Year 2023 concerning Government In Lieu Of Law No. 2 Of 2022 Concerning Stipulation Employment Regulations Become Law which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on UU Cipta Kerja No. 11 Year 2020 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.

The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date less the fair value of plan assets. The defined benefits obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of reporting date of Government Bonds that are denominated in the Rupiah currency in which the benefit will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

For defined contribution plans, the Company pays contributions to pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. However, since Job creation Law No. 11 of 2020 requires an entity to pay to a worker entering into pension age a certain amount based on, the worker's length of service, the Company is exposed to the possibility of having to make further payments to reach that certain amount in particular when the cumulative contributions are less than that amount. Consequently for financial reporting purposes, defined contribution plans are effectively treated as if they were defined benefit plans.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/22 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pensiun (lanjutan)

Biaya jasa kini dibebankan pada saat terjadinya.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amendemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Imbalan jangka panjang lainnya

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti, kecuali untuk pengukuran kembali yang diakui pada laba rugi.

j. Utang usaha dan lain-lain

Utang usaha dan lain-lain merupakan liabilitas keuangan. Utang usaha dan lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

k. Penyisihan

Provisi diakui saat Perusahaan memiliki kewajiban (hukum atau konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan jumlah liabilitas tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

i. Employee benefits obligation *(continued)*

Pension benefits *(continued)*

Current service costs are expensed in the prevailing period.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.

Past service costs arising from amendment of curtailment programs are recognised as expense in profit or loss when incurred.

Other long-term benefits

Other long-term employee benefits such as long service leave is calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. These benefits are accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan, except for remeasurements which are recognised in profit or loss.

j. Account and other payables

Account and other payables are financial liabilities. Account and other payable is recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

k. Provisions

Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of past events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Provisions are not recognised for future operating losses.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/23 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Pendapatan dan beban

Pendapatan dari penjaminan terdiri dari pendapatan premi, pendapatan provisi dan komisi.

Pendapatan premi terdiri dari *guarantee fee* dan *processing fee*. Pendapatan dari *guarantee fee* diamortisasi berdasarkan metode garis lurus dan diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu periode penjaminan. Pendapatan dari *processing fee* diakui pada saat pendapatan diperoleh.

(i) *Guarantee fee* merupakan pendapatan yang diterima atas jaminan yang diberikan kepada penerima manfaat berdasarkan jaminan *exposure* oleh Perusahaan.
(ii) *Processing fee* merupakan pendapatan yang diterima atas adanya aktivitas pemrosesan yang dilakukan jika klaim disampaikan kepada pihak penjamin.

Pendapatan provisi dan komisi terdiri dari *upfront fee* dan pendapatan provisi dan komisi lainnya.

(i) *Upfront fee* adalah pendapatan yang diterima pada saat kontrak penjaminan ditandatangani dan/atau pada saat penjaminan telah efektif, sesuai dengan kesepakatan dalam surat imbal jasa, dan tidak dapat dikembalikan.
(ii) Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat diperoleh.

Pendapatan penjaminan korporasi padat karya merupakan *guarantee fee* yang diakui sebesar porsi margin dari imbal jasa penjaminan *loss limit* dan penjaminan bersama yang diterima saat diberikannya penjaminan dan diamortisasi selama periode penjaminan atau periode pelaksanaan jasa.

Pendapatan bunga regres merupakan pendapatan bunga yang diterima atas timbulnya piutang regres. Pendapatan bunga regres diakui dengan metode bunga efektif.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

I. Revenues and expenses

Revenue from guarantee consists of premium income and fees and commissions.

Premium income consists of guarantee fee and processing fee. Revenue from guarantee fee is amortised based on straight-line method and recognised as income over the guarantee period. Revenue from processing fee is recognised when earned.

(i) Guarantee fee is earned for guarantee provided to the beneficiaries on the basis of guarantee exposure of the Company.

(ii) Processing fee is earned for providing services in processing claims submitted to the guarantor.

Fees and commissions consist of upfront fee and other fees and commissions.

(i) Upfront fee is recognised upon signing of guarantee contract and/or the effectiveness of guarantee, in accordance with fee letter, and non-refundable.

(ii) Other fees and commission is recognised as incurred.

Revenue from labor intensive corporation is guarantee fee which is recognised at margin portion of loss limit guarantee and Corporate Business Entity co-guarantee service fees that received when the guarantee was given and are amortised during guarantee period or period of service.

Recourse interest income is interest income received on the occurrence of recourse receivables. Recourse interest income is recognised using the effective interest method.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/24 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan jasa dari penyiapan proyek dan pendampingan transaksi diakui ketika jasa telah dilaksanakan, kemungkinan besar manfaat ekonomi akan mengalir ke Perusahaan dan biaya-biaya yang terjadi dapat diukur secara handal. Pendapatan diakui sebesar biaya-biaya yang terjadi ditambah margin yang diakui untuk semua penyelesaian tahapan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pendapatan dari pendapatan bunga deposito berjangka dan investasi pendapatan tetap diakui dengan menggunakan metode bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan proses penjaminan, ditangguhkan terlebih dahulu dan disajikan sebagai beban tangguhan. Biaya tersebut akan dibebankan pada laporan laba rugi Perusahaan, ketika Perusahaan mengakui pendapatan penjaminan.

m. Sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset diidentifikasikan selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Pada tanggal permulaan sewa Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan. Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

l. Revenues and expenses *(continued)*

Revenue from project preparation and transaction advisory are recognised when services have been rendered, where it is probable that economic benefits will flow to the Company and expenses incurred can be reliably measured. Revenue is recognised from costs incurred plus recognised margin for all the work in process up to the stage completion as agreed.

Revenue from interest income of time deposits and investment in fixed income are recognised using the effective interest method.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

Costs that are directly related to the guarantee process will be deferred and presented as deferred charges. The costs will be expensed to the Company's profit or loss, when Company recognised revenue from guarantee.

m. Leases

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Company recognises a right-of-use assets and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date. The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/25 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Beban keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa untuk setiap periode.

Perusahaan menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset Hak-Guna" dan "Liabilitas sewa pembiayaan" di dalam laporan posisi keuangan.

Aset hak pakai diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima;
- biaya langsung awal; dan
- biaya restorasi.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa jangka-pendek

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

m. Leases *(continued)*

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments are allocated between the principal and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Company presents right-of-use assets as part of "Right-of-Use Asset" and "Finance lease liabilities" in the statement of financial position.

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:

- *the amount of the initial measurement of lease liability;*
- *any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received;*
- *any initial direct costs; and*
- *restoration costs.*

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Company by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Company will exercise a purchase option, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

Short-term leases

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognised on a straight-line basis as an expense in profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/26 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" yang didefinisikan antara lain:

i. perusahaan di bawah pengendalian Perusahaan;
ii. perusahaan asosiasi;
iii. investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
iv. perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam catatan iii di atas;
v. karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan
vi. entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

n. Transactions with related parties

The Company has transactions with related parties. The definition of related parties used is in accordance with SFAS 224 "Related Party Disclosures" which are defined, among others, as:

i. entities under the control of the Company;
ii. associated companies;
iii. investors with an interest in the voting that gives them significant influence;
iv. entities controlled by investors under note iii above;
v. key employees and family members; and
vi. entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government.

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Faktor risiko keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan menetapkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perusahaan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

(1) Risiko pasar

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing

Perusahaan tidak mempunyai risiko yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang asing karena transaksi utama Perusahaan dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing dalam jumlah yang material. Oleh karena itu, perubahan nilai tukar dari mata uang asing terhadap mata uang fungsional pada tanggal pelaporan tidak akan berdampak signifikan terhadap laba rugi setelah pajak Perusahaan untuk tahun berjalan.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

a. Financial risk factors

The main risks arising from the Company's financial instruments are market risk (including foreign currency exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. Management reviews and agrees policies for managing each of these risks. The Company applies the financial risk management policies to minimise the impact of the unpredictability of financial markets on the Company's financial performance. The summary of the financial risk management policies are as follows:

(1) Market risk

(i) Foreign currency exchange rate risk

The Company has no significant foreign exchange risks since the Company's transactions are performed using the Company's functional currency. As at 31 December 2024 and 2023, the Company has no material financial assets and financial liabilities denominated in foreign currencies. Therefore, changes in foreign exchange against the Company's functional currency will not significantly impact the Company's current year profit after tax.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/27 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(1) Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Aset keuangan Perusahaan yang terekspos dengan risiko suku bunga adalah investasi. Investasi Perusahaan terutama terdiri dari deposito berjangka dan investasi dengan pendapatan tetap. Perubahan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga pasar tidak akan berpengaruh secara signifikan bagi pendapatan bunga Perusahaan, oleh karena deposito berjangka Perusahaan memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun (jangka pendek), sementara pengelolaan dana investasi lainnya terutama merupakan investasi dengan pendapatan tetap (*fixed income*).

Lebih lanjut, perubahan tingkat suku bunga tidak akan berpengaruh terhadap laporan laba rugi Perusahaan karena investasi Perusahaan dikategorikan investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan investasi yang diukur dengan biaya diamortisasi dengan suku bunga tetap.

Liabilitas keuangan Perusahaan yang terekspos dengan risiko suku bunga adalah pinjaman penerusan dengan suku bunga variabel yang menggunakan SUN *Benchmark* dengan tenor 20 tahun. Perubahan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan bagi beban bunga Perusahaan.

(2) Risiko kredit

Perusahaan memitigasi risiko kredit dengan menetapkan kebijakan investasi yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta mengatur mandat investasi untuk jenis, batasan alokasi, serta kriteria *counterparty* yang selektif.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

a. Financial risk factors *(continued)*

(1) Market risk *(continued)*

(ii) Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

The Company's financial assets which are exposed to interest rate risk are investments. The Company's investments mostly consist of time deposit and fixed income investment. The changes due to higher or lower interest rates in the market will not significantly impact the Company's interest income, since the time deposit will mature within 1 (one) year (short-term), while most of the other investments are fixed rate investments.

Moreover, the changes in interest rate will not impact the Company's profit and loss due to the financial assets are classified as investment at fair value through other comprehensive income and investment at amortised cost with fixed interest rate.

The Company's financial liabilities which are exposed to interest rate risk are two-step loans with variable interest rate using SUN Benchmark with 20 years tenor. The changes due to higher or lower interest rates in the market will not significantly impact the Company's interest expense.

(2) Credit risk

The Company mitigates its credit risk by setting a prudent investment policy, including investment mandates for type of investment, portfolio, allocation as well as selective criteria for counterparty.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/28 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(2) Risiko kredit (lanjutan)

Deposito berjangka, deposito yang diklasifikasikan sebagai kas dan setara kas dan kas di bank ditempatkan pada bank-bank domestik yang memiliki reputasi yang tinggi sebagai berikut:

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

a. Financial risk factors *(continued)*

(2) Credit risk *(continued)*

Time deposits, time deposits classified as cash and cash equivalents and cash in bank are placed with highly reputable domestic banks as follows:

	2024	2023	
AAA	6,061,274,102	7,019,445,541	*AAA*
AA	1,902,000,000	-	*AA*
	7,963,274,102	7,019,445,541	

Untuk saldo kas dan setara kas, manajemen menganggap bahwa pihak lawan memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya dalam waktu dekat. Akibatnya, tidak ada penyisihan kerugian yang diakui berdasarkan ekspektasi kerugian kredit 12 bulan, karena penurunan nilai tersebut juga tidak signifikan bagi Perusahaan.

For cash and equivalents balances, management considers that the counterparty has a strong capacity to meet its contractual obligations in near term. As a result, no loss allowance has been recognised based on 12-month expected credit losses, as any such impairment is also insignificant to the Company.

Untuk investasi yang ditempatkan pada efek utang dengan pendapatan tetap, Perusahaan menempatkan investasinya pada surat berharga hutang di luar Pemerintah dengan peringkat investasi paling rendah AA.

For placement of investment in fixed income debt securities, the Company places its investments on debt securities outside Government with investment grade at the lowest of AA.

Eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The maximum credit risk on the Company's financial assets as at 31 December 2024 and 2023 are as follows:

	31 Desember/*December* 2024					
	Lancar/ *Current*	<1 tahun/ *<1 year*	*1-2 tahun/ 1-2 years*	>2 tahun/ *>2 years*	Jumlah/ *Total*	
Aset						***Assets***
Kas dan setara kas*)	2,029,774,102	-	-	-	2,029,774,102	*Cash and cash equivalents*)
Investasi	14,423,560,381	-	-	-	14,423,560,381	*Investments*
Piutang usaha	378,873,780	36,875,000	22,275,000	22,050,000	460,073,780	*Account receivables*
Piutang lainnya	11,935,434	-	-	-	11,935,434	*Other receivables*
Uang jaminan yang dapat dikembalikan	5,385,039	-	-	-	5,385,039	*Refundable deposits*
	16,849,528,736	36,875,000	22,275,000	22,050,000	16,930,728,736	
Dikurangi:						*Less:*
Penyisihan kerugian penurunan nilai					(57,688,580)	*Allowance for impairment losses*
					16,873,040,156	

*)Tidak termasuk kas

Not include cash on hand)

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/29 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(2) Risiko kredit (lanjutan)

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

a. Financial risk factors *(continued)*

(2) Credit risk *(continued)*

	31 Desember/*December* 2023					
	Lancar/ *Current*	**<1 tahun/ *<1 year***	***1-2 tahun/ 1-2 years***	**>2 tahun/ *>2 years***	**Jumlah/ *Total***	
Aset						***Assets***
Kas dan setara kas*)	121,145,541	-	-	-	121,145,541	*Cash and cash equivalents*)
Investasi	15,793,648,683	-	-	-	15,793,648,683	*Investments*
Piutang usaha	321,201,039	21,848,750	1,300,000	2,000,000	346,349,789	*Account receivables*
Piutang lainnya	11,444,354	-	-	-	11,444,354	*Other receivables*
Uang jaminan yang dapat dikembalikan	5,369,039	-	-	-	5,369,039	*Refundable deposits*
	16,252,808,656	21,848,750	1,300,000	2,000,000	16,277,957,406	
Dikurangi:						*Less:*
Penyisihan kerugian penurunan nilai					(18,775,000)	*Allowance for impairment losses*
					16,259,182,406	

*) Tidak termasuk kas

*) *Not include cash on hand*

(3) Risiko likuiditas

Perusahaan tidak mempunyai risiko likuiditas yang signifikan. Risiko likuiditas timbul ketika Perusahaan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Manajemen pengelolaan risiko likuiditas termasuk di dalamnya menjaga kecukupan kas dan setara kas. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan memantau arus kas perkiraan dan aktual dan menyesuaikan profil tanggal jatuh tempo dari aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, penyisihan, dan utang lain-lain dan pinjaman penerusan yang jumlahnya tidak material terhadap aset likuid Perusahaan. Perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi dalam bentuk kas dan setara kas dan investasi.

(3) Liquidity risk

The Company has no significant liquidity risk. Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

As at 31 December 2024 and 2023, the Company's financial liabilities consist of account payables, accrued expenses, provisions, and other payables and two-step loans which are immaterial to the total Company's liquid assets. The Company is highly liquid as it has financial instruments in form of cash and cash equivalents and investments.

	31 Desember/*December* 2024				
	Jumlah/ *Total*	**Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ *No maturity contract***	**Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year***	**Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year***	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang usaha	6,731,077	-	6,731,077	-	*Account payables*
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan, dan utang lain-lain	117,924,523	-	117,924,523	-	*Accrued expenses, provisions, and other payables*
Pinjaman penerusan	54,586,445	-	1,885,333	52,701,112	*Two-step loans*
	179,242,045	-	126,540,933	52,701,112	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/30 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

a. Financial risk factors *(continued)*

(3) Risiko likuiditas (lanjutan)

(3) Liquidity risk *(continued)*

	31 Desember/*December* 2023				
	Jumlah/ ***Total***	**Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/** ***No maturity contract***	**Kurang dari 1 tahun/** ***Less than 1 year***	**Lebih dari 1 tahun/** ***More than 1 year***	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang usaha	14,044,779	-	14,044,779	-	*Account payables*
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan, dan utang lain-lain	162,668,910	-	73,294,256	89,374,654	*Accrued expenses, provisions, and other payables*
Pinjaman penerusan	55,126,686	-	540,242	54,586,444	*Two-step loans*
	231,840,375	-	87,879,277	143,961,098	

Selain pada liabilitas keuangan Perusahan di atas, sebagai BUPI yang memberikan penyediaan penjaminan, risiko likuiditas pada Perusahaan juga berhubungan dengan adanya kemungkinan Perusahaan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban finansial atas klaim yang telah diajukan maupun potensi klaim atas risiko-risiko yang ditanggung Perusahaan dalam perjanjian penjaminan. Perusahaan mengelola dan mengawasi risiko likuiditas untuk kewajiban finansial dengan menyesuaikan portofolio investasi dengan kewajiban finansial untuk klaim yang telah diajukan atau profil jatuh tempo dari potensi klaim. Perusahaan secara rutin melakukan analisa dan mengidentifikasi kebutuhan likuiditas. Analisa ini, disertai dengan kebutuhan investasi yang jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebijakan investasi yang konservatif, membantu Perusahaan dalam mengelola risiko likuiditas dengan tepat.

Apart from the Company's financial liabilities above, as BUPI who provides guarantees, liquidity risk for the Company is also related to the possibility that the Company will not be able to fulfill its financial obligations for claims that have been submitted or potential claims for risks borne by the Company in the guarantee agreement. The Company managed and monitored its liquidity risk for financial obligations by matching the investment portfolio to its financial obligations for claim that has been submitted or maturity profiles of the potential claims. The Company regularly analysed and identified the liquidity needs. These analyses, together with clear investment requirements according to regulation and a conservative investment policy, help the Company to appropriately manage liquidity risk.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/31 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Manajemen risiko modal

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi jumlah utang.

Perusahaan menelaah dan mengelola struktur permodalannya untuk memastikan struktur modal dan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang dan efisiensi modal dari Perusahaan, keuntungan masa lalu dan proyeksi masa depan, proyeksi arus kas operasional, proyeksi pengeluaran modal dan proyeksi kesempatan investasi strategis. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat menggunakan pendanaan internal untuk mengurangi utang.

c. Estimasi nilai wajar

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Tingkat 1
  Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2
  Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas keuangan, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga);
- Tingkat 3
  Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

b. Capital risk management

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt.

The Company periodically reviews and manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder returns, taking into consideration the future capital requirements and capital efficiency of the Company, prevailing and projected profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures and projected strategic investment opportunities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may use internal funding to reduce debt.

c. Fair value estimation

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

- *Level 1*
  Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- *Level 2*
  Inputs other than quoted market prices included in Level 1 that are observable for the financial asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price);
- *Level 3*
  Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/32 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Estimasi nilai wajar (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas Perusahaan yang diukur sebesar nilai wajar pada 31 Desember 2024 dan 2023.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

c. Fair value estimation *(continued)*

The following table presents the Company's assets and liabilities that are measured at fair value at 31 December 2024 and 2023.

	31 Desember/*December* 2024					
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	**Tingkat 1/ *Level 1***	**Tingkat 2/ *Level 2***	**Tingkat 3/ *Level 3***	**Nilai wajar/ *Fair value***	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar						***Financial assets at fair value***
Investasi pada instrumen utang	1,823,949,498	-	1,823,949,498	-	1,823,949,498	*Debt investments*
Jumlah	1,823,949,498	-	1,823,949,498	-	1,823,949,498	*Total*

	31 Desember/*December* 2023					
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	**Tingkat 1/ *Level 1***	**Tingkat 2/ *Level 2***	**Tingkat 3/ *Level 3***	**Nilai wajar/ *Fair value***	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar						***Financial assets at fair value***
Investasi pada instrumen utang	6,019,241,622	-	6,019,241,622	-	6,019,241,622	*Debt investments*
Jumlah	6,019,241,622	-	6,019,241,622	-	6,019,241,622	*Total*

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Perusahaan:

Financial instrument not measured at fair values

The table below sets out the carrying amounts and fair value of those financial assets and liabilities not presented at their fair value in the Company's statements of financial position:

	31 Desember/*December* 2024		
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	**Nilai wajar/ *Fair value***	
Aset keuangan:			***Financial assets:***
Kas dan setara kas	2,030,081,757	2,030,081,757	*Cash and cash equivalents*
Investasi	12,599,610,883	12,527,036,685	*Investments*
Piutang usaha	402,385,200	402,385,200	*Account receivables*
Piutang lainnya	11,935,434	11,935,434	*Other receivables*
Uang jaminan yang dapat dikembalikan	5,385,039	5,369,039	*Refundable deposits*
	15,049,398,313	14,976,808,115	
Liabilitas keuangan:			***Financial liabilities:***
Utang usaha	6,731,077	6,731,077	*Account payables*
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain	117,924,523	117,924,523	*Accrued expenses provisions and other payables*
Pinjaman penerusan	54,586,445	54,586,445	*Two-step loans*
	179,242,045	179,242,045	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/33 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Estimasi nilai wajar (lanjutan)

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar (lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Perusahaan: (lanjutan)

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

c. Fair value estimation *(continued)*

Financial instrument not measured at fair values (continued)

The table below sets out the carrying amounts and fair value of those financial assets and liabilities not presented at their fair value in the Company's statements of financial position: (continued)

	31 Desember/*December* 2023		
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	**Nilai wajar/ *Fair value***	
Aset keuangan:			***Financial assets:***
Kas dan setara kas*)	121,487,653	121,487,653	*Cash and cash equivalents*)*
Investasi	9,774,407,061	9,787,053,266	*Investments*
Piutang usaha	327,574,789	327,574,789	*Account receivables*
Piutang lainnya	11,444,354	11,444,354	*Other receivables*
Uang jaminan yang dapat dikembalikan	5,369,039	5,369,039	*Refundable deposits*
	10,240,282,866	10,252,929,071	
Liabilitas keuangan:			***Financial liabilities:***
Utang usaha	14,044,779	14,044,779	*Account payables*
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain	162,668,910	162,668,910	*Accrued expenses provisions and other payables*
Pinjaman penerusan	55,126,686	55,126,686	*Two-step loans*
	231,840,375	231,840,375	

*) Tidak termasuk kas

Not include cash on hand)*

(i) Kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lainnya dan uang jaminan yang dapat dikembalikan

Nilai wajar dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lainnya dan uang jaminan yang dapat dikembalikan ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun, nilai tercatat dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar (level 2 - hirarki nilai wajar).

(i) Cash and cash equivalents, account receivables, other receivables and refundable deposits

The fair value of cash and cash equivalents, account receivables, other receivables and refundable deposits were based on discounted cash flows using prevailing money market interest rates for debts with similar credit risk and remaining maturity. Since the maturity is below one year, the carrying amounts of cash and cash equivalents, account receivables and other receivables were a reasonable approximation of its fair value (level 2 - fair value hierarchy).

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/34 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Estimasi nilai wajar (lanjutan)

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar (lanjutan)

(ii) Investasi pada instrumen utang

Nilai wajar dari investasi pada instrumen utang ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa (level 2 - hirarki nilai wajar).

(iii) Utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain

Nilai wajar dari utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain diperkirakan adalah sebesar nilai tercatatnya dikarenakan sisa jatuh tempo di bawah satu tahun (level 2 - hirarki nilai wajar).

(iv) Pinjaman penerusan

Nilai wajar untuk pinjaman penerusan dengan suku bunga mengambang, nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya (level 2 - hirarki nilai wajar).

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

c. Fair value estimation *(continued)*

Financial instrument not measured at fair values (continued)

(ii) Debt investments

The fair value of debt investments are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit maturity (level 2 - fair value hierarchy).

(iii) Account payables, accrued expenses and other liabilities

The fair value of account payables, accrued expenses and other liabilities are approximating their carrying amounts since the maturity is below one year (level 2 - fair value hierarchy).

(iv) Two-step loans

The fair value for two-step loans with floating interest rate, the carrying value approximates its fair value (level 2 - fair value hierarchy).

4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

4. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements and these require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experiences and other factors, including expectations with regard to future events.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/35 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Liabilitas imbalan kerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

Perusahaan menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga Obligasi Pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban pensiun yang terkait.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Perusahaan mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar karyawan dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

b. Penyisihan atas kewajiban terkait perjanjian penjaminan

Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa saldo tersebut tidak akan tertagih. Identifikasi piutang tidak tertagih memerlukan pertimbangan dan estimasi. Apabila ekspektasi berbeda dengan estimasi awal, maka perbedaan ini akan berdampak terhadap nilai tercatat piutang usaha serta kerugian penurunan nilai pada periode masa perubahan estimasi tersebut terjadi.

4. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(continued)*

Although these estimates and assumptions are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates and assumptions.

Key sources of estimation uncertainty:

a. Employee benefits obligation

The present value of the pension obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations.

The Company determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of Government Bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

For the rate of future salary increases, the Company collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Other key assumptions for employee benefits obligation are based on current market conditions.

b. Claim provision related to guarantee agreement

Allowance for impairment losses are provided when events or changes in circumstance indicate that the balance may not be collectible. The identification of uncollectible receivables requires the use of judgement and estimates. If the expectations are different from the original estimates, such differences will impact the carrying value of account receivables and impairment losses in the period in which such estimate has been changed.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/36 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

b. Penyisihan atas kewajiban terkait perjanjian penjaminan (lanjutan)

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menelaah kewajibannya atas proyek KPBU dan non-KPBU, dalam bentuk potensi klaim dan/atau klaim atas risiko-risiko yang ditanggung Perusahaan dalam perjanjian penjaminan, untuk menilai apakah suatu liabilitas harus diakui dalam laporan keuangan. Untuk proyek KPBU, Perusahaan memiliki hak regres kepada PJPK terkait segala pembayaran klaim yang akan dilakukan Perusahaan, akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban finansial PJPK kepada BU. Untuk proyek non-KPBU, Perusahaan juga memiliki hak regres kepada BUMN Terjamin terkait risiko gagal bayar BUMN Terjamin atas pinjaman yang diberikan.

Perusahaan secara aktif melakukan penelaahan atas kemungkinan kewajiban yang timbul di kemudian hari atas dukungan penjaminan *loss limit* dan penjaminan bersama pelaku usaha korporasi kepada LPEI. Identifikasi atas kemungkinan kewajiban yang timbul atas penjaminan pelaku usaha korporasi memerlukan pertimbangan dan estimasi. Apabila ekspektasi berbeda dengan ekspektasi awal, maka perbedaan ini akan berdampak pada nilai estimasi komitmen dan kontinjensi pelaku usaha korporasi pada periode masa perubahan estimasi tersebut terjadi.

c. Beban tangguhan dan cadangan kerugian penurunan nilai

Perusahaan secara berkesinambungan mengevaluasi keseluruhan bukti objektif bahwa proyek-proyek yang dibentuk dan memiliki beban tangguhan masih dapat direalisasikan sebagai pendapatan penjaminan pada setiap akhir periode pelaporan. Perusahaan menggunakan pertimbangan dalam menentukan apakah proyek-proyek yang sedang berlangsung dapat mencapai penandatanganan perjanjian, utamanya berdasarkan kondisi terkini dan informasi resmi mengenai kelanjutan proyek yang bersumber dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelelangan proyek pada akhir tiap periode pelaporan.

4. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(continued)*

Key sources of estimation uncertainty: (continued)

b. Claim provision related to guarantee agreement *(continued)*

At each reporting date, the Company assesses its obligations for PPP and non-PPP projects, in form of potential claim and/or claim on risks covered by the Company under guarantees agreements, to determine whether such liabilities should be recognised in the financial statements. For PPP projects, the Company has recourse to GCA in relation with any payments that would be made by the Company, due to inability of GCA in fulfilling its financial obligations to the Investors. For non-PPP projects, the Company also has recourse to guaranteed SOEs related to risk of default of the loans.

The Company actively conducts a review of possible liabilities that may arise in the future for the support of loss limit guarantees and joint guarantees for corporate business entities to LPEI. Identification of possible liabilities arising from guarantees for corporate business entities requires consideration and estimation. If the expectations are different from the initial expectations, then this difference will have an impact on the estimated value of commitments and contingencies of corporate business entities in the period when the changes in estimates occur.

c. Deferred charges and allowance for impairment losses

The Company continually evaluates objective evidence of projects that had deferred charges could be recognised as revenues as at the end of each reporting period. The Company uses its judgement to assess whether the project will achieve financial close that are mainly based on latest conditions and existing official information about the continuity of project issued by the stakeholders in regard to the tender process at the end of each reporting period.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/37 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

c. Beban tangguhan dan cadangan kerugian penurunan nilai

Penyisihan penurunan nilai atas beban tangguhan dibentuk dan dibebankan dalam laporan laba rugi ketika Perusahaan mendapatkan informasi dan konfirmasi mengenai ketidakpastian atas realisasi proyek.

d. Piutang usaha - penjaminan dan cadangan kerugian penurunan nilai

Perusahaan secara berkesinambungan mengevaluasi keseluruhan bukti objektif bahwa piutang usaha - penjaminan yang dicatat masih dapat ditagih kepada Badan Usaha pada setiap akhir periode pelaporan. Perusahaan, salah satunya, menggunakan pertimbangan dalam menentukan apakah proyek-proyek yang sedang berlangsung dapat mencapai syarat efektif, utamanya berdasarkan kondisi terkini dan informasi resmi mengenai kelanjutan proyek yang bersumber dari pihak-pihak yang berkepentingan pada akhir tiap periode pelaporan.

Penyisihan penurunan nilai atas piutang penjaminan dibentuk dan dibebankan dalam laporan laba rugi ketika Perusahaan mendapatkan informasi dan konfirmasi mengenai ketidakpastian atas pembayaran piutang penjaminan, serta mempertimbangkan kemampuan membayar dari Badan Usaha.

4. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(continued)*

Key sources of estimation uncertainty: (continued)

c. Deferred charges and allowance for impairment losses

Provision for impairment losses on deferred expense is recorded and charged to profit and loss when the Company obtained information and confirmations about uncertainty of project realisation.

d. Account receivables - guarantee and allowance for impairment losses

The Company continually evaluates objective evidence that account receivables - guarantee recorded can still be collected from Investors at the end of each reporting period. The Company, for instance, uses its judgement to assess whether the project will achieve effective clause that are mainly based on latest conditions and existing official information about the continuity of project issued by the stakeholders at the end of each reporting period.

Provision for impairment losses on guarantee receivables is recorded and charged to profit and loss when the Company obtained information and confirmations about uncertainty of payment, by also considering the Investor's ability to repay.

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2024	2023	
Bank	32,774,102	66,145,541	*Cash in banks*
Deposito berjangka	1,997,000,000	55,000,000	*Time deposits*
Kas	307,655	342,112	*Cash on hand*
	2,030,081,757	121,487,653	

Deposito berjangka dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga 6,25% - 6,86% per tahun di 2024 (2023: 3,00% - 6,25%).

Seluruh kas dan setara kas merupakan aset keuangan dalam tahap 1 dan tidak ada mutasi antar tahap selama tahun 2024.

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

Time deposits with original maturities of three months or less earned interest rates 6.25% - 6.86% per annum in 2023 (2023: 3.00% - 6.25%).

All cash and cash equivalents are financial assets in stage 1 and there is no movement between stages during the year 2024.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/38 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

6. INVESTASI / *6. INVESTMENTS*

	2024	2023	
Deposito berjangka	5,933,500,000	6,898,300,000	*Time deposits*
Investasi dengan pendapatan tetap			*Fixed income investments*
- Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1,823,949,498	6,019,241,622	*Investment at fair value through - other comprehensive income*
- Investasi yang diukur pada biaya diamortisasi	6,646,223,850	2,855,722,849	*Investment at amortised cost -*
- Investasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi (sukuk)	19,887,033	20,384,212	*Investments measured at - amortised cost (sukuk)*
	14,423,560,381	15,793,648,683	

Seluruh investasi merupakan aset keuangan dalam tahap 1 dan tidak ada mutasi antar tahap selama tahun 2024.

All investments are financial assets in stage 1 and there is no movement between stages during the year 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan mereklasifikasi investasi dengan pendapatan tetap dengan tenor kurang dari 10 tahun dari investasi yang diukur nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi investasi yang diukur pada biaya diamortisasi. Perubahan pada model bisnis ini ditentukan berdasarkan penilaian atas faktor risiko keuangan Perusahaan dan potensi klaim penjaminan yang teridentifikasi.

As of 31 December 2024, Company reclassified its fixed income investments with tenor less than 10 years from investment at fair value through other comprehensive income to investment at amortised cost. The changes to business models are determined through the new business unit approval process. The change in this business model is determined based on an assessment of the Company's financial risk factors and the identified potential guarantee claims.

Manajemen tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai investasi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, karena manajemen berpendapat bahwa pihak lawan memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya.

The management does not provide any allowance for impairment losses for investments as of 31 December 2024 and 2023, since management believes that the counterparty has a strong capacity to meet its contractual obligations.

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.

a) Deposito berjangka / *a) Time deposits*

	2024	2023	
Bank BUMN	3,416,000,000	6,798,300,000	*State-Owned banks*
Bank Swasta	2,517,500,000	100,000,000	*Private banks*
	5,933,500,000	6,898,300,000	

Deposito berjangka dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari tiga bulan sampai dengan satu tahun menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 6,75% - 7,50% per tahun di 2024 (2023: 4,25% - 6,75%).

Time deposits with original maturities more than three months and up to one year period earned interest rates ranging between 6.75% - 7.50% per annum in 2024 (2023: 4.25% - 6.75%).

b) Investasi dengan pendapatan tetap / *b) Fixed income investments*

- Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain / ***- Investments at fair value through other comprehensive income***

	2024	2023	
Obligasi Pemerintah	1,823,949,498	5,188,917,622	*Government bonds*
Obligasi BUMN	-	830,324,000	*State-Owned Enterprise bonds*
	1,823,949,498	6,019,241,622	

Harga pasar investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berkisar antara 94,00% sampai dengan 120,27% dan antara 94,77% sampai dengan 121,87% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The market price of investments at fair value through other comprehensive income ranged from 94.00% to 120.27% and from 94.77% to 121.87% as of 31 December 2024 and 2023, respectively.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/39 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

6. INVESTASI (lanjutan)

b) Investasi dengan pendapatan tetap (lanjutan)

- Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

Perusahaan mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai pasar investasi dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebesar Rp 56.945.416 (rugi) dan Rp 121.403.022 (laba) masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang dicatat pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan.

- Investasi yang diukur pada biaya perolehan

Pada tanggal 31 Desember 2024, periode jatuh tempo investasi pada obligasi berkisar antara 1 - 9 tahun (2023: 1 - 11 tahun) dan menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 4,88% - 10,25% per tahun di 2024 (2023: 5,38% - 10,25%).

6. INVESTMENTS *(continued)*

b) Fixed income investments *(continued)*

- Investments at fair value through ther comprehensive income *(continued)*

The company recognised the unrealized gains or losses from the changes in the market value of the investments categorised as fair value through other comprehensive income in the amount of Rp 56,945,416 (loss) and Rp 121,403,022 (gain) for the year ended 31 December 2024 and 2023, respectively, both recorded in the equity section of the statement of financial position.

- Investments at amortised cost

As of 31 December 2024, the maturity period of investments in bonds ranging between 1 - 9 years (2023: 1 - 11 years) maturities and earned interest rates ranging between 4.88% - 10.25% per annum in 2024 (2023: 5.38% - 10.25%).

	2024	2023	
Obligasi Pemerintah	6,169,223,850	2,748,722,849	*Government Bonds*
Obligasi BUMN	477,000,000	107,000,000	*State-Owned Enterprise bonds*
	6,646,223,850	2,855,722,849	

- Investasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi (sukuk)

Investasi diukur pada biaya perolehan merupakan investasi pada obligasi Sukuk yang diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 410 “Akuntansi Sukuk”.

- Investments measured at amortised cost (sukuk)

Investments at cost represents investments in Sukuk bonds which is recorded in accordance with SFAS 410 “Accounting for Sukuk”.

	2024	2023	
Obligasi BUMN	10,000,000	10,364,000	*State-Owned Enterprise bonds*
Obligasi Pemerintah	9,887,033	10,020,212	*Government Bonds*
	19,887,033	20,384,212	

7. PIUTANG USAHA

7. ACCOUNT RECEIVABLES

	2024	2023	
Bunga yang belum diterima	150,077,434	137,923,984	*Interest receivables*
Regres	184,674,276	92,032,652	*Recourse*
Penjaminan	89,018,262	74,116,250	*Guarantee*
Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi	36,303,808	42,276,903	*Project preparation and transaction advisory*
	460,073,780	346,349,789	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(57,688,580)	(18,775,000)	*Allowance for impairment losses*
Total	402,385,200	327,574,789	*Total*

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/40 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Piutang regres adalah segala pembayaran klaim yang telah dilakukan Perusahaan, akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban finansial PJPK kepada BU atas proyek Sistem Penyediaan Air Minum ("SPAM") Lampung dan SPAM Pekanbaru (lihat Catatan 25). Piutang bunga atas regres sebesar Rp 17.315.552 dicatat pada bunga yang belum diterima (2023 : Rp 5.787.549).

Pada tanggal 31 Desember 2024, piutang usaha sebesar Rp 190.815.202 mengalami penurunan nilai dan telah dicadangkan sebesar Rp 57.688.580 (2023: Rp 18.775.000).

Perubahan pada penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Saldo awal	18,775,000	2,000,000	*Beginning balance*
Penambahan	38,913,580	16,775,000	*Additions*
Saldo akhir	57,688,580	18,775,000	*Ending balance*

Manajemen berkeyakinan bahwa pencadangan atas penurunan nilai piutang tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

7. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

Recourse receivables is any payments that would be made by the Company, due to inability of GCA in fulfilling its financial obligations to the Investors for Water Supply System Lampung and Water Supply System Pekanbaru, and Eastern Palapa Ring projects (refer to Note 25). Interest receivables from recourse amounting Rp 17,315,552 recorded in interest receivables (2023: Rp 5,787,549).

As of 31 Desember 2024, account receivables amounting to Rp 190,815,202 are impaired and have been provisioned amounting Rp 57,688,580 (2023: Rp 18,775,000).

Movements of the allowance for impairment losses are as follows:

Management believes that the allowance for impairment of receivables is adequate to cover losses from uncollectible account receivables.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.

8. ASET TETAP

8. FIXED ASSETS

	2024					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pelepasan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset kepemilikan langsung:						***Direct ownership assets:***
Harga perolehan:						***Acquisition cost:***
Aset dalam penyelesaian	150,520	252,965	-	-	403,485	*Construction in progress*
Prasarana kantor	31,473,882	98,790	-	-	31,572,672	*Leasehold improvement*
Peralatan komputer	15,055,022	11,844	-	-	15,066,866	*Computer equipments*
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	11,250,754	406,952	-	-	11,657,706	*Office equipments, furnitures and fixtures*
	57,930,178	770,551	-		58,700,729	
Akumulasi penyusutan:						***Accumulated depreciation:***
Prasarana kantor	(21,273,452)	(2,821,068)	-	-	(24,094,520)	*Leasehold improvement*
Peralatan komputer	(12,266,465)	(1,645,713)	-	-	(13,912,178)	*Computer equipments*
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	(10,839,429)	(235,395)	-	-	(11,074,824)	*Office equipments, furnitures and fixtures*
	(44,379,346)	(4,702,176)	-	-	(49,081,522)	
Nilai buku	13,550,832				9,619,207	***Net book value***

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/41 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET TETAP (lanjutan) / *8. FIXED ASSETS (continued)*

	2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pelepasan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset kepemilikan langsung:						***Direct ownership assets:***
Harga perolehan:						***Acquisition cost:***
Aset dalam penyelesaian	-	10,142,451	-	(9,991,931)	150,520	*Construction in progress*
Prasarana kantor	20,867,846	614,105	-	9,991,931	31,473,882	*Leasehold improvement*
Peralatan komputer	14,214,197	840,825	-	-	15,055,022	*Computer equipments*
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	11,029,848	220,906	-	-	11,250,754	*Office equipments, furnitures and fixtures*
	46,111,891	11,818,287	-	-	57,930,178	
Akumulasi penyusutan:						***Accumulated depreciation:***
Prasarana kantor	(20,364,250)	(909,202)	-	-	(21,273,452)	*Leasehold improvement*
Peralatan komputer	(10,279,111)	(1,987,354)	-	-	(12,266,465)	*Computer equipments*
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	(10,572,957)	(266,472)	-	-	(10,839,429)	*Office equipments, furnitures and fixtures*
	(41,216,318)	(3,163,028)	-	-	(44,379,346)	
Nilai buku	4,895,573				13,550,832	***Net book value***

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Management believes that no impairment in fixed assets value as at 31 December 2024 and 2023.

9. ASET HAK-GUNA / *9. RIGHT-OF-USE ASSETS*

Perusahaan menyewa aset berupa gedung kantor yang digunakan dalam operasinya yang memiliki masa sewa selama 3 tahun yang dimulai dari tanggal 1 September 2020 dan berakhir pada 31 Agustus 2023. Perusahaan kemudian memperpanjang dengan masa sewa selama 3 tahun yang dimulai dari tanggal 1 September 2023.

The Company leases asset in the form of office space used for its operations that have a lease period of 3 years starting on 1 September 2020 and ending on 31 August 2023. The Company subsequently extended this lease with the period of 3 years starting on 1 September 2023.

Beban amortisasi sewa gedung kantor diakui sebagai beban sewa dalam kategori beban umum dan administrasi.

Amortisation expense of office space lease was recognised as rental expense under general and administrative expenses.

	2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pelepasan/ *Disposals*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset kepemilikan langsung:					***Direct ownership assets:***
Harga perolehan:					***Acquisition cost:***
Gedung kantor	50,978,008	530,217	-	51,508,225	*Office building*
	50,978,008	530,217	-	51,508,225	
Akumulasi amortisasi:					***Accumulated amortisation:***
Gedung kantor	(5,664,223)	(17,228,322)	-	(22,892,545)	*Office building*
	(5,664,223)	(17,228,322)	-	(22,892,545)	
Nilai buku	45,313,785			28,615,680	***Net book value***

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/42 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET HAK-GUNA / *9. RIGHT-OF-USE ASSETS*

	2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pelepasan/ *Disposals*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan:					***Acquisition cost:***
Gedung kantor	56,579,087	50,978,008	(56,579,087)	50,978,008	*Office building*
	56,579,087	50,978,008	(56,579,087)	50,978,008	
Akumulasi amortisasi:					***Accumulated amortisation:***
Gedung kantor	(44,005,957)	(18,237,353)	56,579,087	(5,664,223)	*Office building*
	(44,005,957)	(18,237,353)	56,579,087	(5,664,223)	
Nilai buku	12,573,130			45,313,785	***Net book value***

10. ASET TAKBERWUJUD / *10. INTANGIBLE ASSETS*

	2024					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pelepasan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan:						***Acquisition cost:***
Aset dalam penyelesaian	96,800	1,022,608	-	(77,800)	1,041,608	*Construction in progress*
Piranti lunak	14,778,044	1,577,755	-	77,800	16,433,599	*Software*
	14,874,844	2,600,363	-	-	17,475,207	
Akumulasi amortisasi:						***Accumulated amortisation:***
Piranti lunak	(10,587,718)	(1,963,944)	-	-	(12,551,662)	*Software*
	(10,587,718)	(1,963,944)	-	-	(12,551,662)	
Nilai buku	4,287,126				4,923,545	***Net book value***

	2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pelepasan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan:						***Acquisition cost:***
Aset dalam penyelesaian	48,878	482,312	-	(434,390)	96,800	*Construction in progress*
Piranti lunak	13,863,246	480,408	-	434,390	14,778,044	*Software*
	13,912,124	962,720	-	-	14,874,844	
Akumulasi amortisasi:						***Accumulated amortisation:***
Piranti lunak	(8,442,393)	(2,145,325)	-	-	(10,587,718)	*Software*
	(8,442,393)	(2,145,325)	-	-	(10,587,718)	
Nilai buku	5,469,731				4,287,126	***Net book value***

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Management believes that no impairment in intangible assets value as at 31 December 2024 and 2023.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/43 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

11. BEBAN TANGGUHAN

11. DEFERRED EXPENSES

	2024	2023	
Beban tangguhan	18,579,494	19,928,555	*Deferred expenses*
Penyisihan penurunan nilai	(15,742,247)	(15,594,747)	*Provision for impairment*
	2,837,247	4,333,808	

Beban tangguhan terutama merupakan biaya atas jasa konsultasi yang terkait langsung dengan kegiatan pemrosesan dan pengaturan penjaminan jangka panjang dan akan dibebankan pada saat pendapatan dari penjaminan tersebut diakui.

Deferred expenses mainly represent advisory costs which directly attributable to the processing and arranging activities in providing long-term guarantees and will be expensed upon the recognition of such fees.

Beban tangguhan juga mencakup biaya pelaksanaan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi dan akan dibebankan ke laba rugi pada saat pendapatan dari penyiapan proyek dan pendampingan transaksi diakui.

Deferred expenses also included costs for project preparation and transaction advisory and will be recognised to profit and loss upon the recognition of revenue from project preparation and transaction advisory.

Perubahan pada penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movements of the allowance for impairment losses are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	15,594,747	14,196,021	*Beginning balance*
Penambahan	147,500	1,398,726	*Additions*
Saldo akhir	15,742,247	15,594,747	*Ending balance*

Kecuali untuk jumlah beban tangguhan yang telah dibentuk penyisihannya, manajemen berkeyakinan bahwa proyek-proyek terkait akan dapat mencapai penandatanganan perjanjian penjaminan. Oleh karena itu, beban tangguhan terus diakui di laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Except for deferred expenses that have been provided with impairment provision, management believes that outstanding projects could achieve the signing of guarantee of the project. Therefore, the deferred expenses continue to be recognised in the Company's statement of financial position as at 31 December 2024 and 2023.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai atas beban tangguhan yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the provision for impairment losses on deferred expenses is adequate.

12. UTANG USAHA

12. ACCOUNT PAYABLES

Utang usaha terutama merupakan pembayaran yang belum dilakukan untuk jasa konsultasi terkait dengan penyediaan penjaminan, penyiapan proyek dan pendampingan transaksi dan biaya operasional Perusahaan.

Account payables mainly represent payables for advisory related to the guarantee, project preparation and transaction advisory provision, and the Company's operational costs.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/44 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN / *13. TAXATION*

a. Pajak dibayar dimuka / *a. Prepaid income tax*

	2024	2023	
Lebih bayar:			*Overpayment of:*
Pajak Pertambahan Nilai:			*Value Added Tax:*
- 2022	-	1,908,073	*2022 -*
- 2023	3,124,162	3,122,208	*2023 -*
- 2024	5,548,664	-	*2024 -*
	8,672,826	5,030,281	
Pajak Penghasilan Pasal 21	496,450	-	*Witholding Tax Article 21*
	9,169,276	5,030,281	

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	2024	2023	
Pajak lain-lain:			*Other taxes:*
- Pajak Pertambahan Nilai	1,201,790	1,346,414	*Value Added Tax -*
- Pajak Penghasilan Pasal 23	249,858	144,147	*Withholding Tax Article 23 -*
- Pajak Penghasilan Pasal 21	55,642	2,342,236	*Withholding Tax Article 21 -*
- Lainnya	24,310	13,011	*Others -*
	1,531,600	3,845,808	

c. (Beban)/Manfaat pajak penghasilan / *c. (Expense)/Income tax benefit*

Manfaat pajak Perusahaan terdiri dari sebagai berikut:

Tax benefit of the Company consist of the following:

	2024	2023	
Pajak tangguhan	(11,145,678)	281,887	*Deferred tax*
	(11,145,678)	281,887	

Rekonsiliasi antara manfaat pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the tax benefit and the amounts computed by applying the prevailing tax rates to profit before income tax is as follows:

	2024	2023	
Laba sebelum pajak penghasilan	942,025,356	835,539,267	*Profit before income tax*
Beban pajak dihitung dengan tarif yang berlaku	(207,245,579)	(183,818,639)	*Tax calculated at applicable tax rate*
Pengaruh atas:			*Effects of:*
- Pendapatan yang sudah dikenakan pajak final	240,658,426	222,311,855	*Revenues subjected to - final income tax*
- Rugi pajak yang dibebankan di tahun berjalan	(2,649,713)	(947,046)	*Tax loss charged - in current year*
- Beban yang tidak dapat diperhitungkan	(41,908,812)	(37,264,283)	*Non-deductible expenses -*
Manfaat pajak penghasilan	(11,145,678)	281,887	*Income tax benefit*

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/45 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. (Beban)/Manfaat pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dan laba yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

13. TAXATION *(continued)*

c. (Expense)/Income tax benefit *(continued)*

A reconciliation between profit before income tax and the Company's taxable income is as follows:

	2024	2023	
Laba sebelum pajak penghasilan	942,025,356	835,539,267	*Profit before income tax*
Beda waktu	(50,409,209)	1,431,339	*Timing differences*
Beda tetap	190,241,638	170,034,774	*Permanent differences*
Pendapatan yang sudah dikenakan pajak final	(1,093,901,935)	(1,010,508,431)	*Revenues subjected to final income tax*
(Rugi)/laba pajak berjalan	(12,044,150)	(3,503,051)	*Current tax (loss)/income*
Rugi pajak yang bisa dikompensasi	(65,827,232)	(70,226,268)	*Tax loss carry forward*
Akumulasi kerugian pajak	(77,871,382)	(73,729,319)	*Accumulated tax losses*

Berikut ini adalah rincian akumulasi kerugian fiskal:

Below are details of accumulated fiscal losses:

	2024	2023	
Tahun fiskal:			*Fiscal year:*
2024	(12,044,150)	-	*2024*
2023	(3,503,051)	(3,503,051)	*2023*
2020	(43,281,299)	(43,281,299)	*2020*
2019	(19,042,882)	(26,944,969)	*2019*
	(77,871,382)	(73,729,319)	

Termasuk di dalam koreksi fiskal beda tetap adalah beban pajak sebesar Rp 158.158.364 (2023: Rp 139.545.730) yang dibayarkan atas penerimaan bunga dari deposito berjangka, pendapatan tetap dan rekening giro.

Included in the fiscal correction of the permanent difference is the tax expense of Rp 158,158,364 (2023: Rp 139,545,730) paid for interest income from time deposits, fixed income and current accounts.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 di atas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajaknya.

The above corporate income tax calculation for the year ended 31 December 2024 was a preliminary estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Company lodges its Annual Corporate Tax Return ("SPT").

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sesuai dengan SPT Tahunan Perusahaan.

The calculations of income tax for the year ended 31 December 2023 conform to the Company's Annual Tax Return.

Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-136 Tahun 2024 (PMK-136) telah disahkan di Indonesia, yurisdiksi di mana perusahaan didirikan, dan akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Karena PMK-136 belum efektif pada tanggal pelaporan, Perusahaan tidak memiliki eksposur pajak saat ini yang terkait. Perusahaan menerapkan pengecualian untuk mengakui dan mengungkapkan informasi tentang aset dan kewajiban pajak tangguhan yang terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua, sebagaimana diatur dalam amanedemen PSAK 212 yang diterbitkan pada bulan Desember 2023.

The MOF Regulation no. PMK-136 Year 2024 (PMK-136) was enacted in Indonesia, the jurisdiction in which the company is incorporated, and will come into effect from 1 January 2025. Since the PMK-136 was not effective at the reporting date, the Company has no related current tax exposure. The Company applies the exception to recognising and disclosing information about deferred tax assets and liabilities related to Pillar Two income taxes, as provided in the amendments to PSAK 212 issued in December 2023.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/46 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. (Beban)/Manfaat pajak penghasilan (lanjutan)

Perusahaan sedang dalam proses menilai apakah Perusahaan termasuk dalam cakupan model Pilar Dua dan apakah ada eksposur terhadap PMK-136 ketika peraturan tersebut mulai berlaku. Karena kompleksitas dalam menerapkan PMK-136 dan menghitung pendapatan GloBE, dampak kuantitatif dari PMK-136 yang disahkan belum dapat diperkirakan secara wajar.

13. TAXATION *(continued)*

c. (Expense)/Income tax benefit *(continued)*

The Company is in the process of assessing whether the Company is within the scope of Pillar Two model and if there is any exposure to the PMK-136 for when it comes into effect. Due to the complexities in applying the PMK-136 and calculating GloBE income, the quantitative impact of the enacted PMK-136 is not yet reasonably estimable.

d. Aset pajak tangguhan

d. Deferred tax asset

	2024				
	1 Januari/ *January 2024*	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ *Credited/ (charged) to statements of profit or loss***	**Dibebankan ke ekuitas/ *Charged to equity***	**31 Desember/ *December 2024***	
Penyisihan gaji dan bonus	6,539,681	745,487	-	7,285,168	*Provision for salaries and bonus*
Beban penyisihan imbalan kerja	6,715,779	1,211,392	(847,353)	7,079,818	*Provision for employee benefits obligation*
Perbedaan antara buku dan pajak dari nilai buku bersih aset tetap	1,639,671	(125,513)	-	1,514,158	*Differences between accounting and tax fixed assets net book value*
Pendapatan tangguhan penjaminan	5,911,312	1,103,889	-	7,015,201	*Guarantee unearned income*
Penyisihan penurunan nilai piutang	4,130,500	8,560,987	-	12,691,487	*Allowance for Account Receivable*
Penyisihan penurunan nilai	3,430,845	32,450	-	3,463,295	*Provision for impairment*
Pendapatan tangguhan pelaku usaha korporasi	22,872,674	(14,092,991)	-	8,779,683	*Corporate business entities unearned income*
Estimasi komitmen dan kontijensi penjaminan pelaku usaha korporasi	19,662,424	(8,581,379)	-	11,081,045	*Commitment and contigencies of Corporate business entities revenue*
	70,902,886	(11,145,678)	(847,353)	58,909,855	

	2023				
	1 Januari/ *January 2023*	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ *Credited/ (charged) to statements of profit or loss***	**Dikreditkan ke ekuitas/ *Credited to equity***	**31 Desember/ *December 2023***	
Penyisihan gaji dan bonus	6,578,964	(39,283)	-	6,539,681	*Provision for salaries and bonus*
Beban penyisihan imbalan kerja	4,084,310	1,204,802	1,426,667	6,715,779	*Provision for employee benefits obligation*
Perbedaan antara buku dan pajak dari nilai buku bersih aset tetap	2,022,808	(383,137)	-	1,639,671	*Differences between accounting and tax fixed assets net book value*
Pendapatan tangguhan penjaminan	5,419,972	491,340	-	5,911,312	*Guarantee unearned income*
Penyisihan penurunan nilai piutang	440,000	3,690,500	-	4,130,500	*Allowance for account receivable*
Penyisihan penurunan nilai	3,123,125	307,720	-	3,430,845	*Provision for impairment*
Pendapatan tangguhan pelaku usaha korporasi	31,965,062	(9,092,388)	-	22,872,674	*Corporate business entities unearned income*
Estimasi komitmen dan kontinjensi penjaminan pelaku usaha korporasi	15,560,091	4,102,333	-	19,662,424	*Commitment and contingencies of corporate business entities revenue*
	69,194,332	281,887	1,426,667	70,902,886	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/47 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ("Perpu") Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang ("UU") No. 2 Tahun 2020. Aturan tersebut menetapkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya. Dengan demikian, penetapan tarif pajak sebelumnya sebesar 20% menjadi tidak berlaku setelah Undang-Undang ini disahkan.

Pada 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan dari akumulasi rugi fiskal (*tax losses carry forward*) karena ketidakpastian tersedianya penghasilan kena pajak di masa depan dimana akumulasi kerugian pajak dapat dimanfaatkan.

13. TAXATION *(continued)*

d. Deferred tax asset *(continued)*

On 31 March 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law ("Perpu") of the Republic of Indonesia No. 1 Year 2020 which has become Law ("UU") No. 2 Year 2020. The regulation has stipulated the reduction in the income tax rates for domestic corporate taxpayers and business establishments from 25% to 22% for fiscal year 2020 and 2021 and 20% for the fiscal year 2022 onwards.

On 29 October 2021, the Government issued Law of the Republic of Indonesia No. 7 Year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards. Hence, the previously tax rate determination of 20% will be invalid after the ratification of this Law.

As at 31 December 2024 and 2023, the Company does not recognise deferred assets relating to the tax losses carried forward due to uncertainty about the availability of future taxable income where the tax losses carry forward can be utilised.

e. Pemeriksaan pajak

Tahun pajak 2023

- **Pajak pertambahan nilai**

Pada tanggal 22 Maret 2024, Perusahaan menerima surat perintah pemeriksaan pajak terkait lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2023.

Pada tanggal 24 Desember 2024, Perusahaan menerima SKPLB Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2023 sebesar Rp 3.124.162 yang pembayarannya telah diterima Perusahaan pada tanggal 16 Januari 2025.

e. Tax audit

Fiscal year 2023

- ***Value added tax***

On 22 March 2024, the Company received a tax audit letter related to Overpayment of Value Added Tax for fiscal year 2023.

On 24 December 2024, the Company received an Overpayment Tax Assessment Letter which confirmed the overpayment of Value Added Tax for fiscal year 2023 amounting to Rp 3,124,162 and the payment was received by the Company on 16 January 2025.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/48 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

Tahun pajak 2022

- **Pajak pertambahan nilai**

Pada tanggal 23 Mei 2023, Perusahaan menerima surat perintah pemeriksaan pajak terkait lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2022.

Pada tanggal 20 Desember 2023, Perusahaan menerima SKPLB Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2022 sebesar Rp 2.015.255 (termasuk denda). Perusahaan telah menerima pembayaran lebih bayar ini sebesar Rp 1.908.073 pada tanggal 11 Januari 2024. Denda sebesar Rp 107.182 telah dibukukan oleh Perusahaan pada laba rugi.

13. TAXATION *(continued)*

e. Tax audit *(continued)*

Fiscal year 2022

- ***Value added tax***

On 23 May 2023, the Company received a tax audit letter related to Overpayment of Value Added Tax for fiscal year 2022.

On 20 December 2023, the Company received an Overpayment Tax Assessment Letter which confirmed the overpayment of Value Added Tax for fiscal year 2022 amounting to Rp 2,015,255 (including penalty). The Company has received this overpayment amounting to Rp 1,908,073 on 11 January 2024. Penalty amounting to Rp 107,182 has been recorded by the Company on profit or loss.

14. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR, PENYISIHAN DAN UTANG LAIN-LAIN

14. ACCRUED EXPENSES, PROVISIONS AND OTHER PAYABLES

	2024	2023	
Estimasi komitmen dan kontinjensi penjaminan pelaku usaha korporasi	50,368,387	89,374,654	*Estimated commitment and contingencies of corporate business entities*
Beban jasa konsultasi	31,686,926	40,353,354	*Advisory fees*
Bonus dan gaji	33,114,397	29,725,822	*Bonus and salary*
Lainnya	2,754,813	3,215,080	*Others*
	117,924,523	162,668,910	

Manajemen berpendapat bahwa estimasi komitmen dan kontinjensi atas penjaminan pelaku usaha korporasi yang diakui dalam laporan keuangan adalah cukup untuk menutup potensi klaim penjaminan yang tidak terpulihkan.

Management believes that the estimated commitment and contingency to guarantees for corporate business entities recognised in the financial statements are adequate to cover potential non-recoverable guarantee claims.

15. PENDAPATAN TANGGUHAN

15. UNEARNED INCOME

	2024	2023	
Penjaminan pelaku usaha korporasi	39,907,654	103,966,704	*Corporate business entities guarantee*
Penjaminan infrastruktur	31,887,277	26,869,601	*Infrastructure guarantee*
	71,794,931	130,836,305	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/49 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

16. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN

Liabilitas sewa pembiayaan merupakan liabilitas sewa pembiayaan aset hak-guna yang merupakan nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar dan dihitung dengan suku bunga implisit dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa pembiayaan tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

16. FINANCE LEASE LIABILITIES

Finance lease liabilities represent lease liabilities for right-of-use assets of present value of unpaid lease payments and are calculated using the implicit interest rate of the incremental loan interest rate.

Future minimum lease payments together with the present value of the minimum lease payments for year 2024 and 2023 were as follows.

	2024	2023	
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:			*The present value lease liabilities are as follows:*
- Tidak lebih dari 1 tahun	17,954,021	18,557,572	*Not later than 1 year* -
- Lebih dari 1 tahun	13,244,378	27,642,950	*Later than 1 year* -
	31,198,399	46,200,522	

17. PINJAMAN PENERUSAN

Pada tanggal 27 Mei 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian penerusan pinjaman dengan Pemerintah atas dana pinjaman dari *International Bank for Reconstruction and Development*.

Pinjaman penerusan adalah pinjaman yang diperoleh Pemerintah dari bank luar negeri yaitu *World Bank*, yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh dicatat dan terutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman.

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai peningkatan kapasitas penjaminan Perusahaan dan pengadaan konsultan jasa atas proyek KPBU di bidang infrastruktur. Pokok pinjaman akan dilunasi dengan angsuran semesteran setelah masa tenggang selama 9 (sembilan) tahun dan akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2029.

17. TWO-STEP LOANS

On 27 May 2013, the Company entered into a two-step loans agreement with the Government in regards to the fund provided by the International Bank for Reconstruction and Development.

Two-step loans are loans obtained by the Government from international bank which is World Bank, which are then re-loaned to the Company. The loans were recorded and payable in Rupiah based on the exchange rate at the date of drawdown.

The loans are intended for the development of underwriting capacity of the Company and procurement of service consultants on PPP in infrastructure projects. The loan principal are payable in semi-annual installments after grace period of 9 (nine) years and are due up to 2029.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/50 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. PINJAMAN PENERUSAN (lanjutan)

Pada tanggal 22 Februari 2016, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan surat No. S-1504/MK.5/2016 sebagai amendemen atas perjanjian penerusan pinjaman No. SLA-1251/DSMI/2013 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan, dengan perubahan pada tingkat suku bunga, yaitu menggunakan SUN *Benchmark* dengan tenor 20 tahun. Batas penarikan pinjaman penerusan telah berakhir pada tanggal 30 April 2019.

Pada tanggal 19 November 2020, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan surat No. S-162/MK.5/2020 sebagai amendemen kedua atas perjanjian penerusan pinjaman No. SLA-1251/DSMI/2013 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan, dengan perubahan jadwal pembayaran pokok pinjaman dengan masa tenggang selama 9 (sembilan) tahun sejak tanggal penarikan pertama dan akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2034.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah akumulasi penarikan pinjaman penerusan adalah sebesar Rp 54.586.445 dan Rp 55.126.686. Pinjaman penerusan ini menggunakan SUN *Benchmark* sebagai acuan tingkat suku bunga atau setara dengan tingkat suku bunga 7,13% pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas Cicilan Pokok Rp 540.241 (2023: nihil) dan bunga pinjaman penerusan Rp 3.927.253 (2023: Rp 3.927.776).

Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman tersebut di atas.

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

17. TWO-STEP LOANS *(continued)*

On 22 February 2016, Ministry of Finance Republic of Indonesia issued a letter No. S-1504/MK.5/2016 as an amendment of loan agreement No. SLA-1251/DSMI/2013 between the Government of Indonesia and the Company, with the amendment of interest rate using SUN Benchmark with 20 years tenor. The loans drawdown expired on 30 April 2019.

On 19 November 2020, Ministry of Finance Republic of Indonesia issued a letter No. S-162/MK.5/2020 as second amendment of loan agreement No. SLA-1251/DSMI/2013 between the Government of Indonesia and the Company, with the amendment of changes in repayment schedule with grace period of 9 (nine) years starting from the first drawdown date and are due up to 2034.

As at 31 December 2024 and 2023, the withdrawal of accumulated two-step loans are amounting to Rp 54,586,445 and Rp 55,126,686. This loan used SUN Benchmark as reference of interest expense or equivalent to 7.13% for the year ended 31 December 2024 2023, respectively. As of 31 December 2024, the Company has paid the principal installments Rp. 540,241 (2023: nil) and interest of the two-step loans amounting Rp 3,927,253 (2023: Rp 3,927,776).

The Company has complied with the covenants in the borrowing agreements above.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perusahaan mengakui penyisihan imbalan kerja sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 tanggal 2 November 2020.

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, perusahaan aktuaris independen.

18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

The Company provides employee benefits based on the provisions of Job Creation Law No. 11/2020 dated 2 November 2020.

Employee benefits obligations as at 31 December 2024 and 2023 have been calculated by Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, an independent actuary.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/51 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

Liabilitas imbalan kerja berdasarkan laporan aktuaria tanggal 18 Februari 2025 dan 21 Februari 2024 diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Employee benefits obligations based on the actuarial reports dated 18 February 2025 and dated 21 February 2024 recognised in the statements of financial position are as follows:

	2024	2023	
Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya	25,123,655	24,549,282	*Pension and other post-employment benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	7,057,336	5,976,989	*Other long-term benefits*
	32,180,991	30,526,271	

Beban/(pendapatan) bersih yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Net expense/(income) recognised in the statements of profit or loss is as follows:

	2024	2023	
Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya	6,176,960	4,100,872	*Pension and other post-employment benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	1,781,183	1,955,907	*Other long-term benefits*
	7,958,143	6,056,779	

Asumsi utama yang digunakan untuk menentukan kewajiban imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The principal assumptions used in determining the post-employment benefits obligation as at 31 December 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Usia pensiun normal	56 tahun/*years*	56 tahun/*years*	*Retirement age*
Tingkat diskonto	7.15%	6.80%	*Discount rate*
Tingkat mortalita	TMI 4 (2019)	TMI 4 (2019)	*Mortality rate*
Tingkat kenaikan gaji	10.00%	10.00%	*Salary increment rate*
Tingkat pengunduran diri	5% sampai di usia 25 tahun dan menurun secara linear ke 1% di usia 45 tahun dan seterusnya/ *5% up to age 25 and reducing linearly to be 1% at age 45 and thereafter*	5% sampai di usia 25 tahun dan menurun secara linear ke 1% di usia 45 tahun dan seterusnya/ *5% up to age 25 and reducing linearly to be 1% at age 45 and thereafter*	*Resignation rate*

Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya

Pension and other post-employment benefits

Liabilitas imbalan pensiun dan pascakerja lainnya diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Pension and other post-employment benefits recognised in the statements of financial position are as follows:

	2024	2023	
Liabilitas imbalan pensiun dan pascakerja lainnya	25,123,655	24,549,282	*Pension and other post-employment benefits obligation*

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/52 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION *(continued)*

Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya (lanjutan)

Pension and other post-employment benefits *(continued)*

Beban/(pendapatan) bersih yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Net expense/(income) recognised in the statements of profit or loss is as follows:

	2024	2023	
Biaya jasa kini	4,329,637	2,872,070	*Current service cost*
Beban bunga	1,610,173	990,574	*Interest cost*
Biaya jasa lalu	53,670	161,881	*Past service cost*
Kelebihan pembayaran imbalan	183,480	76,347	*Excess of benefit paids*
	6,176,960	4,100,872	

Mutasi imbalan pensiun dan pascakerja lainnya adalah sebagai berikut:

The movement in the pension and other post-employment benefits is as follows:

	2024	2023	
Saldo awal tahun	24,549,282	14,099,905	*Balance at the beginning of the year*
Beban imbalan kerja tahun berjalan	6,176,960	4,100,872	*Employee benefit expense charged in the current year*
Pengukuran kembali:			*Remeasurement:*
Keuntungan/(kerugian) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(3,851,606)	6,484,852	*Gain/(loss) from changes in financial assumptions*
Pembayaran imbalan kerja	(1,750,981)	(136,347)	*Benefit paid*
	25,123,655	24,549,282	

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial yang signifikan pada imbalan pensiun dan pascakerja lainnya adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in significant actuarial assumptions on pension and post-employment benefits obligation are as follow:

	31 Desember/*December* 2024			
	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1.00%	(2,196,856)	2,522,450	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	3,927,031	(3,453,796)	*Rate of salary increase in the future*

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/53 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION *(continued)*

Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya (lanjutan)

Pension and other post-employment benefits *(continued)*

	31 Desember/*December* 2023			
	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1.00%	(2,107,977)	2,423,919	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	3,573,272	(3,139,600)	*Rate of salary increase in the future*

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2024 adalah 15,00 tahun (2023: 15,46 tahun).

The weighted average duration of the defined benefit pension obligation at 31 December 2024 is 15.00 years (2023: 15.46 years).

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits is as follow:

	2024	2023	
Kurang dari 1 tahun	835,005	1,740,542	*Less than a year*
1 sampai 2 tahun	1,816,263	902,755	*Between 1 - 2 years*
2 sampai 5 tahun	7,765,088	10,907,515	*Between 2 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	247,776,190	257,097,846	*Over than 5 years*

Imbalan jangka panjang lainnya

Other long-term benefits

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Other long-term benefits obligations recognised in the statements of financial position are as follows:

	2024	2023	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya	7,057,336	5,976,989	*Other long-term benefits obligation*

Beban/(pendapatan) bersih yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Net expense/(income) recognised in the statements of profit or loss is as follows:

	2024	2023	
Biaya jasa kini	988,785	828,429	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	14,300	36,488	*Past service cost*
Beban bunga	389,371	306,604	*Interest cost*
Kerugian/(keuntungan) aktuarial	388,727	784,386	*Actuarial loss/(gains)*
	1,781,183	1,955,907	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/54 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION *(continued)*

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

Other long-term benefits *(continued)*

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The movement in the employee benefits obligation is as follows:

	2024	2023	
Saldo awal tahun	5,976,989	4,465,142	*Balance at the beginning of the year*
Beban tahun berjalan	1,781,183	1,955,907	*Current year expense*
Pembayaran imbalan kerja	(700,836)	(444,060)	*Employee benefits paid*
	7,057,336	5,976,989	

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial yang signifikan pada imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in significant actuarial assumptions on other long-term benefits obligation are as follow:

	31 Desember/*December* 2024			
	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in Assumption*	
Tingkat diskonto	1.00%	(446,188)	502,841	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	517,634	(468,472)	*Rate of salary increase in the future*

	31 Desember/*December* 2023			
	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1.00%	(390,638)	441,498	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	451,880	(407,931)	*Rate of salary increase in the future*

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted after other long-term benefits is as follow:

	2024	2023	
Kurang dari 1 tahun	978,342	501,892	*Less than a year*
1 sampai 2 tahun	833,122	789,745	*Between 1 - 2 years*
2 sampai 5 tahun	3,387,187	1,973,955	*Between 2 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	28,251,972	22,725,554	*Over than 5 years*

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/55 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

19. MODAL SAHAM

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

19. SHARE CAPITAL

The composition of Company's shareholder as at 31 December 2024 and 2023 are as follows:

	2024			
	Jumlah saham/ *Number of shares*	**Kepemilikan/ *Ownership (%)***	**Nilai/ *Value***	
Pemerintah Republik Indonesia	10,655,000	100	10,655,000,000	*Government of the Republic of Indonesia*

	2023			
	Jumlah saham/ *Number of shares*	**Kepemilikan/ *Ownership (%)***	**Nilai/ *Value***	
Pemerintah Republik Indonesia	10,655,000	100	10,655,000,000	*Government of the Republic of Indonesia*

20. DIVIDEN

Pada tahun 2024, berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., No. 23 tanggal 21 Mei 2024, Pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2024 telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun 2023 sejumlah Rp 167.165.000 yang telah dibayarkan pada tanggal 6 Juni 2024

Pada tahun 2023, berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., No. 22 tanggal 19 Mei 2023, Pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2023 telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun 2022 sejumlah Rp 142.834.725 yang telah dibayarkan pada tanggal 9 Juni 2023.

20. DIVIDEND

In 2024, based on Notarial Deed of Arry Supratno, S.H., No. 24 dated 21 May 2024, Shareholder through Annual General Meeting of Shareholders on 21 May 2024 approved amount of dividend for 2023 amounting Rp 167,165,000 that has been paid on 6 June 2024.

In 2023, based on Notarial Deed of Arry Supratno, S.H., No. 22 dated 19 May 2023, Shareholder through Annual General Meeting of Shareholders on 19 May 2023 approved amount of dividend for 2022 amounting Rp 142,834,725 that has been paid on 9 June 2023.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/56 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. SALDO LABA YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA - CADANGAN WAJIB

Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba setiap tahun buku untuk cadangan apabila saldo laba positif sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Pada tahun 2024, Perusahaan membentuk tambahan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 41.792.000, sehingga saldo cadangan menjadi sebesar Rp 306.270.126. Cadangan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Notaris Arry Supratno, S.H., No. 23 tanggal 21 Mei 2024.

Pada tahun 2023, Perusahaan membentuk tambahan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 35.708.681, sehingga saldo cadangan menjadi sebesar Rp 264.478.126. Cadangan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Notaris Arry Supratno, S.H., No. 22 tanggal 19 Mei 2023.

Manajemen bermaksud untuk meningkatkan cadangan tersebut di masa datang.

21. RETAINED EARNING APPROPRIATED - STATUTORY RESERVE

Based on Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007, the Company shall appropriate a certain amount of its profit in each year for general reserve if there are available retained earnings, until the general reserve has reached at least 20% of the issued and paid-up capital.

In 2024, the Company has made additional appropriation of retained earnings, amounting to Rp 41,792,000, as the reserve balance became Rp 306,270,126. This general reserve was approved in the Circular Decision General Meeting of Shareholders as covered by Notarial Deed No. 23 of Arry Supratno, S.H., dated 21 May 2024.

In 2023, the Company has made additional appropriation of retained earnings, amounting to Rp 35,708,681, as the reserve balance became Rp 264,478,126. This general reserve was approved in the Circular Decision General Meeting of Shareholders as covered by Notarial Deed No. 22 of Arry Supratno, S.H., dated 19 May 2023.

Management plans to increase the general reserve in the future.

22. PENDAPATAN

22. REVENUES

	2024	2023	
Pendapatan penjaminan:			*Revenue from guarantee:*
- Pendapatan premi	144,317,918	129,209,142	*Premium income -*
- Pendapatan pelaku usaha korporasi	125,671,843	78,694,405	*Corporate business entities revenue -*
- Pendapatan provisi dan komisi	40,064,346	24,450,000	*Fees and commission -*
	310,054,107	232,353,547	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/57 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PENDAPATAN (lanjutan) / *22. REVENUES (continued)*

	2024	2023	
Pendapatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi	70,265,155	70,529,576	*Revenue from project preparation and transaction advisory*
Pendapatan pengelolaan dana:			*Income from investments:*
- Deposito berjangka	491,737,556	387,151,445	*Time deposits -*
- Investasi dengan pendapatan tetap:			*Fixed income: -*
Pendapatan bunga	600,177,496	621,928,913	*Interest income*
	1,091,915,052	1,009,080,358	
Pendapatan lainnya	14,696,272	6,042,076	*Income from others*
	1,486,930,586	1,318,005,557	

Pendapatan penjaminan pelaku usaha korporasi yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Revenue from corporate business entities recognised in the profit or loss is as follows:

	2024	2023	
Amortisasi pendapatan tangguhan penjaminan pelaku usaha korporasi	88,850,000	97,341,375	*Amortisation of corporate business entities unearned income*
Estimasi komitmen pelaku usaha korporasi	36,821,843	(18,646,970)	*Estimated corporate business entities commitment*
	125,671,843	78,694,405	

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.

23. BEBAN USAHA / *23. OPERATING EXPENSES*

	2024	2023	
Umum dan administrasi:			***General and administrative:***
- Pegawai	60,435,400	56,918,066	*Employee cost -*
- Sewa	20,515,894	23,043,522	*Rent -*
- Jasa profesional	11,854,549	13,812,539	*Professional fees -*
- Pemeliharaan	7,007,152	4,542,796	*Maintenance -*
- *Outsourcing*	6,914,927	6,175,776	*Outsourcing -*
- Rapat dan konferensi	6,242,437	6,855,031	*Meeting and conference -*
- Beban bina karyawan	4,829,265	6,064,210	*Employee development -*
- Pelatihan	4,615,925	4,310,379	*Training -*
- Perjalanan dinas	3,382,653	2,663,290	*Travelling -*
- Transportasi	1,113,879	970,688	*Transportation -*
- Perlengkapan kantor	1,005,486	780,758	*Office equipment -*
- Air dan Listrik	251,251	276,453	*Water & electricity -*
- Lokakarya	73,489	370,547	*Workshop -*
- Komunikasi	50,615	89,601	*Communication -*
- Lainnya	259,959	185,262	*Others -*
	128,552,881	127,058,918	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/58 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. BEBAN USAHA (lanjutan) / *23. OPERATING EXPENSES (continued)*

	2024	2023	
Penjaminan:			***Guarantee:***
- Pegawai	78,529,622	70,239,585	*Employee cost* -
- Konsultan	6,757,115	3,626,883	*Consultancy* -
- Perjalanan dinas	1,411,005	1,036,566	*Travelling* -
- Rapat dan konferensi	790,371	1,248,185	*Meeting and conference* -
- Lokakarya	435,370	1,040,390	*Workshop* -
	87,923,483	77,191,609	
Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi:			***Project preparation and transaction advisory:***
- Konsultan	47,082,597	48,029,935	*Consultancy* -
- Pegawai	28,197,968	23,593,649	*Employee cost* -
- Perjalanan dinas	3,244,354	1,861,630	*Travelling* -
- Rapat dan konferensi	2,260,912	1,666,018	*Meeting and conference* -
- Lokakarya	785,120	1,776,989	*Workshop* -
	81,570,951	76,928,221	
Pengembangan usaha:			***Business development:***
- Pegawai	20,870,443	18,815,370	*Employee cost* -
- *IIGF Institute*	5,089,557	5,353,308	*IIGF Institute* -
- Sumbangan sosial	4,867,517	4,429,785	*Social contribution* -
- Lokakarya	3,784,291	2,831,389	*Workshop* -
- Iklan dan promosi	1,860,468	1,918,502	*Advertising and promotion* -
- Representasi	908,494	847,652	*Representation* -
- Rapat dan konferensi	1,208,838	709,120	*Meeting and conference* -
- Perjalanan dinas	75,866	711,986	*Travelling* -
	38,665,474	35,617,112	

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.

24. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN / *24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION*

Sifat pihak berelasi

a. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan.

b. Direksi adalah orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk perencanaan, pengarahan dan pengendalian aktivitas-aktivitas Perusahaan.

c. Bank-bank BUMN dan entitas-entitas nonbank BUMN merupakan pihak berelasi oleh karena merupakan entitas sepengendali oleh Pemerintah Republik Indonesia dimana Perusahaan melakukan penempatan investasi dalam bentuk deposito berjangka dan obligasi.

Nature of relationship

a. The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of the Company.

b. The Board of Directors are persons who have authority and responsibility for planning, directing and controlling the Company's activities.

c. SOEs banks and non-banks SOEs are related parties as those entities under common controls of the Government of the Republic of Indonesia where the Company places its investments in time deposits and bonds.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/59 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

24. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION *(continued)*

Sifat pihak berelasi (lanjutan)

Nature of relationship *(continued)*

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain:

In the normal course of business, the Company enters into certain transactions with related parties, including the following:

Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Balances arising from related parties transactions

	2024	2023	
Kas dan setara kas			***Cash and cash equivalents***
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Syariah)	1,636,000,474	474	*PT Bank Tabungan Negara - (Persero) Tbk (Syariah)*
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk	32,527,189	57,400,651	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk -*
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23,258,655	15,261,048	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk -*
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4,607,997	42,264,005	*PT Bank Rakyat Indonesia - (Persero) Tbk*
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	6,838	7,208	*PT Bank Tabungan Negara - (Persero) Tbk*
	1,696,401,153	114,933,386	
Investasi			***Investments***
- Pemerintah Republik Indonesia	8,003,060,381	7,947,660,683	*Government of the - Republic of Indonesia*
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Syariah)	2,378,000,000	3,546,300,000	*PT Bank Tabungan Negara - (Persero) Tbk (Syariah)*
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,000,000,000	-	*PT Bank Rakyat Indonesia - (Persero) Tbk*
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	150,000,000	155,310,000	*PT Pelabuhan Indonesia - (Persero)*
- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	140,000,000	366,173,500	*PT Sarana Multigriya Finansial - (Persero)*
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	38,000,000	3,252,000,000	*PT Bank Rakyat Indonesia - (Persero) Tbk*
- PT Pupuk Indonesia (Persero)	80,000,000	80,904,000	*PT Pupuk Indonesia (Persero) -*
- PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	77,000,000	77,000,000	*PT Telekomunikasi Indonesia - (Persero) Tbk*
- PT Kereta Api Indonesia (Persero)	40,000,000	41,400,000	*PT Kereta Api Indonesia - (Persero)*
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	121,092,000	*PT Bank Tabungan Negara - (Persero) Tbk*
- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	-	105,808,500	*PT Semen Indonesia - (Persero) Tbk*
	11,906,060,381	15,693,648,683	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/60 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

24. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION *(continued)*

Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Balances arising from related parties transactions *(continued)*

	2024	2023	
Piutang usaha			***Account receivables***
- Pemerintah Republik Indonesia	154,474,132	169,401,117	*Government of the Republic of Indonesia* -
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Syariah)	4,332,717	6,124,636	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Syariah)* -
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	2,950,875	2,950,875	*PT Pelabuhan Indonesia (Persero)* -
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2,998,838	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk* -
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	2,218,262	505,000	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)* -
- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	1,201,562	2,122,912	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)* -
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	2,835,461	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* -
- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	-	756,000	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk* -
- PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tbk	-	661,250	*PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tbk* -
- Lain-lain (dibawah Rp 500.000)	801,376	1,024,373	*Others (below Rp 500,000)* -
	168,977,762	186,381,624	
	13,771,439,296	15,994,963,693	
Persentase terhadap jumlah aset	81.06%	96.79%	*Percentage of total assets*
Pinjaman penerusan			***Two-step loans***
- Pemerintah Republik Indonesia	54,586,445	55,126,686	*Government of the Republic of Indonesia* -
	54,586,445	55,126,686	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	17.28%	12.44%	*Percentage of total liabilities*
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain			***Accrued expenses, provisions and other payables***
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	1,225,900	2,365,884	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)* -
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0.39%	0.53%	*Percentage of total liabilities*

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/61 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

24. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION *(continued)*

Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Balances arising from related parties transactions *(continued)*

	2024	2023	
Pendapatan			***Revenues***
- Pemerintah Republik Indonesia	737,863,800	676,500,750	*Government of the Republic of Indonesia -*
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	148,779,443	143,811,349	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk -*
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Syariah)	239,610,507	102,766,231	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Syariah) -*
- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	19,870,611	29,525,917	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) -*
- PT Waskita Karya (Persero) Tbk	20,140,581	20,140,581	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk -*
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	14,643,929	19,495,939	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk -*
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	27,970,332	19,244,004	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) -*
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	14,023,667	13,725,000	*PT Pelabuhan Indonesia (Persero) -*
- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	2,415,000	9,450,000	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk -*
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		9,243,750	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk -*
- PT Pertamina (Persero)	8,919,477	8,919,477	*PT Pertamina (Persero) -*
- PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	5,875,528	7,892,500	*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk -*
- PT Pupuk Indonesia (Persero)	6,108,667	6,160,000	*PT Pupuk Indonesia (Persero) -*
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3,748,548	4,032,232	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk -*
- PT Geo Dipa Energi (Persero)	3,385,867	3,317,131	*PT Geo Dipa Energi (Persero) -*
- PT Kereta Api Indonesia (Persero)	16,077,452	3,280,000	*PT Kereta Api Indonesia (Persero) -*
- PT Pegadaian (Persero)		2,802,922	*PT Pegadaian (Persero) -*
- PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tbk	776,882	2,437,500	*PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tbk -*
- PT Len Industri (Persero)	2,400,000	2,400,000	*PT Len Industri (Persero) -*
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk	4,751,422	1,414,042	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk -*
- PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	1,322,743	1,297,966	*Indonesia Tourism Development Corporation (Persero) -*
- Perusahan Umum Damri	200,000	200,000	*Perusahaan Umum Damri -*
- PT Jasa Marga (Persero)	182,000	-	*PT Jasa Marga (Persero) -*
- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	42,000	90,000	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) -*
	1,279,108,456	1,088,147,291	
Persentase terhadap jumlah pendapatan	86.02%	82.56%	*Percentage of total revenue*

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/62 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

24. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION *(continued)*

Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Balances arising from related parties transactions *(continued)*

	2024	2023	
Beban penjaminan			***Guarantee expense***
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	-	(3,170,952)	*Lembaga Pembiayaan Ekspor - Indonesia (Indonesia Eximbank)*
Persentase terhadap jumlah beban usaha	0.00%	(0,66%)	*Percentage of total operating expense*
Beban bunga			***Interest expense***
- Pemerintah Republik Indonesia	3,927,253	3,927,776	*Government of the - Republic of Indonesia*
Persentase terhadap jumlah beban usaha	0.72%	0.81%	*Percentage of total operating expense*
Kompensasi dan remunerasi manajemen kunci			***Compensation and remuneration of the key management personnel***
Dewan Komisaris			*Board of Commissioners*
- Gaji dan imbalan kerja jangka pendek	9,794,519	8,609,071	*Salary and short-term - employee benefit*
Direksi			*Board of Directors*
- Gaji dan imbalan kerja jangka pendek	22,976,952	19,381,195	*Salary and short-term - employee benefit*
	32,771,471	27,990,266	
Persentase terhadap jumlah beban usaha	6.01%	5.80%	*Percentage of total operating expenses*

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/63 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING

Perjanjian Penjaminan

Hal-hal berikut adalah perjanjian penjaminan yang telah ditandatangani oleh Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2024:

KPBU

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS

Guarantee Agreement

The following are the guarantee agreement entered by the Company as at 31 December 2024:

PPP

No	Proyek / *Project*	Badan Usaha / Business Entity	Tanggal Perjanjian Penjaminan / *Guarantee Agreement Date*	Tanggal Efektif Penjaminan / *Guarantee Effective Date*	Maksimum Nilai Penjaminan / Maximum *Guarantee Value*
1	PLTU Batang Jawa Tengah ("CJPP") / *Batang East Java Power Plant ("CJPP")*	PT Bhimasena Power Indonesia	6 Oktober / *October 2011*	6 Juni / *June 2016*	Rp 300 Miliar
2	Paket Palapa Ring Barat / *Western Package Palapa Ring*	PT Palapa Ring Barat	29 Februari / *February 2016*	10 November / *November 2016*	Rp 1,293 Miliar
3	Paket Palapa Ring Tengah/ *Central Package Palapa Ring*	PT LEN Telekomunikasi Indonesia	4 Maret / *March 2016*	30 Desember / *December 2016*	Rp 1,211 Miliar
4	Tol / *Toll Road* Batang - Semarang	PT Jasamarga Semarang Batang	27 April / *April 2016*	20 Juni / *June 2016*	Rp 2,450 Miliar
5	Tol / *Toll Road* Pandaan - Malang	PT Jasamarga Pandaan Malang	9 Juni / *June 2016*	3 Oktober / *October 2016*	Rp 5,456 Miliar
6	Tol / *Toll Road* Manado - Bitung	PT Jasamarga Manado Bitung	9 Juni / *June 2016*	6 Oktober / *October 2016*	Rp 3,400 Miliar
7	Tol / *Toll Road* Balikpapan - Samarinda	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	9 Juni / *June 2016*	2 Desember / *December 2016*	Rp 6,120 Miliar
8	Sistem Penyediaan Air Minum / *Water Supply System* Umbulan	PT Meta Adhya Tirta Umbulan	21 Juli / *July 2016*	10 Februari / *February 2017*	RP 1,171 Miliar
9	Paket Palapa Ring Tengah/ *Eastern Package Palapa Ring*	PT Palapa Timur Telematika	29 September/ *September 2016*	29 Maret / *March 2017*	Rp 5,467 Miliar
10	Tol / Toll Road Jalan Layang MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed	PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek	22 Februari / *February 2017*	8 Mei / *May 2017*	Rp 600 Miliar

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/64 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS *(continued)*

Guarantee Agreement *(continued)*

PPP (continued)

No	Proyek / *Project*	Badan Usaha / Business Entity	Tanggal Perjanjian Penjaminan / *Guarantee Agreement Date*	Tanggal Efektif Penjaminan / *Guarantee Effective Date*	Maksimum Nilai Penjaminan* / Maximum *Guarantee Value**
11	Tol / *Toll Road* Cileunyi - Sumedang - Dawuan	PT Citra Karya Jabar Tol	22 Februari / *February 2017*	22 Februari / February *2019*	Rp 1,430 Miliar
12	Tol / *Toll Road* Krian - Legundi - Bunder - Manyar	PT Waskita Bumi Wira	22 Februari / *February 2017*	11 Desember / *December 2017*	Rp 649 Miliar
13	Tol / Toll Road Serang - Panimbang	PT Wijaya Karya Serang Panimbang	22 Februari / *February 2017*	17 November / *November 2017*	Rp 2,053 Miliar
14	Tol / *Toll Road* Probolinggo - Banyuwangi	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	29 Desember / *December 2017*	10 Juli / *July 2020*	Rp 2,281 Miliar
15	Tol / *Toll Road* Jakarta - Cikampek II Selatan	PT Jasamarga Japek Selatan	29 Desember / *December 2017*	27 Juni / *June 2019*	Rp 2,280 Miliar
16	Sistem Penyediaan Air Minum / *Water Supply System* Lampung	PT Adhya Tirta Lampung	14 Februari / *February 2018*	14 Agustus / *August 2018*	Rp 774 Miliar
17	Sistem Penyediaan Air Minum / *Water Supply System* Semarang Barat	PT Air Semarang Barat	23 November / *November 2018*	29 Mei / *May 2019*	RP 630 Miliar
18	Bandar Udara / *Airport* Labuan Bajo[1)]	PT Cinta Airport Flores	7 Februari / *February 2019*	Berakhir Sebelum Efektif / Expired Before Being Effective	Rp 367 Miliar
19	Kereta Api Makassar - Parepare / *Makassar - Parepare Railway Train*	PT Celebes Railway Indonesia	5 April / *April 2019*	16 September / *September 2021*	Rp 1,131 Miliar
20	Satelit Multifungsi Pemerintah / *Government Multifunction Satellite*	PT Satelit Nusantara Tiga	3 Mei / *May 2019*	31 Maret / *March 2021*	RP 9,870 Miliar
21	Tol / *Toll Road* Semarang - Demak	PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak	23 September / *September 2019*	9 Januari / *January 2020*	Rp 5,167 Miliar
22	Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan / *Preservation of The East Sumatera Cross Road at South Sumatera Province*	PT Jalintim Adhi Abipraya	3 Agustus / *August 2020*	30 Desember / *December 2020*	Rp 1,303 Miliar

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/65 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS *(continued)*

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

Guarantee Agreement *(continued)*

KPBU (lanjutan)

PPP (continued)

No	Proyek / *Project*	Badan Usaha / Business Entity	Tanggal Perjanjian Penjaminan / *Guarantee Agreement Date*	Tanggal Efektif Penjaminan / *Guarantee Effective Date*	Maksimum Nilai Penjaminan* / Maximum *Guarantee Value**
23	Tol / *Toll Road* Solo - Yogyakarta - NYIA Kulon Progo	PT Jogjasolo Marga Makmur	9 September / *September 2020*	Belum Efektif / Not Yet Effective	Rp 2,760 Miliar
24	Tol / *Toll Road* Yogyakarta - Bawen	PT Jasamarga Jogja Bawen	13 November / *November 2020*	7 Mei / *May 2024*	RP 2,634 Miliar
25	Sistem Penyediaan Air Minum / *Water Supply System* Pekanbaru	PT Pembangunan Perumahan Tirta Madani	16 Desember / *December 2020*	21 Juli / *July 2021*	Rp 469 Miliar
26	Sistem Penyediaan Air Minum / *Water Supply System* Jatiluhur I	PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur	19 Februari / *February 2021*	25 Februari / *February 2022*	RP 2,066 Miliar
27	Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau / *Preservation of The East Sumatera Cross Road at Riau Province*	PT Adhi Jalintim Riau	12 April / *April 2021*	5 Oktober / *October 2021*	RP 792 Miliar
28	Sistem Penyediaan Air Minum / *Water Supply System* Karian Serpong	PT Karian Water Services	29 April / *April 2021*	Belum Efektif / Not Yet Effective	Rp 2,796 Miliar
29	Jembatan Callender Hamilton / Callender Hamilton Bridge	PT Baja Titian Utama	6 Desember / *December 2021*	16 Juni / *June 2022*	RP 2,736 Miliar
30	Tol / *Toll Road* Gedebage – Tasikmalaya - Cilacap[2)]	PT Jasamarga Gedebage Cilacap	31 Januari / *January 2022*	Berakhir Sebelum Efektif / Expired Before Being Effective	Rp 3,460 Miliar
31	Tol / *Toll Road* Gilimanuk – Mengwi[3)]	PT Tol Jaget Kerthi Bali	8 Maret / *March 2022*	Berakhir Sebelum Efektif / Expired Before Being Effective	RP 2,682 Miliar
32	Alat Penerangan Jalan / *Road Lighting Device* Madiun	PT Tri Tunggal Madiun Terang	20 September / *September 2022*	10 November / *November 2022*	Rp 98 Miliar
33	Proving Ground BPLJKSB Bekasi	PT Indonesia International Automotive Proving Ground	31 Oktober / *October 2022*	13 Juni / *June 2023*	Rp 1,690 Miliar
34	Tol / *Toll Road* Akses Patimban	PT Jasamarga Akses Patimban	24 Januari / *January 2023*	Belum Efektif / Not Yet Effective	Rp 1,027 Miliar

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/66 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS *(continued)*

Guarantee Agreement *(continued)*

PPP (continued)

No	Proyek / *Project*	Badan Usaha / Business Entity	Tanggal Perjanjian Penjaminan / *Guarantee Agreement Date*	Tanggal Efektif Penjaminan / *Guarantee Effective Date*	Maksimum Nilai Penjaminan* / Maximum *Guarantee Value**
35	Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Lombok Barat / *Public Street Light West Lombok Regency*	PT Sinar Energi Indonusa	12 Oktober / *October 2023*	Belum Efektif / Not Yet Effective	Rp 98 Miliar
36	Tol / *Toll Road* JORR Elevated Cikunir - Ulujami	PT Jakarta Metro EkspressWay	17 Oktober / *October 2023*	Belum Efektif / Not Yet Effective	Rp 2,058 Miliar
37	Tol / Toll Road Kediri - Tulungagung	PT Surya Sapta Agung Tol	27 Februari / *February 2024*	Belum Efektif / Not Yet Effective	Rp 1,780 Miliar
38	Jalan non Tol/ Non TollRoad Trans Papua	PT Hutama Mambelim Trans Papua	3 Juli / July 2024	Belum Efektif / Not Yet Effective	Rp 3,357 Miliar

*) Tidak di audit

Unaudited)

1) Pada tanggal 14 November 2022, perjanjian penjaminan antara Perusahaan dengan PT Cinta Airport Flores berakhir sebelum efektif sehubungan dengan berakhirnya PKS antara PJPK dan PT Cinta Airport Flores.
2) Pada tanggal 10 Februari 2023, perjanjian penjaminan antara Perusahaan dengan PT Jasamarga Gedebage Cilacap berakhir sehubungan dengan berakhirnya PKS antara PJPK dan PT Jasamarga Gedebage Cilacap.
3) Pada tanggal 4 Agustus 2023, perjanjian penjaminan antara Perusahaan dengan PT Tol Jaget Kerthi Bali berakhir sehubungan dengan berakhirnya PKS antara PJPK dan PT Tol Jaget Kerthi Bali.

Estimasi nilai penjaminan dari perjanjian penjaminan KPBU di atas adalah sebesar Rp 79.847 miliar (nilai penuh) (tidak diaudit) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dana talangan tanah, terminasi, dana likuiditas terbatas, cidera janji pembayaran bulanan, ketersediaan layanan, biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung, biaya pengakhiran yang ditanggung dan pengakhiran akibat keadaan kahar.

1) On 14 November 2022, the guarantee agreement between the Company and PT Cinta Airport Flores expired before being effective due to the expiration of the PKS between the GCA and PT Cinta Airport Flores.
2) On 10 February 2023, the guarantee agreement between the Company and PT Jasamarga Gedebage Cilacap expired due to the expiration of the PKS between the GCA an PT Jasamarga Gedebage Cilacap.
3) On 4 August 2023, the guarantee agreement between the Company and PT Tol Jaget Kerthi Bali expired due to the expiration of the PKS between the GCA and PT Tol Jaget Kerthi Bali.

Estimated guarantee from this guarantee agreement PPP above is amounting to Rp 79,847 billion (full amount) (unaudited) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition, land bailout fund, termination, limited liquidity fund, breach of monthly payment, availability payment, non-termination costs, termination costs and termination due to force majeure.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/67 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

Non-KPBU

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS *(continued)*

Guarantee Agreement *(continued)*

Non-PPP

No	Proyek / *Project*	Badan Usaha / Business Entity	Tanggal Perjanjian Penjaminan / *Guarantee Agreement Date*	Tanggal Efektif Penjaminan / *Guarantee Effective Date*	Maksimum Nilai Penjaminan* / Maximum *Guarantee Value**
1	Kawasan Ekonomi Khusus / *Special Economic Zone* Mandalika	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	31 Desember/ *December 2018*	22 Maret / *March 2019*	Rp 1,455 Miliar
2	Hydropower Programme	PT Perusahaan Listrik Negara	5 September / *September 2019*	5 September/ *September 2019*	Rp 722 Miliar
3	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ("PLTP") / *Geothermal Power Plant Development Project* Dieng-2 dan Patuha-2	PT Geo Dipa Energi (Persero)	19 Agustus / *August 2022*	21 September/ *September 2020*	Rp 904 Miliar
4	Result-Based Lending Jaringan Distribusi Kalimantan dan Maluku Papua / *Distribution Network* Kalimantan and Maluku-Papua ("RBL-KMP")	PT Pembangkit Listrik Negara (Persero)	16 Desember / *December 2020*	14 Januari/ *January 2021*	Rp 1,619 Miliar
5	Result-Based Lending Jaringan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara/ *Distribution Network* Sulawesi and Nusa Tenggara *("RBL-SNT")*	PT Pembangkit Listrik Negara (Persero)	16 Desember / *December 2020*	16 Desember/ *December 2020*	Rp 833 Miliar
6	Pengembangan Jaringan Distribusi di Jawa Timur dan Bali / *East Java and Bali ("EJB") Distribution Network Development*	PT Pembangkit Listrik Negara (Persero)	10 Februari / *February 2021*	9 April/ *April 2021*	Rp 956 Miliar
7	*Sustainable and Reliable Energy Access Program - Western and Central Java ("SREAP")*	PT Pembangkit Listrik Negara (Persero)	19 Mei / *May 2022*	31 Mei/ *May 2022*	Rp 2,312 Miliar
8	Pembangunan PLTU Tahap III/ *PLTU Development Phase III* (PLTU Timor-1 2 x 50 MW)	PT Pembangkit Listrik Negara (Persero)	28 Desember / *December 2022*	28 Desember/ *December 2022*	Rp 413 Miliar
9	Pinjaman /*Loans* PT Kereta Api Indonesi (Persero) – Kereta Api Cepat Jakarta Bandung	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	25 Januari/ *January 2024*	25 Januari/ *January 2024*	Rp 1,886 Miliar
10	Pinjaman / *Loans* Indonesia Sustainable Least-cost Electrification (ISLE)	PT Pembangkit Listrik Negara (Persero)	28 Mei / *May 2024*	Belum Efektif / Not Yet Effective	Rp 2,357 Miliar

Estimasi nilai penjaminan dari perjanjian penjaminan non-KPBU di atas adalah sebesar Rp 13.456 miliar (nilai penuh) (tidak diaudit) beserta biaya bunga dan biaya lainnya.

Estimated guarantee from this guarantee agreement non-PPP above is amounting to Rp 13,456 billion (full amount) (unaudited) plus interests and other charges.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/68 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

Penjaminan pelaku usaha korporasi

Pada tanggal 28 Juli 2020, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dimana peran Perusahaan adalah memberikan dukungan *loss limit* dan dapat melaksanakan penjaminan bersama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/Indonesia Eximbank ("LPEI") sebagai Badan Usaha Penjamin yang ditunjuk Pemerintah. Berdasarkan PMK tersebut, pada tanggal 19 November 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Keuangan RI dan pada tanggal 15 Desember 2020, Perusahaan juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan LPEI terkait pelaksanaan penugasan pemberian dukungan *loss limit* dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Selanjutnya, pada tanggal 13 Desember 2021, Perusahaan menandatangani adendum perjanjian kerja sama dengan Kementerian Keuangan RI terkait pengaturan tata cara penagihan Imbal Jasa Penjaminan *Loss Limit* yang terbit untuk periode bulan Desember 2021.

Pada tanggal 23 Desember 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Keuangan RI dan pada tanggal 15 Februari 2021 dengan LPEI sehubungan dengan pelaksanaan penugasan penjaminan bersama dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Selanjutnya, pada tanggal 9 Desember 2021, Perusahaan menandatangani adendum perjanjian kerja sama dengan LPEI terkait perubahan profil risiko debitur yang dapat dijamin.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS *(continued)*

Guarantee Agreement *(continued)*

Corporate business entities

On 28 July 2020, the issuance of Minister of Finance Regulation ("PMK") No. 98/PMK.08/2020 regarding Procedures of Government Guarantee for Corporate Business Entities through Guarantee Entities for National Economic Recovery Program where the role of the Company are providing loss limit supports and performing co-guarantee with Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/Indonesia Eximbank ("LPEI") as a guarantor of Corporate Business Entities appointed by the Government of Indonesia. In accordance with the PMK, on 19 November 2020, the Company entered into a cooperation agreement with Indonesia Ministry of Finance, and on 15 December 2020, the Company also entered into a cooperation agreement with LPEI regarding the implementation of the assignment to provide loss limit supports for the the sovereign guarantees for the National Economic Recovery Program. Furthermore, on 13 December 2021, the Company entered into an amendment of cooperation agreement with Indonesia Ministry of Finance regarding the procedure for collecting Loss Limit Guarantee Fees issued for the period December 2021.

On 23 December 2020, the Company entered into a cooperation agreement with Indonesia Ministry of Finance and also on 15 February 2021 with LPEI regarding implementation of a co-guarantee assignment of the sovereign guarantees for the National Economic Recovery Program. Furthermore, on 9 December 2021, the Company entered into an amendment of cooperation agreement with LPEI regarding the changes in the debtor's risk profile that can be guaranteed.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/69 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

Penjaminan pelaku usaha korporasi (lanjutan)

Pada tanggal 1 April 2021, telah diterbitkan PMK No. 32/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas PMK 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Nasional yang mengubah beberapa ketentuan terkait kriteria Korporasi yang mendapatkan pinjaman kredit modal kerja. Berdasarkan PMK tersebut, penerbitan sertifikat penjaminan telah berakhir pada tanggal 17 Desember 2021.

Pada tanggal 30 Maret 2022, telah diterbitkan PMK No. 27/PMK.08/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Nasional yang mengubah beberapa ketentuan terkait kriteria Korporasi yang mendapatkan pinjaman kredit modal kerja. Berdasarkan PMK tersebut, penerbitan sertifikat penjaminan diperpanjang paling lama pada tanggal 16 Desember 2022.

Berdasarkan penugasan dari Pemerintah, Perusahaan memberikan dukungan *loss limit* kepada LPEI dengan batasan 90% dari akumulasi imbal jasa penjaminan *loss limit* yang diterima Perusahaan dari Pemerintah.

Sampai dengan 31 Desember 2024, nilai pinjaman yang telah diterbitkan sertifikat penjaminannya oleh LPEI dan disetujui untuk diberikan dukungan *loss limit* oleh Perusahaan adalah sebesar Rp 8,11 triliun (nilai penuh) (tidak diaudit) dengan nilai penjaminan sebesar Rp 5,58 triliun (nilai penuh) (tidak diaudit). Penjaminan bersama Pelaku Usaha Korporasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan LPEI untuk nilai pinjaman yang dijamin sebesar Rp 2,7 triliun (nilai penuh) (tidak diaudit) dengan nilai penjaminan sebesar Rp 2,0 triliun (nilai penuh) (tidak diaudit) dimana porsi penjaminan Perusahaan dengan LPEI adalah 80% dan 20%.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS *(continued)*

Guarantee Agreement *(continued)*

Corporate business entities (continued)

On 1 April 2021, the issuance of PMK No. 32/PMK.08/2021 regarding Changes of PMK No. 98/PMK.08/2020 regarding Procedures of Government Guarantee for Corporate Business Entities through Guarantee Entities for National Recovery Program that changes several provisions related to criteria for Corporate Business Entities to obtain working capital credit loans. Based on PMK, the issuance of guarantee certificates has ended on 17 December 2021.

On 30 March 2022, the issuance of PMK No. 27/PMK.08/2022 regarding second amendment of PMK No. 98/PMK.08/2020 regarding Procedures of Government Guarantee for Corporate Business Entities through Guarantee Entities for National Recovery Program that changes several provisions related to criteria for Corporate Business Entities to obtain working capital credit loans. Based on PMK, the issuance of guarantee certificates was extended no later than 16 December 2022.

Based on assignment from the Government, the Company provides loss limit supports to LPEI with threshold 90% of the accumulated loss limit received by the Company from Government.

As at 31 December 2024, the value of loans for which guarantee certificate has been issued by LPEI and approved for loss limit supports by the Company is Rp 8.11 trillion (full amount) (unaudited) with guarantee value amounting to Rp 5.58 trillion (full amount) (unaudited). The National Economic Recovery Program with LPEI has been carried out with the value of loans is Rp 2.7 trillion (full amount) (unaudited) with guarantee value amounting to Rp 2.0 trillion (full amount) (unaudited), with the portion of the guarantee between the Company and LPEI is 80% and 20%.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/70 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

BUMN

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS *(continued)*

Guarantee Agreement *(continued)*

SOEs

No	Proyek / *Project*	Badan Usaha / Business Entity	Tanggal Perjanjian Penjaminan / *Guarantee Agreement Date*	Tanggal Efektif Penjaminan / *Guarantee Effective Date*	Maksimum Nilai Penjaminan* / Maximum *Guarantee Value**
1	Obligasi III / *Bonds III* PT Waskita Karya (Persero) Tbk	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	16 September / *September 2021*	16 September / *September 2021*	Rp 112 Miliar
2	Pinjaman / *Loans* PT Waskita Karya (Persero) Tbk	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	29 Oktober / *October 2021*	29 Oktober / *October 2021*	Rp 3,230 Miliar
3	Obligasi IV / *Bonds IV* PT Waskita Karya (Persero) Tbk	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	22 April / *April 2022*	22 April / *April 2022*	-
4	Sukuk Mudharabah I PT Waskita Karya (Persero) Tbk	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	22 April 2022 / *22 April 2022*	22 April 2022 / *22 April 2022*	Rp 586 Miliar
5	Pinjaman / *Loans* PT Industri Kereta Api (Persero)	PT Industri Kereta Api (Persero)	30 Desember / *December 2022*	30 Desember / *December 2022*	-
6	Pinjaman / *Loans* Perusahaan Umum DAMRI	Perusahaan Umum DAMRI	30 Desember / *December 2022*	30 Desember / *December 2022*	Rp 72 Miliar
7	Pinjaman / *Loans* PT Pertamina (Persero)	PT Pertamina (Persero)	30 Desember / *December 2022*	30 Desember / *December 2022*	Rp 3,304 Miliar
8	Pinjaman / *Loans* PT Len Industri (Persero)	PT Len Industri (Persero)	30 Desember / *December 2022*	30 Desember / *December 2022*	Rp 480 Miliar
9	Pinjaman / *Loans* PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) 1)	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	19 Oktober / October 2023	19 Oktober / October 2023	Rp 750 Miliar

1) Penjaminan Pinjaman PT Rajawali Nusantara Indonesia sesuai PMK 34/2023 telah berakhir periode penjaminannya pada tanggal 2 April 2024.

1) PT Rajawali Nusantara Indonesia Loan Guarantee in accordance with PMK 34/2023 has ended the guarantee period on 2 April 2024.

Kontinjensi

Dalam penjaminan KPBU, terkait risiko keterlambatan pengadaan tanah, batas akhir serah terima tanah untuk beberapa proyek jalan tol yang dijamin Perusahaan telah terlewati. Dalam hal adanya kompensasi tunai atas keterlambatan penyerahan tanah tersebut dapat diajukan oleh BU kepada PJPK 7 hari setelah diterbitkannya Sertifikat Laik Operasi (“SLO”). Dalam hal PJPK tidak memenuhi kewajiban pembayaran kompensasi tersebut sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam perjanjian kerjasama, maka BU dapat mengajukan klaim kepada Perusahaan. Sampai dengan 31 Desember 2024, estimasi potensi klaim kepada PJPK terkait risiko keterlambatan pengadaan tanah untuk 4 (empat) proyek adalah sebesar Rp 564 miliar (nilai penuh) (tidak diaudit).

Contingencies

In PPP guarantee, regarding the risk of delay in land acquisition, the due date of land acquisition for few toll road project that guaranteed by Company have passed. In case of any cash compensation incurred due to delay in these land acquisition could be submitted by the Investor to GCA 7 days after the issuance of the Operation Worthiness Certificate (“OWC”). If the GCA did not fulfill the obligation to pay cash compensation in accordance with the time limit stipulated in the cooperation agreement, the Investor could submit a claim to the Company. As per 31 December 2024, the estimated potential claims to GCA regarding the delay of land acquisition risk for 4 (four) guaranteed projects is Rp 564 billion (full amount) (unaudited).

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/71 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Kontinjensi (lanjutan)

Selain itu, terdapat potensi cidera janji dalam pembayaran bulanan atas 3 (tiga) proyek sektor Sistem Penyediaan Air Minum ("SPAM") dan pembayaran ketersediaan layanan atas 3 (tiga) proyek sektor Telekomunikasi. Potensi klaim penjaminan yang dapat terjadi adalah sebesar Rp 390 miliar (tidak diaudit).

Dalam penjaminan Non-KPBU, jika BUMN Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian pinjaman kepada pemberi pinjaman, Perusahaan akan melaksanakan fungsinya sebagai penjamin atas kewajiban pembayaran BUMN Terjamin tersebut. Terdapat potensi cidera janji dari 1 (satu) debitur dalam memenuhi kewajiban finansialnya pada tahun 2026 dengan estimasi potensial klaim sebesar Rp 3.231 miliar (tidak diaudit). Sehubungan dengan potensi cidera janji ini, debitur telah melakukan upaya restrukturisasi pada tahun 2024 dan akan melakukan upaya-upaya lain dalam pemenuhan kewajiban finansialnya, manajemen melakukan pemantauan pelaksanaan hasil restrukturisasi oleh debitur dan upaya lain tersebut secara berkala.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah menelaah kewajibannya, baik dalam bentuk potensi klaim dan/atau klaim aktual atas risiko-risiko yang ditanggung Perusahaan dalam perjanjian penjaminan, untuk menilai apakah suatu liabilitas harus diakui dalam laporan keuangan. Atas penilaian tersebut, pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak ada penyisihan atas klaim yang dibentuk oleh Perusahaan.

Atas semua perjanjian penjaminan yang dimiliki di atas, Perusahaan juga menandatangani perjanjian dengan para PJPK ("KPBU") atau BUMN Terjamin ("Non-KPBU") dari masing-masing proyek yang mengatur tata cara pengembalian hak regres pada saat pembayaran klaim dilakukan.

Perjanjian sewa kantor dengan PT Mahkota Prima Properti

Pada tanggal 22 Agustus 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa dengan PT Mahkota Prima Properti. Periode sewa adalah untuk 4 (empat) tahun dimulai dari 1 September 2016 dan berakhir pada 31 Agustus 2020.

Pada tanggal 27 Juli 2020, Perusahaan telah menandatangani perpanjangan perjanjian sewa dengan PT Mahkota Prima Properti untuk periode perpanjangan sewa selama 3 (tiga) tahun dimulai dari 1 September 2020 dan berakhir pada 31 Agustus 2023.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS *(continued)*

Contingencies *(Continued)*

In addition, there is the potential breach for contract in monthly payments for 3 (three) projects in the Drinking Water Supply System ("SPAM") sector and payments for service availability for 3 (three) Telecommunications sector projects. The potential guaranteed claim that could occur is IDR 390 billion (unaudited).

In Non-PPP guarantee, if guaranteed SOEs are unable to fulfill payment obligations in accordance with the loan agreement to the lender, the Company will carry out its function as a guarantor for the Guaranteed BUMN's payment obligations. There is a potential breach of contract for 1 (one) debtor in fulfilling its financial obligations in 2026 with an estimated potential claim of IDR 3,231 billion (unaudited). In connection with this potential breach of contract, the debtor has made restructuring efforts in 2024 and will make other efforts to fulfill its financial obligations, management monitors the implementation of restructuring results by the debtors and other efforts periodically.

As at 31 December 2024 and 2023, the Company has reviewed its obligation, whether in the form of potential claims and/or actual claims over the risks borne by the Company as stipulated in the guarantee agreement, to assess whether any provision required to be recognised in the financial statements. Based on the assessment, as at 31 December 2024 and 2023, there was no provision of claims deemed necessary to be made by the Company.

Upon the signing of guarantee agreements above, the Company also signed agreement with GCA ("PPP") or guaranteed SOEs ("Non-PPP") of each projects, which stipulates term and conditions of recourse right when the Company make any claim payment.

Rent office agreement with PT Mahkota Prima Properti

On 22 August 2016, the Company entered into a lease agreement with PT Mahkota Prima Properti. The lease period is for 4 (four) years starting from 1 September 2016 and expires on 31 August 2020.

On 27 July 2020, the Company entered into extension of lease agreement with PT Mahkota Prima Properti for another 3 (three) years lease period starting from 1 September 2020 and expires on 31 August 2023.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/72 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian sewa kantor dengan PT Mahkota Prima Properti (lanjutan)

Pada tanggal 2 Agustus 2023, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa dengan PT Mahkota Prima Properti. Periode sewa adalah untuk 3 (tiga) tahun dimulai dari 1 September 2023 dan berakhir pada 31 Agustus 2026.

Perjanjian sewa ini meliputi area yang digunakan untuk ruangan kantor. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar sewa, jasa pemeliharaan dan biaya lainnya terkait sewa ke PT Mahkota Prima Properti. Pembayaran untuk seluruh jumlah sewa dan jasa pemeliharaan dibayarkan setiap bulan. Sebagai tambahan, Perusahaan juga membayar dimuka atas deposit sekuriti yang ditahan oleh PT Mahkota Prima Properti tanpa kewajiban untuk membayar bunga kepada Perusahaan. Seluruh deposit tersebut akan dikembalikan pada waktu berakhirnya perjanjian sewa ini, jika Perusahaan tidak berniat untuk melanjutkan sewa.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

***Rent office agreement with PT Mahkota Prima Properti** (continued)*

On 2 August 2023, the Company entered into a lease agreement with PT Mahkota Prima Properti. The lease period is for 3 (three) years starting from 1 September 2023 and expires on 31 August 2026.

This lease agreement covers an area that is used for office space. Based on this agreement, the Company has an obligation to pay rent, service charges and other charges to PT Mahkota Prima Properti. Payment for the full amount of rent and service charges was charged monthly. In addition, the Company also paid in advance for security deposit, which is held by the PT Mahkota Prima Properti without liability to the Company for interest. All deposits will be refunded on the expiration of this lease, if the Company does not intend to continue the lease.

26. TRANSAKSI NONKAS

Transaksi nonkas yang penting adalah sebagai berikut:

26. NON-CASH TRANSACTIONS

The principal non-cash transactions are as follows:

	2024	2023	
Pencadangan saldo laba	41,792,000	35,708,681	*Appropriation retained earnings*
Kerugian penurunan nilai - piutang usaha	(38,913,580)	(16,775,000)	*Impairment losses - account receivables*
Perubahan nilai pasar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar	(56,945,416)	121,403,022	*Changes in fair value of financial assets at fair value*

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/73 - *Schedule*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

27. REKONSILIASI AKTIVITAS PENDANAAN BERSIH

Rekonsiliasi dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

27. NET FINANCING ACTIVITIES RECONCILIATION

Reconciliation from financing activities are as follows:

	2024					
			Perubahan non-kas/ *Non-cash changes*			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Arus kas/ *Cashflow*	Pergerakan valuta asing/ *Movement of foreign exchange*	Pergerakan beban transaksi/ *Changes in transaction cost*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Pinjaman penerusan	55,126,686	(540,241)	-	-	54,586,445	*Two-step loans*
Liabilitas sewa pembiayaan	46,200,522	(18,610,859)	-	3,608,736	31,198,399	*Financial lease liabilities*
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	101,327,208	(19,151,100)	-	3,608,736	85,784,844	*Total liabilities from financing activities*

	2023					
			Perubahan non-kas/ *Non-cash changes*			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Arus kas/ *Cashflow*	Pergerakan valuta asing/ *Movement of foreign exchange*	Pergerakan beban transaksi/ *Changes in transaction cost*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Pinjaman penerusan	55,126,686	-	-	-	55,126,686	*Two-step loans*
Liabilitas sewa pembiayaan	8,545,628	(15,107,615)	-	52,762,509	46,200,522	*Financial lease liabilities*
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	63,672,314	(15,107,615)	-	52,762,509	101,327,208	*Total liabilities from financing activities*

28. STANDAR AKUNTANSI BARU YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2025.

- SFAS 117: ”Insurance Contract”;
- Amendemen PSAK 117: ”Kontrak Asuransi” terkait Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 - Informasi Komparatif; dan
- Amendemen PSAK 221: ”Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing” terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak tertukarkan

28. ACCOUNTING STANDARD ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The followings are financial accounting standard, amendments and interpretation of financial accounting standard which become effective starting 1 January 2025.

- *SFAS 117: “Insurance Contract”;*
- *Amendment of SFAS 117: “Insurance Contract” regarding Initial Application of SFAS 117 and SFAS 109 - Comprative Information; and;*
- *Amendment of SFAS 221: “The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates” regarding to conditions when a currency is not exchangeable.*

Berinovasi Secara Konsisten untuk Tingkatkan Keberlanjutan

Innovate Consistently to Improve Sustainability

PT PII

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Capital Place, 7-8 Floor
Jl. Gatot Subroto No. Kav 18, RT.6/RW.1
Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan
Kota Jakarta Selatan

+62 21 5795 0550
info@iigf.co.id

Annual Report
Laporan Tahunan 2024